

# MEMBANGUN KARAKTER MAHASISWA KEDOKTERAN UNIVERSITAS WARMADEWA MELALUI “SAPTA BAYU” SPIRIT SRI KESARI WARMADEWA

Oleh:

**Pande Ayu Naya Kasih Permatananda**

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Warmadewa  
email: nayakasih@gmail.com

## Abstrak

Mahasiswa kedokteran memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis sebagai cikal bakal dokter yang profesional. Mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan akademik dan profesi tidak serta merta memiliki karakter profesi dokter yang mulia. Karakter profesional seorang dokter tersebut dapat dikembangkan melalui proses pendidikan, yakni pendidikan karakter. Sebagai salah satu universitas dengan keunikan karakter, Universitas Warmadewa memiliki dan mengembangkan spirit Sri Kesari Warmadewa yang terilhami dari Raja-Raja Bali. Makalah ini akan memberikan gambaran pendidikan karakter dan implementasi Sapta Bayu dalam membangun karakter pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Warmadewa. Makalah ini dibuat menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pendidikan karakter, etika, dan profesionalisme mahasiswa kedokteran. Melalui observasi dan analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan implementasi pendidikan karakter pada mahasiswa kedokteran di Universitas Warmadewa berjalan secara formal dan informal. Sapta Bayu yang merupakan abstraksi personifikasi Sri Kesari Warmadewa diharapkan dapat menjadi landasan dalam membentuk karakter mahasiswa Kedokteran yang berkarakter dan berintegritas seperti raja-raja Bali.

**Kata Kunci:** Pendidikan Karakter, Mahasiswa, Kedokteran, Sapta Bayu, Bali

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan munculnya zaman revolusi industri 4.0, perkembangan kompetensi, karier, keahlian, dan profesi pula semakin pesat. Manusia dihadapkan dalam tuntutan profesionalisme yang semakin meningkat akibat persaingan global. Profesi dokter (*general practitioner*) sampai sekarang masih dianggap sebagai profesi mulia dan menjanjikan. Namun tuntutan masyarakat terhadap profesi dokter menjadikan dokter harus mampu menjaga profesionalismenya dalam menghadapi pasien, keluarga pasien, komunitas, dan masyarakat. Peradaban masyarakat yang semakin maju, semakin besar pula tuntutan profesi dokter sebagai profesi luhur seyogyanya disebutkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagai penyelenggara praktek kedokteran yang merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia (MKEK-IDI, 2012).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian canggih ditambah dengan pergeseran sosial kemasyarakatan yang begitu cepat, memberikan pengaruh yang sangat bermakna terhadap perkembangan berbagai bidang ilmu, termasuk perkembangan ilmu kedokteran. Dokter merupakan profesi dengan etika moral yang tinggi. Dokter dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutunya dengan mengikuti *continuing medical education* dalam bentuk seminar dan pelatihan, sertifikasi, registrasi, pembaharuan lisensi, serta pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dengan tujuan mengikuti perkembangan teknologi seiring implementasi *life-long learning*. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran merupakan dasar hukum penyelenggaraan praktek kedokteran agar dapat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Praktik kedokteran dari dahulu sampai sekarang dipandu berdasarkan prinsip etik kedokteran yang diterapkan dalam bentuk norma etik kedokteran, yaitu *autonomy*, *beneficiency*, *maleficiency*, dan *justice* (Maclean, 2009). Sebagai profesi istimewa, dokter menjadi suatu profesi yang sangat dekat dengan berbagai problematika kehidupan manusia. Oleh karena dokter berurusan dengan penyelamatan manusia, dokter disebut sebagai profesi mulia atau profesi luhur, di mana manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling mulia. Hubungan yang terjadi antara dokter dan pasiennya dapat dikatakan sebagai hubungan personal khusus yang berlandaskan kepercayaan. Dokter tidak menjanjikan kepastian kesembuhan, akan tetapi dokter harus selalu mengupayakan sekuatnya untuk kesembuhan pasien sesuai dengan norma etik kedokteran. Sikap mental fundamental yang diharapkan dimiliki oleh pribadi seorang dokter meliputi: Ketuhanan, rasa kemanusiaan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah, dan sosial. Sikap fundamental tersebut tidak bisa dibangun dalam sekejap, harus tertanam sedari dini, sedari masih menjadi calon dokter atau mahasiswa kedokteran atas dasar bisikan nurani dan panggilan jiwa (Darwin & Hardisman, 2014).

Berbicara mengenai mahasiswa, terkhususnya mahasiswa kedokteran, pendidikan karakter untuk

membentuk integritas seorang dokter sangat patut untuk diperjuangkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mahasiswa memiliki karakter, peran, dan fungsinya tersendiri. Tiga peran mahasiswa, baik itu sebagai *agent of change*, *social of control*, dan *moral force* (Dhiu & Bate, 2017). Mahasiswa kedokteran memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis sebagai cikal bakal dokter yang profesional. Mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan akademik dan profesi tidak serta merta memiliki karakter profesi dokter yang mulia. Karakter profesional seorang dokter tersebut dapat dikembangkan melalui proses pendidikan, yakni pendidikan karakter (Wahono, 2018).

Universitas Warmadewa adalah salah satu perguruan tinggi yang berada di Bali, di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. 'Warmadewa' berasal dari gelar dinasti raja-raja yang berkuasa di Bali pada abad VII-XIV. Nama tersebut dimaksudkan sebagai pengingat jasa pemerintahan dinasti Warmadewa yang berjaya di Bali pada masa itu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja-raja warmadewa memiliki dan mengembangkan spirit 'Sri Ksari Warmadewa'. Spirit tersebut berjumlah tujuh (7) dan disebut sebagai "Sapta Bayu". Makalah ini akan memberikan tinjauan mengenai pendidikan karakter bagi mahasiswa Kedokteran dan gambaran implementasi "Sapta Bayu" dalam pendidikan karakter mahasiswa Kedokteran di Universitas Warmadewa.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian diawali dengan melakukan observasi langsung terhadap mahasiswa kedokteran dan pendidikan karakter yang sudah berlangsung khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (Putra *et al.*, 2021). Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data, pembacaan, pencatatan, serta telaah atau analisis terhadap pustaka yang digunakan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari sumber bahan ilmiah yang valid dengan menggunakan mesin pencari google dengan memasukkan kata kunci berupa "pendidikan karakter", "etika", "profesionalisme", dan "mahasiswa kedokteran". Hasil observasi dan pustaka yang sudah diperoleh, dianalisis dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk laporan narasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Mahasiswa Kedokteran Universitas Warmadewa

Dokter disebut sebagai profesi luhur karena profesionalisme-nya berhubungan dengan manusia. Seorang mahasiswa kedokteran yang merupakan calon dokter tidak hanya mendapat keilmuan tentang pendidikan kedokteran saja, namun juga

pembelajaran tentang etika, moral, norma, serta nilai-nilai professional dokter. Nilai-nilai professional dokter tersebut sudah diajarkan sedari dini meskipun belum menjadi dokter. Mahasiswa kedokteran yang beretika akan menghasilkan dokter yang beretika dan memiliki keteladanan dalam profesionalisme-nya (Nadeak, 2015).

Kurikulum pendidikan dokter berbasis kompetensi yang kemudian diturunkan dalam modul-modul pembelajaran, di Universitas Warmadewa dibuat dalam bentuk Blok. Dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), lulusan diharapkan tidak hanya menjadi dokter yang kompeten dalam bidang ilmunya saja, tetapi juga mampu memperlakukan pasiennya secara manusiawi, seperti memperlakukan diri sendiri. Kurikulum berbasis kompetensi di prodi Kedokteran diyakini pasti sudah mengajarkan etika dan professional dokter sejak awal mahasiswa menginjak pendidikannya sebagai calon dokter (Purnamasari *et al.*, 2015).

Etika, moral, medikolegal, dan profesionalisme termasuk dalam area kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh dokter. Salah satu komponen penting dalam pendidikan kedokteran yang termuat secara empiris dalam kurikulum adalah pembelajaran etik dan profesionalisme (Purwanti *et al.*, 2020). Pendidikan karakter yang dibahas dalam makalah ini dalam kurikulum kedokteran termuat dalam blok atau mata kuliah etika, moral, medikalegal, dan profesionalisme.

Pendidikan etika dapat berlangsung secara formal maupun informal. Secara formal, mahasiswa diajarkan mengenai etika, moral, dan profesionalisme yang dimasukkan ke dalam kurikulum, yaitu dalam suatu mata kuliah atau modul, misalnya di Universitas Warmadewa, mahasiswa kedokteran mendapatkan muatan etika tersebut dalam mata kuliah atau blok *Medical Humanities, Ethics, Laws, and Professionalism*. Blok ini menguraikan secara berkesinambungan tentang prinsip kemanusiaan, etika, hukum, dan profesionalisme dalam praktik kedokteran. Esensi dari materi ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memahami aspek kemanusiaan, etika, hukum, profesionalisme, dan medikolegal yang berkaitan dengan praktik dalam bidang kedokteran (MEU FKIK Unwar, 2021). Selain blok tersebut, mahasiswa kedokteran di Universitas Warmadewa juga sudah mendapatkan muatan pendidikan karakter, etika, moral, dan profesionalisme pada Blok *General Studies*. Blok tersebut adalah blok pertama yang dilalui mahasiswa Kedokteran Universitas Warmadewa dan memuat tujuh kompetensi dasar yang telah dirumuskan dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), meliputi profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kompetensi professional dokter. *Basic medical humanities, ethics,*

*dan professionalism* dipaparkan sebagai modul ke 2 atau minggu ke dua dalam Blok *General Studies* (MEU FKIK Unwar, 2021).

Secara informal, etika disebutkan dapat diajarkan kepada mahasiswa melalui implementasi unsur-unsur etika yang telah terintegrasi dalam kurikulum ke dalam setiap kegiatan belajar mengajar selama pendidikan (Zahir *et al.*, 2016). Untuk setiap proses belajar mengajar yang dijalankan oleh mahasiswa Kedokteran di Universitas Warmadewa, aspek etika dan profesionalisme selalu diikuti terutama sebagai capaian pembelajaran sikap. Penilaian etika dan profesionalisme juga selalu mendapat porsi atau bobot penilaian dalam asesmen mahasiswa kedokteran di Universitas Warmadewa. Semua hal tersebut dimaksudkan agar mahasiswa kedokteran Universitas Warmadewa dapat menjadi lulusan dokter yang berintegritas dan berkarakter.

### **Implementasi Sapta Bayu Sebagai Pendidikan Karakter Mahasiswa Kedokteran Universitas Warmadewa**

Sapta Bayu sebagai spirit Sri Kesari Warmadewa tidak hanya diimplementasikan berupa lagu wajib yang dipentaskan di acara-acara resmi dan dinyanyikan di awal perkuliahan, masing-masing butir sapta bayu juga diimplementasikan dalam rutinitas akademik oleh seluruh civitas akademika Universitas Warmadewa sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan bagi civitas akademika Universitas Warmadewa. Sapta Bayu terdiri dari 2 kata, yaitu *Sapta* dan *Bayu* yang berasal dari Bahasa Sanskerta. Sapta adalah bilangan 'tujuh' (7) dan Bayu dimaksudkan sebagai tenaga atau daya hidup yang memberi dorongan atau semangat (Raka *et al.*, 2018).

Sapta Bayu pada dasarnya terwujud dari abstraksi nilai kearifan Sri Kesari Warmadewa yang merupakan pendiri dinasti Warmadewa atau Raja-Raja Bali. Sri Kesari Warmadewa dikenal sebagai sosok pemimpin yang religius, menghargai keberagaman, arif bijaksana, berinovasi tinggi, kreatif, mencintai lingkungan, serta mandiri dalam mensejahterakan masyarakatnya. Sifat kepemimpinan Sri Kesari Warmadewa tersebut yang kemudian dijemakan ke dalam Sapta Bayu yang menjadi jiwa dan karakter seluruh civitas akademika Universitas Warmadewa, tidak terkecuali mahasiswa Kedokteran. Lulusan Kedokteran Universitas Warmadewa diharapkan tidak hanya mampu menjadi dokter yang kompeten dan profesional, namun juga berkarakter seperti Sri Kesari Warmadewa.

Spirit Sri Kesari Warmadewa atau Sapta Bayu tersebut meliputi:

#### 1. Berketuhanan Yang Maha Esa

Seluruh mahasiswa kedokteran Universitas Warmadewa tersebut bertakwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, mampu mengilhami, dan menunjukkan nilai-nilai religius. Seluruh mahasiswa kedokteran Universitas Warmadewa adalah

mahasiswa yang beragama, menganut dan meyakini nilai-nilai agama dan/atau kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Dalam menjalankan setiap kegiatan pembelajaran, mahasiswa kedokteran senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika. Dalam desain pendidikan kedokteran di Universitas Warmadewa, agama termasuk dalam mata kuliah wajib umum (MKWU) yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Peran agama dan kepercayaan dalam praktek kedokteran juga masuk ke dalam situasi pembelajaran khusus yang diberikan pada *Blok General Studies*.

#### 2. Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Asta Brata

Asta Brata adalah 8 sifat kepemimpinan yang merupakan personifikasi sifat Dewa yang bersifat universal, seperti 1. Dewa Indra: memiliki sifat hujan, memberi perlindungan; 2. Dewa Bayu: memiliki sifat angin, memberi kesejukan; 3. Dewa Yama: memiliki sifat adil; 4. Dewa Surya: memiliki sifat matahari, memberi sumber kehidupan; 5. Dewa Agni: memiliki sifat api, menguasai ilmu pengetahuan; 6. Dewa Baruna: memiliki sifat samudera, berwawasan luas; 7. Dewa Candra: memiliki sifat bulan, memberi sinar dalam kegelapan; 8. Dewa Kuwera: memiliki sifat sejahtera, mampu melaksanakan tata kelola yang baik, dan suka menolong.

Dalam pendidikan kedokteran di Universitas Warmadewa, jiwa kepemimpinan ini didapat dari aktivitas sehari-hari yang dijalankan mahasiswa, dari ruang lingkup paling kecil, mahasiswa mampu memimpin dirinya sendiri dalam menuntaskan tugas-tugas pembelajaran, mampu memimpin kelompok kecil dalam kegiatan pembelajaran, seperti menjadi *leader* dalam kegiatan tutorial, aktif dalam organisasi kemahasiswaan, serta mahasiswa mampu mawas dan menjalankan prinsip *life long learning* dalam dunia kedokteran.

#### 3. Mengabdikan Kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa dan Negara

Universitas Warmadewa memiliki motto "*Guna Widya Sewaka Nagara*" yang berarti ilmu pengetahuan diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara, mahasiswa Kedokteran harus mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasar Pancasila. Kontribusi tersebut salah satunya dengan mahasiswa harus turut aktif berkontribusi dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang berpatokan pada kemajuan bangsa dan negara. Dalam peranan sebagai warga negara, mahasiswa Kedokteran harus mempunyai rasa bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

#### 4. Unggul dalam Berkarya

Unggul dalam berkarya dapat dijabarkan bahwa mahasiswa kedokteran universitas

warmadewa mampu menginternalisasi sikap kemandirian, semangat kejujuran, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Universitas Warmadewa aktif mengadakan pelatihan, seminar, workshop dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dan mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti setiap kegiatan yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa. Mahasiswa kedokteran juga sangat aktif untuk mengikuti berbagai kompetisi sebagai ajang pengembangan dan pembuktian kapasitas diri untuk menjadi insan yang unggul dalam berbuat dan berkarya.

#### 5. Menjunjung Kejujuran dan Integritas Diri dalam Berpikir, Berkata, dan Bertindak

Dalam setiap kegiatan pembelajaran, mahasiswa kedokteran wajib menjunjung nilai-nilai kejujuran, integritas diri, jujur dan bertanggung jawab baik dalam berpikir, berkata, dan bertindak, atau dalam ajaran Hindu disebut sebagai Tri Kaya Parisudha yang berarti berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Ajaran tersebut diyakini mampu menghasilkan energi intelektual, emosional, spiritual dan energi kreatif yang baik khususnya dalam kegiatan pembelajaran (Rosalina, 2017).

Mahasiswa kedokteran juga senantiasa mentaati hukum dan disiplin dalam setiap kegiatan. Mahasiswa juga berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan, serta belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Mahasiswa kedokteran juga harus mampu menjunjung nilai, norma, dan etika akademik yang berlaku di Universitas Warmadewa.

#### 6. Menjaga dan Menghormati Keberagaman untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan

Civitas akademika Universitas Warmadewa khususnya mahasiswa kedokteran berasal dari beragam suku, ras, dan agama, sehingga mahasiswa kedokteran wajib untuk menghormati keberagaman dan menghindari perpecahan. Tidak hanya dalam konteks budaya, suku, ras, dan agama, mahasiswa juga harus mampu menghargai perbedaan pendapat dan menghormati kebebasan berpendapat, terutama pada aktivitas pembelajaran seperti tutorial yang diadakan di FKIK Universitas Warmadewa

#### 7. Berwawasan Lingkungan, berlandaskan Tri Hita Karana

Konsep dasar Tri Hita Karana adalah sebuah konsep yang mengharap manusia untuk dapat menjaga tiga hubungan harmonis, yaitu 1). Hubungan harmonis dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa (*Parahyangan*), 2). Hubungan harmonis antara sesama manusia (*Pawongan*), dan 3). Hubungan harmonis dengan lingkungan (*Palemahan*) (Lilik & Mertayasa, 2019). Landasan Tri Hita Karana tersebut diwujudkan dengan setiap insan di Universitas Warmadewa mampu menjaga hubungan baik dengan Tuhan, mampu bekerja sama, memiliki rasa peduli, solidaritas dalam membina hubungan antar sesama, peduli terhadap lingkungan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan seperti visi

misi Universitas Warmadewa yang berwawasan ekowisata.

Implementasi Sapta Bayu ataupun mata kuliah pendidikan karakter pada mahasiswa kedokteran di Universitas Warmadewa masih belum dilaksanakan tegas secara formal, atau masih dapat dikatakan berupa *hidden curriculum*, namun diketahui sudah adanya sinkronisasi pada butir-butir capaian pembelajaran sikap yang sudah dilaksanakan di FKIK Universitas Warmadewa.

#### **4. KESIMPULAN**

Implementasi pendidikan karakter pada mahasiswa kedokteran di Universitas Warmadewa berjalan secara formal dan informal. Pendidikan karakter pada mahasiswa kedokteran di Universitas Warmadewa tertuang dalam mata kuliah ataupun modul berbasis etika dan professional dengan tujuan menanamkan sejak dini serta membiasakan mahasiswa bersikap sesuai dengan etika, moral dan profesionalisme seorang dokter. Sapta Bayu adalah abstraksi personifikasi nilai luhur Sri Kesari Warmadewa yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membentuk karakter civitas akademika Universitas Warmadewa yang berkarakter dan berintegritas seperti raja-raja Bali.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Darwin, E., Hardisman. 2014. Etika Profesi Kesehatan. Deepublish, Yogyakarta.
- Dhiu, K.D., Bate, N. 2017. Pentingnya Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis Praktis. 2<sup>nd</sup> Annual Proceeding, November 2017 STKIP Citra Bakti, Bajawa, NTT, 172-176.
- Maclean, A. 2009. *Autonomy, Informed Consent and Medical Law: A Relational Challenge* (Cambridge Law, Medicine, and Ethics). Cambridge University Press, Cambridge.
- MEU FKIK Unwar. 2021. Buku Mahasiswa Block I.1 General Studies Edisi Ketujuh. Medical Education Unit Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, Denpasar.
- MEU FKIK Unwar. 2021. Buku Mahasiswa Blok 2.5 Medical Humanities, Ethics, Laws, and Professionalism Edisi Kelima. Medical Education Unit Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, Denpasar.
- MKEK-IDI. 2012. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta
- Lilik, Mertayasa, I.K. 2019. Esensi Tri Hita Karana Perspektif Pendidikan Agama Hindu. Jurnal Bawi Ayah 10(2):60-80.
- Nadeak, B. 2015. Etika Pendidikan Kedokteran: Keteladanan dalam Profesionalisme. *JDP* 8(2):123-129.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun

- 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Purnamasari, C.B., Claramita, M., Prabandari, Y.S. 2015. Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran dalam Persepsi Instruktur dan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia* 4(1):21-27.
- Purwanti, M., Armyanti, I., Asrorudin, M. 2020. Persepsi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Mengenai Konsep Profesionalisme Dokter. *Cermin Dunia Kedokteran* 47(10):751-756.
- Putra, N.M.W.N.D., Arsana, I.W.E, Permatananda, P.A.N.K. 2021. Hubungan Antara Body Image dan Perilaku Diet pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa Tahun Angkatan 2020. *AMJ (Aesculapius Medical Journal)* 1(1):27-31.
- Raka, A.A.G., Parwata, I.W., Runa, I.W., Laksmi, A.A.R.S., Sumantra, I.D.P. 2018. Sapta Bayu Sri Ksari Warmadewa. Warmadewa University Press, Denpasar.
- Wahono, M. 2018. Pendidikan Karakter: Suatu Kebutuhan Bagi Mahasiswa di Era Milenial. *Integralistik* 29(2):1-8.
- Zahir, A., Srirahayu, A., Ali, B. 2016. Pengembangan Karakter Melalui Praktek Dunia Kerja. Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto Palopo 2(1):636-645.

# ANALISIS KETERAMPILAN PROSES SAINS MAHASISWA SELAMA PRAKTIKUM DARING

Oleh:

Dian Tauhidah<sup>1)</sup>, Yuliani Farikha<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Walisongo Semarang

email: <sup>1</sup>diantauhidah@walisongo.ac.id

<sup>2</sup>yulianifarikha100@gmail.com

## Abstrak

Kegiatan praktikum merupakan kegiatan pendukung pembelajaran sains. Kondisi pandemi menyebabkan kegiatan praktikum tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat berdampak pada berbagai keterampilan mahasiswa termasuk keterampilan proses sains. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterampilan proses sains mahasiswa selama pelaksanaan praktikum daring. Penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil partisipan mahasiswa yang telah melaksanakan praktikum daring selama satu semester. Partisipan berjumlah 83 mahasiswa pendidikan biologi UIN Walisongo yang telah menempuh mata kuliah praktikum biokimia yang dilaksanakan secara daring. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes yang dikembangkan dari 9 indikator keterampilan proses sains. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rerata skor keterampilan proses sains seluruh partisipan yaitu 76,63 yang termasuk dalam kategori baik. Indikator keterampilan proses sains terendah dalam penelitian ini yaitu pada indikator *measuring*. Indikator tertinggi dalam penelitian ini yaitu pada indikator *hypothesizing* dan *defining and controlling variables*.

**kata kunci:** keterampilan proses sains, praktikum daring, pandemi, pendidikan tinggi

## 1. PENDAHULUAN

Tiga unsur utama dalam pembelajaran yaitu sikap, proses, dan hasil (Ismail & Groccia, 2018) yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Belajar sains tidak hanya belajar tentang pengetahuan berupa fakta, konsep, hukum, dan prinsip, tetapi juga belajar tentang prosedural berupa cara memperoleh informasi, metode ilmiah dan penggunaan teknologi, kebiasaan bekerja ilmiah, serta keterampilan berpikir. Belajar sains memfokuskan kegiatan pada penemuan dan pengolahan informasi melalui kegiatan mengamati, mengukur, mengajukan pertanyaan, mengklasifikasi, memecahkan masalah, dan sebagainya (Wenno, 2008).

Biologi sebagai sains terdiri atas tiga komponen dasar yang tidak dapat dipisahkan, yaitu biologi sebagai pengetahuan, metode, dan sikap/sosial (Rosenthal & Bybee, 1987). Proses dalam biologi dilaksanakan secara ilmiah dengan keterampilan yang kompleks yang digunakan dalam kerja ilmiah. Salah satu kegiatan yang memfasilitasi kerja ilmiah yaitu kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum merupakan kegiatan penunjang dalam pembelajaran sains yang memiliki peran penting dalam pengembangan keterampilan dan pemahaman mahasiswa (Hodson, 2014).

Kondisi pandemi menyebabkan kegiatan praktikum harus dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa secara daring (Kidd & Murray, 2020). Keterbatasan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi menyebabkan pendidik lebih terfokus pada berjalannya proses pembelajaran, sehingga usaha

pengembangan keterampilan mahasiswa belum optimal, salah satunya keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains yang tidak dimiliki siswa dapat berdampak pada keterampilan lain karena di dalam keterampilan proses sains terdapat keterampilan kognitif sekaligus keterampilan intelektual dan sosial (Rustaman dkk., 2005).

Yildiz & Yildiz (2021) membagi keterampilan proses sains dalam tiga tingkatan, yaitu *basic*, *intermediate*, dan *advance*. Keterampilan *basic* terdiri atas kegiatan *observing*, *comparing*, *classifying*, *measuring*, dan *communicating*. Keterampilan *intermediate* terdiri atas kegiatan *inferring* dan *predicting*. Sedangkan keterampilan *advance* terdiri atas kegiatan *hypothesizing* dan *defining and controlling variables*. Aspek keterampilan proses sains saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Rustaman dkk., 2005).

Kemampuan peserta didik dalam memahami dan melakukan keterampilan proses sains dapat diketahui dengan mengecek pemahaman peserta didik dan memberikan umpan balik (Trianto, 2014). Penilaian keterampilan proses sains dapat dilakukan pada saat melakukan eksperimen atau aktivitas yang dapat teramati. Penilaian dapat berupa *observation checklist*, yaitu penilaian berisi konten tentang data keterampilan dan proses yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan masalah (Carin, 1997). Tes hasil belajar psikomotor juga dapat menjadi alat penilaian untuk mengetahui keterampilan peserta didik dalam melaksanakan eksperimen. Tes dibuat berdasarkan kompetensi dasar dan dijabarkan

menjadi indikator yang kemudian menjadi kisi-kisi penulisan butir soal (Trianto, 2014).

Peserta didik yang sudah terampil dalam melakukan keterampilan proses sains akan mampu melakukan eksperimen atau pengamatan dalam rangka memahami dan menemukan sendiri pengetahuannya. Pengetahuan yang diperoleh sendiri juga dapat mengurangi terjadinya miskonsepsi dalam pembelajaran (Trianto, 2014). Keterampilan proses sains berhubungan dengan hasil belajar (Mandasari dkk., 2021), kreativitas (Bhakti & Astuti, 2018), dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa (Darmaji dkk., 2021). Evaluasi pelaksanaan pembelajaran juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana keterampilan proses sains mahasiswa, terumana untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan praktikum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan tujuan agar dapat menggali informasi dengan maksimal terkait tingkat keterampilan proses sains mahasiswa selama pelaksanaan praktikum di masa pandemi. Populasi penelitian yaitu seluruh mahasiswa pendidikan biologi UIN Walisongo Semarang dengan sampel ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan mengambil partisipan mahasiswa yang telah melaksanakan praktikum daring selama satu semester. Penentuan sampel didasarkan pada asas kesetaraan materi perkuliahan yang diberikan dan tingkat kemampuan akademik mahasiswa. Sampel berjumlah 83 mahasiswa pendidikan biologi UIN Walisongo yang telah menempuh mata kuliah praktikum biokimia yang dilaksanakan secara daring.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes menggunakan tes keterampilan proses sains. Instrumen tes penelitian berupa pilihan ganda yang dikembangkan dari sembilan indikator keterampilan proses sains milik Yildiz & Yildiz (2021). Teknik non tes menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam memeriksa validitas data yang digunakan selama penelitian yaitu teknik triangulasi data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi pandemi membuat seluruh proses pembelajaran beralih dari luring menjadi daring. Teknik praktikum daring yang telah dilakukan oleh partisipan yaitu praktikum mandiri di rumah dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada disekitar dan penggunaan simulasi video praktikum. Pemilihan teknik disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi praktikum dan ketersediaan alat bahan. Teknik praktikum daring juga didukung dengan kegiatan diskusi kelompok dan presentasi kelas. Tagihan akhir dalam pelaksanaan praktikum daring berupa video pelaksanaan praktikum mandiri, laporan praktikum, dan konten kreatif.

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan, hasil analisis data menunjukkan bahwa rerata skor keterampilan proses sains seluruh partisipan yaitu 76,63 yang termasuk dalam kategori Baik. Nilai tertinggi yaitu 100 berada pada kategori baik dan nilai terendah 42,86 berada pada kategori kurang baik (Tabel 1).

Tabel 1. Analisis Deskriptif Seluruh Partisipan

Analisis	Hasil
Rerata	76,63
Nilai Tertinggi	100
Nilai Terendah	42,86

Persentase sebaran level keterampilan proses sains pada seluruh partisipan yaitu 9,64% berada pada level kurang baik, 26,51% berada pada level cukup baik, dan sisanya 61,45% berada pada level baik. Hasil analisis data secara keseluruhan menunjukkan bahwa perkuliahan praktikum secara daring tetap efektif dalam melatih keterampilan proses sains mahasiswa. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah partisipan yang memiliki level keterampilan proses sains baik ada lebih dari 50%.

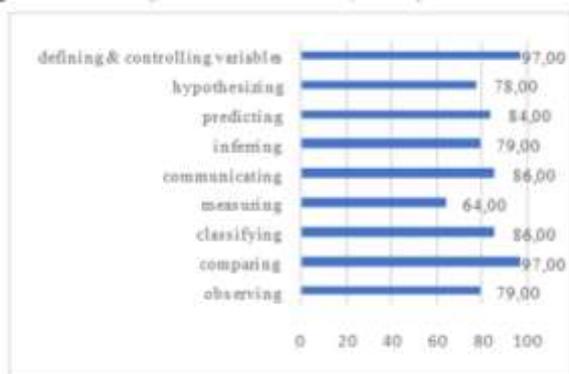
Praktikum daring tetap efektif dalam mengembangkan keterampilan proses sains mahasiswa karena dalam pelaksanaannya mahasiswa tetap diberi kesempatan untuk melakukan praktikum langsung secara mandiri dengan didukung video simulasi praktikum (Kramer et. al., 2018). Video simulasi dapat membantu mahasiswa memahami prosedur praktikum yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung (Creech & Shriner, 2020). Mahasiswa akan lebih memahami materi apabila diberi kesempatan untuk menemukannya sendiri melalui kegiatan penemuan. Kegiatan praktikum daring yang terbatas pelaksanaannya justru memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bisa mengamati lingkungan di sekitar mereka.

Keterbatasan sarana pada praktikum daring dapat disiasati dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar (Creech & Shriner, 2020). Pemanfaatan alat dan bahan yang ada di rumah membuat mahasiswa menjadi lebih familiar dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Hal tersebut dapat memberikan pembelajaran bermakna bagi mahasiswa karena berkaitan dengan struktur pemahaman yang sudah dimiliki sebelumnya (Purba dkk., 2021). Mahasiswa menjadi lebih paham pada materi dan pengetahuan tersebut akan bersifat *long term memory*. Ketika mahasiswa melakukan penelitian sendiri, menyusun pertanyaan, hipotesis, investigasi, hingga mengkomunikasikannya, maka mahasiswa telah menerapkan keterampilan proses sainsnya (Rustaman dkk., 2005).

Mahasiswa juga diajak untuk berkerja dalam kelompok. Kondisi pandemi membatasi sosialisasi mahasiswa secara langsung, kegiatan diskusi kelompok melalui media komunikasi online dapat menjadi salah satu alternatif (Creech & Shriner, 2020). Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa karena adanya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Interaksi sosial dengan

teman sebaya dapat memunculkan ide baru dan membantu perkembangan intelektual mahasiswa (Vygotsky, 1978). Kegiatan interaksi dapat membuat siswa termotivasi, saling mengajukan pendapat, dan memunculkan nilai-nilai sosial lainnya (Slavin, 2009).

Kegiatan praktikum daring dapat menjadi alternatif di masa pandemi. Pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi tetap dianggap efektif untuk menyampaikan pemahaman kepada mahasiswa (Natale et al., 2021). Kegiatan praktikum walaupun dilakukan secara mandiri dan terbatas jarak karena dilakukan dari rumah masing-masing, namun arahan dari pendidik tetap diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Meskipun memberikan arahan, namun guru hanya bertindak sebagai fasilitator di kelas, seluruh kegiatan perumusan prosedur, pengambilan data, analisis hasil, hingga pengambilan kesimpulan dilakukan oleh peserta didik (Amri dan Ahmadi, 2010).



Gambar 1. Analisis Indikator Keterampilan Proses Sains Mahasiswa

Berdasarkan analisis data di tiap indikator, diketahui bahwa indikator tertinggi dalam penelitian ini berada pada indikator *comparing* dan *defining & controlling variables*. Hal tersebut karena mahasiswa melakukan praktikum mandiri dengan tagihan laporan kelompok, sehingga mereka terbiasa untuk membandingkan hasil praktikum antar anggota kelompok. Beberapa tahapan kegiatan praktikum dilaksanakan secara individu yang membuat mahasiswa menjadi lebih fokus dalam pemahaman materi, termasuk dalam penentuan variabel praktikum. Mahasiswa sendiri sebenarnya telah dibekali sifat ingin tahu akan lingkungan sekitar (Arends, 2008) yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan.

Indikator terendah dalam penelitian ini berada pada indikator *measuring*. Indikator *measuring* mengarah kepada keterampilan khusus dalam menggunakan alat dan bahan ketika percobaan (Rustaman dkk., 2005). Kondisi pandemi membatasi kegiatan praktikum di laboratorium sehingga harus dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di rumah masing-masing dengan keberadaan alat dan bahan yang terbatas. Alat dan bahan yang berada di lingkungan mahasiswa tidak memiliki standar pengukuran yang ideal seperti halnya dalam laboratorium. Hal tersebut menyebabkan kemampuan

mengukur tidak dapat dilatihkan secara optimal. Kegiatan memperkenalkan alat dan bahan laboratorium hingga teknik penggunaannya menjadi salah satu tantangan pelaksanaan praktikum daring (Gamage et al., 2020).

Pengembangan virtual laboratorium dapat menjadi alternatif penyelesaian permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan praktikum daring. Kondisi seperti keterbatasan alat bahan, tidak tersedianya ruang atau laboratorium beserta fasilitasnya (Scheckler, 2003), maupun faktor keselamatan seperti penggunaan bahan kimia berbahaya dapat diakomodasi melalui penggunaan virtual laboratorium (Jones, 2008). Virtual laboratorium juga diketahui efektif untuk melatih keterampilan proses sains (Ratamun & Osman, 2018).

#### 4. KESIMPULAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rerata skor keterampilan proses sains seluruh partisipan yaitu 76,63 yang termasuk dalam kategori Baik. Indikator keterampilan proses sains terendah dalam penelitian ini yaitu pada indikator *measuring*. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan alat dan bahan yang ideal saat praktikum daring. Indikator tertinggi dalam penelitian ini yaitu pada indikator *comparing* dan *defining and controlling variables*. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merancang praktikum secara mandiri sehingga lebih memahami proses penentuan variabel eksperimen. Mahasiswa juga melakukan diskusi dalam kelompok maupun antar kelompok sehingga dapat melatih kemampuan membandingkan hasil penelitian hingga dapat diambil suatu kesimpulan akhir. Pengembangan teknik praktikum daring diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui, salah satunya dengan menggunakan virtual laboratorium.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada LP2M UIN Walisongo Semarang atas diberikannya dana bantuan BOPTN sehingga terlaksananya penelitian ini hingga dapat selesai tercapai tujuan.

#### 6. REFERENSI

- Amri, S. dan Ahmadi, I. (2010). *Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif. Dalam Kelas*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Arends, R. (2008). *Learning to Teach*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhakti, Y. B. & Astuti, A. D. (2018). The Influence Process of Science Skill and Motivation Learning with Creativity Learn. *Journal of Education and Learning*, 12(1): 30-35. 1
- Carin, A A. (1997). *Teaching Modern Science (7 Th Edition)*. New Jersey: Merrill. Publishing Company.
- Creech, C. & Shriner, W. (2020). DIY ecologi class: Transitioning field activities to an online

- format. Special Issue: Taking learning online in ecology and evolution. *Ecology and Evolution*, 10(22): 12437-12441. <https://doi.org/10.1002/ece3.6656>
- Darmaji, Astalini, Kurniawan, D. A., Aktapianti, A. & Br.Ginting. (2021). Relationship of Science Process Skills on Critical Thinking Ability Review by Gender in Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 9(4): 711-735.
- Gamage, K. A. A., Wijesuriya, D. I., Ekanayake, S. Y., Rennie, A. E. W., Lambert, C. G., & Gunawardhana, N. (2020). Online Delivery of Teaching and Laboratory Practices: Continuity of University Programmes during COVID-19 Pandemic. *Education Sciences*, 10(10): 291. <https://doi.org/10.3390/educsci10100291>
- Hodson, D. (2014). Learning Science, Learning about Science, Doing Science: Different goals demand different learning methods. *International Journal of Science Education*, 36(15), 2534–2553. <https://doi.org/10.1080/09500693.2014.899722>
- Ismail, E. A. & Groccia, J. E. (2018). Students Engaged in Learning. *Special Issue: Student Engagement: A Multidimensional Perspective*, 154: 45-54.
- Jones, N. (2018). Simulated labs are booming. *Nature*, 562, S5–S7. <https://doi.org/10.1038/d41586-018-06831-1>
- Kidd, W & Murray, J. (2020) .The Covid-19 pandemic and its effects on teacher education in England: how teacher educators moved practicum learning online. *European Journal of Teacher Education*, 43:4, 542-558. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1820480>
- Kramer, M., Olson, D., & Walker, J. D. (2018). Design and Assessment of Online, Interactive Tutorials that Teach Science Process Skills. *CBE-Life Science Education*, 17(2). <https://doi.org/10.1187/cbe.17-06-0109>
- Mandasari, F., Iwan, & Damopolii, I. (2021). The relationship between science process skills and biology learning outcome. *Journal of Research in Instructional*, 1(1): 23-32. <https://doi.org/10.30862/jri.v1i1.9>
- Natale, C. C., Mello, P. S., Trivelato, S. L. F., Marzin-Janvier, P., & Manzoni-de-Almeida, D. (2021). Special Issue: Implication of COVID-19 on Higher Education. Evidence of Scientific Literacy Through Hybrid and Online Biology Inquiry-Based Learning Activities. *Higher Learning Research Communication*, 11(0): 33-49. <https://doi.org/10.18870/hlrc.v11i0.1199>
- Purba, A., Asnewastri, Gultom, S., Girsang, S. E. E., Sinaga, D. P., Saragih, R., Tansliova, L., Hulu, I. L., Nasution, T. A., Huda, M. K., Sitopu, J. W., Marini, N., & Ginting, A. M. (2021). *Pengajar Profesional: Teori dan Konsep*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ratamun, M. M. & Osman, K. (2018). The effectiveness of virtual lab compared to physical lab in the mastery of science process skills for chemistry experiment. *Journal Problems of Education in the 21<sup>st</sup> Century*, 76(4): 544-560.
- Rosenthal, D. B. & Bybee, R. W. (1987). *The Formation of School Subjects: Emergence of the Biology Curriculum: A Science of Life or a Science of Living?* London: Routledge.
- Rustaman, N.Y., Dirdjosoemarto, S., Yudianto, S. A., Achmad, Y., Subekti, R., Rochintaniawati, D., Nurjhani, M. (2005). *Strategi Belajar Mengajar Biologi*. Bandung: UPI.
- Scheckler, R. K. (2003). Virtual labs: A substitute for traditional labs? *International Journal of Developmental Biology*, 47(2–3), 231–236. <https://doi.org/10.1387/ijdb.12705675>
- Slavin, R. E. (2009). *Cooperative Learning*. Bandung: Nusa Media.
- Trianto. (2014). *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vigotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wenno, I. (2008). *Strategi belajar mengajar sains berbasis kontekstual*. Yogyakarta: Inti Media.
- Yildiz, C. & Yildiz, T. G. (2021). Exploring the Relationship between Creative Thinking and Scientific Process Skills of Preschool Children. *Thinking Skills and Creativity*, 39: 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100795>

## PEMBENTUKAN DKN SEBAGAI SOLUSI MENGHADAPI AGHT MASA KINI: PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Oleh :

**Anindita Nur Hidayah<sup>1)</sup>, Agus Adriyanto<sup>2)</sup>, Bayu Setiawan<sup>3)</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia

<sup>1</sup>Email: anindita.nh@gmail.com

<sup>2</sup>Email: agus.adriyanto@idu.ac.id

<sup>3</sup>Email: bayu.setiawan1961@gmail.com

### Abstrak

Perubahan paradigma ancaman global membawa negara-negara di seluruh dunia menjadi lebih memperhatikan kebijakan bukan hanya pada bidang keamanan militer, namun juga nirmiliter. Negara-negara pemilik forum koordinasi (seperti: DKN) dikatakan lebih siap menghadapi AGHT bentuk baru karena memiliki struktur koordinasi yang lebih maju. Ancaman non-militer, sebagaimana Pandemi COVID-19, merupakan bentuk ancaman yang bersifat multi-dimensional. Maka, dibutuhkan penanganan dan regulasi yang tepat dan efisien guna menciptakan keamanan nasional yang lebih stabil. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan DKN di Indonesia dengan isu Pandemi COVID-19 sebagai contoh kasus. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menemukan bahwa penting bagi Indonesia untuk membentuk DKN melalui pengesahan RUU Keamanan Nasional sebagai dasar hukumnya. Karena, pembentukan lembaga ini diproyeksikan dapat menjadi forum koordinasi yang strategis dan efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan AGHT yang bersifat non-militer melalui kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Terlebih, dalam kasus penanganan Pandemi COVID-19 yang bersifat multi-sektoral, penanganan pandemi menjadi bersifat tumpang tindih antarlembaga pembuat kebijakan. Berdasar pada studi kasus Pandemi COVID-19 sebagai ancaman non-militer tersebut, maka Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang memiliki relevansi terhadap penanganan dampak Pandemi COVID-19.

**Kata Kunci:** *ancaman non-militer, COVID-19, DKN, kebijakan nasional, keamanan nasional*

### 1. PENDAHULUAN

Pasca Perang Dunia II, ancaman global bukan hanya bersifat militer, namun mengalami perubahan paradigma yaitu non-militer, bahkan ancaman hibrida. COVID-19 merupakan salah satu contoh ancaman non-militer namun berkarakter multidimensional. Sebagaimana pemaparan yang diberikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Letjen TNI M. Herindra, bahwa dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada isu kesehatan, namun juga pada sektor perekonomian, politik negara, bahkan hubungan internasional (Kemhan RI, 2021). Peningkatan ancaman ini jelas menjadi perhatian besar bagi negara-negara di dunia karena bersifat medadak serta masif. Berangkat dari hal tersebut, maka penting bagi suatu negara untuk memperkuat *state and public policy*-nya, yang kemudian disesuaikan pula dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) bentuk baru, sebagaimana Pandemi COVID-19 tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga harus menghadapi ancaman pandemi ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi bahkan meniadakan dampak COVID-19 ini melalui kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) Pemerintah maupun Non-Pemerintah. Penyebaran virus yang begitu cepat di Indonesia kemudian memantik pemerintah untuk

menjadikan pandemi ini sebagai bencana nasional pada 14 Maret 2020 (Kemenkes RI, 2020).

Merespons masifnya penyebaran virus corona pada tahun 2020 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna memutus rantai penularan, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbagai level yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang bersifat situasional juga ditetapkan, seperti larangan mudik saat Lebaran, pembatasan pengunjung pada objek wisata ketika hari libur nasional, dan sebagainya (KOMPAS, 2021). Mengingat beragamnya kebijakan yang telah ditetapkan di Indonesia, hal ini kemudian menimbulkan harapan bahwa kurva dari kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia ini seyogianya dapat segera melandai. Namun demikian, kebijakan yang beragam tersebut justru membingungkan masyarakat, karena cenderung bersifat tumpang-tindih antarlembaga. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat diperhatikan bahwa bencana nasional COVID-19 termasuk dalam ancaman nasional bentuk baru, dengan dampak yang begitu luas dan multi-sektoral, yang secara langsung mengganggu kestabilan keamanan nasional.

Terciptanya keamanan nasional bukan hanya tugas dari pasukan bersenjata, namun harus diupayakan oleh seluruh masyarakat. Maka, perlu langkah strategis yang melibatkan banyak pihak untuk menyusun standar operasi ketika terjadi ancaman yang harus dihadapi negara. Belajar dari pengalaman penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia, kiranya Indonesia perlu membangun sistem kesiapsiagaan dan keamanan tersebut, dimana hal ini memerlukan kerja sama nyata antarlembaga berwenang dan pemangku kepentingan untuk menangani isu AGHT masa kini yang dapat diimplementasikan melalui pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai pentingnya pembentukan DKN dalam menghadapi tantangan di Indonesia pada masa kini, dengan memberikan contoh kasus pada masa Pandemi COVID-19.

## 2. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, secara lebih spesifik menggunakan desain penelitian deskriptif. Melalui metode ini, peneliti mengeksplorasi suatu masalah dengan suatu batasan yang terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan informasi dari berbagai sumber (Jackson, 2012). Oleh karenanya, dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan studi literatur sebagai sumber data utama, dengan mengumpulkan dokumen, buku, jurnal, artikel, dan surat kabar yang memuat informasi-informasi yang dibutuhkan serta memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimulai pada bulan Oktober hingga Desember 2021.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan studi literatur sebagai sumber data utama. Data yang digunakan adalah data yang dipublikasikan secara resmi (baik berupa dokumen ataupun dalam bentuk *website*), terutama oleh K/L yang berkaitan dengan Pandemi COVID-19 serta ancaman maupun dampak yang ditimbulkannya. Beberapa sumber tersebut antara lain berasal dari publikasi resmi oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, serta para Kementerian Koordinator di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar (Anggoro, 2003). Ditinjau dari tujuannya, keamanan nasional dimaksudkan untuk melindungi negara dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kedaulatan negara, dan menjadi kondisi yang sangat penting dimiliki oleh negara karena berkaitan dengan upaya perlindungan dari berbagai ancaman dari dalam ataupun luar negeri. Maka, keamanan nasional harus

dilihat secara luas dan komprehensif, serta mempertimbangkan kemampuan pertahanan, keselamatan negara, dan kepastian hukum dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari setiap ancaman yang ada (Murray & Viotti, 1985). Dalam kerangka hukum internasional, konsep keamanan nasional diserahkan kepada masing-masing negara asal tidak melenceng dari konsepsi negara demokratis (Amaritasari, 2015). Selain itu, terdapat pula pengertian konsep keamanan nasional dari Berkowitz dan Bock, yang mengartikan keamanan nasional sebagai kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar (Berkowitz et al., 1989).

Definisi dari keamanan nasional memiliki banyak perdebatan yang belum menemukan titik tengah. Namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi dari Prabhakaran Paleri. Berdasarkan pada Paleri, dikatakan bahwa keamanan nasional sebagai seluruh upaya terukur dan sistematis dari suatu negara yang berdampak pada kesejahteraan populasi, serta dapat memberikan perlindungan terhadap agresi dari luar maupun pemberontakan dari dalam (Paleri, 2008). Melalui pengertian ini, dapat dipahami bahwa fokus dari keamanan nasional menurut Paleri bukan hanya ditujukan kepada *state* atau negara, namun juga seluruh populasi – termasuk masyarakat – yang perlu dilindungi dari berbagai ancaman baik militer, non-militer, ataupun hibrida. Selain itu, keamanan nasional dapat pula berfungsi sebagai upaya untuk meminimalisasi bahaya dan ancaman. Dengan demikian, penting bagi negara untuk membentuk dan menetapkan suatu kebijakan yang tepat, guna menghadapi AGHT yang muncul, sehingga dapat menyelenggarakan keamanan nasional demi negara dan seluruh elemen di dalamnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep keamanan nasional nantinya akan terus mengalami perkembangan dan perubahan, terutama karena dipengaruhi oleh perubahan *national interest* yang ingin dicapai, dinamika lingkungan internasional, kondisi domestik, perubahan sifat ancaman, hingga strategi menghadapi ancaman (Lasswell et al., 2014).

### 3.1. Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN)

Penting bagi suatu negara berdaulat memiliki sistem keamanan nasional yang dapat diterapkan ketika negara menghadapi AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, tantangan) yang semakin kompleks, yang dapat dituangkan dalam suatu kebijakan politiknya. Pada dasarnya, pembentukan DKN merupakan salah satu strategi yang efektif yang dapat diterapkan oleh suatu negara dalam mengikuti perkembangan struktur politik global, yang juga merupakan perkembangan politik dari negara-negara maju. Pemerintah Indonesia sendiri belum memiliki DKN karena terhambat oleh pro-kontra RUU Keamanan Nasional yang merupakan dasar hukum pembentukan DKN itu sendiri. Pembentukan DKN

ini diproyeksikan dapat menjadi forum koordinasi yang penting, terutama untuk menghadapi AGHT yang bersifat non-militer, sehingga negara dapat melakukan pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi ancaman dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui DKN, forum koordinasi di tingkat kabinet dapat memberi akses bagi instansi yang berkepentingan untuk menyampaikan kendala birokrasi yang dihadapi di lapangan untuk dicarikan solusinya oleh presiden dan para pejabat tinggi lainnya (Yanan Mochamad Yani & Montratama, 2017). Hal ini penting diterapkan mengingat dinamika ancaman yang muncul mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan multi-dimensional. Sehingga, kerja sama multi-sektoral pun dibutuhkan untuk menghadapi ancaman tersebut. Forum koordinasi atau berupa DKN seperti ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Singapura, Australia dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut dinilai memiliki struktur koordinasi yang lebih maju karena mereka memiliki DKN (Y M Yani & Montratama, 2016) sebagai salah satu strategi dalam menyelenggarakan keamanan nasional yang lebih stabil, efektif, dan efisien. Ketiga negara tersebut memiliki sistem keamanan nasional yang dianggap modern dan dapat menyesuaikan dengan dinamika global. Dikatakan demikian karena mereka telah dianggap lebih siap dalam menghadapi AGHT model baru (non-militer dan hibrida), yang memiliki kecenderungan bersifat dan berdampak multi-dimensional.

Berkaca dari Amerika Serikat, DKN sendiri berisi anggota kabinet yang dapat memberikan rekomendasi jika negara mengalami krisis keamanan nasional (Y M Yani & Montratama, 2016). Penyampaian rekomendasi semacam ini kemudian penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat ego sektoral di setiap lembaga dalam menetapkan suatu kebijakan, yang justru dapat menjadikan masalah menjadi semakin kompleks. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri, belum secara tegas dinyatakan siapa pihak – dalam hal ini kementerian – yang bertanggung jawab dalam menghadapi isu-isu keamanan non-tradisional. Padahal, *element of national security* dapat secara optimal digunakan ketika terdapat kerja sama antarlembaga dan semua fungsi pemerintahan saling terkait. Oleh karena itu, kerap terjadi tumpang tindih antar-kementerian dalam menangani isu non-tradisional, yang justru menjadikan AGHT di tingkat nasional tidak kunjung selesai.

Di Indonesia, penanganan ancaman nasional – terutama pada ancaman non-militer – masih bersifat parsial atau tidak terintegrasi yang secara langsung berdampak pada ketidak-efektifan penanganan AGHT yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan satu upaya lintas sektor yang terpadu guna mengintegrasikan kebijakan sebagai suatu upaya untuk menciptakan

keamanan nasional yang lebih stabil. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka diperlukan semacam dewan yang bertugas membantu Presiden dalam mengintegrasikan kebijakan keamanan nasional/kamnas (Amaritasari, 2015). Dengan demikian, diperlukan suatu keputusan politik dalam pembentukan DKN, guna membangun sinergitas antaraktor keamanan dan K/L terkait, sehingga setiap permasalahan kamnas dapat ditangani dengan efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan legal yang berlaku di Indonesia.

### **3.2. Solusi dalam Menghadapi AGHT Masa Kini: Isu Pandemi COVID-19**

Sebagaimana pada pemaparan sebelumnya bahwa negara Singapura, Australia, dan Amerika Serikat telah memiliki sistem keamanan nasional yang dianggap modern dan dapat menyesuaikan dengan dinamika global karena sudah siap dalam menghadapi AGHT model baru (non-militer dan hibrida). Dikaitkan dengan Indonesia, negara ini belum memiliki forum koordinasi sebagaimana yang terdapat pada ketiga negara tersebut dalam menghadapi ancaman non-militer. Namun, untuk menghadapi ancaman militer, Indonesia telah memiliki sistem keamanan nasional yang sangat mencerminkan kondisi masyarakat yang beragam, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sihankamrata). Berdasar pada penuturan Mayjen TNI (Purn) Dr. Puguh Santoso, bahwa:

“Strategi pertahanan merupakan cara/langkah yang dilakukan dan dipersiapkan oleh negara guna mencapai kepentingan nasional, menciptakan kondisi negara yang aman dan damai, serta membebaskan negara dari ancaman ataupun gangguan. Secara umum, strategi yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Sishankamrata, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan seluruh sumber daya nasional lainnya dalam menciptakan keamanan dalam negeri. Dengan doktrin tersebut, setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keTuhanan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.” (Puguh Santoso, 2021)

Berdasar pada penuturan Dr. Puguh Santoso tersebut, dapat dipahami bahwa Sishankamrata ini menjadi sistem pertahanan negara yang mengintegrasikan kekuatan nasional secara menyeluruh. Sistem ini kemudian menjadi sebuah strategi strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sishankamrata melibatkan secara komprehensif segenap departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta keikutsertaan yang sah semua elemen bangsa. Sishankamrata dirumuskan berdasarkan pada kekhasan dan kondisigeografi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penyesuaian ini ditujukan untuk memberikan referensi bagi negara dalam menggelar kekuatan dan melakukan upaya

pertahanan negara. Karena, penting bagi negara untuk mempertimbangkan faktor geografis, demografi, sumber daya nasional, analisis terhadap ancaman, dan perkembangan teknologi informasi dalam rangka membangun sistem pertahanan yang kuat.

Fokus dari keamanan nasional berkembang dari waktu ke waktu, bukan hanya pada keamanan tradisional (militer) namun juga keamanan non-tradisional. Jika Sishankamrata merupakan sistem keamanan nasional yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi ancaman militer, maka untuk menghadapi ancaman non-militer Indonesia belum memiliki sistem yang terkoordinasi sebagaimana yang dimiliki oleh AS, Australia, dan Singapura. Pada 1947, Amerika Serikat membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN), setelah *total war* (Rifa, 2015). Sejak saat itu, keamanan nasional menjadi hal yang penting bagi negara-negara untuk menghindarkan negara masing-masing dari serangan/ancaman bahkan peperangan, dengan memperkuat elemen seperti ekonomi, keamanan energi, lingkungan keamanan, dan bahkan kesehatan, hingga ketahanan pangan. Setiap permasalahan akan semakin kompleks ketika tidak dikelola dengan baik dan tidak segera diselesaikan. Begitu pula dengan isu-isu atau AGHT yang bersifat non-tradisional, jika tidak segera diatasi, maka hal ini akan memunculkan ancaman non-militer yang semakin menjamur hingga lintas sektoral.

Ketika membahas tentang ancaman non-militer, maka resolusi konfliknya tidak lagi membahas tentang kekuatan persenjataan melainkan kekuatan nirmiliter yang diwujudkan dalam bentuk unsur utama (kementerian terkait) dan unsur-unsur lainnya/pendukung (peran rakyat, sumber daya nasional, hingga kekuatan militer). Upaya penyelesaian ancaman non-militer seharusnya berasal dari kementerian sebagai unsur utama guna menciptakan keamanan nasional (Santoso, 2021). Namun, DKN yang seharusnya dapat menjadi garda terdepan dalam menangani ancaman-ancaman non-militer justru belum dibentuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 kemudian dapat menjadi contoh nyata dari ancaman non-militer – di Indonesia teridentifikasi pada awal Maret 2020 – dengan sifatnya yang begitu mendadak dan masif menyebar ke seluruh wilayah Indonesia sehingga pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kesiapan dalam menghadapinya. Secara normatif, upaya penyelesaian ancaman non-militer berupa Pandemi COVID-19 ini berasal dari kementerian terkait, sebagai unsur utama, guna menciptakan keamanan nasional. Namun, mengingat dampak yang muncul bersifat multi-sektoral, penanganan pandemipun menjadi bersifat tumpang tindih antarlembaga pembuat kebijakan dan serba membingungkan, terlebih bagi masyarakat. Pada awal penyebaran Pandemi COVID-19 di Indonesia, permasalahan yang seharusnya segera diatasi ini justru terhalang oleh belum adanya satu

suara dari para pemangku kebijakan guna mengatasi suatu isu non-militer tersebut.

DKN seharusnya dapat menjadi sebuah solusi penetapan kebijakan yang selaras dan terpadu dalam menangani ancaman-ancaman nonmiliter di Indonesia, sebagaimana Pandemi COVID-19. Berkaca dari Amerika Serikat, DKN sendiri berisi anggota kabinet yang dapat memberikan rekomendasi jika negara mengalami krisis keamanan nasional. Hal ini kemudian penting, karena ketika negara menghadapi suatu isu yang berdampak multi-dimensional, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengatasinya terdapat ego sektoral di setiap lembaga yang justru dapat menjadikan masalah menjadi semakin kompleks. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri, belum secara tegas dinyatakan menteri mana yang bertanggung jawab dalam menghadapi isu-isu keamanan non-tradisional. Padahal, *element of national security* dapat secara optimal digunakan ketika terdapat kerja sama di antara semua fungsi pemerintahan.

Terciptanya keamanan nasional bukan hanya tugas dari pasukan bersenjata, namun harus diupayakan oleh seluruh masyarakat. Dalam konteks ancaman nonmiliter, kementerian terkait adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan strategi pertahanan negara yang dituangkan dalam suatu regulasi. Dalam kasus penanganan COVID-19 maupun ancaman nonmiliter lain yang muncul di Indonesia, maka negara harus menyelesaikannya dengan kekuatan nirmiliter dengan unsur-unsur utamanya – yaitu kementerian terkait – sebagai garda terdepan dalam menciptakan regulasi yang tepat dan efektif. Penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategi keamanan nasional yang nantinya akan menjadi acuan dasar para menteri terkait dalam mempersiapkan *element of national security* sesuai kompetensinya. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang dianggap memiliki keterkaitan lebih terhadap suatu ancaman. Sehingga, strategi keamanan nasional yang kemudian berwujud kebijakan dapat dibentuk oleh semacam lembaga *think tank* (berisi para ahli di bidangnya). Selain itu, unsur-unsur pendukung dalam menciptakan keamanan nasional – yaitu masyarakat, sumber daya nasional, hingga kekuatan militer – harus turut serta dan berperan aktif menciptakan keadaan yang lebih baik dengan mematuhi aturan/regulasi/kebijakan yang telah ditentukan oleh para ahli untuk memerangi ancaman nonmiliter secara bersama. Hal ini penting dilakukan agar *element of national security* dapat secara optimal dikerahkan ketika terdapat ancaman-ancaman, terutama ancaman yang bersifat non-tradisional.

#### 4. KESIMPULAN

Pergeseran paradigma ancaman keamanan global saat ini menjadi perhatian semua pihak, di

mana tidak menutup kemungkinan bahwa AGHT bagi negara akan dihadapi secara mendadak serta massif. Pembentukan DKN kemudian menjadi penting diterapkan di Indonesia mengingat dinamika ancaman yang muncul semakin mengalami perkembangan yang kompleks dan multi-dimensional. Sehingga, kerja sama multi-sektoral pun dibutuhkan untuk menghadapi ancaman tersebut guna menciptakan keamanan nasional yang stabil. Terselenggaranya keamanan nasional menjadi hal yang penting untuk menghindarkan negara dari serangan, ancaman, bahkan peperangan. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu bentuk ancaman non-tradisional nyata yang saat ini dihadapi oleh negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dalam menghadapi COVID-19, elemen keamanan nasional penting untuk dipersiapkan dan dioptimalkan guna menghindarkan negara dari ancaman ataupun dalam menghadapi ancaman. Oleh karenanya, upaya untuk menghadapi ancaman bentuk baru ini harus bersifat kompresensif dan multi-sektoral.

Untuk menciptakan kondisi yang aman dan sejahtera, serta efektif dalam menghadapi AGHT, penting bagi negara untuk menyiapkan, merencanakan, membangun, serta membina seluruh komponen dan sumber daya yang nantinya dapat mendukung tercapainya *interest* dari negara, yaitu rasa aman. Dalam konteks ancaman non-militer berupa Pandemi COVID-19, keamanan nasional kemudian menjadi tanggung jawab kementerian terkait guna menciptakan strategi pertahanan negara berwujud regulasi atau kebijakan strategis. Dalam kasus penanganan Pandemi COVID-19, maka isu ini harus ditangani oleh kekuatan nirmliter dengan unsur-unsur utamanya yaitu kementerian-kementerian yang nantinya dapat menciptakan regulasi yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang memiliki relevansi terhadap penanganan dampak Pandemi COVID-19.

Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang dianggap memiliki relevansi dan keterkaitan terhadap suatu ancaman yang sedang dihadapi. Sehingga, strategi keamanan nasional yang kemudian berwujud kebijakan dapat dibentuk oleh semacam lembaga *think tank*. Selain itu, unsur-unsur pendukung dalam menciptakan keamanan nasional harus turut serta dan berperan aktif menciptakan keadaan yang lebih baik dengan mematuhi aturan/regulasi/kebijakan yang telah ditentukan oleh para ahli untuk memerangi ancaman nonmiliter secara bersama. Oleh karena itu, negara harus memiliki dan menguasai strategi penggunaan kekuatan, bukan hanya yang berkaitan dengan *military forces*, namun juga tentang *people power* ataupun *movements*. Terciptanya keamanan nasional bukan hanya tugas dari pasukan bersenjata, namun harus diupayakan oleh seluruh masyarakat.

## 5. REFERENSI

- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153–174. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.21>
- Anggoro, K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. *Keamanan Nasional. Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*, 1–10.
- Berkowitz, Morton, & Bock, P. . (1989). *Strategic Intelligence for American National Security*. Princeton University Press. [https://www.google.co.id/books/edition/Strategic\\_Intelligence\\_for\\_American\\_Nati/sy2XMFQwe3EC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Strategic_Intelligence_for_American_Nati/sy2XMFQwe3EC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover)
- Jackson, S. L. (2012). *Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach 4th Edition*. Wadsworth Cengage Learning.
- Kemkes RI. (2020). *Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan sebagai Bencana Nasional*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031500003/status-wabah-corona-di-indonesia-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional.html>
- Kemhan RI. (2021). *Kemhan: COVID-19 Ancaman Non Militer dengan Karakter Multidimensional*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029142307-25-714081/kemhan-COVID-19-ancaman-non-militer-dengan-karakter-multidimensional>
- KOMPAS. (2021). *Aturan Wisata Selama Masa Larangan Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/30/09385331/aturan-wisata-selama-masa-larangan-mudik-lebaran-6-17-mei-2021?page=all>
- Lasswell, H. D., Kaplan, A., & Brunner, R. D. (2014). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. Transaction Publisher. <https://www.routledge.com/Power-and-Society-A-Framework-for-Political-Inquiry/Lasswell/p/book/9781412852807#>
- Murray, D. J., & Viotti, P. R. (1985). *The Defense Policies of Nations: A Comparative Study*. The John Hopkins University.
- Paleri, P. (2008). *National Security: Imperatives and Challenges*. Tata McGraw-Hill Education. [https://www.google.co.id/books/edition/National\\_Security/DMzcGe0-HQwC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/National_Security/DMzcGe0-HQwC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover)
- Rifa, A. (2015). Pro Kontra RUU Keamanan Nasional. In *Media Informasi Kementerian Pertahanan: WIRA* (pp. 20–25).
- Santoso, P. (2021). *Pertemuan 2 - Kerangka Strategi Pertahanan Negara Indonesia* (pp. 1–21). Kuliah Strahan Universitas Pertahanan

Republik Indonesia.

- Yani, Y M, & Montratama, I. (2016). Mengenal Dewan Keamanan Nasional di Empat Negara sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1), 1–29.
- Yani, Yanyan Mochamad, & Montratama, I. (2017). (Tidak) Menyoal Dewan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 1–22.

## PENGEMBANGAN VIDEO ANIMASI PEMBELAJARAN MATERI TATA SURYA MATA PELAJARAN GEOGRAFI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Oleh:

Sonia<sup>1)</sup>, Indri Astuti<sup>2)</sup>, Eny Enawaty<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>FKIP : Universitas Tanjungpura

<sup>1</sup>E-Mail: Sonianiya456@Gmail.Com

<sup>2</sup>E-Mail: Indribk91@Gmail.Com

<sup>3</sup>E-Mail: Eny Enawaty@Fkip.Untan.Ac.Id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media video animasi. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut digunakan metode *Research and Development* (R&D) model pengembangan ADDIE. Dengan model pengembangan ADDIE maka penelitian dilakukan melalui tahap-tahap (1) *Analyze*, (2) *Design*, (3) *Develop*, (4) *Implement*, dan (5) *Evaluate*. Penelitian ini di SMAN 1 Tebas pada kelas X IIS 2 dengan partisipan 30 orang siswa. media video animasi yang dikembangkan divalidasi oleh 4 orang ahli media dengan hasil rata-rata 4,12 dengan kategori "sangat valid", 3 orang ahli desain dengan hasil rata-rata 4,36 dengan kategori "sangat valid" dan 3 orang ahli materi dengan nilai rata-rata 4,33 dengan kategori "sangat valid". Demikian pun analisis data uji empiris dengan prosedur uji perorangan, kelompok kecil, dan uji lapangan pada 29 orang siswa SMAN 1 Tebas kelas X IIS 2 menunjukkan sikap siswa "sangat positif" menggunakan media pembelajaran animasi dengan rata-rata 90,73%. Adapun uji efektivitas media dengan kriteria sikap siswa terhadap media video animasi dan nilai *pre-treatment-post-treatment* yang melibatkan 30 orang siswa ternyata terdapat perbedaanyang signifikan dengan Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (15,34) > (1,45) Sedangkan untuk uji *effect size* dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektivan dalam media pembelajaran video animasi dengan nilai sebesar 2,79 dengan kategori "*Strong Effect*". Dengan bukti-bukti tersebut, maka media video animasi untuk mata pelajaran geografi Sekolah Menengah Atas dapat diterapkan untuk materi yang relevan pada pembelajaran Geografi di SMA.

**Kata Kunci:** Video Animasi, Geografi, Materi Tata Surya

### 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dibidang pengetahuan dan teknologi perlunya inovsi dalam perkembangan pendidikan dalam proses ngajar mengajar terutama yang bekaitan dengan faktor-faktor pembelajaran yang akan dilakukan disekolah sehingga proses penyampaian pesan suatu pembejalaran menjadi lebih efektif dan mudah untuk dapat meningkatkan hasil dan prestasi dalam proses pembelajaran. Menurut pendapat Annisa (2020) menyatakan "Meski dalam segala keterbatasan yang ada pengajar tetap harus bisa keratif dan mampu berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran seperti metode, media dan sarana dalam proses ngajar mengajar untuk tetap bisa memberikan ilmunya kepada siswa". Inovasi pembelajaran dapat dilakukan dengan dengan menggunakan media pembelajaran untuk memaksimalkan efektifitas dalam pembelajran, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar serta meningkatkan motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran yang membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan pesan dari maerti dapat tersampaikan dengan baik.

Menurut Aunurrahman, (2014, h.34) menyatakan "Proses pembelajaran harus dirancang terlebih dahulu oleh guru dan dipertimbangkan dalam

situasi dan kondisi yang memungkinkan". Menurut Azhar Arsyad (2014), h.2) "Menggunkanmedia pembelajaran sebagai sarana pembelajaran tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran dalam sarana pendidikan terutama dalam pembelajaran yang dilakukan sekolah". Media pembelajaran membantu meningkatkan efektifitas dalam proses pembelajaran dan pemahaman dalam pembelajaran sehingga meningkatkan motivasi belajar. Muhammad Zainuddin (2020) "Dalam proses pemebeljaran tingkat keberhasilan sangat ditentukan oleh penggunaan media yang diterapkan sehingga media adalah peran yang penting dalam menunjang proses mebelajaran", diperkuat oleh Hamdani & dkk (2019), Peran media pembelajaran adalah komponen paling penting untuk menggali motivasi dan minat dalam proses pembelajaran". Dapat disimpulkan bahwa, penggunaan media video animasi dalam pembejaran sangat dibutuhkan untuk proses pembelajaran yang menarik, neningkatkan efektifitas dalam pembelajaran dan membuat siswa menajdi aktif dalam proses pembelajaran yang akan diberikan oleh guru.

Media video animasi pembelajaran merupakan inovasi dalam belajar mengajar yang dapat diberikan oleh guru. Johari (2014) "Dengan menggunakan

media animasi siswa memiliki pandangan positif dan minat siswa untuk belajar menjadi meningkat". Video pembelajaran bertujuan agar membantu menyampaikan pesan-pesan yang menjadi lebih mudah dipahami. Menurut Sukiman (2012, h.187) "media video merupakan sarana atau komponen yang digunakan untuk mempermudah dalam mempersentasikan materi pembelajaran yang berupa gabungan antara gambar dan suara dalam frekuensi yang sama". Animasi merupakan bentuk visual bergerak yang berisi materi pembelajaran yang tidak bisa dijelaskan dengan metode ceramah sehingga diperlukan media pembelajaran berupa video animasi sebagai bahan ajar persentasi. Video yang akan dikembangkan berupa gambaran visual dan audio dalam bentuk animasi untuk melatih penalaran dan karangka berfikir siswa sehingga lebih mudah dalam memahami isi materi yang dipersentasikan sehingga mampu meningkatkan pengalaman yang lebih baik dalam belajar geografi.

Geografi adalah pembelajaran yang memperelajari bumi dan segala kejadian yang ada di dalamnya, dalam memahami materi pelajaran geografi merupakan hal yang tidak sulit karena dengan media video animasi, materi yang dipersentasikan dapat lebih mudah dipahami dan ini pesan materi dapat tersampaikan dengan baik. Pada materi tata surya, sulit dipahami oleh siswa dengan membaca buku ataupun mendengarkan penjelasan secara lisan. Siswa memerlukan waktu yang lama untuk memahami materi sistem tata surya materi tata surya sehingga memerlukan media video animasi dalam memahami materi tata surya untuk siswa lebih mudah memahami mengenali objek aslinya dan memberikan pengalaman langsung pada siswa.

Berdasarkan hasil kajian lapangan yang ke-1 pada tanggal 2 April 2021, dan hasil kajian lapangan ke 2 pada tanggal 5 April 2021 peneliti mendapatkan hasil belajar siswa kelas X IIS 1 pada semester ganjil di SMAN 1 Tebas rata-rata ulangan harian pada bab tata surya dan penciptaan planet bumi sangat rendah, Sehingga pada bab 4 tata surya dan penciptaan planet bumi rata-rata hasil ulangan harian siswa di SMAN 1 Tebas adalah 66,21, dari 32 siswa yang tuntas hanya 12 siswa dan tidak tuntas 20 orang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 April 2021, kepada guru mata pelajaran geografi kelas X IIS di SMAN 1 Tebas memperoleh informasi penyampaian materi mata pelajaran masih menggunakan buku yang hanya menampilkan gambar-gambar 2D dan metode penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan tanpa didukung oleh sumber belajar yang relevan sehingga membuat siswa sulit untuk memahami materi. Pada permasalahan tersebut, maka inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran, dengan inovasi berupa media, strategi dan model pembelajaran dengan harapan permasalahan dalam pembelajaran dapat diatasi dan meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran,

sehingga guru dituntut harus terampil dan kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran baik berupa media pembelajaran, model pembelajaran maupun strategi pembelajaran lainnya, Sehingga alternatif untuk mengatasi proses pembelajaran materi tata surya dengan mengembangkan video animasi

Penelitian pengembangan video animasi sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dilakukan oleh Shoimatul Izza (2019) yaitu "Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Materi Siklus Hidrologi mata pelajaran geografi", hal ini juga sejalan dengan penelitian Hikamsyah (2019), "Pengembangan Media Video Animasi Pada Materi Mitigasi Mata Pelajaran Geografi", berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan dengan inovasi pengembangan media pembelajaran menggunakan video animasi diharapkan mampu memberikan perubahan dalam masalah yang sedang dihadapi dapat teratasi dan meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan pencapaian pembelajaran.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam penelitian ini perlu dilakukan "Pengembangan Video Animasi Pembelajaran Materi Tata Surya Mata Pelajaran Geografi Di Sekolah Menengah Atas".

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan teknik *Research & Development (R & D)*. pengembangan dalam penelitian digunakan karena peneliti ingin menguji dan menghasilkan produk berupa media pembelajaran video animasi pada mata pelajaran geografi materi Tata surya. Media video animasi dirancang dengan Model desain ADDIE, pengembangan video animasi ini melibatkan guru dan siswa di SMAN 1 Tebas pada kelas X IIS. Dalam memperoleh data penelitian, digunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, soal tes tertulis, dokumentasi, dan angket. Data dianalisis menggunakan prosedur kualitatif dan kuantitatif. Analisis penelitian kebutuhan dilakukan kegiatan observasi melalui wawancara untuk mengetahui kebutuhan siswa lingkungan belajar dan materi pembelajaran. Desain produk diawali dengan menentukan spesifikasi berbentuk media pembelajaran video animasi materi tata surya dan dinamika bumi sebagai ruang kehidupan pada pembelajaran geografi kelas X IIS pada semester ganjil dan mendesain produk video animasi membuat *story board* untuk menentukan alur, letak, bentuk, tampilan, input dan output audio setiap elemen serta bentuk dalam media animasi yang dikembangkan. Tahap development dilakukan verifikasi produk oleh ahli mencakup tiga aspek yaitu validasi kepada ahli secara media, ahli secara desain dan isi materi. Selanjutnya tahap pengujian kepada produk dengan melakukan pengujian berupa uji *perorangan*, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Uji perorangan menggunakan 3 orang siswa, menguji *kelompok kecil*

menggunakan enam (6) orang siswa, serta uji Lapangan melibatkan dua puluh (20) orang siswa dari kelas X IIS 2. Uji coba terhadap produk dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan angket mengenai respon siswa terhadap penggunaan produk video animasi. Tahap *Implementation* Melakukan persiapan pelatihan guru dalam menggunakan media video animasi (prepare the teacher) dan melakukan persiapan siswa dalam menggunakan media video animasi (prepare the student) untuk menggunakan produk akhir tersebut. Tahap ini dilakukan agar guru dan siswa dapat menjalankan navigasi video animasi, dan mengimplementasikan video animasi materi tata surya dan dinamika bumi sebagai ruang kehidupan. Tahap evaluasi lebih memfokuskan apakah produk video animasi ini memiliki suatu efektivitas dan dapat mengetahui tingkat efektivitas bagi siswa dari respon dan hasil belajar menggunakan media video animasi. Peneliti memberikan soal *pretest* sebelum penggunaan media, selanjutnya memberikan soal *posttest* dan angket respon siswa setelah menggunakan media video animasi. Hasil data pengukuran respon siswa dilakukan perhitungan persentase sedangkan hasil nilai *pretest* dan *posttest* dihitung dengan menggunakan uji-t untuk dapat membandingkan sebelum maupun sesudah dalam menggunakan media video animasi dan menghitung menggunakan *Effecsize*.

Teknik Pengumpulan data merupakan teknologi dalam pengumpulan data yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data. Sugiyono (2013), “Langkah terpenting dalam penelitian yaitu memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan data” teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah Observasi bertujuan Melihat faktor dari kelebihan dan kekurangan maupun kendala yang dialami siswa dalam mengaplikasikan sarana media video animasi selama pembelajaran, Wawancara merupakan tanya jawab pertanyaan tertulis untuk responden sesuai dengan fakta dan kejadian yang diperolehnya selama penelitian berlangsung wawancara dilakukan kepada guru matapelajaran geografi kelas X IIS, angket dalam berbentuk lembar, dan lembar tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden berdasarkan kejadian di lapangan. Angket diberikan untuk mengetahui tentang ketepatan media, ketertarikan media pembelajaran yang dikembangkan. peneliti merancang daftar pertanyaan atau instrumen pertanyaan untuk validasi ahli materi, media, desain, dan respon sikap siswa. Angket ini diperlukan untuk memvalidasi produk media video animasi agar valid dan efektif untuk mata pelajaran geografi tingkat SMA. Tes ini dirancang untuk mengukur hasil belajar. Tes yang akan dilakukan peneliti merupakan tes tertulis sebanyak 25 soal dengan jawaban pilihan ganda tes akan diberikan sebelum menerapkan penggunaan media dan sesudah penggunaan media.

### Analisis Kualitatif dan Analisis kuantitatif

Analisis data deskriptif kualitatif menampilkan analisis data dan respon siswa dalam menggunakan media pembelajaran video animasi. Menampilkan data melalui tabel dan grafik.

### Analisis kuantitatif

diperoleh melalui angket maupun pengumpulan hasil tes siswa. Data survei dan tes yang diperoleh dari analisis dengan tujuan mendapatkan suatu gambaran yang utuh dari penerapan media pembelajaran yang diterapkan. Analisis kualitatif pada penelitian ini yaitu: Analisis validasi ahli merupakan ketepatan alat ukur (*Measuring instrument*). Pembelajaran pengembangan media video animasi diuji dengan validitas dari seorang ahli untuk meningkatkan kesesuaian media dengan menerapkan KI dan KD. Kriteria penilaian jawaban angket dengan skala likert. Rumus yang digunakan yaitu:

Tabel 1 Skala Likert

No	Kriteria Penilaian	Skor
1.	Sangat Baik	5
2.	Baik	4
3.	Cukup Baik	3
4.	Kurang Baik	2
5.	Tidak Baik	1

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan:

$\bar{X}$  = Skor rata-rata

$\sum X$  = Jumlah skor

$N$  = Jumlah penilai

Untuk mendapat jarak interval antar kategori Widoyoko (2018) menggunakan prosedur (dalam Mering, 2020):

$$i = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

Keterangan: maka

Skor tertinggi = 5

Skor terendah = 1

Jumlah kelas = 4 (kriteria)

Tabel 2. Kriteria Kevalidan Media

No	Kriteria Penilaian	Skor
1.	Sangat Valid	4,1 – 5,0
2.	Valid	3,1 – 4,0
3.	Kurang Valid	2,1 – 3,0
4.	Tidak valid	1,0 – 2,0

### Analisis Respon Siswa

Analisis respon siswa dapat dilakukan setelah siswa melakukan pengisian pada lembar jawaban. Langkah yang dilakukan untuk menghitung data hasil repons jawaban siswa yaitu: Menghitung jumlah siswa yang memilih jawaban sangat setuju = 4, setuju = 3, kurang setuju = 2, tidak setuju = 1 untuk setiap item pertanyaan. Menghitung hasil rata-rata dari setiap respon yang diperoleh pada pertanyaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RS_{media} = \frac{\sum P_{js}}{n}$$

Dengan :

$RS_{media}$  = rata-rata jumlah respon untuk tiap-tiap pernyataan setelah menggunakan media

$P_{js}$  = point pilihan jawaban setiap siswa setiap butir pernyataan

$n$  = banyaknya siswa

Rumus menghitung presentase dari hasil rata-rata jumlah pada nilai respon yang diperoleh dari siswa adalah sebagai berikut:

$$\%RS_{media} = \frac{R_s media \times 100\%}{n}$$

Dengan :

$\%RS_{media}$  = Persentasi dari rata-rata pada jumlah nilai yang diperoleh dari siswa pada setiap pertanyaan

Menghitung hasil rata-rata dari jumlah pada nilai respon yang diperoleh dari siswa pada seluruh pertanyaan yang telah diberikan Menghitung hasil persentase pada jumlah dari nilai respon yang diperoleh dair siswa pada seluruh pertanyaan yang telah di berikan.

Tabel 3 Kriteria Respon Terhadap Media Pembelajaran

Nilai	Kriteris respon
$85 < R_s media$	Sangat positif
$70 < R_s media < 85$	Positif
$50 < R_s media < 70$	Kurang positif
$R_s media < 50$	Tidak positif

### Analisis Hasil Belajar Siswa

Setelah siswa diberikan soal pre dan post test tentang materi tata surya dan dinamika planet bumi sebagai habitatnya, dilakukan analisis terhadap hasil belajar siswa dengan penggunaan yaitu: Uji T (*Paired Sample T-test*) dapat dijelaskan: Membandingkan nilai yang signifikan antara nilai tingkat signifikan 0,05. Memberikan kesimpulan, Ha: Terdapat perbedaan dari hasil belajar sebelum dan setelah menerapkan media video animasi materi tata surya dan dinamika bumi sebagai ruang kehidupan. H0: Tidak terdapat perbedaan dari hasil belajar sebelum dan sesudah menerapkan media video animasi materi tata surya dan dinamika bumi sebagai ruang kehidupan. Uji *Effect Size* dilakukan mengukur besarnya efektivitas media video animasi terhadap hasil belajar .

Tabel Uji effect size

Size	Interpretation
0-0,20	Weak Effect
0,21-0,50	Modest Effect
0,51-1,00	Moderate Effect
>1,00	Strong Effect

Rumus Effect size single grup/one group menurut cohen (1988) yaitu:

$$d = \frac{(M_1 - M_2)}{\sigma_{gabungan}}$$

$d$  = Effect size

$M_1$  = Rata-rata *Posttest*

$M_2$  = Rata-rata *Pretest*

$\sigma_{gabungan}$  = Standar Deviasi Gabungan

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan di SMAN I Tebas dengan melibatkan 30 orang siswa. Hasil penelitian tentang masalah

desain pengembangan ini adalah analisis, desain, develop, implementasi dan evaluasi.

#### Desain pengembangan media video animasi

Desain pengembangan ini menerapkan model desain ADDIE (analisis, desain, depelop, implementasi dan evaluasi) yang dilaksanakan mulai dari 18 juni Sampai 20 September 2021. Tujuan dari tahapan analisis ini untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam pengembangan produk yaitu Analisis Kajian Kurikulum, Analisis Kajian Penelitian Relevan, Analisis Tujuan Instrusional, dan Analisis Karakteristik Siswa. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kurikulum yang diaplikasikan di SMAN 1 Tebas ialah kurikulum 2013. Hasil temuan menunjukkan terdapat beberapa dari penelitian tedahulu relevan dengan penelitian ini, diantaranya "Pengembangan dari Pembelajaran Media Video Animasi pada Siklus Hidrologi dari mata pelajaran geografi" oleh Shoimatul Izza 2019, Pengembangan dari Media Video Animasi Dengan Materi Mitigasi Dari Mata Pelajaran Geografi oleh Hikamsyah (2019) "Pengembangan Pada Media Video Animasi dengan Dua Dimensi dari Situs Pemukiman di area Bondowoso Dengan Model ADDIE Mata Pelajaran Sejarah Kelas X IPS" oleh Relis Agustien, Nurul Umamamh dan Sumarno (2018)"Pengembangan dari Media Video Animasi Stop Motion" oleh Hesky Elma Ineari (2016)" Pengembangan video pembelajaran berbasis aplikasi powtoon dengan metode pendekatan dari Flipped classroom pada materi suhu maupun kalor kelas x SMA" oleh Laura Yasa, Zulhelmi dan M.Nor, (2021). Hasil analisis tujuan instuksional pada siswa SMAN I Tebas, siswa mulai belajar secara tatap muka di sekolah, sistem pembelajaran masih terfokus kepada guru, tetapi waktu pembelajaran hanya 45 menit sehingga peserta didik menjadi tidak dapat belajar secara mandiri melainkan hanya mendapat materi di dalam kelas, dengan memiliki media untuk mempermudah dalam menyampaikan materi, Kelebihan menggunakan video animasi untuk melatih penalaran dan analisis siswa. Subjek analisis pada karakteristik dari penelitian ini yaitu siswa Kelas X IIS SMAN I Tebas untuk pengembangan media video animasi pembelajaran yang dapat menghadirkan pengalaman yang lebih kongkrit dalam belajar Geografi sehingga produk yang akan dikembangkan sesuai dengan lingkungan peserta didik untuk digali apa kesenangan dan motivasi peserta didik untuk belajar sehingga tingkat pencapaian pembelajar sesuai dengan harapan dan untuk memberi umpan balik yang tepat dalam penerapannya.

#### Tahap Design Pengembangan media video animasi

Tahap desain untuk menentukan spesifikasi produk dan *storyboard* yaitu hasil dari produk penelitian ini berupa produk media pembelajaran video animasi materi tata surya dan bumi sebagai habitat pada mata pelajaran geografi pada materi tata surya pada pembelajaran geografi di sekolah

menengah atas. Penyusunan storyboard sangat penting dilakukan desainer untuk menentukan alur, letak, bentuk, tampilan, input dan output audio setiap elemen serta bentuk interaksi media dengan pengguna.

#### **Tahap *Development* Pengembangan media video animasi**

Tahap pengembangan produk media ini dilakukan oleh validasi ahli media, materi, respon siswa dalam uji coba perorang, uji coba kelompok kecil dan uji lapangan yaitu validasi produk video animasi dilakukan oleh enam orang ahli validator terhadap produk yang dikembangkan yaitu validasi desain, validasi media dan validasi materi.

Berdasarkan penilaian ahli dari rata-rata skor setiap aspek validasi media yaitu Nilai total rata-rata yang diperoleh untuk kevalidan media yaitu 4,12 yang dapat diartikan sebagai "sangat valid". Hasil penilaian kevalidan desain dengan rata-rata 4,36 yang berarti "Sangat Valid". Hasil nilai dari kevalidan materi dengan nilai rata-rata 4,33 yang berarti "Sangat Valid" sehingga dapat diuji cobakan dapat ditinjau dari aspek ini media video animasi yang dikembangkan dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan.

#### **Uji Coba Produk Pengembangan Media Video Animasi**

Tahap pengujian produk perorangan yang dilakukan pada tiga siswa SMAN 1 Tebas. Dilakukan uji coba pada siswa berkemampuan rendah, sedang dan tinggi. Hasil nilai rata-rata respon siswa terhadap media video animasi yang dikembangkan oleh peneliti adalah sebesar 83,92% yaitu  $70 < R_s \text{ media} <$  dengan kriteria "positif". Tahap uji coba kelompok kecil memiliki 6 orang peserta siswa SMAN 1 Tebas kepada siswa berkemampuan rendah, sedang dan tinggi, hasil nilai-nilai rata-rata respon siswa terhadap media video animasi yang dikembangkan oleh peneliti ialah sebesar 92,56% yaitu  $85 < R_s \text{ media} <$  dengan kriteria "Sangat Positif". Tahap uji coba lapangan dilakukan pada 20 orang peserta siswa SMAN 1 Tebas kepada siswa berkemampuan rendah, sedang dan tinggi dengan hasil rata-rata respon siswa terhadap media video animasi yang dikembangkan oleh peneliti ialah sebesar 95,71% yaitu  $85 < R_s \text{ media} <$  dengan kriteria "Sangat Positif".

#### **Implement (Implementasi) Pengembangan media video animasi**

Melakukan persiapan pelatihan guru dalam menggunakan media video animasi (prepare the teacher) dan melakukan persiapan siswa dalam menggunakan media video animasi (prepare the student) untuk menggunakan produk akhir tersebut. Peneliti mempersiapkan materi untuk diajarkan menggunakan video animasi kepada siswa dan melaksanakan pembelajaran pada materi tata surya dan dinamika bumi sebagai ruang kehidupan, menyusun dua Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan hari pertama, siswa diberikan angket

respon siswa terhadap penggunaan media video animasi dan soal *pretest* sebanyak 25 soal pilihan ganda. Pada kegiatan akhir hari kedua, siswa diberikan angket respon siswa terhadap penggunaan media video animasi dan soal post test sebanyak 25 soal pilihan ganda.

#### **Evaluate (evaluasi) Pengembangan Media Video Animasi**

Pada tahap evaluasi, setiap tahapan pengembangan Analisis, Desain, Pengembangan, dan Implementasi pada model ADDIE selalu memiliki tahapan evaluasi. Alat evaluasi yang digunakan peneliti adalah mengukur efektivitas produk. Hasil evaluasi yang dilakukan setiap tahap akan meningkatkan kualitas pengembangan ke tahap selanjutnya. Dengan demikian, hasil evaluasi akhir dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada hasil efektivitas setelah menggunakan produk media video animasi

#### **Profil Pengembangan Media Video Animasi**

Profil media video animasi ini memiliki tampilan menu umum yang terdiri dari beberapa menu yaitu menu Kompetensi dasar, Tujuan Pembelajaran, materi, evaluasi, kesimpulan dan terdapat tombol-tombol navigasi yaitu tombol home, tombol ?, tombol X, tombol Kembali, dan tombol lanjut. Pada menu kompetensi Dasar berisikan Kompetensi dasar yang hendak dicapai, pada menu tujuan pembelajaran berisikan tujuan pada setiap sub bab materi yang akan dicapai dalam suatu proses pembelajaran dengan menggunakan media video animasi, pada menu materi terdapat 6 sub bab dapat dibuka langsung dengan klik salah satu materi yang ingin dipelajari di dalam materi terdapat penjelasan dengan video animasi, materi dan gambar, 6 sub bab materi yang terdapat dalam KD 3.4 tata surya dan dinamika bumi sebagai ruang kehidupan

#### **Efektifitas Respon Siswa Pada Pengembangan Video Animasi**

Efektifitas dalam penelitian ini yaitu mengetahui respon siswa dan hasil dalam belajar siswa setelah menggunakan produk media video animasi yang peneliti kembangkan, Pada respon siswa terhadap penggunaan media video animasi sangat positif dapat diartikan bahwa siswa termotivasi dan merasa senang dalam proses pembelajaran geografi dapat dibuktikan dengan nilai rata-rata respon siswa sebesar 94,74% yaitu  $85 < R_s \text{ media} <$  dengan kriteria "Sangat Positif" di kelas X IIS 2 SMAN I Tebas dengan demikian respon siswa terhadap video animasi sangat tinggi, siswa merasa senang, termotivasi dan tertarik belajar dengan menggunakan video animasi.

#### **Hasil Belajar Siswa Pada Pengembangan Video Animasi**

Dalam tahap *pretest* dilakukan dengan memberikan 25 soal pilihan ganda kepada 30 orang siswa di SMAN I Tebas di kelas X IIS 2. Siswa diberikan 45 menit untuk mengerjakan soal pretest selanjutnya pada tahap *posttest* siswa diberikan

waktu yang sama 45 menit, hasil *Pretest-Posttest* SMAN 1 Tebas, terdapat peningkatan sebesar 21,16 di kelas X IIS 2 SMAN I Tebas. Dari data pre test dan *posttest* dapat dikatakan terjadi peningkatan yang signifikan. Panduan pengambilan keputusan yang akan digunakan dalam penggunaan *Paired sample t-test* hasil nilai dari sig (*2-tailed*) yaitu sebesar  $0,00 < 0,05$  karena terdapat nilai dari sig (*2-tailed*) sebesar 0,00 maka lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung  $> t$  tabel dengan hasil sebagai berikut  $(15,34) > (1,45)$ . terdapat perbedaan dari hasil belajar antara sebelum dan sesudah siswa dalam menggunakan media video animasi sebagai mata pelajaran materi tata surya dan dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan pada pelajaran geografi kelas X tingkat Sekolah Menengah Atas. Hasil *Effect size* bahwa  $2,79 > 1,00$  dengan kategori *Strong Effect*. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa media video animasi mempunyai efek yang besar terhadap hasil belajar siswa kelas X IIS 2 SMAN 1 Tebas. Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukann Penelitian oleh Aufa Id'ha Veranda Putri, Dedi Kuswandi, Susilaningih (2020), dengan judul "Pengembangan Video Edukasi Kartun Animasi Materi Siklus Air Untuk Memfasilitasi Siswa Sekolah Dasar", berdasarkan penelitian tersebut Pengembangan media video edukasi kartun animasi valid atau layak dimanfaatkan dan digunakan dalam pembelajaran. Kevalidan media dapat dilihat dari perolehan hasil validasi ahli. Hasil pengolahan data validasi ahli media diperoleh nilai sebesar 99%, validasi ahli materi sebesar 97,5%, dan dari angket tanggapan siswa sebesar 91,38%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hesky Elma Ideari (2016), dengan judul "Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Stop Motion" Berdasarkan penelitian tersebut, Untuk Pembelajaran Sejarah Keefektifan program media pembelajaran video animasi stop motion ini ditunjukkan dengan hasil perbandingan pre test dan post test siswa yaitu diperoleh kenaikan rata-rata kemampuan diperoleh t hitung= 11,11 dengan  $\alpha = 5\%$  dengan responden sebanyak 32 siswa karena hasil uji pre test post test diatas menunjukkan thitung  $\geq$  ttabel maka dapat disimpulkan pemahaman siswa mengenai materi proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadi perbedaan efektifitas pembelajaran Sejarah pokok bahasan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran video animasi stop motion. Hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media video animasi menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu

guru dan siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil respon siswa yang sangat baik dan tertarik terhadap penggunaan media, serta adanya peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media video animasi.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Desain pengembangan pada video animasi menerapkan metode *Research and Development* (R&D) dengan model pengembangan ADDIE. Dengan step dalam pengembangan diterapkan melalui tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Pada step dalam pengembangan peneliti melakukan rata-rata dari validasi ahli desain yaitu 3,12 rata-rata dari validasi ahli materi yaitu 4,36 dan validasi ahli materi dengan rata-rata 4,33 menyatakan "sangat valid" dan hasil revisi produk dari validasi ahli dilanjutkan tahap uji coba produk kepada siswa meliputi uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan menunjukkan hasil sikap positif "sangat senang". Tahap implementasi, pelatihan penerapan media video animasi pada guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan tahapan terakhir berupa evaluasi dari produk video animasi terhadap hasil respon siswa dengan kategori "sangat positif" dan hasil belajar siswa terdapat perbedaan pada nilai dari sebelum dan sesudah penggunaan video animasi.

Profil pengembangan media video animasi dalam materi tata surya dan dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan mata pelajaran geografi kelas X IIS semester ganjil pada tingkat Sekolah Menengah Atas Produk yang dikembangkan sudah memenuhi setiap komponen media seperti teks, gambar visual diam, video, audio dan audio. Produk media video animasi ini bertujuan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dalam proses pembelajaran materi tatasurya dan dinamika planet bumi sebagai habitat kehidupan. Profil media video animasi ini memiliki tampilan menu umum yang terdiri dari beberapa menu yaitu menu Kompetensi dasar, Tujuan Pembelajaran, materi, evaluasi, kesimpulan dan terdapat tombol-tombol navigasi yaitu tombol home, tombol ?, tombol off, tombol Kembali, dan tombol lanjut. Pada menu kompetensi Dasar berisikan Kompetensi dasar yang hendak dicapai, pada menu tujuan pembelajaran berisikan tujuan pada setiap sub bab materi pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran dengan mengaplikasikan media video animasi, pada menu materi terdapat 6 sub bab dapat dibuka langsung dengan klik salah satu materi yang ingin dipelajari di dalam materi terdapat penjelasan dengan video animasi, materi dan gambar Pada menu evaluasi terdapat 5 soal evaluasi, pada menu kesimpulan merupakan ringkasan dari 6 sub bab materi. Terdapat tombol home bearti kembali kemenu utama, tombol? berisikan petunjuk penggunaan, tombol off berisikan keluar dari media, tombol lanjut melanjutkan ke slide selanjutnya dan



## POTRET GERAKAN LITERASI SEKOLAH MENENGAH ATAS PADA MASA PANDEMI COVID 19

Oleh:

Maria Rosalinda Talan<sup>1)</sup>, Metropoly Merlin J. Liubana<sup>2)</sup>, Joni Soleman Nalenan<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Timor

<sup>1</sup>maria\_rosalindatalan@unimor.ac.id

<sup>2</sup>mmerlin2007@gmail.com

<sup>3</sup>joninalena07@gmail.com

### Abstrak

Pandemi covid 19 turut memberikan tantangan dalam dunia pendidikan. Karena Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sudah terintegrasi dalam kurikulum, maka dipandang perlu untuk tetap dijalankan pada masa pandemi covid 19 ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan GLS di SMA Negeri 1 Kefamenanu pada masa pandemic covid 19. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik angket dan observasi. Teknik analisis data menggunakan model alir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan GLS di SMA Negeri 1 Kefamenanu pada masa pandemi tetap berjalan pada tahap pembiasaan melalui sistem tatap muka silang dan Belajar dari Rumah (BdR). Namun pada sistem BdR diakui guru dan peserta didik tidak maksimal karena keterbatasan jangkauan pengawasan dari guru. Secara umum, pelaksanaan GLS pada masa pandemi di SMA Negeri 1 Kefamenanu meliputi tiga kegiatan yakni 1) mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi; 2) mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat; dan 3) mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat.

**Kata kunci:** Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Pandemi Covid-19

### 1. PENDAHULUAN

Secara tradisional, literasi diartikan sebagai kegiatan membaca dan menulis. Deklarasi Praha 2003 menyatakan bahwa literasi juga mencakup semua aspek berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Deklarasi UNESCO juga menunjukkan bahwa literasi informasi berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, secara efektif dan terorganisir penciptaan, penggunaan, dan pertukaran informasi untuk memecahkan berbagai masalah (Wiedarti, dkk. 2016:7).

Literasi adalah komponen yang cukup signifikan dalam kehidupan. Manfaat literasi antara lain kemampuan untuk menambah kosakata; mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan dalam kegiatan membaca dan menulis; memperoleh wawasan dan informasi baru; mudah memahami makna suatu informasi; meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis; dan meningkatkan analisis dan pemikiran seseorang. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada keterampilan dan kesadaran literasi. Jika seseorang memiliki kemampuan literasi yang signifikan, ia akan cepat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, literasi dianggap sebagai modal utama bagi peserta didik dan generasi muda untuk belajar dan menghadapi tuntutan zaman. Budaya literasi yang mengakar pada diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan di sekolah dan kehidupan sosial (Wandasari, 2017). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan literasi dapat

memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Namun ada fenomena literasi yang memprihatinkan di Indonesia. Dalam PIRLS 2011 *International Results in Reading*, Indonesia memperoleh peringkat ke-45 dari 48 negara dengan skor 428 dari skor rata-rata 500. Selain itu, dalam ajang kompetisi literasi membaca dalam PISA 2012, peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 65 negara dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013). Sedangkan PISA 2018 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-72 dengan skor 371 (skor rata-rata OECD 487). Kenyataan ini membuktikan ada penurunan aspek literasi peserta didik di Indonesia. Riset UNESCO pada tahun 2012 mengenai kebiasaan membaca masyarakat Indonesia juga menunjukkan bahwa hanya satu dari 1.000 orang masyarakat Indonesia yang membaca. Padahal menurut Agustina (2019) pada abad ke-21, peserta didik diharapkan memiliki kreativitas dan inovasi (*creativity and innovation*), kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah (*critical thinking and problem solving*), dapat berkomunikasi (*communication*), dan berkolaborasi (*collaboration*) sehingga bisa menghadapi tuntutan zaman pada masa yang akan datang.

Menyikapi rendahnya kemampuan membaca peserta didik di Indonesia berdasarkan fakta tersebut, pemerintah menginisiasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dengan dukungan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 yang digagas dan dirumuskan oleh Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Faizah dkk, (2016:2) pengertian literasi sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ atau berbicara. GLS memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum GLS adalah untuk menumbuhkan karakter peserta didik melalui penanaman ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam GLS, sehingga mereka dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan tujuan khusus GLS, yaitu 1) menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah; 1) meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat; 3) menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan; 4) menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca (Wiedarti dkk, 2016:5). Selain itu, melalui penguatan kompetensi literasi, peserta didik diharapkan dapat memanfaatkan akses yang lebih luas pada pengetahuan agar rendahnya peringkat kompetensi pada tataran internasional dapat dibenahi.

Pelaksanaan GLS terdiri dari tiga tahap, yaitu 1) tahap pembiasaan, 2) tahap pengembangan, dan 3) tahap pembelajaran. Tahap pembiasaan dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik melalui kegiatan membaca lima belas menit sebelum pelajaran dimulai. Tahap pengembangan dilaksanakan disertai dengan kegiatan tindak lanjut setelah membaca, misalnya kegiatan menanggapi bacaan yang dibaca. Tahap pembelajaran dilaksanakan dengan strategi membaca tertentu dalam kegiatan pembelajaran misalnya mengulas atau berdiskusi buku yang dibaca (Antoro, 2017:41). Beers, dkk dalam bukunya *A Principal's Guide to Literacy Instruction* menyatakan bahwa agar sekolah mampu menjadi garda terdepan dalam pengembangan budaya literasi, maka diperlukan tiga strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah yaitu 1) mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi; 2) mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat; dan 3) mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat (Wiedarti dkk, 2026:12).

Pelaksanaan GLS yang diintegrasikan dalam pembelajaran turut mendapat tantangan akibat situasi pandemi Covid 19. Kondisi pandemi Covid 19 dapat dikatakan memperburuk keadaan pendidikan di Indonesia. Musamah (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa anak sekolah dikatakan banyak yang mengalami pemerosotan kemampuan membaca lancar akibat sistem pembelajaran pada pandemi Covid 19. Sistem pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah beralih menjadi sistem Belajar dari Rumah (BdR) baik secara daring maupun

nondaring yang dituang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret. Sistem ini merupakan alternatif kebijakan untuk harus dilakukan sebagai upaya meminimalisasi penyebaran Covid 19. Sueca dan Darmayanti (2020) menyatakan bahwa kegiatan literasi selama masa pandemi Covid-19 terutama pada anak sangat bermanfaat meningkatkan semangat anak dalam belajar secara daring di rumah. Karena GLS sudah terintegrasi dalam kurikulum, maka dipandang perlu untuk tetap dijalankan pada masa pandemi covid 19 ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang potret GLS pada masa pandemi Covid 19 di SMA Negeri 1 Kefamenanu yang merupakan sekolah percontohan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian potret GLS pada masa pandemi Covid 19 di SMA Negeri 1 Kefamenanu ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa informasi mengenai pelaksanaan GLS pada masa pandemi Covid 19 di SMA Negeri 1 Kefamenanu. Data tersebut bersumber dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Pemilihan guru dan peserta didik yang dilibatkan sebagai sampel penelitian dilakukan dengan teknik *random sampling*. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik angket dan observasi. Teknik angket digunakan untuk mengumpulkan data informasi mengenai pelaksanaan GLS pada masa pandemi Covid 19 di SMA Negeri 1 Kefamenanu. Sedangkan teknik observasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data dari teknik angket. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar angket dan lembar observasi. Lembar angket berisi berbagai pertanyaan yang diisi atau dijawab oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Lembar observasi digunakan untuk mencatat berbagai informasi tambahan. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan model alir yang diadaptasi dari model alir oleh Miles dan Huberman. Pandangan Miles dan Huberman mengenai analisis data kualitatif terdiri atas reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan GLS

Pelaksanaan GLS di SMA Negeri 1 Kefamenanu diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Selama masa pandemi Covid 19, pembelajaran di sekolah ini menganut dua sistem yakni sistem tatap muka silang dan sistem Belajar dari Rumah (BdR). Pada pelaksanaan tatap muka silang, kegiatan GLS dilakukan dengan cara peserta didik membaca lima belas menit sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan membaca lima belas menit dilaksanakan pada setiap hari dan pada setiap mata pelajaran. Kegiatan membaca ini dilakukan di dalam kelas. Jenis buku yang dibaca adalah buku pelajaran

dan buku nonpelajaran yang sesuai dengan keinginan peserta didik (tanpa paksaan). Namun, frekuensi membaca buku pelajaran lebih sering dibandingkan dengan membaca buku nonpelajaran. Hal ini bertujuan agar selain terbiasa dengan kegiatan membaca, peserta didik juga memperoleh gambaran terhadap materi yang akan diterima. Cara ini dianggap baik untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Metode baca dilakukan dengan cara membaca dalam hati. Tidak ada ketentuan khusus dalam membaca seperti jumlah halaman. Setelah kegiatan membaca, tidak ada tagihan atau tindak lanjut hasil baca sehingga guru langsung membuka pelajaran.

Sama halnya dengan pelaksanaan membaca lima belas menit pada sistem tatap muka silang, pada sistem BdR, kegiatan GLS dengan membaca lima belas menit dilakukan namun waktunya bervariasi yakni sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Kegiatan membaca lima belas menit dilaksanakan pada setiap hari dan pada setiap mata pelajaran. Kegiatan membaca ini dilakukan di rumah peserta didik masing-masing. Bahan bacaan yang digunakan berupa bahan bacaan cetak dan digital. Namun, pada pelaksanaannya guru mengarahkan agar peserta didik juga membaca bacaan yang berkaitan dengan virus corona selain bacaan yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya agar selain terbiasa dengan kegiatan membaca, peserta didik juga memperoleh pengetahuan tambahan mengenai virus tersebut. Bahan bacaan berasal dari peserta didik dan guru. Bahan bacaan yang disediakan oleh guru adalah bahan cetak yang dipinjamkan, *E-Modul* dan *E-Book*. Metode pelaksanaannya adalah pada saat guru membuka pelajaran atau sebelum menutup pelajaran pada aplikasi belajar seperti *Whats Up*, *Google Class Room*, dan *Zoom*, peserta didik diinstruksikan untuk membaca. Setelah kegiatan membaca, tidak ada tagihan atau tindak lanjut hasil baca. Pelaksanaan GLS pada sistem BdR diakui guru dan peserta didik tidak maksimal karena keterbatasan jangkauan pengawasan dari guru.

#### **Upaya Pendukung GLS**

Untuk mendukung GLS pada masa pandemi Covid 19 di SMA Negeri 1 Kefamenanu, dilakukan beberapa upaya. Upaya-upaya yang dilakukan seperti mengoptimalkan perpustakaan, menyediakan pojok baca, memajang berbagai poster, mengadakan majalah dinding, menyediakan bangku-bangku di taman dan teras, mengadakan lomba kecakapan literasi, dan sosialisasi secara berkesinambungan.

Perpustakaan di SMA Negeri 1 Kefamenanu dikelola dengan baik. Pada perpustakaan ini terdapat pengurus perpustakaan yang meliputi kepala perpustakaan dan anggotanya. Fungsi perpustakaan ini yaitu menyimpan setiap buku pelajaran dan nonpelajaran seperti buku referensi dan buku fiksi yang dapat mengakomodasi peserta didik terbiasa membaca dan menambah pengetahuan serta keterampilan peserta didik. Pada masa pandemi Covid 19 ini, sekolah masih berupaya ada penambahan

buku pada perpustakaan sebanyak kurang lebih 1.000 buku sehingga total buku yang ada kurang lebih 9.000 buku. Sumber dana dalam pengadaan buku ini adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada setiap harinya, jumlah peserta didik yang berkunjung ke perpustakaan kurang lebih 30 orang. Ada yang membaca langsung di perpustakaan dan ada pula yang meminjam untuk membaca di rumah. Batas waktu pengembalian buku sudah ditentukan yakni sampai satu bulan. Jika pada waktu tersebut buku belum dikembalikan, maka peserta didik yang bersangkutan diberi peringatan untuk segera mengembalikan buku yang dipinjamnya. Pada masa pandemi Covid 19 ini, selain menyiapkan bahan bacaan cetak dari perpustakaan ini, setiap guru juga menyediakan bahan bacaan daring seperti *e-modul* dan *e-book*. Modul dan buku ini dibagikan kepada peserta didik melalui aplikasi belajar yang digunakan seperti *Whats Up*, *Google Class Room*, dan *Zoom*.

Di sekolah ini juga disediakan pojok baca. Pojok baca berupa penyediaan beberapa buku pelajaran dan nonpelajaran pada lemari yang terdapat di dalam kelas. Pojok baca ini tidak terdapat di seluruh kelas karena keterbatasan sarana pendukung seperti lemari. Pojok baca ini berfungsi menyediakan bahan bacaan bagi peserta didik pada saat kegiatan membaca lima belas menit sebelum pelajaran dimulai dan pada waktu senggang lainnya seperti pada jam istirahat. Hal ini dilakukan agar memberikan stimulus kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas membaca.

Lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kefamenanu juga merupakan lingkungan yang kaya teks. Hal ini dapat dilihat pada berbagai tempat seperti di ruang kelas, koridor, dan depan perpustakaan. Pada ruang kelas terdapat gambar hasil karya peserta didik, jadwal pelajaran, jadwal piket harian, dan majalah dinding kelas. Majalah dinding ini berisi tulisan karya peserta didik yang terdiri dari opini, puisi, pantun, karikatur, cerpen, dan humor. Pada koridor-koridor dan depan perpustakaan juga terdapat pajangan poster maupun informasi-informasi lain yang mendukung lingkungan sekolah kaya akan teks. Hal ini dimaksudkan agar setiap peserta didik yang melewati tempat-tempat tersebut dapat membaca informasi yang ada di dalamnya.

Selain mengadakan lingkungan yang kaya teks, sekolah juga menyediakan lingkungan fisik yang nyaman untuk kegiatan membaca. Pada setiap taman disediakan bangku agar peserta didik bisa duduk sambil membaca di taman. Selain itu juga di beberapa teras juga disediakan bangku untuk tujuan yang sama. Biasanya peserta didik menempati bangku-bangku ini untuk membaca pada jam istirahat.

Untuk meningkatkan kecakapan literasi, sekolah selalu mengadakan lomba. Lomba yang dimaksud adalah lomba mading, pidato, debat, mengarang, menulis karya ilmiah, membuat film pendek, desain poster, puisi, molog, dan lain-lain. Lomba-lomba ini diselenggarakan pada bulan

Mei dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional dan bulan Oktober dalam rangka memberingati Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda. Peserta lomba berasal dari setiap kelas. Setiap peserta yang menjuarai lomba tersebut diberikan apresiasi kecakapan literasi seperti piala, uang tunai, dan piagam penghargaan.

Selain itu, untuk memberi kesadaran akan pentingnya literasi, pihak sekolah selalu memberikan sosialisasi. Sosialisasi akan pentingnya literasi ini disampaikan pada setiap upacara bendera dan apel pagi. Penyampai sosialisasi akan pentingnya kegiatan literasi adalah kepala sekolah dan atau guru-guru piket harian. Hal ini dilakukan agar peserta didik selalu terdorong untuk mau membaca untuk menulis, dan menyimak untuk berbicara.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan GLS di SMA Negeri 1 Kefamenanu pada masa pandemi Covid 19 tetap dilaksanakan pada tahap pembiasaan baik melalui sistem tatap muka silang dan BdR. Pelaksanaannya berupa kegiatan membaca selama lima belas menit sebelum pelajaran dimulai. Bahan bacaan yang dibaca tidak ditentukan atau dipaksakan sehingga peserta didik akan termotivasi untuk melakukan kegiatan membaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Tarigan (2008:31) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan yang sebenarnya di dalam masyarakat, setiap anggota masyarakat akan melakukan kegiatan membaca terhadap bahan bacaan yang sesuai dengan selera/pilihan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kegiatan membaca ini tidak diikuti tindak lanjut atau tagihan sehingga pelaksanaan GLS di sekolah ini tergolong pada tahap pembiasaan. Hal ini telah ditentukan klasifikasi tahapannya oleh Wiedarti dkk (2016:29) yang menguraikan bahwa lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membaca buku dengan nyaring (*read aloud*) atau membaca dalam hati (*sustained silent reading*) tanpa tagihan termasuk pada tahapan pembiasaan.

Selain membaca selama lima belas menit sebelum pelajaran, ada upaya lain yang dilakukan sekolah yakni mengoptimalkan perpustakaan, menyediakan pojok baca, memajang berbagai poster, mengadakan majalah dinding, menyediakan bangku-bangku di taman, mengadakan lomba kecakapan literasi, dan sosialisasi secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Beers, dkk dalam bukunya dalam buku *A Principal's Guide to Literacy Instruction* yang menyatakan bahwa agar sekolah mampu menjadi garda terdepan dalam pengembangan budaya literasi, maka diperlukan tiga strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah yaitu 1) mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi; 2) mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat; dan 3) mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat (Wiedarti dkk, 2026:12). Upaya

mengoptimalkan perpustakaan, menyediakan pojok baca, memajang berbagai poster, mengadakan majalah dinding, dan menyediakan bangku-bangku di taman merupakan bagian dari mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Upaya ini dilakukan agar memberikan stimulus kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas membaca secara terus menerus. Hal ini sejalan dengan teori Pavlov yang menyatakan bahwa untuk menimbulkan atau memunculkan reaksi yang diinginkan yang disebut respon, maka perlu adanya stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga disebut dengan pembiasaan (Susanto, 2019). Berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa untuk membentuk suatu pembiasaan seseorang harus melakukan sesuatu dengan terus-menerus atau berulang. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Rohman (2012) bahwa pembiasaan (*habituation*) merupakan proses pendidikan. Upaya mengadakan lomba kecakapan literasi yang diikuti dengan pemberian penghargaan bagi peserta didik yang menjuarai lomba serta melakukan sosialisasi secara berkesinambungan merupakan bagian dari mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Apresiasi yang diberikan kepada peserta didik yang menjuarai lomba dapat memberikan motivasi besar bagi mereka dalam kegiatan literasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2017) dalam hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa kegiatan lomba dan penghargaan dapat memacu semangat peserta didik dalam melaksanakan kegiatan membaca dan menulis. Sedangkan kegiatan membaca selama lima belas menit sebelum pelajaran merupakan bagian dari mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat.

#### 4. KESIMPULAN

Pada masa pandemi Covid 19 pelaksanaan GLS di SMA Negeri 1 Kefamenanu tetap berjalan di tahap pembiasaan melalui sistem tatap muka silang dan sistem BdR. Namun demikian, pelaksanaan GLS pada sistem BdR diakui guru dan peserta didik tidak maksimal karena keterbatasan jangkauan pengawasan dari guru. Untuk menghidupkan dan mengembangkan budaya literasi, pihak sekolah melakukan berbagai upaya yakni mengoptimalkan perpustakaan, menyediakan pojok baca, memajang berbagai poster, mengadakan majalah dinding, menyediakan bangku-bangku di taman, mengadakan lomba kecakapan literasi, dan sosialisasi secara berkesinambungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan GLS pada masa pandemi covid 19 di SMA Negeri 1 Kefamenanu meliputi tiga hal yakni 1) mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi; 2) mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat; dan 3) mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat.

Menyikapi keterbatasan pelaksanaan GLS pada sistem BdR, maka adapun saran kepada guru mata pelajaran sebagai penggerak GLS. Guru hendaknya tetap mengakomodasi terlaksananya GLS pada sistem BdR dengan menginstruksikan kepada peserta didik untuk membuat jurnal kegiatan membaca setiap hari. Hal ini dimaksudkan agar pada masa pandemi covid 19 peserta didik terbiasa membaca untuk menumbuhkan sikap budaya baca, mendapatkan pengetahuan, dan keterampilan tambahan.

## 5. REFERENSI

Agustina Noni. (2019) “Desain Infografis: Pengembangan Kreativitas dan Literasi Membaca Siswa SD Hati Kudus”. *AbdiMas*. Volume 05 Nomor 03.

Atoro, Billy (2017) *Gerakan Literasi Sekolah: Dari Pucuk Hingga Akar*. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.

Faizah, Dewi Utama dkk, 2016. *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar*. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.

Rohman, A. (2012). “Pembiasaan sebagai Basis Penanaman Nilai-nilai Akhlak Remaja”. *Nadwa. Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6, Nomor 1, April 2012 (116134).

Sueca, I. N., & Darmayanti, N. W. S. (2020). “Pembinaan dan Pembimbingan Kegiatan Literasi Dasar Dalam Pembelajaran di Rumah Selama Pandemi Covid-19 pada Anak-Anak Banjar Dinas Temukus, Desa Besakih”. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 557-561.

Susanto, Ratnawati (2019) *Konsep Dasar Teori Belajar*. Modul: Universitas Esa Unggul.

Tarigan, H. G. (2008) *Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.

Wandasari, Yulisa (2017) “Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai Pembentuk Pendidikan Berkarakter”. *JMKSP*. Volume 1 Nomor 1. Tahun 2017

Wiedarti, Pangesti dkk. (2016) *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.

Wulandari, R. (2017). “Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al Hakim International.” (*Doctoral Dissertation*, Fakultas Ilmu Pendidikan).

# PROSES PEMBELAJARAN PENJAS ADAPTIF DI SEKOLAH LUAR BIASA KOTA BENGKULU

Oleh:

**Yahya Eko Nopiyanto<sup>1)</sup>, Dian Pujiyanto<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu

<sup>1</sup>Email: yahyaekonopiyanto@unib.ac.id

<sup>2</sup>Email: dianpujiyanto@unib.ac.id

## Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran penjas adaptif yang ada di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 5 guru penjas yang berasal dari 5 sekolah yaitu: SLB Dharma Wanita, SLBN 1 Bengkulu, SLBN 2 Bengkulu, SLBN 3 Bengkulu, SLBN 4 Bengkulu. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal...adapun teknik dan instrumen yang digunakan adalah observasi, angket, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi data. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses pembelajaran penjas adaptif di SLB Dharma Wanita berada dalam kategori baik, proses pembelajaran penjas adaptif di SLBN 1 Bengkulu berada dalam kategori cukup, proses pembelajaran penjas adaptif di SLBN 2 Bengkulu berada dalam kategori sangat baik, proses pembelajaran penjas adaptif di SLBN 3 Bengkulu berada dalam kategori baik, proses pembelajaran penjas adaptif di SLBN 4 Bengkulu berada dalam kategori sangat baik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran penjas adaptif di SLB Kota Bengkulu berada dalam kategori baik.

**Kata Kunci:** pembelajaran, penjas, adaptif.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang menggunakan aktivitas jasmani guna meningkatkan aspek psikomotor, kognitif, afektif, sosial, dan emosional (Nopiyanto&Raibowo, 2019). Dalam proses pendidikan jasmani tidak diperkenankan untuk membedakan antar siswa. Artinya setiap siswa mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan jasmani tanpa terkecuali siswa berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai beberapa masalah yang berkaitan dengan gerak lokomotor, gerak non lokomotor, maupun permasalahan kognitif(Jauhari, 2017). Oleh karena itu, sebagian besar ABK sulit untuk mengikuti pembelajaran penjas. Guna mengatasi kesulitan tersebut penjas menjawab dengan menghadirkan penjas adaptif.

Penjas adaptif adalah proses pembelajaran pendidikan jasmani yang diadaptasi dan dimodifikasi supaya mudah diterima oleh ABK (Sari, 2016). Penjas adaptif merupakan pendidikan jasmani yang dikhususkan bagi ABK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kognitif, dan meningkatkan jiwa toleransi (Pangesti&Sudarsini, 2015). Namun, dalam praktiknya di lapangan ditemui berbagai permasalahan pada proses pembelajaran penjas adaptif diantaranya adalah minimnya tenaga guru penjas yang kompeten untuk mengajar penjas adaptif, minimnya pemahaman orang tua mengenai anaknya untuk mendapatkan pendidikan, kurangnya pelatihan untuk guru mengenai pembelajaran penjas adaptif, serta

kurangnya sarana dan prasarana penjas adaptif (Vai&Lorenza, 2019). Hambatan lain yang dialami oleh guru diantaranya adalah sulit menerapkan metode pembelajaran yang telah ditentukan (Jauhari, Mabela,&Zakiah, 2020). Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara kepada guru penjas yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam pembelajaran penjas adaptif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Bengkulu. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kesulitan merumuskan tujuan pembelajaran, kesulitan mengembangkan sarana dan prasarana, serta kesulitan untuk melakukan evaluasi pembelajaran.

Berakar dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses pembelajaran penjas adaptif di SLB Kota Bengkulu. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk guru penjas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran penjas adaptif.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu proses pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi dan analisis data bersifat induktif (Anggito&Setiawan, 2018). Teknik pengampilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengampilan sampel yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Sehingga, sampel dalam penelitian ini adalah lima guru penjas adaptif yang mengajar secara aktif di SLB Kota Bengkulu. Sampel yang dipilih merupakan seseorang yang dianggap mampu memenuhi persyaratan pengambilan sampel

yaitu: mengajar di SLBKota Bengkulu, mempunyai pengalaman mengajar minimal satu tahun, mengampu mata pelajaran penjas adaptif. Adapun lokasi dan tempat penelitian dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian	Waktu Penelitian
SLB Dharma Wanita Jl. Mangga Raya No.1, Singaran Pati, Kota Bengkulu	7 Desember 2021
SLBN 1 Bengkulu Jl. Bukit Barisan, Ratu Agung, Kota Bengkulu	15 November 2021
SLBN 2 Bengkulu Jl. Irian Tanjung Jaya, Sungai Serut, Kota Bengkulu	18 November 2021
SLBN 3 Bengkulu Jl. Nakau-Air Sebakul, Sungai Serut, Kota Bengkulu	16 Desember 2021
SLBN 4 Bengkulu Jl. Budi Utomo, Kandang Mas, Kota Bengkulu	29 November 2021

Teknik dan instrumen pengumpul data menggunakan observasi, angket, dan wawancara. Adapun panduan observasi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Panduan Observasi

No	Indikator
1	Situasi dan kondisi sekolah
2	Sarana dan prasarana pembelajaran
3	Proses pembelajaran

Selain melakukan observasi lapangan, peneliti juga mengumpulkan data menggunakan angket yang berisi lima 5 indikator dan terdiri dari 30 pertanyaan. Adapun indikator dalam angket dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Angket

No	Indikator
1	Tujuan pembelajaran
2	Materi pembelajaran
3	Sikap dan motivasi
3	Kompetensi guru
4	Sarana dan prasarana
5	Evaluasi pembelajaran

Guna mendapatkan data yang komprehensif, peneliti juga melakukan wawancara terstruktur kepada lima guru penjas adaptif yang ada di SLB Kota Bengkulu. Pertanyaan dalam wawancara terdiri dari 12 pertanyaan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Panduan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Bagaimana cara bapak/ibu dalam berkomunikasi pada siswa ?
2	Apakah siswa sering salah dalam menerima informasi yang disampaikan ?
3	Materi apa saja yang disampaikan dalam pembelajaran penjas adaptif?
4	Materi apa yang menjadi materi tersulit dalam mengajarkannya ?
5	Metode apa yang digunakan dalam menyampaikan materi penjas kepada siswa ?
6	Apakah dengan menggunakan metode tersebut materi sudah tersampaikan secara maksimal ?
7	Dalam kondisi tertentu misalnya ada anak yang (bermasalah tidak mau ikut pembelajaran), apakah ada metode khusus yang digunakan ?
8	Apakah dalam satu kelas yang bapak/ibu ajar, kondisi kongnitif (kemampuan menerima informasi) sama rata ?
9	Berdasarkan pengalaman anak ABK apa yang paling sulit mengikuti pembelajaran?
10	Bagaimana komunikasi tatap muka yang biasa bapak/ibu lakukan ?
11	Apakah dalam setiap pembelajaran penjaskes yang bapak/ibu lakukan selalu menggunakan RPP sesuai pedoman

	kegiatannya ?
12	Media apa yang sering bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran?

Peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik analisis data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Sehingga, untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara menggabungkan data yang terkumpul melalui observasi, angket, serta wawancara. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kategori proses pembelajaran penjas adaptif menggunakan tabel kategori (Wagiran, 2015).

Tabel 4. Rumus Penentuan Kategori

Interval	Kategori
$>(Mi + 1,8SD) \text{ s.d. } (Mi + 3SD)$	Sangat baik
$>(Mi + 0,6) \text{ s.d. } (Mi + 1,8SD)$	Baik
$>(Mi - 0,6SD) \text{ s.d. } (Mi + 0,6SD)$	Cukup
$>(Mi - 1,8SD) \text{ s.d. } (Mi - 0,6SD)$	Kurang
$(Mi - 3SD) \text{ s.d. } (Mi - 1,8SD)$	Sangat kurang

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian yang ada.

#### SLB Dharma Wanita Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SLBDharma Wanita diketahui bahwa situasi dan kondisi di lingkungan sekolah berada dalam kondisi yang nyaman untuk dilaksanakan proses pembelajaran. Situasi dan kondisi di di SLBDharma Wanita terdapat pembuangan sampah, taman bunga di halaman depan kelas, dan ruang kelas yang bersih. Hal tersebut tentu sangat mendukung untuk proses pembelajaran penjas adaptif. Namun, diketahui bahwa sarana dan prasarana kurang memadai untuk proses pembelajaran penjas adaptif. Sarana dan prasarana yang ada diantaranya adalah ruang olahraga, lapangan basket yang lantainya berlubang, papan dan ring basket yang telah lapuk, gawang futsal yang telah berkarat dan tidak terdapat jaring, dan 2 matras senam lantai. Artinya sarana dan prasarana pembelajaran penjas adaptif di SLBDharma Wanita belum memenuhi standar ideal untuk pembelajaran penjas adaptif. Hal tersebut senada dengan beberapa penelitian serupa yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran penjas adaptif di SLB belum memenuhi standar dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah maupun pemerintah terkait (Agustina & Hanani, 2013; Agustina, 2014). Dengan keterbatasan sarana dan prasarana akan berdampak pada sulitnya siswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran penjas (Salasa, 2021).

Meskipun terkendala dengan sarana dan prasarana di sekolah tidak menyurutkan motivasi guru dalam mengajarkan penjas adaptif kepada siswa yang ada di SLB Dharma Wanita. Untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana para guru memodifikasi sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Proses pembelajaran yang dilaksanakan juga menggunakan beberapa metode ceramah dan demonstrasi. Kedua metode tersebut

dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran karena dianggap paling sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di SLB Dharma Wanita. Dengan menggunakan metode demonstrasi mampu meningkatkan keterampilan siswa berkebutuhan khusus (Amelia, 2020).

Untuk memperoleh data yang mendukung hasil observasi, peneliti membagikan angket kepada guru penjas yang ada di SLB Dharma Wanita. Hasil yang diperoleh dari analisis angket mendapat skor 88 dengan kategori baik. Dari indikator tujuan pembelajaran diketahui memiliki skor 17 dengan kategori baik. Hasil analisis angket telah sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Agustanul Akmal, S.Pd yang menjadi subjek dalam penelitian menyatakan bahwa:

*Saya selalu merumuskan tujuan pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan tujuan tersebut disesuaikan dengan karakteristik siswa.*

Kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa sangat membantu untuk melakukan penilaian maupun evaluasi pembelajaran (Septianti & Afiani, 2020). Selain merumuskan tujuan pembelajaran, seorang guru juga dituntut untuk memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum serta karakteristik siswa. Kemampuan guru penjas dalam memberikan materi pembelajaran di SLB Dharma Wanita dalam kategori sangat baik dengan skor 22. Pada sesi wawancara yang dilakukan pada 7 Desember 2021 Agustanul Akmal, S.Pd selaku guru menyatakan bahwa:

*Materi penjas adaptif yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan berdasarkan pada karakteristik peserta didik. Terlebih lagi materi penjas yang diberikan kepada siswa ABK harus dimodifikasi karena kebutuhan ABK berbeda dengan kebutuhan pada siswa di sekolah reguler.*

Siswa ABK mempunyai hak yang sama dengan siswa normal dalam pembelajaran penjas, yang membedakan hanyalah keterbatasan fisik atau psikis ABK. Oleh karena itu dalam pembelajaran penjas diperlukan pengembangan materi pembelajaran sehingga sesuai dengan tingkat keterampilan dan kebutuhan siswa ABK (Julianti et al., 2019). Pengembangan modifikasi materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru mampu membantu meningkatkan keterampilan siswa, sebagai salah satu solusi dari kurangnya sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan minat dan motivasi belajar (Suryanto, 2016). Minat belajar mempunyai kedudukan penting untuk keberhasilan seseorang dalam mengikuti pembelajaran (Nopiyanto & Ibrahim, 2021). Oleh sebab itu, guru penjas juga dituntut untuk mampu membangkitkan minat belajar siswa ABK dalam mengikuti pembelajaran penjas adaptif. Tingkat kemampuan guru penjas dalam membangkitkan minat belajar siswa ABK di SLB Dharma Wanita

dalam kategori cukup dengan skor 13. Meskipun siswa mempunyai minat belajar yang baik, terkadang siswa juga mengalami kesulitan belajar seperti tidak mampu menangkap semua materi pembelajaran, dan tidak mampu melakukan tugas yang diberikan guru. Agustanul Akmal, S.Pd yang menjadi subjek dalam penelitian menyatakan bahwa:

*Tidak semua materi pembelajaran dapat ditangkap dengan baik oleh siswa ABK, terutama siswa yang memiliki tunaganda. Terkadang siswa tidak mampu menangkap semua instruksi yang diberikan oleh guru, terutama pada materi senam lantai.*

Kurangnya pendengaran yang dialami oleh siswa dan kurangnya kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan siswa ABK menjadi faktor penghambat dalam proses pembelajaran di SLB (Trisanti, Madyan, & Wiyono, 2021). Untuk mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dibutuhkan guru yang kompeten. Tingkat kompetensi guru penjas di SLB Dharma Wanita berada dalam kategori sangat baik dengan skor 18. Guru mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah dan demonstrasi, mampu memperagakan gerakan olahraga sesuai dengan materi, mampu memberikan motivasi belajar kepada setiap siswa, serta mampu memodifikasi sarana dan prasarana. Agustanul Akmal, S.Pd menyatakan bahwa:

*Saya menggabungkan berbagai metode dalam pembelajaran seperti metode ceramah dan demonstrasi. Dengan menggunakan metode tersebut materi yang disampaikan akan mudah untuk dipahami siswa.*

Sarana dan prasarana yang tersedia di SLB Dharma Wanita dalam kategori kurang. Untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana guru penjas melakukan berbagai modifikasi sehingga tetap mampu melaksanakan pembelajaran penjas adaptif. Guna mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran penjas maka guru di SLB Dharma Wanita juga melakukan evaluasi pembelajaran. Tingkat kemampuan guru melakukan evaluasi pembelajaran dalam kategori cukup dengan skor 15. Namun, sangat disayangkan guru penjas belum melakukan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan dalam pembelajaran penjas adaptif. Padahal dengan melakukan evaluasi akan membantu guru dalam mengetahui keberhasilan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan (Yunisya & Sopandi, 2020; Raibowo & Nopiyanto, 2020).

### **SLBN 1 Kota Bengkulu**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SLBN 1 Kota Bengkulu diketahui bahwa situasi dan kondisi di lingkungan sekolah berada dalam kondisi yang nyaman dan aman untuk dilaksanakan proses pembelajaran. Di sekolah ini juga terdapat berbagai sarana dan prasarana untuk pembelajaran penjas adaptif, diantaranya adalah lapangan bola basket, bola basket, ring basket, gawang futsal, bola futsal,

dan berbagai sarana pembelajaran yang dimodifikasi. Proses pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa berjalan efektif dan komunikatif. Guru menggunakan media dalam menyampaikan materi. Media yang digunakan terdiri dari media visual maupun audio visual. Penggunaan media tersebut terbukti efektif, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa (Salim, 2021).

Kemampuan guru dalam menjalankan proses pembelajaran penjas adaptif di SLBN 1 Kota Bengkulu berada dalam kategori cukup dengan skor 79. Ditinjau dari indikator tujuan pembelajaran diketahui memiliki skor 16 dengan kategori baik. Hasil analisis angket telah sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Iyasman, S.Pd yang menjadi subjek dalam penelitian menyatakan bahwa:

*Penetapan tujuan pembelajaran merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan karena akan membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran penjas adaptif dirancang sedemikian rupa untuk dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa.*

Kebugaran jasmani yang baik akan sangat membantu siswa ABK dalam mengikuti pembelajaran jasmani adaptif (Mujianto, 2015). Untuk dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa ABK seorang guru penjas dituntut untuk memilih materi yang tepat. Tingkat kemampuan guru penjas dalam memilih materi pembelajaran berada pada kategori sangat baik dengan skor 22. Guru mampu memilih materi sesuai kebutuhan siswa di kelasnya serta mengetahui dengan baik bahwa materi pembelajaran penjas adaptif untuk ABK berbeda dengan siswa lain pada sekolah reguler.

*Materi yang saya sampaikan kepada siswa telah berpedoman pada kurikulum dan memperhatikan kebutuhan masing-masing siswa. Beberapa materi pembelajaran yang diajarkan diantaranya adalah permainan bola besar dan bola kecil, senam, dan atletik.*

Pemilihan materi yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar. Dari hasil analisis diketahui bahwa kemampuan guru dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar dalam kategori cukup dengan skor 13. Guru mengalami hambatan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa terutama ketika memberikan materi senam lantai. Materi senam lantai dianggap paling sulit untuk diajarkan kepada siswa ABK, karena adanya keterbatasan pada kondisi fisik (Wati & Nugraha, 2018).

Kompetensi guru penjas di SLBN 1 Kota Bengkulu berada dalam kategori baik dengan skor 18. Hal itu dilihat dari keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran, memodifikasi sarana dan prasarana. Namun, guru mengalami kesulitan untuk melakukan evaluasi pembelajaran

secara berkala. Iyasman, S.Pd yang menjadi subjek dalam penelitian menyatakan bahwa:

*Saya hanya kadang-kadang melakukan evaluasi pembelajaran di awal maupun akhir pembelajaran. Jenis tes yang digunakan lebih dominan pada tes keterampilan.*

#### **SLBN 2 Kota Bengkulu**

Hasil pengamatan yang telah dilakukan di SLBN 2 Kota Bengkulu diketahui bahwa situasi dan kondisi sekolah dalam keadaan baik untuk dilaksanakan proses pembelajaran. SLBN 2 Kota Bengkulu memiliki 10 ruang belajar, ruang komputer, ruang klinis, ruang bimbingan penyuluhan, ruang UKS, ruang terapi untuk tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa, serta halaman untuk berolahraga. Sarana dan prasarana untuk pembelajaran penjas adaptif juga sudah terpenuhi seperti lapangan tenis meja dan lapangan bulutangkis. Namun, untuk lapangan bola voli dan bola basket belum ada. Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia, proses pembelajaran tetap dapat dilangsungkan secara efektif.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui angket dapat diketahui bahwa proses pembelajaran penjas adaptif di SLBN 2 Kota Bengkulu berada dalam kategori sangat baik dengan skor 103. Ditinjau dari kemampuan guru dalam menetapkan tujuan pembelajaran berada pada kategori sangat baik dengan skor 21. Guru telah mampu merumuskan tujuan pembelajaran sesuai kurikulum, memperhatikan kebutuhan siswa, guru mampu menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran ditetapkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta menghindari kecacatan yang lebih parah. Deli Puspita Sari, S.Pd selaku guru menyatakan bahwa:

*Tujuan pembelajaran sangat penting untuk dijelaskan kepada siswa agar mereka memahami apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut saya rumuskan ke dalam RPP.*

Melalui tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP sangat membantu guru untuk menyajikan materi pembelajaran. Kemampuan guru dalam memilih dan menyajikan materi pembelajaran berada pada kategori sangat baik dengan skor 23. Deli Puspita Sari, S.Pd mengungkapkan bahwa:

*Materi yang diberikan pada proses pembelajaran telah sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan keadaan siswa, materi yang diajarkan juga membahas tentang kesehatan pribadi, serta menekankan unsur modifikasi pembelajaran dan unsur permainan.*

Pada proses pembelajaran yang dilaksanakan, guru juga tidak lupa untuk memberikan motivasi kepada siswa. Tingkat kemampuan guru dalam memberikan motivasi berada dalam kategori baik dengan skor 14. Dalam proses pemberian motivasi terkadang guru mengalami hambatan terutama kepada peserta yang tunagrahita. Meskipun

mendapatkan hambatan tetapi tidak mengurangi kompetensi guru dalam mengajar. Guru berusaha sebaik mungkin untuk terus memberikan motivasi belajar, melakukan demonstrasi pembelajaran, memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala.

### SLBN 3 Kota Bengkulu

Pada tahun pembelajaran 2021/2022 SLBN 3 Kota Bengkulu memiliki 34 siswa untuk tingkat SD, 17 siswa untuk tingkat SMP, dan 12 siswa tingkat SMA. Situasi dan kondisi sekolah juga terlihat nyaman untuk proses pembelajaran karena dilengkapi dengan 9 ruang kelas, 1 ruang keterampilan, 1 ruang olahraga. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran penjas juga sudah tersedia, seperti lapangan basket, bola basket, ring basket, matras senam lantai, berbagai jenis bola besar dan bola kecil. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan baik oleh guru kepada siswa. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru menggunakan cara berkomunikasi sesuai dengan jenis ketunaan yang dialami oleh siswa, misalkan untuk tunarungu guru menggunakan bahasa isyarat.

Proses pembelajaran penjas adaptif di SLBN 3 Kota Bengkulu berada dalam kategori baik dengan skor 94. Masing-masing skor dari setiap indikator juga berada dalam kategori baik, seperti kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan skor 19. Dalam hal ini, guru penjas telah mampu menerapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, memperhatikan kebutuhan masing-masing siswa, dan proses pembelajaran penjas dilaksanakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa, serta menghindari kecacatan yang lebih parah. Kemampuan guru dalam memilih dan menyajikan materi pembelajaran berada dalam kategori sangat baik dengan skor 22. Pada tanggal 15 Desember 2021 dalam sesi wawancara dengan Mega Sundari, S.Pd menyatakan bahwa:

*Bagi saya merumuskan tujuan pembelajaran sangat penting, karena akan membantu saya dalam menentukan strategi pembelajaran, cara berkomunikasi dengan siswa, serta menentukan materi pembelajaran.*

Kemampuan guru penjas dalam menentukan materi pembelajaran berada dalam kategori baik dengan skor 22. Materi pembelajaran yang diajarkan berbeda dengan materi yang diajarkan kepada anak normal, materi sesuai dengan kurikulum, materi disajikan berdasarkan kebutuhan siswa, terdapat materi kesehatan pribadi. Mega Sundari, S.Pd menyatakan bahwa:

*Saya mengajarkan banyak materi pembelajaran seperti senam, renang, dan pola hidup sehat. Materi tersebut diajarkan dengan cara dimodifikasi supaya lebih mudah diikuti oleh siswa.*

Motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran dalam kategori cukup dengan skor 12.

Tidak semua materi pembelajaran dapat diterima dikarenakan tingkat ketunaan setiap siswa berbeda-beda. Mega Sundari, S.Pd menyatakan bahwa:

*Dalam proses pembelajaran terkadang saya mengalami hambatan untuk memberikan motivasi kepada siswa. Karena kebanyakan anak berkebutuhan khusus tidak suka dipaksa, dan kita sebagai guru harus mengikuti mood anak tersebut, sampai anak tersebut mau melakukan pembelajaran.*

Pada proses pembelajaran penjas adaptif di SLBN 3 Kota Bengkulu guru penjas harus kompeten dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Diketahui bahwa tingkat kompetensi guru penjas memiliki skor 18 berada dalam kategori sangat baik. Guru penjas mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran, mendemonstrasikan materi pembelajaran, memodifikasi sarana dan prasarana, mengalokasikan waktu yang cukup, memberikan motivasi belajar siswa. Mega Sundari, S.Pd menyatakan bahwa:

*Kompetensi yang dibutuhkan guru penjas disini sama dengan guru penjas yang mengajar di sekolah reguler. Hanya saja guru penjas disini harus mempunyai keterampilan lebih, seperti kemampuan untuk menggunakan bahasa isyarat dan kemampuan memodifikasi sarana pembelajaran.*

Sarana dan prasarana pembelajaran penjas adaptif di SLBN 3 Kota Bengkulu sudah tersedia dengan baik meskipun belum terpenuhi semuanya. Oleh karena itu, guru penjas melakukan pengembangan sarana supaya pembelajaran penjas tetap berjalan dengan baik. Dalam proses pembelajaran, guru terkadang juga melakukan evaluasi pembelajaran.

### SLBN 4 Kota Bengkulu

Situasi dan kondisi di SLBN 4 Kota Bengkulu yang diobservasi berada dalam kondisi yang nyaman untuk belajar. Beberapa sarana dan prasarana pendukung untuk proses pembelajaran juga telah tersedia, seperti ruang tata boga dan komputer, perpustakaan, dan ruang kelas. Proses pembelajaran dilaksanakan secara komunikatif antara guru dan siswa. Menurut Wiwin Dahlia, S.Pd yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa:

*Pada proses pembelajaran dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus kita harus komunikatif dengan nada bicara yang pelan dan lembut.*

Selain harus komunikatif, guru penjas juga harus mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Kemampuan guru di SLBN 4 Kota Bengkulu dalam merumuskan masalah mempunyai kategori sangat baik dengan skor 24. Menurut Wiwin Dahlia, S.Pd menyatakan bahwa:

*Saya selalu merumuskan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik siswa, dan menjelaskan tujuan pembelajaran sebelum dimulai pelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas*

akan memudahkan saya dalam memilih materi pembelajaran.

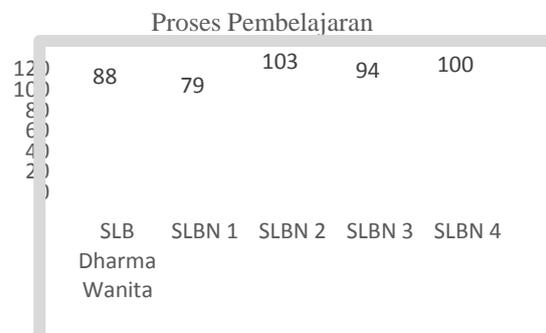
Kemampuan guru dalam memilih materi pembelajaran dalam kategori sangat baik dengan skor 22. Materi yang diajarkan guru sesuai dengan materi yang ada di kurikulum, materi yang disajikan memperhatikan keadaan siswa. Menurut Wiwin Dahlia, S.Pd menyatakan bahwa :

*Beberapa materi yang diajarkan dalam pembelajaran jasmani adaptif diantaranya adalah permainan bulutangkis, gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan permainan bola kecil.*

Materi pembelajaran tersebut diikuti oleh siswa dengan penuh antusias. Hal ini terlihat dari motivasi belajar siswa dalam kategori sangat baik dengan skor 18. Wiwin Dahlia, S.Pd mengaku bahwa:

*Bukan hal yang mudah untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama anak tunagrahita. Namun, sebagai guru saya selalu berusaha yang terbaik dengan melakukan berbagai pendekatan terhadap siswa.*

Salah satu upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik. Itulah sebabnya, guru yang mengajar di SLB harus memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi guru penjas di SLBN 4 Kota Bengkulu dalam kategori sangat baik dengan skor 18. Meskipun guru telah memiliki kompetensi yang baik, dalam proses pembelajarannya masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Diketahui bahwa sarana dan prasarana pembelajaran penjas dalam kategori sangat kurang dengan skor 4. Dengan adanya keterbatasan sarana dan prasarana tidak menyurutkan kemauan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kemampuan guru penjas di SLBN 4 Kota Bengkulu dalam melakukan evaluasi pembelajaran dalam kategori cukup dengan skor 14. Jenis tes yang digunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran masih dominan menggunakan tes keterampilan. Berikut ini disajikan proses pembelajaran dari masing-masing sekolah.



Gambar 1. Proses pembelajaran penjas adaptif

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa SLBN 2 Kota Bengkulu memiliki skor yang paling tinggi. Sementara itu, SLBN 1 Kota Bengkulu memiliki skor yang paling rendah jika dibandingkan

dengan sekolah lain yang menjadi lokasi dalam penelitian ini.

#### 4. KESIMPULAN

Proses pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di Kota Bengkulu dalam kategori baik. Guru penjas telah mampu merumuskan tujuan pembelajaran, mampu memilih materi pembelajaran yang tepat, mampu memotivasi siswa untuk belajar, memiliki kompetensi yang dibutuhkan, mampu memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran, serta mampu melakukan evaluasi pembelajaran. Hasil penelitian ini hanya berlaku bagi kelima sekolah yang dilibatkan dalam penelitian ini, dan hanya untuk pembelajaran penjas adaptif sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk semua SLB di Bengkulu. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya dapat melibatkan guru penjas adaptif dalam jumlah lebih banyak dan skala lebih luas.

#### 5. REFERENSI

- Amelia, H. (2020). Efektivitas Metode Demonstrasi dalam Keterampilan Vokasional Membuat Souvenir Boneka dari Kaus Kaki bagi Anak Tunagrahita Ringan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(1), 136-143. <https://doi.org/10.31933/rri.v3i1.336>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Agustina, E. T., & Hanani, E. S. (2013). Survei Kelayakan Sarana Dan Prasarana Pelaksanaan Belajar Mengajar Penjasorkes Slb B Don Bosco Kabupaten Wonosobo Tahun 2011. *ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 2(4). <https://doi.org/10.15294/active.v2i4.1140>
- Agustina, N. (2014). Survei Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Di Sekolah Luar Biasa Negeri Kendal Dan Sekolah Luar Biasa Abc Swadaya Di Kabupaten Kendal. *ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 3(11). <https://doi.org/10.15294/active.v3i11.4272>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American journal of theoretical and applied statistics*, 5(1), 1-4. doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11
- Jauhari, M. N. (2017). Pengembangan Sekolah Inklusif Dengan Menggunakan Instrumen Indeks For Inclusion. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 13(23), 18 - 27. <https://doi.org/10.36456/Bp.Vol13.No23.A445>

- Jauhari, M. N., Mambela, S., & Zakiah, Z. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Penjas Adaptif Di Sekolah Luar Biasa. *STAND: Journal Sports Teaching and Development*, 1(1), 63-70. <https://doi.org/10.36456/j-stand.v1i1.2594>
- Julianti, Y., Usnawa, Y. V., Febrianti, R., Pratama, G. S., Aqobah, J., & Pratama, T. Y. (2019). Penggunaan Tingkat Modifikasi Stior Untuk Meningkatkan Kemampuan Orientasi Mobilitas Pada Anak Dengan Hambatan Penglihatan. *UNIK (Jurnal Ilmiah Pendidikan Luar Biasa)*, 4(1). <http://dx.doi.org/10.30870/unik.v4i1.5582>
- Mujianto, G. E. (2015). Pengembangan Model Pembelajaran Penjas Adaptif Melalui Media Permainan Rainbow Flag Pada Siswa Tunarungu SMPLB Negeri Semarang. *Journal of Physical Education Health and Sport*, 2(1), 32-37. <https://doi.org/10.15294/jpehs.v2i1.3940>
- Nopiyanto, Y. E., & Raibowo, S. (2019). *Filsafat Pendidikan Jasmani & Olahraga*. Bengkulu: El Markazi.
- Nopiyanto, Y. E., & Ibrahim, I. (2021). Minat Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Filsafat Olahraga Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Education And Development*, 9(3), 177-181. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2773>
- Raibowo, S., & Nopiyanto, Y. E. (2020). Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan pada SMP Negeri Se-Kabupaten Mukomuko melalui Pendekatan Model Context, Input, Process & Product (CIPP). *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 6(2), 146-165.
- Salasa, J. A. (2021). *Analisis Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sllb Rajawali Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Salim, Z. (2021). *Kualitas Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Sari, N. P. (2016). Persiapan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif Siswa Sdllb Negeri 40 Kabupaten Solok. *JURNAL PENDIDIKAN ROKANIA*, 1(1), 20-26.
- Septianti, N., & Afiani, R. (2020). Pentingnya Memahami Karakteristik Siswa Sekolah Dasar Di SDN Cikokol 2. *AS-SABIQUN*, 2(1), 7-17. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v2i1.611>
- Pangesti, R., & Sudarsini, S. (2015). Pengembangan Media Video Senam Irama dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif Pada Siswa Tunagrahita. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa*, 2(1), 5-9. <http://dx.doi.org/10.17977/um029v2i12015p5-9>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, A. B. (2016). *Modifikasi Permainan Bola Tangan Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Pada Siswa Tuna Rungu Di Sllb Manunggal Slawi Kab Tegal Tahun 2015* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Trisanti, A., Madyan, S., & Wiyono, D. F. (2021). Pelaksanaan Pembelajaran Pai Bagi Abk Hambatan Pendengaran Di SmpIb Islam Yasindo Tumpang Malang. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(4), 10-17.
- Vai, A., & Lorenza, J. (2019). Implementasi Pembelajaran Penjas Adaptif Pada Anak-Anak Kebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusif. *Altius: Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan*, 8(1). <https://doi.org/10.36706/altius.v8i1.8243>
- Wagiran. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wati, O. K., & Nugraha, A. W. (2018). Pengembangan Model Pembelajaran Penjasorkes Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Sindrom Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Adhd) Di Sllb Sekota Bandar Lampung. *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 5(2), 212-222. <https://doi.org/10.24042/terampil.v5i2.3433>
- Yunisyah, P., & Sopandi, A. A. (2020). Penyelenggaraan Pembelajaran Penjas Adaptif Bagi Tunanetra di Rumah pada Masa Pandemi Covid-19 (SMK N 7 Padang). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(1), 30-35. <https://doi.org/10.31933/rj.v3i1.319>

## ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM SEKTOR BISNIS PROPERTI DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Hasan Al Farisi<sup>1)</sup>, Bambang Hermanto<sup>2)</sup>, Pratami Wulan Tresna<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

<sup>1</sup>email: hasan20002@mail.unpad.ac.id

<sup>2</sup>email: bhermanto@unpad.ac.id

<sup>3</sup>email: pratami@unpad.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pengusaha sukses di sektor bisnis properti serta dampak gaya kepemimpinannya dalam menghadapi pandemi Covid-19 bagi karyawan-karyawannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta data primer yaitu data yang diperoleh berasal dari narasumber utama yang diwawancarai untuk menjawab secara eksplisit permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis dan transaksional digunakan oleh narasumber sebagai cara untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan menjaga agar perusahaan tetap dalam kondisi baik walau lingkungan sedang tidak baik-baik saja. Kesimpulan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokrasi dapat dijadikan metode yang ideal dalam menyelesaikan persoalan yang tak terduga seperti Covid-19 sehingga seluruh elemen anggota perusahaan terlibat dalam pencarian solusi terbaik bersama-sama.

**Kata kunci:** bisnis properti, covid-19, gaya kepemimpinan

### 1. PENDAHULUAN

Pandangan tentang pentingnya sebuah pemimpin dalam kepemimpinan organisasi sudah digaungkan oleh penulis terkemuka yaitu (Maxwell, 2002) yang mempercayai bahwa kesuksesan seorang individu tanpa kemampuan untuk memimpin hanya akan menghasilkan efektifitas yang minimal. Lanjutnya apabila hendak menginginkan kesuksesan yang besar maka diperlukan lebih banyak kemampuan dalam kepemimpinan.

Akan tetapi seseorang yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang tinggi belum tentu menyebabkan tantangan dalam mencapai kesuksesan menjadi mudah, saat ini ketika makalah ini diterbitkan, masyarakat dunia sedang dilanda oleh virus mematikan yang mudah menular dari satu orang ke orang lain melalui droplet (air bersin atau cairan tubuh lainnya). Virus yang dinamakan Covid-19 menjadi virus yang menakutkan bagi umat manusia tak terkecuali para pemimpin yang sedang memimpin organisasi mereka. Ketakutan akan Covid-19 bukan tanpa alasan, dikarenakan penyakit Covid-19 dapat menyebabkan kematian dengan mudahnya dan dalam waktu yang singkat. Menurut data yang dihimpun dari kementerian kesehatan Indonesia tahun 2021 bahwa sudah terdapat 138.000 lebih pasien yang terinfeksi virus Covid-19 meninggal dunia dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Sedangkan jumlah yang lebih besar apabila dihitung dari kasus pasien meninggal di dunia mencapai 4,55 juta lebih dalam kurun waktu yang sama.

Penyakit yang mengancam umat manusia menjadi batu loncatan yang sangat jauh dalam merubah gaya kepemimpinan yang sebelum adanya pandemi Covid-19 dianggap gaya kepemimpinan yang ideal, namun ketika pandemi melanda bukan berarti kepemimpinan tersebut menjadi tidak ideal lagi dan perlu adanya kajian yang lebih mendalam untuk mencari gaya kepemimpinan ideal lainnya yang dapat diikuti dan ditiru oleh pengusaha lain di seluruh dunia untuk memperoleh kesuksesan.

Keinginan untuk sukses dalam menjalankan bisnis telah melahirkan sosok pemimpin hebat yang memiliki bisnis di bidang properti yang sudah mengeluti usahanya lebih dari 10 tahun. Narasumber menjadi pemimpin yang disegani dan dikagumi oleh karyawan-karyawannya, bukan karena hal tersebut Narasumber mampu menginspirasi namun tindakan kepemimpinannya yang secara tidak langsung telah membenarkan pernyataan Maxwell mengenai keefektifan kesuksesan dalam memimpin.

Makalah yang penulis sajikan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengidentifikasi gaya kepemimpinan narasumber dalam menjalankan bisnis properti sehingga mampu menghasilkan berbagai macam pencapaian sukses seperti membangun dua buah perumahan besar yaitu Firdaus Garden dan paku Haji Highland di kawasan Bandung barat, Jawa barat. Kemampuan dalam memimpin perusahaan yang dilakukan oleh bapak Narasumber menjadi menarik ketika beliau berhasil menstabilkan perusahaannya walau dalam kondisi pandemi Covid-19 yang dimana menjadi sebuah tantangan baru dewasa ini terlebih sejak makalah ini diterbitkan

Covid-19 rupanya masih menghantui dan mengintai para pengusaha dalam mengembangkan dan menstabilkan bisnis mereka. Makalah ini bukan hanya mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang digunakan oleh narasumber, namun juga akan menjawab pertanyaan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dalam mendorong motivasi karyawan di masa pandemi Covid-19.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif serta data primer, hal ini dimaksudkan karena data yang diperoleh dari hasil observasi langsung dengan objek yang penulis teliti serta memperoleh data dari wawancara dengan pihak terkait, yaitu seorang pengusaha yang bergerak di sektor bisnis properti yang dimana pengusaha tersebut dapat mengelola bisnisnya dengan gaya kepemimpinan tertentu bahkan di masa pandemi Covid-19. Temuan yang akan ditemukan akan menjadi perhatian dalam tujuan untuk mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang nampak. Sesuai dengan judul yang di usung oleh penulis mengenai analisis gaya kepemimpinan maka dalam penelitian ini penggambaran gaya kepemimpinan yang ideal menurut narasumber akan sangat berguna.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keilmuan yang mengangkat studi kepemimpinan adalah kajian ilmu yang sudah lama ada dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Kepemimpinan tidak mungkin terlepas dari sosok pemimpin dan orang yang dipimpinya sehingga memunculkan sifat kepemimpinan. Menurut (Marquardt et al., 2021; Smircich & Morgan, 1982) kepemimpinan adalah suatu konsep dari parameter dan struktur teori yang di praktikan di dalam organisasi serta karenanya dapat menggambarkan dan memahami sebuah aksi dari sifat alamiah organisasi dan kemungkinan-kemungkinannya. Sedangkan menurut (Cairns et al., 1998; Wright, 2017) menyoroti tentang pengertian dari seorang pemimpin, menyebutkan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi seseorang, sekelompok atau sekelompok orang dalam upaya untuk mendorong mereka melakukan sesuatu secara maksimal berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kedua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli sejatinya sejalan dengan pendapat (Hutahaean & SE, 2021) yang menyatakan bahwa pemimpin adalah mereka yang memimpin seseorang ataupun sekelompok di dalam organisasi atau bahkan didalam keluarga. Sedangkan kepemimpinan memiliki arti sebagai kemampuan seseorang dalam mempengaruhi pola pikir, tingkah laku dan perasaan individu lain guna melakukan atau bergerak untuk bersama mencapai keberhasilan organisasi.

Kepemimpinan memiliki dampak multiple bagi keefektifan dalam mengapai kesuksesan. (Maxwell, 2002) menyatakan bahwa hal ini sangat wajar karena memimpin sekelompok orang atau organisasi yang memiliki perbedaan di dalamnya akan disatukan oleh kemampuan kepemimpinan seseorang untuk dapat mengumpulkan perbedaan tersebut dan membuatnya bekerja secara bersama-sama demi mengapai tujuan organisasi.

Didalam suatu kelompok, organisasi atau perusahaan sudah dapat dipastikan ada seseorang yang dinjuk, dipilih, atau mendeklarasikan diri sebagai seorang pemimpin. Pemimpin dalam melakukan kepemimpinannya akan menimbulkan gaya kepemimpinan. Menurut (Trang, 2013) menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara yang dilakukan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain agar dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kelompok, organisasi atau perusahaan. Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh (Hutahaean & SE, 2021) bahwa definisi gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian yang khas dan unik dari seorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan orang lain, sehingga mewarnai perilaku dan cara ia memimpin. Sedangkan menurut (Goleman, 2017) menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah memberikan dampak kepada organisasi, departemen dan kelompok dalam menciptakan iklim dan suasana kerja yang kondusif, optimal dan menghasilkan tujuan sempurna dengan tidak bergantung kepada satu gaya kepemimpinan saja.

Secara teori terdapat enam jenis gaya kepemimpinan yang disampaikan oleh (Hutahaean & SE, 2021) yaitu, pertama kepemimpinan demokratis yaitu kepemimpinan yang mawadahi semua kepentingan orang yang dipimpin, kedua kepemimpinan kharismatik yaitu kepemimpinan yang disegani karena ketokohnya, ketiga kepemimpinan otoriter yaitu pemimpin yang mengingkikan semua keinginannya dipenuhi tanpa memahami kepentingan anggotanya, keempat kepemimpinan militer yaitu pemimpin yang dapat memerintah bawahannya berdasarkan atas komando, kelima kepemimpinan paternalistis yaitu pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memberikan teladan dan contoh bagi anggotanya dan terakhir kepemimpinan birokratis yaitu kepemimpinan yang terbentuk karena hirarki kepangkatan dan jabatan dalam organisasi.

Penulis buku terkemuka (Maxwell, 2002) mengatakan bahwa seorang pemimpin harus dapat memberikan pengaruh dan mempengaruhi anggota-anggotanya. Hal ini dinyatakan sebagai keefektifan dalam memimpin. Gaya kepemimpinan akan melibatkan orientasi sifat individu dalam berkomunikasi secara positif untuk memperoleh kepuasan dan peningkatan performa (Manoppo et al., 2021; Wilkinson & Wagner, 1993).

Selain dari apa yang telah disebutkan diatas, terdapat berbagai macam gaya kepemimpinan yang telah banyak diadopsi oleh manajer untuk meningkatkan performa perusahaan mereka. Namun begitu peneliti yang meneliti persoalan kepemimpinan lebih terfokus kepada gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional karena mereka berpendapat bahwa kedua gaya kepemimpinan tersebut lebih banyak di terapkan di dalam organisasi tanpa mempedulikan tipe organisasinya, gaya kepemimpinan cenderung dipilih karena kemampuan personal seorang pemimpin dan berdasar pada pengalaman (Paracha et al., 2012). Walaupun gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional cenderung lebih terkenal, akan tetapi masih terdapat gaya kepemimpinan demokratis yang juga menerima perhatian besar bagi peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Al Khajeh, 2018) yang berpendapat bahwa gaya kepemimpinan demokratis menyiapkan pemimpin masa depan dan keuntungan terhadap organisasi jangka panjang. Gaya kepemimpinan demokratis memiliki dampak positif terhadap performa organisasi sebagai penyedia kesempatan bagi karyawan untuk menekspresikan dan mengimplementasikan ide kreatifitas mereka dan berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan (Bhargavi & Yaseen, 2016). Seperti halnya konstruksi kepemimpinan pada umumnya, gaya kepemimpinan demokratis juga tidak memiliki presisi konseptual. Konsep kepemimpinan demokratis bertujuan untuk pengambilan keputusan harus dibagi dari seorang pemimpin ke anggota dimana kritikan dan pujian secara objektif diberikan dan perusahaan bertanggung jawab dalam pengembangan di dalam organisasi (Igbaekemen & Odivwri, 2015). Bagaimanapun kepemimpinan demokratis adalah hal yang dikenal untuk memotivasi karyawan untuk memiliki performa lebih baik sebagai pandangan mereka dan pendapat mereka yang bernilai (Al Khajeh, 2018). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hilton et al., 2021) menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja organisasi. Temuan juga mengungkapkan bahwa penghargaan kontingen dapat secara signifikan meningkatkan dan moderat kepemimpinan demokratis memiliki dampak yang lebih kuat pada kinerja organisasi.

Gaya kepemimpinan transaksional memiliki fokus kepada pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya, seperti yang contohkan oleh (Northouse, 2021) bahwa politisi yang menang di ajang pemilu dengan menjanjikan tidak ada pajak sama halnya dengan pemimpin yang menjanjikan kenaikan pangkat apabila karyawan melebihi target mereka. Studi menunjukkan bahwa fokus dari kepemimpinan transaksional terdapat pada penghargaan yang telah dibuat dari teori kepemimpinan transaksional unik dalam gaya kepemimpinan yang secara efektif memotivasi

karyawan untuk meningkatkan performa dan pendapatan organisasi (McCleskey, 2014).

Oleh karena para ahli menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan ataupun sifat kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat dalam upaya peningkatan nilai-nilai positif bagi perusahaan seperti menghasilkan profit lebih banyak, peningkatan performa perusahaan dan ketercapaian tujuan perusahaan. Perlunya disertai dengan kemampuan untuk mempengaruhi anggota agar mau bekerja bersama juga menjadi hal penting yang harus diupayakan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Bertoldi, 2021; Chen & Silverthorne, 2005) menunjukkan bahwa kemampuan kepemimpinan yang tinggi dari seorang pemimpin dapat mempengaruhi minat, kemauan karyawan serta meringankan tingkat stress dan menimbulkan sedikit niat untuk meninggalkan organisasi. Akan tetapi walaupun begitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan tidak dipengaruhi oleh tingkat kepemimpinan seorang pemimpin.

Kesibukan yang dialami oleh narasumber dalam mengembangkan bisnis propertinya tidak terlepas dari kesuksesannya memimpin bawahan-bawahannya dalam bersama-sama merangkul mereka untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Dilampir dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Narasumber adalah seorang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kepemimpinan dengan konsep partisipasi. Menurut (Hutahaean & SE, 2021) konsep kepemimpinan partisipasi adalah kepemimpinan yang mementingkan konsultasi dari semua pihak yang terlibat tidak terkecuali bawahannya untuk bersama mencari berbagai macam pendapat dan pemikiran untuk keputusan yang akan diambil. Narasumber adalah sosok pemimpin yang menghargai dan menilai pemikiran-pemikiran bawahannya sebagai bentuk kontribusi dan sumbangan untuk kemajuan perusahaan. Kemudian gaya kepemimpinan yang ditunjukkan dari konsep partisipasi adalah demokratis. Daniel Goleman dalam bukunya "Primal Leadership" menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada ide yang dihasilkan dari proses diskusi dari semua anggota perusahaan/organisasi. Oleh karena itu pemimpin yang menggunakan cara ini akan sedikit sulit untuk menentukan sebuah keputusan dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan karena semua masukan dan pemikiran dari anggotanya dijadikan bahan pertimbangan (Goleman et al., 2002; Graham, 2021).

Narasumber memiliki pandangan unik mengenai seorang pemimpin yaitu seseorang yang harus mampu membaca pikiran bawahannya. Pernyataan Narasumber dikuatkan oleh pendapat yang disampaikan oleh (House, 1996; Yi et al., 2021) yang menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang dapat menjangkau kebutuhan dari anggota tim, sehingga pemimpin harus mengetahui

apa yang menjadi motivasi mereka untuk bekerja. Menurut (Evans, 1970; Sharma et al., 2021) setidaknya ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui motivasi pekerja dalam melakukan pekerjaannya, yaitu: 1) Membantu dan mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan mereka. 2) Mengeliminasi hambatan sehingga dapat meningkatkan performa. 3) Memberikan imbalan dan penghargaan yang sesuai dan layak berdasarkan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pemahaman yang disampaikan oleh para ahli menjadi terbukti tatkala ketika Narasumber dapat memberikan dorongan yang maksimal kepada bawahannya untuk bersama-sama meraih visi dan misi perusahaan diiringi dengan kemampuan perusahaan untuk meraih keinginan terbesar bawahannya. Hal inilah yang dinamakan *win win solution* versi Narasumber. Karena keuntungan yang diperoleh perusahaan pada prinsipnya menjadi keuntungan bawahannya juga.

Dalam memimpin sebuah perusahaan, narasumber sejatinya menjadi sosok pemimpin yang memberikan pengaruh yang kuat pada bawahannya dan perusahaannya. Buktinya beliau pernah mengalami masa dimana tidak memiliki seseorang untuk dipimpin melainkan temannya sendiri untuk bersama membangun bisnis. Namun dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki dan pengimplementasian yang maksimal, akhirnya karyawan Narasumber terus bertambah hingga mencapai puluhan bahkan ratusan. Akan tetapi jumlah karyawan yang terbilang banyak memberikan tantangan tersendiri salah satunya adalah permasalahan motivasi yaitu permasalahan yang terjadi akibat adanya karyawan yang tidak lagi termotivasi dan berminat untuk bersama-sama meraih visi dan misi perusahaan. Menyebabkan bermunculanlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Bagi narasumber, kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sejadinya tidak dijadikan sebuah hambatan yang besar karena Narasumber meyakini bahwa manusia adalah sosok yang dapat melakukan kesalahan dan dapat berubah menjadi lebih baik. Narasumber lebih memilih gaya kepemimpinan Pragmatis sebagai sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan karyawannya. Kepemimpinan Pragmatis adalah kepemimpinan yang mengedepankan kesadaran akan hal-hal praktis yang dapat merancang dan memilih solusi untuk memotivasi orang lain dengan mengangkat keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka sendiri dan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama (Anderson & Sun, 2017). Narasumber berharap dengan gaya kepemimpinan pragmatisnya dapat memberikan kesadaran pada bawahan untuk tidak mengulangi kesalahan dan menyadari bahwa kesalahan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri.

Didalam kepemimpinan Narasumber, cara memotivasi bawahannya dipengaruhi oleh sikapnya memberi tantangan atas apa yang dibutuhkan oleh bawahannya. Narasumber memberikan contoh

jikalau bawahannya menginginkan sesuatu maka bawahannya tersebut harus melakukan sesuatu lebih bagi perusahaan dan menentukan hukumannya sendiri apabila sesuatu yang lebih tersebut tidak dapat terpenuhi. Sebagai imbalan dari pencapaian bawahannya maka perusahaan akan memberikan atau membantu keinginan bawahannya tersebut terwujud. Gaya kepemimpinan untuk memotivasi karyawan ini dinamakan kepemimpinan transaksional, yaitu fokus kepada keinginan individual untuk mencapai tujuannya sendiri sehingga individu tersebut harus memberikan sesuatu kepada organisasi untuk nantinya diganti dengan keinginan pribadi yang harus diberikan oleh organisasi kepadanya (Spahr, 2014; Waddell & Pio, 2015). Akan tetapi Narasumber memberikan peringatan bahwa jika seorang pemimpin tidak dapat memenuhi janjinya akan kepemimpinan transaksional ini kepada bawahannya maka akan menjadi buruk bagi reputasi pemimpin dan kepercayaan bawahan kepadanya.

Pandemi Covid-19 yang sampai makalah ini diterbitkan masih menghantui pengusaha karena mengancam bisnis mereka, sejatinya menjadi ketakutan yang sama yang dialami oleh narasumber. Karena dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 sedikit banyaknya mempengaruhi roda bisnis yang sedang dijalani oleh beliau. Namun begitu, pada prinsipnya gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh narasumber tidak berubah dari sebelum dan sesaat terjadinya pandemi Covid-19, hanya saja kuantitas dari gaya kepemimpinan demokratis semakin ditingkatkan. Hal ini dilakukan karena narasumber meyakini bahwa seorang pemimpin bukan soal kepintaran dalam memberikan solusi, namun tetapi kecerdasan dalam menampung dan mengambil keputusan terbaik dari hasil diskusi yang dilakukan bersama oleh setiap anggota tim. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar keberhasilan narasumber dalam melewati pandemi Covid-19, yaitu melibatkan bawahannya lebih banyak dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan sehingga para bawahan akan merasa butuh untuk tetap mempertahankan perusahaan karena mereka merasa diikutsertakan dalam keutuhan dan keberlangsungan perusahaan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan sebuah pengetahuan yang jelas bahwa gaya kepemimpinan dapat berubah-ubah dalam situasi dan kondisi tertentu namun tidak mempengaruhi inti dari sifat utama kepemimpinan tersebut. Dalam kasus penelitian yang dilakukan Narasumber, beliau cenderung memiliki gaya kepemimpinan demokratis terhadap bawahan yang dipimpinnya di dalam perusahaan, namun ketika ada sesuatu hal yang terjadi seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan atau adanya penurunan motivasi kerja yang dialami oleh bawahan maka Narasumber lebih cenderung menggunakan gaya

kepemimpinan transaksional untuk mencari solusi dan memberikan dampak *win win solution* bagi dirinya dan terkhusus para bawahannya.

Gaya kepemimpinan yang telah melekat pada diri Narasumber sejatinya tidak berubah seiring dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi, malah kuantitas dari gaya kepemimpinannya lebih di tingkatkan sehingga permasalahan dapat dipecahkan bersama-sama. Itulah yang menjadi dasar dari keberhasilan narasumber dalam memimpin perusahaan melewati pandemi Covid-19.

Peneliti menyadari bahwa di dalam makalah ini masih terdapat kekurangan dalam pengumpulan data yang menjadi sumber informasi, karena dampak dari pandemi Covid-19 sejatinya dirasakan oleh hampir seluruh pengusaha dengan sektor bisnis yang berbeda-beda sehingga peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar mencari lebih banyak sumber data untuk diteliti lebih lanjut sehingga dapat mengambarkan secara menyeluruh mengenai dampak pandemi Covid-19 pada pengusaha-pengusaha di berbagai sektor bisnis yang berbeda serta bagaimana para pengusaha tersebut melewati pandemi dengan gaya kepemimpinan yang mungkin lebih efektif dari pada penelitian ini.

## 5. REFERENSI

- Al Khajeh, E. H. (2018). Impact of leadership styles on organizational performance. *Journal of Human Resources Management Research*, 2018, 1–10.
- Anderson, M. H., & Sun, P. Y. T. (2017). Reviewing leadership styles: Overlaps and the need for a new ‘full-range’ theory. *International Journal of Management Reviews*, 19(1), 76–96.
- Bertoldi, B. (2021). The Leadership Style to Lead the Evolution of the Entrepreneurial Essence: A Proposal. In *Entrepreneurial Essence in Family Businesses* (pp. 115–154). Springer.
- Bhargavi, S., & Yaseen, A. (2016). Leadership styles and organizational performance. *Strategic Management Quarterly*, 4(1), 87–117.
- Cairns, T. D., Hollenback, J., Preziosi, R. C., & Snow, W. A. (1998). A study of Hersey and Blanchard’s situational leadership theory. *Leadership & Organization Development Journal*.
- Chen, J., & Silverthorne, C. (2005). Leadership effectiveness, leadership style and employee readiness. *Leadership & Organization Development Journal*.
- Evans, M. G. (1970). The effects of supervisory behavior on the path-goal relationship. *Organizational Behavior and Human Performance*, 5(3), 277–298.
- Goleman, D. (2017). *Leadership that gets results (Harvard business review classics)*. Harvard Business Press.
- Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2002). Primal leadership: Realizing the power of emotional leadership. *Boston, MA: Harvard Business School*.
- Graham, K.-L. (2021). *Leadership toward positive workplace culture in Aotearoa New Zealand: clinical nurse manager perspectives*. Open Access Victoria University of Wellington| Te Herenga Waka.
- Hilton, S. K., Arkorful, H., & Martins, A. (2021). Democratic leadership and organizational performance: the moderating effect of contingent reward. *Management Research Review*.
- House, R. J. (1996). Path-goal theory of leadership: Lessons, legacy, and a reformulated theory. *The Leadership Quarterly*, 7(3), 323–352.
- Hutahaean, W. S., & SE, M. T. (2021). *FILSAFAT DAN TEORI KEPEMIMPINAN*. Ahlimedia Book.
- Igbaekemen, G. O., & Odivwri, J. E. (2015). Impact of leadership style on organization performance: A critical literature review. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 5(5), 1–7.
- Manoppo, V. P., Astuti, E. S., Raharjo, K., & Kusumawati, A. (2021). Transformational Leadership dan Job Satisfaction Variabel A As Factor That Decrease Organizational Citizenship Behavior of Nurses in Private Hospitals in Manado City. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 24(4).
- Marquardt, D. J., Casper, W. J., & Kuenzi, M. (2021). Leader goal orientation and ethical leadership: a socio-cognitive approach of the impact of leader goal-oriented behavior on employee unethical behavior. *Journal of Business Ethics*, 172(3), 545–561.
- Maxwell, J. C. (2002). *Leadership 101: What every leader needs to know*. HarperCollins Leadership.
- McCleskey, J. A. (2014). Situational, transformational, and transactional leadership and leadership development. *Journal of Business Studies Quarterly*, 5(4), 117.
- Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and practice*. Sage publications.
- Paracha, M. U., Qamar, A., Mirza, A., Hassan, I., & Waqas, H. (2012). Impact of leadership style (transformational & transactional leadership) on employee performance & mediating role of job satisfaction. Study of private school (educator) in Pakistan. *Global Journal of Management and Business Research*, 12(4), 55–64.
- Sharma, D., Patel, S. S., & Pandey, S. K. (2021). Exploring the influence of channel leadership style on channel commitment in a franchising context. *Journal of Business & Industrial Marketing*.
- Smircich, L., & Morgan, G. (1982). Leadership: The management of meaning. *The Journal of*

- Applied Behavioral Science*, 18(3), 257–273.
- Spahr, P. (2014). What is transactional leadership? How structure leads to results. *Leadership Is Learned*.
- Trang, D. S. (2013). Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Waddell, A., & Pio, E. (2015). The influence of senior leaders on organisational learning: Insights from the employees' perspective. *Management Learning*, 46(4), 461–478.
- Wilkinson, A. D., & Wagner, R. M. (1993). Supervisory Leadership Styles and State Vocational Rehabilitation Counselor Job Satisfaction and Productivity. *Rehabilitation Counseling Bulletin*, 37(1), 15–24.
- Wright, E. S. (2017). Dialogic development in the situational leadership style. *Performance Improvement*, 56(9), 27–31.
- Yi, Y., Chen, Y., & He, X. (2021). CEO Leadership, Strategic Decision Comprehensiveness, and Firm Performance: The Moderating Role of TMT Cognitive Conflict. *Management and Organization Review*, 1–36.

## ANALISIS TINGKAT LITERASI EKONOMI MAHASISWA IPS UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

Oleh :

**Hendra Rustantono**

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Raden Rahmat Malang  
email: hendrarus09@yahoo.com

### Abstrak

Membuat keputusan ekonomi dan keuangan yang baik merupakan pilihan yang tepat serta perlu adanya pemahaman bagaimana cara yang tepat dan cerdas serta berfikir yang tepat dalam mengambil keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat literasi melek ekonomi mahasiswa IPS tahun ajaran 2018-2021 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Populasi serta sampel dalam penelitian ini sebanyak 58 mahasiswa IPS angkatan 2018-2021. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan teknik pengumpulan data berbasis pertanyaan yang dibagikan ke mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat melek ekonomi mahasiswa IPS tahun ajaran 2018-2021 dalam kategori sedang, yaitu sebesar 60-80% (>60%). Jika dilihat dari jumlah siswa yang menjawab benar diperoleh hasil 39% dari total mahasiswa IPS angkatan 2018-2021 sebanyak 58 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan IPS angkatan 2018-2021 Universitas Islam Raden Rahmat Malang dapat membuat keputusan ekonomi dan keuangan yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari serta menjadi konsumen yang cerdas dan berbuat dengan cara berfikir tepat.

**Kata Kunci:** literasi ekonomi, mahasiswa IPS

### 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah entitas biologis disamping makhluk sosial. Tujuan akhir dari seorang manusia adalah untuk bertahan hidup dan melanjutkan eksistensinya. Untuk bertahan hidup, beberapa kebutuhan dasar seperti makan, air, pakaian, rumah dan perlindungan harus dipenuhi. Manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui keputusan dan tindakan sehari-hari. Upaya manusia inilah yang mendasari asal mula ekonomi (Angnello & Lucel, 2008:254). Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sejak dahulu kala telah melakukan berbagai kegiatan yang bersifat ekonomis seperti memproduksi, memperdagangkan serta melindungi barang-barang yang ada ditangannya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Itulah sebabnya mengapa orang harus mengatasi kekurangan sepanjang waktu sejak mereka mulai hidup secara sosial dan karena itu ekonomi selalu menjadi pusat perhatian dari masyarakat yang paling primitive hingga yang paling modern (Altinok, 2000: 3; Savaş, 1998: 17)

Pemahaman tentang ekonomi serta terminologi yang digunakan sangat penting saat ini karena perkembangan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita sering melihat di media elektronik dan media sosial tentang berita yang disebarkan mengenai tingkat inflasi, pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi dan istilah-istilah ekonomi lainnya yang digunakan untuk menunjukkan kinerja ekonomi suatu Negara. Namun dari berita tersebut apakah kita benar-benar mengerti apa yang mereka coba sampaikan? dan apakah kita mampu

mencerminkan situasi ekonomi sekarang di Indonesia dan di dunia?

Studi tentang ekonomi telah meningkat jumlahnya karena orang-orang mulai memahami perlunya pendidikan ekonomi untuk kewarganegaraan yang efektif dan karena minat terhadap pendidikan ini telah tumbuh dengan meningkatnya pengetahuan ekonomi. Pentingnya pendidikan ekonomi telah didukung oleh kajian akademis dan media populer (Akhan, 2015). Tujuan dari literasi ekonomi adalah untuk meningkatkan minat dan pengetahuan generasi muda tentang masalah ekonomi dan membiasakan bekerja sama, menciptakan profesi yang akan berkontribusi pada masyarakat. Individu yang paham ekonomi akan mengetahui tanggung jawabnya terhadap masyarakat (Nakiboglu, 2017).

Seringkali literasi keuangan disamakan dengan literasi ekonomi, namun literasi keuangan setara dengan literasi ekonomi. Literasi keuangan adalah semua tentang uang, yaitu apa dan bagaimana berinvestasi, menyimpan, serta mengelola uang. Literasi keuangan secara khusus berfokus pada pemahaman hutang, komponen literasi uang yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan sederhana terkait erat dengan kontrak hutang, terutama dalam menerapkan pengetahuan dasar manfaat terkompresi yang diukur dalam konteks opsi keuangan harian (Lusardi & Tufano, 2008). Literasi ekonomi adalah kemampuan untuk menerapkan fundamental ekonomi dalam skenario kehidupan sehari-hari (Salemi, 2005).

Melek ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk membantu orang memahami prinsip-prinsip

ekonomi yang mendasari dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan masalah dan hubungan mendasar yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari ekonomi, bukan informasi ilmiah ekonomi (Rivlin, 1999). Melek ekonomisangat penting di negara mana pun, dan mungkin berdampak signifikan pada sistem keuangan global, yang selalu berubah. Negara-negara kurang berkembang menghadapi banyak kesulitan dalam meningkatkan kinerja ekonomi dan standar hidup. Mahasiswa membutuhkan pemahaman ekonomi yang lebih dalam agar dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian global yang selalu berubah (Walstad & Allgood, 1999). Di era kemajuan teknologi saat ini literasi ekonomi seharusnya membekali siswa dengan pengetahuan ekonomi, keterampilan dan sikap yang memadai untuk sampai pada kesimpulan yang sesuai pada waktu yang sesuai untuk jangka panjangserta lebih memahami negara kita dan dunia dalam peran kita sebagai warga negara dan produsen, konsumen, karyawan, dan investor yang bertanggung jawab, pekerja keras dan jujur (Akhan, 2010).

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ada pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi dalam konteks kehidupan pribadi dan sosial sebagai warga negara. Penting juga bagi siswa untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi secara jelas dan ringkas untuk membuat keputusan yang tepat dalam ekonomi global yang berubah. Berkat pengetahuan ekonomi dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, mahasiswa yang terampil dalam literasi ekonomi akan siap untuk berperan aktif dan akan lebih produktif di masyarakat di abad ke 21 (LSSCS, 1997: 60). Menurut Jappelli (2009) melek ekonomi menjadi semakin penting dalam pengambilan keputusan keluarga tentang berapa banyak yang harus diinvestasikan di pasar keuangan dan berapa banyak yang harus dipinjam. Peristiwa ekonomi dan masalah ekonomi menjadi perhatian yang paling utama di seluruh dunia.

Ekonomi menghadapi krisis hutang serta resesi dalam pertumbuhan ekonomi. Konsumen menghadapi kenaikan harga pangan, fluktuasi harga minyak, masalah pengangguran dan upah rendah. Namun terlepas dari perhatian yang diberikan pada ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, para ekonomi menemukan bahwa masyarakat masih belum terbiasa dengan konsep ekonomi dan dasar ekonomi (Fourie & Krugell, 2015). Topik-topik literasi ekonomi ini menjadi sarana yang memungkinkan orang untuk memahami ekonomi dan menunjukkan kepada mereka bagaimana menafsirkan situasi yang mungkin mempengaruhi mereka secara langsung atau tidak langsung. Mereka membantu individu memperoleh kompetensi dalam membuat keputusan sosial dan memahami mata pelajaran ekonomi yang dapat digunakan secara pribadi dan sepanjang hidup. Mahasiswa juga perlu mengetahui serta memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi sebelum mereka memberikan pendapat mereka

tentang masalah-masalah ekonomi yang mungkin mempengaruhi kehidupan mereka.

Fenomena di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa kurikulum ekonomi di sekolah tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini berlaku untuk dampak dan perilaku perekonomian itu sendiri. Selain itu, konsep-konsep ekonomi yang dipelajari di kampus belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada pengaruhnya. Mereka tidak bisa berpikir benar tentang hal-hal seperti kebutuhan dan keinginan dasar. Sebagai masyarakat dengan sistem ekonomi yang berkembang, masalah kehidupan dan masalah mendidik generasi muda semakin menantang (Che Noraini & Bakare Kazeem, 2013). Tidak dipungkiri lagi bahwa perolehan pengetahuan serta keterampilan sangat penting untuk memungkinkan mahasiswa membuat keputusan serta bertindak dengan bijak dalam kaitannya dengan masalah ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran tingkat melek ekonomi mahasiswa IPS tahun ajaran 2018-2021 Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

## 2. METODE

Teknik yang dipakai pada penelitian ini ialah metode survey. Selain itu hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif sehingga dapat memberikan informasi yang tepat tentang latar belakang keuangan mahasiswa IPS. Populasi dan sampel penelitian ini adalah mahasiswa dari program Pendidikan IPS Universitas Islam Raden Rahmat Malang tahun ajaran 2018-2021 sebanyak 58 mahasiswa serta sudah menempuh mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Adapun dalam penentuan besarnya sampel oleh peneliti yaitu dengan metode *sampling total Sensus/Sampling total* merupakan metode atau cara mengambil sampel, yang mana anggota sampel merupakan anggota populasi (Sugiyono, 2018: 140). Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (2010: 112), jika anggota sampel tidak mencapai 100 orang alangkah baiknya untuk menyertakan semua, tetapi jika anggota sampel lebih dari 100, sebaiknya hanya menyertakan 10-15% , 20-25% atau bahkan lebih.

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data tersebut adalah tes berbentuk pilihan ganda yang berisi soal-soal yang telah diadopsi dari uji literasi ekonomi berdasarkan pada standart *The Standards in Economic Survey* yang dikembangkan oleh NCEE (*The National Council for Economic Education*) dan yang sudah disesuaikan dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi yang diterima oleh mahasiswa IPS Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Indikator tes terdapat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Indikator Tes Literasi Ekonomi Mahasiswa**

No	Indikator	Soal
1	Perubahan permintaan barang	1
2	Peran wirausaha	2
3	Tingkat harga terhadap kecenderungan menabung	3
4	Pendapatan individu	4
5	Pendapatan nasional	5
6	Perubahan penawaran dan permintaan	6
7	Dampak kebijakan perdagangan internasional	7
8	Dampak kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga	8
9	Peran pelaku ekonomi, produsen, konsumen dalam pemerintahan dan perekonomian Indonesia	9
10	Manfaat perdagangan internasional	10
11	Dampak perubahan harga barang terhadap permintaan dan penawaran	11
12	Penggunaan sumber daya yang terbatas	12
13	Peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia	13
14	Cost dan benefit transaksi ekonomi	14
15	Cost dan benefit pengambilan keputusan	15
16	Peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia	16
17	Anggaran perencanaan belanja Negara	17
18	Inflasi	18
19	Pengembangan industri	19
20	Bunga uang	20

Sumber: The National Council for Economic Education, 2003

Berdasarkan penjelasan dari indikator diatas, terdapat 20 soal untuk tes tingkat literasi ekonomi mahasiswa dan untuk setiap jawaban yang benar akan diberi penskoran sebesar 1 (satu) dan untuk yang menjawab salah atau tidak benar akan diberi penskoran sebesar 0 (nol). Untuk penghitungan jawaban peneliti menggunakan rumus yang diadopsi menurut (Chen & Ronald P. Volpe, 1998), yaitu setiap jawaban yang tepat dihitung kemudian dibagi 20 soal lalu dikalikan 100%. Hasil yang didapat kemudian dibandingkan dengan kriteria tingkat melek ekonomi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Kriteria Tingkat Literasi Ekonomi**

No	Jumlah Skor Benar	Kategori Tingkat Literasi Ekonomi
1	>80%	Tinggi
2	60%-80%	Sedang
3	<60%	Rendah

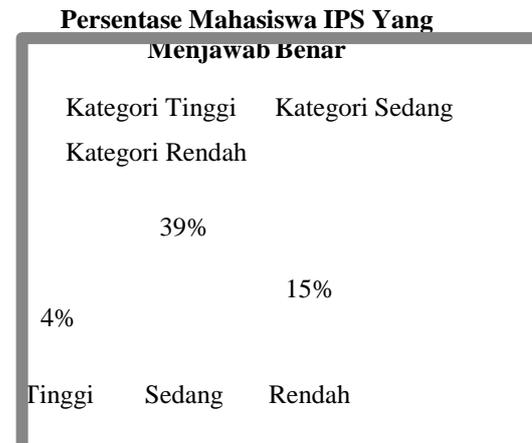
Sumber: Chen & Ronald P. Volpe, 1998

Berdasarkan pada Tabel 2 diatas terdapat 3 kriteria untuk menilai tingkat literasi ekonomi mahasiswa, yaitu yang pertama memiliki rentang nilai >80% dengan kategori tinggi jika mahasiswa menjawab 16 pertanyaan benar. Untuk kategori kedua memiliki rentang nilai 60-80% dengan kategori sedang jika mahasiswa menjawab 12-15 pertanyaan benar. Sedangkan untuk kategori yang ketiga memiliki rentang nilai <60% dengan kategori rendah jika mahasiswa menjawab 11 pertanyaan benar.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang memiliki kategori tinggi sebesar 4% yang memiliki rentang nilai >80% dari total 58 mahasiswa IPS angkatan 2018-2021. Kemudian yang masuk kategori sedang sebesar 39% yang memiliki rentang nilai sebesar 60%-80% dari total 58 mahasiswa IPS angkatan 2018-2021. Sedangkan yang memiliki kategori rendah sebesar 15% yang memiliki rentang nilai <60% dari total 58 mahasiswa IPS angkatan 2018-2021. Jumlah

Presentase Mahasiswa IPS angkatan 2018-2021 yang menjawab dengan benar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Jumlah Presentase Mahasiswa IPS Yang Menjawab Benar**

Berdasarkan pada gambar 1 diatas hasil penelitian didapat nilai rata-rata dari 58 mahasiswa yang menjawab benar sebesar 39% yang berarti bahwa tingkat literasi ekonomi mahasiswa IPS angkatan 2018-2021 Universitas Islam Raden Rahmat Malang berada pada kategori sedang yang memiliki rentang nilai sebesar 60%-80% berdasarkan dari setiap butir pertanyaan yang dijawab dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan IPS angkatan 2018-2021 dapat membuat keputusan keuangan dan ekonomi yang baik dalam kehidupan kesehariannya serta menjadi konsumen yang cerdas dan berbuat dengan cara berfikir tepat. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Mathews (Sina, 2012:137) diyakini melek ekonomi merupakan keahlian orang agar mengenali serta menggunakan prinsip ekonomi dan pemikiran ekonomi untuk meningkatkan dan mencapai kemakmuran. Serta pendapat yang dikemukakan oleh Wulandari (Sina, 2012:137) melek ekonomi diyakini sebagai keahlian hidup yang seharusnya dimiliki setiap orang agar dapat membuat keputusan ekonomi yang sesuai. Persentase mahasiswa yang menjawab dengan benar disetiap butirnya termasuk rata-rata jawaban benar untuk setiap pertanyaan mengenai melek ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Persentase Jawaban Mahasiswa IPS**

No	Indikator	Tingkat Literasi Ekonomi		
		Tinggi >80%	Sedang 60-80%	Rendah <60%
1	Perubahan permintaan barang (Elastisitas Permintaan)	81%	-	-
2	Peran wirausaha	-	63,8%	-
3	Tingkat harga terhadap kecenderungan menabung	-	62,1%	-
4	Pendapatan individu	-	62,1%	-
5	Pendapatan nasional	82,8%	-	-
6	Perubahan penawaran dan permintaan	-	69%	-
7	Dampak kebijakan perdagangan	82,8%	-	-

8	internasional Dampak kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga	-	62,1%	-
9	Peran pelaku ekonomi, produsen, konsumen dalam pemerintahan dan perekonomian Indonesia	-	69%	-
10	Manfaat perdagangan internasional	-	-	51,7%
11	Dampak perubahan harga barang terhadap permintaan dan penawaran	-	63,8%	-
12	Penggunaan sumber daya yang terbatas	-	-	51,7%
13	Peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia	-	69%	-
14	Cost dan benefit transaksi ekonomi	81%	-	-
15	Cost dan benefit pengambilan keputusan	-	-	43,1%
16	Peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia	-	-	48,3%
17	Anggaran perencanaan belanja Negara	-	72,4%	-
18	Inflasi	-	-	48,3%
19	Pengembangan industri	-	-	51,7%
20	Bunga uang	-	-	44,8%

Sumber: Hasil Olah Data Mahasiswa IPS Tahun Ajaran 2018-2021

Berdasarkan pada Tabel 3 diatas dapat dilihat tingkat melek ekonomi mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2018-2021 yang memiliki jawaban dengan kategori tinggi yaitu >80% terletak pada pertanyaan dengan indikator perubahan permintaan barang dan indikator pertanyaan cost dan benefit dari transaksi ekonomi yang memiliki nilai sebesar 81%. Sedangkan untuk indikator pertanyaan pendapatan nasional dan dampak kebijakan perdagangan internasional memiliki nilai 82,8%. Untuk kategori sedang yaitu 60-80% terletak pada pertanyaan dengan indikator Tingkat harga hingga kecenderungan untuk menabung pendapatan pribadi dan dampak kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga yang memiliki nilai sebesar 62,1%. Sedangkan untuk pertanyaan dengan indikator peran wirausaha, dan pengaruh perubahan penawaran dan permintaan terhadap harga barang memiliki nilai sebesar 63,8%. Pertanyaan dengan indikator perubahan penawaran dan permintaan, peran pelaku ekonomi, produsen, konsumen dalam pemerintahan dan perekonomian, dan peran pasar modal dalam perekonomian memiliki nilai sebesar 69%. Dan nilai 72,4% terletak pada pertanyaan dengan indikator anggaran perencanaan belanja Negara. Sedangkan untuk kategori rendah yang memiliki rentang nilai <60% terletak pada pertanyaan dengan indikator cost dan benefit dari pengambilan keputusan dengan nilai sebesar 43,1%. Untuk pertanyaan dengan indikator bunga uang memiliki nilai sebesar 44,8%. Pertanyaan dengan indicator peran pemerintah dalam perekonomian, dan dampak inflasi memiliki nilai sebesar 48,3%. Sedangkan yang terakhir dalam kategori rendah yang memiliki nilai sebesar 51,7% terletak pada pertanyaan dengan indikator manfaat

dari perdagangan internasional, penggunaan sumber daya yang terbatas, dan pengembangan industri.

Mahasiswa Pendidikan IPS dengan pengetahuan pengantar ilmu ekonomi telah memasuki tahap yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran, dan dapat dikatakan perubahan perilaku mereka jauh lebih baik. Mahasiswa jurusan IPS mengamalkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan, terutama untuk memenuhi kebutuhan perilaku konsumtif. Mahasiswa jurusan pendidikan IPS memiliki pemahaman yang lebih baik tentang literasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan IPS memiliki tingkat melek ekonomi yang lebih bagus. Oleh sebab itu, melek ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan yang memenuhi kebutuhan dasar seseorang. Hal ini sejalan pendapat Neti Budiwati (Nur Solihat & Arnasik, 2018) melek ekonomi penting dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini senada dengan Gary H. Stern Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Nuraeni (Nur Solihat & Arnasik, 2018) literasi ekonomi sangat penting karena dapat mengukur apakah masyarakat memahami kekuatan yang berdampak besar pada kualitas hidupnya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan dalam pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi ekonomi mahasiswa Pendidikan IPS Universitas Islam Raden Rahmat Malang berada pada kategori sedang dengan rentang nilai sebesar 60-80% (>60%). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan IPS angkatan 2018-2021 dapat membuat keputusan ekonomi dan keuangan yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari serta menjadi konsumen yang cerdas dan berbuat dengan cara berfikir tepat. Literasi ekonomi merupakan alat yang sangat berguna bagi individu yang telah membuat banyak keputusan ekonomi setiap hari. Individu yang rasional melakukannya dengan menganalisis serta menafsirkan peristiwa ekonomi, mengevaluasi kebijakan publik, dan memeriksa biaya. Peningkatan individu yang membuat keputusan ekonomi yang tepat membantu pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan kekayaan. Oleh karena itu pengetahuan serta pemahaman tentang ekonomi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang melek ekonomi dan mampu mengambil keputusan yang tepat.

#### 5. REFRENSI

Agnello, M. F., & Lucey, T. A. (2008). Toward a critical economic literacy: Preparing K-12 learners to be economically literate adults. In: D. E. Lund, & P.R. Carr, (eds.) *Doing democracy: Striving for political literacy and social justice* (pp. 247-265). New York: Peter Lang Publishing.

- Akhan, N. E. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler öğrencilerinde ekonomi okuryazarlığının durumu ve geliştirilmesi (The case and development of economic literacy of the students in social sciences in primary school). (Unpublished Doctoral Thesis) Gazi University / Institute of Education Sciences, Ankara.
- Akhan, N. E. (2015). Economic Literacy Levels of Social Studies Teacher Candidates. *World Journal of Education*, 5(1). <https://doi.org/10.5430/wje.v5n1p25>
- Altınok, S. (2000). İktisada giriş (Introduction to economics). Konya: Kuzucular Publishing.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiwati, Neti. (2014). Disertasi : Analisis Literasi Ekonomi Dan Perilaku Konsumen. (Survey pada Guru SMA di Kota Bandung). Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Che Noraini Hashim & Bakare Kazeem Kayode (2013). Economics literacy among university students: A case study of International Islamic University Malaysia (IIUM). *World Applied Sciences Journal*, 28(6), 871-875.
- Chen, H., & Ronald P. Volpe. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *FINANCIAL SERVICES REVIEW*, 7(2), 107–128. <https://doi.org/10.3788/CJL201643.0811001>
- Fourie, A., & Krugell, W. (2015). Determining the economic literacy of introductory economic students in South Africa. *International Journal of Education Economics and Development*, 6(1), 86–96. <https://doi.org/10.1504/IJEED.2015.068361>
- RUSTANTONO, H., SOETJIPTO, B. E., WAHOEDI, W., & SUNARYANTO, S. (2020). Socio-Economic Factors and Rural Competitive Advantage: The Moderating Role of Economic Literacy. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(8), 151–159. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO8.151>
- Jappelli, T. (2009). Economic Literacy: An International Comparison. Working Paper No. 238. *Royal Economic Society*, 120(October), 429–451. <http://www.jstor.org.ezproxy.library.wisc.edu/stable/30186800>
- LSSCS (Louisiana Social Studies Content Standards) (1997). State standards for curriculum development. Retrieved August 12, 2008, from <http://www.doe.state.la.us/1de/uploads/2912.pdf>.
- Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. *Journal of Pension Economics and Finance*, 14(4), 332–368. <https://doi.org/10.1017/S1474747215000232>
- Mathews, L. G. (1999). *Promoting Economic Literacy: Ideas for Your Classroom*. 1–12.
- Nakiboglu, D. A. (2017). Examination of the economic literacy of the students of the faculty of economics and administrative sciences. *International Review of Social Sciences*, 5(4), 261–271.
- NCEE 2003. Test your own economic literacy, NCEE Standards in Economics. Diakses dari <http://www.ncee.com>
- Nuraeni. (2015). Skripsi : Pengaruh Literasi Ekonomi, Kelompok Teman Sebaya, Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Untuk Produk Fashion Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta : UNY.
- Nur Solihat, A., & Arnasik, S. (2018). Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, II(X). <https://doi.org/10.23969/oikos.v2i1.915>
- Rivlin, A. M. (1999). Economic literacy symposium. Minneapolis: The Federal Reserve Bank of Minneapolis.
- Salemi, M. K. (2005). Teaching Economic Literacy: Why, What and How. *International Review of Economics Education*, 4(2), 46–57. [https://doi.org/10.1016/S1477-3880\(15\)30132-8](https://doi.org/10.1016/S1477-3880(15)30132-8)
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Savaş, V.F. (1998). İktisadın tarihi (History of economics). İstanbul: Avcıol Press Publication.
- Sina, P. G. (2012). Analisis Literasi Ekonomi. *Jurnal Economia*, 8(2), 135–143. <https://doi.org/10.21831/economia.v8i2.1223>
- Walstad, W., & Allgood, S. (1999). What do college seniors know about economics? *American Economic Review*, 89(2), 350–354. <https://doi.org/10.1257/aer.89.2.350>
- Wulandari (2011) “Hanya 42,6 Persen Guru Ekonomi Berkualitas Baik”. *Republika*. Edisi 3 April 2011.

## PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR ACEH

Oleh:

Elly Irhana Savitri<sup>1</sup>, Surya Wiranto<sup>2</sup>, Endro Legowo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

<sup>1</sup>e-mail: ellyirhanasavitri@yahoo.co.id

<sup>2</sup>e-mail: suryawiranto1@gmail.com

<sup>3</sup>e-mail: endro.legowo65@gmail.com

### Abstrak

Meningkatnya permasalahan keamanan maritim di wilayah Aceh menjadikan suatu masalah sosial di lingkungan masyarakat, Panglima Laot di Aceh memiliki salah satu peran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemaritiman. Artikel ini akan menganalisis peran Panglima Laot dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber pustaka yang terkait dengan topik penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa Panglima Laot mempunyai peran dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan di wilayah Sabang. Adanya kecenderungan munculnya permasalahan maritim yang merupakan indikator adanya menurunnya kondisi ketahanan sosial masyarakat. Panglima Laot secara internal berperan dalam menjaga hubungan sosial antar masyarakat nelayan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dengan adanya peraturan adat yang berlaku dan dihadapkan dengan metode penangkapan ikan yang berlaku di masyarakat nelayan maka dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana manusia dapat bersahabat dengan alam. Secara eksternal Panglima Laot juga mempunyai peran yang luar biasa bagi masyarakat nelayan yaitu sebagai media fasilitator jika terjadi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat nelayan ataupun dengan pihak-pihak lain sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, Ketahanan Sosial dan Keamanan Maritim.

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan adanya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki kerentanan mengenai permasalahan berkaitan dengan kemaritiman tidak terkecuali di Provinsi Aceh yang seringkali mendapatkan ancaman pada wilayah lautnya. Wilayah Aceh ini terdiri dari 119 pulau, dan mempunyai garis pantai yang membentang sepanjang 2.666,27 km dengan luas perairan keseluruhan mencapai 295.370 km<sup>2</sup>. Aceh merupakan wilayah NKRI yang berbatasan dengan beberapa negara yang seringkali mengalami permasalahan terkait dengan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, penyeludupan orang, penyeludupan barang dan banyak kejahatan lainnya. Wilayah Aceh terletak pada daerah yang dikelilingi lautan, sehingga hal ini akan membuat sebagian besar warga masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan demikian juga yang terjadi di Pulau-pulau yang lain termasuk Sabang.

Berdasarkan letak geografisnya, pulau Sabang sebagai Lalu-lintas laut. Sabang berdasarkan posisinya mempunyai potensi kecenderungan meningkatnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keamanan maritim sebagai wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini menjadikan suatu masalah sosial di lingkungan masyarakat, yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai lokalnya,

termasuk menurunnya kemampuan melaksanakan penangkalan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga hal ini menunjukkan adanya kerentanan yang terjadi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam tersebut. Oleh Karena itu dibutuhkan kemampuan untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup atau permasalahan yang berat. Dengan adanya ketahanan sosial yang kuat ditengah-tengah masyarakat Aceh maka diharapkan masalah dan kesengsaraan dalam kehidupan masyarakat tidak menimbulkan stres yang berkepanjangan dan masyarakat sanggup untuk mengatasinya dengan baik. Ketahanan sosial yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat atau suatu komunitas ini dapat dilihat dari kemampuan membangun partisipasi dan kelembagaan komunitas itu sendiri. Dengan demikian untuk mewujudkannya dibutuhkan peran dari aktor-aktor tertentu untuk membantu mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan Sabang termasuk didalamnya adalah peran dari Panglima Laot untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang kemaritiman.

Di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Panglima Laot memiliki peranan penting dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan dari berbagai aspek potensi ancaman. Apabila dilihat dari sisi budaya adat istiadat (*local wisdom*) di Aceh terdapat pola kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yaitu dengan

menempatkan Panglima Laot sebagai pemimpin adat di wilayah tersebut yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam menangkap ikan, mengatur wilayah penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa dimasyarakat.

Selain itu, di Aceh secara internal Panglima Laot juga berperan dalam menjaga hubungan solidaritas antar masyarakat nelayan, pembuatan aturan adat atau hukum adat, melakukan pengecekan terhadap jenis serta teknis berkaitan dengan penangkapan ikan termasuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana hubungan yg harus dibangun antara manusia dengan alam.

## 2. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini akan mengkaji masalah tentang peran Panglima Laot dalam konteks masyarakat pesisir Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Pada penelitian ini selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai Peran Panglima Laot dalam kehidupan masyarakat nelayan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh.

Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu bentuk penelitian yang mana seorang peneliti mengamati secara langsung orang yang ada dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahaminya terkait bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia di sekitarnya, mendekati dan berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus obyek penelitian dengan tujuan untuk mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi terkait data-data yang diperlukan. Pada penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal yang menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif pada prinsipnya berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan menggunakan angka. Sehingga peneliti pada topik penelitian ini memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis peran Panglima Laot

dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di Aceh.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kondisi Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh.

Ketahanan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kapasitas individu, tim dan organisasi, untuk beradaptasi, pulih dan berkembang dalam situasi risiko, perubahan, bahaya, kompleksitas dan kesulitan yang dihadapi. Kapasitas yang dimiliki oleh individu ini, secara universal akan mempengaruhi seseorang, kelompok atau komunitas untuk mencegah, meminimalisasi atau mengatasi efek yang merusak dari kesulitan yg dihadapi. Sedangkan Resiliensi secara umum dapat diartikan bahwa resiliensi adalah merupakan kapasitas manusia untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan serta diperkuat atau ditransformasikan oleh kesulitan-kesulitan dalam hidup (Grotberg, 1995).

Ketahanan bukanlah keadaan yang statis, namun merupakan proses yang fleksibel dan responsif terhadap lingkungan dengan melibatkan interaksi antara individu, pengalaman hidup mereka dalam menghadapi tantangan konteks kehidupan saat ini.

Untuk meningkatkan ketahanan individu dalam masyarakat adalah merupakan tugas yang penting karena hal ini dapat memberikan pengalaman bagi manusia dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Meningkatnya ketahanan sosial individu dalam masyarakat maka dapat mengembangkan ketrampilan hidup seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, kemampuan yang realistis dalam membuat rencana hidup dan mampu mengambil langkah yang tepat bagi hidupnya.

Ketahanan individu menargetkan salah satu faktor yang telah ditunjukkan oleh penelitian untuk meningkatkan ketahanan sosial dan respons yang sehat terhadap stres dan menyediakan sarana untuk membantu individu memasukkan faktor ketahanan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya akan mengalami permasalahan atau situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Sehingga keadaan inilah yang nantinya disebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan serta tidak sesuai dengan harapan yang dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi individu-individu atau manusia. Ketahanan sosial disebut juga sebagai kemampuan untuk mempertahankan stabilitas psikologis manusia dalam menghadapi stres.

Pada penelitian ini, kompleksnya permasalahan yang terjadi di wilayah Aceh sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya, hal ini akibat adanya perubahan ekosistem, *illegal fishing*, *human trafficking* dan lain-lain, sehingga masyarakat diharapkan akan dapat mengembangkan cara untuk mengubah keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan atau peluang untuk pengembangan

diri pribadi sehingga mampu bertahan dari berbagai ancaman persoalan yang ada.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat maka timbul proses dari masyarakat untuk mengatasi situasi yang ada yang mana proses ini selanjutnya akan berpengaruh pada komunitas masyarakat yaitu akan mampu mengelola dirinya untuk bertahan menghadapi kesulitan untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar mereka. Keberhasilan untuk melawan rintangan digunakan untuk menangkap makna dari ketahanan, sehingga ketahanan dapat diartikan merupakan cara menjadi sukses dalam hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sulit.

Berkaitan dengan ketahanan sosial, yang mana ketahanan sosial merupakan suatu kemampuan untuk mendorong keterlibatan, mempertahankan hubungan positif dan untuk tetap bertahan dan pulih dari stres kehidupan dan isolasi sosial yang menekankan kapasitas individu untuk bekerja dengan orang lain untuk mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Untuk itu dibutuhkan peran aktor-aktor terkait akan membantu masyarakat dalam mempercepat peningkatan ketahanan sosial masyarakat salah satunya dengan lebih mengaktifkan peran Panglima Laot.

### 3.2 Sejarah, Tugas dan Wewenang Panglima Laot

Berdasarkan sejarahnya, Panglima Laot telah ada/terbentuk sejak masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang mana pada waktu itu Panglima Laot mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam memobilisasi peperangan dan pemungutan pajak.

Hal ini dikarenakan posisi Aceh yang berada di wilayah paling Barat dari Indonesia, menjadikannya sebagai daerah yang sering disinggahi atau menjadi tempat pemberhentian orang Eropa yang datang dari barat (Vlekke 2008).

Dalam perkembangannya, seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan di wilayah ini, membuat Sultan mulai melakukan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Panglima Laot di bawah Syahbandar pada seluruh pelabuhan di wilayah Aceh. Dengan demikian peran Panglima Laot lebih fokus sebagai bagian dari keamanan laut yang tugasnya pada bagian imigrasi untuk Syahbandar.

Pada masa-masa ini Panglima Laot juga bertugas untuk memobilisasi perang, mengawasi pelabuhan, melakukan hal-hal berkaitan dengan impor dan ekspor serta melakukan pengawasan pada wilayah pesisir. Panglima Laot tidak hanya menjadi penegak Adat Laot, tetapi juga sebagai bagian dari Pejabat Pemerintahan yang bekerjasama dengan Ulhee Balang dan Syahbandar.

Dalam perkembangannya Panglima Laut pada masa keberadaan Kerajaan Islam di Aceh menjadikan kedudukan Panglima Laot sebagai penegak Adat Laot di bawah perintah Sultan semakin jelas (Hurgronje 1996).

Kemudian Panglima Laot dianggap menjadi simbol Adat Laot dan warisan budaya (melakukan ritual adat), di mana fokus kewenangan yang mulanya hanya untuk pemerintahan bergeser menjadi kepentingan masyarakat. Sedangkan tugas Panglima Laot mulai berkembang, tidak hanya menjadi perpanjangan tangan Sultan namun sudah mulai menjadi media pemecahan masalah jika terjadi konflik di lingkungan masyarakat serta menegakkan Adat Laot untuk menjalankan tradisi Adat.

Pada masa setelah Sultan Iskandar Muda wafat, maka terjadi perubahan perpolitikan di wilayah Aceh. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, menjadikan tugas Panglima Laot semakin terlihat dan berada di luar struktur organisasi pemerintahan. Panglima Laot mulai mengatur tata cara penangkapan ikan dan lebih memperdalam bentuk penyelesaian sengketa antar nelayan (Kelana 2018).

Walaupun keberadaan Panglima Laot yang berada di luar struktur organisasi pemerintahan namun tetap memberikan kewajiban pada Panglima Laot setelah masa kemerdekaan untuk tetap bertanggung jawab kepada Kepala Daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa/Geuchik).

Panglima Laot yang sebelumnya hampir hilang keberadaannya kemudian dipertegas kembali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini dilakukan karena pada Tsunami Aceh 2004, Panglima Laot berperan besar dalam pembangunan perikanan berbasis masyarakat lokal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali (Wilson and Linkie 2012).

Pada masa Pasca Bencana Tsunami, Panglima Laot mendapat pengakuan melalui Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e) yang kemudian dijabarkan kembali pada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Pada tahun 2008 Panglima Laot diterima menjadi anggota *World fisher forum people* (WFFP). Dengan demikian keberadaan Panglima Laot yang sudah kurang lebih 400 tahun telah membuktikan bahwa Lembaga Adat memiliki peran penting bagi Masyarakat Aceh dari sejak zaman dahulu hingga saat ini. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan nilai-nilai budaya dan norma adat yang nantinya bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kerukunan hingga kesejahteraan masyarakat Aceh yang tentunya sesuai dengan nilai islami.

Kedudukan Panglima Laot berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semua Panglima Laot Lhok berada di bawah koordinasi Panglima Laot Kabupaten/Kota. Kemudian seluruh Panglima Laot Kabupaten/ Kota akan diketuai oleh Panglima Laot Aceh. Selain memiliki peran Panglima Laot secara umum memiliki peran

untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan, namun Panglima Laot juga memiliki batas-batas tertentu dalam melaksanakan aturannya. Dalam hal batas-batas wilayah kewenangan Panglima Laot didasarkan pada Lhok. Lhok ini merupakan wilayah yang didiami oleh sekelompok nelayan yang nantinya akan dipimpin oleh Panglima Laot Lhok. Lhok juga dapat diartikan sebagai teluk, muara, tepian pantai, atau terusan yang menjorok kearah darat.

Panglima Laot apabila dilihat dari tingkatannya, maka Panglima Laot terdiri dari Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten/ Kota dan Panglima Laot Provinsi Aceh. Tingkatan Panglima Laot tersebut nantinya juga akan menentukan kewenangan dari masing-masing Panglima Laot. Panglima Laot Kabupaten/ Kota pertama kali dicetuskan pada Kongres Adat Laot tahun 1982 yang dihadiri oleh seluruh Panglima Laot Lhok. Sedangkan Panglima Laot Aceh dibentuk pada Kongres Adat Laot pada tahun 2000 (Fitrah n.d.).

Pada naskah dokumen Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan bahwa perkara laut dilimpahkan kepada Panglima Laot dan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat Laot akan mengacu pada kesepakatan bersama Panglima Laot. Kemudian kewenangan Panglima Laot Lhok dalam menyelesaikan sengketa terbatas pada sengketa yang tidak mengandung unsur pidana dan terjadi di laut. Dalam menyelesaikan sengketa, peradilan adat memiliki tatacara tersendiri yang berbeda dengan hukum formal, jika sengketa yang terjadi mengandung unsur pidana maka diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Panglima Laot dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tingkat kewenangannya, Panglima Laot Lhok bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan pada tingkat Lhok, jika perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan pada tingkat Lhok, maka akan dilakukan penyelesaian pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Panglima Laot Kabupaten/ Kota. Dan jika masih tidak terselesaikan pada tingkat Kabupaten/Kota, maka penyelesaian perselisihan dilimpahkan pada Panglima laot Provinsi. Kemudian Panglima Laot Lhok melaksanakan perannya dalam memelihara dan mengawasi berjalannya Hukum Adat Laot, mengkoordinir bentuk kegiatan penangkapan ikan, mengurus dan menyelenggarakan upacara adat, menyelesaikan sengketa antar nelayan Lhok, dan menjadi perantara bagi nelayan dengan pemerintah.

Tugas dan tanggungjawab Panglima Laot Provinsi tidak hanya menyelesaikan konflik antar nelayan pada tingkat Kabupaten/ Kota saja, tetapi pada tingkat yang lebih luas yaitu terkait dengan hubungan dengan pihak asing atau Internasional. Panglima Laot Aceh juga menjadi perantara antara nelayan dengan pemerintah, nelayan dengan lembaga atau organisasi tertentu, mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan, mengadvokasi hukum untuk

kesejahteraan nelayan dan menjadi wakil nelayan bila membutuhkan bantuan Pemerintah.

Apabila dilihat Pada Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan wewenang, tugas dan fungsi Panglima Laot yang telah dituangkan pada Wilayah kekuasaan Panglima Lao tyang meliputi wilayah pesisir pantai hingga ke laut lepas (Puspita.M 2017a). Kemudian ruang fisik wilayah pesisir pantai yang menjadi kewenangan Panglima Laot antara lain meliputi *bineh pasie* (tepi pantai), *leun pukut* (kawasan untuk tarik pukut darat), *kuala* dan *teupien* (tepi pendaratan perahu, baik di kawasan teluk maupun kuala), dan *laot luah* (laut lepas). Luas wilayah kekuasaan Panglima Laot ke arah laut lepas pada prinsipnya mengikuti kaedah hukum sejauh mana sumber daya laut dapat dikelola secara ekonomis oleh masyarakat. Sedangkan menurut ruang fisik yang berhubungan dengan ekosistem pantai meliputi *uteun bangka* (hutan bakau), *uteun pasie*, *uteun aron* (hutan cemara), *neuheun* (tambak), dan *lancang sira* (ladang garam).

Pada prinsipnya Peran Panglima Laot adalah dalam hal menjaga lingkungan laut juga menegakkan aturan pantang melaut pada hari-hari tertentu, hal ini bertujuan agar laut tidak secara terus menerus untuk dimanfaatkan dan untuk menjaga ekosistem dari laut itu sendiri. Pantang melaut diterapkan pada hari Jum'at, Hari besar Agama Islam, Hari Kemerdekaan Indonesia dan setiap tanggal 26 Desember (memperingati Tsunami Aceh 2004). Kemudian terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran baik melanggar ketentuan Pantang Melaut atau Adat Laot lainnya, terdapat sanksi adat berupa seluruh hasil tangkapan disita dan dilarang melaut selama 3 hari atau maksimal 7 hari dengan mempertimbangkan kebebasan menjalankan syariat Islam dan keamanan bagi setiap anggotanya.

Panglima Laot mempunyai prinsip bahwa alam terutama laut merupakan Anugerah dari Allah SWT sudah seharusnya perlu dijaga dan dilestarikan oleh umatnya dan sebagai manusia yang beriman tentu kita harus mengingat syariat agama. Panglima Laot dapat dikatakan sebagai simbol dari keberadaan Kerajaan Islam pada masa lampau di Aceh. Sebagai umat manusia dalam menjalankan perintah agama dan mencari nafkah harus seimbang, sehingga tidak ada nantinya masyarakat yang mengutamakan pekerjaan dari pada menjalankan syariat agamanya. Panglima Laot menilai bahwa kegiatan yang mereka lakukan dalam menjaga Anugerah Allah SWT merupakan bentuk syukur manusia terhadap nikmat Allah dan sebagai bentuk tanggung jawab atas nikmat yang sudah diberikan Hal ini juga yang kemudian mendorong Panglima Laot secara sadar dan berbesar hati untuk tetap menjaga wilayah pesisir dan laut secara sukarela.

### **3.3 Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh**

Panglima Laot mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari Kompleksnya permasalahan yang terjadi di wilayah Aceh akibat adanya perubahan ekosistem, *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, penyeludupan orang, penyeludupan barang dan banyak kejahatan lainnya, sehingga masyarakat diharapkan akan dapat mengembangkan cara untuk mengubah keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan untuk pengembangan diri pribadi.

Yang mana dalam proses ini diharapkan selanjutnya masyarakat mampu mengelola dirinya untuk bertahan menghadapi kesulitan, untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar mereka. Sehingga pada proses ini keberhasilan untuk melawan rintangan digunakan untuk menangkap bahwa makna ketahanan itu ada pada proses tersebut. Dengan demikian ketahanan merupakan cara menjadi sukses dalam hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sulit.

Panglima Laot apabila dikaitkan dengan ketahanan sosial yang merupakan suatu kemampuan untuk mendorong keterlibatan dan mempertahankan hubungan positif dan untuk bertahan dan pulih dari stres kehidupan dan isolasi sosial yang menekankan kapasitas individu untuk bekerja dengan orang lain untuk mengubah kesulitan menjadi keuntungan.

Untuk itu dibutuhkan peran aktor-aktor terkait akan membantu masyarakat dalam mempercepat peningkatan ketahanan sosial masyarakat salah satunya dengan lebih mengaktifkan peran Panglima Laot. Posisi Panglima Laot di antara aktor-aktor keamanan maritim Indonesia cukup menarik untuk dilakukan mengingat Panglima Laot sendiri merupakan institusi adat atau kebudayaan. Dengan peran-perannya yang sudah dijelaskan 1 Wawancara dengan Panglima Laot Kota Sabang, Muhammad Ali Rani, 24 Maret 2021.

Fungsi yang dilakukan oleh Panglima Laot membuat Lembaga ini membuktikan bahwa di luar institusi pemerintahan, Panglima Laot dapat memainkan perannya yang signifikan dalam hal mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat Aceh terkait isu keamanan dimasyarakat Aceh, bahkan mewujudkan suatu simbiosis mutualisme dengan birokrasi yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini Panglima Laot memainkan peranan dalam menjaga lingkungan laut di Aceh, termasuk di dalamnya menjaga biodiversitas, pencegahan abrasi, hingga manajemen sumberdaya perikanan di Aceh yang menyebabkan terjaganya sustainabilitas perburuan ikan (Puspita, 2017).

Dalam mewujudkan keamanan maritim pada tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah aktor yang berperan penting di dalamnya. Instansi-intansi ini didirikan dengan maksud untuk merealisasikan konsep keamanan maritim berdasarkan tugas-tugas dan wewenangnya. Walaupun di lapangan tiap aktor seringkali mengalami tumpang tindih hukum dan

wewenang, namun pada dasarnya keadaan ini memang sengaja dibuat oleh pemerintah agar menjadikan laut sebagai resources yang dikelola bersama-sama.

Panglima Laot dalam perspektif kedudukannya antar lembaga pemerintah terkait, akan ditelisik lebih jauh berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Panglima Laot pada masa lampau dalam hal ini terkait dengan kemaritiman yang pada gilirannya akan menggambarkan posisi Panglima Laot di dalam aktor-aktor pencipta keamanan maritim. Adapun aktor-aktor tersebut dalam Polda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang. Provinsi Aceh mengalami banyak permasalahan termasuk di dalamnya adalah penyelundupan manusia. Provinsi ini menjadi transit bagi para imigran gelap untuk kemudian melanjutkan perjalanannya menuju negara lain. Para imigran gelap tersebut akan melewati laut dan "jalur-jalur tikus" yang sangat sulit diketahui dari pihak kepolisian. Jalur-jalur tikus ini bisa berganti-ganti dan bahkan melewati tempat yang tidak terduga sama sekali oleh polisi. Oleh karenanya, kepolisian mengajak masyarakat pesisir, termasuk di dalamnya adalah Panglima Laot, untuk berperan dalam pengawasan daerah mereka sendiri.

Panglima Laot dapat memberikan informasi yang akurat kepada kepolisian untuk ditindak lebih lanjut. Keterbatasan armada yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam melakukan patroli terbantu dengan bantuan dari Panglima Laot yang melakukan pelayaran tiap hari. Kerjasama yang dibangun antara dua 2 Wawancara dengan Kombes Pol Sony Sonjaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, 25 Maret 2021. Institusi ini berjalan baik. Pada Oktober 2020,

Panglima Laot mendapatkan laporan adanya kapal Rohingya masuk ke wilayah laut Aceh Timur dan Aceh Utara. Informasi ini tentu sangat berguna bagi pihak kepolisian mengingat kasus penyelundupan manusia di Aceh cukup sering terjadi. Peran Panglima Laot bagi kepolisian sangatlah luas. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran di laut dan memiliki unsur pidana, Panglima Laot akan menyerahkan pelaku kepada polisi. Dalam kasus *destructive fishing* misalnya, Panglima Laot akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan hukum adat. Namun, apabila hukum adat dirasa tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif, Panglima Laot akan menyerahkan pelaku kepada kepolisian untuk ditindak secara hukum positif yang berlaku.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Panglima Laot memiliki signifikansi yang tinggi di mata penegak hukum. Dalam penciptaan keamanan yang merupakan tugas pokok kepolisian, Panglima Laot membantu dengan perannya yang luas di masyarakat pesisir. Kedekatan dan legitimasi dari masyarakat, hukum adat yang mengakar, dan

jangkauan profesinya yang memungkinkan melakukan pengawasan laut setiap hari, membuat Panglima Laot memiliki daya tawar yang kuat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Eksistensi Panglima Laot dalam menciptakan dan menjaga *ecological security* di Aceh ini pada akhirnya sangat membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2011, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh (DKP) sendiri mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan dan data serta kegiatan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perairan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perairan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pauk kecil. Tugas yang cukup luas ini dapat bekerja secara efektif dengan kerjasama yang kuat dengan Panglima Laot.

Dalam implementasi program Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) misalnya, DKP Provinsi Aceh menggandeng Panglima Laot karena “masyarakat biasanya lebih mendengarkan saran Panglima Laot daripada kepala desa atau instansi lainnya”. Karakteristik sosial dan budaya yang mendukung ke arah keberlanjutan sumber daya, kehadiran Panglima Laot dengan berbagai aturan dan mekanisme pengelolaan secara arif, hal ini merupakan entitas masyarakat Aceh untuk menjadikan laut tidak hanya memiliki nilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai sosial dan religi.

Peran Panglima Laot lebih kepada bagaimana mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, mengatur nelayan untuk menangkap ikan yang ramah lingkungan sesuai kebijakan yang dibuat oleh Panglima Laot. Praktik adat ini sangat membantu DKP Provinsi Aceh untuk memastikan sustainability ekstraksi sumber daya perikanan di Aceh. Seperti yang ditekankan oleh Plt Kepala DKP Provinsi Aceh, “nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat (Panglima Laot), secara adat budaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan Panglima Laot dan pemerintah berusaha untuk mengalihkan alat tangkap berbahaya ke alat-alat yang lebih ramah lingkungan”.

Dari perspektif DKP Provinsi Aceh yang bertugas dalam hal konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perairan serta pemberdayaan masyarakat pesisir, Panglima Laot adalah mitra strategis bagi instansi ini. Panglima Laot adalah bentuk usaha masyarakat yang lahir secara organik dan mampu menjalankan hukum adat laut secara efektif. Maka tidak heran, DKP Provinsi Aceh sendiri sering mengadakan audiensi dengan Panglima Laot sebagai representasi masyarakat sipil dalam penentuan kebijakan-kebijakan tertentu, termasuk dalam zonasi tata ruang laut. Bahkan, karena kuatnya nilai-nilai adat yang diemban oleh Panglima Laot, bisa dikatakan bahwa efektivitas dan efisiensi kinerja

DKP Provinsi Aceh sangat bergantung pada kinerja Panglima Laot juga.

Peran Panglima Laot dalam perwujudan pertahanan ini sangatlah krusial. Dengan profesinya sebagai nelayan yang memiliki jadwal melaut yang padat beserta anggota yang cukup banyak dan terkoordinasi dengan baik, Panglima Laot senantiasa “memberikan informasi” maupun peringatan apabila ada situasi-situasi khusus baik berupa ancaman-ancaman maupun bahaya-bahaya keamanan perairan kepada pihak Lanal Sabang. Posisi Panglima Laot sendiri sangatlah penting, mereka adalah informan yang handal dan terpercaya karena memungkinkan memberikan data terkait keamanan laut secara aktual. Misalnya saja, pada akhir tahun 2020, Panglima Laot melaporkan adanya kapal berbendera Iran pada Lanal Sabang via telepon.

Dengan kecepatan aliran informasi seperti ini, ancaman kedaulatan yang ada kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Lanal Sabang. Pada kerjasama yang terjalin secara baik antara pihak militer dan Panglima Laot, dapat diketahui bahwa Panglima Laot merupakan representasi sipil yang bekerja secara efektif di dalam perannya sebagai Komponen Pendukung. Panglima Laot sangatlah dibutuhkan oleh pihak militer karena mereka mampu memberikan informasi dan peringatan secara cepat mengingat aktivitas harian mereka di laut.

Hal ini pada akhirnya mampu membantu Lanal Kota Sabang untuk menjalankan fungsinya sebagai Komponen Utama pertahanan negara, terkhususnya dalam wilayah kemaritiman. Berdasarkan perspektif tiga instansi keamanan maritim di atas, dapat diketahui bahwa Panglima Laot memiliki posisi sentral. Panglima Laot adalah playmaker ulung karena ia menggerakkan semua kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Bahkan lebih dari itu, mereka memiliki sistem hukum sendiri, menegakkan hukumnya sendiri, dan sistem ini kompatibel dengan kepentingan-kepentingan instansi keamanan maritim pemerintah. Tidak jarang justru kepentingan instansi pemerintah ini justru eksis karena dipengaruhi oleh aspirasi Panglima Laot. Dalam konteks ini, Panglima Laot, sebagai institusi adat, berarti memiliki kedudukan yang cukup setara dengan instansi pemerintah bidang kemaritiman lainnya. Posisi Panglima Laot di dalam aktor-aktor pencipta keamanan maritim. Adapun aktor-aktor tersebut dalam Polda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang.

Menurut (Naess et al. 2005) kelembagaan lokal memiliki peran dalam adaptasi terhadap ancaman pada tingkat lokal. Panglima Laot Kota Sabang menyebutkan bahwa ancaman pada tingkat lokal merupakan kejahatan yang berasal dari wilayah itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar Panglima Laot yaitu adanya tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah kelautan Aceh

dilakukan oleh nelayan-nelayan lokal. Kejahatan yang dilakukan dapat berupa destructive fishing maupun penangkapan ikan yang dilakukan bukan pada Lhok nelayan tersebut. Penangkapan ikan yang dilakukan di luar Lhok nelayan tersebut akan melanggar aturan Adat laot yang telah disepakati antara nelayan dan Panglima Laot. Kelembagaan lokal ini nantinya akan menggerakkan komunitas untuk dapat beradaptasi. Menurut (Cinner et al. 2012) keberadaan lembaga lokal memberikan tindakan nyata dalam memelihara ekosistem dan kelestarian

Begitu juga dengan peran yang dilakukan oleh Panglima Laot dalam menjaga wilayah pesisir dan lautnya, Panglima Laot menjadi wadah untuk membina dan membangun masyarakat pesisir untuk mengatur dan mengawasi kegiatan kenelayanan. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima Laot Kota Sabang bahwa “peran utama dari Panglima Laot adalah menegakkan aturan Adat Laot dalam hal penangkapan ikan. Panglima laot akan membina dan mengajak masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan yang tidak melanggar aturan demi menjaga ekosistem di laut. Serta harapannya adalah agar nelayan Aceh tidak ada yang melakukan proses penangkapan ikan yang dilakukan dengan metode yang dapat merusak lingkungan” Aturan Adat Laot yang dibuat merupakan kesepakatan antara nelayan dengan Panglima Laot, Panglima Laot pula yang nantinya akan mengawasi pelaksanaan Adat laot ini yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan perikanan yang berkelanjutan. Peran Panglima Laot inilah yang nantinya diharapkan mampu membuat nelayan mampu beradaptasi terhadap sebuah peraturan yang berujung untuk keberlanjutan ekosistem.

Dengan demikian peran yang dijalankan oleh Panglima Laot dalam kiprahnya terhadap kehidupan masyarakat pesisir di wilayah Aceh ini mampu mendorong masyarakat mengelola dirinya untuk bertahan menghadapi kesulitan untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar dilingkungan masyarakat nelayan khususnya. Keberhasilan untuk melawan rintangan sehingga ketahanan sosial yang ingin dicapai sebagai upaya menjadi sukses dalam hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sulit.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot secara umum memiliki peran untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan di wilayah Aceh. Panglima Laot dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai batas-batas wilayah kewenangan. Batas-batas kewenangan Panglima Laot didasarkan pada Lhok. Lhok merujuk pada wilayah yang didiami oleh sekelompok nelayan yang nantinya akan dipimpin oleh Panglima Laot Lhok. Seluruh tugas dan wewenang dari Panglima Laot di atur pada

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Panglima Laot dalam konteks penegakan keamanan maritim di Aceh dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot sangat memiliki peran dalam memberikan informasi-informasi terkait pesisir dan kelautan kepada pihak-pihak tersebut yaitu Polda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang.

Hal ini menunjukkan bahwa Panglima Laot walaupun kedudukan Panglima Laot di luar institusi pemerintahan, tetapi Panglima Laot memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan suatu tatanan isu keamanan, bahkan mewujudkan suatu simbiosis mutualisme dengan birokrasi yang ada.

Peran Panglima Laot sebagai penegak aturan Adat Laot dalam penangkapan ikan dan dengan adanya aturan Adat Laot mengenai larangan melakukan kegiatan destructive fishing memberikan manfaat yang sangat dirasakan nelayan Aceh hingga saat ini. Peran Panglima Laot dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan laut demi terciptanya ekosistem yang baik sehingga sumber daya alam tetap dirasakan secara berkelanjutan menjadi salah satu bentuk dalam mewujudkan ecological security di Aceh.

Kerusakan lingkungan dianggap menjadi sebuah ancaman bagi peran Panglima Laot dalam menjaga dan melestarikan wilayah pesisir dan kelautan menjadi bukti bahwa Panglima Laot berperan dalam memberikan keselamatan lingkungan dalam mewujudkan keamanan maritim, khususnya di wilayah Aceh. Namun, cara pelestarian lingkungan laut yang dilakukan oleh Panglima Laot ini memungkinkan akan mengalami irelevansi seiring tantangan kerusakan lingkungan laut yang semakin bervariasi. Tidak hanya itu, perubahan iklim yang semakin parah akibat adanya pemanasan global, akan sangat berdampak pada ekosistem laut. Akibatnya, apabila hanya mengandalkan manajemen ekstraksi sumber daya laut, cara ini tidak akan cukup untuk menanggulangi perubahan tersebut. Perlu rejuvenasi pranata kebudayaan dengan diadakannya sosialisasi secara sistematis dari pemerintah setempat.

Berkaitan dengan ancaman-ancaman lingkungan lain terutama yang muncul akibat perubahan iklim. Dengan adanya interaksi itu, diharapkan kearifan loka seperti halnya peran Panglima Laot akan semakin berkembang dan dapat melahirkan dampak-dampak riil lain bagi terwujudnya keamanan maritim di Aceh. Dalam kontelasi keamanan maritim, tidak dapat disangkal bahwa Panglima Laot memiliki signifikansi yang sangat tinggi.

Panglima Laot memiliki sederet fungsi yang tidak hanya terbatas pada konteks ecological security, namun lebih dari itu, juga dalam ranah perwujudan National Security. Maka untuk itu, dengan menimbang beban tugas dan peran yang telah dilakukan oleh Panglima Laot serta posisinya yang

sentral di dalam stakeholder keamanan maritim, pemerintah daerah maupun pusat perlu memberikan insentif ataupun bantuan bagi kesejahteraan Panglima Laot. Hal ini pada akhirnya akan membuat kinerja adat tidak hanya sebatas sukarela, namun juga menjunjung tinggi profesionalitas.

## 5. REFERENSI

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2017. "A Study of Panglima La'Ot: An 'Adat Institution in Aceh." *Al-Jami'ah* 55(1): 155–88.

Chen, Sulan, Charlotte De Bruyne, and Manasa Bollempalli. 2020. "Blue Economy: Community Case Studies Addressing the Poverty-Environment Nexus in Ocean and Coastal Management." *Sustainability (Switzerland)* 12(11).

Cinner, J. E. et al. 2012. "Institutional Designs of Customary Fisheries Management Arrangements in Indonesia, Papua New Guinea, and Mexico." *Marine Policy* 36(1): 278–85.

Fitrah, Rahmat. "Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Meureubo , Aceh Barat)." *Universitas Teuku Umar*: 1–15.

Hurgronje, C S. 1996. *Aceh: Rakyat Dan Adat Istiadatnya*. INIS.

Kelana, Ade Syahputra. 2018. "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo)." *UIN Aceh*: 121.

Naess, Lars Otto, Guri Bang, Siri Eriksen, and Jonas Vevatne. 2005. "Institutional Adaptation to Climate Change: Flood Responses at the Municipal Level in Norway." *Global Environmental Change* 15(2): 125–38.

Naess, Lars Otto, Guri Bang, Siri Eriksen, and Jonas Vevatne. 2005. "Institutional Adaptation to Climate Change: Flood Responses at the Municipal Level in Norway." *Global Environmental Change* 15(2): 125–38.

*PandemiCovid-19"*

Puspita.M. 2017a. "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut, Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam." *Universitas Diponegoro*.

Puspita.M. 2017a. "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut, Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam." *Universitas Diponegoro*.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Rahmah, A., S. Salmarika, and E. Miswar. 2021. "The Role of Panglima Laot towards Fisheries Management Based on Ecosystem Approach in

Banda Aceh City." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 674(1).

Rudi, Edi et al. 2008. "Reef Fish Status in Northern Acehnese Reef Based on Management Type." *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 10(2): 88–93.

Satria, A. 2017. "Krisis Laut Dunia." Diakses dari pada 30 Maret 2021

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Vlekke, B H M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. KPG. <https://books.google.co.id/books?id=aY-ohLcYdhQC>.

Wilson, Crispen, and Matthew Linkie. 2012. "The Panglima Laot of Aceh: A Case Study in Largescale Community-Based Marine Management after the 2004 India Ocean Tsunami." *Oryx* 46(4).

## PENANAMAN SIKAP TASAMUH MELALUI AKTIVITAS RUMAH BACA ALAM KALIJAGA DI JAWA TENGAH

Oleh:

Mohamad Ardin Suwandi<sup>1)</sup>, Ruwandi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga

<sup>2)</sup>PPs Institut Agama Islam Negeri Salatiga

<sup>1)</sup>Email: mohamadardinsuwandi1994@gmail.com

<sup>2)</sup>Email: pakruwandi8@gmail.com

### Abstrak

Sikap tasamuh dibutuhkan masyarakat Indonesia yang beranekaragam latarbelakangnya agar dapat meminimalisir konflik-konflik karena perbedaan, yang dapat melahirkan konflik lebih besar seperti radikalisme, fundamentalisme, hingga terorisme. Oleh karena itu salah satu jalan yang dapat ditempu untuk menanamkan sikap toleransi pada anak didik adalah melalui aktivitas pendidikan seperti di rumah baca Alam Kalijaga. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan bagaimana strategi penanaman sikap tasamuh dan apa saja sikap tasamuh yang ditanamkan melalui aktivitas di rumah baca Alam Kalijaga. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan *naturalistik inquiry*. Pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi jenis bahan referensi dan *membercheck*. Sedangkan analisis data menggunakan teori Miles dan Habermen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan adalah *multiple intelligence* berbasis minat dan bakat, diskusi atau dialog, keteladanan atau praktik langsung, dan permainan bersama atau kolaborasi kegiatan. Sedangkan sikap tasamuh yang ditanamkan adalah bersikap empati, saling menghormati dan menghargai, saling berbagi, tolong-menolong, kerjasama, kejujuran, dan mencintai lingkungan sekitar.

**Kata Kunci:** *Sikap Tasamuh, Aktivitas Rumah Baca Alam Kalijaga.*

### 1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, tidak hanya pada budaya, adat-istiadat, kepercayaan atau agama yang berbeda-beda, tetapi dalam internal agama tertentu seperti agama Islam juga terdapat bermacam-macam aliran dan organisasi keagamaan. Misalnya hasil kajian Alvionita dan Auliahadi (2020) yang menyebutkan bahwa di penghujung abad 20 memasuki abad 21 dalam Islam terdapat berbagai tren kelompok keagamaan yang saling terpacu antara satu dengan yang lainnya dalam merebut hati masyarakat atau menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari yang berhaluan halus, keras, atau yang berada di antara ke duanya. Organisasi-organisasi keagamaan dalam Islam yang dimaksud adalah Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Tarbiyah, Salafiyah, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Jamaah Jihad, Jaringan Islam Liberal, dan lain sebagainya (Alvionita dan Auliahadi, 2020).

Menurut Data Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, hingga Juni 2021 jumlah penduduk Jawa Tengah sebesar 37,23 juta jiwa dan agama Islam merupakan agama paling banyak yang dianut masyarakat Jawa Tengah yaitu 36,21 juta jiwa, Kristen sebanyak 595,96 ribu jiwa, Katolik sebanyak 349,3 ribu jiwa, Budha sebanyak 51,84 ribu jiwa, Hindu sebanyak 14,67 ribu jiwa, Kongucu sebanyak 1,39 ribu jiwa, dan sebanyak 6,35 penduduk Jawa Tengah penganut aliran kepercayaan (Kusnandar,

2021). Oleh karena itu, suatu hal yang wajar bila masing-masing dari pemeluk agama meyakini kebenaran agama yang dianutnya, namun yang perlu ditegaskan adalah jangan sampai klim kebenaran yang berlebihan sehingga saling merendahkan atau mudah mengkafirkan ajaran kelompok lain (Janah. dkk, 2018).

Disadari maupun tidak, perbedaan dan keragaman yang ada dapat menjadi pemicu konflik horizontal dan vertikal hingga terjadinya kekerasan dan diskriminasi apabila tidak dikelola dan dimenej dengan baik. Apa lagi saat ini perkembangan teknologi sudah semakin canggih yang dibarengi dengan menguatnya isu-isu mengenai fundamentalisme agama, politisasi agama, politik identitas serta terorisme dan penyebaran berita hoax, yang dalam kenyataannya menjadi momok tersendiri bagi persatuan dan keharmonisan bangsa Indonesia ke depan tentunya. Menurut Muhammad Amarah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh agar keragaman tidak sampai melahirkan intoleransi seperti diskriminasi, kekerasan dan terorisme adalah dengan mengedepankan sikap toleransi (Rasyidi dan Amin, 2019).

Toleransi sebagai sikap positif dibutuhkan dalam kehidupan yang dilatarbelakangi berbagai perbedaan dan keragaman seperti Indonesia. Toleransi sebagai bentuk sikap seseorang, tidak lahir begitu saja secara alamiah, melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor pendidikan (Arifin, 2015). Pada dasarnya

pendidikan merupakan alat dan wadah yang dapat ditempuh untuk melakukan mobilitas sosial, sehingga manusia dapat melakukan kehidupan dengan wajar dan layak (Zaitun, 2016). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi menyebarkan penemuan-penemuan atau informasi-informasi baru, tetapi juga menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap, dan pandangan hidup baru yang semuanya dapat memberikan kemajuan dan dorongan agar terjadinya perubahan sosial (Zaitun, 2016).

Pendidikan tidak hanya melulu berkaitan dengan sekolah atau yang formal saja, tetapi dibutuhkan juga pendidikan nonformal seperti dalam keluarga dan masyarakat untuk membantu (Hasanah, 2019). Sebagaimana ditegaskan Dyah Fifin Fatimah, dalam Hasanah (2019) bahwa pendidikan nonformal atau luar sekolah dalam lingkungan masyarakat dibutuhkan untuk mengajarkan anak didik bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan toleransi yang tinggi. Pendidikan luar sekolah atau nonformal merupakan setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari kegiatan yang lebih luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran anak didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar (Agustiningsih dan Pamungkas, 2017).

Rumah Baca Alam Kalijaga sebagai lembaga pendidikan luar sekolah atau nonformal memiliki peran penting yaitu sebagai alat dan wadah untuk menanamkan sikap toleransi pada anak didik melalui aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan terencana tentunya. Sebagaimana hal ini secara tidak langsung sejalan dengan Asas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Rumah Baca Alam Kalijaga yaitu berasaskan Pancasila dan mencirikan kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan (Dokumen Milik Rumah Baca Alam Kalijaga – tidak diterbitkan).

Pada saat penulis melakukan observasi ke rumah baca Alam Kalijaga pada tanggal 02 Maret 2021 di saat sekolah menerapkan belajar jarak jauh atau online, aktivitas di rumah baca Alam Kalijaga masih berjalan sebagaimana biasanya. Bahkan anak-anak didik di sana juga masih antusias mengikuti kegiatan yang sudah merupakan kegiatan rutin di Rumah Baca Alam Kalijaga. Selain itu, yang belajar dan terlibat di rumah baca Alam Kalijaga bukan hanya anak-anak dari Desa setempat, tetapi ada juga dari berbagai Desa dan komunitas. Menurut Muhamad Ihsanudin salah satu Pendamping anak didik di rumah baca Alam Kalijaga yang peneliti jumpai mengatakan bahwa Rumah Baca Alam Kalijaga didesain sedemikian rupa tepatnya berbasis alam agar menjadi tempat yang nyaman dan menarik untuk anak-anak atau pengunjung yang datang, baik itu dalam rangka ikut belajar di sini maupun sekadar berkunjung dan berbagi pengalaman serta informasi dengan sesama.

Latar belakang didirikannya rumah baca Alam Kalijaga sendiri tidak terlepas dari kontruksi kehidupan masyarakat sekitarnya yaitu dikarenakan kebanyakan orang tua mereka bekerja sebagai buruh di pabrik kayu lapis atau *garmen* hingga sore hari, kerja di sawah paruh waktu, dan sebagiannya bekerja di luar daerah atau merantau, sehingga menyebabkan semakin minimnya kontrol dan perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan anak di luar pendidikan formal atau sekolah. Parahnya lagi kehidupan anak-anak semakin didominasi oleh *gadged* yang menyebabkan anak-anak lebih suka bermain sendiri dan cenderung *individualis* serta tidak terarah dari perhatian dan kontrol dari orang-orang yang lebih dewasa (Dokumen Milik Rumah Baca Alam Kalijaga – tidak diterbitkan).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam secara metodologi ilmiah di rumah baca Alam Kalijaga dengan mengangkat judul penelitian tentang: “*Penanaman Sikap Tasamuh Melalui Aktivitas Rumah Baca Alam Kalijaga di Dusun Nasri Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Jawa Tengah Tahun 2021*”. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang melakukan kajian serupa mengenai penanaman sikap tasamuh dalam dunia pendidikan seperti penelitian yang dilakukan oleh Zahrotun Nasikhah (tesis) tentang “*Penanaman Sikap Toleransi dalam Pembelajaran: Studi Kasus Multisitus SDN Nglekok 01 dan SDN Ngaron 01 Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif fenomenologis (Nasikhah, 2017). Penelitian oleh Nur Aeni Khayati (tesis) tahun 2019 tentang “*Penanaman Nilai-Nilai Toleransi di SMA PIRI 1 Yogyakarta*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan etnografi (Khayati, 2019). Penelitian Dedi Irawan (Tesis) tahun 2019 tentang “*Penanaman Nilai-nilai Toleransi Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan: Studi Kasus Pada SMAN 1, SMAN 2, dan SMKN*”, pada Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Irawan, 2019).

Dari beberapa kajian terdahulu tersebut, belum dijumpai satu pun kajian yang secara spesifik serupa dengan judul penelitian tentang “*Penanaman Sikap Tasamuh Melalui Aktivitas Rumah Baca Alam Kalijaga*”. Memang sudah ada beberapa kajian yang berfokus pada variabel penelitian ini yakni penanaman sikap tasamuh, namun secara spesifik belum ada kajian terdahulu yang melakukan penelitian serupa dengan menggunakan pendekatan dan lokasi yang sama yaitu *narutalistik inquiry* di rumah baca Alam Kalijaga. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metodologi penelitian di bidang pendidikan dan menambah kanzah ilmu pengetahuan khususnya

dalam mengkaji tentang penanaman sikap tasamuh melalui aktivitas rumah baca Alam Kalijaga atau lembaga pendidikan nonformal.

## 2. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai tanggal 9 Mei 2021 di Rumah Baca Alam Kalijaga tepatnya di Dusun Nasri Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Penelitian ini meruakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan *naturalistik inquiry* karena peneliti akan mengungkapkan atau menggambarkan bagaimana strategi penanaman sikap tasamuh serta apa saja sikap tasamuh yang ditanamkan melalui aktivitas rumah baca Alam Kalijaga secara alamiah atau apa adanya (Salim dan Syahrums, 2012). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Pendamping dan 12 anak didik dari jumlah keseluruhan Pendamping dan anak didik di Rumah Baca Alam Kalijaga. Dalam menentukan informan, ada dua kategori yang digunakan. *Pertama*, Informan paling tidak sudah mengikuti kegiatan rutin paling sedikit dua kali pertemuan saat penelitian lapangan berlangsung. Peneliti menggunakan kategori ini agar terhindar dari informan yang sekadar ikut-ikutan temannya yang datang atau sekadar berkunjung. *Kedua*, Informan minimal sudah masuk Sekolah Dasar. Kategori ini peneliti gunakan agar mempermudah peneliti ajak diskusi atau ngobrol untuk memperoleh data melalui teknik wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi jenis bahan referensi dan *membercheck*. Triangulasi bahan referensi dalam penelitian ini terdiri dari rekaman, dokumen wawancara dan foto kegiatan sebagai alat bukti kredibilitas data. Sedangkan *membercheck* berupa tanda tangan informan sebagai alat bukti validitas data (Sugiyono, 2016). Teknik analisis data yang digunakan adalah teori Milles dan Haberman yakni dilakukan bertahap dan secara berurutan yaitu mulai dari reduksi data, dilanjutkan dengan display data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Istilah sikap dalam bahasa inggris di sebut "*attitude*", sedangkan *attitude* dalam bahasa Latin bersal dari kata "*aptus*" yang berarti keadaan yang siap secara mental, yang bersifat melakukan sesuatu (Arifin, 2015). Menurut Winkel dalam Vitalis, sikap merupakan suatu bentuk kecenderungan psikis untuk menolak atau menerima suatu objek tertentu atas dasar penilaian terhadap objek tersebut, baik itu berharga maupun tidak berharga (membantu atau tidak membantu dalam mengembangkan hidupnya) objek itu untuk dirinya (Sumarwoto, 2015). Sedangkan kata tasamuh dalam *Mu'jam Muqayis al-Lughah* merupakan asal kata dari "*samaha*" yang berarti lunak, suka memaafkan, bermurah hati, dan

toleran (Farkhan, 2018). Dalam bahasa Latin, kata toleransi berasal dari asal kata "*tolerantia*" memiliki arti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran (Anshari, 2020). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata toleransi merupakan akar kata dari kata "*toleran*", yang berarti membolehkan, membiarkan, menghargai perbedaan pandangan, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan atau lain sebagainya, meskipun berbeda dengan pandangan sendiri (Fariz Alniezar. dkk, 2019). Dalam arti paling sederhana, toleransi adalah harmoni dalam perbedaan (Suprastowo. dkk, 2018; Zaki, 2018). Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, toleransi merupakan suatu sikap atau tindakan manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seorang menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain (Sumai dan Naumi, 2019).

Perlu ditegaskan di sini bahwa pembahasan ini lebih fokus pada teori toleransi dalam internal agama yaitu agama Islam. Menurut Hasyim Muzadi, toleransi secara internal diartikan sebagai toleransi yang berlandaskan pada prinsip QS al-Qasas ayat 55, yang artinya "*bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian*" (Syukur dan Hermanto, 2021). Toleransi internal agama yaitu toleransi yang berkaitan dengan sikap saling menghormati atau menghargai, menyayangi, menasehati, tolong-menolong, dan tidak saling curiga mencurigai dalam satu agama (Musthofa, 2019; Sholeh, 2014). Dengan kata lain, terdapat tiga prinsip dalam toleransi yaitu: *Pertama*, tidak keluar dari batas syari'ah, *Kedua* tidak memonopoli kebenaran, dan *Ketiga* toleransi hanya dalam hal-hal yang bersifat *dhanni* (Syukur dan Hermanto, 2021). Toleransi dalam internal agama secara tidak langsung telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw ketika hijrah dari Mekkah ke Yasrib/Madinah yang ditandai dengan terbentuknya persaudaraan seagama muslim melalui persaudaraan sahabat anshor dan sahabat muhajirin sebagai persatuan umat Islam dalam ikatan sosial dan pendirian masjid sebagai dasar persatuan umat Islam dalam ikatan keimanan (Yahya, 2017).

Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa strategi penanaman sikap tasamuh melalui aktivitas di rumah baca Alam Kalijaga dilakukan melalui *multiple intelligences* berbasis minat dan bakat, melalui diskusi atau dialog, melalui praktek langsung atau keteladanan, dan melalui permainan bersama atau kelaborasi kegiatan.

Tabel 1 Strategi Penanaman Sikap Tasamuh yang Digunakan di Rumah Baca Alam Kalijaga.

STRATEGI PENANAMAN SIKAP TASAMUH
Multiple Intelligences berbasis minat dan bakat.
Diskusi atau dialog.
Keteladanan atau praktik langsung.
Permainan bersama atau kelaborasi kegiatan.

Sumber : Data Hasil Temuan Lapangan Strategi Penanaman Sikap Tasamuh Melalui Aktivitas Rumah Baca Alam Kalijaga.

### **Multiple Intelligences Berbasis Minat dan Bakat.**

Menurut teori *multiple intelligences* tidak ada strategi yang terbaik karena masing-masing anak didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, untuk itu seorang guru diharapkan dapat menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran yang dapat mengakomodir seluruh kecerdasan agar setiap anak didik dapat terlibat dalam proses pembelajaran (Wulandari, 2015). Di rumah baca Alam Kalijaga yang peneliti temui stimulus minat bakat atau *multiple intelligences* digunakan untuk memberikan kebebasan pada anak didik untuk menentukan pilihan sesuai kecerdasan atau minat dan bakat yang dimilikinya secara otonom.

*Multiple intelligences* di rumah baca Alam Kalijaga juga digunakan dalam upaya melibatkan anak didik dalam merumuskan program atau kegiatan yang akan dilakukan di rumah baca Alam Kalijaga. "...*kalau biasanya si kita suruh nyoba beberapa alat musik dulu, nanti dia fokusnya dimanakan kelihatan. Misalnya kok dia lebih cenderung suka gitar dan mungkin bakatnya juga ada di gitar, ya dia pegang aja gitar. Baik ketika nanti dia kok untuk gitar agak sulit, tapi untuk gitar bas itu gampang, berarti nanti untuk gitar bas. Kalau semisal kok dia lebih enak di dram, ya berarti dia main katon kayak gitu. Yang pasti ki, sesuai minat anaknya si, kan soale kita ngajari anak didik itu kalau gak sesuai dengan minatnya, biasanya ilmu kan tidak bisa masuk sepenuhnya, memang berapa persen. Tapi ketika dia suka biasanya dia akan lebih menguasai.*" (Wawancara Pendamping P).

Menurut Howard Gardner, dalam Wulandari (2015) mengatakan bahwa anak terlahir dengan memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, karena itu apabila kecerdasan tersebut dikelola dengan baik, sesuai, dan tepat melalui proses pendidikan akan membentuk karakter atau sikap anak didik yang positif. Misalnya sikap positif seperti sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan sehingga terwujud sikap positif yang lainnya. Sebagaimana hal ini dibiasakan dalam kegiatan musik atau akuistikan di rumah baca Alam Kalijaga "...*ya itu tadi, ketika kita masuk di awal, ketika mereka belajar dibebepara alat musik itu udah suatu pendidikan untuk menghargai teman sih. Jadi ketika kalau dia merasa kesulitan di satu alat musik, tapi dia memiliki kecenderungan yang lain, dia akan lebih mudah memahami temannya, bahkan kita sendiri sulit untuk masuk dibidang itu kan gitu. Mereka akan berfikir begini, mungkin suatu yang terlihat mudah itu ketika kita melakukan itu juga belum tentu kita bisa*" (Wawancara Pendamping P).

Menurut pengertian dari UNESCO, toleransi berkaitan dengan perbuatan saling menghargai dan saling menghormati dalam keragaman, memberikan kebebasan berekspresi dan perilaku pada setiap manusia (Fithriyana, 2020). Sebagaimana dikatakan Umar Hasyim, toleransi berkaitan dengan memberikan kebebasan pada setiap orang untuk

mengekspresikan dan mengatur hidupnya selama itu tidak bertentangan dengan kedamaian masyarakat (Fithriyana, 2020). Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan menggunakan sistem *multiple intelligences* berbasis stimulus minat dan bakat secara tidak langsung dapat digunakan untuk menggali atau mengidentifikasi kecerdasan dalam diri anak didik yang kemudian dikembangkan melalui proses pembelajaran atau kegiatan di rumah baca dengan cara-cara yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak didik. Dengan strategi ini pula anak didik terlatih dan terbiasa untuk memberikan kebebasan pada orang lain, yang kemudian dapat mewujudkan sikap saling menghargai, menghormati, serta kerjasama dan tidak mudah menyalahkan orang lain.

### **Diskusi atau Dialog.**

Menurut konsep Interfi Dei, dialog mengandung konflik inheren pada hubungan antar manusia, sekaligus menjanjikan sebuah akhir dari penyelesaian atau menghadapi problem atau konflik dengan lebih dewasa (Banawiratma. dkk, 2010). Dialog dapat didefinisikan sebagai "pergaulan antar pribadi-pribadi yang saling memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya" (Ghazali, 2016).

Menurut P, dialog di rumah baca Alam Kalijaga selai dilakukan, baik itu pada saat sebelum maupun sesudah berkegiatan. Menurutny, dialog dan diskusi dilakukan agar setiap anak didik dapat saling menghargai dan saling menghormati perbedaan dan persamaan di antara mereka. Selain itu, dialog dan diskusi juga menjadi salah satu strategi agar anak didik terbiasa bersama-sama terlibat saling memberikan masukan, saran dan nasehat untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. "...*kalau itu pasti ya, mungkin ketika saya gak ada pun biasanya. Semisal saya lagi ada halangan gak bisa datang, anak-anak ya diskusi sendiri. Bahkan mungkin selain mereka membahas kira-kira mau membawahkan lagu apa, biasanya mereka juga diskusi lagu-lagu kesukaan mereka. Missal ow aku suka musis blus, aku kok juga, ya udah kita diskusikan masalah musik blus. Kayak gimana, terus mereka akan tukar pendapat, tukar ilmu mereka, kayak gitu*" (Wawancara Pendamping P).

Dialog dihayati sebagai langkah menjalin komunikasi dan sebagai ungkapan kesediaan untuk saling mendengar, saling menghormati, menghargai, dan saling terbuka tapi tidak untuk menghapus perbedaan (Banawiratma. dkk, 2010). Sebagaimana dilakukan P dalam kegiatan permusikan di rumah baca Alam Kalijaga. "...*misalnya sekolah dan enggak itu kita sebenarnya cuma bisa ngasih saran sih untuk anak, kalau kita memaksakan juga gak bisa, itu kan bersangkutan dengan orang tuanya, tepi kebetulan kalau itu, kebetulankan orang tuanya juga orang mampuhkan, jadi bukan masalah ekonomi, tapi cuman anaknya yang gak mau, kayak gitu.*

*Begitu yo setiap kali kesini ya tak ajak omong, tak ajak omong masalah itu, ya akhirnya dia bisa berubah ya Alhamdulillah sih” (Wawancara Pendamping P).*

Secara sosiologis maupun psikologis, dialog dibutuhkan untuk membuka diri terhadap pihak lain dengan mendasari pada prinsip-prinsip berikut: *pertama* keterbukaan terhadap pihak lain, *kedua* memberikan tanggapan serta kerelaan untuk berbicara dengan pihak lain, dan *ketiga* saling percaya bahwa kedua belah pihak saling memersempikan informasi yang benar dengan caranya sendiri (Ghazali, 2016). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penanaman sikap tasamuh dialog atau diskusi merupakan salah satu strategi yang tepat untuk digunakan sehingga antara sesama anak didik maupun dengan pendamping saling bertukar ilmu dan pengalaman agar terciptanya tali persaudaraan dan kekeluargaan yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling memberikan masukan sebagai proses penyelesaian problematika yang dihadapi.

#### **Keteladanan dan Praktik Langsung.**

Menurut Hidayat dan Nasution (2016), keteladanan atau percontohan dari pendamping dalam pendidikan anak-anak merupakan salah satu cara yang dapat digunakan agar anak didik dapat melihat, menyaksikan, dan meyakini cara yang seharusnya dan sebenarnya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. Keteladanan merupakan salah satu cara yang dianjurkan Nabi Muhammad saw dalam mengajarkan kebaikan dan kebenaran pada orang lain, dalam sebuah hadits sabda Rasulullah saw sebagai berikut: “...*Mulailah dari diri sendiri*”, hadits ini menjelaskan bahwa apabila kita menginginkan agar orang lain melakukan kebaikan hendaknya maka malailah dari diri kita yang mengerjakannya (Hidayat dan Nasution, 2016). Sebagaimana hal ini dilakukan di rumah baca Alam Kalijaga dengan memberikan contoh: “...*mengalir kok yo, jadi membiasakannya itu lebih ke mencontohkan mungkin yo, saya seperti ini terus mereka ikut gitu. Yang saya sudah lakukan mungkin seperti itu. Saya itu gak pernah nyuruh jadi kerjasama itu mereka sudah terbangun sendiri, saya menyontohkan mereka ikut itu saja. Jadi saya lebih enak kayak gitu keran pribadi saya itu saya gak suka menyuruh, gak suka tukang konkon ngena-ngene gak begitu saya. Jadi saya melibatkan anak-anak ya saya menyontohkan dulu*” (Wawancara Pendamping AZA).

Penerapan strategi keteladanan atau percontohan dari Pendamping di rumah baca Alam Kalijaga dilakukan berbarengan dengan memberikan nasehat dan arahan. Dalam Islam memberikan arahan dan nasehat merupakan salah satu anjuran agama, tidak hanya pada sesama agama namun juga sebagai sesama manusia. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits Rasulullah saw yang dikisahkan oleh ‘Alqamah bin S’ad bin Abdurrahman bin Abza,

dia menerima hadits ini dari ayahnya, yang bersumber dari kakeknya Abdurrahman bin Abza ra. Arti dari hadits yang dimaksud adalah “...*demi Allah, suatu kaum hendaknya mengajari kaum yang lain, memberi mereka pemahaman, memberikan mereka pemahaman, mencerdaskan mereka, menganjurkan mereka berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Begitu juga, suatu kaum hendaknya belajar dari kaum lainnya, berusaha mencari pemahaman dan meminta nasehat dari mereka.*” (Ghuddah, 2018).

Menurut Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam Nasir dkk (2021), keteladanan memiliki pengaruh yang kuat dan membekas dalam jiwa, lebih mudah dipahami, diingat, dan menarik perhatian untuk diikuti dan dicontoh. Begitupun dengan tindakan atau praktek langsung adalah cara yang sesuai dengan fitrah mengajar itu sendiri (Nasir. dkk, 2021). Sebagaimana hal ini dilakukan MI di rumah baca Alam Kalijaga, “...*yang pasti tugas kami itu memberi contoh, kemudian memberi apa namanya dikandani, dinasihati. Itu latar belakangnya anak-anak itu banyak yang keluar dari budaya adab, misalnya kulonuwun, terus permisi Pak, kemudian yang kental dengan tata karma ya kalau di Jawa itu.* (Wawancara Pendamping MI). Berdasarkan pembahasan ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keteladanan merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menanamkan sikap tasamuh pada anak didik yang dapat dibarengi dengan nasehat dan arahan. Dalam penerapannya dapat dimulai dari percontohan secara langsung dari guru atau pendamping sehingga dapat ditiru atau diikuti oleh anak didik.

#### **Permainan dan Kelaborasi Kegiatan.**

Setiap orang memiliki berbagai cara untuk memperoleh dan mengembangkan keahliannya, oleh karena itu dalam pembelajaran dibutuhkan berbagai cara dan strategi yang dapat mengakomodasi berbagai keahlian dan kecerdasan yang dimiliki anak didik (Maulidah, 2019). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui permainan bersama atau kelaborasi kegiatan yang melibatkan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Sebagaimana hal ini dikatakan P selaku pendamping di rumah baca Alam Kalijaga. “...*jadi kita biasane juga undang anak-anak dari Metro kayak gitu. Kemaren juga pas waktu ada acara itu, mas Ihsan juga menghubungi anak-anak dari Temanggung, semuanya ke sini. Terus kemaren kan ada acara shelawatan itu kita kan ngundang anak-anak rebana juga. Ya itu salah satu hubungan kita dengan pihak-pihak musik lain sih, kayak gitu*” (Wawancara Pendamping P).

Melalui kelaborasi memungkinkan setiap anak didik dari berbagai latar belakang dan kecerdasan dapat terlibat untuk mengakses berbagai bahan materi yang relevan dalam mendukung perkembangan kreatifitas dan produktifitas anak didik (Maulidah, 2019). Melalui kelaborasi juga memungkinkan seorang guru atau pendamping dapat mendekati

lebih awal terhadap kemampuan dan kemajuan peserta didik dalam pembelajaran (Maulidah, 2019). Di rumah baca Alam Kalijaga hal ini dilakukan dengan bermain bersama. Sebagaimana hal itu dikatakan AZA saat wawancara "...lewat mainan. Lebih ke diri ya mungkin, kita berkolaborasi bermain, contoh kecil kita kemaren bermain sepedaan, dari seluruh Sidogede –seluruh kelurahan, ada yang dari Dusun sebelah. Lah di situ bisa jalan barang, karna emang saya tujuannya ke situ gali sejarah kan. Mungkin saya mengenalkan sajarah pada mereka biar tahu, antara orang mengetahui tentang sejarah itu kan berbedah-bedah ya mungkin, lah jadi di situ bisa saling tahu gitu lo. Misalkan contoh jalan kereta itu kan ada yang benar-benar gak, tahu ada yang tahu. Jadi di situ saling terbuka bercerita jadi tahu, sama-sama tahu, terbukanya lewat itu. Perbedaannya kelihatan semua lewat itu" (Wawancara Pendamping AZA).

Menurut LM, HM, HA, DR, EF, dan AZ, bahwa yang mereka lakukan di rumah baca Alam Kalijaga adalah ziarah dan dilanjutkan dengan kegiatan bersama agar mereka saling mengenal dan saling belajar. "...iya kasih di kasih tahu ada kegiatan ini. Itu kan kegiatan kelaborasi antara teman-teman Dusun sini sama Dusun sana jadi satu kegiatan. Jadi tujuannya itu biar teman-teman atau adek-adek bermain dengan wilayah sini, bermain dengan wilayah sana". Selain itu mereka juga saling belajar dalam kegiatan ziarah bersama. "...senang-senang, bisa mendoakan orang yang meninggal, membaca tahlil bersama, mencontohi sifat-sifat orang yang ziarah kubur, belajar membaca tahlil". Menurut hasil dari penelitian Rani Nugraheni dkk (2021) mengungkapkan bahwa kemampuan kelaborasi ketika anak-anak bermain bersama kelompoknya adalah anak akan belajar saling menghargai dan memahami perbedaan dalam kelompoknya.

Selain strategi penanaman sikap tasamuh di rumah baca Alam Kalijaga, dari hasil penelitian lapangan juga ditemukan bahwa sikap tasamuh yang ditanamkan melalui aktivitas rumah baca Alam Kalijaga adalah bersikap empati, saling menghormati dan menghargai, saling berbagi, tolong menolong, kerjasama, kejujuran, dan mencintai lingkungan sekitar.

Tabel 2 Sikap Tasamuh yang ditanamkan di rumah baca Alam Kalijaga.

**SIKAP TASAMUH**

Bersikap Empati
Saling Menghormati dan menghargai
Saling berbagi
Tolong-menolong
Kerjasama
Kejujuran
Mencintai lingkungan sekitar

Sumber: Data Hasil Tempuan Lapangan Penanaman Sikap Tasamuh Melalui Aktivitas rumah baca Alam Kalijaga.

**Bersikap Empati.**

Empati berkaitan dengan kemampuan individu untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga dapat mengerti dan memahami yang dirasakan dan dialami oleh orang lain (Winangsih. dkk, 2018). Menurut MI pada saat wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa sikap empati yang coba ditanamkan pada anak didik rumah baca Alam Kalijaga adalah suatu upaya untuk menghidupkan kembali budaya kepekaan masyarakat setempat yang mulai semakin luntur dan ditinggalkan oleh generasi sekarang yang cenderung individualis. "...lebih ke menguatkan rasa empati, peka. Sekarang yang mulai hilang di masyarakat kan peka, kalau di Dusun-dusun masih peka, misalnya secara otomatis kalau misalnya ada tetangga yang kena musibah ya secara otomatis masih ke situ. itu kan sudah otomatis itu. ada orang meninggal otomatis ke situ. Kalau kota kan nggak, mungkin sudah bergeser, itu yang mulai di uri-uri di bawah itu cuma seperti itu, meneruskan kepekaan" (Wawancara Pendamping MI)

Sebagaimana ditegaskan Borne dalam Meilani dan Izzati (2019) bahwa individu yang memiliki sikap empati yang tinggi memiliki sikap toleransi, peduli, kasih sayang, membantu orang lain, peka terhadap orang lain, serta mampu mengendalikan amarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap empati diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, sehingga kehidupan yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong-menolong dapat tercapai. Maka dengan sendirinya keharmonisan dapat terwujud dan sikap yang saling melukai, diskriminasi, dan individualis atau anti sosial dapat dihindari.

**Saling Menghormati dan Menghargai.**

Menurut Efendi dalam Ghofir (2017), bersikap toleran secara sederhana berkaitan dengan sikap menghargai terhadap kemajemukan. Menurut Ghofir (2017) menghargai terhadap kemajemukan berarti mengakui bahwa kemajemukan dan perbedaan dalam kehidupan merupakan takdir Illahi, bukan rekayasa manusia, dengan demikian kesadaran manusia akan kemajemukan tidak hanya melulu dan berhenti pada tataran mengakui eksistensi dan hak-hak orang lain, lebih dari itu yaitu adanya terlibatan secara langsung dalam upaya mengetahui dan memahami adanya kemajemukan dan perbedaan, serta tidak membiarkan adanya praktik-praktik yang mendiskriminasi. Sejalan dengan pernyataan ini, Syarif Yahya (2017), dalam bukunya berjudul "Fikih Toleransi" menegaskan bahwa prinsip paling asasi dalam kehidupan sosial adalah saling menghargai. Toleransi adalah sebuah sikap atau sifat yang menghargai dan menghormati perbedaan (Effendi. dkk, 2021).

Hal serupa juga dikatakan Irsyada dan Az-Zafi (2020) dan Tafsiruddin (2020) toleransi merupakan suatu perilaku atau akhlak manusia yang tidak menyalahi peraturan, ditunjukkan dengan saling

menghormati dan menghargai dalam perbedaan. Lanjut Irsyada dan Az-zafi (2020), dalam berhadapan atau bertatap langsung dengan orang yang berbeda pendapat maka seorang akan diuji kesabarannya yaitu harus bisa menampakan sikap menerima perbedaan pada orang lain dengan saling menghargai dan menghormati serta sikap menahan diri dan sabar.

Dari data hasil wawancara dan observasi di rumah baca Alam Kalijaga berkaitan dengan sikap saling menghormati dan saling menghargai ditanamkan pada anak didik rumah baca melalui kegiatan rutin dan kegiatan non rutin. Sebagaimana hal ini dikatakan GAH salah satu anak didik yang peneliti wawancarai: "...iya disuruh agar saling menghormati" (Wawancara anak didik GAH). Hal ini dilakukan dalam kegiatan tanam-menanam yang merupakan kegiatan rutin di rumah baca Alam Kalijaga. Menurut GAH dan MDNC nilai kehidupan yang dapat diambil selama mengikuti kegiatan di rumah baca alam kalijaga yaitu: "...saling menghormati pada orang tua dan bekerjasama" (Wawancara anak didik GAH). "...kalau ketemu orang yang lebih tua kita harus menyapa terus rembulan, yo ngonten niku, ya kita harus menghormati orang tua, kita harus saling menyapa" (Wawancara anak didik MDNC).

Dalam toleransi sikap saling menghargai didasarkan pada keyakinan bahwa tidak boleh ada pemaksaan kehendak dan kebenaran menurut pandangan atau tafsiran sendiri kepada orang atau golongan lain, dengan demikian diharapkan kehidupan harmonis dalam keragaman dan perbedaan dapat terwujud (Afkari, 2020). Oleh karena itu sikap saling mencurigai dan saling membenci serta saling merebut pengaruh merupakan salah satu akibat dari tidak adanya sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya dan tidak akan ada sikap saling menghormati sesama manusia bila tidak ada saling mengerti (Amir dan Hakim, 2018). Penghormatan terhadap keragaman mengandung makna bahwa setiap orang dituntut untuk mampu melihat perbedaan pada orang atau kelompok lain sebagai suatu yang seharusnya tidak harus dipertanyakan, karena itu karakteristik yang ada pada orang lain semestinya dipandang sebagai bagian yang memberikan kontribusi pada semakin meluas dan kayanya kebiasaan dan budaya secara keseluruhan (Zaki, 2018). Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap saling menghormati dan menghargai merupakan sikap yang perlu dimiliki dalam kehidupan yang dilatarbelakangi berbagi perbedaan sehingga terwujudnya keharmonisan dan terciptanya kebebasan berinovasi yang dapat memberikan kontribusi bagi keberlanjutan peradaban umat manusia.

### **Saling Berbagi**

Menurut Husin Al-Munawwar dkk (2021) dalam buku "Islam Menyejukkan" menyebutkan bahwa salah satu ciri dari orang yang berjiwa toleransi adalah mau berbagi ilmu dan pengalaman.

Sikap saling berbagi yang ditanamkan di rumah baca alam kalijaga ialah saling berbagi perihal tugas dan ilmu serta pengalaman, baik itu dalam kegiatan rutin maupun non-rutin. Hal ini sebagaimana dikatakan MDNC selaku salah satu anak didik di rumah baca Alam Kalijaga mengenai pembiasaan saling berbagi dalam kegiatan perbonsaian atau tanam-menanam. "...nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari kegiatan perbonsaian tersebut adalah suka memberi, memberi ilmu, memberi bahan bonsai dan segala macam, mungkin itu saja" (Wawancara Anak Didik MDNC). Saling berbagi ilmu dan pengalaman dilakukan dalam kegiatan rutin, hal itu juga dilakukan di luar kegiatan rutin rumah baca Alam Kalijaga. "...selain mengerjakan tugas bersama yaitu bermain musik bersama-sama, juga nongkrong bersama-sama, ya nongkrong itu dalam hal bercerita, berbagi pengalaman dan ngopi-ngopi bersama-sama dan banyak hal lain-lain mas" (Wawancara Anak Didik MDNC).

Fajri Sodik (2020) mengatakan bahwa berbagi mampu menjadi alat pemersatu bangsa dari berbagai perbedaan latarbelakang. Lanjutnya untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis, penuh rasa toleransi dan menjauhkan dari sifat buruk seperti individualistik dan egoistik yang tidak lagi mempedulikan lingkungan sekitar diperlukan penanaman budaya saling berbagi (Sodik, 2020). Jadi disimpulkan bahwa sikap saling berbagi di rumah baca Alam Kalijaga tercermin dari kegiatan rutin dan di luar kegiatan rutin. pentingnya sikap saling berbagi diharapkan sikap individualistik dan egoistik yang mau benar sendiri pada diri anak didik dan pendamping rumah baca Alam Kalijaga dapat terminimalisir. Dengan demikian diharapkan konflik kepentingan dan monopoli kebenaran oleh orang atau kelompok tertentu dapat terhindari.

### **Tolong Menolong.**

Tolong menolong merupakan salah satu karakter sosial yang terpuji secara universal (Mustafida, 2020). Manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena naluri manusia untuk tergantung pada orang lain inilah yang memunculkan sikap toleransi (Sodik, 2020). Sikap tolong menolong yang diajarkan melalui aktivitas rumah baca Alam Kalijaga adalah sikap tolong-menolong dalam hal membagi ilmu dan saling membantu. "...nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari kegiatan perbonsaian tersebut adalah saling tolong menolong dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terus suka memberi, memberi ilmu, memberi bahan bonsai dan segala macam, mungkin itu saja" (Wawancara Anak Didik MDNC).

Tolong-menolong merupakan salah satu sikap yang dibutuhkan dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan harmonis (Fajri, 2020: 10). Nilai tolong-menolong dalam Islam disamakan

dengan konsep *ta'awun* yang didasarkan pada QS Al-Maidah ayat 2 (Mustafida, 2020). “.....*dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*” (QS Al-Maidah: 2). Menurut Abbudin Nata sebagaimana dikutip Mustafida (2020) mengatakan bahwa Al-Qur'an memberikan isyarat tentang pentingnya menciptakan suasana saling menolong dan membantu agar kegiatan manusia dalam tercapai secara maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap tolong menolong sebagai salah satu sikap yang dibutuhkan dalam mewujudkan kehidupan yang toleran dan terciptanya tatanan kehidupan yang diharapkan atau dicita-citakan bersama.

### **Kerjasama.**

Menurut Karwadi, sebagaimana dikutip Ghofir (2017), dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kerjasama merupakan salah satu bentuk toleransi. Sebagaimana ditegaskan Machasin (2011) bahwa manusia sebagai individu maupun kelompok memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan karena itu musti menjalin hubungan dan bergaul dengan orang lain. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain (Wahyuni, 2020). Menurut Habibi (2015) masyarakat yang diharapkan dalam Islam adalah masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kebaikan dan petunjuk Allah, merupakan masyarakat yang selalu kerjasama serta bahu-membahu dalam membangun kebaikan masyarakat dan memerangi kejahatan serta diskriminasi.

Kerjasama adalah sama-sama atau gotong-royong untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama melampaui hambatan psikologis karena perbedaan, dengan demikian dapat memberikan kontribusi positif dan memiliki makna yang kongrit bagi keberlangsungan hidup berkemasyarakatan (Ghofir, 2017). Toleransi seperti inilah diharapkan dapat mewujudkan suatu tatanan kemasyarakatan dan kerjasama yang harmonis antar elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan sebagai hambatan dalam kerjasama kemasyarakatan (Ghofir, 2017). Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan Nabi Saw ketika bersama sahabat-sahabatnya sebagaimana dikatakan Quraish Shihab sebagai berikut:

“.....*suatu ketika Nabi Saw dengan para sahabat merasa lapar, dan mereka sepakat untuk makan bersama. Salah satu orang di antara mereka berkata “Saya mencari kambingnya”. Yang lain berkata, “Saya yang akan menyembelihnya”. Yang ketiga berkata, “Saya yang mengulitinya”. Yang keempat berkata, “Saya yang akan memasaknya”. Sedangkan Nabi Saw bersabda, “Saya yang mengumpulkan kayu bakarnya”. Demikian budaya kerja dan*

*kerjasama yang dipraktikkan oleh Nabi Saw dan sahabat-sahabat beliau*” (Shihab, 2014).

Menurut SM kerjasama yang ditanamkan melalui aktivitas rumah baca Alam Kalijaga adalah saling berbagi tugas dalam berkegiatan. “.....*harus bagi-bagi. Nanti ada yang mancing, ada yang nyiapin untuk masak dan ada yang masak dan ada yang beres-beres waktu udah makan*” (Wawancara Anak Didik SM). Sebagaimana ditegaskan LTLH saat wawancara “...*kalau pas masak suruh ambil air, terus ngumpulin kayu-kayu untuk bakar*”. (Wawancara Anak Didik LTLH). Hal serupa dikatakan GAH di rumah baca diajarkan dalam kegiatan sepak bola adalah kerjasama untuk mencapai kemenangan bersama. “...*di sepak bola itu harus kerjasama dengan sekelompok temannya, tidak boleh membentak-bentak, ya saling kerjasamalah*” (Wawancara Anak Didik GAH). Sebagaimana ditegaskan Maznah (2016) bahwa salah satu wujud dari sikap toleransi adalah melakukan kerjasama dengan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama dibutuhkan dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang sebagaimana dikatakan di atas agar konflik karena perbedaan dapat diminimalisir dan terwujudnya kehidupan gotong-royong sebagai bentuk keharmonian dalam kehidupan masyarakat.

### **Kejujuran.**

Kejujuran atau jujur merupakan perilaku yang selalu menjadikan dirinya dapat dipercaya, baik itu dalam hal perkataan maupun tindakan (Afandi. dkk, 2013). Sejatinya kejujuran sangat diperlukan untuk jati diri dan kepentingan bermasyarakat, jujur dianggap bersifat moral, sedangkan dusta dianggap amoral (Rachman. dkk, 2014). Di rumah baca Alam Kalijaga sikap kejujuran ditanamkan pada anak didik agar mereka dalam berhubungan dengan orang lain selalu mengedepankan sikap sportif, adil, tidak curang atau kasar, dan tidak berbohong. “...*jangan suka mencuri dan berbohong, jangan suka menghardik anak yatim piatu*” (Wawancara Anak Didik AZ). “.....*ya seperti dalam kegiatan main catur, main voli, main bola harus sportif jangan curang*” (Wawancara Anak Didik YR). “...*bisa di praktekan, seperti jujur dalam hal keluarga, di sekolah, dan di masyarakat*” (Wawancara Anak Didik YR). sejalan dengan ini, menurut Yahya (2017) dalam tasawuf Islam menganjurkan kesolehan sebagai sikap toleransi batiniyah di antaranya yaitu sabar atau kesabaran, menahan amarah, berbaik sangka, melarang iri, dengki, dan hasutan sebagai pengendalian diri individu. Sejalan dengan itu, sebagaimana ditegaskan Habibi (2015), bahwa toleransi menawarkan kekuatan dalam menjaga hubungan kemanusiaan dan meminimalisir konflik yang terjadi.

Jujur atau kejujuran merupakan salah satu sikap yang penting untuk dimiliki setiap individu dalam membangun komunikasi yang efektif dan hubungan antar manusia yang sehat, dengan

kejujuran maka hubungan yang terjalin akan tetap harmonis dan terciptanya rasa saling percaya (Ghufron dan Royani, 2020). Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri menyebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi serta Tirmidzi menshahihkannya dan lafadz baginya, bahwa kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan akan mengantarkan ke surga: “.....Dari Ibnu Mas’ud RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawahkan pada kebaikan dan kebaikan itu membawahkan ke surga. Dan terus menerus seorang berlaku jujur dan memilih kejujuran sengg dicatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan terus menerus seorang hamba itu berdusta dan memilih yang dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (Ghufron dan Royani, 2020). Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap jujur yang diikuti dengan bersikap sabar atau kesabaran, tidak curang, dan sportif diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang perbedaan, sehingga terwujudnya kehidupan yang harmonis dan terciptanya saling percaya dan kerjasama untuk kehidupan bersama.

#### **Mencintai Lingkungan Sekitar.**

Menurut Mucharomah (2017) Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* mengajarkan kasih sayang pada semua makhluk bukan hanya manusia, tetapi juga binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan serta lingkungan sekitar. Islam sendiri memandang bahwa yang memiliki jiwa bukan hanya manusia, tetapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan yang juga harus dikasihani (Mucharomah, 2017). Sebagaimana ditegaskan Shihab (2014) bahwa dalam Al-qur’an sendiri terdapat ayat-ayat larangan terhadap manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi, misalnya dalam QS Al-A’raf ayat 56, yang artinya: “*dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya*”. Sejalan dengan ini, Machasin (2011) mengatakan bahwa salah satu wujud Islam sebagai rahmat bagi manusia adalah membawahkan manusia dari jalan kesesatan pada jalan yang benar sesuai dengan martabat kemanusiaan seperti tidak merusak lingkungan sekitar, tidak menghabiskan waktu dengan tindakan yang berdasarkan nafsu semata, serta tidak bertanggungjawab dan lain sebagainya. Di rumah baca Alam Kalijaga sikap itu ditunjukkan sebagai berikut: “.....tidak merusak tanaman liar, tidak mencabut tanaman yang tidak bersalah seperti tanaman yang tumbuh subur dirusak sampai mati jadi tidak subur lagi, seperti itu” (Wawancara Anak Didik YR). “.....supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah”(Wawancara Anak Didik DR). Sebagaimana hal itu juga dikatakan YR dan AEK pada saat wawancara: “....arahannya dari kakak-kakak itu

*intinya itu untuk mencintai alam dan tidak merusaknya*” (Wawancara Anak Didik YR). “....ya disiram, di kasih pupuk sama dirawat intinya itu” (Wawancara Anak Didik AEK).

Islam secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan di atas muka bumi, prinsip Islam terkait hubungan manusia dengan lingkungan sekitar dan sluruh sejagat raya adalah upaya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada alam sekelilingnya yang terdiri dari makhluk hidup dan mati (Al-Qaradhawi, 2002). Mencintai lingkungan sekitar yang diwujudkan dengan merawatnya merupakan kewajiban setiap umat manusia. Sebagaimana hal ini ditegaskan (Rachman. dkk, 2014) bahwa kelestarian lingkungan hidup dari berbagai macam pencemaran merupakan tanggung jawab manusia terhadap pemeliharaan hidup dan kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam maupun sosial kehidupan, terkait mencintai lingkungan sekitar merupakan sikap yang harus dimiliki setiap manusia agar kerusakan dan pencemaran lingkungan sekitar dapat dihindari, karena pada dasarnya ketika lingkungan sekitar mengalami kerusakan atau pencemaran maka manusia pula yang akan mendapatkan dampaknya yang pada akhirnya dapat menjadi pemicu terjadinya konflik vertikal maupun horizontal.

#### **4. KESIMPULAN.**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan untuk menanamkan sikap tasamuh di rumah baca Alam Kalijaga yaitu *multiple intelligence* berbasis minat dan bakat, diskusi atau dialog, keteladanan atau praktik langsung, dan permainan bersama atau kelaborasi kegiatan. Sedangkan sikap tasamuh yang ditanamkan melalui aktivitas di rumah baca Alam Kalijaga adalah bersikap empati, saling menghormati dan menghargai, saling berbagi, tolong-menolong, kerjasama, kejujuran, dan mencintai lingkungan sekitar.

Saran dari penelitian ini ditujukan kepada Lembaga Pendidikan yaitu perlu ditingkatkan lagi kerjasama dan kelaborasi kegiatan dengan lingkup yang lebih luas dalam upaya menanamkan sikap tasamuh pada anak didik. Kepada Masyarakat sekitar yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penanaman sikap tasamuh dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Kepada Lembaga Pendidikan Agama Islam yaitu dapat digunakan sebagai bahan diskusi, rujukan, referensi, serta gambaran untuk penelitian selanjutnya.

#### **5. REFERENSI**

Afkari, S. G. (2020). *Model Nilai Toleransi Beragama Dalam Proses Pembelajaran di SMA 8 Kota Batam*. Pekanbaru: Yayasan Salman.

- Afandi, Muhamad. dkk. (2013). *Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah*. Semarang: Unissula Press.
- Al-Qaradhawi, Y. (2002). *Islam Agama Ramah Lingkungan*. (A. H. Shah, Trans.) Jakarta: Al-Kautsar.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. dkk. (2021). *Islam Menyejukkan*. Surabaya: Global Aksara Pres.
- Alvionita, Gena dan Arki Auliahadi. (2020). *Dinamika Islam di Indonesia Awal Abad 21*. Khazana: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam , 10 (01), 23.
- Amir, Saiful dan Andy Hakim. (2018). *Pencegahan Sikap Intoleransi Pada Siswa Melalui Penguatan Pendidikan Pancasila: Studi Kasus SMA PABA Binjai*. Seminar Nasional Pendidikan Dasar, (p. 56). Retrieved Desember 10, 2021, from [https://repository.bbg.ac.id/bitstream/680/1/008\\_SAIFUL\\_AMIR.pdf](https://repository.bbg.ac.id/bitstream/680/1/008_SAIFUL_AMIR.pdf)
- Anshari, M. (2020). *Monitoring Intolerant Behavior In Educational Institutions*. Didaxe , 1 (2).
- Arifin, B. S. (2015). *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Banawiratma, F. B. dkk. (2010). *Dialog antar Umat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Mizan Publika.
- Effendi, Muhammad Ridwan. dkk. (2021). *Menjaga Toleransi Melalui Pendidikan Multikulturalisme*. Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan , 18 (1), 50.
- Fariz Alniezar. dkk. (2019). *Q & A: Belajar Islam, Belajar Toleransi*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Farkhan, M. A. (2018). *Wawasan Al-qur'an Tentang Tasamuh dan Implikasinya dalam Kehidupan Masyarakat Madapangga Kabupaten Bima: Studi Kasus di Desa Monggo*. Makassar: UIN Alauddin.
- Fithriyana, A. (2020). *Strategi Guru BK dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Peserta Didik*. Fokus Konseling , 6 (2).
- Ghazali, A. M. (2016). *Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam*. Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya , 1 (1).
- Ghofir, J. (2017). *Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad saw: Menyingkap Pesan Damai Piagam Madinah*. Yogyakarta: Dialektika.
- Ghuddah, A. F. (2018). *Muhammad Sang Guru: Menyimak Cara Mengajar Rasulullah*. Jakarta: Akses.
- Ghufron dan Ahmad Royani. (2020). *Nilai-nilai Kejujuran dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an: Tela'ah Kitab Safwah al-Tafasir Karya Syekh Muhammad Ali as-Sabuni*. Fenomena , 19 (2).
- Habibi, I. (2015). *Dakwah Humanis: Cinta, Toleransi, dan Dialog Paradigma Muhammad Fethullah Gulen*. Ciputat: Irama Offset.
- Hasanah, N. M. (2019). *Penyelenggaraan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal: Studi Kasus di PAUD Terpadu Salsabila Al-Muthi'in Yogyakarta*. Jurnal of Early Childhood Education and Development , 1 (2).
- Hidayat, Rahmat dan Henni Syafriana Nasution. (2016). *Filsafat Pendidikan Islam: Membangun Konsep Dasar Pendidikan Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia / LPPPI.
- Irawan, D. (2019). *Penanaman Nilai-nilai Toleransi Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Buntok Kabupaten Baruto Selatan: Studi Kasus Pada SMAN 1, SMAN 2, dan SMKN*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Irsyada, Mita Nia dan Ashif Az Zafi. (2020). *Peran Pendidikan Islam Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Anak MI/SD*. Tawazaun: Pendidikan Islam , 13 (2), 146.
- Janah, Umratul. dkk. (2018). *Islam dan Kehidupan Multikultural*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Khayati, N. A. (2019). *Penanaman Nilai-Nilai Toleransi di SMA PIRI 1 Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kusnandar, V. B. (2021, September 15). *Mayoritas Penduduk Jawa Tengah Beragama Islam pada Juni 2021*. Retrieved Desember 9, 2021, from <https://databoks.katadata.co.id/https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/mayoritas-penduduk-jawa-tengah-beragama-islam-pada-juni-2021>
- Machasin. (2011). *Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*. Yogyakarta: LKis.
- Maman Rachman. dkk. (2014). *Padepokan Karakter: Lokus Pembangun Karakter*. Semarang: Unnes Press.
- Maulidah, E. (2019). *Charakter Building dan Ketrampilan Abad 21 dalam Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0. Seminar Nasional PGSD 27 April 2019*. Retrieved 10 Desember 2021, from <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sn-pgsd/article/view/4740>
- Maznah, Nana. dkk. (2016). *Seri Pendidikan Orang Tua: Menumbuhkan Sikap Toleransi pada Anak*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Meilani, Fuji dan Izzati. (2019). *Gambaran Sikap Empati Anak Kelompok B1 Di Taman Kanak-Kanak Islam Daud Khalifatulloh Padang*. Pendidikan Islam Anak Usia Din , 2 (1).
- Mucharomah, M. (2017). *Guru di Era Milenial dalam Bingkai Rahmatan Lil Alamin*. Educasia Dinamika: Jurnal Pendidikan Islam , 2 (2).

- Mustafida, F. (2020). *Pendidikan Islam Multikultural: Konsep dan Implementasi Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Nilai-Nilai Multikultural*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Musthofa. (2019). *Tolerance Of Religious People Between Adherents Of One Religion In The Review Of Tafzir Izwaji*. An-Nuha , 6 (2).
- Nasikhah, Z. (2017). *Penanaman Sikap Toleransi dalam Pembelajaran: Studi Kasus Multisitus SDN Nglegok 01 dan SDN Ngaron 01 Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar* . Tulungagung: PGMI UIN.
- Nasir, Muhammad. dkk. (2021). *Pemikiran Abdul Fattah Abu Ghuddah tentang Metode Keteladanan dan Akhlak Mulia*. Teknologi Pendidikan , 10 (1).
- Nur Agustiningih dan Satriyo Pamungkas. (2017). *Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia*. ISTORIA , 1 (1).
- Nugraheni, Benedicta Rani. dkk. (2021). *Pengembangan Modul Permainan Tradisional Guna Menumbuhkan Karakter Toleransi Anak Usia 6-8 Tahun*. Taman Cendekia , 5 (1).
- Rasyidi, Mohammad dan Mohammad Fuad Al Amin. (2019). *Konsep Toleransi dalam Islam dan Implikasinya di Masyarakat Indonesia*. Madaniyah , 9 (2).
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Shihab, Q. (2014). *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-qur'an* (Vol. Hardcover). Bandung: Mizan Pustaka.
- Sholeh, A. (2014). *Pemahaman Konsep Tasamuh (Toleransi) Siswa Dalam Ajaran Islam*. Pendidikan Agama Islam , 1 (1).
- Sodik, F. (2020). *Pendidikan Toleransi dan Relevansinya dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia*. Tsamratul Fikri , 14 (1), 11.
- Syukur, Abdul dan Agus Hermanto. (2021). *Konten Dakwah Era Digital: Dakwah Moderat*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alabeta.
- Sumai, Sumarni dan Adinda Tessa Naumi. (2019). *Drama Turgi Umat Beragama, Toleransi dan Reproduksi Identitas Bergama di Rejang Lebong*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sumarwoto, N. A. (2015). *Meningkatkan Sikap Empati Melalui Bimbingan Kelompok Berbantuan Teknik Problem Solving Pada Siswa Kelas X.A.5.1 SMK Negeri 1 Jiwon Kabupaten Madiun*. Counsellia: Bombingan dan Konseling , 5 (2).
- Suprastowo, Philip. dkk. (2018). *Menangkal Radikalisme Dalam Pendidikan*. : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Menangkal Radikalisme Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tafsiruddin. (2020). *Pluralisme dan Toleransi Dalam Kehidupan*. Dakwatul Islam , 7 (2), 243.
- Wahyuni, D. (2020). *Anak Muda dan Dialog Keagamaan: Belajar dari Komunitas Jariangan Kerja Antar Umat Beragama di Kota Bandung*. Bogor: Guepedia.
- Winangsih, Wiwin. dkk. (2018). *Meningkatkan Sikap Empati Melalui Metode Mendongeng Pada Anak Usia Dini*. Ceria , 1 (3), 45.
- Wulandari, D. (2015). *Kompetensi dan Karakter Peserta Didik: Persepektif Multiple Intellegences Howard Gerdner*. *Seminar Nasional dan Call Papers Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bisnis dan Manajemen* (p. 295). Malang: Surya Pena Gemilang.
- Yahya, A. S. (2017). *Fikih Toleransi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zaitun. (2016). *Sosiologi Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.
- Zaki, M. (2018). *Menyemai Toleransi Merawat NKRI*. Mataram: Sanabil.

# IMPLEMENTASI KONSEP KEAMANAN INSANI (*HUMAN SECURITY*) DI INDONESIA DALAM KONTEKS DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK

Oleh :

Rivaldo Noval Putra Santosa<sup>1)</sup>, Arief Budiarto<sup>2)</sup>, Yulian Azhari<sup>3)</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>Email: rivaldonoval@gmail.com

<sup>2</sup>Email: arief.budiarto@lecture.unjani.ac.id

<sup>3</sup>Email: azhariyulian6@gmail.com

## Abstrak

Pada dasarnya masalah keamanan insani tidak identik dengan ancaman militer kemiliteran belaka saja. Tetapi ancaman insani ini dapat dimaknai sebagai suatu ancaman yang bertransformasi menjadi bentuk kelaparan dan kemiskinan yang berdampak pada munculnya kekerasan, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung. Di Indonesia saat ini, tren kekerasannya lebih cenderung kepada kekerasan langsung. Kemiskinan dan kelaparan memang bukan penyebab utama terjadinya konflik. Namun, bahwa kemiskinan dan kelaparan adalah sebab tidak langsung terjadinya konflik.

**Kata kunci:** kemanan insani, damai dan resolusi konflik

## 1. PENDAHULUAN

Perbedaan pandangan tentang keamanan manusia berakar dari perbedaan filosofis dan praktis. Intinya, ada perbedaan tajam mengenai apakah keamanan manusia dilihat lebih dalam konteks akibat kekerasan fisik dalam konflik bersenjata dan pelanggaran HAM ataukah lebih dari itu yang mencakup kerentanan dari semua bentuk ancaman, termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam. Tampaknya perdebatan ini tidak akan berakhir, masing-masing mempunyai dasar argumen yang sangat kuat.

Ketika sebuah konsep atau gagasan harus ditransformasi ke dalam suatu kebijakan, maka aspek politik dan operasional harus menjadi variabel penting di dalamnya. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disebut *the degree of human agency dan control*. Kebijakan keamanan manusia dengan demikian akan dilihat dalam konteks proses politik yang mengandung aspek human agency dan control yaitu pencegahan aksi kekerasan yang mungkin dilakukan oleh berbagai aktor terhadap manusia, mungkin negara, kelompok, individu, dan sebagainya. Masalah ini mengandung dua dimensi. Pertama, bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab politik terhadap keamanan individu secara luas. Kedua, perlu integrasi kebijakan keamanan yang harus dirancang secara integratif antar sektor. Penyusunan dan pengembangan Indeks Keamanan Manusia Indonesia merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke-Indonesia-an, yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu: Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan. Dengan demikian, dalam konteks damai dan resolusi konflik. Demensi

yang berkaitan erat adalah terkait keamanan dan kekerasan.

Dengan karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk setiap interaksi di dalam masyarakat memiliki potensi untuk terjadi friksi dan konflik, baik sesama anggota kelompok masyarakat, maupun antarkelompok. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan kelompok di Indonesia yang disebabkan oleh kebencian, ketakutan dengan kombinasi persaingan sosial, ekonomi, dan politik menciptakan potensi konflik sosial baru yang makin mengkhawatirkan keselamatan individu, masyarakat, dan persatuan Indonesia. Berbagai kejadian konflik komunal dan struktural yang terjadi di Indonesia, merupakan ancaman bagi manusia, kelompok masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun dalam konteks Keamanan Manusia di Indonesia, dimensi kekerasan merujuk pada kekerasan langsung, yaitu penggunaan kekerasan secara langsung pada manusia yang menyebabkan korban baik luka, cacat maupun hilangnya nyawa. Penggunaan konsep kekerasan langsung dalam dimensi kekerasan terkait keamanan manusia didasarkan pada argumen Schnabel, bahwa kekerasan langsung (*direct violence*) adalah katalis terhadap ketidakamanan manusia. Definisi kekerasan langsung adalah *avoidable impairment of fundamental human needs or life which makes it impossible or difficult for people to meet their needs or achieve their full potential. Threat to use force is also recognised as violence. Direct violence can take many forms. In its classic form, it involves the use of physical force, like killing or torture, rape and sexual assault, and beatings.*

Dalam "Segitiga Kekerasan" milik Johan Galtung juga dijelaskan bahwa perbedaan kekerasan langsung dengan kekerasan tidak langsung (kultural

dan struktural) salah satunya adalah aspek terlihat dan tidak terlihat. Galtung menyatakan, “*The visible effects of direct violence are known: the killed, the wounded, the displaced, the material damage, all increasingly hitting the civilians. But the invisible effects may be even more vicious: direct violence reinforces structural and cultural violence*”.



Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung

Selain menggunakan teori kekerasan Galtung, kekerasan langsung atau personal/fisik juga mengacu pada beberapa dimensi keamanan dalam keamanan manusia versi UNDP seperti keamanan personal yang bertujuan untuk melindungi manusia dari kekerasan fisik, baik berasal dari negara atau dari ancaman eksternal, baik individu atau aktor subnegara, dari kekerasan dalam rumah tangga, hingga predator, keamanan komunitas, yaitu keamanan terhadap penindasan dari kelompok lain, dan keamanan politik, yaitu keamanan dari represi negara, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian termasuk dalam penelitian eksploratif yaitu dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan yang awalnya peneliti hanya memahami permasalahan yang ada secara umum, baru kemudian peneliti melakukan penelitian. Penelitian eksploratif memiliki masalah yang belum pernah dijejaki, dan berusaha menemukan atau mengungkap permasalahan yang sedang dibutuhkan atau akan diteliti tersebut (Bungin, 2011). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka/literatur yaitu peneliti menelaah secara tekun akan kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian (Nazir, 2014)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Keamanan Insani (*Human Security*) di Indonesia dalam Konteks Damai dan Resolusi Konflik

Masalah keamanan dan ketidakamanan tidak identik dengan ancaman fisik ataupun kemiliteran

belaka. Paul Hoffman (2004) menyebutkan bahwa bagi ratusan juta penduduk dunia saat ini, salah satu sebab timbulnya ketidakamanan (*insecurity*) hidup mereka adalah bukan semata-mata terorisme, namun kemiskinan berlebihan (*extreme poverty*). Saat ini, lebih dari satu milyar penduduk bumi (dari total enam milyar) hidup hanya dengan pendapatan setara satu dollar per hari. Penelitian dari *Peace Research Institute (PRIO) Oslo* dan *Uppsala Conflict Data Program (2002)* menyebutkan bahwa perang sipil (*civil wars*) ataupun konflik internal (*internal conflict*) di suatu negara menyebabkan kematian lebih banyak dari pada konflik bersenjata antara negara (*armed forces*) dengan pemberontak ataupun gerakan separatis. Berbanding 1000 kematian per tahun untuk perang sipil dengan 25 kematian per tahun untuk konflik vertikal antara negara dengan pemberontak ataupun gerakan separatis. Di antara sebab tidak langsung terjadinya perang sipil adalah kemiskinan, kelaparan, ketimpangan distribusi pendapatan, maupun pemindahan paksa (*forced displacement*).

Toms dan Ron (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan nasional berpengaruh sebagai sebab terjadinya konflik. Data statistik menyebutkan konflik berpotensi lahir di negara dengan *Gross Domestic Bruto (GDP)* per kapita rendah. Logika dari asumsi ini adalah bahwa negara miskin kurang memiliki angkatan bersenjata yang efisien dan taat hukum. Angkatan bersenjata malah seringkali memerangi gerakan oposisi. Negara miskin juga cenderung lemah dalam pelayanan sosial namun sebaliknya memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Menyebabkan lahirnya diskriminasi dan ketidaksetaraan (*inequality*) antar rakyat.

Kemiskinan dan kelaparan memang bukan penyebab utama terjadinya konflik. Sedikit sekali penelitian ilmiah yang membuktikan korelasi antara keduanya. Namun, bahwa kemiskinan dan kelaparan adalah sebab tidak langsung terjadinya konflik, tak diragukan lagi. Penelitian PRIO Oslo dan Uppsala (2002) menghadirkan relasi yang jelas antara kemakmuran nasional dengan perdamaian. Hanya satu dari tiga puluh negara terkaya di dunia yang mengalami konflik. Sebaliknya, pada saat yang sama tujuh belas dari tiga puluh satu negara termiskin mengalami konflik.

Asumsi ini dapat membantu menjelaskan sebab terjadinya konflik di Indonesia. Sebagian besar konflik yang terjadi sepuluh tahun terakhir (1998-2008) di Indonesia adalah bukan konflik bersenjata antara negara (TNI/POLRI) dengan gerakan separatis, namun lebih bersifat konflik internal ataupun perang sipil antar pihak dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Poso-Sulteng, Maluku, Sambas-Kalbar, Sampit-Kalteng, dan Sanggau Ledo-Kalbar dalam kurun waktu 1998-2003. Di antara penyebab konflik sipil di tempat-tempat tersebut adalah tidak semata-mata perseteruan etnis ataupun agama belaka. Namun

bercampur dengan kepentingan politik, kemiskinan dan rendahnya pendidikan, serta ketidakpuasan dalam hal distribusi pendapatan. Frances Stewart (2005) menyebutkan: *"although every situation is unique, there are some predisposing cultural, political and economic condition that are conducive to conflict."*

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang ada di dalam pembahasan, adapun kesimpulannya yakni pada dasarnya masalah keamanan insani tidak identik dengan ancaman militer kemiliteran belaka saja. Tetapi ancaman insani ini dapat dimaknai sebagai suatu ancaman yang bertransformasi menjadi bentuk kelaparan dan kemiskinan yang berdampak pada munculnya kekerasan, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung. Di Indonesia saat ini, tren kekerasannya lebih cenderung kepada kekerasan langsung. Kemiskinan dan kelaparan memang bukan penyebab utama terjadinya konflik. Namun, bahwa kemiskinan dan kelaparan adalah sebab tidak langsung terjadinya konflik. Hal ini sejalan dengan penelitian dari PRIO Oslo dan Uppsala (2002) menghadirkan relasi yang jelas antara kemakmuran nasional dengan perdamaian.

#### 5. REFERENSI

- Albrecht Schnabel. 2007. *The Human Security Approach To Direct And Structural Violence, Security and Conflict*. SIPRI
- Allenby, Braden R. "Environmental Security: Concept and Implementation". *Journal International Political Science Review*, Vol. 21, No. 1, 2000.
- Galtung, Johan. 2004. *Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence*. Polylog: Forum for Intercultural Philosophy.
- Human Security Unit, *Human Security In Theory And Practice, An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, New York: United Nations, 2009.
- Indonesia Investment, *Kemiskinan di Indonesia*, <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, diakses pada 10 Agustus 2021.
- Jones, J. F. "Human Security and Social Development". *Journal of International Law and Policy*, Vol. 33.
- Tadjoeddi, Mohammad Zulfan. 2002. *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Kontekstransi: Kasus Indonesia 1990- 2001*. Working Paper 0201, United Nations Support Facility for Indonesian Recovery, Jakarta.
- Thomas, Caroline. 2000. *Global Governance and Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality*. Virginia: Pluto Press.

UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*. New York: United Nations Development Programme

# PERAN MAHASISWA DALAM PERJUANGAN MELAWAN COVID-19 DI INDONESIA MELALUI KONSEPSI ASTAGATRA DITINJAU DARI KARAKTER BANGSA & BELA NEGARA

Oleh :

Yoga Rosmanto<sup>1)</sup>, Djayeng Tirto S.<sup>2)</sup>, I Gede Sumertha KY.<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>Email: yoga.drkunhan@gmail.com

<sup>2</sup>Email: djayengtirto@gmail.com

<sup>3</sup>Email: gedeyanca@gmail.com

## Abstrak

Pandemi Covid-19 di Indonesia terus saja meningkat secara signifikan dari hari ke hari. Signifikansi peningkatan yang terkonfirmasi mencapai 31.867 orang, 4.032 orang dirawat, kemudian 12.511 orang meninggal dunia, serta 285.325 orang sembuh. Hal tersebut berdampak pada berbagai sektor di Indonesia seperti sektor yang paling berdampak yaitu sektor kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya peran serta dari berbagai lapisan masyarakat salah satunya adalah peran dari mahasiswa sebagai salah satu pemuda bangsa yang dapat menerapkan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh melalui penelitian terdahulu dalam bentuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berita dari situs-situs resmi. Peran dan implementasi para mahasiswa di Indonesia dapat melalui analisis astagatra meliputi trigatra dan pancagatra serta melalui penerapan karakter bangsa dan bela negara. Peran serta mahasiswa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara yang tidak terlihat dan cara terlihat. Cara yang tidak terlihat dilakukan dengan menuangkan gagasan-gagasan atau konsep-konsep secara kreatif, efektif, dan efisien dalam menghadapi ancaman Covid-19. Cara yang terlihat yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah di gagas oleh pemerintah, bergabung sebagai relawan Covid-19 baik secara swadaya maupun bergabung dengan lembaga atau instansi yang terkait.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19, Peran Mahasiswa, Astagatra, Karakter Bangsa, Bela Negara

## 1. PENDAHULUAN

Awal kasus Covid-19 di Indonesia adalah pada bulan Maret 2020 kemudian kasus yang terkonfirmasi terus menunjukkan peningkatan hingga pada awal bulan juni tahun 2020, mereka yang terinfeksi oleh Covid-19 di Indonesia sudah lebih dari 39.000 orang (Zulfikri & Imandeka, 2020). Data tersebut terus saja berkembang, hingga pada 18 Oktober 2020 penambahan tersebut telah menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu mereka yang terkonfirmasi mencapai 31.867 orang, 4.032 orang dirawat, kemudian 12.511 orang meninggal dunia, serta 285.325 orang sembuh (Kompas.com, 2020). Terlepas dari data yang terkonfirmasi dan meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia, hal lainnya yaitu timbulnya permasalahan di berbagai sektor. Permasalahan ini muncul dikarenakan adanya dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Banyak sektor-sektor yang mulai kewalahan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini tentunya memerlukan peran serta dari setiap lapisan masyarakat di Indonesia agar Covid-19 cepat berlalu dan sektor-sektor yang terkena dampaknya mulai menemukan pemecahan masalah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan ini adalah dengan

menggunakan peran mahasiswa sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Mahasiswa mempunyai Tri Dharma perguruan tinggi, yang mana didalamnya terdapat nilai Pengabdian Masyarakat. Pengabdian masyarakat dapat dilakukan dengan cara menerapkan konsepsi Astragatra. Dampak-dampak yang terjadi akibat Covid-19 terus saja berkembang sehingga menimbulkan ancaman-ancaman di lingkungan masyarakat. Ancaman-ancaman tersebut harus segera dicarikan jalan keluarnya agar stabilitas keamanan nasional dapat terjaga. Apa saja yang harus dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia dalam penanganan Covid-19 dan bagaimana sumbangsih pemuda-pemudi Indonesia dalam perjuangan melawan covid-19 di indonesia melalui konsepsi Astagatra ditinjau dari karakter bangsa dan bela negara.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, artikel ilmiah dan berita-berita dari website resmi. Penelitian ini akan menggunakan konsep Astagatra untuk menganalisis dan mengkaji karakteristik karakter bangsa dan pertahanan negara. Konsep Astagatra dan karakter negara serta bela negara dapat mengungkap peran

mahasiswa dalam menyikapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pandemi Covid-19 di Indonesia

Virus corona atau Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Orang yang terinfeksi Covid-19 dapat dengan mudah menularkan virus ke orang lain. Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar individu yang terinfeksi Covid-19 melakukan karantina mandiri di rumah atau di rumah sakit.

Penyubarannya telah dikonfirmasi oleh Komisi Kesehatan Nasional China. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melalui Direktur Jenderalnya Tan Desai, mengumumkan dalam konferensi pers pada 11 Maret 2020 bahwa wabah Covid-19 saat ini dapat diklasifikasikan sebagai pandemi global. Tan Desai menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global dikarenakan jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia telah melebihi 121.000. Tan Desai menjelaskan bahwa jumlah kasus di luar China telah meningkat 13 kali lipat dan jumlah negara yang terinfeksi meningkat tiga kali lipat (Utomo, 2020).

Covid-19 menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Orang-orang di lebih dari 200 negara di dunia telah terinfeksi Covid-19 (CNN Indonesia, 2020). Hal ini didukung data dari Johns Hopkins University per 14 April 2020. Lebih dari 1,9 juta orang di seluruh dunia dinyatakan positif Covid-19, lebih dari 119.000 orang meninggal, dan lebih dari 400.000 pasien telah pulih. Peningkatan ini selanjutnya digunakan untuk memprediksi puncak penyebaran Covid-19 akan terus terjadi dan menimbulkan dampak yang merugikan.

Berdasarkan hal tersebut maka berbagai negara mulai mencari upaya agar Covid-19 dapat dicegah penularannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Wuhan sebagai wilayah yang pertama kali terdapat Covid-19 melakukan *lockdown* dan isolasi wilayah secara besar-besaran. *Lockdown* dilakukan agar mereka yang terinfeksi tidak menularkan virus tersebut ke orang lain. Isolasi diri dilakukan agar mereka yang belum terinfeksi atau sudah terinfeksi tidak tertular dan tidak menularkan. Penelitian terus saja dilakukan hingga menghasilkan aturan pencegahan untuk diri sendiri dengan cara menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan perilaku hidup bersih & sehat (KEMENKES RI, 2020).

Pada awal Juni 2020, Covid-19 sudah menginfeksi lebih dari 39.000 orang di Indonesia (Zulfikri & Imandeka, 2020). Data ini terus berkembang sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020, data yang terkonfirmasi telah mencapai 31.867 orang, 4.032 orang dirawat, 12.511 orang meninggal, dan 285.325 orang sembuh (Kompas.com, 2020). Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara dengan lokasi yang sangat strategis yang diapit oleh Asia dan

Australia yang sama-sama berada di samudra Pasifik dan Hindia ini memiliki bandara internasional dan sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia yaitu bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Changi di Singapura memiliki jumlah penerbangan 27.046. Bukan hanya itu, Indonesia memiliki 353 pintu masuk dan perbatasan nasional meliputi bandara, pelabuhan, dan penyebrangan darat (Kemenkes RI, 2020). Dikarenakan kebutuhan ekonomi, pendidikan, politik, budaya, pariwisata dan kegiatan lainnya di Indonesia, maka keluar masuknya WNI dan WNA memudahkan Indonesia dalam penyebaran Covid-19 (Sukmana, Aminuddin, & Nopriyanto, 2020).

Terlepas dari besarnya jumlah korban jiwa di Indonesia yang ditimbulkan dari pandemi ini, banyak sekali dampak yang terasa dari sektor lainnya. Banyak sektor yang ambruk dan perlu melakukan perubahan atau penyesuaian yang tidak mudah. Akibat pandemi ini, berbagai rencana nasional dan daerah harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Setidaknya sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan Kasus 01 di Indonesia pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia merasakan tekanan ini (Wiswayana, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melepaskan tekanan yang dirasakan masyarakat. Misalnya di bidang kesehatan, salah satu yang dikeluarkan adalah protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pada 4 Maret 2020. Sejak saat itu, kebijakan strategis telah dirumuskan di tingkat nasional dan seluruh daerah di Indonesia, kemudian tidak hanya di tingkat kementerian, tetapi juga di tingkat sektoral lainnya.

Bidang lain yang sedang dikembangkan adalah keamanan pangan, pemerintah Indonesia kemudian merilis konsep yang disebut "*food estate*" oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2020. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Secara khusus, pangan merupakan bagian penting dari pertahanan negara (SETKABRI, 2020). Bahkan pemerintah Indonesia melihat Menteri Pertahanan sebagai pemain utama dalam kebijakan industri pangan (Wiswayana & Pinatih, 2020).

Problematisasi lainnya bisa dilihat melalui identifikasi konteks ketahanan nasional melalui konsep Astagrata. Astagrata sendiri merupakan konsep nasional yang mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan ke dalam Tri Gatra yang meliputi geografi, kekayaan alam dan kemampuan penduduk, serta Panca Gatra dan keamanan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan negara (Reksodutomo, 1987).

Dari konsep Astagrata, masalah kesehatan dapat diklasifikasikan sebagai aspek sosial yang terkait dengan sosial/budaya di Panca Gatra. Aspek lain, seperti aspek ekonomi yang terkait dengan gatra ekonomi, dan partisipasi lembaga militer dan keamanan lainnya juga melibatkan gatra pertahanan

dan keamanan. Kritik terhadap penanganan pemerintah terhadap Covid-19 juga masuk ke gatra politik. Menyerukan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan atau berkumpul di tempat ibadah yang berkaitan dengan ajaran komunis, yang termasuk dalam gatra ideologi.

Konsep Trigatra menjelaskan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan di persimpangan dunia dan mau tidak mau akan mengalami pandemi Covid-19. Pulau-pulau ini mungkin terkait dengan gatra kekayaan, dan selama orang-orangnya disiplin dan diawasi, pulau-pulau ini dapat menjadi strategi pencegahan Covid-19. Maka hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan status dan kemampuan penduduk (demografi). Masyarakat dan pemerintah harus menunjukkan kerja sama dalam memerangi Covid-19 agar kita bisa merasakan manfaat dari konsep Astagrata.

Berbicara peran serta masyarakat, pemuda-pemudi Indonesia yakni Mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam melawan Covid-19. Dari ancaman-ancaman yang terjadi munculah dampak-dampak yang mulai berkembang. Ancaman-ancaman tersebut harus segera diselesaikan agar kita semua dapat kembali hidup normal seperti biasanya. Apa saja yang harus dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia dalam penanganan Covid-19 dan bagaimana sumbangsih pemuda-pemudi Indonesia dalam perjuangan melawan covid-19 di Indonesia melalui konsepsi Astagrata ditinjau dari karakter bangsa dan bela negara.

### **3.2 Strategi dan Peran Mahasiswa di Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19**

Covid-19 merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari lagi. Ancaman ini menimbulkan dampak yang sangat serius, dimulai yang paling terlihat adalah aspek kesehatan. Aspek kesehatan inilah kemudian menjadi indikator yang menakutkan bagi seluruh dunia karena tidak tanggung-tanggung efek dari terinfeksi Covid-19 ini adalah kematian. Setiap harinya khususnya di Indonesia ini per tanggal 18 Oktober 2020, data mereka yang terkonfirmasi telah mencapai 31.867 orang, 4.032 orang dirawat, 12.511 orang meninggal, dan 285.325 orang sembuh (Kompas.com, 2020). Berbeda dengan penyakit yang disebabkan virus yang berakibat kematian lainnya, Covid-19 ini memiliki keunikan tersendiri dalam menginfeksi orang yang ada disekitarnya. Namun demikian tidak semua orang yang terinfeksi akan berakhir dengan kematian ada juga yang sembuh dengan cara mengisolasi diri dan memakan-makanan yang bergizi serta selalu menerapkan pola hidup sehat.

Dampak yang terjadi dari ancaman Covid-19 bukan hanya dari aspek kesehatan saja, ancaman ini juga dapat merubah semua tatanan kehidupan serta sistem kenegaraan. Aspek lainnya yang dirasakan dampaknya adalah aspek ekonomi. Banyak pekerja-pekerja swasta yang di PHK akibat dari pandemi Covid-19 ini sehingga menyulitkan mereka untuk

bisa bertahan hidup, terlebih Menteri Keuangan juga pada bulan September 2020 menjelaskan akan adanya resesi. Perlu adanya sinergitas secara bersama dari segala kalangan dan elemen bangsa untuk dapat melawan Covid-19. Indonesia memiliki sistem pertahanan dan keamanan nasional yang didalamnya terdapat konsepsi ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah keadaan bangsa Indonesia yang dinamis, yang meliputi keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan keutuhan, jati diri, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketangguhan dan keuletan tersebut tergantung pada kemampuan mengelola 3 gatra alamiah (Trigatra) dan 5 gatra sosial (Pancagatra). Trigatra dan Pancagatra menjadi indikator dalam pencapaian ketangguhan dan keuletan dalam ketahanan nasional.

Kemampuan dalam mengelola Trigatra dan Pancagatra tidaklah mudah. Dalam ruang lingkup Trigatra, gatra geografi dilihat dari letak Indonesia merupakan negara kepulauan dan berada di persimpangan dunia. Pada letak geografis inilah kemudian Indonesia memiliki peluang yang besar untuk terpapar Covid-19. Berbagai pintu masuk menuju Indonesia pun ada sekitar kurang lebih 353 dan mereka yang masuk ke Indonesia semua berasal dari WNI ataupun WNA. Namun demikian ada kemungkinan yang baik yang akan dirasakan oleh negara kepulauan ini, jika mereka disiplin dan patuh terhadap apa yang menjadi aturan untuk melawan Covid-19 ini, maka semuanya akan baik-baik saja.

Gatra yang selanjutnya adalah gatra kekayaan alam, gatra ini memiliki ke khasan tersendiri yaitu adanya efek menenangkan secara psikis jika dinikmati secara bersama. Kekayaan alam Indonesia begitu Indah misalnya Raja Ampat, Pulau Tidung, Pulau Komodo, dan lain sebagainya. Jika kita belum menng menghadapi Covid-19, maka hal tersebut tidak akan bisa kita nikmati bersama. Yang terakhir adalah gatra kependudukan, gatra ini berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, persebaran penduduk yang ideal, dan kualitas penduduk. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk kita dari segi jumlah menurun akibat Covid-19 dan kualitas penduduk kita juga masih jauh dari yang diharapkan, hal ini terlihat ketika kepatuhan mereka terkait protokol kesehatan harus dipertanyakan.

Pancagatra meliputi gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan serta keamanan. Pada pelaksanaannya disituasi pandemi Covid-19 ini, banyak tantangan dan perubahan yang signifikan pada gatra tersebut. Ancaman dari gatra ideologi adalah munculnya persepsi publik terhadap pembatasan jumlah atau ditiadakannya ibadah-ibadah secara berjemaah pada masa pandemi. Hal tersebut mengancam karena akan merubah ideologi yang sudah ada dan akan berpotensi konflik. Gatra yang selanjutnya dalam situasi yang sekarang adalah gatra

politik, gatra politik tidak kalah penting dalam ketahanan nasional. Sebab, dalam pelaksanaannya politik ini bisa menjadi sumber konflik yang besar jika tidak diselesaikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus di kritisi oleh masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19 yang lamban dan tidak responsif adalah salah satu contoh ancaman dari gatra politik.

Ancaman pada gatra ekonomi menimbulkan polemik begitu besar hingga mengancam perekonomian negara dengan adanya pernyataan resesi dari Menteri Keuangan. Disisi yang lain sistem pendidikan sekarang berubah drastis, yang asal muasalnya bertemu secara tatap muka karena pandemi Covid-19 berubah menjadi daring atau dalam jaringan. Hal tersebut akan merubah segala tatanan kehidupan masyarakat dan mungkin akan berakibat mengancam pada aspek lainnya, misalnya mereka yang dirumah saja secara kecerdasan emosional tidak berkembang dengan baik. Salah satu perubahan itulah mengancam dari sisi gatra sosial-budaya.

Kemudian gatra yang terakhir adalah gatra pertahanan dan kemanan, konsep pertahanan dan keamanan nasional menganut konsep Sishankamrata yang mana maksud dari Sishankamrata tersebut adalah adanya upaya dari seluruh lapisan. Jika kita melihat keadaan pandemi Covid-19 saat ini di Indonesia apakah sudah menerapkan Sishankamrata tersebut dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Banyak fakta-fakta aturan protokol kesehatan yang telah disiapkan dan dibuat oleh pemerintah saja tidak dipatuhi. Padahal keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat adalah gambaran dari Sishankamrata yang baik.

Gambaran diatas menunjukan sebagian kecil adanya ancaman-ancaman yang lainnya dalam situasi pandemi Covid-19. Pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerjasama dengan baik agar ancaman Covid-19 ini segera berakhir dan mengembalikan kestabilan negara. Mahasiswa sebagai bagian dari pemuda-pemudi harapan bangsa harus bisa berperan aktif bukan hanya dalam pemikiran saja tapi juga dalam tindakan yang bisa menjadi contoh bagi kita semua. Hal yang dapat dilakukan oleh Mahasiswa sebagai pemuda-pemudi Indonesia banyak sekali. Dimulai dari, berupaya dalam menerapkan penanganan Covid-19, misalnya jika Mahasiswa seorang dari jurusan humaniora, MIPA dan lain sebagainya bisa membantu menganalisa dan menyelesaikan ancaman yang terkandung dalam Trigatra. Sedangkan mereka yang memiliki jurusan sosial, ilmu politik, manajemen, ilmu pertahanan, dan lain sebagainya bisa membantu dan menyelesaikan ancaman yang terkandung dalam Pancagatra. Atau bisa juga semua multidisiplin ilmu bersatu padu untuk menganalisa dan menyelesaikan ancaman yang sudah dijelaskan.

Bukan hanya hal tersebut, secara umum sebagai Mahasiswa kita juga harusnya memberikan sumbangsih dengan bentuk yang tidak terlihat dan

terlihat. Bentuk yang tidak terlihat adalah pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang dituangkan dalam tulisan yang mampu menyelesaikan ancaman yang terjadi saat ini. Konsep-konsep yang efektif dan efisien pada saat ini diperlukan untuk melawan Covid-19. Ada banyak bentuk yang tidak berwujud dalam menghadapi Covid-19, salah satunya adalah tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan pakai sabun atau cara lainnya adalah dengan bergabung sebagai relawan Covid-19, baik mandiri maupun bergabung dengan instansi atau organisasi terkait. Kemudian dapat menjadi pendorong untuk dapat menjaga jarak seperti dengan menjaga jarak minimal 1 meter.

Sebagian orang percaya bahwa kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah di beberapa daerah merupakan peluang besar untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Inilah peran anak muda, yaitu membantu orang-orang di sekitar mereka untuk menghilangkan pemikiran yang "kuno". Revolusi mental itu sangat penting, harus dimulai dari diri kita sendiri dan menyebar ke orang-orang terdekat kita, mendidik keluarga dan teman-teman terdekat kita, dan menyampaikan kepada mereka bahwa Covid-19 bukanlah hal yang patut diremehkan.

Pemuda harus menjadi agen perubahan, yaitu mendorong dunia untuk berubah menjadi lebih baik melalui efektivitas, peningkatan dan pengembangan teknologi, memperkuat, mendorong dan mendorong pendidikan sebanyak mungkin, dan mendesak tindakan pencegahan sesering mungkin yang salah satunya dengan mengingatkan pentingnya tinggal di rumah. Menjadi relawan yang mendukung kebutuhan makanan dan obat-obatan dengan tetap menjaga prinsip pembatasan fisik. Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah minta bantuan keluarga, teman, dan tetangga untuk membantu atau gunakan layanan online, apabila ada hal yang menjadi kendala maka dapat diarahkan melalui RT/RW setempat. Bukan hanya mengingatkan orang lain namun juga jangan lupa untuk selalu memperhatikan kondisi kita sebagai pemuda-pemudi penggerak perubahan.

#### 4. KESIMPULAN

Peran Mahasiswa bisa dilakukan dengan dua cara yaitu cara yang tidak terlihat dan cara yang terlihat. Cara yang tidak terlihat dilakukan dengan penuangan gagasan-gagasan atau konsep-konsep secara kreatif, efektif, dan efisien dalam menghadapi ancaman Covid-19. Cara yang terlihat yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah di gagas oleh pemerintah, bergabung sebagai relawan Covid-19 baik secara swadaya maupun bergabung dengan lembaga atau instansi yang terkait. Menjadi penggerak *physical distancing*, lakukan *physical distancing* sebaik-baiknya, dan sebarkan informasi secara masif mengenai bahaya Covid-19 dan bagaimana cara menanganinya. Revolusi mental itu penting, hal tersebut harus dimulai dari diri kita

sendiri dan mulailah menyebarkan dengan orang-orang yang terdekat dengan kehidupan kita, teman-teman terdekat kita dan sampaikan kepada mereka secara baik-baik bahwa Covid-19 ini bukan hal yang patut diremehkan.

Sumbangsih dan peran Mahasiswa sebagai pemuda-pemudi Indonesia tidak akan terlaksana jika kita sebagai Mahasiswa tidak sadar betul terkait dengan bahaya ancaman Covid-19 ini terlebih ketika kita akan menjadi penggerak perubahan bagi sekitar maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki dan memantaskan diri terlebih dahulu agar mereka yang dipengaruhi oleh kita bisa mengikuti apa yang seharusnya dilakukan. Berhentilah untuk menyalahkan keadaan dan mulailah untuk merancang demi masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan khususnya untuk negeri tercinta, Indonesia

## 5. REFERENSI

- CNN Indonesia . (2020, April 14). *Negara-negara yang Sudah Capai Puncak Pandemi Virus Corona*. Diambil kembali dari CNN Indonesia :  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200413234913-134-493234/negara-negara-yang-sudah-capai-puncak-pandemi-virus-corona>
- KEMENKES RI . (2020). *Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: KEMENKES RI .
- Kompas.com. (2020, Oktober 18). *DATA COVID-19 DI INDONESIA*. Diambil kembali dari Kompas.com:  
<https://www.kompas.com/covid-19>
- Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M. P. (2019). *Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*. Diambil kembali dari staff.blog.ui.ac.id:  
<https://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2012/09/astagatra-pancagatra.pdf>
- Reksohutomo, W. (1987). Meningkatkan Ketahanan Nasional Dalam Bidang Sosial-Budaya Lewat Jalur Mahasiswa. 1(1).
- SETKABRI. (2020, Juli 14). *Bukan Hanya Alutsista, Presiden: Ketahanan Pangan Bagian dari Pertahanan* . Diambil kembali dari setkab.go.id: <https://setkab.go.id/bukan-hanya-alutsista-presiden-ketahanan-pangan-bagian-dari-pertahanan/>
- Sukmana, M., Aminuddin, M., & Nopriyanto, D. (2020). Indonesian Government Response In COVID-19 Disaster Prevention. *East African Scholars Journal of Medical Sciences*, 81-86.
- Utomo, A. P. (2020, Maret 12). *WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global*. Diambil kembali dari Kompas.com:  
[https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all#:~:text=JENEWA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Organisasi,11%2F3%2F2020\)](https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all#:~:text=JENEWA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Organisasi,11%2F3%2F2020))
- Wiswayana, W. M. (2020). Wabah Covid-19 di Indonesia: Ancaman dan Sistem Pertahanan Negara. *Glokalisasi: Gerakan Sosial, Kewargaan dan Komunitas Lokal* , p. XVIII+160.
- Wiswayana, W. M., & Pinatih, N. D. (2020). *Pandemi Dan Tantangan Ketahanan Nasional Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*.
- Zulfikri, & Imandeka, E. (2020). Prevention Strategy Of Covid-19 In Indonesian Prisons. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*, 2020, 37-42.

# MANFAAT EDUKASI VIDEO GENNY TENTANG PENGETAHUAN BAHAYA KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR

Oleh :

**Irwanti Gustina<sup>1)</sup>, Mella Yuria<sup>2)</sup>, Maryuni<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Binawan

<sup>1</sup>email: irwanti@binawan.ac.id

<sup>2</sup>email: mella@binawan.ac.id

<sup>3</sup>email: maryuni@binawan.ac.id

## Abstrak

Angka kekerasan terhadap anak masih tinggi di Indonesia, Survei nasional yang dilakukan terhadap anak yang dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menemukan bahwa 62% anak perempuan dan lelaki mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat edukasi video Genny tentang pengetahuan bahaya kekerasan seksual pada siswa sekolah dasar, Metode dalam Penelitian ini menggunakan desain *Quasi eksperimen* dengan menggunakan *one group pre-post test*. dengan jumlah sampel sebanyak 50 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner melalui *google form* yang diisi sebelum dan setelah menonton video edukasi genny. Hasil analisis menggunakan *wilcoxon tes* terdapat perbedaan antara hasil uji *pre test* sebelum diberikan edukasi melalui video dibandingkan dengan nilai *post tes* setelah dilakukan edukasi melalui video, diperoleh nilai *p-Value* sebesar 0,000 artinya secara statistic terdapat hubungan antara efektifitas pembelajaran melalui video kekerasan anak Genny dengan pengetahuan murid sekolah dasar.

**Kata Kunci:** *Pengetahuan, kekerasan seksual, video genny*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta menandatangani Deklarasi World Fit For Children (WFC) pada sidang Umum PBB ke- 27 pada tanggal 2 s/d 8 Mei 2002. Terwujudnya anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas dan ceria, berahlak mulia dan terlindungi dari deskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, Indonesia aktif berpartisipasi dalam sebuah kebijakan nasional yang diberi nama Program Nasional Bagi Anak Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat baik melalui kesepakatan global dan perencanaan nasional, untuk melindungi anak Indonesia dari Kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi (Unicef, 2020).

Laporan akhir tahun (2013) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sebanyak 3.023 kasus pelanggaran hak anak terjadi di Indonesia dan 58 % atau 1.620 anak jadi korban kejahatan seksual. Sekretaris Jenderal Komnas PA Samsul Ridwan mengungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah tahun 2013 meroket tajam hingga mencapai 60%. Secara garis besar kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi, dan seringkali anak dan perempuan sebagai objek pelampiasan dari kekerasan seksual.

Peluang terjadinya kejahatan seksual dapat bermula dari maraknya situs online dan terbukanya aplikasi video yang mengandung konten pornografi, situasi psiko sosial masyarakat yang terpuruk akibat situasi pandemi seperti sekarang ini.menambah

catatan kriminalitas yang berdampak pada kekerasan anak termasuk kejahatan seksual pada anak.

Di negara Indonesia UU kekerasan seksual anak belum dirumuskan lebih spesifik, saat ini jika terjadi kasus pelanggaran seksual pada anak dan sipelaku hanya dijerat dalam UU Perlindungan Anak no 23 tahun 2002 (Ismantoro, 2015).

Setiap anak korban kekerasan seksual akan memiliki trauma psikologid dalam kehidupannya, dampak Psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah Depresi, Fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama (Ermaya,2018).

Saat ini telah berdiri beberapa lembaga (LSM) terkait pengaduan tindak kekerasan anak maupun kejahatan seksual. Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Yayasan Pulih Indonesia merupakan dua diantara lembaga-lembaga yang menaungi dan bergerak bersama untuk menanggulangi ancaman krisis dari tindak kekerasan tersebut.

Situasi Pendidikan Indonesia saat ini tengah berada dalam ancaman dari krisis pandemi covid 19, seluruh siswa mulai dari siswa sekolah dasar hingga siswa menengah atas maupun di level perguruan tinggi adalah pengguna aktif gadget. Kesibukan orang tua karena tidak selalu dapat memantau langsung kegiatan penggunaan gadget pada saat diluar jam sekolah membuat peluang terjadinya kekerasan seksual.

Untuk mengurangi dan mengentaskan kasus kekerasan anak dan kejahatan seksual, berbagai

lembaga berperan aktif untuk mengurangi resiko tersebut, Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga (LSM) diantaranya adalah kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang ciri-ciri kekerasan maupun kejahatan seksual dan cara menghindarinya. Selama masa pandemi kegiatan tersebut dilakukan secara virtual.

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 9 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan Perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain *Quasi eksperimen* dengan menggunakan *one group pre-post test*. dengan jumlah sampel sebanyak 50 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner melalui *google form*. Populasi adalah siswa SDN Cimuning 3 Bekasi sebanyak 50 siswa, sedangkan sampel penelitian menggunakan teknik total sampling, yaitu peserta yang mengikuti kegiatan intervensi menonton video edukasi kekerasan anak Genny. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner yang telah diinput didalam *google form* yang dibagikan saat pre dan post menonton video tersebut. Proses pengolahan data menggunakan *wilcoxon tes*, setelah uji chi-square data tidak terdistribusi normal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisa Univariat

**Tabel 1 Distribusi Pengetahuan Responden**

Kategori	Sebelum perlakuan		Setelah perlakuan	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
pengetahuan Baik	0	0	8	16
Cukup	36	72	42	84
Kurang	14	28	0	0
Total	50	100	50	100

Berdasarkan distribusi data pengetahuan siswa saat pre test, siswa yang memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 72%, sedangkan siswa yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 28%, dan berdasarkan distribusi data pengetahuan siswa setelah menonton video (post test), siswa yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 16%, sedangkan siswa yang memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 84%.

**Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Ibu Bekerja**

Kategori Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ibu bekerja	18	36
Ibu tidak bekerja	32	64
Total	50	100

Berdasarkan distribusi data siswa yang memiliki Ibu yang bekerja sebanyak 36%, sedangkan siswa yang memiliki ibu yang tidak bekerja sebanyak 64%.

**Tabel 3 Distribusi Pendidikan Ibu Responden**

Kategori Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tamat SMU	28	56
Tamat PT	22	44
Total	50	100

Berdasarkan distribusi data pendidikan Ibu, siswa yang memiliki ibu yang berpendidikan tamat SMU sebanyak 56%, sedangkan siswa yang memiliki ibu dengan pendidikan tamat PT sebanyak 44%.

**Tabel 4 Distribusi Responden Tinggal serumah**

Kategori Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Dengan orang tua	48	96
Dengan Kerabat	2	4
Total	50	100

Berdasarkan distribusi data siswa yang tinggal serumah dengan Orang tua sebesar 96%, sedangkan siswa yang tinggal dengan kerabat sebesar 4%.

## Pembahasan

### 1. Pendidikan ibu

Menurut Nototmodjo (2012), Pendidikan mempengaruhi proses belajar, dimana makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi sehingga makin banyak seseorang mendapatkan pengetahuan. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media masa, semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan (Notoatmodjo, 2012).

Dalam hal ini pendidikan ibu menjadi karakteristik definitive dalam kontribusi memberikan asuhan atau pendidikan kepada anak dirumah, sesuai dengan pendapat nototmodjo bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula peluang seorang ibu memberikan pendidikan atau asuhan yang baik untuk anaknya.

Pendidikan orang tua akan mempengaruhi kesiapan orang tua, dalam hal ini tugas perkembangan menjadi peran ibu dalam menjalankan pengasuhan terhadap anaknya (Altridonatho & Agency, 2014). Pendidikan ibu akan memberikan dampak bagi pola pikir dan cara pandang ibu dalam mengasuh dan mendidik anak. Semakin tinggi pendidikan ibu maka semakin baik juga pengasuhan yang diterapkan (Wina, Yudiernawati, & Maemunah, 2016)

### Ibu bekerja

Peran utama seorang ibu adalah mengasuh anak, tetapi seiring dengan perkembangan zaman banyak ibu yang terjun ke dunia kerja, sehingga peran pengasuhan menjadi semakin rumit. Peran ganda dari seorang ibu sangat menentukan keberhasilan pola asuh dirumah bagi seorang anak, terlepas dari dengan siapakah kelak anak yang diasuh dititipkan ibu yang bekerja.

Nursalam dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati dan Kisdiarti, menjelaskan bahwa semakin sibuk seseorang bekerja, semakin besar kemungkinan untuk mengabaikan informasi-informasi di luar pekerjaannya, ibu cenderung tidak memantau dan tidak mengarahkan anak pada

perkembangan sosial yang sesuai, kondisi ini berpengaruh secara langsung berupa keterlambatan perkembangan sosial seperti anak tumbuh menjadi penakut, pendiam, pemalu, atau biasanya anak lebih suka bergaul dengan remaja yang berperilaku yang kurang baik seperti berperilaku kasar yang akan memberi dampak buruk terhadap masa depan anak berupa resiko kenakalan remaja (Sulistiyowati & Kasdiarti, 2016).

Nampak Jelas peran ganda dari ibu yang bekerja sangat menentukan keberhasilan dari pola asuh seorang anak, atau anak yang diasuh bukan oleh ibu kandung memiliki sisi negative dari sisi perilaku yang terbentuk, minusnya kasih sayang atau peran dari ibu kandung cenderung menampilkan sisi negative dari perkembangan seorang anak.

## 2. Tinggal serumah

Kategori tinggal serumah disini adalah anak yang tinggal dengan orang tua kandung dan anak yang tinggal dengan kerabat, Tempat kejadian kekerasan banyak terjadi dalam rumah, sebagaimana diungkapkan oleh Miller dan Perrin (2007) dalam Sulistyaningsih (2016) bahwa “*Although it is true that most typically the family is a safe place of substance and care, it is equally true that most child maltreatment occurs within families*” (Walaupun hal yang benar bahwa keluarga adalah tempat yang aman untuk mengasuh, tetapi di sisi lain hal yang benar juga bahwa tindak perlakuan salah terhadap anak juga banyak terjadi di dalam rumah).

Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 dalam Sandi Praditama (2015) di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6% dalam lingkungan sekolah dan 17.9 % dalam lingkungan masyarakat, anak korban kekerasan dalam lingkungan masyarakat jumlahnya tergolong rendah sebesar 17,9% yang berarti, anak rentan menjadi korban kekerasan justru yang berada dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak cukup dekat. Mayoritas pelaku kekerasan pada anak justru berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.

Hakikatnya keluarga sebagai tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, serta pembentukan kepribadian yang kelak akan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak tinggal, tumbuh, dan berkembang.

Sebagaimana pentingnya peran keluarga sangat signifikan dalam perkembangan, pembentukan karakter, dan masa depan anak. Keluarga khususnya orangtua yang merupakan elemen awal pembentukan kepribadian anak harus mampu memberikan dan menjalankan peran maupun tanggung jawab secara maksimal, dan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab terhadap agama, nusa, bangsa dan negaranya.

## 1.3 Hubungan efektifitas pembelajaran melalui video kekerasan anak Genny dengan pengetahuan murid sekolah dasar tentang Kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan hasil Analisis, di peroleh temuan yaitu berdasarkan distribusi data pengetahuan siswa diperoleh nilai *p-Value* sebesar 0,000 artinya secara statistik terdapat perbedaan antara hasil uji *pre test* sebelum diberikan edukasi melalui video dibandingkan dengan nilai *post tes* setelah dilakukan edukasi melalui video, sehingga dapat disimpulkan bahwa “Adanya hubungan bermakna antara efektifitas pembelajaran melalui video kekerasan anak Genny dengan pengetahuan murid sekolah dasar tentang kekerasan seksual pada anak.

Perubahan nilai pengetahuan sejalan dengan yang dirumuskan notoatmodjo, 2011 bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-OR” atau Stimulus – Organisme – Respon.

Setelah melihat video edukasi kekerasan anak Genny, para siswa lebih dapat menentukan sikap apabila bertemu dengan orang yang mencurigakan, hal ini telah dibuktikan dengan rekap nilai post tes yang menyatakan terdapat peningkatan dari nilai pre tes, Berdasarkan distribusi data pengetahuan siswa saat pre test, siswa yang memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 72%, sedangkan siswa yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 28%, dan data pengetahuan siswa setelah menonton video (post test), siswa yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 16%, sedangkan siswa yang memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 84%.

### Hasil Analisis Bivariat

**Tabel. 5 Efektifitas Video Pembelajaran Genny Tentang Kekerasan Seksual Pada Siswa SD**

Intervensi Edukasi Kesehatan	Mean	Standar Deviasi	P-Value
Sebelum Intervensi	1.28	0.45356	0,000
Setelah Intervensi	0.84	0.3703	

Berdasarkan Tabel.5 terlihat bahwa intervensi edukasi tentang kekerasan seksual anak yang diberikan melalui Video Genny, kepada para siswa Sekolah Dasar di SDN Cimuning 3 Bekasi. Berdasarkan uji “*Wilcoxon Sign test*” diketahui *P-Value* sebesar 0,000 Karena nilai 0,000 lebih kecil dari  $<0,05$ , maka disimpulkan bahwa Hipotesis diterima, artinya secara statistik terdapat perbedaan antara hasil uji *pre test* sebelum diberikan edukasi melalui video dibandingkan dengan nilai *post tes* setelah dilakukan edukasi melalui video, sehingga dapat disimpulkan bahwa “Adanya hubungan bermakna antara efektifitas pembelajaran melalui video kekerasan anak Genny dengan pengetahuan murid sekolah dasar tentang Kekerasan seksual pada anak.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang edukasi video pembelajaran geny tentang pengetahuan bahaya kekerasan seksual pada murid sekolah dasar dapat disimpulkan bahwa kegiatan intervensi edukasi ini sangat bermanfaat. Saat ini kekerasan seksual anak merupakan permasalahan yang fenomenal di era digital seperti sekarang. Peluang predator anak menjadi lebih besar mengingat angka kejadian kekerasan seksual yang terus bertambah di setiap tahunnya.

Dengan adanya kegiatan edukasi ini menjadi informasi penting bagi setiap pelajar khususnya siswa murid sekolah dasar yang jarang sekali bahkan tidak pernah mendapatkan informasi kekerasan seksual baik dari orang tua maupun guru di sekolah. Peran orang tua dalam memberikan informasi dan dukungan keluarga dapat menjadikan anak tidak terlalu tabu akan definisi dari kekerasan seksual.

Penegasan utama yang disampaikan kepada anak adalah bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, dengan adanya intervensi edukasi ini peneliti menemukan perbedaan antara hasil uji *pre test* sebelum diberikan edukasi melalui video dibandingkan dengan nilai *post tes* setelah dilakukan edukasi melalui video, distribusi data pengetahuan siswa diperoleh nilai *p-Value* sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa "Adanya hubungan bermakna antara efektifitas pembelajaran melalui video kekerasan anak Genny dengan pengetahuan murid sekolah dasar tentang kekerasan seksual pada anak.

##### Saran

###### 1. Untuk orang tua

- Orang tua harus lebih menyayangi anak karena anak adalah titipan/amanah dari Allah swt yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
- Lebih sabar dalam mendidik anak dan tidak tabu dalam memberikan informasi terkait kekerasan seksual
- Selalu memantau langsung perkembangan anak

###### 2. Untuk anak

- Diwajibkan untuk menghormati dan menghargai orang tua.
- Selalu melapor kepada orang terdekat yang dapat dipercaya baik guru maupun orang tua bila mendapatkan perlakuan kekerasan baik fisik maupun seksual
- Memilih teman yang baik dalam pergaulan
- Melaporkan kepada orang terdekat bila ada orang yang dianggap mencurigakan
- Tidak langsung percaya kepada orang yang baru dikenal

###### 3. Untuk pemerintah

- Memberikan pelatihan kepada orang tua mengenai pendidikan parenting
- Memperbanyak tempat dan sarana bermain anak.
- Menghukum predator anak seberat mungkin

- Membuka pelayanan konseling dan penanganan trauma di setiap sekolah khusus kekerasan anak baik fisik, bullying maupun seksual.

#### 5. REFERENSI

- A. Kurniasari, (2019) Dampak Kekerasan pada Kepribadian anak,  
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1594>
- Arini, dkk. (2015). Kekerasan seksual pada anak di Indonesia.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233>
- Ayu Rahayu (2014) Pemahaman orang tua terhadap kekerasan anak.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/thufula/article/viewFile/4959/pdf>
- DepKes RI, (2014) Definisi Anak Menurut WHO  
<https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/8832>
- Ermayasari, dkk (2018) Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kerawang.  
<https://www.neliti.com/id/publications/267040/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang>
- Essah Margaret. (2018). Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual.  
<https://id.linkedin.com/in/essah-margaret-sesca-855252168>
- Herawati Suryanegara.(2015) Pedofil dan Perlindungan atas hak anak.  
<https://www.slideshare.net/herawatisuryanegara/paedofil>
- I.Gustina, (2016) Kejadian Kekerasan seksual pada Anak di Jakarta Timur.  
<http://journal.binawan.ac.id/impuls/article/view/8>
- Ismantoro.(2015). Penerapan Hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pustaka Yustisia
- Ivo Noviana. (2015) Kekerasan seksual terhadap anak, Dampak dan penanganannya  
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87>
- Maria Ulfah (2014). Peran Orang Tua dalam mencegah terjadi kekerasan seksual pada anak.  
<https://kominformo.go.id>
- N, Safitri. (2018). Definisi anak menurut para ahli.  
<http://repository.untag-by.ac.id/420/3/BAB%20II.pdf>
- Nurul F dkk, (2020) Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan seksual  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/41983>
- Praditama S, dkk (2015) kekerasan terhadap anak didalam keluarga dalam perspektif sosial. Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

<https://media.neliti.com/media/publications/164648-ID-kekerasan-terhadap-anak-dalam-keluarga-d.pdf>

Program Nasional Bagi Anak Indonesia, (IDAI).tahun 2015.

<https://www.bappenas.go.id/index.php?CID=705>  
Sulistiyowati, A., & Kasdiarti, R.(2016). *Studi Tingkat Pengetahuan Ibu Yang Bekerja Tentang Perkembangan Sosial Anak Prasekolah Di Desa Simogirang Kecamatan Prambon, Sidoarjo*

Sulistyaningsih, Endah. (2016). *Pengasuhan Alternatif Bagi Anak Berbasis Kerabat.*

*Disertasi.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Indonesia.

Sugyono (2018). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d.* Alfabetha.Bandung

UNICEF, (2020). *Situasi anak Indonesia.*

<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-indonesia-2020.pdf>

Wina, L., Yudiernawati, A., & Maemunah, N. (2016). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Sosial Anak Usia Prasekolah (4-6 Tahun) Di TK Muslimat Al- Gading Kembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.* Nursing news

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/view/410>

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU *BULLYING* ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh :

**Virda Rukmana**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
virdarukmana12@gmail.com

### Abstrak

Perundungan atau disebut '*Bullying*' merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Perundungan sering dialami oleh beberapa orang khususnya anak di bawah umur. Anak adalah kawula muda penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita bangsa, maka proses perkembangan dan pertumbuhan anak sangatlah penting untuk dijaga. Apabila dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban, oleh karena itu diperlukan penanganan serta bentuk perlindungan baik secara preventif maupun represif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan *bullying* khususnya anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, *Bullying*, Anak di Bawah Umur

### 1. PENDAHULUAN

Perundungan atau disebut '*Bullying*' merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah dan juga para orang dewasa meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Anita et al, 2020). Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan (Palupi, 2020).

*Bullying* berasal dari kata *bully* yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lemah (Palupi, 2020). Secara psikologis, *bullying* adalah ekspresi muka yang merendahkan, kasar atau tidak sopan, memperlakukan dan mengucilkan (Darmayanti et al., 2019). *American Psychiatric Association* (2013) mengartikan *bullying* sebagai: "*A form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions.*" Tindakan *bullying* yang dapat dilakukan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari *bullying* verbal, *bullying* fisik maupun sampai dengan perkembangan teknologi yaitu *cyber bullying* (Damayanti et al, 2020).

Anak adalah kawula muda penerus bangsa yang di masa depan akan mewujudkan cita-cita bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan yang baik (Palupi, 2020). Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga diperlukannya pembinaan dan perlindungan dalam

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang (Palupi, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian (Novianti, 2019). Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban. Pencegahan *bullying* harus dilakukan dengan baik mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan persahabatan khususnya lingkungan bagi anak di bawah umur. Semua lingkungan harus

bekerja sama mampu menanamkan sikap terpuji dan saling menghormati.

*Bullying* terdapat 2 (dua) macam bentuk, yaitu verbal dan fisik. *Bullying* verbal adalah tindakan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok-olok baik fisik seseorang atau perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang. Hal ini tanpa disadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau, tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. *Bullying* Fisik ialah tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat.

Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik *bullying* memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik (Palupi, 2020). Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak di bawah umur yang menjadi korban *bullying*, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar.

*Bullying* bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan *bullying* khususnya anak di bawah umur, baik itu berupa perlindungan preventif maupun represif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk pencegahan dan perlindungan kepada korban *bullying* dan sanksi kepada pelaku *bullying*.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang permasalahan *bullying* yang terjadi pada anak di bawah umur beserta upaya perlindungan hukum yang diberikan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna

mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN BULLYING ANAK DI BAWAH UMUR.

Istilah *bullying* merupakan istilah yang masih baru pada perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, sampai saat ini belum ada padanan kata yang tepat untuk kata *bullying* dalam bahasa Indonesia. Menurut Ketua Yayasan Sejiwa, Dena Haryana (2008) yang dikutip Muhammad (2009), secara sederhana *bullying* diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bentuk *bullying* terbagi tiga, pertama: bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. Kedua, bersifat verbal seperti: memaki, menggosip, mengejek. Ketiga bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi (Novianti, 2019).

*Bullying* atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga diluar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik *bullying* juga masih terjadi dikalangan universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Anita et al, 2020). Perundungan atau *bullying* ialah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan yang terjadi secara verbal dan fisik, korban *bullying* terkadang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apalagi jika korbannya anak di bawah umur, mereka cenderung untuk menyimpannya sendiri. Orang yang melakukan *bullying* kadang berkelompok atau juga sendiri (individu). Pada umumnya pelaku melakukan *bullying* karena mereka merasa berkuasa di daerah itu.

Perilaku *bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang

terlibat baik itu merupakan serangan emosional, verbal ataupun fisik (Darmayanti et al., 2019).

Perundungan atau *bullying* merupakan permasalahan yang sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. *National Mental Health and Education Centre* tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa kasus perundungan merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial, antara 15% dan 30% siswa adalah pelaku dan korban perundungan (Palupi, 2020).

Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus *bullying* yaitu pelaku (*bullies*), korban (*victims*), dan orang yang menyaksikan *bullying* (*bystander*) (Darmayanti et al., 2019). Bentuk-bentuk *bullying* merupakan *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* psikis atau mental. *bullying* fisik misalnya perkelahian, pemukulan, distrap, dan sanksi fisik, bentuk verbal misal ejekan, kata-kata tidak sopan, julukan yang tidak sesuai, kata-kata kotor, dan cemoohan, *bullying* psikis atau mental, contohnya mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror baik secara offline maupun online, memandang yang merendahkan, dan mencibir pemalakan, pengucilan, dan intimidasi (Muhammad, 2009).

Faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* adalah keluarga. Pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, orang tua yang selalu bertengkar di depan anaknya, kemudian anak akan mempelajari dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua mereka kemudian menirunya terhadap teman-temannya, faktor selanjutnya yaitu sekolah, karena pihak sekolah sering menyepelekan bahkan mengabaikan perilaku *bullying*, akibatnya, para pelaku *bullying* akan terus melakukan *bullying* kepada korban karena tidak adanya sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam melindungi para korban *bullying*. Faktor selanjutnya yaitu kelompok bermain, karena biasanya anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku *bullying* yang mereka lakukan, dan faktor selanjutnya yaitu kondisi lingkungan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan. *Bullies* atau pelaku *bullying* akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seperti pemalakan, pemerasan. Faktor selanjutnya yaitu dari film dan tayangan televisi. Para pelaku *bullying* biasanya meniru adegan-adegan kekerasan yang terdapat pada film dan tayangan televisi entah dari gerakannya ataupun kata-katanya (Darmayanti et al., 2019). Berdasarkan penjelasan di atas, *bullying* terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal atau di luar diri si pelaku, namun dipengaruhi juga

oleh faktor-faktor yang bersifat internal yang bersumber dari korban *bullying* itu sendiri.

Sejak tahun 1970-an, *bullying* sudah dikenal sebagai penyakit sosial di beberapa Negara. Hal ini merupakan sebagian dampak dari beberapa penelitian yang secara sistematis telah dilakukan tahun 1970-an, dimulai dengan penelitian Olweus di Scandinavia pada tahun 1978, dan berlanjut di Eropa, Amerika, Australia, Jepang. Di Jepang, kekerasan ini dikenal dengan *dime*, menyeruak pada tahun 1984 ditandai dengan 16 peristiwa bunuh diri terkait dengan *bullying* (Sucipto, 2012).

Cara penanganan *bullying* di Hongkong dengan taktik supresif, seperti menceramahi pelaku, mengundang orang tua pelaku, mengundang orang tua ke sekolah, ternyata kurang efektif dibandingkan dengan melakukan strategi anti *bullying* secara komprehensi seperti bermanfaat melatih siswa mengembangkan kompetensi diri dan ketrampilan sosial, sementara hubungan baik orang tua ke guru bermanfaat sebagai strategi anti kekerasan (Palupi, 2020).

Terkait dengan penanganan perbuatan perundungan (*bullying*) di Norwegia, menteri pendidikan setempat memulai kampanye nasional melawan *bullying* pada tahun 1983. Bersamaan dengan kampanye ini, dilakukan penelitian besar secara longitudinal yang melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kejadian *bullying* sebesar 50% setelah 2 tahun pertama dilaksanakannya program kampanye. Pada tahun 2000, menteri pendidikan juga mengembangkan jaringan nasional bagi para profesional terkait dengan mengembangkan lembaga yang menangani *bullying* dan problem perilaku siswa lainnya (Sucipto, 2012).

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), "kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Novianti, 2019). Berdasarkan konsep *parents patriae* menurut Rochaeti (2008), negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai

Pancasila. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.

Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Perlindungan Anak adalah diantara : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali. Komponen tersebut harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terutama terhadap anak yang terkena tindakan *bullying*. *Corning* menjelaskan bahwa sinergi sesungguhnya ada dimana-mana disekitar kita termasuk di dalam diri kita dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari (Damayanti et al, 2020).

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut dilakukan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus di antaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak korban *bullying*, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 *jo.* Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum.

Selain itu Pasal 64 UU Perlindungan Anak juga menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasi; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi

atas identitasnya; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus *bullying* dapat juga dilakukan melalui upaya diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi ini berlandas pada hukum restoratif. Anak sebagai korban, fokus utama pendekatan restoratif terletak pada pemulihan dan kompensasi kerugian (Tirto.id, 12 April 2019).

Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak sesuai lagi perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus tindak pidana *bullying*, dititik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Berdasarkan pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan

bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76C dilanggar adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka wajib diupayakannya diversifikasi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di 7 (tujuh) tahun, dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 tahun, karenanya wajib diupayakannya diversifikasi bagi kepentingan anak. Diversifikasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi merupakan upaya dalam menciptakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga diversifikasi memiliki dampak positif bagi pelaku dan korban ketika tuntutan korban telah dipenuhi oleh pelaku, sebagaimana disebutkan dalam (Rasdi dan Saru Arifin, 2016:90).

Apabila dalam diversifikasi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perlindungan Terhadap Korban *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap warga negara Pada dasarnya berhak atas rasa aman dan Hak untuk Perlindungan dari ancaman, seperti: Termasuk dalam konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Termasuk di dalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *bullying*, yang mana

tindak pidana *bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana *bullying*, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa : "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi". Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan terekam di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya.

Mengingat salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* fisik maka dari itu pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* dan apabila tidak dijelaskan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan di lingkungan belajar, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah dan lebih tertutup.

Berdasarkan proses penyelesaian perundangan atau *bullying* dapat dilakukan juga dengan proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional, namun, penerapan atau pelaksanaan proses diversifikasi tidak dapat terhadap semua anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak (Novianti, 2019).

Menurut kondisi tersebut, hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedua pihak, baik pelaku

maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, disisi lain, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya (Damayanti et al, 2020).

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, selain upaya penegakan hukum peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak (Novianti, 2019). DPR pada bidang pengawasan dan anggaran memiliki peran penting di pemeritahan dalam politik anggaran bagi kesejahteraan anak-anak khususnya terhadap beberapa program pemerintah dalam mengatasi persoalan anak serta koordinasi antar-kementerian lembaga terkait dengan perlindungan anak.

#### 4. KESIMPULAN

*Bullying* atau perundungan merupakan fenomena yang seringkali dialami oleh anak usia di bawah umur yang marak terjadi di lingkungan sekolah dasar. Terkait perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah mengaturnya dalam UU Perlindungan Anak, yang secara umum isinya adalah mengenai perlindungan anak terhadap tindakan *bullying* serta edukasi mengenai larangan berbuat kejahatan. UU Perlindungan Anak memberikan jaminan perlingdungan khusus bagi anak yang berhadapandengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku khususnya dalam hal kasus *bullying*. Penanganan anak yang berhadapandengan hukum dalam kasus *bullying* dilakukan berdasarkan UU SPP. Adan upaya diversifikasi dapat menjadisolusi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak harus dapat dilaksanakan secara lebih bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan anak di kemudian hari. Keluarga, guru, maupun seluruh masyarakat mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder Edition "DSM-5". Washinton DC: American Psychiatric Publishing. Washinton DC
- Anita & Triasavira, M. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Jendela Hukum*
- Palupi, M.C.T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif

Viktimologi, *MLJ : Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2

Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2

Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). *Bullying* di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1

# PENGUJIAN EFEK CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE SAMSUNG

Oleh:

Steven Daniel<sup>1)</sup>, Ariesyia Aprillia<sup>2)\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha

<sup>1</sup>stevendaniel150@gmail.com

<sup>2</sup>april.lie@hotmail.com

## Abstrak

Perkembangan teknologi berjalan dengan cepat, salah satunya adalah teknologi ponsel pintar atau biasa disebut *smartphone*. Namun sayangnya seiring pertumbuhan pengguna *smartphone* di Indonesia, penjualan Samsung di Indonesia justru mengalami penurunan performa. Menguji dan menganalisis apakah terdapat efek/pengaruh dari variabel citra merek dan kualitas produk pada pengambilan keputusan pembelian *smartphone* Samsung merupakan tujuan penelitian. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yang digunakan, serta sampelnya adalah mahasiswa/i Program Studi S-1 Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha Bandung yang sedang menggunakan *smartphone* Samsung. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, lalu diuji dengan uji reliabilitas, validitas, asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan ialah citra merek dan kualitas produk memberi efek/pengaruh secara parsial maupun simultan pada pengambilan keputusan pembelian.

**Kata Kunci:** Citra Merek, Kualitas Produk, Pengambilan Keputusan Pembelian

## 1. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi memungkinkan manusia untuk bekerja lebih mudah dan tentunya praktis. Teknologi saat ini yang berkembang dengan cepat, mendorong para pelaku industri untuk membuat berbagai inovasi produk teknologi, salah satunya adalah ponsel pintar atau biasa disebut *smartphone*. *Smartphone* sendiri merupakan alat komunikasi dengan segudang fitur yang memiliki fungsi hampir sama dengan komputer. *Smartphone* tidak hanya sebatas untuk melakukan telepon ataupun SMS saja, akan tetapi *smartphone* ini dapat diambil kegunaannya dalam penggunaan untuk memperoleh informasi dengan mudah dari bermacam sumber, berkomunikasi melalui media sosial, untuk mendengar lagu, bermain *game*, dan menyimpan berbagai macam data.

Setiap tahunnya pengguna *smartphone* di pasar global terus meningkat, salah satunya di Indonesia dengan jumlah pengguna *smartphone* yang cukup banyak. Dilansir dari Databoks (Pusparisa, 2020), pertumbuhan pengguna *smartphone* di Indonesia terus meningkat, dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2025 diprediksi 89,2% populasi masyarakat Indonesia atau sekitar lebih dari 241 juta orang telah memanfaatkan *smartphone*. Oleh sebab itu para produsen bersaing untuk membuat berbagai varian produk.

Salah satu produk *smartphone* terbaik asal Korea yang selalu ditunggu oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini adalah Samsung. Samsung merupakan perusahaan yang berada di Daegu, Korea Selatan dan berdiri pada tahun 1969, perusahaan ini didirikan oleh Lee Byung Chull (Sebayang, 2019).

Sejak pertama perilisannya hingga saat ini Samsung terus melakukan pengembangan pada produknya dan terus berusaha menjaga pertumbuhan pembelian dari setiap produknya. Di Indonesia sendiri pertumbuhan penjualan *smartphone* Samsung bisa dikatakan mengalami penurunan performa berdasarkan pada data lembaga survei IDC yang memperlihatkan performa Samsung dari kuartal 4 tahun 2019 hingga kuartal 4 2020 pangsa pasar Samsung menurun cukup banyak (Alfianto et al., 2021). Samsung hanya mampu bersaing pada produk kategori *low-end* saja yaitu seri A. Berikut adalah perbandingan data statistiknya di Indonesia.



Gambar 1. Lima Perusahaan *Smartphone* Teratas di Indonesia, Pangsa Pasar 4Q20  
Sumber: Alfianto et al. (2021)

Berdasarkan fenomena mengenai penurunan *market share* dari Samsung, penulis melihat pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi banyak faktor yang memicu konsumen untuk membeli sebuah produk. Hal tersebut tidak lepas dari perlunya faktor pemasaran perusahaan yang baik, seperti pengelolaan citra merek dan terus meningkatkan kualitas produk agar tetap bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Faktor citra merek sangat penting yang mana fungsi dari citra merek yaitu untuk menggambarkan serta mengomunikasikan mutu produk ke konsumen dengan tujuan merayu konsumen agar membeli produk yang dijual. Menurut Firmansyah (2019) ketika pelanggan mengingat suatu merek atau produk tertentu, citra merek menggambarkan persepsi yang muncul dalam pikiran mereka. Kotler dan Keller (2016) mendefinisikan citra merek ialah sebutan, makna, ikon, nilai estetika, maupun campuran kesemuanya yang bertujuan agar dapat memberikan pengenalan terhadap komoditas maupun layanan dari individu maupun kelompok penjual dalam membedakan dari produk pesaingnya. Seperti yang diketahui, citra merek yang dimiliki perusahaan semakin baik, maka semakin besar potensi konsumen untuk percaya diri dalam memilih produk yang dijual perusahaan. Seringkali salah satu aspek yang diminati oleh konsumen dalam pengambilan keputusan yang dilakukannya dalam perolehan suatu produk ialah apabila produk tersebut disukai atau sudah terkenal. Hal inilah yang perlu diperhatikan perusahaan agar terus mempertahankan posisi mereknya agar tertanam dengan jelas di benak konsumen.

Selain citra merek, kualitas produk menjadi pertimbangan penting bagi bisnis. Kualitas menurut Lupiyoadi & Hamdani (2013) adalah sekumpulan sifat dan karakteristik yang menunjukkan seberapa baik suatu produk memenuhi permintaan konsumen. Di sisi lain, kualitas produk digambarkan oleh Kotler & Keller (2016) sebagai kemampuan produk untuk memberikan kemampuan atau hasil yang dapat dicapai sesuai dengan apa yang konsumen harapkan. Kualitas produk didefinisikan dengan kemampuan suatu komoditas dalam melaksanakan fungsi yang dimilikinya yang didalamnya terdiri atas durabilitas, kemahiran, akurasi, pengoperasian yang mudah, serta aspek manfaat lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas produk terdiri dari nilai dan fungsi produk yang baik untuk memenuhi atau melampaui harapan konsumen.

Setelah konsumen mengingat suatu produk dan menentukan kualitasnya, langkah penting berikutnya adalah konsumen mengambil keputusan apakah akan melakukan pembelian produk yang dituju ataukah membatalkannya. Pengambilan keputusan dalam kepemilikan atas komoditas maupun layanan proses pemecahan masalah yang terfokus pada tujuan (Sangadji & Sopiah, 2013),

lebih lengkapnya dijelaskan bahwa pengambilan dalam keputusan pembelian akan suatu produk ialah suatu sistem integrasi yang mana kepehaman yang digabungkan dalam menganalisis dua maupun lebih opsi tingkah laku serta mengambil satu diantaranya. Tjiptono (2014) mengutarakan pandangan tentang keputusan pembelian yaitu hasil dari proses yang mana pelanggan mengidentifikasi masalah, memperoleh pengetahuan mengenai fakta suatu komoditas, serta melakukan pengujian untuk mengetahui tingkatan dari efektifitas masing-masing opsi dalam mengatasi masalah yang pada akhirnya bertujuan pada membuat keputusan pembelian.

Citra merek serta kualitas barang ialah faktor kunci dalam melakukan pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian sebelumnya yang mendukung hal ini yaitu dari Norbaiti & Rahmi (2020), Anam et al. (2020), serta Arjuna & Ilmi (2020) yang mana mengemukakan tentang dua variabel yang diteliti yaitu citra merek dan kualitas barang dimana terdapatnya pengaruh baik serta signifikan dalam pengambilan keputusan kepemilikan akan suatu komoditas. Penulis lainnya yaitu Yasmin (2017) meneliti secara khusus mengenai variabel citra merek pada pengambilan keputusan kepemilikan akan suatu komoditas, menurutnya terdapat dampak positif dari citra merek pada pengambilan keputusan kepemilikan akan suatu komoditas, dimana ketika konsumen membeli suatu produk mereka seringkali tersugesti bahwa citra merek adalah bagian penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Alfred (2013) dalam suatu risetnya mengemukakan jika kualitas akan suatu barang memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan dalam pembelian akan suatu barang serta pelanggan juga melakukan pertimbangan akan mutu yang ditawarkan barang tersebut pada saat melakukan pembeliannya.

Namun Iskuntianti et al. (2020) dan Sabrina et al. (2019) mengemukakan jika citra merek memiliki dampak negatif serta tidak signifikan, tidak ada pengaruh pada pengambilan keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian Setyani & Gunadi (2020) serta Nugroho (2017), citra merek tidak memengaruhi pengambilan keputusan pembelian. Penelitian Nugroho (2017) menyatakan faktor citra merek tidak berpengaruh secara signifikan.

Nurlaila et al. (2021) mengemukakan jika secara terpisah, kualitas produk tidak memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan pembelian, ada beberapa alasan mengapa kualitas produk tidak memengaruhi peran dalam pengambilan keputusan pembelian, diantaranya karena perusahaan tidak mampu menjamin kualitas produk yang dihasilkannya yang ditentukan dalam setiap indikator mutu akan suatu produk seperti rupa, karakteristik, kemampuan mutunya, durabilitas, kinerja reparasinya, kerusakan, bentuk, serta desain.

Hipotesis yang diajukan:

- H<sub>1</sub>: Terdapat efek/pengaruh citra merek pada pengambilan keputusan pembelian *smartphone* Samsung  
H<sub>2</sub>: Terdapat efek/pengaruh kualitas produk pada pengambilan keputusan pembelian *smartphone* Samsung  
H<sub>3</sub>: Terdapat efek/pengaruh citra merek dan kualitas produk secara simultan pada pengambilan keputusan pembelian *smartphone* Samsung

## 2. METODE PENELITIAN

Deskriptif kuantitatif digunakan dengan melalui skema *explanatory research*. Mahasiswa/i dari Program Studi S-1 Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha (Prodi S-1 FB UKM) yang menggunakan *smartphone* penulis gunakan sebagai populasi. *Purposive sampling* penulis gunakan dalam teknik pengambilan sampelnya, dengan sampel mahasiswa/i Prodi S-1 FB UKM yang sedang menggunakan *smartphone* Samsung. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan perbandingan rasio 10:1 yang berarti 10 sampel pada 1 unit pertanyaan, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah 12x10 atau membutuhkan minimal sebanyak 120 sampel. Kuesioner penulis sebarakan dalam rangka pengumpulam data yang dibutuhkan serta melakukan penentuan dalam penilaian dengan menggunakan skala Likert. Pengujian yang dilakukan ialah uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta regresi linear. Definisi operasional variabel diterangkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
1	Citra Merek (X1) merupakan asosiasi yang dihasilkan dalam memori dan dikonseptualisasikan dalam hal jenis, kebaikan, kekuatan, dan keunikan (Shimp, 2014).	- Kesan mewah terhadap produk - Kesan canggih - Citra terhadap perusahaan - Kesan terhadap pelayanan dari karyawan Samsung	Likert	Ashari et al. (2020)
2	Kualitas Produk (X2) mengacu pada seperangkat atribut yang dimiliki suatu produk sebagai hasil pemasaran, teknologi ketahanan produk, dan pemeliharaan yang memungkinkannya memenuhi harapan pelanggan atau konsumen (Wijaya, 2018).	- Kinerja - Features - Cara pandang pelanggan pada produk kesemua mutu sebuah produk - Durability	Likert	Ashari et al. (2020)
3	Keputusan Pembelian (Y) yaitu titik alur kegiatan didalam keputusan melakukan pembelian yang terjadi ketika pelanggan sudah mengetahui informasi produk dan benar-benar ingin membelinya (Kotler & Armstrong, 2014).	- Kemantapan pada sebuah produk - Rutinitas dalam pembelian suatu produk - Merekomendasikan pertimbangan pada pelanggan lain - Repurchase	Likert	Ashari et al. (2020)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat karakteristik responden, hasil uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan regresi linear berganda. Karakteristik 389 orang responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Keterangan	Frekuensi	
	Orang	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	190	48.8
Perempuan	199	51.2
Usia (Tahun)		
18-20	218	56
21-23	164	42.2
>23	7	1.8
Sedang Menggunakan Smartphone Samsung		
Ya	251	64.5
Tidak	128	35.5

Sumber: Olahan data SPSS versi 25 (2021)

Responden perempuan lebih banyak yaitu sebanyak 51,2%, rentang usia 18-20 tahun, serta yang sedang menggunakan *smartphone* Samsung sebanyak 251 orang dengan persentase sebanyak 64,5% dan yang tidak sedang menggunakan sebanyak 138 responden dengan persentase 35,5%. Untuk pengolahan data lebih lanjut hanya menggunakan 251 orang responden yang menjawab Ya saja.

Nilai  $r$  (*corr.*)  $\geq 0,500$  yaitu berkisar antara 0,680-0,803 dengan nilai sig.  $\leq 0,05$  dan nilai koefisien *Cronbach Alpha* berkisar antara 0,680-0,746. Mengacu pada nilai tersebut, maka kuesioner yang dirancang penulis sudah valid dan reliabel.

*One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dengan nilai sig.  $\geq 0,05$  yaitu 0,336. Hasil nilai *tolerance* 0,585  $> 0,10$  serta nilai VIF 1,771  $< 10,00$ , maka tidak terdapat tanda-tanda multikolinearitas dalam penelitian ini. Berdasarkan *scatterplot*, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas (memiliki varian yang homogen), karena titik-titik berpencair diatas dan dibawah titik nol serta tidak membentuk pola.

Hasil pengujian H<sub>1</sub> menunjukkan bahwa sig.  $\leq 0,05$  yaitu 0,000, berarti citra merek memberikan efek/pengaruh pada pengambilan keputusan pembelian *smartphone* Samsung. Untuk hasil pengujian H<sub>2</sub> menunjukkan bahwa sig.  $\leq 0,05$  yaitu 0,000, berarti kualitas produk memberikan efek/pengaruh pada pengambilan keputusan pembelian *smartphone* Samsung. Hasil pengujian H<sub>3</sub> menunjukkan bahwa sig.  $\leq 0,05$  yaitu 0,000, berarti citra merek dan kualitas produk memberikan efek/pengaruh secara simultan pada pengambilan keputusan pembelian *smartphone* Samsung. Nilai *Adjusted R Square* 0,532, artinya pengambilan keputusan pembelian *smartphone* Samsung dipengaruhi oleh citra merek dan kualitas produk sebesar 53,2%, sementara 46,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil ini sejalan riset Norbaiti & Rahmi (2020), Anam et al. (2020), Arjuna & Ilmi (2020), serta Yasmin (2017) yang mana citra merek

memberikan efek/pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian karena konsumen seringkali tersugesti oleh citra merek yang baik. Selain itu, hasil riset Alfred (2013) memberikan pernyataan jika pelanggan sering melakukan pertimbangan atas kualitas produk sebelum melakukan pembelian sehingga kualitas produk memengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian.

#### 4. KESIMPULAN

Samsung merupakan perusahaan dalam industri elektronik, salah satunya adalah *smartphone* yang saat ini dapat dibidang memiliki cukup banyak pesaing, di sisi lain pastinya Samsung ingin tetap dapat bersaing dan unggul di pasarnya. Maka dari itu, suatu industri perlu menciptakan refleksi yang baik didalam membuat citra merek yang ditujukan kepada pelanggan agar dapat terus menarik pelanggan lama maupun baru untuk membeli produk *smartphone* Samsung. Citra merek perlu ditanamkan di benak konsumen karena dengan perusahaan memiliki citra merek yang bernilai positif tentu pelanggan akan mudah mengenal dan setia pada banyaknya lini produk sehingga perusahaan dapat terus bersaing dan mempertahankan posisinya di pasar.

Bagi produsen seperti Samsung, citra sangat penting karena satu diantara banyaknya faktor yang pelanggan gunakan dalam menentukan keputusan pembelian akan suatu produk atau layanan. Ketika pelanggan melihat citra positif dari suatu merek, mereka cenderung untuk membelinya. Jika saja perusahaan memiliki citra negatif tentu saja konsumen akan ragu dengan produk yang akan dibelinya dan cenderung akan mempertimbangkan kembali karena konsumen takut produknya tidak sejalan dengan yang pelanggan harapkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang Tjiptono (2015) utarakan mengenai istilah citra merek yang mengacu pada asosiasi dan keyakinan yang dimiliki konsumen tentang merek tertentu. Efek lainnya setelah konsumen memiliki citra merek yang baik pada sebuah merek yaitu terbentuk keyakinan dan preferensi terhadap merek tersebut sehingga pada akhirnya tidak hanya membeli saja bahkan jika merasa puas, mereka akan spontan mempromosikan produk ke orang-orang terdekatnya secara gratis.

Tidak hanya citra merek saja, pada penelitian ini juga menunjukkan persamaan dengan teori Dharmesta & Handoko (2012) di mana kualitas produk yang dihasilkan perusahaan adalah metode yang paling efektif untuk menarik perhatian pelanggan. Kualitas produk perusahaan adalah "senjata strategis" yang memungkinkannya membangun identitas khasnya sendiri. Perbedaan ini merupakan keuntungan bagi perusahaan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif atas para pesaingnya. Oleh karena itu, dengan kualitas produk bernilai positif berdampak baik kepada produsen serta jika kualitas dari barang yang ditawarkan memiliki kesesuaian terhadap apa yang pelanggan

inginkan, maka ekspektasi konsumen juga pastinya terpenuhi.

Sampai saat ini bila dikaji dan ditinjau kembali, menurut para konsumen citra merek produk Samsung dapat dilihat sudah mendapatkan hasil yang positif sehingga diharapkan perusahaan Samsung dapat terus menjaga konsistensi dalam menjaga citra merek di benak konsumen agar dapat menarik konsumen baru bertambah jumlahnya serta tetap menjaga loyalitas dari konsumen yang telah ada sebelumnya. Di sisi lain kualitas produk dari produk *smartphone* Samsung juga bisa dikatakan cukup memuaskan sehingga diharapkan Samsung dapat terus mengontrol kualitas produk supaya konsumen tetap melakukan keputusan pembelian agar dapat terus bersaing di pasaran *smartphone* khususnya di Indonesia.

Saran pada penelitian ini, diharapkan untuk kedepannya bagi penulis yang akan melakukan riset terhadap variabel citra merek serta kualitas akan suatu barang kepada pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian sebaiknya menggunakan dan dapat menambahkan variabel lain, seperti variabel harga, loyalitas, dan kualitas layanan sehingga diharapkan hasilnya akan lebih komprehensif. Selanjutnya mengenai sampel, penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memakai sampel lebih banyak lagi, hal tersebut dikarenakan agar dapat mewakili total populasi masyarakat yang berdomisili di kota Bandung.

#### 5. REFERENSI

- Alfianto, R. (2021). *IDC: Pasar smartphone Indonesia berhasil bertahan di tengah pandemi*. <https://www.jawapos.com/oto-dan-teknogadget/17/03/2021/idc-pasar-smartphone-indonesia-berhasil-bertahan-di-tengah-pandemi/?page=all>
- Alfred, O. (2013). Influences of price and quality on consumer purchase of mobile phone in the Kumasi Metropolis in Ghana: A comparative study. *European Journal of Business and Management*, 5(1), 179–199. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/3919>
- Anam, M. S., Nadila, D. L., Anindita, T. A., & Rosia, R. (2020). Pengaruh kualitas produk, harga dan brand image terhadap keputusan pembelian produk hand and body lotion merek Citra. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 120–136. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.277>
- Arjuna, H., & Ilmi, S. (2020). Effect of brand image, price and quality of the product on the smartphone purchase decision. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 294–305. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/ekbis/article/view/1190>
- Ashari, A. P., Hardiyono, H., & Aswar, N. F. (2020). *Smartphone Samsung di Makassar*.

- MANDAR: *Management Development and Applied Research Journal*, 3, 18–32. <http://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandar>
- Dharmesta, B.S., & Handoko, T. H. (2012). *Manajemen pemasaran: Analisa perilaku konsumen* (1st ed.). Yogyakarta: BPF.
- Firmansyah, M. A. (2019). Buku pemasaran produk dan merek. In *Buku pemasaran produk dan merek* (Issue August).
- Iskuntianti, N. D., Faisal, M. A., Naimah, J., & Sanjaya, V. F. (2020). The Influence of brand image, lifestyle, and product quality on purchasing decisions. *Journal of Business Management Review*, 1(6), 436–448. <https://doi.org/10.47153/jbmr16.752020>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). *Principles of marketing* (15th ed.). United Kingdom: Pearson Education Ltd.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Lupiyoadi, R., & Hamdani, D. A. (2013). *Manajemen pemasaran jasa*. Jakarta : Salemba Empat.
- Norbaiti, N., & Rahmi, W. S. (2020). Pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian smartphone Iphone di Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.47747/jismab.v1i2.96>
- Nugroho, L. B. I. (2017). Analisis pengaruh brand image, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian mobil (Studi kasus mobil LCGC di Surakarta). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.26533/eksis.v12i1.75>
- Nurlaila, N., Nainggolan, W. N., & Nurlinda. (2021). *Pengaruh brand image dan kualitas produk pada witel Medan*. 4(1), 33–43. [https://www.researchgate.net/profile/Nurlinda-Nurlinda/publication/352934415\\_pengaruh\\_br and\\_image\\_dan\\_kualitas\\_produk\\_terhadap\\_keputusan\\_pembelian\\_produk\\_indihome/links/60e031c2299bf1ea9edb3d28/pengaruh-brand-image-dan-kualitas-produk-terhadap-keputusan-pembelian](https://www.researchgate.net/profile/Nurlinda-Nurlinda/publication/352934415_pengaruh_br and_image_dan_kualitas_produk_terhadap_keputusan_pembelian_produk_indihome/links/60e031c2299bf1ea9edb3d28/pengaruh-brand-image-dan-kualitas-produk-terhadap-keputusan-pembelian)
- Pusparisa, Y. (2020). *Pengguna smartphone diperkirakan mencapai 89% populasi pada 2025*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/15/pengguna-smartphone-diperkirakan-mencapai-89-populasi-pada-2025>
- Sabrina, N. A. P., & Nugraha, A. T. (2019). Analisis pengaruh citra merek, kualitas produk, harga dan diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian Pizza Hut di Jakarta Barat. *Agribusiness Journal*, 12(2), 148–156. <https://doi.org/10.15408/aj.v12i2.11865>
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2013). *Perilaku konsumen pendekatan praktis disertai himpunan jurnal penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sebayang, R. (2019). *Kisah Samsung si raja smartphone, yang dulunya produsen mie*. <https://www.cnbcindonesia.com/>.
- Setyani, T. P. H., & Gunadi, W. (2020). Pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian mobil all new Rio KIA Motors Indonesia (Pada PT. Radita Autoprime). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 92–102. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jimen/article/view/8/8>
- Shimp, T. A. (2014). *Komunikasi pemasaran terpadu dalam periklanan dan promosi* (Edisi 8). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran jasa: Prinsip, penerapan, penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjiptono, F. (2015). *Brand management & strategy*. Yogyakarta: Andi.
- Wijaya, T. (2018). *Manajemen kualitas jasa: Desain servqual, QFD, dan Kano* (B. Sarwiji (ed.); Edisi: 2). Jakarta: PT Indeks.
- Yasmin, A. (2017). Impact of advertisements and brand image on purchase decision. *International Journal of Research in Social Sciences*, 7(4), 6–7. [https://www.ijmra.us/project/doc/2017/IJRSS\\_october2017/IJMRA-12431.pdf](https://www.ijmra.us/project/doc/2017/IJRSS_october2017/IJMRA-12431.pdf)

# IDENTIFIKASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI ASISTIF DALAM PEMBELAJARAN DARING BAGI ANAK DENGAN HAMBATAN PENGLIHATAN

Oleh :

**Rendy Roos Handoyo**

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta  
email: rendy.roos@uny.ac.id

## Abstrak

Teknologi asistif dibutuhkan anak hambatan penglihatan untuk mengakses pembelajaran daring selama pandemic covid-19. Penggunaan teknologi asistif tetap memperhatikan prinsip pembelajaran dan kebutuhan belajar sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Realitanya, belum diketahui pemetaan tipe teknologi asistif yang sudah digunakan, factor pendukung dan kendala yang dialami guru. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi pemanfaatan teknologi asistif yang dapat mengakomodasi anak hambatan penglihatan dalam pembelajaran daring. Metode penelitian menggunakan survei. Teknik pengumpulan data melalui angket terbuka secara daring dan wawancara mendalam dengan jumlah subjek 80 guru SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Instrumen penelitian menggunakan pertanyaan tentang tipe teknologi asistif, faktor pendukung ketersediaan dan hambatan dalam pemanfaatan. Analisis data menggunakan statistic deskriptif kuantitatif dengan presentase untuk angket dan kualitatif dari data wawancara, disajikan dalam bentuk grafik yang dimaknai secara naratif. Hasilnya, pemanfaatan tipe *low technology* 82,4%, *middle technology* 12,5% dan *high technology* 5,1%. Pendukung terbanyak dalam penyediaan teknologi asistif yaitu pemerintah sebesar 68,43%, sedangkan 18,2% dari sekolah dan 13,37% oleh keluarga. Hambatan terjadi karena alasan terbatasnya anggaran sekolah sebanyak 47,85% dan mahalannya harga alat yang akomodatif sebesar 18,94%. Data kualitatif mengungkap kebutuhan guru agar dapat merancang teknologi asistif sederhana dengan harga terjangkau namun tetap fungsional dan kontekstual.

**Kata Kunci:** anak hambatan penglihatan, pembelajaran daring, teknologi asistif.

## 1. PENDAHULUAN

Anak hambatan penglihatan adalah individu yang indera penglihatannya rusak dan mengalami keterbatasan serta ketidakmampuan sehingga menjadi hambatan untuk berfungsi sebagai saluran penerima informasi secara visual. Keterbatasan indera visual pada anak hambatan penglihatan menjadi alasan dibutuhkannya pendidikan khusus dari segi metode pembelajaran, media pembelajaran dan materi pelajaran yang diberikan (Gargiulo, 2006) (Kauffman, 2009). Ketidakberfungsian penglihatan secara optimal menjadikan anak hambatan penglihatan membutuhkan layanan khusus agar dapat beraktivitas sesuai norma masyarakat (Hadi, 2005), (Somantri, 2007). Keterbatasan yang dialami oleh anak hambatan penglihatan meliputi keterbatasan segi kognitif, orientasi mobilitas dan interaksi sosial. Keterbatasan segi kognitif bukan karena faktor intelegensi yang rendah melainkan kurangnya dan minimnya variasi pengalaman. Terbatasnya kemampuan orientasi mobilitas dikarenakan kurangnya variasi gerak psikomotorik untuk mengakses informasi di lingkungan sekitar (Sunanto, 2005). Interaksi sosial yang terbatas disebabkan oleh adanya rasa rendah diri pada anak hambatan penglihatan untuk melakukan sosialisasi di lingkungan sekitar.

Anak hambatan penglihatan memiliki perbedaan penting dengan anak awas dalam membentuk pengetahuannya. Perbedaan tersebut

dikatakan oleh Hallahan & Kauffman (Sunanto, 2005) bahwa perkembangan konsep anak hambatan penglihatan diperoleh melalui taktual, sedangkan indera perabaan akan berfungsi untuk keperluan kognitif. Pengalaman kognitif anak hambatan penglihatan dapat dikembangkan melalui penggunaan indera perabaan dan pengalaman pengetahuan selama pembelajaran.

Sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengetahuan pada anak hambatan penglihatan yaitu assistif teknologi. Teknologi asistif adalah sebuah peralatan yang mengarah pada item, produk, barang yang dimodifikasi untuk dapat memberikan akomodasi pada anak berkebutuhan khusus, termasuk hambatan penglihatan (Bryant, 2012). Saat ini, World Health Organization (WHO) memperkenalkan *Global Cooperation on Assistive Technology* (GATE) sejak 2014 untuk membantu kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhan teknologi asistif bagi penyandang disabilitas di seluruh negara (Organization, 2016). Penggunaan teknologi asistif sangat mendukung peningkatan pra-akademik, membaca, berhitung dan berorientasi mobilitas pada anak hambatan penglihatan.

Kebutuhan Teknologi Asistif bagi anak hambatan penglihatan semakin diperlukan ketika adanya kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) melalui pembelajaran daring akibat pandemi covid-19. Inovasi pembelajaran yang dilakukan guru yaitu

menciptakan pembelajaran efektif secara daring melalui media aksesibel. Salah satu ciri media pembelajaran selama daring bagi anak hambatan penglihatan yaitu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan akademik dan mengurangi hambatan yang dialami untuk memperoleh informasi. Media pembelajaran dengan unsur teknologi informasi diperlukan dalam pembelajaran daring bagi anak hambatan penglihatan, tetapi kendala internal karena kurangnya keaktifan untuk mencari tahu terkait materi serta hambatan mengakses materi secara daring (Rahmawati, 2021). Permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran daring bagi anak berkebutuhan khusus yaitu tidak tersedianya mobile phone dan jaringan internet (Putri & Taufan, 2021). Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan terakses terbukti dapat membentuk pembelajaran efektif bagi anak hambatan penglihatan melalui rekaman audio atau video (Hermanto & Supena, 2021).

Fakta lainnya, tidak semua Sekolah Luar Biasa (SLB) melayani pendidikan bagi anak hambatan penglihatan secara terus-menerus di setiap tahun akademik. Dampaknya yaitu tidak semua SLB siap dengan peralatan yang mendukung pembelajaran bagi anak hambatan penglihatan. Pembangunan fisik SLB belum memperhatikan aksesibilitas bagi anak hambatan penglihatan. Peralatan bagi anak hambatan penglihatan diproduksi dari luar negeri sehingga sekolah harus import dengan biaya mahal.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di SLB tentang problematika penyediaan peralatan berbasis teknologi asistif bagi anak hambatan penglihatan, maka perlu dilakukan identifikasi tipe ketersediaan teknologi asistif di sekolah. Tipe disesuaikan dengan *low technology*, *middle technology* dan *high technology*. Manfaat dari identifikasi peralatan ini memudahkan sekolah untuk saling berbagi sumber alat dengan sekolah terdekat sehingga dapat menghemat biaya namun anak hambatan penglihatan tetap dapat terfasilitasi. Keuntungan lain melakukan identifikasi ketersediaan teknologi asistif yaitu untuk menggali informasi kebutuhan dalam peningkatan kompetensi guru SLB khususnya perancangan peralatan yang sesuai konteks lingkungan sekitar anak.

Tujuan dari penelitian untuk mengidentifikasi ketersediaan teknologi asistif bsgi anak hambatan penglihatan dan kebutuhannya. Adapun pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan teknologi asistif bagi anak hambatan penglihatan di SLB?
2. Bagaimana kebutuhan teknologi asistif bagi anak hambatan penglihatan di SLB?
3. Bagaimana sumber dukungan ketersediaan teknologi asistif di SLB?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa survei dan studi mendalam untuk tujuan deskriptif dengan unit analisis lembaga sekolah. Penelitian ini mengungkap dukungan pembelajaran anak dengan hambatan penglihatan berbentuk teknologi asistif tipe *low technology*, *middle technology* dan *high technology*.

Populasi dalam penelitian ini seluruh sekolah luar biasa (SLB) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sampel diambil secara purposive sesuai data peserta sebanyak 80 sekolah, baik negeri dan swasta. Subyek penelitian ditetapkan secara random sampling dengan populasi 80 SLB dan sampel purposive sebanyak 132 guru. Data dianalisis dengan kuantitatif statistic deskriptif dalam bentuk persentase yang disajikan pada tabel dan grafik selanjutnya dimaknai secara naratif, sedangkan pendapat responden yang bersifat kualitatif dikelompokkan sesuai kategori permasalahan, kemudian diambil kesimpulan secara spesifik untuk dimaknai sebagai data pelengkap.

Instrumen yang digunakan yaitu; angket tertutup yang diisi oleh responden. Instrumen dikembangkan dengan memodifikasi asesmen teknologi asistif dari (Kurniawan, 2013) dan (Scherer, 2012). Aspek dalam instrumen disesuaikan dengan tipologi teknologi asistif dan karakteristik anak hambatan penglihatan di SLB.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

Tipe teknologi asistif yang digunakan SLB untuk anak hambatan penglihatan masih terbatas pada *low technology*. Ketersediaan paling besar didukung oleh dana pemerintah. Data ketersediaan teknologi asistif berbanding terbalik dengan kebutuhan sekolah yaitu peralatan berbasis *high technology*. Kebutuhan peralatan *high technology* diharapkan dapat memperlancar pembelajaran jarak jauh pada saat ini. Faktor biaya yang mahal dalam pemenuhan peralatan tersebut, maka guru menginginkan adanya pelatihan khusus untuk merancang teknologi asistif sederhana namun akomodatif bagi anak hambatan penglihatan sehingga terjangkau oleh semua sekolah. Pertanyaan Penelitian Pertama: Ketersediaan teknologi asistif bagi anak hambatan penglihatan yang mencakup media pembelajaran, peralatan orientasi mobilitas dan alat bantu pendukung aktivitas dari *low*, *middle* dan *high technology*.

Tabel 1. Ketersediaan Teknologi Asistif

No.	Nama	Total	Persentase
1.	Buku Braille	36	28,57%
2.	Huruf Taktual	17	13,49%
3.	Guiding block	13	10,32%
4.	Braille Converter	2	1,59%
5.	Reglet dan Stylus	40	31,75%
6.	Screenreader	2	1,59%
7.	White and Long Cane	5	3,97%
8.	kacamata	1	0,79%
9.	Sensoroptik	2	1,59%
10.	Media taktual	2	1,59%

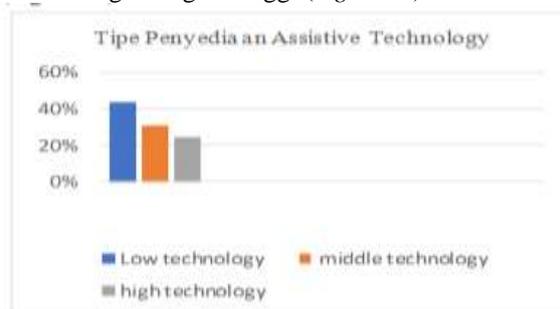
Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa ketersediaan teknologi assistive paling banyak berupa riglet dan stylus sebesar 31.75%. Kedua peralatan ini sering digunakan untuk anak hambatan penglihatan dalam kegiatan akademik membaca, menulis dan berhitung. Reglet dan stylus menjadi pilihan peserta didik hambatan penglihatan karena ringan, praktis dan mudah dibawa kemanapun. Urutan kedua, penyediaan paling banyak berupa buku cetak Braille sebesar 28.57% dan huruf timbul sebesar 13.49%. Ketiga urutan terbanyak dalam ketersediaan bagi anak hambatan penglihatan masih termasuk dalam low technology. Kendala yang dialami saat ini yaitu penggunaan teknologi assistive tipe *low-technology* sulit diimplementasikan dalam pembelajaran jarak jauh. Hasil lain mengungkap kebutuhan guru dalam penggunaan teknologi assistive bagi anak hambatan penglihatan dalam pembelajaran.

Pertanyaan Penelitian Kedua: Kebutuhan teknologi asistif yang mendukung pembelajaran daring bagi anak hambatan penglihatan. Adapun kebutuhan guru dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Kebutuhan Teknologi Asistif**

NO.	NAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Buku Audio	37	28.03%
2.	Buku Braille	30	22.72%
3.	Media Taktual	13	9.85%
4.	Screen reader	52	39.39%

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa kebutuhan guru dalam pembelajaran bagi anak hambatan penglihatan paling banyak yaitu screen reader sebesar 39.39% dan buku atau media berbasis audio sebanyak 28.03%. Data kebutuhan guru berbanding terbalik dengan ketersediaan teknologi assistive di sekolah. Ketersediaan di sekolah didominasi oleh teknologi assistive tipe *low-technology*, sedangkan kebutuhan guru menunjukkan dominasi tipe *high-technology*. Jenis teknologi assistive yang dibutuhkan berupa aplikasi datau software yang dapat digunakan oleh anak hambatan penglihatan secara praktis. Peralatan dibutuhkan berupa komputer bicara, MBC, *Voice recorder*, *Sreen reader*, Printer braille, *keyboard* braille, *Audio book*, mesin tik braille, kalkulator berbicara, jam berbicara dan kompas berbicara yang merupakan teknologi asistif dengan tingkat tinggi (*high tech*).

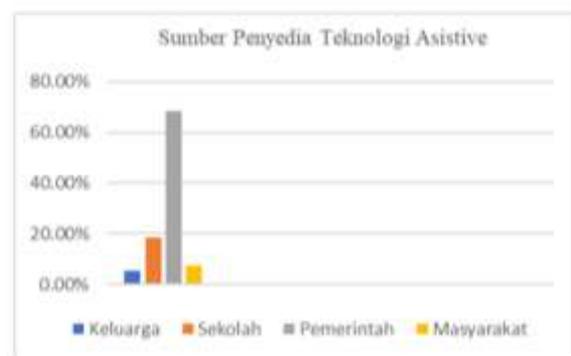


Gambar 1. Tipe Penyediaan Teknologi Asistif

Berdasarkan grafik 1 diketahui bahwa ketersediaan teknologi assistive terbanyak dalam pembelajaran bagi anak hambatan penglihatan yaitu tipe *low technology* sebanyak 44%. Penyediaan

teknologi assistive di sekolah masih terbatas pada perangkat keras seperti media pembelajaran baca, tulis dan berhitung yang mengandalkan indera perabaan. Peralatan yang tersedia berupa papan huruf Braille, petunjuk Braille, peta timbul, guiding block dan sebagainya. Peralatan teknologi assistive dalam kategori *high-technology* hanya tersedia sebanyak 24,9% seperti aplikasi arah, sensor pada tongkat, komputer bicara dan sebagainya.

Pertanyaan Penelitian Ketiga: Penyedia teknologi asistif bagi anak hambatan penglihatan dengan melihat dukungan dari keluarga, sekolah dan pemerintah termasuk komunitas atau masyarakat. Pemenuhan teknologi assistive perlu diketahui sumbernya sebagai dasar untuk penetapan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru di tahun berikutnya. Adapun data tentang sumber penyediaan teknologi assistive dapat dilihat pada grafik 2 berikut.



Gambar 2. Sumber Penyedia Teknologi Assitif

Berdasarkan grafik 2 diketahui bahwa sumber penyediaan teknologi assistive paling banyak diperoleh dari pemerintah pusat maupun daerah sebanyak 68,43%. Bentuk bantuan diberikan melalui hibah atau bantuan operasional sekolah. Artinya, pemenuhan kebutuhan teknologi assistive bagi anak hambatan penglihatan masih sangat tergantung dengan pemerintah. Jika ketergantungan ini semakin tinggi, maka fasilitasi dalam memberikan akomodasi pembelajaran bagi anak hambatan penglihatan semakin terkendala. Peran guru dan pihak sekolah, sebaiknya dapat menyediakan teknologi assistive bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan karena mengetahui secara pasti profil peserta didik melalui asesmen. Minimnya penyediaan teknologi assistive dari guru maupun pihak sekolah menjadi satu penyebab tidak tercapainya hasil belajar siswa secara maksimal. Dari data diketahui bahwa penyediaan teknologi assistive dari guru ataupun pihak sekolah hanya sebesar 18,7%. Sedikitnya ketersediaan teknologi assistive dari guru ataupun pihak sekolah karena faktor berikut:

1. Belum ada kebijakan dari sekolah tentang penyediaan teknologi assistive bagi anak hambatan penglihatan.
2. Terbatasnya anggaran biaya sekolah untuk memberi peralatan.
3. Biaya alat teknologi assistive yang mahal.

4. Belum adanya bentuk Kerjasama dengan keluarga maupun Lembaga non pemerintah dalam penyediaan teknologi assistive..
5. Kurangnya pengetahuan guru dalam merancang teknologi assistive.
6. Tidak ada pelatihan bagi guru dalam merancang teknologi assistive.

Adanya faktor penghambat ketersediaan tersebut, maka guru berkeinginan adanya pelatihan sebagai sarana peningkatan kompetensi guru. Kompetensi dalam merancang teknologi assistive sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik hambatan penglihatan namun harga produksi dan peralatan masih tetap terjangkau. Pelatihan dapat dilakukan dalam tingkat sekolah ataupun regional. Di samping itu, harapan adanya bahan ajar berupa modul tentang cara pembuatan teknologi assistive yang mudah dan praktis dipahami oleh guru.

### 3.2 Pembahasan Penelitian

Teknologi asistif adalah peralatan khusus yang diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, termasuk anak hambatan penglihatan sehingga dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri (Bryant, 2012). Anak hambatan penglihatan dapat dikatakan sebagai individu yang mengalami kerusakan pada bagian mata sehingga tidak dapat melihat benda meskipun sudah menggunakan kacamata, didalamnya terdapat anak buta total dan low vision (Gargiulo, 2006) (Kauffman, 2009). Teknologi asistif bagi anak hambatan penglihatan dapat digunakan untuk mendukung aktivitas hidup sehari-hari dan akademik. Teknologi asistif dalam bidang akademik seperti pra-akademik, peralatan baca tulis, alat berhitung, alat belajar ilmu pengetahuan alam, alat untuk orientasi mobilitas dan permainan (Senjam, 2019). Penggunaan teknologi asistif terbanyak berbasis taktual dengan alasan: buku Braille, reglet, stylus lebih mudah tersedia dan harga lebih murah, tidak semua sekolah mampu menyediakan teknologi asistif modern, guru masih kesulitan beradaptasi dengan penggunaan peralatan terkini (Senjam, Foster, Bascaran, Vashist, & Gupta, 2019).

Aksesibilitas dalam menggunakan teknologi asistif didahului dengan adanya asesmen sehingga dapat melakukan akomodasi sesuai kebutuhan anak hambatan penglihatan. Contohnya pada era saat ini yaitu akses penggunaan sumber belajar digital (Nisbet, 2020). Penciptaan aksesibilitas tidak lepas dari kompetensi guru, (Zhou, et al., 2012) menemukan hasil bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi asistif sehingga pelatihan tentang teknologi asistif masuk di setiap universitas maupun agenda pelatihan dinas pendidikan setempat. Kompetensi guru hendaknya tidak hanya dilakukan satu kali pelatihan melainkan secara periodic untuk mengukur keterampilan organisasi teknologi asistif sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman (Ogirima,

Emilia, & Juliana, 2017). Evaluasi diri dan refleksi para guru mengenai pengetahuan dan keterampilan menggunakan teknologi asistif menunjukkan angka 74,32% tidak sesuai harapan, artinya kompetensi guru belum dapat memberikan layanan terbaik bagi anak hambatan penglihatan (Zhou, Parker, Smith, & Griffin-Shirley, 2011). Pengetahuan dan keterampilan guru menjadi salah satu faktor penting ketepatan penggunaan teknologi asistif bagi anak hambatan penglihatan (Zhou, Parker, Smith, & Griffin-Shirley, 2011). Rancangan teknologi asistive bagi anak hambatan penglihatan perlu dilengkapi dengan evaluasi kualitatif yang terkait dengan ketersediaan informasi yang mendukung aktivitas, pemberian informasi secara akurat dan terbuka dengan adanya umpan balik dari pengguna (Kurniawan, 2013).

Ketersediaan teknologi assistive paling banyak bersumber dari pemerintah, sedangkan sumber dari guru maupun pihak sekolah termasuk kecil. Sekolah terkadang menjadi tempat yang kurang konsisten dalam penyediaan dan penggunaan teknologi assistive bagi anak hambatan penglihatan dalam pembelajaran (Cohen, 2011). Keluarga juga merupakan elemen terkecil dalam pemenuhan teknologi assistive bagi anak hambatan penglihatan. Keterlibatan orangtua dalam penggunaan teknologi assistive berhubungan dengan kesuksesan anak hambatan penglihatan dalam mengakses teknologi assistive sama baiknya seperti di sekolah (Kelly, 2011). Faktor kendala tidak tersedianya teknologi assistive bagi anak hambatan penglihatan karena guru ataupun pihak sekolah belum memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam merancang teknologi assistive sesuai profil peserta didik. Hal ini dapat disebabkan karena guru tidak memahami secara tepat bahwa penggunaan teknologi assistive dapat bermasyarakat lingkungan sekitar sehingga peserta didik memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Zhou, Parker, Smith, & Griffin-Shirley, 2011).

Ketergantungan pada pemerintah untuk menyediakan teknologi asistif sangat tinggi, persepsi ini dapat diberikan solusi melalui adanya pelatihan, workshop peningkatan kapasitas guru dengan mengupdate pengetahuan serta keterampilan mengorganisasikan teknologi asistif secara regular (Chukwuemeka & Samaila, 2020). Pengelola pelatihan akan mendapatkan hasil efektif apabila dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, sekolah, orangtua dan stakeholder yang terkait (Hong & Cohen, 2011). Keterlibatan orangtua melalui pertemuan, pelatihan dan diskusi terbukti dapat meningkatkan keterampilan anak hambatan penglihatan dalam menggunakan teknologi asistif di berbagai tingkatan dan jenjang sekolah (Kelly, 2009). Pelatihan awal dapat dimulai dengan peningkatan kesadaran sekolah dan orangtua tentang pentingnya teknologi asistif sehingga mengadakan pertemuan untuk mendesain kurikulum maupun rancangan

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan capaian hasil belajar anak hambatan penglihatan (Akpan & Beard, 2013).

Ketersediaan teknologi assistive masih banyak pada tipe low technology yang menggunakan media berbasis perabaan seperti buku cetak braille, reglet maupun stylus. Stimulasi tactual berkaitan dengan posisi kulit sebagai sarana penerimaan informasi yang selanjutnya diproses melalui cortical cortex (Pawluk, Adams, & Kitada, 2015). Pemahaman akan suatu konsep tidak hanya melalui tactual, namun perlu diperkuat dengan indera pendengaran melalui verbalisme atribut konsep yang akan dipelajari. Perlu adanya perhatian khusus dan perencanaan ekstra untuk menggunakan teknologi asistif tingkat tinggi dalam pembelajaran. (Kelly S. M., 2011) menemukan fakta bahwa ada hubungan antara penggunaan teknologi asistif tingkat tinggi dengan pemerolehan pekerjaan bagi anak hambatan penglihatan terutama pada sikap kompetitif dan tidak tertinggal jauh secara akademik dibandingkan anak regular pada umumnya. Kebutuhan dalam penyediaan teknologi assistive terbanyak berupa screen reader. Screen reader menjadi pilihan karena memudahkan anak hambatan penglihatan dalam memahami informasi. Kejelasan suara dari screen reader tidak hanya berfokus pada dialek membaca layar, tetapi mengindikasikan tipe dari file yang dibaca ketika terjadi permasalahan atau kesalahan bentuk file (Johnson, 2008). Optimalisasi teknologi asistif dalam pembelajaran tidak hanya sekedar menyediakan peralatan tersebut, namun keterampilan dan responsibilitas guru terhadap kemampuan terkini pada anak hambatan penglihatan perlu dikembangkan sebagai kompetensi profesional (Sze, 2009). Screen reader merupakan teknologi assistive yang paling banyak dibutuhkan saat pembelajaran daring karena mampu memberikan peta kognitif bagi anak hambatan penglihatan (Sabella, 2017).

#### 4. KESIMPULAN

Jenis teknologi asistif yang digunakan oleh sekolah luar biasa untuk anak hambatan penglihatan masih sebatas teknologi rendah. Alat bantu teknologi sebagian besar didukung oleh dana pemerintah. Data ketersediaan teknologi asistif berbeda dengan data kebutuhan sekolah yaitu peralatan teknologi tinggi. Kebutuhan peralatan teknologi tinggi karena sekolah perlu memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Mahalnya biaya menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan teknologi bantu yang tinggi, sehingga guru menginginkan pelatihan khusus untuk merancang teknologi asistif yang sederhana dan terjangkau untuk semua sekolah tetapi dapat mengakomodasi anak hambatan penglihatan.

#### 5. REFERENSI

Akpan, J. P., & Beard, L. A. (2013). Overview of Assistive Technology Possibilities for Teachers to Enhance Academic Outcomes

of All Students. *Universal Journal of Educational Research*, 113-118.

- Bryant, D. P. (2012). *Assistive Technology for People with Disabilities*. USA: Pearson.
- Chukwuemeka, E. J., & Samaila, D. (2020). Teachers' Perception and Factors Limiting the use of High-Tech Assistive Technology in Special Education Schools in North-West Nigeria. *Contemporary Educational Technology*, 99-109.
- Cohen, M. E. (2011). School, Family and Other Influences on Assistive Technology Use. *The British Journal of Visual Impairment*, 130-144.
- Gargiulo, R. (2006). *Special Education in Contemporary Society*. USA: McMillan.
- Gargiulo, R. M. (2012). *Special Education in Contemporary Society 4th Edition*. USA: SAGE.
- Hadi, P. (2005). *Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Hermanto, & Supena, A. (2021). Implementasi Pembelajaran Daring bagi Siswa Tunanetra di Sekolah Dasar. *BASICEDU: Research and Learning in Elementary Education*, 188-194.
- Hong, M. E., & Cohen, L. (2011). School, Family And Other Influences On Assistive Technology Use Access And Challenges For Students With Visual Impairment In Singapura. *The British Journal of Visual Impairment*, 130-144.
- Johnson, M. A. (2008). *Assistive Technology for Visually Impaired and Blind People*. London: Springer.
- Kauffman, D. H. (2009). *Excetional Learner 11th Edition*. Virginia: Pearson.
- Kelly, S. M. (2009). Use of Assistive Technology by Student With Visual Impairment: Findings Form National Survey. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 470-480.
- Kelly, S. M. (2011). The Use of Assistive Technology by High School Students with visual impairment: a second Look at the Current Problem. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 235-239.
- Kelly, S. M. (2011). The Use of Assistive Technology by High School Students with Visual Impairments: A Second Look at the Current Problem. *journal of Visual Impairment & Blindness*, 235-239.
- Kurniawan, R. M. (2013). *Assistive Technology for Blindness and Low Vision*. London: CRC Press.
- Nisbet, P. d. (2020). Assistive Technologies to Access Print Resources for Students with Visual Impairment: Implications for Accomodations in High Stakes Assessments. *British Journal of Visual Impairment*, 222-247.

- Ogirima, O. A., Emilia, O. O., & Juliana, O. B. (2017). Teachers' Attitude And Competence In The Use Of Assistive Technologies In Special Needs Schools. *Acta Didactica Napocensia*, 1-32.
- Organization, W. H. (2016). *Global Cooperation on Assistive Technology (GATE)*. Jenewa: WHO.
- Pawluk, D. T., Adams, R. J., & Kitada, R. (2015). Designing Haptic Assistive Technology for Individuals Who Are Blind or Visually Impaired. *IEEE Transactions on Haptics*, 258 - 279.
- Putri, S. N., & Taufan, J. (2021). Permasalahan Dalam Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *JUPEHKU: Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus*, 41-45.
- Rahmawati, E. (2021). *Problematika Pembelajaran Pai Secara Daring Bagi Anak Tunanetra (Studi Kasus Di SmpIb-A Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta Gebang Putih Surabaya)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel .
- Sabella, S. (Assistive Technology Recent developments and advancements for individuals with disabilities). *Scott Sabella*. Colorado: University of Bufallo.
- Scherer, S. F. (2012). *Assistive Technology Assessment Handbook*. London: CRC Press.
- Senjam, S. S. (2019). Assistive Technology for People with Visual Loss. *Delhi Journal of Ophthalmology*, 7-12.
- Senjam, S. S., Foster, A., Bascaran, C., Vashist, P., & Gupta, V. (2019). Assistive Technology for Students with Visual Disability in Schools for the Blind in Delhi. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 1-8.
- Somantri, S. (2007). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sunanto, J. (2005). *Mengembangkan Potensi Anak Berkelainan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sze, S. (2009). The Effects Of Assistive Technology The Effects Of Assistive Technology. *Journal Educational Technology Systems*, 419-429.
- Zhou, L., Ajuwon, P. M., Smith, D. W., Griffin-Shirley, N., Parker, A. T., & Okungu, P. (2012). Assistive Technology Competencies for Teachers of Students with Visual Impairments: A National Study. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 656-665.
- Zhou, L., Parker, A. T., Smith, D. W., & Griffin-Shirley, N. (2011). Assistive Technology for Students with Visual Impairments: Challenges and Needs in Teachers Preparation Programs and Practice. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 197-211.

# PENGARUH CALON ARTIS LEGISLATIF TERHADAP PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

Oleh:

Edah Jubaedah<sup>1</sup>, Idrus Affandi<sup>2</sup>, Leni Anggraeni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>1</sup>edahj888@gmail.com

## Abstrak

Aktivitas warga negara tidak terlepas dari politik, pengalaman hak dan kewajiban, serta partisipasi publik. Salahsatu bentuk aktivitas yaitu pemilihan umum 2019 terkhusus di pemilihan umum legislative di kota Bandung, munculnya keterlibatan artis pada dunia politik baik sebagai artis *endorsement* maupun sebagai artis politik tentunya akan menghasilkan perilaku politik dan perilaku pemilih yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan terdapat pengaruh calon legislative artis terhadap perilaku pemilih masyarakat di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih masyarakat kota Bandung memiliki pengaruh yang kuat. Terbukti dari hasil analisis data yang menunjukkan hasil hubungan korelasi sebesar 0,6222 serta menunjukkan H0 di tolak H1 sehingga menunjukkan ada hubungan antara calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih masyarakat di kota Bandung, sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

**Kata Kunci:** Pemilhan Umum Legislatif, Legislatif Artis, Perilaku Pemilih.

## 1. PENDAHULUAN

Pesta demokrasi berupa pemilihan umum selalu mengalami pembaharuan yang khas disetiap tahunnya, seperti pemilu 2019 yang pembaharuannya terletak pada keserentakan proses pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR baik pusat maupun daerah, bahkan DPD, sehingga diklaim sebagai pemilu paling rumit di dunia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan landasan konstistusional Hak Asasi Manusia, maka dengan itu setiap warga negara memiliki kesempatan dalam bidang apapun, terkhusus dalam bidang politik, termasuk untuk kalangan artis. Pada kontestasi pemilihan umum DPR RI kita bisa melihat bagaimana banyaknya kalangan artis yang mengikuti kontestasi pemilihan umum tersebut. Kita temui khususnya di kota Bandung ada beberapa artis yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Legislatif tersebut diantaranya pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Partisipasi Artis dalam Pemilu DPR RI Dapil 1 Jabar Tahun 2019

No	Partai Pengusung	Nama Kandidat	Acad Profesi
1	PDI Perjuangan	1. Nico Sabhan 2. Karana Larasati	Presenter Aktis
2	Gerakan	1. Tomy 2. Nurul Arifin	Penyanyi Penyanyi
3	NasDem	1. Muhamad Fachan 2. Arief Sodikoto 3. Citra Skulastika	Penyiar Berita Penyiar Berita Penyanyi
4	Perindo	Chocky Sutuhang	Presenter
5	PSI	Giring Ganesha	Penyanyi
6	Demokrat	Ricky Subaga	Mantri Tanjung

Sumber: KPU Kota Bandung, 2019

Tidak ada yang salah dengan kondisi meningkatnya keterlibatan artis dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Faktanya idealisme dan integritaslah yang menentukan politisi tersebut berhasil mengemban amanah atau tidak. Keterbukaan peluang saat ini, mengakibatkan seseorang yang ingin berkarir sebagai politisi, tidak harus selalu melalui sistem kaderisasi partai, tetapi dengan memiliki modal serta keterkenalan publik, otomatis individu tersebut memiliki celah untuk menjadi calon wakil rakyat (Shuib, Keling, & Ajis, 2018). Dengan hadirnya keterlibatan artis dalam pileg 2019 tentunya ini juga akan memberikan dampak dan pengaruh bagi masyarakat kota Bandung. Karena faktanya pemilihan umum tidak akan lepas dngan bagaimana karakteristik perilaku pemilih warga negaranya.

Menurut (Khairunnas, Agustino, & Sumadinata, 2018, hlm. 99) menjelaskan bahwa perilaku politik masyarakat terhadap pemili dapat dipengaruhi oleh isu dan kebijakan politik, agama dan keyakinan serta figure kandidat yang akan dipilih. Pengembangan keilmuan mengenai perilaku pemilih perlu dilakukan sebagai upaya menambah keberagaman dalam teori ilmu politik, terutama keterkaitan antara pengaruh calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih di kota Bandung. Perilaku pemilih yang diharapkan tentunya pemilih yang mampu mengamalkan hak dan kewajiban, berkontribusi dalam pembangunanan negara serta untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penulisan ini kita akan menggali bagaimana pengaruh calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih di kota Bandung sebagai acuan dan harapan mewujudkan warga negara yang mampu mengamalkan hak politiknya serta mampu berkontribusi aktif dalam kepentingan umum.

## 2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Alasan Alasan memilih pendekatan penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini akan berusaha menggali informasi, mencari data, mengolah data dan menganalisis data terkait fokus penelitian bagaimana pengaruh calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih di kota Bandung yang diperkuat oleh pendapat (Sugiyono, 2017, hlm. 14) mengungkapkan bahwa metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi, sampel, teknik pengambilan sampel dengan *random sampling*, serta analisis data yang bersifat kuantitatif statistic dengan tujuan menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, karena dalam penelitian ini berusaha menggali, mneumpulkan dan menganalisis bagaimana respon masyarakat kota Bandung terhadap calon legislatif artis dengan pilihan jawaban menggunakan skala Likert. Menurut (Arikunto, 2019, hlm. 78) mengungkapkan bahwa angket digunakan untuk penelidikan dalam suatu masalah kepentingan banyak, dengan cara menyebarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis untuk mendapatkan sebuah jawaban. Kedua, teknik observasi dengan tujuan untuk melihat bagaimana respon dan pengaruhnya terhadap variabel yang diajukan. Menurut (Triyadi, 2018) yang menjelaskan observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Ketiga teknik pengumpulan data berdasarkan dokumentasi dimana membantu peneliti dalam menambah sumber informasi penting untuk keperluan penelitian. Menurut Sugiyono (2016) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Hasil Penelitian

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung secara geografis terletak di antara 107° 36' Bujur Timur dan 6° 55' Lintang Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, dan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan yaitu barat – timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara sedangkan utara – selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).

Kota Bandung secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 167, 31 Km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 30 kecamatan dan 151 kelurahan memiliki kegaraman potensi baik potensi fisik maupun potensi sosial di dalamnya. Potensi fisik yang sangat melimpah dan potensis soial yang sangat heterogen menjadikan kota Bandung sebagai ibu kota provinsi

Jawa Barat (Badan Pusat Statistika Kota Bandung, 2018).

Secara tingkat kependudukan, kota Bandung memiliki tingkat kependudukan yang sangat tinggi yaitu 2.497.938 jiwa. Dalam dau atahun pertumbuhan penduduk kota Bandung bertambah sebesar 0,29 % sejak 2016 hingga 2018. Tingkat kepadatan kota Bandung ini di dominasi oleh rentang usia produktif antara usia 20-24 tahun dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 249.461 jiwa (Badan Pusat Statistika Kota Bandung, 2018).

Jumlah penduduk total masyarakat kota Bandung beradsarkan kriteria partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum DPR RI Kota Bandung Tahun 2019 yaitu sebesar 1.488.824 jiwa yang tersebar di berbagai 30 kecaamatan (KPU Kota Bandung, 2019). Sedangkan jumlah partisipasi artis sebagai kandidat dalam Pemilihan Umum DPR RI Kota Bandung ada 10 orang diantaranya Nico Siahaan (PDI Perjuangan), Tetty (Golkar), Nurul Arifin (NasDem), Airef Suditomo (NasDem), Citra Skolastika (NasDem), Chocky Sitohang (Perindo), Giring Nidji (PSI) dan Ricky Subagja (Demokrat) (KPU Kota Bandung, 2019).

### 2) Pembahasan

Gambar 1.1

Pengaruh calon legislative artis terhadap perilaku pemilih di kota Bandung



Berdasarkan gambar diagram di atas, pandangan mengenai calon legislatif artis dapat mempengaruhi perilaku pemilih di kota Bandung menunjukkan angka persentase (Sangat Setuju 7,7%), (Setuju 41,7%), (Netral 34,7%), (Tidak Setuju 11,9%) dan (Sangat Tidak Setuju 4%). Berdasarkan perolehan data pesentasae tersebut menandakan bahwasannya calon legislatif artis dapat mempengaruhi perilaku pemilih di kota Bandung.

Sedangkan untuk mengukur pengaruh calon legislative artis terhadap perilaku oemilih di kota Bandung, kita dapat melihat pada tabel uji korelasi sebagai berikut:

Tabel  
1.2 Uji Korelasi

Correlations				
			Caleg Artis	Perilaku Pemilih
Spearman's rho	Caleg Artis	Correlation Coefficient	1.000	.622**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	400	400
	Perilaku Pemilih	Correlation Coefficient	.622**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	400	400

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan *output* hasil perhitungan SPSS di atas, diketahui nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) sebesar 0,000 karena nilai Sig.(2-tailed) < lebih kecil dari 0,05, maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan (berarti) antara variabel Calon Legislatif Artis (X) terhadap Perilaku Pemilih (Y). Kemudian jika melihat besarnya pengaruh variabel Calon Legislatif (X) Artis terhadap Perilaku Pemilih (Y) yaitu sebesar 0,6222. Untuk melihat tingkat pengaruh variabel, maka dapat menggunakan dasar pedoman kekuatan hubungan pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Pedoman Korelasi

No	Hasil Perhitungan SPSS	Keterangan
1.	0,00 – 0,25	Korelasi sangat lemah
2.	0,26 – 0,50	Korelasi cukup
3.	0,51 – 0,75	Korelasi kuat
4.	0,76 – 0,99	Korelasi sangat kuat
5.	1,00	Korelasi sempurna

(Sudjana, 2014, hlm. 231)

Berdasarkan tabel pedoman kekuatan hubungan di atas, karena hasil uji korelasi pada tabel 2 sebesar 0,6222 maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih memiliki hubungan pengaruh yang kuat.

Menurut (Putra, 2016, hlm. 77) mengungkapkan bahwa hubungan artis dalam dunia politik dapat dibagi menjadi dua. Pertama hubungan artis sebagai *artist endorsement* dimana artis memainkan peran sebagai pendukung dalam kontestasi politik orang lain atau partai politik. Kedua hubungan artis sebagai *artist politician* dimana artis yang secara langsung turut ikut dalam kontestasi politik, salahsatunya ialah sebagai kandidat dalam pemilihan umum legislatif di kota Bandung tahun 2019 (Subiako & Kafid, 2016). Menurut (Affandi, 2011, hlm. 54) mengungkapkan bahwa keterlibatan artis dalam dunia politik bisa saja dipengaruhi oleh komoditas yang dimiliki oleh artis untuk membantu suara partai politik. Menurut Menurut Lubis dalam (Heider Dkk, 2018, hlm. 79) menyatakan bahwa keberadaan artis dalam lingkungan masyarakat memang tidak dapat dipisahkan, sebab artis bisa menjadi aktor sosial yang menarik perhatian publik, semakin besar jumlah orang yang tahu dan memperhatikan aktor, maka semakin besar pula tingkat kepopuleran artis tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi semakin maraknya artis masuk ke dunia politik menurut (Putri dan Muradi, 2017, hlm. 70) yaitu perubahan perilaku pemilih masyarakat Indonesia ke aliran ideologi partai politik yang berbasis pada figure individu. Pengaruh calon legislative artis terhadap perilaku pemilih pun menghasilkan perilaku pemilih berdasarkan pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional.

Dalam menentukan pilihan berdasarkan pendekatan psikologis masyarakat kota Bandung 43% yang didasarkan atas pertimbangan latar belakang lingkungan tempat tinggal dan keluarga. Kedua pendekatan psikologis masyarakat kota Bandung menyatakan 37% setuju yang didasarkan pada faktor-faktor kepribadian kandidat, kepemimpinan dan ketokohan kandidat, kinerja kandidat, visi misi yang dibawakan kandidat serta partai politik yang mengusung kandidat. Menurut (Anggraeni, 2019, hlm. 25) menyebutkan bahwa indikator dalam *personal branding* meliputi kemampuan, perilaku, gaya hidup, misi, pencapaian, profesi dan layanan merupakan indikator *personal branding* yang akan menjadi pertimbangan dan juga menjadi sesuatu yang diharapkan oleh pemilih sehingga apabila masyarakat telah mengetahui hukum spesialisasi dari *personal branding* si kandidat maka akan meminimalisasi munculnya ketidakpercayaan terhadap kandidat.

Dalam menentukan pilihan berdasarkan pendekatan psikologis menurut (Miaz, 2017) yaitu pemilih menentukan berdasarkan identifikasi partai yang mengusung, akan jauh lebih mempengaruhi bagaimana pemilih menentukan pilihannya. Menurut (Mirza & Cempaka, 2015) partai politik dapat membuat kemenangan suara si kandidat termasuk artis yang dicalonkan. Pendekatan sosiologis menurut (Kantaprawira, 2004) menentukan pemilih berdasarkan latar belakang demografi sosioal ekonomi, pendidikan, pekerjaan agama, dan tempat tinggal. Menurut (Ardiani, Sri Kartini, & Ganjar Herdiansyah, 2019) pada pendekatan rasional ini menentukan pilihan berdasarakan dari produk kalkulasi untung dan rugi.

#### 4. KESIMPULAN

Pengaruh calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih masyarakat kota Bandung memiliki pengaruh yang kuat. Terbukti dari hasil analisis data yang menunjukkan hasil hubungan korelasi sebesar 0,6222 serta menunjukkan H0 di tolak H1 sehingga menunjukkan ada hubungan antara calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih masyarakat di kota Bandung, sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

Pengaruh dari keterlibatan artis khususnya dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Bandung telah menghasilkan pola perilaku pemilih yang aktif dan variatif. Dalam menentukan pilihannya, pertama perilaku pemilih masyarakat kota Bandung 43 % mengambil keputusan berdasarkan

pendekatan sosiologis dimana masyarakat kota Bandung lebih mempertimbangkan keputusan suara berdasarkan dari latar belakang tempat tinggal, lingkungan keluarga dan kecenderungan lingkungan sosialnya. Kedua perilaku pemilih masyarakat kota Bandung 37% menentukan pilihannya berdasarkan pendekatan psikologis yang melihat dari kepribadian kandidat, kepemimpinan dan ketokohan, popularitas, kinerja, visi misi dan partai politik yang mengusung calon.

Sejatinya masyarakat kota Bandung bersikap terbuka dan netral dengan hadirnya calon legislatif artis dengan catatan artis tersebut mampu memiliki daya kemampuan merakyat dimana mampu mehidupkan aspirasi-aspirasi yang dibutuhkan oleh rakyatnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Affandi, I. (2011). *Pendidikan Politik; Mengefektifkan Organisasi Pemuda Melaksanakan Politik Pancasila dan UUD 1945*. Cimahi: Universitas Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan Mutiara Press.
- Affandi, Idrus dan Anggraeni, Leni. (2011). *Pendidikan Politik*. Bandung: Lensa Media Pustaka Indonesia.
- Arikunto. (2019). Metodologi Penelitian, Suatu Pengantar Pendidikan. In *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Kantaprawira, R. (2004). Sistem Politik Indonesia. *Bandung: Sinar Baru Algesindo*.
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi. In *artispasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi*.
- Sugiyono. (2017). Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi. In *Metodelogi Penelitian*.
- Sugiyono, P. D. metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. , Alfabeta, cv. (2016).

### Sumber Jurnal

- Anggraeni, Leni. (2019). *Analysis of Laws of Specialization for Presidential Candidates in the 2019 General Election in Bandung – Indonesia*. International Journal of Indonesian Society and Culture. Vol. 11 No. 2, hlm. 77.
- Khairunnas, K., Agustino, L., & Sumadinata, W. S. (2018). Chinese Ethnic Youth's Voting Behavior in the 2018 Palembang Mayoral Election. *Journal of Moral and Civic Education*.  
<https://doi.org/10.24036/8851412222018102>.
- Lubis, Sahrudin. (2015). Artis Kegiatan Politik: Studi Keterlibatan Artis Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Ilmu dan Budaya*. 13 (2).
- Ardiani, D., Sri Kartini, D., & Ganjar Herdiansyah, A. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk

Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Socius*.

<https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>

- Khairunnas, K., Agustino, L., & Sumadinata, W. S. (2018). Chinese Ethnic Youth's Voting Behavior in the 2018 Palembang Mayoral Election. *Journal of Moral and Civic Education*.

<https://doi.org/10.24036/8851412222018102>

- Mirza, N. A., & Cempaka, D. (2015). Peran Facebook Dalam Komunikasi Politik Bagi Pemilih Pemula. *Decision Support Systems*.  
<https://doi.org/10.1016/j.dss.2003.08.004>

- Putra, A. D. T. (2016). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*.  
<https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11056>

- Putri dan Muradi. (2017). Popularitas Artis sebagai Alat Kosmetika Politik. Pascasarjana Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3 (1).

- Shuib, M. S., Keling, M. F., & Ajis, M. N. (2009). The Concept of Mahathiriskonomisme: An Economic Recovery Model during Crisis. *Journal of Politics and Law*.  
<https://doi.org/10.5539/jpl.v2n1p75>

- Subiakto, A. B., & Kafid, N. (2016). Strategi Defensif dan Ofensif Parpol Berbasis Massa Islam dalam Mencapai Parliamentary Threshold pada Pemilu 2014. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*.  
<https://doi.org/10.22515/shahih.v1i2.388>

- Triyadi. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Kompetensi Sistem Bahan Bakar Kelas Xi Tkr Smk Muhammadiyah Prambanan. *Skripsi*.  
<https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### Skripsi

- Triyadi. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Kompetensi Sistem Bahan Bakar Kelas Xi Tkr Smk Muhammadiyah Prambanan. *Skripsi*.  
<https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>.

# STRATEGI REVITALISASI RANTAI PASOK MARITIM INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19

Oleh :

Mohammad Alfin Widyanto <sup>1)</sup>, Panji Suwarno <sup>2)</sup>, Bayu Asih Yulianto <sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan Indonesia  
malfinwidyanto@gmail.com

## Abstrak

Selama pandemic Covid-19 kegiatan rantai pasok di bidang maritime mengalami kelumpuhan menyebabkan seluruh stakeholder yang terdampak mengalami kendala yang tidak biasa, yang apabila kebijakan tersebut dilakukan dalam periode yang panjang dikhawatirkan dapat menimbulkan efek yang negatif bagi setiap stakeholder. Dikarenakan kegiatan rantai pasok pada masa normal memiliki sifat yang berlanjut, maka di saat pandemi pun tetap perlu digiatkan kembali walaupun dengan adanya keterbatasan. Tujuan artikel ini akan membahas strategi revitalisasi yang dapat direkomendasikan untuk membenahi rantai pasok maritime di Indonesia selama pandemic Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi literature dengan menggunakan analisa SWOT. Dari hasil yang didapatkan, maka kesimpulan yang dapat diberikan yaitu (1) Perlu adanya pembentukan otorita nasional yang mengintegrasikan kebutuhan pelabuhan dalam negeri dengan perusahaan pelayaran internasional di terminal dalam negeri serta pengendalian aset pelabuhan domestik selama pandemi; (2) Perlu adanya kerjasama antar pengusaha pelayaran domestik dengan perusahaan leasing global di masa pandemi.

**Kata Kunci :** Rantai Pasok Maritim, Strategi Revitalisasi, Pandemi Covid-19

## 1. PENDAHULUAN

Kegiatan rantai pasok merupakan suatu kegiatan yang sangat vital dikarenakan berkat kegiatan tersebut seluruh negara dapat terhubung serta memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Adapun platform rantai pasok yang banyak digunakan yakni melalui perantara maritim yang hasilnya pun dirasakan dalam bentuk aktivitas pelayaran dan perpindahan kontainer yang masif di setiap tahunnya. Selama pandemic Covid-19 kegiatan rantai pasok di bidang maritime mengalami kelumpuhan menyebabkan seluruh stakeholder yang terdampak mengalami kendala yang tidak biasa, dimulai dengan adanya pembatasan operasional sampai dengan adanya kebijakan *lockdown*, yang apabila kebijakan tersebut dilakukan dalam periode yang panjang dikhawatirkan dapat menimbulkan efek yang negatif bagi setiap stakeholder. Dikarenakan kegiatan rantai pasok pada masa normal memiliki sifat yang berlanjut, maka di saat pandemi pun tetap perlu digiatkan kembali walaupun dengan adanya keterbatasan.

Menurut pemaparan United Nations Conference on Trade and Development (2020) perdagangan maritim global akan turun 4,1% pada tahun 2020 karena gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh COVID-19, UNCTAD dalam *Review of Maritime Transport 2020*, yang dirilis pada 12 November. Laporan tersebut memperingatkan bahwa gelombang baru pandemi yang semakin mengganggu rantai pasokan dan ekonomi dapat menyebabkan penurunan yang lebih tajam. Pandemi telah mengirimkan gelombang kejut melalui rantai pasokan, jaringan pengiriman dan pelabuhan, yang mengarah pada penurunan volume kargo dan menggagalkan prospek pertumbuhan. Bagi sebagian besar negara di

Asia dan Pasifik, pelayaran merupakan pintu menuju ekonomi global dan bagi beberapa di antaranya, merupakan jalur kehidupan bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Negara-negara Asia-Pasifik telah melakukan upaya besar untuk mempertahankan operasional pelabuhan mereka sambil melindungi pekerja transportasi dan pelabuhan. Kontraksi produksi dan konsumsi yang masih berlangsung dan diperkirakan akibat COVID-19 menyebabkan perlambatan perdagangan maritim, mengurangi permintaan pengiriman dan lalu lintas dan perputaran pelabuhan. Strategi respon dari strategi aliansi pelayaran peti kemas, yaitu menghentikan pelayaran pada rute tertentu atau membatalkan panggilan pelabuhan, membuat pasokan jasa pelayaran semakin tidak stabil. Secara paralel, pembatasan terkait covid-19, telah menyebabkan kemacetan pelabuhan dan penundaan bongkar/muat kargo, merusak rantai pasokan dan konektivitas maritim daerah (United Nations,2020).

Dari sisi industri, tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang bagi industri transportasi laut. Mobilitas yang tinggi di industri transportasi laut sangat kontras dengan dampak pandemi, yang memaksa pemerintah berbagai negara untuk membatasi dan menekan orang dan mobilitas barang. Ini berdampak pada arus orang dan barang yang menjadi lebih lambat atau bahkan menghentikan aliran sama sekali. Selain itu terjadi kenaikan harga peti kemas yang signifikan karena produktivitas yang lebih rendah di sisi penawaran. Pandemi Covid telah memaksa berbagai negara untuk membatasi tingkat mobilitas sosial, termasuk di wilayah kerja. Ini telah mengakibatkan penurunan produktivitas pelabuhan, menyebabkan kemacetan dan keterlambatan bongkar/muat kargo. Keterlambatan tersebut menyebabkan penumpukan peti kemas di beberapa

pelabuhan dan menyebabkan kelangkaan di pelabuhan lain, sehingga mengharuskan untuk memindahkan kontainer kosong. Kegiatan reposisi ini secara signifikan meningkatkan permintaan untuk layanan pengiriman, yang menyebabkan kenaikan tarif angkutan peti kemas yang sangat tinggi (Samudra Indonesia, 2020).

Di Indonesia sendiri, kelangkaan kontainer dan masalah keterbatasan ruang pada kapal pengangkut logistik yang terus berlangsung dinilai sangat mempengaruhi rantai pasokan distribusi logistik secara domestik, terutama pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) karena arus rantai pasok terkonsentrasi dari Jakarta dan Surabaya. Pada sisi lain, hal tersebut bertentangan dengan kondisi riil atas aktivitas rantai pasok logistik dari Makassar dengan tujuan ke sejumlah daerah, terutama di KTI. Sejauh ini, kondisi tengah diperhadapkan pada tekanan ekstrim seiring dengan terjadinya kelangkaan kontainer hingga keterbatasan ruang kapal logistik. Untuk skala yang lebih besar, itu bisa membuat rantai pasok memburuk dan memiliki efek ganda terhadap ketersediaan barang hingga harga-harga melambung sehingga menahan upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 (Pusinformar TNI, 2021).

Sehingga dengan adanya kondisi tersebut menyebabkan adanya dampak beruntun yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa. Selain itu, pandemi covid ini pun tidak hanya berlangsung di dalam negeri tetapi berdampak juga dengan luar negeri, sehingga sampai dengan saat ini membuat rantai pasok ke dalam dan luar negeri melemah. Sejalan dengan itu menurut BPS dalam pasardana.id, menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia pada bulan lalu sebesar 10,53 miliar dolar AS, turun 13,40 persen dibandingkan April 2020 dan 28,95 persen dibandingkan Mei 2019 (Ronal, 2020). Oleh karena itu dengan adanya kondisi rantai pasok domestik yang rentan pada masa pandemic Covid-19, artikel ini bertujuan untuk membahas strategi revitalisasi yang dapat digunakan oleh kelembagaan yang bergerak di ranah rantai pasok maritime khususnya lembaga domestik dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 untuk mencapai kepentingan nasional.

Dalam tulisan ini penulis akan memfokuskan pembahasan dalam mendeskripsikan tantangan eksternal yang dialami Indonesia dari segi perdagangan dunia, serta tantangan internal kelembagaan rantai pasok maritime domestik dari sebelum pandemi hingga sampai pada situasi pandemic berdasarkan strategi revitalisasi pada penelitian Wijaya (2016). Adapun dari adanya strategi revitalisasi yang direkomendasikan, ini pun akan menimbulkan perubahan dimana menurut Alriani (2012) setiap perubahan dalam organisasi cenderung mendatangkan konflik, sehingga pembahasan pun akan dilanjutkan dengan manajemen konflik pada kelembagaan dalam penelitian Heridiansyah (2014) untuk menghadapi perubahan dari strategi revitalisasi

tersebut. Terakhir dari pembahasan tersebut akan di berikan kesimpulan umum dari strategi revitalisasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian metodologi yang digunakan yakni studi literatur. Menurut Melfianora (2019), penelitian kepustakaan dan studi pustaka/riset pustaka meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Pada riset pustaka (*library research*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Selain data, beberapa hal yang harus ada dalam sebuah penelitian supaya dapat dikatakan ilmiah, juga memerlukan hal lain seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Perdagangan Dunia

World Trade Organization merupakan suatu rezim perdagangan internasional yang telah lama dibentuk guna mengatur dan memberikan kondisi yang nyaman dalam perdagangan internasional. Harapan yang dialamatkan pada perundingan WTO ini sudah sewajarnya mengingat rezim ini dibentuk dan juga dijalankan oleh mayoritas negara-negara kaya dan makmur. Banyak sudah regionalisasi yang bermunculan di dunia tidak hanya dalam skala kecil, namun juga sudah merambah ke skala yang lebih besar lagi. *Trans Pacific Partnership*, *Transatlantic Trade and Investment Partnership*, dan yang terbaru adalah perundingan *Regional Comprehensive Economy Partnership* adalah segelintir nama regionalisasi bahkan dapat dibilang segelintir nama mega regionalisasi yang bermunculan dewasa ini untuk memenuhi tuntutan setiap negara untuk meningkatkan jumlah perdagangannya untuk meningkatkan perekonomian negaranya masing-masing. *Trans Pacific Partnership* yang merupakan mega regionalisasi yang awalnya dibentuk oleh 4 negara pasifik yang dikenal sebagai Pacific-4 (P4) yaitu Singapura, Chile, Selandia Baru dan Brunei

Dasar. Contoh lain dari terbentuknya mega regionalisme adalah *Transatlantic Trade and Investment Partnership* atau lebih dikenal sebagai TTIP. TTIP sendiri merupakan mega regionalisasi yang beranggotakan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebenarnya negara adikuasa ini dan juga kawasan ekonomi Eropa ini telah terlebih dahulu berkolaborasi sejak lama dalam pembentukan beberapa forum maupun organisasi internasional yang saat ini berdiri seperti IMF, OECD, World Bank dan lain sebagainya. Mega regionalisasi lainnya muncul di kawasan Asia juga. Seperti halnya TPP yang banyak beranggotakan negara Asia, mega regionalisasi yang satu ini beranggotakan semua negara Asia. *Regional Comprehensive Economy Partnership* merupakan mega regionalisasi di kawasan ASEAN. RCEP adalah blok perdagangan yang digagas oleh ASEAN setelah AFTA atau *Asean Free Trade Area*. RCEP merupakan gagasan yang dibicarakan pada saat Indonesia menjadi ketua ASEAN dan dikemukakan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum kepala negara ASEAN pada Bali Summit tanggal 17 November 2011 (Parna, 2017).

#### **Tantangan RCEP Untuk Negara-Negara ASEAN**

Karena prospek TPP yang semakin tidak menentu, RCEP menjadi opsi strategis bagi pengembangan mega regionalisme ekonomi Asia Pasifik. Berbeda dengan APEC yang sudah terlalu jauh terperosok ke dalam rivalitas Beijing dan Washington. RCEP dibentuk sebagai pengejawantahan konsep masyarakat internasional solidarisme RCEP dipromosikan menjadi area perdagangan bebas komprehensif yang meliputi seluruh agenda kerja sama ASEAN+1. Aspek solidarisme RCEP terlihat jelas pada kesediaan para anggota perundingan guna mengakomodasi tingkat kemajuan ekonomi negara mitra yang bervariasi. Otonomi kebijakan ekonomi domestik dan kedaulatan identitas termasuk otoritas teritori tetap diakui secara penuh. Oleh sebab itu, analisis memandang RCEP tidak akan mempunyai standar operasionalisasi komitmen yang ketat, dan cenderung menjadi area perdagangan bebas dengan intensitas dan kualitas integrasi rendah. Kemudian Di tengah perubahan kebijakan dua ekonomi terbesar Asia Pasifik, AS dan Tiongkok, yang terjadi secara dramatis sejak 2016, ASEAN menghadapi dilema; antara multilateralisme atukah bilateralisme dan antara solidarisme atukah pluralisme. Perlu dikemukakan di sini bahwa sekalipun Beijing berperan penting di dalam arena RCEP maupun FTAAP, tidak berarti otomatis akan mendominasi kedua mega regionalisme. Pertama karena substansi RCEP dan FTAAP didesain oleh ASEAN, bukan Tiongkok. Jadi Beijing hanya menumpang di kedua kendaraan diplomasi perdagangan milik ASEAN. Keduanya berasal dari perluasan dan kombinasi aneka kerangka kerja ASEAN+3 dan ASEAN+6. Walaupun Beijing boleh menawarkan dan

merundingkan berbagai model kebijakan, tetapi ASEAN tetap yang menentukan. Kedua, intervensi Beijing terbatas oleh kekuatan aktor regional lain seperti Jepang dan India, sehingga, potensi hegemoni untuk sementara bisa direduksi (Wardhani, 2017).

#### **Keuntungan Indonesia Dalam RCEP**

Gagasan RCEP merupakan usulan Indonesia saat menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011. Indonesia yang ditunjuk sebagai koordinator sekaligus memimpin Komite Perundingan Perdagangan RCEP yang membawahi 16 negara, yaitu 10 negara anggota ASEAN serta Australia, India, Jepang, Korea, China, dan Selandia Baru. Bagi Indonesia, RCEP merupakan proses lanjutan yang sangat logis setelah ASEAN Economy Community pada tahun 2015, dengan mengkonsolidasikan FTA ASEAN+1 yang sudah ada. Indonesia memprioritaskan perundingan RCEP sambil mengamati proses perundingan Trans Pasific Partnership (TPP) yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pertimbangan lain adalah sejumlah isu runding di dalam TPP belum menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Hal-hal yang dirundingkan dalam TPP seperti perpanjangan masa berlaku hak paten bagi obat-obatan tertentu yang diusulkan hingga 150 tahun, liberalisasi ketentuan *government procurement*, pencopotan hak-hak khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau pendisiplinan proses peraturan perundangan, dimana semuanya merupakan kondisi ideal untuk meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang.

Perundingan RCEP menitik beratkan pada upaya menyepakati modalitas integrasi ekonomi RCEP untuk tiga isu utama yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Dalam pertemuan perundingan juga dibahas mengenai isu perdagangan elektronik (*e-commerce*). Mempertimbangkan tingkat kesiapan Indonesia dan negara mitra ASEAN lainnya yang masih tertinggal dibandingkan negara mitra, Indonesia sangat berhati-hati dan menekankan kesediaan membahas isu ini hanya dalam konteks kerjasama yang dapat meningkatkan kesiapan Indonesia khususnya UKM dalam mengakses pasar via elektronik. Penekanan ini merupakan hal yang penting mengingat Indonesia sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perdagangan elektronik dalam mendorong aktivitas perdagangan elektronik termasuk perlindungan konsumen. Transaksi perdagangan elektronik di Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebesar USD 12 Miliar dan pada tahun 2016 akan mencapai USD 20 Miliar.

Visi Indonesia dalam perundingan RCEP yaitu peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di Asia Tenggara, memegang posisi yang

cukup sentral dalam mewujudkan RCEP. Indonesia mengusulkan agar RCEP dapat lebih mendorong keterlibatan UKM dalam mata rantai pasok kawasan maupun global. Banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, dalam negosiasi RCEP, Indonesia menekankan perlunya integrasi dari UKM untuk ikut serta dalam RCEP agar dapat mendorong perekonomian Indonesia yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional. UKM akan dapat perlindungan dari pemerintah sesuai dengan perundingan dan masih dapat berkembang terus karena mendapatkan keistimewaan dan perlindungan dari pemerintah sesuai dengan kemampuan UKM tersebut. Kemudahan yang diberikan seperti kemudahan bea masuk, prosedur kepabean, harmonisasi standar, akses finansial, dan pemberian bantuan teknis peningkatan kapasitas bagi UKM agar dapat meningkatkan kualitas produk (Parna, 2017).

### **Peluang Peningkatan Rantai Pasok Maritim Indonesia Dalam Segi Bilateral**

Indonesia dan Singapura telah menandatangani 29 Perjanjian Kerja Sama (MoU) terkait peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pembahasan manajemen rantai pasokan, keahlian ekonomi digital, teknologi finansial, inovasi sosial, analisa data, pariwisata dan hospitality, kepemimpinan, kebudayaan dan obat-obatan. Sementara pembahasan terkait agribisnis, fokus pada komitmen kedua negara untuk mengembangkan kerja sama dalam sub-kelompok kerja pertanian, hasil laut dan perjanjian sanitari dan fitosanitari (sanitary and phytosanitary) berdasarkan World Trade Organization (WTO). Berdasarkan target Singapura "30 by 30" yaitu memenuhi sendiri kebutuhan gizi 30% pada 2030, Indonesia dan Singapura berkomitmen bekerja sama untuk proyek pengembangan agribisnis di Kawasan BBK dengan tujuan ekspor produk pertanian ke Singapura. Investor Singapura nantinya akan mengembangkan sistem pertanian pintar (smart farming system) untuk memproduksi buah-buahan, sayuran dan produk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar Singapura. Menteri Gan Kim Yong juga menyampaikan, meskipun pandemi berdampak sangat berat bagi sektor pariwisata kedua negara, situasi ini dapat dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur serta kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Menteri Gan juga mengimbau pentingnya safe cruise control agar negara-negara di kawasan regional dapat menyamakan standar prosedur dan kesehatan untuk wisata cruise mengingat Indonesia juga merupakan destinasi favorit. Kedua negara juga membahas kemungkinan pembentukan travel bubble sebagai pilot project. Kedua Menteri sepakat untuk membentuk micro travel bubble antara Singapura dengan kawasan di dalam pulau Bintan, seperti Lagoi. Apabila pembentukan micro travel bubble ini dapat berjalan dengan baik, untuk selanjutnya dapat ditingkatkan ke dalam area yang lebih besar. Melalui

micro travel bubble ini, wisatawan dapat saling berkunjung secara aman dan nyaman, dan bermanfaat sebagai upaya menumbuhkan kembali wisata dan ekonomi. Pembahasan lanjutan mengenai pelaksanaan micro travel bubble ini masih akan dilakukan, agar dalam pelaksanaannya nanti tidak akan berdampak buruk bagi kesehatan (Moegiarmo,2021).

### **Aktivitas Rantai Pasok Maritim Domestik di Masa Normal**

Pada aktivitas kepelabuhan khususnya bongkar muat pada tahun 2019, menurut Sari (2019) Aktivitas bongkar muat barang nonpetikemas di pelabuhan-pelabuhan komersial diperkirakan tumbuh 20% tahun ini, didorong oleh infrastruktur yang membaik dan nilai tukar rupiah yang kompetitif bagi ekspor. Selain itu menurut Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia kegiatan bongkar muat itu berlangsung baik di kargo domestik maupun internasional sehingga dengan keadaan tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Kemudian pada ranah transshipment pada pelabuhan domestik. Menurut Liputan6.com (1/10/2019), terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada Semester I Tahun 2018 tercatat 1.040 boks. Sedangkan pada periode yang sama tahun ini meningkat menjadi 2.799 boks. Di Terminal Teluk Lamong (TTL) Surabaya, pada Semester I Tahun 2018 tercatat 5.392 boks petikemas dan pada semester I tahun ini meningkat menjadi 9.283 boks. Arus transshipment petikemas domestik di TPS dan TTL tumbuh tipis karena memang segmen bisnisnya lebih banyak melayani petikemas internasional. Selain itu di TTL juga lebih sering melayani curah kering. Berdasarkan pemaparan Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto menandakan rute pelayaran peti kemas dari Medan, Sumatera Utara, ke Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan akhir Kalimantan maupun Sulawesi atau sebaliknya menjadi kontributor utama dalam peningkatan petikemas transshipment (Anonim,2019). Selain itu, PT. Pelabuhan Indonesia II atau International Port Container menjalin kerjasama dengan perusahaan pelayaran asal Perancis, *Compagnie Maritime Affetement-Compagnie Genera Maritime (CMA-CGM)*, yang kedepannya akan membuka service baru yang diberi nama *Java South East Asia Express Service* atau disingkat JAX Services. Service ini akan melayani rute pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast Amerika Serikat (Anonim,2017).

Kemudian pada sektor bisnis pelayaran pada tahun 2018, menurut Adi (2018) pelayaran peti kemas diproyeksi masih akan suram; bukan hanya selama tahun ini tetapi juga beberapa tahun ke depan selama inti persoalannya tidak dibenahi dengan serius. Begitu pula dengan pelayaran tanker. Sub-sektor yang satu ini masih digelendoti masalah harga minyak dunia yang terus fluktuatif. Bagian sub-sektor ini, yaitu pelayaran offshore, sudah duluan

mati suri seiring dengan pelambatan operasi rig lepas pantai. Pelayaran yang cukup prospektif pada 2018 akhirnya tersisa pengangkutan komoditas curah kering (dry bulk) dan bulk. Ini merujuk kepada barang yang tidak dikemas atau unpacked seperti batubara, semen dan sebagainya. Yang juga masuk kategori ini adalah curah cair (liquid bulk). Kebutuhan akan bahan mentah atau natural resources yang relatif stabil dari masa ke masa membuat usaha pelayaran yang satu ini tetap menarik digeluti.

Hal itu pun didukung dalam Hikam (2019) yakni pada tahun ini (2019) pelayaran nasional secara umum tumbuh tipis. Khusus angkutan general cargo masih dihadapkan pada pertumbuhan yang kurang meyakinkan. Sektor general cargo diprediksi akan semakin terpuruk mengingat fasilitas kepelabuhanan selalu memprioritaskan kapal kontainer, sehingga menghadapi tantangan potensi terjadinya kongesti. Sedangkan komoditas untuk general cargo sudah banyak berkurang, dan lebih banyak muatan-muatan curah bahan baku. Adapun sektor kontainer domestik akan sangat dipengaruhi pada kinerja ekonomi Indonesia. Dari kuartal I hingga III 2018, ekonomi nasional tumbuh berkisar 5 persen. Pada RAPBN 2019, ekonomi nasional juga dipatok tumbuh 5,3 persen. Dengan melihat itu, sektor kontainer diprediksi mencatatkan pertumbuhan yang tidak jauh berbeda. Baik sektor kontainer dan general cargo juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, seiring dengan supply dan demand muatan pada momen-momen tertentu. Di hari-hari besar keagamaan dan akhir tahun jumlah muatan akan ikut naik. Meski angkutan ekspor impor masih didominasi pelayaran asing, sektor kontainer pelayaran nasional optimistis akan mencatatkan kinerja lebih baik pada tahun depan. Namun peningkatan jumlah muatan tidak terjadi pada kegiatan impor, kecuali untuk komoditas bahan baku.

#### **Kondisi Rantai Pasok Kemaritiman Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19**

Adapun untuk rantai pasok di Indonesia pun mengalami penurunan sejak masuk di masa pandemic Covid-19. Contoh studi kasus yang relevan yakni pengiriman dari pulau Jawa menuju Indonesia Timur dalam penelitian Sutini (2021). Pada penelitian tersebut dijelaskan proses pengiriman barang yang berada di wilayah pelabuhan Banyuwangi hingga pelabuhan tanjungwangi di timur Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 dapat terlihat dalam keluar masuknya kapal yang ada di pelabuhan Banyuwangi dimana pada bulan January hingga February masih seperti biasa hanya memasuki bulan maret mulai ada penurunan dalam kapal yang datang dan keluar dari pelabuhan dikarenakan adanya perarturan pencegahan penanggulangan penyakit yaitu COVID-19, banyak kapal yang menganggur karna rantai pasok atau supply chain mengalami kendala yaitu kendala pada penyaluran barang yang ada didarat. dan data tersebut diambil dari data kegiatan operasional pelabuhan banyuwangi tahun 2020 disajikan oleh

KSOP Kelas III Banyuwangi. Kemudian, dari bulan Januari hingga Agustus 2021 terjadi penurunan yang signifikan pada kapal yang bersandar di pelabuhan Banyuwangi akibat adanya pembatasan pelabuhan agar memutus rantai dari COVID19 pada pelabuhan Tanjungwangi. Selanjutnya dari bulan Januari hingga Februari pada pelabuhan tanjungwangi masih stabil namun pengiriman barang pada bulan maret hingga bulan Agustus mengalami penurunan, dimana penurunan ini diakibatkan oleh pandemi yang ada saat ini. Sementara itu pada pelabuhan Hub Internasional, menurut Sholahuddin (2021), pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap arus kunjungan kapal maupun bongkar muat di pelabuhan. Sebagaimana yang terlihat di pelabuhan milik PT Terminal Teluk Lamong. Selama satu semester terakhir, jumlah kunjungan kapal justru mengalami peningkatan dari 2020 di semester yang sama. yakni, 20,97 persen. Peningkatan kunjungan kapal terjadi karena ada tambahan angkutan laut. Di antaranya, KMTC Line, GSL Line, Cosco, CMA, hingga Evergreen. Armada tersebut sandar di dermaga internasional. Pertambahan jumlah kunjungan juga terlihat di dermaga domestik. Rata-rata dari wilayah timur. yakni, Maluku dan Sulawesi. Meski kunjungan kapal dan bongkar muat dan peti kemas naik, ada penurunan bongkar muat di komoditas curah kering. Penurunan tersebut merupakan dampak dari pandemic Covid-19, yang dimana pihak produsen mengurangi jumlah produksi yang berdampak pada pengurangan jumlah pengiriman barang ke pelabuhan.

Kemudian dari sisi pelaku usaha maritime beberapa kendala yakni dengan adanya kelangkaan kontainer yang disebabkan kurangnya produk yang tidak memenuhi container. Menurut IHS dalam Andi (2021), gangguan rantai pasokan akibat Covid-19 masih terjadi di bulan Agustus, sehingga beberapa perusahaan mencatatkan penurunan performa pemasok dan peningkatan tekanan harga yang berkelanjutan. Gangguan rantai pasok ini erat kaitannya dengan kelangkaan kontainer yang sebenarnya terjadi secara global. Kemudian Kepala Samudera Indonesia Research Initiatives (SIRI) Ibrahim Kholilul Rohman dalam Andi (2021) menjelaskan, permintaan (*demand*) atas jasa kontainer sempat merosot pada awal pandemi di tahun lalu. Lantaran permintaan drop, operator kapal pengangkut kontainer tidak bisa mengisi kapasitas kapalnya dengan kontainer hingga penuh, dilanjutkan dengan pernyataan Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam Andi (2021) menambahkan, kelangkaan kontainer telah terjadi semenjak China terpapar pandemi Covid-19 di awal 2020. Utilisasi kargo mulai menurun karena volume ekspor dari China juga menurun akibat pandemi. Di sisi lain, jumlah kontainer terus menumpuk di China lantaran permintaan kargo impor masih tetap tinggi. Secara gradual, hal ini mulai berpengaruh terhadap suplai

kontainer di negara-negara lainnya. Kondisi ini terjadi di hampir semua pelabuhan utama dunia dan membuat banyak perusahaan pelayaran internasional mengurangi tonnage (kapal) hingga *blank sailing* sebagai langkah antisipasi pandemi. Sejak saat itu, hal yang terjadi bukan hanya kelangkaan kontainer, melainkan juga mulai terjadi kelangkaan *space* kapal. Ditambah lagi, kelangkaan *space* kapal ini juga mendorong peningkatan biaya *charter* kapal. “Akhirnya, *freight rate* terus bergerak naik karena *demand* lebih tinggi daripada *supply*. Kemudian, para anggota INSA tidak menikmati lonjakan tarif *charter* kapal dan biaya terkait lainnya. Sebab, mayoritas kapal kontainer nasional beroperasi di dalam negeri serta pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak memberlakukan *lockdown*, sehingga *supply-demand* masih terjaga seimbang. Untuk mengatasi keseimbangan rantai pasok di Indonesia upaya pemerintah saat ini diantaranya menciptakan ekosistem yang terinterkoneksi secara digital. Selain itu menurut Fernandez (2021) saat ini perusahaan pelayaran juga dihadapkan pada persoalan biaya operasional yang terus meningkat. Salah satunya berasal dari lonjakan biaya solar yang telah naik hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Biaya solar di dalam negeri ini lebih mahal 20 persen - 30 persen dibanding harga solar internasional. Sehingga biaya operasional terus meningkat.

Oleh karena itu dalam mencapai keseimbangan tersebut, pemerintah melalui Kemenperin akan memfasilitasi produsen dan konsumen dalam negeri untuk bersama-sama membangun *connected ecosystems*. Beberapa manfaat ekosistem yang terkoneksi, antara lain adalah menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel di BUMN dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta mendorong kolaborasi inovasi untuk peningkatan kualitas produk dan efisiensi proses. Selain itu, sebagai referensi pemerintah daerah dalam membeli produk dalam negeri dan bagi masyarakat untuk membeli produk dalam negeri di berbagai marketplace. Ekosistem terkoneksi juga dapat menghubungkan industri kecil dan menengah (IKM) dengan berbagai marketplace komersial. Kedepannya hal ini diwujudkan dengan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), sehingga semua data kebutuhan barang dan jasa yang ada di K/L bisa dihubungkan dengan sistem e-katalog (Nurcaya,2020).

### Kepentingan Nasional Ke Konsep Perimbangan Kepentingan

Untuk memahami kepentingan nasional terdapat dua aspek yang harus dipahami, bahwasanya kepentingan nasional merupakan representasi dari kepentingan kolektif dari masyarakat di suatu negara. Kemudian kepentingan nasional juga harus memiliki prioritas untuk kebaikan bersama. Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dalam hubungan

internasional dikenal sebuah perspektif yang bernama neorealisme, Neorealis memandang bahwa negara-negara sekalipun *anarchy* masih mampu bekerjasama antara satu sama lain. Meskipun proses kerjasama ini akan susah dicapai mengingat setiap negara akan terus mengedepankan kepentingan nasional masing-masing. Dalam kaitannya dengan rezim dan kerjasama internasional neorealis percaya bahwa agar tercipta suatu tatanan yang efektif maka dibutuhkan negara dominan untuk mengontrol sikap negara yang ada dalam kerjasama tersebut. Dalam konteks kerjasama antar negara neorealis percaya bahwa dalam kerjasama antarnegara kecurigaan dan ketakutan akan serangan dari negara lain menimbulkan sesuatu yang disebut *security dilemma*, yang menjadikan negara berada dalam dua pertimbangan pertama negara perlu menjaga kestabilan system internasional dengan melakukan pembatasan power tapi di sisi lain power yang dimiliki negara harus ditingkatkan guna mencapai kepentingan nasional. Sehingga pada akhirnya untuk menemukan titik tengah maka diperlukan suatu kondisi *Balance of Power* atas negara yang berkepentingan dalam suatu kerjasama internasional. Hal paling mendasar yang membedakan teori perimbangan kepentingan dengan konsep kepentingan nasional lama adalah bahwasanya selama ini kepentingan nasional dari suatu negara seringkali dipahami sebagai sesuatu yang tunggal, rigid, dan utuh sebagai suatu kepentingan bersama (Fadli,2019).

### Analisa SWOT Pada Rantai Pasok Maritim Di Indonesia

Untuk membahas kondisi Internal rantai pasok maritim di Indonesia maka analisis SWOT dilakukan untuk mendapatkan solusi yang tepat di masa pandemic Covid-19 pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.**

Analisa SWOT Rantai Pasok Maritim Indonesia

	Strength	Weakness
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Armada kapal nasional beroperasi di dalam negeri</li> <li>2. Pelabuhan dalam negeri tidak memberlakukan <i>lockdown</i> sehingga supply dan demand terjaga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontainer tidak terisi penuh dikarenakan permintaan yang drop sejak pandemic Covid di pelabuhan.</li> <li>2. Meningkatnya biaya operasional pelayaran domestik dikarenakan harga bahan bakar meningkat</li> </ol>
Opportunity	S-O	W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya RCEP dalam meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN</li> <li>2. Pengembangan manajemen rantai pasok antara Indonesia dengan Singapura untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Armada kapal internasional dapat berkolaborasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional sehingga keseimbangan supply demand dapat terjaga</li> <li>2. Peningkatan kerjasama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya peningkatan operator terminal dalam negeri supaya dapat mengoperasikan pelabuhan di kawasan ASEAN.</li> <li>2. Perlu adanya aliansi antar pelaku pelayaran domestik yang mampu berintegrasi</li> </ol>

menghadapi pandemic Covid-19	pelabuhan nasional dengan pelabuhan di kawasan Singapura serta membentuk standar baru dalam upaya mencegah pandemic Covid-19.	dengan pelabuhan Singapura yang bertujuan untuk menanamkan aset di lokasi tersebut sehingga apabila kebutuhan dalam negeri tidak dapat memenuhi dapat mengambil pasokan dari lokasi tersebut.
<b>Threat</b>	<b>S-T</b>	<b>W-T</b>
1. Kelangkaan space kapal dikarenakan banyaknya kontainer yang masih menumpuk di China selama pandemic sehingga kuota terbatas	1. Perlu adanya subsidi dari pemerintah untuk menutup biaya charter kapal dalam negeri untuk ekspor	1. Perlu adanya pembentukan otorita nasional yang bertaraf internasional yang mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dalam negeri selama pandemi dengan perusahaan pelayaran internasional di terminal dalam negeri serta pengendalian aset perusahaan pelayaran internasional yang ada di pelabuhan domestik.
2. Kelangkaan space kapal meningkatkan biaya Charter kapal	2. Perlu adanya bursa kontainer yang terkoneksi dengan perusahaan pelayaran internasional sehingga pengaturan kontainer internasional dapat diatur oleh perusahaan dalam negeri, dapat dilakukan dengan pembelian saham oleh BUMN ataupun bagi hasil dengan perusahaan pelayaran nasional.	2. Perlu adanya aliansi antar pelaku pelayaran domestik dengan perusahaan leasing global sehingga pemenuhan kontainer dapat terpenuhi di masa pandemic.

Sumber : diolah oleh peneliti (2021)

### Implementasi Strategi Manajemen Konflik Bagi Rantai Pasok Indonesia Saat Pandemi

Setelah dilakukan analisa SWOT maka perlu adanya implementasi, sehingga strategi tersebut dapat dilaksanakan. Dari hasil SWOT yang telah didapatkan, perlu adanya perhatian pada bagian W-O dikarenakan kondisi tersebut merupakan titik kritis yang dapat mempengaruhi kondisi internal dan eksternal rantai pasok maritime di Indonesia. Dalam mengatasi rantai pasok yang rendah di saat pandemi covid ini, Indonesia tetap harus mengingat kembali amanat yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai komitmen awal dalam mengatasi konflik internal. Amanat tersebut adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (UUD,1945). Kemudian, dalam menangani internal dan eksternal Indonesia terkait kerjasama pengendalian kontainer dapat menggunakan strategi *win-win solution* supaya adanya perimbangan rezim dan kerjasama internasional. Beberapa penelitian

mengenai win-win solution terkait pengendalian kontainer yakni salah satunya terdapat pada penelitian Notteboom *et al.* (2017) yang menekankan kerjasama terminal dan perusahaan pelayaran. Dalam penelitiannya proses pemilihan pelabuhan merupakan hal yang kompleks dikarenakan berhubungan dengan profil permintaan pelabuhan atau terminal, profil pasokan, profil pasar dan dinamika operator. Namun dalam dekade sekarang, pertimbangan strategis di tingkat perusahaan berperan dan pemilihan pelabuhan dan terminal. Pertimbangan strategis ini termasuk dalam pengembangan aliansi dan lokasi terminal peti kemas pengangkut atau aliansi. Dari penelitiannya tersebut dihasilkan tiga opsi pilihan terkait dengan pemulihan rantai pasok yakni 1. Pembentukan Aliansi, 2. Masuknya Jalur Pelayaran; dan 3. Mengkombinasikan pengangkut di operasi terminal.

Pada opsi pertama, aliansi ini lebih menekankan kepada operator pelayanan, untuk menghadapi aturan dari pelabuhan. Keuntungan operator kontainer membuat aliansi dikarenakan untuk meningkatkan jangkauan global, meningkatkan penyebaran armada, dan menyebarkan resiko yang terkait dengan investasi di kapal kontainer besar. Awalnya banyak operator besar tidak memilih aliansi keanggotaan karena perusahaan-perusahaan ini dapat mencapai skala yang cukup memungkinkan mereka mendapat manfaat dari skala dan ruang lingkup ekonomi yang sama dengan penawaran aliansi. Contoh operatornya yakni Maersk Line, MSC, CMA CGM, dan lain-lain. Tetapi dengan adanya dampak dari aliansi ini memungkinkan juga terjadi produk sampingan yakni terjadi proses merger dan akuisisi antar operator. Perusahaan pelayaran linier cenderung lebih memilih merger dan akuisisi ketika berhadapan dengan operator asal wilayah mereka, sementara pengalaman kemitraan operator sebelumnya mengurangi kemungkinan operator memilih merger dan akuisisi daripada pembentukan aliansi. Aliansi dan konsolidasi operator memiliki dampak penuh pada persaingan antar-pelabuhan mengingat besarnya volume kontainer yang terlibat dan pergeseran dalam tawar-menawar terkait kekuatan.

Pada opsi kedua, sejumlah operator sudah memulai mendorong proses integrasi vertikal dan diversifikasi ke pendalaman transportasi, operasi terminal, pergudangan dan kegiatan distribusi. Operator ini mulai berintegrasi secara vertikal mengakuisisi saham ekuitas di perusahaan yang mengoperasikan terminal atau secara langsung mengelola fasilitas terminal untuk memanfaatkan layanan khusus. Beberapa keuntungan dari opsi kedua yakni (i) pertahanan aktiva finansial maritime; (ii) pengurangan dan pengendalian biaya pelabuhan; (iii) peningkatan efisiensi karena ruang lingkup ekonomi; (iv) retensi pelanggan dan pendapatan stabilisasi; (v) memanfaatkan peluang hub dan spoke. Beberapa perusahaan pelayaran yang memiliki operaso terminal mereka sendiri seperti Maersk

(APM *terminal*) dan China COSCO Group (Pelabuhan Pengiriman COSCO). Operator hybrid ini telah mengubah pendekatan strategis terhadap kegiatan terminal. Bahkan mereka cenderung mengelola fasilitas multi pengguna dengan menarik operator pihak ketiga dan laba operasi.

Pada opsi ketiga, terdapat juga kerjasama antara perusahaan kontainer laut dengan operator terminal yang mapan saat menyiapkan fasilitas yang mumpuni. Seiring dengan perspektif operator, hubungan yang lebih dekat dengan operator terminal melalui kemitraan ekuitas di proyek terminal peti kemas diharapkan dapat secara efektif meningkatkan jaringan bisnis. Bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa operator secara signifikan bergantung pada kerjasama sebagai opsi organisasi untuk memasuki pelabuhan peti kemas industri. Salah satu kolaboratif yang dilakukan yakni operator pelabuhan mendirikan *Equity Joint Ventures* tetapi otoritas pelabuhan yang memegang saham dominan. Selain itu, perbedaan geografis pun berpengaruh terhadap tata kelola dan pengaturan kelembagaan yang dikombinasikan dengan karakteristik pasar dan prosedur tender terminal yang berlaku. Beberapa contoh kolaborasi yang diterapkan dari berbagai negara yakni (1) Jepang dan Pelabuhan Barat Amerika Serikat. Terminal peti kemas sebagian besar masih dikendalikan oleh perusahaan pelayaran dan perusahaan bongkar muat terkait; (2) Eropa. Sementara para tuan tanah pemilik pelabuhan di eropa membentuk kelompok perusahaan bongkar muat, banyak dari mereka mewarisi sewa atau konsensi dari era pra-kontainerisasi. (3) Asia dan negara berkembang. Model pelabuhan pelayaran lebih berkembang di kawasan ini, tetapi berdampak kepada sedikitnya peluang perusahaan lokal untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki.

Kemudian mengenai penyelesaian pada aliansi antara perusahaan pelayaran dan perusahaan leasing, penelitian yang dapat dijadikan referensi yakni pada penelitian Padilla, et al (2021), mengenai model opsi kontrak untuk penyewaan kontainer di industri perkapalan. Pada penelitiannya, beberapa kontak opsi kontrak yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Sewa induk

Sewa induk juga disebut sewa layanan penuh atau rencana pengelolaan kolam kontainer. Di sini, perusahaan leasing mengasumsikan manajemen penuh dari kontainer, termasuk pemeliharaan dan perbaikan serta reposisi, setelah off-hire, dan pemutusan kontrak. Tergantung pada lokasi dan kondisi peralatan, sewa induk dapat mempertimbangkan kredit atau debit on-hire dan off-hire. Kontrak leasing menentukan durasi variabel, yang biasanya berkisar antara jangka pendek dan menengah. Kontrak juga dapat menentukan jumlah kontainer yang bervariasi, menetapkan jumlah minimum dan maksimum. perusahaan leasing bertindak sebagai penyedia layanan logistik dalam beberapa cara berdasarkan kontrak ini. Biaya yang

berbeda termasuk dalam kontrak leasing induk dan termasuk sewa peti kemas, biaya depot lift-on/lift-off, on-hire/off-hire drayage, biaya drop-off, dan biaya perbaikan off-hire.

b. Sewa Jangka Panjang

Sewa jangka panjang juga disebut sewa kering dan biasanya memerlukan kontrak 5-8 tahun. Perusahaan leasing tidak memiliki tanggung jawab manajemen atas peti kemas yang disewa. Sewa biasanya mengikuti pembelian kontainer baru oleh perusahaan leasing. Seperti yang ditunjukkan oleh Rodrigue et al. (2013) dalam Padilla et al (2019), tren terbaru melibatkan pergeseran dari induk ke sewa jangka panjang. Karakteristik lain dari jenis sewa ini adalah bahwa peti kemas diintegrasikan ke dalam armada peti kemas milik pengangkut, yang memungkinkan penanganan peti kemas yang lebih efektif. Juga, mereka memiliki risiko bisnis yang rendah dan omset sewa yang lebih rendah daripada kontrak sewa induk. Fitur penting lainnya adalah bahwa, di bawah kontrak sewa jangka panjang, jalur pelayaran memiliki opsi untuk menukar peti kemas secara langsung dengan pengangkut lain, sesuatu yang memberikan fleksibilitas dalam reposisi peti kemas. Dalam hal ini, perusahaan leasing membebaskan biaya yang ditetapkan dalam kontrak. Tren saat ini mempertimbangkan pergeseran dari sewa induk ke sewa jangka panjang.

c. Sewa Jangka Pendek

Sewa jangka pendek juga disebut sewa pasar spot, dan harganya dipengaruhi oleh kondisi pasar saat ini. Kontrak ini biasanya digunakan ketika ada lonjakan permintaan sementara. Secara umum, perusahaan leasing tidak mempertahankan persentase yang signifikan dari peti kemas mereka pada jenis kontrak ini karena tingkat risiko yang tinggi. Dalam hal ini, perusahaan pelayaran juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan reposisi peti kemas. Kontrak jangka pendek mungkin lebih mahal tetapi menawarkan lebih banyak fleksibilitas untuk perusahaan pelayaran, dan ini mungkin merupakan pilihan yang baik ketika permintaan berfluktuasi secara signifikan.

Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari pengalaman manajerial dan para ahli di bidang tersebut, perusahaan leasing menyewakan kontainer mereka secara tahunan atau jangka panjang. Dalam kontrak ini, perusahaan leasing berkomitmen untuk menyediakan sejumlah kontainer, sementara perusahaan pelayaran terlibat untuk menyewa sejumlah kontainer ini selama masa kontrak. Jika perusahaan pelayaran akhirnya memesan lebih sedikit peti kemas, akan dikenakan penalti. Sebaliknya, kontainer, jika tersedia, akan dikenakan harga yang lebih tinggi. Terkadang, perusahaan leasing, yang mengetahui rencana perjalanan perusahaan pelayaran, dapat menawarkan harga khusus untuk pengambilan dan/atau penanganan peti kemas dari dan ke lokasi tertentu. Para ahli mengusulkan kontrak di mana perusahaan pelayaran

menentukan perkiraan permintaan kontainer pertama per bulan dan kemudian menempatkan pesanan terakhir mereka. Modifikasi pesanan akhir ini diselesaikan dengan membayar premi opsi. Selain fluktuasi permintaan peti kemas, perusahaan pelayaran juga perlu memperbarui armada peti kemas mereka ketika umur ekonomis peti kemas berakhir. Jika proses pembaruan ini direncanakan sebelumnya, persyaratan kontrak yang lebih menguntungkan dapat dinegosiasikan antara perusahaan pelayaran dan perusahaan leasing. Para ahli menyebutkan CSAV (perusahaan pelayaran Chile) sebagai contoh jalur pelayaran yang, ketika beroperasi, menerapkan kontrak opsi sebagai bagian dari strategi penyewaan peti kemas.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari implementasi yang sudah di jelaskan, maka untuk mengimplementasikan strategi pada analisa SWOT yang telah dibuat, dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- a) Perlu adanya pembentukan otorita nasional yang mengintegrasikan kebutuhan pelabuhan dalam negeri dengan perusahaan pelayaran internasional di terminal dalam negeri serta pengendalian aset pelabuhan domestik pada masa pandemi yang bersifat permanen walaupun tidak ada pandemi, karena belum adanya otoritas nasional yang mempunyai wewenang seperti itu.

Dari ketiga opsi dalam penelitian Notteboom (2017), berdasarkan analisis SWOT yang ada. Pilihan yang cocok yakni berada pada opsi ketiga yakni kombinasi antara pelabuhan peti kemas dan perusahaan pelayaran. Dalam studi kasus di Indonesia, serta kondisi W-T yang ada, strategi yang ditekankan lebih mengutamakan kerjasama otoritas pelabuhan di Indonesia dengan perusahaan pelayaran di luar negeri. Bentuk kerjasamanya pun dengan membentuk *Equity Joint Ventures* (EJV) antara terminal yang ditunjuk dengan perusahaan pelayaran asing, dimana EJV tersebut dikendalikan oleh otorita nasional. Sehingga perusahaan pelayaran internasional pun dapat leluasa untuk membangun asetnya di dalam negeri walaupun permintaan dari pelabuhan domestik menurun selama masa pandemic. Serta apabila kebutuhan pelabuhan menurun, otorita nasional ini dapat memberi keputusan untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan menggunakan aset perusahaan pelayaran luar negeri. Hal ini dikarenakan karena segmentasi bisnis pelayaran di pelabuhan Indonesia didominasi oleh pelayaran internasional dari sebelum pandemi hingga saat ini khususnya pada pelabuhan hub internasional.

- b) Perlu adanya kerjasama antara perusahaan pelayaran dalam negeri dengan perusahaan leasing kontainer internasional di masa pandemi

Dari penelitian Padilla et al (2021), apabila dari saran para ahli di bidang pelayaran, merujuk kepada permasalahan di Indonesia sebaiknya apabila

Indonesia akan menggunakan opsi tersebut perlu adanya perencanaan yang tepat dalam sebulan sehingga pengiriman pun akan lebih terjangkau dan jika perusahaan pelayaran akhirnya memesan lebih sedikit peti kemas, akan dikenakan penalti. Sebaliknya, kontainer, jika tersedia, akan dikenakan harga yang lebih tinggi. Sehingga di masa pandemi ini, para pengusaha dalam negeri perlu berkolaborasi sehingga biaya operasional pun lebih sedikit untuk memesan perusahaan leasing tersebut dan juga dikarenakan permintaan dalam negeri yang tidak menentu dikarenakan pandemic sebaiknya menggunakan sewa jangka pendek dengan mengintegrasikan permintaan di setiap operator kapal pelayaran dalam negeri.

#### 5. REFERENSI

- Adi, T. 2018. Prospek Bisnis Pelayaran Tahun 2018. Retrieved from <https://analisis.kontan.co.id/news/prospek-bisnis-pelayaran-tahun-2018?page=all>. Diakses pada 28 Desember 2018.
- Andi, D. 2021. Kelangkaan Kontainer Bisa Menahan Laju Kinerja Sektor Manufaktur. Retrieved from <https://industri.kontan.co.id/news/kelangkaan-kontainer-bisa-menahan-laju-linerja-sektor-manufaktur>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2021.
- Anonim.2017. Inilah Upaya Pelindo II Menuju Transshipment Port Besar di Kawasan Asia. Retrieved from <https://upperline.id/post/inilah-upaya-pelindo-ii-menuju-transshipment-port-besar-di-kawasan-asia>. Diakses 28 Desember 2021.
- Anonim.2019. Arus Petikemas di Tanjung Perak Surabaya Tembus Target. Retrieved from <https://surabaya.liputan6.com/read/4075510/arus-petikemas-di-tanjung-perak-surabaya-tembus-target>. Diakses pad 28 Desember 2021.
- Alriani, I. M. 2012. Konflik Dalam Organisasi, Apakah Selalu Negatif. *Dharma Ekonomi*, No. 36 Th. XIX. Hlm. 1-13.
- Fadli, M., Y. 2019. *Regional Comprehensive Economic Partnership Dan Pergeseran Respon China Dalam Kaitannya* (Tesis Magister). Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Fernandez, M. G. N. 2021. Pelaku Usaha Pelayaran Klaim Sudah Maksimal Lakukan Efisiensi. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211109/98/1463877/pelaku-usaha-pelayaran-klaim-sudah-maksimal-lakukan-efisiensi>. Diakses 28 Desember 2021.
- Heridiansyah, J. 2014. Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi. *Jurnal Stie Semarang*, Vol 6, No .1 Hlm 28-41.

- Melfianora. 2019. Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur. Retrieved from <https://osf.io/efmc2/>. Diakses 27 Desember 2021.
- Noteboom, T. E., Francesco, P. Giovanni Satta, Athanasios, A. P. *The Relationship Between Port Choice and Terminal Involve Of Alliance Members In Container Shipping*. Journal Of Transport Geography. 64. Pp. 158-173.
- Nurcaya, I. A. 2020. Pandemi Rusak Rantai Pasok, Ini Langkah Perbaikan Dari Kemenperin. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201022/257/1308414/pandemi-rusak-rantai-pasok-ini-langkah-perbaikan-dari-kemenperin>. Diakses 27 Desember 2021.
- Padilla, A. G., Rosa, G. G., Fernando, A. and Stefan, V. 2021. An Option Contract Model For Leasing Containers In The Shipping Industry. *Maritime Economic and Logistics*, Vol. 23. Pp 328-347.
- Parna, D. 2017. Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economy Partnership. *Jurnal Fisip*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 1-15.
- Pusat Informasi Maritim. 2021. Kelangkaan Kontainer Pengaruhi Rantai Pasokan Logistik di KTI. Retrieved from <http://www.pim-tni.mil.id/news-detail/2686/Kelangkaan-Kontainer-Pengaruhi-Rantai-Pasokan-Logistik-di-KTI/>. Diakses 28 Desember 2021.
- Roboth, J., Y. 2015. Analisis Work Family Conflict, Stres Kerja Dan Kinerja Wanita Berperan Ganda Pada Yayasan Compassion East Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, Vol.3 ,No.1, Hlm. 33-46.
- Ronal. 2020. BPS Sebut Pandemi Covid-19 Buat Kinerja Ekspor Indonesia Terendah Sejak 2016. Retrieved from <https://pasardana.id/news/2020/6/16/bps-sebut-pandemi-covid-19-buat-kinerja-ekspor-indonesia-terendah-sejak-2016/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.
- Samudra Indonesia. 2020. Annual Report : Turning Crisis Into Opportunity. Retrieved from [https://samudera.id/public\\_assets/1/uploads/20210602054535Annual\\_Report\\_2020\\_SMDR\\_\(1\).pdf](https://samudera.id/public_assets/1/uploads/20210602054535Annual_Report_2020_SMDR_(1).pdf). Diakses 28 Desember 2021.
- Sari, S. M. 2019. Aktivitas Bongkar Muat Diprediksi Tumbuh 20%. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190122/98/880969/aktivitas-bongkar-muat-diprediksi-tumbuh-20>. Diaksea 28 Desember 2021.
- Sholahuddin. M. 2021. Jumlah Kunjungan Kapal di Terminal Teluk Lamong Naik 20,97 persen. Retrieved from <https://www.jawapos.com/surabaya/20/10/2021/jumlah-kunjungan-kapal-di-terminal-teluk-lamong-naik-2097-persen/>. Diakses 28 Desember 2021.
- Sutini. 2021. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pandemi Covid-19 Pada Pengiriman Bahan Pokok Dari Pulau Jawa ke Wilayah Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Sainstek Maritim*, No. 1, Vol. 2. Hlm. 93-98.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- United Nation. 2020. *Covid-19 And Its Impact On Shipping and Port Sector In Asia and The Pacific*. Retrieved from <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/ShippingPolyBrief-16Oct2020-FINAL.pdf>. Diakses 28 Desember 2021.
- United Nations Conference on Trade and Development. 2020. *Covid-19 Cuts Global Maritime Trade, Transforms Industry*. Retrieved from <https://unctad.org/news/covid-19-cuts-global-maritime-trade-transforms-industry>. Diakses 28 Desember 2021.
- Wardhani, B., I. Gede, W., W., Dan Vinsensio, D. 2017. Asean RCEP, Mega Regionalisme & Prospek Diplomasi Perdagangan Di Asia Pasifik. Surabaya:Pusat Studi Asean Universitas Airlangga.
- Wijaya, G. A. 2016. Strategi Revitalisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember. (SKRIPSI). Jember: Universitas Jember.
- Yoshitani. T. 2018. *PNW Seaport Alliance : Stakeholders Benefits of Port Cooperation*. Research In Transportation Business & Management.

## EFEKTIVITAS JUS WORTEL DAN NANAS UNTUK MENURUNKAN DISMENORE PRIMER PADA REMAJA PUTRI SMP

Oleh :

Mella Yuria R.A.<sup>1)</sup>, Irwanti Gustina<sup>2)</sup>, Rohanah<sup>3)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Binawan

<sup>3</sup>Kebidanan, STIKES Widya dharma Husada

email: mella@binawan.ac.id

email: irwanti@binawan.ac.id

email: riri.rohanah@gmail.com

### Abstrak

Di Indonesia angka kejadian dismenore terdiri dari 54,89% dismenore primer dan 9,36% dismenore sekunder. Jus wortel dan nanas mengandung zat yang dapat memberikan efek analgesik dan anti inflamasi sehingga dapat mengurangi nyeri haid. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas jus wortel dan nanas dalam mengurangi dismenore primer pada remaja putri. Metode Penelitian ini menggunakan *Quasy Eksperiment* dengan rancangan *pre and post nonequivalent control group*. Populasi penelitian ini siswi SMPIT. Sample Penelitian ini adalah siswa SMPIT Ruhama yang mengalami dismenore primer yaitu 40 responden dan dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan uji hipotesis dengan dua kelompok. Uji statistik yang digunakan yaitu *uji beda dua mean dependen atau uji T dependen (T test paired)*. Hasil penelitian menunjukkan setelah intervensi jus wortel dan nanas pada kelompok eksperimen mengalami nyeri ringan sebanyak 16 orang (80%), 3 orang (15%) mengalami nyeri sedang dan 1 orang (5%) tidak nyeri. Kelompok eksperimen rata-rata tingkat nyeri mengalami penurunan dari 3.1 menjadi 2.25. Setelah intervensi nilai P pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol (0,001: 0,33) artinya terjadi penurunan dikarenakan jus wortel dan nanas masing-masing mengandung bromelain serta betakaroten yang dapat memberikan efek analgesik dan anti inflamasi untuk menurunkan dismenorea primer. Kesimpulannya adalah jus wortel dan nanas efektif dalam menurunkan dismenore primer pada remaja putri sehingga mengurangi pemakaian analgesic farmakologi.

**Katakunci:**Dismenorea primer, remaja putri, jus wortel dan nanas

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu tanda remaja putrimemasuki masa pubertas adalah terjadinya menstruasi. Menstruasi yang terjadi pada remaja putri terkadang diikuti dengan nyeri menstruasi atau dismenore. Dismenore atau nyeri menstruasi merupakan nyeri di perut bagian bawah, terkadang menjalar sampai ke pinggang dan paha. Nyeri ini timbul sebelum atau selama menstruasi dan berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. (Prawirohardjo, 2010)

Menurut badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO), pada tahun 2016 angka kejadian dismenore di dunia sangat besar. Rata-rata lebih dari 50% perempuan di setiap dunia mengalaminya. Dari hasil penelitian di Amerika Serikat persentase kejadian dismenore sekitar 60% dan di sebesar Swedia 72% (WHO, 2016).

Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) menyatakan bahwa angka kejadian dismenore di Indonesia tahun 2009

terdiri dari 72,89% mengalami dismenore primer dan 27,11% mengalami

dismenore sekunder serta angka kejadian dismenore berkisar 45-95% dikalangan wanita usia produktif (Rakhma, 2012). Di Indonesia angka kejadian dismenore terdiri dari 54,89% dismenore primer dan 9,36% dismenore sekunder (Kemenkes RI, 2016).

Dismenore cukup mempengaruhi aktivitas remaja putri sebanyak 56% pelajar, sedangkan 39% dan 5% pelajar mengatakan dismenore sedikit dan sangat berpengaruh pada kehidupan (Noravita, 2017). Dampak yang diakibatkan oleh dismenore primer berupa gangguan aktifitas seperti tingginya tingkat absen dari sekolah maupun kerja, ketebatasan kehidupan sosial, performa akademik, serta aktivitas olahraganya. Permasalahan dismenore juga berdampak pada penurunan kualitas hidup akibat tidak masuk sekolah maupun bekerja. (Sandiati, 2015).

Salah satu cara non obat-obatan yang digunakan adalah dengan menggunakan jus buah atau sayuran. Untuk meringankan nyeri haid dengan cara nonfarmakologi salah satunya adalah pemberian jus wortel (Devi, 2012). Menurut Muchtadi menyebutkan bahwa kandungan vitamin E pada wortel mengeblok *prostaglandin* yaitu *hormon* yang mempengaruhi *dysmenorrhea* atau nyeri haid. Sehingga hasil penelitian yang dilakukan sesudah diberikan jus wortel responden setengahnya mengalami penurunan tingkat nyeri haid (*dysmenorrhea*) Muchtadi (2010).

Nanas merupakan tanaman yang memiliki efek analgesik karena kandungan enzim bromelain. Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bahwa buah nanas memiliki efek analgesik karena adanya kandungan enzim bromelain. Bromelain merupakan suatu enzim proteolitik yang didapat dari *Ananans comosus L* (Amalia dkk, 2017). Jus nanas mengandung pektin, vitamin C, dan enzim bromelain untuk mengurangi rasa nyeri dan memperlancar peredaran darah dan berkhasiat untuk proses penyembuhan luka. Bromelain menyebabkan penurunan kadar bradikinin dan menurunkan kadar prekallikrein dalam serum. Penurunan prekallikrein artinya penurunan pelepasan asam arakidonat dan penghambatan produksi prostaglandin PGE2 (Rahayu, 2015). Kandungan bromelain dan vitamin E yang terdapat pada buah nanas dapat menurunkan tingkat nyeri menstruasi (Dismenore) dengan menghambat produksi prostaglandin yang merupakan reseptor stimulus nyeri tubuh sehingga tingkat nyeri responden sebelum dan sesudah diberikan minuman jus nanas terdapat penurunan nyeri menstruasi atau dismenore setelah meminum jus nanas (Setianingsih, Y.A., Widyawati N., 2018).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan *Quasy Eksperiment* dengan rancangan pre and post nonequivalent control group. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Desember 2021 di SMPIT Ruhama Depok. Populasi penelitian ini adalah siswi SMPIT Ruhama. Sample Penelitian ini adalah siswa yang mengalami dismenore primer yaitu 40 responden dan dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan uji hipotesis dengan dua kelompok. Uji statistik yang digunakan yaitu uji beda dua mean dependen atau uji T dependen (*T test paired*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisa Univariat

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tingkat Nyeri Dismenore pada Pretes (pre intervensi)

Tingkat Dismenore	Kel. Eks	(%)	Kel. Kontrol	(%)
Nyeri Ringan	13	65	15	75
Nyeri Sedang	7	35	5	25
TOTAL	20	100	20	100

Berdasarkan tabel 1 tingkat nyeri sebelum diberikan intervensi berupa jus nanas dan wortel menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok eksperimen mengalami nyeri ringan sebanyak 13 orang (65%) dan nyeri sedang 7 orang (35%) sedangkan kelompok kontrol 15 orang (75%) mengalami nyeri ringan dan 5 orang (25%) mengalami nyeri sedang.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tingkat Nyeri Dismenore pada Posttes (post intervensi)

Tingkat Dismenore	Kel. Eks	(%)	Kel. Kontrol	(%)
Tidak Nyeri	1	5	0	0
Nyeri Ringan	16	80	14	70
Nyeri Sedang	3	15	6	30
TOTAL	20	100	20	100

Berdasarkan tabel 4 tingkat nyeri setelah diberikan intervensi berupa jus nanas dan wortel menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami nyeri ringan sebanyak 16 orang (80%) pada kelompok eksperimen sedangkan kelompok kontrol 14 orang (70%), sedangkan responden mengalami nyeri sedang sebanyak 3 orang (15%) pada kelompok eksperimen sedangkan kelompok kontrol 6 orang (30%).

### Analisa Bivariat

Tabel 3. Efektivitas Jus Wortel dan Nanas Untuk Menurunkan Dismenore Primer Pada Remaja Putri SMP

Perlakuan	Subjek	Mean	N	SD	PValue
Eksperimen	Pre test	3.1	20	1.33	0.001
	Pos test	2.25	20	1.11	
Kontrol	Pre test	2.5	20	1.57	0.33
	Pos test	2.8	20	1.64	

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa kelompok eksperimen rata-rata tingkat nyeri pada posttes 2.25 hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan pretest sebelum diberikan intervensi jus nanas dan wortel yaitu rata-rata 3.1. Nilai P pada kelompok eksperimen sebesar 0.001 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang artinya ada perbedaan rata-rata tingkat nyeri pre dan post intervensi serta adanya pengaruh antara pemberian jus nanas dan wortel terhadap penurunan tingkat nyeri. Sedangkan dikelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi jus nanas dan wortel menunjukkan nilai rata-rata tingkat nyeri pos test lebih tinggi 2.8 dibandingkan pre test 2.5 dan nilai P

sebesar 0.33 yaitu lebih besar dari 0.05 yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata tingkat nyeri pretest dan posttest. Jika dibandingkan nilai P pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol (0,001: 0,33) yang artinya kelompok eksperimen memiliki penurunan nyeri lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Sesudah diberikan jus wortel dan nanas tingkat nyeri responden termasuk kategori nyeri ringan, maka hal ini disebabkan pemberian jus wortel tersebut yang mengandung Vitamin E dan betakaroten dapat memberikan efek analgesik dan anti inflamasi dengan mekanisme kerja mempengaruhi sistem prostaglandin yaitu menghambat enzim aktivitas, oksigenase-2 sehingga enzim tersebut tidak dapat merubah asam arachidonat menjadi prostaglandin sebagai timbulnya nyeri.

Sesuai dengan teori Anurogo, (2012) yaitu pada saat menstruasi di dalam tubuh setiap wanita terjadi peningkatan kadar prostaglandin F2 pada fase sekresi yang menyebabkan kontraksi otot-otot berbeda-beda dalam merespon kenaikan kadar prostaglandin tersebut maka nyeri yang dialami oleh responden hanya nyeri ringan. Salah satu faktor yang menyebabkan nyeri menstruasi (dismenorea) karena perbedaan ambang rangsang nyeri pada setiap orang, dimana setiap orang memiliki ketahanan yang berbeda-beda terhadap nyeri.

Apabila dismenore tidak segera diatasi maka dapat berakibat syok, penurunan kesadaran, dan dapat menjadi masalah sosial karena nyeri yang tak tertahankan. Faktor resiko yang mempengaruhi dismenore yaitu haid pertama pada usia yang sangat dini <11 tahun, belum pernah hamil atau melahirkan, riwayat keluargayangpositif, merokok, dan mengkonsumsi alkohol (Apay, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian dari 20 orang remaja tentang kejadian dismenorea primer sesudah mengkonsumsi perasan air perasan wortel dan nanas menunjukkan bahwa sebagian besar mengalami penurunan rasa nyeri. Dari hasil penelitian bahwa remaja yang mengamati penurunan yaitu nyeri ringan di karenakan setelah diberikan intervensi mengkonsumsi perasan air wortel dan penurunan skala nyeri ini dialami karena siswi diberikan air perasan wortel 2 kali pada hari pertama dan kedua menstruasi.

Menurut Berkley (2013), dalam penelitiannya vitamin B1 (Thiamine), B6 dan E mampu mengurangi nyeri menstruasi. Sehingga makanan yang mengandung vitamin tersebut sebaiknya dikonsumsi untuk mengurangi nyeri menstruasi. Kandungan magnesium pada wortel dapat digunakan untuk kekuatan tulang, mengaktifkan vitamin B, merilekskan otot dan syaraf, pembekuan darah dan produksi energi. Wortel juga mengandung analgetik alami yang berperan seperti obat analgetik (contoh ibuprofen) dan sebagai anti inflamasi (Silva, 2014).

Mengonsumsi vitamin E 2-3 hari sebelum dan 2-3 hari setelah masa menstruasi dapat mengurangi kram dan kecemasan pada premenstrual syndrom (PMS). Vitamin E dapat menurunkan tingkat nyeri dan dapat mengurangi banyaknya darah haid yang keluar. Hal ini dilakukan dengan cara menyeimbangkan hormon dalam tubuh. sehingga siklus menstruasi dapat diatur (Axe, 2016).

Dari hasil penelitian Lelly dan Munaroh (2019) menyebutkan bahwa air perasan wortel dapat menurunkan dismenorea karena wortel kaya dengan kandungan beta karoten selama menstruasi baik karena beta karoten menghasilkan efek analgetik yang dapat menurunkan nyeri dismenore. Selain itu beta karotin juga mengkonversi ke vitamin A yang membantu untuk memperlancar aliran darah dan mengontrol nyeri haid. Sehingga membantu untuk mengatasi nyeri dismenorea, wortel dapat membantu untuk mengatur perdarahan berat dan periode tidak teratur.

Terjadi penurunan pada kelompok perlakuan setelah diberikan wortel dan nanas dikarenakan jus nanas mengandung bromelain yang berfungsi sebagai pereda nyeri. Menurut Rahayu tahun 2015. Jus nanas mengandung pektin, vitamin C, dan enzim bromelain untuk mengurangi rasa nyeri, dan memperlancar peredaran darah serta untuk proses penyembuhan luka. Bromelain menyebabkan penurunan kadar bradikinin dan menurunkan kadar prekallikrein dalam serum. Penurunan prekallikrein artinya penurunan pelepasan asam arakidonat dan penghambatan produksi prostaglandin PGE2.

Manfaat yang terkandung didalam buah nanas salah satu yaitu yang dihasilkan dari enzim bromelain yang merupakan 95% campuran protease sistein, yang berguna sebagai penghidrolisis protein dan tahan terhadap panas. Enzim bromelin dapat sebagai anti-nyeri, anti-endema, dehidemant (menghilangkan debris kulit) akibat luka bakar, mempercepat penyembuhan luka, dan meningkatkan penyerapan antibiotik serta dapat mempercepat pemulihan pasca operasi (Hayat Indrika Utami, dkk., 2015)

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat nyeri saat menstruasi setelah diberikan jus wortel dan nanas pada kelompok eksperimen mengalami penurunan sebelum intervensi 3.1 menjadi 2.25. Jika dibandingkan nilai P pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol (0,001: 0,33) Kelompok eksperimen memiliki penurunan nyeri haid lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. artinya pemberian jus wortel dan nanas efektif menurunkandismenorea primer pada saat remaja putri mengalami menstruasi.

Saran yang dapat diberikan kepada remaja putri agar dapat mengkonsumsi buah-buahan seperti jus wortel dan nanas untuk menurunkan dismenorea primer pada saat menstruasi dibandingkan dengan mengkonsumsi obat-obatan (farmakologik).

## 5. REFERENSI

- Amalia, F. 2017. *Efektifitas Analgesik Kombinasi Paracetamol dan Ekstrak Kasar Nanas Terhadap Reflek Geliat Mencit yang Diinduksi Asam Asetat*. *E-journal Pustaka Kesehatan*, volume 5(no2),534.
- Anurugo. 2011. Asuhan kebidanan pada remaja dengan dismenore primer, [http://perpusnwu.web.id/karya\\_ilmiah/document/3696.pdf](http://perpusnwu.web.id/karya_ilmiah/document/3696.pdf)
- Apay, S. E., et.al. (2012). Effect of Aromatherapy Massage on Dysmenorrhea in Turkish Students. *Journal of the American Society for Pain Management Nursing*. <Http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2010.04.002>.
- Axe, J. (2016). Vitamin E Benefits, Foods & Side Effects. Available from <https://draxe.com/vitamin-e-benefits/>
- Berkley, K. J. (2013). Primary Dysmenorrhea: An Urgent Mandate. *Journal of International Association for the study of pain*. October 2013 Volume 21, Issue 3.
- Devi,N.(2012).*GiziAnakSekolah*.Kompas Media Nusantara: Jakarta
- Hayat, I.U., Edi S., Susanto J. 2015. Pengaruh Sari Buah Nanas (*ananas comosus (L.)*) Terhadap Aktifitas Antioksi dan Pada Ekstrak Tongkol Jagung (*zea mays L.*). *JurnalIlmiahFarmasi*.Vol4.(3):51-57
- Noravita, & Kurniati, N. (2017). Pengaruh Pemberian Jus Wortel terhadap Penurunan Tingkat Dismenore Primer pada Mahasiswi DIV Bidan Pendidik Semester IV Di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Prawirohardjo, S. (2010),*Ilmu Kandungan*.Yayasan Bina Pustaka SarwonoPrawirohardjo,Jakarta.
- R. D Rahayu. 2015. Pengaruh Jus Nanas Terhadap Percepatan Penurunan TFU dan Penyembuhan Luka Perineum PadaIbu Post Partum di BPM Wilayah KlatenTengah. Surakarta : Kementrian Kesehatan Politeknik Kesehatan Surakarta Jurusan Kebidanan.*Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2015 <http://jurnal.poltekkessolo.ac.id/index.php/Int/article/download/145/135>
- Sandiati,F.E.2015.*PengaruhPemberianMaduTerhadapPenurunanNyeriHaid(Dismenorhea) pada Mahasiswi PSIK FIKES Universitas Muhammadiyah. Surakarta :UniversitasMuhammadiyah.*
- Setianingsih,Y.A.,Widyawati N.(2018). Pengaruh Pemberian Jus Nanas dan Madu Terhadap Penurunan Nyeri Menstruasi (Dismenore) Pada Remaja Putri Di SMP Tri Tunggal II Surabaya. *Jurnal Info Kesehatan Vol.8, No.2, Juli2018*
- Silva, D.J.C. (2014). Nutritional and Health Benefits of Carrots and Their Seed Extracts. *Journal of Food and Nutrition Sciences*. 5,2147-2156. <http://dx.doi.org/10.4236/fns.2014.522227>.
- WHO.2016.*TheIncidenceofDysmenorrhoea*.Diaksesdari [http://www.who.int/topics/womens\\_health/en/](http://www.who.int/topics/womens_health/en/).

## PENGAMANAN BAGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN

Oleh :

**Saiful Rizal**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
rizalsaiful1000@gmail.com

### Abstrak

Notaris dalam rangka menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman pada undang-undang jabatan notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang tugas dan kewenangannya diberikan oleh pemerintah guna melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan terutama dalam hal pembuatan akta autentik. Namun, seringkali dalam menjalankan tugas jabatan, notaris digugat dan/atau diajukan laporan pidana serta dugaan pelanggaran administrasi yang mengakibatkan Notaris dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menguraikan ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris dan perlindungan hukum yang seyogyanya diberikan kepada notaris agar terhindar dari pertanggungjawaban dalam lingkup hukum perdata, pidana dan administratif. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada notaris apabila notaris menjalankan jabatannya sebagaimana ketentuan undang-undang jabatan notaris, peraturan perundang-undangan lainnya, dan kode etik jabatan, serta adanya klausul eksonerasi.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Notaris, Tugas Jabatan

### 1. PENDAHULUAN

Perjanjian dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih. Para pihak yang saling mengikat diri tentu membutuhkan perjanjian yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan bersifat mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bentuk kepastian hukum serta perlindungan hukum atas dirinya sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik (Nisa, 2021). Perjanjian yang dituangkan dengan akta autentik sebagaimana substansi Pasal 1868 BW memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1870 BW, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Nisa, 2021).

Sebagaimana ketentuan Pasal 1868 BW menerangkan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat." G.H.S Lumban Tobing menjelaskan bahwa yang dimaksud pejabat umum (*openbare ambtenaren*) dengan kualifikasi sesuai Pasal 1868 BW hanya diberikan kepada notaris dan bukan kepada pejabat lain seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang (Anand, 2018).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491 (selanjutnya disingkat UUUJNP), Pasal 1 angka 1 mendefinisikan notaris, sebagai berikut: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Kewenangan notaris secara eksplisit diatur di dalam ketentuan Pasal 15 UUUJNP dengan kewenangan utama yaitu membuat akta notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa "Notaris berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris dalam menjalankan jabatan khususnya dalam proses penyusunan dan pembuatan akta wajib memperhatikan koridor hukum yang berlaku yaitu UUUJNP, Peraturan perundang-undangan, kode etik jabatan dan juga prinsip kehati-hatian. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan konflik kemudian hari yang menyebabkan otentitas daripada akta tersebut hilang. Hilangnya otentitas akta Notaris sebagai akta autentik bisa menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban (Anshori, 2009).

Beberapa kasus yang ditemui di lapangan akta notaris seringkali dijadikan sebagai objek gugatan (Nisa, 2021). Faktor timbulnya permasalahan hukum yang melibatkan notaris pada umumnya disebabkan 2 (dua) faktor, yaitu : Pertama, kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya terutama dalam proses penyusunan dan pembuatan akta (Nisa, 2021). Kedua, karena itikad buruk para pihak dalam akta (Kosuma, 2021), seperti salah satu pihak dalam akta diduga wansprestasi, melakukan perbuatan melawan hukum atau salah satu pihak dalam akta menyangkal kebenaran isi akta, tanda tangan dan kehadiran para pihak di hadapan Notaris hingga adanya keterangan palsu yang tertuang di dalam akta (Nisa, 2021). Kedua Faktor tersebut, pada umumnya melatarbelakangi notaris seringkali dipanggil pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum hingga hakim untuk diminta keterangan baik sebagai saksi, tergugat atau turut tergugat maupun tersangka atau terdakwa berkaitan dengan akta yang telah Notaris buat (Setiawan dan Gunarto, 2017).

Problematika ini menjadi sumber keresahan Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena berdampak merugikan notaris baik secara materiil maupun immateriil, maka penting kiranya Notaris mengetahui bahwa terdapat wujud pengamanan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya guna terhindar dari permasalahan yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata dan pidana.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai kajian hukum terhadap wujud pengamanan bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman UUJN, Kode etik Notaris dan BW.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN WUJUD PENGAMANAN BAGI NOTARIS GUNA MENGHINDARI KEWAJIBAN UNTUK BERTANGGUNG JAWAB

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengamanan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengamankan. Pengamanan yang dimaksud oleh penulis dalam pembahasan ini yaitu bentuk pengamanan yang mengandung konsep perlindungan hukum bagi notaris. Perlindungan hukum ini dapat diberikan kepada notaris apabila ia menjalankan tugas jabatannya sebagaimana ketentuan sumpah jabatan notaris, UUJN/UUJNP, Kode Etik Notaris, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sumpah jabatan notaris merupakan pintu gerbang bagi notaris dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yaitu membuat alat bukti dengan kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yaitu dalam bentuk akta notaris. Untuk itu, penting bagi notaris mengimplementasikan seluruh substansi yang ada pada sumpah jabatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Guna terhindar dalam sengketa perdata, pidana, serta sanksi administratif notaris dalam menjalankan tugas jawabannya terutama dalam membuat akta autentik, penting untuk mengetahui ketentuan Pasal 1868 BW. Pasal 1868 BW merupakan sumber otentitas akta Notaris, juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut (Adjie, 2021): Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum; Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan pasal 1868 BW, maka Notaris wajib mengikuti ketentuan Pasal 38 UUJN mengenai bentuk dan sifat akta agar memenuhi ketentuan sebagai akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1870 BW. Pasal 38, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. awal Akta atau kepala Akta;
  - b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomordan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik, selain memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN, notaris dalam membuat akta harus mengimplementasikan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh UUJN/UUJNP yaitu: Pasal 16 ayat (1) huruf m :

“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.”

Pasal 40 ayat (1) :

“Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.”

Pasal 44:

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh notaris agar akta notaris memenuhi ketentuan sebagai akta autentik yaitu dengan memperhatikan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN. Pasal 39 UUJN berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan

belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

- (3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 UUJN tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 41 UUJN. Selain Pasal tersebut, berdasarkan UUJNP akta notaris terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan apabila tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 angka (9), Pasal 44, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (4) UUJNP (Adjie, 2021). Apabila akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal hukum dan hal tersebut menjadi sebab timbulnya kerugian bagi para pihak dalam akta, maka para pihak dapat meminta ganti rugi kepada notaris. Hal ini lah yang menjadi sumber tanggung gugat bagi notaris. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk melaksanakan segala ketentuan yang diatur di dalam UUJN/UUJNP dan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (Nisa, 2021). Apabila notaris telah melaksanakan sebagaimana koridor hukum yang berlaku, maka notaris akan terhindar dari segi permasalahan hukum. Upaya pengamanan diri lain yang bisa dilakukan oleh notaris selain menjaga keabsahan dan otentitas akta notaris sebagai akta autentik yaitu dengan memperhatikan bahwa kedudukan notaris merupakan pejabat netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak/penghadap. Hal tersebut merupakan kewajiban notaris yang tidak dapat diabaikan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP dan Pasal 3 angka (4) Kode Etik Notaris.

Prinsip Kehati-hatian juga wajib diterapkan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatan. Notaris seringkali terlibat dalam kasus pidana karena di anggap sebagai dader intelektual (Nisa, 2021). Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana substansi pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu dalam memberikan penyuluhan hukum atau saran sehubungan dengan pembuatan akta diharuskan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang ada, agar terhindar dari ancaman hukum pidana.

Apabila notaris telah menjalankan jabatannya sebagaimana koridor hukum yang berlaku, para pihak dalam akta juga perlu memahami dan tidak semestinya menggugat atau melibatkan notaris ke dalam konflik atau sengketa yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab notaris dengan hanya mendasarkan pada nama dan tanda tangan notaris dalam akta. Pada dasarnya, hubungan hukum antara notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan atau ditentukan pada awal akta notaris (Adjie, 2021: 62). Untuk menentukan bentuk hubungan antara notaris dan para penghadap harus

dikaitkan dengan ketentuan pasal 1869 BW, bahwa tanpa adanya notaris sebagai pejabat umum maka akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Nisa, 2021).

Secara yuridis, akta autentik yang dibuat notaris wajib mencantumkan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris ke dalam akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf d UUIJP yang menjelaskan bahwa awal akta atau kepala akta harus memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris (Nisa, 2021). Notaris juga wajib membubuhkan tanda tangan pada akhir akta sebagaimana bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UUIJP yang berisi bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya (Nisa, 2021).

Pencantuman nama notaris pada akta, tidak berarti pihak di dalamnya turut serta, menyuruh atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, tetapi hal tersebut merupakan aspek formal akta notaris sesuai dengan UUIJP dan notaris tidak terikat dengan isi akta sebagaimana pasal 38 ayat (3) huruf c UUIJP dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan (Nisa, 2021). Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUIJP yaitu melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta. Ketika saran notaris diikuti oleh para penghadap dan dituangkan dalam akta notaris, hal tersebut dianggap sebagai keinginan dan permintaan para penghadap, bukan saran atau pendapat notaris, atau lebih jelasnya isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris (Adjie, 2021 : 16).

Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan koridor hukum dan tetap dilibatkan para pihak khususnya dalam ranah hukum pidana, terdapat perlindungan hukum bagi Notaris yang secara normatif dapat ditemukan dalam UUIJP. Hal tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 66 UUIJP yang menyatakan bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud di atas, dibuat berita

acara penyerahan. Majelis kehormatan Notaris (MKN) dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut di atas, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.

Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 66 UUIJP diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan Pasal 66 UUIJP hanya berlaku dalam perkara pidana, karena ketentuan tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam ruang lingkup perkara pidana (Anand, 2018: 73). Pasal 66 UUIJP merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris (Anand, 2018: 74).

Bentuk pengamanan lain terhadap notaris khususnya dalam proses peradilan pidana menurut UUIJP yaitu ketentuan yang mengatur kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) dan hak ingkar notaris yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain. Sesuai Pasal 54 UUIJP, bahwasanya Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna perbuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Utami, 2015).

Selain perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat bentuk perlindungan hukum bagi notaris selama pembuatan akta yaitu dengan melekatkan sidik jari di minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Fungsi sidik jari di sini untuk lebih memperkuat alat bukti (Nisa, 2021). Dengan demikian, diaturnya tentang sidik jari ini adalah untuk menguatkan masalah pembuktian (Utami, 2015).

Pengamanan lain yang juga dapat dilakukan oleh notaris yaitu dengan mencantumkan klausul eksonerasi dalam akta yang notaris buat (Nisa, 2021). Menurut *Black's Law Dictionary*, klausul eksonerasi atau *exemption clause* didefinisikan sebagai berikut :*"A contractual provision providing that a party will not be liable for damages for which that party would otherwise have ordinarily been liable"*. Sedangkan menurut Jean Chrysostome Kanamugire (2014 : 165) menerangkan bahwa *"An exemption clause is a term incorporated into a contract usually to exclude a contracting party's liability or a duty which under normal circumstances the law would attach in that*

*type of agreement. In English law they are sometimes referred to as exclusionary clauses, exception clauses or disclaimers.*”

Istilah Eksonerasi (*Exoneration*) atau *disclaimer* atau *exemption* dalam berbagai kepastiaan hukum jika diintisarikan dapat diartikan untuk membebaskan subjek hukum (orang atau badan hukum) dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum yang sudah diperjanjikan sebelumnya (Adjie, 2021).

Pencantuman klausul tersebut merupakan bentuk urgensi notaris dalam memberikan perlindungan atau pengamanan diri. Alasan lain notaris mencantumkan klausul eksonerasi tersebut, yaitu (Adjie, 2021: 52) :

- a. Sebagai bentuk tindakan kehati-hatian dan berhati-hati bagi notaris;
- b. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris sendiri;
- c. Sebagai informasi kepada pihak lain, jangan terlalu mudah menstigmatisasi/melabelisasi kepada notaris dari pihak lainnya sebagai pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya, jika tanpa ada bukti yang kuat.
- d. Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong maka para penghadap sendiri yang harus bertanggungjawab.

Contoh klausul eksonerasi dalam akta pihak (*partij*) adalah sebagai berikut (Nisa, 2021):

“Bahwa para penghadap, menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana **tidak akan melibatkan notaris dengan cara dan bentuk apapun.** Bahwa segala ucapan/keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta ini adalah benar, jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggung jawab para penghadap dan **tidak akan melibatkan notaris.** Bahwa semua surat/dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini adalah surat/dokumen yang benar. Jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya, dan **membebaskan notaris dari akibat hukum secara perdata** (Adjie, 2021).”

Pencantuman klausul eksonerasi dalam akta Notaris, apabila ditinjau berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidak dilarang, akan tetapi dengan syarat bahwa para pihak dalam akta sepakat dan menyetujui pencantuman klausul tersebut (Putra dan Christine, 2018). Apabila para penghadap keberatan setelah pembacaan akta dilangsungkan, maka notaris wajib untuk melakukan *renvoi* (Nisa, 2021). Klausul tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi bisa menjadi alat untuk membela Notaris dalam persidangan apabila diikutsertakan para pihak dalam sengketa, bahwa para pihak telah memberikan pernyataan secara langsung kepada Notaris dengan sadar mengenai keterangan yang

diberikan adalah benar adanya, sehingga Notaris terlepas dari kebenaran materiil yang disampaikan para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik.

#### 4. KESIMPULAN

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman pada UUJN/UUJNP, peraturan perundang-undangan lainnya, serta kode etik jabatan. Ketidakpatuhan notaris terhadap aturan hukum yang berlaku, berdampak pada pertanggungjawaban notaris baik secara perdata, pidana maupun administratif sesuai kadar pelanggaran yang notaris lakukan. Wujud perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh notaris guna terhindar dari tanggung jawab hukum yaitu dengan mematuhi sumpah jabatan notaris, menjaga keabsahan dan otentitas akta notaris sebagai akta autentik, menjalankan kewenangan, kewajiban serta menjauhi larangan yang telah di atur dalam ketentuan UUJN/UUJNP serta kode etik. Notaris yang telah menjalankan tugas jabatan sesuai koridor hukum akan tetapi tetap dilaporkan melakukan tindak pidana, maka terdapat pengaturan yang diatur pada pasal 66 UUJNP dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai bentuk wujud perlindungan diri bagi notaris. Wujud pengamanan lain yang dapat dilakukan notaris yaitu dengan mencantumkan klausul eksonerasi dalam akta yang ia buat. Klausul tersebut hanya bersifat menegaskan kedudukan dan jabatan notaris serta sebagai informasi bagi para pihak ataupun pihak ketiga.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama
- Adjie, Habib. 2021. *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Ansohri, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press
- Black, Henry Cambell. 1979. *Black's Law Dictionary. Fifth Edition*. West Publishing Company
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lumban Tobing, G.H.S. 1998. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-3. Jakarta: Erlangga
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Nisa, Naili Zahrotun. 2021. *Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (Partij)*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
- Putra, Mohamad Fajri Mekka dan Christine. (2018). *Implikasi Klausul Pembebasan Tanggung*

Jawab (Asas Eksonerasi) Pada Akta Notaris, diakses melalui <https://kabarnotariat.id/wp-content/uploads/2018/11/Artikel-Implikasi-Klausul-Eksonerasi-Terhadap-Akta-Notaris-23-Agustus-2018.doc>. (diakses pada tanggal 01 Juni 2021)

Setiawan, Asep dan Gunarto. (2017), Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Eksonerasi Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1

Utami, Sri. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, Edisi 3 Januari-Juni

## STYLISTICS ANALYSIS OF THE POEM “THE DOOR IN THE DARK” BY ROBERT FROST

Oleh:

Mochamad Raka Hendayana<sup>1)</sup>, Fithriyah Inda Nur Abida<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Univesitas Negeri Surabaya

<sup>1)</sup>meredien588@gmail.com

<sup>2)</sup>qingyinda@gmail.com

### Abstract

The goal of stylistics is to not only explain the formal features of texts, but also to demonstrate their functional value in text interpretation; or to demonstrate the relationship between literary text and linguistic effects where these are regarded relevant. The study of stylistics is a branch of linguistics that deals with the qualities and variants of language. The purpose of this research is to examine the stylistic features of Robert Frost's poem “The Door in the Dark”. By looking at the choice of language at phonetic, morphology, graphitic, and semantics, it is found that *Robert Frost's writing, viewpoints, and themes are all connected. The data is analyzed using stylistics devices to achieve the goal.* It has been concluded that Frost used a philosophy of a number of stylistic devices including cacophony, alliteration, assonance, tone modulation, denotation, connotation, metaphor, personification, symbolism, and imagery to highlight the idea of life.

**Keywords:** Stylistics, Robert Frost, alliteration.

### 1. INTRODUCTION

Stylistics is a discipline of applied linguistics that focuses on the study of textual style. Stylistics only dealt with literary text before the twentieth century. However, it began to deal with non-literary texts in the twentieth century. Leech (2007: 167) highlights the relationship between language and artistic function by explaining stylistics as a linguistic approach to literature. Stylistics, according to Mugair (2013: 316) is an in-depth study of writing to achieve a specific effect by specific word selections. The goal of stylistics is to not only explain the formal features of texts, but also to demonstrate their functional value in text interpretation; or to demonstrate the relationship between literary text and linguistic effects where these are regarded relevant. There are various degrees of stylistic analysis, and a text is examined based on these levels, which are: The study of graphs is known as graphology. The science of sound is known as phonology. Grammatical level is analysing the words and sentence structure. Semantics level is the meaning of words and sentences (Bradford, 2005).

Robert Frost was an American poet who specialized in realistic depictions of rural life. He was nominated four times for the Pulitzer Prize for Poetry. “The Door in the Dark” talks about someone who is in the dark and attempting to find their way to a dark door. The person reaches into the darkness to open the door. That individual obtains the door and attempts to open it. When the individual opens the door, it slams into his face, unguarded, and the door slams into him so hard in the face that he loses consciousness. In this poem, Frost is applying the short, pithy *versanelle* to describe a simple scenario of the man's story. “The door in the dark” is a

metaphor used by Robert Frost. The individual looking for the door represents the reader and, by extension, every human being on the planet, the room represents the world, and the door represents the truth about life. This poem is about most people who are still blindfolded by innocence (darkness) and are only gradually being exposed to the truth, or more accurately, hit by hit (of the door) to the darkness and dangers that exist in everyday life. According to Kaplan (2007: 42) Frost is recognized for his frequent use of coordinating conjunctions in his poems. Frost's poetry uses a variety of stylistic elements at the phonetic, phonological, graphitic, grammatical, and lexico-syntactic levels to communicate his own viewpoint.

Frost uses combination of different stylistic devices to make the poem lyrical. The importance of analyzing Robert Frost's poetry is to gain a better understanding of the symbolism and metaphors symbol or expression (Setiawan, 2014: 6). A symbol connects a word or idea to a physical object, scene, or action, even though they are fundamentally different. A linguistic sign whose interaction with its semiotic object is customary is one of Pierce's best qualifications (Martin B and Felizitas R, 2000). In this poem various of figurative languages are used to reveal the hidden message occur in line and sentences of the poem. As Riffatrr (1978) says that a poetry expresses concepts and thing by indirection. To put it simply, a poem says one thing and means another. Frost uses a lot of metaphors, antithesis, and symbolism in his word and sentence choices. As a result, stylistic methods are employed in order to analyze the poetry and answer the following questions: 1) What are the stylistic features of Robert Frost's poem “The Door in the Dark”? and 2) How

do those stylistic features contribute to construct the theme of the poem?

## 2. RESEARCH METHOD

The research uses library research with qualitative approach to analyze of Robert Frost's poem "The Door in the Dark". According to Moleong (2010:6), qualitative research is utilized to better comprehend the phenomenon of what the subject has experienced, such as behaviors, perception, motivations, and others, holistically and through the depiction of a unique natural context in the form of words and language, utilizing a range of natural methods. In order to comprehend the poem, stylistic analysis is employed to analyze the themes using various poetic devices and word items. The research looks at how the poet used basic narrative language to express complex thoughts. This research looked at four levels of language features: phonological, graphological, grammatical, and semantic levels. The study examines how the poet has presented the deep philosophy by using simple narrative language.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

This poem is arranged with only a stanza that consist of nine lines. Hence, the rhymes pattern of this poem is ABBACCCDD. This poem does not use a common verse because it is composed entirely of the poet's own verse. Each line has a different number of feet; the poet utilizes five in the first, second, fourth, sixth, eighth, and ninth lines. In the third line, the poet employs six feet, and in the fifth and seventh lines, he uses four feet. Each foot should have a stressed syllable followed by an unstressed syllable. We may confidently state that the poem is written in trachio pentameters. Almost every line has ten syllables and follows the DUMda DUMda rhythm, with each stressed word followed by an unstressed syllable. A beat, or trachio, is a pair of syllables. As a result, when all of the factors are considered, "The Door in the Dark" is written in trachio pentameters because nearly every line contains 10 syllables (five beats) that alternate between stressed and unstressed. The poet has used only two punctuations such as comma and full stop. Mostly, they are placed at the end of the lines to give pause or end the sentence. This punctuation divides the poem into three sentences which contains of four line, three lines, and two lines making a sentence. The poet employs a comma in the first line to show that the sentence has a small break but is not yet complete. It describes the speaker's travel through each room, including the black room.

The information is insufficient since it does not describe what happens when the speaker enters the dark chamber. The second line likewise has a comma, indicating that it has a minor break. This statement describes how the speaker (I) reaches out hesitantly to emerge from the darkness. This line still bears a connection to the first, but the poet has not

yet used a full stop to signify the end of the sentence. Because the third and fourth lines, together with the first and second lines, do not contain any punctuation, they form a single phrase. However, the poet takes a breather, implying that the lacing finger of the speaker is significant. When the poet's fingers are disregarded when stretching out, the speaker lace his finger and closes his arms, the poet gives the room. The poet breaks apart the line to stress the importance of the overlooked part and the close arms. The fifth line uses comma to give a break. It is given a break to give an information that the poet wants to be focus on the slim door that already passing his guard. the sixth line contains no punctuation, we can deduce that it is truly a single phrase with the seventh line. These two phrases imply that the previous door slammed on the speaker's head, causing the speaker to be startled. The eighth line is likewise a whole phrase that combines with the last line. These two phrases emphasize that the speaker believes that human and things are not a couple after being hit by the door. Even if they had previously been paired.

### Phonological Analysis

In this poetry, rhyming words are highly significant since they help to create the sounds of the poem. It's worth noting that the first four lines do not rhyme with the middle two lines or the last two lines. It provides a stumbling block in the first four stanzas since the rhyme is switched three times in the first, second, third, and fourth lines. The same rhyming strategy is used in the last five lines, which are similarly separated into two sounds. To generate an accentuating effect on the reader's consciousness, Frost employed predominantly spoken tones in the poem (words like dark, arc, guard, hard, and jarred). The fundamental idea of using harsh sounds in words like more and before with the 'r' sound is that the vowel 'e' in 'more' and 'before' adds no meaningful sound. As a result, the words 'more' and 'before' have a harsh 'r' ring to them. Not only that, but the words 'dark' and 'arc' have the same harsh sound as the words 'guard,' 'hard,' and 'jarred,' which have the same strong 'd' and 'r' sound. Similarly, the vowel 'e' in face and lace does not contribute significantly because they sound like the consonant's sound. We can deduct from this that the poet follows the standard rule of vowels and consonants, in which vowels share soft sounds and consonants share hard sounds. It is indicating that there is a normal role in the poem without any switches.

In this poetry, assonance appears in the first, second, and fourth lines. The 'o' sound appears in the first sentence in the words room, going, and from. In the second sentence, the 'e' sound appears in the words 'save' and 'face.' In the fourth line, however, the letters 'a' appear in the word's arms, a, and arc. These vowel sounds were employed in a certain order to create a rhythmic impression in the reader's head. The consonance in this poem can be found in the

first, fifth, and sixth line. In the first line, there is 'm' sound in from and room to room. Not only that, but there is also 'g' sound in the fifth line in the words got and guard. Last, in the sixth line there is 'h' sound in hit, head, and hard. In this poem, consonance creates a melodious affect to the poem and Frost tried to create a lyrical feeling in the poem. There are multiple alliterations in the poem. In the first line, the word 'room to room' has a 'r' sound. There is a 'h' sound in head, hit, and hard in the sixth sentence. The last line has the 'w' sound in 'with' and 'what.' As a result, there are three alliterations in this poem. Frost can utilize alliteration to draw the reader's attention to the distinct situations of the entering room by room, as well as the speaker's condition after being hit by the 'door.'

**Morphological Analysis**

This poem uses of simple and formal diction without any kind of slang. The language is descriptive and evaluative as it describes the scene as well as expresses the speaker's ideas and feelings. Here we will classify various parts of speech of this poem.

Noun	Pronoun	Action Verb	Adjective	Adverb	Preposition	Conjunction
Room	I	Going	Dark	From	In	But
Face	My	Reached	Slim	Blindly	To	However
Fingers	Me	Save	Hard	Lightly	Out	And
Arms	They	Neglected		Past	With	So
Arc		Lace		Blow		Before
Door		Got		Jarred		
Guard		Hit		Anymore		
Head		Had				
Native		Used				
Simile		Pair				
People						
Things						

We may deduce from the table above that the poet uses a very clear diction, despite the fact that it has a very profound and mysterious meaning for the audience. As we can see, the nouns employed in this poem are related to the speakers and the items stated. Concrete nouns emphasize physical presence and natural imagery, whereas abstract words imply the speaker's state of mind. The verbs convey his current situation and compulsions by being in continuous tense for one and present indefinite and infinitive for the other. In this poetry, it's more likely that the speaker is attempting to flee. Pronouns allude to places and people, and they highlight two of the poem's personas: the speaker and his possessions. The speaker's perception of the situation is described via adjectives. Here, the black represents his condition, the slender represents the door that

slammed him, and the hard represents the way the door slammed him. Adverbs and prepositions indicate location, while co-ordinate and sub-ordinate conjunctions join phrases to give the poetry coherence.

The sentences are declarative and come in three types: simple, compound, and complicated. The length of the sentences is determined by the ideas they express. The poem has noun phrases, prepositional phrases, and verb phrases. 'My fingers,' 'my arm,' 'my guard,' and 'my native simile jarred' are noun phrases. 'In the dark' and 'in an arc' are prepositional phrases. 'I reached out,' for example, while infinitive expressions include 'to rescue,' 'to room,' and 'to lace.'

The poem contains a lot number of both free and bound morphemes. Mostly used are the free morphemes while less used bound morphemes are in the form of suffixes. Suffixes are in the form of plural nouns, the different forms of verb and adverb. There are two kinds of affixes; derivational and inflectional. Woods, darkest, gives, bells, promises, miles and stopping are inflectional while frozen, sound's, lovely and before are derivational. Allomorph sounds present in bound are of 's' and 'z'.

Free	Bound	Prefix	Suffix	Two Morphemes
In, From,	Going		Go-ing	
Room, Dark,	Reached		Reach-ed	
Out, To, Save	Blindly		Blind-ly	
My, Face, But,	Neglected		Neglect-ed	
However, Lace	Lightly		Light-ly	
And, Close, Arc	Fingers		Finger-s	
Slim, A, Door	Arms		Arm-s	
Got, Past, Guard	Jarred		Jar-ed	
An, Hit, Me	Things		Thing-s	
The, Head, So	Before		Be-fore	
Had, Native,				
Simile, so, Do				
Not, People,				
Pair, Any, More				
With, What, They				
Hard, Blow				

From this table we can see that bound morphemes mostly related with the sense of human body (fingers and arms) and an action (going, neglected, reached) and also a condition of something (blindly, lightly, jarred). While free morphemes consist of person (I, me, my, people, they), location (in and to) and action (save, lace, hit, blow) and things (door, arc, head, room, face). The poet employs bound

morphemes and free morphemes to connect the encounter of human and the difficulties and the condition they face. Human and the difficulties will be always walk together due to the relation of them. Frost uses the concept of life to describe the difficulties that human always face in their life. He also shows the possibility that will be happened when we face the difficulties like trying and failed. The poet employs diverse words and techniques to convey his meanings and create a great impact on the reader. The analysis of words and devices incorporated help the reader comprehend the message and theme of the poem in a better way. Frost has made use of words in such a way that these descriptions create a visual image in front of reader and the figurative language even make it more decorative.

We can observe from this table that bound morphemes are usually associated with human body sensing (fingers and arms) and action (going, neglected, reached), as well as a condition of anything (blindly, lightly, jarred). Person (I, me, my, people, they), location (in and to), and action (save, lace, hit, blow) are among the free morphemes (door, arc, head, room, face). The poet uses bound and free morphemes to connect the human encounter with the challenges and conditions people face. Because of their relationship, humans and obstacles will always walk hand in hand. Frost uses the concept of life to describe the challenges that humans confront on a daily basis. He also demonstrates what might happen if we confront problems such as attempting and failing. To transmit his concepts and make an impact on the reader, the poet uses a variety of words and strategies. The analysis of words and devices incorporated help the reader comprehend the message and theme of the poem in a better way. Frost has made use of words in such a way that these descriptions create a visual image in front of reader and the figurative language even make it more decorative.

This poem by Robert Frost also has several figurative meanings that can be found in it and here is the explanation to all the figurative language found.

*In going from room to room in the dark,  
I reached out blindly to save my face,  
But neglected, however lightly, to lace  
My fingers and close my arms in an arc.  
A slim door got in past my guard,  
And hit me a blow in the head so hard  
I had my native simile jarred.  
So people and things don't pair any more  
With what they used to pair with before.*

**Denotation** in this poem can be found in these words:

- Room: space that can be occupied or where something can be done, especially viewed in terms of whether there is enough.
- Face : the front part of a person's head from the forehead to the chin.

- Fingers : each of the four slender jointed parts attached to either hand (or five, if the thumb is included).
- Arms : each of the two upper limbs of the human body from the shoulder to the hand.
- Door : a hinged, sliding, or revolving barrier at the entrance to a building, room, or vehicle, or in the framework of a cupboard.
- Things : an inanimate material object as distinct from a living sentient being.

**Connotation** in the poem can be found in this words :

- Room : symbol of the difficulties that has been faced
- Face : our own self
- Fingers : the spirit of trying
- Arms : the struggle
- Door : chance that comes
- Things : Lucky

#### **Metaphor**

Frost conveys his point of view in this poem with astute use of metaphorical language, as he says: in walking from chamber to room. In a metaphorical sense, the poet explains the concept of all he has already experienced. There's also the dark, which indicates that it's not a nice thing. Or it encountered difficulty here.

#### **Personification**

In this poem, the personification that is found is the door. The personification of the slim door that hit the speaker's head is important, since the speaker talks about the reality and the change that comes but it does not work as it should be.

#### **Symbolism**

In this poem, the author uses the image of a room in the dark to represent the problems that we may face in life. There's also the native simile jarred, which refers to all of the lessons learned by the speaker after working so hard and fighting for his life. The door also represents the possibility of improving one's situation. However, the reality is symbolized by the head. As a result, the chance that we discover also has the potential to break the truth. It could also fail. And things represent luck, because the speaker in this poem does not have any luck at all. As a result, he gives up.

#### **Imagery**

Frost has used many images to transport the idea of dismay. The use of imagery here is for helping the audiences get the feel of the senses that they have. Here the imagery that contained in this poem :

- Visual imagery: dark
- Tactile imagery : A slim door hit in the head
- Light/dark imagery: "room in the dark " vs "a slim door."
- Man-made imagery: room, door

The poem is 72 words long. Only 12 of the 108 words include more than one syllable. To put it

another way, this poetry is primarily made up of monosyllabic words. Monosyllabic words serve to keep the poetry moving along, and they also make it appear simpler than it is. We can see that "The Door in the Dark" is a straightforward poem with a straightforward term, but it contains deeper and more complicated themes. There are 74-word types in which 'the' is a referential article that is used twice to draw the reader's attention to specific ideas. The word 'and' appears twice in the poem to represent the writer's mind's plethora of ideas. The first-person pronoun 'I' is repeated twice, giving the poetry a subjective feel. Room, face, fingers, arm, arc, door, guard, head, native, simile, people, and objects are among the 12 nouns. These nouns are used to subtly portray various images and symbols. Going, reached, saved, neglected, lace, got, hit, had, used, and pair are the 12 verbs. This is utilized to show whether the speaker's condition or movement and conduct are correct. The adjectives dark, thin, and hard are used to make a strong effect on readers and to stress the poem's main themes.

#### Syntax Analysis

From the beginning till the end, the whole poem is linked and there is a constant connection between all parts of the poem. All the sentences are linked, and the poem moves smoothly carrying its theme and ideas in a flow. It starts from one point and then referring to it, connects all other concepts.

*In going from room to room in the dark,  
I reached out blindly to save my face,  
But neglected, however lightly, to lace  
My fingers and close my arms in an arc.  
A slim door got in past my guard,  
And hit me a blow in the head so hard  
I had my native simile jarred.  
So people and things don't pair any more  
With what they used to pair with before.*

The speaker says in the first line, "In walking from room to room in the dark," which is not a complete sentence because there is no verb. The second line, 'I stretched out blindly to rescue my face,' is a clear sentence since it includes I as a subject, 'reached out' as a verb that indicates something happened in the past due to the use of verb 2 in 'reached,' and my face as the object that needs to be saved. 'But neglected, however lightly, to lace,' says the third sentence, which is unclear because there is no verb. When we move a line to the previous line, though. It demonstrates that they are both linked to one another. 'My fingers and close my arms in an arc,' says the fourth line. Give the current precise time when the speaker wants to 'close' his arm, which has been neglected since the use of verb 2. 'A slim door slipped in past my guard, And dealt me a smack in the skull so hard,' says the fifth and sixth lines, implying that it is set in the past. That indicates that the door had already passed him by and collided with his head. 'I had my native simile jolted,' says the next line. The use of the past verb 'had'

indicates that after experiencing the prior incident, he has now learned that he can come to a conclusion. And he's already reached the conclusion indicated in the last two lines. 'As a result, people and things no longer pair with what they used to pair with.' Which, by utilizing the present tense, indicates that it is a statement he has previously stated. And the usage of the word 'used to' here emphasizes the notion that he may have been associated with some 'things' in the past, but he is no longer doing so.

#### Semantics Analysis

Semantic deals with the study of meaning in which this poem titled "The Door in The Dark" explores the theme of difficulties in life as we can see from the poem.

*In going from room to room in the dark,  
I reached out blindly to save my face,  
But neglected, however lightly, to lace  
My fingers and close my arms in an arc.  
A slim door got in past my guard,  
And hit me a blow in the head so hard  
I had my native simile jarred.  
So people and things don't pair any more  
With what they used to pair with before.*

The speaker is drawn to the dark reality of life, which represent the difficulties and obstacles, but the speaker does not only accept his destiny, but he tries so hard to struggle and escape from all the difficulties. The speaker is drawn so deep by all the obstacles he faced but then he also given chances to flip back the condition, yet he gets failure. Looking at it line by line is a great way to get submerged in its meaning. The whole poem describing the someone's distress in which he is struggling to overcome the affliction that he faced.

The poet begins the poem by stating a condition, "In walking from room to room in the dark," as the poet phrased it. We can deduct from this that the speaker has encountered a wide range of challenges. He may frequently confront challenges in his life as a result of the 'room to room' symbolizing hurdles and the 'black' symbolizing negative impulses. The second phrase reads, "I reached out blindly to save my face," implying that the speakers are attempting to overcome all hurdles. The word 'blindly' is used to emphasize how difficult his efforts are. And the word 'face' represents himself, in which he is desperately attempting to save himself from negativity. "But omitted, however softly, to intertwine My fingers and close my arms in an arc," says the third line, which is also related to the fourth line. Which indicates that all of his efforts were futile because the word 'neglected' elicited no response, prompting him to "close his arm" in order to reduce his spirit. The next line, which says that the speaker gets hit by the "door," which signifies the chance, makes it further clear that he is lowering his spirits (again). His chances are continuously letting him down. As a result, he came to the conclusion that luck was not on his side, as stated in the last two

lines, "So people and things don't pair with what they used to pair with before." The luck is symbolized by "items."

#### 4. CONCLUSION

The poem 'The Door in the Dark,' written by Robert Frost, depicts the lives of an ordinary person. During his voyage from one dark room to the next, the speaker tries to find a way to glimpse the light so that he can save himself. However, the speaker never receives assistance from anyone. He has been abandoned. As a result, he tries to accept his situation. But one day, he discovers a light that enters his dark room successfully, but when he tries to obtain it, he fails. It has vanished. The one item he can think of that might be able to aid him is never found. He is enraged, and he realizes that there will never be an opportunity to flee. Even if he's almost there, he'll never get there. As a human being, we will always face with two things. They are positivity and negativity. We cannot avoid that negativity will be always haunting us. Sadness, failure, obstacles, death are some of the examples of the negativity which may be found by us as a human being. In this poem, the speaker emphasizing that life is not about the happiness only. There are numerous factors that can cause you to fail. Starting with entering the "black room," we will encounter any situation in which we are "neglected," whether by society or by the luck that God may bestow despite our best efforts, there is still the possibility of being "neglected." Not only pointed about the sadness, but it also gives a little hope as what life usually does. Chances exist at all times. But, once again, this poem slaps us in the face as readers as it reminds us that chances do not always succeed. It is possible to fail. Whatever the case may be. The conflict in this poetry is eerily similar to reality itself. Failure-related conflict is well-known in society. The speaker asserts that not everything that is difficult will turn out to be as good as we had hoped. As the speaker states in the poem's two final lines, we cannot rely solely on luck because it may disappoint us.

#### 5. REFERENCES

- Bradford, R. (2005). *Stylistics*. New York. Routledge.
- Frost, Robert. (1950). *The Complete Poems of Robert Frost*. Limited Editions Club.
- Ichwan Setiawan. (2014). *Symbols in Robert Frost's Poem*. Unpublished Thesis. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Leech, G. (1981). *Style in Fiction*. London: Longman
- Leech, Geoffrey. (2007). *An Introduction to English fictional prose 2<sup>nd</sup> edition*. Pearson
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Riffaterre, Michael. 1978. *Semiotics of Poetry*. London: Indiana of University Press.
- Sarab Kadir Mugair. (2013). *A Stylistic Analysis of "I Have a Dream"*. International

- Journal of English and education. Vol.2. Issue 2. April 2013
- Short, Michael. (1996). *Exploring the language of poems, plays, and prose*. Routledge
- Simpson. (2004). *Stylistics*. New York: Routledge.
- Verdonk, P. (2002). *Stylistics*. Oxford: Oxford University Press.
- Wales, K. (2011). *A Dictionary of Stylistics 3<sup>rd</sup> edition*. New York: Routledge.
- Widdowson, H.G. (1975). *Stylistics and The Teaching of Literature*. London: Longman.

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG SEHAT DALAM RANGKA MENEKAN PENYEBARAN COVID-19 (STUDI PADA KELURAHAN BINTARO, KOTA MATARAM)

Oleh:

I Made Putra Suryantara<sup>1)</sup>, Muh. Zulfiqri Syahmat<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram

<sup>2</sup>Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Mataram

<sup>1</sup>Email: putrasuryantaraimd@gmail.com

<sup>2</sup>Email: piki.syahmat@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program Kampung Sehat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, juga untuk mengetahui apakah program kampung sehat mampu menjadi solusi dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Program Kampung Sehat di Kelurahan Bintaro Kota Mataram berjalan efektif dan mampu menekan penyebaran virus Covid-19. Dari pendekatan sumber, pemerintah desa berhasil menemukan sumber-sumber dan cara untuk menginpresasikan sifat-sifat lingkungan yang ada melalui pemanfaatan masyarakat yang dijadikan sebagai objek dan subjek kegiatan. Program Kampung Sehat juga mampu mencapai salah satu *output* penting dimana masyarakat mulai terbiasa dengan hidup bersih dan sehat sesuai protokol Covid-19. Dari pendekatan proses, adanya semangat kerjasama, saling percaya diri, dan desentralisasi dari berbagai elemen mampu membuat program Kampung Sehat berjalan lancar. Dari pendekatan sasaran, program Kampung Sehat berhasil membuat masyarakat mematuhi protokol kesehatan, namun untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masing-masing individu masih menemui kendala karena bergantung pada kesadaran dan komitmen setiap orang.

**Kata kunci:** Efektifitas, Covid-19, Kampung Sehat, NTB.

### 1. PENDAHULUAN

Kampung sehat, tak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa NTB memiliki keindahan yang luar biasa, potensinya melimpah, tetapi juga untuk menjamin alamnya sehat. Program Kampung Sehat tidak dimaknai pada sebatas lomba saja, kemudian berakhir selama Wabah Covid 19 saja. Akan tetapi harus terus berlanjut untuk mewujudkan cita-cita bersama menggapai NTB Gemilang.

Program kampung sehat juga untuk memastikan desa-desa di NTB selain bersih, sehat, indah, aman dan religius (Bersinar) serta masyarakatnya bahagia. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah desa yang bebas dari narkoba. Kampung sehat dari NTB akan menjadi bagian dari media promosi untuk ikut mengenalkan NTB dikancah nasional dan internasional karena kehebatan dan prestasinya.

Program kampung sehat yang diinisiasi Kapolda NTB dalam upaya membantu pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran covid-19 patut diapresiasi. Lomba kampung sehat ini salah satu strategi untuk membantu peranan masyarakat memaksimalkan dalam menjalankan protokol Covid-19. Sebagai bentuk pemacu masyarakat berlomba-lomba mencari strategi, atau formula sesuai adat dan budaya agar tidak kaku dengan protokol kesehatan sesuai standar WHO (afredasi.com).

Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram bersama warga sangat antusias melakukan kegiatan gotong-royong untuk mewujudkan kampung yang bersih dan sehat. "Kegiatan gotong-royong ini sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan di kelurahan Bintaro. Selain itu juga untuk membangun sinergitas dan menjalin silaturahmi dengan Warga kegiatan gotong royong ini juga dimaksudkan untuk mengembalikan kebiasaan masyarakat agar peduli dengan lingkungannya dengan tidak membuang sampah yang bukan tempatnya. Di samping itu kegiatan gotong royong ini juga untuk mendukung program kampung sehat dalam menghadapi kehidupan baru atau *new normal life* di tengah Pandemi Covid-19.

Di lokasi Kampung Sehat Kelurahan Bintaro, kegiatan ini sangat positif dengan harapan dapat menstimulan, menggugah kesadaran masyarakat dalam meningkatkan budaya hidup sehat dimulai dari lingkungan paling rendah dan dari hal kecil setiap orang dalam lingkungannya. Terlebih, saat ini kita masih dalam situasi Pandemi Covid -19. Hal ini bagian dari upaya percepatan penanganan memutus penularan Covid-19. Kampung Sehat ini mampu menggerakkan masyarakat dalam berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, perekonomian, keamanan, hingga kebersihan. Kampung Sehat menjadi program yang sangat tepat dalam menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB (HarianNusa.Com).

Tingkat kedisiplinan masyarakat mengikuti protokol Covid-19 ini adalah kunci dalam mencegah penyebaran covid-19 di NTB. Kapolda NTB, mengajak masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di NTB. Sehingga pandemi covid-19 ini bisa berakhir (afredasi.com). Dilihat dari situasi di atas, maka permasalahan yang dapat di teliti adalah : 1) Bagaimanakah efektifitas program kampung sehat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 ? 2) Apakah program tersebut benar-benar mampu memberikan efektivitas dalam rangka menekan penyebaran Covid-19?

## 2. METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan, mengumpulkan data, menentukan objek dan subjek penelitian, menentukan metode penelitian yang digunakan, menyusun jadwal waktu penelitian dan mencari literatur (studi kepustakaan) yang bisa membantu menjelaskan dan memberikan jawaban dari rumusan masalah. Lokasi dalam penelitian ini adalah salah satu kelurahan yang ada di Kota Mataram yaitu di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan, yaitu beberapa kepala lingkungan di Kelurahan Bintaro. Pendekatan dengan informan dilakukan dengan cara mengemukakan secara jelas maksud dan tujuan peneliti dalam melakukan pengumpulan data kepada informan. Untuk lebih jelasnya pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik yang saling mendukung guna mempertajam analisis data dan proses triangulasi. Teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Observasi Pengumpulan Data, dilakukan berdasarkan hasil pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti terlibat langsung dengan program yang akan diteliti agar data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam.
2. Wawancara Pengumpulan Data, dilakukan melalui komunikasi langsung dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam melalui pendekatan semi terstruktur untuk menemukan permasalahan lebih terbuka.
3. Dokumentasi Pengumpulan Data, dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk gambar dan berkas yang terkait dengan permasalahan. Dokumentasi yang diambil harus mendukung analisis data hasil penelitian. Dokumen ini yang nantinya akan menjadi rujukan untuk menentukan evaluasi, kontrol dan tingkat perbaikan. Teknik ini dilakukan sebagai

pelengkap observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif berdasarkan data, fakta dan informasi yang dikumpulkan dengan tetap mengedepankan penelusuran representatif untuk menghindari data bias. Kemudian dikaji secara kualitatif sesuai dengan teori yang digunakan dan dikembangkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kelurahan Bintaro

Kelurahan Bintaro merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Bintaro terletak dan berbatasan langsung dengan daerah pesisir dan pantai. Disebalah utara, Kelurahan Bintaro berbatasan dengan Kali Meninting Lombok Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Ampenan Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ampenan Utara dan Kelurahan Dayan Peken, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok.

Kelurahan Bintaro terbagi menjadi 5 (lima) lingkungan dan 31 RT, yakni: 1) Lingkungan Telaga Emas, 2) Lingkungan Dende Seleh, 3) Lingkungan Bugis, 4) Lingkungan Pondok Prasi, dan 5) Lingkungan Bintaro Jaya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 12 Tahun 2012, tiap-tiap lingkungan tersebut memiliki seorang ketua, sekeretaris, dan bendahara. Adapun daftar nama ketua tiap-tiap lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**  
**Daftar Lingkungan dan Kepala Lingkungan Kelurahan Bintaro Tahun 2020**

Nama Lingkungan/Dusun	Kepala Lingkungan
Lingkungan Telaga Emas	H. Ismail
Lingkungan Dende Seleh	Sarwo Edy Fiqri
Lingkungan Bugis	Suherman
Lingkungan Pondok Prasi	H. Maskan
Lingkungan Bintaro Jaya	Sopian Hadi

Sumber: Profil Kelurahan Bintaro Tahun 2020.

Data jumlah penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Bintaro pada tahun 2020, sebanyak 2.647 KK, dengan jumlah KK terbesar berada di Lingkungan Pondok Perasi, yakni sebanyak 834 KK, dan jumlah KK terkecil berada di Lingkungan Dende Seleh, yakni hanya 380 KK. Sementara itu, jika melihat berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, yakni 3.465 orang penduduk perempuan, dan 1.822 orang penduduk laki-laki. Dibawah ini merupakan jumlah penduduk di Kelurahan Bintaro secara lebih rinci, yaitu:

**Tabel 2.**  
**Data Jumlah Penduduk di Kelurahan Bintaro Tahun 2020**

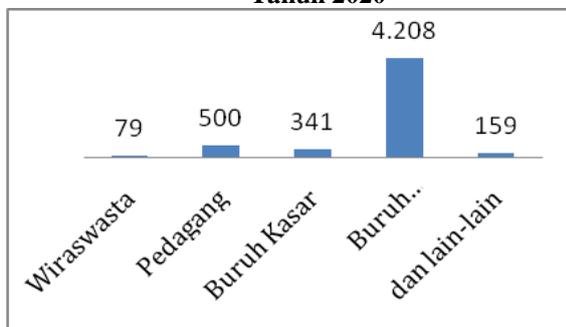
Nama Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah Anak
		Laki-laki	Perempuan	
Lingkungan	427	312	542	675

Bintaro Jaya				
Lingkungan Pondok Perasi	834	700	964	532
Lingkungan Bugis	604	357	851	498
Lingkungan Telaga Mas	402	311	493	224
Lingkungan Dende Seleh	380	142	615	441
<b>JUMLAH</b>	<b>2.647</b>	<b>1.822</b>	<b>3.465</b>	<b>2.340</b>

Sumber: Profil Kelurahan Bintaro Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Bintaro bermata pencaharian sebagai buruh nelayan, pedagang, dan kuli bangunan (buruh kasar). Jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh nelayan sebanyak 4.208 orang, pedagang 500 orang, dan buruh kasar 341 orang. Berikut disajikan data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kelurahan Bintaro, yaitu:

**Grafik 1. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Kelurahan Bintaro Tahun 2020**



Sumber: Profil Kelurahan Bintaro Tahun 2020.

Jika melihat dari tingkat pendidikan, mayoritas penduduk di Kelurahan Bintaro tidak tamat SD (Sekolah Dasar), yakni sebanyak 931 orang. Disusul oleh tamatan SMP sebanyak 865 orang, dan tamatan SMA sebanyak 486 orang. Sementara jumlah penduduk yang masih ada pada usia sekolah mencapai 2.081 orang. Untuk melihat secara lebih rinci jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Bintaro, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Bintaro Tahun 2020**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	446 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	278 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	282 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1.075 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	478 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	453 orang
Tamat SD/ sederajat	122 orang
Tamat SMP/ sederajat	868 orang
Tamat SMA/ sederajat	486 orang
Tamat D-1/ sederajat	16 orang
Tamat D-2/ sederajat	17 orang
Tamat D-3/ sederajat	26 orang
Tamat S-1/ sederajat	18 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>4.079 orang</b>

Sumber: Profil Kelurahan Bintaro Tahun 2020.

Pendidikan merupakan salah satu sumber yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, serta didukung oleh kemajuan dan berkembangnya informasi dan teknologi, akan sangat membantu

pola pikir masyarakat, khususnya pola pikir tentang hidup bersih dan sehat baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar.

Untuk dapat disebut sebagai Kampung Sehat, perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan, terutama ketersediaan sarana dan prasarana. Di Kelurahan Bintaro, berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa sarana dan prasarana kesehatan, seperti: posyandu, kader posyandu, dan PUS.

**Tabel 4. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Bintaro**

Sarana	Lingkungan				
	Telaga Mas	Dende Seleh	Bugis	Pondok Prasi	Bintaro Jaya
Posyandu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Kader Posyandu	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
PUS	300	534	409	233	209

Sumber: Profil Kelurahan Bintaro Tahun 2020.

**Program Kampung Sehat di Kelurahan Bintaro**

Kampung sehat tidak hanya memiliki misi dalam bidang kesehatan, namun juga misi dalam bidang ekonomi dan sosial, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih, namun juga memiliki solusi yang tepat bagi permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Program Kampung Sehat pada tiap-tiap desa/kelurahan di Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa indikator yang harus dipenuhi. Indikator-indikator tersebut, terdiri dari: 1) aspek kelembagaan pemerintah desa, 2) program kesehatan desa, 3) program sosial ekonomi desa, 4) program keamanan dan ketertiban desa, dan 5) kelengkapan dan kesiapan sarana dan prasarana. Dalam rangka mencapai indikator-indikator di atas, Pemerintah Kelurahan Bintaro telah melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai predikat Kampung Sehat. Dari sisi kelembagaan desa, Pemerintah Kelurahan Bintaro telah menjalin kerjasama dengan berbagai elemen, termasuk dengan masyarakat, Babinsa (Bintara Pembina Desa), maupun dengan Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina keamanan dan keteriban). Sebagaimana diungkapkan oleh Lurah Bintaro, yaitu:

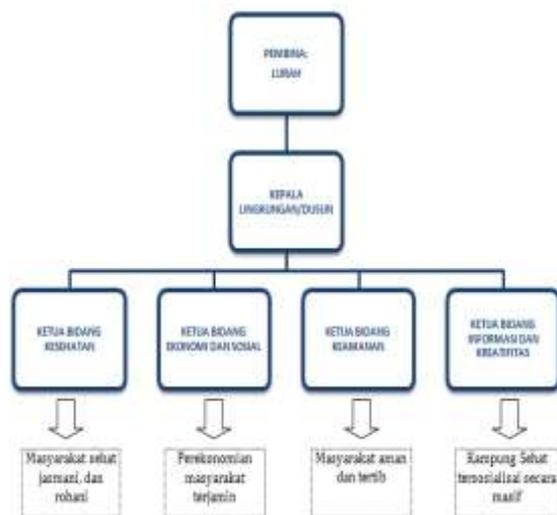
“Kampung Sehat coba kami raih melalui kerjasama dengan beberapa pihak, yaitu Babinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat yang harapannya tidak hanya sebagai obyek namun juga bisa menjadi subyek dalam mencapai Program Kampung Sehat” (Wawancara LL. Issugiono selaku Lurah Bintaro, Mei 2021).

Sebagaimana hasil wawancara di atas, masyarakat dalam program Kampung Sehat ini memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai sasaran atau objek dalam pelaksanaan program, juga sebagai subjek atau pelaku yang memerankan peranan penting dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan melibatkan masyarakat sebagai ujung tombak kegiatan, pemerintah di Kelurahan Bintaro berharap dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitas untuk mencapai tujuan program dengan

memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk bertahan dan saling bahu-membahu menghadapi pandemi covid-19. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Bintaro pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2019), dimana menurutnya suatu program pemerintah akan berhasil apabila dijalankan dengan memanfaatkan potensi masyarakatnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kepala Lurah Bintaro lebih lanjut memaparkan bahwa setiap masyarakat di masing-masing lingkungan/dusun dibagi ke dalam beberapa kelompok masyarakat yang disesuaikan dengan indikator-indikator Kampung Sehat. Kelompok-kelompok tersebut terdiri dari: kelompok bidang kesehatan, kelompok bidang ekonomi dan sosial, kelompok bidang keamanan, dan kelompok bidang info dan kreatifitas. Adapun skema pelaksanaan program Kampung Sehat dapat dilihat pada skema di bawah ini:

**Gambar 5.**  
**Skema Pelaksanaan Kampung Sehat di Kelurahan Bintaro**



Sumber: Olah Data Primer

*Pertama*, bidang kesehatan. Kepala Lurah Bintaro mengatakan bahwa khusus untuk bidang kesehatan, pihaknya telah melakukan sejumlah himbuan kepada masyarakat terkait dengan Pola Hidup Sehat, membuat Pos penanganan Covid-19, menaruh tempat cuci tangan di sejumlah titik setempat, menyediakan tempat pembuangan sampah, membagikan masker, membagikan susu kepada ibu hamil, serta memberikan vitamin. Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama dari berbagai pihak, termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang telah dibentuk di tiap-tiap lingkungan/dusun.

“Semua itu dilakukan agar kesehatan masyarakat Kelurahan Bintaro tetap terjaga. Terlebih lagi kita masih dalam masa pandemi covid-19, tentu saja kesemuanya itu kami lakukan

secara bersama-sama dengan Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, Staf Desa, dan kelompok masyarakat” (Wawancara, Mei 2021).

*Kedua*, bidang perekonomian dan sosial. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi covid-19, pemerintah desa menghimbau masyarakat untuk memulai usaha. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha, didorong untuk terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya. Jenis usaha yang akan maupun yang sudah dibangun oleh masyarakat tidak diatur dalam program Kampung Sehat ini, namun masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih usaha mana yang paling mereka minati. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Vernia dan Sandria (2020), dimana masyarakat yang diberikan kebebasan untuk memilih, maka masyarakat tersebut akan semakin yakin dengan kompetensinya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja dari masyarakat tersebut.

Dalam hal pengembangan usaha masyarakat lewat program Kampung Sehat, pemerintah desa memiliki peran penting, terutama dalam hal pembinaan para pedagang, pemberian saran bagi usaha-usaha yang akan maupun sudah dijalankan, bantuan baik berupa modal maupun informasi-informasi yang dibutuhkan bagi pengembangan usaha masyarakat. Beberapa usaha yang masih terus berjalan, diantaranya usaha penjualan ikan hasil tangkap oleh nelayan, yang dilakukan di sekitaran pantai. Meskipun saat pandemi covid-19 penjualan mengalami penurunan, namun masyarakat menyebutkan bahwa hasil usaha tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka.

*Ketiga*, bidang keamanan dan ketertiban. Dalam bidang ini, pihak yang lebih banyak berperan adalah Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas, dimana keduanya bertugas untuk menjaga keamanan dari lingkungan tempat program Kampung Sehat dilaksanakan. Hasil wawancara bersama salah satu Babinsa, yaitu Serda Kamaruddin menjelaskan bahwa:

“Adanya covid-19 saat ini dapat menyebabkan berbagai keributan, bahkan tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini didorong oleh tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yang pada akhirnya memunculkan pemikiran untuk melakukan tindakan yang melenceng.” (Wawancara, Mei 2021).

*Keempat*, bidang informasi dan kreatifitas. Dalam hal ini, Lurah Bintaro menyebutkan bahwa tiap elemen masyarakat, pemerintah desa, Babinsa maupun Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam proses pemberian informasi dan peningkatan kreatifitas masyarakat. Oleh sebab itu, Lurah Bintaro berharap ada sinergi yang tepat dan berlanjut dari semua elemen tersebut guna mencapai program Kampung Sehat yang efektif dan berdampak bagi masyarakat.

## Efektifitas Program Kampung Sehat di Kelurahan Bintaro

Dimianus Ding (2014) menyebutkan bahwa dalam mengukur efektifitas sebuah program kegiatan, baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: 1) pendekatan sumber, 2) pendekatan proses, dan 3) pendekatan sasaran. Adapun hasil penelitian terkait efektifitas program Kampung Sehat dapat dilihat pada paparan di bawah ini:

### a. Pendekatan Sumber (*Resorce Approach*)

Pendekatan sumber merupakan pendekatan yang mengukur efektifitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang dibutuhkannya, juga keberhasilan dalam memelihara keadaan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif. Pendekatan sumber mempergunakan beberapa indikator untuk mengukur efektivitas program sebuah organisasi, yaitu: a) kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber b) kemampuan para pengambil keputusan untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat, c) kemampuan organisasi untuk menghasilkan *output* tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh, d) kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari, dan e) kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

*Pertama*, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber. Sebagaimana telah paparkan sebelumnya, bahwa dalam menjalankan program Kampung Sehat, pemerintah di Kelurahan Bintaro menjalin kerjasama, yang disebut sebagai kerjasama antara masyarakat dan tiga pilar (Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas). Kerjasama ini merupakan tolak ukur keberhasilan Bintaro dalam melaksanakan program Kampung Sehat, sebab melalui kerjasama tersebut, pemerintah desa mampu memanfaatkan setiap sumberdaya yang ada di lingkungannya, termasuk masyarakatnya sendiri, dimana masyarakat Bintaro tidak hanya ditempatkan sebagai sasaran program, namun juga dimanfaatkan sebagai pelaku atau subjek kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penempatan masyarakat sebagai objek dan subjek kegiatan dapat meningkatkan efektifitas dari program Kampung Sehat. Melalui kedua peran tersebut, masyarakat sebagai sasaran paham akan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan mereka, dan sebagai subjek kegiatan, masyarakat juga bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menemukan solusi bagi tiap-tiap permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya saja, ketika masyarakat dihadapkan dengan permasalahan ekonomi, maka mereka mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan berbagai

pengembangan usaha yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Di bidang kesehatan, ketika masyarakat merasa kurang dalam hal sarana dan prasarana, seperti tempat untuk mencuci tangan, maka masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk menyiapkan tempat mencuci tangan di beberapa titik pada masing-masing lingkungan, begitupun dengan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

*Kedua*, kemampuan para pengambil kebijakan untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat. Kelurahan Bintaro yang terbagi ke dalam 5 (lima) lingkungan dimanfaatkan oleh pemerintah desa dengan membentuk sebuah organisasi yang bersifat *bottom-up*. Organisasi ini di ketuai oleh masing-masing kepala lingkungan yang membawahi beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang dibagi berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program Kampung Sehat. Melalui organisasi kecil di tingkat bawah ini, program Kampung Sehat dapat terorganisir sehingga pelaksanaannya berjalan secara efektif.

*Ketiga*, kemampuan organisasi untuk menghasilkan *output* tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh. Salah satu *output* yang diperoleh dalam pelaksanaan program Kampung Sehat adalah tercapainya pola hidup masyarakat yang bersih dan sehat sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, melalui program Kampung Sehat ini, masyarakat mulai sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Masyarakat mulai terbiasa menggunakan masker, *handsanitizer*, menjaga jarak, dan mengikuti protokol-protokol kesehatan lainnya.

*Keempat*, kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari. Dengan adanya kelompok-kelompok pada tiap-tiap lingkungan yang di ketuai oleh Kepala Lingkungan di Kelurahan Bintaro, tentu mempermudah koordinasi dan pengawasan pada pelaksanaan program kegiatan Kampung Sehat setiap harinya. Dengan koordinasi yang baik, maka efektifitas kegiatan juga dapat meningkat.

*Kelima*, kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Tercapainya beberapa indikator-indikator pendekatan sumber di atas dapat menjadi bukti bahwa program Kampung Sehat mampu menjadi solusi bagi organisasi maupun masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungannya.

Berdasarkan beberapa analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari pendekatan sumber, program Kampung Sehat sudah berjalan secara efektif, dimana pemerintah desa sebagai motor penggerak berhasil menemukan sumber-sumber yang tepat untuk menjalankan program, menemukan cara untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan yang ada, mampu mengkoordinasikan tiap-tiap kegiatan yang berjalan, sehingga masyarakat dapat

menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang ada. Selain itu, program Kampung Sehat juga mampu mencapai salah satu *output* penting yang diharapkan.

#### b. Pendekatan Proses

Pendekatan proses merupakan pendekatan yang menganggap efektivitas sebagai efisiensi kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada pendekatan ini, sebuah program dikatakan efektif apabila organisasi yang menjadi implementasinya secara internal berjalan lancar. Indikator untuk mengukur pendekatan ini diantaranya adalah: 1) semangat, kerjasama, dan loyalitas kelompok kerja, 2) saling percaya dan komunikasi antara bawahan dengan pemimpin, 3) desentralisasi dalam pengambilan keputusan, 4) adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dan 5) organisasi dan bagian-bagian kerjasama dengan baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan bersama.

*Pertama*, semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok. Dalam program Kampung Sehat di Kelurahan Bintaro, organisasi pelaksanaannya terdiri dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga masyarakat Bintaro sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tiap-tiap komponen pelaksana program menunjukkan semangat dan kerjasama yang luar biasa. Hal ini dilihat dari, misalnya: Lurah selaku leader dalam program ini terus berusaha memotivasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitar, maupun ketika ada program gotong royong membersihkan lingkungan, tiap-tiap elemen ikut bergerak dan saling bekerjasama.

*Kedua*, saling percaya dan komunikasi antara bawahan dengan pemimpin. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program Kampung Sehat, Lurah sebagai pemimpin membangun komunikasi yang "santai" terhadap masyarakat, bahkan tak jarang, Lurah ikut berpartisipasi langsung pada tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Adanya komunikasi yang baik antara Lurah maupun masyarakat kemudian mampu membangun 'trust' atau kepercayaan masyarakat terhadap pimpinannya.

*Ketiga*, desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kerjasama antar beberapa elemen tersebut berjalan baik, dimana masing-masing kegiatan selalu terkoordinasi. Adanya desentralisasi tugas dan wewenang dari Lurah kepada Ketua Lingkungan menunjukkan pola komunikasi dan koordinasi yang baik. Desentralisasi ini selanjutnya berdampak pada efektifitas dan produktifitas program Kampung Sehat. Melalui desentralisasi juga, kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat diawasi secara lebih dekat guna mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

*Keempat*, adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Melalui kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program Kampung Sehat menunjukkan komitmen dari tiap-tiap orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

*Kelima*, organisasi dan bagian-bagian kerjasama dengan baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas ditemukan bahwa selama pelaksanaan Program Kampung Sehat, seluruh elemen bekerjasama dengan baik, sehingga konflik atau masalah-masalah yang tidak diinginkan dan mengganggu ketertiban dapat dihindari. Bhabinkamtibmas lebih lanjut menjelaskan bahwa selama pelaksanaan program di Kelurahan Bintaro, tidak ditemukan masalah-masalah yang mengganggu kepentingan bersama.

#### c. Pendekatan Sasaran (Goals Approach)

Pendekatan sasaran merupakan pendekatan yang dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran dalam program Kampung Sehat ini adalah seluruh masyarakat di Kelurahan Bintaro, yang terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Dilihat dari aspek kesehatan, program Kampung Sehat sudah mampu membuat masyarakat mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19. Masyarakat terlihat sudah terbiasa dengan penggunaan masker, penggunaan *handsanitizer*, menjaga jarak, dan protokol-protokol kesehatan lainnya. Namun demikian, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat masih sulit dilakukan, meskipun sudah ada beberapa yang mulai melakukannya. Namun perilaku hidup bersih dan sehat ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari diri masing-masing individu.

Dari aspek ekonomi, program Kampung sehat mampu memberikan solusi bagi permasalahan perekonomian masyarakat. Melalui kelompok masyarakat yang dibentuk, kerjasama antar masyarakat tersebut mampu menemukan solusi bagi permasalahan perekonomian mereka. Adapun solusi yang dibuat, yaitu dengan membuka lapangan usaha baru maupun mengembangkan usaha lama yang mendapat dukungan materil dan pendampingan dari pemerintah desa. Sementara dari aspek sosial, adanya kerjasama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas pelaksanaan Kampung Sehat bisa terjaga kemandirian dan ketertibannya.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Program Kampung Sehat di Kelurahan Bintaro Kota Mataram berjalan efektif dan mampu menekan penyebaran virus Covid-19. Dari pendekatan sumber, pemerintah desa berhasil

menemukan sumber-sumber dan cara untuk menginprentasikan sifat-sifat lingkungan yang ada melalui pemanfaatan masyarakat yang dijadikan sebagai objek dan subjek kegiatan. Program Kampung Sehat juga mampu mencapai salah satu *output* penting dimana masyarakat mulai terbiasa dengan hidup bersih dan sehat sesuai protokol Covid-19. Dari pendekatan proses, adanya semangat kerjasama, saling percaya diri, dan desentralisasi dari berbagai elemen mampu membuat program Kampung Sehat berjalan lancar. Dari pendekatan sasaran, program Kampung Sehat berhasil membuat masyarakat mematuhi protokol kesehatan, namun untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masing-masing individu masih menemui kendala karena bergantung pada kesadaran dan komitmen setiap orang.

## 5. REFERENSI

- Afederasi. 2020. "*Lomba Kampung Sehat Tekan Angka Penyebaran Virus Covid-19*" <https://www.afederasi.com/breaking-news/lomba-kampung-sehat-tekan-angka-penyebaran-virus-covid-19/> Di akses pada Tanggal 2 Oktober 2020 Jam 15:55WITA.
- Dimianus Ding. 2014. "*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10.
- Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida. 2013. "*Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*". Bandung: Alfabeta, h. 11.
- Harian Nusa. 2020. "*Program Kampung Sehat Dinilai Berhasil Tekan Penyebaran Covid-19 di NTB*" <https://hariannusa.com/2020/09/02/program-kampung-sehat-dinilai-berhasil-tekan-penyebaran-covid-19-di-ntb/> | Hariannusa.Com Di akses pada Tanggal 2 Oktober 2020 Jam 15:37 WITA.
- Iga Rosalina, 2012. "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.
- Mahmudi, 2015. "*Manajemen Kinerja Sektor Publik*", Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, h. 86.
- Media Harapan. 2020. "*Mewujudkan Desa Sehat Upaya Mensejahterakan Masyarakat*" <https://mediaharapan.com/mewujudkan-desasehatupaya-mensejahterakan-masyarakat/> Di akses pada Tanggal 2 Oktober 2020 Jam 15:23 WITA.
- Moh. Pabundu Tika, 2014. "*Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*", Jakarta: Bumi Aksara, h. 129.
- Ulber Silalahi, 2015. "*Asas-asas Manajemen*", Bandung: Refika Aditama, h. 416-417..

# ANALISIS HARGA JUAL TERHADAP PENINGKATAN UPAH KERJA KERAJINAN TANGANDI KABUPATEN MANGGARAI

Oleh:

Damianus Tola<sup>1)</sup>, Valentinus Bata<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Ekonomi Fakultas Kegeuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores

<sup>1</sup>e-mail: \_datobela28@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harga jual kain tenun songke terhadap peningkatan upah kerja kerajinan tangan. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jual kain tenun songke berpengaruh signifikan dengan menyumbang 93,4 persen dalam mempengaruhi upah kerja kerajinan tangan.

**Kata kunci:** Karyawan, Pendapatan, Upah kerja

## 1. PENDAHULUAN

Kerajinan tangan adalah usaha lokal yang dipekerjai oleh ibu-ibu rumah tangga Desa Ruang Kecamatan Satar Mese untuk menciptakan suatu produk khas daerah manggarai dengan menggunakan tangan dan memiliki fungsi pakai maupun keindahan dan keunikan yang memiliki menjadi ciri khas kedaerahan manggarai. Usaha kerajinan tangan yang dikerjakan ibu-ibu Desa Ruang adalah pembuatan kain tenun songke, kain tenun songke merupakan hasil tenunan khas manggarai. Produk kain tenun songke adalah salah satu hasil kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat lokal manggarai.

Hasil karya pengerajin kain tenun songke dengan berbagai ukuran dan motif serta arti dari motif tersebut antara lain: 1). Motif Ju'i yang berciri garis-garis batas, 2). Motif Ranggong berciri jarring laba-laba, 3). Motif Wela Runu berciri bunga runu atau bunga kembang sepatu, 4). Motif Ntala berciri bintang di langit, 5). Motif Wela Kaweng berciri bunga kaweng yang, 6). Motif Wela Kawu berciri bunga kapuk. Sejauh ini usaha kerajinan tangan menjadikan mata pencaharian ibu-ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya kebutuhan ekonomi rumah tangga, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan biaya sosial (hajatan), upah yang didapat oleh ibu-ibu membantu mengatasi kesulitan ekonomi namun upah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap nilai produksi (Indrajaya & Ningsih, 2015). Berbicara mengenai upah seyogianya dibayarkan kepada para pekerja harus mengikuti standar Upah Minimum Regional (UMR) (ISLAM, 2017). Hasil kerja keras pengerajin kain tenun songke dapat dijual sesuai ukuran dan harga antara lain: motif *su'i* dengan ukuran lebar 135 cm dan panjang 170 cm dengan kisaran harga mencapai Rp 1.000.000,00. Sedangkan motif ranggong (laba-laba) dengan ukuran lebar 135 cm dan panjang 170 cm dengan kisaran harga mencapai adalah Rp 800.000,00. Kemudian motif *wela runu*,

*ntala, wela kaweng, wela kawu*. dengan ukuran lebar 135 cm dan panjang 170 cm dengan kisaran harga mencapai Rp 500.000,00.

Penetapan harga yang ditentukan oleh pengerajin kain tenun songke berdasarkan bahan baku. Persepsi harga kain tenun songke yang beredar di pasar lokal mungkin saja tidak semua masyarakat ekonomi lemah mampu membeli, melainkan kebanyakan membeli adalah masyarakat luar daerah maupun mancanegara. Dilihat dari warna dan kualitas yang bagus daya beli masyarakat semakin tinggi. Meskipun harga yang ditawarkan relative mahal tetapi konsumen tetap berminat untuk melakukan pembelian karena jenis, motif dan corak beranekaragam dan nyaman untuk digunakan. Harga jual kain songke yang tinggi akan menutup biaya produksi dan upah bagi pekerja (Sri, 2020).

Warna dan motif menjadi ciri khas dalam penentuan karya seni kerajinan tangan yang dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan industri rumah tangga. Pengerajin adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kerajinan tertentu, (<http://rubrikbahasa.wordpress.com>, unduh 15/06/2011) hal ini ibu-ibu rumah tangga sebagai karyawan dalam mengolah benang menjadi kain dengan menggunakan tangan dan alat tradisional. Berdasarkan hasil observasi lapangan pengerajin kain tenun songke, memiliki tenaga kerja tetap sebanyak 35 orang. Banyaknya tenaga kerja harusnya bisa lebih maksimal hasil produktivitas sehingga dapat meningkatkan upah kerja.

Upah merupakan salah satu dari barometer di dalam pengukuran-pengukuran berbagai macam kesejahteraan, oleh karena itu pemerintah akan berperan aktif untuk mengukur tentang upah. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengatur upah minimum regional kabupaten, (BPS Kabupaten Manggarai 2020). Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan upah Minimum regional Kabupaten Manggarai dalam 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1 Upah Minimum Kabupaten Manggarai

Tahun	UMR Kabupaten Manggarai
2016	3.045.000
2017	3.296.212
2018	3.583.312
2019	3.871.052
2020	4.200.479

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai (2016-2020)

Upah minimum yang diberikan oleh perusahaan baik perusahaan berskala besar, maupun berskala kecil memberi upah para karyawan atau pekerja layak meningkat sesuai dengan harga-harga kebutuhan ekonomi yang selalu meningkat. Pemerintah berusaha meningkatkan upah minimum dan untuk menyeimbangi dengan kebutuhan hidup layak. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Analisis pendapatan terhadap peningkatan upah kerja kerajinan tangan di Kabupaten Manggarai

### Tinjauan Teori

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam perusahaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya), dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Soekartawi (1990) mengatakan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah tetapi juga kualitas barang tersebut menjadi perhatian. Sama hal dikatakan oleh kusnadi (2000) pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva yang juga berengaruh dengan penambahan modal melalui penjualan barang dagang maupun pelayanan jasa kepada pihak lain dan bukan berasal dari penyertaan penambahan modal dari investor. Menurut budyono (2001) pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.

#### 1.1 Upah Karyawan

Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Sedangkan menurut undang ketenaga kerjaan no 13 tahun 2013 menyatakan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja, termasuk tunjangan bagi pekerja.

#### 1.2 Teori Kerajinan Tangan

Menurut Kadjim (2011: 10) Kerajinan adalah berbagai upaya dengan dilakukan secara terus menerus berbagai antusiasme ketangkasan, ketekunan dan juga dedikasi tinggi serta kemajuan besar dalam

realisasi sebuah karya. Demikian hal yang disampaikan Suprato (1985) kerajinan tangan adalah bentuk kerajinan yang dapat menghasilkan benda berupa seni yang memiliki kualitas, sehingga di dalam prosesnya dapat dilakukan dengan sebuah rasa keindahan serta ide-ide yang murni supaya dapat menghasilkan berbagai produk dengan kualitas tinggi dan bentuk indah serta menarik. <https://quora.co.id/pengertian-kerajinan>. Tanggal 9 Januari 2021.

Menurut Wiyadi (1991) kerajinan tangan ialah segala kegiatan diberbagai bidang industry dengan pembuatan barang secara sepenuhnya dapat dilakukan oleh alam supaya terampil, kreatif, rajin dan ulet dalam menjangkau mereka. Menurut Kusnadi (1986) kata kerajinan secara literal lahir dari sebuah sifat manusia yaitu rajin, sehingga penghasilan dengan pembuatan dalam karya seni bukan juga karena sifat yang rajin, namun dari berbagai keterampilan seseorang di dalam menghasilkan berbagai produk dari kerajinan tangan.

Menurut Makmun dan yasin (2003) Faktor produksi diklasifikasikan menjadi empat, yakni tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap empat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elastisitas penawaran parsial, karakteristik yang terkandung pada setiap faktor produksi dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produksi. Secara historis, perbedaan ini kesesuaian dengan berkembangnya *bargaining position* antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang menentukan berapa besar imbalan yang diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga.

Menurut Yanti dkk (2020) Dalam mengatasi kondisi ini seorang distributor harus memiliki alasan atau dorongan dalam diri serta mempunyai keyakinan bahwa mampu mengatasi kendala ketika menjalankan bisnis untuk mencapai target penjualan. Menurut Tenardi dalam Yanti dkk (2020) target penjualan merupakan tujuan penting yang hendak dicapai agar menghasilkan penjualan yang menguntungkan. Dalam mengelola aktivitas usaha menjual maka seorang harus mampu menjual, bahkan seorang selalu mempunyai target dalam melakukan penjualan.

Menurut Tambunan (2012) pilihan tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu dari jenis-jenis kegiatan yang akan mendapatkan beberapa imbalan (upah) yang diharapkan oleh tenaga kerja. Preferensi subjektif seseorang yang akan menentukan besar jam kerja optimal yang ditawarkan dan tingkat upah yang diharapkan. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan jenis penelitiannya adalah eksplanasi untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh variabel bebas yakni harga jual kain tenun songke terhadap upah kerja karyawan. Adapun rancangan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pekerja kain tenun songke berjumlah 35 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni *sampling jenuh* dimana teknik pengambilan sampel ini semua digunakan sebagai sampel (Sugiyono). Pertimbangan dalam pengambilan sampel ini karena jumlah karyawan yang bekerja pada usaha kain tenun songke relative kecil.

Teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk data primer. Angket disebar ke 35 responden yang menjadi sampel penelitian. Terdapat 13 butir pernyataan dari 2 variabel yang disiapkan. Pilihan jawaban pernyataan menggunakan skala likert, yakni

SS = Sangat Setuju,	Skor = 5
S = Setuju,	Skor = 4
R = Ragu-ragu,	Skor = 3
TS = Tidak Setuju,	Skor = 2
STS = Sangat Tidak Setuju.	Skor = 1

Untuk data sekunder menggunakan metode dokumentasi yang didapat dari manajemen pengolahan kain tenun songke terkait nama, umur, jenis kramin, alamat, dan tingkat pendidikan. Data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan analisis validitas, realibilitas dan analisis regresi sederhana. Analisis validitas digunakan untuk mengukur instrument yang digunakan dapat mengintrestasikan data secara akurat. Analisis realibilitas digunakan untuk mengukur konsistensi instrument penelitian. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh harga jual kain tenun songke terhadap upah kerja karyawan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Berdasarkan hasil rekapan data yang telah diedarkan dan diolah menggunakan program SPSS 16.0 dengan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Hasil Analisis Validitas Instrumen

Nilai r tabel sebesar 0,333 dengan jumlah sampelsebanyak 53 (n=35) pada signifikansi 0,05 uji dua sisi. Berdasarkan 13 butir pernyataan yang telah dihitung diperoleh nilai korelasi r tabel berkisaran 0,422 sampai 0,796 maka dapat disimpulkan bahwa 13 butir pernyataan disebut valid dan dilanjutkan uji realibilitas.

### Hasil Uji Realibilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach's Alpha sebesar 0,814. Nilai r tabel dengan n=53, signifikansi 0,05 uji dua sisi sebesar 0,333. Nilai cronbach's Alpha lebih besar dari nilai r tabel maka butir-butir pernyataan kuesioner dikatakan reliable dengan kategori layak (baik). Menurut Sugiyono (2010) realibilitas instrument kurang dari 0,6 maka butir instrument dinyatakan kurang layak, jika nilai instrument diatas 0,8 dinyatakan layak.

Tabel 1.  
Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.680	2.594		-.647	.522
	Harga jual kain tenun songke	1.033	.047	.967	21.965	.000

a. Dependent Variable: peningkatan upah karyawan

Dari tabel 1 diatas diperoleh persamaan regresi sederhana dilihat pada kolom B sebagai berikut:  $Y = a + bx + e$

$$Y = -1,680 + 1,033$$

Y = Peningkatan Upah Kerja Karyawan

a = konstanta

b = koefisien regresi

x = Harga Kain Tenun Songke

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditemukan nilai konstanta sebesar -1,680 artinya harga jual kain tenun songke dengan probabilitas  $0,000 < 0,05$  menandakan ada hubungan signifikan.
2. Koefiseian regresi variabel harga jual kain tenun songke sebesar 1,033 dengan probabilitas  $0,000 < 0,05$  artinya harga jual kain tenun songke menandakan ada pengaruh cukup signifikan

Tabel 2

### Hasil korelasi dan analisis determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.967 <sup>a</sup>	.936	.934	1.50206

a. Predictors: (Constant), Harga jual kain tenun songke  
b. Dependent Variable: Peningkatan upah karyawan

Berdasarkan tabel 2 diatas hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara harga jual kain tenun songke terhadap upah kerja karyawan ditunjukkan nilai R sebesar 0,967. Menunjukkan nilai korelasi sangat kuat. Menurut Sugiyono (2010) interprestasi koefisien korelasi dengan rentangan 0,80 - 1,00 masuk dalam kategori sangat kuat.

Analisis determinasi bertujuan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh antara

variabel independen (Harga jual Kain Songke) dilihat dari nilai R Square sebesar 0,934 atau sebesar 93,4 persen sedangkan 6,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 3  
Hasil uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1088.518	1	1088.518	482.462	.000 <sup>b</sup>
	Residual	74.454	33	2.256		
	Total	1162.971	34			
a. Dependent Variable: Peningkatan upah karyawan						
b. Predictors: (Constant), Harga jual kain tenun songke						

Uji F untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 3 diatas dilakukan dengan uji dua sisi maka nilai F hitung sebesar 482.462 dengan menggunakan tingkat kepercayaan 0,05 persen 2,470 dengan demikian terdapat pengaruh secara signifikan harga jual kain tenun songke terhadap peningkatan upah kerja karyawan. Dilanjutkan uji T untuk mengetahui apakah koefisien regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 21.965 lebih besar dari tingkat kepercayaan 0,05 persen dengannilai t tabel sebesar 1,692 demikian koefisien harga jual kain tenun songke saling berkaitan secara linier.

#### 4. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa :

1. Proses pembuatan kain tenun songke dengan berbahan dasar alami tergolong sulit, disebabkan membutuhkan ketekunan, ketelitian dan keseriusan dalam mengerjakannya paling cepat empat belas hari paling lambat satu bulan.
2. Harga jual perlembar kain tenun songke berbeda-beda sesuai dengan motif, warna dan kualitas, serta jenis kain. Motif Ju,i dengan ukuran sekitar 135 cm x 170 cm, dengan harga satuan sebesar Rp 1.000.000,00. Kain tenun songke motif Ranggong dengan ukuran 135 cm x 170 cm,dengan harga satuan sebesar Rp 800.000,00, kain tenun songke motif Wela Runu dengan ukuran 135 cm x 170 cm dengan harga satuan sebesar Rp 500.000,00. Kain songke motif Ntala dengan dengan ukuran 135 cm x 170 cm dengan harga satuan sebesar Rp 500.000,00. Kain tenun songke motif wela Kaweng ukuran 135 cm x 170 cm dengan harga satuan sebesar Rp 500.000,00 kain tenun songke motif wela Kawu ukuran 135 x 170 cm dengan harga satuan sebesar Rp 500.000,00. Penentuan harga ini seharusnya ditetapkan dengan menggunakan metode akuntansi (Pidada, Atmadja, & Herawati, 2020) sehingga bisa dilihat untung ruginya dalam memproduksi sekalipun masih berskala lokal.
3. Proses penjualan kain tenun songke menggunakan sistem penjualan tidak langsung atau melalui makelar yang biasanya membeli di penunun dengan harga murah lalu dijual kepada konsumen luar dengan harga tinggi. Seharusnya para

penenun jangan menjual hasil tenunannya kepada para pengepul melainkan dipasarkan sendiri sehingga mendapatkan harga yang layak (Saidani & Arifin, 2012) ada harga dibalik kualitas barang yang dihasilkan.

4. Upah yang diterima oleh pengrajin kain tenun songke, dalam satu bulan berkisaran mencapai sebesar Rp 1.500.000,00. Dari hasil upah yang diterimaoleh pengerajin kain tenun songke dapat disimpulkan masih sangat minim tidak sesuai dengan UMR Kabupaten Manggarai. Pembagian upah kepada para penenun tergantung hasil penjualan kain tenunnya, apabila para penenun menggunakan metode penjualannya dengan system akuntansi (Sri, 2020) maka upah yang didapat bisa dikalkulasikan dan mereka mendapatkan upah yang layak.

#### 5. KESIMPULAN

Proses pembuatan kain tenun songke secara manual, dimana membutuhkan waktu, ketekunan, ketelitian untuk menghasilkan satu lembar kain tenun songke. Harian Orang kerja dihitung dalam proses pembuatan sampai dengan hasil dari berabagai motif *ju'i*, motif *wela kawu*, motif *ranggong*, motif *ntala*, motif *wela runu* dan *wela kaweng*. Rata-rata upah kerja pengrajin kain tenun songke di Kabupaten Manggarai dalam satu bulan sebesar Rp 1.500.000,00. Ditemukan nilai konstanta sebesar -1,680 artinya harga jual kain tenun songke dengan probabilitas  $0,000 < 0,05$  menandakan ada hubungan signifikan. Koefiseian regresi variabel harga jual kain tenun songke sebesar 1,033 dengan probabilitas  $0,000 < 0,05$  artinya harga jual kain tenun songke menandakan ada pengaruh cukup signifikan

#### SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, memberikan perhatian khusus bagi para pengrajin dalam pelatihan manajemen dan pemasaran produk kain tenun singke.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai menyiapkan pasar kusus sebagai pasar souvenir
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai membantu mendatangkan alat-alat modern.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai membantu mempromosikan kain tenun songke ke skala internasional

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, G. (2011). Tenun Dan Penerapannya pada Desain Interior sebagai Warisan Budaya yang Memiliki Nilai Jual yang Tinggi. *Humaniora*, 2(1), 572-582.
- Indrajaya, I. G. B., & Ningsih, N. M. C. (2015). Pengaruh Modal dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 44330.
- ISLAM, K. S. D. P. (2017). UPAH TENAGA KERJA LEPAS. *Jurnal Syari'ah*, 5(2).

- Pidada, I. A. T. P., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2020). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Sebagai Acuan Dalam Menentukan Harga Jual Kain Sekordi/Sukawerdi (Studi Pada Usaha Tenun Sekordi di Geria Batan Cempaka, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).
- Saidani, B., & Arifin, S. (2012). Pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen dan minat beli pada ranch market. *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 3(1), 1-22.
- Sri, R. W. A. R. S. (2020). PENGARUH HARGA TERHADAP UPAH BURUH KELAPA DAN PINANG DI DUSUN KUALA DUA DESA SUNGSANG. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 61-77.
- Aulia, Dewi, and Andri Ikhwana. "Perencanaan strategi pengembangan usaha kain tenun sutra dengan pendekatan metode balanced scorecard (Studi kasus di Pabrik Sutra Tiga Putra)." *Jurnal Kalibrasi* 10.1 (2012).
- Arikunto, Suharsimi. (2010) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- B. Wea., T. Damianus. (2016). "Pengaruh Pendapatan Petani Terhadap Pendidikan Anak Usia Sekolah Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo". *Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 1*, Nomor 1, April 2016.
- Badan pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai 2020
- Deda, Yohanis Ndapa; DISNAWATI, Hermina. Hubungan motif kain tenun masyarakat Suku Dawan-Timor dengan matematika sekolah. 2017.
- Elvida, Maria Nona. Pembuatan Kain Tenun Ikat Maumere Di Desa Wololora Kecamatan Lela Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 2016.
- Keny W., Kirwani. (2012). "Kontribusi Tenaga Kerja Dan Pendapatan Sektor Industri Tenun Ikat Di Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Fakultas Ekonomi, Unesa". *Artikel E-Jurnal Unesa*.
- Kusumanto, R. D., et al. Faktor-Faktor Pemanfaatan Teknologi Informasi UKM Kain Tenun Songket Palembang. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 2017, 1.3: 177-182.
- Kusnadi (2000) *Akuntansi Keuangan Menengah, Prinsip, Presdur dan Metode*, penerbit Bayangkara, Jakarta
- Suantara, D., Siregar, Y., & Moeliono, M. (2016). Karakteristik kain ATBM Dobby hasil pengembangan motif batik khas kota Bandung sebagai motif tenun ikat untuk kain kemeja. *Arena Tekstil*, 31(1).
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sitompul, Linda, Novita: 2008 "Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatra Utara". *Tesis Dipublikasikan*, Sekolah Pascasarjana USU: Medan.
- Suryanto, Dwi: Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran pemerintah terhadap otonomi di Suboskawonosraten Tahun 2004-2008. 2011
- Setiawan, Gagok; ACHMADI, Fuad; VITASARI, Prima. Analisis Peningkatan Penjualan Produk Kain Tenun Ikat dengan Metode Quality Function Deployment (QFD). *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri*, 2018, 4.1: 10-13.
- Tambunan, T. 2012 *Usaha kecil dan Menengah Di Indonesia*" Isu-isu Penting' Penerbit: Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Netrawati, I. Gusti AO; Suastina, I. Gusti PB; ALLI, Jumawan. Hambatan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Kasus Pada Perajin Kain Tenun Tradisional Dusun Sade). *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 2019, 14.4.
- Makmun dan Yasin, Akhmad (2003) " Pengaruh Investasi dan Tanaga Kerja Terhadap PDB Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.7 No. 3. September 2003.
- Jaya, Putu Eka Juliana. "Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Metode Learning Comunity." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 12.1 (2020): 36-49.
- Yanti, Ayu Agustina Indra, Lulup Endah Tripalupi, and Iyus Akhmad Haris. "Pengaruh Motif Berprestasi dan Self Efficacy Terhadap Pencapaian Target Penjualan Distributor." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 12.1 (2020): 78-88.

# ANCAMAN BAHAYA NARKOBA DI INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI

Oleh:

Sukma Oktaviani<sup>1)</sup>, Gonda Yumitro<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

<sup>1</sup>email: mrspulubuhu@gmail.com

<sup>2</sup>gonda@umm.ac.id

## Abstrak

Tulisan ini mengkaji ancaman perdagangan dan peredaran narkoba yang berkembang pesat di era globalisasi Indonesia. Globalisasi membuat pergerakan lintas batas barang, jasa dan pengetahuan menjadi cepat karena kemajuan teknologi, transportasi dan telekomunikasi. Penulis menemukan bahwa saat menata kehidupan negara di era globalisasi, Indonesia menghadapi banyak tantangan terkait ancaman perdagangan dan peredaran narkoba. Sisi gelap globalisasi membuat ancaman kejahatan transnasional ini menjadi lebih luas karena telah melibatkan anak, perempuan bahkan publik figur Indonesia. Pemberitaan di berbagai media cetak ataupun digital mengenai kasus narkoba yang setiap tahunnya ada, membuktikan bahwa perdagangan narkoba di Indonesia marak terjadi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dengan data sekunder yang diperoleh dari website pencari jurnal seperti Google Scholar. Untuk memudahkan pencarian data, penulis juga menggunakan aplikasi Harzing: Published or Perished. Data yang relevan kemudian diubah menjadi data RIS melalui Aplikasi Mendeley. Data RIS tersebut kemudian diolah kembali menggunakan Aplikasi Vosviewer, yaitu software yang menampilkan visualisasi data yang memuat pembahasan terbanyak terkait topic globalisasi dan perdagangan narkoba di Indonesia.

**Kata Kunci:** Globalisasi, Indonesia, Ilegal, Narkoba, Perdagangan

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi yang sering ditandai dengan revolusi kearah yang lebih maju membawa kontradiksi terhadap suatu negara. Arus dari globalisasi yang tidak hanya pada satu bidang membuat globalisasi seperti pisau bermata dua, yang mana keuntungan sesungguhnya hanya akan dapat dirasakan bagi negara yang mampu mengendalikan arusnya. Transformasi dan arus global menjadi tantangan bagi negara. Hampir semua barang, modal, teknologi, individu, kelompok, pengetahuan, kejahatan, ideologi dan lain sebagainya bergerak cepat melintasi batas negara mengikuti arus globalisasi (Göksel, 2021). Dalam menghadapi pergerakan yang cepat tersebut, negara harus mengejar stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang stabil melalui berbagai kebijakan. Negara membuka pintu lebar bagi negara lain untuk dapat masuk ke pasar dalam negeri (Berger, 2000). Keterbukaan dan kebebasan inilah yang merusak pasar melalui berbagai kejahatan pasar gelap khususnya terkait dengan perdagangan ilegal Narkotika Psikotropika dan Obat-obat terlarang atau lebih dikenal dengan Narkoba.

Di Indonesia peredaran narkoba telah merambah kepada remaja yang merupakan penerus bangsa. Maraknya perdagangan narkoba ilegal merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia menjadi target penjualan narkoba oleh negara-negara lain karena Indonesia memiliki pasar yang menjanjikan (Puspitosari, 2007). Sinta Herindrasti (2018) mengungkapkan bahwa posisi

Indonesia bergeser dari negara transit menjadi negara tujuan perdagangan ilegal narkoba. Hal ini karena geografis Indonesia yang sangat mendukung, berada di antara benua Asia dan Australia (Lusia Sinta Herindrasti, 2018). Indonesia sering menjadi sasaran penyelundupan oleh negara lain melalui jalur penerbangan internasional maupun jalur pelayarannya. Berdasarkan data *Laporan Kegiatan Pengkajian Hak Manusia di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika* oleh Kemenkumham DKI Jakarta Tahun 2019, dalam empat tahun terjadi lonjakan jumlah narapidana kasus narkotika di Indonesia. Hanya dalam jangka waktu 2015 hingga 2018 peningkatan yang terjadi sebesar 82%. Pada tahun 2015 terdapat 63.355 orang yang menjadi tersangka dan pada 2018 angka tersebut meningkat menjadi 115.289 (Kemenkumham, 2019)

Tingginya jumlah kasus narkoba menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan narkoba menjadi kejahatan yang masif. Lebih dari 50% kasus narkoba tersebut tersebar di 6 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Bahkan menurut data Direktorat Jendral Pemasyarakatan, tahun 2018 terjadi over kapasitas narapidana kasus narkoba. Jumlah narapidana mencapai 19.993, sedangkan dari total 22 UPT khusus narkotika hanya memiliki daya tampung maksimal sebanyak 11.659 (Kemenkumham, 2019). Fenomena ini menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi perdagangan dan peredaran narkoba ilegal.



bertahap dihilangkan, sehingga globalisasi ekonomi berupa ekspansi pasar, produksi dan investasi berjalan lancar terhadap suatu negara (Suprijanto, 2011).

Semangat globalisasi Indonesia sangat terlihat pada masa awal pemerintahan Orde Baru, di mana pembangunan di berbagai bidang gencar dilakukan. Pemerintahan Orde Baru merubah politik luar negeri ditandai dengan bergabungnya kembali Indonesia dengan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan melanjutkan kerja sama. Pemerintahan Orba fokus pada perbaikan bidang ekonomi melalui berbagai kebijakan ekonominya yang memberi jalan bagi pasar internasional masuk ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak di bukanya pasar domestik Indonesia tersebut, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan yang dilakukan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan transportasi, listrik dan infrastruktur lain (Zulkarnain, 2016). Adapun Adisetiawan (2017) menambah catatan kemajuan yang dialami Indonesia. Adisetiawan melakukan penelitian kuantitatif mengenai globalisasi pasar Indonesia dan menyebutkan bahwa presentase bursa efek Indonesia menunjukkan hasil positif dan Index Harga Saham Gabungan cenderung berfluktuasi positif akibat bantuan pasar luar negeri. Penelitian dengan batas waktu 2001 hingga 2011 tersebut menjelaskan bahwa pasar modal Indonesia telah terintegrasi dengan pasar global dan memiliki tingkat integrasi yang bervariasi (Adisetiawan, 2017).

Kemudian Hidsan Jamil (2015) mengungkapkan pada tahun 1998 Indonesia juga sempat melakukan reformasi ekonomi yang memilih kerja sama dengan organisasi keuangan dunia IMF (Jamil, 2015). Tidak hanya itu, Bank Dunia juga terlibat dalam reformasi ekonomi Indonesia. Secara garis besar agenda yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini adalah untuk mempromosikan berbagai kebijakan yang merujuk pada liberalisasi ekonomi Indonesia. Bersamaan dengan itu, Indonesia telah meratifikasi kebijakan perdagangan bebas dan menjadi sejarah terbentuknya kerja sama regional maupun internasional. Di tingkat regional Indonesia memiliki ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN - Korea Free Trade Area (AKFA), ASEAN - China Free Trade Area, ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) dan lain sebagainya (Jamil, 2015). Masnur T. Malau (2015) berpendapat komitmen untuk menciptakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu contoh implementasi dari kerja sama regional yang dilakukan Indonesia. Dengan komunitas MEA, para pemimpin negara ASEAN menyepakati jika ASEAN menjadi suatu kawasan yang di mana pergerakan barang, jasa, modal, investasi dan pekerja ahli dapat bergerak mudah dan cepat. Tentunya langkah yang paling nyata dari komunitas ini adalah membuat hambatan tarif perdagangan antar negara

harus diturunkan bahkan dihapuskan (Malau, 2014). Menurut Abidin (2019) tujuan dasar integrasi ekonomi yaitu peningkatan volume dagang barang atau jasa, meningkatkan produksi, serta peningkatan mobilitas kapital dan tenaga kerja. Namun, kebebasan tersebut membawa tantangan besar bagi negara Indonesia. Integrasi yang melahirkan perdagangan bebas menuntut kemampuan negara untuk dapat mengontrol pergerakan lintas batas yang cepat atas barang dan jasa (Abidin, 2019). Negara dihadapkan pada penyedia barang dan jasa dari negara lain yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran bisnis mereka. Indonesia tidak dapat memungkiri dengan cara membuka diri atas proses globalisasi ekonomi tersebut, artinya Indonesia juga membuka pintu bagi pelaku kejahatan lintas negara untuk dapat masuk ke Indonesia. Khususnya terkait dengan perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia.

Menurut Alfiah dan Triandika (2018), kawasan ASEAN memang menjadi lahan strategis bagi perdagangan narkoba. Mengutip dari laporan *UN Office on Drugs and Crime (UNODC)*, data analisis *Global Synthetics Monitoring* menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan permintaan obat sintetik dan obat terlarang yang terus meningkat. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia merupakan pasar gelap peredaran narkoba terbanyak (Alfiah & Triandika, 2018). Hal tersebut juga sejalan dengan yang pernah disebutkan mantan Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (Kahumas BNN) 2015 Sumirat Dwiyanto, bahwa transaksi narkoba Indonesia berada pada posisi tertinggi dibanding dengan negara ASEAN lainnya. Pasalnya dari 100% transaksi narkoba di wilayah ASEAN, 40% presentase dimiliki oleh Indonesia. Sumirat Dwiyanto mengungkapkan bahwa transaksi dagang narkoba Indonesia berkisar pada Rp.48 triliun/tahun dan menyebabkan kematian akibat narkoba di Indonesia sebanyak 15 ribu jiwa/tahun. Berdasarkan situasi tersebut, Presiden Jokowi memberlakukan situasi darurat narkoba bagi Indonesia (Prayoga, 2016).

Melihat kondisi diatas, dalam menghadapi globalisasi ekonomi Indonesia mengalami tantangan yang sulit dengan perdagangan dan peredaran narkoba. Selain perdagangan ilegal tersebut, dampak terburuk yang dihadapi Indonesia adalah kematian dari masyarakat yang kecanduan terhadap obat-obatan terlarang.

### **Penyebaran Narkoba Yang Semakin Luas di Indonesia**

Menurut Faturachman (2020) perkembangan narkoba di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang melibatkan aspek regional dan aspek global. Faturachman mengungkapkan kejahatan narkoba di Indonesia bahkan telah dilakukan secara terang-terangan (Faturachman, 2020). Anastasia (2012) mengatakan salah satu yang menyebabkan bisnis gelap narkoba di

Indonesia tidak terkendalikarena para bandar besar yang memanfaatkan anak-anak dan perempuan sebagai kurir penyebaran narkoba (Anastasia, 2012). Kemudian Tantra (2020) menambahkan bahwa anak dijadikan kurir narkoba di Indonesia selain disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika, juga disebut sebagai korban. Menurut Tantra, anak dibawah umur yang terlibat peredaran narkoba dimanfaatkan oleh para bandar untuk mengelabui petugas berwajib. Adapun cara untuk merekrut anak-anak yaitu dengan dijanjikan imbalan yang besar atas aksinya (Tantra, Widiantara, & Suryani, 2020). Prasetyo (2019) mengungkapkan bahwa perekrutan anak-anak oleh bandar narkoba dilakukan dengan cara memanfaatkan kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah anak-anak tersebut. Selain itu, para bandar narkoba tidak jarang member minuman yang telah dicampur dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak dibuat ketergantungan dengan narkoba jenis tertentu yang dimiliki oleh bandar, sehingga dengan cara ini mereka mengontrol anak-anak agar mau melakukan apa yang diperintahkan (Prasetyo, 2019).

Sedangkan Wibowo (2015) menjelaskan perempuan Indonesia banyak direkrut bandar narkoba bahkan menjadi kurir internasional dan terkenal di Asia Pasifik. Tidak jauh berbeda seperti pola rekrutran terhadap anak-anak yang memanfaatkan kondisi ekonomi, perempuan Indonesia juga direkrut dengan modus pernikahan (Wibowo, 2015). Di tahun 2014 dilansir dari Tempo.co, BNN menyebutkan bahwa perempuan Indonesia yang terlibat peredaran narkoba sebanyak 4.297 orang. Kebanyakan dari perempuan diperdaya bandar internasional dengan tiket keluar negeri, dan kesejahteraan ekonomi jika bersedia menjadi kurir narkoba (Tempo, 2014).

Setiap tahun Indonesia tidak pernah terlepas dari pemberitaan media terkait perdagangan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Narkoba di Indonesia menyentuh semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, selebriti hingga pejabat negara. Pada 2012 dalam salah satu wawancara artikel berita, Sekretaris Utama BNN Irjen Pol Bambang Abimanyu menyebutkan bahwa di seluruh Indonesia terdapat sekitar 200 titik yang menjadi pintu masuk narkoba (FER, 2012). Pintu masuk tersebut tersebar di berbagai pulau Indonesia yang melalui jalur darat, udara maupun laut. Berikut beberapa contoh kasus besar terkaitperdagangan dan penyelundupan narkoba yang pernah terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

1. Kasus penyelundupan 1ton narkoba pada tahun 2017 di Anyer, Serang. Dalam kasus ini, tim gabungan kepolisian Polda Metro Jaya menangkap warga negara Taiwan yang membawa masuk narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 ton melalui jalur laut menggunakan perahu karet yang menggunakan mesin. Narkoba senilai Rp. 1,5 triliun tersebut disembunyikan di bangunan bekas Hotel Mandalika yang telah lama tidak berfungsi. Setelah mendapat laporan dari kepolisian Taiwan,

tim Polda Metro Jaya membutuhkan waktu dua bulan pengintaian untuk menggagalkan perdagangan dan peredaran narkoba tersebut (Ali, 2017).

2. Pada tahun yang sama, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan 13 juta pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) yang siap diperdagangkan. Narkoba jenis pil PCC merupakan hasil produksi rumahan Indonesia. Meskipun tempat produksinya hanya merupakan sebuah rumah kontrakan yang berada di Semarang Timur, tapi Mantan Komisaris Jendral Polisi (Komjen Pol) Budi Waseso mengatakan ruang produksi rumah tersebut dikategorikan sebagai industri profesional. Hal ini karena mereka merupakan orang yang berpengalaman dalam pembuatan obat terlarang dan didukung dengan mesin produksi yang canggih. Rumah produksi ini menghasilkan kurang lebih Rp. 2,7 milyar setiap bulan dari hasil penjualan yang dilakukan (Jawapos, 2017). Adapun untuk dapat membongkar jaringan narkoba ini, tim BNN dan Kepolisian membutuhkan waktu lima bulan pengintaian.
3. Kasus narkoba senilai Rp. 600 milyar yang berasal dari Belanda pada tahun 2017. Kerja sama BNN, Bea Cukai dan Polri menggagalkan sebanyak 1,2 juta butir ekstasi yang siap edar. Pil ekstasi tersebut dikemas rapi dalam bungkus aluminium di mana setiap bungkus berisi 2,2 kg. Kasus penangkapan tersangka pengedar narkoba di Tangerang ini mengakibatkan 1 korban yang meninggal karena mencoba melawan polisi saat diamankan (Movanita, 2017).
4. Pada tahun 2018, TNI Angkatan Laut berhasil menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 1ton yang akan diperdagangkan. Narkoba jenis ini diangkut oleh kapal ikan 'MV Sunrise Glory' dengan bendera Singapura. Penangkapan ini dilakukan diperbatasan antara Singapura dan Batam, di mana kapal tersebut tertangkap oleh KRI Sigurot – 864 yang berpatroli sedang melintas dijalur pelayaran memasuki wilayah perairan Indonesia (Teguh, 2018).
5. Di era Pandemi Covid-19 tahun 2021 BNN yang bekerja sama dengan Bea Cukai menggagalkan peredaran 581 kg sabu-sabu yang merupakan narkoba jaringan internasional berasal dari Malaysia, Pakistan dan Myanmar. Barang bukti sebanyak 581 kg tersebut dikumpulkan hanya dalam satu minggu pada bulan April 2021 (Maulana, 2021).

Kasus narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kasus narkoba bahkan melibatkan banyak pejabat politik dan publik figur. Di ketahui nama Andi Arief yang merupakan mantan Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Indra J. Piliang mantan anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Baharuddin Mamasta mantan Kepala Biro Agama Sekretariat Negara. Bahkan mantan anggota Dewan

Partai Nasdem Ibrahim Hasan ditangkap atas kepemilikan sabu-sabu kurang lebih 100kg (Azanella, 2019). Dalam periode 2020 saja, belasan selebriti terkenal yang merupakan publik figur dengan jutaan pengikut di sosial media tersangkut kasus narkoba. Beberapa nama diantaranya adalah Reza Artamevia, Lucinta Luna, Vanessa Angel, Roy Kiyoshi, Cathrine Willson, dan Vitalia Sessa (Ayuningtyas, 2020).

Sedikit kasus diatas menunjukkan gambaran bagaimana fenomena perdagangan dan peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia. Narkoba tidak hanya diperoleh dari jaringan internasional. Di dalam negeri juga telah berkembang tempat produksi obat-obatan terlarang. Indonesia rentan terhadap perdagangan narkoba dan dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berkembang darurat narkoba, karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini karena narkoba Indonesia melibatkan orang-orang penting dan memiliki kuasa, maka memiliki potensi memicu masyarakat lain sebagai pengikutnya.

#### **Perkembangan *Cashless System* Dalam Transaksi Narkoba**

Menurut Faturachman (2020) perkembangan narkoba di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang melibatkan aspek regional dan aspek global. Faturachman mengungkapkan kejahatan narkoba di Indonesia bahkan telah dilakukan secara terang-terangan (Faturachman, 2020). Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah sistem pembayaran *Cashless*. Irma Putri (2015) mengungkapkan bahwa Indonesia melalui Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dalam sistem pembayaran Indonesia telah melakukan sosialisasi mengenai pembayaran non tunai sejak 2010. Kemudian realisasi mulai dilakukan sejak 2014 melalui program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) (Putri, 2014). Lina Marlina (2020) menyebutkan bahwa sistem *Cashless* ini memiliki pengertian bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi canggih seperti, *e-banking, e-money, e-commerce dan e-payment*. Metode tersebut merupakan transaksi tanpa melibatkan uang kartal seperti cek dan giro (Marlina et al., 2020).

Pada era sekarang, perkembangan transaksi non tunai di Indonesia sangat digemari. Bahkan dilansir dari media online, Kepala BNN Banten Heru Narko menyatakan bahwa di masa Pandemi Covid-19 peredaran narkoba di Indonesia meningkat signifikan menggunakan transaksi online (Tanjung, 2020). Wakil Presiden Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa era pandemi tidak membuat peredaran narkoba menurun. Bandar narkoba semakin gencar menawarkan narkoba secara daring menggunakan situs gelap jual beli narkoba (Amali, 2021).

Menurut Kasat Narkoba Polresta Bogor Kompol Indra Sani, cara transaksi kerap dilakukan

dengan akun *anonim* dan kenalan yang bekerja di jasa pengiriman online. Pembayaran dilakukan via transfer kemudian bandar memproses pesanan (Sudarno, 2020). Kepala BNN Gianyar, AKBP Gusti Ngurah Alit bahkan mengakui bahwa dengan menggunakan sistem tersebut membuat petugas kesulitan dalam melacak pelaku. Menurut penjelasan AKBP Alit, pemantauan sulit dilakukan karena setelah narkoba dipesan, dibayar, kemudian bandar mengirim barang menggunakan kurir yang berujung pada menghilangnya pelaku. Terlebih lagi jika transaksi tersebut dilakukan antar pulau di Indonesia (Tabelak, 2021).

Perdagangan gelap yang marak terjadi menunjukkan betapa banyak permintaan narkoba di Indonesia. Melansir artikel berita nasional, pada tahun pertama pandemi, kasus narkoba di Indonesia mencapai 48.948 kasus. Barang bukti yang dikumpulkan berupa 50 ton ganja, 5,53 ton sabu, dan ratusan ribu narkoba jenis pil (Yamin, 2020). Sementara itu tahun 2021, jumlah kasus narkoba Indonesiamencapai 19.229 pada pertengahan bulan Juni. Menurut Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Polri telah menyita barang bukti perdagangan narkoba sebanyak 7.969 ton sabu, 2.1 ton ganja, 34,3 tembakau gorila, dan 239.277 pil ekstasi (Ramadhan, 2021).

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa masalah perdagangan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia merupakan hal yang serius. Para penyelundup narkoba sulit untuk dihentikan pemerintah Indonesia karena letak geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau.

Selain itu, kasus narkoba yang melibatkan pejabat politik maupun selebriti menunjukkan bahwa di era globalisasi dengan teknologi yang canggih ini membuat mudah jalan mereka untuk memperoleh obat-obat terlarang tersebut. Pemerintah tidak dapat menghentikan atau memperlambat kecanggihan akibat proses globalisasi, oleh karena itu sulit menghentikan para pelaku kejahatan masuk dan melakukan bisnis narkoba di Indonesia.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, andi mahammar qadafi. (2019). Integrasi Ekonomi Regional Dalam Asean Free Trade. *Jurnal Education and Development*, 7(4), 162–167. Retrieved from [https://repository.ubaya.ac.id/37306/1/Andi\\_Muhammar\\_Integrasi\\_Ekonomi\\_Regional.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/37306/1/Andi_Muhammar_Integrasi_Ekonomi_Regional.pdf)
- Adisetiawan, R. (2017). Globalisasi Pasar Modal Dunia Dan Pengaruhnya Terhadap Pasar Modal Indonesia. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.19>
- Alfiyah, N. I., & Triandika, L. S. (2018). Kebijakan politik luar negeri Indonesia Dalam Integrasi Kerjasama di ASEAN Untuk Menyikapi

- Permasalahan Peredaran Narkoba. *Global & Policy*, 6(2), 108–115.
- Ali, M. (2017, July 14). 4 Fakta Mengerikan dalam Kasus Sabu 1 Ton di Anyer - News Liputan6. *Liputan6.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3022365/4-fakta-mengerikan-dalam-kasus-sabu-1-ton-di-anyer>
- Amali, Z. A. (2021, September 16). Ma'ruf Amin Sebut Transaksi Narkoba di Indonesia Pakai Dark Web. *Tirto.D*, p. 1. Retrieved from <https://tirto.id/maruf-amin-sebut-transaksi-narkoba-di-indonesia-pakai-dark-web-gjzC>
- Anastasia, A. (2012). Narkoba (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis). *Kriminologi Indonesia*, 1(11).
- Ayuningtyas, N. (2020). 18 Seleb yang Terjerat Kasus Narkoba Sepanjang 2020, Ada yang Jadi Pengedar - Hot Liputan6. *Liputan6.Com*, p. 1. Retrieved from <https://hot.liputan6.com/read/4441065/18-seleb-yang-terjerat-kasus-narkoba-sepanjang-2020-ada-yang-jadi-pengedar>
- Azanella, L. A. (2019, March 5). Daftar Politisi dan Pejabat yang Terjerat Kasus Narkoba. *Kompas.Id*, p. 1. Retrieved from [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com)
- Azhari, S. (2007). Globalisme (Bangkitnya Ideologi Pasar). *Jurnal Sosioteknologi*, 6(11), 273–275.
- Berger, S. (2000). *Globalization and Politics*. 89–133.
- Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 13–19.
- FER. (2012, March 2). 200 Pintu Masuk Narkoba di Indonesia. *Beritasatu.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/megapolitan/34840/200-pintu-masuk-narkoba-di-indonesia>
- Göksel, N. K. (2021). *Globalization and the state* (Vol. 96).
- Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7), 13–20.
- Jamil, H. (2015). *Perangkap Liberalisasi Ekonomi di Indonesia*. (APRIL), 0–25. Retrieved from [http://www.researchgate.net/publication/277667433\\_Perangkap\\_Liberalisasi\\_Ekonomi\\_di\\_Indonesia?enrichId=rgreq-a301d72e-e250-4b52-b42e-4a162f6a8101&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NzY2NzQzMzZBUzoyMzY0OTY4MTI3NjkyODBMAMTQzMzM5NjY0MjI0Mg%3D%3D&el=1\\_x\\_2](http://www.researchgate.net/publication/277667433_Perangkap_Liberalisasi_Ekonomi_di_Indonesia?enrichId=rgreq-a301d72e-e250-4b52-b42e-4a162f6a8101&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NzY2NzQzMzZBUzoyMzY0OTY4MTI3NjkyODBMAMTQzMzM5NjY0MjI0Mg%3D%3D&el=1_x_2)
- Jawapos. (2017, December 4). Gerebek Pabrik PCC di Semarang, BNN Sita 13 Juta Pil. *Jawapos.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/12/2017/gerebek-pabrik-pcc-di-semarang-bnn-sita-13-juta-pil/>
- Kemenkumham, J. (2019). *Kegiatan pengkajian hak asasi manusia di wilayah karakteristik narapidana kasus narkotika*.
- Lusia Sinta Herindrasti, V. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Malau, M. T. M. (2014). Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional. *Rechtsvinding*, 1(2 Agustus), 375–395.
- Malihah, E. (2015). An ideal Indonesian in an increasingly competitive world: Personal character and values required to realise a projected 2045 'Golden Indonesia.' *Citizenship, Social and Economics Education*, 14(2), 148–156. <https://doi.org/10.1177/2047173415597143>
- Marlina, L., Mundzir, A., Pratama, H., Sebagai, C., Dan, C., Sebagai, C., ... Pratama, H. (2020). Cashless Dan Cardless Sebagai Perilaku Transaksi Di Era Digital. *Co-Management*, 3(2), 533–542.
- Maulana, R. (2021, May 5). Seminggu, BNN Sita 581 Kg Sabu dari Jaringan Internasional. *Sindonew.Com*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/418888/13/seminggu-bnn-sita-581-kg-sabu-dari-jaringan-internasional-1620198355>
- Movanita, A. N. K. (2017, August 1). Kapolri : 1,2 Juta Butir Ekstasi Asal Belanda Seharga Rp 600 Miliar. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/01/16562761/kapolri--1-2-juta-butir-ekstasi-asal-belanda-seharga-rp-600-miliar?page=all>
- Nurhadi, G. (2021). Pelabuhan "Tikus" Sebagai Pintu Masuk Peredaran Gelap Narkoba Di Kepulauan Riau. *BNN Kepulauan Riau*, p. 1.
- Prasetyo, A. (2019). Jaringan Peredaran Narkoba. *Unair.Ac.Id*, 1–15.
- Prayoga, R. (2016, January 16). BNN: transaksi narkoba Indonesia tertinggi se-ASEAN. *Antaranews*, p. 1. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkoba-indonesia-tertinggi-se-asean>
- Puspitosari, H. (2007). *Globalisasi Peredaran Narkoba*.
- Putri, I. A. (2014). Pengaruh Perkembangan Cashless Transaction Terhadap Kebutuhan Uang Tunai (Kartal) Masyarakat (Studi Kasus Indonesia Periode 2010 – 2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3(1), 1–18.
- Ramadhan, A. (2021, June 16). Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba Sepanjang 2021 dan Sita Barang Bukti Senilai Total Rp 11,66 Triliun.

- Komp*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/13301571/polri-ungkap-19229-kasus-narkoba-sepanjang-2021-sita-barang-bukti-senilai>
- Sudarno, A. (2020). Transaksi Narkoba Secara Online di Bogor Marak - News Liputan6. *Liputan6.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/4301084/transaksi-narkoba-secara-online-di-bogor-marak>
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Imiah CIVIS, I(2)*, 100–119. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/592-929-1-SM.pdf
- Tabelak, D. (2021, December 23). Sindikat Narkoba Transaksi Via Online untuk Hindari Petugas. *Radar Bali*, p. 1. Retrieved from <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/23/12/2021/wow-sindikat-narkoba-transaksi-via-online-untuk-hindari-petugas>
- Tanjung, E. (2020, October 21). BNN : Transaksi Narkoba di Masa Pandemi Beralih Secara Daring. *Suara.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2020/10/21/173244/bnn-transaksi-narkoba-di-masa-pandemi-beralih-secara-daring?page=all>
- Tantra, I. W. G., Widianara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 215–220. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1895.215-220>
- Teguh, Z. (2018, February 10). 6 Kasus Narkoba Terbesar di Indonesia, Batam Setara Sindikat Anyer. *INews.Id*, p. 1. Retrieved from <https://www.inews.id/news/nasional/6-kasus-narkoba-terbesar-di-indonesia-batam-setara-sindikat-anyer>
- Tempo. (2014). 4.279 Wanita Indonesia Menjadi Kurir Narkoba Internasional. *Tempo Nasional*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/630260/4-297-wanita-indonesia-kurir-narkoba-internasion>
- Wibowo, I. (2015, August 7). Kurir Narkoba Wanita Asal Indonesia Terkenal di Asia Pasifik. *MediaInd*, p. 1. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/18907/kurir-narkoba-wanita-asal-indonesia-terkenal-di-asia-pasifik>
- Yamin, M. (2020, December 22). Polri Tangkap 48.948 Tersangka Kasus Narkoba. *Sindonew.Com*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/276838/13/polri-tangkap-48948-tersangka-kasus-narkoba-1608624762>
- Zulkarnain, M. E. (2016). Peran dan Kebijakan Zaman Orde Baru Dalam Sektor Ekonomi Indonesia. *IAIN Tulungagung*, 4(1), 38–39. Retrieved from
- [https://www.academia.edu/download/64451077/Perkembangan\\_Ekonomi\\_Zaman\\_Orde\\_Baru.pdf](https://www.academia.edu/download/64451077/Perkembangan_Ekonomi_Zaman_Orde_Baru.pdf)

## PEMBELAJARAN EKSPRESI VOKAL BERBASIS *SELF ASSESSMENT* DI MAYOR MINOR *MUSIC COURSE* MALANG

Oleh:

Rikyana Dyah Bathari Widowati<sup>1)</sup>, Warih Handayani<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Seni Budaya, Universitas Negeri Surabaya

<sup>1</sup>rikyan.19070865032@mhs.unesa.ac.id

<sup>2</sup>warihhandayani@unesa.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses pembelajaran ekspresi vokal melalui penguasaan register yang berlangsung di Mayor Minor *Music Course* Malang, serta (2) menguji efektivitas dari metode yang digunakan dalam pembelajaran tersebut, yaitu *Self Assessment*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan proses pembelajaran ekspresi vokal melalui wawancara dengan narasumber, pengumpulan data, serta observasi. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu enam bulan untuk mengamati, mengumpulkan data, mengikuti proses pembelajaran, dan penulisan tesis ini. Sejalan dengan tujuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran ekspresi vokaldidahuluidenganpembelajaran register, yaitu Register dada (*Chest Voice*), Register tenggorokan (*Spoken Voice*), Register diafragma (*Diaphragm Voice*), Register hidung (*Nasal Voice*), dan Register kepala (*Head Voice*). Untuk pembelajaran ekspresi vokal, diklasifikasikan beberapaemosiyaitu; (1) sedih, manja, yang memunculkan suara sengau, desah, dan parau, hasil dari *Nasal Voice*, dan *vocal fry*; (2) marah, bersemangat, geregetan, yang memunculkan suara yang kuat dan lantang, hasil dari *Diaphragm Voice*; (3) tegang, gelisah, yang cenderung memunculkan suara/nada yang rendah, hasil dari *Chest Voice*; dan (4) gembira, romantis, kasih sayang, yang memunculkan suarajernih, halus, dan merdu, hasil dari *Head Voice*.

**KataKunci:** ekspresi vokal, register, *self assessment*

### 1. PENDAHULUAN

Belajar merupakan proses kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengubah perilaku sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya (Slameto, 2003:2). Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami proses dari 'tidak mengetahui' menjadi 'memahami', dari 'tidak bisa' menjadi 'bisa', dan dari 'bisa' menjadi 'lebih baik lagi'. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku pada individu yang muncul karena adanya interaksi dengan lingkungannya.

Selanjutnya, pembelajaran dimaknai sebagai proses interaksi guru dengan siswa, dilengkapi dengan materi, strategi, metode, serta sumber pembelajaran (Pane dan Dasopang, 2017:334). Guru berperan dalam mengorganisir lingkungan di sekitar siswa, untuk memotivasi siswa dalam melakukan kegiatan belajar (Sudjana, 2002:5). Maka dapat dipahami bahwa perbedaan antara belajar dan pembelajaran adalah jika belajar merupakan proses perubahan, pembelajaran adalah proses interaksi yang akan memunculkan perubahan tersebut, dengan dilengkapi perangkat pembelajaran. Hasil dari belajar maupun pembelajaran akan dapat dilihat dari tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, guru dapat dikatakan berhasil dalam mengajar jika tujuan yang telah direncanakan sebelumnya tercapai dengan baik.

Hasil penelitian dari para pakar musik menyatakan bahwa peran musik sangat kuat dalam pembentukan karakter individu (Lely, 2016:13).

Musik ibarat 'basis pondasi' dalam pembentukan perilaku dan budi pekerti. Musik dan budi pekerti memiliki kesinambungan dalam prinsip keindahan, harmoni, dan proporsi. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran musik, siswa diharapkan memperoleh pengalaman bermusik, melalui mendengar, menyimak, memainkan alat musik, bergerak mengikuti musik, bahkan bernyanyi. Dengan demikian, siswa akan memperoleh citra yang utuh dan menyeluruh mengenai apa yang diungkapkan pada sebuah karya musik.

Seni musik yang menggunakan media vokal atau suara manusia disebut seni suara (Poetra, 2006:4). Perbedaan vokal dibandingkan dengan instrumen musik lainnya adalah bahwa alat musik yang satu ini melekat dengan tubuh manusia, sedangkan instrumen seperti gitar, flute, biola, dan sebagainya merupakan instrumen kebendaan yang terpisah dari tubuh manusia (Poetra, 2006).

Pembelajaran seni suara/vokal bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat bahwa suara adalah materi yang bersifat *tersembunyi*, bukan suatu benda yang bisa dilihat. Suara hanya bisa dirasakan dengan indra pendengaran. Begitupun dalam mengajar ekspresi vokal, dimana ekspresi yang dipahami selama ini cenderung bersifat visual (melalui mimik wajah, gerak tubuh, gerak bibir, dan lain-lain), namun ekspresi bersifat audio agaknya kurang *disentuh* atau diperdalam. Sedangkan Muhathir (2019:14) menyatakan bahwa suara adalah

sarana yang utama dan efektif bagi manusia untuk berkomunikasi.

Seni adalah segala hal yang berkaitan dengan *aesthetic values*, maka ekspresi sangat mempengaruhi performa ataupun hasil karya seorang pelaku seni (Widhyatama, 2012:17). Begitu pula yang seharusnya diterapkan dalam bernyanyi. Tantangan seorang penyanyi adalah bahwa ekspresi yang dihasilkan bukan berupa visual, melainkan audio. Maka diperlukan sebuah teknik pembelajaran melalui materi tertentu yang dapat memunculkan apa yang dinamakan 'ekspresi vokal'.

Juslin (2005:235) menyatakan '*The human voice may be a common and biologically critical sound structure of our sound-related environment*'. Maksudnya adalah, bahwa suara manusia adalah struktur yang umum dan penting secara biologis dari lingkungan yang berhubungan dengan pendengaran kita. Lebih lanjut, Juslin mengungkapkan: '*Cross-cultural inquire about affirms that individuals express feelings by shouting, hollering, talking with a trembling voice, or employing a moo, calm, moderate, and repetitive voice*', yang bermakna; penelitian lintas budaya menegaskan bahwa orang mengekspresikan emosi dengan berteriak, berbicara dengan suara gemetar, atau menggunakan suara rendah, pelan, lambat, dan monoton.

Yuwanto (2015:2) yang menulis artikel mengenai ekspresi emosi dari pandangan psikologi, menjelaskan bahwa ekspresi merupakan representasi perasaan individu yang bukan hanya diaktualisasikan melalui visual (simbol, gambar), mimik wajah/raut muka, gestur (posisi dan gerak tubuh), namun juga dapat dimunculkan melalui audio, dalam hal ini adalah suara manusia (suara pelan, berteriak, suara desah, merintih, dan lain-lain). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekspresi tidak hanya ditampilkan/dinyatakan secara visual, namun juga dapat melalui audio atau suara.

Ekspresi yang dikeluarkan melalui media suara ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran vokal, terutama untuk memunculkan suatu gambaran emosi dalam sebuah lagu yang dirasakan oleh penyanyi, untuk kemudian disampaikan melalui suaranya dengan tujuan untuk menginterpretasikan dan memberikan sentuhan emosi dalam lagu tersebut. Jadi, segala hal yang menyangkut dengan ekspresi, penjiwaan, emosi ketika bernyanyi, yang selama ini ditunjukkan secara visual, sudah tentu akan dialihkan ke audio, dengan harapan untuk memberikan *nyawa* atau rasa yang kurang lebih sama seperti ketika ekspresi tersebut ditampilkan secara visual, sehingga dapat memunculkan komunikasi antara pelaku dan penikmat itu sendiri, karena pada dasarnya, bernyanyi adalah juga berkomunikasi melalui suara manusia. Seperti yang dikutip dari Yusuf (2002:12) bahwa lebih dari sepertiga dampak komunikasi berasal dari suara. Suara cenderung menggambarkan perasaan individu. Ini akan relevan dengan pernyataan Salliyanti (2004:10) bahwa lagu adalah

luapan perasaan seorang penyanyi. Dalam sebuah lagu, penyanyi dapat menyampaikan apa yang dirasakan kepada penikmat, dan ini merupakan bentuk komunikasi.

Selama ini, proses pembelajaran di sekolah-sekolah umum, bahkan sekolah-sekolah musik, belum pernah *menyentuh* ranah ekspresi vokal ini. Ekspresi yang diajarkan kepada siswa saat bernyanyi hanyalah yang bersifat visual saja, yaitu gerak tubuh, mimik wajah, lirikan atau tatapan mata. Sedangkan seorang penyanyi tidak selalu dapat dilihat penampilannya. Suara penyanyi lah yang harusnya lebih menjadi perhatian. Ekspresi secara visual hanya bersifat mendukung saja. Sebab seni musik (terutama bernyanyi) berbeda dengan seni yang lain, seperti tari atau rupa, yang memang haruslah ditampakkkan visual pelaku atau karyanya.

Pada umumnya, guru-guru vokal mengajarkan ekspresi suara hanya melalui dinamika, atau pemahaman tempo secara umum (tempo yang cepat mengesankan lagu yang gembira, sebaliknya tempo yang pelan menggambarkan lagu yang sedih). Sedangkan selain melalui tempo, *rhythm*, jenis tangga nada yang digunakan (mayor atau minor), notasi, dinamika, dan vibrasi, ada beberapa ekspresi vokal yang dapat dicapai dengan menggunakan *stressing* (penekanan kata atau suku kata dalam lirik), teknik *vocal fry*, dan nasal *voice* (suara hidung). Ketiga teknik ini masuk dalam Materi Register Vokal.

Register vokal dimaknai sebagai *bagian* atau *tempat suara* (Bakar, 2018:30). Register vokal menggambarkan bagian-bagian suara yang dapat dicapai manusia. Ada tiga pembagian besar register secara umum, yaitu register atas, register tengah, dan register bawah. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan pembagian register vokal berdasarkan oleh apa yang diajarkan di lokasi penelitian, karena register-register tersebut berkaitan erat dengan pembelajaran ekspresi vokal, yaitu register atas meliputi *head voice* dan *nasal*, register tengah meliputi *spoken voice* dan *diaphragm*, serta *chest voice* yang masuk dalam register bawah. Pembagian register ini didasarkan pada jangkauan nada yang dapat dicapai pada suara manusia, serta untuk memunculkan produk suara tertentu yang dapat digunakan untuk memberi ekspresi pada vokalnya.

Mayor Minor *Music Course* (MMMC) adalah sekolah musik non-formal yang mempunyai beberapa kelas musik, diantaranya adalah kelas vokal, kelas bas, kelas *drums*, kelas gitar, kelas *keyboard*, dan kelas piano. Di semua kelas terdapat tiga tingkatan/*level* untuk siswa didiknya, yaitu *Beginner*, *Intermediate*, dan *Advanced*, termasuk dalam kelas vokal. Di Mayor Minor, siswa vokal diarahkan lebih ke *vokal solo* (bukan paduan suara), yang berarti bahwa materi yang disampaikan berpedoman pada pengembangan dan penguatan karakter vokal masing-masing siswa.

Materi-materi yang diajarkan di sekolah ini, di kelas vokal, adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkat *Beginner*/pemula: Postur tubuh saat bernyanyi, Pernafasan, Artikulasi, Resonansi, Notasi, dan Frasing
2. Pada tingkat *Intermediate*/menengah: Register, Ekspresi Vokal (dengan materi tambahan: Wawasan *genre musik* dan beberapa *scales*)
3. Pada tingkat *Advanced*/mahir: Improvisasi, Apresiasi Lirik, dan *Stage Act*

Dari urutan materi pembelajaran tersebut, dapat diketahui bahwa ekspresi vokal dipelajari setelah siswa menguasai materi Register. Sehingga, penguasaan register vokal haruslah lebih dahulu diutamakan sebelum nantinya register-register tersebut digunakan sebagai ekspresi dalam bernyanyi.

Satu hal yang unik dari MMMC adalah bahwa pembelajaran register vokal ini disampaikan dengan metode pengenalan/penilaian diri yang disebut dengan *Self Assessment*.

*Whenever we learn we question ourselves 'How am I doing?', 'Is this enough', 'Is this right?', 'How can I tell?', 'Should I go further?' in the act of questioning is the act of judging ourselves and making decisions about the next step. This is self assessment (Boud, 1995:1).*

Boud sebagai pencetus metode ini, mengemukakan bahwa "Tiap kali kita belajar, kita selalu bertanya-tanya (pada diri kita sendiri); 'Apakah yang kulakukan ini sudah benar?', 'Apakah ini sudah cukup baik?', 'Haruskah aku melangkah ke tahap selanjutnya?'" Tindakan mempertanyakan kemampuan dan lalu mengambil keputusan untuk terus melanjutkan ataukah mengulangi inilah yang dinamakan Penilaian Diri (*Self Assessment*).

Siswa kelas vokal di MMMC berusia antara 10 hingga 30 tahun, diajar oleh Ibu Johanna Tania Listio, S.Psi, yang awalnya merupakan guru paduan suara di Gereja GKI Blimbing Malang, pernah mengambil jurusan Psikologi di Universitas Negeri Malang, dengan mayor Psikologi Klinis dan minor Psikologi Perkembangan dan Pendidikan. Ilmu Psikologi Pendidikan yang didapatkan banyak bermanfaat untuk metode pembelajaran vokal, terutama dalam menumbuhkan motivasi dan mengembangkan minat murid terhadap pembelajaran vokal, serta menerapkan metode pembelajaran *Self Assessment* yang akan dikaji dalam tesis ini. Hasil yang selama ini dicapai adalah munculnya beberapa siswa MMMC yang mampu bernyanyi dengan ekspresif dengan hanya melalui audio. Berhubung MMMC juga memiliki perangkat lengkap untuk produksi rekaman, maka beberapa siswa telah menjalani proses rekaman, membawakan lagu sendiri atau mengcover lagu dari penyanyi lain, dan sering diunggah di beberapa media sosial seperti *Youtube* dan *Instagram*.

Materi yang detail dan metode yang menarik inilah yang membuat para orang tua tertarik memasukkan putra-putrinya untuk belajar vokal di

MMMC. Sekolah Musik Mayor Minor ini masih tergolong baru jika dibandingkan dengan sekolah musik atau sekolah vokal lain di Malang seperti Swara Narwastu, Purwatjaraka, dan Gracioso Sonora (MMMC baru didirikan pada tahun 2015, sedangkan sekolah-sekolah yang telah disebutkan telah berdiri setidaknya 15 tahun di Kota Malang). Meski demikian, MMMC telah mampu mencapai banyak hasil, diantaranya adalah banyaknya siswa yang berminat untuk belajar di sana. Terbukti sebelum pandemi Covid-19 lalu, siswa kelas vokal di MMMC mencapai 42 anak, terdiri dari 26 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Saat ini, MMMC memiliki 40 siswa di kelas vokal, yaitu 24 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Dan klasifikasi untuk pembelajaran ekspresi vokal melalui penguasaan register ini adalah dengan rentang usia 12 hingga 40 tahun. Terdapat sebanyak 5 siswa, yaitu 4 perempuan dan 1 laki-laki yang sudah mencapai level tersebut, sisanya masih di tingkat pemula dan menengah awal. Penurunan jumlah yang tidak begitu signifikan ini menjadi bukti bahwa MMMC masih sangat diminati sebagai sekolah musik, terutama vokal di Kota Malang, meskipun tidak setenar yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, di bidang vokal, nama MMMC telah dikenal mempunyai berbagai prestasi, diantaranya; Juara 1 Lomba Karaoke *Sound of Women and Men* Anang Karaoke Kategori Anak (30 Juni 2019), Juara 3 Lomba Karaoke *Sound of Women and Men* Anang Karaoke Kategori Anak (30 Juni 2019), dan Juara 1 Lomba Menyanyi Happy Sunday with A & R Kategori A (7 Juli 2019).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penulis disini berperan sebagai peneliti dan pengumpul data. Penulis melakukan penelitian dengan menjadi pengamat dan partisipan dari proses latihan dengan hadir di lokasi penelitian, melakukan wawancara, mengikuti kegiatan latihan, namun tidak terlibat dalam proses mengajar. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data.

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi yang dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, pengambilan foto, video, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah mereduksi data, menyusun satuan-satuan, mengklasifikasikan, dan terakhir adalah menginterpretasikan data. Peneliti menggunakan 3 langkah untuk menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Observasi yang dilakukan peneliti meliputi: 1) Materi dan proses pembelajaran pada kelas vokal tingkat menengah, 2) Pelaku yang memiliki peran tertentu terhadap suatu aktivitas pembelajaran, 3) Kegiatan yang dapat mewujudkan interaksi, 4) Waktu, 5) Jumlah siswa dan tingkatannya, 6) Peristiwa, kejadian yang berlangsung yang melibatkan pelaku-

pelaku yang diamati, yang bersifat rutin sehubungan dengan pembelajaran, serta 7) Metode dan tujuan pembelajaran.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pembelajaran Vokal Materi Register di MMMC

Dalam proses pembelajaran register, Johanna sebagai guru vokal MMMC, menggunakan metode *self assessment*. Metode ini mengarah pada kegiatan sehari-hari manusia. Diharapkan melalui metode ini, siswa dapat membedakan mana pengalaman subjektif, dan mana pengalaman objektif manusia, sehingga hal itu akan dapat diterapkan dalam bernyanyi, seperti misalnya “Tidak semua orang pernah merasakan jatuh cinta, namun semua orang pasti pernah berbahagia”, atau “Tidak semua orang pernah merasakan putus cinta, namun semua orang pasti pernah menangis”.

Bernyanyi adalah bentuk komunikasi yang estetik. Bernyanyi dengan lirik merepresentasikan orang yang berbicara, bercerita, berkeluh kesah, dan sebagainya, yang di dalamnya mengandung ekspresi atau emosi tertentu, yang sudah pasti pernah pula dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Representasi karya seni biasanya melambangkan kenyataan (Sudaryanto, 2004:11).

Sebelum memulai pengajaran register, Johanna memberi pedoman latihan sebagai berikut:

1. Berdiri atau duduk tegak sesuai postur atau sikap tubuh dalam bernyanyi
2. Pernafasan yang dilakukan adalah pernafasan diafragma (kecuali bila ada tahap-tahap latihan tertentu yang membutuhkan pernafasan lain)
3. Hindari menunduk. Kepala diusahakan tetap datar atau tegak.
4. Memperluas rongga mulut, menghindari sudut bibir melebar, sesuai materi Artikulasi dan Resonansi yang telah dijabarkan di level sebelumnya (*Beginner*).

Berikut adalah proses pembelajaran register vokal. Johanna selaku pengajar vokal mengawali dengan pembelajaran register dada (*chest voice*), dilanjutkan dengan *spoken voice*, *strong voice* (*diaphragm*), *nasal*, dan terakhir adalah *head voice*.

#### 1. Register Dada

Register dada atau *chest voice* di sini merupakan register yang membunyikan suara atau nada terendah manusia. Resonansi atau getaran yang dirasakan berada di rongga dada. Suara yang dihasilkan register ini bersifat rendah, tebal, dan dalam. Register dada dapat diraih dengan membunyikan nada terendah yang mampu dicapai oleh siswa. Masing-masing siswa tentunya mempunyai jangkauan nada rendah yang berbeda-beda, sesuai *range* atau jangkauan vokalnya.

Awalnya, guru meminta siswa untuk melakukan pernafasan dada, dimana udara diambil melalui hidung, lalu disimpan di rongga dada, dan dihembuskan lewat mulut. Hal ini diulangi berkali-

kali. Selanjutnya, masih dengan pernafasan dada tersebut, guru meminta siswa untuk menirukan bunyi nafas orang yang lelah karena aktivitas (seperti bekerja, berlari, berolahraga, dan lain-lain) dengan *humming* (hmmmm) dimana ketika nafas dihembuskan, muncul suara atau bunyi dari pita suara yang bersifat rendah, tebal, dan dalam. Langkah ini diulangi berkali-kali.

Tahap terakhir, guru meminta siswa untuk mengganti pernafasan dada tersebut dengan pernafasan diafragma, dan lalu membunyikan suara terendah yang baru saja dicapai sebelumnya, dan menahan nada itu setidaknya selama 10 detik. Langkah ini diulangi berkali-kali, hingga siswa terbiasa membunyikan nada tersebut dan merasakan sensasi getaran pada area rongga dada. Bila perlu, durasi dapat ditambah menjadi 12 detik, 15 detik, 20 detik, dan seterusnya. Lalu *humming* diganti dengan huruf vokal A, I, U, E, O, suku kata MO, NO, SI, NEY, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk membiasakan siswa mengucapkan berbagai bunyi kata dengan menggunakan register ini.

Untuk merasakan sensasi getaran atau resonansi di area rongga dada inilah yang terkait dengan penilaian diri siswa (*self assessment*).

#### 2. Register Tenggorokan (*Spoken Voice*)

Selanjutnya, guru melanjutkan pengajaran ke tahap ke dua, yakni register tenggorokan. Suara yang dihasilkan register ini bersifat lemah, dan tipis, dan *breathy*. Sesuai nama lain dari register ini yaitu *spoken voice*, register ini kerap muncul dan digunakan pada saat berbicara sehari-hari dalam keadaan santai. Resonansi yang dirasakan berada di area tenggorokan. Register ini **tidak dapat** membunyikan suara yang kuat, lantang, atau tinggi, tanpa bantuan organ lain. Langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut:

- a. Guru meminta siswa untuk menirukan suara orang berbisik (lirih, cenderung mendesah) dengan kata *hey*. Ini diulangi beberapa kali.
- b. Guru meminta siswa untuk mengucapkan *hey* tersebut dengan “menada”. Diulangi beberapa kali.
- c. Guru meminta siswa untuk membunyikan register dada lalu menaikkan nada hingga ke *spoken voice* (dengan *humming*, huruf vokal, atau suku kata tertentu seperti yang telah dijelaskan di atas)

Register tenggorokan ini mempunyai 2 (dua) produk suara, yaitu parau dan jernih. Produk suara parau ini dinamakan *vocal fry*. *Vocal fry* atau suara kering adalah produk suara yang muncul saat seseorang dalam keadaan santai (cenderung malas), atau saat bangun tidur. Suara ini bersifat kering dan kasar. Seperti halnya pernyataan di atas, *vocal fry* tidak dapat membunyikan suara yang lantang, kuat, dan tinggi secara bersamaan.

Melalui 2 kegiatan sehari-hari yaitu berdialog santai dan bangun tidur, siswa dapat merasakan sensasi dari 2 (dua) produk suara yang dihasilkan oleh register tenggorokan ini. Dengan berlatih

berkali-kali, siswa akan terbiasa merasakan sensasi getaran pada tenggorokan, dan ini dapat mencapai konsistensi saat siswa tersebut aktif berlatih. Guru juga mengingatkan siswa untuk terus berlatih materi sebelumnya yaitu register dada dan meminta siswa untuk merasakan perbedaan sensasi yang muncul saat membunyikan dua register tersebut. Pernafasan yang dilakukan dalam register ini adalah pernafasan diafragma.

### 3. Register Diafragma

Register Diafragma adalah register yang menghasilkan produk suara lantang dan kuat, selayaknya orang berteriak. Register ini sering disalahpahami sebagai *spoken voice*, namun jelas sekali perbedaannya, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa register tenggorokan (*spoken voice*) bersifat lemah, lirih, dan *breathy*, sedangkan register diafragma bersifat lantang, kuat, dan *bulat*. Produk suara register diafragma dapat ditemui pada kegiatan sehari-hari seperti; memanggil tukang bakso/makanan lewat, memanggil teman yang jaraknya jauh, meneriaki pencuri (maling), dan lain-lain. Intinya register ini diperlukan untuk menghasilkan suara yang lantang, dan cenderung tegas.

Proses latihan register ini adalah sebagai berikut:

- Guru meminta siswa untuk menirukan suara 'balap motor' (menggunakan *humming*), dari nada paling rendah, secara perlahan dinaikkan, hingga otot diafragma terasa menekan ke dalam.
- Masih di latihan 'balap motor', guru meminta siswa untuk menemukan dan menahan 1 nada panjang dengan stabil, durasi minimal 10 detik.
- Guru meminta siswa untuk melepaskan/mengakhiri nada panjang tersebut dengan huruf vokal (A, I, U, E, O), dengan mempertahankan tekanan yang sama dengan ketika menahan nada tersebut.
- Setelah siswa dapat merasakan sensasi tekanan diafragma, huruf vokal dapat diganti dengan kata HAP dan HEY.

Register ini dapat dicapai secara optimal dengan latihan rutin dan tekun. Tidak semua siswa dapat dengan cepat menguasai register ini karena kerancuan dengan register sebelumnya, yaitu *spoken voice*. Minimum waktu yang dibutuhkan untuk melatih register ini adalah 3 pertemuan (3 x 1 jam). Hal ini disebabkan karena siswa sulit membedakan antara register tenggorokan dengan diafragma, sehingga yang kerap terjadi adalah 'kebocoran' register yang seharusnya mengoptimalkan kinerja diafragma, siswa seringkali menempatkannya di tenggorokan, yang mengakibatkan *larynx* dalam posisi turun. *Larynx* yang turun ini menyebabkan beberapa keluhan seperti suara serak atau bahkan habis, tenggorokan gatal, perih, dan sensasi tercekik saat bernyanyi. Untuk menghindari hal ini, siswa perlu mencoba berkali-kali mengoptimalkan kinerja diafragma, agar tercapai konsistensi. Tautan berikut

adalah pijakan penulis menyangkut hal ini, sementara masih belum menemukan referensi:

<https://youtu.be/sVDmtcbNUXs>

### 4. Register Hidung/Nasal Voice

Register ini tentunya sangat familiar, hanya banyak sekali yang tidak menyadari akan penggunaannya. *Nasal* berarti sengau, atau *twang*, dihasilkan dari saluran hidung yang tersumbat. Produk suara ini sering dan pasti muncul saat seseorang sedang mengalami flu, pilek, sinusitis, atau bahkan menangis. Yang sering tidak disadari adalah bahwa produk suara ini dapat dihasilkan tanpa harus mengalami hal-hal tersebut. Kunci dari produk bunyi ini adalah *tongue placement* atau peletakan lidah, terutama anak lidah (lidah bagian belakang). Berikut proses pembelajaran register hidung:

- Siswa membunyikan kata eng/sengau (disimbolkan dengan 'NG') berulang-ulang.
- Siswa mengganti bunyi 'NG' dengan huruf vokal 'A', lalu kembali ke 'NG', dan ini dilakukan berulang kali, hingga siswa memahami perbedaan bunyi dan peletakan anak lidahnya.
- Siswa membunyikan *nasal* dengan huruf vokal A. Bunyi ini dihasilkan dari anak lidah yang diangkat, namun tidak menempel ke langit-langit mulut.
- Dengan mempertahankan posisi anak lidah, huruf vokal A diganti dengan I, U, E, O, MA, NEY, PAW, MIAW.

### 5. Register Kepala/Head Voice

Register ini memproduksi suara dengan nada tertinggi manusia (dalam *range*). Register ini pun banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti menirukan suara ambulans, suara hantu/kuntilanak, saat memberi dukungan di suatu pertandingan (bunyi 'UUUUU'), bahkan ada pula yang tertawa diawali dengan menggunakan *head voice* ini. Sifat dari suara yang dihasilkan oleh *head voice* adalah tinggi dan jernih (tidak parau).

Untuk register ini, siswa diminta menirukan bunyi-bunyi tersebut bergantian. *Voice Imagery* juga berperan di sini. Yaitu gambaran mengenai audio atau produk bunyi yang dihasilkan, saat siswa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Namun bila siswa masih merasa kesulitan, guru menerapkan latihan berikut:

- Siswa berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka/berjarak (tidak rapat), lalu membungkukkan badan hingga kepala menjuntai ke bawah.
- Siswa mempertahankan posisi ini hingga merasa pusing atau berat di kepalanya, lalu membunyikan huruf vokal U dengan nada tertinggi yang ia mampu capai.
- Bunyi huruf vokal U dapat diulang-ulang dan diganti dengan huruf vokal lain, dengan tetap mempertahankan nada tertinggi yang dicapai.
- Setelah dirasa cukup, siswa diminta untuk menegakkan badan secara perlahan, DENGAN KEDUA MATA TERTUTUP. Hal ini dilakukan

- agar siswa dapat tetap fokus pada sensasi yang baru saja dirasakan.
- e. Setelah di posisi tegak, sambil menunggu keseimbangan tubuh kembali normal, dengan mata terpejam, siswa diminta untuk diam sejenak, merasakan, atau mengingat-ingat sensasi yang sebelumnya dialami, antara lain rasa pusing atau kepala yang berat.
  - f. Ketika sensasi tersebut didapatkan kembali, siswa diminta mengulangi bunyi huruf vokal dengan nada yang sama dengan saat membungkuk.

Pengulangan latihan-latihan register tunggal ini dilakukan agar siswa terbiasa merasakan sensasi dan perbedaan sensasi antar register tersebut.

Selanjutnya, setelah menguasai register-register tunggal, siswa vokal MMMC level menengah ini kemudian diberikan materi tentang *Mixed Register*. Di materi ini, siswa diajarkan untuk mencampur setidaknya dua register menjadi satu, yang lalu menghasilkan produk bunyi baru. Inilah yang dimaksud dengan *mixed register*. *Mixed Register* yang digunakan dalam aplikasi ekspresi vokal adalah *falseto*. *Falseto* adalah campuran antara register tenggorokan/*spoken voice*, dengan register kepala/*head voice*. Hasil suara dari *falseto* ini adalah tinggi, tipis dan *breathy*. *Head voice* berperan sebagai register yang membantu pencapaian nada tinggi, dan *Spoken voice* berperan untuk mempertahankan bunyi yang lemah/tidak lantang.

## B. Pembelajaran Ekspresi Vokal Melalui Penguasaan Register

Saat siswa sudah benar-benar menguasai bunyi produk suara melalui berbagai register tersebut, maka pembelajaran ekspresi vokal melalui penguasaan register dapat diterapkan, diawali dengan pengenalan intonasi. Berbicara dengan intonasi, tekanan, dan produk suara tertentu adalah natur manusia. Melalui intonasi, tekanan, dan produk suara inilah manusia dapat mengekspresikan emosi atau maksudnya. Juslin (2005) mengungkapkan: '*Cross-cultural inquire about affirms that individuals express feelings by yelling, hollering, talking with a trembling voice, or employing a moo, calm, moderate, and repetitive voice*', yang bermakna; penelitian lintas budaya menyatakan bahwa manusia mengekspresikan emosi dengan berteriak, berbicara dengan suara gemetar, atau menggunakan suara yang rendah, pelan, dan lamban. Yuwanto (2015) menjelaskan bahwa ekspresi merupakan ungkapan perasaan manusia yang bukan hanya dinyatakan melalui raut muka, gestur (posisi dan gerak tubuh), namun juga dapat dimunculkan melalui audio, dalam hal ini adalah suara manusia (suara pelan, berteriak, suara desah, merintih, dan lain-lain). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekspresi tidak hanya ditampakan/dinyatakan secara visual, namun juga dapat melalui audio atau suara.

Secara tidak disadari sebenarnya ini merupakan proses alami dalam mengaktifkan organ register. Misalnya suara berbisik untuk mengatakan

sesuatu yang rahasia atau penting, dihasilkan dari register tenggorokan, kemudian suara yang lantang dan tegas dalam kegiatan baris berbaris atau ketika orang mengucapkan kalimat perintah, dihasilkan dari register diafragma. Dan hal ini dapat diterapkan ke seni bernyanyi, seperti pada video berikut ini <https://youtu.be/MEKfYBlesLc> (menit 0:32)

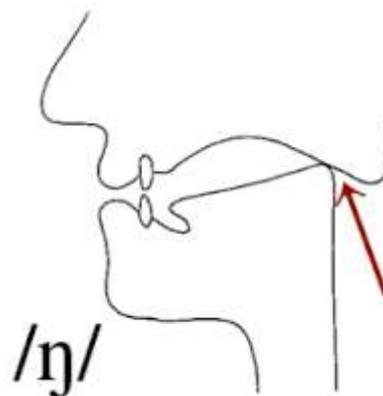
Untuk lebih memudahkan siswa mempelajari ekspresi vokal, guru mengajak siswa untuk mengidentifikasi berbagai macam kegiatan yang melibatkan ekspresi dan emosi manusia. Dari identifikasi ini, siswa dapat mengetahui produk suara yang secara umum dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Berikut adalah ekspresi-ekspresi yang sering muncul dalam karya musik/lagu (guru membericontohbeberapa lagu, terlepas dari bahasa, negara, ataupun pemaknaan. Guru hanya menekankan pada produksi suara dan perpindahan *placement* yang jelas dan memudahkan siswa mempelajari atau mengamati perpindahan tersebut). Ekspresi ini dimunculkan melalui produk suara tertentu yang dihasilkan dari organ register:

### 1. Sedih, Manja

Sedih dan manja adalah dua ekspresi yang menghasilkan produksi suara yang hampir sama, yaitu sengau, desah, atau parau. Suara sengau dan parau dihasilkan dari kegiatan menangis atau merengek. Menangis identik dengan ekspresi sedih, dan merengek identik dengan ekspresi manja.

Suara sengau pada kegiatan menangis atau merengek ini tidak dapat dihindari, karena saat menangis, saluran hidung tertutup oleh lendir, mengakibatkan suara menjadi sengau. Produk nasal atau sengau ini merupakan bunyi dari register hidung. Perbedaannya adalah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa siswa tidak harus menangis dulu atau bersikap manja untuk menghasilkan register ini. Cukup dengan memposisikan anak lidah, yaitu mengangkat anak lidah namun tidak sampai menempel ke langit-langit.



Gambar 4.2 1. Posisi Lidah pada Register Hidung

Sumber:  
<http://mikeacademe.blogspot.com/2019/02/nasal-sounds-m-nand.html>

Untuk desah dan parau, register yang digunakan adalah *spoken voice*. Desah identik dengan berbisik sedangkan parau dapat dihasilkan dengan membunyikan *vocal fry*. Contoh penggunaan produk-produk suara ini adalah seperti dalam lagu-lagu berikut:

- a. Lagu berjudul Pestamu Dukaku yang dibawakan oleh Yulia Citra. Video dapat diakses di sini: <https://www.youtube.com/watch?v=gkvsXIFmwGc>

Lagu ini banyak menggunakan register nasal sebagai penggambaran ekspresi sedih, berduka, menangis, bahkan hampir di sepanjang lagu.

- b. Lagu berjudul *Why Oh Why* yang dibawakan oleh penyanyi Kanada, Celine Dion. Video dapat diakses di sini: <https://www.youtube.com/watch?v=qN567XNw5D4>.

Dapat didengarkan suara penyanyi dalam lagu ini yang cenderung seperti orang sedang menangis. Register penggambaran emosi yang sering muncul (dominan) adalah sengau (nasal), desah, dan *vocal fry*, yang mengesankan kesedihan. Berikut penjabaran beberapa contoh penggunaan register-register tersebut berdasarkan waktu dalam video:

**Tabel 4.1. Ekspresi Vokal pada lagu Why Oh Why**

NO	KATA/KALIMAT	MENIT KE	PRODUK SUARA/REGISTER
1.	<i>Don't you know that you're my reason</i>	0:12	Sengau/Nasal
2.	<i>...that you're my reason</i>	0:15	Parau/Vocal Fry
3.	<i>...my being</i>	0:21	Parau/Vocal Fry
4.	<i>I try to swallow my pride</i>	0:34	Parau/Vocal Fry
5.	<i>Wish I didn't know...</i>	0:46	Parau/Vocal Fry
6.	<i>...Tell me why...</i>	0:50	Parau/Vocal Fry
7.	<i>I felt the trust...</i>	1:00	Parau/Vocal Fry
8.	<i>Why oh why</i>	1:04	Parau/Vocal Fry
9.	<i>How can you tell me it was nothing....</i>	1:24	Parau/Vocal Fry
10.	<i>....everything I dreamed in...</i>	1:33	Parau/Vocal Fry
11.	<i>Just a night and I held you so tight</i>	1:38	Parau/Vocal Fry
12.	<i>I try to swallow my pride</i>	1:47	Sengau/Nasal
13.	<i>Tell me why..</i>	2:03	Sengau/Nasal
14.	<i>Why when I looked in your eyes</i>	2:06	Parau/Vocal Fry
15.	<i>I felt my heart....</i>	2:12	Parau/Vocal Fry

- c. Lagu berjudul Mercedes Benz yang dibawakan oleh Janis Joplin. Video dapat diakses di sini:

<https://www.youtube.com/watch?v=Qev-i9-VKIY>.

Lagu ini dominan, dan bahkan di sepanjang lagu, menggunakan register nasal dan parau (*Vocal Fry*) seperti lagu sebelumnya. Dua register ini digunakan untuk menggambarkan ekspresi manja, merengek, ibarat seorang anak kecil yang merajuk pada orang tuanya.

- d. Lagu berjudul Pertama yang dibawakan oleh penyanyi Indonesia, Reza Artamevia. Video dapat diakses di sini: [https://www.youtube.com/watch?v=RfU75PYUdjK&ab\\_channel=AquariusMusikindo](https://www.youtube.com/watch?v=RfU75PYUdjK&ab_channel=AquariusMusikindo)

### 1. Marah/Berseemangat/Gregetan

Salah satu kegiatan manusia yang melibatkan emosi marah adalah membentak. Membentak melibatkan produk suara yang tegas dan lantang. Begitu pula saat sedang bersemangat atau geregetan. Manusia cenderung berbicara tegas dan jelas, dengan tekanan yang lebih kuat daripada ketika sedang berbincang santai. Produk suara lantang, tegas dan bertekanan kuat ini dihasilkan dari penggunaan register diafragma. Contoh penggunaan register diafragma dalam lagu adalah sebagai berikut:

- a. Lagu berjudul Abandoned yang dibawakan oleh *band* asal Norwegia, Kamelot. Video dapat diakses melalui tautan berikut: [https://www.youtube.com/watch?v=gkNXiC6XwJE&ab\\_channel=Gatekeeper](https://www.youtube.com/watch?v=gkNXiC6XwJE&ab_channel=Gatekeeper) (mulai menit 3:20 hingga akhir kalimat).
- b. Lagu berjudul Exit Music, yang dibawakan oleh *band* asal Inggris, Radiohead. Penggunaan register diafragma dalam lagu ini menghasilkan tekanan yang kuat, volume yang lebih besar dari bagian lagu sebelumnya, mengesankan seperti menegaskan sesuatu, atau bahkan kecewa berujung marah. Register diafragma dibunyikan mulai menit ke 3:18 hingga 3:36 (*...choke you, now we are one in everlasting peace*). Video dapat diakses melalui tautan berikut: [https://www.youtube.com/watch?v=50rIHVe6g9Q&ab\\_channel=TrinhPham](https://www.youtube.com/watch?v=50rIHVe6g9Q&ab_channel=TrinhPham)
- c. Lagu berjudul I Wanna Dance with Somebody yang dibawakan oleh *diva* dunia, Whitney Houston. Register diafragma di lagu ini muncul di bagian-bagian lagu tertentu yang menunjukkan semangat. Video dapat diakses melalui tautan berikut:

[https://www.youtube.com/watch?v=eH3giaIzONA&ab\\_channel=whitneyhoustonVEVO](https://www.youtube.com/watch?v=eH3giaIzONA&ab_channel=whitneyhoustonVEVO)

### 2. Tegang, Gelisah

Telah disinggung dalam bab sebelumnya, tentang penggunaan suara yang tebal atau rendah atau dalam, sebagai produk suara yang dapat mempengaruhi alam bawah sadar manusia (hipnotis). Produk suara ini dihasilkan oleh *Chest voice*. Contoh dari pernyataan ini adalah seperti pada tautan berikut: <https://youtu.be/zoTKln3vsT4>.

Dalam lagu, produk suara seperti ini biasanya dimunculkan untuk menimbulkan suasana tegang,

seperti orang mengancam, mengintimidasi, atau bahkan kegelisahan. Contoh-contoh lagu yang menggunakan ekspresi ini adalah:

- a. Lagu berjudul *The Rains of Castamere*, yang merupakan *Original Soundtrack* dari film seri berjudul *Game of Thrones*. Sepanjang lagu ini dibawakan dengan menggunakan register bawah, yaitu dada. Nada yang rendah, produk suara yang dalam dan tebal mengesankan ketegangan. Video dapat diakses di tautan berikut:  
[https://www.youtube.com/watch?v=vU8eL2CjzHw&ab\\_channel=EricThePooh](https://www.youtube.com/watch?v=vU8eL2CjzHw&ab_channel=EricThePooh)
- b. Lagu berjudul *Sound of Silence* yang dibawakan oleh *Disturbed*, yang videonya dapat diakses melalui tautan berikut:  
<https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4>. Ekspresi tegang yang digambarkan dalam lagu ini berada di menit 0:22 hingga 1:47. Di menit-menit tersebut, penyanyi menggunakan register dada yang bersifat, rendah, tebal, dan dalam.
- c. Lagu berjudul *Where the Wild Roses Grow*, yang dibawakan oleh *band* *Kamelot*. Video dapat diakses di tautan berikut:  
[https://www.youtube.com/watch?v=aBtMkR72uCU&ab\\_channel=MusicFHDHQ](https://www.youtube.com/watch?v=aBtMkR72uCU&ab_channel=MusicFHDHQ). Lagu ini dibawakan oleh dua orang penyanyi, laki-laki dan perempuan. Saat mereka bernyanyi bersama, produk register yang mereka gunakan berbeda. Penyanyi perempuan menggunakan register *spoken voice*, dan penyanyi laki-laki menggunakan register dada, walaupun nada yang mereka nyanyikan sama. Untuk selanjutnya, ketika mereka bernyanyi secara terpisah, penyanyi perempuan tetap menggunakan register *spoken voice*, dan penyanyi laki-laki menggunakan register dada. Register dada yang dibunyikan penyanyi laki-laki ini memberi nuansa tegang, seperti mengintimidasi atau mengancam.

### 3. Gembira/Romantis/Kasih Sayang

Perasaan gembira, romantis, atau sayang tidak selalu dihubungkan dengan asmara. Perasaan ini dapat muncul dalam hubungan saudara, teman, ibu kepada anak dan sebaliknya, atau bahkan kepada Tuhan. Nuansa yang dibentuk adalah damai dan tenang. Pada umumnya, nuansa ini dibentuk dari hasil produk suara yang jernih (tidak parau), halus, dan merdu. Ini adalah ciri dari register kepala (*head voice*). Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Lagu berjudul *Somewhere*, yang dinyanyikan oleh *Barbra Streisand*. Di sepanjang bagian dalam lagu ini, *Barbra* menggunakan *head voice* untuk memunculkan ekspresi damai dan tenang. Produk suara yang dihasilkan adalah merdu dan jernih. Video dapat diakses di tautan berikut:  
[https://www.youtube.com/watch?v=cAu3a7CMA84&ab\\_channel=barbrastreisandVEVO](https://www.youtube.com/watch?v=cAu3a7CMA84&ab_channel=barbrastreisandVEVO)
- b. Lagu berjudul *Ave Maria*, yang dibawakan *Celtic Woman*. Video untuk lagu ini dapat diakses di tautan berikut:  
<https://www.youtube.com/watch?v=usADINi17cI>

Sepanjang lagu ini, penyanyi menggunakan register yang sama, yaitu *head voice*, sebagai penggambaran kesan damai, khidmat, dan tenang.

- c. Lagu berjudul *Memory* yang dibawakan oleh *Simone Simons* yang merupakan penyanyi dari *band* *Epica*. Video untuk lagu ini dapat diakses di tautan berikut:

[https://www.youtube.com/watch?v=pgYEJHJXFB4&ab\\_channel=MattCharles](https://www.youtube.com/watch?v=pgYEJHJXFB4&ab_channel=MattCharles)

Lagu ini dominan menggunakan register *head voice* untuk mengekspresikan keindahan dan ketenangan.

Dan berikut ini adalah tahapan lengkap untuk latihan penguasaan dan aplikasi register dalam bernyanyi:

1. Siswa diperdengarkan sebuah lagu yang mengandung ekspresi tertentu. Lagu yang diperdengarkan adalah salah satu dari lagu-lagu yang telah disebutkan di atas.
2. Siswa menganalisa ekspresi yg terdapat dalam lagu tersebut, dan menjelaskan register yang terlibat. Latihan ini membutuhkan setidaknya 5 putaran lagu untuk dapat menangkap semua ekspresi yang 'terdengar' di keseluruhan lagu.
3. Siswa mencoba membunyikan atau menyanyikan lagu tersebut dengan ekspresi vokal yang telah diketahui.
4. Siswa mengulangi latihan 3.
5. Setelah semua ekspresi terwakili oleh produk suara, siswa mencoba menyanyikan keseluruhan lagu.

Untuk menentukan evaluasi dalam pembelajaran ini, siswa perlu melakukan proses sebagai berikut:

1. Menjelaskan produk-produk suara tertentu dalam kegiatan sehari-hari. Dalam proses ini, siswa diminta untuk menyebutkan beberapa kegiatan manusia sehari-hari yang melibatkan suara, seperti menangis, memanggil teman dari kejauhan, merengek, marah, mendengkur, berbisik, dan lain-lain.
2. Memahami perbedaan antara produk suara satu dengan lainnya. Perbedaan ini dapat didefinisikan dengan menyebutkan sifat-sifat suara, seperti lemah, lirih, kuat, parau, melengking, jernih, rendah, dan lain-lain.
3. Menirukan produk-produk suara tersebut dengan *voice imagery*. Di sini, siswa diarahkan untuk merecall pengalamannya sendiri saat siswa tersebut melakukan sikap atau kegiatan tertentu seperti pada poin a di atas, lalu melakukannya. Dapat dikatakan, siswa bertindak 'seolah-olah sedang' melakukan hal-hal tersebut.
4. Merasakan sensasi saat membunyikan produk suara tersebut. Sensasi yang dimaksud adalah reaksi organ tubuh tertentu saat siswa tersebut membunyikan sebuah produk suara. Untuk dapat merasakan dan menyebutkan sensasi, siswa perlu mengulang-ulang bunyi produk suara yang sama. Dalam hal ini peran guru adalah memberi

instruksi untuk siswa mengulang, kemudian bertanya apakah siswa sudah merasakan sensasi tertentu dalam tubuhnya, lalu siswa menyebutkan sensasi tersebut. Beberapa sensasi tersebut dapat dijabarkan seperti berikut:

- a. Berbisik: lirih, tidak menada, pita suara dalam keadaan diam (tidak bergetar)
  - b. Menangis: sengau
  - c. Berteriak: lantang, kuat, rongga mulut luas (*soft palate* naik, rahang bergerak ke bawah, yang mengakibatkan turunnya dagu), diafragma menekan ke dalam, seperti pada video berikut:  
<https://youtu.be/yF-R15acQdA>
5. Mengulangi produk suara tersebut secara konsisten.
  6. Mendengarkan unsur-unsur produk suara penyanyi dalam sebuah lagu yang dipilih oleh guru.
  7. Menyebutkan register dari produk suara dalam lagu tersebut,
  8. Menirukan produk suara tersebut dengan mengaplikasikan pembelajaran register yang ditempuh sebelumnya.
  9. Mengevaluasi hasil belajar ungkapan vokal dari diri sendiri melalui rekaman, sesuai acuan yang diberikan oleh guru.

Mengacu pada teknik penilaian menurut Suwandi (2011), hasil pembelajaran dari metode *Self Assessment* ini meliputi 3 hal yaitu Aspek Afektif, Kognitif, dan Psikomotor.

1. Aspek Afektif; Sanjaya (dalam Khotimah & Roro, 2017) menjelaskan bahwa pembelajaran afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur, karena menyangkut kesadaran diri. Pembelajaran ekspresi vokal melalui penguasaan register berbasis self assessment di MMMC menekankan pada kesadaran siswa akan kondisi lingkungan di sekitarnya. Siswa menjadi lebih peka terhadap situasi dan kondisi di sekitarnya, dengan hanya mengenali produk suara orang-orang di sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan rasa empati pada siswa tersebut.
2. Aspek Kognitif; siswa memahami cara mengungkapkan ekspresi pada sebuah lagu. Hubungannya adalah dengan interpretasi. Siswa tidak lagi harus 'terpaksa' mengalami hal yang sama dengan lirik yang diceritakan pada lagu tersebut, namun siswa cukup menangkap kesan atau emosi dalam kata-kata tertentu yang kemudian diekspresikan dengan suaranya.
3. Aspek Psikomotor; siswa mampu menirukan, menerapkan, dan mengkreasi produk-produk suara tertentu berdasarkan emosi yang ingin diungkapkan dalam sebuah lagu, dengan mengaplikasikan pembelajaran register. Satu emosi bisa diekspresikan dengan lebih dari satu produk suara. Dari sini, siswa akan mempunyai tolok ukur atau landasan dalam menerapkan ekspresi vokal di lagu tertentu.

#### 4. KESIMPULAN

Terdapat 2 poin penting dalam sebuah pembelajaran, yaitu proses dan interaksi. Sebuah pembelajaran tentunya memerlukan proses dalam pelaksanaannya, antara lain adalah proses kinerja yang menyangkut kemampuan guru dalam menyampaikan materi, dan kemampuan siswa dalam menyerap materi. Selanjutnya, pembelajaran membutuhkan 2 subjek, yaitu guru dan siswa yang saling berinteraksi. Guru menyampaikan materi dan siswa menerima materi. Bila salah satu dari 2 poin penting ini tidak terpenuhi, maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Seni suara adalah termasuk dalam bidang seni musik. Seni suara adalah salah satu seni musik yang menggunakan organ tubuh manusia sebagai alat musiknya. Organ tubuh ini disebut pita suara. Karena seni suara bersifat audio, maka segala hal yang berkaitan dengan emosi atau ekspresi dalam seni suara, sudah tentu akan dimunculkan melalui suara. Hal ini dapat diwujudkan dengan munculnya berbagai produk suara yang mewakili ekspresi tersebut. Munculnya bermacam-macam produk suara tersebut berasal dari getaran/resonansi dari organ yang berbeda-beda. Inilah yang dinamakan register suara.

Tiap-tiap manusia mempunyai natur yang sama dalam berkomunikasi dan meluapkan emosi. Produk suara yang dihasilkan dari register-register suara tidak berbeda jauh dengan produk suara yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam kesehariannya. Bernyanyi adalah bentuk komunikasi yang disampaikan secara estetik. Bernyanyi (dengan lirik), disadari atau tidak, adalah representasi dari orang yang berbicara, bercerita, berkeluh kesah, dan sebagainya. Di dalamnya mengandung ekspresi atau emosi tertentu, yang sudah pasti pernah pula dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat sebanyak 6 register yang diajarkan di MMMC, yaitu Register Dada (*Chest Voice*), Register Tenggorokan (*Spoken Voice*), Register Diafragma (*Strong Voice*), Register Hidung (*Nasal Voice*), Register Kepala (*Head Voice*), dan *Mixed Register (Falsetto)*. Masing-masing register ini dapat 'menggambarkan' lebih dari 1 ekspresi dalam bernyanyi. Register Dada dapat digunakan untuk memunculkan ekspresi tegang atau gelisah, Register Tenggorokan untuk ekspresi netral, Register Diafragma untuk ekspresi semangat, gembira, atau dapat juga digunakan sebagai ekspresi kecewa atau marah, Register Hidung seringkali digunakan untuk penggambaran ekspresi sedih atau manja, bersamaan dengan pemakaian register *Falsetto*, dan Register Kepala untuk memunculkan ekspresi kasih sayang, keromantisan, dan sikap khidmat.

Pembelajaran vokal di MMMC menekankan pada produk audio yang benar-benar harus dikuasai siswa untuk memunculkan ekspresi (selain tempo, dinamika, penekanan, improvisasi, dan intonasi), yaitu penguasaan register. Karena produk-produk

suara tersebut tidak berbeda jauh dengan produksi suara manusia ketika berkomunikasi, maka guru membimbing siswa untuk melakukan *Voice Imaginary* terlebih dahulu, yaitu *me-recall* atau mengenang/mengingat/membayangkan produk suara tertentu yang dihasilkan dari emosi tertentu, untuk kemudian melakukannya (memproduksi suara tersebut). Ini termasuk dalam metode *self assessment*. Dalam metode ini, siswa diharapkan dapat merasakan sensasi kinerja organ saat mereka memproduksi sebuah suara, dan mengamati sekitarnya, dengan jeli, untuk dapat mengaplikasikan berbagai produk suara.

## 5. REFERENSI

- Ahmadi, A., & Prasetya, J.T. (2015). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Andrade, Heidi & Valtcheva, Anna. (2009). *Promoting Learning and Achievement Through Self-Assessment, Theory Into Practice*.  
<https://doi.org/10.1080/00405840802577544>
- Anggraini, Indah Ayu, Wahyuni Desti Utami & Salsa Bila Rahma. (2020). *Mengidentifikasi Minat Bakat Siswa Sejak Usia Dini di SD Adiwiyata*.  
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/570/445>
- Aningtiyas, E. (2012). Pengelolaan Kursus Musik (Studi Pada Lembaga Kursus Musik 99 Jl. Pattimura Raya Ungaran Kabupaten Semarang). *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, 1(1). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/2803>
- Assegaf, R. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam, Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afifatu Rohmawati, (2015), *Efektivitas Pembelajaran*. Jurnal Pendidikan Usia Dini. Vol 9 Ed. 1.
- Bakar, Nur Fardilla Nadia BT Abu. 2018. *Mengkaji Stail Nyanyian Saloma Daripada Perspektif Teknik Vokal Klasikal Barat: Penggunaan Vokal Register*. Skripsi. Pusat Kebudayaan Universiti Malaya Kuala Lumpur.
- Bell Gredler, & Margaret, E. (1991). *Belajar dan Membelajarkan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Bhaskoro, S. B. (2012). *Pelatihan, F. and Pengenalan, F. 'Aplikasi pengenalan gender menggunakan suara'*, Snati pp. 15–16.
- Boud, David. (1995). *Enhancing Learning through Self Assessment*. London and New York: Routledge Falmer Taylor & Francis Group.
- Bintarto, A. Gathut. (2014). Aspek Olah Vokal Musik Klasik Barat pada Musik Populer. *Journey of Urban Society's Arts*. Vol 1(1), 44-56
- Canazza, S., G. De Poli, C. Drioli, A. Roda, & A. Vidolin, "Modeling and control of expressiveness in music performance," *Proc. IEEE Special Issue Eng. Music*, vol. 92, no. 4, pp. 686–701, 2004.
- Cowie, Bronwen & Bell, Beverley. (2010). *A Model of Formative Assessment in Science Education*.  
<https://doi.org/10.1080/09695949993026>
- Djaali. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Edisi I; Cet. III. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djohan. (2005). *Psikologi Musik*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Eldi Fajri dan Desyandri, (2019), *Pembelajaran Seni Musik di Era Globa*. Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan Vol. 8 No. 2.
- Fermita, Marlin Tri. 2013. *Metode Didaktik Solfegio Dalam Peningkatan Kemampuan Bermusik Siswa Di Kelas Musik Non Klasik (MNK) SMKN.1 Somba Opu Kabupaten Gowa*. Diunduh dari <http://eprints.unm.ac.id/5502/>
- Gagne, R.M. (1985). *The Conditions of Learning (4<sup>th</sup>)*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Grolier Incorporated. (1983). *The Encyclopedia Americana International Edition: Desert to Egret, Vol 9*. USA: Grolier Incorporated.
- Heidi Andrade dan Anna Valtcheva, (2009), *Promoting Learning and Achievement Through Self-Assessment, Theory Into Practice*, 48:12-19.
- Hakim, A. R. (2016). 'Analisis Perbandingan Discrete Wavelet Transform , Discrete Cosine Transform dan Fourier Transform pada Proses Pengenalan Pola Suara'. Diunduh dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2767>
- Halimah, Lely. 2016. *Ejournal.upi.edu. Edu Humaniora, Jurnal Pendidikan Dasar.UPI Cibiru*. DOI: <https://doi.org/10.17509/eh.v2i2.2763>
- Hasan, Chadidjah. (2004). *Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Hatimah, Ihat & Sadri. 2008. *Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Hendriana, Yana. (2013). *Program Bantu Identifikasi Penyakit THT*. Yogyakarta: Simposium Nasional Teknologi Terapan (SNTT).
- Jamalus. (1988). *Pengajaran Musik melalui Pengalaman Musik*. Jakarta: Depdikbud.
- Jamalus. (1991). *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Jakarta: Depdikbud.
- Juslin, P.N., & Scherer, Klaus R. (2005). *Vocal Expression of Affect*. Oxford UK: Oxford University Press.
- Juslin, P.N. (2003). "Five facets of musical expression: A psychologist's perspective on music performance," *Psychol. Music*, vol. 31, no. 3, pp. 273–302.
- Jones, L. (2007), *The Student-Centered Classroom*. New York: Cambridge University Press

- Kamil, Mustofa. (2009). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta
- Kumbara, Hendra. (2013). *Bentuk Ekspresi Musikal Kesenian Musik Gambus El Mata di Pekalongan*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Mambili, E. (2004). *The Position of Non-Formal Education in Kakamega District in the Face of Declared Free Primary Education, Accessing Quality Basic Education Through Non-Formal Education*. LIFA Programme Coordinator.
- Marcellina Wurangan, & Sarita. (2017). *Model Pembelajaran Ekspresi Vokal "Broadway" untuk Mahasiswa Jurusan Vokal Kontemporer di Universitas Pelita Harapan*. Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu).
- Miranda, H., Saragih, A.R., Adnan, A., & Haryuna. (2011). *Pengaruh Bising Lingkungan Sekolah Terhadap Kelelahan Bersuara pada Guru Sekolah Dasar Negeri di Kota Medan*. Vol. 41, No 1. Diunduh dari <http://orli.or.id/index.php/orli/article/view/58>
- Muhatir, Rizki Muliono, & Susilawati, (2019). *Analisis Fast Fourier Transform untuk Pengenalan Voice Register Wanita dalam Teknik Bernyanyi*. Journal Of Informatics And Telecommunication Engineering. Vol. 2 No. 2
- Mega Rahmawati Dan Edi Suryadi, (2011), *Guru Sebagai Fasilitator Dan Efektivitas Belajar Siswa*. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 4 No. 1.
- Poetra, Adjie Esa. (2006). *1001 Jurus Mudah Menyanyi*. Bandung: Mizan
- Popham, W. J. (1995). *Classroom Assessment what Teachers Need to Know*. Boston: Allyn and B.
- Reid, G. 2009. *Memotivasi Siswa di Kelas: Gagasan dan Strategi*. Terjemahan Widiastuti, H. 2007. Jakarta: Indeks.
- Rifa'i, Achmad & Tri Anni. Catharina. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Semarang: UNNES Press.
- Riskey Oktavian dan Riantina Fitra Aldya, (2020). *Efektivitas Pembelajaran Daring Terintegrasi di Era Pendidikan 4.0*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 20 No.2.
- Sallyanti.2004. *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Lirik Lagu*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Sanjaya, Wina. (2007). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Predana Media Grup.
- Satiadarma, Monty P. & P. Zahra, Roswiyani. (2004). *Cerdas dengan Musik*. Jakarta: Puspa Swara.
- Simanungkalit, N. (2008). *Teknik Vokal Paduan Suara*. Jakarta: Gramedia.
- Slameto. (2003). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudjana, Nana. (2002). *Dasar-dasar Proses Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sudjana, S HD. (2004). *Pendidikan Nonformal, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Azas*. Bandung: Falah Production.
- Sudira, IN. (2013). *Pengaruh Metode Pembelajaran Drill Terhadap Prestasi Belajar Seni Tari Ditinjau dari Kreativitas pada Siswa Kelas X SMK Negeri 3 Sukawati*. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan Vol 4
- Suharti, Mimi. (2011). *Perkembangan Peserta Didik*. Padang: IAIN IB Press.
- Slavin, R.E. (2000). *Educational Psychology: Theory and Practice*. Sixth Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Supardi, (2013), *Sekolah Efektif, Konsep Dasar dan Praktiknya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sundari F. (2017). *Peran Guru sebagai Pembelajar dalam Memotivasi Peserta Didik Usia SD*. Prosiding Diskusi Panel Pendidikan "Menjadi Guru Pembelajar". Jakarta: UI PGRI.
- Tatang Muhajang dan Monica Desiria Pangestika, (2018). *Pengaruh Literasi Informasi Terhadap Efektivitas Belajar Siswa*, Pedagonal Vol. 2 No 2.
- Utomo, Petrus Haning Tridhora dan S. Suharto. (2016). *Meningkatkan Penguasaan Lagu Dengan Metode Ear Training Pada Pembelajaran Kelas Vokal*. Semarang: E-Print-Sendratasik Unnes
- Woolfolk, A.E. & Nicolich, L.M. (1984). *Educational Psychology for Teacher*. Englewood Cliffs: Prentice Hill Inc.
- Uno, Hamzah, B. (2009). *Teori Motivasi dan Pengukurannya (Analisis di Bidang Pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Welham, Nathan V. dan Maclagan, Margaret A. (2003). *Vocal Fatigue: Current Knowledge and Future Directions*. Elsevier:Journal of Voice 17(1): 21-30
- Widhyatama, Sila. (2012). *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Widmer, G. (2001). "Using AI and machine learning to study expressive music performance: Project survey and first report," AI Commun., vol. 14, no. 3, pp. 149-162.
- Wiggins, G. (1984). *A True Test: Toward More Authentic and Equitable Assessment*. Phi Delta Kappan. 70. (9) 703-713.
- Wintara, I Gusti Agung Dian. (2017). *Simulasi dan Analisis Klasifikasi Genre Musik Berbasis Support Vector Machine*. e-Proceeding of Engineering Vol 4 No. 2.

# DISTRIBUSI DAN KARAKTERISTIK HABITAT PERKEMBANGBIAKAN LARVA *ANOPHELES* DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PIJORKOLING KOTA PADANGSIDEMPUN TAHUN 2021

Oleh :

Rusdiyah Sudirman<sup>1)</sup>, Imam Bachtiar<sup>2)</sup>, Nayodi Permayasa<sup>3)</sup>

<sup>1,3</sup>Kesehatan Masyarakat Universitas Aufa Royhan;

<sup>2</sup>Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar;

<sup>1</sup>rusdiyahmadeali@gmail.com

<sup>2</sup>imamie91@gmail.com

<sup>3</sup>nayodipermayasa@gmail.com

## Abstrak

Malaria masih merupakan masalah di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang merupakan daerah endemis malaria meskipun beberapa daerah telah mencapai target eliminasi. Untuk mempertahankan capaian eliminasi diperlukan strategi melalui ketersediaan data dasar bionomik vektor nyamuk malaria khususnya habitat perkembangbiakan larva. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi habitat perkembang biakan potensial larva *Anopheles*, dan distribusinya melalui pemetaan dengan GPS. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati habitat potensial larva *Anopheles* dan mengamati lingkungan fisik biologinya. Pengamatan larva *Anopheles* dilakukan dengan metode pencidukan larva. Hasil dari penelitian ini adalah jenis habitat perkembangbiakan larva *Anopheles* di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling adalah sawah, kolam ikan, genangan air, parit dan sungai. Suhu air pada habitat perkembangbiakan berkisar 28 – 34 °C, pH air pada semua habitat perkembang biakan berkisar antara 7.4 – 8.2 dengan kadar garam yaitu 0‰. Sebagian habitat perkembangbiakan larva *Anopheles* terkena paparan sinar matahari langsung dan sebagian lagi terlindung sinar matahari. Ditemukan vegetasi berupa tanaman dan predator pada beberapa habitat . Karakteristik habitat perkembang biakan yang ditemukan di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling adalah potensial untuk tempat perkembang biakan larva *Anopheles*

**Kata Kunci** : *Anopheles*; habitat perkembangbiakan; puskesmas Pijorkoling

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia malaria masih merupakan salah satu penyakit yang merupakan masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan kesakitan dan kematian terutama pada kelompok resiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, selain itu malaria juga menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja (Kemenkes RI, 2014).

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah endemis malaria di Indonesia. Secara nasional angka kesakitan malaria selama tahun 2009–2017 cenderung menurun yaitu dari 1,8 per 1.000 penduduk pada tahun 2009 menjadi 0,99 per 1.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2019 terdapat 14 kabupaten/kota dengan persentase pemeriksaan suspek Malaria di Laboratorium mencapai 100%, 2 kabupaten mencapai angka diatas 90% sementara ada 14 Kabupaten/Kota yang tidak ada persentasenya 0%, salah satu diantaranya adalah Kota Padangsidempuan (Profil Kesehatan, 2019)

Provinsi Sumatera Utara menargetkan akan mencapai eliminasi malaria pada tahun 2020, Padangsidempuan adalah salah satu daerah yang telah mencapai target eliminasi malaria. Meskipun beberapa daerah telah mencapai target eliminasi namun pola penularan kasus malaria di Provinsi Sumatera Utara telah terjadi penularan setempat (indigenous ). Hal ini dipengaruhi berbagai faktor

termasuk lingkungan memungkinkan terjadinya peningkatan penderita setiap waktu (Hakim, 2018)

Diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan capaian eliminasi. Salah satu strateginya yaitu dengan pengendalian vektor berdasarkan informasi bionomik vektor (evidence based) . Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai bionomik vektor nyamuk malaria di kota Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi habitat perkembangbiakan potensial larva *Anopheles*, dan distribusinya melalui pemetaan dengan GPS di UPT puskesmas Pijorkoling Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dasar dalam upaya pengendalian penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk terutama penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk *Anopheles spp* di Padangsidempuan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling kota Padangsidempuan pada bulan Juni-Juli 2021. Survey habitat perkembangbiakan dilakukan dengan cara observasi pada semua jenis perairan yang dianggap potensial sebagai habitat perkembangbiakan larva baik

permanen maupun temporer. Pengumpulan larva dilakukan menggunakan cidukan sebanyak 10 kali untuk setiap habitat. Data mengenai karakteristik habitat berupa suhu, salinitas, pH dan vegetasi dicatat pada lembar observasi. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar. Pemetaan dilakukan dengan mengambil titik pada habitat perkembang biakan menggunakan GPS dan kemudian overlay dalam bentuk peta distribusi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Habitat Perkembangbiakan Potensial Larva *Anopheles sp* Berdasarkan hasil penelitian di peroleh 20 titik sampel yang berpotensi sebagai habitat perkembang biakan yang potensial untuk perkembang biakan larva *Anopheles* berupa sungai, parit, genangan air, kolam ikan dan sawah. Dari keseluruhan total habitat perkembangbiakan potensial yang ditemukan terbanyak pada parit dengan jumlah 10 habitat dan kemudian paling sedikit ditemukan habitat perkembang biakan berupa sungai dan kolam ikan. Jumlah habitat perkembangbiakan yang ditemukan dapat dilihat pada pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah habitat *Anopheles sp* yang ditemukan di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling Kota Padangsidempuan

Tempat perkembangbiakan nyamuk *Anopheles* adalah genangan-genangan air, baik air tawar maupun air payau, tergantung dari jenis nyamuknya. Tipe tempat perkembangbiakan sesuai dengan tempat spesies *Anopheles* tertentu. Habitat perkembang biakan yang ditemukan pada lokasi penelitian berbeda-beda jenisnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latumanuwu (2013) di kota Ambon yang menemukan breeding site yang berbeda, yaitu selokan, kolam, rawa-rawa dan tapak ban. Penelitian lain yang sejenis juga dilakukan oleh Nurhelmi (2012) di Kecamatan Wonomulyo yang menemukan habitat perkembangbiakan nyamuk *Anopheles* juga berbeda-beda, dimana umumnya berkembang biak di sawah, saluran irigasi, kolam, rawa-rawa yang terlindung, sungai aliran rendah, saluran air serta mata air terlindung dan berumput.

Dari duapuluh titik habitat perkembang biakan jentik yang potensial, tidak satupun ditemukan adanya larva *Anopheles*, hal ini kemungkinan diakibatkan pada saat pengambilan sampel sedang memasuki musim hujan sehingga air yang terisi pada habitat perkembangbiakan adalah air

baru. Berdasarkan pengukuran suhu air pada setiap habitat perkembang biakan ditemukan rata-rata suhu air yaitu 28 – 34 °C, sementara hasil pengukuran untuk pH air pada semua habitat perkembang biakan berkisar antara 7.4 – 8.2. Salinitas air pada habitat perkembang biakan yaitu 0 0/00 yang menandakan bahwa semua perairan yang diperiksa adalah air tawar karena lokasi pengambilan sampel merupakan perbukitan dataran rendah. Data pengukuran suhu, pH dan salinitas air dapat dilihat pada Tabel.1.

Suhu air pada breeding site merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam perkembangbiakan larva *Anopheles*. Suhu air sangat berpengaruh pada perkembangbiakan larva, umumnya larva lebih menyukai tempat yang hangat. Hasil penelitian pengukuran suhu air terhadap 20 titik diperoleh hasil pengukuran berkisar antara 28 - 34°C. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syarifa pada tahun 2002 dinyatakan bahwa rata-rata suhu tempat perindukan yang paling banyak ditemukan larva *Anopheles* berkisar antara 28,9°C – 33,8 °C. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman (2011) menemukan suhu rata-rata habitat perkembangbiakan berada pada kisaran 25-30°C yang tingkat kepadatan larva tertinggi berada pada suhu 27°C. Ini sejalan juga dengan penelitian Shinta (2012) yang menemukan bahwa karakteristik lingkungan fisik perairan pada habitat perkembangbiakan larva nyamuk di Pulau Sekanak memiliki suhu 31-33 °C. Adanya perbedaan suhu breeding site yang di temukan oleh peneliti seperti pada tabel 1 disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi dimana ada perindukan yang memiliki tanaman pelindung disekitar breeding site dan ada juga yang tidak mempunyai tanaman pelindung sehingga memungkinkan terjadi penyinaran matahari secara terus menerus (terkena sinar matahari langsung). Selain itu Pengukuran suhu yang tinggi diduga karena dipengaruhi oleh waktu pengukuran suhu pada breeding site di lokasi penelitian ini cuaca dalam keadaan panas

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil pengukuran salinitas pada 20 titik dengan 5 jenis breeding site adalah 00/00. Hal tersebut menunjukkan bahwa air yang terdapat pada habitat termasuk tipe air tawar. Hal ini sesuai dengan penelitian Sandy (2016) di kabupaten Tambora Papua Barat dengan hasil pengukuran kadar salinitas pada semua breeding site 00/00 begitupula dengan hasil penelitian Mayasari (2020) di Ogan komeringhulu. Di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling ditemukan salinitas rendah atau nol pada habitat perkembang biakan jentik *Anopheles* karena dipengaruhi oleh kondisi topografi dimana wilayah kerja puskesmas Pijorkoling secara topografis berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit serta dilalui oleh sungai dan anak sungai dengan ketinggian diatas permukaan laut 260 – 1100 meter. Letak topografi juga mempengaruhi salinitas habitat perkembang biakan. Pada daerah dengan topografi

yang tinggi seperti pegunungan memiliki kadar salinitas 00/00 berbeda dengan habitat yang ditemukan pada topografi rendah yang berdekatan dengan laut, kadar salinitas biasanya di pengaruhi oleh permukaan air laut.

Perkembangbiakan nyamuk *Anopheles* terutama pada tiga stadium akuatik sangat dipengaruhi oleh pH tempat perkembangbiakan nyamuk. Tinggi rendahnya pH air sangat dipengaruhi oleh kandungan mineral lain yang terdapat dalam air. Berdasarkan hasil pengukuran pH terhadap 20 titik di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling berkisar antara pH 7.4-8,2 yang merupakan nilai ideal untuk habitat perkembangbiakan jentik *Anopheles*. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahman (2011), Pada variabel pH menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan pH dengan densitas larva di Wilayah Puskesmas Durikumba. Sejalan pula dengan hasil penelitian Mofu (2015) di wilayah kerja Puskesmas Hamadi dengan rata-rata pH pada breeding habitat yaitu 7.2 masih merupakan batas kadar normal dan optimal sebagai habitat perkembangbiakan *Anopheles*. Hal ini juga didukung oleh pendapat Effendi (2003), bahwa sebagian besar biota akuatik menyukai nilai pH antara 7-8,5. pH air mempunyai peranan penting bagi perkembangbiakan larva *Anopheles*. Larva *Anopheles* dalam pertumbuhannya pada breeding site dapat hidup pada pH yang rendah yaitu pH di bawah tujuh, semakin tinggi pH melebihi pH yang optimum untuk perkembangbiakan nyamuk maka larva akan mati. pH air sangat dipengaruhi oleh musim, hal ini berdampak pada kehidupan nyamuk *Anopheles*.

Tabel. 1 Karakteristik habitat perkembangbiakan (suhu, pH dan salinitas air) di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling kota Padangsidempuan tahun 2021

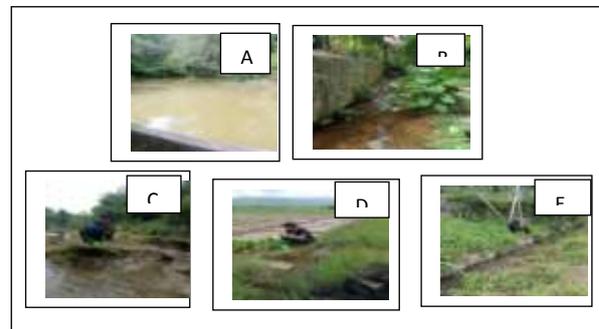
Jenis Habitat	Suhu (°C)	pH	Salinitas (0/00)	Rata-rata kepadatan jentik/ciudukan	Keterangan
Kolam Ikan	28.8	7.9	0	0	Potensial
Genangan 1	28.2	7.9	0	0	Potensial
Parit 1	28.6	7.1	0	0	Potensial
Parit 2	28	7.2	0	0	Potensial
Parit 3	30.4	7.6	0	0	Potensial
Parit 4	33	7.9	0	0	Potensial
Sungai	28.8	8.2	0	0	Potensial
Genangan 2	31.4	7.7	0	0	Potensial
Sawah 1	31.9	7.4	0	0	Potensial
Parit 5	33.4	7.9	0	0	Potensial
Parit 6	29.4	7.6	0	0	Potensial
Genangan 3	29.7	7.8	0	0	Potensial
Parit 7	28.2	7.9	0	0	Potensial
Genangan 4	28.9	7.8	0	0	Potensial
Parit 8	29.4	7.6	0	0	Potensial
Genangan 5	30.6	7.7	0	0	Potensial
Sawah 2	30.9	7.9	0	0	Potensial
Parit 9	29.9	8.2	0	0	Potensial
Parit 10	30.4	7.8	0	0	Potensial
Sawah 3	34	8.1	0	0	Potensial

Pengamatan karakteristik habitat perkembangbiakan dilihat dari vegetasi, terkena sinar matahari langsung atau tidak, keberadaan predator dan kekeruhan air dapat dilihat pada Tabel. 2. Dari tabel menunjukkan bahwa habitat perkembang biakan potensial habitat larva *Anopheles* ada yang terlindung

(tidak terkena sinar matahari langsung) maupun yang tidak terlindung (terkena matahari langsung). Pada pengamatan lingkungan fisik, ditemukan adanya tanaman pada habitat perkembangbiakan berupa tanaman kangkung, keladi dan rerumputan serta ada pula sebagian habitat yang tidak memiliki vegetasi air. Kondisi air sebagian besar jernih, adanya predator yang ditemukan berupa ikan dan kecebong. Karakteristik vegetasi pada Jenis habitat yang ditemukan dapat dilihat pada Gambar 2

Tabel. 2 Karakteristik habitat perkembangbiakan potensial larva di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling kota Padangsidempuan tahun 2021

Jenis Habitat	Sinar matahari	Vegetasi	Predator
Kolam Ikan	Tidak langsung	Kangkung	Ada
Genangan 1	Tidak langsung	Kangkung, Keladi	Ada
Parit 1	Langsung	Tdk ada	Ada
Parit 2	Tidak langsung	Keladi	Ada
Parit 3	Langsung	Tdk ada	Tdk ada
Parit 4	Langsung	Kangkung	Tdk ada
Sungai	Langsung	Tdk ada	Ada
Genangan 2	Langsung	Tdk ada	Ada
Sawah 1	Langsung	Tdk ada	Tdk ada
Parit 5	Langsung	Kangkung	Ada
Parit 6	Langsung	Tdk ada	Tdk ada
Genangan 3	Langsung	Rumput	Ada
Parit 7	Tidak langsung	Tdk ada	Tdk ada
Genangan 4	Tidak langsung	Rerumputan	Tdk ada
Parit 8	Langsung	Tdk ada	Tdk ada
Genangan 5	Tidak langsung	Rerumputan	Tdk ada
Sawah 2	Langsung	Rerumputan	Tdk ada
Parit 9	Langsung	Tdk ada	Tdk ada
Parit 10	Tidak langsung	Rumput	Tdk ada
Sawah 3	Langsung	Padi	Tdk ada



Gambar 2. Habitat perkembangbiakan potensial jentik *Anopheles*, (A) Kolam ikan, (B) Genangan air, (C) Sungai, (D) Sawah, (E) Parit yang ditemukan di UPTD Puskesmas Pijorkoling, Kota Padangsidempuan

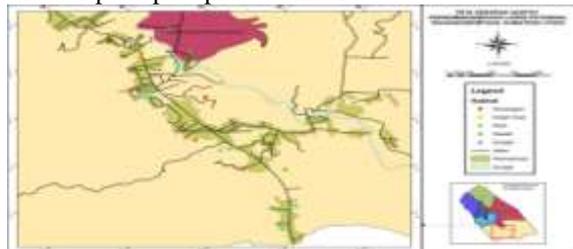
Tumbuhan sangat berpengaruh terhadap kehidupan nyamuk antara lain sebagai tempat meletakkan telur, tempat berlindung, tempat mencari makan dan berlindung bagi jentik (Depkes R1 2004). Tumbuh-tumbuhan atau vegetasi yang ditemukan pada breeding site yang potensial adalah rumput, kangkung dan tanaman keladi. Hasil penelitian Sandy (2016), dkk menemukan jenis tanaman di sekitar habitat yaitu algae, lumut hijau, kangkung (*Ipomoea aquatica*), enceng gondok (*Eichornia crassipes*) dengan kerapatan tanaman agak jarang. Sejalan dengan penelitian Mayasari (2020) yang menemukan padi, rumput dan kangkung pada habitat

perkembangbiakan jentik *Anopheles* di Ogankomeringhulu. Keberadaan vegetasi dapat meningkatkan keberadaan jentik karena bisa menjadi tempat bersembunyi dan makanan bagi jentik. Pada umumnya tempat perkembangbiakan nyamuk *Anopheles* di Indonesia dicirikan dengan adanya vegetasi dipermukaan badan air (Idham,2002)) sejalan dengan hasil penelitian Putri (2021) di desa Hanura Lampung Selatan menunjukkan keberadaan tumbuhan berkorelasi positif terhadap kepadatan jentik.

Dari hasil penelitian habitat potensial jentik *Anopheles* terdapat habitat yang terkena sinar matahari langsung dan tidak terkena sinar matahari langsung (terlindung). Pada penelitian ini semua habitat tidak ditemukan larva *Anopheles*, hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Latumaui (2013) di kota Ambon yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan pencahayaan dengan keberadaan larva *Anopheles*. Beberapa jenis nyamuk *Anopheles* menyukai tempat istirahat yang dipengaruhi oleh sinar matahari seperti contoh larva *An.sundaicus* menyukai tempat teduh berbeda dengan jentik *An. koliensis* banyak dijumpai pada genangan air sementara dengan paparan sinar matahari langsung (Sandy, 2016).

Pada breeding site di lokasi penelitian terdapat habitat dimana ditemukan predator berupa ikan dan kecebong sehingga ini menjadi alasan tidak ditemukannya larva. Keberadaan ikan pada tempat perindukan mempengaruhi larva nyamuk, makin banyak ikan maka kepadatan larva semakin kecil dan makin sedikit ikan maka kepadatan larva semakin besar. Keberadaan hewan akuatik dapat berpotensi menjadi musuh alami (predator) yang dapat mengurangi jumlah populasi larva nyamuk di tempat perindukan. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernamiyanti (2010) yang menemukan tingginya kepadatan larva *Anopheles* spp. pada breeding site berupa selokan tenang diduga karena musuh alami (predator) pada stasiun ini tidak ada, sehingga produktivitas larvanya tinggi .

Distribusi Habitat Perkembangbiakan Potensial Larva *Anopheles* sp Identifikasi distribusi habitat perkembang biakan potensial larva *Anopheles* sp dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) berdasarkan pada titik koordinat yang tersebar pada peta pada Gambar 3



Gambar 3. Peta distribusi habitat perkembang biakan potensial larva *Anopheles* UPTD Puskesmas Pijorkoling, Kota Padangsidempuan, 2021

Pada pemetaan yang dilakukan di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling ditemukan breeding site potensial tersebar hampir merata diseluruh wilayah yang menandakan bahwa daerah tersebut berpotensi untuk terjadinya persebaran kasus malaria

#### 4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jenis habitat perkembangbiakan *Anopheles* di wilayah kerja puskesmas Pijorkoling adalah sawah, sungai, kolam ikan, genangan air dan parit. Suhu air pada habitat perkembangbiakan berkisar antara 28 – 34 °C, pH air pada semua habitat perkembang biakan berkisar antara 7.4 – 8.2 dengan salinitas yaitu 0 0/00. Seluruh habitat perkembangbiakan *Anopheles* terkena paparan sinar matahari langsung. Kadar garam pada habitat perkembangbiakan yaitu 0‰. dengan memiliki pH masing-masing pada habitat yaitu 6-8. Dengan demikian karakteristik habitat perkembang biakan yang ditemukan di wilayah kerja puskesmas Siabu adalah potensial untuk tempat perkembang biakan jentik *Anopheles*.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai fauna nyamuk *Anopheles* dewasa di wilayah kerja puskesmas Siabu untuk lebih melengkapi vektor di daerah tersebut sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengendalian vektor malaria ke depannya

#### 5. REFERENSI

- Depkes RI. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 2019
- Depkes RI. Pedoman Ekologi dan Aspek Perilaku Vektor. Jakarta: Jakarta : Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman; 2004
- Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Kanisius, Yogyakarta
- Ernamiyanti, Kasry A, Abidin Z. Faktor-Faktor Ekologis Habitat Larva Nyamuk *Anopheles* Di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2009. J Environ Sci. 2010;2(4):92–102.
- Hakim L, Hadi UK, Sugiarto. Kajian Pengendalian Malaria di Provinsi Sumatera Utara dalam Upaya Mencapai Eliminasi Malaria Study of Malaria Control to Achieve Malaria Elimination in North Sumatera Province. Vektor penyakit. 2018;II(1):47–56
- Idram NI, Sudomo M, Djana I, Empi S. Fauna *Anopheles* Di Tapanuli Selatan Dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bul Penelit Kesehat. 2002;30(4 Des)
- Kemenkes RI. Indonesia Malaria Report 2014. Jakarta; 2014.
- Latumanuwu Lesly . Karakteristik lingkungan dan densitas larva *Anopheles* sp terhadap kejadian malaria di wilayah puskesmas

- CH.M.Tiahahu kota Ambon Tahun 2013.  
Tesis: Pascasarjana Universitas Hasanuddin,  
Makassar
- Mayasari R, Amlarrasit A, Sitorus H, Santoso S.  
Karakteristik Distribusi Dan Habitat  
Anopheles Spp. di Kelurahan Kemelak  
Bindung Langit, Kabupaten Ogan Komering  
Ulu Tahun 2018. *Spirakel*. 2020;12(2):69–78
- Mofu RM. Hubungan Lingkungan Fisik, Kimia dan  
Biologi dengan Kepadatan vektor Anopheles  
di Wilayah Kerja Puskesmas Hamadi Kota  
Jayapura. *J Kesehat Lingkung Indones*.  
2015;12(2):120-126–126
- Nurhelmi. Faktor Risiko Tempat Perkembangbiakan  
Vektor Malaria Terhadap Kejadian Malaria di  
Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali  
Mandar Tahun 2011 [Skripsi]. Makassar :  
Kesehatan Masyarakat Universitas  
Hasanuddin
- Putri DF, Husna I, Hermawan D, Firmansyah F.  
Korelasi Karakteristik Ekologi Tempat  
Perindukan Vektor Malaria Dengan  
Kepadatan Larva Anopheles Spp DI DESA  
HANURA KABUPATEN PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG 2019. *J Med  
Malahayati*. 2021;5(1):8–20
- Rahman R, Ishak H, Ibrahim E. Hubungan  
Karakteristik Lingkungan Breeding Site  
Dengan Densitas Larva Anopheles di  
Wilayah Kerja Puskesmas Durikumba  
Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah.  
2011;1– 14.
- Sandy S, Sasto I, Wike I. Survei Entomologi  
Anopheles spp di Kampung Bikar dan  
Kampung Kwor Kabupaten Tambrau,  
Papua Barat. *JHECDs J Heal Epidemiol  
Commun Dis*. 2016;2(1):19–27.
- Shinta, dkk. Bionomik Vektor Malaria Nyamuk  
Anopheles sudaicus dan Anopheles letifer di  
Kecamatan Belakang Padang, Batam,  
Kepulauan Riau. *Buletin Penelitian  
Kesehatan*, 2012;40(1)
- Syarifah A. Studi Ekologi Vektor Malaria di  
Wilayah Kerja Puskesmas Toaya Kecamatan  
Sindue Kabupaten Donggala [Skripsi].  
Makassar : Kesehatan Lingkungan FKM  
Unhas, 2002

## PENGGUNAAN *DESIGN THINKING* UNTUK INOVASI PRODUK FASHION BRAND LOKAL DARI YOIKOTO

Oleh:

Anindita Nurjihan Dwi T<sup>1)</sup>, Iwan Sukoco<sup>2)</sup>,  
<sup>1,2</sup>Magister Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran  
<sup>1</sup>anindita20001@mail.unpad.ac.id  
<sup>2</sup>iwan.sukoco@unpad.ac.id

### Abstrak

Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sampai saat ini memberikan dampak pada semua pelaku bidang usaha sehingga perlu melakukan sebuah terobosan atau inovasi agar terus mampu bersaing. Sehingga kompleksitas yang dihadapi dapat menuntut pemecahan masalah yang solutif dan mampu diterapkan dengan baik dalam menjawab segala hambatan dan tantangan yang dirasakan. Salah satu metode yang hadir dan dapat digunakan ialah *design thinking* dengan menganalisis lima tahapan seperti *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype* dan *test*. Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk menjelaskan penggunaan *design thinking* dalam usaha bisnis jasa logistik dengan metode analisis deskriptif menggunakan jenis *literature review* untuk memaksimalkan penggunaan data. Hasil yang diperoleh ialah penerapan *design thinking* dapat dijadikan acuan metode bagi Yoikoto dalam mengembangkan bisnis yang mereka jalani. Sejauh analisis dilakukan, *design thinking* bisa menjadi metode untuk pengembangan strategi membangun *brand* Yoikoto.

**Kata kunci:** *Design thinking*, Bisnis mode, Pemecahan masalah

### 1. PENDAHULUAN

Pada zaman modern fashion menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya sehari-hari. Benda-benda seperti baju dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekadar penutup tubuh dan hiasan, lebih dari itu juga menjadi sebuah cara untuk mengekspresikan diri seseorang. Zaman modernisasi saat ini bisa memberikan peluang dan juga tantangan bagi para pelaku bisnis. Saat ini clothing lokal di kota Bandung menghadapi persaingan yang sangat berat, bukan hanya dari sesama lokal namun juga dari brand luar negeri dengan pangsa pasar anak muda.

Sedangkan dalam masyarakat di zaman modern, gaya hidup (*lifestyle*) membantu mendefinisikan mengenai sikap, nilai-nilai, kekayaan, serta posisi sosial seseorang (Chaney, 2004). Menurut data BEKRAF industry fashion berada peringkat dua, menunjukkan bahwa industri kreatif di bidang fashion ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, kontribusi yang cukup besar dari industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDP) membuat pemerintah sadar bahwa industri kreatif merupakan sumber ekonomi yang harus bahkan wajib dikembangkan dalam ekonomi nasional.

Dalam perkembangan zaman pada revolusi industri 4.0 sudah semua memulai serba *online*, maka dari itu yang membuat hampir semua pelaku usaha agar dituntut untuk memanfaatkan fasilitas *social media* sebagai alat untuk mereka berjualan. *Social media* yang sedang marak dipakai oleh masyarakat salah satunya adalah Instagram, sebagai salah satu *social media* yang dapat menjadi pasar yang paling potensial dengan total pengguan sebanyak 40 juta

jiwa, dan Negara Indonesia merupakan pasar terbesar di asia.

Yoikoto adalah salah satu usaha atau UMKM dibidang fashion yang berdomisili di Kota Bandung. Konsep dari Yoikoto ini menjual pakaian yang bertujuan untuk bisa dipakai segala kalangan wanita yang berhijab atau tidak berhijab, bisa di sebut juga sebagai “Hijab Friendly” cocok untuk di gunakan sebagai pakaian sehari-hari maupun formal dengan desain yang dirancang oleh ownernya secara simple dan elegant sehingga memungkinkan produk yang ia tawarkan tidak akan banyak model yang sama dengan penjual lainnya.

Yoikoto ini berdiri sejak 2020 dengan modal yang tidak seberapa. Yoikoto ini memfokusnya penjualan melalui Shopee dikarenakan e-commerce ini sudah membuat kepercayaan pada konsumennya dengan transaksi yang aman.

### 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis *literature review* dengan metode analisis deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan penjabaran suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sugiyono, 2011).

Penggunaan data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan melakukan analisis dari sumber-sumber yang relevan baik dari buku, jurnal, website, dll. Pembahasan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode *design thinking* dengan melakukan analisis pada lima tahapan *design thinking* yaitu: *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype* dan *test*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cabut Kost merupakan sebuah *brand* yang berdiri di Kota Bandung pada Juni 2020 dan digagas oleh Gibran Siswantoro. Cabut Kost bergerak pada bidang jasa logistik yang menjual pelayanan pengemasan dan pengiriman barang dari rumah kost khususnya mahasiswa yang ingin pindah baik ke tempat ataupun kota lain.

#### Empathy

Tahapan pertama yaitu *emphaty*, dalam proses ini yaitu bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungannya guna memahami apa yang diperlukan. Pada tahapan pertama, menurut pandangan penulis yang telah mengidentifikasi Yoikoto bahwa terdapat masalah mulai dari penawaran yang kurang dari suatu permintaan, kurangnya pemasaran yang inovatif untuk menarik konsumen dan kurangnya berkolaborasi.

#### Define

Tahapan kedua yaitu *define*, dalam proses ini yaitu bagaimana cara menentukan masalah dengan fokus terhadap user yang spesifik berdasarkan kebutuhan pengguna. Setelah melalui tahapan pertama yaitu *emphaty*, penulis mendefinisikan masalah yang dirasakan oleh Yoikoto ini terdapat pada stok produk masih terbatas dan pemasaran yang masih kurang menarik banyak konsumen.

#### Ideation

Tahapan ketiga yaitu *ideation*, dalam proses ini lebih kepada melakukan analisis terhadap banyaknya minat terhadap produk Yoikoto ini terkendala di stok yang diproduksi oleh Yoikoto sendiri karena budget yang diperolehnya masih awal-awal. Sehingga memunculkan ide untuk membuka sistem pre-order untuk meningkatkan daya belinya. Selain itu ide selanjutnya dengan diadakan kolaborasi dengan orang-orang terdekat dengan pemilik Yoikoto dan orang-orang yang sudah terkenal.

#### Prototype

Tahapan keempat yaitu *prototype*, dalam proses ini lebih kepada bagaimana Mengaplikasikan ide-ide yang sudah dikumpulkan ke dalam bentuk fisik, berupa catatan atau storyboard. Kendala di kurangnya stok produk di usaha Yoikoto ini salah satunya jikalau belum bisa memperbanyak stok akan diadakannya sistem pre-order. Dengan ditampungnya konsumen yang akan memesan dengan uang yang masuk duluan lalu produk akan segera di proses.

Selain itu akan diadakan kolaborasi dengan menggunakan cara :

- Apabila orang yg terdekat dengan pemilik usaha ini, menawarkan kerjasama dengan desain yang mereka punya bahan diluar dari Yoikoto
- Endorse Selebgram/orang yang sudah terkenal, menawarkan produk Yoikoto untuk di promosikan di media sosial yang mereka punya.

#### Test

Tahapan terakhir yaitu *test*, dalam proses ini merupakan peluang untuk memperbaiki solusi yang ada dan membuatnya menjadi lebih baik lagi. Sebagai

usaha dalam bidang fashion, tawaran produk dari yoikoto yang merupakan self-manufacturing merupakan suatu hal yang unik sehingga penjual masih jarang memproduksi barang yang sama dengan Yoikoto, selain dari model mungkin dari bahan yang berbeda dan dari segi harga Yoikoto ini ramah di kantong mahasiswa. Sampai saat ini harga masih di bawah Rp 200rb dengan kualitas yang bagus.

Untuk menentukan keberhasilan sebuah konsep yang dirancang Cabut Kost jangan hanya mencari keuntungan semata saja, tapi juga harus memberikan nilai lebih (*value added*) bagi penggunaannya, dengan melakukan terobosan yang dapat menyelesaikan masalah disekitar, cara ini dilakukan untuk strategi membangun dan mengembangkan sebuah *brand* yang baik, berjangka panjang, dan dapat bersaing dengan *platform* lainnya.

Berikut adalah gambar kesimpulan dari pembahasan lima tahapan *design thinking* pada *brand fashion* Yoikoto yaitu: *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype* dan *test* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Analisis Penggunaan *Design Thinking* Sumber: Data diolah (2021)

### 4. SIMPULAN

Dilihat dari semua penjelasan ini dalam menggunakan metode *design thinking* pada penerapannya akan dilakukan dengan kelima tahapan yaitu *emphaty*, *define*, *ideation*, *prototype*, dan *test* dapat mengetahui apa potensi dan inovasi yang lebih mendalam bagi usaha Yoikoto inidn tentunya juga cara untuk mengembangkan usaha tersebut. Di sisi lain penggunaan metode *design thinking* dapat memberikan sebuah gambaran rencana ataupun solusi yang lebih mudah, fleksibel, terstruktur dan yang terpenting dapat memberikan jawaban atas kebutuhan dari konsumen.

### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Brown, T. (2009). *Change by Design*. New York: Harper Collins.
- Brown, T. (2013). *Design Thinking*. Harvard Business Review, pp. 1-11.
- Carlgrén Lisa, Maria Elmquist & Ingo Rauth. (2016). *The Challenges of Using Design Thinking in*

- Industry-Experiences from Five Large Firms.  
John Willey & Son Ltd.
- EradatifamMahdi,Heydarabati Sahar, Shahbazi Aida.  
The Impact of Design Thinking on Innovation.  
*Journal of Design Thinking*, 1(1): 49-60.
- Glinski, P. 2012. *Design Thinking and The Facilitation Process*. Collaborative Design Workshop. NSW, Australia.
- Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing, *Journal of Marketing*, 58(3): 20-38.
- Purnomo, Dwi.(2013). Konsep *Design Thinking* bagi Pengembangan Rencana Program dan Pembelajaran Kreatif dalam Kurikulum berbasis Kompetensi. *Konferensi Nasional Inovasi dan Technopreneurship*, Halaman 1-6.
- Satgas Covid-19 Kota Bandung. (2021). Pusat Informasi Covid-19 Kota Bandung. (online) <https://covid19.bandung.go.id/> (Diakses pada 25 Mei 2021).
- Sugangga, Rayan. (2020). Pengembangan Produk Menggunakan Design Thinking Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akademika*, 18(2): 82-86.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Zaki,Ahmad &Sukoco, Iwan. (2018) Use of Design Thinking at Digital Technology Consultant Company Indie Labtek Bandung. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2): 123-129.

# STRATEGI KERJASAMA PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT GUNA MENGHADAPI ANCAMAN KONFLIK LAUT CINA SELATAN DALAM RANGKA MENJAGA HAK BERDAULAT NKRI

Oleh :

**Bambang Wasito<sup>1)</sup>, Surya Wiranto<sup>2)</sup>, Gentio Harsono<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

## Abstrak

Konflik Laut China Selatan (LCS) menjadi perhatian karena merupakan batas negara dan memiliki potensi sumber daya alam. Amerika Serikat pada bulan Juli 2020 menolak klaim sengketa China untuk sumber daya lepas pantai pada wilayah tersebut sehingga meningkatkan latihan dan patrolinya sebagai bentuk kebebasan navigasi. Indonesia sebagai kawasan Indo-Pasifik juga mengerahkan strategi geopolitik dengan dengan Amerika dalam rangka menjaga kedaulatan negara sehingga perlu diketahui faktor dan setrategi Kerjasama pertahanan antara kedua negara dalam rangka menghadapi konflik LCS. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan ex post facto. Data penelitian diperoleh dengan wawancara, observasi dan studi literatur. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi dan dianalisa menggunakan alur sesuai teori Hubberman dan Saldana (2014) menggunakan SWOT, PESTLE serta AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan faktor internal yang dapat meningkatkan maupun menghambat kerjasama adalah adanya lembaga pengelolaan kerjasama sumber daya dengan skor 1,9. Kelemahan faktor internal adalah ego sectoral dengan nilai 1,89 namun dapat ditutupi oleh kekuatan berdasarkan matriks IFAS. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah politik bebas aktif dengan skor Matriks EFAS adalah 4. Penghitungan AHP menunjukkan bahwa strateginya adalah SO (Strenghts-Opportuniny) yang menduduki ranking pertama dengan nilai 0,50 yaitu pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia dengan memaksimalkan kemampuan Lembaga negara sesuai dengan budaya politik, memaksimalkan pengawasan dan pengendalian Lembaga sesuai isu internasional serta Kerjasama dan penilaian secara intensif.

**Kata Kunci:** Kerjasama, Indonesia-Amerika, Laut Cina Selatan, Kedaulatan

## 1. PENDAHULUAN

Konflik Laut China Selatan (LCS) dewasa ini kian menjadi perbincangan hangat dikarenakan proses sengketa kepemilikan yang belum juga selesai. Enam negara yang terlibat mengklaim wilayahnya di LCS yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam dan Malaysia. Indonesia dalam hal ini bukan merupakan negara claimant dalam konteks kepemilikan LCS. Hasil dari putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag terkait LCS semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut (Sire, 2019).

Sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan politik luar negeri yang “bebas aktif”, Indonesia memahami kerumitan dari konflik LCS. Selain itu, masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara (sovereignty), termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia agar meminimalisir konflik yang terkait dengan batas wilayah. Sire (2019) menjabarkan bahwa salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan (*diplomacy border*) agar

terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan aktifitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna, sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah tersebut. Namun, Indonesia tetap mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan antar negara terutama masalah wilayah perbatasan.

Amerika Serikat pada bulan Juli 2020 menolak klaim sengketa China untuk sumber daya lepas pantai di sebagian besar LCS. Palsanya, China tidak memberikan dasar hukum yang koheren untuk ambisinya di LCS. Perkembangan di LCS telah berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan dan mengganggu terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional sehingga Amerika mengambil langkah untuk melakukan Kerjasama dengan beberapa negara termasuk Indonesia untuk menjaga perdamaian. Indonesia juga berencana membeli alutsista dan kerjasama diklat lainnya dengan AS, maka benar undangan AS pada Menhan salah satu manuver untuk meyakinkan Indonesia agar bisa menggunakan fasilitas lanud (pangkalan udara) bagi pesawat udara intai AS. Secara geostrategis, Indonesia memiliki posisi penting bagi pihak-pihak yang bersitegang (Sukmadewi, P., 2019). Maka dari itu, peneliti ingin mengangkat penelitian terkait dengan Kerjasama pertahanan di LCS dengan judul “Strategi Kerjasama Pertahanan RI dan AS guna

Menghadapi Ancaman Konflik Laut China Selatan (LCS) dalam Rangka Menjaga Hak Berdaulat NKRI”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method yang merupakan metode campuran yang menggabungkan jenis desain kualitatif dan kuantitatif (Subedi, 2016). Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif dan Ex Post Facto yaitu meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor peningkatan atau penghambat kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam konflik LCS. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni hingga September 2021 dengan sumber dan jenis data primer serta sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner pada informan dari Kementerian Pertahanan RI dan Mabes TNI yang kemudian didukung dengan observasi dan studi literatur. Analisis data menggunakan teori kerjasama internasional dan analisa SWOT-ANP dalam penentuan faktor yang berpengaruh.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor peningkatan dan penghambatan Kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat dalam menghadapi konflik LCS

Data sejarah nasional menyebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan dengan berbagai negara sahabat, dengan esensi tujuannya adalah sebagai salah satu cara untuk mencegah konflik yang mungkin akan terjadi. Satu diantara dari kerjasama pertahanan tersebut adalah kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika yang sudah terjalin secara resmi sejak 1949 dan terselenggara dengan penuh dinamika sesuai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika yang mencakup berbagai bidang dipandang sebagai langkah strategis sebagai solusi untuk menghadapi ancaman konflik yang terjadi di Laut China Selatan saat ini namun demikian output dari kerjasama pertahanan tersebut belum mampu meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan Indonesia, maka dari itu diperlukan suatu upaya untuk mengoptimalkan kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika tersebut.

Kriteria faktor dianalisa berdasarkan pendapat Asan dkk. (2002) mengenai kepentingan faktor pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sumber daya dalam implementasi strategi. Analisa faktor internal organisasi dapat dilihat dari kapasitas sumber daya manusia, prosedur pengendalian dan pengawasan, Lembaga atau organisasi pengelola sumber daya dan Lembaga penilaian Kerjasama.

Bobot tertinggi terdapat pada penilaian strategi kerjasama dan analisa kepentingan. Tiap lembaga yang memiliki fungsi dalam pelaksanaan strategi kerjasama pada dasarnya telah memiliki

sarana prasarana yang diperlukan. Pengelolaan dan pengawasan terhadap fasilitas yang telah ada harus dapat dilakukan secara optimal melalui kerjasama antara kedua lembaga besar yaitu TNI dan Kementerian Pertahanan. Selain itu, Diplomasi pertahanan merupakan upaya penting untuk mempersiapkan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman serta mempertahankan keyakinan dalam pembangunan demokrasi. Kerja sama Pertahanan Indonesia dan AS secara historis menjadi bagian penting dari hubungan kedua negara dengan tingkat kerjasama yang baik dalam membangun hubungan pribadi dan membentuk jaringan yang dapat memperkuat kerja sama militer di masa depan yang akan datang. Dinamika konflik di Laut China Selatan saat ini menunjukkan kecenderungan sulitnya menemukan sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga diperlukan forum dalam memfasilitasi kepentingan tersebut.

Prioritas kerja sama internasional dilakukan dengan meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral dengan meningkatkan langkah membangun kepercayaan yang dilakukan dengan pendekatan diplomatik yang bertujuan pada kondisi dimana kerja sama pertahanan dengan AS didasarkan pada prinsip simbiosis mutualisme dalam membangun kepentingan nasional dan memelihara negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan utama kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat adalah perwujudan tugas TNI yang bersinergi dengan Kementerian Pertahanan dalam membangun dan membangun kekuatan pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman dan melindungi kepentingan nasional. Dinamika keamanan lingkungan global akibat dominasi kepentingan negara-negara maju yang ingin melindungi kepentingan nasionalnya, memberikan kewaspadaan bagi Indonesia untuk selalu waspada dalam menjaga hak kedaulatan wilayah. Mekanisme kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika dianggap mampu dan dapat mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul sewaktu-waktu.

Analisa faktor eksternal berdasarkan kriteria yang telah disusun membantu menemukan peluang dan ancaman dalam pelaksanaan strategi kerjasama yang biasanya berjalan kompetitif antar negara dengan kepentingannya masing-masing. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kerjasama adalah kemampuan pengelolaan politik nasional, isu nasional maupun internasional, analisa kepentingan dan politik bebas aktif Indonesia. Hasil analisis faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai bentuk penilaian strategi yang telah berjalan yang kemudian dilakukan pembobotan dengan matriks IFAS maupun EFAS.

Analisis matriks IFAS menunjukkan nilai 3,79. Hasil ini diperoleh dari faktor kekuatan tambahan dengan skor 1,9 dan kelemahan organisasi dengan skor 1,89 yang artinya kekuatan organisasi diasumsikan dapat menutupi kelemahan. Kekuatan tertinggi dalam organisasi adalah adanya lembaga atau organisasi pengelola sumber daya yang melaksanakan tugasnya dengan baik dalam implementasi strategi kerjasama, sedangkan kelemahan tertinggi adalah ego sektoral pada pengelolaan dan penilaian sumber daya. Hasil analisis matriks EFAS dapat diketahui bahwa skor yang diperoleh adalah 4. Hasil ini diperoleh dari penjumlahan faktor kekuatan sama dengan faktor kelemahan dengan skor 2 sehingga dapat diasumsikan bahwa peluang dalam implementasi telah dimanfaatkan dengan baik dalam rangka menghadapi ancaman yang ada. Politik bebas aktif Indonesia menjadi peluang tertinggi dalam pelaksanaan strategi kerjasama antar kedua negara. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat mengatasi ancaman berupa sentiment negative karena adanya kebijakan budaya politik tersebut.

#### **Strategi Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat guna Menghadapi Konflik Laut Cina Selatan**

Sinergi antara analisis IFAS dan EFAS dengan SWOT menggambarkan potensi strategi yang sesuai dengan kapasitas dan kondisi lingkungan organisasi yang kompleks dan multidimensi. Posisi strategi menunjukkan bahwa implementasi strategi kerjasama berada dalam situasi moderat atau sedang sehingga memerlukan konsentrasi dalam rangka memaksimalkan fungsi melalui integrasi horizontal. Lembaga yang berperan dalam implementasi strategi antara Indonesia dan Amerika Serikat guna menghadapi ancaman konflik Laut Cina Selatan dalam rangka menjaga hak kedaulatan NKRI berada pada situasi dan kondisi Sedang-Sedang. Lembaga pelaksana secara eksternal cukup banyak peluang dengan sumber daya bersifat sedang. Kondisi dapat direspon menggunakan strategi horizontal (Horizontal Integration Strategy) yang mengharuskan lembaga terkait perlu melibatkan pihak lain dalam rangka upaya peningkatan koordinasi pihak yang saling berkepentingan pada pelaksanaan kerjasama pertahanan.

Analisa matriks EFAS dan IFAS sekaligus Terdapat empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT sebagai berikut.

##### **a. Strategi SO**

1. Melaksanakan pengelolaan SDM dengan menggunakan kemampuan Lembaga Negara sesuai politik negara
2. Tujuan pengawasan pengendalian lembaga kerjasama selaras dengan analisa isu internasional
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait pengawasan dan pengendalian dalam rangka menselaraskan tujuan kerjasama

4. Penilaian mengenai kerjasama luar negeri agar dapat digunakan sebagai sumber daya penting bagi kegiatan kerjasama

##### **b. Strategi ST**

1. Pengelolaan isu nasional dan internasional oleh SDM yang ahli
2. Mencari supplier bahan baku dengan harga yang kompetitif
3. Melakukan sinergitas kerjasama antar lembaga/organisasi
4. Melakukan pemberdayaan lembaga/organisasi dalam menyampaikan politik bebas aktif

##### **c. Strategi WO**

1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan menggunakan dukungan antar lembaga/organisasi
2. Menggunakan isu internasional untuk menjalin kerjasama dengan prinsip menguntungkan kondisi Konflik
3. Menggunakan tujuan yang sama dalam mengurangi ego sektoral
4. Menggunakan politik bebas aktif untuk menjalin kerjasama dengan prinsip menguntungkan kondisi Konflik

##### **d. Strategi WT**

1. Rancangan kerjasama yang selaras dengan politik nasional .
2. Rancang kerjasama yang selaras dengan politik internasional
3. Rancang Pengelolaan Sumber daya dalam kerjasama
4. Rancang model strategi meningkatkan politik bebas aktif sebagai daya saing Indonesia

Hasil perhitungan AHP pada pengembangan strategi menunjukkan bahwa strategi SO (Strengths-Opportunities/Strengths and Opportunities) menduduki peringkat pertama dengan nilai 0,50. Strategi ini memanfaatkan kekuatan organisasi atau institusi untuk mengambil dan memaksimalkan peluang yang ada di lingkungan eksternal. Pengelolaan sumber daya manusia dengan memaksimalkan peran lembaga negara sesuai dengan budaya politik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga implementasi kerjasama dapat berjalan dengan maksimal. Pengawasan dan pengendalian yang menjadi fungsi lembaga seharusnya dapat disesuaikan dengan dinamika lingkungan dan isu internasional. Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian dapat menjadi alternatif perbaikan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik pada implementasi. Kerjasama maritime secara bilateral seharusnya dapat digunakan sebagai sumber daya penting yang harus dimaksimalkan sehingga memperoleh penilaian yang baik dari lembaga penilaian.

#### **4. KESIMPULAN & REKOMENDASI**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Faktor peningkatan kerjasama adalah secara internal antara lain kompetensi SDM, prosedur pengendalian dan pengawasan, pengelolaan sumber daya dan penilaian kerjasama. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kerjasama pertahanan adalah kemampuan dalam pengelolaan politik nasional, isu nasional dan internasional serta Analisa kepentingan. Faktor internal tertinggi adalah lembaga pengelolaan sumber daya dan kelemahan tertinggi adalah ego sektoral dengan bobot 3,79 serta faktor kekuatan dapat menutupi kelemahan. Faktor eksternal tertinggi adalah politik bebas aktif.
2. Strategi kerjasama yang dapat dirumuskan adalah strategi kerjasama secara integrasi horizontal dengan melakukan peningkatan kualitas maupun kuantitas untuk dapat bersaing secara kompetitif. Strategi So menduduki rangking pertama sebagai rekomendasi strategi yaitu memaksimalkan kemampuan pengawasan dan pengendalian lembaga kerjasama negara sesuai budaya politik dan perkembangan internasional yang ada.

#### **Rekomendasi**

Beberapa rekomendasi praktis dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Kementerian pertahanan dapat meningkatkan peran diplomasi dan memaksimalkan fungsi kerjasama antar kedua negara.
2. TNI sebagai pelaksana di lapangan dapat mempertimbangkan mempertimbangkan kebijakan dan rencana strategis dalam implementasi strategi kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat sehingga tercipta kedaulatan NKRI dalam menghadapi ancaman konflik LSC.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian mengenai konseptualisasi strategi kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat guna menghadapi konflik LCS sehingga kedaulatan NKRI tetap terjaga.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Asan, S., Panjaitan, A., Suwu, S. E., & Ferdinand, F. V. (2020). Employee Engagement and Organization Support Strategies: The Mediating Role of Perceived Organization Support for Holistic Employee Subjective Well-Being. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(4), 754-766.
- Sire. 2019. *Laut China Selatan: Strategi Indonesia dalam Sengketa Kawasan*. Diakses di <https://www.idntimes.com/science/discovery/nur-mar-a-siregar/laut-china-selatan-strategi-indonesia-dalam-sengketa-kawasan-exp-c1c2/5> pada 6 Juni 2021.
- Subedi, D. (2016). Explanatory sequential mixed method design as the third research community of knowledge claim. *American Journal of Educational Research*, 4(7), 570-577.

- Sukmadewi, P. 2019. Indo-Pacific Treaty sebagai Perluasan Kerjasama Indonesia di bidang maritim. *Jurnal UMY Tahun 2019*

## PENGUJIAN EFEK BAURAN PEMASARAN 7P PADA LOYALITAS KONSUMEN DI PASAR TRADISIONAL MANDALAGIRI GARUT

Oleh:

Kevin Cahyadi<sup>1)</sup>, Ariesya Aprillia<sup>2)\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha, Bandung

<sup>1</sup>kevincahyadi25@gmail.com

<sup>2</sup>april.lie@hotmail.com

### Abstrak

Keberadaan sebenarnya pasar tradisional sebagai sektor perekonomian masyarakat Indonesia mulai tersisih oleh pasar modern di zaman ini. Tujuan dibuatnya penelitian ini ialah guna menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial maupun secara simultan dari *product, price, place, promotion, people, process*, dan *physical evidence* terhadap loyalitas konsumen di pasar tradisional Mandalagiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang memakai regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini yakni konsumen di pasar tradisional Garut, sampelnya adalah konsumen yang masih berbelanja dalam 24 bulan terakhir di pasar tradisional Mandalagiri Garut yang berjumlah 261 orang. Hasil penelitian secara parsial yakni *product* dan *process* tidak memberikan pengaruh pada loyalitas konsumen, sedangkan secara simultan terdapat pengaruh bauran pemasaran 7P pada loyalitas konsumen di pasar tradisional Mandalagiri Garut.

**Kata Kunci:** bauran pemasaran, loyalitas, pasar tradisional

### 1. PENDAHULUAN

Loyalitas konsumen adalah salah satu kunci untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Untuk mempertahankan eksistensi ini dapat dilakukan melalui beragam cara, salah satunya yakni melalui strategi bauran pemasaran 7P. Bauran pemasaran 7P menurut Kotler & Keller (2016) mengacu pada *product* atau produk, *price* atau harga, *place* atau tempat, *promotion* atau promosi, *people* atau orang, *process* atau (proses), dan *physical evidence* atau (bukti fisik). Menurut Sihombing, Dewi, & Astika (2019), loyalitas seorang pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan memperoleh kepuasan yang sangat tinggi, karena pada umumnya konsumen suka mencoba sebuah produk yang diperkenalkan atau ditawarkan oleh sebuah perusahaan, lalu akan muncul perasaan puas ataupun kecewa. Adapun di sini konsumen atau pembeli yang loyal ialah kunci dari keberadaan sebuah pasar tradisional.

Begitu menjamurnya pasar modern seperti *supermarket* dan *minimarket*, dimulai dari daerah perkotaan bahkan hingga yang berada di pedesaan di banyak daerah, membuat para pedagang yang ada di pasar tradisional menjadi semakin terpojok. Minat beli konsumen pasar tradisional semakin menurun, dikarenakan konsumen lebih menyukai berbelanja di pasar modern, yang memiliki karakteristik jauh lebih baik, baik itu dari standar kebersihan dan sebagainya, jika dibandingkan dengan pasar tradisional, di mana pasar tradisional terkesan kumuh, sempit, panas, bau, berdesakan, dan hal negatif lainnya (Sihombing et al., 2019).

Alasan mengapa para konsumen telah beranjak meninggalkan pasar tradisional dan lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok di pasar modern ketimbang pasar tradisional, selain

dikarenakan nilai kebersihan yang sangat kurang, faktor harga pun menjadi penyebab lain dalam peralihan tempat berbelanja konsumen. Meskipun di pasar tradisional harga barang tergolong murah serta dapat terjadi transaksi tawar-menawar, namun harga yang dicantumkan di pasar modern seperti *supermarket* dan *minimarket* pun sudah dapat terbilang murah. Lalu, kebanyakan dari konsumen pun mempertimbangkan jarak antara rumah mereka dengan tempat berbelanja, dibandingkan dengan pasar tradisional, sudah jelas bahwa keberadaan pasar modern lebih banyak dan merambah ke daerah-daerah bahkan yang terpencil sekalipun. Oleh karenanya para konsumen lebih memilih untuk menghemat waktu mereka dengan pergi ke tempat berbelanja yang lebih dekat jangkauannya.

Berkaitan dengan penyebaran secara cepat dari virus *Corona (Covid 19)* yang kian meningkat dari waktu ke waktu, maka sebagian orang merasa bahwa mereka tidak perlu melakukan aktivitas berbelanja ke tempat yang tidak begitu bersih seperti pasar tradisional, banyak dari mereka yang memilih untuk berbelanja di tempat yang terlihat lebih higienis dan lebih nyaman untuk dikunjungi. Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut maka penelitian mengenai loyalitas konsumen perlu lebih dikembangkan lagi. Penelitian ini lebih menekankan pada faktor bauran pemasaran 7P yang berpotensi mempunyai pengaruh terhadap loyalitas konsumen dan ditemukan bahwa adanya perbedaan hasil antar satu peneliti dengan peneliti lainnya, ada yang berpengaruh serta ada juga yang tidak berpengaruh. Bauran pemasaran pada umumnya mengarah pada beberapa tindakan maupun taktik yang dipakai oleh perusahaan guna mempromosikan sebuah merek maupun produknya di pasar. Bauran pemasaran

menurut Kotler & Keller (2016) yakni sekumpulan variabel atau faktor pemasaran yang bisa dipakai untuk meraih tujuan pemasaran sesuai sasaran dalam sebuah perusahaan.

Sya'idah & Jauhari (2018) menyatakan bahwa produk, harga, serta tempat memang terbukti secara bersamaan memberikan pengaruh positif pada kesetiaan pelanggan, namun di sini promosi terbukti mempunyai pengaruh negatif pada loyalitas pelanggan. Rolianto (2007) menyimpulkan bahwa secara parsial dan secara serentak *product*, *price*, *promotion*, *distribution*, dan *public relation* memberikan pada variabel loyalitas konsumen. Hasil penelitian dari Duza (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh elemen *marketing mix* yang berupa elemen produk, harga, promosi, dan humas secara simultan terhadap loyalitas konsumen di Perusahaan bernama Jenang Teguh Raharjo. Prasetyo (2019) menyatakan bahwa *product* memberikan pengaruh yang dapat dikatakan positif dan juga cukup signifikan pada kesetiaan nasabah, *place* memberikan pengaruh positif serta tidak signifikan pada kesetiaan nasabah, *price* memberikan pengaruh secara positif dan tidak signifikan pada kesetiaan nasabah, serta *promotion* memberikan pengaruh yang terbilang positif dan juga tidak signifikan pada kesetiaan nasabah. (Alipour, Pour, & Darbahaniha, 2018) menemukan hasil di mana elemen bauran pemasaran memberikan pengaruh yang terbukti signifikan pada loyalitas konsumen.

Sedangkan dalam penelitian Suhendro (2019) dijelaskan bahwa secara parsial elemen produk, lokasi, promosi, dan harga tidak mempunyai pengaruh pada kesetiaan konsumen pada *minimarket* Indomaret serta Alfamart yang berada di Kota Pematangsiantar. Nugraha (2020) memberikan simpulan yakni secara parsial elemen bauran pemasaran tidak memberikan pengaruh secara signifikan, akan tetapi jika ditinjau secara simultan, elemen bauran pemasaran memang memberikan pengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Bourjuis Cafe. Nurbani, Mulyanto, Wardani, & Andriyani (2019) menjelaskan di mana bauran pemasaran tidak mempunyai pengaruh pada kesetiaan konsumen.

## 2. HIPOTESIS PENELITIAN

Sya'idah & Jauhari (2018) menjelaskan bahwa produk memberikan pengaruh yang positif terhadap kesetiaan pelanggan; Napa (2021) menjelaskan bahwa *product* memang terbukti memberikan pengaruh positif dan juga signifikan pada kesetiaan konsumen kartu prabayar Simpati; kemudian Santoso, Sudodo, & Fietroh (2017) menyatakan bahwa *product* memberikan pengaruh yang terbukti secara positif serta signifikan pada kesetiaan konsumen permen susu.

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh *product* pada loyalitas konsumen.

Sya'idah & Jauhari (2018) menjelaskan bahwa harga memberikan pengaruh yang positif pada

kesetiaan pelanggan; Napa (2021) menjelaskan di mana elemen *price* memberikan pengaruh yang positif dan juga cukup signifikan pada kesetiaan konsumen kartu prabayar Simpati; kemudian Santoso et al. (2017) menyatakan bahwasannya elemen *price* memberikan pengaruh secara positif dan juga signifikan pada kesetiaan konsumen permen susu.

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh *price* pada loyalitas konsumen.

Sya'idah & Jauhari (2018) menjelaskan bahwa variabel tempat atau *place* memberikan pengaruh yang positif pada kesetiaan pelanggan; Napa (2021) menjelaskan bahwa *place* memberikan pengaruh yang positif dan juga signifikan pada kesetiaan konsumen kartu khusus prabayar Simpati; kemudian Santoso et al. (2017) menyatakan di mana *place* memberikan pengaruh secara positif dan juga signifikan pada kesetiaan para konsumen permen susu.

H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh *place* pada loyalitas konsumen.

Ghaisani, Darsiharjo, & Miftah (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa promosi (*promotion*) mempunyai pengaruh yang terbukti positif pada kesetiaan konsumen yang berkunjung dan makan ke Suis Butcher Steak House yang ada di Setiabudhi, kota Bandung; Rotinsulu, Sumayku, & Sambul (2015) menjelaskan bahwa promosi signifikan memengaruhi loyalitas konsumen di Big Jay Family Karaoke Manado; selanjutnya Prihatma, Masitoh, & Saputra (2020) menyatakan bahwa memang terbukti ada pengaruh yang signifikan *promotion* pada kesetiaan konsumen pada CV. Saluyu Motor khusus Cabang di Kecamatan Bojong di Kabupaten Pandeglang.

H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh *promotion* pada loyalitas konsumen.

Penelitian Winata (2020) menyimpulkan bahwa *people* berpengaruh signifikan pada kesetiaan konsumen yang pernah menginap di Grand Serela Hotel & Convention yang berlokasi di Medan; Subagyo (2011) menyatakan yakni variabel *people* memberikan pengaruh yang signifikan pada loyalitas konsumen yang makan di Rumah Makan Lestari Jember; serta Hapsari & Rulirianto (2017) memberikan simpulan yaitu *people* memberikan pengaruh yang signifikan serta positif pada loyalitas pelanggan.

H<sub>5</sub>: Terdapat pengaruh *people* pada loyalitas konsumen

Adapun riset yang dibuat oleh Mukhsinah & Brahmaratih (2014) menjelaskan yakni elemen proses memberikan pengaruh yang positif signifikan pada kesetiaan pelanggan perusahaan PT. Samudera Shipping Services cabang yang berlokasi di Surabaya; Winata (2020) menjelaskan bahwa proses memberikan pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial pada kesetiaan konsumen Grand Serela Hotel & Convention Medan; serta Subagyo (2011) menyatakan bahwasannya elemen proses

memberikan pengaruh yang signifikan pada kesetiaan konsumen.

H<sub>6</sub>: Terdapat pengaruh *process* pada loyalitas konsumen.

Mukhsinah & Brahmaratih (2014) menyatakan bahwa *physical evidence* memberikan pengaruh positif signifikan pada kesetiaan pelanggan perusahaan PT. Samudera Shipping Services yang ada di Surabaya; Subagyo (2011) memberikan penjelasan yakni terdapat pengaruh yang terbukti signifikan dari elemen bukti fisik pada kesetiaan konsumen; serta Anabas (2017) menunjukkan bahwa variabel bukti fisik baik secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan pada kesetiaan nasabah yang menabung di Bank Rakyat Indonesia khusus Cabang Sintang.

H<sub>7</sub>: Terdapat pengaruh *physical evidence* pada loyalitas konsumen.

Hasil penelitian dari Winata (2020) menunjukkan hasil di mana bauran pemasaran jasa terbukti memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada kesetiaan konsumen yang pernah menginap di Grand Serela Hotel & Convention Medan; Subagyo (2011) memberikan pernyataan yaitu adanya pengaruh yang memang terbukti signifikan dari produk, harga, tempat, promosi, proses, orang, dan bukti fisik pada kesetiaan konsumen; lalu penelitian yang dibuat oleh Nugraha (2020) memberikan penjelasan yakni ada pengaruh secara simultan bauran pemasaran terhadap kesetiaan pelanggan di Bourjuis Cafe.

H<sub>8</sub>: Terdapat pengaruh *product, price, place, promotion, process, people, dan physical evidence* secara simultan pada loyalitas konsumen.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai berupa penelitian kuantitatif. Lokasi riset terletak di Pasar Tradisional Mandalagiri di Kota Garut dengan metode untuk pengambilan sampel ialah *non-probability sampling* menggunakan *purposive sampling technique*. Populasinya yaitu konsumen di Pasar Tradisional Mandalagiri Garut, sedangkan sampelnya adalah konsumen yang masih berbelanja dalam 24 bulan terakhir di Pasar Tradisional Mandalagiri Garut. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda digunakan pada penelitian ini. Berikut variabel-variabel yang diteliti.

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Skala	Keterangan
Product	1. Keragaman Produk	Likert	Modifikasi dari Anjani, Irham, & Waluyati (2018)
	2. Kemasan yang Memadai		
Price	3. Kemasan yang Bagus		
	1. Harga Lebih Murah		
Place	2. Mengikuti Perkembangan Harga		
	3. Harga Nego		
	4. Tawaran Diskon		
	1. Lokasi Strategis		
	2. Jasa Pengiriman		

	3. Identitas Tempat		
	4. Ketersediaan Produk		
Promotio n	1. Bonus dari Pembelian		
	2. Promosi <i>Word-of-Mouth</i>		
	3. Informasi Media (HP/Surat Sebaran)		
People	1. Mengelola Bisnis dengan Sendirinya		
	2. Sikap Ramah		
	3. Sigap/Tangkas/Respon Cepat		
	4. Kejujuran		
Process	1. Tawar-menawar dalam hubungan antar pihak		
	2. Fleksibilitas Pembayaran		
Physical Evidence	1. Kebersihan pasar		
	2. Ditata dengan rapi		
	3. Kenyamanan Belanja		
Loyalitas Konsume n	1. Mengatakan hal yang positif		Modifikasi dari Reynaldi & Suprapti (2017)
	2. Merekomendasikan ke berbagai pihak		
	3. Pembelian berulang		

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas mengenai karakteristik responden, kemudian hasil uji validitas disertai dengan hasil uji reliabilitas, lalu hasil uji asumsi klasik, dan juga hasil uji analisis regresi linear berganda

**Tabel 2. Karakteristik Responden**

Deksripsi	Frequency	Perc ent	Valid Percen t	Cumulativ e Percen t
Yang Pernah Berbelanja di Pasar Tradisional Mandalagiri Garut				
• Pernah	261	100.0	100.0	100.0
Waktu Terakhir Belanja				
• 1-6 Bulan Terakhir	157	60.2	60.2	60.2
• 7-12 Bulan Terakhir	59	22.6	22.6	82.8
• 13-18 Bulan Terakhir	28	10.7	10.7	93.5
• 19-24 Bulan Terakhir	17	6.5	6.5	100.0
Jumlah Pergi Berbelanja				
• <10 Kali	138	52.9	52.9	52.9
• 11-20 Kali	46	17.6	17.6	70.5
• 21-30 Kali	33	12.6	12.6	83.1
• 31-40 Kali	18	6.9	6.9	90.0
• 41-50 Kali	11	4.2	4.2	94.3
• 51-60 Kali	5	1.9	1.9	96.2
• 61-70 Kali	4	1.5	1.5	97.7
• >70 Kali	6	2.3	2.3	100.0
Jenis Kelamin				
• Pria	117	44.8	44.8	44.8
• Wanita	144	55.2	55.2	100.0
Usia				
• <16 Tahun	1	.4	.4	.4
• 16-25 Tahun	160	61.3	61.3	61.7
• 26-35 Tahun	42	16.1	16.1	77.8
• 36-45 Tahun	27	10.3	10.3	88.1
• 46-55 Tahun	23	8.8	8.8	96.9
• 56-65 Tahun	8	3.1	3.1	100.0
Pengeluaran dalam 1 Bulan				
• <Rp 2.000.000	74	28.4	28.4	28.4
• Rp 2.000.001-4.000.000	103	39.5	39.5	67.8

• Rp 4.000.001- 6.000.000	49	18.8	18.8	86.6
• Rp 6.000.001- 8.000.000	17	6.5	6.5	93.1
• Rp 8.000.001- 10.000.000	11	4.2	4.2	97.3
• >Rp 10.000.000	7	2.7	2.7	100.0
Total		100. 0	100.0	

Sumber: Olah Data SPSS 26 (2021)

100% responden pernah berbelanja di Pasar Tradisional Mandalagiri Garut dalam 24 bulan terakhir. Mayoritas responden berbelanja <10 kali, wanita lebih banyak sebagai responden dengan rentang usia 16-25 tahun, dengan pengeluaran berkisar antara Rp 2.001.000-4.000.000.

Nilai  $r$  (*corr.*)  $\geq 0,500$  yaitu berkisar antara 0,628-0,901 dengan nilai sig.  $\leq 0,05$  dan nilai koefisien *Cronbach Alpha* berkisar antara 0,603-0,854. Mengacu pada nilai tersebut, maka kuesioner yang dirancang penulis sudah valid dan reliabel.

*One-Sample Kolomogorov Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dengan nilai sig.  $\geq 0,05$  yaitu 0,066. Hasil nilai *tolerance* berkisar antara 0,411-0,966 > 0,10 serta nilai VIF berkisar antara 1,035-2,430 < 10,00, maka tidak terdapat tanda-tanda multikolinearitas dalam penelitian ini. Berdasarkan Uji *Spearman's Rho*, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas (memiliki varian yang homogen) dengan nilai berkisar antara 0,410-0,966 > 0,05.

Persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7$$

$$Y = 0,966 + -0,012X_1 + 0,159X_2 + 0,214X_3 + -0,122X_4 + 0,299X_5 + -0,031X_6 + 0,195X_7$$

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Nilai Sig.	Keterangan
H <sub>1</sub>	0,820	Tidak Berpengaruh
H <sub>2</sub>	0,000	Berpengaruh
H <sub>3</sub>	0,000	Berpengaruh
H <sub>4</sub>	0,003	Berpengaruh
H <sub>5</sub>	0,000	Berpengaruh
H <sub>6</sub>	0,633	Tidak Berpengaruh
H <sub>7</sub>	0,000	Berpengaruh
H <sub>8</sub>	0,000	Berpengaruh

Dari 8 hipotesis yang ada, 2 hipotesis ditolak, tidak berpengaruh yaitu H<sub>1</sub> dan H<sub>6</sub>.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah disajikan serta pembahasan yang dicantumkan di atas, bisa diambil kesimpulan, bahwasannya berdasarkan uji F terdapat adanya pengaruh dari bauran pemasaran 7P secara simultan pada loyalitas konsumen di pasar tradisional Mandalagiri Garut, dengan pengaruh sebesar 61,5%, lalu untuk sisanya yakni 38,5% dipengaruhi oleh unsur serta faktor lainnya yang berasal dari luar variabel *marketing mix*.

Berdasarkan uji *tprice* (harga), variabel *place* (tempat), *promotion* (promosi), *people* (orang), dan *physical evidence* (bukti fisik) saja yang berpengaruh terhadap loyalitas konsumen di pasar tradisional Mandalagiri Garut, sedangkan *product* (produk) dan *process* (proses) terbukti tidak memberikan pengaruh pada loyalitas konsumen di pasar tradisional Mandalagiri Garut.

*Product* tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dikarenakan kemasan produk di pasar tradisional Mandalagiri cenderung kurang bagus, sehingga para konsumen kehilangan minat beli yang dapat berpengaruh terhadap loyalitas. *Price* berpengaruh terhadap loyalitas konsumen karena harga yang bisa dinegosiasikan, terbukti bahwa kebanyakan harga barang yang ditawarkan di pasar tradisional Mandalagiri lebih murah berdasarkan pendapat para konsumen, maka dari itu konsumen rela berbelanja kembali ke pasar Mandalagiri. *Place* berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dikarenakan letak pasar tradisional Mandalagiri yang sangat strategis di kota Garut, serta para konsumen dapat mencari ataupun mengenali pasar tradisional Mandalagiri dengan mudah. *Promotion* berpengaruh terhadap loyalitas konsumen karena penyebaran informasi melalui HP maupun surat selebaran mengenai pasar tradisional Mandalagiri berhasil, alhasil para konsumen keberadaan Pasar Tradisional Mandalagiri, serta ditambah dengan promosi melalui *word of mouth* (WOM). *People* berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dikarenakan para pedagang di pasar tradisional Mandalagiri yang sangat ramah, cekatan, serta sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran di mata para konsumen, membuat para konsumen menjadi setia untuk berbelanja ulang ke pasar tradisional Mandalagiri. *Process* tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen karena kurangnya fleksibilitas pembayaran, yaitu kebanyakan konsumen tidak dapat melakukan pembayaran secara kredit di pasar tradisional Mandalagiri. *Physical Evidence* berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dikarenakan para konsumen merasa nyaman untuk berbelanja di pasar tradisional Mandalagiri, sebab tata letak yang baik juga memudahkan para konsumen untuk memilih produk yang akan dibeli, serta penampilan fisik dan kondisi Pasar Tradisional Mandalagiri yang baik.

Pedagang di pasar disarankan untuk meningkatkan kualitas maupun kinerja beberapa variabel bauran pemasaran khususnya untuk variabel produk dan proses. Upayakan kemasan produk yang disediakan oleh penjual mencukupi agar dapat membungkus barang-barang hasil belanja konsumen sesuai dengan kuantitas produk yang dibeli oleh konsumen, serta upayakan kemasan produk dikemas dengan rapi dan juga kemasan dalam keadaan yang baik (tidak sobek, dsb.). Selain itu, pedagang juga dianjurkan untuk mengadakan pembayaran secara kredit bagi para konsumen yang memang sudah

seringkali berbelanja kepada pedagang yang bersangkutan, agar para konsumen tersebut menjadi lebih setia, dengan kata lain konsumen itu tidak akan berpindah ke pedagang maupun tempat berbelanja yang lain. Saran yang dapat diberikan guna penelitian mendatang yaitu penambahan indikator pertanyaanantara lain mengenai keamanan berbelanja, lalu meneliti respon konsumen dalam kurun waktu yang berbeda, misal dalam beberapa tahun agar didapat hasil yang lebih komprehensif.

## 6. REFERENSI

- Alipour, M., Pour, B. M., & Darbahaniha, A. (2018). The Effects of the 7P Marketing Mix Components on Sporting Goods Customer Satisfaction. *International Journal of Business and Management Invention*, 7(1), 20–26.
- Anabas, S. (2017). Pengaruh Produk, Harga, Promosi, Tempat, Proses, Orang dan Bukti Fisik Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Simpedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 12(1), 673. <https://doi.org/10.29406/jmm.v12i1.440>
- Anjani, H. D., Irham, & Waluyati, L. R. (2018). Hubungan Penerapan Bauran Pemasaran 7P dan Loyalitas Konsumen di Pasar Tradisional. *Agro Ekonomi*, 29(2), 261–273.
- Duza, B. (2018). Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Konsumen di Perusahaan Jenang Teguh Raharjo Ponorogo. *Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo*.
- Ghaisani, R. P., Darsiharjo, & Miftah, R. (2016). Pengaruh Promosi terhadap Loyalitas Konsumen di Suis Butcher Steak House Setiabudhi Bandung. *The Journal Gastronomy Tourism*, 3, 255–264.
- Hapsari, D. O. A., & Rulirianto. (2017). Pengaruh People dan Process terhadap Loyalitas Pelanggan di Klinik Kecantikan Navagreen Cabang Malang. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 61–65.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management 15th Edition*. New Jersey: Pearson Pretice Hall.
- Lovelock, C., Wirtz, J., & Mussry, J. (2016). *Pemasaran Jasa Manusia, Teknologi, Strategi*.
- Masitoh, E. A. (2013). Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul. *Jurnal PMI*, X(2), 63–78.
- Mukhsinah, & Brahmartih, I. A. (2014). The Impact of Product, People, Process Dan Physical Evidence on Customer Loyalty at PT. Samudera Shipping Services - Surabaya. *Jmm17*, 1(01). <https://doi.org/10.30996/jmm17.v1i01.312>
- Napa, E. Y. (2021). Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Konsumen Kartu Prabayar Simpati. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Nugraha, R. A. (2020). *Pengaruh Bauran Pemasaran Restoran Terhadap Loyalitas Pelanggan di Bourjuis Café*. Retrieved from <http://repository.unika.ac.id/23023/>
- Nurbani, A., Mulyanto, H., Wardani, M. K., & Andriyani, M. (2019). Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan dan Kepercayaan serta Dampaknya pada Loyalitas Konsumen. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 16(02).
- Prasetyo, A. A. (2019). Analisis Pengaruh Marketing Mix terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan sebagai Variabel Intervening: Studi Pegadaian Syariah Semarang. *Tesis*.
- Prihatma, G. T., Masitoh, M. R., & Saputra, D. A. (2020). Pengaruh Promosi dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada CV. Saluyu Motor Cabang Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ekonomi Vokasi*, 4(1), 38–54. Retrieved from <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JEV/article/view/3007>
- Reynaldi, G. H., & Suprapti, N. W. S. (2017). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Pelanggan Mobil Merek “Honda” di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen*, 6(1).
- Rolianto, T. (2007). *Pengaruh Marketing Mix terhadap Loyalitas Konsumen Teh Celup Tambi di Wonosobo*, 4.
- Rotinsulu, E., Sumayku, S. M., & Sambul, S. A. P. (2015). Pengaruh Harga, Produk dan Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen Big Jay Family Karaoke. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(029), 1302.
- Santoso, A., Sudodo, Y., & Fietroh, M. N. (2017). Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Konsumen Permen Susu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 19–25. <https://doi.org/10.37673/jebi.v2i2.58>
- Sihombing, I. K., Dewi, I. S., & Astika, A. (2019). *Analisis Kepuasan Konsumen pada Pasar Tradisional Sebagai Dampak*. 72–75.
- Subagyo, D. A. (2011). Pengaruh Bauran Pemasaran dalam Bisnis Restoran Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen pada Rumah Makan Lestari Jember. *Skripsi Universitas Jember*, 1–161.
- Suhendro, D. (2019). *The Influence of Marketing Mix ( 4P ) on Consumer Loyalty on Indomaret and Alfamart Mini market in Pematangsiantar City*. 5(2), 206–220.
- Sya'idah, E. H., & Jauhari, T. (2018). *Pengaruh Marketing Mix terhadap Loyalitas Pelanggan*. 3(1), 2018.
- Winata, E. (2020). Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Loyalitas Konsumen pada Grand Serela Hotel & Convention Medan. *Journal Ilmu Manajemen*, 14.

# HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG DAMPAK MEDIA SOSIAL, PERGAULAN BEBAS DAN STATUS EKONOMI TERHADAP KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI KELURAHAN PASIR JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR TAHUN 2021

Oleh :

Royani Chairiyah<sup>1)</sup>, Legina Anggraeni<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Binawan

<sup>1</sup>email: royani.chairiyah@binawan.ac.id

<sup>2</sup>email: legina@binawan.ac.id

## Abstrak

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang remaja pada usia dibawah 20 tahun. Masa ini disebut dengan masa reproduksi muda, meskipun terjadi suatu kehamilan dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun akan tetapi tubuh belum siap untuk hamil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara hubungan pengetahuan remaja tentang dampak media social, pergaulan bebas dan status ekonomi Terhadap pernikahan dini. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan studi *cross sectional* dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November tahun 2021. Hasil Penelitian pernikahan dini sebanyak 17 remaja (34%) dan 33 remaja (66%) yang tidak pernikahan dini. Data dianalisis menggunakan uji chi-square hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dampak medsos terhadap kejadian pernikahan dini dengan p-value 0,000 dan Pengetahuan pergaulan bebas terhadap pernikahan dini dengan p-value 0,000 dan hubungan status ekonomi terhadap pernikahan diri p-value 0,000

**Kata Kunci:** Remaja, Pernikahan Dini, Dampak Media Sosial, Pergaulan Bebas dan Status Ekonomi.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam 30 tahun terakhir, perkawinan usia anak di seluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010. Akan tetapi, berbeda dengan kemajuan ini, secara keseluruhan prevalensi perkawinan usia anak tetap relatif konstan dari tahun 2000 sampai 2010. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan (atau 14,2 juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030.

Angka pernikahan dini di Indonesia tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa prevalensi umur pernikahan pertama antara 15-19 tahun sebanyak 41,9%..

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2008), jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia sudah mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Salah satu Provinsi yang tinggi tingkat pernikahan dininya yaitu Provinsi Jawa Barat. Presentasi pernikahan dini (<15 tahun) di Jawa Barat mencapai 7,5 % dan pernikahan dini (<15 tahun) di Indonesia hanya 50,2%. Sedangkan presentase pernikahan dini (<15 tahun) di Indonesia

hanya 0,2% dan presentase untuk pernikahan dini (15-19 tahun) hanya 11,7% untuk perempuan dan 1,6% untuk laki-laki (Riskesdas, 2010). Pada 2013 terdapat 1.626 di Bogor pasangan nikah dini

Bogor terbagi menjadi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, dan Tanah Sareal, menurut data BKKBN yang tercatat melakukan pernikahan dini usia < 20 tahun untuk kelompok umur istri, Bogor Selatan (61%), Bogor Timur (10%), Bogor Tengah (32%), Bogor Barat (44%), Bogor Utara (29%), Tanah Sareal (30 %).

Tercatat di Kecamatan Bogor Barat menurut data BKKBN banyak terjadi pernikahan dini mendapatkan urutan ke 2 setelah Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat mempunyai 16 Kelurahan yang terdata setiap wilayahnya terdapat pernikahan dini berdasarkan umur istri dibawah 21 tahun data 2017, Kelurahan Menteng (228 orang), Kelurahan Sindang Barang (307 orang), Kelurahan Bubulak (405 orang), Kelurahan Margajaya (86 orang), Kelurahan Balumbang Jaya (347 orang), Kelurahan Situ Gede (306 orang), Kelurahan Semplak (165 orang), Kelurahan Cilendek Barat (402 orang), Kelurahan Cilendek Timur (212 orang), Kelurahan Curug Mekar (141 orang), Kelurahan Curug (281 orang), Kelurahan Pasir Jaya (470 orang), Kelurahan Pasir Kuda (242 orang), Kelurahan Pasir Mulya (72 orang), Kelurahan Gunung Batu (393 orang), Kelurahan Loji (174 orang). Berdasarkan data tersebut Kelurahan Pasir Jaya yang pernikahan dini

atau pernikahan muda masih cukup banyak. Penggunaan media sosial juga terkadang disalah gunakan. Banyak media sosial yang memberi informasi-informasi yang baik ataupun buruk. Seperti media sosial facebook dan instagram juga digunakan sebagai ajang prostitusi di kalangan remaja. Selain dua hal tersebut, masih banyak lagi masalah-masalah yang ditimbulkan dari situs pertemanan dan pencarian informasi melalui media sosial yang sebagian besar akan menyebabkan perilaku buruk bagi remaja itu sendiri.

Pada saat ini keingintahuan remaja tentang apa yang mereka saksikan di media sosial, tidak menutup kemungkinan remaja sendiri bisa saja mencontoh informasi yang mereka saksikan di media sosial, rasa ingin tahu yang besar pada masa remaja membuat remaja mencoba segala sesuatu yang dilihatnya tanpa tahu resiko yang akan dialaminya. Penyebaran informasi seperti instagram yang menyediakan berbagai informasi tentang hiburan dan facebook sebagai sarana berkenalan dengan teman baru, dan hiburan. Kedua media ini sering memunculkan iklan-iklan tentang orang dewasa yang sepatutnya belum bisa di perlihatkan pada remaja. Yang bisa saja akan menimbulkan rasa ingin tahu dan mencoba hal tersebut, pastinya akan berdampak pada remaja itu sendiri seperti seks pra nikah, hamil pra nikah dan menikah muda.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda pada keluarga prasejahtera ini. Mulai faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, serta adat istiadat yang dilakukan keluarga (Anthony, 2016).

Adapun Faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu: pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan (Maryanti & Septikasari, 2009). Menurut (Kumalasi & Andhantoro, 2012) faktor penyebab pernikahan usia dini adalah faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapat pekerjaan, media massa, agama serta pandangan dan kepercayaan Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Pengetahuan Dampak Media Sosial, Pergaulan Bebas, Dan Status Ekonomi Terhadap Pernikahan Usia Dini Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2021"

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan studi *cross sectional* dengan jumlah populasi sebanyak 50 orang sedangkan sampel penelitian menggunakan teknik total sampling yaitu sebanyak 50 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November tahun 2021 di Kelurahan Pasir Jaya. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis menggunakan uji chi-square.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisa Univariat

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Medsos Terhadap Pernikahan Usia Dini.

Pengetahuan Dampak Media Sosial	(N)	(%)
Kurang ( $\leq 60$ )	17	34
Cukup (61-75 %)	14	28
Baik ( $\geq 76-100\%$ )	19	38
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 1 didapati hasil bahwa tingkat pengetahuan dampak medsos didominasi oleh pengetahuan baik sebesar 38 %, sisanya pengetahuan kurang 34% dan cukup 28%

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Pergaulan Bebas

Pengetahuan Pergaulan Bebas	(N)	(%)
Kurang ( $\leq 60$ )	17	34
Cukup (61-75 %)	14	28
Baik ( $\geq 76-100\%$ )	19	38
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 2 didapati hasil bahwa tingkat pengetahuan dampak medsos didominasi oleh pengetahuan baik sebesar 38 % sisanya pengetahuan kurang 34% dan cukup 28%

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Status Ekonomi

Status Ekonomi	(N)	(%)
Rendah ( $\leq 4.100.000$ )	20	40
Tinggi ( $\geq 4.100.000$ )	30	60
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 3 didapati hasil bahwa status ekonomi didominasi oleh status ekonomi tinggi yaitu sebesar sebanyak 60 % dan sisanya memiliki status ekonomi rendah sebesar 40 %.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan Usia Dini	(N)	(%)
Ya	17	34
Tidak	33	66
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 3 didapati hasil bahwa pernikahan usia dini didominasi oleh tidak usia dini yaitu sebesar sebanyak 66 % dan sisanya dengan usia dini sebesar 34 %.

### Analisa Bivariat

Tabel 5. Hubungan Antara Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Medsos Terhadap Pernikahan Usia Dini

PENGETAHUAN DAMPAK MEDSOS	PERNIKAHAN USIA DINI				TOTAL	
	YA		TIDAK		N	%
	N	%	N	%	N	%
Kurang	17	34	0	0	17	34
Cukup	0	0	14	28	14	28
Baik	0	0	19	38	19	38
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>47,9</b>	<b>23</b>	<b>66</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b>P-Value</b>	<b>0,000</b>					

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa responden yang memiliki pengetahuan dampak media sosial kurang mempunyai persentase lebih banyak

yang pernikahan usia dini yaitu sebesar 34 %, sedangkan responden yang memiliki pengetahuancukup dan baik tidak ada. Hasil uji statistic diperoleh p-value 0,001 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dampak media sosial dengan pernikahan usia dini.

Menurut Moeliono (2011) menyatakan bahwa dampak negatif media sosial terhadap remaja sangat banyak dan meresahkan seperti modus kejahatan, kekerasan, pelecehan, pemerkosaan, hubungan seks bebas bahkan sampai pernikahan dini. Oleh sebab itu harus diberikan arahan, tuntunan, bimbingan, panduan, dan pengawalan dari pihak-pihak seperti orang tua, guru, dan pemangku kepentingan dalam pendidikan anak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Delita, dkk pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pernikahan usia dini dimana hasil yang diperoleh adalah *p-value* 0,043. Penelitian lain juga menyebutkan sebesar 74,8 % responden yang memiliki pengetahuan kurang terhadap pernikahan dini (Nurhayati,2015)

Menurut Jeremi(2008) pernikahan dini berkaitan dengan permasalahan terkait sosial, ekonomi, tradisi, dan budaya dalam kelompok masyarakat. Pernikahan usia dini disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan responden, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, social ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas,. Pernikahan dini berdampak terhadap aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomi-demografi.

Maka dari itu remaja yang memiliki pengetahuan baik dampak media sosial akan memilah mana yang baik dan buruk. Kalau yang buruk bisa menyebabkan melakukan perbuatan yang menyimpang seperti terjadi pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini, banyak dampak yang ditimbulkan seperti kehamilan dini dimana reproduksi remaja itu belum siap menerima kehamilan sehingga bisa menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, Komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas. Remaja yang kurang sehingga bis melakukan pernikahan dini

Tabel 6. Hubungan pengetahuan pergaulan bebas dengan Pernikahan Usia Dini

PENGETAHUAN PERGAULAN BEBAS	PERNIKAHAN USIA DINI				TOTAL	
	YA		TIDAK		N	%
	N	%	N	%	N	%
Kurang Cukup	17	34	0	0	17	34
Baik	0	0	14	28	14	28
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>38</b>
<b>P-Value</b>	<b>0,000</b>					

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa responden yang memiliki pengetahuan pergaulan bebas baik mempunyai persentase lebih banyak yang pernikahan usia dini yaitu sebesar 34%, sedangkan responden yang memiliki pengetahuancukup dan baik tidak ada yang pernikahan usia dini. Hasil uji statistik diperoleh p-value 0,0001 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pergaulan bebas dengan pernikahan usia dini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Priyanti (2013) perkawinan usia muda yang terjadi sebagian besar memiliki pergaulan secara bebas. Secara statistik terbukti ada hubungan pergaulan responden dengan perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda terjadi karena akibat kurangnya pemantauan dari orang tua yang mana mengakibatkan kedua anak tersebut melakukan tindakan yang tak pantas tanpa sepengetahuan orang tua. Pergaulan di kalangan remaja yang melewati batas dan tidak di pantau oleh orang tua dapat menyebabkan terjadi kelakuan yang belum sewajar dilakukan. Pergaulan remaja yang begitu bebas bisa menjadi penyebab menikah di usia muda yang baringi dengan kehamilan diluar nikah yang sudah di rasakan anak. Pergaulan remaja yang tidak bisa dibatasi dan tidak dilarang oleh orang tua menjadikan semakin tingginya kejadian menikah di usia muda. Semakin bebasnya pergaulan pada anak menjadikan semakin tingginya terjadi pernikahan pada usia muda..

Adanya pengaruh pengetahuan yang kurang tentang pergaulan bebas remaja sehingga bisa terjadi pernikahan dini. Dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan remaja bukan menjadi faktor resiko terjadinya remaja menikah pada usia muda tetapi menjadi variabel perancu

Tabel 7. Hubungan Status Ekonomidengan Pernikahan Usia Dini

STATUS EKONOMI	PERNIKAHAN USIA DINI				TOTAL	
	YA		TIDAK		N	%
	N	%	N	%	N	%
Rendah	17	34	3	6	20	40
Tinggi	10	0	30	60	30	60
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b>P-Value</b>	<b>0,000</b>					

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan bahwa pengetahuan dampak media sosial (p-value 0,000) dan pengetahuan pergaulan bebas (p-value 0,000) status ekonomi (p-value 0,000) memiliki hubungan dengan pernikahan usia dini.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah membandingkan antara pengetahuan dampak media sosial, pengetahuan pergaulan bebas dan status ekonomi terhadap pernikahan usia dini

## 5. REFERENSI

- Aisah, U. N., Th, E. M., & Rahmawati, A. (2018). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Agtikasari Nurhayati, *Hubungan Pengetahuan tentang Pernikahan Dini dengan Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul Tahun 2015*, Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- Agustariana, F., Angriani, P., & Hastuti, K. P. (2015). *Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin*. JPG (Jurnal Pendidikan Geografi), 2(4).
- Chandra, L. *Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (Sma) Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin*. Abstrak.
- Delita S, Atik M, Djoko N, Yudhy D, 2016 Hubungan Pengetahuan Responden Dan Faktor Demografi Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 5, Nomor 4, Oktober 2017 (ISSN: 2356-3346)  
<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Elya, eva, Dkk. 2010. *Pernikahan Pada Usia Dini*. Surabaya: victory inti cipta
- Notoatmodjo, 2012. *Metodologi pengetahuan*. Jakarta:rineka cipta.
- Nurhayati A, Ismarwati, 2015. *Hubungan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Dini Dengan Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Sma Negeri 2 Banguntapan Tahun 2015*. Naskah publikasi
- Imron, 2012. *Penyebab Pergaulan Remaja Di Kalangan Remaja Putri*. Jakarta: EGC
- Kaplan, Dkk. 2010. *Media social dan pengaruh pengetahuan remaja*. Yogyakarta: Nuha medika
- Imron, 2012. *Penyebab Pergaulan Remaja Di Kalangan Remaja Putri*. Jakarta: EGC
- Imron, 2012. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta
- Irdamayanti, 2012. *Bahaya Pernikahan Dini*, Jakarta: EGC
- Juditha C, 2011. *penggunaan situs jejaring social facebook*, Makassar: BBPPKI
- Jeremy E, Charles E. Early Marriage in the United States. J marriageFam.2008;70(4):835.
- Kalasi, R. 2014. *Dunia internet di kalangan remaja pada perkembangan pengetahuan oleh media internet*. Jakarta: EGC
- Moeliono, 2011. *Dampak perkembangan media social di kalangan remaja*. Surabaya :victory inti cipta
- Priyanti, 2013. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan usia muda pada penduduk kelompok umur 12-19 tahun di desa puji mulyo kecamatan sunggal kabupaten deli serdang tahun 2013. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara : Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Yunita, Astri. 2014. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja Putri di Desa Pagarejo Kabupaten Wonosobo*. Wonosobo: STIKES Ngundi Waluyo Ungaran
- Yulivina, E., Pertiwi, F. D., & Avianty, I. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2018*. Promotor, 1(1).

## STUDI KASUS: COPING STRESS ORANG TUA TUNGGAL DALAM MENGASUH ANAK RETARDASI MENTAL

Oleh:

Raissa P. Putri<sup>1)</sup>, Ikhda I. Aqilah<sup>2)</sup>, Nastiti F.<sup>3)</sup>, Bellaningtyas K.<sup>4)</sup>, Rr. Aliifah M.G.<sup>5)</sup>, Wiwin Hendriani<sup>6)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga

<sup>1</sup>email: raissa.pратиwi.putri-2021@psikologi.unair.ac.id

<sup>2</sup>email: Ikhda.izzatul.aqilah-2021@psikologi.unair.ac.id

<sup>3</sup>email: nastiti.fatihahma-2021@psikologi.unair.ac.id

<sup>4</sup>email: bellaningtyas.komarasasih-2021@psikologi.unair.ac.id

<sup>5</sup>email: rr.aliifah.maurizka-2021@psikologi.unair.ac.id

<sup>6</sup>email: wiwin.hendriani@psikologi.unair.ac.id

### Abstrak

Memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan tantangan tersendiri bagi orang tua. Tantangan tersebut akan menjadi lebih berat ketika orang tua merupakan orang tua tunggal. Hal itu dapat menjadi pemicu munculnya stress yang dialami oleh orang tua tunggal ketika mengasuh anak berkebutuhan khusus. Adapun setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi stress yang dialami, salah satunya ketika mengasuh anaknya yang berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat coping stress yang digunakan oleh orang tua tunggal dari mengasuh anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak dengan retardasi mental. Subjek penelitian ini merupakan seorang ibu tunggal (N=1) yang berusia 42 tahun dan sudah menjadi ibu tunggal selama 16 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis tematik dengan *theory driven*. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa subjek menggunakan *problem-focused coping* (*seeking social support* dan *confrontive coping*) serta menggunakan *emotional-focused coping* (*positive reappraisal* dan *self controlling*).

**Kata Kunci:** *coping stress*, orang tua tunggal, anak berkebutuhan khusus, retardasi mental.

### 1. PENDAHULUAN

Gangguan psikiatrik pada anak dikenal dengan istilah anak berkebutuhan khusus (*Special needs children*), yaitu anak secara bermakna mengalami kelainan atau gangguan pada fisik, mental, intelektual, sosial dan emosional dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, dibandingkan dengan anak lain seusianya sehingga mereka dengan kebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan khusus (Direktorat Pembinaan SLB, 2005). Hasil Survey dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, dimana 80% dari penyandang disabilitas di dunia berada di kalangan negara-negara berkembang dan anak-anak mengambil porsi sepertiga dari total penyandang disabilitas dunia adalah anak berkebutuhan khusus (InfoDatin, 2014). Salah satu jenis anak berkebutuhan khusus adalah disabilitas intelektual atau disebut juga retardasi mental yang didefinisikan sebagai kondisi fungsi intelektual umum individu yang berada di bawah rata-rata sehingga menyebabkan adanya gangguan perilaku adaptif yang berdampak selama periode perkembangan.

Kelahiran seorang anak dengan disabilitas perkembangan dapat menambah stress pada orang tua, termasuk tuntutan finansial, fisik, dan emosional. Anak dengan gangguan intelektual tentunya tidak mudah diterima oleh orang tua, ketika anaknya

berbeda dari anak lainnya. Kondisi ini lah yang memungkinkan bagi beberapa pasang orang tua merasa belum siap untuk menjalaninya. Terutama bagi orang tua tunggal terlebihnya seorang *single mother*. Seorang ibu tunggal dituntut untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana ibu tunggal juga harus bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengatur keuangan, dan mengambil keputusan dalam keluarga. Selain itu ibu tunggal tidak lepas dari perannya yang harus mengasuh, mendidik, serta memberikan bekal pengetahuan, pengalaman dan membangun mental anak.

Beratnya pekerjaan seorang ibu yang bukan *single mother* dalam mengurus anak berkebutuhan khusus tidak seberat ibu tunggal dimana masih adanya sosok pasangan untuk membantunya dalam mengurus anak, baik itu dari ekonomi, maupun penerapan pengasuhan. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Levine (dalam Hasanah, 2017) menyatakan bahwa dibandingkan ibu yang memiliki pasangan, ibu *single parent* yang memiliki anak berkebutuhan khusus jauh lebih rentan terhadap stres. Stres yang muncul berupa kekhawatiran tentang masa depan anak, rasa tidak berdaya, hambatan ekonomi, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri, (Sutadi, 2003 dalam Hasanah dan Sofia, 2017).

Ibu tunggal lebih banyak mengalami dimensi stress saat mengasuh anak dengan tidak adanya peran pasangan (Dyches, 2016). Ibu tunggal menghadapi

tingkat yang lebih tinggi ketertinggalan ekonomi dibandingkan ibu yang memiliki pasangan (Vespa dalam Dyches, 2016). Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus mempunyai tanggung jawab dan tekanan psikologis yang lebih besar daripada orang tua yang memiliki anak tanpa disabilitas (Yamaoka, dkk.,2016).

Permasalahan yang dihadapi oleh ibu tunggal yang memiliki anak berkebutuhan khusus memerlukan kemampuan pemecahan masalah sebagai upaya untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap masalah dan tekanan yang dapat menimbulkan stress pada ibu tunggal. Strandova (2006) mengatakan bahwa ada beberapa tahap yang dilalui oleh ibu single parent yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk mencoba coping dan menerima kenyataan bahwa anaknya mengalami disabilitas, salah satu tahapnya adalah orang tua secara bertahap akan menerima kenyataan dan mencoba coping terhadap permasalahan tersebut dan mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap keadaan menekan.

Ibu tunggal dapat beradaptasi dengan baik, dimana ibu tunggal harus dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya, seperti sumber daya internal yaitu ketahanan, adaptasi positif, penerimaan dan penyesuaian diri). Selain faktor eksternal atau dukungan dari lingkungan, seorang ibu tunggal juga memerlukan peran penting yang harus ditumbuhkan dari dalam diri seorang ibu tunggal untuk meningkatkan ketangguhan dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus. Usaha dari individu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan dan usaha untuk memecahkan permasalahan yang menyebabkan stress disebut dengan coping. Coping dapat menyeimbangkan emosi individu dalam situasi yang penuh tekanan. Menurut Folkman et. al. (1986) pengelola stres yang disebut dengan istilah coping yang berfokus pada masalah (Problem focused coping) dan coping yang berfokus pada emosi (emotion focused coping).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan strategi coping yang tepat, anak penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam memperkuat unit keluarga, serta berkontribusi secara positif terhadap kualitas hidup anggota keluarga.

*Coping* stress merupakan strategi individu yang secara aktif mencari penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan keadaan atau situasi yang menjadi sumber terbentuknya stres dan bagaimana strategi individu dalam mengatur emosinya dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang diakibatkan oleh *stressor* (Lazarus & Folkman, 1984). Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka peneliti ingin membuat studi kasus terkait coping stress orang tua tunggal dalam mengasuh anak retardasi mental.

## 2. METODE PENELITIAN

### Strategi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Menurut Bogdan dan Biklen (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu peristiwa tertentu. Penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang mampu membawa pemahaman tentang isu yang kompleks dan dapat memperkuat pemahaman tentang pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Menurut Stake (2005) menyatakan bahwa penelitian studi kasus sebenarnya bukanlah suatu pilihan metode penelitian, tetapi bagaimana memilih kasus sebagai objek atau target penelitian.

### Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan pada sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian. Pemilihan subjek menggunakan *purposive sampling*, yaitu peneliti dengan sengaja memilih individu dan situs untuk mempelajari atau memahami fenomena utama (Creswell, 2012). Pemilihan metode ini didasarkan menemukan subjek yang benar-benar cocok atau sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Sehingga akan didapatkan data yang kaya, detail, dan relevan yang nantinya dapat mengungkap fenomena utama yang terjadi pada responden. Untuk memastikan bahwa subjek yang diwawancarai selaras dengan topik penelitian, terdapat beberapa karakteristik subjek dalam penelitian ini, antara lain:

1. Individu merupakan orang tua tunggal
2. Berjenis kelamin laki laki atau Wanita
3. Mengasuh anak retardasi mental
4. Bersedia menjadi responden dan melakukan wawancara

Penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda dan telah disepakati antara peneliti dan subjek penelitian. Pemilihan lokasi mempertimbangkan kondisi, kenyamanan, dan keamanan bagi subjek, yakni di kediaman subjek.

### Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang sangat umum dilakukan oleh peneliti kualitatif adalah wawancara dengan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka, namun tetap pada poin penting pada tema yang akan ditanyakan. Ciri khas dari wawancara semi terstruktur adalah penggunaan panduan wawancara (*interview guide*) yang dibuat oleh peneliti (Kahija, 2017). Pada wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan tujuan memberikan kemudahan pada peneliti untuk menggali pengalaman terdalam dan unik dari masing-masing partisipan, serta tetap berpedoman pada pokok bahasan dan tema penelitian.

## 2. Audio

Menurut Bungin (2007) Dokumen audio merupakan salah satu metode dokumenter. Metode dokumenter merupakan hal yang penting dalam metodologi penelitian, dalam hal ini bertujuan untuk menelusuri dan mengumpulkan data, karena data dan fakta sosial dapat disimpan menjadi satu dalam bahan berbentuk dokumentasi (Bungin, 2007). Materi audio dalam penelitian ini menggunakan alat perekam pada *handphone*. kemudian hasil wawancara berupa rekaman audio akan ditransfer dalam bentuk transkrip atau salinan rekaman untuk kemudian diolah, dianalisis, dan didapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

## 3. Catatan Lapangan

Menurut Bungin (2007), Catatan merupakan salah satu dokumen pribadi seorang peneliti dalam bentuk tulisan mengenai tindakan, kepercayaan, dan pengalaman. Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat berupa coretan seperlunya yang dipersingkat (Idrus, 2009). Catatan lapangan dipilih dikarenakan dapat dilakukan sewaktu-waktu saat bertemu dengan subjek penelitian. Catatan lapangan berisi frasa, kata kunci, isi pembicaraan, pengamatan, gambar, sketsa, dan lain-lain (Idrus, 2009).

### Prosedur Analisis Data dan Interpretasi

Analisis data merupakan hal yang cukup penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Setelah melakukan serangkaian wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis tematik. Menurut Boyatzis (1998) analisis tematik merupakan cara pandang yang mampu melihat sesuatu (yang tidak dapat dilihat orang lain) dari data, terkait suatu fenomena tertentu, berdasarkan tema-tema yang muncul dari informasi umum. Tema merupakan sebuah pola yang ditemukan dalam informasi kualitatif, yang memuat penjelasan hingga interpretasi dari suatu fenomena (Boyatzis, 1998) Analisis tematik yang digunakan adalah theory driven yakni tema-tema yang ditemukan melalui prosedur analisis dengan pengkodean yang berbasis pada teori, sebuah kode tematik memiliki beberapa elemen (Boyatzis, 1998), diantaranya:

1. Label (nama tema)
2. Definisi
3. Indikator

### Keabsahan data

Pengujian pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2011). Dengan menganalisis dan mengaitkan data-data yang sudah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Penelitian ini dilakukan ketika peneliti sudah memperoleh data yang diperlukan dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan dan dokumentasi (Sugiyono, 2007)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. *Problem-focused coping*

Ketika seseorang menggunakan *problem-focused coping*, ia dapat memperoleh informasi tentang apa yang harus ia lakukan dan mengerahkan usahanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Folkman & Lazarus, 1980).

##### 1) Mencari dukungan sosial

Mencari dukungan sosial adalah berbicara pada seseorang untuk mencari informasi lebih banyak terkait situasi yang sedang dihadapi, berbicara pada seseorang yang mungkin dapat membantu masalah yang sedang dihadapi, serta meminta saran pada teman dan kerabat. Berkaitan dengan hal ini subjek mencari dukungan sosial dengan menjalin komunikasi dengan mantan suami dan melepaskan stresnya dengan bercerita mengenai kondisi anak. Namun subjek merasa hal tersebut tidak membantu dan merasa tidak bermanfaat jika bercerita dengan mantan suaminya karena respon mantan suami yang kurang baik. Sehingga subjek melampiaskan stresnya dengan bercerita kepada ibunya.

“Ya saya nangis mbak, waktu itu masih ada ibuku si mbak jadi aku lumayan agak ringan ya..”

Namun beberapa waktu terakhir subjek kehilangan kedua orang tuanya, sehingga subjek bercerita tentang masalahnya kepada saudaranya. “Kakak..”

Kemudian subjek juga mencari dukungan sosial dengan bercerita pada sahabat. “Saya ceritanya ke sahabat”

##### 2) *Confrontive Coping*

Konfrontatif coping adalah perilaku seseorang yang teguh dan berjuang untuk hal yang ia inginkan, berusaha mengubah pikiran orang-orang yang bertanggung jawab dalam masalahnya, serta mengekspresikan emosinya pada orang yang menyebabkan masalahnya. Berkaitan dengan hal ini subjek mengaku pernah merasa emosi paling besar pada anaknya hingga subjek mengekspresikan emosinya tersebut dengan memukul anaknya.

“Pernah sayaukul”

“sudah jengkel saya. Ya baru-baru ini”

“cukup mukul saya. Jadi ya gamau mukul lagi ‘gak wes, takut anaknya malah bales””

Selain itu subjek melakukan konfrontatif coping dengan memberikan ancaman pada anaknya ketika tidak menuruti subjek.

“Kalo ga nurut biasanya saya bilang mama tinggal loh ya... kalo ga nurut mama pergi, kamu di sini sendirian... gamau... dia nurut...”

##### 2. *Emotion-focused coping*

Ketika seseorang menggunakan *emotion-focused coping*, hal tersebut ia tuju untuk meregulasi atau mengatur emosinya atas situasi stress yang sedang dihadapinya (Folkman & Lazarus, 1980)

##### 1) *Self-Controlling*

*Self-controlling* adalah perilaku yang berusaha menyimpan perasaan untuk diri sendiri, menjaga agar

tidak ada yang mengetahui masalah yang sedang dihadapi, dan berusaha untuk tidak bertindak dengan gegabah dan tergesa-gesa mengikuti perasaan atau firasat yang pertama muncul. Subjek menyembunyikan statusnya sebagai janda dari orang lain di sekitarnya.

“Kalo orang sini kan gak tau masalahnya, gatau kalo saya janda

## 2) *Positive Reappraisal*

Penilaian ulang yang positif adalah berubah dan bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, menganggap masalah sebagai suatu pengalaman yang baik, serta percaya pada takdir untuk meningkatkan keimanan. Berkaitan dengan hal ini subjek melampiaskan stresnya dengan beribadah.

“Iya, setiap hari tahajjud”

Selain itu, subjek merasa hikmah dibalik kondisi anaknya ialah ia menjadi lebih dekat dengan anaknya karena harus mengurusnya, terutama setelah pandemi waktu bersama anak menjadi lebih banyak.

“Mungkin jadi lebih dekat lagi ya...biasanya kan kerja pulang sampai jam 8...setengah 9... langsung tidur capek...”

Subjek juga tetap berusaha menjalani apa yang harus dijalani dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan serta mempercayai akan ada sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan untuknya.

“Wes pokoknya dijalani saja... laa kalo liat di ig, liat statusnya orang...kok dikasi begini banget sih, mau dikasi apa sama Tuhan...”

### Proses Analisis

Tabel 1. Proses Analisis Subjek 1

Kode dan Baris	Catatan Reflektif	Indikator	Tema
(IE1.W1.2 1-22)	Subjek merasa mendapatkan dukungan pengasuhan oleh ayah dan ibunya ketika masih hidup	Mendapatkan dukungan pengasuhan dari ayah dan ibu sebelum ayah dan ibu meninggal	Mencari Dukungan Sosial (Seeking Social Support) (Sebelum Pandemi)
(IE1.W1.3 8-40)	Subjek mencoba mencari jalan keluar atas kebutuhan anaknya dengan memberikan terapi ke Rumah Sakit	Mencari solusi akan kebutuhan anaknya dengan memberikan terapi	Mencari Dukungan Sosial (Seeking Social Support) (Sebelum Pandemi)
(IE1.W1.1 28-129)	Menjalani komunikasi dengan mantan suami dan melepaskan stresnya (bercerita mengenai kondisi anak) kepada mantan suami	Melepaskan stres dengan bercerita kepada mantan suami	Mencari Dukungan Sosial (Seeking Social Support)
(IE1.W1.1 37-138)	Subjek melepaskan stress dengan menangis dan bercerita ke orang terdekat	Melepaskan stress dengan menangis dan bercerita	Mencari Dukungan Sosial (Seeking Social Support)
(IE1.W1.1 85-186)	Subjek menanyakan kepada pencipta mengapa ia harus mengalami kejadian yang menimpa	Mengeluh kepada sang pencipta	Evaluasi Positif (Positive Reappraisal)

(IE1.W1.3 32)	Subjek melampiaskan stres pengasuhan dengan sholat tahajjud	Melepaskan stres dengan tahajjud	Evaluasi Positif (Positive Reappraisal)
(IE1.W1.3 36)	Subjek menutupi status jandanya	Menyembunyikan status janda	Self Controlling
(IE1.W1.3 38)	Subjek mendapat dukungan sosial dari sahabat	Mendapat dukungan dari orang terdekat	Mencari Dukungan Sosial (Seeking Social Support)
(IE1.W1.3 49)	Subjek melepaskan stressnya kepada sahabat	Melepaskan stres pada sahabat	Mencari Dukungan Sosial (Seeking Social Support)
(IE1.W1.4 10)	Subjek memukul anaknya	Memukul anak	Konfrontive Coping
(IE1.W1.4 12)	Subjek memukul anaknya karena menurut subjek anaknya menjengkelkan	Memukul anak	Konfrontive Coping
(IE1.W1.4 15-416)	Ibu mukul sekali dan tidak memukul lagi karena takut dibalas anaknya	Memukul anak	Konfrontive Coping
(IE1.W1.5 13-514)	Subjek mendapatkan dukungan sosial dari bule, tante, dan adiknya ibu subjek	Dukungan sosial dari keluarga dekat	Mencari Dukungan Sosial (Seeking Social Support)
(IE1.W1.5 29-530)	Subjek merasa bisa lebih dekat dengan anaknya	Hikmah adanya pandemi	Positive Reappraisal
(IE1.W1.5 79-580)	Subjek tetap menjalani keadaan dengan menyerahkan kepada Tuhan	Kepasrahan akan takdir Tuhan	Positive Reappraisal
(IE1.W1.5 96-597)	Subjek memberikan ancaman ketika anak tidak nurut	Mengancam ketika anak tidak menurut	Konfrontive Coping

Tabel 2: Rangkuman Temuan Tema

No.	Tema	Indikator	Kode Transkrip
1.	Seeking Social Support (Mencari Dukungan Sosial)	a. Mendapatkan dukungan pengasuhan dari ayah dan ibu sebelum ayah dan ibu meninggal	(IE1.W1.21-22)
		b. Mencari solusi akan kebutuhan anaknya dengan memberikan terapi	(IE1.W1.38-40)
		c. Melepaskan stres dengan bercerita kepada mantan suami	(IE1.W1.128-129)
		d. Melepaskan stress dengan menangis dan bercerita	(IE1.W1.137-138)
		e. Mendapat dukungan dari orang terdekat	(IE1.W1.338)
		f. Melepaskan stres pada sahabat	(IE1.W1.349)
2.	Positive Reappraisal (Evaluasi Positif)	a. Subjek merasa bisa lebih dekat dengan anaknya	(IE1.W1.529-530)
		b. Subjek tetap menjalani keadaan dengan menyerahkan kepada Tuhan	(IE1.W1.579-580)
		c. Hikmah adanya pandemi	(IE1.W1.529-530)
		d. Kepasrahan akan takdir Tuhan	(IE1.W1.579-580)
3.	Self Controlling	a. Menyembunyikan	(IE1.W1.336)

	(Kontrol Diri)	status janda	)
4.	Konfrontive Coping	b. Memukul anak	(IE1.W1.410)
		c. Memukul anak	(IE1.W1.412)
		d. Memukul anak	(IE1.W1.415-416)
		e. Mengancam ketika anak tidak menurut	(IE1.W1.596-597)

#### 4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka subjek merupakan orang tua tunggal. yakni Sager dkk (dalam Duval & Miller, 1985), orang tua tunggal (single parent) adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya. Bahkan menurut Santrock (2002) ada dua macam single parent, yakni single father dan single mother. Single father adalah ayah sebagai orangtua tunggal yang selain harus berperan sebagai ayah untuk mencari nafkah, juga menggantikan peran ibu yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti bersih-bersih rumah, memasak, memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Single Mother, yakni seorang ibu tunggal yang selain harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga namun juga harus mencari nafkah, sebagai sosok yang menggantikan peran ayah. Dalam hal ini subjek merupakan seorang single mother yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas intelektual.

Subjek menjadi single mother sejak bercerai dengan suami subjek. Subjek sudah menjadi single mother selama 16 tahun sejak hamil anak subjek. Menurut subjek menjadi single mother dengan anak berkebutuhan khusus bukanlah suatu hal yang mudah. Subjek mengasuh anaknya tanpa bantuan mantan suami. Subjek dibantu oleh ibu dan ayahnya sebelum keduanya meninggal dunia. Diakui bahwa subjek merasa berat menjadi seorang single mother tanpa bantuan suami terutama dalam hal mengurus anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa temuan yang muncul di antaranya adalah sub memiliki dua macam coping stress yakni problem-focused coping dan emotion focused coping. Menurut Folkman dan Lazarus (1980), terdapat dua macam coping stress yakni problem-focused coping dan emotional focused coping. Coping stress sendiri merupakan suatu proses dimana seseorang mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan individu maupun lingkungan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghadapi stress (Lazarus & Folkman, 1984). Ada beberapa macam coping stress yang muncul pada subjek. Pada problem focused coping, subjek mendapatkan dukungan dalam hal mengasuh anak oleh ayah dan ibu sebelum keduanya meninggal, namun sekarang subjek sendiri. Subjek kerap kali melepaskan stres yang dirasakan dengan bercerita kepada mantan suami, meskipun mantan suaminya tidak begitu menanggapi sekalipun membahas mengenai anak. Subjek juga melepaskan stressnya dengan menangis dan bercerita kepada orang terdekat dan sahabatnya. Hal ini menandakan

bahwa subjek melakukan coping stress dengan mencari dukungan sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lazarus dan Folkman (1984) bahwa mencari dukungan sosial merupakan salah satu upaya bagaimana individu melakukan coping stress. Dalam hal ini subjek melakukan coping dengan cara mencari dukungan sosial. Selain itu, ketika sedang stress dan anak subjek sulit diatur respon subjek memukul anaknya. Subjek mengaku ketika memukul, artinya subjek sudah benar-benar jengkel dengan perilaku anaknya dan menambah rasa stress subjek, selain memukul subjek juga mengancam ketika anak tidak menurut akan perintah subjek. Kondisi ini bisa juga disebut sebagai konfrontive coping. Menurut Lazarus dan Folkman (1984), Konfrontive Coping merupakan coping stress yang dilakukan individu dengan perilaku individu yang teguh, berusaha mengubah pikiran orang-orang yang bertanggung jawab dalam masalahnya, serta mengekspresikan emosinya pada orang yang menyebabkan masalahnya. Dalam hal ini subjek mengekspresikan emosinya dengan memukul anaknya.

Selain itu, subjek juga melakukan coping stress dengan emotional focused coping. Selama ini subjek mengaku kepada tetangganya dan saudaranya bahwa subjek belum bercerai, subjek menyembunyikan status jandanya selama 16 tahun. Hal ini bisa disebut juga dengan self controlling. Self controlling merupakan perilaku yang berusaha menyimpan perasaan untuk diri sendiri, menjaga agar tidak ada yang mengetahui masalah yang sedang dihadapi, dan berusaha untuk tidak bertindak dengan gegabah dan tergesa-gesa mengikuti perasaan atau firasat yang pertama muncul. Subjek menyembunyikan statusnya sebagai janda dari orang lain di sekitarnya (Lazarus & Folkman, 1984). Subjek juga melakukan coping stress dengan positive reappraisal. Positive Reappraisal merupakan Penilaian ulang yang positif adalah berubah dan bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, menganggap masalah sebagai suatu pengalaman yang baik, serta percaya pada takdir untuk meningkatkan keimanan. Berkaitan dengan hal ini subjek melampiaskan stressnya dengan beribadah. Dalam hal ini, subjek berserah kepada Tuhan tiap kali masalah datang khususnya dengan suaminya, kerap kali subjek juga menanyakan kepada Tuhan mengapa semuanya subjek alami tanpa terkecuali. Subjek juga sholat tahajjud ketika melampiaskan stressnya, dan percaya pada takdir untuk meningkatkan keimanan. Subjek juga merasakan hikmah, sekarang lebih dekat dengan sang anak, terutama saat pandemi melanda.

#### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang ditemukan, diketahui bahwa subjek merupakan seorang ibu tunggal atau *single mother* sejak 16 tahun lalu dan memiliki anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas intelektual. Subjek menghadapi keadaan tersebut dengan menggunakan beberapa strategi

coping, yakni *problem-focused coping* yang terdiri dari *seeking social support* dan *confrontive coping*. Selain itu subjek menggunakan *emotional-focused coping*, yakni *positive reappraisal* dan *self controlling*.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ialah informasi yang didapatkan dari subjek belum mendalam, jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadikan peneliti tidak menemukan keunikan yang beragam jika dibandingkan dengan adanya jumlah partisipan yang lebih banyak, wawancara tidak dilakukan “*epoche*”, ketidaksinkronan waktu peneliti dengan subjek, sehingga salah satu subjek gugur sebelum penelitian dilakukan. Kemudian adanya salah satu subjek yang meninggal dunia menyebabkan peneliti perlu mencari subjek pengganti yang sesuai kriteria dan hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama.

## 6. REFERENSI

- Bogdan, Robert C., Biklen, Kopp S. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
- Boyatzis, Richard, E. (1998). *Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development*. Thousand Oaks: Sage pub.
- Bronstein, P. (1988). Marital and parenting roles in transition: An overview. In P. Bronstein & C. P. Cowan (Eds.), *Fatherhood today: Men's changing role in the family* (pp. 3–10). John Wiley & Sons.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Creswell, John W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2005). *Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan Inklusif*, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Jakarta.
- Duvall, E., & Miller, B. (1985). *Marriage and Family Development* (Sixth Edition). New York: Harper & Row.
- Dyches, T. T., Christensen, R., Harper, J. M., Mandleco, B., & Roper, S. O. (2016). Respite care for single mothers of children with autism spectrum disorders. *Journal of autism and developmental disorders*, 46(3), 812-824.
- Folkman, S., & Lazarus, R. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. *Journal of Health and Social Behavior*, 219-239.
- Folkman, S., & Lazarus, R. (1988). *Manual for The Ways of Coping Questionnaire*. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
- Hasanah, dan Sofia Retnowati. 2017. Dinamika Resiliensi Ibu Single Parent dengan Anak Tuna Ganda. *Gajah Mada Journal of Psychology* Volume 3, No.3: 151-161.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- InfoDatin. (2014). *Penyandang disabilitas pada anak: Peringatan 3 Desember hari penyandang cacat sedunia*. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kahija, YF. (2017). *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memaknai Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). *Stress Appraisal and Coping*. Newyork: Springer Publishing Company.Inc.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rodiyah. (2021). Hubungan Spiritual, Jenis Kelamin, dan Dukungan Sosial dengan Strategi Coping pada Mahasiswa. *Journal of Human and Education*, 12-22.
- Santrock, J. (2002). *Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup)* Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Stake, Robert E. (2005). *Case Study Methods in Educational Research: Seeking Sweet Water*. In R. M. Jaeger (Ed.) *Complementary methods for research in education*, 2nd Edition (pp. 401-414). American Educational Research Association: Washington, DC.
- Strandova, I. (2006). Stress and resilience in families of children with specific learning disabilities. *Rev. Comput Education*. 17(2), 35-50.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadiyanto. (2010). *Stress dan Cara Mengurangnya*. Cakrawala Pendidikan, 55-66.
- Yamaoka, dkk. 2016. The Relationship between Raising a Child with a Disability and the Mental Health of Mothers Compared to Raising a Child without Disability in Japan. *Population Health* 2 (542-548). <http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.08.001>.

## DAMPAK STRESS PADA ORANGTUA YANG MENGASUH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Oleh:

Rr. Aliifah Maurizka Ghaisani<sup>1)</sup>, Wiwin Hendriani<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga

<sup>1</sup>email: rr.aliifah.maurizka-2021@psikologi.unair.ac.id

<sup>2</sup>email: wiwin.hendriani@psikologi.unair.ac.id

### Abstrak

Menjadi bagian keluarga dari anak berkebutuhan khusus pastinya memiliki tantangan tersendiri karena harus menghadapi dan menjalani kehidupan berbeda dengan keluarga pada umumnya. Tujuan dari studi literatur ini untuk mengungkap dampak stress orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus terutama dalam kehidupan sehari-harinya. Jurnal yang digunakan untuk studi literatur dalam penelitian kali ini diambil dari 2 database jurnal yaitu Science Direct, dan Google Scholar dengan dibatasi tahun terbit 2011-2021. Pencarian awal ditemukan 32 jurnal yang kemudian diseleksi dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga didapatkan 3 jurnal (N=3) yakni 2 jurnal kuantitatif dan 1 jurnal mixed method. Berdasarkan review yang didapat, dampak stress pada orangtua sangat beragam, mengingat sumber jurnal yang digunakan tidak terpaku pada 1 jenis disabilitas pada anak. Terdapat orangtua yang tergolong pada stress ringan yang berdampak pada kesehariannya seperti menampilkan perilaku semangat kerja berlebihan, mudah lelah, dan tidak bisa santai. Adapun orang tua yang memiliki kekhawatiran berlebih pada anaknya akan memiliki dampak seperti *overprotektif* atau membatasi interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Serta stress pengasuhan yang bergantung pada mengandalkan pasangan mereka untuk memenuhi tuntutan pengasuhan, dikarenakan sudah tidak mampu mengatasinya sendiri. Dengan mengetahui apa saja dampak stress yang dialami oleh para orang tua yang mengasuh anak berkebutuhan khusus akan menjadi dasar dalam penyusunan program-program parenting yang efektif dalam melakukan *copingstress* akibat mengasuh anak berkebutuhan khusus.

**Kata Kunci:** *parenting stress*, anak berkebutuhan khusus

### 1. PENDAHULUAN

Memiliki anak adalah impian semua orang tua. Orangtua tentu saja mendambakan anak yang sehat baik secara fisik maupun jiwanya. Namun demikian, pada beberapa keluarga impian tersebut tidak dapat terwujud karena dikaruniai anak dengan keterbatasan yang dimiliki atau yang sering disebut dengan anak dengan disabilitas.

Kelahiran seorang anak dengan disabilitas perkembangan dapat menambah stress pada orang tua, termasuk tuntutan finansial, fisik, dan emosional. Penelitian telah menunjukkan orang tua dari anak-anak dengan disabilitas perkembangan mengalami tingkat stres dan depresi yang lebih tinggi daripada orang tua lainnya, dan timbulnya gangguan pada unit keluarga (Feldman et al., 2007; Benson & Karlof, 2009). Kondisi ini lah yang memungkinkan bagi beberapa pasang orang tua merasa belum siap untuk menjalaninya. Apabila orang tua dan keluarga tidak mendapat dukungan dalam memenuhi kebutuhannya, hal tersebut dapat semakin mengganggu perkembangan anak, yang pada akhirnya akan menciptakan situasi stres bagi orang tua dan keluarga (Azar & Badr, 2006). Dalam konteksnya, harus dipahami bahwa kebutuhan orang tua bukan berarti kebutuhan pribadi orang tua, tetapi dukungan sumber daya dalam mengasuh anak. Kebutuhan orang tua bergantung pada sumber daya pribadi orang tua,

dukungan keluarga, karakteristik anak-anak, dan yang lebih penting kondisi sosial-budaya yang dimiliki keluarga. Secara umum, usia orang tua, status perkawinan, dan jumlah anak berkebutuhan khusus di lingkungan keluarga juga mempengaruhi tingkat kebutuhan dukungan orang tua (Grant & Whittell, 2000).

Meskipun stres dapat dirasakan sangat berat dan melelahkan, beberapa keluarga mampu beradaptasi dan berhasil mengatasinya sehingga kondisi stres mereka dapat dikendalikan dan kehidupan mereka kembali normal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan strategi coping yang tepat, anak penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam memperkuat unit keluarga, serta berkontribusi secara positif terhadap kualitas hidup anggota keluarga. Parenting stres bisa memunculkan suatu tindakan yang berpeluang menyebabkan toxic stress pada anak. Ketika orang tua terus menerus memojokkan anak secara psikologis atau mencederai anak secara fisik, tanpa ada dukungan, perlindungan dan keterikatan emosional yang dirasakan oleh anak, maka anak akan menderita stres toksik.

Beberapa peneliti mendokumentasikan pentingnya pola pikir, sudut pandang, nilai-nilai dan keyakinan spiritual, prioritas dan perhatian sehari-hari keluarga dalam sebuah strategi coping (King et al., 2009). Karena masing-masing sistem keluarga itu unik, setiap keluarga mungkin memiliki strategi

koping yang berbeda (Woodgate, Ateah, & Secco, 2008; Hockenberry & Wilson, 2007). Pentingnya strategi koping yang akan digunakan oleh orang tua guna menghindari dampak dari stress yang dapat menyebabkan orang tua mengalami gangguan dalam proses pengasuhan yang pada akhirnya juga dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak dengan berkebutuhan khusus itu sendiri. Stress pengasuhan juga akan menghambat pekerjaan yang biasa dilakukan ibu sehari-hari. Ibu yang tidak bisa menerima kenyataan atas kondisi anaknya hanya akan terpukul dan bahkan tidak mau melakukan apapun untuk mendukung perkembangan anaknya. Akibatnya, ibu hanya berdiam diri dan kondisi keterbelakangan anak semakin parah (Sa'diyah, 2016).

Melihat besarnya dampak stress yang dialami oleh orang tua terhadap pengasuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus, peneliti menganggap penting untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran informasi bagi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan terhadap stress yang dialami oleh orang tua dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus

## 2. METODE PENELITIAN

### Strategi Pencarian dan Sumber Data

Peneliti melakukan pencarian mengenai jurnal yang berhubungan dengan tema yang akan dibagi berdasarkan 5 database yang terdiri dari 3 database Internasional dan 2 database Indonesia. Adapun database Internasional yang digunakan adalah Science Direct (sciencedirect.com), JSTOR (jstor.org), dan SAGE (journals.sagepub.com). Kemudian untuk database Indonesia yang digunakan adalah GARUDA (garuda.kemendikbud.go.id) dan Google Scholar (Scholar.google.co.id). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah "parenting stress" dan "children with special needs" dan "anak berkebutuhan khusus", dengan limitasi 10 tahun terakhir (2011-2021).

### Proses Skringing

Pencarian artikel terselesaikan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti: (1) artikel mengenai stress orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, (2) studi empirik (kuantitatif dan kualitatif), (3) jurnal dalam Bahasa Inggris, (4) jurnal dalam Bahasa Indonesia, (5) semua artikel dapat diunduh. Sehingga total jurnal yang akan dianalisa sebanyak 1 jurnal dari Science Direct dan 2 jurnal dari Google Scholar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan penelitian dan proses skringing, terdapat 3 artikel yang dipilih dan dijelaskan karena sesuai dengan tema pembahasan yang dipilih, seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Judul, Penulis, Tahun	Lokasi Penelitian	Sampel (n)	Desain Penelitian	Instrumen Pengukuran	Temuan Utama
Stress pada Orang Tua yang Memiliki Anak dengan Gangguan Spektrum Autisme  Putri, Pramesti, Hapsari (2019)	Bandar Lampung, Indonesia	39 orang tua dari anak penyandang GSA yang bersekolah di SLB di Bandar Lampung, yaitu SLB Dharma Bakti, SLB Islam Terpadu Baitul Jannah, SLB Growing Hope dan SLB Mazaya	Penelitian kuantitatif dengan desain survey observasional	Stres pada orang tua diukur dengan Perceived Stress Scale (PSS) yang disusun oleh Sheldon Cohen (1994)	Sebagian besar mengalami stres ringan. Stres ringan termasuk tingkat stres yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang mengalami stres ringan dapat menampilkan perilaku semangat kerja berlebihan, mudah lelah dan tidak bisa santai. Jumlah orangtua yang tergolong dalam stress dengan kategori ringan yaitu sebanyak 23 responden (59%).
Efikasi Diri Stres Pengasuhan dan Strategi Koping Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus di Masa Pandemi Covid-19  Pratiwi, Ismail, Irayana (2021)	Banjarmasin dan Banjarbaru, Indonesia	Seluruh orang tua atau wali anak berkebutuhan khusus yang terdapat di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.	Kualitatif dan kuantitatif ( <i>Mixed method</i> ) dengan strategi <i>embedded konkuren</i>	Untuk mendapatkan data kuantitatif, peneliti menggunakan instrumen baku dalam mengukur stress pengasuhan, yaitu <i>Parental Stress Scale</i> (Berry and Jones, 1995) dipadukan dengan pengukuran parenting <i>self-efficacy</i> dengan menggunakan instrumen dari Van Rijen (2013) yang dinamakan <i>Self Efficacy for Parenting Tasks Index-Toddler Scale</i> . Sedangkan dalam mengumpulkan data kualitatif, peneliti akan menggunakan	Orang tua khawatir anaknya tidak bisa mandiri, sangat bergantung kepada orang lain hingga sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kekhawatiran ini dapat membuat orang tua <i>overprotektif</i> atau membatasi interaksi sosial dengan lingkungan sekitar.

				n wawancara mendalam, semistruktur	
Parenting Stress in Parents of Children with Developmental Coordination Disorder  Jijon, Leonard (2020)	Online survey	174 orang tua dari anak dengan DCD (usia antara 35 tahun 1 bulan dan 53 tahun 5 bulan, mayoritas orang tua adalah White British (80%), berpendidikan tinggi (79%), dan bekerja paruh waktu atau penuh waktu (83%)	Penelitian kuantitatif	Parenting Stress Index/Short Form (3 <sup>rd</sup> ed PSI/SF-3; Abidin, 1995) -Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ: Goodman, 1997) - Developmental Coordination Disorder Questionnaire '07 (DCD: Q'07; Wilson et al 2009) -Parenting Sense of Competence Scale (PSOC; Gibaud-Wallston & Wandersman, 1978) -Family Support Scale (FSS; Dunst, Jenkins, & Trivette, 2007)	untuk orang tua dari anak-anak yang biasanya berkembang yang memiliki kompetensi yang dirasakan rendah, kontribusi pasangan adalah prediktor stres pengasuhan yang lebih signifikan daripada orang tua dengan kompetensi yang dirasakan lebih tinggi. Ini bisa berarti bahwa orang tua tersebut lebih mengandalkan pasangan mereka untuk memenuhi tuntutan pengasuhan, dan akibatnya stres pengasuhan mereka lebih bergantung pada dukungan itu.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil temuan dari review yang dilakukan, orang tua yang memiliki anak penyandang GSA sebagian besar mengalami stres ringan. Stres ringan termasuk tingkat stres yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Stres dalam kategori ringan dapat membantu seseorang menjadi lebih waspada dan mampu mencegah munculnya berbagai hal yang akan terjadi dari permasalahan atau tekanan yang dihadapi nantinya. Stres ringan tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi terus menerus (Atziza, 2015). Adapun tingkat stres dalam kategori ringan sebanyak 23 responden (59%). Tingkat stress terbagi menjadi beberapa aspek yaitu aspek perasaan tidak terprediksi, aspek perasaan tidak terkontrol dan aspek perasaan tertekan (Cohen, 1994).

Pada situasi yang berbeda, stress pengasuhan yang dialami oleh orang tua dari anak berkebutuhan khusus di masa pandemic covid-19 juga dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan memberikan dukungan dan juga sumber daya yang mereka miliki. Karena semakin banyak dukungan yang diterima orang tua, mereka akan merasa semakin kuat dan mampu menangani tantangan mengasuh anak berkebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan temuan (Durban et al, 2012) yang mengungkapkan bahwa jika pengasuh didukung, mereka akan lebih mampu menangani tantangan

dalam memberikan pengasuhan bagi anak berkebutuhan khusus.

Namun dalam penelitian ini, orang tua mengungkapkan bahwa kekhawatiran terbesar mereka mungkin akan menjadi *stressor* baru, terkait dengan kondisi anak mereka yang berkebutuhan khusus. Mereka khawatir akan adanya kemungkinan besar bahwa anak mereka akan dipandang berbeda, *dibully*, bahkan diasingkan oleh anak lain ketika mereka mulai bersosialisasi. Selain itu, orang tua juga memiliki kekhawatiran akan kemandirian anak mereka. Sangat ditakutkan bahwa anaknya akan bergantung pada orang lain sehingga akan mempersulit diri untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Dampak dari besarnya rasa khawatir ini dapat membuat orang tua menjadi *overprotektif* atau membatasi interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Temuan ini seperti hal ditegaskan oleh (Leung & Li-Tsang, 2003) yang melaporkan bahwa meskipun para ibu membutuhkan waktu untuk menerima anak-anak mereka, ketika anak-anak tumbuh, para ibu mungkin merasakan tekanan dari masyarakat, terutama pada saat anak-anak mereka menunjukkan perilaku buruk yang tidak terduga di depan umum. Untuk menghindari rasa malu tersebut, para ibu terkadang menahan diri dari kegiatan sosial.

Pada kasus anak dengan DCD, kompetensi yang dirasakan orang tua dan dukungan sosial merupakan prediktor penting dari stres pengasuhan, dengan skor yang lebih rendah pada langkah-langkah ini berkaitan dengan stres pengasuhan yang dilaporkan lebih tinggi. Temuan ini memberikan dukungan dalam DCD untuk hubungan yang telah diidentifikasi oleh beberapa penelitian dalam ASD dan ADHD (misalnya Krakovich et al., 2016; Williamson & Johnston, 2019). Meskipun keduanya merupakan faktor penting, penting juga untuk mempertimbangkan cara mereka berinteraksi. Lavenda dan Kestler-Peleg (2017) menjelaskan bahwa, untuk orang tua dari anak-anak yang biasanya berkembang memiliki kompetensi yang dirasakan rendah, kontribusi pasangan adalah prediktor yang lebih signifikan dari pola asuh.

Stres dari orang tua dengan kompetensi yang dirasakan lebih tinggi, ini bisa berarti bahwa orang tua tersebut lebih mengandalkan pasangan mereka untuk memenuhi tuntutan pengasuhan, dan akibatnya, stres pengasuhan mereka lebih bergantung pada dukungan itu. Sebaliknya, orang tua dengan yang kompetensi lebih tinggi mungkin lebih mengandalkan diri mereka sendiri untuk memenuhi tuntutan pengasuhan, yang akan mengarah pada jumlah dukungan dari pasangan yang tersedia memiliki dampak yang lebih rendah pada stres pengasuhan mereka. Mempertimbangkan kepentingan relatif dari masing-masing faktor ini untuk keluarga individu, dan interaksi antar faktor, oleh karena itu akan menjadi penting untuk memberikan intervensi yang disesuaikan.

#### 4. REFERENSI

- Atziza, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stres dalam Pendidikan Kedokteran. *Jurnal Agromedicine*, 2(3), 317-320.
- Azar, M., & Badr, L. K. (2006). The adaptation of mothers of children with intellectual disability in Lebanon. *Journal of Transcultural Nursing*, 17(4), 375-380.
- Benson, P. R., & Karlof, K. L. (2009). Anger, stress proliferation, and depressed mood among parents of children with ASD: A longitudinal replication. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 39(2), 350-362.
- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1994). Perceived stress scale. Measuring stress: A guide for health and social scientists, 235-283.
- Durban, J. M., Rodriguez-Pabayos, A. M., Alontaga, J. V., Dolorfino-Arreza, G., & Salazar, C. (2012). Coping strategies of parents of children with developmental delay: A quantitative analysis. *Asian Journal of Sosial Sciences & Humanities*, 1(4), 177-195.
- Feldman, M., McDonald, L., Serbin, L., Stack, D., Secco, M. L., & Yu, C. (2007). Predictors of depressive symptoms in primary caregivers of young children with or at risk for developmental delay. *Journal of Intellectual Disability Research*, 51(8), 606-619.
- Grant, G., & Whittell, B. (2000). Differentiated coping strategies in families with children or adults with intellectual disabilities: The relevance of gender, family composition and the life span. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 13(4), 256-275.
- Hockenberry, M., & Wilson, D. (2007). Wong's Nursing Care of Infants and Children, Eight Edition. Elsevier.
- Jijon, A.M., Leonard, H.C. (2020). Parenting stress in parents of children with developmental coordination disorder. United Kingdom: *Research in Developmental Disabilities* 104.
- King, G., Baxter, D., Rosenbaum, P., Zwaigenbaum, L., & Bates, A. (2009). Belief systems of families of children with autism spectrum disorders or Down syndrome. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 24(1), 50-64.
- Krakovich, T. M., McGrew, J. H., Yu, Y., & Ruble, L. A. (2016). Stress in parents of children with autism spectrum disorder: An exploration of demands and resources. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46, 2042-2053.
- Lavenda, O., & Kestler-Peleg, M. (2017). Parental self-efficacy mitigates the association between low spousal support and stress. *Psychiatry Research*, 256, 228-230.
- Putri, S.M., Pramesti, W., Hapsari, R.D. (2019). Stress pada Orang Tua yang Memiliki Anak dengan Gangguan Spektrum Autisme. *Jurnal Psikologi Malahayati*, (1)1, 7-13.
- Pratiwi, H., Ismail, M., Irayana, I. (2021). Efikasi Diri, Stres Pengasuhan dan Strategi Koping Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus di Masa Pandemi Covid-19. Banjarmasin: *Jurnal Smart Paud*. (4)1. 11-22.
- Sa'diyah, S. (2016). Gambaran psychological wellbeing dan stres pengasuhan ibu dengan Anak AUTIS. Malang: Universitas Muhammadiyah, diakses tanggal, 1 Oktober 2021, 394-399.
- Williamson, D., & Johnston, C. (2019). Maternal ADHD symptoms and parenting stress: The roles of parenting self-efficacy beliefs and neuroticism. *Journal of Attention Disorders*, 23, 493-505.
- Woodgate, R. L., Ateah, C., & Secco, L. (2008). Living in a world of our own: The experience of parents who have a child with autism. *Qualitative Health Research*, 18(8), 1075-1083.

## RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN BANDAR UDARATORAJA DI KABUPATEN TANATORAJA

Oleh :

Muh. Aditya Ibrahim<sup>1)</sup>, Eri Hidayat<sup>2)</sup>, Halomoan Alexandra<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>email: muh.aditya99@gmail.com

<sup>2</sup>email: eri\_hidayat@yahoo.com

<sup>3</sup>email: halomoansitinjak88@gmail.com

### Abstrak

Pembangunan Bandar UdaraTorajayang menjadi proyek strategis pariwisata nasional, mendapati adanya masalah dan tuntutan oleh masyarakat. Tulisan ini memuat keterpaduan konflik antara pemerintahdengan masyarakat dan tentunya resolusi konflik yang terimplementasikan. Dalam penulisan ini, penelitian kualitatifialah bentuk penulisan yang digunakan dengan metode wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Latarbelakang konflik ialah kesenjangan antara opini publik dengan kebijakan yang ada. Dinamika konflik juga membahasdengan permasalahan ganti rugi atas lahan/tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah pembangunan bandar udara dan tentunya dikarenakan sebagian besar wilayah tersebut merupakan Tanah *Tongkonan*. Kerumitan dan kompleksitas karena keterlibatan Panitia 9 yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten TanaToraja sebagai pihak yang membantu proses pembangunan bandar udara malah terjaring korupsi. Dinamika konflik mempunyai dampak terhadapperubahanbudaya sosial, intimidasi, sertapenolakan dan perubahan sikap masyarakat. Resolusi konflik dilakukan oleh pihak yang melibatkan pemerintah,dan juga nonpemerintah. Pemerintah kabupaten tentunya berupaya bertindak secara persuasif, dengan melibatkanpihak pemangku adat dalam memediasi pihak yang berkonflik.Kedepannya penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendorong pihak manapun untuk menyusun dan membuat strategi penyelesaian konflik agraria dimanapun, terintegrasi serta terkoordinasi sehingga dapat menjadi rujukan pada pembangunan-pembangunansarana dan prasarana umum lainnya.

**Kata Kunci:** Resolusi Konflik, Pembangunan Bandar Udara,Tanah *Tongkonan*

### 1. PENDAHULUAN

Masyarakat Toraja memaknai bahwa suatu objek tanah dapat menjadi sebuah nilai ekonomi maupun nilai budaya. Status hak milikanah secara individualmaupun perseorangan di Kabupaten TanaTorajaterpadang sebagai nilai ekonomi sebab bisa dijadikan lahan pertanian atau peternakan. Namun lain halnya tanah yang dimaknai sebagai bentuk nilai budaya tatkalasebidang tanah itu kepemilikannya olehbanyak orang atau bahkan dalam satu keluarga, yang di Kabupaten TanaToraja disebut sebagai Tanah *Tongkonan* (Andau, 2021).

Peningkatan populasi dan tingginya hak guna lahan demi kepentingan penyediaan sarana dan prasarana sering kali diharuskan berselisih dengan situasi dan kondisi lingkungan. Ketersediaan lahan agraria ini lah dalam arti eksistensi khususnya sumber daya agraria seringkali beriringan dengan penyebab utama sebuah konflik. Berdasarkan permasalahan yang ada, jumlah konflik agraria secara signifikan terus-menerus mengalami kenaikan sehingga berdampak pada banyaknya persaingankepemilikan lahan yang pada dasarnya ialah ketersediaan lahan yang berkurang.

Permasalahan agraria di Kabupaten TanaToraja, yang meliputi tanah kepemilikan individu maupun tanah dengan kepemilikan secara kekeluargaan ataubersama (Tanah *Tongkonan*)

faktanya menjadi sebuah fenomena yang sering terjadi. Adapun diantaranya ialah kasus pembangunan Bandar UdaraToraja sebagai salah satu program pembangunan sektor pariwisata nasional.

Ichsan Malik menjelaskan bahwasanyasebuah konfliktidak terlepas dalam pengelolaan sumber daya alam (agrarian) dan disebabkan oleh banyaknya aktor yang menjadi pihakdengan kepentingan serta tujuan yang berbeda. Perkembangan pembangunan khususnya infrastrukturseperti akses jalan, sarana dan prasarana, fasilitas transportasi, dan lain sebagainya seringkali melatarbelakangkembangkan menjadi pemicu terjadinya konflik agraria. Menurut Wallenstein dan sollenberg bahwa konflik intra-negara telah menjadi ancaman serius bagi sebuah perdamaian.Kompleksnya dinamika konflik pembangunan Bandar Udara Torajaini sehingga mengakibatkan terganggunya stabilitas keamananyang juga berdampak pada situasional keamanan daerah.

Pola masyarakat masa kini lebih mengarah kepada tuntutan yang dibarengi dengan perlawananyangbertransformasi sejak erareformasi. Masyarakat saat ini pun kian sadaran menuntut akan hanyalah mengekspresikannyamelalui perlawanan secara terbuka.Fenomena konflik di Kabupaten TanaTorajatepatnya di Kecamatan Mengkendek merupakan sebuah konflik sosial yang diakibatkan

adanya perbedaan atau pertentangan. Pertentangan yang ada mencakuptindakan saling klaim atas kepemilikan Tanah tongkonan dan berlomba-lomba untuk meminta ganti rugi atas kepemilikan lahan/Tanah. Tanah *Tongkonan* dalam masyarakat Toraja adalah Tanah milik bersama dan digunakan untuk kepentingan seluruh anggota keluarga (Pakan, Pratiknjo & Mamosey, 2018). Jadi semua anggota keluarga berhak untuk menggarap tanah tersebut.

Pokok Permasalahan pada studi ini adalah konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Mengkendek yang mana melibatkan masyarakat dengan pemerintah. Maka dari itu, analisis resolusi konflik dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada membuat penulis ingin mengetahui sejauhmana Langkah-langkah yang dilakukan sebagai bentuk dari sebuah resolusi konflik.

## 2. METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif penulis gunakan karena sesuai dalam memahami masalah-masalah yang dialami manusia pada tatanan sosial dengan menciptakan gambaran secara kompleks dan menyeluruh (Creswell, 1998). Dalam penelitian ini penulis juga berusaha menjelaskan resolusi konflik agraria pembangunan Bandar Udara Toraja. Pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling yang ditinjau dengan mengumpulkan informasi guna menjadi dasar dari teori dan rancangan yang digunakan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini dari unsur regulator, operator, dan masyarakat. Analisis data kualitatif menggunakan mode 1 interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014), menjelaskan bahwa teknik analisis terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bandar Udara Toraja terletak pada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, yang merupakan kawasan dataran tinggi. Pada proses pembangunannya, Bandar Udara Toraja yang terletak di Kecamatan Mengkendek ini mulai direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang dimana pada saat itu Tandi Roma Andi Lolo menjabat sebagai Bupati Tana Toraja (1990-1995). Awal mulai perencanaannya ditahun 2010, ketika DPRD Tana Toraja mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.20 milyar guna sebagai biaya ganti rugi lahan. Lokasinya tepat berada sekitar Buntu (Gunung/Bukit) Kuni' yang meliputi Lembang (Desa) Tampo, Simbuang, Rante Dada dan Buntu Marinding di Kecamatan Mengkendek (Biringkanae, 2014).

Pemerintah melegitimasi bahwa Bandar Udara Pongtiku (Bandar Udara lama Toraja) dinilai sudah

tidak dapat digunakan lagi terlebih untuk pesawat komersil dengan kebutuhan landasan pacu yang lebih panjang dari ketersediaan di Bandar Udara Pongtiku. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mulai merencanakan pembangunan bandar udara baru yang luasnya sekitar 225 Ha yang dilengkapi dengan panjang landasan sekitar 1.650 meter.

### Latar Belakang Konflik

Selang beberapa tahun sejak dimulainya sosialisasi ke masyarakat terkait rencana pembangunan bandar udara hingga tahap pengerjaan, masyarakat terus dihadapkan dengan permasalahan sosial. Konflik yang dilatarbelakangi oleh pergolakan sumber daya agraria (tanah/lahan) yang bertujuan untuk pembangunan kepentingan umum menemui titik temu masalah, dimana hampir seluruh wilayah pembangunan Bandar Udara merupakan Tanah *Tongkonan*. Masalah utama perihal Tanah *Tongkonan* ialah Pertama, Tanah *Tongkonan* pada umumnya tidak memiliki sertifikat secara administrasi disebabkan kepemilikannya yang kolektif atau secara bersama. Kedua, batasan-batas dari Tanah *Tongkonan* yang tidak jelas. Ketiga, dengan tidak adanya sertifikat dan batas yang jelas mengakibatkan aksi saling klaim atas kepemilikan yang sah.

Kompleksitas masalah kepemilikan Tanah *Tongkonan* ini merujuk kepada tatanan kearifan lokal masyarakat adat Suku Toraja yang berorientasi penguasaan Tanah *Tongkonan* yang berdasarkan atas:

1. Pemberian maupun penyerahan kepemilikan atas tanah bersumber dari Adat *Tongkonan* diserahkan bahkan dikuasakan kepada keturunan *Tongkonan* yang dalam bahasa Toraja disebut *Ampa'na Tongkonan*.
2. Pemberian maupun penyerahan tanah/lahan secara Hibah atau *Ditekkenan*.
3. Pemberian maupun penyerahan didasari oleh peran serta tanggungjawab dari seseorang dalam upacara-upacara adat terhadap hak dan kewajiban dilakukan baik oleh perseorangan maupun rumpun keluarga *Tongkonan* yang dalam bahasa Toraja disebut *Ada' Disumpa'*
4. Pemberian maupun penyerahan yang didasari oleh ketokohan yang disebut *Torroan Dipolondong* atau *Pekamberan*.
5. Tanah merupakan Tanah yang didapatkan atas adanya suatu jaminan terhadap adanya suatu ikatan pernikahan yang diselenggarakan melalui tatanan adat.

Tanah *Tongkonan* dapat dikenali dengan adanya bangunan rumah adat, *Rante* (hamparan Tanah untuk pelaksanaan *Rambu Solo'*) dengan batas-batas yang didasari dengan tanda alam seperti alor yang merupakan pertemuan dua buah lembah, selokan, sungai atau jalan setapak. Ketidakjelasan pembagian kepemilikan dalam Tanah *Tongkonan* merupakan salah satu hal yang mengakibatkan munculnya persoalan pembangunan Bandar Udara

Toraja yakni dalam pembebasan 78 Tana*Tongkonan*(Biringkanae,2014).

Dinamika konflik dalam penulisan ini menjelaskan adanya sebuah kesenjangan antara opini publik dengan kebijakan yang menjadi pendampingnya. Pembangunan bandar udara yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, nyatanya harus berhadapan dan berselisih dengan ketergantungan warga akibat pergolakan dari sengketa lahannya. Persoalan konflik agraria dalam pembangunan Bandar Udara TorajadiKabupaten TanaToraja diawali adanya pertentangan atas sengketa Tanah *Tongkonan*dengan aksi saling klaim kepemilikan secara penuh (Rima, 2019). Sehingga berimbas terhadap adanya tuntutan pihak (orang/badan hukum) yang berisi tuntutan-tuntutan akan keberatan terhadap hak atas tanah,batas-batas tanah, status tanah serta status kepemilikan.

Pada pembebasan lahan dalam konflik agraria ini, pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten TanaToraja membentuk “Panitia 9” yang Pimpinoleh Sekretaris Kabupaten TanaToraja sebagai Ketua. Selain itu, dibentuk juga satuan tugas (satgas) pembebasan lahan yang berjumlah 146 orang yang beranggotakan; Forkopimda dan beberapa kepala OPD, para tokoh- tokoh adat, aktivis LSM, lurah/kepala Lembang (desa), serta awak media/wartawan.

Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat mengenai biaya ganti rugi lahan adalah lahan basah/ sawah yang belum bersertifikat dihargai senilai Rp 35.000/ m<sup>2</sup>, tanah kering yang belum memiliki sertifikat senilai Rp 21.390/m<sup>2</sup>. Selanjutnya lahan basah bersertifikat senilai Rp.40.250/m<sup>2</sup> dan lahan kering bersertifikat senilai Rp.26.737/m<sup>2</sup>. Dalam pemberian ganti rugi, tidak hanya terhadap nilai sebidang tanah, namun ganti rugi juga diberikan kepada 31 jenis tanaman produktif yang terdapat kawasan/lahan agraria. Pada proses pelaksanaannya, pembayaran tersebut dilakukan dengan cara: a) Melakukan sosialisasi perihal rencana pembangunan bandar udara; b) dalam proses perencanaan pun pemerintah telah melibatkan tokoh adat yang dalam hal ini *To' Pareng'e* dan juga masyarakat yang mempunyai lahan yang akan dibangun bandar udara; c) Melakukan pendataan/Inventarisasi lahan agraria; d) Penyampaian hasil pemetaan dan pengukuran luas area pembangunan kepada masyarakat; e) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang harga/nilaitanah.

Pendataan lahan dilakukan oleh pemerintah kepada pemilik lahan dengan mengajukan syarat-syaratguna melengkapi data sebagai bukti atas kepemilikan tanah, berupa sertifikat atas tanah secara absah serta bukti lain yang diakui oleh masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Panitia 9 bersama dengan pihak Kantor Pertanahan TanaToraja serta masyarakat yang memiliki lahan, melakukan

verifikasi data kepemilikan tanah lalu kemudian memprosesnya hingga mengumumkan hasil keputusan. Dalam upaya ganti rugi lahan dalam konflik ini, pemerintah terus berupaya melakukan pembayaran secara bertahap. Namun kemudian, proses pembayaran ganti rugi tersebutmengalami hambatan dikarenakan timbulnya masalah baru berupa adanyatindak korupsi yang melibatkan pemerintah terkhusus Panitia 9 ini.

### **Dampak**

Dalam teori perubahan sosial, dinamika konflik agraria ini merupakan proses adanya peningkatan alam secara fisik. Masyarakat yang sebelumnya bermukim di lokasi desa yang damaiserta jauh dari pergolakan sosial terpaksa diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang berbeda pasca bandar udara ini telah dibangun. Bagi masyarakat TanaToraja khususnya di wilayah Kecamatan Mengkendek tentunya akan mengalami perubahan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam teori resolusi konflik, dampak yang ditimbulkan dari eskalasi konflik berupa pembangunan bandar udara ini akan menjadi masalah jika tidak dibarengi dengan antisipasi serta penanganan yang baik dan solutif.

Rencana strategis nasional pada proyek pembangunan bandar udara baru akan menimbulkan perubahan nilai dan mengakibatkan pergeseran nilai kearifan lokal terutama dengan adanya budaya baru yang masuk. Budaya serta kearifan lokal dipandang dapat mengalami perubahan sosial jika tidak dipegang teguh oleh masyarakatnya. Berdasarkan teori konflik, dalam budaya leluhur masyarakat tentunya diyakini akan berasaskan kepada nilai kepatuhan, namun pada akhirnya mengalami perubahan terutama didorong oleh desakan ekonomi.

Kemajemukan persoalan seperti kemajuan teknologi, ekonomi bahkan peningkatan jumlah penduduk sangat potensial memicu tuntutan dan kebutuhan atas tanah. Identifikasi serta penguasaan atas administrasi terhadap kepemilikan lahan menjadi persoalan dalam kepastian dan keadilan akan hak lahan agraria (Abdullah, 2018). Pandangan masyarakat terhadap makna lahan agraria yang mengalami perubahan mengakibatkan munculnya konflik-konflik kepentingan,. Adapun bentuk konflik kepentingan itu ialah aksi saling mencari keuntungan dari ganti rugi pembebasan lahan.Dipandang berdasarkan teori Ralph Dahrendorf, bahwa masyarakat yang hanya memandang tanah warisan berdasarkan sisi ekonominya saja tentu akan berdampak kepada keinginan untuk dapat sebanyak-banyaknya menguasai tanah tersebut.

Keberlangsungan konflik agraria ini sangat berdampak terhadap mudarnya norma-norma dan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang melekat dalam identitas masyarakat TanaToraja. Perbedaan-perbedaan yang munculkan ditengah masyarakat juga secara tidak langsung dikarenakan oleh adanya disfungsi sosial. Yang berarti bahwa budaya dan

kearifan lokal yang didalamnya termuat nilai dan norma sosial tidak lagi dipatuhi dan dilakukan serta pranata sosial dengan sistem pengendalinya pun juga tidak terlaksana seperti apa yang seharusnya (Kolip, 2010). Hancurnya nilai dan norma dalam kearifan lokal tidak hanya akibat dari sebuah dinamika konflik namun bisa juga diakibatkan karena ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan dalam budaya dan kearifan lokal yang berujung pada munculnya sebuah konflik. Namun dalam konsep konflik pada dasarnya konflik dapat membawa dampak positif dan negatif dalam tatanan hidup bermasyarakat. Menurut L. Coser bahwasanya dampak positif yang ditimbulkan oleh konflik ialah dapat menggugah masyarakat untuk dapat mengambil peran aktif yang semula pasif guna menjalankan sistem dalam tatanan bermasyarakat.

### Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik di TanaToraja pada umumnya mengupayakan adanya penyelesaian dengan asas damai dan rukun, terlebih dalam kaitannya dengan Tanah tongkonan yang tidak hanya mengharuskan para pihak yang terlibat dalam konflik namun semua anggota keluarga dalam satu tongkonan. Jadi masyarakat tidak hanya mengharapkan suatu keputusan menang atau kalah, namun konflik sengketa lahan serta ganti rugi tersebut dalam terselesaikan dengan damai, sehingga akar konflik yang merusak tatanan kehidupan yang erat dengan kekeluargaan yang harmonis dapat kembali seperti sebelum adanya konflik agraria.

Penyelesaian konflik salah satunya dilakukan mulai dengan cara bermusyawarah, mulai dengan musyawarah dengan skali kecil dimana melibatkan keluarga serta kerabat, bahkan jika perlu dengan melibatkan para tokoh-tokoh adat. Upaya damai dalam penyelesaian konflik masalah sengketa Tanah *Tongkonan* pada masyarakatToraja biasanya diselesaikan melalui aturan adat, dimana terdapat salah seorang yang berstatus *To' Parenge'* atau *To' Ma'Kada Londong*. Selain itu keterlibatan pemerintah lembang/desa sebagai mediator terhadap pihak yang terlibat dalam sengketa. Pada prosesnya akan dijelaskan mengenai asal-usul kepemilikan Tanah Tongkonan atau *Masullo Nene'*.

Pemerintah yang mempunyai andil (Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten TanaToraja)juga berupaya dan terus melakukan kontribusi dalam menciptakan budaya damai dalam konflik pembangunan Bandar Udara Toraja. Adpaun tindakan yang telah dilakukan yang berdampak bagi proses penyelesaian konflik, misalnya berkoordinasi dengan lintas sektor, membangun partisipasi masyarakat, hingga upaya membangun penyelesaian alternatif lainnya. Pemerintah KabupatenTanaToraja dalam peranan pentingnyaberhasil menjembatani antar kepentingan masyarakat yang tidak mendukung/kontra, dan tentunya karena pendekatan yang terwujud dengan baik. Sesuai dengan asas prinsip persuasif yang dikedepankan, Pemerintah

kabupaten TanaToraja pungiat membangun komunikasi yang intensif. Misalnya melakukan pendekatan langsung kepada warga, serta melakukan upaya negosiasi dengan masyarakat dengan melakukan pendekataninformalitas yang secara berkelanjutan.

Stabilitas dan keamanan dalam upaya penyelesaian konflik tentunya tak lepas dari peran lintas sektor sepertiForkopimda, Aparat Kepolisian, Aparat TNI, bantuan Satpol PP, dan keterlibatan Intelijen daerah serta pihak-pihak lainnya terpadu menjadi satu dalam melaksanakan koordinasi guna menghadapi masyarakat yang tidak mendukung/kontra. Dengan kata lain, lembaga pemerintah dalam legitimasi dan otoritas yang kuat tentunya memiliki kesiapan dan sumber daya yang baik dalam memainkan perannya.

Berdasarkan pernyataan Galtung yang menjelaskan bahwasanya suatu konflik dapat diatur apabila yang terlibat dalam konflik tersebut menemukan cara bernegosiasi terhadap perbedaan kepentingan sertasesepakat dalam aturan main sehingga dapat mengatur konflik. Berdasarkan kutipan dari Galtung yang merupakan salah satu konsep resolusi konflik bahwa negosiasi merupakan bentuk dari salah satu perwujudan upaya damai atau yang dikenal dengan istilah *Peace Making*.

Rangkaian pencapaian tujuan dalam menemukan titik terang ialah dapat dilakukan dengan pendekatan dialog, maupun negosiasi. Pemerintah KabupatenTanaTorajaberupaya melakukan pengomodoran berbagai kepentingan terutama terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan bandar udara melalui: (1) Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan maksimal demi terpenuhinya hak atas kebutuhan warga atas lahan yang mereka miliki, dan (2) Memberikan edukasi, pelatihan bahkan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menjadi wadah untuk menggali potensi mata pencaharian baru bagi masyarakat. Akan tetapi, dengan beragam upaya yang dilakukan pemerintah tetap saja terdapat kekecewaan serta kepahitan yang dirasakan akibat dari pembangunan bandar udara.

Pada proses dibangunnya penyelesaian konflik pembangunan Bandar Udara Toraja, muncul sebuah prasyarat dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahmisalnya, hak semua masyarakat yang terdampak harus diakomodir dan teraktualisasikan dengan baik. Lalu kemudian proses penyelesaian konflik guna menghasilkan titik terang (*common ground*). Sebab jika tahap ini tidak diupayakan terlaksana dengan efektif dan efisien maka jalannya penyelesaian konflik akan menemui banyak hambatan. Sebagian masyarakat yang terlibat dalam dinamika konflik pun juga mengkonfirmasi bahwa mereka mengaku lelah dalam penuntutan haknya yang berlangsung lama. Selain itu masyarakat pun juga merasa sungkan apabila ingin menyuarkan haknya melalui media organisasi, sebab di sisilain ada kekhawatiran terhadap sanksi sosial yang

melekat dalam tatanan hidup masyarakat. Terlebih dalam wilayah yang terkena dampak dari pembangunan bandar udara ialah daerah yang kental akan budaya dan memegang teguh nilai dan norma yang ada.

Untuk itu, perlunya aksi nyata dalam upaya menjaga budaya dan kearifan lokal sehingga tetap melekat dan menjadi identitas sosial pada tatanan hidup bermasyarakat. Pernyataan tersebut selaras dengan kutipan Ichsan Malik, yang menjelaskan bahwasanya pada proses mewujudkan suatu nilai damai dalam konflik, terdapat keharusan terhadap penggunaan nilai budaya serta pendekatan lokal bahkan tatanan kebiasaan dalam masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja juga telah berupaya mengubah dinamika konflik yang menjadi pergolakan sosial pada masyarakat. Perubahan yang dilakukan ialah mengubah fenomena yang terjadi menjadi damai positif (*positive peace*). Berdasarkan konsep Galtung dijelaskan bahwa aspek damai secara struktur, berlandaskan pada nilai keadilan, kesetaraan serta persamaan. Kebutuhan serta kepentingan dari semua pihak yang terlibat telah diakomodir sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Terjalannya hubungan dan komunikasi yang baik, menjadikan masyarakat yang tidak mendukung pemerintah pun harus ikhlas terhadap pengalihan kepemilikan tanah. Walaupun begitu mereka tetap menyesuaikan dengan perubahan dan percaya diri untuk tetap menjalankan hidup sebagaimana dalam tatanan sosial bernuansa budaya dan kearifan lokal yang terjaga.

#### 4. KESIMPULAN

Dinamika konflik pembangunan bandar udara ini berlatar belakang adanya opini publik yang tidak selaras dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pengambil kebijakan. Sebagai perwujudan pembangunan yang berkelanjutan, proyek pembangunan bandar udara Toraja sebagai salah satu program strategis nasional disektor pariwisata pun tetap menjaga dan melestarikan keberlangsungan budaya dan kearifan lokal dalam tatanan sosial masyarakatnya. Berdasarkan harapan bersama, bahwasanya akan terwujudnya perubahan dari dinamika konflik menjadi damai positif sehingga masyarakat akan merasakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, bahkan kesetaraan akan hak sebagai warga negara.

Pemerintah dalam pembangunannya patut memperhatikan akan pentingnya perencanaan yang baik dan tentunya selaras dengan aspek-aspek sosial. Karena jika hanya dilakukan dengan tujuan kepentingan tertentu maka akan memberikan pandangan bahwa pemerintah memaksakan masyarakat untuk membebaskan lahannya dengan sepihak. Fenomena konflik telah mendapatkan penyelesaian yang terlaksana oleh keterlibatan pemerintah serta non pemerintah. Pemkab Tana Toraja dalam andilnya sebagai penanggungjawab

telah menyelesaikan berbagai macam tindak masalah dengan aksi yang damai dan persuasif. Keterlibatan pemangku adat menjadi salah satu pihak mediator dalam konflik ini. Dengan adanya dialog dan mediasi yang terus dilakukan menjadi sebuah resolusi konflik bagi penyelesaian konflik agraria pada pembangunan Bandar Udara Toraja.

#### Rekomendasi

##### Akademis

1. Terkait perubahan tatanan hidup sosial masyarakat Tana Toraja akibat pembangunan bandar udara ini sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut secara kualitatif. Penelitian kuantitatif diharapkan mampu menganalisis tolak ukur capaian dari aktualisasi kebijakan pemerintah terutama dalam sengketa pembebasan lahan agraria.
2. Melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai ketahanan masyarakat Tana Toraja dalam menghadapi konflik agraria yang berimplikasi pada perubahan sosial masyarakat serta terhadap hasil kinerja pemerintah.
3. Studi kedepan juga perlu memperhatikan peran lembaga non pemerintah dalam penyelesaian masalah agraria khususnya mengenai pengadaan lahan guna pembangunan sarana dan prasarana umum.

##### Praktis

1. Keterlibatan pihak-pihak dalam resolusi konflik agar berkolaborasi dan komunikasi lintas sektor dalam penanganan masalah jika nantinya muncul lagi, khususnya tatanan hidup masyarakat setelah mediasi agar terhindari dari ancaman potensi konflik nantinya.
2. Implementasi UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, khususnya pada skala masyarakat pedesaan yang sangat perlu memperhatikan fungsi sosial. Sebab, permasalahan yang ada tidak hanya tentang nilai dari sebuah ganti rugi agrarian namun kontrak sosial yang ada dan telah terjalin sejak lama akan menjadi sia-sia. Upaya damai secara kekeluargaan dengan itikad dan keharmonisan perlu tetap dipegang erat oleh setiap individu, sebab dalam aksi persuasif yang dilakukan sebagai mediator konflik berguna dalam mengetuk hati masyarakat yang lahannya diambil alih demi suatu kepentingan umum. Selain itu, keterlibatan masyarakat, seperti tokoh-tokoh adat dalam pembahasan perencanaan pembangunan setidaknya membuat mereka mendapatkan pengakuan akan penghormatan dirinya.
3. Demi kepentingan pembangunan-pembangunan selanjutnya, pemerintah dalam hal ini baik pusat maupun daerah untuk dapat membuat suatu mekanisme penyelesaian konflik yang terintegrasi dan terkoordinir. Selain itu komunikasi lintas sektor penting terus ditumbuh

kembangkan dengan ruang-ruang dialog terutama perihal eksistensi fungsi sosial masyarakat.

##### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Suparman. 2018. Makna kearifan lokal To Pareng dalam penyelesaian konflik lahan di Tana Toraja. doi : <http://dx.doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.122-131>
- Andau, Andau, Nopri. 2021. Pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik: Studi Tentang Konflik Sengketa Tanah Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Biringkanae, P, Arland. 2014. Konflik Tanah Tongkonan Pada Pembangunan Bandar Udara Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten TanaToraja. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/14386>
- Galtung, Johan. 1996. Peace by Peaceful Means, London: Sage Publication.
- Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmuabad.
- Malik, Ichsan. 2017. Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian. Jakarta: Kompas.
- Pakan MSL, Pratiknjo, & Mamosey WE. 2018. Rumah Adat “Tongkonan” Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. *Holistik Journal of Social and Culturef Social and Culture*, XI(22), 1–16.
- Pritangguh, Mei. 2019. Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (Nyia) Di Kulon Progo. Vol 5 No 1 *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*. Universitas Pertahanan RI.
- Pruit, Dean G., dan Jeffrey Z., Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rima, G. 2019. Persepsi masyarakat Toraja pada upacara adat Rambu Solo’ dan implikasinya terhadap kekerabatan masyarakat di Kecamatan Makale Kabupaten TanaToraja. *Phinisi Integration Review* 2 (2). doi: <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10000>

# PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN IPA MATERI GETARAN DAN GELOMBANG UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Oleh :

Fenny Fenesia<sup>1)</sup>, Aloysius Mering<sup>2)</sup>, Indri Astuti<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> UNTAN, Pontianak, Indonesia

<sup>1</sup>E-mail: fennyfenesia@gmail.com

<sup>2</sup>E-mail: aloysiusmering@fkip.untan.ac.id

<sup>3</sup>E-mail: indribk91@yahoo.com

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan multimedia pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada materi getaran dan gelombang Sekolah Menengah Pertama. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode *Research and Development* (R&D) model pengembangan 4D. dengan model pengembangan 4D melalui tahapan: (1) *define*; (2) *design*; (3) *develop*; dan (4) *disseminate*. Penelitian dilaksanakan di SMP Bruder Pontianak Kelas VIII dengan partisipan 30 peserta didik dan enam orang validator ahli desain pembelajaran, ahli media, dan ahli materi pelajaran IPA. Perolehan data dari angket tertutup dan hasil belajar peserta didik yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Secara keseluruhan desain multimedia pembelajaran dinyatakan valid dengan rata-rata 80% dan peserta didik memberi tanggapan positif terhadap multimedia pembelajaran yang digunakan. Perubahan pada hasil belajar mengalami peningkatan sebesar 11,467. Pada hasil uji Wilcoxon yang melibatkan 30 peserta didik terdapat perbedaan yang signifikan dengan  $T > t_{tabel}$ , yaitu  $4,21 > 1,64$ , serta nilai *effect size* yang diperoleh adalah 0,79; yaitu pada kategori *moderate effect*. Dengan hasil penelitian tersebut, maka multimedia pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Materi getaran dan gelombang untuk Sekolah Menengah Pertama dapat diterapkan untuk materi yang relevan pada pembelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama.

**Kata Kunci:** Multimedia Pembelajaran, Hasil Belajar, 4D, Getaran dan Gelombang

## 1. PENDAHULUAN

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang berhasil memerlukan dukungan berbagai aspek antara lain sikap peserta didik yang positif terhadap mata pelajaran, kegiatan belajar mengajar yang mampu meningkatkan pemahaman peserta didik, multimedia pembelajaran yang menarik, dan sesuai dengan kurikulum. Dalam penelitian ini dikembangkan multimedia pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang dengan kriteria penilaian efektifitas multimedia adalah sikap terhadap multimedia tersebut.

Kurikulum 2013 yang menitik beratkan pendidikan berbasis karakter yaitu kurikulum yang mengutamakan pemahaman, keterampilan, dan pendidikan berkarakter. Kurikulum yang mengutamakan pemahaman yaitu kurikulum dengan pengembangan potensi tertentu dari peserta didik melalui pembelajaran yang bersifat alamiah dan bukan dengan transfer pengetahuan. Contohnya adalah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pendidik hanya sebagai fasilitator dalam suatu pembelajaran berdasarkan perbedaan karakteristik peserta didik. Contoh pendidikan berkarakter adalah cerdas, berakhlak, toleransi, arif, bijaksana, rukun, kerja keras, disiplin, jujur, dan menepati janji (Idi, 2016, h.272). Jadi, kurikulum 2013 dalam pembelajaran IPA tercapai bilamana peserta didik memiliki pemahaman, keterampilan,

dan karakter yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam kurikulum.

Selain itu keterbatasan kemampuan berfikir dan hasil belajar sains peserta didik Indonesia juga secara global dinyatakan rendah yang menyebabkan hasil capaian evaluasi IPA dalam TIMSS menduduki peringkat 70 dari 79 negara peserta dan pada peringkat keseluruhan, Indonesia menduduki peringkat 74 dari 79 negara (TIMSS dan PIRLS *International Study Center*, 2019). Sehingga salah satu cara yang dapat diterapkan dalam mendukung keterlaksanaan kurikulum dan pemanfaatan dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik adalah melalui penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Multimedia merupakan penggunaan lebih dari satu media untuk menyampaikan informasi (Munir, 2015, h.2). Multimedia dalam *American Heritage Electronic Dictionary* adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan dan menampilkan informasi, sehingga multimedia merupakan gabungan antara media teks, gambar, suara, video, dan media lainnya dalam suatu produk (dalam Munir, 2015, h.2). Hasil penelitian Ratih Wulandari, dkk (2017) menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran aktivitas belajar peserta didik mengalami peningkatan hingga mencapai 85,05% dengan predikat sangat baik dan tingkat ketertarikan pelaksanaan pembelajaran dengan multimedia interaktif berada pada 92,72% dengan predikat sangat

menarik. Dengan kata lain, dalam pembelajaran multimedia pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran.

Dari temuan tentang manfaat multimedia pembelajaran, yakni dapat meningkatkan aktivitas dan ketertarikan peserta didik pada pembelajaran juga tergambar dari sikap peserta didik di SMP Bruder Pontianak. Sikap tersebut antara lain peserta didik cenderung cepat bosan dan mengalami kesulitan dalam memahami inti materi pembelajaran yang diberikan. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh dari temuan awal bahwa pendidik kurang memaksimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia, seperti televisi dan projector interaktif sehingga peserta didik cenderung merasa lelah dan bosan dengan pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan atau hanya menggunakan slide power point dalam proses belajar mengajar. Dari temuan diatas dapat dikatakan belum ada ketercapaian tujuan dari kurikulum 2013, yaitu diharapkan mampu membangun proses belajar berbasis karakter untuk peserta didik. Selain itu, oleh karena pembelajaran yang cenderung konvensional berakibat pada ketertarikan peserta didik. Peserta didik merasa bosan karena belum ada sesuatu yang dapat memicu semangat serta daya tarik terhadap pembelajaran IPA, hal ini juga tampak dari hasil belajar peserta didik yang rendah.

Pada temuan awal diperoleh 87,8% yaitu, 108 peserta didik dari 123 peserta didik menjawab memerlukan multimedia agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, dari 12 pendidik yang memberi tanggapan pada angket, 12 peserta didik menjelaskan bahwa peran multimedia dalam pembelajaran sangat diperlukan.

Berdasarkan permasalahan dan penelitian sebelumnya yang relevan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media yang mampu memfasilitasi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran IPA, khususnya pada materi getaran dan gelombang di SMP Bruder Pontianak. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar peserta didik menjadi termotivasi, menyukai, dan mudah dalam melaksanakan pembelajaran.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan (R & D). Penelitian ini dilakukan di SMP Bruder Pontianak, jalan A.R. Hakim N0.92, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sejak 16 Juni 2021 hingga 27 Juli 2021. Partisipan penelitian ini terdiri dari peserta didik kelas VIII SMP Bruder Pontianak.

Prosedur pengembangan pada penelitian ini menggunakan tahapan model desain 4D dalam mengembangkan multimedia pembelajaran dengan *lectora* 18. Menurut Thiagarajan, Langkah-langkah

pada tahapan pengembangan produk, yaitu: *Define*, pada tahapan *define* dimulai dengan *front and analysis*, yaitu melakukan analisis kebutuhan awal dalam lingkungan sekolah, terutama pada proses pembelajaran IPA dan analisis pada kurikulum yang digunakan untuk menetapkan produk yang akan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kedua adalah *learner analysis* yaitu menganalisis karakter peserta didik dan memperhatikan tanggapan-tanggapan yang tampak oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi acuan peneliti dalam menentukan produk yang akan dikembangkan. Ketiga *task analysis* adalah penentuan jenis tugas yang akan diberikan pada peserta didik sehingga mendukung esensial dari produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan analisis tugas maka tugas yang diberikan dapat berupa kuis dan peserta didik dapat langsung melihat berapa skor yang diperoleh dari kuis tersebut. Keempat adalah *concept analysis* dengan menanyakan pendapat peserta didik tentang pembelajaran IPA pada kesehariannya. Kelima, *specifying instructional objectives* yaitu merumuskan tujuan pembelajaran untuk mendukung hasil dari penggunaan produk yang akan dikembangkan yaitu menuntut agar peserta didik paham dan memberikan tanggapan yang baik terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan produk yang dikembangkan.

Tahap kedua adalah *design*. Tahapan *design* dimulai dengan *constructing criterion-referenced test*, yaitu penyusunan tes dalam konteks ini adalah tes dalam bentuk kuis dalam bentuk soal pilihan ganda. Kedua, dilakukan *media selection* sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, yaitu menggunakan multimedia pembelajaran untuk materi getaran dan gelombang yang dirancang dengan menggunakan aplikasi *lectora inspire* yang terdiri dari komponen teks, gambar, suara, simulasi, dan kuis. Pada bagian *format selection* menggunakan format halaman depan, halaman pembuka, format petunjuk penggunaan, format pendahuluan yang berisi pemaparan kompetensi inti (KI); kompetensi dasar (KD); dan tujuan pembelajaran, format isi (format materi, format audio, format gambar, format simulasi), format akhir (format daftar referensi), format kuis, format penutup (format profil) yang dapat dikemas dalam bentuk *Compact Disk (CD)* atau dengan *flashdisk*.

Tahap ketiga adalah *develop*. Pada tahap *develop* atau tahap pengembangan akan menghasilkan produk berupa multimedia pembelajaran. Tahapan yang terdapat pada *develop* adalah *expert appraisal* dengan melakukan validasi ahli desain, materi, dan media. Setelah itu melakukan uji coba (*development testing*). Pada tahapan uji coba ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok besar. Uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, dan uji coba kelompok besar

bertujuan untuk memperoleh tanggapan peserta didik tentang multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan multimedia pembelajaran yang dikembangkan dan alat pengumpul data, mendorong peserta didik untuk memberikan tanggapan yang berhubungan dengan multimedia pembelajaran melalui alat pengumpul data yang diberikan, dan pengembang mengumpulkan serta mencatat tanggapan yang diberikan oleh peserta didik tersebut. Setelah itu peneliti akan memperbaiki multimedia sesuai dengan saran dan komentar dari peserta didik sehingga memperoleh hasil yang efektif digunakan untuk pembelajaran.

Tahap keempat adalah *disseminate*. *Disseminate* merupakan tahap akhir pada model pengembangan ini. *Disseminate* atau biasa dikenal dengan penyebarluasan dilakukan dengan cara mengunggah media pembelajaran yang telah di kembangkan ke akun sosial media berupa YouTube sehingga jangkauan pemanfaatan multimedia ini diharapkan lebih luas dan mampu menginspirasi para pengembang di kemudian hari serta dilakukan berbagi inovasi dengan guru mata pelajaran serumpun.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, angket, dan tes dalam bentuk pilihan ganda. Serta analisis data kualitatif dan kuantitatif. Tahapan yang dilakukan pertama kali adalah pada angket validasi ahli.

Peneliti menggunakan data deskriptif kualitatif untuk menjelaskan hasil analisis validasi ahli terhadap multimedia pembelajaran. Penyajian data menggunakan tabel dan grafik. Berikut ini adalah kriteria penilaian validitas:

Tabel 1 Skala Likert

Kategori	Skor
Sangat senang (SS)	4
Senang (S)	3
Cukup senang (CS)	2
Kurang senang (KS)	1

Prosedur dalam penilaian tanggapan peserta didik adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata skor setiap peserta didik dengan rumus:

$$\text{Rata - rata tiap peserta didik} = \frac{\sum(\text{skor} \times \text{jumlah butir soal})}{\text{Total butir soal}}$$

- Menghitung rata-rata skor seluruh peserta didik dengan rumus:

$$\text{Rata - rata seluruh peserta didik} = \frac{\sum \text{rata - rata tiap peserta didik}}{\text{Jumlah peserta didik}}$$

Tabel 2 Klasifikasi tanggapan peserta didik

Rata-rata skor jawaban	Klasifikasi sikap
$4,25 < x \leq 5$	Sangat baik
$3,5 < x \leq 4,25$	Baik
$2,8 < x \leq 3,5$	Kurang baik
$2,05 < x \leq 2,8$	Tidak baik
$1,3 < x \leq 2,05$	Sangat tidak baik

Penggunaan perhitungan statistik pada perolehan hasil belajar menggunakan uji Wilcoxon. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh tidak berdistribusi normal dan berdasarkan teori asumsi

bahwa dengan sampel yang kecil data cenderung tidak berdistribusi normal. Untuk mencari nilai T (nilai t dari tabel) maka menggunakan persamaan:

$$T = \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2}}$$

Keterangan:

T = nilai uji wilcoxon

$R_1$  = jumlah ranking

$R_1^2$  = jumlah kuadrat dari hasil ranking

Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0$ : tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia pembelajaran IPA pada materi getaran dan gelombang di SMP Bruder Pontianak.

$H_a$ : terdapat perbedaan nilai yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia pembelajaran IPA pada materi getaran dan gelombang di SMP Bruder Pontianak

Untuk memperoleh nilai signifikansi penggunaan multimedia maka dilakukan pengukuran pengaruh penggunaan media terhadap hasil belajar, yaitu pengujian efektifitas penggunaan multimedia. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah menggunakan multimedia pembelajaran dalam proses belajar. Acuan perhitungan *effect size* (ES) menurut Cohen, yaitu:

$$ES = \frac{\bar{X}_2 - \bar{X}_1}{S_{gab}}$$

$$S_{gab} = \sqrt{\frac{(N_1 - 1)SD_1^2 + (N_2 - 1)SD_2^2}{N_1 + N_2 - 2}}$$

Keterangan:

$\bar{X}_2$  = rerata *posttest*

$\bar{X}_1$  = rerata *pretest*

$N_1$  = jumlah sampel *pretest*

$N_2$  = jumlah sampel *posttest*

$SD_1^2$  = standar deviasi sampel *pretest*

$SD_2^2$  = standar deviasi sampel *posttest*

Tabel 3 Klasifikasi *effect size*

Size	Interpretasi
0 - 0.20	Weak effect
0.21 - 0.50	Modest effect
0.51 - 1.00	Moderate effect
>1.00	Strong effect

Sumber : Cohen, Manion, Morrison, 2018

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

*Define*

Hasil kajian literatur ditemukan bahwa karakteristik peserta didik di SMP Bruder Pontianak cenderung ingin belajar dengan cara yang baru dan tidak monoton. Tidak monoton di artikan bahwa peserta didik lebih senang jika proses pembelajaran bervariasi dan didukung dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh sekolah, seperti televisi, speaker, dan akses internet.

*Design*

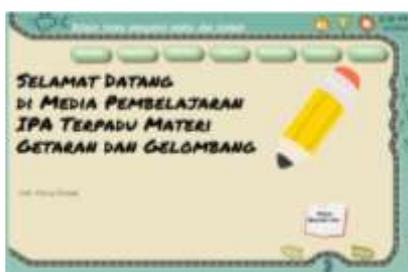
Pada proses *design* atau perancangan dimulai dengan menentukan tujuan instruksional yang ingin di capai dalam proses pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat mengidentifikasi getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi periode dan frekuensi suatu getaran dan gelombang, membedakan karakteristik gelombang longitudinal dan gelombang transversal, mendeskripsikan hubungan antara kecepatan rambat gelombang, frekuensi dan panjang gelombang, menganalisis karakteristik gelombang bunyi, membedakan bunyi infrasonik, ultrasonik dan audiosonik, menyebutkan contoh pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam teknologi, serta dapat mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan hasil percobaan tentang getaran, mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan hasil percobaan tentang gelombang longitudinal. Sebelum pembuatan media pembelajaran, dilakukan pembuatan *storyboard*.



Gambar 1 Tampilan *Storyboard*

*Develop*

Pada tahap *develop* dimulai dengan pembuatan produk awal, validasi ahli dan revisi, dan tiga tahapan uji coba yang disertai revisi sehingga akan memperoleh produk akhir. Hasil produk awal ditunjukkan oleh gambar 2.



Gambar 2 Tampilan produk awal

Pada tahapan ini, multimedia pembelajaran IPA di validasi oleh 6 (enam) orang ahli yang memiliki keahlian pada aspek materi, media, dan desain pembelajaran. Validasi produk ini dilakukan mulai 16 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021.

Tabel 4 Hasil Validasi Materi oleh Ahli

No.	Indikator	Nilai Korelasi		Keterangan Akhir
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
<b>Relevansi Materi Dengan Silabus</b>				
1	Materi yang disajikan sesuai dengan isi silabus (KI)	0,48	0,52	Valid
2	Memiliki	0,92	0,92	Valid

No.	Indikator	Nilai Korelasi		Keterangan Akhir
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
	kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar (KD) dan indikator pembelajaran			
	<b>Rata-rata</b>		<b>0,72</b>	
<b>Kualitas Materi</b>				
3	Materi pembelajaran yang diberikan adalah tentang getaran, gelombang, bunyi, mekanisme mendengar pada manusia dan hewan, serta aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi	0,92	0,92	Valid
4	Terdapat latihan soal yang dapat mengukur kemampuan kognitif peserta didik	0,2	0,5	Valid
5	Gambar dan simulasi yang disajikan dapat memperkuat pemahaman peserta didik	0,2	0,13	Tidak Valid
6	Strategi pembelajaran yang diberikan sederhana dan terdapat penyelesaian masalah	-0,2	-0,32	Tidak Valid
7	Materi belajar yang disajikan mulai dari tingkatan yang mudah hingga sukar sehingga memerlukan cara berpikir yang logis	0,34	0,46	Valid
8	Sistematika penyajian materi dalam setiap kegiatan belajar sudah berurutan	0,68	0,73	Valid
	<b>Rata-rata</b>		<b>0,40</b>	
<b>Bahasa dan Penulisan</b>				
9	Ketepatan penggunaan bahasa sehingga mudah dipahami	0,62	0,65	Valid
10	Tulisan yang ada pada setiap halaman materi dapat terbaca dengan jelas	0,92	0,92	Valid
	<b>Rata-rata</b>		<b>0,78</b>	
	<b>Jumlah Item Valid</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
	<b>Persentase</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	

Berdasarkan data hasil validasi materi oleh ahli menunjukkan bahwa materi getaran dan gelombang daam multimedia pembelajaran IPA sangat valid. Adapun perbaikan validasi materi oleh ahli direvisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Tabel 5 Hasil Validasi Media oleh Ahli

No.	Indikator	Nilai Korelasi		Keterangan Akhir
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
<b>Fungsi dan Manfaat</b>				

No.	Indikator	Nilai Korelasi		Keterangan Akhir
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	Media ini mempermudah dan memperjelas penyampaian pesan dalam proses belajar	0	0,59	Valid
2	Terdapat komponen tulisan, gambar, video, audio, animasi, simulasi dalam media yang disajikan	0,3		Valid
<b>Rata-rata</b>		<b>4,66</b>		
<b>Aspek Teks</b>				
3	Pemilihan <i>font</i> halaman pembuka dapat di baca dengan baik	0,94		Valid
4	Memiliki kesesuaian antara isi materi dengan tujuan pada pembelajaran	0,57		Valid
5	Ukuran <i>font</i> yang digunakan pada judul dan pada isi materi dapat terbaca dengan baik	0,77		Valid
6	Teks yang disajikan singkat dan dapat dipahami dengan baik	0	0,33	Valid
7	Tepat dalam sistematika penulisan, isi, dan latihan pada media yang dikembangkan	0,61		Valid
8	Teks yang tertera sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD)	0,57		Valid
<b>Rata-rata</b>		<b>4,55</b>		
<b>Aspek Gambar</b>				
9	Gambar yang disajikan sesuai materi yang dibahas	0,3		Valid
10	Gambar terlihat jelas dan dapat dipahami	0,57		Valid
11	Pemilihan gambar yang konsisten dengan materi belajar	0,96		Valid
12	Bentuk <i>background</i> konsisten	0,91		Valid
13	Hubungan antar gambar sesuai dengan materi	0,57		Valid
<b>Rata-rata</b>		<b>4,53</b>		
<b>Aspek Warna</b>				
14	Warna sesuai dengan tema belajar yang menggambarkan suasana segar dan bersemangat	0,86		Valid
15	Warna pada latar dan tulisan terlihat jelas	0,91		Valid
16	Gambar dan latar belakang memiliki keserasian	0,86		Valid
17	Komposisi warna menarik yaitu perpaduan warna hijau, putih, dan hitam	0,86		Valid
18	Warna pada gambar dan teks sudah sesuai	0,86		Valid
<b>Rata-rata</b>		<b>4,53</b>		
<b>Aspek Tata Letak</b>				
19	Posisi gambar pada media sudah simetris	0,61		Valid
20	Gambar bantu dalam	0,61		Valid

No.	Indikator	Nilai Korelasi		Keterangan Akhir
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
	penjelasan materi dilengkapi keterangan			
<b>Rata-rata</b>		<b>4,33</b>		
<b>Jumlah Item Valid</b>		18	20	
<b>Persentase</b>		90%	100%	

Berdasarkan data hasil validasi materi oleh ahli menunjukkan bahwa materi getaran dan gelombang daam multimedia pembelajaran IPA sangat valid. Adapun perbaikan validasi media oleh ahli direvisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Tabel 6 Hasil Validasi Desain Pembelajaran oleh Ahli

No.	Indikator	Nilai Korelasi		Keterangan Akhir
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
<b>Karakteristik Model Pembelajaran</b>				
1	Model pembelajaran terlihat jelas pada sintaks setiap urutan dalam sistematika desain belajar	0,74		Valid
2	Memiliki kesesuaian dengan isi variabel penelitian	0,78		Valid
3	Terdapat kompetensi dasar pembelajaran yang mandasari proses pembelajaran	0,85		Valid
<b>Rata-rata</b>		<b>4,27</b>		
<b>Rancangan Aktivitas Pembelajaran</b>				
4	Aktivitas peserta didik dapat terlihat jelas dan sistematis	0,47		Valid
5	Aktivitas dalam pembelajaran sesuai dengan isi materi pada kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan	0,76		Valid
<b>Rata-rata</b>		<b>3,91</b>		
<b>Sintaks Model Pembelajaran</b>				
6	Sintaks pada model pembelajaran sesuai dengan materi	0,02		Valid
7	Pembelajaran dengan media bantu lebih mudah dipahami	0,62		Valid
8	Dapat menarik perhatian peseta didik dalam proses pembelajaran	0,39		Valid
<b>Rata-rata</b>		<b>4,44</b>		
<b>Strategi Penilaian Pembelajaran</b>				
9	Penilaian disesuaikan dengan aktivitas belajar	0,61		Valid
10	Penilaian mudah dipahami	0,86		Valid
<b>Rata-rata</b>		<b>4,58</b>		
<b>Jumlah Item Valid</b>		9	1	
<b>Persentase</b>		90%	10%	

Berdasarkan data hasil validasi materi oleh ahli menunjukkan bahwa materi getaran dan gelombang daam multimedia pembelajaran IPA sangat valid.

Adapun perbaikan validasi desain pembelajaran oleh ahli direvisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Uji Coba Produk Awal

Hasil Uji Coba Perorangan dan Revisi

Pada tahapan uji coba perorangan dilakukan setelah melakukan validasi ahli dan revisi pada multimedia pembelajaran. Tahap uji coba perorangan ini dilaksanakan pada 21 Juli 2021. Uji coba perorangan dilakukan pada 3 (tiga) orang peserta didik yang dipilih secara acak. Adapun hasil uji coba perorangan ditunjukkan oleh grafik berikut:

Grafik 1 Tanggapan Peserta Didik pada Uji Coba Perorangan



Berdasarkan data hasil uji coba perorangan menunjukkan bahwa peserta didik sangat senang menggunakan multimedia pembelajaran IPA. saran dan perbaikan di revisi sesuai dengan saran yang diberikan dan di lanjutkan pada uji coba kelompok kecil.

Hasil uji coba kelompok kecil dan Revisi

Grafik 2 Hasil Uji Coba Kelompok Kecil



Berdasarkan data hasil uji coba kelompok kecil menunjukkan bahwa peserta didik sangat senang menggunakan multimedia pembelajaran IPA. saran dan perbaikan di revisi sesuai dengan saran yang diberikan dan di lanjutkan pada uji coba kelompok besar.

Hasil uji coba kelompok besar dan Revisi

Grafik 3 Hasil Uji Coba Kelompok Besar



Berdasarkan data hasil uji coba kelompok besar menunjukkan bahwa peserta didik sangat senang menggunakan multimedia pembelajaran IPA. Saran dan perbaikan di revisi sesuai dengan saran yang diberikan dan di lanjutkan pada uji coba lapangan.

Hasil Uji Coba Lapangan

Uji coba lapangan dilaksanakan pada 27 Juli 2021 dengan 30 peserta didik kelas VIII yang dipilih secara acak. Hasil pada uji coba lapangan adalah sebagai berikut:

Grafik 4 Hasil Uji Coba Lapangan

Data Tanggapan Peserta Didik Pada Uji Coba Lapangan



Berdasarkan data grafik diatas diperoleh bahwa peserta didik sangat senang belajar dengan menggunakan multimedia pembelajaran dengan *lectora viewer*.

Disseminate

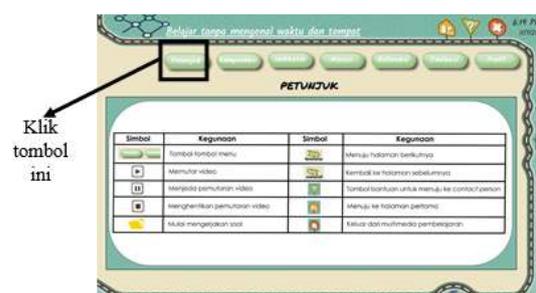
Pada tahap akhir pengembangan dilakukan *disseminate*, yaitu dengan berbagi pengalaman serta berbagi produk kepada pendidik di lingkungan SMP Bruder Pontianak.

Profil Multimedia

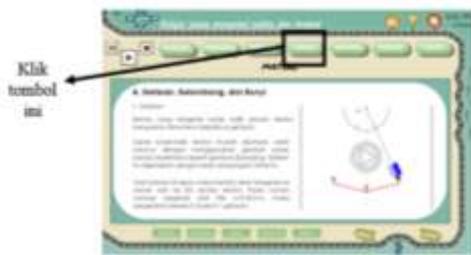
Profil multimedia pembelajaran IPA pada materi getaran dan gelombang untuk Sekolah Mengengah Pertama memiliki berbagai fitur pada setiap halamannya. Berikut ini penjelasan singkat dari beberapa fitur yang terdapat pada multimedia pembelajaran.



Gambar 3 Tampilan Judul



Gambar 4 Tampilan Halaman Indikator

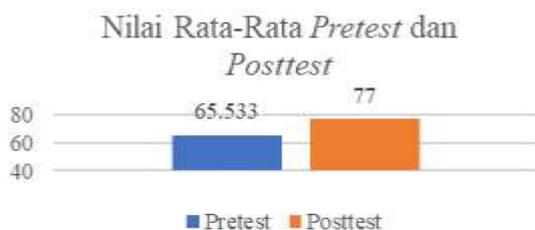


Gambar 5 Tampilan Halaman Materi Tanggapan Peserta Didik Terhadap Multimedia

Peserta didik memberikan jawaban sangat senang dan senang terhadap multimedia pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang yang dapat membantu mereka dalam proses belajar. Selain itu, multimedia pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang membuat peserta didik menjadi lebih bersemangat serta termotivasi untuk belajar. Hal ini tampak dari komentar-komentar peserta didik yang mengatakan senang dan lebih mudah dimengerti belajar dengan multimedia ini. Oleh karena peserta didik senang untuk belajar dengan bantuan multimedia pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang, maka hal tersebut menjadi acuan pada hasil belajar yang meningkat.

**Hasil Belajar Peserta Didik**

Perolehan hasil belajar diukur melalui aspek kognitif. Hasil belajar diperoleh dari hasil *pretest* dan *posttest*. Pada tahap *pretest* dilakukan dengan memberikan 10 soal pilihan ganda pada peserta didik kelas VIII SMP Bruder Pontianak begitu juga pada tahap *posttest* dilakukan dengan memberikan 10 soal pilihan ganda. Adapun hasil belajar untuk *pretest* dan *posttest* adalah sebagai berikut:



Grafik 5 Nilai Rata-Rata *Pretest* dan *Posttest*

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh multimedia terhadap hasil belajar, maka dilakukan analisis uji Wilcoxon. Adapun perhitungan uji Wilcoxon adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Uji Wilcoxon *Pretest* dan *Posttest*

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah - Sebelum	Negative Ranks	0 <sup>a</sup>	.00	.00
	Positive Ranks	23 <sup>b</sup>	12.00	276.00
	Ties	7 <sup>c</sup>		
	Total	30		

a. Sesudah < Sebelum

b. Sesudah > Sebelum

c. Sesudah = Sebelum

Test Statistics<sup>a</sup>

		Sesudah - Sebelum
Z		-4.212 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Selain menggunakan uji Wilcoxon, maka dilakukan perhitungan untuk memperoleh tingkat pengaruh (*effect size*) pada multimedia pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik. Berdasarkan perhitungan *effect size* diperoleh nilai varian data pada  $X_1$  adalah 230,257, data pada  $X_2$  adalah 184,171. Sedangkan pada hasil perhitungan nilai *Sgab* adalah 14,394 sehingga diperoleh nilai *effect size* 0,79. Pada tabel kasifikasi *effect size* nilai 0,79 berada pada kategori *moderate effect* yang berarti multimedia pembelajaran IPA pada materi getaran dan gelombang memiliki nilai pengaruh terhadap peserta didik SMP Bruder Pontianak.

**Pembahasan**

Pada latar belakang ditemukan bahwa peserta didik memerlukan multimedia pembelajaran untuk membangun pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga diperlukan multimedia pembelajaran untuk membantu proses belajar peserta didik. Ratih Wulandari, dkk (2017) menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran aktivitas belajar peserta didik mengalami peningkatan hingga mencapai 85,05% dengan predikat sangat baik dan tingkat ketertarikan pelaksanaan pembelajaran dengan multimedia interaktif berada pada 92,72% dengan predikat sangat menarik. Serta penelitian Yulia Novera (2019) dijelaskan bahwa media pembelajaran yang disertai dengan pemanfaatan multimedia untuk materi bioteknologi merupakan salah satu komponen yang penting dalam kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, multimedia pembelajaran dengan menggunakan *lectora* memiliki peluang untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Untuk menghasilkan fitur terbaru, maka multimedia ini memiliki fitur simulasi pada sub materi jenis gelombang, video animasi yang relevan, teks singkat mengenai pembelajaran materi getaran dan gelombang, terdapat tombol-tombol navigasi yang memudahkan untuk memilih sub materi, serta terdapat fitur pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran berisi soal-soal pilihan ganda yang dapat di selesaikan peserta didik secara *offline*.

Dalam kajian penelitian yang relevan, ditemukan bahwa multimedia pembelajaran IPA dengan menggunakan *lectora* menjadi lebih interaktif. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa peserta didik menjadi lebih aktif dan senang dalam pembelajaran IPA, khususnya pada materi getaran dan gelombang. Oleh sebab itu, multimedia pembelajaran dengan menggunakan *lectora* ini memiliki pengaruh dalam pembelajaran. Hal ini juga tampak dari hasil pembelajaran peserta didik yang mengalami peningkatan yang dilihat dari *pretest* dan *posttest*.

Pada desain konsep produk awal peneliti memanfaatkan *storyboard* yang dapat memudahkan untuk melihat format produk multimedia dengan jelas. *Storyboard* yang dibuat adalah lengkap dengan tampilan-tampilan awal hingga pada halaman evaluasi yang berbentuk kuis. Setelah perancangan *storyboard*, peneliti melakukan percobaan terhadap produk awal. Multimedia pembelajaran ini di rancang dengan menggunakan aplikasi *Lectora 18*, pembuatan simulasi materi dengan *adobe flash*. Selanjutnya dilakukan proses validasi ahli. Tujuan dari validasi ahli adalah untuk mengetahui kelayakan produk awal yang terdiri dari aspek materi, media, dan desain pembelajaran sebelum diujicobakan ke lapangan.

Proses penggunaan multimedia dilakukan pada 20 Juli 2021 hingga 23 Juli 2021 sebanyak dua kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, peserta didik diberikan angket tanggapan dengan menggunakan google formulir untuk melihat tanggapan awal peserta didik. Pada proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disiapkan. Hasil *pretest* diperoleh dari data nilai sebelumnya sebelum menggunakan multimedia pembelajaran. Pada pertemuan ke dua, yaitu akhir kegiatan, peneliti memberikan *posttest* dengan menggunakan google formulir untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah menggunakan multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran dengan memanfaatkan *lectora* bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik sehingga mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA, terutama materi getaran dan gelombang yang merupakan materi belajar yang abstrak atau sulit dipahami konsep materinya. Berdasarkan hasil penelitian, peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran dan menggunakan multimedia pembelajaran.

Peserta didik senang dan tertarik untuk belajar dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran berbasis *lectora viewer*. Hal ini didukung oleh penelitian Khalid, Alias, Razally, Yamin & Herawan (2010) bahwa tanggapan-tanggapan yang positif secara langsung menunjukkan bahwa peserta didik senang dan termotivasi dalam belajar serta hasil pendapat dari Narmadha Chamundeswari (2013) bahwa dengan menyukai pembelajaran maka kecenderungan akan memperoleh peningkatan pada hasil belajar, serta hasil nilai yang baik akan berbanding lurus dengan hasil belajar peserta didik itu sendiri.

Perolehan hasil belajar peserta didik menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik setelah menggunakan multimedia pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil *pretest* dan *posttest* peserta didik, yaitu rata-rata nilai *pretest* adalah 65,533 dan hasil *posttest* adalah 77. Dengan demikian, berdasarkan data diperoleh peningkatan nilai rata-rata sebesar 11,467 poin. Selain itu melalui

uji Wilcoxon diperoleh nilai pengaruh penggunaan multimedia terhadap hasil belajar peserta didik adalah 0,123. Berdasarkan analisis pada uji Wilcoxon dengan taraf kesalahan 5% atau 0,05 diperoleh  $L_{tabel} = 1,64$ , maka diperoleh  $T > L_{tabel}$ . Dengan penarikan kesimpulan jika  $t_o \geq t_{tabel}$  maka  $H_o$  ditolak yang berarti terdapat perbedaan nilai yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia pembelajaran IPA pada materi getaran dan gelombang di SMP Bruder Pontianak. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Parata & Zawawi (2018), bahwa multimedia pembelajaran merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik. Selain itu pada perhitungan *effect size* (ES) yang digunakan untuk melihat tingkat keefektifan multimedia pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang, diperoleh hasil sebesar 0,79. Hal ini berarti multimedia pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar dan peserta didik memberikan tanggapan yang positif terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan kriteria dalam penentuan efektifitas, data hasil penelitian ini menunjukkan *effect size* pada kategori *moderate effect* yang berarti multimedia pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang memiliki pengaruh terhadap pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa desain pengembangan multimedia pembelajaran ilmu pengetahuan alam materi getaran dan gelombang untuk Sekolah Menengah Pertama menggunakan model desain pengembangan 4D yaitu, *define, desain, develop, disseminate*. Pada tahap *define* dilakukan analisis awal kebutuhan peserta didik, mengetahui karakteristik peserta didik serta analisis konsep dan analisis tugas untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Setelah mengetahui kebutuhan peserta didik dan merumuskan tujuan pembelajaran, maka dihasilkan perancangan awal pengembangan dengan memilih media yang akan digunakan dan dilakukan validasi ahli. Dalam validasi ahli dinyatakan sangat valid setelah melalui uji coba dan proses perbaikan. Setelah pelaksanaan uji coba lapangan, dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai pengaruh multimedia terhadap pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang, kemudian pada proses diseminasi dilakukan pada rekan sejawat sebagai rekomendasi untuk menggunakan multimedia pembelajaran yang memanfaatkan aplikasi *lectora*.

Pada profil multimedia pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang untuk Sekolah Menengah Pertama mempunyai halaman utama; halaman petunjuk; halaman kompetensi; halaman indikator pembelajaran; tombol navigasi *play, pause, stop*; tombol-tombol navigasi keluar, beranda, dan pertanyaan; keterangan tanggal dan waktu mengakses multimedia; tombol navigasi untuk sub materi; fitur

profil; referensi; serta evaluasi berupa soal tes pilihan ganda. Multimedia pembelajaran dapat diakses dengan *lectora viewer* dan dapat diakses secara *offline*. Pada fitur akses *online* hanya dapat berupa video pembelajaran yang di upload ke youtube. Selain itu, peserta didik senang belajar dengan multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Tanggapan senang melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan multimedia pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi getaran dan gelombang diperoleh data sebesar 59,16% sangat senang, 39,16% senang, 1,83% cukup senang, dan 0,16% tidak senang. Serta hasil belajar pada penggunaan produk akhir diperoleh peningkatan sebesar 11,467 poin. Dari data hasil uji Wilcoxon diperoleh adalah nilai 4,21;  $T > T_{tabel}$  yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia pembelajaran IPA pada materi getaran dan gelombang di SMP Bruder Pontianak. Pada perhitungan *effect size* dengan tingkat *human error* 5% diperoleh nilai 0,79 berada pada kriteria *moderate effect* yang berarti multimedia pembelajaran IPA materi getaran dan gelombang efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar.

## 5. REFERENSI

- AECT. (2018). *The Definition and Terminology Committee*. Diunduh di [https://aect.org/news\\_manager.php?page=17578](https://aect.org/news_manager.php?page=17578)
- Fitriani, F. H, dkk. (2013). Pengembangan Media Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis Komputer Pada Tema Bunyi Melalui *Lesson study* Untuk Kelas VIII. Diunduh di <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/usej>
- Khalid, M. S., Alias, M., Razally, W., Yamin, S., & Herawan, T. (2010). *The effect of using an interactive multimedia courseware within a collaborative learning environment on the learning of pre-algebra concepts among preuniversity engineering students*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 8, 571-579.
- Munir. (2015). *Multimedia: Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- National Association for Media Literacy. (2016). *Media Literacy Defined*. Diakses pada <https://namle.net/publications/media-literacy-definitions>.
- Narmadha, U., & Chamundeswari, S. (2013). Attitude towards learning of science and academic achievement in science among students at the secondary level. *Journal of Sociological Research*, 4(2), 114-124. Diunduh di <https://core.ac.uk/download/pdf/193550118.pdf>
- OECD. (2019). *PISA 2018 Assesment and Analytial Framework PISA*. Paris: OECD.
- Parata, T. P., & Zawawi, M. (2018). Pemanfaatan Multimedia Interaktif Pembelajaran IPA-Biologi Terhadap Motivasi dan Kemampuan Kognitif Siswa SMP Negeri 14 Kota Palembang. *Jurnal Ecoment Global*, 3(2), 5278. Diunduh di <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EG/article/download/476/575>
- Rajendra, I. M., & Sudana, I. M. (2018). *The influence of interactive multimedia technology to enhance achievement students on practice skills in mechanical technology*. In *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1), 012104. Diunduh di <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/953/1/012104>
- Reigeluth, C. M, dan And Y. A. (2021). *Merging The Instructional Design Process With Learner-Centered Theory*. New York: Routledge.
- Siregar, N. R. (2017). *Persepsi siswa pada pelajaran matematika: studi pendahuluan pada siswa yang menyenangi game*. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia*, 1. Diunduh di <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ippi/article/viewFile/2193/1655>

## THE USE OF PRAGMATICS DEIXIS IN THE E-PAPER “ADVANTAGE #4: MEANINGFUL ENGAGEMENT”

By:

**Renggi Vrika<sup>1)</sup>, Meli Fauziah<sup>2)</sup>, Adam Mudinillah<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>The Faculty of Adab and Humanities, Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang

<sup>2)</sup>The faculty of Tarbiah, Institut Agama Islam Negeri Curup

<sup>3)</sup>Islamic High School Al-Hikmah Pariangan Batusangkar

<sup>1)</sup>email: renggivrika.FAH@uinib.ac.id

<sup>2)</sup>email: melifauziah@iaincurup.ac.id

<sup>3)</sup>email: adammudinillah@staialhikmahpariangan.ac.id

### Abstract

Deictic expression usually found both in written and spoken context. Deictic or deixis means pointing or indicating which comes from a Greek word. In this research, the researcher analyzed the deictic expression that had been included in the “Advantage #4: Meaningful engagement” text in The Jakarta Post E-PAPER. This research was qualitative research which content analysis that applied to the written or visual material. The researcher wanted to find the deictic expression in the text and gave an interpretation of the expression. There were some kinds of the deictic expression in the “Advantage #4: Meaningful engagement” text in The Jakarta Post E-PAPER. The person deixis that was involved were “us, Indonesia students, it, the students, your malnourished children, you, themselves, them”. The time deixis was “in 1998, last year, evening”. The place deixis that was involved in this text were “there, high school, the school, university, Trisakti University, Hotel Indonesia traffic circle, and the Presidential Palace”. Discourse deixis that was involved in this text was “there, it, and that”. And also the social deixis that was involved was “the president”. So, those are the deictic expression that included in the text in The Jakarta Post E-PAPER.

**Keywords:** Pragmatic, Deixis, E-Paper

### 1. INTRODUCTION

People use verbal or written forms to express their meaning in a variety of contexts in the form of discourses or utterances in everyday communication. These language fields are still closely related to each other. It is not easy to determine the meaning of the different linguistics different kinds. It needs understanding and interpretation of the reader or listener in gaining the meaning of the writer and speaker based on their statements. One of the most basic of utterances is called deixis. Deixis doesn't appear to be friendly. People use it verbally and in writing all the time, but they don't know what to call it. For college students studying English, the term deixis is commonly used when studying pragmatics as well as semantics. The deixis study implies one of the aspects of natural language that requires such a reference to know who the speaker and listener are, and the place and time of speech in which the deictic term is used (at least).

According to Levinson (1983), deixis demonstrates the relationship with both reflected language and context and is an important area of study throughout pragmatics, semantics, and linguistics. A deictic expression, also identified as a deixis, is a word or phrase that refers to the time, place, or situation in which a speaker is speaking (for example, this, that, these, those, now, then, here). In English, deixis is expressed using personal pronouns, demonstratives, adverbs, and tense. Deixis is a

phenomenon that occurs when contextual information is required to understand the meaning of specific words and phrases in an utterance. Deictic words or phrases are those that require context to convey meaning. Levinson (1983) defines contextual information as knowledge about the speaker, recipient, time, and place of an utterance. For example, unless you know the time, place, speaker, and context of the utterance, you won't be able to understand the sentence "I'm watching a movie tonight, where are they going?" Expressions like "I," "you," "us," "this," "that," "here," "there," "today," and "tomorrow" are indexed, and the listener must determine the speaker, the time, and put of the utterance to fully understand what is being said and what is being said by speaker.

In the literature, three types of direct expressions can be distinguished. A deictic expression or deixis is a personal or personal deixis that includes me, you, us, she, he, etc. Person deixis is the study of how to encode the role of the participant in which the utterance in the question is delivered. Person deixis encodes the various participants in a communicative event. Furthermore, the participants must be encoded, which means determining who the speaker and addressee are (Renkema, 1993). He said that person deixis applies to individuals whom the speakers are referring; thus, person deixis is realized through the use of personal pronouns. The speaker addresses the listener in the first person (I), the second person (you), and the

person about whom the speaker is speaking in the third person (he, she, it). Spatial/local deixis includes this, that, here, there, etc. Gjergji, (2015) defined that the indication of the relative location of people and objects is referred to as place deixis, also known as spatial deixis. Here, this, these, that, those, and there are examples of demonstrative adverbs for place deixis. There is a gestural and a non-gestural use for spatial deixis. The gestural use can be demonstrated by an eye-glaze or a head movement, as in "I don't like the color of the picture there" (points to the picture). Temporal deixis, also known as Time Deixis, refers to the a single point in time once the speaker makes an utterance. The coding time, which is the moment of utterance, is typically used for the reference point for time deixis. There's also a distinction for both coding time and receiving time in the written or noted use of language (Levinson, 2004). The utterance time is the coding time, and the receiving time is the time when the hearer recovers information (Gjergji, 2015). Time deixis includes the words now, today, and yesterday, tomorrow and so on.

In addition, Levinson (1983) adds two other direct types or categories, following by Lyons (1977). The two types of deictic/deixis are social deixis, which involve the encoding of social differences related to the roles of participants, particularly aspects of the social relationship between the speaker and the recipient or between the speaker and some referent. Social deixis distinguishes the social characteristics of speech participants Levinson (1983). A type is a discursive summary containing the encoding of a reference to the part of the unfolding discourse in which the statement is located. Discourse deixis refers to specific parts of a discourse in order to improve text coherence (Levinson, 2004). Deixis is a technical term derived from the Greek, which is a "tongue-pointing" way of referring to deixis (Yule, 1996). She admits that direct expression is mainly used in face-to-face speech. Lyons (1977) also defined deixis as deixis, which generally refers to the location and identification of persons, objects, events, processes, and activities that are mentioned or referred to in relation to the spatial/ temporal contexts generated and maintained by human speech and actions and at least one speaker and recipient.

Analysis of deictic expression has been applied to many dimensions by many researchers. Deictic analysis was applied in novels, movies, songs, brochures and texts. Haryanto (2008) did an analysis on deixis in Jane Austen's Novel entitled *Pride and Prejudice*. He found that there are some typed of deixis that can be found in the novel. The person deixis that found in the novel was namely as first personal deixis, second personal deixis, and third personal deixis. He also found three kinds of the referents in personal deixis, namely, the referent which refers to first person, the referent which refers to second person, and the referent which refers to

third person. Prichatin (2020), Putri, et al. (2018), and Wibowo et al. (2018) had some result in analysis deictic expression in the novel. They found the most prominent type showed in the analysis was person/personal deixis. While, Khalili (2017) found in his analysis on novel that social deixis shows the social characters of the story.

Researchers also did deictic analysis on movies. In the movies analysis using deictic expression, they found person deixis that can be divided into three part; first, second and third person (Wiguna, Anggraeni, Nuramalia, & Irma, 2018; Sasmita, Hardiah, & Elfrida, 2018; Noerofi'a & Bahri, 2019; Ainiyah, Sili, & Ariani, 2019; Viahapsari & Parmawati, 2020; Sari & Zakrimal, 2020; Wasdili & Santoso, 2021; Apriyana, Friatin, & Said, 2021). On the other hand, Putra, Sofyan, & Sembiring (2020) in their analysis found relational social deixis was the prominent type found In the analysis/it referred to first personal pronoun that is referred to the speaker itself. The dominant word found for social deixis was "Sir".

Pangaribuan, Rotua, Sondang & Pasaribu (2015) did research about deixis used on business brochures text. They found five types of deixis in the analysis which the most prominent used in the text was discourse deixis. Discourse Deixis is the most dominantly used in business brochures. Discourse deixis refers to expressions in the text within an utterance used in written language. It contains reason, description, background, and sophisticated technology explanation. To give clear explanation is the goal in preparing brochures including the detail of the product and also the new technology that be offered by the company. Writers conclude that in the inexpensive products, the prominent deixis that mostly used is person deixis is; on the contrary if the product is expensive they use discourse deixis because they need to put more explanation and description of the product. Songs also analysed by the researcher using deictic expression. In the songs, they found person deixis as the prominent one (Anggara, 2017; Nasution, Setiadi, & Ilza, 2018; Kusumadewi & Anggraeni, 2020; Natalia & Santoso, 2020; Nisa, Asi, & Sari, 2020; Ginting & Syahri, 2021; Saputra & Apsari, 2021; Fadilah & Resmini, 2021). Besides person deixis, the other types of the deictic expression also found in the song analysis. The analysis showed the function of the deictic expression that related to the information and to give a reference to the deixis words. The analysis helped to understand the meaning of the song by using context deixis.

Furthermore, Anugrah (2018), Ibnu (2018), Abdulameer, Mohd Noor, & Nasser (2019), Astria, Mujiyanto, & Rukmini (2019), Wicaksono (2019), Salamah, Octaviani, & Isnaini (2021) they did research in analyzing deixis or deictic used in the text. They found that person deixis is most common used in the text. Besides, they also found time deixis,

place deixis, and so on. Ekawati, Argian and Sofwan (2014) did a research on Deixis in Conversations Text. The results revealed that the most prevalent deixis in the conversation was person deixis. Person deixis showed frequently more than other types. Besides, person deixis, it was also found discourse deixis, place deixis, time deixis and social deixis in the analysis. The person deixis of pronouns could be used to refer to an imaginary person in real life, depending on the context, while "We" could also assume a unity in the context. As a result, it is critical to consider context-dependency when reading or conversing with others in order to arrive at an accurate interpretation of the utterance. While, Sari (2015) and Asmarita & Haryudin (2019) did research on conversation. They also found deixis expression is the common prominent found in the analysis.

Based on the explanation above, this article focuses only on the discussion of deixis, the use of deixis in the language is important to be understood. There are many words and expressions that depend on the circumstance, in order to be understood. The previous study, on the other hand, only observed the use of deixis in the form of text, novel, song, movie, and brochure. The present study attempts to analyse the used of deixis found in electronic newspaper on The Jakarta Post E-PAPER. Particularly the researcher analyzed the used of deixis in the text selected from The Jakarta Post E-PAPER entitled Advantage #4: Meaningful engagement.

## 2. METHOD

This study is classified as a descriptive qualitative study because it analyzed the data and presented each result in a narrative form. Technology research defines and communicates things. It means that this research occurs naturally, has no control over states and situations, and can only measure what is already there (Gay, L.R. & Airasian, 1992). One type of such qualitative research was content analysis applied to text or visuals. According to Ary, D., et al. (2002), content analysis is only focused on the analysis and interpretation of recorded material for learning. The data source for this study was Benefit #4: Significant participation of Jakarta Post EPAPER.

## 3. RESULT AND DISCUSSION

There was a text about Advantage #4: Meaningful engagement in The Jakarta Post E-PAPER, this text discussed the meaningful engagement related to the tragedy of 1998. This text was analyzed based on the deictic expression. It could be seen in the following explanation. Paragraph 1 was the opening paragraph that consisted of the introduction of the text. In paragraph 1, there are some deictic expressions included in the text. They were "us, in 1998, there, Indonesia students, it, the students". It could be seen in the following explanation:

In the first sentence:

"Most of us may be too young to remember what happened in 1998."

Begin with the word "Us", it related to the Indonesian students and also the writer itself. It related to the expression of person deixis. It is called as a personal pronoun in person deixis. The correct identification of the grammatical persons used to refer to the speaker and the addressee is dealt with in person deixis. It showed the participant roles knowing the event in the past years. The writer tried to remind the reader the event that was memorable to Indonesia people. The second word was "in 1998" that indicated the time that the tragedy happened. The event that is memorable for Indonesia people. This word relates to the expression of the time deixis. Time deixis is expressed through time adverbs and verb tense markers. In English, verbs have two tenses that are morphological features. They are the present and the past, respectively. To refer to future events, English employs modal verbs such as will or shall, as well as the phrasal modal be going to. In this text, the writer used specific year to show the event. This showed the moment the event happened and showed the exactly time in the past.

In the second sentence:

"But as history shows, if there's anything the Indonesia students' movement showed the world, it was the students have the power to mobiles for a cause."

The word "there" indicates to history that the tragedy happened. It is related to the discourse deixis. This word brought the writer to the real event that could be felt as the memorable event in the past. The word "Indonesia students" indicated to all of the students in Indonesia included the writer itself. It is related to the person deixis. The writer tried to show the power that can be showed to the world about the event. The other word that indicated as deixis word is the word "it". This word indicated the Indonesia movement, not the people itself that the writer wanted to show. It is related to the discourse deixis. The writer tried to bring the reader to remind the event that happened in the past several years. The word "the students" is also known as person deixis. Person deixis is the encoding of the participant's role in the speech, regardless of how the utterance is delivered. It indicated to all of the students including the writer itself.

In paragraph 2, there were also some deictic expressions. Those were "your, high school students, it, the school, and children". It could be seen in the following examples:

In the first sentence:

"Start out small by doing something within your reach."

The word "your" indicated the person deixis that relate to the previous paragraph that was Indonesian students. The writer tried to invite the

reader to do something that can make a movement that can make a better changing.

In the second sentence:

“For high school students, it could be as simple as improving the quality of environment nearby the school or helping malnourished children within the vicinity.”

The word “high school students” indicates the person deixis that related to the specific person; all the high school students in Indonesia. The writer points to the specific person to showed that changing can be started in the high school students. The word “it” indicated the small thing that the Indonesian students can do to express their respect. It is a discourse deixis. The word “the school” meant that the writer referred to the place that the students study. It indicated the place deixis. The word “malnourished children” indicated to the young people who needed helping malnourished so it related to the person deixis.

In paragraph 3, there were only two types of deictic expression. Those were “university, you, that, your, your”. It could be seen in the following examples:

In the first sentence:

“As you progress into university level, you’ll realize that you have more power in your hands.”

The word “university” indicates the place that the college students study. It is related to the place deixis. Place deixis is the encoding of spatial location relative to the participants' location. The writer showed the place the event happened. Place deixis generally requires contextual information about the utterance's location. The word “that” referred to discourse deixis, because it indicated the thing that someone could realize. The word “you” indicated to the readers who are reading the text. In this paragraph, there are some words “you” that have the same relation to the reader. It is related to the person deixis. Person deixis can be seen directly in the person's grammatical categories. The word “your” in this paragraph also indicated to the readers who are reading the text. It is related to the person deixis.

In the second sentence:

“But as you pick a cause, do so wisely.”

The word “you” indicated to the readers who are reading the text. It referred to a person deixis. Person deixis refers to the encoding of the role of the participant in the text, regardless of how the utterance delivered. Person deixis is directly related to person grammatical categories. In this sentence, the writer suggested the reader to be wise in doing or done something.

In the third sentence:

“Listen to your heart and conscience and dare to take reaction.”

The word “your” in this paragraph also indicated to the readers who are reading the text. It is related to the person deixis too. The person deixis showed in pointing the reader.

In paragraph 4 that was the last paragraph. There were also deictic expressions. Those were “students, Trisakti University, themselves, last year, the students, the Hotel Indonesia traffic circle, the Presidential Palace, them, the President, evening”. It could be seen in the following examples:

In the first sentence:

“For students at Trisakti University, home to the respected 1998 movement, peace rallies are an annual event to remind themselves and other of those who perished during Indonesia’s bloody transition to democracy.”

The word “students” indicated to the students who were studying at Trisakti University, it referred to the person deixis. The word “Trisakti University” indicated the place deixis that the writer showed the place where the 1998 tragedy happened. The word “themselves” indicated to the Indonesian people who felt the same thing when the 1998 tragedy happened. It is related to the person deixis.

In the second sentence:

“Last year, the students and some faculty members joined hands in marching from the Hotel Indonesia traffic circle to the Presidential Palace.”

The word “last year” referred to the time deixis because it indicates the time when the faculty members joined hands in marching. The word “the students” indicated to the students who have joined hands in marching, it referred to the person deixis. The word “the Hotel Indonesia traffic circle” indicated the place where they were marching. It is related to the place deixis. The word “The Presidential Palace” indicates the place where the people come over. It is related to the place deixis.

In the third sentence:

“Some of them ended up getting a dinner invitation from the President for an evening of intellectual discussion.”

The word “them” indicated the people who joined hands in marching. It is related to the person deixis. The word “the president” indicates someone who leads this country. It is related to the social deixis. The word “evening” indicated the time which showed the dinner. It is related to the time deixis.

The most prominent type of deixis in this analysis was person deixis; us, Indonesia students, it, the students, your malnourished children, you, themselves, them

#### 4. CONCLUSION

Based on the finding and discussion, text entitled “Advantage #4: Meaningful engagement” in The Jakarta Post E-PAPER, all of the deictic expressions could be found in the text. They were person deixis, time deixis, place deixis, discourse deixis and also social deixis. The person deixis that was involved were “us, Indonesia students, it, the students, your malnourished children, you, themselves, them”. The time deixis was “in 1998, last year, evening”. The place deixis that was involved in

this text were “there, high school, the school, university, Trisakti University, Hotel Indonesia traffic circle, and the Presidential Palace”. Discourse deixis that was involved in this text was “there, it, and that”. And also the social deixis that was involved was “the president”. So, those are the deictic expression that included in the “Advantage #4: Meaningful engagement” text in The Jakarta Post E-PAPER.

## 5. REFERENCES

- Abdulameer, A. H., Mohd Noor, S. N. F., & Nasser, W. K. (2019). Systemic functional linguistics of political articles in eastern and western online news. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(5). Retrieved from <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.753>
- Ainiyah, K., Sili, S., & Ariani, S. (2019). ANALYSIS OF DEIXIS IN PITCH PERFECT 2 MOVIE. *Jurnal Ilmu Budaya* (Vol. 3).
- Anggara, I. G. A. (2017). Deixis Used in Top Five Waldjinhah’s Popular Keroncong Song Lyrics. *Parole - Journal of Linguistics and Education*, 6(1), 35–42. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/parole.v6i1.12377>
- Anugrah, S. V. (2018). Analysis Of Deixis In The Story Selected From Christian Bible, Genesis. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 5(1), 664–670.
- Apriyana, A., Friatin, L. Y., & Said, I. (2021). The Analysis of Pragmatic Deixis Realized on Big Hero Movie 6. *JALL (Journal of Applied Linguistics and Literacy)*, 5(1), 109–115.
- Ary, D., Jacobs, L.C. & Asghar, R. (2002). *Introduction to Research in Education*. New York: Wadsworth Thomson Learning.
- Asmarita, A., & Haryudin, A. (2019). AN ANALYSIS DEIXIS IN RIDWAN KAMIL’S SPEECH AT THE ASIA AFRICA CONFERENCE (KAA). *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 2(5), 622–627. Retrieved from <https://doi.org/10.22460/project.v2i5.p622-627>
- Astria, A., Mujiyanto, J., & Rukmini, D. (2019). The Realization of Deixis in Students’ Writing at Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu Lampung. *English Education Journal*, 9(4), 517–526. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eej>
- Ekawati, Argian and Sofwan, A. (2014). The Use of Pragmatics Deixis in Conversation Texts in “Pathway to English. *Journal Unnes*, 43(2), 71–77. Retrieved from ISSN 0216-0847.
- Fadilah, S., & Resmini, S. (2021). A DEIXIS ANALYSIS OF A SONG LYRICS ENTITLED “LOVER”. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 4(4), 628–633. Retrieved from <https://doi.org/10.22460/project.v4i4.p628-633>
- Gay, L.R. & Airasian, P. (1992). *No Title Education Research*. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Ginting, N. A., & Syahri, C. (2021). DEIXIS IN JUSTIN BIEBER’S SONGS. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 4(1). Retrieved from <https://doi.org/10.22460/project.v4i1.p55-61>
- Gjergji, S. (2015). A Pragmatic analyses of the use of types of deixis in poetry and novels of the author Ismail Kadare. *Academicus International Scientific Journal*. Retrieved from <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=289510>
- Haryanto, I. (2008). *Pragmatic Analysis of Deixis in Jane Austen’s Novel*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ibnus, N. (2018). The Use Of Deixis In Narrative Texts In The Bse English Textbook’s “Developing English Competencies 1.” *Philosophica*, I(1), 20–24.
- Khalili, E. (2017). Deixis analysis in A Tale of Two Cities written by Charles Dickens. *International Academic Journal of Social Sciences*, 4(4), 58–65. Retrieved from [http://iaiest.com/dl/journals/3-IAJ of Social Sciences/v4-i3-jul-sep2017/paper9.pdf](http://iaiest.com/dl/journals/3-IAJ%20of%20Social%20Sciences/v4-i3-jul-sep2017/paper9.pdf)
- Kusumadewi, S., & Anggraeni, A. (2020). AN ANALYSIS OF DEIXIS IN PAMUNGKAS’S ‘ONE ONLY’ SONG LYRICS. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 3(4), 489–493. Retrieved from <https://doi.org/10.22460/project.v3i4.p489-493>
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levinson, S. C. (2004). *The Handbook of Pragmatics*. Ed. Horn, L.R and Ward, G. Cornwall: Blackwell Publishing.
- Lyons, J. (1977). *Semantics II*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasution, D. R. A., Setiadi, G., & Ilza, S. S. (2018). Deixis Analysis in the Song Lyrics of Ed Sheeran’s Divide Album. In *Journal of 2nd English Language and Literature International Conference (ELLiC) Proceedings* (Vol. 2, pp. 376–382).
- Natalia, Y. Y., & Santoso, I. (2020). PERSON DEIXIS AND SPATIAL DEIXIS OF KING DANGDUT BY RHOMA IRAMA SONGS. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 3(3), 348–353. Retrieved from <https://doi.org/10.22460/project.v3i3.p348-353>
- Nisa, B., Asi, A. G., & Sari, S. W. (2020). The Context Meaning of Deixis in Soundtracks Lyric of the Greatest Showman Movie. *Metathesis: Journal of English Language*,

- Literature, and Teaching*, 4(1), 41–55. Retrieved from <https://doi.org/10.31002/metathesis.v4i1.2179>
- Noerrofia, I., & Bahri, S. (2019). The Analysis of Social Deixis in the Movie Beauty and the Beast. *PIONEER: Journal of Language and Literature*, 11(1), 12–20. Retrieved from <https://doi.org/10.36841/pioneer.v11i1.441>
- Pangaribuan, Rotua E., Manik, Sondang & Pasaribu, T. (2015). Deixis Used on Business Brochures Text: A Pragmatics Study. *International Journal of English Linguistics*, 5(5), 171–182. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.5539/ijel.v5n5p171>
- Prichatin. (2020). Deixis in 'Peter Pan and Peter Pan in Kensington Gardens' Novel. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(3).
- Putra, Z. D., Sofyan, D., & Sembiring, B. (2020). Analysis of Social Deixis in the Madness of King George Movie. *Jadila: Journal of Development and Innovation in Language and Literature Education*, 1(1), 17–32. Retrieved from <https://doi.org/10.52690/jadila.v1i1.15>
- Putri, A., Budiarsa, M., & Sudana, I. G. P. (2018). The Analysis of Deixis in the Novel The Fault In Our Stars by John Green. *Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud*, 23(3). Retrieved from <https://doi.org/10.24843/jh.2018.v22.i03.p19>
- Renkema, J. (1993). *Discourse Studies: An Introductory Textbook*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Salamah, U., Octaviani, I., & Isnaini, N. A. (2021). Analysis of Deixis in Short Story "A Little Match Girl": Pragmatics Study. *Vivid: Journal of Language and Literature*, 10(2), 63–71. Retrieved from <http://jurnalvivid.fib.unand.ac.id/index.php/vivid/article/view/193>
- Saputra, S., & Apsari, Y. (2021). A DEIXIS ANALYSIS OF SONG LYRICS IN "I WANT TO BREAK FREE" BY QUEEN. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 4(2), 244–249. Retrieved from <https://doi.org/10.22460/project.v4i2.p244-249>
- Sari, D. P., & Zakrimal, Z. (2020). An Analysis of Deixis in Avenger Infinity War Movie. *Linguistic, English Education and Art (LEEAA) Journal*, 4(1), 13–24. Retrieved from <https://doi.org/10.31539/leea.v4i1.1354>
- Sari, R. (2015). Deixis Analysis Through the Interaction Among the Students with Different Culture. *Transformatika*, 11(2), 41–48.
- Sasmita, R., Hardiah, M., & Elfrida. (2018). An Analysis of Deixis and Its Reference Used By Main Character in "a Thousand Words" Movie Script by Steve. *Journal Of English Education and Teaching (JEET)*, 2(1), 68–85.
- Viahapsari, E., & Parmawati, A. (2020). ANALYSIS THE TYPE OF DEIXIS IN THE MAIN CHARACTER ON THE MOVIE I LEAVE MY HEART IN LEBANON. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 3(3), 388–394. Retrieved from <https://doi.org/10.22460/project.v3i3.p388-394>
- Wasdili, A. R., & Santoso, I. (2021). AN ANALYSIS DEIXIS IN "NOM NOM'S ENTOURAGE" MANUSCRIPT ON WE ARE BARE BEARS MOVIE SEASON. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 4(1), 80–85. Retrieved from <https://doi.org/10.22460/project.v4i1.p80-85>
- Wibowo, A. I., & Nailufar, N. (2018). Deixis And Its Context Used In "Girl In Pieces" Novel By Kathleen Glasglow. *Wanastra Jurnal Bahasa Dan Sastra Akademi Bahasa Asing BSI Jakarta*, 10(2).
- Wicaksono, G. A. (2019). Students' Competence In Interpreting Deixis In Descriptive Text On Pragmatics Course Of English Course of English Letters Department of Universitas Ahmad Dahlan in 2017/2018. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 20(1), 10–21.
- Wiguna, A., Anggraeni, H., Nuramalia, R., & Irma, S. S. (2018). Deixis in Maleficent Movie Script. *Professional Journal Of English Education*, 1(2), 133–138.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. New York: Oxford University.

# IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG STATUS HAK MILIKNYA TERHAPUS

Oleh:

**Ulfa Nur Halimah**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
ulfanurhalimah935@gmail.com

## Abstrak

Salah satu jaminan kebendaan yang dapat memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor selaku penerima jaminan adalah Hak Tanggungan. Pada umumnya kreditor lebih memilih hak milik atas tanah untuk dijadikan sebagai objek jaminan, sebab hak milik memiliki hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUPA, meskipun demikian hak milik atas tanah juga dapat dihapuskan sebagaimana ketentuan Pasal 27 UUPA. Hal tersebut tentu menjadi persoalan bagi kreditor apabila hak milik atas tanah tersebut dijadikan sebagai objek jaminan utang piutang dan telah dibebani hak tanggungan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum terhapusnya hak milik atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturannya yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hapusnya hak milik atas tanah juga berakibat pada terhapusnya hak tanggungan, selain itu terhapusnya objek jaminan hak tanggungan berakibat pada kreditor yang semula merupakan kreditor preferen berubah menjadi kreditor konkuren.

**Kata kunci:** Kreditor, Hak Milik, Hak Tanggungan

## 1. PENDAHULUAN

“Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha untuk memperoleh pendanaan untuk modal usaha atau untuk kepentingan lainnya, sedangkan menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae bahwa yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga (Dharmanto, 2016).”

“Masyarakat yang membutuhkan dana dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank, yang selanjutnya pihak bank mengikat pihak yang membutuhkan dana dengan perjanjian utang piutang atau disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata:”

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

“Bank selaku kreditor dalam memberikan dana kepada debitur tidak hanya cukup diikat dengan perjanjian kredit semata. Debitur diharuskan memberikan jaminan kepada kreditor sebagai bentuk jaminan apabila debitur wanprestasi di kemudian hari maka jaminan tersebut berlaku sebagai pelunasan. Suatu hal yang sangat penting dalam masalah utang piutang adalah adanya kesanggupan dari orang yang

berutang untuk mengembalikan utangnya.” Hal ini berhubungan dengan jaminan yang diberikan dalam pembayaran utang debitur, terutama bagi pihak yang meminjamkan utang, jaminan “mutlak diperlukan dalam utang piutang sehingga ada kepastian bahwa uang yang dipinjamkan akan terbayar. Apalagi jika bank sebagai kreditor, maka jaminan mutlak diperlukan.”

“Terdapat 2 (dua) lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia, yaitu jaminan umum dan khusus. Agar menjadi kreditor yang didahulukan pelunasannya (kreditor preferen), maka kreditor diharuskan untuk memilih benda-benda yang masuk kategori jaminan khusus seperti jaminan kebendaan, misalnya gadai, hipotik, hak tanggungan dan lain-lain. Jaminan kebendaan merupakan jenis jaminan yang mempunyai posisi paling dominan dan dianggap strategis dalam hukum jaminan. Hal ini disebabkan karena jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, kemanapun benda tersebut beralih dan dialihkan, serta dapat dialihkan kepada dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.”

Jaminan kebendaan yang dianggap paling efektif dan aman adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) dalam Pasal 1 ayat (1) didefinisikan :

“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Terhadap hakaatas tanah yang telah dibebani dengan HakTTanggung, maka apabila debitur *wanprestasi* terhadap hak atas tanah itu akan dilakukan penjualan di bawah tangan ataupun lelang guna melunasi utang debitur sebagaimana telah ditentukan dalam UUPA.”

“Hak-hak atasitanah yang dapat dibebani HakkTanggung, antaraalain:”

- a) Hakmilik;
- b) Hakigunaibangunan;
- c) Hakigunaiusaha;
- d) Hakipakai; dan
- e) Hakimilikiatas satuan rumahisusun.

Diantara jenis-jenis hak atas tanah di atas, yang memiliki hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh adalah hak milik sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUPA yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”

“Hak milik atas tanah yang menjadi obyek jaminan hak tanggungan yang telah di hapus tentu memunculkan sebuah persoalan hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT, hak tanggungan hapus karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Hal tersebut selanjutnya berimplikasi pada nasib dari Kreditor selaku pemegang hak tanggungan yang memiliki akibat hukum hilangnya jaminan atas piutangnya. Berdasarkan uraian di atas, penting kiranya untuk mengetahui akibat hukum dari hapusnya hak milik yang dibebani hak tanggungan bagi kreditor selaku pemegang hak tanggungan terhadap objek jaminan piutangnya.”

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif untuk menganalisa isu hukum mengenai implikasi terhadap kreditor pemegang hak tanggungan yang status hak miliknya terhapus. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang didasarkan pada teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).”“Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan cara menelaah, mengidentifikasi serta mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar dapat menjawab dan menyusun setiap argumentasi dengan baik, benar dan” sistematis. “Untuk menunjang argumentasi lainnya, penulis mengambil sumber yang berasal dari internet yang sumbernya

dapat dipertanggungjawabkan. Teknis analisa pada penelitian ini bersifat deduktif. Artinya dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini, penulis menjabarkan serta menjawab isu hukum dengan argumentasi yang umum terlebih dahulu, yang selanjutnya dipaparkan secara khusus.”

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN AKIBAT HUKUM HAPUSNYA HAK MILIK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN

Pada dasarnya, perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zdfstanding een reddden van bestaan recht*).”

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor. Pada perjanjian ini, bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas dan disertai dengan kewajibannya yang lain, yaitu dapat berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Dharmanto, 2016).”

Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu, di dalam permohonan kredit, bank perlu mengkaji permohonan kredit, yaitu (Dharmanto, 2016):“*Character* (kepribadian); *Capacity* (kemampuan); *Capital* (modal); *Collateral* (agunan); Kondisi ekonomi (*condition of economy*).”

Di antara kelima asas tersebut salah satunya adalah *collateral*, yaitu berupa barang-barang yang diserahkan oleh debitor kepada bank selaku kreditor sebagai jaminan terhadap pembayaran kembali atas kredit yang diterimanya (Dharmanto, 2016).Jaminan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditor, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor, apabila debitor tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit tersebut (Poesoko, 2007).”

Tanah menjadi barang jaminan yang paling diminati oleh kreditor, sebab tanah pada umumnya mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan dan dapat dibebani dengan hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditor (Perangin, 1991).Tanah dalam pengertian yuridis adalah Permukaan Bumi demikian dinyatakan dalam Pasal 4 UUPA, sedangkan Hak Atas Tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dan dengan ukuran Panjang dan lebar (Santoso, 2006).”

Tanah sebagai jaminan kredit, dapat dibebani dengan hak tanggungan. Angka 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak tanggungan menyatakan pengertian hak tanggungan, yaitu “hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”. Artinya, “bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain.”

Kedudukan hak tanggungan sesungguhnya sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang. Dengan demikian antara perjanjian hutang piutang dan hak tanggungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ketika suatu perjanjian hutang piutang diletakkan, maka dengan sendirinya hak tanggungan akan mengikutinya. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan sebuah akta yang didalamnya tercantum pemberian hak tanggungan dari debitur kepada kreditur untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur. Sebagai jaminan maka debitur memberikan hak tanggungan kepada kreditur (Prapta Jaya et al, 2017).”

Pada Pasal 51 UUPA menyatakan bahwa : “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 diatur dengan undang-undang”. Obyek hak tanggungan juga meliputi hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya “yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam APHT atas tanah yang bersangkutan (Prapta Jaya et al, 2017).”

Berdasarkan beberapa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan, bank selaku kreditur akan lebih mempertimbangkan dan memilih tanah dengan status Hak Milik yang dapat dijadikan jaminan utang, karena Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Dharmanto, 2016). Meskipun hak milik merupakan hak atas tanah terkuat, akan tetapi ia juga dapat dicabut atau dihapus” status haknya, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 27 UUPA yang merumuskan:

Hak Milik hapus bila :

a. Tanahnya jatuh pada negara

1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18

Bahwa “untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 18 UUPA ini selanjutnya dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada” di Atasnya. “Mengenai hal ini pemilik tanah tidak dapat melakukan upaya hukum apapun untuk membatalkan pelaksanaan pencabutan hak atas kepemilikan tanah, sebab apa

yang sudah ditetapkan/diputuskan bersifat memaksa. Tanah yang telah dicabut haknya itu menjadi tanah negara.”

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya

Penyerahan hak dengan cara ini dilakukan setelah “melalui musyawarah terdapat kesepakatan antara pihak-pihak maka dengan sukarela pemilik menyerahkan tanah seperti halnya di dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atau juga pelepasan/penyerahan hak bentuk lainnya. Jika hak dilepaskan maka tanah tersebut menjadi tanah negara.”

3. Karena ditelantarkan

Pengaturan mengenai “tanah yang terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP No. 36/1998). Pasal 3 dan 4 PP No. 36/1998 mengatur mengenai kriteria tanah terlantar yaitu; (i) tanah yang tidak dimanfaatkan dan/atau dipelihara dengan baik. (ii) tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat atau tujuan dari pemberian haknya tersebut.”

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2 UUPA

Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena “pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Kemudian Pasal 26 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”

b. Tanahnya musnah.

Tanah yang “dimiliki oleh pemilik tersebut mengalami kehancuran, lenyap atau binasa. Hancurnya tanah tersebut bisa disebabkan adanya gempa bumi, banjir dan lain-lain. Oleh karena itu,

dapat dipahami bahwa tanah tersebut tidak dipergunakan lagi dengan perusahaan” yang bagaimanapun untuk mendapatkan hasil (Anshari, 2005).

Pengaturan mengenai hapusnya hak milik juga berpengaruh “pada hapusnya hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUHT. Pasal 18 ayat (1) UUHT merumuskan :”

Hak Tanggungan hapus karena hal -hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya “utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;”
- b. Dilepaskannya “Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;”
- c. Pembersihan “Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;”
- d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Salah satu yang menjadi persoalan adalah hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUPA. Hal tersebut tentu berdampak pada kreditur pemegang hak tanggungan yang seharusnya ia merupakan kreditur preferen berubah menjadi kreditur konkuren. “Hal tersebut dikarenakan hapusnya hak atas tanah khususnya hak milik berakibat pada hapusnya hak tanggungan yang melekat pada hak milik tersebut. Pada akhirnya kreditur yang seharusnya pelunasannya didahulukan menjadi kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur lain (Pasal 1131 dan 1132 BW). Pasal 1131 BW menegaskan tanggung jawab seseorang atas perikatan/utangnya, yaitu segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. (Pasal 1131 dan 1132 BW). Pasal 1131 BW menegaskan tanggung jawab seseorang atas perikatan/utangnya, yaitu segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Ketentuan Pasal 1131 BW ini merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang lahir dari undang-undang. Disini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan yang sama.” Setiap kreditur menikmati hak jaminan umum seperti itu, dari Pasal 1131 tersimpul asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut (Usman, 2009):

1. Seorang “kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.”
2. Setiap bagian “kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.”
3. Hak tagihan “kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja,” tidak dengan “person debitur”.

Berdasarkan uraian di atas, maka hak tanggungan yang termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan perjanjian aksesoir dianggap batal demi hukum, sedangkan batalnya perjanjian aksesoir tidak dapat menghapuskan perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok. Artinya debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur sesuai dengan jumlah uang, bunga atau imbalan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

#### 4. SIMPULAN

Obyek Tanah merupakan jaminan yang paling diminati oleh kreditur khususnya terkait hak milik atas tanah. Tanah sebagai obyek jaminan dapat dibebani hak tanggungan yang selanjutnya diikat melalui APHT yang selanjutnya didaftarkan di kantor pertanahan setempat sehingga lahirlah sertifikat Hak Tanggungan. Hak milik atas tanah yang dibebani hak tanggungan dapat terhapus sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 UUPA, akibat hukum dari terhapusnya hak milik atas tanah juga menghapuskan hak tanggungan yang melekat pada hak atas tanah tersebut. Hal ini berakibat pada kedudukan kreditur yang semula merupakan kreditur preferen berubah menjadi kreditur konkuren.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, T. 2005. *Pendalaman Lanjutan Undang-Undang Pokok Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Dharmanto, L.A. 2016. “Perlindungan Hukum Kreditur dengan Objek Hak Guna Bangunan yang Berakhir Jangka Waktunya Sebelum Perjanjian Kredit Jatuh Tempo”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No.2
- Poesoko, Herowati. 2007. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*. Yogyakarta: Laksbang Presssindo
- Santoso, Urip. 2006. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Perangin, Effendi. 1991. *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*. Jakarta: Rajawali Press
- Prapta Jaya, I.G.; Utama, I.M.A; & Westra, I.K. 2017. “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam”, *Acta Comitatus 2*
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika

## KEWAJIBAN NOTARIS MENJAGA KERAHASIAAN AKTA DALAM KETERLIBATANNYA DI PERADILAN

Oleh :

**Dian Ayu Prasstumi**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
dianayuprasstumi@gmail.com

### Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum sekaligus jabatan kepercayaan yang memiliki kewajiban merahasiakan isi akta beserta keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan pembuatan akta, oleh karena itu notaris dituntut melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Apabila terjadi konflik antar para pihak dalam akta, maka berdampak pula pada dihadapkannya Notaris dalam proses peradilan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi. Guna melindungi Notaris dalam menjamin kerahasiaan akta, UUJN telah memberikan hak ingkar bagi notaris, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana, sehingga Notaris harus mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang batasan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta beserta perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**Kata Kunci :** Notaris, Hak Ingkar, Saksi

### 1. PENDAHULUAN

Terdapat 3 (tiga) jabatan di Indonesia yang digolongkan sebagai Pejabat Umum, antara lain Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang (Anand, 2018). Masing-masing dari ketiga jabatan tersebut memiliki kewenangan yang telah diatur di peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jabatan tersebut. Semua produk (akta ataupun lainnya) atau tindakan hukum lainnya akan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum jika dilakukan sesuai dengan kewenangannya (Adjie et al, 2022).

Notaris merupakan satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik (Prajitno, 2018). Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJNP) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa "suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat". Pasal 1 angka 1 UUJNP menerangkan bahwa: "Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UUJNP ataupun undang-undang lainnya", sedangkan Pasal 15 ayat (1) UUJNP menjelaskan bahwa : "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Bilamana sebuah akta notaris dibuat atau disusun tanpa mengindahkan ketentuan dari Pasal 1 angka 1 UUJN jo. Pasal 1868 KUHPerdata, maka akta tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai suatu akta yang autentik melainkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Implikasi hukum ini tidak sebatas pada akta yang dibuatkan Notaris, namun juga pada jabatan dari Notaris tersebut. Jabatan Notaris dapat diminta suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak sebatas administrasi, namun juga secara perdata dan juga pidana. Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa supaya akta ini mempunyai kekuatan bukti yang autentik, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus berpijak pada peraturan perundang-undangan khususnya UUJN/UUJNP, sumpah jabatan, kode etik jabatan serta prinsip kehati-hatian. Hal tersebut bertujuan agar produk (akta) yang dikeluarkan oleh Notaris dapat digunakan sebagai bukti yang kuat apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Apabila terdapat persoalan yang terjadi, maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan dilibatkan dalam permasalahan tersebut.

Jabatan yang diemban oleh Notaris juga dapat disebut sebagai jabatan kepercayaan. Notaris sebagai orang kepercayaan selain memformulasikan kehendak para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan para penghadap kepadanya, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang pada pokoknya mewajibkan Notaris untuk menjamin kerahasiaan untuk semua hal yang berkenaan dengan akta yang disusunkannya agar dalam membuat akta tersebut sesuai dan juga sejalan terhadap sumpah di dalam janji jabatan (Adjie et al, 2022). Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN yang menyebutkan bahwa : “Notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang mempunyai kepentingan pada akta tersebut secara langsung, orang yang mendapatkan hak, ahli waris, kecuali yang ditentukan peraturan perundang-undangan”. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan berhadapan dengan konsekuensi yaitu dapat dikenakan sanksi yang berbentuk teguran secara lisan sampai pada pemberhentian dari fungsi Notaris secara tidak hormat, selain itu juga berdampak secara sosial yaitu kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (Arisaputra, 2012).

Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menerangkan bahwa mereka yang dikarenakan harkat, martabat, pekerjaan ataupun jabatan diwajibkan agar menjaga rahasia, dapat diminta untuk dibebaskan atas hak guna memberi keterangannya sebagai saksi, yakni berkenaan dengan hal-hal yang dipercayakan padanya. Pada Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.”

Apabila Notaris memainkan peran sebagai seorang saksi di dalam proses peradilan, maka hal tersebut akan menimbulkan dilema. Notaris dituntut serta wajib bersikap kooperatif dengan para penegak hukum untuk menjaga lancarnya proses hukum di peradilan, disisi lain Notaris juga sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi maupun informasi berkaitan dengan akta yang Notaris buat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP. Berdasarkan isu hukum di atas, penulis bertujuan untuk membahas mengenai batasan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta berkaitan dengan hak ingkar notaris serta bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang memberikan

informasi data terkait isi akta berkaitan dengan pemeriksaan pada pihak notaris tersebut di dalam tahapan penyidikan sampai dengan tahapan pengadilan di dalam perkara perdata ataupun pidana.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta dalam keterlibatannya di peradilan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### BATASAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa Notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan guna membuat akta autentik dan juga mempunyai beberapa kewenangan lain seperti yang termaktub juga pada Undang-undang ini ataupun berlandaskan terhadap undang-undang yang lain. Notaris juga mempunyai kewenangan sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJNP. Notaris memiliki peran dalam membuat produk berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak manapun, serta memiliki kekuatan hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya. Akta autentik sendiri merupakan alat bukti bagi para pihak dalam

suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak tersebut berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati. Oleh karena itu, akta autentik berguna bagi para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing demi kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Keotentikan akta tersebut tetap bertahan walaupun Notaris yang membuatnya meninggal dunia. Tanda tangan Notaris yang bersangkutan tetap memiliki kekuatan meskipun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu (Adjie, 2009).

Terdapat dua jenis akta Notaris, diantaranya ialah Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi tentang uraian-uraian Notaris yang disaksikan dan juga dilihat Notaris itu sendiri dengan permintaan dari para pihak, supaya perbuatan atau tindakan para pihak yang dilaksanakan tersebut tertuangkan pada akta Notaris dan Akta Pihak yang dibuatkan di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, yang berisikan tentang keterangan atau uraian, pernyataan dari para pihak yang diceritakan atau yang diberikan di hadapan Notaris. Para pihak tersebut memiliki keinginan supaya keterangan atau uraiannya tersebut dituangkan pada akta Notaris (Tobing, 1992).

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta autentik, yakni: pertama, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) dimana hal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatig*), misalnya akta yang dibuat oleh Notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya; kedua, format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang; ketiga, akta tersebut ditempatkan pejabat publik itu berwenang atau ditempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian akta tersebut tidaklah autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Tanggung jawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu (Anshori, 2009) :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, artinya Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi

atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pada prakteknya, Notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus memperhatikan koridor hukum yang ada serta berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, karena kelalaian atau keteledoran Notaris dapat menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari berdampak pada dihadapkannya Notaris dalam proses peradilan. Pada proses peradilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Pada hukum perdata, yang menjadi alat bukti dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPerdata (Arisaputra, 2012). Seiring berjalannya waktu, pada kasus tertentu para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh pengacara, jaksa, hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Pada kejadian ini, akta autentik yang dikenal sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh bisa memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Peranan Notaris dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi dan saksi ahli. Jika notaris berperan sebagai saksi ajli, maka hal tersebut pasti tidak akan melanggar rahasia jabatan karena keterangan dibatasi hanya pada suatu pengetahuan dan keahliannya yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan. Namun, apabila notaris berperan sebagai saksi, maka ia akan memberikan keterangan yang menyangkut substansi akta, manakala ada ketentuan eksepsional yang

mengharuskan seorang notaris untuk memberikan kesaksian. Keterangan saksi diberikan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang mengalami atau mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang tengah diperiksa (Arisaputra, 2012).

Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum diharuskan untuk turut melancarkan suatu proses hukum. Pada proses tersebut seorang Notaris wajib untuk memberi keterangan atau bahkan menyerahkan salinan fotokopi dari minuta akta yang dibuatnya, sedangkan kedudukan notaris sebagai saksi notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk membuat kesaksian karena jabatannya menurut UU diwajibkan untuk merahasiakannya. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : “mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.” Selanjutnya pada pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara dijelaskan bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian”. Pasal 322 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan pembuatan Akta kepada notaris (Laksana, 2016). Pada dasarnya pembuatan undang-undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan “kebenaran materiil” (Tjay Sing, 1978).

Pada sisi lain, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa : “saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya.” Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dijelaskan bahwa : “Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang

menentukan lain”. Lebih lanjut Pasal 54 UUJN berbunyi “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.” Dari pasal tersebut jelas sudah diperintahkan kepada notaris untuk tidak memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada yang berkepentingan langsung, seperti saat pihak yang berkaitan dengan akta tersebut bersengketa dan terdapat pihak lain yang ingin mendapatkan berita kemudian menemui notaris yang membuat akta tersebut, maka notaris tersebut harus menggunakan Hak Ingkarnya demi menjaga kepentingan para penghadapnya (Laksana, 2016).

Hak ingkar (*Verschoningsrecht*) jika dikaji terdiri dari dua kata yaitu hak dan ingkar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), hak berarti benar; milik atau kepunyaan; kewenangan serta kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Menurut I.P.M. Ranuhandoko, hak atau *right* berarti dasar untuk melakukan sesuatu tindakan secara hukum (Ranuhandoko, 2003), sedangkan kata ingkar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak menepati; tidak melaksanakan; tidak mengaku; dan tidak mau. Hak Ingkar dari para notaris didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 54 UUJN yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak ingkar notaris adalah suatu hak untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan, artinya notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya, notaris tidak hanya berhak untuk tidak berbicara akan tetapi mempunyai penggunaan hak untuk tidak berbicara (Arisaputra, 2012). Batasan bolehnya notaris memberikan keterangan berkaitan dengan isi akta apabila undang-undang memberikan perintah kepada notaris membukakan kerahasiaan dari isi akta dan juga pernyataan atau keterangan yang dipahami oleh notaris yang berkenaan dengan tujuan dari pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, notaris harus bisa membatasi diri kapan harus berbicara dan kapan tidak boleh bicara, notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, sesuai ketentuan Pasal 66 UUJNP. Apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan, maka khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan (Arisaputra, 2012).

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Polri dengan INI-PPAT, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut sebagai Nota Kesepahaman) yang mengatur bahwa pemanggilan

Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris, mencantumkan waktu, tempat, alasan pemanggilan.

Keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986, mengatur antara lain :

- a. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang dibuatnya dan/atau selaku pemegang protokol;
- b. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyempahan, kecuali ada cukup kuat alasan, bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP;
- c. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan padanya;
- d. Sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik pembantu;
- e. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara penyidik dan Notaris sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang;
- f. Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan secara benar, mengingat sumpah jabatan dan UUJN. Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak untuk menolak memberika keterangan kepada pihak, karena Notaris tersebut diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan;
- g. Hak ingkar Notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan dengan isi akta;
- h. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan Surat Penugasan; Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

Hak Ingkar Notaris dalam perkara pidana tidak bisa dipergunakan, sebab di hadapan hukum setiap warga negara yang baik wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tak lain

daripada yang sebenarnya. Dan dalam hal ini peranan hakim sangatlah diperlukan apakah Notaris tersebut perlu atau tidak dalam memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Kesaksian notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar notaris Pasal 4 ayat 2 *jo.* Pasal 16 ayat 1 huruf e *jo.* 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris itu sendiri.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJNP dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 3 (tiga) orang berasal dari pemerintah, 3 (tiga) orang berasal dari organisasi Notaris, 3 (tiga) orang berasal dari akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJNP yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;
- c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 angka 3 KUHPerdara, Pasal 4 ayat (2) UUJN dan (4) Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN;
- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Pada kenyataan di lapangan, meskipun pemanggilan Notaris telah diatur baik dalam UU ataupun dalam Nota Kesepahaman, kenyataannya pemanggilan terhadap Notaris dilakukan secara langsung tanpa persetujuan Majelis Pengawas Notaris. Bahkan hingga saat ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di daerah sesuai dengan UUJN yang terbaru belum memiliki manfaat sehingga terjadi kekosongan hukum. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia hingga ke tingkat Pengawas Wilayah dan Tingkat Pengurus Daerah sudah melakukan usaha-usaha sosialisasi dan konsinering dengan para pihak penegak hukum dari mulai Kejaksaan, Kepolisian, KPK hingga Lembaga Peradilan bahwa cukuplah copy akta yang sudah dilegalisir oleh Notaris yang bersangkutan saja yang diperiksa, tidak perlu Notarisnya yang diperiksa dan selalu disampaikan

bahwa Notaris adalah bukan para pihak dalam akta, sehingga jika terjadi sesuatu yang melanggar hukum yang dibuat oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat di dalamnya (Akhiruddin, 2014).

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jika seorang notaris menjadi saksi di pengadilan, maka ia tetap mempunyai hak ingkar, tetapi jika notaris sebagai tersangka di pengadilan, hak ingkar tersebut otomatis gugur. Notaris sebagai pejabat umum sekaligus merupakan jabatan kepercayaan menuntut profesionalitas serta ketelitian, hal tersebut berfungsi untuk menjaga notaris dari bentuk permasalahan di kemudian hari.

#### 4. KESIMPULAN

Notaris merupakan pejabat umum dan selaku jabatan kepercayaan (*vertronwens ambts*) memiliki kewajiban merahasiakan isi akta yang dibuatnya oleh dan dihadapannya serta segala keterangan yang diberikan yang diberikan oleh para penghadap. Guna melindungi Notaris dalam menjamin kerahasiaan akta, UUJN telah memberikan hak ingkar bagi notaris. Notaris dapat menggunakan hak ingkar apabila Notaris dimintai keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan mengenai keterangan berkaitan dengan isi akta, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana, sehingga Notaris harus mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib & Agustini, Sri. 2022. "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2)", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.6 No.1
- Akhiruddin, A. 2014. "SOS Perlindungan Profesi Notaris (Notaris Dijadikan Tersangka Terus Bertambah)", *Majalah RENVOL*, Edisi Nomor 1.133.XII, tanggal 3 Juni
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Arisaputra, M.I. 2012. "Kewajiban Notaris dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris", *Jurnal Persepektif*, Vol. XVII No.3
- Laksana, P.A. 2016. "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 3 No. 4
- Prajitno, A.A. Andi. 2018. *Pengetahuan Praktis Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUJN*

- Nomor 2 Tahun 2014*. Caetakan ke-5. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara
- Ranuhandoko, I.P.M. 2003. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tjay Sing, Ko. 1978. *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Tobing, G.H.S lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga

## AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI PADA POLIS ASURANSI

Oleh:

**Vara Deviana**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
varadeviana642@gmail.com

### Abstrak

Perjanjian saat ini seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku yang sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak, tidak sedikit hubungan hukum antar para pihak yang diikat dalam suatu perjanjian baku tersebut ditentukan secara sepihak oleh mereka yang mempunyai keunggulan ekonomi yang kuat. Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang digunakan oleh masyarakat tersebut pada umumnya dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak standar, salah satunya sering ditemui pada polis Asuransi. Adanya klausula tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi tertanggung dan lebih menguntungkan bagi pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi itu sendiri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi dilarang penggunaannya oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum karena tidak mencakup syarat sahnya perjanjian dalam hal kesepakatan. Apabila pihak tertanggung merasa dirugikan, maka tertanggung bisa mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan secara litigasi.

**Kata kunci:** perjanjian baku, klausula eksonerasi, polis asuransi

### 1. PENDAHULUAN

Ikatan perjanjian para pihak merupakan substansi pokok yang melahirkan hak dan kewajiban. Hubungan kontraktual dapat dilakukan oleh siapapun dengan isi perjanjian yang sesuai dengan kepentingan para pihak. Keleluasaan dalam membuat perjanjian dibatasi dengan norma kesucilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keleluasaan tersebut bahkan dapat mengesampingkan peraturan yang tertuang dalam KUHPerdata atau yang lazim kita sebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

Perjanjian standart saat ini telah menjadi dilema serta perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul guna mengikat atau berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak (Njatrijani, 2012). Perjanjian saat ini seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku yang sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Njatrijani, 2012). Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat dewasa ini (Listiawati, 2015). Adanya Perkembangan itulah, kebebasan Berkontrak akhirnya mulai dikikis, sehingga berkembanglah hukum *from contract to status* (Mertokusumo, 1990).

Pada perkembangan di era saat ini, banyak perjanjian standart yang pada umumnya digunakan oleh kalangan yang memiliki keunggulan ekonomi yang dominan (Listiawati, 2015). Tidak sedikit hubungan hukum antar para pihak yang diikat dalam

suatu perjanjian, isi dari perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh mereka yang mempunyai keunggulan ekonomi yang kuat dan tidak jarang pula mereka juga mencantumkan syarat-syarat atau klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut, sedangkan pihak lawannya pada umumnya memiliki kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu (Badruzaman, 1980).

Eksonerasi atau *exoneration* (Bahasa Inggris) diartikan oleh I. P. M Ranuhandoko B.A. dalam bukunya, "Terminologi Hukum Inggris Indonesia", yaitu, pemberian kebebasan terhadap seseorang dalam upaya lepas dari tuntutan dan tanggungjawab (Guntara, 2016). Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang digunakan oleh masyarakat tersebut pada umumnya dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak standar. Salah satu bentuk perjanjian baku yang sering ditemui yaitu pada polis Asuransi.

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk polis asuransi. Pengaturan Asuransi sebagai suatu Perjanjian dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Salah satu contoh klausula eksonerasi yang sering ditemukan dalam polis asuransi antara lain klausula yang pada intinya menyatakan bahwa "tertanggung tunduk terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penanggung tanpa kesepakatan tertanggung selama masa pertanggungan

asuransi” (Windiantina, 2020). Hal ini tentu sangat merugikan pihak tertanggung karena tidak adanya keseimbangan hak dengan pihak Penanggung. Hal tersebut merupakan bentuk permasalahan yang perlu dianalisa, karena akan berdampak pada hilangnya keabsahan daripada perjanjian asuransi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini hendak menganalisa terkait akibat hukum pencantuman klausul eksonerasi pada polis asuransi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman KUHPerduta dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN AKIBATHUKUMPENCANTUMANKLAUSULE KSONERASIPADAPOLIS ASURANSI

Asuransi di Indonesia berasal dari Belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah *verzekering* (Purba, 2004). Secara harfiah kata ini dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan. Menurut James L. Ahearn (1997) didalam bukunya yang berjudul *Risk and Insurance* mengemukakan bahwa asuransi adalah suatu alat sosial yang menggabungkan risiko-risiko individu pada kelompok, dengan menggunakan dana kelompok untuk membayar kerugian. Menurut Robert Mehr dan Emmerick Commack (1980), menyatakan bahwa asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko

dengan menggabungkan sejumlah unit yang menyebabkan kerugian guna mengumpulkan taksiran kerugian yang mungkin terjadi.

Pengaturan asuransi di Indonesia diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dan Pasal 246 KUHD. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian pada intinya memberikan definisi asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Santri & Rahdiansyah, 2020). Menurut Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa yang tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa di dalam asuransi wajib terdapat 4 (empat) unsur, yakni (Tuti, 2011):

- Adanya perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
- Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung;
- Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
- Adanya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi yang disebabkan karena adanya suatu resiko yang mungkin datang.

Hal-hal yang sering ditemui di lapangan adalah pemasaran produk oleh agen penjualan asuransi yang memberikan keterangan kepada konsumen seolah-olah produk asuransi yang mereka jual dapat memenuhi segala bentuk klaim yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dengan proses yang mudah, sederhana, dan cepat (Njatrijani, 2012). Penawaran yang dilakukan oleh agen tersebut tentu saja memikat calon konsumen sehingga tertarik untuk segera melakukan perikatan terhadap perjanjian/polis asuransi. Tahapan selanjutnya agen asuransi akan segera mengeluarkan surat permohonan asuransi dan meminta konsumen untuk segera menandatangani dan pada saat yang bersamaan konsumen diminta untuk segera membayarkan premi yang pertama. Pada tahapan ini adalah tahapan yang

paling penting dalam rangkaian bergabung atau tidaknya konsumen pada perusahaan asuransi, karena jika sudah dilakukan penandatanganan pada surat permohonan asuransi dan telah dilakukan pembayaran premi pertama, maka seringkali premi tidak dapat dikembalikan atau premi akan dikembalikan sebagian jika terjadi pembatalan permohonan asuransi. Persoalan selanjutnya mulai timbul ketika konsumen melakukan klaim kepada perusahaan asuransi yang mereka ikuti.

Apabila melihat fakta lapangan, banyak sekali ditemukan klausula yang tidak melindungi kepentingan konsumen. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh agen asuransi sebelumnya tidaklah tercantum dalam klausula polis asuransi yang dimaksud secara mendetail, padahal detail klausula tersebut yang seharusnya dijadikan dasar klaim, sehingga hasilnya proses klaim akan berlangsung lama dan berakhir dengan tidak dipenuhinya klaim tersebut. Perusahaan asuransi akan berdalih bahwa dasar klaim konsumen merupakan hal yang tidak terlindungi (Njatrijani, 2012).

Berdasarkan sudut hukum perjanjian, suatu kontrak dinyatakan sah apabila kontrak tersebut dibuat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan subjektif dan obyektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal-Pasal yang melindunginya. Secara spesifik, adanya "kesepakatan" yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian tersebut secara tegas telah di atur dalam Pasal 257 KUHD yang pada pokoknya menyebutkan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi (Asikin, 2013).

Sebagai suatu perjanjian yang tertulis seharusnya polis asuransi berisi kesepakatan kedua belah pihak, namun pada kenyataannya polis asuransi selalu sudah dipersiapkan oleh penanggung atau perusahaan asuransi terlebih dahulu. Polis asuransi tersebut berbentuk perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun secara sepihak sebelumnya oleh penanggung atau perusahaan asuransi (Njatrijani, 2012). Oleh sebab itu, seringkali dalam perjanjian tersebut didapati banyak klausula baku yang menguntungkan perusahaan asuransi, yang pada akhirnya para calon tertanggung hanya dihadapkan pada pilihan menerima perjanjian atau menolak perjanjian.

Moch Isnaeni menjelaskan substansi adanya perjanjian baku digunakan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dan posisi tawar yang lebih tinggi untuk memanfaatkan kesempatan terhadap orang yang mempunyai kebutuhan untuk melakukan perjanjian tersebut, sehingga hilangnya makna berimbang atau proporsionalitas dalam perjanjian (Isnaeni, 2013). Implikasi dari perjanjian tersebut

mengakibatkan adanya kerugian karena tertutupnya daya tawar salah satu pihak bahkan sampai hilangnya syarat-syarat perjanjian substansial, akan tetapi disisi lain salah satu pihak harus menerima kondisi tersebut karena adanya kebutuhan yang mendesak (Isnaeni, 2013).

Klausul eksonerasi atau *exemption clause* merupakan sebuah kelaziman dalam suatu perjanjian asuransi, namun bertanggung tidak dapat menolak persyaratan tersebut sehingga sangat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap tertanggung. Rijken mendefinisikan Klausula eksonerasi adalah klausul yang tercantum dalam sebuah hubungan kontraktual dengan upaya menghindarkan diri dalam pemenuhan suatu kewajiban dalam bentuk penggantian kerugian baik seluruh atau sebagian karena pengingkaran terhadap perjanjian (Muru, 2007). Eksonerasi merupakan salah satu bentuk perjanjian baku (*standard contract*) dalam bentuk penyalahgunaan kondisi oleh salah satu pihak yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan syarat perjanjian dengan menghilangkan makna kesepakatan secara substansial, dengan demikian perjanjian yang dibuat yang seperti itu dapat dikatakan tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak.

Pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi yang memberatkan pihak Tertanggung, dapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerduta), karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sehingga klausula eksonerasi dalam perjanjian baku hanya ditentukan oleh pihak Penanggung tanpa melibatkan pihak tertanggung, hal ini memungkinkan pihak Penanggung dengan leluasa menyalahgunakan keadaan ini (Sunarmi, 2012). Kerugian yang mungkin timbul dari klausula eksonerasi akan dialami oleh pihak tertanggung. Permasalahan yang selalu dialami oleh pihak tertanggung adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika *evenement* terjadi (Sunarmi, 2012).

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) (Muaziz et al, 2015). Pada pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaanklausula baku yaitu: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang

dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti", sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Walaupun berakibat batal demi hukum, tetap diperlukan adanya kesadaran dan keberanian konsumen atau bertanggung untuk mengajukan gugatan pembatalan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut sebagai upaya hukum terakhir ke pengadilan (Windiantina, 2020).

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak "berbentuk klausula eksonerasi" sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut" (Kristiyanti, 2001).

Larangan ini dimaksudkan untuk menetapkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Disamping itu pembatasan-pembatasan itu dalam praktik peradilan peranan hakim memanglah sangat strategis manakala terjadi sengketa antara para pihak. ada beberapa sikap yang diambil oleh hakim dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi tersebut.

1. Pernyataan tidak berlaku dari syarat-syarat baku, artinya kemungkinan bagi hakim untuk menyampingkan syarat-syarat baku;
2. Penafsiran, dengan merugikan pemakai. Artinya, penafsiran yang merugikan orang yang menyusun syarat-syarat baku atau mengusulkannya (penafsiran *contra proferentum*);

3. Pengujian pada kesesuaian atau itikad baik. Artinya, bahwa kontrol yang paling penting untuk hakim adalah dengan melakukan pengujian dari pertimbangan syarat-syarat baku pada itikad baik (Mertokusumo, 1990).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang disalahgunakan, seperti misalnya untuk membebaskan atau bahkan untuk menghapus tanggung jawab salah satu pihak adalah bertentangan dengan undang-undang. Disamping itu jika sengketa maka lembaga peradilan mempunyai peranan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah (konsumen).

#### 4. SIMPULAN

Pencantuman klausul eksonerasi dalam kontrak standar (perjanjian baku) dapat menimbulkan suatu kerugian kepada tertanggung sebab pembuatan isi kontrak dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi dan membuat kedudukan para pihak tidak seimbang dan jauh lebih menguntungkan kepada pihak pembuat perjanjian, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi dilarang penggunaannya oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum karena tidak mencakup syarat sahnya perjanjian dalam hal "kesepakatan". Apabila pihak tertanggung merasa dirugikan, maka tertanggung bisa mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan secara litigasi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Athearn, James L. 1977. *Risk and Insurance*. West Publishing Co
- Badruzaman, M.D. 1980. "Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya di Indonesia". *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata*. Universitas Sumatera Utara
- Deny Guntara. 2016. "Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturinya", *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1
- Isnaeni, M. 2013. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta 2013
- Kristiyanti, Celina. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Listiawati, Danty. 2015. "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen", *Jurnal Private Law*, Edisi 07
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Mehr, Robert L. & Commack, Emmerson. 1980. *Principle of Insurance*. Rechar D. Irwin Inc., Illinois

- Mertokusumo, Sudikno. 1990. "Perkembangan hukum Perjanjian", *Makalah Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Dagang*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Miru, Ahmadi.2007. *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Muaziz, M. H. & Busro, A. 2015."Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1
- Njatrijani, Rinitami. 2003. Akibat Hukum Pencantuman Klausul Baku dalam Polis Asuransi yang Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999, *Jurnal MMH*, jilid 41 No. 2
- Purba, Radiks. 2004. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo
- Tuti,Rastuti.2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia
- Windiantina, W.W. 2020. "Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi", *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 11 No. 1

## AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN DIRI”

Oleh:

**Siti Rohmatul Izzah**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
srohmatulizzah@gmail.com

### Abstrak

Notaris sebagai “pejabat umum bertugas melayani kepentingan umum dalam lingkup membuat akta-akta autentik. Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut maupun masalah dari para pihak dalam Akta. Masalah diantara para pihak dalam Akta juga akan melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya. Sebagai bentuk pencegahan, Notaris mencantumkan klausul proteksi diri pada akta yang dibuatnya sebagai bentuk pengamanan diri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan hukum pencantuman klausula proteksi diri pada akta notaris sebagai upaya pengamanan diri. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris terutama akta pihak (*partij acte*) tidak dilarang oleh UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan ia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Klausul proteksi diri hanya menegaskan kedudukan dan tanggung jawab Notaris serta tidak memberikan hak imunitas hukum bagi Notaris.”

**Kata kunci:**akta notaris, klausul proteksi diri, Keabsahan

### 1. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum bertugas melayani kepentingan umum dalam lingkup membuat akta-akta autentik. Akta autentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Subekti, 2005). Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan pengertian di atas, akta autentik dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*ambtelijke acte*) dan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang (*partij acte*) (Listiana, 2020).

Menurut Sjaifurrachman, terdapat perbedaan dari 2 (dua) macam sifat akta di atas, pada akta pejabat (*ambtelijke acte*), akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani akta, sepanjang Notaris menyebutkan alasan pihak yang tidak menandatangani akta tersebut, sedangkan tidak ditandatanganinya akta di dalam *partij acte* akan menimbulkan akibat yang lain (Sjaifurrachman, 2011). Apabila salah satu pihak tidak membubuhkan tanda tangannya dalam *partij acte*, maka dapat diartikan pihak tersebut tidak menyetujui isi akta yang dibuatnya, kecuali apabila tidak menandatangani akta itu didasarkan atas alasan yang kuat. Alasan yang dapat diterima untuk tidak membubuhkan tanda tangan didalam *partij acte* harus

dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan (Sjaifurrachman, 2011).

Notaris dalam menjalankan jabatan khususnya dalam proses penyusunan dan pembuatan akta wajib memperhatikan koridor hukum yang berlaku yaitu UUJN, Peraturan perundang-undangan, kode etik jabatan dan juga prinsip kehati-hatian yaitu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) tentang syarat sah perjanjian, 1337 KUH Perdata tentang pembatasan perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terkait asas kebebasan berkontrak (Nisa, 2021). Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan konflik atau sengketa di kemudian hari yang berdampak pada hilangnya kekuatan hukum akta autentik sebagai alat bukti sempurna, serta tidak merugikan para pihak dalam akta ataupun pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan akta tersebut (Nisa, 2021). Kekeliruan atas akta Notaris bisa mengakibatkan hilangnya hak seseorang atas suatu kewajiban, karena akta Notaris dapat dijadikan sebagai alasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang (Anshori, 2009).

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut maupun masalah dari para pihak dalam Akta. Masalah diantara para pihak dalam Akta juga akan melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya, sehingga Notaris seringkali dipanggil pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum hingga hakim untuk dimintai keterangan baik sebagai saksi, tergugat atau turut tergugat maupun tersangka atau terdakwa berkaitan

dengan akta yang telah Notaris buat (Setiawan dan Gunarto, 2017).

Sebagai bentuk pencegahan, Notaris mencantumkan klausul proteksi diri pada akta yang dibuatnya sebagai bentuk pengamanan diri. Klausul tersebut pada umumnya berisi bahwa: “para penghadap menyatakan dan menegaskan bahwa para pihak akan membebaskan Notaris, baik kedudukannya sebagai pribadi ataupun sebagai Notaris yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Selanjutnya apabila terjadi sengketa atau konflik berkaitan dengan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya.”

Pencantuman klausul proteksi diri pada badan akta dipertanyakan keabsahan dan kekuatan hukumnya. Hal ini disebabkan tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur ketentuan pencantuman klausul tersebut. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menganalisa terkait keabsahan dan kekuatan hukum dari klausul tersebut dalam akta Notaris.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dari klausul tersebut dalam akta Notaris. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman KUHPperdata dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN KEABSAHAN DAN KEKUATAN HUKUM KLAUSUL PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS

Istilah keabsahan berasal dari istilah hukum Belanda “*recht matig*” yang berarti “berdasarkan atas hukum”. Pada istilah Bahasa Inggris, keabsahan dikenal sebagai “*legality*” yang mempunyai makna “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Berdasarkan Kamus hukum, keabsahan memiliki arti sesuatu hal yang pasti. Keabsahan hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum yang mempunyai hubungan dengan teori positivis di Indonesia. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara hukum yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan serta keadilan dalam setiap kebijakan. Selain itu, suatu perbuatan hukum dikatakan sah jika ada aturan atau norma tertulis berupa undang-undang (Simorangkir et al, 2013).

Akta Notaris dapat dikatakan sah serta memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh UUJN (Adjie, 2021). Pasal 1868 BW merupakan sumber otentitas akta Notaris, juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut (Adjie, 2021) :

- Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
- Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Menurut Prof. Subekti, S.H, nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada akta autentik diatur dalam Pasal 1870 BW *jo*. Pasal 285 RBG adalah: sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga akta autentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain akta autentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian (Makarim, 2015).

Syarat agar akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek (Adjie, 2021):

- Prosedur Pembuatannya

Pembuatan akta harus dilakukan secara bertahap dan berurutan sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam UUJN/UUJNP yang secara umum yaitu :

- Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
- Menanyakan, kemudian mendengarkan, dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab);

- Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk para penghadap;
- Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta;
- Memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta;
- Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- Apabila dalam pembuatan akta tersebut ada prosedur yang tidak ditempuh/dilakukan, akta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai akta Notaris yang tidak sah atau tidak valid, karena tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam UUJN/UUJNP.

b. Kewenangan

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJNP. Notaris yang tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan di luar kewenangan dan tindakan tersebut menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan jika ada pihak yang merasa dirugikan dan akta yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan mengikat apapun.

c. Substansi

Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJNP menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan para penghadap sendiri yang dalam pembuatannya Notaris harus pula memperhatikan ketentuan pasal 1337 BW. Notaris hanya bisa bertindak dalam ruang lingkup hukum perdata. Notaris tidak mengabdikan keinginan para penghadap yang secara materiil substansinya di luar hukum perdata.

Pembuatan akta Notaris harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh UUJN. Bentuk akta Notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN yaitu sebagai berikut:

(6) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(7) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(8) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(9) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pencantuman klausul proteksi diri dapat ditemui dalam akta Notaris terutama pada akta pihak (*Partij*). Pencantuman klausul tersebut merupakan bentuk urgensi Notaris dalam memberikan perlindungan atau pengamanan diri. Urgensi Notaris dalam mencantumkan klausul proteksi diri tersebut, yaitu (Adjie, 2021) :

- e. Sebagai bentuk tindakan kehati-hatian dan berhati-hati bagi Notaris;
- f. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris sendiri;
- g. Sebagai informasi kepada pihak lain, jangan terlalu mudah menstigmasi/ melabelisasi kepada Notaris dari pihak lainnya sebagai pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya, jika tanpa ada bukti yang kuat.
- h. Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong maka para penghadap sendiri yang harus bertanggungjawab.

Menurut Habib Adjie, klausul proteksi diri ini merupakan klausul baru yang digunakan oleh beberapa Notaris dalam praktik kenotariatan, pencantuman klausul ini dianggap perlu sebagai upaya penegasan secara tidak langsung terkait kedudukan dan tanggung jawab Notaris, agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu. Pencantuman klausul tersebut dalam akta pihak (*partij acte*) boleh saja selama itu tidak dilarang. Klausul proteksi diribukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban, tapi dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan (Adjie, 2021).

Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris pada awalnya memang menimbulkan dilema mengingat ketentuan pasal 15 ayat (1), Pasal 38 ayat (3) huruf c, dan Pasal 53 UUJN. Inti dari Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa wewenang Notaris yaitu membuat akta yang didasarkan pada kehendak para penghadap, Pasal 38 ayat (3) huruf c menegaskan bahwa badan akta memuat isi akta yang

berisi kehendak para penghadap, serta Pasal 53 UUJN yang berbunyi:

“Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi :

- a. Notaris, istri atau suami Notaris
- b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.”

Substansi Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menjelaskan secara eksplisit bahwasanya Notaris mempunyai wewenang untuk mengkonstantir kehendak atau kepentingan para pihak yang selanjutnya dituangkan ke dalam isi akta.

Habib Adjie (2021) menjelaskan bahwasanya secara praktis Notaris biasanya meminta persetujuan kepada para penghadap terkait pencantuman klausul proteksi diri dalam akta, bahwa apabila terjadi sengketa atau ada hal-hal yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri maka ia yang bertanggung jawab dan tidak pula melibatkan Notaris. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pencantuman klausul proteksi diri harus didasarkan pada kesepakatan para pihak meskipun munculnya klausul tersebut pada awalnya merupakan inisiatif dari Notaris itu sendiri (Nisa, 2021).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, Mahkamah Agung berpendapat Notaris berfungsi hanya untuk mencatatkan dan menuliskan hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap di hadapan Notaris. Pada pokoknya Putusan tersebut menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Notaris hanya menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta, namun Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut dan Notaris tidak mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk menilai kebenaran materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya.

Tidak adanya kepentingan Notaris dalam pencantuman klausul proteksi diri, cukup menjadi dasar bahwa Notaris tidak pula melanggar ketentuan Pasal 53 UUJN. Klausul proteksi diri tidak memberikan keuntungan berupa hak imunitas hukum bagi Notaris baik secara perdata maupun pidana. Klausul tersebut pada akhirnya hanya berupa penegasan saja mengenai batasan tanggung jawab Notaris dan juga para penghadap.

Klausul proteksi diri tidak diatur dalam UUJN/UUJNP sehingga klausul ini tidak mempunyai kekuatan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris (Leoprayogo, 2019). Pencantuman klausul proteksi diri dalam akta baik di buat oleh atau di hadapan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Notaris, tetapi apabila

Notaris ingin tetap mencantumkan klausul tersebut di dalam aktanya juga tidak salah dan tidak mengurangi atau tidak membuat Notaris menjadi lemah (Listiana, 2020). Klausul proteksi diri tidak dapat menghilangkan jaminan atas kepastian penuntutan Notaris di kemudian hari baik secara perdata maupun pidana, karena ada atau tidaknya klausul proteksi diri, secara normatif Notaris tetap harus bertanggung gugat mengganti rugi, tanggung jawab sesuai ketentuan hukum pidana, atau dapat dijatuhi sanksi administrasi apabila dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dibuktikan melakukan kesalahan atau pelanggaran sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

#### 4. SIMPULAN

Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris terutama akta pihak (*partij acte*) tidak dilarang oleh UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu pencantuman klausul proteksi diri sah secara hukum dan tidak menghilangkan otentitas akta, dengan ketentuan bahwa Notaris dalam mencantumkan klausul tersebut tetap harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau penghadap.

Klausul proteksi diri secara eksplisit tidak diatur di dalam ketentuan UUJN maupun perundang-undangan lainnya, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Klausul proteksi diri hanya menegaskan kedudukan dan tanggung jawab Notaris serta tidak memberikan hak imunitas hukum bagi Notaris, sehingga apabila Notaris dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka Notaris tetap bertanggung jawab sesuai kadar pelanggaran yang Notaris lakukan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2021. *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani
- Ansohri, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press
- Listiana, A. 2020. “Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 3
- Makarim, Edmon. 2015. Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember 2015*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana
- Nisa, Nailly Z. 2021. Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (*Partij Acte*), Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

- Setiawan, Asep dan Gunarto. 2017. "Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Eksonerasi Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1
- Simorangkir., Erwin, Rudi T., & Prasetyo, JT. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju
- Subekti, R. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

# KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN

Oleh :

**Guntur Eko Saputro**

Lecturer in Defence Economics Indonesia, Defenese University Indonesia  
Kawasan IPSC Sentul, Citereup, Bogor, Jawa Barat, 16810  
Gunturekosaputroarm95@gmail.com

## Abstrak

Kebijakan pemerintah untuk kerjasama dengan Korea Selatan di bidang industri pertahanan dipusatkan pada pengembangan kapal selam kelas changbogo dan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Kerja sama ini menunjukkan ketidaksiapan industri dalam negeri untuk mendukung kemandirian industri pertahanan. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan masukan pemerintah mengenai implementasi dan strategi kerjasama Industri Pertahanan bekerjasama dengan Korea Selatan. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Hasil yang dicapai sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan terkait Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi dan Struktur Birokrasi, diperlukan strategi pemenuhan SDM yang komprehensif, sarana dan prasarana pendukung serta inventarisasi perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan, untuk mengantisipasi terhambatnya proses revitalisasi industri pertahanan yang belum siap melakukan alih teknologi

**Kata Kunci** :Industri Pertahanan, Korea Selatan dan Ekonomi Pertahanan.

## 1. PENDAHULUAN

Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal antara lain faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi(Indrawan, 2018). Pertahanan merupakan sesuatu yang fundamental bagi keberlangsungan sebuah negara. Tanpa adanya sistem pertahanan yang kuat, ancaman dari pihak luar akan lebih mudah mengganggu stabilitas negara. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai unsur untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat. Salah satunya adalah memiliki industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata(Saputro, G. E., Mahroza, J., & Tarigan, 2020).

Ekonomi Pertahanan adalah manajemen ekonomi nasional yang terkait dengan dampak dari belanja militer, manajemen ekonomi yang terkait dengan dampak ekonomi dan belanja militer, manajemen ekonomi pada masa perang dan manajemen anggaran militer pada masa damai (Yusgiantoro, 2014). Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan merupakan usaha pemerintah melalui industri dalam negeri di tahun 2012 untuk mengembangkan alutsista Indonesia dikarenakan kondisi alutsista yang melemah. Secara detail, hal tersebut disebutkan dalam Pasal 3 dan 4 yang mengatur mengenai fungsi dan tujuan penyelenggaraan industri pertahanan (Romansyah, 2015: 2). Menurut ekonomi pertahanan, dampak penggunaan anggaran pertahanan terhadap

perekonomian dapat dilihat dari pendekatan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi (Saputro, Tarigan, et al., 2021)

Sistem keamanan nasional dibangun dengan pendekatan partisipasi warga dan masyarakat atau kesepakatan reformasi sektor keamanan, yang terpenting adalah bagaimana pengaruhnya terhadap Struktur Pengeluaran Pertahanan-Keamanan terhadap stabilitas keamanan di Indonesia (Saputro et al., 2020). Kerjasama pada bidang pertahanan yang pernah terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan diantaranya adalah perjanjian mengenai pengaturan pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kemitraan Pertahanan Republik Korea Selatan tentang penerimaan bersama jaminan mutu antar pemerintah untuk material dan jasa pertahanan (*Agreement Between the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defence of the Republic of Korea Concerning Mutual Acceptance of Government Quality Assurance of Defence Materiel and Services*) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1999.

Tepatnya pada tanggal 15 Juli 2010 bertempat di Seoul, Pemerintah Indonesia menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) mengenai kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-X yang kemudian dilanjutkan dengan kontrak tentang Technology Development Phase Program atau pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X pada tanggal 20 April 2011 di Daejeon. Berdasarkan peraturan Presiden tentang program pengembangan pesawat tempur IFX, tahapan pengembangan pesawat

tempur IF-X dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pengembangan teknologi, tahap pengembangan rekayasa serta manufaktur dan tahap produksi. Tahap pengembangan teknologi merupakan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan, tahapan untuk membangun persyaratan operasional, identifikasi teknologi dan desain konfigurasi Pesawat Tempur IF-X. Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan industri pertahanan dipusatkan pada pengembangan kapal selam kelas *changbogo* dan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Kedua proyek ini menjadi fokus utama kerjasama strategis antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kapal selam kelas *changbogo* sendiri memiliki beberapa teknologi mutakhir seperti *Latest Combat System, Enhanced Operating System, Non-hull penetrating mast, and Comfortable Accommodation*. Dalam hal ini, pembelian kapal selam *changbogo* memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Laut (Jalo, 2015).

Dilihat dari kebijakan Pemerintah terlihat ketidaksiapan industri dalam negeri untuk menyokong kemandirian industri pertahanan. Ketidaksiapan ini bisa disebabkan karena belum adanya infrastruktur pendukung maupun dukungan dana untuk melakukan produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan secara masal. Demikian juga permasalahan pada sektor industri, Jika dikaitkan dengan *roadmap* pengembangan alat peralatan pertahanan dan keamanan, apakah sanggup untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan TNI dari segi kualitas. Apabila kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI, maka kebutuhan operasi TNI akan terganggu dan beresiko bagi personel di lapangan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri Pasal 1, imbal dagang didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Imbal dagang merupakan salah satu bentuk mekanisme pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan dari luar negeri selain kandungan lokal dan offset. Komponen yang dapat dilakukan mekanisme imbal dagang diantaranya barang dan atau jasa Industri Pertahanan, barang industri manufaktur, maupun produk lain yang menguntungkan perekonomian nasional. Bentuk pengadaan dari luar negeri tidak melulu pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan, namun juga berbentuk perbaikan dan pemeliharaan dikarenakan di dalam negeri **belum mampu** melakukan perbaikan dan pemeliharaan sendiri.

Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Industri Strategis berpengaruh secara simultan terhadap Stabilitas Makroekonomi. Integrasi pembangunan stabilitas keamanan bersama-sama

dengan peningkatan pertumbuhan industri strategis secara sinergis memiliki kemampuan untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi ( Saputro & Meirinaldi, 2019).

Kebijakan kerjasama Indonesia-Korea Selatan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperkuat visi pengadaan kapal selam Indonesia pada tahun 2024. Berbeda dari beberapa kerjasama serupa yang bersifat pembelian alat pertahanan semata, kesepakatan yang ditandatangani tahun 2011 ini turut mengikutsertakan proses transfer teknologi untuk menjamin keberlanjutan kemandirian maritim Indonesia. Kerjasama Bilateral tersebut memiliki hambatan yang perlu diselesaikan, khususnya di sektor kesiapan SDM Indonesia serta anggaran yang masih terbatas (Al-Fadhat & Effendi, 2019).

Korea Selatan cenderung berperan sebagai agensi pemerintah yang memiliki kepentingan paling besar (80% investasi) dalam proyek. Indonesia, dalam hal ini cenderung terlihat sebagai kontraktor, tidak memiliki kepentingan yang cukup besar (20% investasi), dan sangat bergantung pada dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (Armandha, S. T., Sumari, A. D. W., & Rahmadi, 2016).

Pelaksanaan kerjasama Indonesia Korea Selatan dalam pembangunan kapal selam memiliki kekurangan berupa kekuatan tawar menawar pemerintahan Indonesia, khususnya KKIP maupun Industri Pertahanan yang terlibat dalam program kerjasama tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya proses alih teknologi yang masih kurang dari angka 85% sebagai salah satu dasar bagi percepatan revitalisasi industri pertahanan dalam mencapai ketahanan alutsista Angkatan Laut (Al-Fadhat & Effendi, 2019). Terjadi peningkatan terhadap kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa yang akan datang dan juga terdapat peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia khususnya dalam strategi penangkalan dan postur pertahanan Indonesia. Peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia juga semakin mengamankan Kepentingan Nasional Indonesia dalam peremajaan Alutsista (Utomo, 2017).

Baik Indonesia dan Korea Selatan menyadari pentingnya kemandirian Negara dalam membuat pesawat sendiri, kerja sama ini akan menguntungkan 2 pihak karena memiliki visi dan misi yang hampir sama. Pada masa sekarang sebuah Negara harus mempunyai peralatan tempur yang canggih untuk menjaga kedaulatannya, proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini diyakini sebagai solusi bagi tantangan masa depan kedua Negara (Afiff, 2016).

Integrasi pembangunan stabilitas keamanan bersama-sama dengan peningkatan pertumbuhan industri strategis dan stabilitas makroekonomi secara sinergis memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (SAPUTRO, 2021). Perencanaan anggaran pertahanan serta alokasi

belanja pertahanan yang tepat setiap tahunnya dapat menopang kekuatan pertahanan Indonesia, sehingga mampu menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Saputro, Rivai, et al., 2021)

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta (Moleong, 2007). Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan datanya yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan dengan teori (Moleong, 2012). Analisis data dalam artikel ini dilakukan melalui :

1. Reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilah data pokok, kemudian memfokuskan dan menyusun data secara sistematis.
2. Display data, yaitu menyajikan data tertentu dalam bentuk matriks, grafik, charts, atau network bila diperlukan.
3. Verifikasi data.

Model yang dikemukakan oleh George C. Edward III, III (1980: p. 9-10), ini sifatnya *Top down* dan cocok diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga pemerintahan, dimana setiap level hirarki mempunyai peran sesuai dengan fungsi dalam penjabaran kebijakan yang akan dilaksanakan dan memudahkan terhadap implementasi suatu kebijakan pada masing-masing level birokrasi mulai dari tingkat departemen (pemerintah pusat), sampai tingkat pelaksana lapangan. Model Edward III mengarahkan pemahaman tentang variable implementasi kebijakan dan hubungan antar variable dengan menetapkan peran masing-masing variable. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Sumber daya menjamin dukungan efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi (Edward III, 1980).

Disposisi menurut Edward dalam (Widodo, T. T., Alamsyah, N., & Utomo, 2018) menyatakan bahwa disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemauan untuk melakukan kebijakan, tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Edward III, 1980)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian tahapan proses kebijaksanaan, yang berada diantara penyusunan dan konsekuensi yang akan muncul oleh suatu kebijaksanaan tersebut merupakan definisi dari sebuah kebijakan (Edwards III, 1980). Pada sebuah kebijakan terdapat 4 aspek yang saling berhubungan dalam pelaksanaannya, yaitu aspek **komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi** (Wahyudi, 2016).

**Komunikasi** mempunyai peran yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang akan disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Komunikasi mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia (Lattal & Rutherford, 2013).

Komunikasi berlangsung sesuai kaidah komunikasi yang baik ditandai dengan Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding* (MoU)) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea ditandatangani pada 15 Juli 2010. MoU tersebut berisikan kesepakatan mengenai pengembangan bersama berikut dengan penelitian, produksi, dan pemasaran bersama antara Korea Selatan dan Indonesia untuk membangun pesawat tempur Korea (KFX) dengan kemampuan multi-role generasi ke 4,5. Adapun Korea Selatan akan menanggung 80% dan Indonesia 20% dari biaya keseluruhan (Armandha, S. T., Sumari, A. D. W., & Rahmadi, 2016)

Penandatanganan kontrak oleh pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan senilai US\$ 1.1 miliar untuk pembelian 3 unit kapal selam series DSME-209 telah dilaksanakan pada tahun 2011. Dilengkapi dengan Improved Changbogo, Kapal selam DSME-209 adalah salah satu varian kapal selam U-209 yang dilisensi oleh Korea Selatan dari Jerman. Dalam kontrak pembelian tersebut disebutkan bahwa 1 dari 3 unit terakhir kapal selam yang dibeli Indonesia diproduksi oleh Galangan Kapal Nasional, PT. PAL Surabaya. Apabila ditinjau dari segi fisik, Kapal DSME209/1400 tersebut pada dasarnya adalah penyempurnaan serta perkawinan desain antara kapal jenis 209/1300 Cakra milik Indonesia dengan kapal selam jenis 209/1200 Changbogo milik Korea Selatan (Jalo, 2015).

Kerjasama antara Indonesia – Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini memiliki beberapa tahap yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak. Tahap – tahap yang sudah disepakati oleh kedua Negara ada 3 tahap yaitu tahap TD (*Technical Development*), EMD (*Engineering and Manufacturing Development*) dan tahap PD (*Production Development*). 3 tahap tersebut sudah tercantum pada MOU antara Indonesia – Korea Selatan tentang pembangunan bersama pesawat

tempur KFX (Afiff, 2016)

**Sumber Daya Manusia** memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir sertadaya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. (Hasibuan, 2003).

Terkait dengan faktor sumber daya manusia, sumber daya manusia sendiri adalah faktor utama dari suksesnya suatu kegiatan perusahaan dalam peningkatan kemampuan penguasaan teknologi khususnya pada proses transfer of technology pembuatan dan pengembangan kapal selam yang dilaksanakan oleh PT. PAL Indonesia dari landasan kapal DSME Korea Selatan. Faktor usia merupakan kesenjangan utama pada sektor Sumber Daya Manusia di PT. PAL Indonesia dimana antar personel yang diganti terpaut selisih usia yang jauh. Selain itu, kesiapan jumlah SDM organik PT. PAL Indonesia sangat tidak memadai, hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat beban pekerjaan yang dihadapi (Sulistijono, 2017)

Sementara itu, menurut Boutin kemandirian industri pertahanan sebenarnya merupakan hal yang sulit dicapai, bahkan oleh negara maju sekalipun. Penyebaran bahan baku, teknologi, dan efisiensi produksi di beberapa negara membuat sebagian pelaku industri pertahanan saling mendukung. Kesulitan negara-negara berkembang untuk mencapai kemandirian industri pertahanan yang sepenuhnya bahkan lebih besar akibat keterbatasan sumber daya, termasuk keuangan, teknologi, dan infrastruktur (Bitzinger & Boutin, 2009).

SDM Indonesia yang dilibatkan Dalam Produksi KFX/IFX Sebagaimana yang tercantum pada PERPRES nomor 136 tahun 2014 tentang program pengembangan pesawat tempur I-FX pada pasal 7 pembangunan sumber daya nasional yang diantaranya terdapat tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Didalamnya menerangkan bahwa akan dilaksanakannya Indonesia nomor 136 tahun 2014 tentang pengembangan pesawat tempur KF-X/IF (Fitri, 2018). Peningkatan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan, dan Pemberian insentif atau tunjangan bagin peneliti dan perekayasa bidang kepakaran terkait program oengembangan pesawat tempur IF-X sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT.DI selaku mitra kerja sama Korea Selatan di Indonesia akan berperan besar dalam menyediakan Sumber Daya Manusia yang dilibatkan Dalam Produksi KFX/IFX (Afiff, 2016) Banyak insinyur asal Indonesia yang dilibatkan dalam proses produksi KFX-IFX, Para ilmuwan Indonesia itu akan berdatangan ke Korea Selatan secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Para Insinyur akan dirotasi selama kurun waktu 10 tahun dibagi menjadi 2 yang di Korea Selatan dan di Indonesia. Ilmuwan ilmuwan

Indonesia akan mendapat pelatihan untuk mempertajam kemampuan, termasuk dengan disekolahkan lagi di dalam dan luar negeri. Untuk di dalam negeri, Institut Teknologi Bandung digandeng. 25 orang kandidat S2 dan enam orang kandidat S3 di ITB. Sebagian ilmuwan lainnya disekolahkan ke Inggris. Negeri di barat laut benua Eropa itu dipilih karena karena masa kuliah di sana relatif singkat.

Dari sisi **sumber daya anggaran**, Satu upaya utama antara kedua negara adalah pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X yang baru. Walau proyek tersebut terus menjadi titik diskusi dalam hubungan pertahanan, namun prospek masa depan program tersebut masih belum jelas, di mana beberapa laporan yang muncul menunjukkan bahwa Indonesia kekurangan dana untuk program tersebut karena kendala anggaran, dan Korea Selatan menjadi khawatir bahwa program ini bisa berada dalam bahaya. Terkait dengan pernyataan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono Pada Juli 2020 sempat buka-bukaan mengenai nasib proyek ini ke depannya. Disampaikan bahwa benefit yang didapat Indonesia dalam proyek ini tak terlalu signifikan. Keterbatasan anggaran merupakan factor yang harus diperhitungkan.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kapal selam, khususnya terkait dengan kemampuan PT. PAL Indonesia yang masih terbatas dalam pembuatan kapal selam DSME 209/1400. Keterbatasan tersebut dikarenakan: (1). Indonesia belum memiliki kemampuan dalam bidang rancang bangun kapal selam, serta masih kurang optimalnya fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT PAL Indonesiasendiri dalam kegiatan pemeliharaan, perbaikan, maupun pembuatan kapal selam; (2). Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT. PAL Indonesia masih terbatas dan minim pengalaman dalam merancang kapal selam, begitu juga dalam kelemahan dalam menguasai teknologi terbaru (Susdarwono et al., 2020)

Saat ini Indonesia masih mendatangkan sejumlah kapal perang untuk memenuhi kebutuhan TNI-AL yang merupakan kapal perang bekas negara lain yang tentunya sudah tertinggal dari segi teknologi maupun penurunan kemampuan tempurnya. Ini tidak dapat dilepaskan dari **keterbatasan anggaran** sehingga Indonesia hanya mampu membeli kapal perang bekas dari negara lain untuk sekedar memenuhi kuantitas tanpa menghiraukan kualitas dari kapal perang tersebut. Namun, keberadaan PT. PAL membuat anggaran yang dikeluarkan akan jauh lebih rendah, dengan harapan tersedianya teknologi persenjataan dan kemampuan tempur yang tinggi dalam pengadaan alutsista bagi TNI-AL (Susdarwono et al., 2020).

Agenda transfer teknologi yang telah disepakati, memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Diantaranya Indonesia dapat menghemat anggaran negara untuk melakukan riset tentang

teknologi yang diinginkan. Juga dari teknologi yang didapat melalui transfer teknologi Indonesia dapat mengembangkan teknologi yang sudah didapatnya. 3. Bahwa transfer teknologi merupakan salah satu cara atau sarana pendukung yang efektif dan efisien, dan merupakan salah satu cara atau sarana pendukung yang efektif dan efisien sebagai sebuah pelepas dahaga teknologi di era yang serba canggih. Bagi Indonesia sebagai negara maritim, keberadaan kapal selam menjadi elemen penting dalam pengamanan wilayah laut. Sayangnya, pengadaan kapal selam seringkali terganjal oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Dengan produksi secara mandiri dikemudian hari, kebutuhan akan kapal selam maupun kapal perang dimasa yang akan datang diharapkan dapat dengan mudah dipenuhi tanpa terlalu membebani anggaran negara.

#### **Jika dilihat dari Sarana dan Prasarana.**

Produsen kapal selam Korea Selatan berkenan datang ke Indonesia dan membimbing PT PAL Indonesia untuk memproduksi kapal selam sendiri. Kapal selam dari Korea Selatan juga memiliki kualitas dan kecanggihan yang sama dengan kapal selam sejenisnya. Memiliki berat 1.600ton, kapal selam produksi Korea Selatan juga dilengkapi dengan torpedo. Dalam hal ini, kecanggihan diesel elektrifik kapal selam produksi Korea Selatan relatif sama dengan kapal selam yang lain yaitu harus senyap dalam kurun waktu yang lama, dan dilengkapi dengan persenjataan yang memenuhi standar (Julaikah, 2014).

Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan mengedepankan skema alih teknologi untuk mendukung kemandirian dan kemajuan industri serupa di dalam negeri yang dipimpin pengembangannya oleh PT. PAL Indonesia. Adanya kendala dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kapal selam tersebut, khususnya terkait dengan kemampuan PT. PAL Indonesia yang masih terbatas dalam pembuatan kapal selam DSME 209/1400. Keterbatasan tersebut dikarenakan Indonesia belum memiliki kemampuan dalam bidang rancang bangun kapal selam, serta masih kurang optimalnya fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT PAL Indonesia sendiri dalam kegiatan pemeliharaan, perbaikan, maupun pembuatan kapal selam (Al-Fadhat & Effendi, 2019).

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kapal selam tersebut, khususnya terkait dengan kemampuan PT. PAL Indonesia yang masih terbatas dalam pembuatan kapal selam DSME 209/1400. Keterbatasan tersebut dikarenakan Indonesia belum memiliki kemampuan dalam bidang rancang bangun kapal selam, serta masih kurang optimalnya fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT PAL Indonesia sendiri dalam kegiatan pemeliharaan, perbaikan, maupun pembuatan kapal selam.

Dilihat dari **Struktur Birokrasi**. Untuk mengetahui secara sistematis proses dari

terbentuknya persepsi ancaman hingga dilakukannya proses pengadaan/akuisisi, Kaldor menyampaikan menggunakan prinsip permintaan-penawaran yang ada dalam ilmu ekonomi dan ilmu politik, dalam akuisisi pertahanan terdapat unsur permintaan (demand) dan penawaran (supply). Agar akuisisi pertahanan terjadi, kedua unsur/aspect tersebut harus bertemu. Bertemuinya kedua unsur tersebut dapat terjadi apabila terdapat mekanisme mandat (proxy mechanism) yang dapat berupa perang ataupun peran sistemik di kancah internasional (Kaldor, 1986). Sebagai contoh dalam kondisi perang, akuisisi pertahanan otomatis akan dilakukan karena memang kebutuhan untuk menyerang musuh.

Data yang diperoleh bahwa dalam kasus proyek KFX/IFX, tarik ulur yang terjadi antara pemerintah Korea Selatan dan Indonesia, terlihat dari masalah seputar transfer teknologi, pembiayaan, dan spesifikasi. Setidaknya telah terjadi beberapa penundaan. bahwa dalam perkembangannya akuisisi pertahanan tidak dapat dilepaskan dari relasi ekonomi politik. Relasi tersebut tercipta ketika industri pertahanan sebagai salah satu instrumen pertahanan negara, terlibat dalam relasi antara pemerintah dan parlemen, yang bertambah kompleks seiring dengan semakin pesatnya kerja sama internasional dalam hal pengembangan persenjataan.

James Buchanan berpandangan bahwa negara dengan dinamika politik di dalamnya merupakan sumber dari inefisiensi Politik dianggap sebagai salah satu faktor kegagalan dalam menciptakan efisiensi (*the science of political failure*). Hal ini justru semakin menunjukkan bahwa faktor politik tidak dapat dikesampingkan meskipun faktor biaya merupakan faktor utama bagi suatu negara untuk mengadakan kerja sama dengan negara lain, khususnya dalam akuisisi persenjataan yang sangat mahal harganya jika dibandingkan dengan produk-produk lain (Hartley & Braddon, 2014).

Dari sisi **Disposisi**. Setiap implementasi kebijakan yang diinstruksikan atasan melalui perintah yang komunikatif, persuasif dan perilaku administrator yang sigap maka implementasi kebijakan atau program akan berjalan baik. mekanisme bertemunya permintaan dan penawaran bersandar pada pemahaman ketiganya mengenai tata dunia (*world order*). Dari pemahaman tata dunia tersebut, terdapat turunan lain persepsi mengenai keamanan internasional yang menurunkan persepsi ancaman. Bertemuinya permintaan dan penawaran membutuhkan apa yang disebut Kaldor sebagai mekanisme mandat (Kaldor, 1986).

Dalam konteks penelitian dan pengembangan yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh DAPA, dilakukan proses yang disebut *Request for Proposal (RFP)* untuk mencari perusahaan mana yang tertarik untuk menjadi kontraktor. Kolonel Lee Jong-hee, Direktur Pengembangan DAPA pada Juli 2010 menjelaskan bahwa banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek KFX/IFX. Hal tersebut

ternyata juga terkait dengan program F-XIII Korea Selatan. Program F-XIII berisi rencana akuisisi besar-besaran untuk memperbarui skuadron pesawat tempur Korea Selatan ke tingkat generasi yang lebih mutakhir. Perusahaan-perusahaan yang tertarik di antaranya *Boeing dan Lockheed Martin* dari Amerika Serikat, EADS dari Uni Eropa, dan Saab dari Swedia. Korea Selatan juga sempat menawarkan RFP pada Turki, namun Turki menolak dan akhirnya diberikan kepada Lockheed Martin yang digandeng oleh KAI sebagai rekanan kontraktor.

Demi mencapai kemandirian dalam bidang pertahanan Indonesia memilih untuk bekerja sama dengan Korea Selatan untuk pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Hal ini disebabkan karena dalam kesepakatan perjanjian di tekankan bahwa Korea Selatan tidak menolak untuk melakukan transfer teknologinya kepada Indonesia, yang mana membuat Indonesia akan semakin diuntungkan dalam kerja sama ini. Transfer teknologi yang terjadi awalnya dengan melibatkan para ilmuwan dan insinyur Indonesia dalam proses pengerjaan prototype pesawat tempur KFX/IFX. Pemerintah Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia dikabarkan telah mempersiapkan sekitar 200 sampai 300 orang tenaga ahli untuk dilibatkan dalam mega proyek militer Indonesia ini. Jumlah tenaga ahli yang banyak ini akan datang ke Korea Selatan secara bertahap selama 10 tahun kedepan.

**Perlu adanya strategi** pemerintah dalam menjalankan fungsinya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah. Apabila melihat perkembangan lingkungan strategis saat ini, Bangsa Indonesia hendaknya memperbaharui kekuatan militer baik dari persenjataan militer maupun alusista militer untuk mengantisipasi ancaman yang kemungkinan akan muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Jika dilihat dari terbatasnya pengadaan persenjataan dan alusista militer disebabkan adanya broker – broker yang muncul antara hubungan dua negara dalam pengadaan barang tersebut. hal tersebut dapat dilihat dari adanya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea selatan dalam pengadaan kapal selam yang mana hal tersebut tidak lepas dari adanya broker di Indonesia dimana kualitas alusista dari Korea Selatan secara kualitas masih kurang memadai dari kapal selam Rusia yang menyebabkan kerugian bagi pihak pemerintah Indonesia.

Pertama, Indonesia dengan Korea Selatan dalam melakukan kerjasama khususnya pengembangan kapal selam sebagai proyek alusista DSME-209/1400 (*Changbogo Class*), hal tersebut merupakan kebijakan untuk memperkuat visi pengadaan kapal selam Indonesia pada tahun 2024, dan tentunya dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) terkait pembuatan kapal selam. Kerjasama yang dilakukan lebih dari sekedar pembelian alusista saja, hal ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Indonesia dalam

mewujudkan kemandirian maritim di masa yang akan datang.

Kedua, Indonesia dan Korea Selatan dalam melakukan kerjasama mengedepankan skema alih teknologi dalam rangka mendukung kemandirian dan kemajuan industri serupa di dalam negeri yang dipimpin pengembangannya oleh PT. PAL Indonesia. Terdapat beberapakendala dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kerjasama kapal selam, khususnya melihat kemampuan PT. PAL Indonesia yang terbatas dalam pembuatan kapal selam DSME 209/1400. Keterbatasan kemampuan tersebut dikarenakan Indonesia belum memiliki kemampuan dalam bidang rancang bangun kapal selam dan masih kurang optimalnya fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT PAL dalam kegiatan pemeliharaan, perbaikan, serta pembuatan kapal selam. Jika melihat Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT. PAL masih terbatas dan minim pengalaman dalam merancang kapal selam, begitu juga dalam kelemahan dalam menguasai teknologi terbaru.

Dengan demikian perlunya Kementerian BUMN yang membawahi BUM, sebagai bahan pelaksanaan dan pengadaan infrastruktur yang akan melaksanakan proses *transfer of technology*, saharunya melakukan inventarisir perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak pada sektor industri pertahanan. Upaya tersebut dalam rangka mengantisipasi terhambatnya proses revitalisasi industri pertahanan yang belum siap untuk melaksanakan *transfer of technology* seperti yang tercermin dari PT. PAL Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

**Dari segi Komunikasi.** Secara umum komunikasi tidak ada kendala, hubungan kedua negara sudah terjalin selama sejak 40 tahun lalu kemudian pada 2006 ditingkatkan dengan kerjasama mitra strategis salah satunya di bidang pertahanan. Kerjasama ini tercipta, karena kedua negara menaruh rasa saling kepercayaan. Kontrak CSA mengatur kesepakatan dan ketentuan mengenai dana berbagi yaitu pendanaan sebagai kewajiban yang akan diserahkan Kemenhan kepada KAI berdasarkan project *Agreement On Engineering And Manufacturing Development Of Joind Development KF-X/IF-X* yang sudah ditandatangani Dirjen Potensi Pertahanan dan Kementerian. Sementara kontrak WAA mencakup partisipasi industri pertahanan Indonesia dalam kegiatan rancang bangun pembuatan komponen, prototipe, pengujian dan sertifikasi serta pengaturan aspek bisnis maupun legal. Selain itu diatur pula peran yang akan diambil PT DI meliputi semua hak dan kewajibannya karena WAA merupakan dokumen *bussiness to bussines*.

**Dari segi Sumber daya.** Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan industri pertahanan dipusatkan pada pengembangan kapal selam kelas *changbogo* dan pengembangan pesawat tempur KFX/

IFX. Kesulitan negara-negara berkembang seperti Indonesia bahwa untuk mencapai kemandirian industri pertahanan yang sepenuhnya bahkan lebih besar akibat keterbatasan sumber daya, termasuk keuangan, teknologi, dan infrastruktur.

**Dari Segi Disposisi.** Kerja sama bidang industri pertahanan merupakan tingkat yang paling tinggi di bidang kerja sama pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya memiliki hubungan yang sangat erat, tetapi juga Indonesia merupakan partner terbaik bagi Korea Selatan. Indonesia merupakan negara yang paling aktif melakukan kerja sama industri pertahanan dengan Korsel serta satu-satunya negara dimana ditugaskannya Atase Industri Pertahanan dari DAPA Korsel. Melalui prinsip kerjasamayang saling percaya dan menguntungkan, Indonesia dan Korsel telah menjalin berbagai program kerja sama seperti pembangunan Kapal Selam, Pesawat T50 dan Pesawat Tempur KFX/IFX dan kerja sama lainnya di bidang industri pertahanan. Indonesia selalu memandang Korea Selatan sebagai model, contoh keberhasilan dalam memajukan industri pertahanan dan juga dalam teknologi peralatan militer. Melalui Korsel, Indonesia juga telah memahami dan mendapatkan pelajaran bahwa untuk mencapai penguasaan teknologi yang canggih diperlukan usaha dan perjuangan yang lebih keras lagi.

**Dari Struktur Birokrasi.** Sebagaimana yang tercantum pada PERPRES nomor 136 tahun 2014 tentang program pengembangan pesawat tempur I-FX pada pasal 7 pembangunan sumber daya nasional yang diantaranya terdapat tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Didalamnya menerangkan bahwa akan dilaksanakannya Rekrutmen tenaga ahli. Peningkatan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan, dan Pemberian insentif atau tunjangan bagi peneliti dan perekayasa bidang kepakaran terkait program pengembangan pesawat tempur IF-X sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ekonomi Pertahanan.** Salah satu isu utama dalam ekonomi pertahanan adalah anggaran untuk belanja militer (*military expenditure/ milex*). Komponen milex merentang dari belanja pegawai hingga perawatan dan pengadaan alutsista. Isu lain dalam ekonomi pertahanan adalah manajemen pengadaan alutsista atau *weapons acquisition*. Faktor tersebut mempengaruhi manajemen pengadaan alutsista, yang dalam perkembangannya akan mewarnai proses pengadaan karena sifatnya yang mendasar bagi konteks manajemen alutsista, adalah ekonomi, politik, dan doktrin. Faktor ekonomi berkaitan dengan anggaran yang tersedia dan rencana makro pertahanan negara. Secara garis besar, ada dua strategi yang bisa dilakukan negara dalam melakukan pengadaan alutsista, yaitu produksi dalam negeri dan impor. Namun, pada dasarnya tidak ada resep manjur sekali tenggak bagi keperluan alutsista negara. Dalam banyak kasus, negara-negara di dunia –terlepas dari

status negara maju, berkembang, dan terbelakang-mengombinasikan dua strategi di atas. Hal ini tidak terlepas dari konteks globalisasi yang tengah melanda dunia dan perhitungan untung-rugi yang sifatnya politis dan teknis.

## 5. DAFTAR PUSTAKA.

- Affif, G. I. (2016). Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Militer Dengan Korea Selatan Dalam Pengembangan Pesawat Tempur Kfx/Ifx. *JOM FISIP*, 3(2).
- Al-Fadhat, F., & Effendi, N. N. A. (2019). Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: Kedaulatan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3). <https://doi.org/10.22146/jkn.48822>
- Armandha, S. T., Sumari, A. D. W., & Rahmadi, H. B. (2016). Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia dalam Joint Development Pesawat Tempur KFX/IFX. *Global Strategis*, 10(1), 75–94.
- Bitzinger, R., & Boutin, J. D. K. (2009). China's defence industries: change and continuity. In *Rising China: Power and Reassurance*. <https://doi.org/10.22459/rc.03.2009.10>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy Washin.* Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fitri, A. (2018). Keberlanjutan program pesawat tempur kfx/ifx dalam industri pertahanan Indonesia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Pemerintahan Dalam Negeri /II/Puslit/Juli/2018*, X(14). [berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info..](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info..)
- Hartley, K., & Braddon, D. (2014). Collaborative projects and the number of partner nations. *Defence and Peace Economics*, 25(6). <https://doi.org/10.1080/10242694.2014.886434>
- Hasibuan, M. (2003). Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Indrawan, J. (2018). PERUBAHAN PARADIGMA PERTAHANAN INDONESIA DARI PERTAHANAN TERITORIAL MENJADI PERTAHANAN MARITIM: SEBUAH USULAN. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.359>
- Jalo. (2015). Siluman Penjaga Nusantara. <https://Jakartagreater.Com/Changbogo-Silumanpenjaga-Nusantara>.
- Julaikah, N. (2014). Ini alasan pemerintah beli kapal selam dari Korea Selatan. <https://Www.Merdeka.Com/Uang/Ini-Alasan-Pemerintah-Beli-KapalSelam-Dari-Korea-Selatan>.
- Kaldor, M. (1986). The weapons succession process.

- World Politics*, 38(4), 577–595.
- Lattal, K. A., & Rutherford, A. (2013). John B. Watson's behaviorist manifesto at 100. *Revista Mexicana de Analisis de La Conducta*, 39(2).  
<https://doi.org/10.5514/rmac.v39.i2.63915>
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Saputro, G. E., Mahroza, J., & Tarigan, H. (2020). The Impact Of The Military Expenditure And Security Expenditure Structure On The Security Stability. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(3), 328–341.
- Saputro, G. E., Tarigan, H., & Rajab, D. D. A. (2021). the Role of Defense Economic in Economic Growth. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 7(2), 330.  
<https://doi.org/10.33172/jp.v7i2.1239>
- Saputro, G. E. (2021). Implementation of Economic Policy Facing the China American Trade War in the Framework of Nirmilitary Defense. *International Journal of Social Science And Human Research*.
- Sulistijono, R. K. (2017). Kemandirian PT. PAL Indonesia (Persero) sebagai Industri Strategis Pertahanan Nasional dalam Pembuatan Kapal Selam Diesel Elektrik Klas 209. *Strategi Perang Semesta*, 3(1).
- SAPUTRO, G. E. (2021). Pengaruh Stabilitas Makro Ekonomi, Stabilitas Keamanan Dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Oleh :. *Jurnal Ekonomi*, Volume 23 Nomor 1, UNIVERSITAS BOROBUDUR.
- Susdarwono, E. T., Setiawan, A., & Husna, Y. N. (2020). KEBIJAKAN NEGARA TERKAIT PERKEMBANGAN DAN REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DARI MASA KE MASA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 3(1).  
<https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2224>
- Saputro, G. E., & Meirinaldi. (2019). Analisis Pengaruh Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Makroekonomi. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 237–238.  
<https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/603>
- Saputro, G. E., Rivai, A. M., & Meirinaldi. (2021). Pengaruh Anggaran Pertahanan, Impor Alutsista, Ekspor Alutsista, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1980-2019. *Jurnal Ekonomi*, 23(2), 103.  
<https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/801>
- Utomo, A. B. A. (2017). *Kontribusi transfer teknologi militer dari Korea Selatan kepada Indonesia melalui penandatanganan The Joint Declaration on Strategic Partnership*. repository.unpar.ac.id
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 99–103.
- Widodo, T. T., Alamsyah, N., & Utomo, C. B. (2018). Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT Telkom Indonesia Cabang Batam. *Jurnal Industri Kreatif (JIK)*, 2(1), 97–104.
- Yusgiantoro, P. (2014). *Ekonomi pertahanan*. In *Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama*.

## PENGAJARAN BAHASA YANG BERKARAKTER KEBANGSAAN DAN BERSPEKTIF MULTIKULTUR DI ERA GLOBALISASI

Oleh :

Ida Bagus Rai <sup>1)</sup>, Ni Made Suarningsih <sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwiandra

<sup>1</sup>ib.raii.undwi@gmail.com

<sup>2</sup>nimadesuarningsih60@gmail.com

### Abstrak

Pendidikan multikultural sebagai strategi memanfaatkan berbagai budaya masyarakat siswa yang berbeda-beda merupakan keunikan atau ciri khas siswa untuk membentuk sikap multikultural yang saling pengertian dan saling menghormati sehingga tercipta sektor pendidikan yang toleran. Integrasi kajian Pendidikan Bahasa dalam pendidikan multikultural dapat berkontribusi mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam perkembangan globalisasi dan menjunjung tinggi falsafah dasar menyatakan bahwa keragaman, menjadikan pendidikan semakin meningkat mutunya dan lebih maju. Dalam masyarakat multibudaya, keberbedaan itu dapat menimbulkan pertikaian atau perpecahan. Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk memperkuat rasa kebangsaan. Salah satunya adalah dengan pengajaran bahasa yang berkarakter kebangsaan. Karakter kebangsaan yang tinggi dapat secara dinamis digunakan untuk mengatasi ancaman, kendala, atau tantangan yang datang dari luar yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa. Pendidikan dapat dijadikan alat yang mampu menuntun peserta didik menjadi manusia yang berperilaku dan berakhlak baik sekaligus memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Pengajaran bahasa dapat dijadikan motor untuk mengimplementasikan pendidikan yang berperspektif multibudaya, yaitu pendidikan yang memiliki visi dan misi untuk menghargai keberbedaan atau pluralitas, demokrasi, humanisme, dan mengembangkan karakter kebangsaan. Pengajaran bahasa perlu direvitalisasi agar mampu membuat siswa menjadi insan yang menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, keadilan, kesetaraan, kepedulian sosial, integritas, tanggung jawab, serta cinta kepada tanah air dalam perilakunya sehari-hari.

Keyword : Pengajaran Bahasa Berkarakter, Pendidikan Multikultural, Globalisasi

### 1. PENDAHULUAN

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi antara individu dengan lingkungan. Mengajarkan berarti suatu usaha menciptakan sistem lingkungan yang terdiri atas komponen pendidik, tujuan pengajaran, peserta didik, materi pembelajaran, metode pengajaran, media pengajaran, dan faktor pendukung lainnya. Guru sebagai salah satu sumber ilmu dituntut kemampuannya untuk mentransfer ilmunya kepada peserta didik dengan menggunakan berbagai ilmu ataupun metode serta alat yang dapat membantu tercapainya suatu kegiatan pembelajaran, yang dalam hal ini adalah adanya penggunaan strategi yang beraneka ragam, cocok tepatnya dengan peserta didik (Santika, 2021a). Adanya strategi pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan (Lede & Swarniti, 2020).

Pembelajaran bahasa bertujuan membina para siswa agar terampil berkomunikasi secara lisan dan tulis melalui pemahaman dan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari (Santika & Sudiana, 2021). Kerangka berpikir yang dikembangkan dalam pembelajaran bahasa adalah berkomunikasi baik melalui pengembangan kemampuan berbahasa reseptif dan ekspresif (Swarniti, 2021). Kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif meliputi kemampuan

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keempat kemampuan tersebut dilandasi oleh kemampuan berpikir. Kemampuan-kemampuan tersebut saling menunjang dan tidak terpisahkan (Swarniti, 2021). Dalam pembelajaran di kelas, kemampuan berbahasa tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan. Namun untuk kepentingan pembinaan kemampuan berbahasa siswa, masing-masing kemampuan berbahasa dapat dipilah sesuai dengan fokus pembelajaran (Swarniti, 2020).

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran akan tetapi juga harus berupaya agar materi pelajaran yang diberikan dapat benar-benar dipahami dan dimengerti oleh siswa (Santika, 2017). Hal ini penting agar nilai-nilai yang terkandung dalam materi tersebut dapat membawa siswa untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat (Berta & Swarniti, 2020). Dengan hal ini maka proses pembelajaran dapat lebih bermakna. Adanya keragaman budaya ini akan berpengaruh pada tingkah laku, sikap, pola pikir manusia sehingga manusia tersebut memiliki cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), aturan (*mores*), dan adat-istiadat (*custom*) yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adanya pendidikan multikultur ini diharapkan mampu menghasilkan kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial (Santika, Sujana, et al., 2019). Hal ini karena secara teknis dan

teknologi, masyarakat Indonesia telah mampu untuk tinggal bersama di tengah kemajemukannya. Akan tetapi masih menjadi suatu beberapa permasalahan ketika perbedaan itu menyangkut suatu spiritualnya yang relatif dalam perbedaan agama, etnisitas, dan kelas sosial.

Pada saat ini, globalisasi sudah melanda dunia, termasuk Indonesia. Implikasi yang ditimbulkannya semakin dirasakan dalam setiap sisi kehidupan (Swarniti, 2019). Semua aktivitas yang semula terbatas pada skala nasional, kini mulai bergeser pada skala internasional yang jangkauannya tidak terbatas. Globalisasi budaya melalui media televisi dan internet telah memengaruhi gaya hidup dan budaya bangsa kita. Globalisasi yang menggunakan berbagai media informasi canggih, khususnya melalui proses digitalisasi, telah menyebabkan berbagai pesan, kreasi, peristiwa, tayangan, atau pikiran merebak dengan cepat dan memengaruhi konstruksi berpikir masyarakat Indonesia. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia akan diinternasionalisasi, termasuk masyarakat pedesaan (Santika et al., 2018). Sangat disayangkan, proses globalisasi berjalan sepihak saja. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan global yang sudah sedemikian kompleks dan berkembang dengan cepat, diperlukan ide-ide segar yang dapat dikembangkan dalam konteks kultural Indonesia. Dengan demikian, budaya Indonesia dan karakter kebangsaan dapat dipertahankan. Jadi, diperlukan suatu upaya untuk memperkuat rasa kebangsaan (Santika, 2021b). Salah satunya adalah dengan pengajaran bahasa yang berkarakter kebangsaan. Karakter kebangsaan yang tinggi dapat secara dinamis digunakan untuk mengatasi ancaman, kendala, atau tantangan yang datang dari luar yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa.

Untuk mewujudkan insan yang berkarakter kebangsaan dalam masyarakat multibudaya, diperlukan revitalisasi pendidikan yang diarahkan kepada perspektif multibudaya. Pendidikan dapat dijadikan alat yang mampu menuntun peserta didik menjadi manusia yang berperilaku dan berakhlak baik sekaligus memiliki karakter kebangsaan yang kuat (Santika, 2020b). Pengajaran bahasa dapat dijadikan motor untuk mengimplementasikan pendidikan yang berperspektif multibudaya, yaitu pendidikan yang memiliki visi dan misi untuk menghargai keberbedaan atau pluralitas, demokrasi, humanisme, dan mengembangkan karakter kebangsaan. Pengajaran bahasa perlu direvitalisasi agar mampu membuat siswa menjadi insan yang menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, keadilan, kesetaraan, kepedulian sosial, integritas, tanggung jawab, serta cinta kepada tanah air dalam perilakunya sehari-hari (Santika, I. G. N. et al., 2019). Guru pun dianggap memiliki *power* untuk mengubah dan merevitalisasi pengajaran bahasa yang konvensional menjadi pengajaran bahasa yang berkarakter

kebangsaan dan berperspektif multibudaya (Swarniti, 2021).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moeleong, 2014:4). Sumber datanya adalah dikumpulkan secara langsung dan tidak langsung dari pihak lain. Informan dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode purposive sampling dengan tambahan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen/ dokumentasi.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang termasuk pada kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dengan mengamati/observasi secara mendalam untuk menemukan jawaban sementara sebelum penelitian ditindaklanjuti. Penelitian ini bersumberkan pada kepustakaan dengan sumber jurnal atau buku referensi. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu jurnal yang berkaitan dengan pengajaran bahasa, pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa, dan kajian pendidikan multikultural dan beberapa literasi penguat yang berkaitan dengan konsepsi dari globalisasi. Metode analisis yang digunakan melalui tahapan reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan atau penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Guru

Peran guru dalam kegiatan belajar-mengajar bukanlah sekadar menjalankan proses tersebut secara mekanis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi guru merupakan orang yang harus melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, kinerja guru tidak bergantung pada tugas itu sendiri, tetapi bergantung pada sikap, cara berpikir, dan cara pandang guru terhadap tugas yang diembannya. Jadi, cara berpikir manusia selalu bergantung pada presuposisi tertentu yang tidak dapat ditangkap oleh rasio, melainkan oleh kepercayaan. Bertitik tolak dari pernyataan tersebut, seorang guru harus memiliki pandangan terhadap lingkungan dan keilmuannya yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran.

Guru berperan sebagai pendidik, sedangkan peserta didik berperan sebagai subjek didik. Keduanya merupakan insan yang kedudukannya sejajar dan berada dalam suatu interaksi, tetapi memiliki peran yang berbeda. Guru harus berperan sebagai penolong yang senantiasa berusaha memberi bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya dan membangun karakter secara utuh. Guru berdiri di antara peserta didik dan membagikan

ilmunya secara total. Guru yang diperlengkapi dengan wawasan keilmuan dan pengalamannya harus dapat mengantarkan peserta didik ke arah pengembangan potensi, kepribadian, dan karakter yang lebih baik.

### **Pendidikan Multikultural**

Pendidikan multikultural dikatakan sebagai strategi guna memanfaatkan berbagai kebudayaan dengan latar belakang yang berbeda dari siswa merupakan keunikan atau menjadi ciri khas siswa untuk membentuk sikap yang multikultural (Santika, 2018). Pendidikan multikultural salah satu gejala baru yang mengharap adanya persamaan hak, termasuk hak dalam mendapatkan pendidikan yang sama bagi setiap manusia, hal ini tentunya berjalan dengan proses demokrasi dari hak asasi manusia yang tujuannya tidak membedakan manusia meskipun dengan latar belakang yang berbeda (Santika, 2021c).

Tujuan pendidikan Multikultural salah satunya adalah upaya untuk menanamkan perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai suatu kondisi yang alamiah, dapat menumbuhkan sifat sadar tentang keanekaragaman, tentang kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, menanamkan nilai-nilai demokrasi yang saat ini sangat diperlukan berkaitan dengan beragam permasalahan sosial (Santika & Suastika, 2022). Selain itu untuk menumbuhkan paradigma baru di masa mendatang yang mengakui perbedaan dan meningkatkan rasa nasionalisme demi negara kesatuan republik Indonesia. Berbagai hal tersebut telah diterapkan dalam dunia pembelajaran Bahasa, dari tingkat sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Hasil lainnya adalah sebagai contoh yang dapat dilihat saat ini, banyak organisasi tentang kemanusiaan yang pada dasar tujuannya untuk membantu sesama baik dibidang pengabdian kependidikan maupun misi kemanusiaan pada bidang kesehatan.

Gagasan pendidikan multikultural bertujuan untuk merespon hal yang ditimbulkan adanya arus globalisasi yang semakin berkembang saat ini, berbagai permasalahan konflik budaya, konflik agama, konflik sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, sebagian besar konflik tersebut sering terjadi karena adanya perbedaan latar belakang budaya, agama, etnis, ras dan sebagainya. Perkembangan waktu di masa yang akan datang seharusnya dalam dunia pendidikan saat ini sudah mulai dikembangkan pendidikan yang dapat menempatkan pendidikan sendiri tidak hanya sebagai media transformasi. Maka pendidikan multikultural yang dijalankan di Indonesia harus sesuai dengan perkembangan demokrasi yang ada saat ini seiring adanya kebijakan desentralisasi otonomi daerah (Santika, Purnawijaya, et al., 2019). Pendidikan multikultural yang dibentuk mulai dari kurikulum, materi ajar, sampai metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan

beda halnya dengan perguruan tinggi dan tetap mengacu pada peraturan undang-undang Pemerintah (Santika, 2019).

Jati diri bangsa atau identitas bangsa bisa meluntur karena derasnya arus globalisasi (Santika, 2020c). Globalisasi telah membawa dampak negatif terhadap keutuhan dan ketahanan bangsa. Bangsa ini sudah mulai berpaling dan berkeblat kepada budaya luar. Bagaimana kelokalan kita dapat dipertahankan dan tetap eksis jika kita sendiri tidak menerapkan dan menjwai nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk memperkuat nilai-nilai budaya lokal. Perekukuan budaya lokal sangat diperlukan untuk mengatasi ancaman, kendala, atau tantangan yang datang dari luar yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan eksistensi produk budaya lokal (Santika, 2020a). Upaya untuk mempertahankan dan memperkuat jati diri bangsa, salah satunya ialah melalui pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa semestinya mengandung nilai-nilai budaya lokal. Warna lokal tentu saja mencerminkan ke-Indonesiaan. Pengajaran bahasa dituntut banyak mencerminkan suasana dan lokasi, falsafah, etnis, kekhasan, keunikan, atmosfer, keindahan, serta keberagaman Nusantara. Pengajaran bahasa harus mampu mengungkapkan kekayaan berbagai etnis dan menonjolkan khazanah kedaerahan yang tentu saja merupakan warna lokal yang termasuk identitas bangsa Indonesia (Santika et al., 2021).

### **Pengajaran Bahasa dengan Karakter Kebangsaan dan Multikultur**

Berikut ini akan dipaparkan pengajaran bahasa yang berkarakter kebangsaan dan berprespektif multibudaya.

1. Pemberian materi ajar kebahasaan yang dapat menghubungkan guru, peserta didik, dan lingkungan, misalnya peserta didik harus membuat laporan hasil wawancara terhadap guru, teman, dan masyarakat sekitar sekolah tentang "semangat kebersamaan".
2. Pemberian tugas penganalisisan dan pengapresiasian karya pengajaran bahasa yang mengandung keberagaman budaya.
3. Dalam pembelajaran bahasa di kelas, harus terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi ialah hal saling melakukan aksi, ada hubungan timbal balik, ada komunikasi dua arah. Interaksi tentu saja bersifat dinamis, tidak statis. Dalam pembelajaran bahasa, interaksi secara verbal memang paling menonjol dan dominan.
4. Perlu adanya perancangan tugas-tugas yang memberdayakan karakter kebangsaan kepada peserta didik. Misalnya, memberikan tugas kelompok berupa laporan analisis hasil wawancara kepada pedagang kecil yang berjualan di dekat kampus. Selain peserta didik menerapkan teori teknik wawancara dan tata tulis laporan, mereka pun disentuh untuk mewujudkan *care* atau kepedulian kepada wong cilik. Di samping

itu, pemberian tugas berupa diskusi kelompok dengan *cararole play*, memaksa peserta didik untuk memberdayakan *karakter kebangsaan* mereka. Dengan *role play*, mereka dapat berkreasi dalam memainkan watak, bersinergi dengan yang lain, melatih penghayatan peran, melatih daya kepekaan, dan melatih untuk mengaktualisasikan diri. *Role play* dalam pembelajaran bahasa, misalnya, memainkan peran sebagai mahasiswa perantauan yang berkuliah di kota besar yang diperolok-olokkan oleh teman-temannya karena menggunakan bahasa Indonesia yang berdialek daerah dan diinterferensi oleh percampuran bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Selain tercapainya materi ajar yaitu interferensi bahasa, juga kegiatan *role play* dapat menumbuhkan nilai moral yaitu menghargai sesama, kemajemukan, dan setiap pribadi memiliki keunikan. Pemberian tugas dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, misalnya membuat *power point* yang kreatif, inovatif, dan penuh dengan visualisasi dan animasi ketika peserta didik mempresentasi tugas mereka.

5. Dengan pendekatan *karakter kebangsaan*, kita dapat mendesain aturan di kelas. Misalnya, aturan tidak boleh mencontek, aturan tidak boleh terlambat, aturan berpakaian rapi, aturan memakai sepatu, aturan tidak mengaktifkan *handphone*, tidak makan atau minum di kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan aturan lain yang dapat memberdayakan keterampilan *karakter kebangsaan*.
6. Peserta didik pun dapat mengembangkan diri melalui kegiatan teater, unit kesenian kampus, olah raga, kelompok belajar, dan kelompok penelitian untuk meningkatkan *karakter kebangsaan*.
7. Untuk mendukung pembelajaran bahasa dengan pendekatan *karakter kebangsaan dan pemahaman multibudaya*, diadakan kegiatan-kegiatan seperti debat antarjurusan, presentasi hasil temuan penelitian oleh peserta didik di muka umum, lomba baca puisi dengan musikalisasi, penggunaan teknologi komputer dalam pembuatan poster tentang jargon/ ungkapan politik yang membangun dan mendidik bangsa, dan sebagainya.
8. Para mahasiswa dilatih menjadi *volunteer/sukarelawan* untuk membantu adiknya belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, belajar menulis, dan belajar membaca. Kepekaan peserta didik untuk berempati, merasakan kondisi yang memprihatinkan, menyaksikan secara langsung penderitaan hidup, dan mengetahui bahwa di sekitarnya ternyata ada komunitas atau kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi akhirnya membuat peserta didik mau menghargai hidup dan kehidupan. Latihan menjadi *volunteer* dapat mengembangkan

*karakter kebangsaan* dan pemahaman multibudaya peserta didik

#### 4. PENUTUP

Dengan pembelajaran Bahasa dalam pendidikan multikultural diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dari berbagai budaya, etnis, suku, agama yang berbeda dapat menanamkan kesadaran peserta didik yang memiliki nilai-nilai sosial bermanfaat untuk sebagai wujud sumbangsinya dalam mengatasi permasalahan di lingkungan masyarakat sekitar di masa yang akan datang. Sehingga peran Bahasa untuk pendidikan multikultural ini dapat berkontribusi terhadap perbaikan realitas kehidupan, dengan didik memiliki sikap saling menghargai dan menerima berbagai perbedaan, memiliki karakter yang kokoh, memiliki nilai-nilai moral, memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial yang membutuhkan, mengedepankan nilai-nilai bukan hanya pengetahuan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Hidayatullah Al Arifin, 2012. *Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Praksis Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 1, Nomor 1, Juni 2012
- Alwi, Hasan. 1999. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Depdiknas: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Berta, M. O., & Swarniti, N. W. (2020). IMPROVING THE STUDENTS' VOCABULARY MASTERY THROUGH WORD SQUARE GAME AT THE EIGHTH GRADE OF SMP DWIJENDRA DENPASAR IN THE ACADEMIC YEAR 2019/2020. *Widyasrama*, 30(2), 18–25.
- Cultural Studies. 2000. *Teori Sastra Pengantar Komprehensif*. Jakarta: Jalasutra Egleton Terry.
- Gulo, W. 2002. *Strategi Belajar-mengajar*. Jakarta: Gramedia.
- Kartika, I. M., Angga Mahendra, P. R., & Awa, V. (2021). Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn. *Jurnal Locus Delicti*, 1(1), 1-10. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD/article/view/187>
- Lasmawan, I Wayan. 2019. *Kurikulum dan Kearifan Lokal Era Disrupsi*. Undiksha press.
- Lede, D. A. S., & Swarniti, N. W. (2020). IMPROVING THE STUDENTS' VOCABULARY MASTERY BY USING TREE DIAGRAM ON THE EIGHTH GRADE STUDENTS' OF SMP DWIJENDRA IN THE ACADEMIC YEAR 2019/2020. *Widyasrama*, 30(2), 51–57.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Wahyuni, N. W.

- R. (2019). Pendidikan karakter: studi kasus peranan keluarga terhadap pembentukan karakter anak Ibu Sunah di Tanjung Benoa. *Widya Accarya*, 10(1).
- Santika, I. G. N. (2017). Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Widya Accarya*, 7(1). <http://103.39.12.42/index.php/widyaaccarya/article/view/898>
- Santika, I. G. N. (2018). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kepedulian Lingkungan Untuk Membebaskannya Dari Bencana Banjir. *Widya Accarya*, 9(1).
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan ( Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik ). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23–34. <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777>
- Santika, I. G. N. (2020a). Menelusuri Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001>
- Santika, I. G. N. (2020b). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020c). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid- 19 : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 127–137. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437>
- Santika, I. G. N. (2021a). Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 369–377.
- Santika, I. G. N. (2021b). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021c). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, XVI(2), 5–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25078/vd.v16i2.2384>
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Ayu, I. G., & Darwati, M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory ( TEP ). *Jurnal Etika Demokrasi (JED)*, 6(2), 40–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v6i2.5272>
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 74–85. <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1665>
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2018). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No. 79 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya Di Era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*, 79, 981–990.
- Santika, I. G. N., & Suastika, I. N. (2022). Efforts of State-Owned Enterprises (SOE) in Disseminating Pancasila by Actualizing Tri Hita Karana (THK). *Jurnal Etika Demokrasi (JED)*, 7(1), 14–27. <https://doi.org/10.26618/jed.v>
- Santika, I. G. N., & Sudiana, I. N. (2021). Inseri Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Ditinjau dari Perspektif Teoretis. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, 11(4), 464–472. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jipbs.v11i4.42052>
- Santika, I. G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *Journal of Etika Demokrasi (JED)*, 4(2), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391>
- Susilastri, Dian. 2009. Sastra Indonesia Berwarna "Lokal": Think Globally and Act Locally. Balai Bahasa Surabaya: Pelantra.
- Swarniti, N. W. (2019). The Translation Procedures of Bible Translation. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 5(2), 187–196. <https://doi.org/10.22225/jr.5.2.1277.187-196>
- Swarniti, N. W. (2020). Fenomena Morfologi pada Berita-Berita di CNN Indonesia Mengenai Covid-19: Kajian Linguistik. In *COVID-19 Perspektif Susastra dan Filsafat* (p. 93). Yayasan Kita Menulis.
- Swarniti, N. W. (2021). A Corpus Based Approach to the Analysis of Structures in Prepositional Phrase. *Yavana Bhasha: Journal of English Language Education*, 4(1), 18–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25078/yb.v4i1.2207>
- Swarniti, N. W. (2021). The Analysis of Semantics Meaning Found In Comments of Instagram Account of Info Denpasar. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMNALISA)*, 193–199.
- Swarniti, N. W. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Quizizz Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa. *Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran*, 133-144.

- Swarniti, N. W. (2021). The Meaning of The Verb “Destroy” in the Balinese Language: A Natural Semantic Meta Language Approach. *HUMANIS: Journal of Arts and Humanities*, 25(3), 292–298. <https://doi.org/10.24843/JH.2021.v25.i03.p05>
- Swarniti, N. W. (2021). Translation Methods Found in New Testament Bible of Mark’s Gospel. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 7(2), 172–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jr.7.2.3823.172-179>
- Tiurma Manurung, Rosida. 2011. Pengajaran Bahasa yang Berkarakter Kebangsaan dan Berspektif Multibudaya Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 13 No. 2 Juli 2011 hal 235-242. Universitas Kristen Maranatha Bandung.

## PENGARUH KINERJA MENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SD NEGERI 34 BONTOSUA

Oleh :

Kamil<sup>1)</sup>, Muhammad Yunus<sup>2)</sup>, Muhammad Sri Yusal<sup>3)</sup>, Elpisah<sup>4)</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Pendidikan Ekonomi, STKIP-PI Makassar

<sup>1</sup>email: kamil\_ovick@yahoo.co.id

<sup>2</sup>email: emyunusjale@gmail.com

<sup>3</sup>email: yusal.pasca@gmail.com

<sup>4</sup>email: elpisah77.stkip@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa di SD negeri 34 Bontosua. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan siswa di SD Negeri 34 Bontosua. Teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh dan *purposive sampling*, maka total sampel secara keseluruhan adalah jumlah guru 8 orang dan jumlah siswa adalah 8 orang. Teknik pengumpulan data digunakan adalah angket sebagai data primer, dan dokumentasi sebagai data pendukung. Teknik Analisis data dilakukan dengan menganalisis hasil jawaban responden pada angket secara kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan kinerja mengajar sekolah terhadap prestasi belajar siswa di SD Negeri 34 Bontosua, dimana diperoleh nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $2,814 > 2,571$  dan nilai probabilitas  $<$  taraf signifikan, yaitu  $0,037 < 0,05$ .

**Kata kunci:** kinerja mengajar guru, prestasi belajar siswa.

### 1. PENDAHULUAN

Kemampuan profesional guru di Indonesia masih belum memadai dan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan profesional guru adalah belum terampilnya guru dalam mengajar. Dalam menguasai keterampilan tersebut, guru membutuhkan bimbingan dan pembinaan intensif yang dapat meningkatkan keterampilannya dalam mengajar. Kinerja mengajar guru dikatakan berhasil apabila memberikan efek terhadap perkembangan potensi siswa dalam konteks psikologis dan fisik, yakni bersifat positif terhadap apa yang dipelajarinya, baik dilihat dari tujuan serta manfaatnya (Kuswana, 2012).

Selanjutnya menurut wahyudi (2012) menyatakan bahwa kinerja mengajar guru adalah hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang meliputi menyusun program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan analisis evaluasi. Mulyasa (2013) mengemukakan bahwa kinerja mengajar guru dalam pembelajaran berkaitan dengan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran, baik yang berkaitan dengan proses maupun hasilnya.

Guru yang baik tentunya tergambar pada penampilan mereka baik dari penampilan kemampuan akademik maupun kemampuan profesi

artinya guru harus mampu mengelola kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan juga dapat mendidik siswa di luar kelas dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan seseorang guru dapat dilihat dari kriteria-kriteria yang telah tercapai secara keseluruhan. Jika kriteria telah tercapai berarti pekerjaan seseorang telah dianggap memiliki kualitas kerja yang baik. Berkaitan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja mengajar guru, *Georgia department of education* telah mengembangkan *teacher performance assessment instrument* yang kemudian dimodifikasi oleh depdiknas menjadi alat penilaian kinerja guru.

Alat penilaian kinerja guru terdiri atas tiga aspek utama kemampuan guru yaitu: rencana pembelajaran atau RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), prosedur pembelajaran (*classroom procedure*) dan hubungan antar pribadi, dan penilaian pembelajaran. Kinerja mengajar guru adalah kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh kemampuan menyusun pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, menjalin hubungan antar pribadi dan melaksanakan penilaian hasil belajar (Supardi, 2013).

Kinerja individu yang diperoleh berdasarkan pada konsep, begitupun untuk kinerja mengajar guru. Mazda dan Lord (2006) menjelaskan konsep kinerja mengajar guru sebagai suatu proses perkembangan kerja guru. Perkembangan kinerja mengajar guru

merupakan bagian ideal dari suatu proses manajemen kerja. Pendapat tersebut diartikan bahwa perkembangan kinerja mengajar guru secara ideal adalah suatu proses berkelanjutan dalam manajemen agar dapat mengontrol tingkat manajemen sekolah.

Adapun fenomena kinerja mengajar beberapa guru di SD Negeri 34 Bontosua belum tercapai maksimal karena beberapa guru belum mampu mengelola kelas dengan baik. Terdapat beberapa guru memiliki keterampilan mengajar yang belum efektif, diantaranya keterampilan dalam menjelaskan, keterampilan menggunakan media pembelajaran dan keterampilan mengelola kelas. Kenyataan pula diamati bahwa guru kurang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan bersemangat. Ketidaktepatan penggunaan metode pembelajaran beberapa guru menimbulkan kejenuhan bagi siswa dalam menerima materi sehingga materi kurang dapat dipahami dan mengakibatkan siswa menjadi kurang motivasi untuk belajar

Permasalahan yang terjadi pula di SD Negeri 34 Bontosua menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa rendah, khususnya di kelas V dan VI. hal ini dibuktikan. beberapa siswa memperoleh nilai rata-rata ujian mencapai 58 yang masih berada dibawah standar KKM yaitu dibawah 65. Permasalahan dalam proses pembelajaran diketahui bahwa beberapa siswa terlihat jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan masih ada siswa yang tidak memperhatikan pada saat guru mengajar.

Permasalahan prestasi belajar yang telah diuraikan diatas berkaitan dengan teori Maslow. Teori ini dalam dunia pendidikan dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan siswa, agar menunjukkan keaktifan dalam belajar, misalnya guru dapat memahami keadaan siswa secara perorangan, memelihara suasana belajar yang baik, keberadaan siswa (rasa aman dalam belajar, kesiapan belajar, bebas dari rasa cemas) dan memperhatikan lingkungan belajar, misalnya tempat belajar yang menyenangkan, bebas dari kebisingan atau polusi, tanpa gangguan dalam belajar.

Ghufron dan Risnawita (2012) menyatakan prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai angka atau huruf. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar menurut Purwanto (2006) yaitu: pertama, faktor sosial meliputi faktor keluarga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial, kedua, faktor individual meliputi: kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. guru dalam hal ini adalah menilai perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa.

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data prestasi belajar siswa adalah mengetahui garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis prestasi yang akan diukur. Pengukuran menghasilkan data kuantitatif mengenai hal yang diukur, berupa angka-angka tentang sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Indikator prestasi belajar siswa dalam penelitian ini akan diperoleh dari penilaian yang ditinjau dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, yang dirangkum dalam nilai raport siswa.

Selanjutnya dari hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah Nita (2016) menyatakan bahwa pengaruh kinerja mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa SD, dimana ditemukan kinerja mengajar guru yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian terdahulu oleh Widoyoko (2011) menyatakan bahwa pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah Purworejo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kinerja mengajar guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja mengajar guru merupakan faktor dominan dalam menentukan prestasi belajarsiswa. Guru yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran dengan kinerja yang baik akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga siswa akan memiliki semangat dan motivasi dalam belajar.

Berdasarkan paparan di atas, membuktikan bahwa masih rendahnya prestasi belajar siswa di sekolah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan alasan untuk meninjau lebih lanjut kinerja mengajar guru dan pengaruhnya terhadap prestasi belajarsiswa. Selain itu belum pernah ada yang meneliti mengenai variabel tersebut di SD negeri 34 Bontosua. Peneliti dalam hal ini memiliki inisiatif untuk memilih judul "Pengaruh kinerja mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa di SD negeri 34 Bontosua.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan seluruh siswa di SD Negeri 34 Bontosua Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun populasi guru berjumlah 8 orang sedangkan populasi siswa berjumlah 109 orang. Pada penelitian ini, cara pengambilan sampel untuk mengetahui data prestasi belajar siswa dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. dan jumlah siswa tiap kelas diambil secara random sehingga dipilih masing-masing 4 orang mewakili kelas V dan VI. Oleh karena itu, total sampel secara keseluruhan adalah jumlah guru 8 orang dan jumlah siswa untuk menganalisis data nilai rapor adalah 8 orang.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan penyebaran angket dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menggunakan persentase dan analisis inferensial dengan menggunakan uji normalitas dan uji t. Kategori skor yang digunakan mengacu pada pendapat Mardapi (2008) sebagai berikut:

Tabel 1 Kategori Skor

Interval Skor	Kategori
$X \geq (Mi + 1,5 SDi)$	Sangat tinggi
$Mi \leq X < (Mi + 1,5 SDi)$	Tinggi
$(Mi - 1,5 SDi) \leq X < Mi$	Rendah
$X < (Mi - 1,5 SDi)$	Sangat rendah

(Sumber: Mardapi, 2008)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil data pada variabel kinerja mengajar guru akan diuraikan mengenai persentase frekuensi jawaban responden.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Kinerja Mengajar Guru

Interval Skor	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Kategori
$X \geq 65$	5	62,5	Sangat tinggi
$50 \leq X < 65$	3	37,5	Tinggi
$35 \leq X < 50$	0	0	Rendah
$X < 35$	0	0	Sangat Rendah

(Sumber: Data primer diolah, 2021)

Tabel 2 di atas menunjukkan nilai persentase variabel kinerja mengajar guru tertinggi sebesar 62,5 % (5 responden), terletak pada kategori sangat tinggi. Kemudian diikuti oleh nilai persentase sebesar 37,5 % (3 responden) pada kategori tinggi. Selanjutnya, nilai persentase paling rendah terletak pada kategori rendah dan sangat rendah dengan persentase sebesar 0 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja mengajar guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran dinilai sudah optimal. Dibuktikan oleh hasil data jawaban responden cenderung berada pada kategori sangat tinggi.

Selanjutnya deskripsi variabel prestasi belajar siswa dapat diuraikan sebagai berikut:

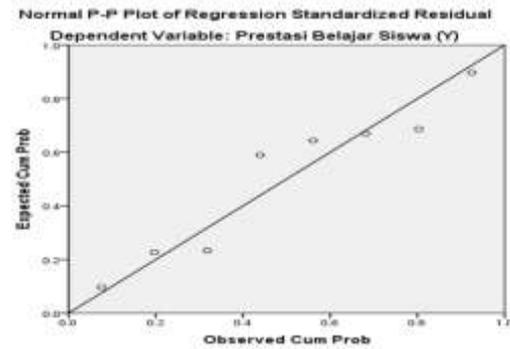
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Siswa

Interval Skor	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Kategori
$X \geq 90$	0	0	Sangat tinggi
$82 \leq X < 90$	6	75	Tinggi
$74 \leq X < 82$	2	25	Rendah
$X < 74$	0	0	Sangat Rendah

(Sumber: Data primer diolah, 2021)

Tabel 3 di atas ditunjukkan persentase skor variabel prestasi belajar siswa, dimana persentase tertinggi sebesar 75 % (6 responden) berada pada kategori tinggi sedangkan persentase terendah sebesar 0 % berada pada kategori sangat tinggi dan sangat rendah, dan 25 % (2 responden) berada pada kategori rendah. Hal ini berarti bahwa prestasi belajar siswa cenderung berada pada kategori tinggi.

Selanjutnya hasil analisis inferensial dengan menggunakan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji hipotesis dengan uji t. Adapun hasil uji pengujian normalitas dapat dilihat dari hasil gambar diagram P-P Plot residual dari perhitungan SPSS sebagai berikut:



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sebagaimana gambar di atas menunjukkan data berdistribusi normal karena titik-titik plot data menyebar pada sekitar garis diagonal serta penyebarannya searah mengikuti garis diagonal. Setelah diketahui data variabel dalam penelitian I I berdistribusi normal, maka dilanjutkan uji hipotesis dengan hasil uji t yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	t hitung	P-Value
Constanta	4,887	0,005
Kinerja mengajar guru	2,814	0,037

(Sumber: olah data spss, 2021)

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu  $2,814 > 2,571$  dan nilai sig < 0,05, yaitu  $0,037 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kinerja mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa.

Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kinerja mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa di SD Negeri 34 Bontosua. Hal ini berarti semakin baik kinerja mengajar guru akan meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Negeri 34 Bontosua dan sebaliknya, jika kinerja mengajar guru kurang baik, maka prestasi belajar siswa juga akan rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rodriguez, A.M, et al (2014) menyatakan bahwa kinerja mengajar guru merupakan penampilan kerja guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan bimbingan belajar yang berisi pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi siswa. Pembelajaran yang dilakukan guru harus dapat diukur (*accountable*), walaupun dalam proses pengukuran tidak terdapat satu cara yang paling tepat dalam mengukur kinerja mengajar guru. Kinerja mengajar guru berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS dengan kisaran nilai signifikansi 0,037. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja mengajar guru berpengaruh positif, berarti prestasi belajar IPS yang meningkat pada siswa SD Negeri 34 Bontosua dipicu oleh peningkatan mengajar guru. Sesuai pengamatan peneliti, kondisi kinerja mengajar guru cukup baik, dimana pelaksanaan pembelajaran secara luring cukup terlaksana dengan baik. Dengan keterbatasan prasarana, guru telah terampil dalam pembelajaran

luring sehingga siswa cukup serius dalam menerima pelajaran. Hal ini tentunya membangkitkan minat siswa untuk belajar dan akhirnya prestasi belajar juga ikut meningkat.

Hasil analisis deskriptif data angket yang diberikan kepada guru ditemukan bahwa kecenderungan variabel kinerja mengajar guru secara keseluruhan berada pada kategori sangat tinggi. Berbeda hal dengan penelitian Junianto (2013) yang menyatakan kinerja mengajar guru belum mencapai hasil optimal dan masih diperlukan upaya perbaikan. Hal ini sejalan dengan kecenderungan skor responden menyatakan bahwa kinerja mengajar guru masih dalam kategori cukup. Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja mengajar guru harus selalu dilakukan.

Ketercapaian indikator dalam penelitian ini diukur dengan besarnya tingkat persentase dari masing-masing indikator, dimana ditemukan indikator kemampuan menilai hasil pembelajaran memiliki persentase yang tertinggi dibandingkan dengan indikator lainnya. Hasil penelitian ini tentunya tidak terlepas dari ketercapaian indikator, besarnya pengaruh indikator dari kinerja mengajar guru telah diteliti lebih lanjut dalam pengujian parsial. Hasil pengujian parsial menunjukkan terdapat pengaruh kinerja mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa, dimana besarnya pengaruh kinerja mengajar terhadap prestasi belajar yaitu sebesar 0,527 atau 52,7 %, berarti jika kinerja mengajar mengalami peningkatan sebesar satu poin, maka prestasi belajar juga meningkat sebesar 0,527 atau 52,7 %.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Junianto (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kinerja mengajar guru, keterlibatan orang tua, aktualisasi diri dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa masing-masing sebesar 0,145; 0,128; 0,108; dan 0,098. Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu tujuan penelitian yang dikemukakan sama-sama mendeskripsikan besarnya kinerja mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas (kinerja mengajar guru dan kinerja manajemen kepala sekolah) dalam kaitan besarnya pengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Rachmawati, T & Daryanto (2013) mendefinisikan kinerja mengajar guru sebagai kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Hasil ini pula sejalan dengan pendapat para ahli mengenai keterkaitan kinerja mengajar guru dengan prestasi belajar siswa. Guru yang mempunyai kinerja mengajar yang baik akan mampu menumbuhkan semangat dan motivasi belajar siswa yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa (Gimbert, Bol, & Wallace, 2007).

Menurut B. Bloom (dalam Sudjana, 2006), terdapat faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain faktor internal dan faktor eksternal, dimana salah satu faktor tersebut mendukung meningkatnya prestasi belajar siswa. Salah satu dari faktor tersebut ialah kemampuan guru dalam mengajar Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan standar tugas yang diemban memberikan efek positif bagi hasil yang ingin dicapai seperti perubahan hasil akademik siswa, sikap siswa, keterampilan siswa, dan perubahan pola kerja guru yang makin meningkat, sebaliknya jika kemampuan mengajar yang dimiliki guru rendah akan berakibat bukan saja menurunkan prestasi belajar siswa tetapi juga menurunkan tingkat kinerja mengajar guru itu sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jika kinerja mengajar guru meningkat maka prestasi belajar siswa akan meningkat, begitupun sebaliknya

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu terdapat pengaruh signifikan kinerja mengajar sekolah terhadap prestasi belajar siswa di SD Negeri 34 Bontosua, dimana diperoleh nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $2,814 > 2,571$  dan nilai probabilitas  $<$  taraf signifikan, yaitu  $0,037 < 0,05$ . Adapun saran yang diajukan adalah mengingat bahwa kinerja guru mengajar memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa, maka sebaiknya sekolah lebih memperhatikan aspek-aspek peningkatan kinerja guru baik melalui wadah kegiatan pemberdayaan guru maupun diklat lain yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar.

#### 5. REFERENSI

- Gimbert, B., Bol, L., & Wallace, D. (2007). *The influence of teacher preparation on student achievement and the application of national standards by teachers of mathematics in urban secondary school*. Educatin And Urban Society
- Ghufron, M.N dan Risnawita. (2012). *Teori-Teori Psikologi*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Junianto, D. (2013). *Pengaruh Kinerja Mengajar Guru, Keterlibatan Orang Tua, Aktualisasi Diri dan Motivasi Berprestasi Terhadap Prestasi Belajar*. Jurnal Pendidikan Vokasi, volume 3 (3). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpv/article/view/1845>
- Kuswana, W. S. (2012). *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Manullang, N.T. (2016). *Pengaruh Kinerja Guru dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa SD Penabur Bandarlampung*, Jurnal Manajemen Magister, volume 2 (2). <https://jurnal.darmajaya.ac.id/articledownload>
- Mazda, J.F. & Lord, S. (2006). *Developing Effective Teacher Performance*. London: sage publication Inc

- Mardapi, D. (2008). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes*. Yogyakarta. Mitra Cendekia Press.
- Mulyasa. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purwanto, N. (2006). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachmawati, T & Daryanto. (2013). *Penilaian Profesi Guru dan Angka Kreditnya*. Yogyakarta: Gava Media
- Rodriguez, A. M., et al. (2014). *Teaching Performance: Determinants of The Student Assessment*. Academia Revista Latinoamericana De Administracion
- Sudjana, N. (2006). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Supardi. (2013). *Kinerja Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahyudi, I. (2012). *Mengejar Profesionalisme Guru*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widoyoko, E.P. (2011). *Pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa, cakrawala pendidikan*, Volume 2 (2). file:///C:/Users/MyPC /App Data/ Local/Temp/1563-4601-1-PB.pdf

## STUDI KEMAMPUAN KOLABORASI SISWA DALAM PEMBUATAN HERBARIUM MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP

Oleh :

Khilma Vita Nurmayasari<sup>1)</sup>, Yuni Pantiwati<sup>2)</sup>, Sri Wahyuni<sup>3)\*</sup>, Rr. Eko Susetyarini<sup>3)</sup>, Iin Hindun<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang

<sup>1</sup>email: khilma.vita@gmail.com

<sup>2</sup>email : sri\_wahyuni@umm.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kolaborasi belajar siswa dalam membuat herbarium pada materi klasifikasi tumbuhan sub bahasan herbarium. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara detail kemampuan kolaborasi siswa dalam membuat herbarium pada materi klasifikasi makhluk hidup. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Batu yang berjumlah 23 siswa. Cara pengambilan data kemampuan kolaborasi dengan menggunakan lembar observasi dengan menggunakan 4 indikator dan 10 deskriptor. Data penelitian dianalisis menggunakan presentase rata-rata skor pada indikator keterampilan kolaborasi. Diperoleh nilai rata-rata presentase kemampuan kolaborasi siswa pada pembelajaran pertama dan kedua yaitu 64,12% dengan kategori kolaboratif. Berdasarkan hasil rata-rata nilai presentase pada pembelajaran pertama dan kedua indikator yang paling banyak dilakukan siswa yaitu pada indikator A dengan rata-rata presentase 100% dan deskriptor yang paling sedikit dilakukan siswa yaitu pada deskriptor J 13,04%. Implikasi dari penelitian ini yaitu model *Project Based Learning* dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam bekerjasama menyelesaikan tugas proyek yang diberikan sehingga dapat meningkatkan sikap aktif untuk berkolaborasi pada siswa yang dibuktikan dari kenaikan nilai presentase pada pembelajaran pertama dan kedua.

**Kata kunci :** *project based learnig*, keterampilan abad 21, kolaborasi, herbarium tumbuhan

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada abad ke-21 menuntut peserta didik harus memiliki keterampilan belajar dan berinovasi dalam menggunakan teknologi dan media informasi yang dapat digunakan untuk memiliki keterampilan untuk hidup (*life skills*) (Wijaya et al., 2016). Pendidikan memiliki peranan yang strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap dan nilai dalam memenuhi tuntutan pembangunan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang modern (Benawa, 2012). Menurut (Cahyono, 2017) pengembangan sumber daya manusia (SDM) tidak hanya kemampuan akademik, melainkan juga harus memiliki kemampuan lainnya seperti kreativitas, komunikasi, kerjasama, dan adaptasi juga perlu diperhatikan, sehingga pendidikan memiliki peranan yang penting dalam berkontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dapat disiapkan melalui peserta didik yang memiliki kemampuan dalam sains, sikap dan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi. (Zubaidah, 2016) juga menyebutkan bahwa keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, berkolaborasi dan beberapa keterampilan lainnya juga perlu untuk diberdayakan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kerjasama dalam keterampilan kolaborasi dipersiapkan sedemikian rupa dengan tujuan untuk memudahkan dalam

mencapai tujuan bersama. Keterampilan kolaborasi merupakan keterampilan yang efektif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama (Ilmiyatni et al., 2019) menjelaskan bahwa kemampuan dalam bidang akademis dan kemampuan dalam bekerjasama harus diajarkan kepada peserta didik, hal tersebut karena dapat digunakan untuk meningkatkan kerja kelompok peserta didik, dan menentukan keberhasilan peserta didik dalam berhubungan di masyarakat.

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada guru IPA SMP Muhammadiyah 2 Batu diperoleh informasi bahwa, dalam pembelajaran telah menerapkan model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) pada beberapa materi pelajaran IPA, namun siswa masih banyak yang tidak fokus pada pembelajaran, hal tersebut berdampak pada saat bekerja secara berkelompok dimana banyak siswa yang kurang mampu bekerjasama dengan siswa lain dan hanya menggantungkan penyelesaian tugas kepada siswa yang dianggap pandai sehingga penyelesaian tugas menjadi terlambat (Kristanti, 2016).

Namun, pada materi klasifikasi tumbuhan guru masih mempresentasikan materi kepada siswa dengan metode ceramah yang berpusat pada guru dan tanya jawab sehingga kurang memungkinkan siswa untuk lebih bekerja sama dan berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh (Saenab et al., 2017) bahwa kolaborasi dapat berjalan apabila anggota dari

kelompok mampu untuk mengerjakan pekerjaan secara individu. Kolaborasi juga mengenai kontribusi dari masing-masing individu untuk mengenali dan menilai dalam produktifitas dan pengembangan kerja tim.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut rendahnya keterampilan kolaborasi disebabkan karena masih kurangnya wadah untuk menyampaikan gagasan dan ide baru mereka, dan untuk mengekspresikan pendapat sesuai dengan kreatifitas siswa masih kurang. Selain itu penerapan metode pembelajaran juga masih belum berjalan maksimal dan pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru. Hal tersebut tentu mendorong guru untuk perlu melakukan inovasi dalam melatih kemampuan kolaborasi siswa. Menurut (Redhana, 2019) guru juga dituntut untuk kreatif dalam menerapkan strategi pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran perlu adanya inovasi untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa mampu untuk mengkespresikan kreatifitasnya. Hal yang dapat dilakukan agar siswa memiliki kemampuan tersebut, siswa dapat dilatih dengan memberikan masalah yang menantang yang berkaitan dengan kehidupan nyata.

Model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) menurut (Natty et al., 2019) merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitanya dengan siswa, atau dengan suatu proyek sekolah. Pembelajaran model PjBL juga selaras dengan tujuan yang terdapat pada kurikulum 2013 yaitu meningkatkan dan menumbuhkan pengetahuan serta pemahaman siswa dalam meningkatkan hasil belajar. Selain itu PjBL juga dapat menstimulasi siswa untuk dapat berpikir cara untuk memecahkan masalah dan merancang suatu hasil dari permasalahan tersebut (Masykur, 2016). Model pembelajaran PjBL dapat memfasilitasi dalam membangun keterampilan psikomotor. Ranah psikomotor berkaitan dengan pengalaman peserta didik yaitu keterampilan dalam bertindak-laku setelah menerima pengalaman belajar. Bentuk dari hasil belajar pada psikomotor yaitu keterampilan dan kecakapan dalam bertindak secara individu (Mulyani, 2020).

Kolaborasi belajar berkaitan dengan merancang dan bekerja sama dalam perspektif yang berbeda dan memberikan kontribusi dalam pembahasan topik tertentu (Saenab, 2019). Pembelajaran model *Project Based Learning* berfokus pada konsep inti dari suatu disiplin ilmu, yang melibatkan peserta didik dalam memahami suatu konsep yang telah diberikan oleh pendidik berupa kegiatan pembelajaran yang bermakna, sehingga mampu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri, yang mampu memahami konsep pembelajarannya sendiri (Komarudin, 2020).

Kolaborasi dapat berlangsung ketika setiap individu dalam kelompok mampu untuk bekerjasama.

Kontribusi masing-masing individu dalam prokduktifitas dan kerja tim juga dinilai dalam kolaborasi. Materi klasifikasi tumbuhan menuntut siswa untuk dapat mempelajari tentang penggolongan jenis-jenis tumbuhan yang didasarkan pada ciri-ciri yang dimilikinya. Sehingga, materi yang dapat diberikan bukan hanya materi teoritis yang tercatat dalam buku. Materi klasifikasi makhluk hidup pada sub materi klasifikasi tumbuhan dapat disampaikan dengan menggunakan model PjBL, siswa dapat memilih, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan jenisnya secara mandiri melalui pembuatan herbarium untuk berbagai jenis tumbuhan (Masykur, 2016).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Khanifah, 2017) menunjukkan bahwa penerapan PjBL berpengaruh terhadap keterampilan kolaborasi dan hasil belajar siswa. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh (Fauziyyah, 2018) bahwa penerapan model PjBL mengalami peningkatan hasil belajar pada materi klasifikasi makhluk hidup di kelas VII SMP Negeri 2 Taman Sidoarjo. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Mulyani, 2020) penerapan model PjBL efektif digunakan dalam pembelajaran pada materi klasifikasi makhluk hidup di MTsN 11 Ciamis.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena data yang diperoleh berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yang digunakan yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan suatu proses dalam pengambilan serta analisis data kemampuan kolaborasi siswa dalam membuat herbarium pada materi klasifikasi makhluk hidup.

Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan bagaimana kemampuan kolaborasi siswa dalam membuat herbarium pada materi klasifikasi makhluk hidup. Data pada penelitian kualitatif ini diperoleh dari hasil observasi dalam pembelajaran yang kemudian dianalisis dan didiskripsikan secara detail. Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Batu. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi. Observasi dilakukan oleh empat observer. Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran. Observasi digunakan untuk mengamati keterampilan kolaborasi siswa pada pembelajaran klasifikasi makhluk hidup yang disusun berdasarkan indikator kolaborasi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi 4 indikator dengan 10 deskriptor yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Pedoman Observasi Keterampilan Kolaborasi Siswa**

No.	Indikator	Deskriptor	Kode
1.	Bersedia berkelompok sesuai pembagian kelompok	Siswa menerima untuk masuk ke dalam kelompok yang telah ditentukan	A
2.	Bekerjasama dan saling melengkapi	Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk	B

	antar teman untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan ide-ide	menyelesaikan masalah yang ada di LKPD	C
		Siswa menyampaikan pendapat maupun ide saat berdiskusi	
		Siswa membantu teman saat mengerjakan LKPD	
3.	Setiap anggota bertanggung jawab mengerjakan tugas kelompok yang menjadi bagiannya	Siswa mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan di depan kelas	E
		Siswa menanyakan tugas maupun materi yang belum dipahami kepada kelompok lain	F
		Siswa mencari sumber belajar materi klasifikasi makhluk hidup untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD	G
		Siswa menyelesaikan tugas kelompok yang menjadi bagiannya dengan tepat waktu	H
4.	Mampu membuat keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama	Siswa memilih salah satu anggota dalam kelompok sebagai ketua	I
		Siswa membuat kesimpulan dalam LKPD	J

(Sumber: Sulistiyawati, 2020)

Teknik penilaian pada lembar observasi dilakukan dengan cara memberikan tanda centang pada kolom deskriptor A sampai J jika terlihat perilaku yang sesuai dengan deskriptor. Data penelitian dari hasil lembar observasi kemudian dijadikan dalam bentuk presentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Rumus keterampilan kolaborasi siswa

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Deskriptor yang terlihat}}{\text{Jumlah keseluruhan deskriptor}} \times 100$$

- b. Rumus presentase rata-rata nilai keterampilan kolaborasi siswa

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor Seluruh Siswa}}{\text{Jumlah seluruh siswa}} \times 100$$

Data hasil lembar observasi keterampilan kolaborasi siswa kemudian direkap dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP merupakan teknik penilaian dengan cara membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan suatu standar atau norma absolut (Alfath & Raharjo, 2019). PAP yang dijelaskan oleh (Widyoko, 2009) yang digunakan untuk mengkategorikan keterampilan siswa adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Keterampilan Kolaborasi Siswa

Nilai	Kategori
>80	Sangat Kolaboratif
>60 – 80	Kolaboratif
>40 – 60	Cukup Kolaboratif
>20 – 40	Kurang Kolaboratif
≤20	Tidak Kolaboratif

Sumber : Widoyoko dalam (Rahmawati, 2019)

Keterampilan kolaborasi siswa diperoleh hasil dengan cara observasi dengan menggunakan lembar observasi yang dinilai pada kegiatan pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Pada pembelajaran

pertama untuk keterampilan kolaborasi peneliti mematok nilai rata-rata keterampilan kolaborasi siswa yaitu 65% dan untuk pertemuan kedua menaikkan angka target menjadi 70%.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model *Project Based Learning* (PjBL) mengalami perkembangan. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan pada ketereampilan kolaborasi pada pembelajaran pertama dan kedua. Data mengenai tingkat keberhasilan kemampuan kolaborasi dari penerapan model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) pada materi klasifikasi makhluk hidup dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Data Keterampilan Kolaborasi Siswa Pembelajaran Pertama

No.	Nama	Nilai	Kriteria
1	AFBF	60	Cukup Kolaboratif
2	AIRW	50	Cukup Kolaboratif
3	AUP	40	Kurang Kolaboratif
4	DAA	50	Cukup Kolaboratif
5	DARB	50	Cukup Kolaboratif
6	DRSM	30	Kurang Kolaboratif
7	FPI	30	Kurang Kolaboratif
8	FAR	60	Kolaboratif
9	GF	60	Kolaboratif
10	HPS	80	Kolaboratif
11	KAAN	80	Kolaboratif
12	KR	50	Cukup Kolaboratif
13	LMA	50	Cukup Kolaboratif
14	MRA	70	Kolaboratif
15	MAS	50	Cukup Kolaboratif
16	MFU	50	Cukup Kolaboratif
17	MHR	60	Cukup Kolaboratif
18	MIA	50	Cukup Kolaboratif
19	MIA	50	Cukup Kolaboratif
20	MYI	70	Kolaboratif
21	RGNA	50	Cukup Kolaboratif
22	RAF	70	Kolaboratif
23	TIA	70	Kolaboratif
<b>Rata-Rata</b>		<b>55,65</b>	<b>Cukup Kolaboratif</b>

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah nilai seluruh siswa 1280 yang telah dibagi dengan 23 jumlah seluruh siswa mendapat nilai presentase 55,65% dengan kategori cukup kolaboratif. Namun, presentase tersebut masih kurang dari target yang seharusnya yaitu 65% pada pembelajaran pertama. Observasi yang dilakukan pada pembelajaran pertama masih terlihat banyak deskriptor yang perlu adanya perlakuan. Berikut merupakan grafik jumlah siswa yang melaksanakan deskriptor pada pembelajaran pertama.



Gambar 1. Grafik Siswa yang Melaksanakan Deskriptor pada Pembelajaran Pertama

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa deskriptor yang paling banyak dilaksanakan oleh siswa yaitu deskriptor A yaitu 23 siswa dengan presentase 100% menerima untuk masuk ke dalam kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Selain itu, deskriptor yang paling sedikit dilakukan oleh siswa yaitu pada deskriptor E yaitu 0 siswa dengan presentase 0% tidak mempresentasikan tugas proyek yang telah dikerjakan di depan kelas pada pembelajaran pertama. Hal tersebut terjadi karena pada pembelajaran pertama tugas proyek berupa membuat herbarium masih belum selesai sehingga presentasi tugas proyek dilaksanakan pada pertemuan kedua. Deskriptor yang juga paling sedikit dilakukan siswa yaitu pada deskriptor J yaitu 5 siswa dengan presentase 21,73%, deskriptor J berkaitan dengan siswa membuat kesimpulan yang terdapat pada LKPD. Kesimpulan dalam membuat herbarium yang terdapat pada perintah LKPD dilaksanakan pada saat pembuatan herbarium telah selesai, yang diwakili oleh setiap kelompok dengan masing-masing satu hingga dua orang yang memiliki inisiatif untuk memberikan kesimpulan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Pembelajaran kedua peneliti mengamati kegiatan siswa berdasarkan deskriptor A dan I. Selain itu peneliti juga mengamati kegiatan siswa berdasarkan deskriptor B, C, D, E, F, G, dan J yaitu berkaitan dengan kerja tim. Berikut merupakan data kemampuan kolaborasi siswa pada pembelajaran kedua yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Data Nilai Observasi Kemampuan Kolaborasi Siswa Pembelajaran Kedua

NO.	NAMA	NILAI	KRITERIA
1	AFBF	70	Kolaboratif
2	AIRW	70	Kolaboratif
3	AUP	70	Kolaboratif
4	DAA	70	Kolaboratif
5	DARB	80	Kolaboratif
6	DRSM	60	Cukup Kolaboratif
7	FPI	60	Cukup Kolaboratif
8	FAR	80	Kolaboratif
9	GF	90	Sangat Kolaboratif
10	HPS	80	Kolaboratif
11	KAAN	70	Kolaboratif
12	KR	70	Kolaboratif
13	LMA	70	Kolaboratif
14	MRA	70	Kolaboratif
15	MAS	60	Cukup Kolaboratif
16	MFU	70	Kolaboratif
17	MHR	80	Kolaboratif
18	MIA	70	Kolaboratif
19	MIA	70	Kolaboratif
20	MYI	80	Kolaboratif
21	RGNA	70	Kolaboratif
22	RAF	80	Kolaboratif
23	TIA	80	Kolaboratif
<b>RATA-RATA</b>		<b>72,60</b>	<b>Kolaboratif</b>

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah nilai seluruh siswa 1670 yang telah dibagi dengan 23 jumlah seluruh siswa mendapat nilai presentase 72,60% dengan kategori kolaboratif. Berikut merupakan grafik jumlah siswa yang melaksanakan deskriptor pada pembelajaran kedua :



Gambar 2. Data Siswa yang Melaksanakan Deskriptor pada Pembelajaran Kedua

Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat bahwa deskriptor yang paling banyak dilakukan oleh siswa yaitu pada kemampuan kolaborasi membuat herbarium tumbuhan yaitu pada deskriptor A dengan presentase 100% yakni siswa menerima untuk masuk ke dalam kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Deskriptor B yakni siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di LKPD telah mengalami peningkatan pada pembelajaran kedua menjadi 100%, artinya seluruh siswa sudah mampu untuk mengutarakan pendapat dan gagasan yang mereka miliki untuk saling bertukar pikiran guna menyelesaikan tugas proyek untuk kepentingan bersama. Kemudian deskriptor yang paling sedikit muncul pada pembelajaran kedua yaitu pada deskriptor E dan J yakni pada deskriptor E sebanyak 6 siswa dengan presentase 26,08% siswa berani untuk mempresentasikan tugas proyek berupa herbarium yang telah dikerjakan di depan kelas, sedangkan untuk deskriptor J yakni sebanyak 3 siswa dengan presentase 13,04% dengan deskriptor, siswa membuat kesimpulan dalam LKPD.

Berikut merupakan grafik mengenai perbandingan data nilai kemampuan kolaborasi siswa pada pembelajaran pertama dan kedua sebagai berikut:



Gambar 3. Perbandingan Kemampuan Kolaborasi Siswa

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dari pembelajaran pertama hingga pembelajaran kedua telah terjadi peningkatan kemampuan kolaborasi siswa. Kondisi pada pembelajaran pertama menunjukkan rata-rata kemampuan kolaborasi siswa 55,65%. Kemudian

angka ini mengalami peningkatan pada pembelajaran kedua yakni 72,60%.

Berdasarkan hasil pemaparan data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan kolaborasi siswa dalam membuat herbarium pada materi klasifikasi makhluk hidup dengan menerapkan model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) mengalami perkembangan. Pembelajaran pertama kemampuan kolaborasi siswa sebesar 55,65% dengan kategori cukup kolaboratif kemudian pada pembelajaran kedua kemampuan kolaborasi siswa mengalami perkembangan menjadi 72,60% dengan kategori kolaboratif. Rata-rata nilai presentase kemampuan kolaborasi siswa pada pembelajaran I dan II yaitu 64,12% dengan kategori kolaboratif.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kemampuan kolaborasi siswa dalam memecahkan masalah juga dapat teratasi dengan baik. Siswa mampu bekerja sama dalam kelompok dengan pembagian tugas pada setiap anggota kelompok agar tugas proyek yang diberikan menjadi lebih maksimal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggelita & Mariono, 2020) yang menyatakan bahwa keterampilan kolaborasi dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Seiring berjalannya waktu keterampilan kolaborasi penting dilakukan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan maupun digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang efektif dan bermakna. Siswa juga dituntut untuk mampu berkolaborasi satu sama lain dalam masyarakat global. Selain itu, melalui model pembelajaran *Project Based Learning* juga dapat meningkatkan motivasi belajar dalam bekerjasama menyelesaikan tugas proyek yang diberikan sehingga dapat meningkatkan sikap aktif untuk berkolaborasi pada siswa (Handayani, 2020).

Model *project based learning* merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan tugas proyek secara berkelompok, seluruh siswa akan berusaha untuk menjalankan tugas masing-masing untuk berpikir, bergerak lebih cepat, berdiskusi menyelesaikan proyek dan berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek dengan tepat waktu yang akan berpengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi dan hasil belajar siswa (Maulidah, 2019). *Project based learning* mampu mengakomodasi keterampilan abad 21 dengan pendekatan konstruktivisme, siswa menjadi pusat pembelajaran, kerjasama tim, dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik (Mayasari et al., 2015).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Batu, peneliti menyimpulkan sebagai berikut: Studi Kemampuan Kolaborasi Siswa dalam Pembuatan Herbarium pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup pada setiap pembelajaran mengalami peningkatan. Pembelajaran pertama kemampuan

kolaborasi siswa memiliki rata-rata 55,65% dengan kategori cukup kolaboratif kemudian pada pembelajaran kedua menjadi 72,60% dengan kategori kolaboratif. Rata-rata kelas pada pembelajaran pertama dan kedua memiliki rata-rata 64,13% dengan kategori kolaboratif. Deskriptor yang paling banyak dilakukan oleh siswa yaitu deskriptor A yaitu siswa menerima untuk masuk ke dalam kelompok yang telah ditentukan dan deskriptor yang paling sedikit dilakukan siswa yaitu E dan J yakni pada deskriptor E siswa mempresentasikan tugas proyek berupa herbarium yang telah dikerjakan di depan kelas, sedangkan untuk deskriptor J yakni siswa membuat kesimpulan dalam LKPD.

#### 5. REFERENSI

- Alfath, K., & Raharjo, F. F. (2019). Teknik Pengolahan Hasil Asesmen: Teknik Pengolahan Dengan Menggunakan Pendekatan Acuan Norma (Pan) Dan Pendekatan Acuan. *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 8(1), 1–28.
- Anggelita, D. M., & Mariono, A. (2020). Pengaruh Keterampilan Kolaborasi Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Smk Abstrak. 5(2), 21–30. <https://doi.org/10.32832/Educate.V5i2.3323>
- Benawa, A. (2012). Kontribusi Pendidikan Dalam Membangun Pengetahuan Dan Karakter Bangsa. *Humaniora*, 3(2), 354. <https://doi.org/10.21512/Humaniora.V3i2.3329>
- Cahyono, B. (2017). Analisis Keterampilan Berfikir Kritis Dalam. *Aksioma*, 8(1), 50–64.
- Fauziyyah. (2018). Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ipa Materi Pokok Klasifikasi Makhluk Hidup Pada Kelas Vii Di Smp Negeri 2 Taman Sidoarjo. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan (Jmtp)*, 9(2), 1–7.
- Handayani. (2020). Peningkatan Motivasi Belajar Ipa Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Siswa Smp Negeri 4 Gunungsari. 7(3), 168–174.
- Ilmiyatni, F., Jalmo, T., & Yolida, B. (2019). Pengaruh Problem Based Learning Terhadap Keterampilan Kolaborasi Dan Berpikir Tingkat Tinggi. *Jurnal Bioterdidik*, 7(2), 35–45.
- Khanifah. (2017). Pengaruh Penggunaan Model Project Based Learning Dan Keterampilan Kolaborasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas Iv Madrasah Ibtidaiyah Pada Tema Cita-Citaku. *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 4(2), 138–155.
- Komarudin. (2020). Analisis Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Sekolah Dasar: Dampak Model Project Based Learning Model Komarudin1a. *Jurnal Pendidikan Guru*

- Sekolah Dasar, 7(1), 43–53.  
<https://doi.org/10.30997/Dt.V7i1.1898>
- Kristanti, Y. D. (2016). Model Pembelajaran Berbasis Proyek ( Project Based Learning Model ) Pada Pembelajaran. *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 5(2), 122–128.
- Masykur. (2016). Penerapan Model Project Based Learning Pada Materi Klasifikasi Tumbuhan Di Mtsn Kuta Baro. *Jurnal Edubio Tropika*, 4(2), 20–23.
- Maulidah, E. (2019). Peningkatan Motivasi Belajar Ipa Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Siswa Smp Negeri 4 Gunungsari. Tesis.
- Mayasari, T., Kadarohman, A., & Rusdiana, D. (2015). Apakah Model Pembelajaran Problem Based Learning Dan Project Based Learning Mampu Melatihkan Keterampilan. *Jpjk*, 2(1), 48–55.
- Mulyanil. (2020). Studi Dokumenter Hasil Belajar Psikomotor Materi Klasifikasi Makhluk Hidup Dengan Menggunakan Model Pjbl Pada Siswa Kelas Vii Mtsn 11 Ciamis. *Viii(2)*, 36–39.
- Natty, R. A., Kristin, F., & Anugraheni, I. (2019). Peningkatkan Kreativitas Dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 3(4), 1082–1092.  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.V3i4.262>
- Rahmawati, A. (2019). Analisis Keterampilan Berkolaborasi Siswa Sma Pada Pembelajaran Berbasis Proyek Daur Ulang Minyak Jelantah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Kimia*, 8(2), 1–15.
- Redhana, I. W. (2019). Mengembangkan Keterampilan Abad Ke-21 Dalam Pembelajaran Kimia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 13(1), 2239–2253.
- Saenab. (2019). Pengaruh Penggunaan Model Project Based Learning Terhadap Keterampilan Kolaborasi Mahasiswa Pendidikan Ipa. *Jurnal Biology Science & Education*, 8(1), 29–41.
- Saenab, S., Yunus, S. R., & Virninda, A. N. (2017). Pjbl Untuk Pengembangan Keterampilan Mahasiswa: Sebuah Kajian Deskriptif Tentang Peran Pjbl Dalam Melejitkan Keterampilan Komunikasi Dan Kolaborasi Mahasiswa. *Seminar Nasional Lembaga Penelitian Unm*, 2(1), 45–50.
- Sulistiyawati, D. Y. R. (2020). Peningkatan Keterampilan Kolaborasi Dan Hasil Belajar Materi Debit Untuk Siswa Kelas V Sdn Kentungan Dengan Model Stad. *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Skripsi*, 348.
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., & Nyoto, A. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan. *Jurnal Pendidikan*, 1, 263–278.  
<http://repository.unikama.ac.id/840/32/263-278> Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global .Pdf. Diakses Pada; Hari/Tgl; Sabtu, 3 November 2018. Jam; 00:26, Wib.
- Zubaidah, S. (2016). Sitizubaidah-Stkipsintang-10des2016. *Seminar Nasional Pendidikan*, 2(2), 1–17.

# MODEL EKSPONENSIAL UNTUK MEMPROYEKSIKAN PERSENTASE PEREMPUAN YANG PERNAH KAWIN DI BAWAH UMUR 17 TAHUN DI NTT TAHUN 2026

Oleh:

**Melki Puling Tang**

Program Studi Matematika FMIPA Universitas Tribuana Kalabahi NTT- Indonesia,  
email: melkipulingtang@gmail.com,

## Abstrak

Perkawinan merupakan anugerah Tuhan yang mestinya dihargai. Proses perkawinan merupakan interaksi biologis dimana interaksi tersebut mestinya berdampak positif dan tidak terkesan membebani keluarga. Perempuan yang pernah kawin di bawah umur ( $< 17$  tahun) baik interaksinya berjalan sesuai kaidah yang berlaku dan atau pun kawin yang tidak menjurus kepada rumah tangga, sangatlah berdampak secara negatif dalam komunitas. Dampak yang akan dirasakan ketika perempuan kawin di bawah umur yaitu morak-mariknya rumah tangga yang akan dibina, masih ada ketergantungan yang sebagian besar mengharapkan keluarga, tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terus meningkat. Jumlah populasi perempuan pernah kawin di bawah umur atau kawin dibawah umur 17 tahun di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari tahun 2016 sampai 2020 adalah: tahun 2016 sebanyak 5,55%, tahun 2017 sebanyak 6,67%, tahun 2018 sebanyak 5,06 %, tahun 2019 sebanyak 5,11%, dan tahun 2020 sebanyak 5,28% dan rata-rata jumlah populasi yang kawin dibawah umur (umur kurang dari 17 tahun) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 5,53%. Proyeksi pada tahun 2026 jumlah populasi perempuan pernah kawin di bawah umur (umur kurang dari 17 tahun) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan rumus model eksponensial, ketika  $t=10$ , maka  $y = 34,88$ . Hal ini, berdasarkan model perhitungan model eksponensial mengalami peningkatan sebanyak 34,88. Hal ini akan berdampak pada lintas bidang yaitu meledaknya jumlah penduduk, kemiskinan, terganggunya stabilitas ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, stabilitas keamanan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, kasus perselingkuhan dan lain-lainnya yang berdampak secara negatif. Hal ini akan berdampak pada lintas bidang yaitu meledaknya jumlah penduduk, kemiskinan, terganggunya stabilitas ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, stabilitas keamanan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, kasus perselingkuhan dan lain-lainnya yang berdampak secara negatif. Perlu dilakukan sosialisasi atau pun strategi untuk dapat membatasi kondisi dimaksud, dalam hal ini mengurangi atau membatasi persentase jumlah perempuan kawin di bawah umur 17 tahun.

**Kata Kunci:** Kawin, eksponensial.

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan dikenal sebagai hubungan antara pria dan wanita yang melakukan hubungan seksual, keturunan, dan membagi peran antara suami isteri. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja

menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia (Hilman Hadi Kusuma, 2007).

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undangundang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan (Moh Zahid, 2002).

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah (Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini.", h. 65-66).

Data yang diambil merupakan data berkala, dikumpulkan menurut waktu dari tahun 2016-2020, untuk menggambarkan populasi jumlah perempuan kawin di bawah umur (kurang dari 17 tahun) yang terdata di BPS. Data berkala tersebut digunakan untuk meramalkan atau mengestimasi populasi jumlah perempuan kawin di bawah umur (kurang dari 17 tahun) yang terdata di BPS tahun 2026. Selanjutnya data hasil ramalan tersebut dapat berguna untuk dasar pembuatan perencanaan pemerataan penduduk, baik jangka pendek, menengah, atau pun jangka panjang untuk menekan meningkatnya laju populasi perempuan kawin dibawah umur (umur kurang dari 17 tahun). Teknik analisa data menggunakan model eksponensial.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

**Prosedur Penelitian** :(1) rancangan penelitian; mengambil data BPS tahun 2015, 2016, 2017, 2018,2019 dan 2020; (2) sasaran penelitian yaitu proyeksi jumlah populasi Persentase Perempuan yang Pernah Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) (Persen) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2026; (3) teknik pengumpulan data pada tahapan pengumpulan data langkah-langkah yang digunakan, mengumpulkan data tentang populasi jumlah persentase perempuan yang pernah kawin di bawah umur (kurang dari 17 tahun) (persen) berdasarkan data BPS kabupaten Alor dan atau BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui internet, selanjutnya menganalisis data dan terakhir menarik kesimpulan.; (4) dan teknik analisis data yaitu penerapan model eksponensial populasi Persentase Perempuan yang Pernah Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) (Persen) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2026.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Model Populasi Eksponensial

Hukum Maltus atau hukum pertumbuhan eksponensial berbunyi: Laju pertumbuhan suatu populasi (mikroba, bakteri, serangga, manusia, binatang) sebanding dengan populasi saat itu. Jika  $y$  menyatakan jumlah populasi setiap saat, maka Hukum Maltus dinyatakan dengan:

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad (1)$$

Dengan menyelesaikan  $\frac{dy}{dt} = ky$  dengan syarat bahwa  $y = y_0$  ketika  $t = 0$  dengan memisahkan variabel- variabel dan mengintegrasikan, kita memperoleh

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= ky \\ \frac{dy}{y} &= kdt \\ \int \frac{dy}{y} &= \int kdt \\ \ln y &= kt + C \end{aligned} \quad (2)$$

syarat  $y = y_0$  pada  $t = 0$  memberikan  $C = \ln y_0$  sehingga

$$\ln y - \ln y_0 = kt$$

$$\ln \frac{y}{y_0} = kt \quad (3)$$

Sehingga diperoleh

$$y = y_0 e^{kt} \quad (4)$$

Keterangan

$y$  = populasi Persentase Perempuan yang Pernah Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) (Persen) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2026 tahun  $t$

$y_0$  = populasi Persentase Perempuan yang Pernah Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) (Persen) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2026 tahun dasar

$t$  = waktu

Ketika  $k > 0$ , tipe pertumbuhan ini disebut pertumbuhan eksponensial, dan ketika  $k < 0$  disebut peluruhan eksponensial.

### b. Data BPS (oke)

Tabel 1. Data Persentase Perempuan yang Pernah Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) (Persen)

Wilayah	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sumba Barat	4.59	4.57	5.6	4.15	6.28	7.11
Sumba Timur	8.65	10.12	11.22	7.54	13.21	8.04
Kupang	3.19	6.91	8.15	5.44	5.66	5.87
Timor Tengah Selatan	4.57	6.86	8.29	5.02	4.56	3.35
Timor Tengah Utara	3.86	9.61	8.11	5.14	3.17	7.47
Belu	7.52	8.15	10.34	5.14	6.42	8.09
Alor	5.08	5.93	6.65	5.07	5.06	4.02
Lembata	3.77	1.95	3.29	3.70	3.48	2.52
Flores Timur	2.62	2.49	2.64	4.55	2.01	3.23
Sikka	2.19	2.58	6.28	3.61	2.91	4.13
Ende	3.44	4.66	5.38	3.38	5.42	5.54
Ngada	0.47	0.78	1.99	1.67	2.57	2.84
Manggarai	3.02	4.59	8.44	6.39	5.03	5.89
Rote Ndao	3.89	6.6	7.55	4.12	5.16	8.74
Manggarai Barat	2.51	9.38	8.31	8.28	2.14	7.28
Sumba Tengah	6.22	6.34	11.59	7.69	5.98	6.23
Sumba Barat Daya	5.06	6.58	8.48	8.16	8.81	5.80
Nagekeo	1.50	4.02	2.77	1.03	1.15	1.81
Manggarai Timur	3.07	3.77	5.42	6.64	3.46	7.07
Sabu Raijua	2.71	6.23	8.27	7.67	10.64	5.57
Malaka	3.97	4.87	4.19	4.17	7.06	3.79
Kota Kupang	3.40	3.97	3.34	2.60	5.57	3.28
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3.82</b>	<b>5.55</b>	<b>6.67</b>	<b>5.06</b>	<b>5.11</b>	<b>5.26</b>

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Source Url: <https://ntt.bps.go.id/indicator/30/615/1/persentase-perempuan-yang- pernah-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-.html>

Access Time: January 17, 2022, 3:48 pm

<https://ntt.bps.go.id/indicator/30/615/2/persentase-perempuan-yang- pernah-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-.html>

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menyatakan bahwa jumlah populasi perempuan kawin di bawah umur atau kawin dibawah umur 17 tahun di provinsi NTT dari tahun 2015 sampai 2020 adalah: tahun 2015 sebanyak 3,82 %, tahun 2016 sebanyak 5,55%, tahun 2017 sebanyak 6,67%, tahun 2018 sebanyak 5,06%, tahun 2019 sebanyak 5,11%, dan tahun 2020 sebanyak 5,26%. Rata-rata jumlah populasi perempuan kawin dibawah umur provinsi NTT dari tahun 2015 sampai 2020 adalah 5,25%.

### 1. Penerapan Model Eksponensial

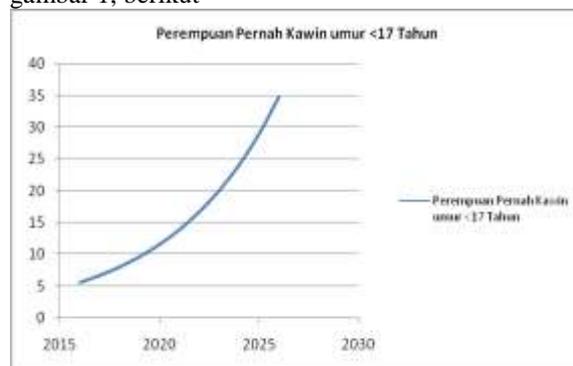
Pada tabel 1 di atas, untuk populasi jumlah perempuan pernah kawin di dibawah umur (kurang dari 17 tahun) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data BPS jumlah perempuan kawin di bawah umur

Tahun	Perempuan yang pernah kawin di bawah umur < 17 tahun
2016	5.55
2017	6.67
2018	5.06
2019	5.11
2020	5.26

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret  
Source Url: <https://ntt.bps.go.id/indicator/30/615/1/persentase-perempuan-yang-pernah-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-.html>  
Access Time: January 17, 2022, 3:48 pm

Jumlah populasi perempuan pernah kawin di bawah umur atau kawin dibawah umur 17 tahun di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari tahun 2016 sampai 2020 adalah: tahun 2016 sebanyak 5,55%, tahun 2017 sebanyak 6,67%, tahun 2018 sebanyak 5,06 %, tahun 2019 sebanyak 5,11%, dan tahun 2020 sebanyak 5,28% dan rata-rata jumlah populasi yang kawin dibawah umur (umur kurang dari 17 tahun) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 5,53%. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar 1, berikut



Gambar 1. Perempuan Pernah Kawin umur <17 tahun di Provinsi NTT tahun 2015 sampai tahun 2020

### Model Eksponensial 1

Mencari nilai k berdasarkan data 2016 ke 2017, maka  $t = 1$ . Diperoleh model eksponensial, sebagai berikut

$$y = y_0 e^{kt}$$

$$6,67 = 5,55 e^k$$

$$k = \ln \left( \frac{6,67}{5,55} \right)$$

$$k \approx 0.183822$$

pada saat  $t = 1$ , maka

$$y = y_0 e^{kt}$$

$$y = 5,55 e^{0.183822(1)}$$

$$y = 5,55 e^{0.183822}$$

Dasar acuan tahun yang digunakan yaitu tahun 2016 yakni dengan persentase jumlah populasi perempuan pernah kawin di bawah umur 17 tahun di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan  $y = 6,67$ , dengan  $y_0 = 5,55$ , dan nilai

$k \approx 0.373548$  sehingga diperoleh rumus untuk model eksponensial yaitu

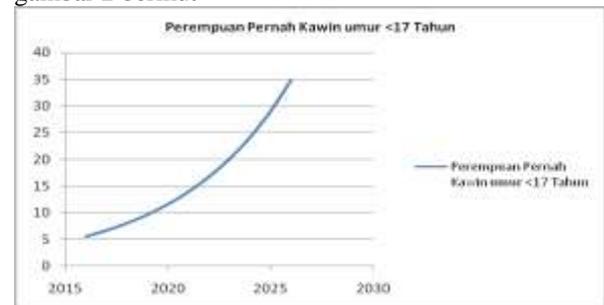
$$y = 5,55 e^{0.183822} \quad (5)$$

Berdasarkan (5) di atas, maka diperoleh data proyeksi populasi persentase perempuan pernah kawin di bawah umur (< umur 17 tahun) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Proyeksi menggunakan model eksponensial 1

Tahun	t	$y_0$	nilai e	proyeksi
2016	0	5.55	0.183822	5.55
2017	1	5.55	0.183822	6.67
2018	2	5.55	0.183822	8.016
2019	3	5.55	0.183822	9.634
2020	4	5.55	0.183822	11.58
2021	5	5.55	0.183822	13.91
2022	6	5.55	0.183822	16.72
2023	7	5.55	0.183822	20.1
2024	8	5.55	0.183822	24.15
2025	9	5.55	0.183822	29.03
2026	10	5.55	0.183822	34.88

Pada tahun 2026 jumlah populasi perempuan kawin di bawah umur (umur kurang dari 17 tahun) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan rumus model eksponensial, ketika  $t=10$ , maka  $y = 34,88$ . Hal ini, berdasarkan model perhitungan model eksponensial mengalami peningkatan sebanyak 34,88. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar 2 berikut



Gambar 2. Proyeksi Perempuan pernah kawin di bawah umur (< 17 tahun) di Kabupaten Alor

## 4. KUTIPAN DAN ACUAN

### 1. Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa ‘‘untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material’’

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

- hamil diluar nikah, faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas,

sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya dimana anaknya diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tanpa dapat membedakan mana teman yang baik dengan teman yang justru menjerumuskan dirinya. Hal tersebut sering dimanfaatkan oleh para remaja yang mendapat peluang tersebut untuk bebas melakukan apa saja termasuk hubungan asmara yang sebenarnya belum pantas untuk dilakukan oleh remaja tersebut. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat (Teguh Surya Putra, 2013). Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat (Pustaka Setia, 201).

- (b) faktor ekonomi, tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan (Teguh Surya Putra, 2013).
- (c) faktor pendidikan, Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah (Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan., h. 120.). Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor

dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya (Nita Fatmawati, 2016).

- (d) Kekhawatiran orang tua, Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut (Nita Fatmawati, 2016).
- (e) peranan media masa, Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada filem atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang "layak jual" untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik (Bambang Samsul Arifin, 2015).

## 2. Persamaan Diferensial Linier

Cara mencari penyelesaian sistem persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan terutama berukuran  $2 \times 2$  yang berbentuk :

$$\dot{x}_1(t) = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + f_1(t) \quad (6)$$

$$\dot{x}_2(t) = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + f_2(t)$$

di mana koefisien  $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$  dan fungsi-fungsi  $f_1, f_2$  semua merupakan fungsi dari  $t$  yang kontinu pada suatu interval  $I$  dan  $x_1$  dan  $x_2$  adalah fungsi dari  $t$  yang tidak diketahui.

Metode paling dasar untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial dalam dua fungsi yang tak diketahui dan dengan koefisien konstanta adalah metode eliminasi. Tujuan metode ini adalah mengubah sistem persamaan diferensial yang diberikan ke suatu persamaan diferensial tunggal dalam suatu fungsi yang tak diketahui dengan mengeliminasi variabel bebas lainnya.

Jika koefisien  $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$  semuanya konstanta dan fungsi-fungsi  $f_1, f_2$  identik dengan nol, maka sistem persamaan diferensial (6) dari sub sebelumnya dapat disederhanakan ke dalam bentuk :

$$(a) \quad \frac{dx}{dt} = ax + by \quad (7)$$

$$(b) \quad \frac{dy}{dt} = cx + dy$$

Atau dinyatakan dalam bentuk matriks :

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}(t) \mathbf{x} ; \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Dari persamaan (7a) diperoleh

$$y = \frac{1}{b} \frac{dx}{dt} - \frac{a}{b} x \quad (8)$$

Turunkan persamaan pertama dari (7 a) terhadap  $t$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= a \frac{dx}{dt} + b \frac{dy}{dt} = a \frac{dx}{dt} + b(cx + dy) \\ &= a \frac{dx}{dt} + bcx + d\left(\frac{1}{b} \frac{dx}{dt} - \frac{a}{b} x\right) \\ &= (a + d) \frac{dx}{dt} - (ad - bc)x \\ \frac{d^2 x}{dt^2} - (a + d) \frac{dx}{dt} + (ad - bc)x &= 0 \end{aligned} \quad (9)$$

Persamaan karakteristik (9) adalah

$$\lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = 0 \quad (10)$$

memberikan

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(a + d) \pm \frac{1}{2} \sqrt{(a + d)^2 - 4(ad - bc)} \quad (11)$$

$$= \frac{1}{2}(p \pm \sqrt{p^2 - 4q}) ; p = (a + d), q = (ad - bc)$$

Solusi umum persamaan (7a) adalah

$$x(t) = c_1 \exp(\lambda_1 t) + c_2 \exp(\lambda_2 t)$$

Turunkan persamaan ini dan hasilnya disubstitusikan ke dalam persamaan (8)

$$\frac{dx}{dt} = \lambda_1 c_1 \exp(\lambda_1 t) + \lambda_2 c_2 \exp(\lambda_2 t)$$

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{b} \frac{dx}{dt} - \frac{a}{b} x \\ &= \frac{1}{b} \{ \lambda_1 c_1 \exp(\lambda_1 t) + \lambda_2 c_2 \exp(\lambda_2 t) \} - \frac{a}{b} \{ c_1 \exp(\lambda_1 t) + c_2 \exp(\lambda_2 t) \} \end{aligned}$$

$$y(t) = c_1 \frac{1}{b} (\lambda_1 - a) \exp(\lambda_1 t) + c_2 \frac{1}{b} (\lambda_2 - a) \exp(\lambda_2 t)$$

Dengan demikian sistem persamaan diferensial yang dinyatakan dalam persamaan (7) di atas mempunyai solusi :

$$(a) \quad x(t) = c_1 \exp(\lambda_1 t) + c_2 \exp(\lambda_2 t) \quad (12)$$

(b)

$$y(t) = c_1 \frac{1}{b} (\lambda_1 - a) \exp(\lambda_1 t) + c_2 \frac{1}{b} (\lambda_2 - a) \exp(\lambda_2 t)$$

Atau dinyatakan dalam bentuk matriks :

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \exp(\lambda_1 t) + c_2 \exp(\lambda_2 t) \\ c_1 \frac{1}{b} (\lambda_1 - a) \exp(\lambda_1 t) + c_2 \frac{1}{b} (\lambda_2 - a) \exp(\lambda_2 t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = c_1 \exp(\lambda_1 t) \begin{bmatrix} 1 \\ (\lambda_1 - a)/b \end{bmatrix} + c_2 \exp(\lambda_2 t) \begin{bmatrix} 1 \\ (\lambda_2 - a)/b \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = c_1 \exp(\lambda_1 t) \begin{bmatrix} b \\ \lambda_1 - a \end{bmatrix} + c_2 \exp(\lambda_2 t) \begin{bmatrix} b \\ \lambda_2 - a \end{bmatrix} \quad (14)$$

atau

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \exp(\lambda_1 t) & b \exp(\lambda_2 t) \\ (\lambda_1 - a) \exp(\lambda_1 t) & (\lambda_2 - a) \exp(\lambda_2 t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Kedua vektor kolom pada ruas kanan persamaan (14) masing-masingnya disebut vektor eigen dan matriks pertama pada ruas kanan persamaan (15) disebut matriks fundamental.

### 3. Model Pertumbuhan Eksponensial

Secara umum model populasi seperti pada persamaan berikut

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{laju lahir} \\ \text{besarnya populasi} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \text{laju lahir} \\ \text{kelahiran} \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{l} \text{laju mati} \\ \text{kematian} \end{array} \right\} \quad (16)$$

Persamaan (16) di atas akan dikembangkan dengan asumsi-asumsi serta setelah itu, proses kelahiran dan kematian dinyatakan sebagai simbol.

Ketika kita menjumpai populasi besar dalam kasus-kasus tertentu, diasumsikan bahwa individu pada suatu populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk lahir dan anggaplah bahwa populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk mati dalam interval waktu tertentu. Misalkan laju kelahiran perkapita  $\beta$  perkapita waktu dan laju kematian  $\alpha$  perkapita waktu merupakan asumsi-asumsi yang masuk akal.

Misalkan jumlah populasi pada saat  $t$  adalah  $Y(t)$  dan populasi awal bernilai  $y_0$  dengan laju kelahiran perkapita  $\beta$  perkapita waktu dan laju kematian  $\alpha$ . Asumsikan bahwa penduduk hanya dapat berubah karena kelahiran dan kematian. Imigrasi dan Emigrasi diabaikan.

Karena laju kelahiran perkapita  $\beta$  diasumsikan konstanta maka laju kelahiran keseluruhan setiap waktu adalah laju kelahiran per-kapita dikalikan besarnya populasi saat itu. Laju kematian keseluruhan setiap waktu adalah laju kematian perkapita dikalikan besarnya populasi saat itu.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{laju lahir} \\ \text{kelahiran} \end{array} \right\} = \beta Y(t)$$

(17)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{laju mati} \\ \text{kematian} \end{array} \right\} = \alpha Y(t)$$

Dari persamaan (17) di atas diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{dY}{dt} &= \beta Y - \alpha Y \\ \frac{dY}{dt} &= (\beta - \alpha)Y \end{aligned} \quad (18)$$

Dengan catatan  $Y(t)$  ditulis sebagai  $Y$ . Artinya  $Y$  terhadap  $t$ .

Sekarang sudah diperoleh persamaan diferensial yang menyatakan laju perubahan populasi  $Y(t)$ . Dengan demikian diperlukan kondisi awal untuk memperoleh suatu penyelesaian tunggal. Menyelesaikan persamaan 7) untuk populasi yang kontinu. Misalkan  $r = \beta - \alpha$ , maka

$$\frac{dY}{dt} = rY$$

Kita menyelesaikan bahwa  $r$  adalah laju pertumbuhan atau laju pertumbuhan atau laju reproduksi populasi  $\frac{dY}{Y} = r dt$

$$\int \frac{1}{Y} dY = \int r dt$$

$$\ln Y = rt + C$$

$$Y(t) = e^{rt+C}$$

$$Y(t) = e^{rt} e^C$$

dengan  $e^C = K$

Maka

$$Y(t) = e^{rt} K$$

$$Y(t) = K e^{rt}$$

Dengan menerapkan kondisi awal  $Y(t) = y_0$  untuk memperoleh nilai konstanta, maka diperoleh penyelesaian persamaan diferensial

$$Y(t) = y_0 e^{rt} \quad (19)$$

Dari persamaan (19), terdapat tiga kasus

$r > 0$ , jika  $t \rightarrow \infty$ , maka  $Y(t)$  mendekati tak hingga.

$r = 0$ , jika  $t \rightarrow \infty$ , maka  $Y(t) = y_0$  adalah.

$r < 0$ , jika  $t \rightarrow \infty$ , maka  $Y(t)$  mendekati nol.

#### 4. KESIMPULAN

Proyeksi pada tahun 2026 jumlah populasi perempuan pernah kawin di bawah umur (umur kurang dari 17 tahun) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan rumus model eksponensial, ketika  $t=10$ , maka  $y = 34,88$ . Hal ini, berdasarkan model perhitungan model eksponensial mengalami peningkatan sebanyak 34,88. Hal ini akan berdampak pada lintas bidang yaitu meledaknya jumlah penduduk, kemiskinan, terganggunya stabilitas ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, stabilitas keamanan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, kasus perselingkuhan dan lain-lainnya yang berdampak secara negatif.

#### 5. SARAN

Semua elemen mestinya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi populasi jumlah perempuan kawin di bawah umur. Pembatasan terhadap pergaulan bebas, memperhatikan secara serius usia sekolah anak remaja, membimbing dan menasihati anak remaja dan mengarahkan pada kegiatan-kegiatan religious dan atau kegiatan lainnya yang berpotensi pada pengembangan karakter remaja, menuju pada cara berpikir yang bisa membentuk mereka berpikir akan nasib dan masa depan mereka.

#### 6. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua, adik-adik, istri dan ketiga anak: Angel, Gerald, dan Sean, semua keluarga besar, seluruh civitas akademika UNTRIB, sahabat, dan pembaca atas segala saran dan kritikan demi penyempurnaan penulisan ini.

#### 7. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2020). *Enhancing the Revisit Intention of Nature-Based Tourism in Indonesia: The Management and Business Research Quarterly Enhancing the Revisit Intention of Nature-Based Tourism in Indonesia: The Role of Memorable Tourism Experience and Satisfaction*. (January). <https://doi.org/10.32038/mbrq.2019.11.02>
- Castillo-Chavez, C. dan Capurro, A.F., 2000. *A Model for Tuberculosis with Exogenous Reinfection, Theoretical Population Biology*, 57, hal 235-247
- Davies, A. And G. Quinlivan. 2006. *A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human*

*Development, Journal of Socioeconomics*, New York

- Degeng, W.I. (2007). *Kalkulus Lanjut Persamaan Diferensial dan aplikasinya*. Jakarta: Graha Ilmu
- Ginting, C.K. (2008) "*Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia*". Tesis Master, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Harianto, W. (2017). *Jurnal Aplikasi Persamaan Diferensial Model Populasi Kontinu Pada Pertumbuhan Penduduk Kediri*. Artikel Skripsi. [Online]. Tersedia
- Varberg, dkk. (2008). *Kalkulus Edisi Kesembilan*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- <https://alorkab.bps.go.id/indicator/26/80/1/indeks-pembangunan-manusia.html> akses kamis, 18 nopember 2021
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm. 2.
- Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12.
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182.)
- Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)," Dalam *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.
- Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.

## PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS *PROJECT BASED LEARNING* PADA MATERI PENCEMARAN AIR DI SMP PONTIANAK

Oleh :

Resha Meisya Ariana<sup>1)</sup>, Rahmat Rasmawan<sup>2)</sup>, Rody Putra Sartika<sup>3)</sup>, Hairida<sup>4)</sup> dan Erlina<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak

<sup>1</sup>email: reshameisyaariana@student.untan.ac.id

<sup>2</sup>email: rahmat.rasmawan@fkip.untan.ac.id

<sup>3</sup>email: rody.putra.sartika@fkip.untan.ac.id

<sup>4</sup>email: hairida@fkip.untan.ac.id

<sup>5</sup>email: erlina@fkip.untan.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis *Project Based Learning* (PjBL) dan respon peserta didik dan pendidik terhadap LKPD berbasis *PjBL* pada materi Pencemaran Air di SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah *Research & Development* (R&D) penelitian dan pengembangan dengan model ADDIE. Model ADDIE terdiri dari 5 tahap yaitu *Analyze* (Analisis), *Design* (Desain), *Development* (pengembangan), *Implementation* (Implementasi), dan *Evaluation* (Evaluasi). Akan tetapi dalam penelitian ini hanya dilakukan tiga tahap yaitu: analisis, desain dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kelayakan LKPD berbasis *PjBL* pada materi Pencemaran Air untuk SMP kelas VII mendapatkan persentase rata-rata 97% dengan kategori sangat valid. Ditinjau dari aspek isi, penyajian, grafis dan kebahasaan. Respon peserta didik memperoleh persentase rata-rata sebesar 87% dengan kategori sangat baik dan respon pendidik memperoleh persentase rata-rata sebesar 89% dengan kategori sangat baik. This shows that the *PjBL*-based LKPD that was developed is suitable to be used to teach Water Pollution materials.

**Kata Kunci:** Pengembangan, LKPD, *Project Based Learning* (PjBL), Pencemaran Air.

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas baik dari segi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan demikian harus memiliki strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Agar pendidikan dapat ditingkatkan dengan baik, hal yang perlu dilakukan seperti dengan meningkatkan fasilitas dalam pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan anggaran pendidikan. Kurikulum pembelajaran seharusnya sesuai dengan perkembangan zaman makan yang harus digunakan kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran abad 21, bahwa peserta didik harus memiliki keterampilan dalam pembelajaran pada abad 21 adalah *Critical Thinking, Creativity, Collaboration and Communication* (4C). Dengan demikian pembelajaran ditantang sesuai dengan kurikulum 2013 bahwa peserta didik memiliki kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) (Bialik & Fadel, 2015).

Berdasarkan kajian dilapangan pencemaran air yang terjadi di Pontianak sangat memprihatinkan sekali dengan air sungai yang kotor yaitu berwarna

coklat oleh aktivitas pembuangan limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah rumah sakit dan masih banyak lagi. Dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak lagi dapat menikmati air bersih (Febrianti, 2014; Saragih, 2018). Aktivitas seperti ini dapat membuat penurunan kualitas air sungai, karena dapat menghasilkan limbah yang memberikan sumbangan paling banyak ke sungai. Berdasarkan hal ini bahwa pembelajaran dapat melakukan kontribusi dalam membuat suatu proyek untuk meminimalisirkan pencemaran tersebut. Bahwa materi pencemaran air pada kelas VII merupakan salah satu materi yang cocok digunakan pada LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL). Dengan melakukan sebuah proyek menjernihkan air dengan menggunakan bahan dasar arang karbon aktif dari tempurung kelapa, arang karbon aktif ini dapat menyerap partikel-partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat di air. Dengan hal ini peserta didik dapat meningkatkan keterampilan serta pengetahuannya.

Berdasarkan hasil wawancara pendidik mata pelajaran IPA di SMPN 12, SMPN 13, dan SMPN 17 Pontianak, pada bulan November 2020 bahwa informasi yang didapatkan bahwa pendidik

melakukan proses pembelajaran berstruktur proyek yang melibatkan peserta didik. Sehingga bahan ajar atau LKPD pendukung yang melibatkan kegiatan mengerjakan proyek juga belum pernah digunakan. Diketahui melalui wawancara pendidik menginginkan LKPD IPA yang menyediakan kegiatan proyek bagi peserta didik, namun pendidik belum dapat membuat LKPD sendiri. Pendidik selama ini hanya menggunakan LKPD dari buku paket atau dari sekolah. Hal ini disebabkan kegiatan pembelajaran dalam lembar kerja kurang bervariasi karena pendidik juga hanya mengarahkan untuk mencatat kembali bacaan yang ada di lembar kerja, serta dalam pengerjaan soal-soal peserta didik hanya mengamati gambar pada lembar kerja lalu menjawab soal-soal yang ada. Menurut (Andi, 2014) LKPD sebenarnya bisa dibuat sendiri oleh pendidik yang bersangkutan, sehingga LKPD dapat lebih menarik serta lebih kontekstual dengan situasi dan kondisi sekolah ataupun lingkungan peserta didik. Di samping itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada peserta didik (Fathurrohman, 2015). LKPD juga yang digunakan tidak mengandung enam unsur utama bahan ajar LKPD yang meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja dan penilaian (Andi, 2012). Oleh karena itu, pembelajaran sangat monoton dan membosankan. Serta membuat peserta didik tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap lingkungannya sekitar. Bahwa fungsi LKPD ini sebagai media yang dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi melalui urutan langkah yang telah dirancang sebelumnya dan peserta didik dapat mengekspresikan kemampuannya dalam memecahkan masalah (Prastowo, 2013). LKPD merupakan suatu hal yang dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. LKPD yang dibuat secara menarik dan sistematis dapat membantu peserta didik untuk belajar lebih aktif secara mandiri maupun berkelompok (Dezricha Fannie & Rohati, 2014). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pencemaran air merupakan salah satu materi dalam pembelajaran IPA. Kompetensi Dasar (KD) 4.8 peserta didik diminta membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan.

Dengan tujuan agar peserta didik dapat meningkatkan keterampilannya serta pengetahuannya.

Salah satu model pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari adalah model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) atau model pembelajaran berbasis proyek (Ika, 2013). LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL) dalam penelitian ini adalah lembaran yang berisikan tahapan pembelajaran untuk menyelesaikan tugas proyek yang dikerjakan oleh peserta didik pada materi pencemaran air di kelas VII. *Project Based Learning* (PjBL) ini sebagai model pembelajaran yang sangat sesuai dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan belajar pada peserta didik. Dengan melalui serangkaian kegiatan merancang produk, melaksanakan proyek, dan menghasilkan suatu produk, yang akan dikumpulkan dalam satu wadah yaitu berupa produk pembelajaran (Abidin, 2014). *Project Based Learning* (PjBL) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan hasil belajar afektif yaitu dengan nilai 85% dan hasil belajar psikomotorik dengan nilai 94% peserta didik tuntas (Addin et al., 2014). Rancangan bahan ajar harus seimbang dengan kurikulum 2013. Penilaian dalam hasil belajar peserta didik mencakup pada aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap. Dalam hal ini sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan (Permendikbud, 2016).

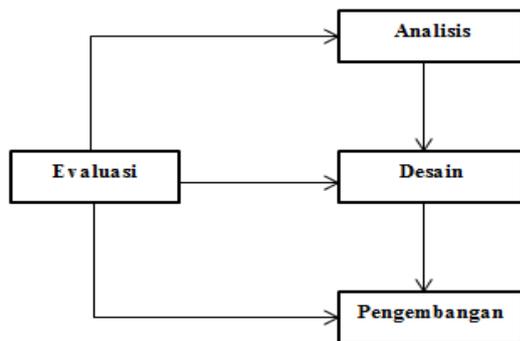
Tujuan penelitian ini untuk melihat kevalidan LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL) pada materi pencemaran air di SMPN Pontianak dan uji respon peserta didik dan pendidik.

## 2. METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021, bertempat di SMPN 12, SMPN 13 dan SMPN 17 Pontianak. Pada penelitian ini dilakukan 2 tahap uji, yaitu uji terbatas dan uji meluas. Pada tahap uji terbatas dilakukan terhadap 9 orang peserta didik kelas VII. Dari 9 orang peserta didik diambil masing-masing 3 dari sekolah yang berbeda. Pada uji meluas melibatkan 36 orang peserta didik dan 3 orang pendidik. Dari 36 orang peserta didik ini diambil 12 orang peserta didik dan 1 pendidik masing-masing dari sekolah SMPN 12, SMPN 13 dan SMPN 17 Pontianak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau *Research and Development* (R&D). Metode ini digunakan untuk menghasilkan

sebuah produk, dan mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan (Sudaryono, 2017). Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahap yaitu *Analyze* (Analisis), *Design* (Desain), *Development* (Pengembangan), *Implementation* (Implementasi), dan *Evaluation* (Evaluasi) (Tegeh & Made Dkk, 2014). Adapun desain penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini disajikan pada gambar 1.



**Gambar 1. Skema Model ADDIE yang dilaksanakan Dalam Penelitian**

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi tidak langsung. Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan angket. Angket pada penelitian ini berupa lembar penilaian kevalidan LKPD dan angket respon peserta didik dan pendidik terhadap LKPD Pencemaran Air berbasis *Project Based Learning* (PjBL). Validasi kelayakan LKPD ini dinilai oleh masing-masing tiga orang ahli dalam bidangnya dari dosen dan guru yaitu 3 orang ahli materi, 3 orang ahli media dan 3 orang ahli bahasa. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar penilaian kevalidan dan angket respon peserta didik dan pendidik, tujuannya untuk mengetahui pendapat dan saran perbaikan sebelum produk digunakan.

Prosedur penelitian pengembangan LKPD mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam model pengembangan ADDIE, tetapi yang dilakukan hanya tiga langkah yaitu *Analyze*, *Design*, dan *Development* dibawah ini sebagai berikut:

Tahap *Analyze* (Analisis) tahap ini dilakukan dengan berbagai analisis, diantaranya analisis kebutuhan, analisis kesenjangan kinerja dan analisis kurikulum. Analisis kebutuhan menganalisis kebutuhan sekolah yang dapat menunjang atau meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Kebutuhan yang diperlukan terkait dalam bahan ajar. Maka dilakukanlah penentuan bahan ajar yang perlu dikembangkan untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Analisis

kesenjangan kinerja dilakukan dengan merumuskan Kompetensi Dasar (KD) serta indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Analisis kurikulum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kurikulum yang digunakan di sekolah. Hal ini sesuai dengan tuntutan kurikulum yang digunakan di SMPN 12, SMPN 13, dan SMPN 17 Pontianak adalah kurikulum 2013. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan dengan kondisi yang akan diharapkan.

Tahap *Design* (Desain) adalah membuat sesuatu yang baru yang lebih menarik untuk mengembangkan serta meningkatkan program pembelajaran (Prawiradilaga & Dewisalma, 2014). Pada penelitian ini yaitu melakukan pembuatan storyboard, yaitu rancangan atau konsep LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL), pengumpulan referensi dan pembuatan desain produk yang akan dikembangkan yaitu berupa LKPD Pencemaran Air berbasis *Project Based Learning* (PjBL). Selanjutnya membuat lembar penilaian untuk uji kevalidan dan uji respon peserta didik dan pendidik.

Tahap *Development* (Pengembangan) ini melakukan pembuatan LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL) pada materi Pencemaran Air, yang sebelumnya sudah dibuat pada tahap *design* yaitu berupa rumusan indikator, materi, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan kemudian dimasukkan kedalam LKPD yang akan digunakan. Selanjutnya melakukan validasi ahli. Validasi ahli ini melibatkan ahli materi, ahli media dan ahli bahasa. Aspek penilaian masing-masing ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan. Pada penelitian ini ahli yang dilibatkan untuk satu segi adalah tiga orang, misalnya untuk ahli materi melibatkan tiga orang ahli, begitu pula dari segi media dan bahasa. Pada tahap ini bertujuan untuk melihat kevalidan dari media yang dikembangkan yaitu LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL). Setelah LKPD dianggap valid, tahap selanjutnya melakukan revisi formatif pada tahap ini yaitu melakukan revisian produk sebelum di implementasikan. Terdapat dua tahap pada *formative evaluation*, yang pertama uji terbatas dan yang kedua uji meluas. Keseluruhan hasil dari tahap pengembangan ini adalah produk atau *learning resources* (sumber belajar) yang akan diimplementasikan. Tujuan dari tahap ini untuk mengetahui respon dan tanggapan peserta didik dan pendidik terhadap LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL) yang telah dikembangkan.

Uji terbatas merupakan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pada produk yang sudah dibuat serta sudah dinilai oleh para ahli. Jumlah peserta didik pada uji coba terbatas yang optimal yaitu diantara 8 sampai 20 . Dengan demikian, subjek uji coba terbatas dalam pengembangan LKPD ini melibatkan 9 orang peserta didik. Dari 9 orang peserta didik ini diambil masing-masing 3 orang peserta didik dari sekolah yang berbeda.

Uji meluas merupakan tahap dimana menentukan produk yang telah dikembangkan dapat digunakan dalam proses pembelajaran atau tidak. Setelah produk yang dihasilkan telah direvisi berdasarkan masukan yang diberikan pada uji terbatas, produk akan dilakukan uji meluas pada proses belajar mengajar (Atwi-Suparman, 2012). Dengan demikian uji coba skala besar dalam pengembangan LKPD ini melibatkan 36 orang peserta didik dan 3 orang pendidik. Dari 36 orang peserta didik ini diambil 12 orang peserta didik dan 1 orang pendidik masing-masing dari sekolah yang berbeda. Dengan diambil berdasarkan peserta didik yang berkemampuan rendah, sedang dan tinggi.

Penerapan revisi formatif ini dapat menghindari terjadinya kesalahan pada LKPD yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar (Pribadi & A. Benny, 2014).

Setelah dilakukan penilaian kevalidan dari para ahli, respon peserta didik dan pendidik. Selanjutnya melakukan perhitungan sebagai berikut: menghitung frekuensi skor penilaian tiap-tiap pernyataan, menghitung skor total tiap-tiap pernyataan dan menghitung persentase perolehan skor tiap pernyataan. Setiap aspek memiliki skor maksimal 4 dan minimal 1. Adapun rumus untuk menghitung persentase perolehan skor tiap pernyataan sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum X}{\sum Xi} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase perolehan skor

$\sum X$  = Jumlah perolehan skor (skor total) tiap pernyataan

$\sum Xi$  = Jumlah skor ideal (skor tertinggi)

Untuk mengetahui kevalidan pada LKPD Pencemaran Air berbasis *Project Based Learning* (PjBL) yang akan dikembangkan. Rumus yang digunakan dalam menghitung rata-rata kevalidan secara keseluruhan sebagai berikut:

$$V = \frac{\sum P}{n}$$

Keterangan:

V = Persentase rata-rata kevalidan

$\sum P$  = Jumlah rata-rata persentase skor tiap aspek

n = Jumlah aspek yang dinilai

Setelah didapatkan hasil persentase keseluruhan dari tiap-tiap pernyataan, kemudian diinterpretasikan kevalidan produk dengan kategori pada tabel 1.

**Tabel 1. Kategori Uji Kevalidan**

Persentase (%)	Kategori
Angka 85-100	Sangat Valid
Angka 70-85	Cukup Valid
Angka 50-70	Kurang Valid
Angka 01-50	Tidak Valid

(Riduwan & Sunarto, 2011)

Untuk mengetahui persentase total respon peserta didik dan pendidik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_{total} = \frac{\sum P}{n}$$

Setelah didapatkan persentase total respon peserta didik dan pendidik, kemudian diinterpretasikan hasil respon dengan kategori pada tabel 2.

**Tabel 2. Kategori Uji Respon Peserta Didik dan Pendidik**

Persentase (%)	Kategori
Angka 0-20	Sangat Buruk
Angka 21-40	Buruk
Angka 41-60	Cukup
Angka 61-80	Baik
Angka 81-100	Sangat Baik

(Akdon & Riduwan, 2013)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pertama dalam pengembangan ini adalah *analyze*(analisis), yaitu analisis kebutuhan, analisis kesenjangan kinerja dan analisis kurikulum. Berdasarkan hasil wawancara pendidik mata pelajaran IPA di SMPN 12, SMPN 13, dan SMPN 17 Pontianak, bahwa informasi yang didapatkan terdapat di LKPD yang digunakan oleh pendidik, pendidik hanya menggunakan LKPD dari jasa penerbit atau dari buku paket dan pendidik juga belum pernah memberikan tugas yang dilakukan secara kelompok diluar kelas. LKPD tersedia terdapat berbagai kelemahan, seperti tampilan pada LKPD yang digunakan kurang menarik, dan juga isi LKPD masih sangat sederhana. Oleh karena itu, pembelajaran sangat monoton dan membosankan serta peserta didik tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap lingkungannya sekitar. Kompetensi Dasar (KD) pada materi Pencemaran Air yaitu KD 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran dilingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Sehingga diperlukannya suatu

media pembelajaran yang sesuai terhadap tujuan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran sesuai seperti yang diharapkan pada kurikulum 2013.

Langkah selanjutnya adalah tahap *design*(desain), tahap ini melakukan pembuatan desain produk LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL) pada materi Pencemaran Air. Seperti desain sampul, isi dan tampilan LKPD. Kemudian membuat angket penilaian untuk uji kevalidan LKPD dan uji respon peserta didik dan pendidik. Adapun batasan materi dan capaian pembelajaran dengan indikator pembelajaran pada 4.8.1 melakukan pembuatan karbon aktif dari tempurung kelapa, 4.8.2 membuat desain rancangan penjernihan air, 4.8.3 melakukan penjernihan air, dan 4.8.4 menuliskan hasil pengamatan berdasarkan proyek yang telah dilakukan. Dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Batasan Materi dan Capaian Pembelajaran pada LKPD yang dikembangkan	Batasan Materi	Capaian Pembelajaran
Komponen-komponen penjernihan air		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertanyaan mendasar tentang proses dalam menjernihkan air</li> <li>2. Mendesain perancangan proyek penjernihan air dengan menggunakan bahan dasar arang karbon aktif</li> <li>3. Menuliskan alat dan bahan yang digunakan</li> <li>4. Melakukan pembuatan arang karbon aktif dari tempurung kelapa</li> </ol>
Menerapkan hasil rancangan yang telah dilakukan		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menguji hasil dengan melakukan percobaan dalam menjernihkan air dengan menggunakan bahan dasar arang karbon aktif</li> </ol>

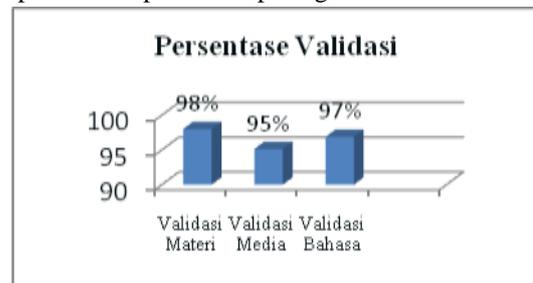
Langkah selanjutnya adalah *development* (pengembangan), pembelajaran berbasis proyek akan lebih berpusat kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilannya melalui tugas proyek yang diberikan (Safitri et al., 2020). Pada langkah-langkah model pembelajaran ini peserta didik diminta untuk merumuskan masalah dengan membuat pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, dan menguji hasil. LKPD disusun secara sistematis sesuai dengan sintak model pembelajaran yang digunakan (A. Lestari et al., 2021). Sehingga dikembangkanlah LKPD berbasis PjBL. LKPD yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Lembar Kerja Peserta Didik berbasis *Project Based Learning*

Pada tahap ini dilakukan validasi terhadap LKPD yang dikembangkan. Validasi ini melibatkan ahli materi, ahlimedia dan ahli bahasa. Ahli yang dilibatkan untuk satu segi adalah tiga orang, misalnya untuk ahli materi melibatkan tiga orang ahli, begitu pula dari segi media dan bahasa. Produk dikatakan valid apabila kriteria penilaian minimal berada pada kriteria valid (Santi & Santosa, 2016).

Hasil dari keseluruhan penialian kevalidan dari para ahli dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Hasil Validasi Produk LKPD Berbasis *Project Based Learning*

Berdasarkan pada gambar 3 bahwa hasil yang didapatkan dari validasi produk mendapatkan persentase skor rata-rata 97%, yaitu dikategorikan sangat valid. Dari validasi materi ini disesuaikan pada aspek penyajian, aspek isi dan konsep materi yang disajikan telah sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) yang ingin dicapai. Hasil nilai kevalidan materi aspek kevalidan isi dan kevalidan penyajian dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.

**Tabel 4. Data Hasil Penilaian Kevalidan LKPD Berbasis *Project Based Learning* (PjBL) Oleh Ahli Materi (Aspek Kevalidan Isi)**

Indikator Penilaian	Rata-rata Penilaian Ahli (%)	Kategori
A. Kesesuaian Materi dengan KD	100	Sangat Valid
B. Keakuratan Materi	98	Sangat Valid
C. Mendorong Keingintahuan	100	Sangat Valid
<b>Rata-rata Persentase</b>	<b>99</b>	<b>Sangat Valid</b>

**Tabel 5. Data Hasil Penilaian Kevalidan LKPD Berbasis *Project Based Learning* (PjBL) Oleh Ahli Materi (Aspek Kevalidan Penyajian)**

Indikator Penilaian	Rata-rata Penilaian Ahli (%)	Kategori
A. Teknik Penyajian	92	Sangat Valid
B. Pendukung Penyajian	98	Sangat Valid
C. Penyajian Pembelajaran	100	Sangat Valid
D. Korehensi dan Kerututan Alur Pikir	100	Sangat Valid
<b>Rata-rata Persentase</b>	<b>98</b>	<b>Sangat Valid</b>

Materi yang disajikan akurat dalam penyajian masalah dengan kehidupan nyata serta wacana dan ilustrasi yang disajikan dapat mendorong rasa keingintahuan. Penyajian dalam LKPD sangat konsistensi dalam kegiatan belajar seperti kata pengantar, petunjuk penggunaan LKPD, daftar isi dan daftar pustaka. Penilaian validasi media menunjukkan bahwa LKPD yang didesain memiliki kegrafisan yang sudah baik dari segi ilustrasi gambar, keterpaduan warna maupun tata letak serta penggunaan variasi jenis huruf yang digunakan. Penilaian validasi kebahasaan yang terdapat dalam LKPD menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan lugas, komunikatif, dialogis dan interaktif, sesuai dengan perkembangan peserta didik dan sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). Adapun masing-masing hasil validasi diuraikan sebagai berikut:

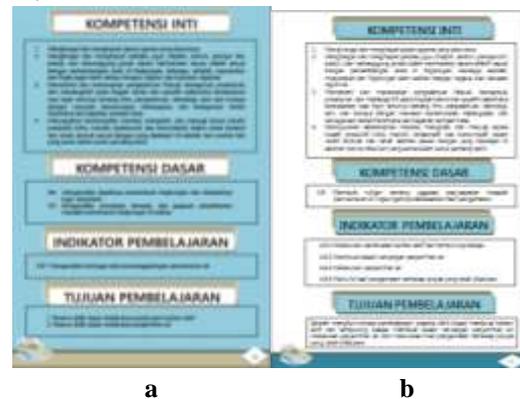
**Kevalidan Materi**

Berdasarkan hasil validasi produk pada aspek materi didapatkan nilai persentase kevalidan 98% dengan kategori sangat valid. Pada saat proses validasi terdapat saran dan perbaikan dari validator terkait penyusunan materi, KD, indikator dan gambar yang terdapat di bagian kasus. Beberapa diantaranya dapat dilihat pada gambar 4 dan 5.



**Gambar 4. a) sebelum revisi; b) setelah revisi**

Pada bagian kasus gambar yang terkait harus sesuai dengan kehidupan nyata seperti gambar pencemaran air di sungai kapuas Pontianak. Isu atau topik yang dekat dengan peserta didik dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan dapat mengarahkan peserta didik untuk lebih aktif dan terampil dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian menyatakan bahwa peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran sebagian besar tuntas dan lebih paham tentang materi yang di ajarkan. LKPD berisi gambar-gambar tentang peristiwa atau perilaku yang sering terjadi dan dilihat oleh peserta didik. Peserta didik merasa mudah untuk mempelajari materi IPA (Hairida & Setyaningrum, 2020).



**Gambar 5. a) sebelum revisi; b) setelah revisi**

Penyajian materi perlu diperhatikan KD dan indikator ketercapaian, karena KD merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu (Mulyasa, 2014).

**Kevalidan Media**

Berdasarkan validasi produk pada aspek media memperoleh persentase kevalidan 95%, yaitu dikategorikan sangat valid. Saran dan perbaikan yang diberikan validator. Bagian yang diperbaiki adalah pada gambar sampul disesuaikan dengan gambar kehidupan nyata agar sesuai dengan kehidupan sekitar peserta didik. Pada bagian kotak identitas peserta didik diberi warna yang lebih kontras dengan warna sampul, variasi warna yang digunakan harus

konsisten, tidak banyak menggunakan warna lain dan warna yang diambil warna yang selaras atau harmonis agar LKPD terlihat lebih menarik. Hasil nilai kevalidan dari ahli media dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Data Hasil Penilaian Kevalidan LKPD Berbasis *Project Based Learning* (PjBL) Oleh Ahli Media (Kegrafikan)**

Indikator Penilaian	Rata-rata Penilaian Ahli (%)	Kategori
A. Unsur Tata Letak	96	Sangat Valid
B. Keterpaduan Warna	96	Sangat Valid
C. Ilustrasi yang Harmonis dan Bermakna	94	Sangat Valid
D. Konsistensi Tata Letak	92	Sangat Valid
E. Tipografi Isi Buku Sederhana	100	Sangat Valid
<b>Rata-rata Persentase</b>	<b>95</b>	<b>Sangat Valid</b>

Setelah dilakukan perbaikan dapat dilihat perbandingan sebelum revisi dan sesudah revisi pada gambar 6.



**Gambar 6. a) Sampul sebelum revisi; b) Sampul setelah revisi**

Kemudian warna *background* (latar belakang) yang digunakan pada bagian isi LKPD sebaiknya tidak menggunakan warna agar judul dan sub judul terlihat lebih jelas. LKPD juga harus disertai dengan informasi pendukung agar dapat menunjang peserta didik untuk melakukan kerja di dalam LKPD. Setelah dilakukan perbaikan dapat dilihat perbandingan sebelum revisi dan sesudah revisi pada gambar 7.



**Gambar 7. a) sebelum revisi; b) setelah revisi**

Tampilan bahan ajar yang terlihat rapi dan menarik dapat menumbuhkan minat baca peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Bahan ajar yang menarik dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu pembelajaran (Nurrita, 2018).

**Kevalidan Bahasa**

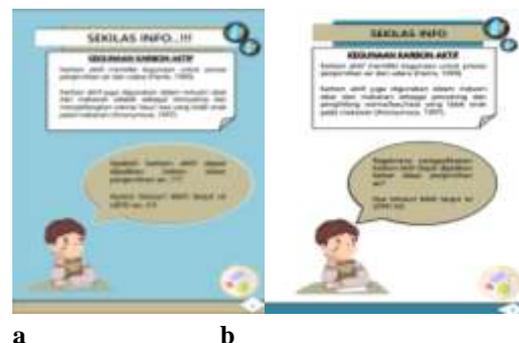
Berdasarkan hasil validasi produk pada aspek kebahasaan didapatkan persentase kevalidan 97%, dengan dikategorikan sangat valid. Hasil nilai kevalidan dari ahli bahasa dapat dilihat pada tabel 7.

Saran dan perbaikan yang diberikan validator. Bagian yang diperbaiki adalah penggunaan tanda baca seperti tanda titik (.), tanda koma (,), tanda seru (!), dan tanda tanya (?) yang tidak tepat atau berganda. Struktur kalimat tidak sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kalimat yang digunakan tidak lugas. Setelah dilakukan perbaikan dapat dilihat perbandingan sebelum revisi dan sesudah revisi pada gambar 8.

**Tabel 7. Data Hasil Penilaian Kevalidan LKPD Berbasis *Project Based Learning* (PjBL) Oleh Ahli Bahasa**

Indikator Penilaian	Rata-rata Penilaian Ahli (%)	Kategori
A. Lugas	94	Sangat Valid
B. Komunikatif	100	Sangat Valid
C. Dialogis dan Interaktif	100	Sangat Valid
D. Kesesuaian dengan Perkembangan Peserta Didik	100	Sangat Valid
E. Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa	92	Sangat Valid
<b>Rata-rata Persentase</b>	<b>97</b>	<b>Sangat Valid</b>

Saran dan perbaikan yang diberikan validator. Bagian yang diperbaiki adalah penggunaan tanda baca seperti tanda titik (.), tanda koma (,), tanda seru (!), dan tanda tanya (?) yang tidak tepat atau berganda. Struktur kalimat tidak sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kalimat yang digunakan tidak lugas. Setelah dilakukan perbaikan dapat dilihat perbandingan sebelum revisi dan sesudah revisi pada gambar 8.



**Gambar 8. a) sebelum revisi; b) setelah revisi**

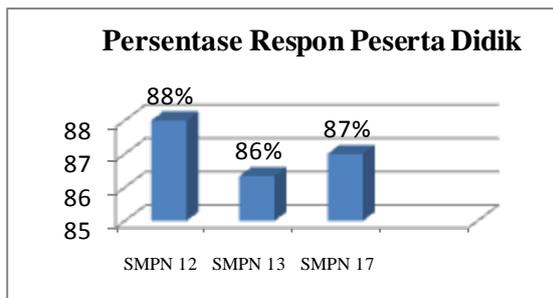
Standar bahasa dalam bahan ajar yang meliputi penggunaan bahasa yang baik dan benar

dapat mempengaruhi aktivitas belajar peserta didik (Budiono, 2014).

Setelah dilakukan validasi kevalidan produk, selanjutnya dilakukan uji respon peserta didik kelas VII SMP dan pendidik di sekolah yang berbeda.

### Respon Peserta Didik

Hasil dari angket respon peserta didik di SMPN 12, SMPN 13 dan SMPN 17 Pontianak pada LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL) pada materi Pencemaran Air dapat dilihat pada gambar 9.

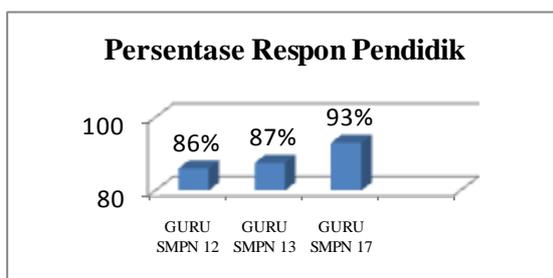


Gambar 9. Hasil Uji Respon Peserta Didik

Berdasarkan pada gambar 9 bahwa diketahui hasil persentase respon peserta didik paling tinggi mendapatkan 88%, dengan dikategorikan sangat baik. Respon peserta didik disesuaikan pada aspek kemenarikan, kemudahan dan keterpahaman. Hasil respon peserta didik menunjukkan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik berbasis *Project Based Learning* (PjBL) pada materi Pencemaran Air menarik dan mudah untuk dipahami dan digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis proyek seseorang akan belajar jauh lebih baik sebab terlihat secara aktif dalam proses belajar yakni berpikir tentang apa yang dipelajari dan kemudian menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi nyata (Siwa et al., 2013).

### Respon Pendidik

Hasil dari angket respon pendidik SMPN 12, SMPN 13 dan SMPN 17 Pontianak terhadap LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL) pada materi Pencemaran Air dapat dilihat pada gambar 10.



Gambar 10. Hasil Uji Respon Pendidik

Berdasarkan pada gambar 10 bahwa diketahui hasil persentase rata-rata respon pendidik paling tinggi mendapatkan 93%, dengan dikategorikan

sangat baik. Respon pendidik disesuaikan pada aspek materi, tampilan media dan program LKPD. Dari respon pendidik tersebut menyetujui bahwa LKPD yang dikembangkan ini dapat membantu peserta didik lebih aktif dan terampil dalam belajar. Karena melalui pembelajaran berbasis *Project Based Learning* (PjBL) peserta didik akan melibatkan kreativitas yang mereka miliki. Kreativitas diperlukan untuk menghasilkan ide-ide baru dalam rangka memecahkan masalah, membuat perbaikan, meningkatkan keefektifan dan menambah nilai (Isa & Jamil, 2012). Pendidik tidak hanya memiliki peran sebagai pemberi informasi tetapi pendidik juga dapat mendorong peserta didik dalam membangun pengetahuan (Maulina et al., 2019). Diskusi antara pendidik dan peserta didik harus dikembangkan lebih lanjut sampai tercipta keterampilan dan kegiatan baru yang meningkatkan keterampilan dan aktivitas saat ini (Hairida & Junanto, 2018).

Terdapat saran dan perbaikan dari pendidik yaitu materi yang terdapat di LKPD sebaiknya lebih diringkaskan, peletakkan objek kurang tepat. Saran ini tentunya sangat bagus untuk LKPD yang dikembangkan agar memudahkan peserta didik dalam melakukan penjernihan air dan memahami materi.

Setelah melakukan uji kevalidan dan uji respon peserta didik dan pendidik pada LKPD berbasis PjBL ini diterima dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran IPA khususnya pada materi Pencemaran Air.

## 4. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). LKPD berbasis PjBL pada materi Pencemaran Air di SMP Pontianak menunjukkan bahwa tingkat kelayakan mendapatkan persentase rata-rata sebesar 97% dengan dikategorikan sangat valid. 2). Respon peserta didik mendapatkan persentase rata-rata sebesar 88% dengan dikategorikan sangat baik dan respon pendidik mendapatkan persentase rata-rata sebesar 89% dengan dikategorikan sangat baik.

### Saran

Bagi peserta didik dan pendidik sebaiknya dapat menggunakan LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL) dalam proses belajar mengajar. LKPD berbasis *Project Based Learning* (PjBL) pada materi Pencemaran Air diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pendidik untuk mengembangkan bahan ajar serupa dan disesuaikan dengan kebutuhan. Hendaknya temuan penelitian ini

menjadi bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya.

##### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. (2014). *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013*. Refika Aditama.
- Addin, I., Redjeki, T., & Ariani, Sri, R. (2014). Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (Pjbl) Pada Materi Pokok Larutan Asam Dan Basa Di Kelas Ix Ipa 1 Sma Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014. *Jurnal Pendidikan Kimia*, 4(3), 125–129.
- Akdon, & Riduwan. (2013). *Rumus Data Data Dalam Aplikasi Statistika*. Alfabeta.
- Andi, P. (2012). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Diva Press.
- Andi, P. (2014). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Diva Press.
- Atwi-Suparman, M. (2012). *Desain Intruksional Modern*. Erlangga.
- Bialik, M., & Fadel, C. (2015). *Skills For 21st Century: What Should Student Learn*. Center For Curriculum Redesign.
- Budiono, J. D. (2014). Validitas Dan Kepraktisan Lkpd Berbasis Proyek Untuk Melatihkan Keterampilan Proses Sains Materi Tumbuhan Spermatophyta Kelas X Sma. 3(3), 571–579.
- Dezricha Fannie, R., & Rohati. (2014). Pengembangan Lembar Kerja Siswa (Lks) Berbasis Poe (Predict, Observe, Explain) Pada Materi Program Linear Kelas Xii Sma. *Jurnal Sainmatika*, 8(1), 96–109.
- Fathurrohman, M. (2015). *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Ar-Ruzz Media.
- Febrianti, N. (2014). Studi Beban Pencemaran Sungai Kapuas Akibat Buangan Dari Drainase Di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. *Jurnal Terkonologi Lingkungan Lahan Basah*, 2(1), 1–10.
- Hairida. (2017). Menggunakan Bahan Ajar Pembelajaran Ipa, Lingkungan, Teknologi Dan Masyarakat (Set) Kearifan Lokal Dan Berbasis Koloid. *Jurnal Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 2(1), 143–148.
- Hairida, H., & Junanto, T. (2018). The Effectiveness Of Performance Assessment In Project-Based Learning By Utilizing Local Potential To Increase The Science Literacy. *International Journal Of Pedagogy And Teacher Education*, 2(July), 17. <https://doi.org/10.20961/ijpte.v2i0.25722>
- Hairida, H., & Setyaningrum, V. (2020). The Development Of Students Worksheets Based On Local Wisdom In Substances And Their Characteristics. *Journal Of Educational Science And Technology (Est)*, 6(2), 106–116. <https://doi.org/10.26858/Est.V6i2.12358>
- Isa, A., & Jamil, A. (2012). How To Measure Students` Creativity. *Journal Of The Asian Conference On The Social Sciences Official Conference Proceedings*, 2186–2303.
- Lestari, A., Hairida, & Lestari, I. (2021). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (Lkpd) Berbasis Discovery Learning Pada Materi Asam Dan Basa. *Jurnal Zarah*, 9(2), 117–124.
- Lestari, Ika. (2013). *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai Dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Pt.Bumi Aksara.
- Maulina, R., Nazar, M., & Hanum, L. (2019). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (Lkpd) Berbasis Masalah Pada Materi Koloid Di Kelas Xi Sman 5 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kimia (Jimpk)*, 4(4), 52–58.
- Mulyasa. (2014). *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.
- Nurrita, T. (2018). *Pengembangan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa*. Misykat: *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(1), 171. <https://doi.org/10.33511/Misykat.V3n1.171>
- Permendikbud. (2016). *Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan*.
- Prastowo, A. (2013). *Pengembangan Bahan Ajar Tematik*. Diva Press.
- Prawiradilaga, & Dewisalma. (2014). *Wawasan Teknologi Pendidikan*. Kencana Prenada Group.
- Pribadi, & A. Benny. (2014). *Desain Dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi: Implementasi Model Addie*. Kencana.
- Riduwan, & Sunarto. (2011). *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, Dan Bisnis (4 (Ed.))*. Alfabeta.
- Safitri, Yf, Melati, Ha, & Lestari, I. (2020). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Project Based Learning Materi Perubahan Fisika Dan Kimia. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9(9).

- Santi, I. K. L., & Santosa, R. H. (2016). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Saintifik Pada Materi Pokok Geometri Ruang Smp. *Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika*, 11(1), 35. <https://doi.org/10.21831/pg.v11i1.9673>
- Saragih, S. O. (2018). Sungai Kapuas Tercemar Merkuri. *Berita Satu*.
- Siwa, I. ., Muderawan, I. W., & Tika, I. . (2013). Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Pembelajaran Kimia Terhadap Keterampilan Proses Sains Ditinjau Dari Gaya Kognitif Siswa. *E-Journal Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1–15).
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Press.
- Suhery, Putra, T., & Jasmalinda. (2020). *Jurnal Inovasi Penelitian*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 1–4.
- Susilowati, I., Iswari, R., & Sukaesih, S. (2013). Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Hasil Hasil Belajar Siswa Materi Sistem Pencernaan Manusia. *Jurnal Pendidikan Biologi Unnes*, 1(2), 82–90.
- Tegeh, & Made Dkk. (2014). *Model Penelitian Pengembangan*. Graha Ilmu.
- Yuberti. (2014). *Teori Pembelajaran Dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan*.

## RESISTENSI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH TERINTEGRASI PADA KINERJA GURU DI KELAS

Oleh:

Edy Suprayetno<sup>1)</sup>, Jusrin Efendi Pohan<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2)</sup>Universitas Prima Indonesia, Indonesia

<sup>1)</sup>E-mail: edysuprayetno@umsu.ac.id

<sup>2)</sup>Email: jusrinefendipohan@unprimdn.ac.id

### Abstract

The purpose of this study was to describe the correlation of integrated principals' transformational leadership on the performance of teachers at SMA N 1 Medan City. The problems found in the field are the low ability of school principals in motivating teachers to work and innovate. This type of research is quantitative research using a survey method involving 80 teachers as respondents. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires to teachers, structured interviews, and in-depth observations. Data were analyzed by t test and f test. Data analysis was carried out by simple regression to determine the relationship of each variable X to Y, then using multiple regression formulas to determine the contribution of X1 and X2 together to variable Y. Before testing the hypothesis, the classical assumption was first tested, which consisted of from the normality assumption test, heteroscedasticity test, serial correlation test and multicollinearity test, and the second is regression analysis test. The findings of this study are that the principal's transformational leadership can improve the performance of teachers to be creative and innovate.

**Kata Kunci:** kepemimpinan transformasional; kepala sekolah; guru

### 1. PENDAHULUAN

Konferensi antara kepala sekolah dengan guru akan berdampak positif dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai supervisor dan manager. Kepala sekolah akan mudah mengatasi masalah dalam meningkatkan kualitas guru-guru dan administratif. Hal inilah membuat perlunya kepala sekolah membangun struktur perilaku yang berhubungan dengan tugas, seperti menetapkan batas waktu (*deadline*), menetapkan standar performa, dan mengawasi tingkat performa (Hughes dan Curphy, 2012).

Disintegrasi antara kepentingan dengan tujuan yang akan dicapai sering menimbulkan ketidakharmonisan antara pemimpin dengan bawahan. Ketidakharmonisan itulah akan mengakibatkan keambiguan bagi bawahan dalam bekerja secara maksimal sesuai standar operasional yang ditetapkan. Kemapanan seorang pemimpin bermuara pada sebuah kebijakan yang mementingkan kepentingan bersama. Kinerja kepemimpinan pendidikan di sekolah-sekolah ditandai dengan kelemahan, kompleksitas, miskin kreativitas, kontradiksi, dan diskontinuitas (Alalfi, 2015). Struktur sosial di mana kedua perempuan dan laki-laki harus bekerja adalah cepat menjadi luas, dan keinginan untuk memenuhi tanggung jawab dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga membuat perlu untuk membangun keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (Yuldirim, 2017).

Salah satu organisasi yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat, bijak, dan berkomitmen dalam menentukan tujuan adalah kepala sekolah.

Kepala sekolahmen jadi motor penggerak dalam merumuskan perencanaan, strategi, capaian dalam menentukan kebijakan. Kebijakan yang benar akan mengantarkan sekolah mencapai keberhasilan bersama dalam mecerdaskan generasi di masa depan. Sebaliknya, kebijakan yang salah akan memberikan dampak negatif bagi sekolah, biasanya masyarakat tidak percaya kepada pihak sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan.

Merujuk penelitian telah dilakukan oleh Korkmaz (2008) tentang kepemimpinan kepala sekolah sangat erat dengan kaitannya dengan peran pemimpin dan gaya memimpin sangat diperlukan. Kepemimpinan kepala sekolah terlihat dari kepuasan guru dalam bekerja (Yılmaz dan Ceylan, 2011). Model proses peran organisasi mengacu pada cara di mana karyawan menjangkau peran mereka dan bagaimana peran tercermin oleh karyawan dalam perilaku mereka.

Salah satu model kepemimpinan yang tepat digunakan dalam membangun suatu budaya pengambilan keputusan yang kolaboratif adalah model kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan transformasional ini mengarah pada pemberian dukungan individual, memberikan stimulasi intelektual, dan menetapkan ekspektasi performa yang tinggi terhadap bawahan (Leithwood dan Jantzi, 1997). *Transformational leadership is conceptualized as involving a series of behaviors designed to inspire, empower, and motivate others to transcend and achieve higher levels of goals and missions* (Kim, dkk, 2017).

Selain itu, kepemimpinan transformasional

menekankan pada proses mempengaruhi individu dan memobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem sosial serta mereformasi kelembagaan (Komariah dan Triatna, 2006). Artinya, dimensi kepemimpinan transformasional sejalan dengan masa perubahan yang cepat dengan konteks yang berubah-ubah (Bush & Middlewood, 2005; Leithwood, *et al.*, 1999). Di sisi lain, peran utama kepemimpinan transformasional mencakup penciptaan visi, mobilisasi komitmen terhadap visi, dan pelembagaan perubahan seluruh organisasi (Jonyo, 2017).

Dimensi kepemimpinan transformasional dengan konsep 4-I, yaitu (1) *idealized influence*, (2) *inspirational motivation*, (3) *intellectual stimulation*, dan (4) *individualized consideration* (Komariah dan Triatna, 2006; Barling, *et al.*, 2010). Suatu model kepemimpinan transformasional dalam konteks sekolah mengandung enam dimensi, yaitu menyokong pembangunan visi dan tujuan, membangun suatu struktur pengambilan keputusan yang kolaboratif, memberi contoh praktik-praktik profesional yang baik, memberikan dukungan individual, memberikan stimulasi intelektual, dan menetapkan ekspektasi performa yang tinggi (Leithwood dan Jantzi, 2015). Rangkaian utama praktik-praktik dasar kepemimpinan yang berguna hampir di setiap sekolah. Model ini mengklasifikasi beberapa dimensi spesifik menjadi tiga kelompok besar praktik-praktik kepemimpinan berikut ini.

*Pertama*, menetapkan arah, yaitu membangun visi bersama, menciptakan konsensus tentang tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas, serta membangun ekspektasi performa yang tinggi. *Kedua*, mengembangkan sumber daya manusia, mencakup: menyediakan dukungan individual, menawarkan stimulus intelektual, dan memberikan contoh nilai-nilai dan praktik-praktik yang penting. *Ketiga*, mendesain ulang organisasi; meliputi membangun suatu kultur kolaboratif, menciptakan dan memelihara struktur-struktur dan proses-proses pengambilan keputusan bersama, serta membangun hubungan dengan para orang tua dan komunitas yang lebih besar (Yu dkk., 2002). Peran kepemimpinan yang berbeda ini dapat mentransformasikan sekolah menjadi komunitas dan menginspirasi beragam komitmen, kekuasaan, dan pelayanan yang membuat sekolah tidak dapat disamakan dengan institusi masyarakat lainnya (Raihani, 2010).

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey yang bersifat deskriptif analitik menggambarkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel-variabel kepemimpinan transformasional, yaitu iklim organisasi dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini dilakukan di SMA Kota Medan dan objek penelitiannya adalah kepala sekolah. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah iklim organisasi (X1), budaya organisasi (X2)

dan kualitas pelayanan (Y). Dalam mengoperasikan variabel-variabel penelitian tersebut, peneliti menggunakan skala likert. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2004) bahwa skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 450 orang.

Penentuan besarnya sampel menggunakan rumus Slovin (Azhari, 2002) diperoleh sampel penelitian sebanyak 82 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dengan instrumen kusioner, observasi dengan instrumen pedoman observasi, dan wawancara dengan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan regresi sederhana untuk menentukan hubungan masing-masing variabel X terhadap Y, selanjutnya menggunakan rumus regresi berganda untuk menentukan kontribusi X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> secara bersama-sama terhadap variabel Y.

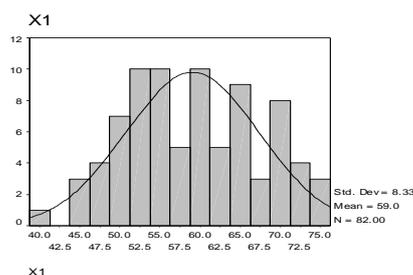
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari uji asumsi normalitas, uji heteroskedasitas, uji korelasi serial dan uji multikolinieritas, serta yang kedua dilakukan uji analisis regresi.

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik serta analisis regresi kemudian dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pengujian hipotesis variabel X terhadap variabel Y secara sendiri-sendiri dilakukan dengan uji t. Sedangkan pengujian hipotesis variabel X terhadap Y secara bersama-sama dilakukan dengan uji F.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

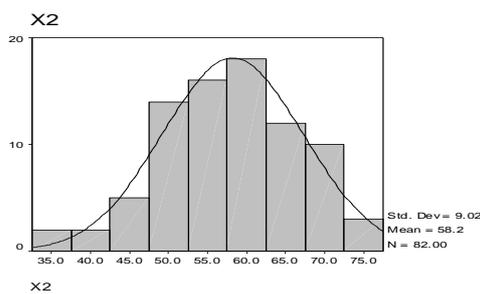
Setelah penelitian dilakukan, diperoleh data atau hasil penyebaran kusioner untuk data variabel iklim organisasi (Y) menunjukkan bahwa skor terendah adalah 40 dan skor tertinggi adalah 75. Dengan demikian, diperolehnya skor terendah dan tertinggi, maka rentangan skornya (range) adalah 35 (40-75). Angka-angka tersebut setelah dianalisis menghasilkan skor rata-rata (*Mean*) = 59,0488, nilai tengah (*median*) = 58,8333, modus (*mode*) = 53,00, varians (*variance*) = 69,4050, dan simpangan baku (*standard deviation*) = 8,3310.



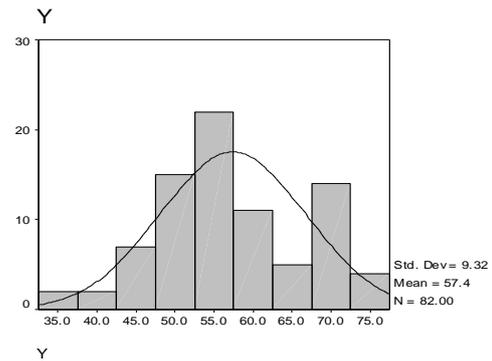
Pada aspek budaya organisasi dapat dilihat dari kegiatan guru-guru secara keseluruhan setiap hari kerja, mulai dari disiplin waktu masuk kerja, istirahat dan pulang. Pekerjaan guru dilihat dari apakah guru merasa takut terhadap hukuman yang diterapkan jika tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Guru-guru bekerja atau menyelesaikan tugas-tugas karena unsur takut, maka jelas budaya kerja guru-guru itu belum sadar. Namun, guru bekerja dengan disiplin pada saat masuk kerja, istirahat, pulang, dan tugas-tugas dikerjakan tepat waktu tanpa takut atasan, takut hukuman, melainkan tugas dikerjakan dengan senang hati. Guru merasakan mengerjakan tugas merupakan bagian dari kehidupannya akan menjadi sebuah kebiasaan dalam bekerja dan menjadi budaya kerja.

Tindakan yang dilakukan oleh guru hendaknya antusias dan bersikap optimis berhasil. Sikap optimis guru dapat dilihat percaya diri guru dalam mengerjakan tugas sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Posisi kepala sekolah harus mampu menumbuhkan sikap optimis guru dalam bekerja sesuai dengan keahlian guru, sehingga guru akan merasa nyaman dalam bekerja. Dengan sikap optimis itu, guru akan selalu percaya diri mampu menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu yang ditentukan.

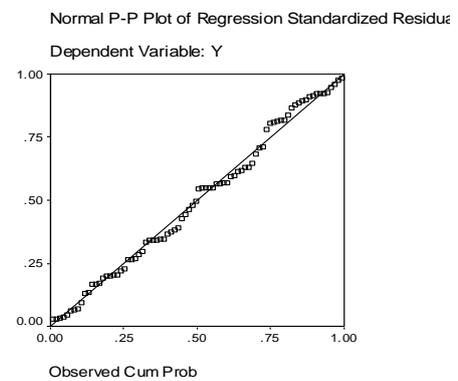
Hasil penyebaran kuesioner diberikan kepada sampel 82 orang untuk data variabel budaya organisasi menunjukkan bahwa skor terendah adalah 35 dan skor tertinggi adalah 75. Dengan demikian, diperolehnya skor terendah dan tertinggi, maka rentangan skornya (range) adalah 40 (35-75). Angka-angka tersebut setelah dianalisis menghasilkan skor rata-rata (*mean*) = 58,2195, nilai tengah (*median*) = 58,2857, modus (*mode*) = 57,00, varians (*variance*) = 81,4327, dan simpangan baku (*standard deviation*) = 9,0240. Agar lebih jelas, dapat dilihat diagram berikut ini.



Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada variabel terikat yaitu kualitas pelayanan (Y), menunjukkan bahwa hasil akhir skor terendah 36 dan skor tertinggi 75. Dengan demikian rentangan skornya adalah 39 (36-75). Setelah dianalisis lebih lanjut, angka-angka tersebut menghasilkan skor rata-rata (*mean*) = 57,3902, nilai tengah (*median*) = 56,3077, modus (*mode*) = 56,00, varians (*variance*) = 86,8582, dan simpangan baku (*standard deviation*) = 9,3198.



Merujuk data di atas, langkah berikutnya adalah uji normalitas dengan bantuan SPSS, variabel iklim organisasi ( $X_1$ ) dan budaya organisasi ( $X_2$ ) terhadap kualitas pelayanan (Y) menunjukkan bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Artinya, regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel iklim organisasi ( $X_1$ ) dan budaya organisasi ( $X_2$ ) terhadap kualitas pelayanan (Y).



Gambar di atas menunjukkan bahwa *normal probability* memperlihatkan sebaran data pada chart tersebut terdapat korelasi yang kuat antara *expected cumulative probability* dengan *observed cumulative probability*, sehingga memenuhi persyaratan normalitas.

Setelah itu, dilakukan pengujian hipotesis statistik untuk hipotesis pertama dan kedua dilakukan dengan Uji t, sedangkan hipotesis ketiga dilakukan dengan Uji F. Sebelum melakukan pengujian hipotesis uji t dan uji F, terlebih dahulu dilakukan pengujian koefisien korelasi sederhana, koefisien korelasi berganda, dan pengujian determinasi berganda. Hal ini ditunjukkan pada koefisien korelasi sederhana berikut ini

Koefisien Korelasi Sederhana

Correlations				
		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.675	.907
	X1	.675	1.000	.652
	X2	.907	.652	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000
	X1	.000	.	.000
	X2	.000	.000	.
N	Y	82	82	82
	X1	82	82	82
	X2	82	82	82

Selain koefisien korelasi sederhana, peneliti juga menguji dengan korelasi berganda. Dari hasil

perhitungan diperoleh besarnya koefisien korelasi berganda antara iklim organisasi dan budaya organisasi dengan kualitas pelayanan adalah 0,913, artinya keeratan hubungan antara iklim organisasi dan budaya organisasi dengan kualitas pelayanan adalah sebesar 91,3%. Hubungan ini menunjukkan sangat kuat karena berada di antara 0,80 – 1,000, yang artinya iklim organisasi dan budaya organisasi meningkat dan kualitas pelayanan juga meningkat. Untuk lebih jelasnya, koefisien korelasi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.913 <sup>a</sup>	.834	.830	3.8394

a. Predictors: (Constant), X2, X1

#### Pengujian Hipotesis Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5870.961	2	2935.480	199.135	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1164.551	79	14.741		
	Total	7035.512	81			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji F diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 199,135, sedangkan harga kritis nilai  $F_{tabel}$  dengan derajat bebas pembilang 2 dan penyebut 79 pada  $\alpha$  (0,05) sebesar 3,11. Dengan demikian,  $F_{hitung}$  (199,135) >  $F_{tabel}$  (3,11), sehingga jelas  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama iklim organisasi dan budaya organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

#### Pembahasan

Merujuk hasil penelitian di atas, peneliti menjabarkan variabel-variabel penelitian ini, yaitu iklim organisasi dan budaya organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kepemimpinan transformasional dengan konsep 4-I, yaitu (1) *idealized influence*, (2) *inspirational motivation*, (3) *intellectual stimulation*, dan (4) *individualized consideration* (Komariah dan Triatna, 2006; Barling, dkk, 2010).

*Pertama, idealized influence* menjelaskan sebagai perilaku yang menghasilkan rasa hormat dan percaya diri dari orang yang dipimpinnya. *Idealized influence* mengandung makna saling berbagi resiko melalui pertimbangan kebutuhan para staf di atas kebutuhan pribadi dan perilaku moral secara etis. *Kedua, inspirational motivation*, tercermin dalam perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan bagi pekerjaan yang dilakukan staf dan memerhatikan

makna pekerjaan bagi staf. Pemimpin menunjukkan atau mendemonstrasikan komitmen terhadap sasaran organisasi melalui perilaku yang dapat diobservasi staf. Pemimpin adalah seorang motivator yang bersemangat untuk terus membangkitkan antusiasme dan optimism staf.

*Ketiga, intellectual stimulation*, yaitu pemimpin yang mempraktikkan inovasi-inovasi. Sikap dan perilaku kepemimpinannya didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara intelektual mampu menerjemahkannya dalam bentuk kinerja yang produktif. Sebagai intelektual, pemimpin senantiasa menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif dari para staf dan tidak lupa selalu mendorong staf mempelajari dan mempraktikkan pendekatan baru dalam melakukan pekerjaan. *Keempat, individualized consideration*, pemimpin merefleksikan dirinya sebagai seorang yang penuh perhatian dalam mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan, ide, harapan-harapan, dan segala masukan yang diberikan staf.

Model kepemimpinan transformasional kepala sekolah sangat tepat diterapkan untuk meningkatkan manajemen sekolah. Kepala sekolah dapat melakukan dengan strategi-strategi yang mampu menjembatani aspirasi guru-guru tersebut. *Pertama*, strategi motivasi diri. Strategi ini bertujuan untuk menerapkan kepemimpinan transformasional untuk kepala sekolah dengan jalan memotivasi diri agar bisa bekerja dengan profesional harus dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan baik. Hal ini disebabkan dengan ada motivasi dari kepala sekolah untuk dapat bekerja dengan profesional maka hal ini akan menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh kepala sekolah akan dapat terlaksana dengan baik.

*Kedua*, memotivasi bawahan. Strategi ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan memotivasi guru dan staf agar bisa bekerja dengan profesional harus dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan baik. Guru dapat bekerja dengan profesional mengajar siswa dengan baik. Selain guru, kepala sekolah juga memotivasi staf agar bekerja dengan profesional dengan menyiapkan administrasi sekolah. *Ketiga*, menumbuhkan percaya diri. Strategi ini menfokuskan bahwa kepala sekolah meningkatkan rasa percaya diri guru dan staf dengan memberikan kebebasan penuh untuk berkreasi.

*Keempat*, memaksimalkan potensi guru dan staf. Strategi ini digunakan oleh kepala sekolah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh guru dan staf dengan baik. Memaksimalkan potensi guru dapat memberikan stimulus bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan profesional. Siswa akan dapat memahami setiap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya sesuai dengan kemampuan siswa. Kepala sekolah dengan model kepemimpinan transformasional dapat memaksimalkan potensi guru dan staf.

*Kelima*, memiliki komitmen yang tinggi.

Strategi dilakukan oleh kepala sekolah menyampaikankomitmen yang tinggi dalam memajukan sekolah harus kepada guru-guru dan staf. Artinya, kepala sekolah memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan sekolah akan membuat guru dan staf memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan sekolah. Jika kepala sekolah, para guru, dan staf dapatbersama-sama memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan sekolah, sekolah tersebut akan menjadi sekolah yang unggul.

*Keenam*, meningkatkan integritas diri. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan integritas diri, guru dan staf dengan memiliki kepercayaan kepada kepala sekolah. Guru dan staf diberikan kepercayaan penuh untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Semua guru-guru merasakan kebersamaan dalam melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan target yang akan dicapai. Kepala sekolah dapat memerintahkan guru dan staf dengan membantu sesama dalam tugas. Setiap guru dengan sadar mengerjakan tugas mengajar tanpa terbebani.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut. Kepemimpinan transformasional sangat cocok dilakukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan proses manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Kepala sekolah tidak hanya merangkul bawahan dan staf, tetapi dapat meningkatkan kualitas sekolah. Kepemimpinan transformasional sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan transaksional, dimana kepemimpinan transformasional lebih mementingkan kebersamaan dan keberagaman dalam pemikiran maupun pekerjaan.

Empat dimensi kepemimpinan transformasional yaitu *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized considerations* sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi kepala sekolah sebagai objek penelitian. Implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dapat dilakukan komitmen yang tinggi dalam memajukan sekolah, meningkatkan integritas dirinya, harus banyak membaca agar memiliki pengetahuan yang tinggi, dan harus menolong guru dan staf yang mengalami kesulitan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Alalfi, R Hany. (2015). Some Modern Trends in Educational Leadership and Its Role in Developing the Performance of the Egyptian Secondary School Managers. *American Journal of Educational Research*, 2015, Vol. 3, No. 6, 689-696 <http://pubs.sciepub.com/education/3/6/4>.  
Barling, J., Christie, A., & Hopton, A. (2010). Leadership. In S. Zedeck (Ed.), *Handbook of*

*Industrial and Organizational Psychology*, 183-240.

- Bush, T., dan Middlewood, D. (2005). *Leading and Managing People in Education*. London: Sage Publication.
- Jonyo, Dorothy Owuor dan Bonn Odera Jonyo. (2017). Teacher Management: Emerging Issues in Kenya. *European Journal of Educational Sciences*, EJES, Vol.4, No.1. (Online) tersedia <http://dx.doi.org/10.19044/ejes.v4no1a18>.
- Kim, Minhyun. (2017). The Effect of Transformational Leadership on Middle School Students' Intrinsic Motivation and Expectancy-Value in Physical Education. *European Journal of Educational Sciences*, EJES, Vol.4, No.2. tersedia (Online) <http://dx.doi.org/10.19044/ejes.v4no2a2>.
- Kim, B.Y. (2010). Application of Transformational Leadership: The Case of Hiddink Leadership. *The Korean Association of Sport Law*, 13(1), 11-37.
- Komariah, Aan dan Cepi Triatna. (2006). *Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Leithwood, K. and Jantzi, D. (2015). *Explaining Variation in Teachers' Perceptions of Principals' Leadership: A Replication*. *Journal of Educational Administration*. 35 (4).
- Northouse. (2013). *Kepemimpinan: Teori dan Praktik, Edisi Keenam*. Jakarta: Indeks.
- Raihani. (2010). *Kepemimpinan Sekolah Transformatif*. Yogyakarta: LKis.
- Sergiovanni, T.J. (1990). *Value-Added Leadership*. New York: Harcourt Brace Javanovich.
- Yu, H., dkk. (2002). The Effect of Transformational Leadership on Teachers Commitment to Change in Hongkong. *Journal of Educational Administration*. 40 (4).
- Yuldirim, Bilal. (2017). The Relationship between Principals' Leadership Practices and Teachers' Work-Life Balance. *International Online Journal of Educational Sciences*, 2017, 9 (3), 755 – 767.

# SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMP DHUHAA ISLAMIC SCHOOL DENGAN MENGGUNAKAN METODE *SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING* (SAW)

Oleh :

**Alian Buchori<sup>1)</sup>, Mulia Rahmayu<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Teknologi Informasi, Universitas Nusa Mandiri

<sup>1</sup>email: alianbuchori89@gmail.com

<sup>2</sup>email: mulia.mlh@nusamandiri.ac.id

## Abstrak

Sistem perangkaan penerimaan peserta didik baru yang digunakan oleh SMP Duhuaa Islamic School ini masih menggunakan cara manual. Hal ini menyebabkan data penerimaan peserta didik baru tidak tepat, contohnya terdapat pendaftar yang memiliki skor nilai yang sama sehingga panitia kewalahan dalam mengurutkan perangkaan dan meningkatnya jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar disuatu sekolah membuat pihak sekolah perlu mengadakan penyeleksian calon peserta didik baru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sekolah. Dari permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah metode yang dapat digunakan dalam proses perhitungan nilai kriteria agar memudahkan pihak sekolah dalam mengambil keputusan. Tujuan penelitian ini untuk membantu proses penyeleksian peserta didik baru pada SMP Duhuaa Islamic School dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting dengan menentukan kriteria dan bobot kriteria. Kriteria dalam penerimaan peserta didik baru yaitu nilai bahasa indonesia, matematika, bahasa inggris dan tes agama islam. Metode SAW dimulai dengan pemberian nilai pada setiap kriteria, pembobotan, normalisasi dan perangkaan dari nilai tertinggi ke terendah. Dengan perangkaan tersebut dapat ditentukan calon peserta didik yang diterima dan tidak diterima.

**Kata Kunci :** Sistem Pendukung Keputusan, Metode SAW, Proses Penerimaan Peserta Didik Baru

## 1. PENDAHULUAN

Seleksi penerimaan siswa baru merupakan agenda rutin tahunan bagi sekolah, dengan semakin berkembangnya zaman dan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, membuat semakin banyak calon siswa yang mendaftar di sebuah sekolah. Namun karena keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana sebuah sekolah terkadang tidak dapat menampung semua calon siswa yang mendaftar dan untuk mendapatkan siswa yang berkualitas maka perlu dilakukan penyaringan penerimaan siswa baru

Permasalahan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi dengan beberapa sumber diatas. Sistem perangkaan penerimaan siswa baru yang digunakan oleh SMP Duhuaa Islamic School ini masih menggunakan cara manual. Hal ini menyebabkan data penerimaan peserta didik baru tidak tepat, contohnya terdapat pendaftar yang memiliki skor nilai yang sama sehingga panitia kewalahan dalam mengurutkan perangkaan dan meningkatnya jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar disuatu sekolah membuat pihak sekolah perlu mengadakan penyeleksian calon peserta didik baru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sekolah.

SMP Duhuaa Islamic School Tangerang yang beralamat di jalan sandong raya No. 77 Pondok Pucung kota Tangerang. Metode Simple Additive Weighting merupakan metode yang optimal yang

dapat digunakan dalam permasalahan penerimaan peserta didik baru disekolah ini. Metode ini dapat membantu dalam proses perangkaan berdasarkan hasil penilaian kriteria yang sudah ditetapkan, penerapan metode ini dapat digunakan dalam penentuan penerimaan peserta didik baru yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu keputusan dan meminimalisir masalah-masalah yang terjadi pada SMP Duhuaa Islamic School Tangerang.

### Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan tepat sesuai kriteria yang telah ditentukan.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan beberapa tinjauan studi yang digunakan sebagai landasan teori serta sebagai perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Beberapa tinjauan studi dalam penelitian ini sebagai berikut :

Metode simple additive weighting ini didasarkan pada rata-rata pembobotan. Skor evaluasi didapat dari setiap alternatif dengan mengalikan nilai skala yang diberikan kepada alternatif bahwa atribut dengan bobot kepentingan relatif diberikan langsung oleh pengambil keputusan diikuti dengan menjumlahkan produk untuk semua kriteria. Hasil

yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu memudahkan dan membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan dan memudahkan panitia dalam menentukan perangkingan calon siswa untuk menyeleksi siswa yang memiliki skor nilai yang sama.

Untuk melakukan pengambilan keputusan, ada beberapa obyek yang akan diteliti diantaranya goal, kriteria, dan alternatif. Berikut adalah beberapa kriteria yang dibutuhkan untuk mengukur dan menilai teller pooling yang akan terpilih menjadi teller pooling terbaik, Setelah melakukan pencocokan kriteria pada setiap alternatif, lalu mencari normalisasi matriks dengan menggunakan rumus Simple Additive Weighting. Setelah mendapat hasil dari normalisasi matriks  $r$ , lalu melakukan perhitungan penentuan ranking teller pooling terbaik Untuk mencari nilai dari masing-masing teller pooling yang ada, yang akan menjadi tellerpooling terbaik yaitu dengan menggunakan rumus metode Simple Additive Weighting yang merupakan hasil penjumlahan dari perkalian antara bobot dikalikan dengan nilai matriks  $r$  yang diperoleh pada masing masing alternatif. Dari hasil perhitungan tersebut, maka terpilihlah teller pooling terbaik yaitu Liana Agustin dengan persentase 96,6 %

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam usaha mendapatkan data yang benar dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dilakukan yang meliputi:

### A. Observasi

Dalam hal ini, peneliti secara langsung mengunjungi tempat yang bersangkutan yaitu SMP Dhuhaa Islamic School yang beralamat di jalan sandong raya No. 77 Pondok Pucung kota Tangerang. Dengan tujuan untuk melakukan pengamatan terhadap data-data yang ada serta melakukan klasifikasi data para peserta didik baru.

### B. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung kepada Bapak Ustadz Sodri sebagai Kepala sekolah dan Bapak Ustadz Fahmi sebagai Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Dhuhaa Islamic School serta staf-staf yang bisa membantu memberikan informasi yang di perlukan dalam penulisan ini.

### C. Studi Pustaka

Selain melakukan kegiatan diatas, penulis juga melakukan studi kepustakaan melalui literatur atau referensi yang ada di internet, perpustakaan, baik perpustakaan Universitas Nusa Mandiri maupun di perpustakaan lainnya.

### Metode Analisis Data

Proses penerimaan peserta didik baru pada SMP Dhuhaa Islamic School dengan menggunakan metode Simple Additive Weigthing diperlukan perhitungan nilai kriteria-kriteria dan bobot masing-

masing kriteria sehingga didapatkan alternatif terbaik.

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan penerimaan peserta didik baru pada SMP Dhuhaa Islamic School sudah ditentukan oleh pihak sekolah, adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria

C1	Nilai Ujian Sekolah Matematika
C2	Nilai Ujian Sekolah Bahasa Indonesia
C3	Nilai Ujian Sekolah Bahasa Inggris
C4	Nilai Tes Agama Islam

Sumber : SMP Dhuhaa Islamic School Tangerang, 2021/2022

Dalam suatu pengambilan keputusan terdapat obyek yang akan dibahas atau goal, kriteria, dan alternatif. Berikut adalah kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk mengukur nilai tertinggi dan menentukan calon peserta didik baru yang akan diterima, antara lain :

Tabel 2. Kriteria Nilai Ujian Sekolah Matematika

Nilai Matematika	Kategori	Nilai
86-100	Istimewa	1
76-85	Sangat Baik	0,8
66-75	Baik	0,6
51-65	Cukup	0,4
31-50	Rendah	0,2
<30	Sangat Rendah	0

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel 3 .Kriteria Nilai Ujian Sekolah Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia	Kategori	Nilai
86-100	Istimewa	1
76-85	Sangat Baik	0,8
66-75	Baik	0,6
51-65	Cukup	0,4
31-50	Rendah	0,2
<30	Sangat Rendah	0

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel 4. Kriteria Nilai Ujian Sekolah Bahasa Inggris

Bahasa Inggris	Kategori	Nilai
86-100	Istimewa	1
76-85	Sangat Baik	0,8
66-75	Baik	0,6
51-65	Cukup	0,4
31-50	Rendah	0,2
<30	Sangat Rendah	0

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel 5. Kriteria Nilai Test Agama Islam

Nilai Tes Agama Islam	Kategori	Nilai
86-100	Istimewa	1
76-85	Sangat Baik	0,8
66-75	Baik	0,6
51-65	Cukup	0,4
31-50	Rendah	0,2

Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, Selanjutnya diberikan bobot preferensi sebagai berikut :

Tabel 6. Penentuan Kriteria Dan Bobot

Kriteria	Nama Kriteria	Bobot
C1	Nilai Ujian Sekolah Matematika	20% = 20/100 = 0.2
C2	Nilai Ujian Sekolah Bahasa Indonesia	15% = 10/100 = 0.15
C3	Nilai Ujian Sekolah Bahasa Inggris	15% = 10/100 = 0.15
C4	Nilai Test Agama Islam	50% = 60/100 = 0.5

Sumber : Hasil Penelitian

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data alternatif calon peserta didik baru SMP Dhuhaa Islamic Tangerang, 2021/2022

Tabel 7. Data alternatif calon peserta didik baru SMP Dhuhaa Islamic Tangerang, 2021/2022

No	Nama	Kriteria			
		Nilai Matematika	Nilai B. Indonesia	Nilai B. Inggris	Nilai Agama Islam
1	Aan Dwi Hartoyo	70	65	70	70
2	Adi Santoso	80	71	67	79
3.	Siti Aisyah	65	66	69	84
4.	Cesar Handoko	81	76	77	70
5.	Muhammad Egi	68	74	78	66

Sumber : Hasil Penelitian

Dalam penentuan rating kecocokan maka nilai dari masing-masing kriteria kemudian dimasukkan kedalam tabel rating kecocokan yang telah disesuaikan dengan nilai tabel kriteria.

Tabel 8. Kecocokan Kriteria Pada Setiap Alternatif

No	Nama	C1	C2	C3	C4
1.	Aan Dwi Hartono	0.6	0.4	0.4	0.6
2.	Adi Santoso	0.8	0.6	0.6	0.8
3.	Siti Aisyah	0.4	0.6	0.6	0.6
4.	Cesar Handoko	0.8	0.8	0.8	0.6
5.	Muhammad Egi	0.6	0.6	0.8	0.6

Sumber : Hasil Penelitian

Nilai dari tabel kecocokan kemudian dibuat matriks keputusan sebagai berikut:

$$X = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.4 & 0.6 \\ 0.8 & 0.6 & 0.6 & 0.8 \\ 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.6 \\ 0.6 & 0.6 & 0.8 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Membuat Normalisasi Matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua alternatif yang ada, menentukan nilai R dengan rumus sebagai berikut :

$$R_{ij} = \frac{X_{ij}}{\text{Max } X_{ij}}$$

Normalisasi setiap alternative sebagai berikut :

A. Kriteria Nilai Ujian Sekolah Matematika

R11, R51

$$= \frac{0.6}{\text{Max}\{0.6;0.8;0.4;0.8;0.6\}} = \frac{0.6}{0.8} = 0.75$$

R31

$$= \frac{0.4}{\text{Max}\{0.6;0.8;0.4;0.8;0.6\}} = \frac{0.4}{0.8} = 0.5$$

R21, R41

$$= \frac{0.8}{\text{Max}\{0.6;0.8;0.4;0.8;0.6\}} = \frac{0.8}{0.8} = 1$$

Maka R11, R51 memiliki nilai yang sama yaitu : 0.75

R31 memiliki nilai yaitu : 0.5

R21, R41 memiliki nilai yang sama yaitu : 1

B. Kriteria Nilai Ujian Sekolah Bahasa Indonesia

R22, R52

$$= \frac{0.6}{\text{Max}\{0.4;0.6;0.6;0.8;0.6\}} = \frac{0.6}{0.8} = 0.75$$

R12

$$= \frac{0.4}{\text{Max}\{0.4;0.6;0.6;0.8;0.6\}} = \frac{0.4}{0.8} = 0.5$$

R42

$$= \frac{0.8}{\text{Max}\{0.4;0.6;0.6;0.8;0.6\}} = \frac{0.8}{0.8} = 1$$

Maka R22, R52 memiliki nilai yang sama yaitu : 0.75

R12 memiliki nilai yaitu : 0.75

R42 memiliki nilai yaitu : 1

C. Kriteria Nilai Ujian Sekolah Bahasa Inggris

R23, R32, R33

$$= \frac{0.6}{\text{Max}\{0.4;0.6;0.6;0.8;0.8\}} = \frac{0.6}{0.8} = 0.75$$

R13

$$= \frac{0.4}{\text{Max}\{0.4;0.6;0.6;0.8;0.8\}} = \frac{0.4}{0.8} = 0.5$$

R43, R53

$$= \frac{0.8}{\text{Max}\{0.4;0.6;0.6;0.8;0.8\}} = \frac{0.8}{0.8} = 1$$

Maka R23, R32 memiliki nilai yang sama yaitu : 0.75

R13 memiliki nilai yaitu : 0.5

R43, R53 memiliki nilai yang sama yaitu : 1

D. Kriteria Nilai Tes Agama Islam

R14, R34, R44, R54

$$= \frac{0.6}{\text{Max}\{0.6;0.8;0.6;0.6;0.6\}} = \frac{0.6}{0.8} = 0.75$$

R24

$$= \frac{0.8}{\text{Max}\{0.6;0.8;0.6;0.6;0.6\}} = \frac{0.8}{0.8} = 1$$

Maka R14, R34, R44, R54 memiliki nilai yang sama yaitu : 0.75

R24 memiliki nilai yaitu : 1

Dari perhitungan diatas diperoleh Normalisasi matriks R, sebagai berikut :

$$X = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.5 & 0.5 & 0.75 \\ 1 & 0.75 & 0.75 & 1 \\ 0.5 & 0.75 & 0.75 & 0.75 \\ 1 & 1 & 1 & 0.75 \\ 0.75 & 0.75 & 1 & 0.75 \end{pmatrix}$$

Untuk mencari nilai masing-masing calon peserta didik baru yang akan dijadikan sebagai penentuan yang lolos tes seleksi, dan dalam menentukan rangking dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Hasil akhir diperoleh dari proses perangkangan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi.

Proses perangkangan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan :

$$w = [0.2 ; 0.15 ; 0.15 ; 0.5]$$

menentukan nilai V1 sampai dengan V5 adalah sebagai berikut :

$$V1 = (0.2*0.75) + (0.15*0.75) + (0.15*0.5) + (0.5*0.75)$$

$$= 0.15 + 0.1125 + 0.075 + 0.375 = 0.7125$$

$$V2 = (0.2*1) + (0.15*0.75) + (0.15*0.75) + (0.5*0.75)$$

$$= 0.2 + 0.1125 + 0.1125 + 0.375 = 0.8$$

$$V3 = (0.2*1)+(0.15*0.75)+(0.15*0.75)+(0.5*0.75) \\ = 0.2 + 0.1125+0.1125+0.375 = 0.8$$

$$V4 = (0.2*1)+(0.15*1)+(0.15*1)+(0.5*0.75) \\ = 0.2+0.15+0.15+0.375 = 0.875$$

$$V5 = (0.2*0.75)+(0.15*0.75)+(0.15*1)+(0.5*0.75) \\ = 0.15+0.1125+0.15+0.375 = 0,7875$$

Maka dapat dibuatkan tabel penentuan perangkingan sebagai berikut :

Tabel 9.Penentuan Rangking

NO	NAMA	Nilai	Persentase %	Rangking
1	AAN HARTONO DWI	0,7125	71%	5
2	ADI SANTOSO	0,8	80%	2
3	SITI AISYAH	0,8	80%	2
4	CESAR HANDOKO	0,875	88%	1
5	MUHAMMAD EGI	0,7875	79%	4

Sumber : Hasil Penelitian

Penentuan rangking berdasarkan tertinggi dan hasil perhitungan penerimaan peserta didik baru:

Tabel 10.Penentuan Rangking Tertinggi-Terendah dan Hasil Perhitungan Penerimaan peserta Didik Baru

NO	Nama	Nilai	Persentase %	Rangking
1	CESAR HANDOKO	0,875	88%	1
2	ADI SANTOSO	0,8	80%	2
3	SITI AISYAH	0,8	80%	3
4	MUHAMMAD EGI	0,7875	79%	4
5	AAN HARTONO DWI	0,7125	71%	5

Sumber : Hasil Penelitian

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- Metode Simple Additive Weighting dapat menjadi alternatif dalam pengambilan keputusan.
- Dengan metode Simple Additive Weighting padaproses penerimaan peserta didik baru dimulai dengan mengumpulkan nilai dari setiap referensi atau kriteria, bobot, normalisasi, dan menentukan rangking dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Sehingga dari perangkingan tersebut sekolah dapat mengambil keputusan peserta didik yang diterima dan peserta didik yang tidak diterima.
- Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah sekolah dalam mendapatkan peserta didik yang berkualitas.
- Didalam penelitian ini belum adanya aplikasi pendukung keputusan untuk sekolah sehingga dalam proses perhitungannya masih membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diusulkan beberapa saran, yaitu:

- Aspek Manajerial apabila sekolah di masa yang akan datang, terdapat kriteria baru yang relevan bagi sekolah atau sesuai dengan kebijakan maka sekolah dapat mengganti kriteria yang telah ada.

- Aspek Sistem Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting juga diharapkan dapat dikembangkan secara luas dan lebih baik lagi dengan menghadirkan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk sekolah.
- Aspek Penelitian selanjutnya disarankan berharap kedepannya perlu di buat pengembangan juga dengan menggunakan metode yang lain antara lain AHP, TOPSIS, PROFIL MATCHING sebagai bahan pembanding dan agar alternatif yang didapat lebih akurat.

#### 5. REFERENSI

- S. Zain and R. Purniawati, "Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru dengan Metode Simple Additive Weighting," *Sains, Apl. Komputasi dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 1, p. 18, 2020.
- P. Giovani, T. Haryanti, and L. Kurniawati, "Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai Bekasi," *SATIN - Sains dan Teknol. Inf.*, vol. 06, no. 01, pp. 70–79, 2020.
- Nofriansyah and S. Defit, *Multi Criteria Decision Making (MCDM) pada Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017.
- A. Riyanto and T. Haryanti, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Teller Pooling Terbaik Pada PT. BCA Tbk. Dengan Metode SAW (Simple Additive Weighting)," *Pilar Nusa Mandiri*, vol. 13, no. 1, pp. 128–135, 2017.

## ALAT PERAGA BERBANTUAN HOLAHOP UNTUK MENINGKATKAN KEAKURASIAN MELEMPAR BOLA SISWA KELAS V

Oleh:

Isa Ansori<sup>1)</sup>, Edo Agung Prayogo<sup>2)</sup>, Sutaryono<sup>3)</sup>, Akhmad Junaedi<sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

<sup>1</sup>isaansori@mail.unnes.ac.id

<sup>2</sup>edoprayeroagung@gmail.com

<sup>3</sup>sutaryono@mail.unnes.ac.id

<sup>4</sup>akhmadjunaedi143@mail.unnes.ac.id

### Abstrak

Penelitian dan pengembangan dengan model Borg & Gall menggunakan 8 langkah yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; 4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba. Dengan tujuan untuk mengembangkan, mengetahui kelayakan dan keefektifan alat peraga berbantuan holahop muatan pelajaran PJOK materi bola tangan kelas V SD. Subjek penelitian adalah siswa dan guru Kelas V SD Negeri Sawangan 03 Kabupaten Magelang. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, angket, tes dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat peraga bola tangan berbantuan holahop sangat layak digunakan dengan presentase kelayakan penyajian oleh ahli alat peraga sebesar 92,5%, dan kategori sangat layak berdasarkan ahli materi sebesar 89,06%. Hasil uji t yaitu  $t_{hitung} = 9,21138 > t_{tabel} = 1,98972$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan alat peraga bola tangan berbantuan holahop efektif digunakan pada pembelajaran PJOK terhadap keterampilan siswa melempar bola. Hal ini diperkuat oleh N-gain data pretest dan posttest sebesar 0,406 dengan kriteria sedang.

**Keywords:** PJOK, Holahop, Pengembangan

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pendidikan selanjutnya dan pembangunan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut, telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) dalam Perubahan Ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002: 3), menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dalam kurikulum 2013 tertuang permendikbud No.22 tahun 2016 menyatakan bahwa proses pembelajaran dalam satuan Pendidikan diselenggarakan secara inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa supaya berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Untuk melengkapi permendikbud no 22 tahun 2016 maka terbitlah permendikbud no 37 tahun 2018 yang memuat perubahan Permendikbud no 24 tahun 2016 tentang KI dan KD dalam pendidikan dasar dan menengah. Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu: (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah penggunaan alat peraga. Terwujudnya tujuan pembelajaran jasmani khususnya perwujudan

keterampilan motorik dasar melalui permainan sekolah dasar memerlukan dukungan alat peraga yang baik yaitu alat peraga yang dapat menarik minat siswa sesuai muatan pelajaran yang diterapkan dan mengikuti perkembangan zaman (Taufik & Pardijono, 2013 : 393).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan hasil belajar siswa Sekolah Dasar Negeri Sawangan 03 terdapat beberapa permasalahan dalam pembelajaran. Masalah yang ditemui terdapat pada materi bola besar yaitu pada permainan bola tangan. Dibuktikan dengan hasil nilai pada permainan bola tangan ini siswa tuntas hanya 45% dibandingkan dengan nilai pada materi lain dengan tingkat ketuntasan 100%. Peneliti juga menemukan permasalahan lainnya yaitu belum adanya alat peraga khusus yang digunakan guru dalam mengajar. Guru hanya menggunakan alat peraga seadanya. Sedangkan untuk lapangan bola tangan dan bola belum memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh ABTI( Asosiasi Bola Tangan Indonesia). Hal tersebut menyebabkan permainan bola tangan yang dilakukan siswa kurang maksimal. Ramli (2011:12) menyarankan penggunaan alat peraga pembelajaran digunakan saat perhatian siswa berkurang akibat bosan, bahan pembelajaran kurang dipahami, terbatasnya sumber belajar serta guru kurang bergairah menjelaskan bahan pembelajaran. Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran salah satunya dengan menggunakan alat peraga berbantuan holahop.

Dalam proses pembelajaran alat peraga digunakan untuk menyampaikan berita atau informasi dalam pembelajaran yang dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar Arsyad (2014: 10). Selain itu penggunaan alat peraga pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran memiliki potensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Gerald & Ely menyatakan dalam Daliano (2016: 18) bahwa alat peraga dibagi menjadi delapan kategori berdasarkan ciri fisiknya, yaitu benda nyata, presentasi lisan, presentasi grafik, gambar diam, gambar bergerak, rekaman audio, gambar terprogram dan simulasi. Maka, pembelajaran menggunakan alat peraga berbantuan holahop dapat meningkatkan keakurasian siswa melempar bola.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan alat peraga berbantuan holahop, mengetahui kelayakan serta keefektifan produk yang dikembangkan untuk meningkatkan keakurasian siswa melempar bola kelas V SDN Sawangan 03 Kabupaten Magelang.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan model pengembangan Borg & Gall yang diadaptasi oleh Sugiyono yang menggunakan 8 langkah yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; 4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba pemakaian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Sawangan 3 sejumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan tes, angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data produk berupa analisis kelayakan alat peraga serta analisis tanggapan guru dan siswa, analisis data awal berupa uji normalitas, dan analisis data akhir berupa uji t dan N-gain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian meliputi hasil pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran PJOK di kelas V SDN Sawangan 3, pengembangan alat peraga bola tangan berbantuan holahop, kelayakan alat peraga bola tangan berbantuan holahop, dan keefektifan alat peraga bola tangan berbantuan holahop dalam pembelajaran PJOK bola tangan.

### 1). Pengembangan Alat Peraga Bola Tangan Berbantuan Holahop

Pengembangan alat peraga bola tangan berbantuan holahop pada muatan pembelajaran PJOK materi bola tangan di Kelas V telah dilaksanakan, pada tahap pertama yaitu potensi dan masalah ditemukan masalah terkait alat peraga pembelajaran. Alat peraga pembelajaran yang digunakan untuk belajar kurang inovatif hanya menggunakan gawang seadanya dan buku dari pemerintah. Sehingga

menyebabkan siswa kurang akurat dalam melempar bola kearah gawang. Dari permasalahan tersebut perlu adanya alat peraga yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan keakurasian siswa melempar bola ke gawang.

Alat peraga bola tangan berbantuan holahop dikemas secara menarik. Karena bahan dari alat peraga ini dari holahop yang dimodifikasi terpasang digawang. Alat peraga bola tangan berbantuan holahop dikemas secara menarik untuk memotivasi siswa agar meningkatkan keakurasian dalam melempar bola ke gawang. Dengan mengembangkan alat peraga yang menarik dan menyenangkan diharapkan siswa dapat lebih mudah dalam menerima pembelajaran yang diajarkan guru dan meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan PJOK kelas V SDN Sawangan 3 khususnya pada aspek psikomotorik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengembangkan alat peraga bola tangan berbantuan holahop materi bola tangan kelas V SDN Sawangan 3.

Jenis alat peraga bola tangan berbantuan holahop dipilih peneliti berdasarkan hasil observasi sesuai dengan potensi dan masalah yang ditemukan di kelas V SDN Sawangan 3, alat peraga bola tangan berbantuan holahop juga tepat digunakan karena memiliki kelebihan antara lain, ukuran alat peraga gawang bola tangan sesuai dengan modifikasi, fungsi alat peraga gawang bola tangan modifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahan dasar aman digunakan, bentuk alat peraga gawang bola tangan bersifat menantang dan menarik perhatian.

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, peneliti selanjutnya melakukan tahap pengumpulan data berupa analisis angket kebutuhan guru dan siswa terhadap alat peraga bola tangan berbantuan holahop materi bola tangan di kelas V SDN Sawangan 3 melalui angket. Hasil analisis guru dan siswa menunjukkan bahwa: (1) siswa memerlukan alat peraga yang menarik; (2) siswa dan guru setuju alat peraga pembelajaran dikemas dengan alat peraga bola tangan berbantuan holahop; (3) penyajian materi berdasarkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran; (4) Isi media yang disajikan harus singkat, padat, jelas dan dimengerti siswa; (5) siswa lebih tertarik dengan alat peraga bola tangan berbantuan holahop;.

Berdasarkan analisis angket kebutuhan guru dan siswa, mereka sangat setuju dengan adanya alat peraga bola tangan berbantuan holahop karena guru membutuhkan alat peraga pembelajaran kreatif dan menarik yang dapat meningkatkan keakurasian siswa melempar bola ke gawang. Gunawan (2016: 37) mengemukakan pendapat alat peraga merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mengajarkan materi pelajaran secara kongkret, sehingga peserta didik dapat menangkap dan memahaminya. Manfaat alat peraga, di antaranya: (a) sangat menarik minat siswa dalam belajar, (b) mendorong siswa untuk belajar bertanya dan berdiskusi, (c) menghemat

waktu belajar.. Sejalan dengan hal tersebut (Holmes & Collins, 2001:2) mengemukakan tujuan dari latihan mental imagery untuk menghasilkan pengalaman olahraga sehingga atlet merasa secara akurat seolah-olah benar-benar melakukan olahraga.

Perkembangan suatu alat peraga harus disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa, sebagaimana pendapat Sugiyono (2017:411) yang menyatakan bahwa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data berguna sebagai bahan penunjang perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kaitan dengan alat peraga, beberapa prinsip prinsip alat peraga.

Menurut (Sudjana, 2019:104) meliputi: (1) Menentukan jenis alat peraga dengan tepat; (2) Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat; (3) Menyajikan alat peraga dengan tepat; (4) Menempatkan atau memperlihatkan alat peraga pada waktu, tempat dan situasi yang tepat. Kurikulum 2013 menghendaki supaya guru dituntut melaksanakan pembelajaran yang inovatif, menarik dan menyenangkan dengan menggunakan alat peraga sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar, dalam hal tersebut alat peraga yang digunakan bisa dibuat dengan menggunakan benda yang inovatif untuk menunjang kualitas belajar siswa. Pada alat peraga bola tangan berbantuan holahop, peneliti menggunakan holahop sebagai modifikasi gawang.

Berdasarkan dengan teori kebutuhan dasar menurut Maslow yaitu hierarki kebutuhan "hierarchy of need", terdapat lima kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Peneliti melakukan observasi mengenai kebutuhan guru dan siswa di sekolah dasar dengan mengacu pada teori kebutuhan dasar menurut Maslow untuk melakukan pengembangan alat peraga bola tangan berbantuan holahop.

Sejalan dengan Novi Kurnia Triwijayanto (2012:62) pada penelitian berjudul pengembangan model permainan bola tangan kappar dengan media botol sebagai gawang, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengembangan permainan bola tangan yang dikembangkan oleh program pengembangan diperoleh produk yang memenuhi karakteristik siswa SD yaitu permainan bola tangan Kappar media botol sebagai gawang. Hal ini terlihat dari hasil analisis data uji lapangan bahwa persentase mendapatkan jawaban yang sesuai adalah 89,1%.

Sedangkan hasil penelitain oleh Ita Kristiowati tahun 2011. Yang berjudul "Pengembangan model pembelajaran permainan bola tangan pendekatan lingkungan pepohonan dalam Penjasorkes bagi siswa kelas V SD Negeri 3 Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tahun 2011". Hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase pilihan jawaban yang sesuai 88,93 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka

permainan bola tangan ini telah memenuhi kriteria baik, sehingga dari uji coba lapangan model ini dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri 3 Kaligarang. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa kelas V SD Negeri 3 Kaligarang adalah dari semua aspek yang diuji coba yang ada, lebih dari 90 % siswa dapat mempraktikan dengan baik. Baik dari pemahaman peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktifitas gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan model permainan bola tangan ini dapat diterima siswa SD dengan baik, sehingga uji coba lapangan model ini dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri 3 Kaligarang.

Berdasarkan data dan analisis kebutuhan guru maupun siswa yang telah dilakukan, peneliti kemudian mendesain produk. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan materi bola tangan dari beberapa sumber kemudian mulai merancang desain alat peraga pembelajaran. Alat peraga bola tangan berbantuan holahop didesain menggunakan gawang yang dimodifikasi dengan holahop.

Alat peraga yang dikembangkan oleh peneliti berupa alat peraga yang didesain menggunakan gawang dimodifikasi dengan holahop. Holahop ini dimodifikasi terpasang digawang berbahan rotan. Alat peraga yang digunakan pun disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar sesuai pembelajaran kelas V. Sedangkan pengembangan alat peraga yang dikembangkan oleh penelitian terdahulu biasanya berupa alat peraga botol dan pohon sebagai gawang bola tangan.

## 2) Kelayakan Alat Peraga Bola Tangan Berbantuan Holahop

Kelayakan alat peraga bola tangan berbantuan holahop diperoleh dari penilaian ahli alat peraga dan ahli materi. Penilaian ini bertujuan agar dapat mengetahui kelayakan alat peraga bola tangan berbantuan holahop untuk menunjang proses pembelajaran keterampilan melempar bola secara akurat. Sebelum dilakukan penilaian, peneliti melakukan validasi kepada ahli materi dan ahli alat peraga. Saat proses validasi materi ada beberapa komponen materi yang perlu diperbaiki yaitu tujuan pembelajaran dan kriteria.

Berdasarkan masukan dari para ahli, 4 menunjukkan bahwa penilaian kelayakan alat peraga pada alat peraga bola tangan berbantuan holahop materi bola tangan oleh ahli alat peraga kesesuaian alat peraga dari ukuran, fungsi, bahan dasar, bentuk, dan kesesuaian materi mendapat nilai positif dengan skor 37 dan presentase 92,5% termasuk kategori yaitu sangat layak. Penilaian tersebut mengenai pengembangan alat peraga bola tangan berbantuan holahop materi bola tangan dapat digunakan ke tahap selanjutnya.

Setelah alat peraga divalidasi oleh ahli, dilanjutkan uji coba produk (skala kecil) alat peraga bola tangan berbantuan holahop dilakukan oleh

siswa kelas V SDN Butuh 1 sebanyak 6 orang siswa. Pada tahap ini siswa dan guru diminta mengisi angket tanggapan siswa dan guru terhadap alat peraga bola tangan berbantuan holahop. Adapun hasil dari angket tanggapan siswa tersebut yaitu mendapat skor 56 dari 60 dengan presentasi 93% dan tanggapan dari guru dapat skor 9 dari 11 dengan presentasi 81,8% yang berarti alat peraga ini memberikan manfaat positif dari guru dan siswa.

Sedangkan uji pemakaian (skala besar) dilakukan di kelas V SDN Sawangan 3. Pada tahap ini pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang dibuat peneliti. Adapun hasil tanggapan siswa pada skala besar diperoleh skor 309 dari 320 dengan presentasi 96,5% dan tanggapan dari guru dapat skor 10 dari 11 dengan presentasi 91%. Berdasarkan hasil angket tanggapan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alat peraga bola tangan berbantuan holahop praktis digunakan.

Indikator yang digunakan dalam alat peraga sudah sesuai dengan teori menurut Sanjaya (2014:173) bahwa penyusunan alat peraga harus menyatu dengan komponen pembelajaran. Alat peraga bola tangan berbantuan holahop sudah sesuai dengan materi, KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Media juga sesuai dengan tingkat perkembangan atau taraf berpikir siswa seperti dalam Sanjaya (2014:173). Selain itu juga sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya seperti dalam Arsyad (2017:75) serta memperhatikan kebenaran dan kemenarikan sajian sehingga mampu menarik minat belajar siswa.

Hal ini didukung dengan Penelitian lain oleh Rinal Taufik Nurfalah, dkk (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Imagery Training Terhadap Keterampilan Hasil Shooting Sepak Bola di SSB Java Putra Yudha. Hasil penelitian menyatakan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan imagery training terhadap keterampilan hasil shooting Sepak Bola di SSB JAVA PUTRA YUDHA. Imagery training memiliki efektivitas sudah teruji dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. data Pretest Eksperimen memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov = 0,200,  $p = 0,200 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, dengan itu data dinyatakan normal. Sedangkan data dari hasil Posttestnya, diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov = 0,155,  $p = 0,200$  maka  $H_0$  diterima, dengan itu data dinyatakan normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat peraga bola tangan berbantuan imageri lebih efektif dibandingkan dengan alat peraga konvensional belajar lainnya.

### 3) Keefektifan Alat Peraga Bola Tangan Berbantuan Holahop

Keefektifan alat peraga bola tangan berbantuan holahop dapat diketahui dari hasil belajar siswa berupa nilai pretest dan posttest yang diperoleh dari pembelajaran dengan alat peraga yang biasa digunakan guru yaitu dengan menggunakan alat peraga bola tangan berbantuan holahop yang

dikembangkan peneliti pada pembelajaran PJOK materi bola tangan. Berdasarkan hasil pretest diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 60,1 dan posttest 76,3. Jumlah siswa yang nilainya tuntas pada pretest sebanyak 11 siswa (34,375%) dan posttest sebanyak 23 siswa (71,875%).

Setelah nilai pretest dan posttest diperoleh kemudian dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui analisis data yang cocok digunakan pada penelitian. Uji normalitas data ini menggunakan rumus Sudjana yang menyatakan suatu data berdistribusi normal apabila nilai  $L_0$  atau Lhitung kurang/lebih kecil dari  $L_{tabel}$  dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui hasil Lhitung pretest lebih kecil dari  $L_{tabel}$  ( $0,146302 < 0,1566$ ) dan hasil Lhitung posttest lebih kecil dari  $L_{tabel}$  ( $0,15413 < 0,1566$ ) sehingga data tersebut berdistribusi normal. Maka dari itu teknik analisis data selanjutnya menggunakan statistik parametris.

Peneliti selanjutnya mencari perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan posttest dengan menggunakan analisis uji t dua pihak (paired sampel t-test) untuk menguji keefektifan alat peraga bola tangan berbantuan holahop. Hasil perhitungan menggunakan bantuan Ms. Excel diperoleh hasil thitung lebih besar dari t-tabel ( $9,21138 > 1,998972$ ) sehingga  $H_a$  diterima, dan  $H_0$  ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan melempar bola sebelum dan sesudah menggunakan alat peraga bola tangan berbantuan holahop, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan alat peraga bola tangan berbantuan holahop efektif digunakan pada pembelajaran PJOK terhadap keterampilan melempar bola.

Tahap selanjutnya peneliti melakukan uji N-Gain dengan tujuan mengetahui peningkatan rata-rata antara nilai pretest dan posttest. Berdasarkan uji N-Gain terjadi peningkatan rata-rata antara nilai pretest dan posttest sebesar 0,406 dengan kriteria sedang dan selisih rata-ratanya 16,2. Peningkatan rata-rata tersebut membuktikan bahwa penggunaan alat peraga bola tangan berbantuan holahop efektif digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.

Menurut teori Edgar Dale (Sanjaya,2014:165) terkait peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar yang dijadikan acuan dalam menentukan media yang sesuai bagi siswa menyatakan bahwa semakin konkret media pelajaran yang dipelajari siswa maka semakin banyak pengetahuan yang diperoleh. Sebaliknya, semakin abstrak siswa memperoleh pembelajaran maka semakin sedikit pengetahuan dan keterampilan yang akan diperoleh siswa. Mengacu pada kerucut tersebut, posisi alat peraga bola tangan berbantuan imageri yang dikembangkan pada penelitian ini adalah pada tingkat audio dan visual yang mampu memperjelas keterampilan melempar bola muatan

PJOK Kelas V sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar keterampilan siswa.

Jurnal Pendukung yang mendasari pengembangan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh gumilar mulya (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Latihan Imagery dan Koordinasi Terhadap Keterampilan Shooting Pada Olahraga Petanque dalam Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan imagery dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap keterampilan shooting pada olahraga petanque. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya guna pengembangan variabel yang lebih luas lagi. Peneliti berharap agar beberapa komponen kondisi fisik dapat lebih digali dan dimanfaatkan supaya menjadi sebuah pelatihan khusus bagi cabang olahraga petanque.

Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Rinal Taufik Nurfalah, dkk (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Imagery Training Terhadap Keterampilan Hasil Shooting Sepak Bola di SSB Java Putra Yudha. Hasil penelitian menyatakan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan imagery training terhadap keterampilan hasil shooting Sepak Bola di SSB JAVA PUTRA YUDHA. Imagery training memiliki efektivitas sudah teruji dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. data Pretest Eksperimen memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov = 0,200,  $p = 0,200 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, dengan itu data dinyatakan normal. Sedangkan data dari hasil Posttestnya, diketahui nilai Kolmogorov- Smirnov = 0,155,  $p = 0,200$  maka  $H_0$  diterima, dengan itu data dinyatakan normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat peraga bola tangan berbantuan imagery lebih efektif dibandingkan dengan alat peraga konvensional belajar lainnya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengembangan alat peraga berbantuan holahop yang dikembangkan pada aspek konten dan konteks tampilan sesuai dengan tahapan Borg & Gall yang diadaptasi oleh Sugiyono yang menggunakan 8 langkah yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba pemakaian. 2) Kelayakan alat peraga bola tangan berbantuan holahop diperoleh dari penilaian ahli alat peraga dan ahli materi dengan presentase kelayakan penyajian oleh ahli alat peraga sebesar 92,5%, dan kategori sangat layak berdasarkan ahli materi sebesar 89,06%. Adapun hasil dari angket tanggapan siswa tersebut yaitu mendapat skor 56 dari 60 dengan presentasi 93,3% dan tanggapan dari guru dapat skor 9 dari 11 dengan presentasi 81,8% yang berarti alat peraga ini memberikan manfaat positif dari guru dan siswa. Sehingga dengan hasil tersebut disimpulkan bahwa alat peraga berbantuan holahop muatan pelajaran

PJOK materi bola tangan yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. 3) Keefektifan alat peraga bola tangan berbantuan holahop dapat diketahui dari hasil belajar siswa berupa nilai pretest dan posttest yang diperoleh dari pembelajaran dengan alat peraga yang biasa digunakan guru yaitu dengan menggunakan alat peraga bola tangan berbantuan holahop yang dikembangkan peneliti pada pembelajaran PJOK materi bola tangan. Berdasarkan hasil pretest diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 60,1 dan posttest 76,3. Jumlah siswa yang nilainya tuntas pada pretest sebanyak 11 siswa (34,375%) dan posttest sebanyak 23 siswa (71,875%). Setelah nilai pretest dan posttest diperoleh kemudian dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui analisis data yang cocok digunakan pada penelitian. Uji normalitas data ini menggunakan rumus Sudjana yang menyatakan suatu data berdistribusi normal apabila nilai  $L_0$  atau Lhitung kurang/lebih kecil dari  $L_{tabel}$  dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui hasil Lhitung pretest lebih kecil dari  $L_{tabel}$  ( $0,146302 < 0,1566$ ) dan hasil Lhitung posttest lebih kecil dari  $L_{tabel}$  ( $0,15413 < 0,1566$ ) sehingga data tersebut berdistribusi normal. Maka dari itu teknik analisis data selanjutnya menggunakan statistik parametris.

#### 5. REFERENSI

- Abdul, Kadir Ateng, Peranan Pendidikan Jasmani dan Olahraga Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan, Jakarta: ISORI DKI, 2016
- Budiyono, S., Anatomi Tubuh Manusia, Bekasi-Jawa Barat: Laskar Aksara, 2011
- Decaprio, Richard. (2013). Aplikasi Teori Pembelajaran Motorik di Sekolah. Yogyakarta: DIVA Press.
- Desmika W.S., Endang N.W., Setyo Purwanto. (2012). Hubungan Antara Status Gizi dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 1-5 Tahun di Posyandu Buah Hati Ketelan Banjarsari Surakarta. Jurnal Kesehatan. Vol. 5, No. 2.
- Dini, Rosdiani. (2012). Model Pembelajaran Langsung dalam Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Bandung: Alfabeta.
- Endang Ramdan BA, dkk. (1983). Olahraga dan Kesehatan. Bandung: Angkasa. Hari A. Rachman. (2011). Keterlaksanaan Pendidikan Jasmani dan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia. 8(1).
- Hari A. Rachman & Ermawan Susanto. (2005). Bola Tangan, sebuah pengantar dalam pembelajaran. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Haryati. (2013). Melalui Modifikasi Alat Pembelajaran Dapat Meningkatkan Gerak Dasar Menangkap Bola Mendatar Dalam Bola Tangan Kelas V Sdn 1 Sepangjaya Kec.

Kedaton Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi.  
Tidak Diterbitkan. Universitas Lampung  
Heri , Rahyubi. (2012). Teori-Teori Belajar dan  
Aplikasi Pembelajaran Motorik. Bandung:  
Nusa Media

# PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS INKUIRI PADA MATERI ZAT ADIKTIF UNTUK MENUMBUHKAN KARAKTER PEDULI KESEHATAN

Oleh :

Patya Mudira Mufti Akbar<sup>1)</sup>, Hairida<sup>2)</sup>, Ira Lestari<sup>3)</sup>, Masriani<sup>4)</sup>, Rahmat Rasmawan<sup>5)</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura  
<sup>1</sup>email: Muftiakbar66@student.untan.ac.id

## Abstrak

Pengembangan karakter peserta didik kurang diperhatikan oleh sistem pendidikan, sehingga menyebabkan turunnya kualitas sikap dan moral peserta didik. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pecandu rokok dikalangan remaja. Tujuan penelitian ini adalah menentukan kelayakan dan mendeskripsikan tanggapan guru terhadap lembar kerja peserta didik. Penelitian ini menggunakan model ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate*). Penelitian ini hanya menerapkan tahap analisis (*analyze*), desain (*design*), dan pengembangan (*develop*). Subjek dalam penelitian ini adalah “lembar kerja peserta didik berbasis inkuiri terbimbing untuk menumbuhkan karakter peduli pada materi zat adiktif di SMP”. Subjek validasi kelayakan melibatkan masing-masing 3 ahli media (grafis), bahasa, dan materi yang memperoleh hasil rata-rata kelayakan 96,19%. Subjek uji coba penelitian yaitu 3 guru IPA di SMPN yang berdomisili di Kecamatan Jongkong yang memperoleh hasil respon rata-rata sebesar 85,41%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa “LKPD Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Zat Adiktif untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Kesehatan” sangat layak dan mendapat respon sangat baik.

**Kata Kunci:** Lembar kerja peserta didik, Zat Adiktif, Peduli Kesehatan, Inkuiri Terbimbing.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan ialah landasan utama untuk mengelola, mencetak, dan meningkatkan sumber daya manusia kualitas tinggi. Pendidikan dapat secara mandiri mengembangkan berbagai sumber daya manusia secara optimal, yaitu fisik, intelektual, secara emosional, sosial dan spiritual, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul di semua tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Juniati & Widiarta, 2017).

Sistem pendidikan yang terus memprioritaskan pertumbuhan kognitif di atas pengembangan karakter peserta didik, mengakibatkan penurunan pandangan peserta didik dan karakteristik moral, seperti yang terlihat oleh meningkatnya kecanduan rokok di kalangan remaja. Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah perokok terbanyak yaitu sebesar 141 juta perokok, 58,6 diantaranya adalah perokok aktif yang berumur 15 tahun ke atas (Machini dkk, 2015). Tingginya jumlah remaja yang merokok mengindikasikan pengaruh rokok sangat cepat menjalar kepada remaja yang masih sekolah (Widiansyah, 2014). Faktor yang melatarbelakangi tingginya jumlah remaja yang merokok dari beberapa sumber adalah peran orang tua yang merokok, lingkungan sosial seperti teman sebaya dan kurangnya sifat peduli akan kesehatan. (Almaidah dkk., 2020; Mirnawati dkk., 2018).

Penerapan pembentukan karakter dalam proses pembelajaran pada semua mata pelajaran dinilai penting, sehingga pemilihan metode dan pendekatan dalam pembelajaran semaksimal mungkin tepat sasaran agar tujuan pembelajaran yang diinginkan tercapai. Penerapan pendidikan karakter bahaya merokok dalam pembelajaran dapat diterapkan kepada Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Adapun penelitian Putri (2020) menunjukkan terjadinya peningkatan *scientific literacy* pada peserta didik dengan nilai *gain score* 0,61 dalam pembelajaran yang menggunakan LKPD dengan tema “Bahaya Rokok bagi Pernapasan”. Dengan meningkatnya literasi sains peserta didik diharapkan dapat meningkatkan karakter peduli kesehatan akan bahaya zat adiktif (Sulistiyowati, 2018). LKPD adalah metode pengajaran yang memandu peserta didik melalui penyelesaian rencana kegiatan mereka. Lembar kerja peserta didik adalah salah satu media pembelajaran yang dapat dibuat oleh pendidik atau guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran (Hairida & Setyaningrum, 2020). LKPD yang digunakan peserta didik hanya menyediakan kumpulan materi motorik dan pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan kognitif peserta didik, bukan perkembangan emosional atau karakter mereka.

Karena saat ini tidak ada lembar kerja peserta didik yang memaksa peserta didik untuk berpikir secara ilmiah, belajar, dan menerapkan gagasan mereka sendiri, peserta didik tidak memiliki

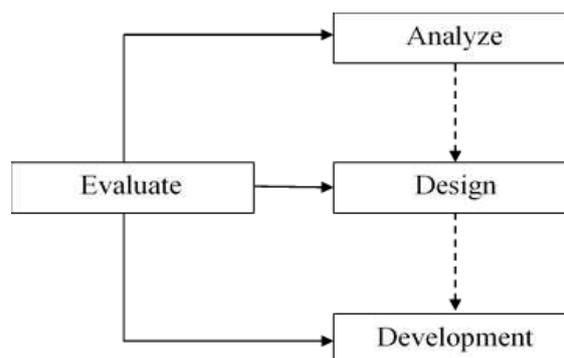
kemampuan yang diperlukan untuk menjawab masalah secara ilmiah (Fara dkk, 2019). Untuk mengatasi kurangnya kemampuan peserta didik untuk menjawab masalah secara ilmiah dapat dilakukan dengan mengembangkan LKPD berbasis inkuiri (Fahmi dkk, 2021). Tujuan pengembangan LKPD berbasis inkuiri adalah untuk membantu peserta didik menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan memecahkan masalah menggunakan keterampilan proses ilmiah (Firdaus & Wilujeng, 2018).

Banyak peserta didik yang merokok di sekolah, menurut temuan wawancara dengan guru IPA di SMPN/MTsN di Kecamatan Jongkong Kapuas Hulu. Jika dibandingkan dengan peserta didik perempuan, peserta didik laki-laki lebih cenderung merokok (Harsanti & Wicaksono, 2017). Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena pembelajaran IPA pada materi zat adiktif harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik mempunyai karakter peduli kesehatan dan tidak hanya sekedar tahu tentang apa yang mereka pelajari, namun mengerti dampak baik dan buruk dari apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, wawancara dengan guru IPA di Kelas IX mengungkapkan bahwa LKPD sudah digunakan dalam proses pembelajaran pada materi zat adiktif. Guru IPA, di sisi lain, tidak merancang LKPD mereka sendiri; sebaliknya, mereka mengandalkan LKPD yang tersedia di pasar atau ditawarkan oleh sekolah. LKPD masih belum memiliki nilai karakter, terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan 2013 yang ingin pembelajaran untuk lebih berorientasi pada karakter.

Peneliti membuat penelitian berjudul “Pengembangan Lkpd Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Zat Adiktif Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Kesehatan” yang didasarkan pada masalah dan fakta tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan kelayakan LKPD dan untuk mengkarakterisasi reaksi guru terhadap LKPD. Diperkirakan bahwa penelitian ini akan menghasilkan lembar kerja peserta didik yang layak untuk digunakan di sekolah menengah pertama.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Model ADDIE digunakan dalam penelitian ini, dan memiliki lima tahap: (1) analisis, (2) desain, (3) pengembangan, (4) implementasi, dan (5) evaluasi. ADDIE merupakan model pengembangan sistematis karena menetapkan aturan dan proses yang membantu dalam definisi dan desain arahan; Namun, ini bukan proses pengembangan yang sepenuhnya ditentukan (Branch, 2009). Hanya tahap analisis, desain dan pengembangan yang dijalankan didalam riset ini. Adapun desain penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada penelitaian ini disajikan pada bagan berikut:



Gambar 1. Skema Model ADDIE yang dilaksanakan dalam penelitian.

Tahap analisis bertujuan untuk mengetahui kondisi dilapangan dengan kondisi yang akan diharapkan. Analisis kurikulum, analisis masalah, dan analisis kebutuhan semua dilakukan pada tahap ini. Berdasarkan hasil analisis kurikulum, diketahui bahwa kurikulum yang diterapkan di SMPN/MTSN Jongkong adalah kurikulum 2013. Analisis masalah dilakukan dengan mewawancarai peserta didik dan guru untuk mengetahui masalah dalam peserta didik IPA di sekolah. Analisis kebutuhan yang dilakukan adalah studi tentang kebutuhan sekolah yang dapat membantu atau meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Persyaratan tersebut, seperti media atau bahan ajar, diperlukan untuk menarik minat peserta didik dalam belajar IPA.

Desain adalah tahap berikutnya. Langkah ini mencakup peninjauan substansi materi serta pemeriksaan tugas untuk menentukan kompetensi. Kegiatan berikutnya adalah membuat *storyboard*, desain pola LKPD, seperti identitas LKPD, kata pengantar, petunjuk penggunaan LKPD bagi peserta didik, biodata penulis desain *header* dan *footer*, dan sampul LKPD dengan menggunakan aplikasi *PowerPoint*. Kemudian, berdasarkan penyelidikan yang mengarah pada materi zat adiktif, membangun instrumen evaluasi untuk validasi kelayakan (ahli) dan mengevaluasi reaksi guru terhadap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk mengembangkan karakter peduli kesehatan.

Validasi media yang telah dihasilkan dan diubah berdasarkan komentar dan ide dari validator sepanjang tahap pengembangan. Tahap ini guna melihat kelayakan dari LKPD yang telah dibuat apakah telah mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah produk diverifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan tes respon dengan guru sebagai penyedia kegiatan belajar (fasilitator).

“Lembar kerja peserta didik berbasis inkuiri pada materi zat adiktif untuk menumbuhkan karakter peduli kesehatan”, menurut judul penelitian. Validasi kelayakan LKPD melibatkan masing-masing 3 ahli media (grafis), bahasa, dan materi. Subjek uji coba penelitian yaitu 3 guru IPA di Kecamatan Jongkong diantaranya guru IPA SMPN 2 Jongkong, MTSN 3 Kapuas Hulu dan SMPN 4 Jongkong.

Data yang dikumpulkan sebagai hasil dari evolusi ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan pengukuran, observasi, dan wawancara digunakan untuk mendapatkan data. Kuesioner kelayakan dan kuesioner respons guru digunakan sebagai alat pengumpulan data. Lembar Penilaian Kelayakan tim Ahli digunakan untuk mengumpulkan data nilai kelayakan LKPD dan memberikan saran perbaikan. Kuesioner Respons Guru dirancang untuk menentukan bagaimana perasaan guru tentang daya tarik dan kenyamanan LKPD yang dihasilkan.

Adapun lembar penilaian kelayakan produk dan angket respon guru terdiri atas pernyataan positif dan negatif dalam aspek penilaian. Setiap aspek memiliki skor di bawah ini:

Tabel 1. Skor Penilaian Kelayakan Produk dan Respon Guru

Kategori	Skor Alternatif Jawaban	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju	4	1
Setuju	3	2
Tidak Setuju	2	3
Sangat Tidak Setuju	1	4

Berikut Persentase perolehan skor setiap pernyataan dihitung memakai rumus:

$$\frac{\sum X}{\sum Xi} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase perolehan skor

$\sum X$  = Skor total dari tiap item

$\sum Xi$  = skor tertinggi

Kemudian persentase rata-rata produk seluruhnya dihitung memakai rumus:

$$V = \frac{\sum P}{n}$$

Keterangan:

V = presentase rata rata kevalidan

$\sum P$  = jumlah rata-rata presentase skor tiap aspek

n = jumlah aspek yang di nilai

Setelah didapatkan hasil persentase keseluruhan dari tiap-tiap pernyataan kemudian diinterpretasikan kelayakan produk dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Kelayakan Produk

Persentase (%)	Kriteria
0-20	Sangat Tidak Layak
21-40	Tidak Layak
41-60	Cukup Layak
61-80	Layak
81-100	Sangat Layak

Persentase total respon dihitung memakai rumus:

$$P_{total} = \frac{\sum P}{n}$$

Skala Likert digunakan untuk menentukan kriteria respons untuk setiap item, yang kemudian ditafsirkan menggunakan kriteria berikut.

Tabel 3. Kriteria Uji Respon

Persentase (%)	Kriteria
25%-40%	Sangat Buruk
40%-55%	Buruk
55%-70%	Cukup
70%-85%	Baik
85%-100%	Sangat Baik

(Riduwan, 2015)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

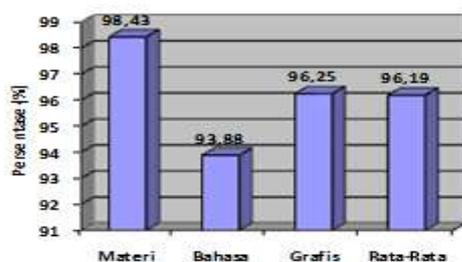
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah perangkat pembelajaran operasional dalam bentuk media yang mendorong peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran aktif (Anggreani, 2021). Kurikulum 2013 menempatkan penekanan kuat pada pembentukan sikap melalui integrasi nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran, dengan harapan bahwa peserta didik akan memiliki karakter (Pradita & Wangid, 2017). Dengan demikian pendidik dapat menyisipkan nilai-nilai karakter dalam bahan ajar, salah satunya dalam bentuk LKPD. Sementara itu, LKPD yang tersedia belum ada yang membimbing peserta didik untuk pembentukan karakter terutama karakter peduli kesehatan.

Penelitian pengembangan LKPD dengan model instruksional ADDIE diperoleh hasil pada tahap analisis (*analyze*) sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis kurikulum, diketahui bahwa kurikulum yang diterapkan di SMPN/MTSN Jongkong adalah kurikulum 2013. Bersumber dari hasil wawancara bersama guru IPA di SMPN/MTSN di Kecamatan Jongkong Kapuas Hulu diperoleh informasi bahwa banyak peserta didik yang merokok disekolah. Merokok dapat menimbulkan dampak negatif di kehidupan remaja, diantaranya dapat menimbulkan ketergantungan, perilaku boros, menurunkan kebugaran, konsentrasi, dan mengganggu kesehatan (Wati dkk, 2018). Selain itu, merokok dapat berfungsi sebagai pintu gerbang ke kegiatan berbahaya lainnya seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba (Larasati & Dokhi, 2020). Peserta didik yang merokok, di sisi lain, berada pada bahaya kinerja akademik yang buruk. Hal ini dikuatkan oleh temuan studi Agustina (2017), yang menemukan bahwa 30 dari 34 perokok, atau 88,2%, memiliki skor hasil belajar yang lebih buruk. Akibatnya, sekolah harus memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang merokok selama proses pembelajaran dengan menanamkan nilai karakter peduli terhadap kesehatan, yang meliputi penggunaan LKPD. Selain itu, wawancara dengan guru IPA kelas VIII yang berbasis di Jongkong mengungkapkan bahwa belajar tentang topik zat adiktif sudah menggunakan LKPD. Guru, di sisi lain, tidak membuat LKPD sendiri; sebaliknya, mereka menggunakan LKPD yang tersedia di pasar atau ditawarkan oleh sekolah. LKPD masih belum

memiliki nilai karakter, terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan 2013 bermaksud untuk lebih berorientasi pada karakter. Dengan demikian, diperlukan media pembelajaran berwujud “lembar kerja peserta didik berbasis inkuiri terbimbing pada materi zat adiktif untuk menumbuhkan karakter peduli kesehatan”. Melalui karakter ini diharapkan peserta didik terhindar dari rokok, menerapkan konsep yang telah dipelajari, dan mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah berdasarkan keterampilan proses ilmiah melalui konsep ilmiah.

Tahap selanjutnya yaitu desain (*design*). Pada tahap ini yang dilakukan yaitu mengkaji isi materi, menganalisis tugas dengan menentukan pencapaian kompetensi. Membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan (KD 4.6) adalah kompetensi yang harus diperoleh dalam pembelajaran IPA dalam zat adiktif. Setelah itu membuat *storyboard*, desain dasar LKPD terdiri dari: 1) identitas LKPD; 2) kata pengantar; 3) petunjuk penggunaan; 4) biodata penulis. Adapun desain *header*, *footer*, dan sampul LKPD menggunakan aplikasi *PowerPoint*. Setelah itu, pembuatan alat penilaian untuk validasi kelayakan (ahli) dan kuesioner uji respons guru ke LKPD berbasis inkuiri.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan (*development*). Untuk menumbuhkan karakter peduli kesehatan, bahan ajar berupa LKPD berbasis inkuiri diarahkan pada materi zat adiktif. Model pembelajaran yang diusulkan dalam kurikulum 2013 salah satunya adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing. Kelebihan dari model inkuiri terbimbing yaitu guru dapat membimbing peserta didik melalui kegiatan dengan mengajukan pertanyaan diawal untuk diarahkan ke proses diskusi (Jauhar, 2011). Guru berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah dan tahapan penyelesaiannya. Bagi peserta didik yang kurang berpengalaman dalam pembelajaran inkuiri cocok menggunakan inkuiri terbimbing. Peserta didik belajar berorientasi pada bimbingan dan petunjuk dari guru merupakan bagian dari pembelajaran model inkuiri, sehingga peserta didik dapat memahami konsep-konsep pelajaran. Karena guru benar-benar dikhususkan untuk belajar, diasumsikan bahwa peserta didik tidak akan mudah bingung atau gagal dengan metodologi ini.



Gambar 1. Hasil Uji Kelayakan LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi zat adiktif untuk menumbuhkan karakter peduli kesehatan

Pada tahap pengembangan, setelah LKPD dibuat selanjutnya dilakukan validasi materi, bahasa, dan grafis yang dapat dilihat pada Gambar 1. Hasil validasi materi, kebahasaan, dan grafis mendapatkan skor rata-rata nilai sebesar 96,19%. Pada rentang 81%-100% menunjukkan bahwa validitas ketiga tahapan penilaian produk dikategorikan sangat layak (Arikunto, 2009). Uji validitas ditujukan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya yang dinilai oleh tenaga ahli dibidangnya (Zulmiyetri dkk, 2019). Perihal itu mengindikasikan bahwasanya dari segi materi (isi serta penyajian), bahasa dan grafis telah sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Adapun masing-masing hasil validasi diuraikan sebagai berikut:

#### Kelayakan Materi

Materi selama tahap validasi terdiri dari dua aspek: kelayakan konten dan kelayakan presentasi. Komponen kelayakan konten terdiri dari delapan poin evaluasi, sedangkan aspek kelayakan presentasi terdiri dari enam item penilaian, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Validasi Materi pada Setiap Butir Penilaian

Indikator	No.	Butir Penilaian	Rata-rata penilaian ahli (%)
<b>Aspek Kelayakan Isi</b>			
Kesesuaian Materi dengan KD	1	Kelengkapan materi	91,66
	2	Keluasan materi	91,66
	3	Kedalaman materi	91,66
Keakuratan Materi	4	Keakuratan konsep dan definisi	91,66
	5	Keakuratan menyajikan permasalahan yang kontekstual dalam kehidupan nyata	100
	6	Keakuratan ilustrasi	91,66
	7	Keakuratan istilah	91,66
Mendorong Keingintahu-an	8	Wacana dan ilustrasi yang disajikan mendorong rasa ingin tahu.	100
<b>Aspek Kelayakan Penyajian</b>			
Teknik penyajian	1	Konsistensi sistematika sajian dalam kegiatan belajar.	100
Pendukung penyajian	2	Pengantar.	91,66
	3	Daftar isi.	91,66
	4	Daftar pustaka.	91,66
Penyajian pembelajaran	5	Soal latihan dalam kegiatan pembelajaran.	100
	6	Kesesuaian model inkuiri terbimbing dengan langkah pada LKPD.	100
Korehensi dan keruntutan alur pikir	7	Keterlibatan peserta didik.	100
	8	Keruntutan konsep.	100

Berdasarkan hasil validasi materi pada aspek kelayakan isi dan penyajian materi yang telah dilakukan perbaikan, diperoleh rata-rata sebesar 98,43%. Pada rentang penilaian tersebut menandakan validitas materi pada LKPD dikategorikan sangat

layak. Dengan dicapainya kategori sangat layak pada LKPD menunjukkan materi yang disajikan telah akurat, berkesinambungan dengan kompetensi dasar dan mendorong keingintahuan peserta didik. Kesalahpahaman dapat diminimalisir dengan menyajikan materi secara akurat pada media pembelajaran (Dazrullisa dkk, 2019). Keingintahuan penting dalam proses pembelajaran karena peserta didik yang ingin tahu lebih memperhatikan apa yang mereka pelajari (Wibhawa, 2018). Materi dan wacana yang terdapat pada LKPD sudah sesuai dengan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mengerjakannya dan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik (Safitri dkk, 2020).

Beberapa indikator evaluasi termasuk dalam aspek kelayakan presentasi, termasuk strategi presentasi, dukungan presentasi, presentasi pembelajaran, koherensi, dan ketertelusuran aliran pemikiran. Berdasarkan hasil penilaian ahli materi pada aspek kelayakan penyajian memperoleh kriteria sangat layak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LKPD yang disajikan sudah sistematis, terdapat rincian materi dan tujuan pembelajaran yang jelas, langkah pada LKPD sesuai dengan model inkuiri, pendukung penyajian yang sesuai, dan dapat membuat peserta didik berpartisipasi pada proses pembelajaran. Penyajian materi yang sistematis diharapkan mampu mempermudah peserta didik dalam memahami konteks materi yang disajikan. Penjelasan yang sistematis secara umum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran (Nurrita, 2018). Lebih lanjut, dengan terpenuhinya kriteria aspek yang diinginkan oleh kurikulum 2013, maka LKPD yang dikembangkan sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Depdiknas (2008) menegaskan bahwa bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Terdapat beberapa perbaikan yang telah dilakukan sesuai komentar dan saran validator, poin utama revisi yang dilakukan pada aspek kelayakan penyajian di poin kesesuaian model inkuiri terbimbing. Hasil validasi menunjukkan bahwa sintaks langkah-langkah model inkuiri terbimbing pada LKPD masih kurang tepat, seharusnya tidak terdapat materi. Menurut (Dyah dkk, 2013) langkah-langkah proses pembelajaran inkuiri terbimbing terdiri dari enam tahap, yaitu:

1. Orientasi

Tindakan yang diambil guru untuk mempersiapkan peserta didik untuk proses pembelajaran dikenal sebagai orientasi.

2. Merumuskan masalah

Proses membantu peserta didik untuk memecahkan kesulitan dimulai dengan perumusan masalah.

3. Mengajukan hipotesis

Hipotesis ialah solusi jangka pendek untuk masalah yang sedang diselidiki.

4. Mengumpulkan data

Tindakan mengumpulkan data atau informasi melalui koneksi yang ditawarkan oleh guru ada di tahap ini.

5. Menguji hipotesis

Proses menemukan respons yang benar terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data dikenal sebagai pengujian hipotesis.

6. Merumuskan kesimpulan

Merumuskan kesimpulan yaitu mendeskripsikan pengetahuan yang didapat berdasarkan hasil uji hipotesis.

Seluruh hasil perbaikan pada validasi materi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tampilan Sebelum dan Sesudah Revisi Berdasarkan Komentar dan Saran Ahli Materi

Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
<p>Validator memberikan komentar bahwa sintaks inkuiri terbimbing pada LKPD kurang sesuai, seharusnya tidak ada materi. Validator memberikan saran untuk LKPD yang dikembangkan disesuaikan dengan sintaks inkuiri terbimbing.</p> 	<p>Dilakukan perbaikan yaitu menyesuaikan isi LKPD dengan sintaks inkuiri, yang terdiri dari orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan.</p> 
<p>Saran validator, pada bagian judul petunjuk penggunaan ditambahkan sasaran, yaitu untuk peserta didik. Selain itu, petunjuk penggunaan LKPD sebaiknya disesuaikan dengan langkah-langkah model inkuiri terbimbing.</p> 	<p>Perbaikan dilakukan dengan memberikan petunjuk penggunaan disesuaikan dengan langkah-langkah inkuiri terbimbing.</p> 

**Kelayakan Bahasa**

Keterusterangan, komunikatif, dialogis, interaktif, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, dan norma bahasa adalah lima penanda yang digunakan selama tahap validasi. Hasil penilaian validator kualifikasi bahasa ditunjukkan Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Validasi Bahasa pada Setiap Butir Penilaian

Indikator	No	Butir penilaian	Rata-rata penilaian ahli (%)
Lugas	1	Ketepatan struktur kalimat.	91,66
	2	Keefektifan kalimat.	91,66
	3	Kebakuan Istilah.	100
Komunikatif	4	Pemahaman terhadap pesan atau informasi.	91,66

Dialogis dan Interaktif	5	Kemampuan memotivasi peserta didik.	100
Kesesuaian dengan Perkembangan Peserta Didik	6	Kesesuaian dengan perkembangan intelektual peserta didik.	91,66
	7	Kesesuaian dengan tingkat perkembangan emosioanal peserta didik.	91,66
Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa	8	Ketepatan tata bahasa.	83,33
	9	Ketepatan ejaan.	83,33

Berdasarkan hasil validasi bahasa pada Tabel 6 yang telah dilakukan perbaikan, didapatkan rata-rata persentase kelayakan bahasa adalah 93,88%. Pada rentang penilaian tersebut menandakan validitas bahasa pada LKPD dikategorikan sangat layak. Terdapat beberapa poin penting dalam kevalidan bahasa dalam sebuah pengembangan media pembelajaran. Pertama, kelugasan bahasa dalam sebuah bahan ajar diperlukan agar penjabaran materi tidak berbelit-belit, alhasil memudahkan peserta didik mengerti makna bacaan tersebut (Untari & Nurmiwati, 2021). Kedua, aspek kebahasaan yang komunikatif juga diperlukan dalam sebuah bahan ajar agar pembahasan materi yang tersaji dapat tersampaikan secara optimal (Yuliati & Ulfa, 2017). Ketiga, aspek bahasa yang dialogis dan interaktif diperlukan agar mendorong peserta didik termotivasi untuk terus membaca hingga tuntas, karena merasa tertantang dengan sajian materi (Purnanto & Mustadi, 2018). Keempat, bahasa yang digunakan disarankan sejalan dengan perkembangan anak usia sekolah, yang memang memiliki batasan dalam menafsirkan bahasa dari perspektif orang lain, sehingga peserta didik tidak jengkel dan gagal (Muhammad, 2018). Akhirnya, bahasa media pembelajaran harus mengikuti standar bahasa Indonesia yang sangat baik dan akurat, dan simbol dan frasa harus digunakan secara konsisten (Hersandi, 2015).

Pada validasi bahasa, tersapat beberapa saran dari validator, yaitu penggunaan kata kesimpulan yang kurang tepat sehingga direvisi menjadi simpulan. Selanjutnya, penggunaan titik-titik dan koma pada akhir kalimat tidak tepat, dan terminologi yang digunakan tidak sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang luas, oleh karena itu ditulis ulang sesuai dengan peraturan Bahasa Indonesia yang sangat baik dan tepat. Standar bahasa buku teks, seperti penggunaan bahasa yang tepat dan tepat, berdampak pada kegiatan belajar peserta didik (Budiono, 2014). Akibatnya, penggunaan bahasa dalam buku teks harus mematuhi aturan bahasa Indonesia yang sangat baik dan akurat agar peserta didik dapat memahami informasi dalam LKPD.

#### Kelayakan Media (Grafik)

Pada tahap validasi bahasa terdiri dari lima indikator, yaitu keharmonisan tata letak unsur, warna, dan ilustrasi, serta konsistensi tata letak dan tipografi dari LKPD. Hasil penilaian validator pada kelayakan media ada di Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Validasi Media (Grafik) pada Setiap Butir Penilaian

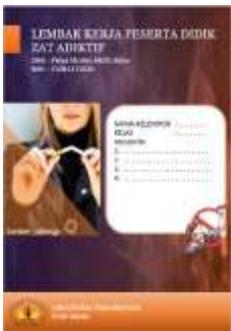
Indikator	No	Butir Penilaian	Rata-rata penilaian ahli (%)
Unsur tata letak yang harmonis	1	Bidang cetak dan margin proporsional.	100
	2	Penempatan judul, subjudul, ilustrasi dan keterangan gambar.	100
Keterpaduan warna yang harmonis	3	Keterpaduan antara warna, teks dan background (latar belakang).	91,66
	4	Gambar latar yang digunakan sudah kontras, harmonis dan tidak mengganggu tampilan lain seperti teks, kotak dan ilustrasi lainnya.	83,33
Ilustrasi yang harmonis dan bermakna	5	Kualitas ilustrasi gambar baik dalam segi posisi, warna, ukuran, kejelasan dan kehalusan ilustrasi	100
	6	Bentuk ilustrasi akurat dan proporsional sesuai dengan kenyataan.	91,66
	7	Ilustrasi sampul mampu menggambarkan isi materi ajar dan mengungkapkan karakter objek	100
Konsistensi tata letak	8	Ilustrasi isi mampu mengungkapkan makna/arti dari objek.	100
	9	Penempatan unsur tata letak konsisten.	91,66
Tipografi	10	Pemisahan antar paragraf jelas.	100
	11	Tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf.	100
	12	Penggunaan variasi (italic, bold, all capital, small capital) tidak berlebihan.	100

Menurut temuan evaluasi Pakar Media (Grafik) pada Tabel 7, Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Penyelidikan Terpandu (LKPD) yang dihasilkan memenuhi persyaratan luar biasa dengan persentase rata-rata 96,25%. Akibatnya, potongan-potongan yang dibuat oleh LKPD memiliki tata letak koordinasi dan palet warna, grafis yang disajikan secara harmonis dan bermakna, elemen tata letak yang konsisten, dan tipografi yang jelas. Diperkirakan bahwa desain grafis yang kuat dalam hubungannya dengan bahan ajar akan menggelitik minat dan antusiasme peserta didik untuk belajar (Sri Mulyani, 2021). Pengetahuan peserta didik tentang konsep pembelajaran dapat ditingkatkan melalui materi ajar yang menarik (Nurrita, 2018).

Terdapat beberapa perbaikan yang dilakukan pada bagian sampul halaman LKPD, berkaitan dengan aspek perpaduan warna. Aspek keterpaduan warna yang harmonis dapat dilihat dari pemilihan warna teks, *background* dan gambar latar yang kontras. Perihal itu bermaksud supaya pengembangan bahan ajar mudah untuk dibaca (Pangestu, 2021). Adapun ilustrasi dan gambar harus disajikan dengan tata letak dan warna yang sesuai agar tidak mengganggu konsentrasi peserta didik saat memahami materi (Mariyani dkk, 2020). Selain itu, sampul dalam bahan ajar sebaiknya menggunakan warna-warna yang cerah agar dapat menarik perhatian peserta didik (Ramadhani & Mahardika, 2015). Pada sisi yang lainnya, terdapat perbaikan

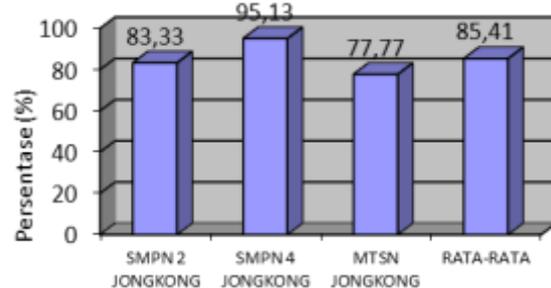
terhadap konsistensi tata letak unsur-unsur grafis pada bagian isi LKPD. Konsistensi tata letak sebuah desain grafis penting untuk diperhatikan, karena komposisi atau *layout* yang baik tidak hanya dapat memberikan kesan yang enak untuk dilihat namun, dapat juga memberikan pesan yang efektif untuk pembaca (Ratu dkk., 2015). Variasi dari unsur-unsur desain grafis penting dilakukan untuk memenuhi prinsip menyatukan irama (Erlyana & Giovani, 2018). Aspek tipografi dalam sebuah desain grafis juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesan desain komunikasi visual, apabila aspek tipografi ini kurang diperhatikan maka akan mengacaukan desain dan fungsi dari desain tersebut (Hasian & Putri, 2021). Terkait validasi media, validator memiliki beberapa saran untuk perbaikan. Perbaikan tersebut ada di Tabel 8.

Tabel 8. Tampilan Sebelum dan Sesudah Revisi Berdasarkan Komentar dan Saran Ahli Media

Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
<p>Terdapat beberapa komentar validator pada bagian sampul, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada bagian sampul, warna dan gambar kurang menarik serta terlihat suram</li> <li>2. Dicantumkan sasaran LKPD, yaitu untuk kelas VIII SMPN/MTsN</li> <li>3. Kolom nama kelompok, kelas, dan anggota terlalu besar, sebaiknya dikecilkan</li> </ol> 	<p>Dalam hal warna dan identifikasi pelajar di sampul, perbaikan dilakukan berdasarkan umpan balik dan saran dari validator.</p> 
<p>Pada bagian isi, desain footer kurang bervariasi</p> 	<p>Perbaikan dilakukan pada bagian desain isi LKPD.</p> 
<p>Desain dalam LKPD kurang konsisten karena ada halaman yang memiliki header &amp; footer dan ada yang tidak</p>	<p>Perbaikan dilakukan pada bagian desain konsistensi header dan footer pada LKPD</p>



Setelah dilakukan validasi kelayakan produk, selanjutnya dilakukan uji respon kepada 3 guru IPA SMPN/MTsN yang berdomisili di Jongkong diantaranya SMPN 2 Jongkong, SMPN 4 Jongkong dan MTSn 3 Kapuas Hulu. Hasil uji respon dapat dilihat pada Gambar 2.



Grafik 2. Hasil Uji Respon Guru Terhadap LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi zat adiktif untuk menumbuhkan karakter peduli kesehatan

Gambar 2 menunjukkan bahwa LKPD yang dihasilkan mendapat reaksi yang sangat baik, dengan persentase rata-rata 85,41%, yang di atas rata-rata. Ini menunjukkan bahwa LKPD yang baru dirancang menarik, mudah digunakan, dan berguna dalam mempelajari sifat adiktif bahan kimia. Menurut Umbaryati (2018), LKPD dapat membantu dan mendorong pembelajaran dengan membentuk interaksi antara pendidik dan peserta didik, sehingga meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar peserta didik. Selain itu, LKPD yang dikembangkan mudah digunakan karena dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang disesuaikan dengan langkah-langkah model inkuiri terbimbing. Petunjuk penggunaan tersebut dapat membantu guru serta peserta didik dalam menggunakan pengembangan media (Cahyarini, 2017). Pada saat uji respon guru, terdapat saran untuk perbaikan LKPD agar lebih baik lagi. Guru menyarankan untuk menambahkan sedikit gambar mengenai kerusakan organ bagi orang yang merokok. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui dampak buruk dari merokok yang dapat merusak organ. Menurut hasil Rini (2018), gambar dalam buku teks dapat meningkatkan kesediaan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dapat mendorong minat peserta didik dalam proses pembelajaran karena tantangan belajar mereka meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil Arini dkk (2020), yang mengungkap hubungan positif dan

substansial antara keinginan untuk belajar dan rasa ingin tahu. Selain itu, gambar ilustrasi yang disajikan dalam bahan ajar berperan untuk memperkuat narasi dalam konteks materi yang ingin disampaikan oleh penulis (Gilang dkk., 2018)

Berdasarkan hasil keseluruhan uji kelayakan dan respon guru, dapat disimpulkan bahwa “LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi zat adiktif untuk menumbuhkan karakter peduli kesehatan” sangat layak untuk diuji dalam pembelajaran IPA dan telah mendapat respon yang sangat positif dari guru IPA SMPN/MTsN di Jongkong, Kapuas Hulu. Peserta didik dapat menggunakan ide-ide yang telah dipelajari dan memecahkan masalah berdasarkan kemampuan proses ilmiah melalui konsep ilmiah melalui LKPD, yang didasarkan pada penyelidikan terpandu untuk menciptakan karakter peduli kesehatan.

#### 4. KESIMPULAN

Menurut temuan penelitian, “LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi zat adiktif untuk menumbuhkan karakter peduli kesehatan” memiliki tingkat kelayakan rata-rata 96,19% dengan kriteria yang sangat baik, dan “LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi zat adiktif untuk menumbuhkan karakter peduli kesehatan” menerima respon yang sangat baik dari guru, dengan persentase rata-rata 85,41% dengan kriteria yang sangat baik. Saran penelitian ini termasuk bahwa temuan tersebut diuji dan digunakan untuk penelitian tambahan tentang kemanjuran penggunaan bahan ajar berbasis LKPD berbasis inkuiri yang diarahkan pada zat adiktif untuk mempromosikan karakter peduli kesehatan.

#### 5. REFERENSI

- Agustina, F. (2017). Hubungan Umur dan Prilaku Merokok Siswa Kelas I SMP Terhadap Prestasi Belajar. *CENDEKIA MEDIKA*, 2(2), 26–37.
- Almaidah, F., Khairunnisa, S., Sari, I. P., Chrisna, C. D., Firdaus, A., Kamiliya, Z. H., Williantari, N. P., Akbar, A. N. M., Pratiwi, L. P. A., Nurhasanah, K., & Puspitasari, H. P. (2020). Survei Faktor Penyebab Perokok Remaja Mempertahankan Perilaku Merokok. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.20473/jfk.v8i1.21931>
- Anggreani, C. (2021). Pengembangan Lembar Kerja Peserta didik (LKPD) bermuatan Budaya Lokal untuk Anak Usia Dini. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 3500–3508.
- Arikunto. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (revisi 6). Rineka Cipta.
- Arini, N. K. A. D., Murda, I. N., & Agustiana, I. G. A. T. (2020). Korelasi Antara Rasa Ingin Tahu dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V. *Mimbar Ilmu*, 25(1), 20. <https://doi.org/10.23887/mi.v25i1.24472>
- Branch, R. M. (2009). *Desain Instruksional: Pendekatan ADDIE* (M. W. P. A. M. Claude Dellacherie, Ed.). Springer.
- Budiono, J. D. (2014). *Validitas Dan Kepraktisan Lkpd Berbasis Proyek Untuk Melatihkan Keterampilan Proses Sains Materi Tumbuhan Spermatophyta Kelas X Sma*. 3(3), 571–579.
- Cahyarini, Y. (2017). Pengembangan Buku Guru Dan Buku Siswa Mata Pelajaran Matematika Kelas I Sekolah Dasar Dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). *Skrispi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Dazrullisa, D., Rahman, A. A., & Violita, W. (2019). Kesalahan Konsep Siswa Pada Materi Persamaan Linear Berdasarkan Metode CRI (Certainty Of Respon Indeks). *GENTA MULIA*, X(1), 1–10.
- Depdiknas. (2008). *Panduan Pengembangan Bahan Ajar*. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- Dyah, S., Damayanti, N., Ngazizah, E., & Setyadi, K. (2013). Pengembangan Lembar Kerja Peserta didik (LKS) Dengan Pendekatan Inkuiri Terbimbing Untuk Mengoptimalkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Listrik Dinamis SMA Negeri 3 Purworejo Kelas X Tahun Pelajaran 2012/2013. *RADIASI: Jurnal Berkala Pendidikan Fisika*, 3(1), 58–62.
- Erlyana, Y., & Giovani, M. (2018). Analisis Cover Artwork Album-Album Gigi Band Gigi Band's Album Cover Artworks Analysis. *JURNAL TITIK IMAJI*, 1(2), 90–104.
- Fahmi, Abdullah, & Irhasyuarna, Y. (2021). Empowering Peat Lands as a Resource of Learning Natural Science to Strengthening Environment Care. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)*, 525. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210222.072>
- Fara, U., Noer, H., & Rasidin, U. (2019). Pengembangan Lkpd Berbasis Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta didik. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 12(2), 242-253.
- Safitri, Y. F., Melati, H. A., & Lestari, I. (2020). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Project Based Learning Materi Perubahan Fisika Dan Kimia. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*.
- Firdaus, M., & Wilujeng, I. (2018). Pengembangan LKPD inkuiri terbimbing untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 4(1), 26–40. <https://doi.org/10.21831/jipi.v4i1.5574>

- Gilang, L., Sihombing, R. M., & Sari, N. (2018). Pengaruh Konteks pada Ilustrasi Buku Pendidikan Karakter terhadap Perilaku Disiplin Anak Usia Dini. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(1), 41–50. <https://doi.org/10.24246/j.js.2018.v8.i1.p41-50>.
- Hairida, H., & Setyaningrum, V. (2020). The Development of Students Worksheets Based on Local Wisdom in Substances and Their Characteristics. *Journal of Educational Science and Technology (EST)*, 6(2), 106–116. <https://doi.org/10.26858/est.v6i2.12358>.
- Harsanti, T., & Wicaksono, F. (2017). Determinan Perilaku Merokok Pada Remaja Sekolah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 9(1), 25.
- Hasian, I., & Putri, I. (2021). Analisis Elemen Desain Grafis dari Visual Konten Instagram Indonesia Tanpa Pacaran Ditinjau dari Teori Retorika. *Jurnal Magenta*, 5(01), 633–646.
- Hersandi, M. (2015). Brosur IPA Terpadu sebagai Bahan Ajar di SMP ditinjau dari Aspek Keterbacaannya. *Seminar Nasional Jurusan Fisika FMIPA UM 2015*, 139–144.
- Jauhar, M. (2011). Implementasi Paikem dari Behavioristik sampai Konstruktivistik Sebuah Pengembangan Pembelajaran Berbasis CTL (Contekstual Teaching dan Learning). Presrasi Pustaka.
- Juniati, N.W., & Widiana, I.W. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* .1(1). 20-29.
- Larasati, W., & Dokhi, M. (2020). Variabel-Variabel Yang Memengaruhi Waktu Hingga Seseorang Menggunakan Narkoba Pertama Kali Menggunakan Analisis Survival. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 4(2), 359–373. <https://doi.org/10.29244/ijsa.v4i2.587>.
- Machini, F. N., Nafikadini, I., Gani, H. A., Promosi, B., Perilaku, I., & Masyarakat, F. K. (2015). *Self Esteem Pada Remaja Perokok (Studi Kualitatif di SMA Islam Lumajang) Self Esteem In Teen Smokers ( Qualitative Study in Senior High School Islam Lumajang )*. Jember: Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember.
- Mariyani, M., Setiyowati, R., & Fatihah, H. (2020). Analisis Tingkat Validitas Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Hots Dengan Sistem Barcode. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 200–205. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3747>
- Mirnowati, Nurfitriani, Zulfiarini, F. M., & Cahyati, W. H. (2018). Perilaku merokok pada remaja umur 13-14 tahun. *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 2(3), 396–405.
- Muhammad, S. F. (2018). Pembelajaran Bahasa Yang Sesuai Dengan Perkembangan Anak. *Al-Munzir: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam*, 11(2), 283–302.
- Mulyani, E. A. (2021). *Desain Grafis*. Media Sains Indonesia.
- Nurrita, T. (2018). Pengembangan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Misykat*, 3(1), 171-187. <http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v3n1.171>
- Pangestu, N. (2021). Modul Pembelajaran Berbasis Instagram Pada Materi Zat Adiktif Kelas VIII di MTSN 16 Tanah Datar. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- Pradita, E. N., & Wangid, M. N. (2017). Pengembangan LKPD Tematik-Integratif Berbasis Karakter Pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 56-70. <https://doi.org/10.21831/jpk.v7i1.15500>
- Purnanto, A. W., & Mustadi, A. (2018). Analisis Kelayakan Bahasa Dalam Buku Teks Tema 1 Kelas I Sekolah Dasar Kurikulum 2013. *Profesi Pendidikan Dasar*, 3(2), 101. <https://doi.org/10.23917/ppd.v3i2.2773>
- Purwanti, D. (2017). Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Dan Implementasinya. *Dwicandekia Jurnal Riset Pedagogik*, 1(2),14-20. <https://doi.org/10.20961/jdc.v1i2.17622>.
- Putri, A. S. (2020). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Learning Cycle 7e Tema “Bahaya Rokok Bagi Pernapasan” Untuk Meningkatkan Scientific Literacy Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains*.
- Raharja, S., Wibhawa, M. R., & Lukas, S. (2018). Mengukur Rasa Ingin Tahu Siswa. *Polyglot: Jurnal Ilmiah*, 14(2), 151-160. <https://doi.org/10.19166/pji.v14i2.832>
- Ramadhani, W. P., & Mahardika, I. K. (2015). Kefrafikaan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Multirepresentasi. *Seminar Nasional Fisika dan Pembelajarannya*, 85–91.
- Ratu, I. S., Belasunda, R., Desintha, S. (2015). Analisis Elemen Visual Corporate Identity Proxis Consulting Group Proxis Consulting Group Corporate Identity. *Prosiding---* 2(2), 359–366.
- Riduwan. (2015). *Buku Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (cetakan ke 6). Alfabeta.
- Rini, D. P. Y. (2018). Pengaruh Penggunaan Gambar Ilustrasi Dalam Buku Teks Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sulistiyowati, E. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Literasi Sains Berbasis Proyek Pada Pelajaran Ipa Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir. *Jurnal Sains*

- Edukatika Indonesia (JSEI)*, 1(2), 1–9.  
<https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/28048>
- Umbaryati. (2018). Pentingnya LKPD Pada Pendekatan Scientific Pembelajaran Matematika. *Jurnal UNNES*, 2(2), 217-225.
- Untari, T., & Nurmiwati. (2021). Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VIII (Sebuah Kajian Kualitas). *Jurnal Ilmiah Telaah*, 6(1), 66–81.
- Wati, S. H., Bahtiar, B., & Anggraini, D. (2018). Dampak Merokok Terhadap Kehidupan Sosial Remaja (Studi di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna). *Advanced Optical Materials*, 3(2), 503–509.
- Widiansyah, M. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Remaja Perokok Di Desa Sidorejo Kabupaten Penajam Paser Utara. *EJournal Sosiologi*, 2(4), 1–12.
- Yuliati, A., & Ulfa, M. (2017). Pengembangan Bahan Ajar Lks Berorientasi Pendekatan Komunikatif Berbasis Tugas. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 189–203.
- Zulmiyetri., Nurhastuti., & Safaruddin. (2020). *Penulisan Karya Ilmiah*. Kencana

# MODEL *CREATIVE THINKING* SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DI SEKOLAH DASAR

Oleh:

**Suratno**

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang  
Suratno@mail.unnes.ac.id

## Abstrak

Studi ini dilakukan untuk mengunpulkan informasi yang cukup terhadap model *Creative Thinking* dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah dasar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur untuk mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu untuk mengungkap atau mencari informasi mengenai model *Creative Thinking* sebagai inovasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Hasil studi yang telah dilakukan menemukan bahwa model *creative thinking* dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dapat mengkaitkan dengan masalah di kehidupan sehari-hari sehingga siswa terbiasa berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan berpikir kreatif siswa yang dikembangkan mencakup aspek kognitif dan afektif. Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa *creative thinking* sangat berperan penting dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai alat untuk meningkatkan berpikir kreatif.

**Kata kunci:** *Creative Thinking, Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Dasar*

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pembelajaran saat ini menuntut kreatifitas guru di dalam pembelajaran. Guru dituntut mengembangkan kreatifitas agar pembelajaran berjalan sesuai tujuan yang dicapai. Kreatifitas yang baik akan menunjang proses belajar yang aktif. Kemampuan berpikir kreatif tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 ayat 1 bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif mengakibatkan siswa kesulitan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran (Mulyasa, 2009). Kemampuan berpikir kreatif dapat berupa imajinasi individu dalam memecahkan masalah. Kemampuan berpikir kreatif yang dikembangkan dalam pembelajaran menurut (Munandar, 2004) meliputi aspek fluency (kemampuan berpikir lancar), flexibility (kemampuan berpikir luwes), originality (kemampuan berpikir orisinal), dan elaboration (kemampuan berpikir memerinci). Indikator dalam berpikir kreatif yang menjadi acuan peneliti menurut Munandar yaitu, keterampilan lancar; keterampilan luwes; keterampilan orisinal; keterampilan memerinci; serta keterampilan mengevaluasi.

Berpikir kreatif mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kemampuan pemecahan masalah.

Peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir kreatif tidak hanya mampu memecahkan masalah masalah non rutin, tetapi juga mampu melihat berbagai alternatif dari pemecahan masalah itu. Kemampuan berpikir kreatif merupakan bagian yang sangat penting untuk kesuksesan dalam pemecahan masalah. Seperti yang dikemukakan oleh Evans, J. R., (1991) Sikap positif terhadap pemecahan masalah dapat meningkatkan keberhasilan seseorang dalam pemecahan masalah. Berpikir kreatif dapat mempertinggi sikap positif peserta didik dengan tidak mengenal putus asa dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, berpikir kreatif sangat penting untuk keberhasilan pemecahan masalah. Menurut Usman (Utami, 2020) berpikir kreatif merupakan suatu kebiasaan dan pikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi dan mengungkapkan kemungkinan kemungkinan baru, membuat sudut pandang yang menakjubkan dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Krulik dan Rudnick (Siswono, 2017) menjelaskan bahwa berpikir kreatif merupakan pemikiran yang bersifat asli, reflektif, dan menghasilkan suatu produk yang kompleks.

Implementasi Pembelajaran IPS di sekolah harus dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut Hamid Hasan (1995) (Budiarti, 2015), bahwa tujuan pendidikan IPS meliputi pengembangan kemampuan intelektual yang meliputi pemahaman disiplin ilmu, berfikir disiplin ilmu, dan kemampuan prosesual. Tujuan yang kedua adalah pengembangan kemampuan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, termasuk di dalamnya kemampuan komunikasi, tanggung jawab sebagai warga negara dan dunia serta dan sikap positif

terhadap nilai, sikap, dan norma. Tujuan ke tiga adalah pengembangan diri sebagai pribadi, yaitu kemauan mengembangkan diri atau belajar lebih lanjut, dan kebiasaan positif sebagai pribadi.

Implementasi dilapangan bahwa pembelajaran IPS masih berada pada tataran teori saja. Guru hanya memfokuskan kepada pencapaian pemberian materi berupa teori posisi pendidikan IPS hanyalah “sebagai pelajaran hapalan” (Suwarma, 2004). Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, menunjukkan bahwa betapa pembelajaran di sekolah masih belum dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa secara maksimal, khususnya kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang dihadapinya

Konsekuensi dari cara mengajar guru yang cenderung tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran tidak dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang kreatif dan mandiri. Padahal siswa yang kreatif, akan mencari jalan keluar bagaimana agar dia tetap dapat membantu orang tua tanpa harus berhenti sekolah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Treffinger (Munandar, 2004)) bahwa “dengan belajar secara kreatif siswa dapat menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak diramalkan sebelumnya”. Melalui tulisan ini akan dicoba menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kreativitas siswa melalui pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, konsep studi literatur digunakan untuk menyusun data adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan untuk mengumpulkan, membaca, mencatat, mengolah dan menganalisis topik yang relevan (Auisena et al., 2021). Peneliti mengumpulkan data yang relevan dari buku, skripsi, dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian ini. Kemudian, data yang didapatkan dari sumber-sumber tersebut digunakan untuk mendukung gagasan peneliti dalam studi literatur atau kajian media jurnal bergambar di sekolah dasar ini. Objek peserta didik pada penelitian tentang kajian peranan creative thinking dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) dalah peserta didik untuk semua kelas pada jenjang pendidikan sekolah dasar, baik yang berada di kelas rendah maupun kelas tinggi. Ruang lingkup lokasi kajian dibatasi hanya untuk wilayah Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan nyata abad 21 adalah sumber daya manusia harus menguasai kompetensi utuh yang dikenal dengan keterampilan abad 21. Greenstein dalam (Dyah Indraswati, 2020) mengemukakan Abad 21 menuntut peserta didik menguasai keilmuan,

memiliki keterampilan metakognitif, dapat berpikir kritis dan kreatif, serta dapat berkomunikasi dan berkolaborasi. Untuk itu, pendidikan tinggi menjadi tempat yang strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan mampu melahirkan kemampuan 4C (Faiz, 2021).

Kurikulum 2013 diyakini menjadi salah satu kurikulum yang berbasis pada perkembangan peserta didik dalam menerapkan kemampuan 4C (Critical Thinking, Communication, Collaboration, and Creativity). Anies Baswedan (Republika, 2016) menjelaskan pengertian dari keterampilan 4C yang dimaksud, sebagai berikut: 1. Creativity (Kreativitas) adalah kemampuan untuk menciptakan suatu penemuan baru. Kreativitas peserta didik perlu dilatih setiap hari agar dapat menghasilkan sesuatu yang baru bagi masyarakat. 2. Critical Thinking (Berpikir kritis) adalah kemampuan peserta didik untuk menalar, mengungkapkan menganalisis dan memecahkan masalah. Pada era globalisasi, cretaive thinking digunakan untuk memfilter beragam informasi, karena banyaknya hoax yang tersebar dikalangan masyarakat. 3. Communication (Komunikasi) adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan, menanggapi, dan menggunakan informasi agar dapat terhubung dengan orang lain sehingga tercapai suatu perubahan kearah kemajuan. 4. Collaboration (Kolaborasi) adalah kemampuan peserta didik untuk bekerja sama dan bertanggung jawab dengan orang lain sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Keterampilan ini digambarkan dalam skema sebagai berikut:



**Gambar 1. Keterampilan 4c di abad 21**

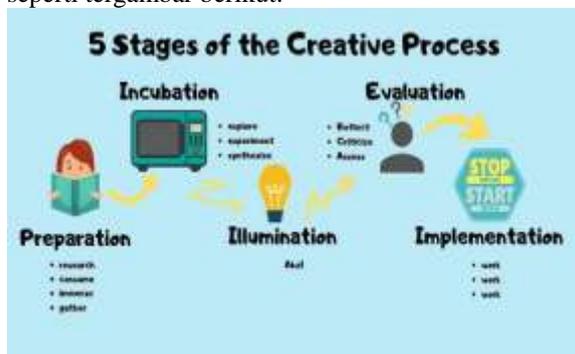
Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu komponen berpikir tingkat tinggi yang menjadi focus pembelajaran abad-21. Creative thinking atau berpikir kreatif merupakan suatu kesanggupan, kecakapan atau kekuatan untuk menghasilkan ide, gagasan, opini atau suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang orisinil yang relatif dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain sehingga menghasilkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, dengan proses yang mencerminkan kelancaran, kelenturan berpikir dan keaslian ide berpikir yang diciptakan seseorang. Wheeler (Dyah Indraswati, 2020) menyatakan bahwa berpikir kreatif merupakan salah satu yang paling penting bagi anak-

anak sedini mungkin untuk memperoleh dan mengembangkan keterampilan pada usia awal mereka. Berpikir kreatif dapat digunakan dalam sejumlah konteks pembelajaran untuk memperkaya perolehan pengetahuan dan keterampilan. Tanpa kemampuan berpikir kreatif, anak-anak tidak menjadi imajinatif dan seolah keterampilan yang didapat hanya keterampilan yang dipindah tangkankan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Lebih lanjut menurut (Ritin Uloli, 2016) Berpikir kreatif adalah upaya untuk menghubungkan benda-benda atau gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak berhubungan. Berpikir kreatif menggunakan benda-benda atau gagasan-gagasan yang sudah nyata ada dan di dalam pikiran kitalah sesungguhnya proses nyata itu berlangsung. Proses ini tidak harus selalu menciptakan suatu konsep-konsep baru, walaupun hasil akhirnya mungkin akan tampak sebagai sesuatu yang baru hasil dari penggabungan dua atau lebih dari konsep-konsep yang sudah ada.

Menurut Hulbeck (1945) (Budiarti, 2015) mengatakan "Creative action is an imposing of one's own whole personality on the environment in an unique and characteristic way". Tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungan. Kreativitas merupakan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan aktivitas individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, jadi dengan mengembangkannya.

Kreativitas diharapkan siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri atau kelompok. Kreativitas ini tercipta di segala bidang dan kreativitas dapat diajarkan di sekolah-sekolah, karena setiap orang pada dasarnya memiliki kreativitas pada dirinya meskipun dengan kadar yang berbeda-beda. Bahwa pada intinya kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.

Tahapan proses kreatif menurut Steven L. MC.Shane dan Mary Ann Von Glinow (Suprapti, 2015) yang menggambarkan proses kreativitas seperti tergambar berikut:



Gambar 1. The Creative Proses Model

Pertama, Tahap preparation (persiapan) adalah mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data/ informasi, mempelajari pola berpikir dari orang lain, bertanya kepada orang

lain. Dalam tahapan ini mencoba untuk mendapatkan ide-ide dalam menemukan kreativitas, dari tahapan ini akan menuju pada tahapan inkubasi. Kedua, Tahapan Inkubasi merupakan tahap pengumpulan informasi dihentikan, individu melepaskan diri untuk sementara masalah tersebut. Ia tidak memikirkan masalah tersebut secara sadar, tetapi "mengeramkannya" dalam alam pra sadar. Ketiga, tahap selanjutnya adalah tahap Iluminasi, tahap ini merupakan tahap timbulnya "insight" atau "Aha Erlebnis", saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru. Keempat atau tahap terakhir adalah tahap Verifikasi. Dalam tahap Verifikasi merupakan tahap pengujian ide atau kreasi baru tersebut terhadap realitas. Tahap ini memerlukan pemikiran kritis dan konvergen. Proses divergensi (pemikiran kreatif) harus diikuti proses konvergensi (pemikiran kritis). Setelah mengalami tahapan inilah akan muncul pemikiran kreatif dan kritis yang akan mendorong munculnya ide-ide inovatif.

Proses berpikir kreatif merupakan salah satu tahapan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Dan Manusia selalu diperhadapkan pada permasalahan sehingga diperlukan suatu proses berpikir kreatif untuk memecahkan masalah tersebut. suatu proses yang mengkombinasikan berpikir logis dan berpikir divergen. Berpikir divergen digunakan untuk mencari ide-ide untuk menyelesaikan masalah sedangkan berpikir logis digunakan untuk memverifikasi ide-ide tersebut menjadi sebuah penyelesaian yang kreatif. Lee, Kyung Hwa, (2005) (Ritin Uloli, 2016) menyatakan bahwa yang diperlukan dalam proses berpikir kreatif termasuk kepekaan, kefasihan, fleksibilitas, orisinalitas. Menurut Ramly (2011) Tes dalam kreativitas menggunakan Torrance Tes Creative Thinking (TTCT) dan tiga kemampuan yang diukur adalah Fluency (kelancaran), Fleksibilitas (Fleksibel) dan Originalitas (kebaruan).

Berkaitan dengan proses berpikir kreatif, Menurut Munandar (1999) (Utami, 2020) adapun ciri-ciri kemampuan creative thinking (berpikir kreatif) sebagai berikut: pertama, Fluency (keterampilan berpikir lancar) yaitu memiliki ciri-ciri seperti mencetuskan banyak pendapat, jawaban dan penyelesaian masalah, memberikan banyak cara atau saran dalam melakukan berbagai hal dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban, kedua Flexibility (keterampilan berpikir luwes) yaitu keterampilan memberikan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari banyak alternatif, pemecahan yang berbeda-beda dan mampu mengubah cara pendekatan. Ketiga, Originality (keterampilan berpikir orisinal) yaitu kemampuan melahirkan gagasan baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri dan mampu membuat kombinasi yang tidak lazim. Keempat Elaboration (keterampilan memperinci) yaitu kemampuan

memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, dan menambahkan atau memperinci secara detail dari suatu situasi sehingga lebih menarik.

Siswa kreatif memiliki Ciri-ciri perilaku (Nurizzati, 2012) sebagai berikut Menanggapi atau memberikan komentar terhadap sesuatu dengan penuh pertimbangan, Bersedia memperbaiki kesalahan atau kekeliruan, dapat menelaah dan menganalisa sesuatu yang datang kepadanya secara sistematis, Berani menyampaikan kebenaran meskipun berat dirasakan, bersikap cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan agama Allah maupun dengan urusan duniawi, Kebencian terhadap suatu kaum, tidak mendorongnya untuk tidak berbuat jujur atau tidak berlaku adil dan Adil dalam memberikan kesaksian tanpa melihat siapa orangnya walaupun akan merugikan diri sendiri, sahabat dan kerabat.

Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran yang ada di sekolah dasar salah satunya adalah pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS memiliki tujuan agar siswa dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, hal ini nada dengan (Saputra, 2019) yang menyatakan tujuan dari proses pendidikan di sekolah dasar adalah agar siswa mampu memahami potensi diri, memiliki peluang, dan memahami tuntutan lingkungan serta dapat merencanakan masa depan mengenai serangkaian keputusan yang paling mungkin bagi dirinya. Tujuan akhir pendidikan dasar adalah diperolehnya pengembangan pribadi anak yang dapat membangun dirinya sendiri dan ikut serta bertanggung- jawab terhadap pembangunan bangsa, mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan mampu hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan.

Berkaitan dengan tujuan di atas Hasan, (1996: 41) (Saputra, 2019) mengemukakan bahwa fungsi dari kurikulum IPS Sekolah Dasar adalah membentuk sikap rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah- masalah yang timbul akibat interaksi antara manusia dan lingkungannya. Sementara itu tentang materi pembelajaran dikemukakan Djahiri, (1995: 6) bahwa pengajaran IPS di Sekolah Dasar tidak bersifat pengetahuan. Ini bermakna bahwa yang diajarkan bukanlah teori- teori ilmu sosial, melainkan hal- hal yang praktis yang berguna bagi dirinya dan kehidupannya kini maupun kelak dikemudian hari dalam berbagai lingkungan serta berbagai aspek kehidupannya. Untuk kepentingan itu, pembelajaran IPS di SD harus dimulai dari lingkungan keluarga siswa itu sendiri, lingkungan sekolah dan para tetangga dengan cara membandingkan diantara sesamanya. Hal ini perlu ditekankan untuk memperjelas kebutuhan- kebutuhan dasar bersama, serta respek- respek yang mengiringinya, yaitu

fakta- fakta adanya keaneka ragaman (Mutakin, 2004: 17).

Pembelajaran atau pengajaran IPS merupakan kegiatan guru menciptakan situasi agar siswa belajar. Pendidikan IPS mempunyai arti bahwa merupakan seleksi dan rekonstruksi dari disiplin ilmu pendidikan dan disiplin ilmu sosial, humaniora, yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001:191). Melalui proses belajar tersebut terjadi perubahan, perkembangan, kemajuan, baik dalam aspek fisik- motorik, intelek, sosial-emosi maupun sikap dan nilai. Makin besar atau tinggi perubahan perkembangan yang dicapai siswa, makin baik pula proses belajar.

Aktualisasi Pendidikan IPS ini akan lebih menekankan langkah strategis jangka panjang dalam "laboratorium demokrasi" sebagai investasi sumber daya manusia (human investment) agar mutu generasi muda bangsa semakin meningkat dalam upaya demokratisasi untuk menghadapi masa mendatang yang akan penuh dengan masalah dan tantangan. Aktualisasi Pendidikan IPS tidak dimaksudkan untuk memecahkan masalah upaya demokratisasi dalam arti politik praktis difokuskan pada perkembangan akademiknya. Hal ini dimaksudkan agar Pendidikan IPS mampu melahirkan pikiran dan teori terbaiknya dalam upaya demokratisasi sebagai bagian untuk menjadikan "education as power".

#### 4. KESIMPULAN

Kemampuan berpikir kreatif siswa dapat ditingkatkan melalui pembelajaran IPS. Pembelajarannya dapat dikaitkan dengan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat terbiasa berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Kemampuan berpikir kreatif siswa yang dikembangkan mencakup aspek kognitif atau kemampuan berpikir kreatif/divergen maupun aspek afektif atau sikap kreatif. Pada dasarnya anak memperlihatkan ciri berpikir kreatif tertentu meskipun ciri yang diperlihatkan tidak selalu sama dan berada pada tingkat yang berbeda pula. Faktor pendukung berpikir kreatif siswa dapat bersumber dari sikap dan strategi mengajar tutor/guru, sarana pembelajaran, pengaturan ruang/fisik, teman, maupun orangtua siswa.

#### 5. REFERENSI

- Auvisena, A. U., Faiz, A., & Aeni, K. (2021). *Studi literatur: Analisis pengaruh dan upaya pengembangan perilaku prososial pada peserta didik sekolah dasar*. 19(1), 1–6.
- Budiarti, Y. (2015). Pengembangan Kemampuan Kreativitas Dalam Pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol.3.No.
- Dyah Indraswati, D. A. (2020). *Critical Thinking Dan Problem Solving Dalam Pembelajaran*

- Ips Untuk Menjawab Tantangan Abad 21. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 7, No. 1.
- Faiz, A. (2021). PERAN FILSAFAT PROGRESIVISME DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN CALON PENDIDIK DI ABAD-21. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(1), 131–135.
- Munandar, U. (2004). Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas dan Rineka Cipta.
- Nurizzati, Y. (2012). Upaya Mengembangkan Kemampuanberpikir Kritis Dan Kreatif. *Jurnal Edueksos*, Vol I No 2.
- Ritin Ulohi, P. d. (2016). Kajian Konseptual Proses Berpikir Kreatif Dan Pemecahan Masalah. *Jurnal Pendidikan*.
- Saputra, T. A. (2019). Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Siswono, T. Y. (2017). Proses Berpikir Kreatif Siswa Dalam Memecahkan Dan Mengajukan Masalah Matematika. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, VOLUME 15, NO 1.
- Suprpti, W. (2015). Inovasi, Berpikir Kreatif Dan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Suwarma, M. A. (2004). Pengembangan Berpikir dan Nilai Dalam Pendidikan IPS. *Jurnal Pendidikan*.
- Utami, R. W. (2020). Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Melalui Pendekatan Open-Ende. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 7 No. 1.
- Widiyanto, R. (2019). Pengembangan Pembelajaran Literasi Berbasis Creative Thinking. *Jurnal Kependidikan*

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB UMUM

Oleh:

**Imas Kurniawaty<sup>1)</sup>, Aiman Faiz<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Cirebon

e-mail: i.kurniawaty@upi.edu

e-mail: aimanfaiz@umc.ac.id

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kebijakan serta kendala dalam pengembangan mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Polman. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada dosen dan mahasiswa Polman, observasi dan dokumentasi. Pengajaran MKWU PKn di Polman ini sudah berjalan dengan baik. Pedoman kurikulum telah merujuk pada kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah: (1) MKWU dititipkan pada Unit Sosio Manufaktur (USM); (2) Pengajar MKWU PKn tidak ditangani oleh dosen lulusan PKn; (3) Dosen PKn yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, dalam proses pembelajaran cenderung mengajarkan ilmu Kewarganegaraan, bukan Pendidikan Kewarganegaraan; (4) Beban studi per semester selama 21 minggu dengan bobot sks yang banyak serta menggunakan sistem blok antara teori dan praktek; (5) Adanya program penyelesaian MKWU selama 3 minggu; (6) MKWU tidak diajarkan pada semester awal (semester 1 dan 2), melainkan diajarkan pada semester akhir (semester 5).

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah wajib umum

### 1. PENDAHULUAN

Hakikat pembelajaran di Pendidikan Tinggi adalah memperluas cakrawala berpikir mahasiswa, kesempatan berdialog dengan individu dari ilmu lain, kesempatan memperkaya kajian untuk pembuatan keputusan yang komprehensif, memperkaya dan menajamkan kemampuan analisis dan sintesisnya (Kemenristekdikti, 2017).

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan seperti korupsi, narkoba, hilangnya rasa cinta tanah air, menurunnya rasa bela negara, hingga ketidakpuasan masyarakat yang diwujudkan dalam demo-demo anarkis yang menunjukkan buntunya komunikasi antar pihak di Indonesia. Permasalahan diatas melanda generasi muda bangsa Indonesia. Bahkan bukan hanya generasi muda, anak di bawah umur saja bisa melakukan tindakan melanggar nilai moral. Dalam artikelnya Faiz et al., (2021) merangkum bahwa ada seorang siswa SD kelas V melakukan aksi kriminal, dengan mencuri motor (curanmor). Anak tersebut sudah 3 Kali Mencuri Motor, namun bukan untuk dijual, melainkan anak tersebut hanya ingin menaiki kendaraan saja, jika bensinnya sudah habis maka akan ia tinggal untuk mencari motor lain (TribunNews, 2021).

Selain itu juga, tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan manusia yang intelektual, beriman dan bertaqwa sekaligus matang secara emosional. Namun yang terjadi dalam tataran praksis, pendidikan masih menekankan pada kemampuan teoritis-kognitif saja.

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang menyebabkan melemahnya pendidikan di Indonesia, maka diselenggarakan Pendidikan Umum atau yang sering kita sebut mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional menyentuh tiga ranah dalam pendidikan, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor secara utuh dan seimbang.

Pendidikan Umum di perguruan Tinggi mempunyai tujuan untuk:

- 1) Sebagai usaha membantu perkembangan kepribadian mahasiswa agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat, bangsa serta agama;
- 2) Menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan kenyataan-kenyataan sosial yang timbul di dalam masyarakat;
- 3) Memberi pengetahuan dasar kepada mahasiswa agar mampu berpikir secara interdisipliner, mampu memahami pikiran para ahli berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian memudahkan mereka berkomunikasi.

Berdasarkan hasil semiloka tahun 1995 dosen-dosen UPI, Mata kuliah dasar umum adalah kelompok matakuliah yang mengkoordinasikan matakuliah-matakuliah yang termasuk pada bidang Pendidikan Umum (*general*), yaitu matakuliah yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif dan keterampilan semata melainkan lebih menekankan pada aspek konatif, bobot moral, mental, nilai serta makna yang menjadi karakter dasar kemanusiaan dengan menggunakan pendekatan multiaspek,

multidimensional, multidisipliner atau interdisipliner. Disinilah posisi pendidikan umum, sebagai pendidikan yang memberi warna atau integrasi antar disiplin ilmu sehinggadapat menjadikan manusia menjadi manusia yang utuh dan menyeluruh (Faiz, 2020).

Program mata kuliah dasar umum ini bisa diberikan pada setiap jenjang pendidikan dengan implementasi pembelajaran melalui sekumpulan pelajaran dasar umum di perguruan tinggi.

Setiap perguruan tinggi memiliki kekhasan mata kuliah dasar umumnya, seperti mata kuliah dasar umum di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung atau yang sering kita sebut Polman Bandung. Di lingkungan kampus Polman, mata kuliah dasar umumnya yaitu terdapat dua bidang mata kuliah yaitu bidang sosial dan humaniora serta Matematika dan sains alam. Bidang sosial dan humaniora terdiri dari Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Olahraga dan Pengabdian pada Masyarakat. Sedangkan bidang Matematika dan Sains Alam terdiri dari Kalkulus dan Matematika, Fisika, Kimia dan pengetahuan lingkungan.

Pedoman penyusunan kurikulum Politeknik Manufaktur Negeri Bandung ini disusun dengan merujuk pada:

- 1) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- 2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi,
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- 5) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014,
- 6) Perumusan Capaian Pembelajaran Bidang Teknik Terapan, Komisi Pembelajaran, FDPNI, 2014,
- 7) *Curricula 2015, A Four Year Strategic Plan for Manufacturing Education, society of Manufacturing Engineers, 2011,*
- 8) Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi 2014, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran 2014, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pedoman penyusunan kurikulum ini diperuntukkan bagi program studi di semua jenjang

pendidikan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, yaitu program pendidikan Diploma-3 (Ahli Madya) dan Sarjana Terapan. Kurikulum jenjang pendidikan ini merupakan kurikulum program pendidikan tinggi vokasi terapan.

Pendidikan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung adalah suatu upaya kreatif mengembangkan potensi peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian yang ditunjang keilmuan, yang akan menjadi panutan di tengah masyarakat dalam membantu mewujudkan cita-cita masyarakat yang mandiri, sejahtera dan bermartabat. Hal ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan minat dan potensinya. Pendidikan tersebut dilaksanakan melalui bentuk-bentuk berikut ini:

- 1) Pendidikan keahlian yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai akademis yang luhur dan etika profesi.
- 2) Pengembangan kepribadian yang bermartabat. Pengembangan kepribadian ini mencakup:
  - (i) Pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi etika, memiliki etos kerja, sikap serta perilaku yang patut diteladani dalam masyarakat profesi yang digelutinya;
  - (ii) Pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi tata nilai yang luhur, serta sikap dan perilaku yang patut diteladani dalam kehidupan bermasyarakat di mana ia berada.

Matakuliah dan sks minimum yang wajib ada pada kurikulum program studi meliputi:

Tabel 1. Sosial dan Humaniora

No	Mata Kuliah	sks	
		D3	D4
1	Agama	3	3
2	Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3
3	Bahasa Indonesia	3	3
4	Bahasa Inggris	2	2
5	Olahraga	2	2
6	Pengabdian pada Masyarakat	-	2
	Jumlah sks	13	15

Tabel 2. Matematika dan Sains Alam

No	Mata Kuliah	sks	
		D3	D4
1	Kalkulus dan Matematika	6	10
2	Fisika (+Praktikum)	4	6
3	Kimia (+Praktikum)	2	4
4	Pengetahuan Lingkungan	2	2
	Jumlah sks	14	22

Dalam menjalankan proses pendidikan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kualitas, kemampuan, sikap dan perilaku bagi lulusan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung yang didasarkan pada peran yang diharapkan akan dipegang oleh lulusan tersebut;
- 2) Kendali mutu, baik dalam konsep pendidikan, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikan beserta pembelajarannya, yang harus dilakukan berdasarkan standar akademis dan professional yang berlaku dan diakui di dunia internasional;
- 3) Kesadaran akan adanya kebutuhan pendidikan sepanjang hayat, seiring dengan dinamika

perkembangan ilmu, teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Sikap dan proses pembelajaran dalam pendidikan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung berorientasi pada perwujudan lulusan yang memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan pengembangan sebagai hasil dari pengalaman pendidikan dan praktek industri yang sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- 2) Memadukan dan memberdayakan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- 3) Melakukan berbagai upaya dalam menciptakan konsep dan pemikiran ataupun barang atau jasa bagi kemaslahatan masyarakat;
- 4) Bekerjasama serta membawakan dirinya, baik dalam masyarakat profesi dengan melaksanakan etika keprofesiannya maupun dalam masyarakat umum dengan membawakan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional, maka *output* perguruan tinggi diharapkan menjadi pemeluk agama yang taqwa, warganegara yang sadar dan berdisiplin, anggota keluarga yang sakinah, individu yang mampu mengembangkan diri dan membangun lingkungan hidupnya, baik lingkungan sosial, lingkungan budaya maupun lingkungan alamiah. Secara khusus program matakuliah dasar umum bertujuan menghasilkan warga negara yang berkualifikasi sebagai berikut:

- 1) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain.
- 2) Berjiwa Pancasila, sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan memiliki kepribadian yang tinggi yang mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan.
- 3) Memiliki wawasan yang komprehensif dan pendekatan integral dalam menyikapi permasalahan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan maupun pertahanan keamanan.
- 4) Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama mampu berperan serta meningkatkan kualitasnya maupun lingkungan alamiah dan secara bersama-sama berperan serta dalam pelestariannya.

Tujuan Pendidikan Pancasila yang utama adalah untuk dipahami, dihayati, dan diamalkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai peran, fungsi, dan kedudukannya masing-masing.

Menurut Model Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian (2003), tujuan dari kuliah Pancasila adalah menjelaskan landasan tujuan Pendidikan Pancasila, Sejarah Paham Kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem

filsafat, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

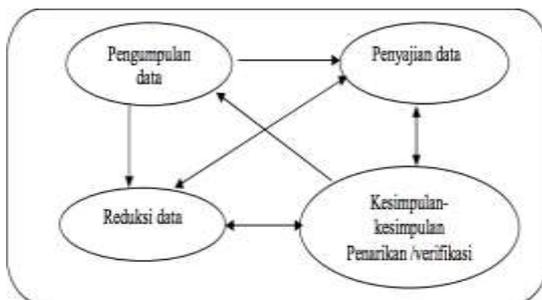
Melalui pembelajaran matakuliah ini, mahasiswa di ajak untuk menjadi salah satu upaya pembangunan karakter yang sesuai dengan Pancasila (RISTEK DIKTI, 2016), mata kuliah wajib umum dalam hal ini yang dimaksud adalah mata kuliah wajib umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Matakuliah Pancasila/Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara spesifik, tujuan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi (Pembelajaran et al., 2013, hal. viii) yaitu, untuk:

- 1) Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- 4) Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. karakteristik penelitian adalah *natural setting*, yaitu peneliti mengumpulkan data penelitian di lokasi partisipan alami (Creswell, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi

dilakukan kepada dosen dan mahasiswa. Analisis data penelitian dengan mengumpulkan data secara umum dengan didasarkan pada pertanyaan yang bersifat umum dan informasi dari para partisipan (Creswell, 2013) selanjutnya peneliti memulainya analisis hasil data dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu reduksi, penyajian, dan pengambilan keputusan sesuai dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung yang terletak di Jalan Kanayakan No.21 Dago Bandung.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Politeknik Manufaktur Bandung atau yang lebih dikenal dengan Polman Bandung adalah politeknik pertama di Indonesia yang dahulu bernama Politeknik Mekanik Swiss (PMS-ITB). Pendirian Polman Bandung merupakan hasil kerja sama bilateral antara pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan konfederasi Swiss. Berbeda dengan sistem pendidikan akademik yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan IPTEK masyarakat luas, pendidikan tinggi berbentuk Politeknik adalah Pendidikan Tinggi vokasi (Vocational Oriented Higher Education) yang memiliki tugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat langsung memasuki pagar kerja sesuai dengan keahlian yang di milikinya sesuai dengan arti kata vokasional yang bermakna keahlian.

Politeknik Manufaktur Bandung memiliki empat jurusan Teknik dengan program studi dan konsentrasi keahlian yang berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu:

1. Jurusan Teknik Manufaktur (ME)
  - D-3 Prodi Teknik Pembuatan Perkakas Presisi
  - D-3 Prodi Teknik Pemeliharaan Mesin
  - D-3 Prodi Teknik Mekanik Umum
  - D-4 Prodi Teknik Mesin dan Manufaktur
2. Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur (DE)
  - D-3 Prodi Teknik Perancangan Perkakas Presisi
  - D-3 Prodi Teknik Perancangan Mekanik Umum
  - D-4 Prodi Perancangan Manufaktur
3. Jurusan Teknik Pengecoran Logam (FE)

- D-3 Prodi Teknik Pengecoran Logam
  - D-4 Konsentrasi Teknologi Foundry
4. Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekanika (AE)
    - D-3 Prodi Teknik Mekanika
    - D-4 Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi

Polman merupakan Perguruan Tinggi di Indonesia yang dalam penyelenggaraannya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia termasuk dalam penyusunan kurikulum. Panduan penyusunan kurikulum Polman merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia (ayat 3). Mata kuliah tersebut dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma (ayat 5).

Pedoman kurikulum Polman diperuntukkan bagi program studi di semua jenjang pendidikan Diploma-III (Ahli Madya) dan Diploma-IV (Sarjana Terapan). Selain itu, terdapat dua kelompok mata kuliah wajib yang perlu diselesaikan, yaitu kelompok Matematika dan Sains serta Kelompok Sosial dan Humaniora. Kelompok Matematika dan Sains terdiri dari mata kuliah Matematika, Fisika, Kimia, dan Pengetahuan Lingkungan. Sedangkan kelompok Sosial dan Humaniora terdiri dari mata kuliah Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Olahraga, Pengabdian pada Masyarakat (khusus D-IV).

Berdasarkan hasil penelitian, Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Kewarganegaraan di Politeknik Manufaktur Negeri ini sudah berjalan dengan baik hanya saja masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan atau kebijakan mata kuliah wajib umum yang berlaku. Meskipun pedoman kurikulum Polman sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sampai saat ini Politeknik Manufaktur Bandung tidak memiliki departemen Mata Kuliah Wajib Umum yang fokus mengurus mata kuliah tersebut, tetapi Mata kuliah wajib umum dititipkan pada Unit Sosio Manufaktur (USM). Hal tersebut dikarenakan seluruh jurusan di Polman merupakan jurusan teknik dan tidak terdapat jurusan yang sesuai dengan mata kuliah wajib umum. Ditambah tidak adanya dosen tetap mata kuliah wajib umum menyebabkan proses persiapan pengajaran hingga evaluasi belum dilakukan secara maksimal.

Sumber daya manusia (pengajar MKWU) di Polman terutama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan awalnya ditangani oleh dosen yang bukan lulusan PKn. Hal tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dosen mata kuliah wajib umum yang telah diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43 tahun 2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi:

- a) Dosen berijazah Magister (S2) Ketahanan Nasional dan Magister (S2) Pendidikan Ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Sosial Budaya, Filsafat, dan Hukum yang mendapat pembekalan Pendidikan Kewarganegaraan.
- b) Apabila belum tersedia dosen yang berijazah Magister (S2) dapat diangkat dosen yang minimal berijazah Sarjana (SI) di bidang Pendidikan ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Sosial Budaya, Filsafat, Hukum, dan Sarjana bidang lain yang memiliki wawasan PKn secara memadai dan mendapat pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan atau lulusan Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan atau Sarjana (SI) dengan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan integritas pribadi sebagai dosen yang dinilai memiliki kompetensi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kualifikasi dosen menjadi sangat penting dalam menentukan tujuan pembelajaran mata kuliah wajib umum. Dosen PKn yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan belum tentu memahami hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dalam proses pembelajaran cenderung mengajarkan Ilmu Kewarganegaraan, bukan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kerangka Pendidikan umum.

Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari *Civics*. Ilmu Kewarganegaraan mengambil porsi dari ilmu yang demokrasi politik. Ilmu Kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu yang mendeskripsikan peranan warga negara atau hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam dan tugas-tugas pemerintahan yang dilihatnya dari pendekatan yuridis formal dan sosio-politis. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan *CivicEducation* atau *Citizenship Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) atau *PoliticalEducation* (Pendidikan Politik) versi Indonesia. PPKn merupakan usaha pembinaan peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 dan yang secara dominan mendasarkan karakter Ilmu politik dalam memprogram dan pengajarannya sehingga diharapkan dapat terwujudnya warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Serta mampu ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan, seperti kemiskinan, masalah penyakit, permasalahan global, dan sebagainya (Parhan & Sukaenah, 2020).

Pemahaman dosen mengenai mata kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan sangat berpengaruh terhadap metode pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dalam proses pembelajaran, dosen dengan pemahamannya memegang peran penting dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran.

Keberhasilan sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari peran guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan didukung dengan pemilihan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. Disamping menarik perhatian siswa, pendekatan pembelajaran juga dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan pada setiap mata pelajaran. (Hidayah, dkk, 2019: 22)

Hasil temuan lain dari penelitian ini adalah masa studi per semester di Polman yang terhitung lama yaitu 21 minggu dan bobot sks yang banyak. Polman menggunakan sistem blok antara teori dan praktek dengan pembagian satu minggu teori lalu dilanjutkan dengan dua minggu praktek. Jika dihitung, maka lama proses belajar efektif di kelas adalah 7 minggu dan praktek industri adalah 14 hari. Berhubung dengan lebih sedikitnya waktu yang dapat digunakan untuk belajar di kelas, maka Polman menyediakan program untuk menyelesaikan mata kuliah wajib umum dalam waktu tiga minggu.

Program percepatan penyelesaian mata kuliah wajib umum selama tiga minggu merupakan solusi bagi mahasiswa dengan jadwal praktek yang begitu padat. Namun, program tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti RI No 44 Tahun 2015: Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pemangkasan waktu studi dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Bahan ajar yang perlu disampaikan selama 16 kali pertemuan akan dipadatkan sehingga dapat disampaikan dalam waktu 3 minggu. Pembelajaran satu mata kuliah yang dilakukan setiap hari akan menyebabkan kebosanan bagi mahasiswa karena akan terasa monoton. Kebosanan tersebut dapat berakibat pada penyerapan serta pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut. Maka dari itu, program mata kuliah wajib umum tiga minggu belum bisa dikatakan efektif.

Mata kuliah wajib umum di Polman tidak diajarkan pada semester awal (semester 1 dan 2), tetapi pada semester akhir (semester 5). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa yang hendak terjun ke dunia kerja telah memiliki bekal untuk hidup bermasyarakat yang sesuai dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jumlah sks mata kuliah wajib umum Pancasila dan PKn telah sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 tahun 2006 Pasal 10, yaitu beban studi untuk matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 (tiga) sks (satuan kredit semester).

#### 4. KESIMPULAN

Pengajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Kewarganegaraan di Politeknik Manufaktur Negeri ini sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan panduan kurikulum Polman, MKWU kelompok Sosial dan Humaniora, diantaranya adalah mata kuliah Agama, Pancasila dan KWN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Olahraga, Pengabdian pada Masyarakat (khusus D4). Selain itu, penentuan sks MKWU sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun pedoman kurikulum telah merujuk pada kebijakan yang telah ditetapkan, masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah:

1. Tidak ada departemen mata kuliah wajib umum sehingga MKWU dititipkan pada Unit Sosio Manufaktur (USM)
2. Sumber daya manusia (pengajar MKWU) terutama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan awalnya ditangani oleh dosen yang bukan lulusan PKN.
3. Dosen PKN yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, sehingga dalam proses pembelajaran cenderung mengajarkan ilmu Kewarganegaraan, bukan Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Beban studi per semester dan bobot sks yang banyak dan menggunakan sistem blok antara teori dan praktek di 18 minggu.
5. Adanya MKWU paket selama 3 minggu
6. MKWU tidak diajarkan pada semester awal (semester 1 dan 2), melainkan diajarkan pada semester akhir (semester 5), hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

## 5. REFERENSI

- Cholisin. 2014. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faiz, A. (2020). Pendidikan nilai dan karakter dalam perspektif pendidikan umum di perguruan tinggi. *Sosioreligi*, 18(2), 1–7.
- Faiz, A., Soleh, B., Kurniawaty, I., & Purwati. (2021). Tinjauan Analisis Kritis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan Karakter di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, Volume 5(4), 1766–1777.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1014>
- Parhan, M., & Sukaenah. (2020). Pendekatan Kontekstual Dalam Meningkatkan Pembelajaran a Contextual Approach To Improving Pancasila and Civic Education. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 360–368.
- Hidayah, dkk. 2019. *Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 1, Hlm. 22-33
- Kemenristek Dikti. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016
- Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43 tahun 2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
<https://belmawa.ristekdikti.go.id/pengayaan-mata-kuliah-wajib-umum-di-perguruan-tinggi/>  
<https://polman-bandung.ac.id/>

# ORIENTALIS PLUS DI PONDOK PESANTREN NAWESESA YOGYAKARTA (STUDI LITERATUR PEMIKIRAN PROF. YUDIAN WAHYUDI)

Oleh:

**Ahmad Akso Abdur Rouf**  
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
akso011258@gmail.com

## Abstrak

Artikel ini untuk menjelaskan bahwa bagaimana melakukan pembaharuan pendidikan pesantren menjadi Universitas kelas dunia dan mencetak Orientalis Plus, menurut Yudian Wahyudi. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dan paradigma naturalistic. Menurut Yudian bahwa tujuan mendirikan pesantren dengan nama "NAWESEA" (North America Western Europe and Southeast Asia) adalah ingin mendorong santri-santri yang sudah sarjana khususnya alumni UIN Sunan Kalijaga untuk dapat melanjutkan kuliah di Barat agar menjadi Orientalis Plus. Yakni santri-santri yang bisa memadukan antara Orientalis (umumnya non-muslim) dengan iman. Jadi orientalis Plus, agar lahir santri-santri yang memenuhi semua persyaratan akademik orientalis, tetapi berhasil menjadi dosen Islamic Studies di Barat. Pada umumnya sarjana-sarjana setelah menyelesaikan kuliahnya mereka mencari kerja atau bekerja untuk memperoleh kehidupan yang mapan dan menjamin kesejahteraan masa depan, kurang memikirkan bagaimana kemajuan masyarakat ke depan, hal ini mungkin kurang adanya sosialisasi atau pembinaan dari para senior atau dosen dan menggugah pemikiran mereka untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, lebih-lebih ke negara Barat. Nawesea salah satu solusi untuk mengakomodir dan mendorong agar para lulusan S1 dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dalam strata pendidik

**Kata kunci:** Orientalis, Ponpes Nawesea, Yudian Wahyudi

## 1. PENDAHULUAN

Sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai Kawasan dunia Muslim, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Pembaharuan dan modernisasi pendidikan Islam, tidak ragu lagi bermula di Turki menjelang pertengahan abad ke-19, dan diikuti oleh Mesir, dimulai oleh Muhammad Ali Pasha. Sedangkan sistem pendidikan modern di Indonesia dimulai oleh sistem pendidikan Belanda, baru kemudiann diikuti oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia atau pendidikan asli Indonesia, walaupun saat itu masih dalam penjajahan Belanda. Belanda waktu itu mendirikan *Volkschoolen*, sekolah rakyat atau sekolah desa (nagari) dengan masa belajar 3 tahun, dibeberapa daerah di Indonesia sangat antusias. Namun untuk di Jawa sendiri, Belanda merasa kecewa, karena tingkat putus sekolah sangat tinggi dan mutu pengajaran sangat rendah (Yudian Wahyudi, 2021).

Pesantren Nawesea Yogyakarta (North America Western Europe and Southeast Asia) didirikan dengan semangat menjadi universitas kelas dunia sebagaimana seminari yang sekarang menjadi Harvard. Dan merancangannya sebagai Nawesea English Pesantren for Under and Postgraduate Students, Ia ingin mendorong alumni-alumni S1 UIN Sunan Kalijaga yang nyantri di Nawesea untuk melanjutkan kuliah ke Barat. Ia ingin mencetak "Orientalis Plus", yaitu santri-santri yang bisa

memadukan antara Orientalis (umumnya non-Muslim) dengan Iman. Nilai plus tersebut agar lahir santri-santri yang memenuhi semua persyaratan akademik Orientalis, tetapi berhasil menjadi dosen Islamic Studies di Barat yang orientalisme plus.

Disamping itu resistensi yang kuat terhadap sekolah tersebut, para Kyai memandangnya sebagai bagian integral dari rencana pemerintahan colonial Belanda untuk "membelandakan" anak-anak para Kyai. Respon yang relatif baik- untuk tidak mengatakan antusias-terhadap sekolah desa ini justru muncul di Minangkabau, sehingga banyak surau yang merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam-yang ditransformasikan secara formal menjadi sekolah-sekolah nagari. Sekolah-sekolah nagari yang semula merupakan surau tersebut, ternyata tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum yang digariskan pemerintah Belanda, sehingga mendorong Belanda untuk melakukan standarisasi kurikulum, metode pengajaran dan lain-lain (Wahyudi, 2021). Yudian Wahyudi mengatakan bahwa, pertama; pendidikan pesantren atau tradisional Indonesia tidak memiliki apa-apa pada saat itu, sedangkan awal dunia Islam membuang *experimental sciences* dari kurikulum madrasah dan kedua; seminari mengembangkan *experimental sciences*, tetapi pesantren membuang *applied sciences* ini dari kurikulum (Yudian, 2022).

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik

yang dibahas. Dengan tujuan tersebut maka metodologi penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan literature dengan cara membaca, mencatat, mengolah, menganalisis dan memparaprase berbagai konsep yang bersumber dari buku, artikel, pemikiran para ahli sebagai dasar penelitian ini (Faiz, 2019; Faiz & Faridah, 2022).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prof. Yudian sang pendobrak sebagai 'Orientalis Plus' yang menurut penulis sejalan dengan ide-ide Khalil Abdul Karim dalam menentang adanya penafsiran-penafsiran harfiyah terhadap sumber Islam (al-Qur'an dan Sunnah) oleh orang-orang yang telah dimakluminya berasal dari pendidikan pas-pasan dalam ilmu-ilmu keislaman (SLTA, Pondokan dan Doktorandus). Selama mengikuti tatap muka dengan Prof. Yudian dalam menempuh mata kuliah Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia, saya dapat menangkap apa yang sebenarnya terjadi dari segi otoritas perkembangan keilmuan di Indonesia. Prof. Yudian hadir dengan segenap kritik tajam dan solusi terbarunya untuk mendobrak sistem pendidikan Pesantren dan sekolah yang dianggap mapan selama ini, ternyata banyak ditemukan kendala di sana sini yang sungguh telah merugikan masa depan anak bangsa Indonesia, karena mereka telah mengenyam pendidikan yang berkualitas rendah (tidak mutu) (Mahmudah, 2011).

Dalam sejarah Modernisasi dan istilah modern didalam pondok pesantren sangat sedikit di fahami oleh para pembelajar dan Pelajar di berbagai Istandi. Tulisan ini mencoba untuk menyajikan dan mendeskripsikan modernisasi pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al-muhsinin baik dari segi Historis pada priode awal dan akhir, Kurikulum Pembelajaran, Sistem pembelajaran, Metode Pembelajaran, Proses Modernisasi pendidikan di Indonesia Adapun Fokus pada tulisan ini adalah mengkaji Proses Modernisasi Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al-Muhsinin Kerinci. yang mana unsur didalam nya mencakup: Sejarah Modernisasi Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al-muhsini, Kurikulum Pembelajaran Periode-awal dan Periode-akhir, Metode Pembelajaran, Evaluasi pembelajaran dan lain sebagainya.

Banyak pesantren yang menamakan diri dengan istilah pesantren modern, atau pesantren dengan mengembangkan baik bahasa maupun metode ataupun memberrikan pasilitas yang serba baru dan maju, namun tidak seperti pesantren Nawasea yang ada di Yogyakarta, yakni dengan misi yang sangat menarik dan menantang yakni mencetak Orientalis Plus. Yudian mengatakan pesantren Nawasea menerapkan sistem pendidikan modern dan kini telah memiliki kurikulum terpadu, pendidikan berasrama, serta pengajaran bahasa Inggris yang telah diterapkan secara intensif. Bahkan kegiatan takror dan sorogan di pesantren Nawasea diisi

dengan belajar Matematika dan IPA menggunakan bahasa Inggris dan Arab atau belajar Inggris menggunakan bahasa Arab. Nawasea singkatan dari North America Western Europe and Southeast Asia. Yudian ingin merancang nya sebagai Nawasea English Pesantren for Under and Postgraduate Students, Ia ingin mendorong alumni-alumni S1 UIN Sunan Kalijaga yang nyantri di Nawasea untuk melanjutkan kuliah ke Barat. Ia ingin mencetak 'Orientalis Plus', yaitu santri-santri yang bisa memadukan antara Orientalis (umumnya non-Muslim) dengan Iman. Nilai plus tersebut agar lahir santri-santri yang memenuhi semua persyaratan akademik Orientalis, tetapi berhasil menjadi dosen Islamic Studies di Barat. Dengan demikian, belum ada penelitian tentang misi Pesantren Nawasea untuk menjadi universitas kelas dunia.

Yudian ingin mempercepat perwujudan generasi sarjana muslim yang memadukan antara syir'ah salaf dengan Minhaj alias ilahiat dengan mujarrobot (metafisis-transendental tetapi Praksis-eksperimentalalis). Dengan begitu akan lahir ulama "Nuh", ulama "Daud", ulama "Yusuf", ulama "Isa" dan seterusnya. Untuk menopang cita-cita tersebut, Yudian mendirikan Yudian W. Asmin Fellowship/Beasiswa Yudian W. Asmin. Hal itu Dia lakukan karena baginya ilmu bukanlah an sich (pada dirinya sendiri dalam bahasa Jerman), tetapi rahmatan lil 'alamin.

Azyumardi Azra dalam Bilik-bilik Pesantren Nurcholis Majid mengatakan, Tetap bertahannya pesantren mengisyaratkan bahwa tradisi dunia Islam dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan di tengah deru modernisasi. Yudian mengatakan Pesantren Nawasea merupakan lembaga pendidikan Islam swasta yang dirintisnya sejak tahun 2005. Dengan menerapkan sistem pendidikan modern dan kini telah memiliki Kurikulum terpadu, pendidikan berasrama serta pengajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang telah diterapkan secara intensif. Bahkan kegiatan "Takror" dan "Sorogan" diisi dengan belajar Matematika dan IPA menggunakan Bahasa Inggris dan Arab. atau belajar Inggris menggunakan bahasa Arab. Di pesantren Nawasea diwajibkan untuk mukim atau menetap di dalam lingkungan pesantren dengan pengawasan 24 jam. Dengan pola pendidikan yang diterapkan, tentu pesantren tersebut memerlukan sumber daya manusia yang tepat guna dalam melaksanakan pengawasan dan kegiatan belajar mengajarnya. Yudian ingin memadukan kembali agama dengan sains-teknologi. Ia ingin mempercepat perwujudan generasi sarjana muslim yang memadukan antara syir'ah salaf dengan Minhaj alias ilahiat dengan mujararobot (metafisis – transcendental – tetapi praksis-eksperimental). Dengan begitu akan lahir ulama "Nuh", ulama "Daud", ulama "Yusuf", ulama "Isa" dan seterusnya. Salah satu solusinya adalah melalui ajaran "Tarekat Sunan Anbia" yang telah ia dirikan.

Dalam rekonstruksi Nurcholis Majid, bahwa kelemahan yang dihadapi oleh lembaga pesantren adalah antara lain : 1)lemahnya visi dan tujuan yang dibawa pendidikan pesantren; 2) Adanya pengaruh semangat pribadi para pendirinya; 3)Kurangnya kemampuan pesantren dalam merespon dan mengimbangi perkembangan zaman; 4)lemahnya Metodologi, kurang adanya improvisasi metodologi, proses tranmisi itu hanya melahirkan penumpukan keilmuan.Dari kelemahan-kelemahan tersebut menurut Nurcholis timbul masalah-masalah yang harus dihadapi pesantren antara lain : 1) Tidak ada yang dapat memimpin proses perubahan pesantren kecuali orang dalam; 2)Perubahan yang dilakukan tidak mungkin radikal revolusioner; 3) Kesahan atau legitimate pimpinan dengan harisma. Tetapi tidak cukup dengan harisma saja, tetapi juga diperlukan skill atau keahlian; 4)Biaya senantiasa merupakan persoalan yang kronis; 5)Untuk pertimbangan efisiensi, dan karena keterbatasan biaya dan lainnya, maka perlu disusun skala prioritas yang bisa dituangkan dalam rencana kerja, baik jangka pendek maupun jangka Panjang.

Yudian mengatakan bahwa paling tidak ada tiga (3) Kekuatan sekaligus kelemahan dalam lembaga pendidikan pesantren yakni: 1)Pendidikan pesantren overspesialisasi tetapi over produksi. Sejak tingkat rendah hingga tingkat tinggi, pesantren hanya Attafaquh Fiddin (mendalami agama). 2) Terlalu banyak mata pelajaran. Dalam rangka merespon tantangan zaman modern, pendidikan Islam Indonesia (sebagai penerus tradisi pesantren) berusaha menggabungkan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan. Islam dan Barat atau Kemenag dan Kemendikbud terpadukan menjadi satu. 3)Terlalu awal merancang spesialisasi (takhassus). Dari sini akan dibangkitkan industry versi pesantren: menyatu dan dijiwai akidah demi Rahmatan Lil 'alamin.

#### 4. KESIMPULAN

Dengan demikian, pengembangan pesantren Nawesea yang berlandaskan pada pemikiran Prof. Yudian memberikan kritik sebagai pemecahan masalah yang terkait pendidikan pesantren yang berorientasi pada kemajuan sehingga tidak kalah berasing dengan sekolah-sekolah yang non-pesantren secara global. Salah satu solusi untuk mengakomodir dan mendorong agar para lulusan S1 dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dalam strata pendidik sehingga para lulusan memiliki asa untuk mampu bersaing dengan lulusan lainnya,

#### 5. REFERENSI

- Azyumardi Azra. (1970). *Bilik-bilik Pesantren Nurcholis Majid*.
- Faiz, A. (2019). Program Pembiasaan Berbasis Pendidikan Karakter Di Sekolah. *PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon*, 5(20). <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jps.v5i>

2.741

- Faiz, A., & Faridah. (2022). PROGRAM GURU PENGGERAK SEBAGAI SUMBER BELAJAR. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 82–88.
- Mahmudah, S. (2011). *REKONSTRUKSI SYARI ' AT ISLAM ( Pmikiran Khalil Abdul Karim Tentang Hubungan Syari ' at Islam Dan Tradisi Lokal ) agama dalam kehidupannya . Sementara itu , menurut hasil dipisahkan antara yang satu dengan lainnya . Agama dan Maha Tinggi , demikian juga m. 45(Ii)*.
- Nurcholis Majid,. (2013). *Islam Kemodernan dan keindonesiaan*. PT. Mizan Pustaka, Bandung,
- Yudian Wahyudi. (2021). *Living Qur'an: Studi Kasus atas Majlis Ayat Kursi, Lembaga Ladang Kata*.
- Yudian Wahyudi. (2022). *Perang Diponegoro:Pesantren Nawesea Press: Surabaya*

# ZOOM APPLICATION UTILIZATION IN DISTANCE LEARNING PROCESS DURING A PANDEMIC OF CORONAVIRUS (CASE STUDIES ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AT SD PRESIDEN YAYASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PRESIDEN)

by:

**Sefchullisan**

Master of Technology Management at President University  
sefchullisan@student.president.ac.id

## Abstract

The Pandemic of Coronavirus in Indonesia has had a significant impact on several sectors such as the economy, industry, and education. The government also issued a policy regarding the existence of a distance learning process, this requires students and teachers to master technology. Several structures in education have changed due to policies during the pandemic, such as the implementation of the new academic year, the implementation of the learning process, and the use of school facilities for students. This distance learning must be carried out by every educational institution as a way for the learning process to continue. The author discusses the distance learning process during the pandemic of Coronavirus. This case study illustrates the use of the Zoom application, which shows that all teachers and students at SD Presiden can operate the Zoom application so that all school activities run well. Another finding, SD Presiden developed another application called JIBAS. The JIBAS application is to support the distance learning process, especially when doing exams combined with the Zoom application as supervision by the teacher.

**Keywords:** Distance Learning Process, Zoom, Pandemic of Coronavirus

## 1. INTRODUCTION

Education is the future capital of our lives and an important role in formal and non-formal education. When my undergraduate rector, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. in the graduation procession in 2014 at Paramadina University said that enhancing the standard of education is one of the considerations in proposing human capital. Education has a responsibility to plan a country's growth for change. YPUP, through President School, exists as a concrete type of real contribution to the nation.

The school consists of SMA, SMP, SD, TK Presiden, and PSNC. TK and SD Presiden are some of the youngest units among the schools. TK and SD Presiden are respectively 6 years old. 9 January 12, 2001, with Notary NY. Machrani Moertolo, S.H. YPUP deed of establishment No. Registered at Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri, November 06, 2003, No. 82/2003. As part of the learning process for tolerance and Bhinneka Tunggal Ika, SD Presiden is a primary level public school focused on discipline and ethnic character education. This is in line with UU No. 20, 2003 article one, section one of the national education system.

Teaching and learning are difficult to process, because it is not just listening to, then absorbing information from the teacher, but involves various activities to get better learning outcomes (Putri & Dewi, 2019). Looking at the current situation, the pandemic of Coronavirus in Indonesia has had a significant impact on several sectors such as the economy, industry, and education.

The Ministry of Education makes a new policy through SE No.4 2020 regarding the

implementation of distance learning policies to provide learning to students, which is they do not carry out activities together (in groups) due to minimizing the rate of transmission of the Coronavirus in Indonesia. Based on existing policies, the distance learning process is implemented at all levels of education.

Based on an article written by Simanjuntak and Kismartini (2020), if the school environment is the place of greatest concern as a place of transmission, considering the number of students and schools in each region in Indonesia has increased every year. Below is information about the overview of primary school (PS), junior secondary school (JSS), general senior secondary school (GSSS), and vocational senior secondary school (VSSS) in Indonesia based on information from the Ministry of Education and Culture's statistical data via the page [statistik.data.kemdikbud.go.id](http://statistik.data.kemdikbud.go.id).

**Table 1.** School Statistics Data in Indonesia Academic Year 2016/2017 – 2019/2020

No.	Academic Year	Status of School							
		PS		JSS		GSSS		VSSS	
		Public	Private	Public	Private	Public	Private	Public	Private
1.	2016/2017	132.022	15.481	22.803	14.960	6.567	6.577	3.434	9.802
2.	2017/2018	131.974	16.270	23.227	15.733	6.732	6.763	3.519	10.191
3.	2018/2019	131.867	16.815	23.386	16.254	6.815	6.880	3.579	10.488
4.	2019/2020	131.879	17.556	23.594	16.965	6.883	7.061	3.622	10.679

Source: [statistik.data.kemdikbud.go.id](http://statistik.data.kemdikbud.go.id)

Based on the school statistical data summarized by the author in Table 1, shows that the number of schools, both PS, JSS, GSSS, and VSSS

every year has increased. A large number of schools shows a large number of students, seeing this phenomenon, schools are considered unable to be able to monitor every movement of students and provide facilities by health protocols. Therefore, the best step is to carry out a distance learning process.

President Jokowi said that it is very important to prioritize the spread of the Coronavirus by reducing mobility from one place to another. This was conveyed to the media in *Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat* on Maret 16, 2020, as well as the Minister of Education and Culture to coordinate learning through online systems or distance learning. President Jokowi emphasized that the current conditions require us to work from home, study from home, and worship at home. In addition, President Jokowi said to maintain distance and reduce crowds that carry the risk of spreading the Coronavirus.

In an article written by Pakpahan and Fitriani (2020), if studying from home provides meaningful learning experiences for students without being burdened with demands to complete curriculum achievements. Distance learning itself aims to meet educational standards by utilizing the use of information technology using computers or gadgets that are connected between students and teachers so that the teaching and learning process can be carried out properly. Several applications can be used as support such as Google Meet, Zoom, and Microsoft Teams. In the end, it is hoped that it will be able to overcome the differences in the distance teaching and learning process during the pandemic of Coronavirus.

Based on the three types of video conferencing available, Google Meet, Zoom, and Microsoft Teams. The author will describe the differences between Google Meet and Zoom only, because the cases that occur are by the setting, at SD Presiden has tried to use both types of video conferencing since the beginning of the pandemic of Coronavirus. Some of the differences that the author managed to find for video conferencing applications such as Google Meet and Zoom through [www.medcom.id](http://www.medcom.id) and [today.line.me](http://today.line.me). Google Meet is a name change from Google Hangout; Google Meet is suitable for businesses. Google Meet is better suited for quick meetings, while Zoom is more for large meetings. Google Meet supports the number of participants up to 250 while Zoom is up to 500 participants. Even though the process for making a meeting room is both easy, seeing all the features and capacities they have, they both have differences in the types of meetings or video conferences that will be held.

The Google Meet video output is a very good definition. Furthermore, the Zoom application is very easy to use as well as a very competitive conferencing platform. The Zoom application has strong security, with the recent release of Zoom 5.0, the company reached a new milestone that allows it to proactively identify, address and improve the

capabilities and privacy of its services. Google Meet has a slightly cluttered interface compared to Zoom. New users who are using it for the first time may be confused about the features on the Google Meet interface, especially on smartphones with smaller screen sizes. It's different from Zoom which has a simple interface so that with a little guidance, one can remember the location of each feature.

Google Meet provides video conferencing sessions of up to 60 minutes while Zoom is only 40 minutes on the free version. In the paid version this feature can take longer, more than 60 minutes. All features including their ability to video or audio-video conferencing sessions are available free of charge but are originally paid for G-Suite subscribers. It's different from Zoom in the free version which still provides recording features in video and audio and can be stored directly on the PC or smartphone device used. Google Meet through the G-Suite subscription service offers the lowest monthly fee of USD10 per month for each active user. Zoom itself provides a monthly subscription fee of at least USD16 month. The price is indeed more expensive, but in the free version, there are now many features that can be accessed and are more complete than Google Meet.

Along with the development of technology, we can easily access several applications while the support capacity of the internet is adequate. However, if we look at the existing conditions, not all schools can carry out distance learning process activities using some of the applications that I have mentioned. Based on survey data of APJII via the page [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id) that the results of a survey conducted by APJII on internet user penetration in Indonesia are an important part of realizing digital transformation. According to the Secretary-General of APJII Henri Kasyfi Soemartono, the main results of the 2019-2020 Indonesian Internet User survey amounted to 73.7%, up from 64.8% from 2018. When combined with figures from the projection of the BPS, Indonesia's population in 2019 will be 266,911,900 million, so that Indonesian internet users are estimated to be 196.7 million users. This number is up from 171 million in 2019 with a penetration of 73.7% or an increase of around 8.9% or around 25.5 million users.

Based on the data information listed on [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com) shows that users on the island of Java still made the largest contribution to the increase in the number of internet users, 56.4%. The second-largest internet user comes from Sumatra Island, 22.1%. Furthermore, Sulawesi Island 7%, Kalimantan 6.3%, Bali-Nusa Tenggara 5.2%, and Maluku-Papua 3%. The existing data shows inequality in internet use in Indonesia, this affects the carrying capacity and ability of schools or teachers and students to carry out the distance learning process through applications.

Based on a comparative analysis between Google Meet and Zoom and the carrying capacity of the internet in the distance learning process that has been carried out, then the authors chose the Zoom application (license) at SD Presiden. The author is interested in knowing the distance learning process using the Zoom application which has been carried out at SD Presiden during the pandemic of Coronavirus.

## 2. RESEARCH METHOD

This analysis using qualitative research. Herdiansyah (2010) describes that qualitative study has many essential characteristics, including empirical validity and reliability, as well as the potential to be both objective and subjective. The second is a social context, which means that in qualitative analysis, the subject and its social setting are examined together. The third is natural, which means that changing or manipulating the context or construction of the research domain is not justified in qualitative research. Creswell (in Herdiansyah, 2010) explains that there are five types of qualitative research models like biography, phenomenology, grounded theory, ethnography, and case study.

This analysis using a case study. A case study is a model that emphasizes in-depth data mining that includes multiple sources of knowledge in a rich setting, as well as the analysis of a restricted framework in a case or many cases. A case study is a detailed research model that focuses on a person or a specific social unit over some time. This research is intensive, in-depth, informative, and focused on examining current (time-limited) problems or phenomena (Herdiansyah, 2010).

Prasetyo & Jannah (2005) direct citation and researched explanations of program circumstances, activities, individuals, experiences, and daily conduct of research participants, qualitative data offer depth and detail. The qualitative interview approach employs an interview guide to make conducting interviews, extracting data and knowledge simpler, and relying on the improvisation of field researchers (Patilima, 2007).

Data collection techniques related to topics similar to this article, the collected data is then reduced to produce data that is in line with the research question, then the data is presented (data display), then the data that has been presented can be drawn conclusions. The following is a picture of the research flow selected in this study:

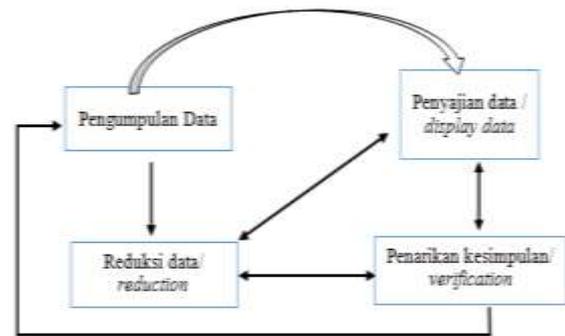


Figure 1: data analysis flow (Sugiyono; Faiz & Soleh, 2021)

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

### Learning Concept

In an article written by Hanafi (2014) about the concept of learning, it explains if learning has a broad meaning, as a process that allows the emergence or change of new behavior that is not caused by maturity and something temporary as a result of the formation of the main response. New behavioral changes as a result of learning occur consciously, continuously, and functionally, are positive and active, constant, purposeful, and directed.

Meanwhile, Putri and Dewi (2019) describe learning as a process carried out to get a whole new change in behavior as a result of their own experiences in interaction with their environment. These changes can be seen from several behaviors such as remembering, feeling, thinking, solving problems, being creative.

Hanafi (2014) provides a further description through a conclusion he has made if learning is a psycho-physical activity that can produce changes such as attitudes, knowledge, and skills that are differentiated into learning skills, social learning, abstract learning, problem-solving, rational learning, learn appreciation and habits and learn knowledge. This learning concept always shows a process of changing individual behavior based on certain experiences.

Based on the description above, the authors conclude that learning is a form of change in behavior as a result of the experiences and interactions of individuals with their environment, the changes that occur are permanent.

### Learning Outcomes

Education in Indonesia, as we have believed if students who get low learning outcomes are believed to have difficulties in learning. However, if we look at class assessments and exams, there are three major groups such as cognitive, affective, and psychomotor. This is in line with article three, section four of *Kepmendiknas* No. 012/U/2002 January 28, 2002, that the three domains can be separated from one another explicitly. So, the learning assessment must be comprehensive, covering all three aspects. Cognitive assessment includes knowledge,

understanding, application, analysis, synthesis, and assessment. This is the summary that the author made to be able to understand the differences between each part of cognitive assessment.

**Table 2.** Types of Cognitive Assessment

No.	Cognitive Assessment	Description
1.	Knowledge	Relates to the ability to recognize or remember the material that has been learned.
2.	Understanding	Related to the ability to grasp the meaning of a concept.
3.	Application	Related to the ability to apply a concept that has been obtained, an idea, a formula, or law to a new situation.
4.	Analysis	Concerned with the ability to break down and understand the relationships between elements so that they can be understood in a structure.
5.	Synthesis	Concerned with the ability to unite elements into one meaningful whole.
6.	Assessment	Related to the ability to give value judgments about something based on predetermined criteria.

Source: *Kepmendiknas No. 012/U/2002*

Assessment of affective aspects can include attitudes, interest in learning, habits, and tendencies in assessing an object. The assessment of affective aspects can be done using interviews, observations, questionnaires, and the attitude scale that is owned. Psychomotor assessment can include the appearance of students, which refers to the procedure for carrying out activities for which the criteria have been determined. Several things can be measured in psychomotor aspects such as level of proficiency, timeliness of completion, and quality of the product produced.

Based on the description above, the authors conclude that learning outcomes are a description of the results of students from the goals that have been made that must be achieved in learning through tests and observations made.

### **Zoom Application**

Launched through the page [www.zoom.us](http://www.zoom.us) that Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars. Zoom Meeting is also a popular application because it doesn't require a lot of memory if it is used for online seminars, online meetings, video conferencing, and so on. This application can be used via iOS or Android smartphones. In addition, Zoom Meeting can be done via a web browser (web client) but this feature can only be used to join meetings, cannot be used to create a room (host).

To use the Zoom application is by downloading the application through the Play Store on the cellphone or installing the application on the PC. Furthermore, the way to join the meeting is to first open the Zoom application on desktop or mobile, click join the meeting, and fill in the Meeting ID to be able to join immediately. This application is widely used as a medium of long-distance communication. Some of the advantages allow

meeting up to 100 participants, users can send texts while the meeting is in progress, users can schedule meetings via the schedule feature.

### **Analysis**

The purpose of this study was to determine the distance learning process using the Zoom application for elementary school students, especially at SD Presiden. In March 2020, for all teachers and staff, SD Presiden introduces a work from home scheme, students have to learn from home and teachers teach remotely the distance teaching method. The work from the home system is not recent, since the 1970s it is well known as an attempt to solve traffic jams every day (Mungkasa, 2020). Nadiem Anwar Makarim, BA., MBA. said that teaching tasks can be carried out from home using technology, as the Minister of Education invited teachers to perform work from home. It is recommended for educators not to come to school.

In July 2020, the work from office system was adopted by SD Presiden but still implements the online learning process. Since being used to doing work from home, the new normal is now facing us. The situation, however, is that a teacher comes to school without the normal student attendance to teach online. Teachers are expected to adjust to the situations, even though they work from school, but the learning process is always done online.

In 2020, Purwanto's research on an exploratory analysis of the effects of work from home on teacher performance during the pandemic of Coronavirus that it can be successful if teachers and schools are equally accountable. It is really necessary for the teacher to interact, to avoid things that are not acceptable. Besides, teachers should maximize technology, such as teachers and teachers or teachers and students, to be able to remain linked to each other. The capacity of human resources must be strengthened and then, as a teacher, all work that can be easily carried out by technical innovations should not become an obstacle to performing daily tasks.

It does not have a major impact in an article on the role of technology in learning during the pandemic of Coronavirus if human resources do not have good expertise and skills in the use and management of technology (Salsabila, Sari, Lathif, Lestari, & Ayuning, 2020). The results of research conducted by Muzakki, Susilo, and Yuniarto (2016) indicate that success is simultaneously affected by the use of information technology, the ease of information technology, and the advantages of information technology.

Mungkasa (2020) states that knowing remote work requires at least four things, such as; first, choosing the workplace to save time, the second is the complete or partial replacement of frequent commuters, the third is the frequency and duration of the strength of remote work activities, and the fourth is the provision of connectivity and information technology. SD Presiden has carried out many ways

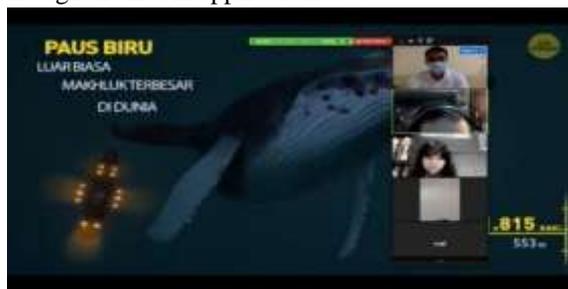
to facilitate this distance learning process, such as the licensed Zoom application. The author summarizes the distance learning process that has been carried out by SD Presiden through the licensed Zoom application.

**Table 3.** Distance Learning Process Activities for Academic Year 2020/2021

No.	Grade	Day	Time	Activities	Tools
1.	I A I B	Monday to Friday	08.00-10.30	Distance Learning Process	Licensed Zoom
2.	II	Monday to Friday	08.00-10.30	Distance Learning Process	Licensed Zoom
3.	III	Monday to Friday	08.00-10.30	Distance Learning Process	Licensed Zoom
4.	IV	Monday to Friday	08.00-12.00	Distance Learning Process	Licensed Zoom
5.	V	Monday to Friday	08.00-12.00	Distance Learning Process	Licensed Zoom
6.	VI	Monday to Friday	08.00-12.00	Distance Learning Process	Licensed Zoom

Source: Author (2021)

Based on the data in Table 2 above, shows that all classes at SD Presiden in the 2020/2021 Academic Year during the pandemic of Coronavirus were carried out online, which means that the distance learning process uses the licensed Zoom application. Based on the author's experience, the results of observations, and interviews with teachers at SD Presiden show that the distance learning process through the Zoom application such as material delivery, daily assessments, making crafts, and seeing student activeness by questions and answers regarding the material that has been delivered. The following are examples of a distance learning process conducted by SD Presiden teachers through the Zoom application.



**Figure 2** Video's Share Screen



**Figure 3** Distance Learning Process

**Table 4.** Distance Tutoring Activities for Academic Year 2020/2021

No.	Grade	Day	Time	Activities	Tools
1.	I A and I B	Monday to Friday	11.00-14.00	Tutoring	Licensed Zoom
2.	II	Monday to Friday	11.00-14.00	Tutoring	Licensed Zoom
3.	III	Monday to Friday	11.00-14.00	Tutoring	Licensed Zoom
4.	IV	Monday to Friday	13.00-15.00	Tutoring	Licensed Zoom
5.	V	Monday to Friday	13.00-15.00	Tutoring	Licensed Zoom
6.	VI	Monday to Friday	13.00-15.00	Tutoring	Licensed Zoom

Source: Author (2021)

Based on the data in Table 3 above, it shows that all classes at SD Presiden in the 2020/2021 Academic Year during the pandemic of Coronavirus, to provide additional material for students who are late in completing assignments, online counseling sessions are carried out through the licensed Zoom application. The addition of lesson hours after the teaching and learning process is complete. The following are examples of tutoring conducted by SD Presiden teachers through the Zoom application.



**Figure 4** Student Consultation

The author summarizes the various activities that have been carried out by SD Presiden through the licensed Zoom application, to support the distance learning process.

**Table 5.** School Activities During the Pandemic of Coronavirus Academic Year 2020/2021

Grade	Date	Activities	Tools
I-VI	13-15 July 2020	MPLS	Licensed Zoom
I-VI	16-17 July 2020	Scouting Orientation	Licensed Zoom
I-VI	18 August 2020	RI 75th Anniversary Competition	Licensed Zoom
I-VI	9 October 2020	Students Report PTS1	JIBAS
I-VI	18 December 2020	Students Report PAS1	JIBAS
I-VI	1-5 February 2021	Book Week	Licensed Zoom
I-VI	19 February 2021	Chines New Year	Licensed Zoom
I-VI	31 March 2021	Students Report PTS2	JIBAS
VI	8-10 April 2021	Try Out 1	JIBAS and Licensed Zoom
VI	15-16 April 2021	Practical Exams	Licensed Zoom
VI	19-20 April 2021		
VI	28 April-4 May 2021	Try Out 2	JIBAS and Licensed Zoom
VI	17-22 May 2021	School Exams	JIBAS and Licensed Zoom
I-VI	25 June 2021	Students Report PAS2	JIBAS

Source: Author (2021)

Based on the data in Table 4 above, shows that all activities at SD Presiden in the 2020/2021 Academic Year during the pandemic of Coronavirus were carried out online through the licensed Zoom and JIBAS applications. JIBAS was established by President School. Based on the information listed on the page [www.jibas.net](http://www.jibas.net) of the JIBAS application, which can accommodate the interactions and activities of students, teachers, parents, colleges, foundations, government, and the general public in every aspect of education. This information system of school management supports school operations ranging from academics, finance, libraries, reporting, and interactions between teacher and student. The JIBAS application is a supporter of technology development at SD Presiden, but cannot be used for video conferencing yet. The following are examples of activities conducted by SD Presiden teachers through the licensed Zoom and JIBAS applications.



**Figure 5.** Students Examination  
Try out of all students of Grade 6 through Zoom application and JIBAS  
*Source: Author (2012)*



**Figure 6** JIBAS Application  
Main Screen of JIBAS by Cellphone  
*Source: Author (2012)*

Based on Figure 6 above, it can be seen that all Grade 6 students are taking the exam, in which all students use 2 different devices. 1 device is used for the JIBAS application in solving exam questions, while 1 device is used for the Zoom application as control and supervision by the teacher towards all students in completing the given exam.

#### 4. CONCLUSION

Based on the analysis that has been done, the use of the Zoom application at SD Presiden to support the distance learning process is running well. Not only is the distance learning process the main activity of the distance learning process, but other activities such as tutoring, student examinations, and school activities are also carried out using the Zoom application.

#### Recommendation

Analysis of the distance learning process can also be done on other applications that can be used such as Google Meet and Microsoft Teams. Case studies can be carried out at different levels of education such as junior high and high school.

#### 5. REFERENCES

- Faiz, A., & Soleh, B. (2021). Implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 7(1), 68–77.  
<https://doi.org/10.22219/jinop.v7i1.14250>
- Hanafi, M. S. (2014). Konsep Belajar dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan*, Vol. 17 No. 1, 66-79.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- , (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Seni dalam Memahami Fenomena Sosial*. Jakarta: Greentea.
- JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah. Retrieved from [HYPERLINK "https://jibas.net/"](https://jibas.net/) <https://jibas.net/>. Accessed May 02, 2021
- Kominfo. (2020). *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*. Retrieved from [HYPERLINK "https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita\\_satker"](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker) [https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker). Accessed May 01, 2021
- Medcom. (2020). *4 Perbedaan Google Meet dan Zoom untuk Konferensi Video*. Retrieved from [HYPERLINK "https://www.medcom.id/teknologi/tips-trik/ObzMoe9N-4-perbedaan-google-meet-dan-zoom-untuk-konferensi-video?\\_\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_\\_=1e321d566e52da0dd345b674b06fcfb4e7ec5ce-1619844160-0-AZjlXLXeQHhG\\_qJXzpqEkjhsiPQT1OodnjIhhKTKRounS7dKCqgmKZRXIvonIHPLYesuG-Fg4Mjh\\_HuaSjOb9qNvEJxnML0Iw8BtDwSgu"](https://www.medcom.id/teknologi/tips-trik/ObzMoe9N-4-perbedaan-google-meet-dan-zoom-untuk-konferensi-video?__cf_chl_jschl_tk__=1e321d566e52da0dd345b674b06fcfb4e7ec5ce-1619844160-0-AZjlXLXeQHhG_qJXzpqEkjhsiPQT1OodnjIhhKTKRounS7dKCqgmKZRXIvonIHPLYesuG-Fg4Mjh_HuaSjOb9qNvEJxnML0Iw8BtDwSgu)

- Z4Vd632dWcQ4CNigKMpQX6mKo7POkED  
0Hszbd-  
KMd0tYdqm5Ym7th\_f7e\_DCGzI25DX2Hplk  
uwwKK2k5EeTMmAdnb97rz0DbfDC5eSrhk  
VCvbd6CM4u5hrYU5owQD\_By-  
mtTxvCXyRckU26lf6sP8q\_ZZQKuVyxxTy\_  
YEIDobIDBs9FUfjJhmzEhhEJF6Zi943v72Vak  
P7DK72wB-T1wh02ZVIwj8BHtJVABIT7V-  
BqZCvZS5r8wEdJeDdhWy0Z1ndHsAe2w17p  
ezgCdd8WoiMCQLfIXr-  
LJt4T66o2v5PGbr6pBqITGkmm32bhdAvliTjT  
OY\_fd70UfyPHSa9XgW3jflOn-5tyBm-  
3esyJ39O6TJrHVWscff68-iHfTQiMjzvr-  
zYX\_LAU4-xB5oIPEiA"  
[https://www.medcom.id/teknologi/tips-trik/ObzMoe9N-4-perbedaan-google-meet-dan-zoom-untuk-konferensi-video?\\_\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_\\_=1e321d566e52da0dd345b674b06fcfb4e7ec5ce-1619844160-0-AZjIXLXeQHHkG\\_qJXzpqEkjhsiPQT1OddnjhhKTKRounS7dKCqgmKZRXIvonIHPLYesuG-Fg4Mjh\\_HuaSjOb9qNvEJxnML0Iw8BtDwSguZ4Vd632dWcQ4CNigKMpQX6mKo7POkED0Hszbd-KMd0tYdqm5Ym7th\\_f7e\\_DCGzI25DX2Hplk uwwKK2k5EeTMmAdnb97rz0DbfDC5eSrhk VCvbd6CM4u5hrYU5owQD\\_By-mtTxvCXyRckU26lf6sP8q\\_ZZQKuVyxxTy\\_YEIDobIDBs9FUfjJhmzEhhEJF6Zi943v72Vak P7DK72wB-T1wh02ZVIwj8BHtJVABIT7V-BqZCvZS5r8wEdJeDdhWy0Z1ndHsAe2w17p ezgCdd8WoiMCQLfIXr-LJt4T66o2v5PGbr6pBqITGkmm32bhdAvliTjTOY\\_fd70UfyPHSa9XgW3jflOn-5tyBm-3esyJ39O6TJrHVWscff68-iHfTQiMjzvr-zYX\\_LAU4-xB5oIPEiA](https://www.medcom.id/teknologi/tips-trik/ObzMoe9N-4-perbedaan-google-meet-dan-zoom-untuk-konferensi-video?__cf_chl_jschl_tk__=1e321d566e52da0dd345b674b06fcfb4e7ec5ce-1619844160-0-AZjIXLXeQHHkG_qJXzpqEkjhsiPQT1OddnjhhKTKRounS7dKCqgmKZRXIvonIHPLYesuG-Fg4Mjh_HuaSjOb9qNvEJxnML0Iw8BtDwSguZ4Vd632dWcQ4CNigKMpQX6mKo7POkED0Hszbd-KMd0tYdqm5Ym7th_f7e_DCGzI25DX2Hplk uwwKK2k5EeTMmAdnb97rz0DbfDC5eSrhk VCvbd6CM4u5hrYU5owQD_By-mtTxvCXyRckU26lf6sP8q_ZZQKuVyxxTy_YEIDobIDBs9FUfjJhmzEhhEJF6Zi943v72Vak P7DK72wB-T1wh02ZVIwj8BHtJVABIT7V-BqZCvZS5r8wEdJeDdhWy0Z1ndHsAe2w17p ezgCdd8WoiMCQLfIXr-LJt4T66o2v5PGbr6pBqITGkmm32bhdAvliTjTOY_fd70UfyPHSa9XgW3jflOn-5tyBm-3esyJ39O6TJrHVWscff68-iHfTQiMjzvr-zYX_LAU4-xB5oIPEiA) . Accessed April 30, 2021
- Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari Rumah (Working from Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *The Indonesian Journal of Development Planning Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia, Vol. IV No. 2*, 126-150.
- Muzakki, M. H., Susilo, H., & Yuniarto, S. R. (2016). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT. TELKOM Pusat Divisi Regional V Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya, Vol. 39 No. 2*, 169-175.
- Pakpahan, R., & Fitriani, Y. (2020). Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
- Patilima, H. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Pembelajaran Jarak Jauh di Tengah Pandemi Virus Corona COVID-19. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting, and Research, Vol. 4 No. 2*, 30-36.
- Prasetyo, B., Jannah, L. M. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, A. (2020). Studi Eksplorasi Dampak *Work from Home* (WFH) terhadap Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Psychology, and Counselling Universitas Pelita Harapan, Vol. 2 No. 1*, 92-100.
- Putri, G. K., & Dewi, Y. S. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Google Classroom. *Al-Fikrah, Vol. 2 No.1*, 60-72.
- Salsabila, U. H., Sari, L. I., Lathif, K. H., Lestari, A. P., & Ayuning, A. (2020). Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Universitas Ahmad Dahlan, Vol. 17 No. 2*, 188-198.
- Simanjuntak, S. Y., & Kismartini. (2020). Respon Pendidikan Dasar Terhadap Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 6 No. 3*, 308-316.
- Statistik Data Kemdikbud. Retrieved from [statistik.data.kemdikbud.go.id](http://statistik.data.kemdikbud.go.id). Accessed April 29, 2021
- Teknologi Bisnis. (2020). *APJII: 196,7 Juta Warga Indonesia Sudah Melek Internet*. Retrieved from <https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet>. Accessed May 01, 2021
- Today Line. (2020). *Bingung Pilih Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet?* Retrieved from <https://today.line.me/id/v2/article/vG79EQ>. Accessed April 30, 2021
- Zoom. Retrieved from <https://zoom.us/>. Accessed May 02, 2021

## PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN MORAL DAN KARAKTER

Oleh:

Aiman Faiz<sup>1)</sup>, Purwati<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Cirebon

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya

<sup>1</sup>e-mail: aimanfaiz@umc.ac.id

<sup>2</sup>Purwati\_purwati@upi.edu

### Abstrak

Penanaman moral dalam pendidikan merupakan fondasi dan modal utama dalam mengembangkan karakter masyarakat dan mengokohkan jatidiri bangsa. Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan peran guru dan penggunaan strategi dan pendekatan dalam pendidikan moral dan karakter di Sekolah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka dengan metode deskriptif. Peran guru sebagai pewaris nilai dan agen moral harus memahami betapa perannya sangat penting dalam menanamkan nilai moral. Peran guru yang memiliki otoritas bukan semata-mata untuk memperlakukan siswa dengan seenaknya, akan tetapi untuk menciptakan aturan agar siswa menjadi terbiasa patuh pada aturan yang menjadi nilai pada lingkungan tersebut. Guru juga perlu memahami strategi dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam penanaman moral kepada siswa, baik itu melalui pendekatan transmisi maupun pendekatan konstruksi, tergantung pada situasi dan kondisi nilai yang ingin dikembangkan oleh guru maupun sekolah. Dengan dua pendekatan yang telah dibahas, diharapkan mempermudah guru dalam menginternalisasi nilai moral sehingga dapat efektif membentuk karakter siswa dalam lingkup pendidikan.

**Kata Kunci:** Peran Guru, Pendidikan Moral, Strategi dan Pendekatan

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan moral dan karakter saat ini menjadi hangat untuk diperbincangkan dalam setiap kegiatan pendidikan. Pentingnya pembahasan pendidikan moral dan karakter ini sebagai respon dari banyaknya tindakan tidak bermoral dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat luas. Adanya degradasi moral yang saat ini dirasakan oleh para pakar pendidikan sehingga bahasan pendidikan moral dan karakter menjadi hal yang *urgent* dan harus terus di kaji.

Peneliti merangkum beberapa kasus yang bertolak belakang dengan cita-cita dalam Uu Sisdiknas. Tahun 2019 misalnya, ada seorang siswa SD ditangkap karena mencuri ponsel. Siswa tersebut mencuri ponsel karena membutuhkan biaya untuk terus sekolah. (DetikNews, 2019). Masih pada kasus serupa, Polisi melakukan penangkapan terhadap siswa kelas 4 SD saat mereka sedang bermain. Diketahui anak tersebut melakukan perbuatan mencuri alat ibadah di Vihara demi untuk bermain game online, siswa SD tersebut nekat mencuri (iNews.ID, 2020). Selanjutnya kejadian pada 18 Februari 2021 anak dibawah umur nekat mencuri buku paket sekolah demi bermain game online (Tribunnews. 2021). Kasus lain misalnya, seorang siswa SD kelas V melakukan aksi kriminal, dengan mencuri motor (curanmor). Anak tersebut sudah 3 Kali Mencuri Motor, namun bukan untuk dijual, melainkan anak tersebut hanya ingin menaiki kendaraan saja, jika bensinnya sudah habis maka akan ia tinggal untuk mencari motor lain (Tribunnews, 2021)(Faiz et al., 2021). Dari beberapa kasus tersebut menunjukkan keprihatinan bahwa

dalam tingkat Sekolah Dasar saja perilaku tidak bermoral sudah banyak. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus bagi para praktisi pendidikan untuk dapat merekonstruksi kembali cara mendidik agar para siswa dapat memiliki karakter moral yang baik.

Pentingnya membuat siswa lebih bermoral agar mereka mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, mampu membedakan mana yang merupakan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama yang telah disepakati dalam lingkungan masyarakat dan menjadi nilai di masyarakat. Asumsi tersebut karena siswa merupakan calon penerus generasi bangsa yang nantinya akan menjadi masyarakat. Apabila para siswa tidak memiliki kemampuan dalam menentukan yang baik dan yang buruk, bukan tidak mungkin kondisi bangsa Indonesia ini kedepannya semakin tidak berkarakter dan tidak bermoral.

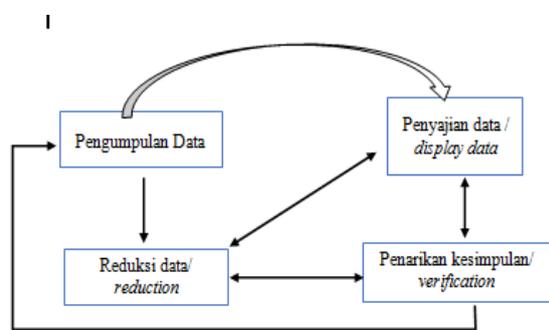
Penanaman moral dalam pendidikan merupakan fondasi dan modal utama dalam mengembangkan karakter masyarakat dan mengokohkan jatidiri bangsa. Alasannya karena siswa merupakan miniatur dari cikal bakal terbentuknya masyarakat yang akan menjalankan roda kehidupan suatu bangsa. Masyarakat merupakan modal sosial (social capital) untuk menentukan sebuah peradaban bangsa yang maju dan sejahtera. Konsep modal sosial ini diperkenalkan oleh(Fukuyama, 1995). Jadi, tentu sangat jelas apabila bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju dan sejahtera maka yang harus diperbaiki adalah karakter masyarakatnya, dan yang paling logis dalam membentuk karakter masyarakat adalah melalui pendidikan moral dan karakter. Oleh sebab

itu, mendidik para siswa pada hakikatnya untuk melahirkan generasi masyarakat yang memiliki kualitas moral dan karakter lebih baik.

Penanaman moral pada siswa bertujuan agar siswa memiliki karakter yang baik, karena karakter merupakan aspek yang penting bagi peradaban bangsa seperti yang diungkapkan Erikson (1966; Faiz, 2019) bahwa pendidikan moral dan karakter sangat berkaitan dengan kualitas suatu bangsa, karakter aspek yang penting dari kualitas SDM karena kualitas karakter suatu bangsa menentukan kemajuan bangsa tersebut. Dengan demikian, sangat penting menanamkan nilai moral saat ini jika bangsa Indonesia ingin terus mempertahankan eksistensinya dan identitas bangsanya. Salah satu yang diyakini dapat menanamkan nilai moral adalah dunia pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu pilar yang menjadi fondasi dalam menopang berdirinya sebuah peradaban bangsa. Untuk itu diperlukan berbagai macam strategi pendekatan yang perlu diketahui agar penanaman dan pengembangan nilai moral dalam mencapai karakter yang diinginkan dapat tercapai. Adapun grand teori yang digunakan dalam strategi dan pendekatan penanaman nilai moral, peneliti menggunakan konsep yang dijelaskan oleh Peof. Kama Abdul Hakam, pakar pendidikan nilai dan moral/ karakter dari Universitas Pendidikan Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka dengan metode deskriptif. Tujuannya untuk mendeskripsikan hasil temuan pustaka yang diambil dari artikel dan buku terkait dengan topik yang dibahas (Faiz & Kurniawaty, 2020). Teknik analisis data yang digunakan mengambil dari teknik analisis data Sugiyono (2015). Diantaranya pengumpulan data terkait dengan topik-topik yang serupa dengan artikel ini, data yang terkumpul kemudian di reduksi untuk menghasilkan data-data yang sejalan dengan pertanyaan penelitian, kemudian data disajikan (*display data*), selanjutnya data yang sudah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan. Berikut gambar alur penelitian yang dipilih pada penelitian ini:



Gambar 1: alur analisis data (Sugiyono; Faiz & Soleh, 2021)

Gambar 1: alur analisis data (Sugiyono; Faiz & Soleh, 2021)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran guru dalam penanaman moral kepada siswa.

Sekolah memiliki peran besar dalam mendidik moral siswa ketika banyak siswa yang mendapatkan sedikit pendidikan moral dari lingkungan keluarga mereka (Lickona, 2012: 32). Tentunya peran guru menjadi hal yang sangat fundamental dan vital dalam penanaman nilai moral kepada siswa, guru sebagai motor penggerak berjalannya pendidikan moral dan karakter di sekolah. Peran guru dalam membangun hubungan dengan siswa untuk memberikan masukan moral, salah satunya melalui interaksi yang dibangun antara guru dan siswa.

Seorang guru harus memperlakukan siswa dengan penuh cinta dan penuh hormat, menjadikan dirinya teladan yang baik agar dapat memperbaiki perilaku siswa yang tidak baik menjadi baik. Pendidikan moral dan karakter akan semakin efektif jika guru dapat berperan sebagai figur keteladanan bagi para siswa (Koesoema, 2012). Selain menjadi teladan bagi siswa, guru juga harus konsisten terhadap nilai moral yang diyakininya. Nilai moral tidak akan menjadi nilai yang penting bagi para siswa jika hal tersebut tidak dianggap penting oleh yang mencontohkannya yaitu guru. Dengan demikian, dua hal yang penting dalam penanaman nilai moral yaitu keteladanan dan konsisten dalam menjalankan nilai moral tersebut.

Hal lain yang dianggap penting dalam penanaman nilai moral adalah peran guru sebagai otoritas moral di kelas. Peran guru bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi moral yang baik dalam lingkungan sekolah agar siswa dapat mematuhi peraturan di kelas. Selain itu, peran guru juga berfungsi sebagai mentor moral dengan menginstruksikan para siswa dalam beberapa hal diantaranya tidak menyela pembicaraan orang, meminjam barang tanpa izin, memanggil teman dengan nama yang tidak sopan (Lickona, 2012: 169-170).

Kendati demikian, peran guru yang memiliki otoritas bukan semata-mata untuk memperlakukan siswa dengan seenaknya, akan tetapi untuk menciptakan aturan agar siswa menjadi terbiasa patuh pada aturan yang menjadi nilai pada lingkungan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Durkheim (Hakam, 2010: 60) bahwa otoritas yang diterapkan pada siswa untuk memberikan pemahaman akan penghormatan terhadap aturan yang menjadi kesepakatan. Guru harus menjadikan peraturan moral tersebut untuk dihargai dan ditegakkan oleh para siswa, bukan untuk membuat para siswa menderita.

### Pendekatan yang dapat di gunakan dalam internalisasi nilai moral di sekolah

Pendidikan moral dan karakter hadir dalam memberi keseimbangan antara unsur intelektual di bidang akademis dengan perkembangan emosional, moral dan spiritual siswa. Pertumbuhan pendidikan

harus lebih utuh sehingga pendidikan karakter diharapkan menjadi respon dari permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada saat ini. Dalam pendidikan moral terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan oleh guru, yang pertama adalah pendekatan transmisi untuk mewariskan nilai-nilai kepada siswa. Yang kedua adalah pendekatan konstruksi untuk membangun nilai-nilai siswa. Kedua pendekatan ini menjadi alternatif strategi yang bisa dikembangkan oleh para guru dalam menginternalisasikan nilai moral kepada para siswa. Adapun pendekatan yang di tawarkan dalam implementasi pendidikan moral dan karakter di sekolah mengambil contoh yang diuraikan Hakam & Nurdin (2016) adalah sebagai berikut:

Strategi	Pendidikan Karakter	Implementasi
Model	Transmisi Nilai	Pewarisan Nilai
Pendekatan	Information	Memperkenalkan individu pada nilai sosial, hal ini biasanya digunakan oleh guru melalui metode ceramah dalam interaksi edukatif dengan siswa
	Training	Melatih individu agar mampu berbuat seperti yang diharuskan oleh nilai sosial. Salah satunya membiasakan siswa mengikuti aturan dan tata tertib di sekolah.
	Modeling	Menghadapkan individu pada model sehingga dapat meniru dari model yang dilihatnya. Pendekatan ini berkaitan dengan guru sebagai contoh teladan yang diberikan oleh siswa, sehingga siswa meniru apa yang dicontohkan oleh gurunya
	Conditions	Menyiapkan kondisi yang kondusif sehingga nilai-nilai sosial tersebut dapat diaplikasikan, baik dengan cara memberikan hadiah dan hukuman. Pendekatan ini digunakan sebagai penguatan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai apa yang di inginkan dari dalam diri siswa. Contoh: ketika ada anak membuang sampah sembarangan, seorang guru menegur dan menyuruhnya untuk mengumpulkan semua sampah disekitarnya. Kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (penguatan negatif). Jika ada anak buang sampah dengan tertib di tong sampah, kemudian guru melihatnya dan memberi pujian pada anak tersebut yang merupakan bagian dari hadiah berupa respon positif. (penguatan positif).
	Habitiasi	Membiasakan individu secara pribadi maupun kelompok untuk terbiasa mengimplementasikan nilai dalam kehidupan sehari-hari baik secara spontan maupun terprogram. Melaksanakan program yang telah dirancang dalam sekolah yang memiliki tujuan atau nilai yang ingin dikembangkan. Contoh, mengembangkan nilai religius dengan melaksanakan pembiasaan mengaji bersama-sama, membaca asma ul-husna dan mendengarkan ceramah.
Kulturalisasi	Mewujudkan seluruh anggota komunitas sosial (seluruh warga sekolah) untuk membudayakan nilai-nilai dalam kehidupan di sekolah. Contohnya, setiap warga sekolah harus berpakaian sopan, memakai sepatu tertutup, baju dimasukkan. Ketika ada warga sekolah yang bajunya dikeluarkan dan tidak memakai sepatu tertutup maka individu yang	

		bersangkutan akan merasa malu sendiri karena memiliki kesadaran moral yang telah menjadi kultur dalam sekolah tersebut.
Output	Output	Dengan pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan di atas maka apa yang menjadi tujuan dalam transmisi nilai adalah agar siswa menjadi patuh aturan
Strategi	Pendidikan Karakter	Implementasi
Model	Konstruksi Nilai	Pengembangan Penalaran Nilai Moral
Pendekatan	Model Konsiderasi	Model ini merupakan salah satu pendekatan nilai yang memperhatikan dan memberikan pertimbangan pada orang lain. Model ini untuk membantu mengatasi perasaan negatif seperti hanya memikirkan diri sendiri, sehingga tercipta hubungan yang didasari dengan rasa hormat, empati, toleransi, perhatian dan lain sebagainya. Dengan model ini memperkuat perilaku moral siswa secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi setiap respon melalui diskusi. Strategi yang digunakan bisa menggunakan sosio drama, bermain peran dalam pembelajaran.
	Value Clarification Technique	Model ini dirancang untuk mendukung pilihan nilai-nilai yang mereka sukai diantara alternatif yang tersedia, dengan menentukan tingkat kepentingan pada apa yang mereka sukai dan bertindak dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga model ini membantu siswa untuk mengurangi tingkat kebingungan nilainya masing-masing serta membantu mengembangkan nilai yang konsisten. Tugas guru pada model ini untuk membuka dialog kelas sehingga memusatkan perhatian perhatiannya pada isu-isu yang relevan dengan nilainya, menerima nilai-nilai orang lain, belajar mempelajari nilai dirinya agar memperjelas arah kehidupan pribadi.
	Cognitive Moral Development	Perkembangan moral kognitif dikembangkan oleh Kohlberg, model ini ditujukan untuk membantu siswa agar mampu melewati tahapan perkembangan moral dan keterampilan penalaran moral secara bertahap. Dalam model ini tugas guru memiliki dua tanggung jawab dalam membangun kemampuan kognitif siswa yang memiliki bobot afektif dengan strategi dilema moral. Guru bisa menggunakan dilema moral melalui isu-isu moral yang ada, ataupun isu-isu moral di lingkungan sekolah.
Output	Output	Dengan pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan di atas maka apa yang menjadi tujuan dalam konstruksi nilai adalah agar siswa memiliki penalaran nilai yang baik hingga memiliki prinsip dalam menjalani kehidupan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral didalamnya

Dengan demikian, pendekatan yang telah dijabarkan di atas merupakan langkah awal dalam mengembangkan pendidikan moral dan karakter dalam lingkup pendidikan. Dengan berbagai macam pendekatan yang ditawarkan diharapkan memudahkan guru dalam membuat proses internalisasi nilai yang diinginkan. Namun, semua kembali lagi pada aktor utama yaitu guru, karena

pendidikan yang bermutu hanya akan dicapai melalui guru-guru yang bermutu.

#### 4. KESIMPULAN

Dengan demikian, peran guru sebagai pewaris nilai dan agen moral harus memahami betapa pentingnya sangat penting dalam menanamkan nilai moral. Peran guru yang memiliki otoritas bukan semata-mata untuk memperlakukan siswa dengan seenaknya, akan tetapi untuk menciptakan aturan agar siswa menjadi terbiasa patuh pada aturan yang menjadi nilai pada lingkungan tersebut. Guru juga perlu memahami strategi dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam penanaman moral kepada siswa, baik itu melalui pendekatan transmisi maupun pendekatan konstruksi, tergantung pada situasi dan kondisi nilai yang ingin dikembangkan oleh guru maupun sekolah. Dengan dua pendekatan yang telah dibahas, diharapkan mempermudah guru dalam menginternalisasi nilai moral sehingga dapat efektif membentuk karakter siswa dalam lingkup pendidikan. Dalam menjalankan program pendidikan moral dan karakter tentunya harus ada keterkaitan antar seluruh *stakeholder* yang saling mendukung. Baik itu masyarakat, lingkungan sosial, keluarga maupun seluruh warga sekolah. Pendidikan moral dan karakter tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada kesinambungan antar elemen penguat. Untuk itu, diperlukan lingkungan yang mendukung satu sama lain agar terciptanya kondisi moral yang kondusif dan positif.

#### 5. REFERENSI

- Erikson, E. H. (1966). *Youth: Fidelity and diversity. In Conflict Resolution and World Education (pp. 39-57)*. Springer, Dordrecht.
- Faiz, A. (2019). Program Pembiasaan Berbasis Pendidikan Karakter Di Sekolah. *PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon*, 5(20). <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jps.v5i2.741>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/konstru.k.v12i2.973>
- Faiz, A., & Soleh, B. (2021). Implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 7(1), 68–77. <https://doi.org/10.22219/jinop.v7i1.14250>
- Faiz, A., Soleh, B., Kurniawaty, I., & Purwati. (2021). Tinjauan Analisis Kritis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan Karakter di Indonesia. *Jurnal Basicedu, Volume 5(4)*, 1766–1777. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1014>
- Fukuyama, F. (1995). *Social capital and the global economy. Foreign Aff.*, 74, 89.
- Hakam, K. A. (2010). *Model Pembelajaran Pendidikan Nilai*. CV. Yasindo multi aspek.
- Hakam, K. A., & Nurdin, E. S. (2016). *INTERNALISASI NILAI-NILAI*. CV. Maulana Media Grafika.
- Koesoema, D. (2012). *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lickona, T. (2012). *Character Matters* (Uyu Wahyudun dan Budimansyah (ed.)). PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.

# STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM DAN MEMPERTAHAKAN KEDAULATAN INDONESIA

Oleh:

Yudi Listiyono<sup>1)</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2)</sup>, Dohar Sianturi<sup>3)</sup>  
Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan  
(alvaroalgis@gmail.com)

## Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sebagai negara kepulauan telah meratifikasi United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82) dan sebagai konsekuensinya Indonesia menetapkan tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu: ALKI-I, ALKI-II dan ALKI-III. Pelaksanaan hak ALKI membuat keamanan maritim di wilayah Indonesia menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia karena terganggunya jalur ALKI dapat mengancam perekonomian dunia implementasi ketentuan UNCLOS. Secara geografis Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di sektor perairan. Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan ALKI dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang ALKI dalam rangka upaya pengamanan ALKI untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis strategi pertahanan laut dalam pengamanan alur laut kepulauan Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode dokumentasi. Kebijakan membentuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadikan Indonesia sebagai negara “terbuka”. Hingga saat ini, berbagai pelayaran dan penerbangan asing dengan bebas berlalu lalang memotong wilayah Indonesia. Ancaman keamanan pada tiga jalur ALKI menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia.

**Kata Kunci:** Alur Laut Kepulauan Indonesia, Ancaman, Keamanan, Kedaulatan, Strategi Pertahanan Laut

## 1. PENDAHULUAN

*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 untuk selanjutnya disingkat (UNCLOS 1982), mengatakan bahwa kedaulatan Negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan ditarik sesuai ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 yang disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai. Kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas perairan kepulauan, dasar laut, dan tanah dibawahnya dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereignty right*) negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan dan pengeloan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di lautan. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan adanya pengamanan laut di Indonesia yang berkelanjutan.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985, tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi 1982. Oleh karena itu, Indonesia mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut 1982 dengan mengundang Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Di dalam Undang- Undang No. 6 Tahun

1996 terdapat pengaturan mengenai alur-alur laut kepulauan.

Potensi strategis wilayah perairan Indonesia secara geopolitik dan geografis ditambah dengan posisi silang Indonesia yang diapit dua benua, Asia dan Australia, serta terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat Indonesia menjadi negara yang sangat strategis dan diperhitungkan banyak negara lainnya. Konsekuensinya, Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairannya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Bynkershoek bahwa semua negara yang memiliki wilayah laut sangat tergantung kepada kemampuan negara tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah laut yang dikuasainya.

Kondisi lingkungan strategis global dan regional sewaktu-waktu dapat mempengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan disetiap wilayah NKRI, karena ALKI dapat dipergunakan untuk kepentingan regional maupun global.

Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu untuk diteliti terkait dengan upaya pengamanan alur laut kepulauan Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sebagai perangkat analisis, penelitian ini

menggunakan konsep teori keamanan maritim dari McNicholas.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengamanan alur laut kepulauan Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa tentang adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
2. Untuk mengetahui ancaman-ancaman yang ada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam hal pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan menurut Hardani penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di laporan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*), merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti menurut Sugiyono.
2. Dokumentasi, dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat merupakan catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file siswa dan pegawai, diskripsi program dan data statistik pengajaran. Nasution menjelaskan bahwa: ada sumber yang non manusia (*non human resources*), antara lain adalah dokumen, foto dan bahan statistik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dari sejak Deklarasi Juanda 1957 sampai diakuinya konsepsi tersebut oleh dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982 sebenarnya merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa dan Negara Indonesia, tetapi sebagian masyarakat Indonesia tidak begitu mengenal dengan baik bahwa Indonesia mempunyai luas laut dua per tiga dari luar daratan.

Menurut UNCLOS 1982 pada pasal 46 mengatakan bahwa, Negara Kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985, tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi 1982. Oleh karena itu, Indonesia mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut 1982 dengan membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Di dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 1996 terdapat pengaturan mengenai alur-alur laut kepulauan.

### Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan yang sudah menentukan alur laut kepulauan. Alur laut kepulauan Indonesia terdiri dari 3 alur laut kepulauan (ALKI-I, ALKI-II, dan ALKI-III) yang membentang dari utara ke selatan dan sebaliknya. Kapal asing yang sedang melakukan pelayaran internasional dalam melaksanakan hak lintas melalui ALKI baik kapal niaga maupun kapal perang dapat melintas tanpa harus meminta izin terlebih dulu kepada pemerintah Indonesia. Termasuk kapal selam asing juga dapat melintas tanpa harus muncul dipermukaan laut, namun hanya dikhususkan pada tiga alur laut yang telah disepakati. Jika melewati alur yang telah ditentukan maka dianggap telah melakukan pelanggaran.

Dengan dibukanya ALKI-I, ALKI-II, dan ALKI-III tentu membuka pula peluang kehadiran berbagai konsekuensi keamanan di perairan Indonesia. Ketiga jalur strategis tersebut sangat berarti bagi negara lain yang berada di kawasan regional maupun global. Jalur itu digunakan oleh banyak negara untuk menopang kegiatan ekonomi mereka. Perdagangan dan transportasi internasional meningkat menempatkan laut Indonesia memegang peranan penting sebagai penghubung antar pulau dan antar negara

#### **Ancaman-ancaman yang ada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)**

Pembentukan ALKI menjadi jalan untuk memudahkan negara lain yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban untuk melintas di wilayah Indonesia. Bagi Indonesia selaku negara yang mempunyai kedaulatan teritorial seharusnya kebijakan ini memudahkan pemerintah dalam pengawasannya, karena dari sekian banyak celah perairan di Indonesia hanya tiga jalur ini yang dibuka secara resmi sehingga dapat menjadi prioritas utama. Sebaliknya bagi negara yang kapalnya ingin melintas di jalur tersebut, wajib mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan. Intensitas pelayaran yang semakin banyak mendorong pula peningkatan permasalahan di laut. Hingga kini persoalan keamanan laut belum menemukan solusi yang tepat. Bahkan senantiasa menjadi bahasan dalam berbagai forum guna menemukan jalan keluar dari masalah ini.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara mengakibatkan banyaknya ancaman dan tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Secara umum ancaman tersebut terdiri dari ancaman militer (tradisional) dan ancaman non-militer (non-tradisional). Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman keamanan tradisional yang melibatkan aktor negara kini tergeser oleh maraknya isu keamanan non-tradisional. Namun bukan berarti isu keamanan tradisional hilang begitu saja. Justru Indonesia perlu lebih waspada karena ancaman ini dapat muncul sewaktu-waktu. Ancaman keamanan non-tradisional sering disebut sebagai isu transnasional. Aktor kejahatan transnasional umumnya adalah kelompok-kelompok yang terorganisir dan tujuan utamanya adalah mendapatkan uang baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan resiko sesedikit mungkin.

Tindak pidana transnasional hampir selalu berkaitan dengan tindak pidana dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Tindak pidana ini antara lain, kejahatan terorganisasi lintas batas negara

(*transborder organized criminal activity*), perdagangan obat bius (*drugs trafficking*), pencucian uang (*moneylaundering*), kejahatan finansial (*financial crimes*), perusakan lingkungan secara disengaja (*willful damage to the environment*), dan lain-lain.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa transnational crime merupakan suatu kejahatan yang terjadi dan bersifat lintas negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat aspek hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dan dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan dan dilakukan bersifat lintas batas negara untuk masuk ke yurisdiksi negara yang berbeda lantas dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*).

Sudrajat mengatakan bahwa, isu kejahatan transnasional yang dihadapi Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga: Pertama, gangguan keamanan di laut contohnya penyelundupan kayu, bahan bakar minyak, pasir, dan pencurian ikan. Kedua, gangguan keamanan di udara contohnya pembajakan di udara, sabotase, pengintaian terhadap wilayah Indonesia dan lain-lain. Ketiga, gangguan di wilayah perbatasan seperti penyelundupan barang, senjata, narkoba dan penyelundupan manusia.

Permasalahan keamanan maritim yang juga perlu mendapat perhatian adalah ancaman yang bersifat non-tradisional, antara lain: separatisme dan pembajakan terorisme maritim. Kerusuhan sosial antar pengguna laut, imigran dan pembalakan ilegal, perompakan dan pembajakan, serta penyelundupan juga menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Semakin banyak kapal-kapal internasional yang melewati perairan Indonesia menambah kemungkinan terjadinya kejahatan pembajakan maritim. Fenomena ini tidak hanya dinilai sebagai bentuk kerentanan dari aspek keamanan saja tetapi juga kerugian ekonominya sangat besar. Meskipun terorisme dan pembajakan maritim belum menjadi ancaman utama saat ini tetapi potensi tersebut harus bisa diantisipasi dengan baik sebelum meningkat menjadi ancaman nasional. Transportasi laut yang masih menjadi jalur utama lalu lintas perdagangan global, juga memiliki potensi penyelundupan barang. Pada saat yang bersamaan, aktivitas penyelundupan senjata api ilegal, narkoba, bahan bakar minyak, hingga manusia juga mudah terjadi dan dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan.

#### **Keamanan Maritim dan Kedaulatan Negara**

Akhir-akhir ini, isu keamanan perlu mendapat perhatian serius. Isu keamanan laut tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan, sabotase serta terror obyektif vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian saran bantu navigasi), ancaman sumber daya laut (perusakan serta

pencemaran laut dan ekosistemnya) dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara illegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut.

Ancaman sengketa perbatasan maritim merupakan permasalahan perbatasan yang hingga kini masih belum selesai, masalah sengketa teritorial tersebut melibatkan tidak hanya Indonesia tetapi juga negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi kawasan, posisi strategis maritim Indonesia sangat penting dan berpengaruh dalam peta konflik perbatasan ASEAN, dimana dua pertiga dari seluruh luas perairan wilayah Asia Tenggara adalah perairan yurisdiksi Indonesia. Melihat keadaan tersebut, tentu Indonesia akan selalu memainkan peran sentral dalam keamanan dan stabilitas regional menurut Leong.

Kepentingan negara-negara yang berada di kawasan regional maupun global juga perlu menjadi perhatian. Kepentingan utama bagi negara-negara kawasan global, terutama dari negara-negara besar antara lain: Amerika Serikat, Cina dan Jepang, adalah kemudahan akses maritim dan ketersediaan sumber daya bagi kepentingan geoekonomi negara-negara tersebut. Posisi strategis Indonesia yang di dalamnya terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dapat memudahkan dan meringankan peredaran logistik perdagangan antar benua yang dilakukan oleh negara-negara besar tersebut. Paradigma geostrategis ini berperan penting dalam interaksi keamanan antar kawasan di benua Asia dan Australia. Kepentingan negara-negara luar kawasan terhadap perairan Indonesia tersebut harus diantisipasi dan direspons dengan tepat oleh Indonesia menurut Hardiana & Trixie.

Menurut McNicholas, keamanan maritim adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemilik, operator, administrator kapal, fasilitas pelabuhan, instalasi lepas pantai, serta organisasi kelautan untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan, sabotase, penyitaan, pencurian, dan gangguan lainnya. Kesulitan dalam merumuskan konsep keamanan maritim dapat dikatakan terjadi karena menghindari tindakan pre-emptive terhadap forum-forum keamanan maritim yang berada di luar mekanisme PBB, keinginan pemisahan konsep keamanan maritim dengan keselamatan maritim, serta definisi keamanan maritim yang kaku mengakibatkan berkurangnya otoritas keamanan nasional dalam pengelolaan laut. Hal ini berarti keamanan maritim tidak hanya berfokus pada aksi militer (gencatan senjata) saja, tetapi juga aktivitas perikanan, pencemaran laut yang disengaja, serta kegiatan penelitian atau survei yang bertempat di laut.

Dengan terjaganya keamanan maritim merupakan salah satu bagian dari upaya menjaga pertahanan bagi kedaulatan negara. Kedaulatan Indonesia tentu mencakup penjagaan kemaritiman yang baik, dimana hal ini merupakan sebuah upaya

untuk meningkatkan kekuatan Armada atau Pasukan laut di suatu wilayah Indonesia dengan kegiatan pengembangan instalasi kapal maritim, pengawasan, kepatuhan, tata cara keselamatan dan peningkatan kapasitas pendidikan serta pelatihan kualitas manusia untuk kemaritiman menurut Pratama. Keamanan Maritim merupakan permasalahan keamanan di kawasan regional yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat berbagai kegiatan perekonomian hadir secara serentak melalui kawasan perairan.

### **Strategi Pertahanan Laut, upaya pemerintah Indonesia dalam hal pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)**

Isu keamanan menjadi hal penting yang turut menguatkan kembalinya wacana negara maritim. Tidak tergalinya potensi maritim secara ekonomi menegaskan bahwa infrastruktur pertahanan maritim Indonesia sangat lemah. Perubahan global memandang pentingnya jalur perdagangan maritim maka isu keamanan menjadi penting bagi Indonesia tidak hanya untuk mempertahankan kedaulatannya di laut saja tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal logistik internasional yang melewati perairan Indonesia. Kondisi ini membangkitkan kesadaran bahwa masih terdapat banyak anomali dalam kebijakan pertahanan Indonesia yang selama ini terlalu berorientasi pada penguatan sistem militer di darat saja dan mengesampingkan pengembangan postur kebijakan maritim. Padahal bentuk wilayah Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki banyak selat strategis dalam pelayaran internasional.

Konsekuensi penerapan kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang maritim harus melihat permasalahan keamanan laut yang masih banyak perlu dicari titik lemahnya, tanpa melupakan wilayah daratan dan udara sebagai sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi suatu kesatuan. Kasus perampokan bersenjata dan perompakan banyak terjadi di jalur ALKI yang merupakan jalur tersibuk di dunia. Dalam hal ini, respon pemerintah Indonesia terhadap ancaman ketahanan maritim yang terjadi sangat diperlukan dalam bentuk strategi keamanan nasional.

Upaya untuk mencapai tujuan kepentingan nasional, yang sering disebut dengan strategi keamanan nasional, bertumpu pada tiga pilar yaitu: pilar ekonomi, pilar politik dan pilar pertahanan keamanan. Ketiga pilar ini merupakan kerangka strategi kebijakan keamanan nasional yang ditetapkan oleh presiden atau pemerintah. Secara khusus strategi kemaritiman Indonesia yang dibahas untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia gagasan dari Presiden Jokowi adalah memberdayakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai alat negara untuk mengamankan lautan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah lebih dahulu merespon Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat oleh Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono. TNI AL membuat paradigma baru yang digagas oleh Laksamana (Purn) Dr. Marsetio, yakni mewujudkan TNI AL sebagai *World Class Navy*, yang tertuang dalam buku yang berjudul *Sea Power Indonesia*, berisi mengenai kondisi TNI AL dari segi alat utama sistem pertahanan (alutsista) maupun kualitas dan kuantitas personel yang dimilikinya.

Hal ini seiring dengan pembangunan TNI AL yang menghendaki target untuk dapat melampaui Minimum Essential Force (MEF) 2010-2024. Terdiri dari tingkat kemampuan, kekuatan dan pola gelar kekuatan. Dengan MEF inilah diharapkan TNI AL dapat menjadi alat utama dalam pertahanan negara matra laut, yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang datang suatu saat nanti.

#### 4. KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PEMBATASAN

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara peserta dalam penggunaan perairan laut dunia. Ini mencakup pedoman untuk perdagangan, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut. Dokumen konvensi ini sudah dibahas dan diperbarui kedalam beberapa versi. Versi ketiga dan terakhir adalah versi yang aktif berlaku hingga hari ini. Terhitung sampai hari ini, dokumen ini sudah diratifikasi oleh 165 negara peserta dan Uni Eropa.

Sejak tahun 2002 melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002, Indonesia sudah menentukan ada 3 (tiga) ALKI di wilayah perairan Indonesia yang menjadi alur lintas bagi kapal-kapal asing dan pesawat terbang asing yang terbang melintasi wilayah udara Indonesia. Ketentuan ini mengatur hak dan kewajiban negara kepulauan dan pengguna alur laut kepulauan, yaitu setiap kapal asing dan pesawat udara asing dapat dengan bebas melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui bagian tertentu laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dengan rute yang telah ditentukan, tidak boleh lagi bercabang dalam bernavigasi atau menyisir area ke daratan sesuai rute-rute pelayaran yang terdahulu. Kapal dan pesawat udara internasional tersebut wajib mematuhi jalur yang sudah ditetapkan. Sehingga dalam melaksanakan lintas alur laut kepulauan setiap kapal-kapal asing baik kapal niaga, kapal tanker dan kapal perang dan pesawat terbang niaga dan pesawat militer asing harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan negara kepulauan agar setiap pengguna lintasan dapat berlayar denganselamat sampai ketempat tujuan. Bagi kapal-kapal perang dan pesawat udara militer harus ada notifikasi baru dapat berlayar memasuki alur laut kepulauan.

Gagasan negara maritim Indonesia kerap berlalu sebagai wacana belaka, saat ini semua pihak berharap hal tersebut tidak terulang kembali. Upaya

mewujudkan visi Indonesia sebagai 'Poros Maritim Dunia' perlu proses dan waktu yang tidak singkat. Memasuki rezim baru di bawah kepemimpinan Jokowi, cita-cita menjadi poros maritim dunia mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Jokowi datang sebagai pemimpin yang melanjutkan perjuangan Mochtar Kusumaatmadja untuk memperjuangkan laut Indonesia dengan pemanfaatan ALKI dan kekayaan sumber daya laut yang dimiliki.

Beberapa hal yang patut digarisbawahi tentang kebijakan pemerintah ke depan adalah: Pertama, penggunaan strategi pertahanan laut yang mengedepankan kekuatan laut Indonesia yang diwujudkan dengan pembangunan TNI AL sebagai *World Class Navy*, sebagai *driving force* pengawal laut Indonesia. Di samping itu, pemerintah harus bertindak tegas terhadap siapa saja manakala ada tindakan yang melanggar aturan hukum. Kedua, dengan adanya ALKI sebagai jalur internasional yang membuat Indonesia menjadi negara terbuka tidak selalu menimbulkan masalah dan kerugian negara, sebagai bangsa yang cermat kita harus pandai memanfaatkan keadaan ALKI untuk menghasilkan keuntungan. Ketiga, gagasan poros maritim hendaknya didukung dengan mengerahkan kekuatan matra laut secara maksimal yang dibantu oleh pihak lain terkait seperti polisi air dan udara, pemerintah daerah, para nelayan, aktivis lingkungan, dan lain-lain. Keempat, menyusun rekomendasi langkah-langkah strategis dan implementatif yang didiskusikan bersama para ahli dalam masing-masing bidang. Indonesia wajib memperkuat status dari negara kepulauan menjadi negara maritim untuk pembangunan Indonesia yang berorientasi kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Syahrin, M. Najeri (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective, Vol. 3*(No. 1), hlm. 9.
- Hutagalung, Siti Merinda (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di. *Jurnal Asia Pacific Studies, Vol. 1*(No. 1), hlm 76.
- Muhamad, Simela Victor (2009). Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Info Singkat Hubungan Internasional, VI*(21), hlm. 7.
- Nugroho, Sigit Sutadi (2019). Implementasi Ketentuan Pasal 50 Unclos Di Wilayah Negara Kepulauan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8*(No. 2), hlm. 297.
- Paskarina, Caroline (2016). Wacana Negara Maritim Dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Wacana Politik, Vol. 1*(No. 1), hlm. 6.
- Rustam, Ismah. (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai

- Poros Maritim Dunia. *Indonesian Perspective*, Vol. 1(No. 1), hlm. 8.
- Sari, Milya (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), hlm. 43.
- Waas, Richard M. (2016). Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal SASI*, Vol. 22(No. 1), hlm 28.
- Hardani, Andriani, Helmina, Ustiawaty, Jumari, Utami, Evi Fatmi, Istiqomah, Ria Rahmatul, Fardani, Roushandy Asri, Sukmana, Dhika Juliana, & Auliya, Nur Hikmatul (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); ke-1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, hlm. 254.
- McNicholas, Michael (2008). *Maritime Security: An Introduction* (P. Chester (Ed.)). Elsevier Inc, hlm. 1-2.
- Puspitawati, Dhiana. (2017). *Hukum Laut Internasional* (Pertama). Kencana, hlm. 120.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Ke-19). CV. Alfabeta, hlm. 9.
- Tri, Sulistyanyingtyas, Susanto, & Munaf, Dicky R. (2015). *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut* (Edisi Ke-1). PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 184.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Pub. L. No. UU No. 6 tahun 1996, 36 (1996), hlm. 4.
- Danendra, Defta (2020). Komitmen Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia untuk Menjaga Keamanan Maritim. Kompasiana. dalam <https://www.kompasiana.com/defta04595/5e698d54d541df47c97bb932/komitmen-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim-dunia-untuk-menjaga-keamanan-maritim-dalam-paradigma-neorealisme?page=all>, 12 Maret 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Leonardo, Andrian, Oktavia, Cindy, Ardikatama, Haikal, Hidayat, Muhammad Ilham, Trihastoro, Muhammad Panji, & Putra, Ryan Arya (2020). Jurnal Konsep Pengukuran dan Esensi Analisis Web. Amryanap.Wordpress.Com. dalam <https://iamryanap.wordpress.com/2020/07/04/jurnal-konsep-pengukuran-dan-esensi-analisis-web/>, 4 Juli 2020, diakses pada 7 Desember 2020.

## STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM RANGKA ANCAMAN KEAMANAN DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II

Oleh:

Amora Harris<sup>1)</sup>, Aries Sudiarso<sup>2)</sup>, Rudy Sutanto<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>1</sup>ah17081945@gmail.com

### Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara maritim dunia dan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau yang wilayah teritorialnya didominasi lautan (Pushidrosal, 2018). Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki 4 (empat) titik yang menjadi chokepoints internasional yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok serta Selat Ombai-Wetar (Rodrigue, 2004). Indonesia telah menetapkan tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk lintas damai pelayaran internasional, yang dijamin keberadaannya oleh hukum internasional dan nasional. Selat Lombok merupakan salah satu pintu gerbang masuk jalur pelayaran (Chokepoint - ALKI II) dan juga merupakan jalur utama perdagangan Asia-Australia, Strategi Pertahanan Laut dalam rangka Ancaman Keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II, penelitian melakukan pengamatan di sepanjang ALKI II, Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menyampaikan beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan eskalasi konflik di Laut China Selatan, serta dari terorisme global, intervensi asing, dan beragam kejahatan lainnya.

**Kata Kunci:** Alur Laut Kepulauan Indonesia II, ALKI, kawasan, keamanan, strategi

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dan sekaligus kepulauan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki laut yang sangat luas karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 13.466 ribu lebih banyaknya di hamparan laut seluas 5,8 juta km persegi, dengan garis pantainya sebagai salah satu yang terpanjang di dunia, yaitu mencapai 95.181 km. Posisi Indonesia yang diapit dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan diapit 2 (dua) samudera, yaitu Pasifik dan Hindia, membuat Indonesia sebagai negara yang strategis di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, atau Asia Pasifik, atau secara geostrategis diapit 2 (dua) benua, yaitu Asia dan Australia, dan diapit 2 (dua) samudera, yaitu Pasifik dan Hindia menjadi sangat penting. Perkembangan kawasan Asia Pasifik dewasa ini memperlihatkan situasi yang terus berkembang sangat dinamis, jauh lebih dinamis dari kawasan lainnya, dari segi politik, ekonomi, dan keamanan. Perkembangan yang kian dinamis di kawasan ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi tinggi yang berlangsung ketika kawasan lainnya terjerat dalam reses ekonomi berkepanjangan dan belum pulih sampai sekarang ini. Perkembangan perekonomian dunia bergeser dari Eropa ke Asia, atau dari kawasan Atlantik ke Asia-Pasifik, dengan aktifitas perdagangan dunia di kawasan ini yang diperkirakan mencapai 70 persen. Sementara, sebesar 75 persen komoditi yang diperdagangkan dikirim dengan menggunakan wilayah perairan (laut) Indonesia, terutama melalui Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Makassar, serta Selat

Sunda, Laut Arafura, dan laut-laut Indonesia lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan hubungan internasional yang meningkat di antara negara-negara, baik yang berasal dari dalam kawasan, maupun yang memiliki kepentingan yang besar yang datang dari luar kawasan Asia Tenggara membuat kedudukan Indonesia menjadi semakin penting. Lebih jauh lagi, dinamika ekonomi dan politik yang terjadi di kawasan ini turut memberi kontribusi ancaman atas (stabilitas) keamanan yang dapat ditimbulkannya, bagi Indonesia, yang telah muncul sebagai sebuah negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan, yang dapat diharapkan menjadi sebuah kekuatan menengah (*middle power*) di abad ke-21.

Presiden Joko Widodo meluncurkan agenda poros maritim dalam kampanye pilpres pertamanya ditahun 2014. Kampanye ini dilanjutkan dengan mem asukkan Poros Maritim dalam sembilan agenda pembangunan nasional (*Nawacita*) pemerintahnya, ketika Beliau mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Presiden Joko Widodo, meluncurkan gagasan pembangunan “Tol Laut”, sebagai solusi untuk perbaikan keterkaitan dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia. Laut pun kini tidak lagi dikatakan sebagai pemisah, namun penyatu wilayah-wilayah (kepulauan) Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau itu. Keterkaitan atau keterhubungan lalu menjadi kunci untuk menyelamatkan pulau-pulau dari keterpisahan, yang jaraknya cukup lebar (jauh) satu dengan lainnya, karena begitu banyaknya pulau yang terdapat di Indonesia. Dalam hubungannya dengan perkembangan yang dinamis di kawasan, dan implementasi agenda poros

maritim dunia Presiden Joko Widodo. Pentingnya Wilayah Laut Indonesia terhadap dunia Internasional (posisi silang dunia yang sering dilewati transportasi laut oleh negara-negara lain) Indonesia membuat dan menetapkan beberapa lajur Internasional yang melewati yuridiksi nasional Indonesia digunakan sebagai alur pelintasan negara lain di wilayah laut Indonesia. Pentingnya konektivitas di negara kepulauan Indonesia dan kondisi stabilitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi hal yang penting untuk diteliti dan dibahas, dari ketiga ALKI yang ada (I, II, dan III).Peneliti akan membahas di ALKI II, karena alur perairannya juga sangat panjang dan berliku, melewati gugusan pulau besar dan kecil, dengan berbagai masalah dan potensi ancamannya. ALKI adalah alur untuk pelayaran dan penerbangan internasional,yang dapat dimanfaatkan secara damai dan normal oleh kapal, atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, di wilayah perairan yang merupakan yuridiksi negara Indonesia. Pemanfaatan ALKI terbuka bagi semua kapal atau pesawat udara asing, yang tujuannya untuk melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia secara rutin dengan mengikuti *Law of the Sea Convention* (LOSC) dari suatu bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), atau laut bebas, ke bagian ZEE atau laut bebas lainnya. Sehingga, pemanfaatan jalur ALKI harus mengikuti peraturan wilayah negara Indonesia. Ini mengikuti ketentuan internasional yang berlaku bagi lintas di perairan negara kepulauanmanapun.

ALKI II meliputi jalur lintas perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok, dan Laut Flores, yang menghubungkan lalu-lintas pelayaran dan perdagangan internasional dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang, serta dari Australia ke Singapura, Tiongkok, dan Jepang, atau sebaliknya. Penetapan ALKI dibuat supaya kegiatan dan kepentingan pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara berkesinambungan, cepat, dan tidak terhalang.

ALKI merupakan garis perhubungan laut yang sudah ada atau digunakan sejak lama, berabad-abad lalu, oleh kapal-kapal asing pengguna yang datang ke perairan alur laut Kepulauan Nusantara. Penetapannya sejak semula diharapkan tidak akan melanggar, dan justru menjadi acuan atau titik-tolak, bagi penggunaan wilayah perairan Kepulauan Indonesia oleh kapal-kapal dunia internasional, sesuai dengan aturan hukum laut internasional, UNCLOS. Melalui Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2002, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga ALKI, yang dapat diterima dunia internasional, setelah sebelumnya diusulkan ke, dan diterima, *International Maritime Organization*-IMO.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka adalah sebuah karangan ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah yang dipandang perlu untuk

diteliti, yang kemudian di telaah dan dibandingkan, dan ditarik kesimpulannya. Atau suatu survei studi deskriptif yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan kepustakaan sebagai sumber utama. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan ALKI oleh pengguna pihak asing bukannya tanpa syarat, yang diminta Pemerintah Indonesia yang telah mengajukan keberadaan dan statusnya sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), yang telah diterima PBB. Tercatat 19 syarat yang harus dipatuhi negara asing pengguna ALKI, baik untuk kapal maupun pesawat yang mengawalinya, meliputi ketentuan, antara lain: (1) Tidak akan mengganggu atau mengancam kedaulatan integritas teritorial Indonesia; (2) Untuk pesawat terbang tidak boleh terbang di luar ALKI; dan (3) Kapal perang asing dan pesawat terbang militer asing yang melewati ALKI tidak dibolehkan melaksanakan latihan perang.

Ketentuan lainnya yang lebih rinci, seperti: (1) Kapal-kapal ikan asing harus tetap menyimpan peralatan penangkapan ikan sewaktu transit, dan dilarang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan ketika transit; (2) Setiap kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya, atau sampah, di perairan Indonesia; (3) Setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia di saat melakukan lintas transit; (4) Kapal-kapal yang melintas transit tidak diizinkan untuk menurunkan personel, material, atau melakukan pemindahan atau transfer personel dari dan ke kapal lain, atau melayani berbagai kegiatan yang bertentangan dengan aturan-aturan keimigrasian, kepabeanan, dan perekonomian serta kondisi kesehatan di wilayah Indonesia; dan Setiap kapal tanker asing, kapal penjelajah yang menggunakan energi nuklir, kapal penjelajah asing yang membawa muatan yang mengandung nuklir atau material berbahaya lain, kapal ikan asing, termasuk kapal perang asing yang melintas di perairan Indonesia dari perairan ZEE, atau dari wilayah laut lepas, atau dari perairan ZEE menuju ke perairan laut lepas dan melintasi perairan Indonesia, hanya diizinkan melintas melalui alur laut yang sudah ditentukan.

Dalam hubungannya dengan ALKI, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia telah membuat negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan perairan ini menjadi obyek perhatian dan incaran kepentingan negara tetangganya dan negara lain di luar kawasan. Ini logis saja, karena luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi, dengan 2,8 juta km persegi perairan

pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km persegi luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengamanan ALKI menjadi penting, selain karena posisi geopolitik dan geostrategis Indonesia, juga karena munculnya Pilar ke-6 dalam agenda Poros Maritim, yakni pertahanan maritim, berupa pengamanan wilayah maritim dan kekayaan SDA-nya. Sebaliknya, kondisi dukungan operasional alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk melindungi pertahanan dan menjaga keamanan laut Indonesia dari penguasaan dan pencurian SDA oleh negara lain sangat terbatas, termasuk dalam pengadaan bahan bakar dan belanja operasional dan kesejahteraan para awak kapalnya, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan operasional kapal-kapal Tiongkok dan AS, di Asia Pasifik. Sebesar 52 persen total alutsista TNI telah dipergunakan lebih dari 30 tahun, usia yang cukup lama dan perlu diremajakan, jika ingin menjadi sebuah kekuatan yang disegani di kawasan.

Ancaman keamanan yang dihadapi Indonesia di ALKI II saat ini menjadi permasalahan signifikan untuk dibahas dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena, pemerintah Joko Widodo/Ma'ruf Amin (2019-2024), ingin mewujudkan agenda pembangunan Poros Maritim Dunia. Hasil penelitian mengenai masalah keamanan di ALKI ini dapat dikonstruksikan kepada parlemen (DPR RI) untuk mengawasi sejauh mana kerja pemerintah telah dicapai dalam mewujudkan agenda Poros Maritim Dunia, selain membantunya dalam menjalankan tugas terkait dibidang legislasi dan anggaran. Penelitian ini sendiri menjawab pertanyaan, bagaimana kondisi dan stabilitas keamanan di sekitar ALKI II saat ini, dan apakah ancaman keamanan yang muncul di sana? Upaya mencari jawaban atas pertanyaan ini menjadi penting, agar Pemerintahan Joko Widodo dapat mengenali hambatan dan juga solusi untuk merespon masalah yang ada di ALKI II, sehingga kebijakan poros maritim dunia dapat diwujudkan dalam periode II pemerintahannya. Secara komprehensif ancaman-ancaman keamanan yang muncul dari luar Indonesia ke wilayah sekitar ALKI II. Sebagai konsekuensinya, wilayah penelitian hanya di ALKI II letak dan kerawannya dari berbagai bentuk ancaman keamanan yang datang belakangan ini dan masuk jauh ke dalam wilayah perairan Indonesia, sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis yang berlangsung.

Penulis bertujuan membuat sebuah analisis penelitian komprehensif yang menjelaskan kondisi dan stabilitas keamanan di sekitar ALKI II, dan ancaman keamanan yang muncul akibat perkembangan dinamis lingkungan strategis yang terjadi. Karena ancaman keamanan yang muncul, dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik dari penelitian kelompok maupun individu. Selain itu, dalam pembahasan dan analisis, juga digunakan data beragam lain, yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai masalah-masalah kelautan sebelumnya,

sebagai pelengkap dan pembanding dari tinjauan pustaka.

Penulis menghasilkan kajian kondisi stabilitas dan ancaman keamanan yang dihadapi Indonesia di ALKI II. Hasil penelitian ringkasan yang konsentrasi pada masalah pertahanan-keamanan dan kelautan, yang berguna untuk digunakan sebagai informasi dan sekaligus referensi dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah.

ALKI II ditetapkan sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS pada tahun 1982, dengan kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan, yang diatur oleh Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut tersebut. Adapun Pasal 47 menyatakan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (*arhipelagic baselines*), dan aturan ini sudah diadopsi ke dalam UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan PP No. 37/2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan PP No. 38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sebelumnya, sudah ada UU No. 17/1985, sebagai konsekuensi dari ratifikasi UNCLOS. Bicara ALKI tidak bisa dilepaskan dari implementasi gagasan Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo, Pendulum Nusantara Presiden SBY yang belum sepenuhnya diwujudkan, dan Wawasan Nusantara mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja, yang sudah duluan dikemukakan. Terkait implementasi gagasan Poros Maritim Dunia, ALKI memegang peranan dalam mendukung upaya optimalisasi pemanfaatan ALKI bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan penduduk sekitarnya, terutama infrastruktur dan fasilitas penunjangnya. Secara khusus, di sana terkait budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas, diplomasi maritim, dan terutama ketahanan maritim, yang secara khusus menjadi tugas pokok aparat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Sehingga, eksistensi ALKI berhubungan langsung dengan posisi geopolitik dan perspektif geostrategis Indonesia. Demikian halnya, gagasan Pendulum Nusantara Presiden SBY, sejalan dengan gagasan 'tol laut' yang dikemukakan Presiden Joko Widodo, sebagai bagian dari gagasan Poros Maritim Dunia. Terkait Wawasan Nusantara, ALKI berhubungan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang, di satu sisi, kedaulatannya diakui oleh hukum internasional, sedangkan di sisi lain, turut mengakui dan menghormati (hak internasional atas) lintas-damai bagi kapal-kapal asing di wilayah perairannya. Gagasan ini, melalui perjuangan yang berat dan kontinu, dapat diterima oleh dunia internasional sebagai bagian dari prinsip hukum internasional mengenai kelautan. Sehingga, ALKI merupakan transaksi pengakuan masyarakat internasional atas konsep Wawasan Nusantara dan Deklarasi Djuanda. Sebaliknya, tanpa tersedianya atau memberikan hak

lintas damai di ALKI, Indonesia sulit memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan penuh di wilayah perairannya, seperti yang dikonsepsikannya dalam gagasan Wawasan Nusantara dan Deklarasi Djuanda. Karenanya, eksistensi hak lintas damai kapal-kapal asal negara lain menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ALKI, Deklarasi Djuanda, dan Wawasan Nusantara, serta pencaangan Poros Maritim Dunia. Analisis mengenai ALKI II dan permasalahannya tidak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai kedaulatan negara, mengingat ia menyatukan, dan bukan lagi memisahkan, seperti dalam perspektif lama eksistensi pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menjadi semakin penting ketika Indonesia dilihat sebagai sebuah negara dalam konsep Wawasan Nusantara, sejak Deklarasi Djuanda disampaikan kepada dunia tahun 1957. Sebagai konsekuensinya, seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang masuk dalam lintasan ALKI I, II, dan III semuanya disatukan, dan tidak lagi dipandang dari perspektif lama, yaitu dipisahkan, oleh lautan. Sehingga, laut pun dilihat dalam perspektif yang lebih positif keberadaannya. Eksistensi laut serta posisi dan peran ALKI menjadi kian penting setelah pemerintah baru Indonesia di bawah Joko Widodo meluncurkan gagasan Poros Maritim Dunia.

Penetapan ALKI dinilai lebih jauh memberikan manfaat dalam memberikan pengakuan atas eksistensi Indonesia dengan peradaban lautnya, sebagai bagian penghubung penting *Eurasian Blue Belt*, *Global Logistic Support System*, *Sea Lanes of Communication* (SLOC), *Consolidated Ocean Web of Communication* (COWOC), serta *Highly Accessed Sea Areas* (HASA), yang menyatukan 3 lautan, yakni India, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan. Yang tidak kalah pentingnya, pemberlakuan ALKI membuat Indonesia sebagai wilayah pelayaran kapal-kapal dunia, dengan muatan *dry cargo* dan *liquid cargo*. Akibat posisi dan nilai penting geopolitik dan geostrategis Indonesia itu, ALKI menjadi rawan dari berbagai bentuk ancaman. Kategori ancamannya mencakup yang bersifat tradisional dan non-tradisional. Ancaman tradisional, yang bersumber dari kehadiran militer asing dengan ancaman alat utama sistem persenjataan (alutsista) mereka. Begitu pula, ancaman yang datang di ALKI II dan wilayah sekitarnya dapat berasal dari aktor negara dan non-negara, individual maupun kelompok. Karena begitu luas wilayah dan sebaran pulau-pulau Indonesia, pengawasan dan pengawasannya oleh aparat keamanan pengguna ALKI II perlu lebih waspada mengingat jenis dan pemberi ancaman terhadap keberadaan ALKI bisa beragam, berkembang dinamis, mengikuti kondisi kawasan dewasaini dan begitu luas wilayah dan sebaran pulau-pulau Indonesia, sedangkan di pihak lain, terbatas kapasitas aparat pertahanan dan keamanan lautnya.

Perairan Indonesia bersinggungan hampir 50 % atau sekitar 40 % perdagangan di dunia. Dari temuan di lapangan, kawasan perairan ini dewasa ini rawan dari implikasi konflik di kawasan serta berbagai bentuk kejahatan transnasional kapal, serta *illegal fishing*, bersama-sama dengan ancaman keamanan yang datang dari intervensi asing dibahas sesudahnya, mengingat wilayah yang terkena dampak bersifat lebih terbatas merupakan ancaman keamanan yang cukup sering terjadi di wilayah sekitar ALKI, dan juga kian potensial merusak stabilitas keamanan (perairan) Indonesia.

Prospek perkembangan Laut China Selatan (LCS) patut memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan ALKI II. Kekhawatiran terhadap ancaman keamanan di ALKI II patut diperhatikan, karena eskalasi ketegangan yang sering kali muncul serta kebijakan dan manuver Angkatan Laut Tiongkok yang agresif terhadap pulau-pulau yang dipersengketakan, paling sedikit dengan 4 (empat) negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam. Perkembangan eskalasi ketegangan yang tidak dapat diredam, melainkan terus meningkat, membawa konsekuensi perlunya Indonesia menyiapkan berbagai langkah skenario terburuk untuk mampu menyiapkan respons yang tepat. Sebagai penangkal atas agresifitas dan manuver-manuver militer Tiongkok, perluasan kerjasama militer, yang bersifat bilateral dan multilateral dengan negara-negara di kawasan, perlu dilakukan Indonesia.

#### **ALKI II dan Ancaman Terorisme Global**

Kondisi Kepulauan Indonesia, dengan garis pantai yang panjang dan letak pularnya yang tersebar, membuat wilayah ini sangat ideal bagi persembunyian dan aktifitas para teroris internasional. Dengan kapasitas dan alutsista yang sangat terbatas, dan menyurutnya peran teritorial TNI, aktifitas para teroris internasional menjadi sulit dipantau dan dicegah. Sehingga TNI, dengan analisis intelijennya, telah menilai Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai wilayah rawan yang dijadikan basis persembunyian, latihan, dan perlawanan para teroris internasional asal Indonesia (Pulau Jawa) dan negara-negara lain, terutama dari Asia Tengah, Timur-Tengah, Eropa Tengah, dan Afrika Utara. Intelijen TNI telah mengungkapkan kegiatan Kelompok Santoso dan Daeng Koro di Poso, yang telah memunculkan konflik sektarian dan digelar operasi militer di sana. Dalam skenario TNI, wilayah Poso adalah *safe haven* para teroris internasional yang pulang pergi selama ini melaksanakan jihad di Suriah dan Irak, berbaur dengan kelompok separatis di Filipina Selatan dan Thailand Selatan.

Dalam hubungannya dengan aksi-aksi terorisme di Poso, perairan di perbatasan Indonesia dan Filipina Selatan termasuk wilayah yang rawan dari mengalirnya para pelaku terorisme global, secara perorangan dan berkelompok. Itulah sebabnya,

Kodam VII Wirabuana telah bekerja sama dengan pihak militer Filipina untuk memperketat pengawasan jalur masuk mereka melalui pulau-pulau kecil atau pulau-pulau terluar di perbatasan kedua negara. Kerjasama antara aparat keamanan RI-Filipina itu meliputi kegiatan patroli bersama secara rutin dan pengawasan di imigrasi, terutama untuk memantau imigran gelap dan orang yang dicurigai. Selain terhadap masuknya secara ilegal para pelaku atau kelompok teroris, kekhawatiran aparat keamanan Indonesia juga meningkat terhadap masuknya senjata dan amunisi yang dipasok dari kelompok ekstrim di Filipina Selatan ke Poso, Sulawesi, lewat jalur laut. Selama ini telah ditemukan jenis senjata dan bahan peledak yang digunakan oleh kelompok radikal muslim, pelaku separatisme di Filipina Selatan. Diluar Poso, wilayah tetanggaseperti Ampana, ibukota Kabupaten Tojo, Una-una, kabupaten hasil pemekaran dari Poso, telah dipantau ketat pihak aparat pertahanan dan keamanan Indonesia. Di laut, aparat telah meningkatkan kegiatan kapal-kapal patroli, serta peralatan komunikasi dan radarmereka. Tingginya tawaran dan kerjasama asing untuk melakukan kegiatan dan latihan maupun operasi bersama di wilayah perairan, memperlihatkan rawannya ALKI II dari berbagai bentuk ancaman yang bersifat langsung maupun tidak, bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya, termasuk Indonesia. ALKI II lebih mengundang perhatian Australia, yang berkepentingan dengan perlindungan wilayah perairannya dari masuknya *illegal immigrants* asal Asia, Timur-Tengah, dan Afrika, yang kian meningkat frekuensinya belakangan. Kawasan ALKIII merupakan laut dalam, yang ombaknya ganas dan rawan ditangkap kapal-kapal pengawas dan penjaga perairan Australia.

#### **ALKI dan Intervensi Asing**

Karena posisi geografis, serta geopolitik dan geostrategis Indonesia, kehadiran kekuatan laut terutama AS, Tiongkok, Rusia, dan Australia, di perairan Indonesia termasuk melalui ALKI, begitu sering, baik yang secara legal maupun ilegal, untuk misi sosial seperti SAR, kerjasama militer, maupun kepentingan intelijen negara-negara tersebut. Perspektif ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan hukum Indonesia, belajar dari kasus Timor Timur, ancaman yang datang dari aktor negara berasal dari negeri jiran, seperti diperlihatkan Malaysia, yang berani dan seringkali melakukan pelanggaran terang-terangan ke wilayahudara Indonesia di atas ALKI II. Pada bulan Januari 2015, Malaysia telah melanggar wilayah kedaulatan Indonesia di Nunukan, dekat dengan ALKI II, sebanyak 2kali di Tahun 2020. Pelanggaran wilayah disekitar ALKIII, jika dibiarkan, akan meningkatkan ancaman bagi Pulau Sebatik dan Ambalat. Pesawat tempur Malaysia diberitakan sengaja memasuki wilayah udara di atas ALKI, karena mereka mengetahui pesawat-pesawat tempur Indonesia yang mengawal perairan di perbatasan,

Dalam perkembangan terkini, ALKI tidak luput dari kegiatan operasi pesawat nirawak (*drones*) negara besar di kawasan, seperti AS dan Australia. Mereka sangat beralasan memerlukan *drones*, demi efisiensi, karena kesulitan untuk melakukan gelar operasi jauh di luar wilayahnya. Selain membantu meningkatkan pengamanan ALKI bagi negara yang berkepentingan, bagaimanapun, kehadiran *drones* di ALKI perlu dipantau, khususnya terhadap penyalahgunaan untuk kegiatan spionase yang merugikan kepentingan Indonesia, termasuk di Lautan Hindia, sebagai akses masuk dan keluar ALKI II. Perairan Indonesia yang kaya dengan SDA, dan sulit diawasi, akibat panjanggaris pantai dan letak pulau-pulaunya yang begitu tersebar. Diluaroperasi *drones*, aktivitas kapal-kapal *super modern* negara besar, terutama Tiongkok, AS, dan Australia, serta Rusia, di ALKI dan wilayah perairan Indonesia lainnya yang tidak terdeteksi radar dan pengawasan langsung, turut memberikan ancaman keamanan yang tinggi terhadap prospek keamanan di seluruh perairan Indonesia. Ancaman ini patut diantisipasi mengingat kapasitas dan kapabilitas kapal-kapal mereka dengan peralatan anti-radar, selain alutsista tercanggih, dengan kemampuan menghindari diri dari berbagai upaya pencegahan, penindakan, dan penangkalan di lapangan. Ini termasuk untuk kegiatan operasi bawah air kapal-kapal selam Tiongkok yang baru diluncurkan untuk operasi di perairan Asia-Pasifik. Eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS) dan kepentingan negeri itu yang meluas di kawasan, akibat kebutuhan energi yang besar, akan memperbesar kemungkinan aksi intervensi militer langsung di wilayah perairan Indonesia, termasuk melalui ALKI II.

Ancaman yang datang terhadap wilayah sekitar ALKIII dari kegiatan *illegal fishing*, begitu besar, dengan kerugian potensial per tahunnya mencapai lebih dari Rp.300 trilyun lebih, Hasil investigasi Tim Satgas *Anti-Illegal Fishing* mengungkapkan, 913 kapal telah didiskualifikasi, karena telah melakukan berbagai pelanggaran. Kapal-kapal asing itu bisa leluasa melakukan kegiatan *illegal fishing* dengan menggunakan ALKI. Jenis pelanggaran mereka sangat beragam, seperti mempekerjakan nakhoda dan ABK asing tanpa surat lengkap, memakai lebih dari satu bendera, VMS tidak aktif atau dimatikan, terutama ketika memasuki wilayah di perairan yang kaya ikan, apalagi di pulau-pulau terdepan atau perbatasan, melakukan *transshipment*, membawa BBM ilegal, dan lain-lain.

Terhadap kegiatan *illegal fishing* di ALKI II, Tiongkok adalah ancaman utama, yang diperkuat fakta angka hasil perikanan tangkap Tiongkok, Selain Tiongkok, negara asal para pencuri ikan yang tertangkap juga banyak yang berasal dari negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Dalam kasus perampokan (*armed robbery*) dan pembajakan kapal (*piracy*), wilayah perairan Indonesia dilaporkan sebagai yang ketiga

tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan *International Maritime Organization*, Selat Sulawesi di ALKI II, telah diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan perompakan. Selain kasus-kasus *illegal fishing*, serta perompakan, penyelundupan narkoba, penyelundupan dan perdagangan orang serta migrasi manusia secara ilegal, penyelundupan pakaian bekas, senjata, dan barang-barang komoditas lainnya, serta *illegal logging*, telah menambah kondisi rawan di ALKI II. Kasus-kasus yang terjadi begitu kompleks, sehingga membutuhkan pembahasan dalam tersendiri. Kejahatan transnasional yang masuk melalui kawasan perairan sekitar ALKI II dalam tahun-tahun di depan akan cenderung meningkat.

## 5. KESIMPULAN

Kondisi keamanan di sekitar ALKI II telah ditandai perkembangan dinamis dan, meningkatnya ancaman instabilitas kawasan. Temuan penulis memperlihatkan kecenderungan meningkatnya eskalasi konflik di Laut China Selatan serangan terorisme global, intervensi asing, dan *illegal fishing*, yang memberi ancaman keamanan terhadap Indonesia dewasa ini. Berbagai bentuk ancaman keamanan itu bermunculan dari wilayah-wilayah sekitar ALKI, di luar kejahatan transnasional lain, yang datang kecuali dari ancaman *spill over* eskalasi ketegangan dari *illegal fishing*, perompakan, dan pembajakan kapal. Eskalasi ketegangan dan konflik antarnegara besar dan perilaku *claimants* yang agresif, terutama Tiongkok dan Filipina, di Laut China Selatan, dan aksi-aksi terorisme global yang dilancarkan para aktor non-negara sangat rawan memicu instabilitas wilayah di Indonesia, terutama di wilayah ALKI II. Demikian halnya, dengan intervensi asing yang dapat muncul akibat perkembangan yang sangat dinamis di kawasan, termasuk di perairan Indonesia. Sementara, berbagai bentuk kejahatan transnasional, selain menciptakan instabilitas, juga dapat memberi kerugian secara ekonomi yang semakin besar bagi Indonesia di masa depan.

Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas alutsista aparat membuat tingkat ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan wilayah di sekitar ALKI II menjaditinggi. Sementara, upaya mengatasinya melalui latihan dan operasi kerjasama di lapangan bukannya tidak membawa resiko. Karena, mengundang keterlibatan asing dalam latihan bersama sesering mungkin, untuk masuk jauh ke wilayah perairan Kepulauan Indonesia, di luar jalur ALKI yang disediakan, semakin memberikan kesempatan pihak asing untuk melakukan pengintaian dan pendataan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak langsung. Kondisi saat ini yang berkembang menunjukkan eksistensi ALKI II dan prospek ancamannya, serta upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membutuhkan personel keamanan yang profesional dan memiliki dedikasi

dan kemampuan yang tinggi dalam bertugas. Sehingga, tugas mengawal kedaulatan Indonesia di ALKI dan menciptakan stabilitas jangka panjang, supaya Indonesia dapat meraih manfaat kemakmuran yang optimal dari posisi geopolitik dan geostrategis yang baik, yang selama ini telah disediakan dalam Perspektif dari langkah TNI-AL untuk mengubah struktur dan meningkatkan gelar pangkalan dan armadanya patut didukung dan diwadahi seoptimal mungkin. Hal ini sejalan dengan rencana Mabes TNI untuk membentuk kembali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, yang di masa lalu dikenal dengan Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan). Sehingga, pengadaan 3 (tiga) armada akan sejalan dengan kehadiran 3 (tiga) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, yaitu di Barat, Tengah dan Timur, di samping sesuai dengan penetapan dan keberadaan ALKI. Sudah menjadi kewajiban aparat pertahanan dan keamanan laut Indonesia untuk mampu memberikan perlindungan dan rasa aman, dengan standar internasional tentunya, bagi para pengguna ALKI, sesuai UNCLOS, sebagai negara pantai atau negarakepulauan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Komang Hare Yashuananda, Wisanjaya, I. G. P. E., & Mahartayasa, I. M. (2018). "Penegakan Hukum Pada Alur Laut". *Jurnal Fak. Hukum Unud*, 2018, hlm 8.
- MARBUN, V. (2015). "Hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing melakukan lintas di alur laut kepulauan indonesia" *jurnal*, 2015, hlm 22.
- Nainggolan, P. P. (2015). Indonesia Dan Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Pusat Kajian P3DI Setjen DPR RI*, 2015, hlm 3.
- Purwaka, T. H. (2015). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015, hlm 3-4.
- Suhirwan, S., & Prakoso, L. Y. (2019). *Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda*. 13–20. <https://doi.org/10.33510/slki.2019>, hlm 2.
- Ditjen PSDKP KKP. (2015). *Mina Bahari*. 2015, hlm 9.
- Haryanto, Ruslijanto, H., & Mulyono, D. (1999). *Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah*, 1999 hlm 3.
- Vinsensio Dugis. (2018). Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. In *Neorealisme* (Issue December). [https://www.researchgate.net/profile/Vinsensio\\_Dugis/publication/321709080\\_Teori\\_Hubungan\\_Internasional\\_Perspektif-Perspektif\\_Klasik/links/5a2c36a00f7e9b63e53adfed/Teori-Hubungan-Internasional-Perspektif-Perspektif-Klasik.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Vinsensio_Dugis/publication/321709080_Teori_Hubungan_Internasional_Perspektif-Perspektif_Klasik/links/5a2c36a00f7e9b63e53adfed/Teori-Hubungan-Internasional-Perspektif-Perspektif-Klasik.pdf), 9 Desember

- 2018, diakses tanggal 09 Desember 2020 ,  
hlm 7.
- Yaniawati, P. D. H. R. P. (2020). *Penelitian Studi  
Kepustakaan. 2020, hlm 6.*
- detik.com/. (2019, September 26). *TNI dan Polri  
Dapat Anggaran Jumbo di 2020.*  
[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-  
bisnis/d-4723279/tni-dan-polri-dapat-  
anggaran-jumbo-di-2020-alasannya](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-<br/>bisnis/d-4723279/tni-dan-polri-dapat-<br/>anggaran-jumbo-di-2020-alasannya), 26  
september 2019, diakses 10 Desember 2020.
- Gregory B. Poling. (2013, March 8). *Indonesia's  
Blueprint for a 21st Century Asia Pacific.*  
[https://www.csis.org/analysis/dynamic-  
equilibrium-indonesia's-blueprint-21st-  
century-asia-pacific](https://www.csis.org/analysis/dynamic-<br/>equilibrium-indonesia's-blueprint-21st-<br/>century-asia-pacific)
- ISL NEWS. (2019, January 26). *IMO Tetapkan  
Indonesia Sebagai Negara Kepulauan  
Pertama di dunia Yang Memiliki Bagan  
Pemisah Alur Laut/ ALKI I - ALKI II.*  
[https://indonesiashippingline.com/shipping/37  
39-imo-tetapkan-indonesia-sebagai-negara-  
kepulauan-pertama-di-dunia-yang-memiliki-  
bagan-pemisah-alur-laut-alki-i-alki-ii.html](https://indonesiashippingline.com/shipping/37<br/>39-imo-tetapkan-indonesia-sebagai-negara-<br/>kepulauan-pertama-di-dunia-yang-memiliki-<br/>bagan-pemisah-alur-laut-alki-i-alki-ii.html), 26  
Januari 2019, diakses 10 Desember 2020.
- Muhammad Choirul Anwar. (2020, August 24). *40%  
Kargo Dunia Numpang Lewat Laut NKRI, RI  
Dapat Untung?*  
[https://www.cnbcindonesia.com/news/202008  
24133827-4-181528/40-kargo-dunia-  
numpang-lewat-laut-nkri-ri-dapat-untung](https://www.cnbcindonesia.com/news/202008<br/>24133827-4-181528/40-kargo-dunia-<br/>numpang-lewat-laut-nkri-ri-dapat-untung), 24  
Agustud 2020,diakses 12 Desember 2020,

# STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DIHADAPKAN DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN MARITIM GLOBAL DAN REGIONAL

Oleh:

Andhika Wira Kusuma<sup>1)</sup>, M. Faisal<sup>2)</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Pertahanan

## Abstrak

Sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang strategis, Indonesia telah mencanangkan konsep poros maritim dunia sebagai agenda resmi pemerintah. Tulisan ini membahas tentang kondisi perairan Indonesia, perkembangan lingkungan strategis di tingkat global maupun kawasan, potensi ancaman yang ada serta strategi pertahanan laut yang dapat diterapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menyeleksi lebih dulu data primer yang diperoleh, dan kemudian melengkapinya dengan data sekunder serta informasi yang diperoleh melalui penelusuran internet. Hasil penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan, serta dari beragam kejahatan transnasional. Dalam hal konflik di Laut Cina Selatan, diperlukan cara yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan strategi penangkalan dengan menyusun dan memperkuat strategi pertahanan laut dengan membentuk komponen utama melalui restrukturisasi kementerian dan lembaga terkait berdasarkan aspek militer, politik, ekonomi, sipil, dan informasi, dimana strategi ini bergantung pada eskalasi konflik yang terjadi dan penggunaan kekuatan militer negara di wilayah yang disengketakan.

**Kata kunci:** Strategi, pertahanan, ancaman, keamanan

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan memiliki laut yang sangat luas dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 13 ribu pulau yang tersebar di wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi, serta memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km sebagai salah satu garis pantai terpanjang di dunia (Dahuri, 2014). Posisi negara Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta benua Asia dan Australia memberikan keuntungan secara geografis, dimana kondisi tersebut menjadi sangat potensial jika dapat dioptimalkan karena kondisi geografis tersebut akan mengarah pada terwujudnya aktivitas pelayaran yang ramai di wilayah Indonesia dengan sendirinya. Sedangkan bagi Indonesia, pentingnya aktivitas pelayaran tentunya disebabkan oleh posisi, luas wilayah laut, serta bentuk geografisnya. Posisi Indonesia yang strategis berada dalam persilangan jalur perdagangan dunia, membuat Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perekonomiannya, selain itu perairan Indonesia yang merupakan bagian dari *sea lines of communication* (SLOC) bagi pelayaran internasional, memiliki arti yang penting bagi komunitas pengguna laut di dunia (Till, 2009). Status Indonesia sebagai negara kepulauan juga harus bisa mengakomodir kepentingan pelayaran dan penerbangan internasional yang akan melalui perairan laut teritorialnya. Semua fakta tersebut dapat diartikan jika Indonesia mampu memanfaatkan dan

mengelola peluang di wilayah lautnya, maka akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakatnya. Di sisi lain, apabila Indonesia tidak mampu mengelola dan mengantisipasi kerawanan yang ada, akan timbul potensi ancaman dan gangguan di dan lewat laut yang dapat mempengaruhi pertahanan negara.

Pada tahun 2014, pemerintahan presiden Jokowi mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia (PMD), yang diteruskan dengan memasukkan agenda tersebut dalam sembilan agenda pembangunan nasional. Selain itu, sejumlah RUU yang terkait dengan agenda tersebut juga telah dirancang seperti RUU pembangunan infrastruktur dan transportasi laut serta beberapa RUU lainnya, konsep pengembangan tol laut sebagai salah satu solusi untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya pun telah digagas sebagai tindak lanjut. Semua hal tersebut dilakukan untuk mengubah cara pandang terhadap laut yang selama ini dianggap sebagai pemisah menjadi laut sebagai penyatu dari wilayah-wilayah yang terpisah. Dalam kaitannya dengan perkembangan kawasan yang sangat dinamis, pentingnya strategi pertahanan laut di wilayah Indonesia menjadi isu yang menarik untuk dibahas, baik mengenai perairan di dalam wilayah Indonesia seperti alur laut kepulauan Indonesia, maupun perairan di batas-batas luar wilayah Indonesia. Gagasan mengenai poros maritim dunia harus bisa menjadi konsep utama yang mendasari pembangunan Indonesia dari sektor kemaritiman. Strategi pertahanan laut merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional, dimana permasalahan mengenai

potensi konflik, energi, ekonomi merupakan hal yang mutlak dan harus dipertahankan, dan sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, sudah sepatutnya sektor kemaritiman memperoleh perhatian lebih dari para pembuat kebijakan. Menurut Geoffrey Till, laut memiliki empat fungsi utama yang dapat memberikan keuntungan bagi negara pada masa damai maupun perang (2013). Pertama, laut merupakan tempat berkumpulnya sumber daya, baik hayati maupun energi, yang berperan penting bagi negara. Kedua, laut sebagai jalur transportasi dan perdagangan yang merupakan unsur penghubung utama dari aktivitas perdagangan serta merupakan bagian dari globalisasi yang dianggap dapat meningkatkan perdamaian dan kemakmuran. Ketiga, laut sebagai media informasi dan penyebaran ide, dimana meningkatnya arus aliran barang seringkali diikuti dengan pertukaran informasi atau ilmu pengetahuan baru dari berbagai belahan dunia. Terkait dengan hal ini, saat ini fungsi tersebut telah tergeser oleh perkembangan teknologi informasi. Keempat, laut sebagai atribut kekuasaan dimana negara menggunakan laut sebagai instrumen dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam bidang kemaritiman, aspek pertahanan dalam strategi pertahanan laut menekankan pada pentingnya kemampuan dalam peperangan sebagai bagian dari strategi bidang maritim secara keseluruhan. Perkembangan dalam bidang peperangan laut telah mengalami kemajuan pesat sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang pertahanan. Saat ini telah muncul beberapa teknologi baru yang mungkin dapat digunakan pada peperangan di masa mendatang, seperti adanya pesawat tempur, kapal selam, kapal permukaan maupun rudal jarak jauh dengan teknologi terbaru. Till berpendapat bahwa perkembangan teknologi juga akan berpengaruh terhadap perubahan arah strategi maritim (2005), di sisi lain terdapat kondisi-kondisi utama yang berpengaruh terhadap negara maritim seperti posisi geografis, tata ruang fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter masyarakat dan karakter pemerintahannya (Mahan, 1889). Mahan berpendapat bahwa negara yang memiliki keuntungan dalam hal alam dan posisi strategis semestinya bisa memanfaatkan kelebihan tersebut untuk mencapai keunggulan kekuatan laut negara tersebut, dimana pendapat tersebut sesuai dengan karakter militer sebagai bagian dari kekuatan laut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi dengan tujuan untuk memahami fenomena yang ada untuk kemudian disajikan secara deskriptif. Pendekatan fenomenologi merupakan cara dimana penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu (Creswell, 2012). Penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahap. Yang pertama dimulai dengan

mengumpulkan, menelaah, dan mereduksi seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber untuk dianalisis. Tahap kedua adalah penyajian data yang sudah direduksi dan dianalisis untuk dijadikan dasar bagi langkah selanjutnya untuk melakukan analisis atau membuat kesimpulan, dan penarikan kesimpulan merupakan tahap ketiga dalam proses analisis (Sugiyono, 2018). Tipe penelitian kualitatif dalam tulisan ini berfokus pada menjelaskan suatu fenomena. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan teknik analisis data bertipe eksplanatif dimana tulisan ini bermaksud untuk membuat penjelasan secara faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena tertentu. Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, jurnal, buku, dan halaman website. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap fenomena yang terjadi sehubungan dengan perkembangan situasi perkembangan lingkungan baik domestik, regional, maupun global.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Globalisasi dan Banglingstra

Globalisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau serangkaian proses lintas wilayah yang menyebabkan meningkatnya kecairan dan tumbuhnya arus manusia, benda, tempat, dan informasi multi arah (Ritzer, 2006). Secara alamiah globalisasi merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari dan membuat kabur batas geografis suatu negara, dimana globalisasi menyebabkan negara-negara menjadi tanpa batas dan ada sebab serta akibat yang muncul dari pola interaksi tanpa sekat dan batasan geografis. Rosenberg berpendapat bahwa globalisasi terbangun dari elemen-elemen seperti ekonomi, sosial, politik, kultur, diplomasi, dan militer yang memiliki konteks dan keterhubungan yang unik (2005). Sejak awal abad 21, tercatat adanya peningkatan fenomena globalisasi pada industri pertahanan yang nampak semakin menguat sejak tahun 80an. Hal tersebut ditandai dengan adanya kecenderungan yang cukup signifikan dalam intensitas kerjasama antar negara dalam pembangunan industri pertahanan mereka (Caverley, 2007). Dalam era perkembangan teknologi saat ini, teknologi pertahanan dengan kemampuan siluman dan persenjataan nirawak seperti *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau *Autonomous Underwater Vehicle* (AUV) merupakan produk-produk yang menjadi andalan dalam industri pertahanan di negara-negara maju. Secara lebih lanjut, perubahan teknologi yang drastis dan cepat, yang muncul pada era Revolusi Industri 4.0, memaksa militer beradaptasi lebih cepat dan berevolusi untuk melakukan perubahan besar. Hal ini membuat kondisi yang berhadapan dengan dinamika lingkungan strategis dan perubahan geopolitik (Octavian, 2019). Kemajuan teknologi dan strategi pertahanan yang demikian pesat menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam

memaknai arti pertahanan dan keamanan nasional. Dalam dua dekade terakhir, kondisi lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik telah menunjukkan perkembangan yang dinamis, bahkan jauh lebih dinamis dibandingkan kawasan lain di dunia, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan. Perkembangan tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung di saat kawasan lain di dunia tengah mengalami resesi ekonomi. Hal ini mengakibatkan pergeseran sektor perkembangan perekonomian dunia dari negara-negara di kawasan Eropa ke negara-negara di kawasan Asia. Sehubungan dengan Indonesia, distribusi dari sekitar 75 persen komoditi yang diperdagangkan dikirim melalui laut dengan menggunakan wilayah perairan Indonesia, khususnya melalui perairan seperti Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Sunda, serta Laut Arafuru, dan laut-laut Indonesia lainnya, dan diperkirakan nilai perdagangan tersebut secara keseluruhan mencapai US\$ 1.500 trilyun setiap tahunnya (Warsito, 2014). Tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya hubungan internasional antar negara, baik yang berasal dari negara di dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara yang memiliki kepentingan, menjadikan kedudukan Indonesia semakin penting. Di sisi lain, dinamika ekonomi dan politik yang terjadi di dalam kawasan ini turut memberikan kontribusi potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan Indonesia, yang telah muncul sebagai sebuah negara dengan pengaruh besar secara regional, yang dapat diharapkan dapat menjadi sebuah negara dengan kekuatan menengah pada abad 21 (Polling, 2013). Seiring dengan visi Indonesia sebagai PMD, pemerintah telah berkomitmen agar Indonesia secara langsung turut berkepentingan untuk berperan menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia, dimana Indonesia menginginkan situasi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, dan tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, sengketa wilayah wilayah, dan kompetisi supremasi maritim (Setkab, 2014). Gagasan PMD sendiri pada dasarnya merupakan bentuk dari kesadaran akan posisi strategis yang dimiliki Indonesia sebagai bagian dari jalur perdagangan dunia (SLOT) serta jalur komunikasi dan perhubungan dunia (SLOC) yang sudah ada sejak lama. Sebagai jalur perdagangan dunia, Indonesia juga mendapatkan perhatian lebih dari negara-negara pengguna laut karena di Indonesia terdapat tiga *choke point* yang terletak di tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Visi Indonesia sebagai PMD tersebut selaras dengan pemikiran Mahan, dimana pemerintah saat ini tengah berupaya mengembalikan karakter pemerintahan dan rakyat agar bercorak maritim dengan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi dan politik yang berkarakter maritim, yang berdasarkan modal dasar kondisi geografis serta populasi penduduk

Indonesia yang besar jumlahnya. Sebagai konsekuensi, visi dari PMD juga menuntut kemampuan Indonesia untuk mengontrol, melakukan pengawasan, serta menjaga keamanan wilayah maritim (UNCLOS, 1982). Kondisi keamanan dan stabilitas maritim sendiri memiliki pengertian kegiatan baik sipil maupun militer yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kegiatan ilegal dan ancaman dalam domain maritim, melalui upaya penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga negara dan kepentingan nasional (Srenal, 2015), sehingga peningkatan kemampuan institusi maritim yang berwenang berfungsi untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia serta menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan wilayah maritim dan juga perlindungan kedaulatan laut Indonesia.

#### **Ancaman Maritim Indonesia**

Seiring dengan perkembangan jaman, bentuk dan pola ancaman terhadap suatu negara telah mengalami perubahan. Ancaman terhadap suatu negara saat ini tidak hanya berbentuk agresi militer atau perang terbuka dari negara lain, namun potensi ancaman saat ini telah berevolusi dengan melibatkan aktor non negara (Krahmann, 2005). Berdasarkan BPPI tahun 2015, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata (2015). Salah satu ancaman nyata terhadap keamanan global adalah kejahatan lintas negara yang dipandang sebagai ancaman serius dan menjadikan kerawanan bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dalam UU No. 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes*, disebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan lintas negara, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan satwa dan tumbuhan illegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan migran. Berdasarkan trend yang ada, saat ini terdapat beberapa jenis kejahatan lintas negara yang marak di Indonesia, diantaranya adalah perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, perompakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, serta terorisme (BPPI, 2015), dimana semua ancaman kejahatan lintas negara tersebut berpotensi masuk dari ataupun terjadi di wilayah laut dikarenakan posisi Indonesia yang sangat terbuka. Ancaman keamanan maritim yang dihadapi Indonesia pada akhirnya akan menjadi permasalahan bersama di kawasan Asia Tenggara atau sebaliknya, yang dapat berkembang menjadi masalah bagi pertahanan dan keamanan, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Selain itu, isu maritim regional yang terus berkembang saat ini adalah permasalahan klaim Laut Cina Selatan (LCS) oleh Cina. Implikasi konflik yang terjadi muncul dari perkembangan konflik LCS yang belum teratasi dan bahkan terus mengalami eskalasi ketegangan, sehingga negara yang tidak mampu menerapkan kebijakan strategisnya di kawasan tersebut juga akan kehilangan

kepentingan strategisnya. Saat ini, kondisi lingkungan strategis yang berkembang di kawasan ini adalah ketergantungan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN terhadap Cina, dimana Cina merupakan negara yang mampu memanfaatkan kondisi tersebut hingga membuatnya leluasa untuk beraktivitas di wilayah yang menjadi sengketa (Meidi, 2014). Cina tampak leluasa dalam membangun dan mengembangkan pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan Paracel (Hannah, 2018), walaupun seperti diketahui dunia internasional bahwa hal tersebut ilegal karena pulau-pulau tersebut masih dalam status sengketa. Potensi ancaman lain yang muncul adalah meningkatnya ketegangan di antara negara-negara yang bersengketa dan perlombaan untuk saling memperkuat kemampuan militernya di kawasan tersebut. Sebagai contoh adalah Filipina yang melakukan modernisasi militernya pada tahun 2017 dengan membeli alutsista dari Rusia (Mogato, 2017) dan juga Vietnam yang meningkatkan kapabilitas militernya dengan membeli kapal-kapal patroli dari India yang diyakini dilakukan untuk menjaga wilayah laut yang disengketakan dari dominasi Cina (Joshi, 2016). Jika dilihat dari dampaknya di masa mendatang, konflik LCS perlu mendapat prioritas dalam memprediksi arah ancaman, karena situasi konflik yang terjadi dapat berdampak secara luas terhadap kawasan dengan tidak mengesampingkan ancaman kejahatan lintas negara yang datang dari terorisme, pencurian dan pembajakan kapal, serta *illegal fishing*, bersama-sama dengan ancaman keamanan yang datang dari intervensi asing. Dalam masalah LCS, situasi yang berkembang di kawasan ini muncul dari intervensi Amerika Serikat (AS) terhadap kawasan LCS, dimana AS terlihat sangat proaktif dalam menentang kebijakan Tiongkok di LCS (US DoD, 2012). Kepentingan AS untuk menempatkan pangkalan militernya di Asia Timur dan Tenggara tentu berkaitan dengan *nation building* mereka, selain untuk menekan Korea Utara dalam program denuklirisasi, dan sekaligus untuk mengimbangi kekuatan Cina serta melindungi sekutunya (Revere, 2005). Hadirnya dua kekuatan besar di kawasan LCS menimbulkan dinamika persaingan di antara keduanya, dimana masing-masing terus mencari pengaruh dan dukungan di kawasan ini untuk kepentingannya. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Menhan AS yang siap memberikan bantuan kekuatan militer saat Indonesia mengalami ketegangan dengan Cina di wilayah LCS (Hasan, 2018). Bantuan ini bukan hanya bentuk dukungan, melainkan juga usaha AS untuk meraih simpati dari Indonesia, karena AS juga sangat membutuhkan dukungan dari negara-negara anggota ASEAN di kawasan ini untuk mempertahankan statusnya sebagai negara *super power*.

#### **Strategi Pertahanan Laut Indonesia**

Pada dasarnya, kebijakan pertahanan Indonesia diimplementasikan melalui segala

kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara guna mengoptimalkan kemampuan dalam menanggulangi berbagai ancaman. Kebijakan pertahanan negara tersebut mencakup pembangunan, pengerahan, maupun pemberdayaan pertahanan negara didukung dengan kebijakan penganggaran dan pengawasan. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terarah bagi segenap komponen pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun nonmiliter. Fungsi dan peran militer memiliki dua dimensi yakni untuk melakukan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang, sedangkan pertahanan nonmiliter memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertahanan sebagai usaha untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman nonmiliter, serta fungsi sesuai tugas pokok dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2015). Penekanan terhadap permasalahan penguatan keamanan maritim juga didasari oleh masih tingginya gangguan keamanan di laut yang disebabkan masih kurangnya kehadiran dan pengawasan aparat keamanan di laut. Dalam mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan program berupa peningkatan pengawasan wilayah perairan Indonesia serta peningkatan sarana dan prasarana perbatasan laut.

Sehubungan dengan potensi ancaman di LCS, konflik yang tengah berlangsung di wilayah tersebut memang sepertinya tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Walaupun Indonesia bukan termasuk negara *claimant*, mau tidak mau Indonesia harus turut mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Doktrin pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif mengharuskan Indonesia mempertahankan kedaulatannya atas kemungkinan invasi dari pihak asing. Indonesia memiliki alat pertahanan negara berupa TNI sebagai komponen utama pertahanan yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI (Indonesia, 2004). Seperti yang dijelaskan bahwa kondisi lingkungan strategis di kawasan LCS sangatlah dinamis dan memungkinkan terjadinya konflik dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi yang tepat guna mengantisipasi hal tersebut. Konsep dasar dari serangan dan pertahanan adalah letak sumber kekuatan, dimana terdapat area yang vital atau strategis dan di sanalah pusat serangannya yang lebih besar, sehingga pertahanan di dalam obyek vital tersebut juga harus lebih kuat. Bentuk serangan terkuat adalah serangan yang ditujukan untuk menduduki fasilitas maritim strategis seperti terminal pelabuhan, dan membangun blokade yang dapat berpengaruh terhadap laju ekonomi negara. Oleh karena itu, pulau yang terdekat dengan LCS seperti Natuna seyogyanya tidak dikembangkan sebagai kota pelabuhan atau perdagangan, melainkan lebih dimanfaatkan untuk fungsi pertahanan. Dalam strategi pertahanan laut, kekuatan pertahanan maritim mutlak diperlukan. Dalam kondisi apapun, kekuatan militer yang ada tidak akan mampu menangkal atau

melakukan serangan balasan tanpa adanya pertahanan yang memadai. Dengan kata lain, jika Indonesia tidak memiliki kemampuan mampu untuk melakukan penyerangan, maka Indonesia dapat melakukan pertahanan. Jika sebuah negara tidak memiliki kekuatan laut yang superior, maka bertahan adalah cara paling efektif dalam mengamankan kedaulatan wilayah dengan cara penyerangan balasan di wilayah perairan laut sendiri. Salah satu keuntungan dari bertahan adalah menunda sebuah keputusan. Seperti diketahui bahwa menyerang musuh membutuhkan perhitungan taktik dan strategi yang sangat teliti dan penuh dengan perhitungan. Sehingga dengan bertahan, setidaknya mampu membuat musuh mengambil sebuah keputusan yang sulit (Clausewitz, 1989). Dalam pengertian ini, bertahan bukan berarti bersikap pasif, melainkan merupakan bentuk dari negosiasi peperangan, dimana konsep untuk bertahan tersebut sebenarnya didukung dengan kemampuan konsep *Minimum Essential of Force* (MEF) yang sudah dimulai sejak dari tahun 2012 (Kemhan, 2012). Dalam sebuah strategi pertahanan maritim diperlukan suatu komando laut (Corbett, 2015), dimana tugas dari komando laut tersebut bukanlah untuk menaklukkan wilayah laut atau menginvasi pantai dalam wilayah musuh, melainkan untuk mengontrol komunikasi maritim, baik untuk kepentingan komersial maupun militer. Penguasaan komunikasi laut ini menetapkan batasan, larangan, dan hak kepada siapapun yang berlayar di wilayah komando. Penguasaan tersebut ini dapat berupa otoritas penuh atas properti publik atau swasta yang berada di laut, sehingga mempertahankan laut memang penting, namun mempertahankan komando laut dari serangan musuh juga harus diprioritaskan. Dalam strategi pertahanan laut yang bersifat defensif aktif, Indonesia akan lebih banyak melakukan kegiatan observasi dan pengawasan. Kapabilitas terkuat yang mungkin dilakukan adalah menggabungkan antara kemampuan bertahan dan menyerang, dimana posisi bertahan lebih mudah dilakukan untuk tindakan pencegahan, karena strategi pertahanan laut defensif aktif bukan merupakan sebuah perang laut untuk menghancurkan armada lawan, melainkan untuk mencegah pasukan musuh melewati laut teritorial dan melindungi kapal-kapal kita dalam melaksanakan kegiatan patroli. Sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, TNI AL dapat melakukan tindakan guna mengintervensi musuh sebagai bentuk supremasi komando laut di wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, pengetahuan mengenai kekuatan militer negara yang bersengketa di LCS sangat penting untuk dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk menentukan strategi pertahanan laut yang tepat. Menurut laporan dari CSIS Brief, Cina tengah mengembangkan alutsista nirawak berupa UAV dan AUV, selain itu Cina juga terus mengembangkan rudal jarak jauh *Inter Continental Ballistic Missile* (ICBM) dan *Submarine*

*Launch Ballistic Missile* (SLBM) (Ian & Masao, 2019). Cina juga merupakan negara yang memiliki senjata nuklir, dimana keberadaan senjata nuklir tersebut dapat dijadikan alat untuk memperkuat sistem pertahanannya baik ofensif maupun defensif. Secara ofensif, senjata nuklir berguna untuk memberikan pengaruh seperti intimidasi, terhadap negara lain yang lebih lemah, sedangkan secara defensif, senjata nuklir Cina berfungsi untuk memberikan efek *deterrent* bagi negara yang lebih kuat khususnya AS (Ahyar, 2019). Pada dasarnya, konflik di LCS hingga saat ini bukanlah merupakan konflik militer, dimana kekuatan laut Cina tidak secara langsung hadir di wilayah yang disengketakan. Dalam prakteknya, kegiatan yang dilakukan oleh Cina adalah penguasaan secara fisik terhadap wilayah sengketa dan pembangunan pulau-pulau buatan, selain itu kapal-kapal nelayan Cina juga secara aktif melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan dikawal oleh *coast guard* Cina yang dalam hal ini adalah non militer, sehingga dapat diartikan bahwa perang yang terjadi bersifat hibrida. Secara umum, perang hibrida dapat diartikan sebagai sinkronisasi penggunaan beberapa instrumen kekuatan untuk menyerang spektrum kerentanan suatu negara dalam mencapai kepentingan strategisnya (Patrick & Erik, 2017). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 dinyatakan bahwa sistem pertahanan Indonesia adalah pertahanan bersifat semesta yang memadukan segala elemen dan sumber daya nasional dalam menghadapi ancaman baik militer maupun non militer, sehingga diperlukan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait disesuaikan dengan bidang tugasnya dengan dukungan kekuatan militer dan elemen kekuatan bangsa lainnya.

#### 4. PENUTUP

Situasi dan kondisi keamanan di perairan Indonesia secara umum masih menunjukkan perkembangan yang dinamis dengan masih adanya potensi ancaman instabilitas kawasan. Fenomena yang ada memperlihatkan kecenderungan masih terjadinya kegiatan ilegal di laut berupa kejahatan lintas negara maupun meningkatnya eskalasi konflik di LCS, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap Indonesia. Eskalasi ketegangan dan konflik antar negara dan perilaku *claimants* yang agresif terkait LCS, terutama Cina serta aksi-aksi kejahatan lintas negara di laut sangat rawan memicu instabilitas wilayah di Indonesia. Secara realistis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya wilayah perairan Indonesia dan prospek ancamannya, serta upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia membutuhkan kehadiran negara dengan kemampuan yang tinggi dalam mengelolanya, disamping kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk menciptakan stabilitas jangka panjang agar Indonesia dapat meraih manfaat kemakmuran yang optimal dari

posisi geopolitik dan geostrategis yang baik. Khusus untuk permasalahan konflik di LCS, gejala yang berkembang di wilayah tersebut menuntut Indonesia menerapkan strategi pertahanan maritim yang tepat untuk mengantisipasi konflik berskala besar yang mungkin terjadi. Indonesia dapat memperkuat kapabilitas kekuatan pertahanan maritimnya dengan memperkuat komando laut, menguasai dan mengontrol jalur komunikasi maritim serta melakukan pengamatan akan kapabilitas militer pihak-pihak yang terlibat. Dalam pertahanan menangkal serangan hibrida di LCS, strategi perang semesta yang melibatkan seluruh komponen sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan instansi lain yang terkait merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, walaupun strategi maritim yang dibuat tersebut hanya akan memberikan daya tangkal dan pertahanan yang bersifat sementara tergantung tingkat konflik yang berkembang.

## 5. REFERENSI

- Ahyar, A. (2019). Parade Dongfeng 41, Senjata Nuklir China Paling Ditakuti AS", 6 Oktober 2019, dalam <https://akuratnews.com/parade-dongfeng-41-senjanuklir-china-paling-ditakuti-as/>, diakses pada 12 Januari 2021.
- Caverley, J. D. (2007). United States Hegemony and the New Economics of Defense. *Journal of Security Studies*, Vol. 16.
- Clausewitz, C. Von. (1989). *The Strategic Collection: The Art of War, On War, The Prince*. Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret. New Jersey: Princeton University Press.
- Corbett, J. S. (2015). *Some Principles of Maritime Strategy*. USA: Middletown.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahuri, R. (2014). "Roadmap Pembangunan Kelautan untuk Mengembangkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Indonesia yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat." dalam Tim Ahli Seknas Jokowi, *Jalan Kemandirian Bangsa*. Jakarta: Kompas, Gramedia.
- Hannah, B. (2018). China's Sea Control Is a Done Deal, 'Short of War With the U.S', 20 September 2018, dalam <https://www.nytimes.com/2018/09/20/world/asia/south-china-sea-navy.html>, diakses pada 11 Januari 2021.
- Hasan, R. A. (2018). Menhan AS: Kami Siap Bantu RI di Laut China Selatan dan Natuna, 23 Januari 2018, dalam <https://www.liputan6.com/global/read/3235768/menhan-as-kami-siap-bantu-ri-di-laut-china-selatan-dan-natuna>, diakses pada 12 Januari 2021.
- Ian, W., & Masao, D. (2019). More Than Missiles: China Prepares its New Way of War. Washington: CSIS Briefs.
- Joshi, M. (2016). Vietnam will never be for India what Pakistan is to China, 5 September 2016, dalam <https://www.orfonline.org/research/vietnam-will-never-be-for-india-what-pakistan-is-to-china/>.
- Kemhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kemhan. (2012). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*. Kementerian Pertahanan RI.
- Krahmann, E. (2005). *New Threats And New Actors in International Security (Issue October)*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mahan, A. T. (1889). *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*. Boston: Little Brown and Company.
- McCuen, J. J. (2008). *Hybrid Wars*. *Military Review*, Vol. 88.
- Meidi. (2014). *Conflicts in the South China Sea and China-ASEAN Economic Interdependence: A Challenge to Cooperation*, ASEAN-Canada Working Paper Series no. 7.
- Mogato. (2017). *Philippines, Russia Sign Two Military Deals*, 25 Oktober 2017, dalam <https://de.reuters.com/article/us-philippines-russia-defence/philippines-russia-sign-two-military-deals>, diakses pada 12 Januari 2020.
- Octavian, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0 Paksa Militer Beradaptasi Ke Artificial Intelligence*, diakses dari <http://samudranesia.id/revolusi-industri-4-0-paksa-militer-beradaptasi-ke-artificial-intelligence/>, pada 12 Januari 2021.
- Patrick, J. C., & Erik, R. K. (2017). *Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare*.
- Polling, G. B. (2013). "Dynamics Equilibrium: Indonesia's Blue Print for a 21st Century Asia Pacific". Washington DC: CSIS.
- Revere, E. J. R. (2005). *U.S. Interests and Strategic Goals in East Asia and the Pacific*, 2 Maret 2005, dalam <https://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/rm/2005/42900.htm>, diakses pada 12 Januari 2021.
- Ritzer, G. (2006). *The Globalization of Nothing, Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi*.
- Rosenberg, J. (2005). *Globalization Theory: A Post Mortem*. *International Politics*, Vol. 42.
- Setkab. (2014). *Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014*, dalam <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar>, pada 12 Januari 2021.
- Setneg. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara*

- Nasional Indonesia Pasal 9. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Srenal. (2015). Langkah-Langkah Strategis TNI AL Dalam Mendukung PMD.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Till, G. (2005). Sea Power - A Guide for the Twenty First Century. London: Frank Cass.
- Till, G. (2009). Seapower - A Guide for the Twenty-First Century Second Edition. London: Frank Cass Publishers.
- Till, G. (2013). The Historic Attributes of The Sea And Maritime Developments in The Asia-Pacific. In J. Ho & S. Bateman (Eds.), Maritime Challenges and Priorities in Asia: Implications for Regional Security. New York: Routledge.
- UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (1982).
- US DOD. (2012). Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense.
- Warsito, T. (2014). "Geostrategi Maritim Indonesia dalam Perspektif Diplomasi," dalam, Jalan Kemandirian Bangsa. Jakarta: Gramedia.

# MEMBANGUN AKUNTABILITAS INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

Oleh:

**Mohamad Ikhsan Nurulloh<sup>1)</sup>, Luhut Simbolon<sup>2)</sup> George Royke Deksino<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan,  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>email: ikhsannur1996@gmail.com

<sup>2</sup>email: lsimbolon427@gmail.com

<sup>3</sup>email: george.royke@idu.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan cara mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia. Kekuatan pertahanan sebuah negara akan menjadi lebih unggul jika didukung oleh kemampuan industri pertahanannya dalam melakukan pengadaan untuk pemenuhan berbagai peralatan pendukung pertahanan. Akuntabilitas menjadi unsur utama dalam mewujudkan pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan negara yang baik. Permasalahan dalam akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia adalah terkait penyelewengan dana negara untuk pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan negara. Korupsi pada sektor industri pertahanan berdampak pada melemahnya sistem pertahanan negara. Adanya korupsi dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan diakibatkan karena terbukanya celah besar untuk melakukan korupsi serta lemahnya pengawasan. Usaha mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan memerlukan seperangkat kebijakan, penerapan instrumen berupa sistem pencegahan korupsi, penanaman nilai-nilai anti korupsi, reformasi organisasi serta penguatan peran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan sinergi antara pemegang kepentingan dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Industri Pertahanan; Korupsi.

## 1. PENDAHULUAN

Industri pertahanan menjadi faktor utama dalam mendukung kekuatan pertahanan suatu negara, khususnya pada era globalisasi dan perkembangan teknologi modern. Kekuatan pertahanan sebuah negara akan menjadi lebih unggul jika disokong oleh kemampuan industri pertahanannya dalam memenuhi berbagai peralatan pendukung pertahanan. Kemampuan menyediakan pasokan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) secara terus menerus menjadi syarat utama bagi kepastian dan keleluasaan dalam merancang strategi pertahanan pada jangka waktu yang panjang, tanpa kekhawatiran akan adanya faktor-faktor ekonomi dan politik seperti pembatasan atau embargo (Setiadji, 2020).

Industri pertahanan merupakan industri strategis yang didominasi oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Konsumen utama dari sektor industri pertahanan adalah pemerintah yang bersifat monopoli, yaitu negara (TNI atau negara lainnya yang membeli dengan izin negara). Anggaran yang cukup besar memungkinkan potensi terjadinya kecurangan yang cukup besar. Apabila hal ini tidak diorganisir dan diawasi dengan baik tentunya akan memunculkan berbagai tindakan korupsi dalam pengadaan peralatan pertahanan yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan alat utama sistem pertahanan negara serta memperlemah sistem pertahanan Indonesia.

Akuntabilitas menjadi unsur utama dalam mewujudkan pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan negara yang baik, transparan dan bebas dari kecurangan. Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa setiap aktor dan aktivitas pengadaan alutsista, baik dalam bentuk kebijakan, peraturan dan pembelanjaan keuangan negara harus terukur serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi upaya untuk mengurangi terjadinya tindakan curang dan korupsi pada penyelenggara industri pertahanan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai akuntabilitas sektor industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan alutsista untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui studi literatur dan telaah data sekunder untuk mendapatkan data serta informasi mengenai akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan pengumpulan berbagai sumber informasi yang menjadi data penelitian baik melalui laporan, publikasi, buku, maupun sumber lainnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis kondisi, permasalahan dan cara mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep Akuntabilitas Industri Pertahanan

Industri pertahanan menurut Banlaoi (2009) merupakan industri yang terlibat dalam produksi senjata, peralatan, perangkat dan mesin militer, beserta bahan baku untuk memproduksi produk militer. Sedangkan Kuah & Loo (2004) mendefinisikan industri pertahanan sebagai industri yang mampu untuk menyediakan manufaktur, produksi, teknologi, penelitian, pengembangan dan sumber daya untuk menghasilkan peralatan pertahanan.

Korupsi dijelaskan oleh Robert Klitgaard merupakan sebuah tindakan penyelewengan yang muncul akibat adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak diikuti dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang baik (Klitgaard, 1998). Korupsi kemungkinan besar akan terjadi ketika seseorang atau pihak tertentu memiliki hak monopoli atas urusan tertentu yang didukung oleh kebebasan dalam mempergunakan kekuasaannya hingga berpotensi untuk menyalahgunakan wewenangnya, namun lemah dalam pertanggungjawaban kepada publik (Hamzah, 2012). Sedangkan akuntabilitas merupakan sebuah konsep pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik dalam penggunaan dana publik dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis, serta tidak ada kebocoran dan pemborosan dana, serta bebas dari praktik korupsi. Prinsip akuntabilitas bertujuan untuk menghindari dana publik disalahgunakan (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas industri pertahanan bermakna bahwa setiap pelaku dan tindakan aktor dalam sektor industri pertahanan dalam mengatur dan membelanjakan keuangan negara untuk kegiatan pengadaan sistem pertahanan dan keamanan harus dilakukan secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### Permasalahan Akuntabilitas Industri Pertahanan

Pemenuhan kebutuhan peralatan pertahanan negara dan pengembangan industri pertahanan membutuhkan pendanaan yang besar demi mewujudkan sistem pertahanan yang kuat serta memadai untuk membangun target MEF pada tahun 2029. Tujuan dari penguatan industri pertahanan adalah untuk memberikan efek gentar dan sebagai usaha dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Industri pertahanan yang kuat dapat dicapai oleh pemerintah melalui penganggaran dana untuk keperluan pertahanan dengan sebagian besarnya digunakan untuk pengadaan alutsista.

Pengadaan alat utama sistem pertahanan negara sering kali dilakukan tanpa keterbukaan sehingga susah untuk diawasi. Hal ini tentunya membuka terjadinya kebocoran dan kecurangan dalam penggunaan anggaran pertahanan. *Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency* (DCI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* telah melakukan penilaian tingkat komitmen publik terhadap

antikorupsi dan transparansi pada perusahaan 134 perusahaan industri pertahanan terbesar di dunia pada tahun 2020. Indonesia masuk ke dalam penilaian tersebut dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) masuk ke dalam perusahaan dengan predikat F, yaitu perusahaan dengan komitmen anti korupsi sangat rendah (*Defence Companies Index*, 2020). Terdapat sepuluh area risiko korupsi yang menjadi basis penilaian, yaitu kontrol internal, budaya organisasi dan kepemimpinan, dukungan ke pegawai, konflik kepentingan, manajemen rantai pasokan, keterlibatan pelanggan (pemerintah), agen, pasar berisiko tinggi, perantara dan *jointventures*, badan usaha milik negara dan mekanisme *offset*. Hal tersebut juga diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada tahun 2020 yang menyatakan indeks persepsi korupsi di Indonesia berada pada 102 dari 180 negara dengan nilai 37 (*Transparency Internasional Indonesia*, 2020). Nilai tersebut membuat Indonesia masih di bawah beberapa negara ASEAN yaitu Singapura peringkat 3 dengan skor 85, Malaysia dengan peringkat 57 dengan skor 51 dan Brunei dengan peringkat 35 dengan skor 60. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan di Indonesia memiliki komitmen akuntabilitas yang rendah serta rawan terjadi tindakan korupsi.

Pertahanan termasuk sektor yang rawan untuk terjadi korupsi di dalamnya, khususnya dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan. Terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan besarnya peluang korupsi di sektor pertahanan antara lain; a) tertutupnya ruang KPK sebagai lembaga independen dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan aparat TNI; b) adanya keterlibatan pihak ketiga saat pengadaan dan pembelian alutsista; c) pembelian alutsista bekas membuka kesempatan terjadinya korupsi karena sukar untuk diawasi; d) dalih 'rahasia negara' mempersulit pemberantasan korupsi; e) kurangnya pengawasan internal serta eksternal pada proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista (Ady, 2017).

Berdasarkan data perkara tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi, selama tahun 2017-2020 terdapat sembilan kasus korupsi pada sektor pertahanan dan keamanan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Berdasarkan data tersebut penyuaipan menjadi jenis tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi. Penyuaipan merupakan bagian dari tidak perilaku korupsi yang berdampak serius pada bidang ekonomi, sosial, politik dan moral. Adanya penyalahgunaan dana menyebabkan ketidakpastian transaksi, mengurangi mutu produk dan jasa, meningkatkan biaya barang dan jasa (Suprpto & Lukiawan, 2017).

Penyalahgunaan anggaran pada sektor industri pertahanan berdampak negatif pada sistem pertahanan di Indonesia. Korupsi menyebabkan lemahnya sumber daya manusia dan alutsista,

anggaran yang seharusnya digunakan untuk pertahanan dan keamanan Indonesia hilang sia-sia. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan kekuatan pertahanan sehingga akan melemahkan garis batas pertahanan negara. Dampak lainnya adalah penyusutan efektivitas operasi militer, kualitas peralatan yang lebih rendah mengakibatkan risiko yang lebih besar pada tentara dan berpotensi meningkatkan jumlah korban saat mempertahankan negara. Sisi lain dari korupsi di sektor pertahanan adalah penurunan moral dan rasa percaya masyarakat kepada lembaga pertahanan. Tindakan korupsi juga memberikan ancaman keamanan secara langsung karena dapat disalahgunakan oleh teroris dan kejahatan terorganisir untuk mendapatkan bahan berbahaya, pengetahuan, informasi, sistem dan teknologi senjata. Tindakan korupsi pada akan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi ekonomi, birokrasi pemerintah, politik, sosial, kemiskinan, penegakan hukum dan kerusakan lingkungan (Tagarev, 2010).

Penyuapan merupakan tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena perbuatan kejahatan korupsi berdampak pada kehidupan rakyat yang hak ekonomi sosialnya dirampas oleh pelaku korupsi, maka tindakan korupsi harus diberantas secara luar biasa (Irfani, 2017). Korupsi didorong oleh adanya kekuasaan yang membangun adanya monopoli yang disalahgunakan untuk mendukung tujuan seseorang atau kelompok tertentu. Kondisi ini menyebabkan banyaknya praktik korupsi karena adanya peluang penyalahgunaan monopoli kebijakan dan kekuasaan yang diikuti dengan akuntabilitas yang lemah.

Berdasarkan perspektif ancaman buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015 korupsi merupakan salah satu bentuk ancaman non militer dari dalam negara yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Sedangkan korupsi dalam konteks peperangan diibaratkan sebagai medan yang jauh berbeda dengan terminologi perang pada umumnya. Peperangan jenis ini merupakan perang yang tidak menggunakan tentara, tanpa wilayah dan tanpa senjata. Korupsi merupakan peperangan yang menyerang tanpa menggunakan sistem senjata, namun menyerang hati nurani manusia melalui jerat materialisme. Kesusahan perang melawan korupsi adalah bahwa yang dilawan merupakan rakyat sendiri. Korupsi merupakan perwujudan perang *proxy* karena memberikan dampak menyeluruh pada kehidupan suatu negara. Tindakan korupsi menjadi bagian dari ancaman non-konvensional utama yang sedang hadapi oleh negara Indonesia (Indrawan & Widiyanto, 2017).

#### **Mewujudkan Akuntabilitas Industri Pertahanan**

Mewujudkan industri pertahanan yang berlandaskan prinsip akuntabilitas merupakan hal utama dalam pembangunan industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing. Secara umum pemerintah

telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberantas korupsi dan meningkatkan akuntabilitas di sektor industri pertahanan. Melalui Peraturan Menteri BUMN No. Per-21/MBU/2012, bahwa dalam usaha untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada badan usaha milik negara, maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan keuangan lebih ditingkatkan lagi dan berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan BUMN harus dilandaskan dengan prinsip-prinsip: dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya, transparansi, terbuka, jujur, proporsional, komprehensif dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan ini telah mengatur bagaimana penyelenggaraan BUMN dan pengelolaan keuangan yang ada termasuk perusahaan industri pertahanan milik negara.

Upaya berikutnya untuk mewujudkan akuntabilitas pada sektor industri pertahanan adalah melalui Panitia Pengadaan dan Penyedia Alutsista Bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam pelaksanaan pengadaan alutsista selalu membuat Pakta Integritas (*Integrity Pact*), yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut didasari pada Permen Pertahanan RI No. 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Lebih lanjut lagi Kementerian Pertahanan turut mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang, bersih, berdaya guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemegang kepentingan khususnya Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia harus mampu mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pedoman untuk menerapkan dan melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama dalam aspek industri pertahanan. Meskipun pakta integritas dan kebijakan telah dibuat namun dalam pelaksanaannya masih saja terjadi tindakan korupsi dan kecurangan lainnya dalam pengadaan alutsista. Jika praktik korupsi pada industri pertahanan dapat ditiadakan maka akan terbentuk tata integritas pada sektor industri pertahanan. Hal tersebut akan membuat kontribusi perusahaan industri pertahanan lebih tinggi dalam memproduksi atau melakukan pengadaan alutsista sehingga kemandirian industri pertahanan dan *Minimum Essential Force* akan terwujud.

Kondisi korupsi di Indonesia telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sehingga dikeluarkanlah Instruksi Presiden RI Nomor 10

Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Salah satu bentuk kebijakan yang diputuskan adalah dengan pemberian tugas kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menginisiasi usaha sertifikasi anti korupsi di Indonesia. Pada akhir tahun 2015 BSN telah berhasil menyelesaikan sebuah standar internasional yang menyerupai *International Organization for Standardization* (ISO) 37001 untuk mencegah serta mengurangi korupsi pada sektor swasta dan pemerintah (Suprpto & Lukiawan, 2017). Sistem tersebut dikenal sebagai SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Munculnya instrumen tersebut dilatarbelakangi bahwa penegakan hukum tidak cukup untuk mengatasi permasalahan terkait dengan korupsi. Organisasi juga mempunyai tanggung jawab aktif untuk berkontribusi melawan tindakan korupsi dan penyuapan. Melalui komitmen pemimpin untuk menerapkan budaya transparansi, kejujuran, kepatuhan dan keterbukaan. Maka hal ini dapat dicapai melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Badan Standardisasi Nasional, 2016). Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan akan mencegah terjadinya kasus suap suatu organisasi yang melibatkan perorangan atau terorganisir (Suprpto & Lukiawan, 2017).

Industri pertahanan baik BUMN dan BUMS dapat mengadopsi, mengadaptasi dan menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai penyiapan instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses implementasi pencegahan korupsi di BUMN Industri pertahanan telah diawasi dan dinilai secara rutin oleh Kementerian BUMN sesuai surat edaran Menteri BUMN No. SE-2/MBU/07 Tahun 2019. Sedangkan untuk BUMS Industri pertahanan belum ada peraturan khusus yang dapat dijadikan landasan dalam pemantauan dan evaluasi. Sistem Manajemen Anti Penyuapan menyoroti untuk organisasi yang menerapkan sistem tersebut juga harus melakukan kerja sama ataupun transaksi dengan organisasi yang telah mengimplantasikannya sehingga dapat digunakan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi tindakan penyuapan serta korupsi. Sistem Manajemen Anti Penyuapan disusun sebagai pemberi arah bagi organisasi untuk menerapkan, menetapkan, meningkatkan dan memelihara program anti penyuapan secara luwes yang dapat diaplikasikan oleh setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta (Wijaya, Fasa, & Sani, 2016). Sehingga penerapan sistem ini akan memperkuat pengawasan internal dan eksternal pada proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista yang mengikat sektor pemerintah serta swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan industri pertahanan di Indonesia.

Instrumen *Whistleblowing* juga dapat diterapkan di sektor pertahanan yang rawan untuk terjadinya penyalahgunaan anggaran. *Whistleblowing* mengacu pada sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang pegawai untuk

mengadukan adanya indikasi kecurangan dalam organisasi yang dilakukan oleh atasan atau perusahaan kepada pihak lain (Elias, 2008). *Whistleblowing* sebagai sebuah sistem pencegahan korupsi dapat dilakukan dari dalam dan luar organisasi. Bentuk dari *whistleblowing* di dalam organisasi menitik beratkan pada pelaporan dugaan kegiatan ilegal oleh sesama pihak di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kekuasaan dan keputusan (Darjoko & Nahartyo, 2017). Sedangkan *whistleblowing* luar organisasi adalah tindakan pelaporan yang dilakukan anggota organisasi ke pihak yang berada di luar organisasi baik individu, organisasi dan penegak hukum yang diindikasikan melakukan kecurangan (Elias, 2008). *Whistleblowing* erat kaitannya dengan individu yang melaporkan indikasi adanya korupsi di organisasi tempatnya bekerja. Keberadaan *whistleblowing* menjadi hal yang penting dalam mengungkapkan skandal keuangan dan kecurangan.

*Whistleblower* sebagai aktor utama dalam pengungkapan upaya penyelewengan di sektor industri pertahanan harus didukung oleh pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait. Pemerintah harus memfasilitasi sistem *whistleblowing* yang memadai untuk BUMN dan BUMS industri pertahanan serta aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengadaan alat sistem pertahanan negara. Selain akan menjadi sarana pelaporan adanya sistem yang baik juga akan memberikan perlindungan bagi *whistleblower*. Sistem *whistleblowing* yang baik akan mencegah dan mengurangi dorongan untuk melakukan penyelewengan etika yang sekaligus akan mendorong *whistleblower* dalam melaporkan penyelewengan tanpa keraguan dan rasa takut (Satyasmoko & Sawarjuwono, 2020).

Aspek selanjutnya dalam mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan adalah dengan penerapan pertahanan semesta. Strategi pertahanan semesta mengisyaratkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu bentuk pertahanan negara (Mudita, 2016). Pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor industri pertahanan memerlukan dukungan dari seluruh aktor serta partisipasi yang aktif baik dari pelaku dan juga dari masyarakat. Penanaman nilai-nilai sejak dini harus dilakukan melalui pendidikan anti-korupsi, cinta tanah air dan takut melakukan korupsi harus dipahami serta dihayati dengan baik kepada seluruh pemegang kepentingan berserta pelaku di sektor industri pertahanan sehingga akan mencapai akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia. Contoh dari penanaman nilai-nilai ini adalah dari Kementerian BUMN yang saat ini telah menetapkan AKHLAK sebagai *core value* yang dijadikan sebagai panduan dalam bekerja secara benar demi kepentingan bangsa dan negara, adapun AKHLAK merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Safaruddin, Indah, & Franca, 2021). *Core value*

dimaknai sebagai nilai inti yang menjiwai sebuah organisasi, sehingga *core value* dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas di dalam organisasi (Meutia & Husada, 2019). Penyelenggaraan industri pertahanan memerlukan *core value* yang mampu digunakan untuk mencapai akuntabilitas, kemandirian dan teknologi sektor industri pertahanan. Pemerintah harus membuat dan internalisasi *core value* dalam sektor pertahanan yang dilaksanakan melalui pelatihan dilingkungan internal kementerian/lembaga pemerintah, internal perusahaan BUMN dan BUMS serta seluruh pelaku industri pertahanan sehingga dapat menerapkan nilai-nilai yang akan mencegah tindakan kecurangan dalam aktivitas sehari-hari.

Strategi lain untuk membebaskan sektor industri pertahanan dari kemungkinan terjadinya korupsi dan penyuapan adalah dengan melakukan perbaikan pada organisasi. Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan yang mendirikan lembaga khusus untuk pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan negara melalui lembaga *Defense Acquisition Program Administration* (DAPA). Sistem akuisisi serta reformasi organisasi industri pertahanan di Korea selatan telah membawanya ke kegiatan akuisisi pertahanan yang transparan, terhindar dari korupsi dan penguasaan teknologi pertahanan yang tinggi (Yogaswara, 2017). Organisasi yang baik dan kuat akan mencegah terjadinya kecurangan serta mampu memberikan dorongan untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat penting dalam mewujudkan industri pertahanan yang berlandaskan akuntabilitas. Porsi kerja KPK dalam pengawasan terkait penggunaan anggaran pertahanan untuk pengadaan peralatan pertahanan saat ini masih terbatas. Dalih 'rahasia negara' mempersulit pemberantasan korupsi karena menjadikan pembelian alutsista sukar untuk diawasi. Perlu adanya perbaikan kebijakan untuk akan menambah peran dan ruang gerak bagi KPK dalam mengawasi proses pengadaan alutsista. Wewenang KPK telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sedangkan dalam pengadaan alutsista menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Kedua peraturan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai porsi KPK dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pengadaan peralatan pertahanan. Sinkronisasi dan sinergi kedua regulasi tersebut menjadi penting untuk mencegah adanya tabrakan serta saling tumpang tindih di Kementerian Pertahanan, TNI dan KPK.

#### 4. KESIMPULAN

Usaha mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan memerlukan seperangkat kebijakan,

penerapan instrumen berupa sistem pencegahan korupsi, penanaman nilai-nilai anti korupsi, reformasi organisasi serta penguatan peran KPK dan sinergi antara pemegang kepentingan dalam pengadaan peralatan sistem pertahanan dan keamanan negara.

#### 5. REFERENSI

- Ady. (2017). Kondisi Penyebab Pengadaan Alutsista Rawan Korupsi. Retrieved April 22, 2021, from Hukumonline website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e49a5793bb3/5-kondisi-penyebab-pengadaan-alutsista-rawan-korupsi/>
- Badan Standarisasi Nasional. (2016). *Sistem Manajemen Anti-penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan (ISO 37001:2016, IDT)*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Banlaoi, R. C. (2009). *Globalization's Impact on Defence Industry in Southeast Asia*. In *Contemporary Security Studies*. New York: Routledge.
- Darjoko, F. J., & Nahartyo, E. (2017). Efek Tipe Kecurangan dan Anonimitas Terhadap Keputusan Investigasi Auditor Internal atas Tuduhan Whistleblowing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 202–221. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.11>
- Defence Companies Index. (2020). *Final Assesment PT Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace)*. United Kingdom: Transparency International Defence & Security.
- Elias, R. (2008). Auditing Students' Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing. *Managerial Auditing Journal*, 23(3), 283–294. <https://doi.org/10.1108/02686900810857721>
- Hamzah, F. (2012). *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*. Jakarta: Faham Indonesia.
- Indrawan, R. M. J., & Widiyanto, B. (2017). Korupsi Sebagai Bagian dari Perang Proxy: Upaya Untuk Memberantas Bahaya Korupsi. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(1), 21–38.
- Irfani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *NASPA Journal*, 9(3), 319–336.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. *Finance and Development*, 35(1), 3–6.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Retrieved April 22, 2021, from <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/penyidikan>
- Kuah, A., & Loo, B. (2004). *Examining the Defence Industrialization – Economic Growth*

- Relationship:the Case of Singapore*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies Singapore.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meutia, K. I., & Husada, C. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 4(1), 119–126.
- Mudita, I. W. (2016). Strategi Pertahanan Semesta Dalam Rangka Mengembalikan Masa Keemasan Indonesia. *Defendonesia*, 2(1), 1–5.
- Safaruddin, Indah, B. P., & Franca, M. L. (2021). Pengaruh Pelatihan Internalisasi “ Core Value AKHLAK BUMN ” Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PT . Semen Baturaja ( Persero ) Tbk . *Kotama*, 1(3), 1–9.
- Satyasmoko, A., & Sawarjuwono, T. (2020). Sistem Whistleblowing dalam Penanganan Kasus Penyelewengan Etika. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 1–18.
- Setiadji, A. (2020). Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam. In *Universitas Pertahanan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Suprpto, & Lukiawan, R. (2017). Kelembagaan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi SNI ISO 37001 Terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan. *Jurnal Standarisasi*, 19(2), 145–154.
- Tagarev, T. (2010). *Building Integrity and Reducing Corruption in Defence*. Geneva: Procon Ltd.
- Transparency Internasional Indonesia. (2020). *Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi dan Covid-19 Memperburuk Kemunduran Demokrasi*. Jakarta. Retrieved from <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CPI2020INDOTII-web.pdf>
- Wijaya, A., Fasa, H., & Sani, S. Y. (2016). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001 : 2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187–208. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>
- Yogaswara, Y. H. (2017). Strategi Percepatan Penguasaan Teknologi dan Industri Pertahanan: Studi Korea Selatan. *Defendonesia*, 3(1), 1–9.

# OPTIMALISASI PRODUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN (BANGTEKINDHAN) GUNA MENINGKATKAN KESIAPAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN (ALPALHAN) DALAM RANGKA Mendukung TUGAS POKOK TNI

Oleh:

Andi Sugiarto<sup>1)</sup>, George Royke Deksin<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>andisugiarto94@gmail.com,

<sup>2</sup>george.royke@idu.ac.id

## Abstrak

UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Industri Pertahanan salah satu tujuannya adalah mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhan). Salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesiapan Alpalhan TNI. Kondisi saat ini produk Bangtekindhan dari tahun 2016 s.d. tahun 2021 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) *First Article* (FA), dimana baru 2 (dua) FA yang diproduksi masal dan sisanya 31 (tiga puluh satu) belum diproduksi masal. Hal ini terkendala akibat adanya gap teknologi, varian produk dan kemampuan Industri Pertahanan dalam memproduksi produk Bangtekindhan. Dari kendala tersebut terdapat pokok-pokok persoalan yaitu kepercayaan menggunakan produk Bangtekindhan masih kurang, sumber daya manusia pelaksana program Bangtekindhan secara kuantitas dan kualitas masih terbatas, fasilitas dan sarpras Industri Pertahanan masih terbatas. Hal tersebut mengakibatkan belum optimalnya produk Bangtekindhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode Analisa dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada dan upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk mengoptimalkan produk pengembangan teknologi Industri Pertahanan yang dilakukan oleh Menhan, Pimpinan *Stakeholder* dan Direktur Utama Industri Pertahanan, guna mewujudkan optimalnya produk pengembangan teknologi Industri Pertahanan guna meningkatkan kesiapan ALPALHAN dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Bangtekindhan, Alpalhan

## 1. PENDAHULUAN.

Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama (Komput) yang diperkuat oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk). Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam system pertahanan negara memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dikaitkan dengan pertahanan Negara maka pencapaian tugas pokok TNI menjadi

sangat penting dalam rangka menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan tugas pokok tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan operasional Alutsista TNI manakala didukung oleh kemampuan dan kemandirian Industri Pertahanan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata (Alutsista). Pada saat ini pemenuhan

kebutuhan Alutsista dapat dikatakan hampir seluruhnya masih tergantung dari luar negeri, hal ini disebabkan karena adanya kemampuan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan Persyaratan Operasional (Opsreq) dan Spesifikasi Teknis (*Spektek*) TNI, perlu dikembangkan teknologi produk-produk Industri Pertahanan secara mandiri melalui penyiapan produk Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) berupa *First Article* (FA) atau produk siap pakai yang merupakan kelanjutan dari prototipe terpilih hasil Litbang.

UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan telah mengamanatkan tentang penyelenggaraan Industri Pertahanan salah satu tujuannya adalah mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dengan fungsi untuk mengembangkan teknologi Industri Pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan dan kepentingan masyarakat. Salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui program Bangtekindhan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesiapan Alutsista TNI. Sasaran Program Bangtekindhan adalah membangun kemampuan Industri Pertahanan melalui penguasaan teknologi canggih dibidang

Alpalhankam guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara; mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dalam memproduksi Alpalhankam sesuai dengan Opsreq dan Spektek dari pengguna; dan sebagai bentuk insentif bagi Industri Pertahanan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi.4 Kondisi saat ini produk Bangtekindhan dari tahun 2016 s.d. 2021 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) *First Article*, dimana masih ada 4 (empat) produk yang belum tersertifikasi, 1 (satu) produk yang berlanjut diproduksi massal dan 5 (lima) produk yang digunakan oleh TNI. Hal ini terkendala akibat adanya gap teknologi, varian produk dan kemampuan Industri Pertahanan dalam memproduksi produk Bangtekindhan. Dari kendala tersebut terdapat pokok-pokok persoalan yaitu kepercayaan dalam menggunakan produk Bangtekindhan masih kurang, sumber daya manusia pelaksana program Bangtekindhan secara kuantitas dan kualitas masih terbatas, fasilitas dan sarpras Industri Pertahanan masih terbatas,

dan regulasi belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan belum optimalnya produk Bangtekindhan yang berdampak pada belum tercapainya tujuan dan sasaran program Bangtekindhan sehingga berdampak pada kesiapan Alutsista TNI. Berdasarkan uraian di atas, Produk Bangtekindhan dapat optimal apabila adanya kepercayaan pengguna dalam menggunakan produk Bangtekindhan, kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pelaksana Program Bangtekindhan terpenuhi, Industri Pertahanan memiliki fasilitas dan sarpras yang memadai, dan regulasi dalam penetapan dan penentuan produk Bangtekindhan sesuai standar yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya sebagai

pokok-pokok pemecahan persoalan untuk mengatasi penyebab timbulnya masalah tersebut, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan dalam menggunakan produk pengembangan teknologi Industri Pertahanan, memenuhi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, melengkapi fasilitas dan sarpras Industri Pertahanan dan melengkapi regulasi yang dibutuhkan sesuai dengan standar, dengan metode rekrutmen, diklat, pengadaan, pembinaan, kerjasama, koordinasi, sosialisasi, revisi dan evaluasi

## 2. METODE PENELITIAN.

Metode yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah metode deskriptif analisis yaitu berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari beberapa literatur, pengumpulan data dan pengalaman selama melaksanakan dinas di Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan (Dittekindhan) Ditjen Pothan Kemhan.

Pendekatan. Pendekatan yang dilaksanakan dalam penulisan naskah ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk melihat dan memahami produk pengembangan

teknologi Industri Pertahanan guna meningkatkan kesiapan Alutsista dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Kecenderungan memilih penelitian kualitatif ini menitikberatkan pada hal-hal yang terjadi pada kurun waktu tertentu dari hasil pengalaman penulis selama melaksanakan dinas di Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan dan berdasarkan studi kepustakaan serta referensi yang ada dalam rangka mendukung tujuan utama yang diharapkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### KONDISI PRODUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN SAAT INI DAN POKOK-POKOK PERSOALAN Kondisi pembuatan produk Bangtekindhan saat ini.

Produk Bangtekindhan sejak tahun 2016 s.d 2021 telah membuat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) produk dengan rincian berdasarkan usulan dari angkatan, terdapat 12 (dua belas) produk usulan TNI AD, 12 (dua belas) produk usulan TNI AL dan 9 (sembilan) produk usulan TNI AU. Produk Bangtekindhan tersebut saat ini hanya 1 (satu) *First Article* (FA) yang berlanjut untuk produksi massal serta 5 (lima) FA yang sudah diserahkan dan digunakan pengguna/TNI. Sisa produk Bangtekindhan yang tersertifikasi saat ini dititipkan di Industri Pertahanan pelaksana, dikarenakan pengguna merasa tidak membutuhkan produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses dalam membuat produk Bangtekindhan belum berjalan dengan optimal sesuai tahapan dari sejak proses perencanaan s.d pengakhiran program sebagaimana

yang tertuang dalam Permenhan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Bangtekindhan, teori Industri Pertahanan modern, dan teori proses pengembangan produk baru pada implementasi Program Bangtekindhan, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Proses Perencanaan Produk Bangtekindhan.

- Prototipe terpilih yang diusulkan pengguna belum selaras dengan Program Bangtekindhan. Adanya perbedaan fungsi dari produk Prototipe hasil Litbang disesuaikan dengan tugas masing-masing instansi antara Litbang Angkatan, Kemhan dan Industri Pertahanan dalam fungsi pemenuhan kebutuhan ALPALHAN guna pengembangan kekuatan.
- Produk Bangtekindhan Yang Diusulkan Belum Sesuai Prioritas. Produk Prototipe hasil Litbang Kemhan dan Industri Pertahanan lebih bersifat pengembangan ALPALHAN baru yang memiliki fungsi yang sama dengan produk ALPALHAN dari Luar Negeri, namun kebutuhannya masih belum menjadi prioritas Pengguna/TNI.
- Standar Penetapan dan Penentuan Prototipe Terpilih Belum Sesuai Program Bangtekindhan. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur standar baku dalam penetapan dan penentuan

prototipe terpilih yang dapat diarahkan menuju produksi massal.

## 2. Proses Pelaksanaan Pembuatan Produk Bangtekindhan.

- a. Adanya perbedaan kompetensi dan fasilitas produksi antara Industri Pertahanan skala besar dengan Industri Pertahanan skala kecil terkait sistem tata kelola untuk menghasilkan produk dengan standar manajemen mutu serta proses yang dijalankan.
- b. Pemilihan Industri Pertahanan pelaksana pembuatan Produk Bangtekindhan juga tidak terlepas dari kerjasama yang dibangun oleh lembaga Litbang baik di Angkatan maupun di tingkat Kemhan pada saat pembuatan prototipe Litbang.
- c. Verifikasi terhadap kompetensi dan fasilitas produksi Industri Pertahanan sebagai pelaksana Program Bangtekindhan belum terlaksana dengan baik.

## 3. Proses Pengawasan Pembuatan Produk Bangtekindhan.

- a. Kompetensi Tim Wasprod dalam menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pengawasan produksi masih sebatas kendali berdasarkan pencapaian bobot pekerjaan dihadapkan dengan jadwal progres yang harus dicapai dalam pembuatan Produk Bangtekindhan.
- b. Komposisi personel dari Tim Wasprod belum mewakili perwakilan dari calon pengguna yang memiliki kompetensi terkait produk.

## 4. Proses Akhir Produk Bangtekindhan.

- a. Belum tersosialisasikannya proses dan tahapan sertifikasi produk Bangtekindhan kepada Industri Pertahanan sebagai pelaksana program yang tentunya sangat berbeda dengan proses pelaksanaan pada saat pembuatan produk prototipe yang hanya mensyaratkan lulus uji statis dan dinamis, dimana produk dari kegiatan uji prototipe adalah sertifikat lulus uji.
- b. Dalam proses sertifikasi sering terkendala oleh aspek pengujian dinamis dikarenakan umumnya Industri Pertahanan tidak memiliki laboratorium uji fungsi.

### Pokok-Pokok Persoalan

#### 1. Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Bangtekindhan Masih Kurang.

Berdasarkan data dan fakta yang dijelaskan sebelumnya bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) produk Bangtekindhan yang siap di produksi massal untuk memenuhi kebutuhan ALPALHAN TNI, hanya 1 (satu) FA yang telah di produksi massal yaitu FA *Swamp Boat* dan 5 (lima) FA yang digunakan oleh pengguna untuk mendukung operasi dan latihan. Hal ini disebabkan ketidakpercayaan Pengguna/TNI terhadap produk Bangtekindhan ini dikarenakan lebih percaya terhadap produk ALPALHAN negara lain dan kualitas produk Bangtekindhan belum memenuhi standar yang diinginkan. Apabila hal ini tidak diatasi maka

akan berimplikasi terhadap peningkatan kesiapan ALPALHAN dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

#### 2. Sumber Daya Manusia pelaksana Program Bangtekindhan secara Kuantitas dan Kualitas Masih Terbatas.

Sumber Daya Manusia pelaksana program Bangtekindhan yang ada masih terbatas, dikarenakan minimnya kualitas dukungan program pengembangan SDM dan riset bidang inovasi teknologi pertahanan.

#### 3. Fasilitas dan Sarpras Industri Pertahanan Masih Terbatas.

Fasilitas dan Sarpras merupakan faktor pendukung untuk menghasilkan produk Bangtekindhan yang berkualitas dan sesuai standar.

#### 4. Regulasi Belum Memadai.

Setiap penyelenggaraan program perlu adanya dukungan regulasi yang harus disiapkan sebagai pedoman baik bagi penyelenggara, pelaksana dan penerima manfaat dari program yang bersifat mengikat sehingga indikator keberhasilan dan output program dapat terukur dengan jelas. Selama ini penyiapan regulasi yang ada belum mencakup tugas dan tanggung jawab dari Kemhan dan TNI, apabila hal ini tidak diatasi maka akan berimplikasi terhadap kesiapan ALPALHAN dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

### KONDISI PRODUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN YANG DIHARAPKAN

#### Kondisi Produk Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan yang Diharapkan.

Produk pengembangan teknologi Industri Pertahanan dikatakan optimal apabila kondisi yang diharapkan dari pokok-pokok persoalan seluruhnya terpenuhi dengan indikasi keberhasilan telah mengacu pada landasan teori tentang Teori Industri Pertahanan Modern dan Teori Proses Pengembangan Produk Baru. Kondisi yang diharapkan dari pokok-pokok persoalan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

#### 1 Meningkatkan Kepercayaan Menggunakan Produk Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan.

Sesuai dengan Teori Industri Pertahanan Modern, menurut Andi Widjanto (2012), dalam perkembangan Industri Pertahanan di negara-negara Asia Timur menunjukkan terdapat tiga model utama Industri pertahanan yaitu kemandirian (*autarky model*), produksi ceruk (*nicheproduction model*), dan model rantai logistik global (*global supply chain model*).

#### 2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Program Bangtekindhan Terpenuhi.

Sesuai dengan Teori Proses Pengembangan Produk Baru, menurut hasil penelitian SAP Business One bahwa terdapat 8 (delapan) tahapan untuk pengembangan produk baru salah satunya adalah Penciptaan Ide (Idea Generation).

### 3. Fasilitas dan Sarpras Industri Pertahanan Memadai.

Sesuai dengan Teori Industri Pertahanan Modern, menurut Andi Widjajanto (2012) Produksi Ceruk (Niche-Production Model) diterapkan oleh negara yang berupaya untuk mengurangi ketergantungan ALPALHANNya terhadap produsen luar negeri dengan mengembangkan kapasitas nasional untuk menguasai teknologi militer utama.

### 4. Regulasi Semakin Lengkap dan Efektif.

Sesuai dengan Teori Industri Pertahanan Modern, menurut Andi Widjajanto (2012), model produksi ceruk (niche-production model) diterapkan untuk mengurangi ketergantungan ALPALHAN nya terhadap produsen luar negeri dengan mengembangkan kapasitas nasional untuk menguasai teknologi militer utama yang didukung oleh regulasi sebagai pedoman baik bagi penyelenggara, pelaksana dan penerima manfaat dari program yang bersifat mengikat sehingga indikator keberhasilan dan output program dapat terukur dengan jelas.

### INDIKASI KEBERHASILAN.

Indikasi berhasilnya dari Produk Bangtekindhan guna meningkatkan kesiapan ALPALHAN dalam rangka mendukung tugas pokok TNI dengan optimal adalah:

#### 1. Meningkatnya Kepercayaan Menggunakan Produk Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan.

Dengan meningkatnya kepercayaan pengguna dalam menggunakan Produk Bangtekindhan, maka meningkatnya Produk Bangtekindhan yang dihasilkan berlanjut dan masuk dalam ranah pengadaan atau masuk menjadi salah satu prioritas dalam shopping list TNI, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kesiapan ALPALHAN dan tugas pokok TNI.

#### 2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Program Bangtekindhan Terpenuhi.

Dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM pelaksana Program Bangtekindhan, maka tercapainya jumlah ideal tenaga-tenaga terampil bidang teknologi pertahanan, baik sebagai engineering, operator produksi maupun tenaga manajerial, dan SDM yang kapabel, profesional, inovatif, visioner, dan revolusiner dalam hal pengembangan teknologi Industri Pertahanan, sehingga akan berkontribusi terhadap kesiapan ALPALHAN dan tugas pokok TNI.

### 3. Fasilitas dan Sarpras Industri Pertahanan Memadai.

Fasilitas dan Sarpras merupakan salah satu kunci untuk menghasilkan produk Bangtekindhan yang berkualitas dan sesuai standar, maka salah satu indikasi keberhasilannya produk Bangtekindhan adalah apabila didukung oleh fasilitas dan Sarpras yang dimiliki Industri Pertahanan dengan optimal, sehingga yang pada akhirnya akan berkontribusi

terhadap kesiapan ALPALHAN dan tugas pokok TNI.

### 4. Regulasi Semakin Lengkap dan Efektif.

Semakin lengkap dan efektif regulasi yang ada sebagai pedoman baik bagi penyelenggara, pelaksana dan penerima manfaat dari program Bangtekindhan yang bersifat mengikat sehingga indikator keberhasilan dan output program dapat terukur dengan jelas, sehingga akan berkontribusi terhadap kesiapan ALPALHAN dan tugas pokok TNI.

## 4. PENUTUP

### Kesimpulan.

Berdasarkan uraian naskah tentang Optimalisasi Produk Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan Guna Meningkatkan Kesiapan ALPALHAN Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepercayaan menggunakan produk pengembangan teknologi Industri Pertahanan masih kurang. Hal ini disebabkan kualitas dari produk Bangtekindhan belum memenuhi standar yang diinginkan pengguna dalam hal ini TNI, karena belum melibatkan calon pengguna sejak penentuan Opsreq/Spektak dan sebagai Tim Pengawasan Produksi (Tim Wasprod) produk Bangtekindhan.
2. Sumber daya manusia pelaksana program Bangtekindhan yang ada masih terbatas, dikarenakan minimnya kualitas dukungan program pengembangan SDM dan riset bidang inovasi teknologi pertahanan.
3. Fasilitas dan Sarpras Industri Pertahanan masih terbatas. Hal ini disebabkan terbatasnya bahan baku dalam pembuatan produk Bangtekindhan dan terbatasnya fasilitas pengujian yang dimiliki oleh Industri Pertahanan.
4. Regulasi belum memadai, dikarenakan regulasi yang ada saat ini belum mengatur standar dalam penetapan dan penentuan prototipe terpilih yang akan diajukan dalam program Bangtekindhan dan belum ada kewajiban dari pengguna setelah produk Bangtekindhan tersertifikasi untuk digunakan.

### Saran

1. Presiden RI selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Menhan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan beserta jajarannya membuat kebijakan pemakaian ALPALHAN produk Industri Pertahanan sebagai prioritas dalam rencana kebutuhan TNI dan berkomitmen Produk Bangtekindhan yang dihasilkan berlanjut ke ranah pengadaan serta menjadi prioritas dalam shopping list TNI, sehingga tujuan Undang-undang No. 16 tentang Industri Pertahanan dan Permenhan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Bangtekindhan dapat tercapai.
2. Pemerintah dalam hal ini K/L terkait yaitu Menteri Pertahanan, Menteri PPN/Kabappenas, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian,

- Menteri BUMN, dan Menristek/Ka BRIN berperan sebagai katalis untuk mendorong pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan agar lebih maju, mandiri dan berdaya saing tinggi baik dari sisi SDM, fasilitas dan Sarpras serta regulasi.
3. Pengguna dalam hal ini Asrenum Panglima TNI, Asrena Angkatan, Aslog Angkatan dan Kadislitbang Angkatan perlu untuk melakukan perencanaan pengembangan hasil Litbang menjadi produk ALPALHAN yang komprehensif mulai dari pemilihan prototipe yang akan diusulkan dan sekaligus tindak lanjut rencana kebutuhan yang akan dijadikan dasar dalam produksi massal Produk Bangtekindhan termasuk memberikan dukungan dalam penyediaan ALPALHAN untuk kepentingan pengujian Produk Bangtekindhan.
  4. Direktur Utama Industri Pertahanan disarankan untuk mempersiapkan diri secara maksimal dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya secara internal dalam rangka produksi ALPALHAN mulai dari penyiapan SDM, fasilitas, Sarpras dan lini produksi untuk produk-produk militer serta penerapan standar militer yang tinggi (Military Specification) dalam kendali mutu sesuai yang dipersyaratkan dalam Opsreq/Spektek oleh Pengguna.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Permenhan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kelaikan Militer Untuk Mendukung Pertahanan Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- Andi Widjajanto, "Kemandirian Industri Pertahanan",  
[https://money.kompas.com/read/2012/04/26/02195530/kemandirian\\_industri.pertahanan](https://money.kompas.com/read/2012/04/26/02195530/kemandirian_industri.pertahanan).
- KKIP, Buku Kebijakan Strategis Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertahanan(2015–2045), Timlak KKIP, Jakarta, 2016.
- Andik Purwanto, Optimalisasi Penggunaan ALPALHAN Produk Dalam Negeri Guna Membangun Industri Pertahanan Nasional Dalam Rangka Mendukung Tugas TNI AU, Taskap Seskoau, Lembang, 2020.

## KEBIJAKAN DAN UPAYA MITIGASI MALAYSIA DALAM MENGATASI ANCAMAN DI LAUT CHINA SELATAN

Oleh:

**Sartono**

Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan  
p.sartono@gmail.com

### Abstrak

Perkembangan terkini di kawasan Indo Pasifik telah menunjukkan sejumlah tantangan dan ketidakpastian baru yang berdampak pada pertahanan nasional Malaysia. Sementara Malaysia dan kawasan secara umum mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, isu-isu terkini khususnya isu keamanan non-konvensional mulai membentuk dan mempengaruhi sifat ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian literatur untuk mengetahui bagaimana upaya Malaysia dalam mengurangi kemungkinan konfrontasi militer pada konflik wilayah di Laut China Selatan yang semakin memanas akibat upaya militerisasi China. Kajian ini menunjukkan bahwa Malaysia menyadari atribut dari paradigma ini, yaitu sebuah desakan untuk tidak memihak, adopsi bersamaan dari pertahanan terbuka dan pembangkangan secara tidak langsung, upaya aktif untuk memupuk posisi mundur. Malaysia melalui kebijakan lindung nilai terus berusaha memelihara hubungan persahabatan dengan semua negara dan mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional. Malaysia berpendapat Laut China Selatan harus menjadi *platform* kerjasama dan konektivitas, bukan area konfrontasi atau konflik, ini sejalan dengan semangat *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). ZOPFAN bertujuan untuk mengurangi berbagai risiko yang dipimpin oleh ketidakpastian komitmen AS, niat jangka panjang China, dan hubungan masa depan Malaysia dengan kedua negara tersebut.

**Kata Kunci:** Strategi Malaysia, Maritim, Laut China Selatan, Konflik, Mitigasi

### 1. PENDAHULUAN

Geografi Malaysia adalah relatif kecil dengan dua wilayah di Semenanjung Malaysia, dan Sabah dan Sarawak, wilayah di antara Samudra Pasifik dan Hindia yang luas, lokasi dan sumber daya alam Malaysia yang strategis menjadi berkah sekaligus tantangan. Visi nasional Malaysia memungkinkankan Pemerintah untuk mengejar tiga hasil yang diinginkan, yaitu: legitimasi, akseptabilitas, dan keandalan. Untuk jangka panjang, posisi Malaysia sebagai negara maritim dengan akar kontinental, dan memaksimalkan potensinya sebagai *bridging linchpin* antara kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia (Ahmad, 2019a).

Malaysia adalah salah satu dari beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki klaim unilateral di sebagian wilayah dari kawasan Laut China Selatan yang diklaim Republik Rakyat China. Dalam hal ini, Malaysia memilih untuk menjauhi perselisihan dan berupaya melanjutkan hubungan positif dalam bidang ekonomi dengan China. Namun demikian, beberapa tahun terakhir Malaysia juga berupaya meningkatkan hubungan politik dan militernya dengan Amerika Serikat (AS), disamping keduanya pun telah lama menikmati hubungan ekonomi yang kuat. Melalui kebijakan ini, Malaysia berusaha mencari keseimbangan diantara dua kekuatan adidaya dunia, yang pada satu sisi meningkatkan hubungan ekonomi dengan China untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Malaysia pada AS, sedang peningkatan hubungan politik dan

militer yang lebih kuat dengan AS adalah untuk membantu melindungi Malaysia dari hegemoni China di kawasan Asia Tenggara (Finkbeiner, 2013).

Laut China Selatan yang kaya sumber daya alam merupakan wilayah maritim yang penting bagi Malaysia. Selain menjadi penghubung rute pelayaran utama perdagangan dunia antara timur dan barat, Malaysia juga salah satu negara pengklaim Laut China Selatan. Pemerintah Malaysia bagaimana pun juga menghadapi ketidaksesuaian yang berkembang antara kemampuan angkatan bersenjata dan kepentingannya dalam mengatasi tantangan maritim di Laut China Selatan. Dalam sebuah catatan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Malaysia menyatakan penolakannya atas klaim China terhadap hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut China Selatan yang dicakup dalam klaim unilateral '*nine dash line*' China (Parameswaran, 2015). Ini bukan pertama kalinya Malaysia mengeluarkan pernyataan seperti itu tentang Laut China Selatan kepada PBB. Pada Desember 2019, Malaysia telah mengirim catatan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengatakan bahwa Malaysia bermaksud mengklaim wilayah laut di luar landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis dasar Malaysia. Mengikuti negara-negara regional lainnya, seperti China, Vietnam, dan Indonesia, yang juga telah mengeluarkan pernyataannya ke PBB tentang Laut China Selatan. Klaim ini juga menjadi upaya dan pernyataan sikap tegas Malaysia untuk menolak

klaim oleh negara lain, langkah ini tidaklah mengejutkan dan tidak juga berdampak signifikan terhadap masalah Laut China Selatan (Yuanzhi, 2020).

Tindakan Malaysia terkait dengan perubahan kebijakannya di Laut China Selatan selama beberapa tahun terakhir terlihat tidak menonjolkan diri dan lebih mengadopsi pendekatan yang relatif pragmatis dalam sengketa Laut China Selatan. Malaysia lebih mementingkan eksplorasi minyak dan kerja sama menyeluruh dengan China. Meskipun China tetap menjadi mitra dagang terbesar Malaysia, postur yang terakhir telah berubah sampai pada batasan tertentu. Sehingga Malaysia dalam beberapa tahun terakhir telah beralih dengan menjadi negara yang bersikap "*pragmatis low profile*". Ini menegaskan hak atas eksplorasi minyak dan gas di perairan yang disengketakan dengan China. Kejadian inilah yang kemudian memicu kemarahan China. Dengan menyerahkan notanya ke PBB, Malaysia bermaksud menyatakan kesediaannya untuk mempertahankan hak dan kepentingan maritimnya di kawasan ini.

Sikap Malaysia ini sejalan dengan konsep Amerika Serikat yang sepenuhnya menunjukkan sikap tidak netral atas masalah Laut China Selatan dan mendukung negara-negara Asia Tenggara dalam perselisihan mereka dengan China di kawasan itu. Ini akan mendesak negara-negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan yang lebih ofensif terhadap China atas sengketa Laut China Selatan dan mereka berusaha untuk mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Sebagai tanggapan, China harus lebih banyak melakukan upaya diplomatik untuk menangani hubungannya dengan negara-negara kawasan tersebut.

Tentu saja terkait dengan meningkatnya ketegangan antara China dan AS di Laut China Selatan, para penuntut ini jelas menyadari bahwa konflik militer antara dua negara adidaya di Laut China Selatan akan menimbulkan ancaman besar bagi keamanan mereka sendiri. Negara-negara Asia Tenggara tentu saja tidak ingin melihat konsekuensi seperti itu. Sebagai tanggapan, ASEAN akan mencoba melakukan upaya untuk mendinginkan ketegangan China-AS di kawasan dan menolak melakukan terlalu banyak tindakan ofensif dan radikal terhadap China di bawah pengaruh AS. Untuk langkah penyelesaian menghindari konflik di masa depan, Bagaimana upaya Malaysia dalam mendorong dan mempromosikan hubungan bilateral yang kuat dengan AS dan China, serta mempromosikan hubungan mereka dengan ASEAN, kajian ini antara lain adalah untuk menganalisis keinginan Malaysia dalam penyelesaian konflik mereka dengan China di LCS.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan desain kepustakaan (literatur). Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dan peneliti merupakan instrumen utama penelitian, teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi, dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan suatu makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Sedangkan desain kepustakaan atau literatur, merupakan desain penelitian yang mendasarkan pada pendalaman data melalui kajian teoritis dan referensi lainnya yang terkait pada situasi sosial yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif, menekankan kenyataan berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian kualitatif lebih banyak digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang obyek yang diteliti.

### Regionalisme Konflik LCS

Dalam menghadapi klaim *nine dash line* China di LCS, Malaysia cenderung mengambil langkah-langkah menghindari konflik langsung dengan China untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam kajian *Regional Security Complex Theory* (RSCT), isu keamanan dan stabilitas kawasan adalah fenomena yang selalu menjadi perhatian, karena setiap kawasan di dunia ini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Seperti halnya di Laut China Selatan, kondisi regionalnya masih belum dapat diselesaikan dan bahkan cenderung semakin berkembang untuk menjadi konflik antar kekuatan yang saling berkompetisi akibat adanya kekuatan lain di luar kawasan yang masuk. RSCT mencoba mengembangkan dan menganalisis interaksi antar negara-negara sebagai unit-unit yang saling terhubung satu sama lain di dalam suatu kawasan sebagai bagian dari sistem (Buzan & Waever, 2009). Kawasan ini memuat konteks yang luas, dan dipahami sebagai kesatuan unit berdasarkan jarak atau faktor geografis belaka, dan juga memuat unsur lain yang turut berkontribusi dalam pembentukan identitas unit sebagai satu bagian dari sebuah kawasan (Breslin, 2010). Dalam RSCT, polaritas yang muncul dapat dianalisis dalam level global, regional maupun subregional. Buzan memaparkan bahwa polaritas muncul akibat fenomena pada tiap kawasan, dimana muncul sebuah negara atau kekuatan baru yang dominan didalamnya, namun tidak melampaui kawasan tersebut. Polaritas yang ada memberikan hasil distribusi kekuatan untuk membuat kriteria suatu negara menjadi *super power*, *great power*, *regional power*, maupun *lesser power*.

Dalam sebuah negara, kekuatan merupakan satu variabel penting karena dapat menentukan kemampuan negara tersebut untuk dapat bertahan hidup dalam sistem. Buzan menandai distribusi kekuatan yang tidak berimbang antara negara-negara dalam sebuah kawasan dapat menjadi awal penyebab konflik. Selain itu, identitas negara juga mempengaruhi dinamika yang terjadi di dalam

kawasan, sehingga distribusi kekuatan maupun identitas negara dalam suatu kawasan merupakan hal yang saling berhubungan. Jika distribusi kekuatan di suatu kawasan bersifat unipolar, maka hanya ada satu negara yang beridentitas sebagai *regional power*, demikian pula distribusi kekuatan bipolar dan multipolar, dimana identitas ini menentukan peran yang dapat dimainkan oleh negara tersebut di dalam kawasan (Frazier & Stewart-ingersoll, 2010). Frazier membagi peranan sebuah negara *regional power* dalam tiga, yakni sebagai penyerang (*aggressor*), pelindung (*defender*), dan penyeimbang (*balancer*). Negara *regional power* berperan *aggressor* adalah negara memiliki kebijakan untuk meningkatkan kekuatannya dan mengesampingkan distribusi kekuatan merata untuk menjadi aktor dominan di kawasan. Sementara negara *defender* adalah negara yang kebijakannya cenderung untuk mempertahankan status quo, yang dapat berbentuk interaksi berupa konflik maupun kerja sama. Sedangkan negara *balancer* akan senantiasa mengupayakan keseimbangan kekuatan antara negaranya dengan negara lain di dalam kawasan tersebut agar kondisi *balance of power* dapat tercapai dan stabilitas kawasan dapat terjaga.

Dalam konteks lain, konsep stabilitas kawasan dapat dijelaskan dari aspek hubungan internasional, yaitu sebuah kondisi dimana setiap negara dalam sebuah kawasan memiliki kemampuan untuk menjaga kedaulatan negaranya dan mampu menjamin bahwa seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi, dan ketika kondisi berhasil dicapai, suatu negara akan menyesuaikan pola perilaku dan interaksi yang ditunjukkan oleh negara lain. Disamping itu, stabilitas juga dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang bersifat menentang terhadap adanya konflik atau interaksi yang menghasilkan kerugian, baik bagi salah satu maupun semua pihak (Ayson, 2007). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa stabilitas kawasan merupakan kondisi nyaman yang ingin dicapai oleh negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

### 3. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Ketika isu Laut China Selatan muncul sebagai masalah keamanan yang serius pada akhir 1980-an, Malaysia telah menerapkan kebijakan yang sama hingga saat ini secara konsisten, adapun jika ada perubahan terhadap kebijakan luar negerinya hanya berupa penyesuaian kecil. Pada dasarnya kebijakan luar negeri Malaysia mengandung tiga elemen. Elemen pertama adalah perlindungan terhadap kedaulatan teritorial dan hak berdaulat negara dalam wilayah ZEE Malaysia. Area yang diklaim Malaysia terletak di daerah Sarawak dan Sabah, serta perairan lepas di wilayahnya yang memiliki potensi perikanan dan kandungan hidrokarbon yang signifikan. Terkait dengan potensi sumber energi, hal itu penting bagi Malaysia sebagai sumber pendapatan negara tersebut. Tercatat pada tahun 2019, Malaysia menjadi

produsen gas alam terbesar ketiga di dunia dengan 28,69 juta ton dan produsen minyak mentah terbesar ke-26 dengan 661.240 barel per hari (Muller, 2021).

Elemen kedua adalah penegakan hukum internasional, termasuk kebebasan bernavigasi dan penerbangan. Sebagai negara yang relatif kecil, sikap Malaysia adalah mendukung hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang telah memberikan cukup keuntungan. Sikap ini terlihat dari dukungannya pada Mahkamah Arbitrase Internasional atau *Permanent Court of Arbitration* (PCA) untuk menyelesaikan klaim teritorial dan yurisdiksi yang saling bertentangan, dan telah berpartisipasi dalam penyelesaian tiga kasus besar dengan Indonesia dan Singapura. Contoh lain adalah ketika PCA mengeluarkan putusannya tentang Filipina melawan China pada 12 Juli 2016, setelah itu Malaysia menyatakan bahwa sengketa Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai melalui “penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik” termasuk UNCLOS. Sikap Malaysia itu sepenuhnya telah sesuai dengan putusan Arbitrase Internasional yang menyatakan bahwa klaim *nine dash line* China tidak sesuai dengan UNCLOS, sehingga Malaysia tidak mengakui klaim tersebut dan oleh karenanya juga tidak menganggap adanya klaim yang tumpang tindih antara kedua negara (The Straits Times, 2017).

Elemen ketiga adalah upaya Malaysia untuk terus mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan. Sebagai negara yang dilalui oleh jalur perdagangan, kemakmuran ekonomi Malaysia tergantung pada kebebasan pelayaran dan perdagangan yang melintasi Selat Malaka dan Laut China Selatan, karena secara kritis, *sea line of communication* yang melewati Laut China Selatan menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan wilayah Timur Malaysia. Oleh karena itu, sebagai negara yang menyadari kekuatan militernya yang masih jauh dibawah China, Malaysia lebih memilih untuk menerapkan kebijakan mengelola (*manage*) hubungan dengan China melalui berbagai bentuk kerjasama, daripada kebijakan membatasi (*containment*) China seperti yang dilakukan beberapa negara anggota ASEAN. Walaupun demikian, sikap terbuka Malaysia tetap ditunjukkan terhadap negara-negara Barat seperti AS dan sekutunya dalam hal kerjasama di berbagai sektor. Dengan sikap netral tersebut, Malaysia berharap agar tercipta kondisi yang stabil di dalam kawasan serta tetap dapat memperoleh keuntungan dari semua pihak yang berkepentingan di Laut China Selatan.

Sejak 2009, China telah mengambil sikap yang lebih tegas dalam perselisihannya dengan lima negara pengklaim lainnya - Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam - atas kedaulatan teritorial dan hak maritim di Laut China Selatan. Selama beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan cakupan dan frekuensi patroli angkatan lautnya dalam klaim sembilan garis putus-

putusnya yang terkenal yang meliputi sebagian besar Laut China Selatan dan memastikan dimulainya pekerjaan reklamasi di Spratly. Tentu saja tindakan China ini telah menimbulkan kekhawatiran di dalam negara-negara ASEAN dan di seluruh Asia-Pasifik, tanggapan oleh negara-negara pengklaim terhadap tindakan China belum seragam. Vietnam dan Filipina secara langsung menghadapi kapal-kapal China dan secara terbuka mengutuk upaya paksa China, sedangkan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir terlihat melakukan pendekatan yang pragmatis, lebih tenang dan tidak mencolok (Darmawan & Mahendra, 2018).

Malaysia memiliki beberapa kepentingan di Laut China Selatan. Yang pertama dan tersempit adalah mempertahankan klaim Malaysia. Di Laut China Selatan, Malaysia mengklaim 11 fitur maritim di Kepulauan Spratly dan menempati delapan di antaranya, dengan tiga lainnya diduduki oleh Vietnam atau Filipina. Bagi Malaysia, menjaga klaim tersebut sangat penting untuk kemakmuran dan keamanan Malaysia (Storey, 2020). Negara ini adalah produsen minyak dan gas alam terbesar kedua di Asia Tenggara dan eksportir gas alam cair (LNG) terbesar ketiga di dunia, dengan besar sumber daya minyak dan gasnya sebagian besar dari Laut China Selatan. Sektor minyak dan gas menyumbang sekitar sepertiga pendapatan tahunan pemerintah Malaysia, dan beberapa ladang dan *platform* untuk mengeksploitasi hidrokarbon berada dalam klaim *nine dash line* China. Dari segi keamanan, mencegah perambahan ke bagian Malaysia di Laut China Selatan terkait dengan menjaga kedaulatan dan integritas teritorial negara, terutama karena jalur air tersebut memisahkan Semenanjung Malaysia dari Malaysia Timur.

#### **Kebijakan Maritim Malaysia di LCS**

Malaysia berupaya mendefinisikan kembali strategi untuk meningkatkan kesiapan militer dalam melindungi kepentingan Malaysia sebagai negara yang aman, berdaulat dan sejahtera. Gagasan ini timbul karena dipengaruhi oleh sifat ancaman tradisional dan non-konvensional di teater pertahanan timur dan barat Malaysia; kebersamaan angkatan bersenjata dalam operasi; integrasi dan koordinasi komando dan kontrolnya; interoperabilitas mesinnya; dan, kebutuhan pengetahuan kekuatan masa depan. Dengan demikian, strategi Malaysia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata untuk melindungi integritas teritorial, kedaulatan, dan kesejahteraan ekonomi negara.

Sebagai upaya melindungi dan mempromosikan kepentingan Malaysia yang berlapis-lapis, strategi pertahanan negara dikelompokkan dalam tiga pilar pendekatan kebijakan: pencegahan konsentris, pertahanan komprehensif, dan kemitraan yang kredibel. Unsur-unsur reformasi strategi pertahanan ini dimotivasi oleh aspirasi pemerintah untuk menanamkan tata kelola yang baik dan meningkatkan integritas,

akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pengadaan pertahanan.

Redefinisi Strategi Malaysia ini memberikan tiga pesan utama, dua pesan ditujukan untuk rakyat Malaysia, dan satu merupakan pesan internasional, yaitu: (a) warga Malaysia dibujuk untuk tidak menganggap remeh keamanan dan stabilitas negara ini. Ini merupakan dorongan kesadaran keamanan dan kesiapan keamanan bagi seluruh bangsa, di mana pemerintahan dan masyarakat harus berbagi tanggung jawab untuk pertahanan nasional; (b) ancaman keamanan Malaysia bersumber dari militer dan non-militer, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini membawa pendekatan 'seluruh pemerintah' sebagai bagian integral dari strategi keamanan yang efektif, di mana militer dan lembaga non-militer secara terpadu bekerja sama dalam membela Malaysia; dan (c) Malaysia bertekad untuk membela kepentingan nasionalnya melalui prinsip-prinsip non-blok, kerja sama inklusif, dan keamanan bersama (Ahmad, 2019b).

Mendasarkan pada konsep strategi diatas, maka Malaysia memiliki kepentingan untuk terus mempertahankan hubungan bilateral yang kuat dengan China di luar masalah Laut China Selatan. Hubungan Tiongkok-Malaysia cukup erat sejak berakhirnya era Perang Dingin, dengan ketegangan atas pertanyaan ideologis dan etnis Tionghoa mereda dan kedua negara telah meningkatkan hubungan ekonomi. Secara simbolis, Malaysia adalah negara ASEAN pertama yang menormalkan hubungan dengan China, diinisiasi oleh PM Tun Abdul Razak pada tahun 1974. Peristiwa ini menandai berbagai gagasan tentang hubungan khusus antara kedua negara yang terus mengemuka di kalangan resmi. Saat ini, China juga merupakan mitra dagang terbesar Malaysia dan pasar penghasil turis terbesar di luar ASEAN. Itu berarti Beijing dapat menjadi pusat tujuan Pemerintah Malaysia untuk menjadi salah satu negara berpenghasilan tinggi dan negara maju di kawasan Asia Tenggara pada masa mendatang.

Kepentingan Malaysia lainnya di Laut China Selatan adalah memastikan perdamaian dan stabilitas regional yang lebih luas dan kebersamaan yang terbuka. Laut China Selatan sarana utama perdagangan, pengiriman dan telekomunikasi lewat laut yang dilalui oleh sepertiga armada perdagangan dunia. Hal ini membuat perdagangan bebas, jalur komunikasi laut yang aman dan terjamin (SLOCs), dan tatanan regional secara keseluruhan menjadi sangat penting bagi negara perdagangan dan maritim seperti Malaysia, di mana rasio perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) melebihi 150 persen dan di mana sekitar 95 persen perdagangan dilakukan melalui laut (Parameswaran, 2015).

Malaysia di Laut China Selatan juga memiliki kepentingan pelestarian norma-norma global dan hukum internasional. Ini termasuk prinsip-prinsip umum seperti penyelesaian sengketa secara damai dan kesepakatan khusus yang berlaku untuk masalah

Laut China Selatan, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Dalam pandangan Malaysia, hukum dan norma di Laut China Selatan membantunya dan pengklaim lainnya mencari kejelasan dalam menghadapi klaim yang saling bertentangan dari dasar pemahaman bersama tanpa menggunakan pendekatan “yang paling mungkin benar” dan tindakan destabilisasi wilayah yang melibatkan kekuatan militer.

#### **Pendekatan Aman Malaysia Sebagai Kontinuitas dan Perubahan**

Malaysia dalam beberapa tahun terakhir ini untuk melindungi berbagai kepentingannya telah berupaya menggunakan pendekatan lindung nilai yang cenderung aman bagi negara itu. Strategi lindung nilai merupakan suatu strategi yang bertujuan mengurangi dampak risiko dari aktifitas negara yang tidak terduga, di samping tetap memungkinkan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktifitas tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Malaysia berupaya menggunakan kombinasi pendekatan diplomatik, hukum, keamanan, dan ekonomi untuk mengamankan klaimnya di Laut China Selatan, sekaligus menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan hubungan khususnya dengan China. Sementara ketegasan China yang terus berkembang telah membuat Malaysia harus mengkalibrasi ulang pandangannya di beberapa kepentingannya dan komponen pendekatan.

a. Pendekatan Diplomasi. Secara diplomatis, sejak 2009 Malaysia telah bermain aman dengan secara cerdas mengelola hubungan istimewanya dengan China secara bilateral sekaligus menggunakan norma dan mekanisme regional untuk mengamankan kepentingannya. Di satu sisi, Malaysia dalam menganggapi insiden di Laut China Selatan yang melibatkan China dikontrol dengan ketat dan sering dikomunikasikan secara pribadi ke Beijing, karena diyakini bahwa meningkatnya nasionalisme di kalangan publik dapat membatasi pilihan pemerintah dan berisiko merusak hubungan vital. Beijing pada gilirannya secara pribadi dan publik menghargai pendekatan pemerintah Malaysia yang lebih tenang untuk menangani masalah ini dan sebagai hasilnya telah memperlakukannya jauh lebih lembut dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina di Laut China Selatan. Di sisi lainnya, Malaysia telah berupaya memastikan ASEAN mempertahankan tingkat persatuan dasar pada masalah Laut China Selatan, sehingga dapat berbicara menentang perubahan sepihak terhadap status quo oleh para aktor, termasuk China. Malaysia juga memulai pembicaraan dengan sesama negara pengklaim di ASEAN untuk mempersempit perbedaan di Laut China Selatan dan berpotensi membantu memajukan kemajuan *Code of Conduct* (CoC), meskipun diskusi ini dikatakan berada pada tahap yang sangat awal. Meskipun ada cukup alasan untuk percaya bahwa

bahkan COC mungkin tidak cukup untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, apalagi menyelesaikan perselisihan (Manurung, 2017).

b. Pendekatan Hukum. Malaysia juga telah mencoba bermain aman dalam pendekatan hukum, dengan hati-hati dan selektif menggunakan lembaga internasional untuk mengamankan klaimnya dan mempersempit perbedaan dengan sesama negara klaim di ASEAN bila perlu, tetapi menolak untuk mendukung upaya yang lebih kontroversial oleh pihak lain karena takut membuat marah Beijing dan merusak kepentingan Malaysia sendiri.

Kehati-hatian Pemerintah Malaysia dapat dipahami untuk menjaga hubungan Tiongkok-Malaysia, meskipun ketegasan Beijing semakin meningkat di Laut China Selatan. Bagi Pemerintah Malaysia menjaga hubungan baik dengan Beijing adalah menjaga hubungan perekonomian yang semakin berkembang baik. Ini pentingnya, karena hubungan baik Tiongkok-Malaysia akan membuat Beijing memperlakukan Malaysia dalam masalah Laut China Selatan relatif lebih baik daripada perlakuan Beijing terhadap Filipina dan Vietnam.

c. Pendekatan Keamanan. Malaysia terus memperkuat kemampuan lembaga-lembaga pertahanannya, terutama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN), Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) dan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) untuk mengamankan klaimnya di Laut China Selatan dan sumber daya di dalamnya. Namun langkah-langkah yang dirancang dalam penguatan kemampuan pertahanan lautnya adalah untuk mencegah potensi eskalasi dengan China di Laut China Selatan. Ini terus berlanjut di tengah meningkatnya pelanggaran kapal-kapal China ke perairan Malaysia, sejak 2008 hingga 2012 sebanyak 35 aset milik PLA Navy dan *China Coast Guard* (CCG) yang diamati di ZEE Malaysia di wilayah Kepulauan Spratly.

Di satu sisi, Malaysia secara aktif meningkatkan kemampuannya di laut, tahun 2013 dan 2014 seiring dengan meningkatnya pelanggaran China di wilayah ZEE Malaysia. Secara tradisional, untuk melindungi klaimnya, dengan mempertahankan beberapa pos militer di Kepulauan Spratly, patroli laut dengan kapal perang dan kapal selam di ZEE dan daerah sengketa untuk memantau dan membayangi kapal asing, jika diperlukan, menggunakan prosedur standar, dan melakukan latihan secara berkala di atau dekat wilayahnya di Laut China Selatan untuk menegaskan kembali kehadirannya di wilayah sengketa dan menguji kesiapan operasionalnya. Dalam menanggapi pelanggaran kapal China yang semakin berani ke perairan Malaysia, RMN telah meningkatkan patroli di sekitar fitur yang diduduki dan diklaim dan diam-

diam meningkatkan kerja sama intelijen dengan mitra seperti Amerika Serikat dalam domain maritim.

Sementara kapal-kapal Malaysia membayangi kapal-kapal China ketika mereka melanggar perairan Malaysia, pihak Malaysia cenderung mengeluarkan perintah bagi kapal-kapal China untuk pergi tetapi menghindari melakukan manuver agresif, sejalan dengan preferensi untuk mengajukan protes diplomatik yang tenang sebagai gantinya. Malaysia juga telah membangun mekanisme yang dirancang untuk mencegah eskalasi, termasuk dengan sengaja mengerahkan satu kapal lebih sedikit daripada Beijing ketika kontak dilakukan. Malaysia juga terus membangun hubungan keamanannya dengan Beijing dengan meningkatkan konsultasi pertahanan dan langkah-langkah membangun kepercayaan.

Malaysia bermain aman di ranah ini karena beberapa alasan khusus keamanan. Pertama, kemampuan Malaysia masih sangat terbatas. RMN cukup kecil, dengan armada tua hanya 39 kapal permukaan dan dua kapal selam untuk menutupi perairan sekitar negara yang luas. Kedua, pelanggaran China hanyalah salah satu dari banyak ancaman tradisional dan nontradisional yang harus dihadapi Malaysia dalam domain maritimnya yang luas; lainnya termasuk pembajakan, penyelundupan, penculikan, terorisme, penangkapan ikan ilegal, dan perambahan dari negara tetangga seperti Indonesia dan Filipina.

d. Pendekatan Ekonomi. Komponen penting dan sering diremehkan dari pendekatan aman Malaysia adalah ekonomi. Beberapa cadangan minyak dan gas di Laut China Selatan yang paling produktif berada di luar negara bagian Sabah dan Sarawak, dan sektor minyak dan gas menyumbang sekitar sepertiga dari pendapatan pemerintah tahunan. Selain meningkatkan kemampuan militernya untuk melindungi instalasi minyak dan gasnya, Malaysia telah bekerja sama dengan perusahaan internasional dan menandatangani perjanjian dengan negara lain untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari Laut China Selatan.

Malaysia juga telah bekerja untuk mengecilkan perbedaan dengan negara penuntut lainnya untuk mewujudkan manfaat ekonomi melalui perjanjian pembangunan bersama (*Joint Development Agreement /JDA*). Seperti di Laut China Selatan, pada Maret 2009 Malaysia dan Brunei berhasil menyelesaikan sengketa perbatasan laut dan darat mereka melalui Pertukaran Surat, dengan kedua belah pihak kemudian sepakat untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya minyak dan gas di dua blok (CA1 dan CA2). Meskipun ada kesediaan Malaysia untuk mengesampingkan perselisihan demi pragmatisme ekonomi dengan semangat bermain aman, namun dengan China tidak ada rencana serupa yang sedang dikerjakan, karena hal itu akan melibatkan beberapa bentuk pengakuan atas Klaim China di Laut China Selatan, yang meluas ke ZEE

Malaysia. Pengakuan seperti itu akan bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat ini.

#### **Upaya Mitigasi**

Malaysia menolak penggunaan ancaman dan kekerasan bersenjata untuk menyelesaikan konflik internasional dan mengadvokasi serta mempraktikkan penyelesaian sengketa secara damai. Kebijakan Pertahanan Nasional menggambarkan hal ini melalui penerapan strategi pertahanan berdasarkan diplomasi pertahanan bilateral dan multilateral yang dicapai melalui kerja sama regional dan internasional. Sejalan dengan filosofi ini, Malaysia mendukung penuh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan universal untuk memastikan tatanan dunia sosial dan ekonomi yang adil.

Malaysia menganggap pembelaan kepentingan nasional sebagai hal mendasar bagi kedaulatan dan kemerdekaannya. Sejalan dengan itu, tujuan utama kebijakan Pertahanan Negara adalah untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan dan wilayah Malaysia dari ancaman dalam dan luar negeri. Kepentingan geografis Malaysia dibagi menjadi: (a) wilayah inti; (b) kepentingan ekonomi lepas pantai; dan (c) perairan dan wilayah udara strategis. Area inti meliputi daratan Malaysia di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak; perairan teritorial dan ruang udara di atasnya. Daerah-daerah ini harus sepenuhnya dilindungi dan dipertahankan dengan kemampuan terbaik Malaysia dari ancaman eksternal.

Wilayah ekonomi lepas pantai adalah ZEE negara dan landas kontinen. Daerah-daerah di Laut China Selatan ini kaya akan sumber daya perikanan dan hidrokarbon yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Jalur komunikasi maritim dan ruang udara strategis Malaysia adalah sebagai berikut: (a) Jalur komunikasi maritim dan ruang udara yang menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak; (b) Selat Malaka dan Pendekatannya; dan (c) Selat Singapura dan pendekatannya. Dalam hal ini, Malaysia harus memiliki kemampuan pertahanan untuk memastikan bahwa wilayah utamanya yang didasarkan pada kepentingan nasional dipertahankan dengan segala cara yang mungkin. Mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah terestrial dan maritimnya termasuk ZEE, landas kontinen, dan semua jalur komunikasi dan ruang udara strategis laut. Dengan demikian pengembangan Angkatan Tentara Malaysia harus berdasarkan pada pertahanan ketiga wilayah tersebut untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan yang menyediakan katalis bagi program-program pembangunan nasional.

Untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan peluang yang timbul dari perilaku kekuatan besar China, Malaysia menerapkan strategi lindung nilai.

Dari 2018 hingga 2020, kekuatan menengah Malaysia menerapkan keterlibatan langsung dan elemen penyeimbangan terbatas dan *bandwagoning* terbatas secara fleksibel namun konsisten. Baik *Belt and Road Initiative* (BRI) China maupun tindakannya di Laut China Selatan tidak menyebabkan perubahan besar dalam strategi lindung nilai Malaysia. Malaysia juga berusaha memelihara hubungan persahabatan dengan semua negara dan mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional. Laut China Selatan harus menjadi *platform* kerjasama dan konektivitas, bukan area konfrontasi atau konflik, yang sejalan dengan semangat *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Kerja sama ini sangat penting untuk menjamin kebebasan navigasi dan penerbangan sebagaimana diatur oleh hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Malaysia bersikeras pada penggunaan diplomasi dan hukum internasional untuk mengelola perselisihan.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagi Malaysia yang terpenting adalah kebijakan terhadap China dapat tertanam dalam hubungan multilateral (segala arah), bersahabat, dan seimbang dengan Amerika Serikat, Jepang, dan ASEAN. Konsep pendekatan pragmatis (lindung nilai) yang diperbarui sebagai inovasi penting, menambahkan komponen khusus untuk menilai persepsi para pemimpin politik tentang risiko dan peluang yang terkait dengan target lindung nilai serta nilai strategis dari mitra penyeimbang potensial. Bagi Malaysia Laut China Selatan harus menjadi *platform* kerjasama dan konektivitas, bukan area konfrontasi atau konflik, yang sejalan dengan semangat *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN), dan bersikeras pada penggunaan diplomasi dan hukum internasional untuk mengelola perselisihan.

Sebagai upaya mitigasi, maka (1) Malaysia tetap memelihara hubungan baiknya dengan China untuk kemakmuran ekonomi di atas kepentingan lain, termasuk sengketa kedaulatan kedua negara; 2) Malaysia tetap melanjutkan hubungan militer yang kuat dengan AS untuk mengimbangi China, mengingat kehadirannya semakin meningkat di Asia Tenggara; dan (3) Malaysia berupaya menggaungkan hubungan bilateral yang kuat dengan AS dan China, termasuk mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara multilateral melalui ASEAN.

#### 5. REFERENSI:

- Ahmad, R. (2019a). *New ideas and reforms in protecting nation's interests, dalam* <https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/12/544108/new-ideas-and-reforms-protecting-nations-interests>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.
- Ahmad, R. (2019b, December 2). *New ideas and reforms in protecting nation's interests.*

<https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/12/544108/new-ideas-and-reforms-protecting-nations-interests>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

- Ayson, R. (2007). Regional Stability in the Asia-Pacific: Towards a Conceptual Understanding. *Asian Security, 1*, 190–213.
- Breslin, S. (2010). *Regions and Regionalism in World Politics*. New York: Palgrave MacMillan.
- Buzan, B., & Waeber, O. (2009). *Regions and Powers, The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Darmawan, A. B., & Mahendra, Lady. (2018). Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok. *Jurnal Global & Strategis, 12*(1), 79–100.
- Finkbeiner, J. M. (2013). *Malaysia's Great Power Balance and the South China Sea Disputes*. U.S. Army War College.
- Frazier, D., & Stewart-Ingersoll, R. (2010). Regional powers and security: A framework for understanding order within regional security complexes. *European Journal of International Relations*.
- Manurung, H. (2017). South China Sea Territorial Dispute: A Lesson for Association of South East Asian Nations (ASEAN). *SSRN Electronic Journal, January 2017*.
- Muller, J. (2021). *Production of liquefied natural gas (LNG) in Malaysia from 2013 to 2020, dalam* <https://www.statista.com/statistics/719073/liquefied-natural-gas-production-malaysia>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.
- Parameswaran, P. (2015). Playing It Safe : Malaysia 's Approach to the South China Sea and Implications for the United States. *Maritime Strategy Series, February*, 1–14.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); Cet. 1). Literasi Media Publishing.
- Storey, I. (2020). Malaysia and the South China Sea Dispute: Policy Continuity amid Domestic Political Change. *ISEAS Yusof Ishak Institute, 18*(2020), 1–10.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Sutopo (ed.); Cet. Ke-19). Penerbit Alfabeta.
- The Straits Times. (2017). *Beijing's nine-dash line "not recognised by KL", dalam* <https://www.straitstimes.com/asia/beijings-nine-dash-line-not-recognised-by-kl>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.
- Yuanzhi, L. (2020, August 2). *Does Malaysia want to rock the boat in the South China Sea? - Global Times.* <https://www.globaltimes.cn/content/1196456.shtml>, diakses pada tanggal 6 Juli 2021.

# PENTINGNYA PENANAMAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI MASYARAKAT PESISIR PULAU TERDEPAN SEBAGAI UPAYA KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM BELA NEGARA

Oleh:

Supriyono<sup>1)</sup>, Lukman Yudho P<sup>2)</sup>, Dohar Sianturi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Universitas Pertahanan

<sup>1</sup>agustinuspriyo527@gmail.com,

<sup>2</sup>kamalekumdeplek@gmail.com,

<sup>3</sup>sianturi\_dohar@yahoo.co.id

## Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak pulau-pulau terluar yang sangat rentan untuk menjadi target oleh negara asing. Posisi pulau-pulau terdepan di wilayah perairan Indonesia memiliki dampak penting dalam aspek pertahanan. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun pulau-pulau terluar yaitu di antaranya melakukan upaya-upaya pembangunan infrastruktur guna mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pulau terluar Indonesia. Namun sebenarnya ada satu hal yang lebih penting, yaitu membangun kesadaran berbangsa bagi masyarakat pesisir di pulau terluar. Penanaman nilai-nilai kebangsaan perlu dilakukan, yaitu sebagai upaya dalam Bela Negara yang merupakan bagian tujuan dari kementerian pertahanan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di kawasan pulau terluar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat pesisir pulau terluar sebagai upaya keikutsertaan warga negara dalam bela negara dan apa pengaruhnya bagi masyarakat pesisir pulau terluar. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Hasil studi ini menunjukkan menunjukkan bahwa pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat perlu diutamakan sebelum menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan akan memberikan *sense of defense* dan *deterrent effect* bagi siapapun yang akan mengusik kedaulatan Indonesia.

**Kata Kunci :** Nilai kebangsaan, Bela Negara, Pulau Terluar, Masyarakat Pesisir, Pertahanan Semesta.

## 1. PENDAHULUAN

Pertahanan merupakan istilah yang kerap kali diartikan sebagai tugas militer. Pada dasarnya, militer merupakan istilah yang digunakan untuk mengindikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh personel berseragam yang disebut tentara. Sementara itu, pertahanan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mempertahankan negara yang tidak hanya melibatkan tentara, tetapi juga masyarakat sipil. Hal ini pula yang tergambar dalam istilah bela negara.

Upaya bela negara tidak hanya menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Kewajiban bela negara diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia berlandaskan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Keempat hal ini merupakan paradigma nasional yang menjadi kerangka berpikir masyarakat Indonesia terkait pelbagai permasalahan nasional.

Hal ini pula yang mendasari pelaksanaan pendidikan bela negara oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pendidikan ini dilaksanakan melalui empat poin pembelajaran, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer wajib, pelatihan ala TNI, dan pelatihan sesuai profesi masing-masing. Keempat poin ini bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pertahanan semesta. Apalagi ada lima nilai dasar yang menjadi inti kurikulum pendidikan bela negara,

yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik.

Jika meninjau pada nilai yang menjadi inti pada pendidikan bela negara, semuanya sudah disampaikan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga SMA atau sederajat. Di beberapa universitas juga sudah menetapkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Namun, dalam kurikulumnya tidak ada wajib militer dan pelatihan ala TNI, sehingga pemahaman militer menjadi sangat minim.

Salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menumbuhkan kesadaran semangat bela negara kepada segenap anggota masyarakat. Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) melalui:

1. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda.

Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan.
3. Memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundangundangan.

Perlunya penanaman kesadaran bela negara bagi setiap unsur bangsa sangat penting dilakukan karena kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:

1. Cinta Tanah Air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Warga negara dapat mewujudkan itu semua dengan cara setiap warga mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan dan pastinya menjaga nama baik negara.
2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap setiap warga negara yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya.
3. Pancasila, merupakan ideology warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.

4. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebagai contoh adalah dengan melakukan bela negara di tiap tiap profesi yang kita jalani.
5. Memiliki Kemampuan Bela Negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.

Hubungan/keterkaitan antara pembelaan negara atau bela negara dengan ketahanan nasional meliputi:

1. Pembelaan Negara sebagai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi dan sosialisasi. Sedang Ketahanan Nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan negara. Tujuan Ketahanan Nasional akan diukur melalui seberapa jauh "keuletan" warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam Ketahanan Nasional dan seberapa besar kekuatan "ketangguhan" warga negara dalam Ketahanan Nasional.
2. Pembelaan Negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilakukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional.
3. Perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi warga negara bukan suatu kesadaran, fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik yang langsung maupun tidak langsung dapat timbul sewaktu-waktu, dan pengingkaran terhadap kewajiban bela negara merupakan karapuhan Ketahanan Nasional, yang pada gilirannya akan membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Pembinaan kesadaran bela negara perlu dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, baik dipedesaan, perkotaan, dan diwilayah perbatasan. Hingga wilayah pesisir. Fungsinya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa sesuai dengan profesi yang dimiliki.

Sehingga bagaimana penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat pesisir pulau terluar sebagai upaya keikutsertaan warga negara dalam bela negara dan apa pengaruh penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat pesisir pulau terluar sebagai upaya keikutsertaan warga negara dalam bela negara sebagai wujud pertahanan rakyat semesta.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan adalah melakukan pendalaman data-data berdasarkan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan

nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada tentang ancaman maritim yang ada di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh dari hasil telaah pustaka dan interpretasi dari bahan yang terdapat dalam buku-buku, dokumen, akses situs serta artikel-artikel lepas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data-data tersebut berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3. PEMBAHASAN

Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ciri khas atas keanekaragaman suku, bahasa, dan budayanya. Secara fisik antar satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh laut. Akan tetapi, pemisahan itu tidak bisa dilihat dari segi kemaritiman karena seluruh perairan yang ada di Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah tersebut.

Di negara Indonesia berdiam sebuah bangsa besar yang mendiami wilayah dan negara kepulauan, bangsa yang multikultur. yang di dalamnya ada dua kelompok kehidupan, yaitu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman. Secara sadar atau tidak, kedua kelompok masyarakat ini hidup dalam sebuah ketergantungan akan laut. Semuanya itu kembali pada konsep hidup dan kesadaran ruang hidup yang berasal dari heterogenitas tadi. Kemudian dalam sejarahnya, juga tercatat antagonis hasrat untuk saling mengendalikan dari kedua kelompok besar itu sendiri. Kelompok yang tinggal di darat berusaha untuk mengendalikan pesisir dengan segala upaya untuk mendapatkan hasil dari laut, dan juga sebaliknya.

Masyarakat maritim pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resource based*), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relative berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam Buku Putih Pertahanan Negara disebutkan bahwa pertahanan negara Indonesia

disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta guna mencapai tujuan nasional. Pertahanan negara yang bersifat semesta ini pada hakikatnya adalah suatu bentuk pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Sistem pertahanan semesta itu sendiri mengombinasikan pertahanan militer serta pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan pertahanan negara yang kuat dan disegani. Hal tersebut dipersiapkan secara dini dengan harapan dapat bekerja secara berkelanjutan dalam menghadapi berbagai jenis ancaman. Oleh karena itu, masyarakat maritim tentunya memiliki peran dalam upaya pertahanan negara.

Untuk itu konsep pengembangan kawasan pulau terdepan sangat terbantu oleh sikap masyarakat maritim yang hidup di wilayah perbatasan dengan negara lain guna menjaga kutuhan wilayah NKRI. Dengan adanya optimalisasi dan pemberdayaan masyarakat maritim, maka dukungan pertahanan dan keamanan negara dapat terjamin yang ditandai dengan aktivitas oleh masyarakat maritim Indonesia sebagai wujud dari pertahanan semesta. Karenanya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat daerah pesisir di pulau terdepan menjadi sebuah keharusan sebagai wujud bela negara setiap unsur bangsa.

Luasnya spektrum bela negara yang dimulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang-undang. Diantaranya sudah disebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 30.

Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, hal ini menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, termasuk didalamnya unsur penting bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Laut sendiri merupakan ajang dalam pencarian kehidupan bagi masyarakat maritim. Pada mulanya masyarakat bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup, namun pada akhirnya mereka juga bertujuan mengembangkan kesejahteraan, atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kekayaan dari kegiatan kemaritiman dalam rangka mencapai tujuan nasional. Laut menjadi media pemersatu bangsa karena melalui laut banyak orang dari berbagai bangsa melakukan interaksi dengan bermacam-macam aktivitas. Melalui laut orang dari berbagai bangsa menjalankan

aktivitas perekonomian melalui “jasa” pelayaran antar benua atau antar pulau. Tentunya, hal-hal yang terkait dengan kemajuan dunia maritime tersebut patut untuk diberdayakan.

Dalam masyarakat maritim, termasuk di Indonesia, telah tumbuh berbagai sektor dan subsektor ekonomi kemaritiman baru yang memunculkan segmen-segmen atau kategori-kategori sosial seperti petambang, pekerja industri, pengelola dan karyawan wisata, marinir, akademisi/peneliti, birokrat, dan lain-lain. Tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi dan jasa dengan segmen-segmen masyarakat maritim tersebut memerlukan dan diikuti dengan perkembangan dan perubahan-perubahan kelembagaannya menjadi wadah dan regulasinya. Bentuk nyata pemberdayaan lainnya adalah dengan memotorisasi perahu nelayan dalam rangka pengembangan usaha yang didukung dengan teknologi perikanan laut yang mumpuni diiringi dengan membangun SDM masyarakat maritim itu sendiri.

Dukungan konsep bela negara dapat diartikan secara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara khususnya dalam mewujudkan “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”. Guna terwujudnya pertahanan semesta, maka sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, layaknya pertahanan semesta, masyarakat maritim juga harus direalisasikan pada diri seluruh masyarakat Indonesia karena bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim yang mendunia.

Wilayah pulau terdepan sebagai konsep halaman depan Indonesia memiliki arti penting dalam aspek pertahanan. Dari perspektif Pertahanan merupakan wilayah yang harus dijaga kedaulatannya baik dari gangguan internal maupun secara eksternal, karena ancaman bagi kedaulatan negara khususnya di perbatasan dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan bahwa kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dinyatakan memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar.

Yang dimaksud dengan pengaruh penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk mengembangkan sikap Bela Negara dilingkungan masyarakat pesisir adalah

bagaimana masyarakat daerah pesisir pulau terdepan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kondisi kesadaran Bela Negara masyarakat dan apa saja yang melatarbelakangi atau penyebab terjadinya kondisi Bela Negara masyarakat tersebut, ditinjau dari faktor kondisi masyarakat sendiri maupun ditinjau dari kondisi lingkungannya. Kondisi masyarakat yang dimaksud antara lain pendidikan, ekonomi dan kultur yaitu budaya, watak dan kebiasaan dari kebanyakan masyarakat, sedangkan kondisi lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mempunyai kontribusi terhadap Pemahaman dan Implementasi Bela Negara masyarakat, yang didapat dari bangku sekolah, satgas perbatasan, pemerintah Kabupaten/Kota yang menaungi pulau terdepan di Indonesia, serta Kementerian/Lembaga terkait. Salah satu aspek nasionalisme adalah kebanggaan akan jati diri bangsa. Bagian ini akan menguraikan sejauh mana masyarakat yang hidup di Pulau terdepan memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang dipahami dalam terminologi para ahli sebagai “komunitas politik yang dibayangkan”. Kebanggaan nasional warga di daerah perbatasan muncul sebagai konsekuensi logis dalam keberhasilan negara menyelenggarakan pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama transportasi dan komunikasi. Kurangnya pemenuhan kesejahteraan dapat berimplikasi pada menurunnya kebanggaan nasional dan memberikan kemungkinan yang lebih besar terhadap menurunnya ketahanan dalam menjaga keberlangsungan negara bangsa.

Rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat *taken for granted* atau terjadi dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang secara sosial dan politik dikonstruksi oleh institusi-institusi negara melalui proses sosial, yakni upaya-upaya pemeliharaan nasionalisme. Nasionalisme ditanamkan oleh aparat-aparat ideologi negara terhadap masyarakat dengan menggunakan ritual-ritual nasionalisme. Ritus-ritus dalam masyarakat tradisional, menurut Durkheim, bertujuan meningkatkan solidaritas dan integrasi sosial yang dilakukan melalui penciptaan simbol-simbol tertentu. Sebagaimana sebuah ritus dalam masyarakat tradisional, upaya pemeliharaan nasionalisme dilakukan secara berulang-ulang dan di institusionalisasikan.

Lembaga-lembaga negara telah melakukan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengajarkan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Institusi pendidikan dari SD sampai SMA, yaitu merupakan salah satu instrumen negara untuk menanamkan ideologinya terhadap masyarakat sipil. Praktik-praktik tersebut secara sosiologis dapat dilihat sebagai ritus-ritus nasionalisme, yang didefinisikan secara teoretis sebagai upacara-upacara menggunakan simbol-simbol untuk menggalang

solidaritas suatu kelompok dan sekaligus menjaga integrasi sosial. Implikasi ritus-ritus nasionalisme seperti ini adalah penanaman pengetahuan masyarakat tentang Indonesia yang dipahami dalam konsepsi politik, yaitu NKRI dan simbol-simbolnya.

Selain pemenuhan kesejahteraan masyarakat daerah pesisir pulau terluar, Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sosial politik perlu segera dilakukan. Keberhasilan dari proses ini ditandai dengan menurunnya konflik sosial politik. Pemantapan ini diupayakan melalui penerapan strategi nasional pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai – nilai nasionalisme bangsa mengandung kaidah atau norma yang harus tertanam dan terpatri dalam jiwa seluruh anak bangsa ini. Hal ini menunjukkan semua ucapan, tingkah laku dan tindakan manusia haruslah dijiwai dengan semangat ataupun pancaran akan nasionalisme yang menyimbolkan rasa senasib sepenanggungan, solidaritas, berwawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan.

Penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk memupuk kesadaran Bela Negara ini dimaksudkan untuk membangun rasa cinta tanah air dan Bela Negara yang merupakan salah satu upaya revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa sebagaimana menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang tertuang dalam nawacita diantaranya melalui penanaman nilai-nilai Patriotisme, Cinta Tanah Air dan Bela Negara. Penanaman nilai-nilai Bela Negara serta cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan kebenaran ideologi pancasila dan memiliki kemampuan awal Bela Negara kepada setiap warga negara ini sangat penting sebagai upaya membangun *sense of defence* bangsa Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Pentingnya penanaman nilai-nilai tersebut oleh karena adanya perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada perubahan paradigma ancaman yang sudah bersifat multi dimensi dalam bentuk dan sifatnya. Kesadaran Bela Negara menjadi modal sosial bagi bangsa Indonesia sekaligus menjadi *deterrence effect* bagi bangsa lain yang ingin mengganggu, mengancam bahkan menghancurkan bangsa Indonesia dari berbagai sisi. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga menjadi tuntutan pada era globalisasi ini, akan tetapi jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan dilandasi nilai-nilai Bela Negara seperti cinta tanah air dan kesadaran Bela Negara juga harus dimiliki oleh setiap warga negara. Sumber Daya Manusia yang hanya menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saja tanpa memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air dan kesadaran Bela Negara justru akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Dalam perspektif Pertahanan, kualitas sebagaimana tersebut di atas merupakan Sumber

Daya Manusia Potensi Pertahanan Negara. Dengan kualitas itulah, setiap warga negara sudah pasti memiliki kesiapsiagaan dini baik secara psikis maupun fisik, dalam menghadapi berbagai bentuk dan sifat ancaman yang datang, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Essensi kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan Negara merupakan landasan bagi terbangunnya Sistem Pertahanan Semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman non militer. Program pembinaan Kader Bela Negara merupakan bagian dari suatu proses pembinaan Sumber Daya Manusia yang tidak akan pernah berhenti, senantiasa berlanjut dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air dan kesadaran bela negara, dalam 5 tahun ke depan, Kementerian Pertahanan akan membentuk kader Bela Negara melalui institusi Kabupaten/Kota di pulau terdepan Indonesia yang dilaksanakan secara sinergitas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kader Bela Negara yang memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah derasnya arus globalisasi saat ini

#### 4. KESIMPULAN

Pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat pesisir pulau terluar Indonesia dalam meningkatkan rasa bela negara di kawasan perbatasan perlu menjadi perhatian di tengah globalisasi yang dapat berubah menjadi ancaman transnasional. Yang perlu diperhatikan sebelum menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi komunitas masyarakat di daerah pesisir, pemerintah perlu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan fasilitas infrastruktur di wilayah pulau terluar. Hal tersebut merupakan faktor eksternal untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat pesisir pulau terluar.

Pembinaan kesadaran Bela Negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama melalui Kementerian/Lembaga serta segenap Komponen Bangsa. Upaya Bela Negara sebagai kewajiban warga negara, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Penanaman kesadaran bela negara dikawasan pesisir dapat memberikan dampak efektif dari aspek pertahanan.

Penanaman nilai-nilai kebangsaan penting sebagai upaya membangun *sense of defence* bangsa

Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman sekaligus menjadi deterrence effect bagi bangsa lain yang ingin mengganggu, mengancam bahkan menghancurkan bangsa Indonesia dari berbagai sisi.

Maka pembinaan kesadaran berbangsa bagi masyarakat daerah pesisir merupakan tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan baik di daerah maupun dipusat untuk bersama membangun kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, Emile. 1993. *The elementary of the religious life*. New York: Free Press.
- Kementerian Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan RI tahun 2008, Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Departemen Pertahanan RI.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nainggolan, P. P. 2004. *Batas wilayah dan situasi perbatasan Indonesia: ancaman terhadap integritas teritorial*. Jakarta: Tiga Putra Utama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Cet.19. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Indrawan, Jerry & Efriza. 2018. "Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer". *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol. 8. No. 2..
- Indrawan, Jerry. 2015. *Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan*. *Jurnal Pertahanan*: Agustus 2015, Vol.5 No. 2.
- Madjid, Adnan. 2018. "Membangun Kesadaran Masyarakat Maritim Dalam Perspektif Bela Negara". *Majalah Wira*. Vol. 74. No. 58. September.
- Matonandang, Erlinda. 2015. "Kurikulum Bela Negara Di Tingkat Pendidikan Tinggi: Prospektif Ketimpangan Dalam Sistem Pertahanan Indonesia". *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol.5. No. 3.
- Pamungkas, Cahyo. 2015. "Nasionalisme Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu Karimun". *Jurnal Sosiologi*. Vol. 41 No. 2. Desember.
- Suhari, Muhammad. 2017. "Pemahaman Dan Implementasi Bela Negara Masyarakat Pesisir Sekitar Obyek Vital Nasional Bandar". *Jurnal*

*Prodi Strategi Perang Semesta*. Vol.2. No2. Jakarta: Universitas Pertahanan.

Sutarman. 2011. "Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen)". *Jurnal Magistra*. No. 75.

Kementerian Pertahanan, *Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018*. Dalam

<https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/03/22/pembentukan-kader-bela-negara-bagi-masyarakat-perbatasan-di-kecamatan-tasifeto-barat-kabupaten-belu-provinsi-nusa-tenggara-timur-ta-2018.html>

## STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM ANALISA ANCAMAN DAN KEKUATAN LAUT

Oleh:

**Tofan Hermawan<sup>1)</sup>, Rudi sutanto<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>tofan15100@gmail.com,

<sup>2</sup>Rudi.sutanto71@gmail.com

### Abstrak

Banyak orang sudah tahu bahwa luas laut Indonesia adalah 70% dari luas wilayahnya. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Data Asian Development tahun 2009 menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies laut. Hal ini merupakan kekayaan sekaligus mengandung ancaman bagi keamanan laut Indonesia. Dibutuhkan sebuah kekuatan pertahanan laut yang mampu menjaga perairan Indonesia. Pertahanan laut Indonesia merupakan bagian penting dari sistem pertahanan negara Indonesia, dan mengandung misi yang cukup kompleks yang menjadi tantangan dan sekaligus permasalahan dari berbagai pihak yang terlibat. Pemahaman akan pertahanan laut dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas pokok dan fungsi mereka. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan pertahanan laut Indonesia, berdasarkan analisa ancaman, dan kekuatan laut Indonesia. Hal-hal yang menjadi perhatian penting penulis untuk dijadikan dasar atau bahan analisis yaitu: ancaman yang dalam hal ini penting dan perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian - pengertian dan lingkup pertahanan laut Indonesia, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun strategi kekuatan pertahanan laut Indonesia. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan alutsista untuk mendukung kekuatan pertahanan laut dan sistem pertahanan laut yang lebih komprehensif dalam mengantisipasi dan meminimalisir ancaman yang ada agar pertahanan laut Indonesia dapat terlaksana dengan lebih optimal.

**Kata Kunci:** Ancaman, batas wilayah, keamanan maritim, kekuatan pertahanan laut, strategi pertahanan laut.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara yang terdiri dari daratan dan lautan yang mencapai 5.193.250 km<sup>2</sup>. Hal ini menempatkan Negara Indonesia sebagai Negara terluas ke-tujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada di peringkat ke-dua, dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara.

Pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo sejak terpilih dalam pemilu 2014. Sebelum terpilih sebagai Presiden, Joko Widodo telah menyiapkan agenda pembangunan baru bangsa Indonesia, yang bertitik-tolak dari kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). Kebijakan ini mengungkapkan penekanan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan dalam berbagai aspek di masa pemerintahannya.

Indonesia adalah negara kepulauan atau *archipelagic state* terbesar di dunia. Wilayah Negara kita beradani antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas perairan, laut territorial dan perairan pedalaman, kurang lebih

2,7 juta kilometer persegi, atau sekitar 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya tambahan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 juta kilometer persegi, total luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Wilayah laut atau perairan seluas itu tentu saja menjadi sumber daya alam yang sangat besar. Negara Indonesia tentu saja memiliki peluang besar untuk menjadikan laut sebagai sumber yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dari hasil lautnya. Posisi yang sangat strategis ini, menjadikan wilayah perairan Indonesia dilewati oleh jalur utama kapal-kapal laut dari banyak Negara di dunia, baik dari barat ke timur maupun dari timur ke barat, baik kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal angkatan laut.

Dengan kedudukannya pada jalur perdagangan dan transportasi laut yang strategis, Indonesia memiliki tantangan dalam pengelolaan ketahanan maritim yang mencakup berbagai dimensi termasuk didalamnya dimensi pertahanan dan keamanan. Penentuan batas-batas yurisdiksi nasional selalu menemui rintangan khususnya dialami oleh negara-negara kepulauan yang memiliki kepentingan memperoleh sumber daya alam laut baik hasil laut seperti perikanan maupun

hasil dibawah perut bumi seperti minyak dan gas. Kasus Sipadan dan Ligita, Celah Timor, Laut Ambalat, Laut China Selatan dan lainnya adalah contoh nyata persoalan batas-batas laut nasional. Hal tersebut dapat memicu dan meningkatkan ketegangan (*disputes*) maupun konflik (*conflicts*) antar negara. Indonesia sebagai negara kepulauan harus terus berusaha meningkatkan yurisdiksi maritim mereka untuk menanggulangi berbagai macampeluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melingkup.

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi dilaut seperti, *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking*/ Penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Bicara penegakkan hukum di laut, bagi Indonesia tidaklah mudah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 wilayah terdiri dari lautan atau perairan, dengan tujuh belas ribu lebih pulau. Hal ini merupakan peluang, harapan, masa depan sekaligus ancaman yang tidak mudah bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk bisa menegakkan kedaulatan maritim di wilayahnya sendiri, salah satunya dengan cara mengontrol wilayah laut Indonesia dengan serius dan berkelanjutan. Indonesia belajar banyak dari masa lalu saat kasus pulau Sipadan dan Ligita yang lepas dari wilayah Indonesia karena kalah diplomasi dari Malaysia di persidangan hukum internasional. Kasus tersebut, menjadi pelajaran penting yang harus terus diingat dijadikan peringatan untuk terus waspada bagi bangsa Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara mengakibatkan banyaknya ancaman dan tantangan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka ancaman tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia (PMD). Penelitian ini dilakukan dengan maksud ingin mengetahui upaya apa dari pemerintah Indonesia dalam rangka penguatan pertahanan laut Indonesia.

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk menenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi bangsa dan negara. Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,

keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Pertahanan negara juga merupakan elemen atau bagian pokok penting suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi segenap warga negara, keutuhan wilayah, dan sistem politik dari ancaman negara lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat KJ Holsti dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut keberadaan atau eksistensi suatu negara. Kebijakan pertahanan suatu negara pada dasarnya sudah ada dalam cetak biru (*blueprint*) yang merupakan strategi besar pertahanan negara. Strategi besar pertahanan ini adalah kebijakan politik yang dihasilkan dua lembaga negara, yaitu presiden dan DPR atau parlemen. Strategi besar pertahanan ini pada prinsipnya adalah pondasi dari prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pertahanan Indonesia.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia agar tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sebab, Prabowo menilai akan ada ancaman yang bisa saja muncul dari bangsa lain yang ingin menghancurkan Indonesia.

Prabowo tidak ingin Indonesia dianggap lemah oleh negara-negara lain. Atas dasar inilah, Prabowo ingin membangun pertahanan Indonesia yang kuat sehingga disegani oleh negara lain.

Prabowo menegaskan jika ingin suatu negara ingin kaya, keamanan juga harus diprioritaskan. Prabowo lalu bicara soal kekuatan negara-negara lain dalam sektor pertahanan.

Menurut penulis, dalam membangun sebuah sistem pertahanan laut nasional yang kuat, paling tidak menyangkut pada empat faktor berikut, yaitu : faktor geografis, faktor sumber daya nasional, faktor ancaman yang akan muncul, dan faktor perkembangan teknologi. Di luar ke-empat faktor tersebut tentu saja masih ada hal-hal penting lainnya untuk bagaimana merumuskan sebuah sistem pertahanan nasional yang lebih luas khususnya pertahanan laut yang efektif dan efisien.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km dan

juga memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara, baik perbatasan darat maupun laut, sehingga perbatasan negara merupakan perwujudan utama dari kedaulatan wilayah negara, dimanamempunyai nilai penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatansumber daya alam, dan peningkatan keamanan serta keutuhan wilayah NKRI.

Permasalahan mengenai kejahatan maritim saat ini telah menjadi ancaman dan jadi perbincangan di kancah internasional, sebab tindak kejahatan ini tidak hanya mencakup pada satu Negara Indonesia saja melainkan sudah jadi kejahatan lintas negara (*Transnational crimes*). Pelakunya pun beragam dan terorganisir secara rapih meliputi kelompok-kelompok yang terdiri lebih dari satu negara. Sampai hari ini, laut masih menjadi jalur perdagangan yang strategis, hampir 90% perdagangan di dunia diangkut melalui laut. Maraknya kejahatan maritim dapat dianalogikan seperti semut, dimana ada gula di situ semut akan berkumpul, sama halnya ketika laut menjadi ramai dengan kegiatan perekonomian, maka di situ pula akan tumbuh subur kejahatan.

Indonesia merupakan “surga” bagi jalur pelayaran dunia dikarenakan letaknya sangat strategis, yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia. Secara tidak langsung wilayah Indonesia merupakan persimpangan bagi kapal dari dunia bagian barat yang ingin berlayar menuju ke arah timur, begitu juga sebaliknya yaitu kapal dari belahan dunia timur yang ingin ke belahan dunia bagian barat. Indonesia juga memiliki beberapa *Choke Points* (titik perlintasan) yang sangat strategis bagi jalur pelayaran dunia, seperti Selat Malaka, Selat Makasar, dan juga Selat Lombok.

Kepulauan Indonesia (ALKI) tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, secara detail adalah sebagai berikut:

1. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A).
2. Jalur pada ALKI II yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.
3. Jalur pada ALKI III-A yang difungsikan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI III-A sendiri mempunyai 4 cabang, yaitu ALKI Cabang III B: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III C: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut

Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya; ALKI Cabang III D: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III E: untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku.

Indonesia juga memiliki luas laut yaitu sekitar 6 juta km lebih, dimana didalamnya terkandung sumber daya alam yang melimpah ruah, terutama sumber daya bidang perikanan yang memiliki potensi produk lestari perikanan laut mencapai sekitar 6,4 juta ton setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi Indonesia jika bisa dikelola dengan baik, bisa juga ini menjadi permasalahan yang serius bahkan menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Keamanan maritime khususnya di wilayah Indonesia menjadi persyaratan mutlak yang harus dimiliki untuk menunjang pemasukan dari sektor maritim.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi pustaka dan fenomenologi. Peneliti kualitatif ingin mendeskripsikan atau memerikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang sesungguhnya dan dalam konteksnya. Ia tidak boleh digiring oleh ilmu atau teori

yang dimilikinya dalam fenomena tersebut. Andai kata itu terjadi, berarti peneliti mencari tafsiran/makna menurut dirinya sendiri sesuai ilmu yang dimilikinya bukan dari pandangan subjek yang diteliti sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap.

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Sesuai dengan desain penelitian tersebut maka penelitian dilakukan terhadap fenomena ancaman di perairan Indonesia, karena pengamanan di perairan atau laut Indonesia yang belum optimal.

Proses penelitian kualitatif adalah penelitian yang belum memiliki masalah, atau keinginan yang

kelas, tetapi dapat langsung memasuki lapangan/objek penelitian. Setelah memasuki objek penelitian tahap awal peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada ditempat itu, masih bersifat umum. Baru ketika pada proses penelitian tahap ke dua yang disebut sebagai tahap reduksi/fokus, peneliti akan memilih mana data yang menarik penting, berguna, dan baru. Selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Tahap selanjutnya atau tahap ke tiga dalam penelitian kualitatif adalah tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus menjadi lebih rinci. Kemudian peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka selanjutnya peneliti dapat menemukan temuan dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sebuah pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.

Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini bukan hanya sekedar menghasilkan Data atau informasi seperti yang sulit di cari halnya pada metode penelitian kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Pembahasan masalah dan analisis dilakukan melalui proses kepustakaan secara mendalam, untuk kemudian disusun dalam laporan dan analisis yang komprehensif dan mendalam.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertahanan negara

Pertahanan Negara dikelola dalam satu sistem pertahanan negara yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,

keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pertahanan merupakan salah satu dimensi dari keamanan nasional, selain dari dimensi-dimensi lainnya. Karena apabila melihat konsep keamanan nasional dari perspektif domain, yaitu melihat cakupan keamanan nasional terdiri dari pertahanan eksternal, keamanan internal, ketertiban public, dan manajemen bencana. Dan sudut pandang obyek yang melihat keamanan adalah sesuatu yang mencakup keselamatan Negara, keselamatan public, dan keselamatan individu. Fakta geografis menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau adalah negara kepulauan terbesar dengan wilayah yurisdiksi laut sangat luas serta penduduk yang sangat beragam. Ancaman yang dihadapi Indonesia dapat berupa ancaman militer maupun ancaman non militer, sehingga kekuatan pertahanan diperlukan untuk menghadapi kedua jenis ancaman tersebut sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Guna menghadapi ancaman yang mungkin timbul, sangat diperlukan penyelenggaraan pertahanan negara yang handal serta yang mempunyai daya tangkal yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan pembangunan kekuatan dan kemampuan secara terus menerus dan berkesinambungan. Sementara itu, kemampuan dukungan anggaran masih sangat terbatas, sehingga perlu disusun berbagai kebijakan agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka menghadapi berbagai ancaman tersebut pada khususnya dan dalam rangka pengelolaan Sistem Pertahanan Negara pada umumnya, sesuai perintah Undang-Undang perlu menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Banyak sekali ancaman dan praktik kejahatan yang menjadi tantangan di laut. Mulai dari pencurian ikan, pelanggaran batas wilayah, perompakan, kecelakaan di laut, penyelundupan, pencemaran di laut, terorisme, hingga invasi. Belum lagi kegiatan perbudakan, perusakan lingkungan, overfishing, konflik, penipuan, serta pencucian uang yang juga termasuk bagian dari persoalan di laut.

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Dengan kedudukannya pada jalur perdagangan dan transportasi laut yang strategis, Indonesia memiliki tantangan dalam pengelolaan ketahanan maritim yang mencakup berbagai dimensi termasuk didalamnya dimensi

pertahanan dan keamanan. Penentuan batas-batas yuridiksi nasional selalu menemui rintangan khususnya dialami oleh negara-negara kepulauan yang memiliki kepentingan memperoleh sumber daya alam laut baik hasil laut seperti perikanan maupun hasil dibawah perut bumi seperti minyak dan gas.

Strategi Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersifat defensif aktif yang mengandung pengertian bahwa pertahanan negara tidak ditujukan untuk melancarkan agresi terhadap negara lain, namun secara aktif menangkal, mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang ditujukan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Strategi pertahanan negara disusun untuk menghadapi segala ancaman terhadap pertahanan negara baik yang bersifat militer maupun nonmiliter sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, "salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan". Sebagai negara kepulauan, dengan masyarakatnya yang sangat beragam dan keberadaannya di posisi silang antara dua benua dan dua samudera, serta kekayaan sumber daya alamnya merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dinamika berbagai aspek kehidupan NKRI. Diantara aspek penting yang dipengaruhi kondisi geografi Indonesia termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang dapat dijelaskan dengan pandangan geopolitik, geo-ekonomi dan geososial budaya, serta secara keseluruhan menjelaskan geostrategi pertahanan Negara Indonesia. Dengan demikian strategi pertahanan negara berkenaan dengan geopolitik, geo-ekonomi, dan geososial budaya diarahkan kepada upaya menjaga kedaulatan politik, ekonomi dan sosial budaya NKRI dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kondisi geografi Indonesia.

Di bidang maritim, strategi pertahanan yang diterapkan adalah Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang pada hakekatnya merupakan strategi pertahanan negara yang dilaksanakan di laut. Penyelenggaraan SPLN dilaksanakan melalui kampanye militer melalui operasi gabungan yang saling terkait, operasi matra dan operasi bantuan dengan dukungan kekuatan nasional. SPLN ditata berdasarkan konsep strategi pertahanan nusantara dengan mengacu kepada perkembangan lingkungan strategi dan kemampuan sumber daya nasional yang tersedia, diselenggarakan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi baik dimasa damai maupun dimasa perang dengan mengerahkan kekuatan nasional.

SPLN berorientasi pada konsep negara kepulauan yang artinya pertahanan laut nusantara harus mempertimbangkan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Visi pemerintah menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan suatu pemikiran yang perlu dilakukan

dalam pembangunan kekuatan berdasarkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

## **B. Pertahanan Laut.**

Strategi pertahanan laut nusantara meliputi :

*Pertama, Strategi Penangkalan*, diarahkan untuk mencegah niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta yang akan merugikan kepentingan nasional melalui diplomasi Angkatan Laut, kehadiran dilaut terutama dikawasan-kawasan perbatasan yang berpotensi menjadi sumber konflik dimasa mendatang, serta membangun kemampuan dan kekuatan TNI AL.

*Kedua, Strategi Pertahanan Berlapis*, diarahkan untuk meniadakan dan menghancurkan ancaman dari luar melalui gelar kekuatan gabungan laut dan udara di medan pertahanan penyanggah (lapis 1), medan pertahanan utama (lapis 2) dan daerah perlawanan (lapis 3), dengan melibatkan kekuatan TNI AL bersama-sama seluruh komponen maritim dan didukung oleh kekuatan TNI AU. Strategi pertahanan berlapis diterapkan pada masa perang dalam bentuk operasi tempur laut yang mempunyai sifat pertahanan ke depan dengan tetap memperhatikan konsep pergeseran medan juang.

*Ketiga, Strategi Pengendalian Laut*, diarahkan untuk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan, memutus garis perhubungan laut lawan serta mencegah meniadakan berbagai ancaman aspek laut dari dalam negeri melalui gelar kekuatan dalam bentuk operasi laut sehari-hari dan operasi siaga tempur laut dengan didukung oleh kekuatan TNI AU diperairan rawan selektif.

Pertahanan nusantara bersifat dualistik komprehensif yaitu mawas ke luar dan mawas ke dalam. Mawas ke luar, dimaksudkan bahwa pertahanan nusantaramenganut konsep pertahanan ke depan agar tidak memberi peluang bagi musuh untuk memasuki wilayah yurisdiksi nasional. Sedangkan mawas ke dalam, mengandung makna bahwa pertahanannusantara mampu menanggulangi setiap bentuk ancaman dari dalam negeri yang telah menyatu dengan ancaman dari luar negeri.

## **C. Ancaman Maritim**

Keamanan (*security*) pada dasarnya merupakan upaya mengelola elemen ancaman (*threat elements*) dengan suatu tujuan akhir terciptanya lingkungan kehidupan pada negara maupun tataran individu yang terbebas dari segala bentuk ancaman (Buzan, 2007).

Worfer (dalam Baldwin, 1997) secara singkat menyampaikan bahwa keamanan bermakna ketidadaannya ancaman. Sementara itu berbagai macam pendekatan dan rumusan keamanan telah dikembangkan oleh para ahli, mulai dari pendekatan realisme, liberalisme, sosial konstruktifisme, keamanan manusia, dan lain sebagainya. Collins(2010), menyatakan bahwa sekalipun telah dirumuskan berbagai macam pendekatan dalam

'keamanan' tetapi secara garis besar, keamanan adalah sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan diri (*survival*) terhadap berbagai ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka keamanan memiliki dua komponen utama, yaitu sumber ancaman dan obyek ancaman suatu obyek yang dapat terancam sehingga perlu dilindungi serta dijaga.

Ancaman maritim Indonesia itu dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, ancaman tradisional yakni klaim tumpang tindih, wilayah abu-abu dan wilayah perselisihan. *Kedua*, ancaman non-tradisional yakni pembajakan, perompakan bersenjata di laut, terorisme, penyanderaan, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api, penyelundupan/ perdagangan manusia dan kerusakan lingkungan (bom ikan, racun ikan). *Ketiga*, ancaman Hybrid/Mix yang mencakup klaim tumpang tindih kawasan penangkapan ikan, pembebasan sandera dan ancaman dunia maya.

Hakikat ancaman sendiri dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang dimana sangat tergantung kepada bagaimana cara pandang suatu entitas memandangnya. Bandoro (2013) menyebutkan ancaman sebagai segala jenis hal baik yang bersifat masih dalam potensi maupun bentuk aktifitas yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan termasuk upaya mengubah hakikat suatu negara berdaulat baik yang datang dari luar maupun dalam wilayah negara. Sementara itu Buzan (2007) melihat ancaman sebagai segala sesuatu yang memungkinkan terganggunya terpengaruhnya obyek referensi. Sehingga bersama dengan Wilde dan Waever, Buzan (dalam Buerger, 2014) menjelaskan 'ancaman' dapat dikonstruksikan dalam rangkaian pengakuan (*a series of claims*) yang menyatakan suatu pernyataan yang generik terkait dengan perlindungan terhadap suatu rujukan obyek tertentu. Oleh karena itu, konstruksi ancaman biasanya disertai dengan usulan upaya untuk mengatasinya dalam kondisi ekstrem usulan upaya tersebut akan melibatkan kekuatan militer yang dapat mengurangi bahkan menghapuskan hak-hak kebebasan sipil. David (2013) menyatakan ancaman merupakan sesuatu yang direferensikan oleh suatu organisasi oleh karena dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu eksistensi maupun operasi organisasi sehingga menjadi pusat perhatian dan perlu diatasi secara seksama.

Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia dengan luas total perairan 6,4 juta kilometer persegi dan terdiri dari 17.504 pulau. Didominasi oleh perairan, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah ancaman keamanan laut. Sedikitnya ada delapan bentuk ancaman faktual dan berpotensi terjadi di perairan Indonesia.

Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan dalam diskusi daring bertema "Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia", ancaman tersebut berupa pelanggaran

wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan, kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*), penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran, terorisme, dan invasi.

"Ancaman paling berbahaya yaitu masalah *trans organized crime* seperti penyelundupan, perbudakan, narkoba, komoditas minerba. Ini merupakan ancaman yang perlu kita tindak lanjuti," kata Aan, Jumat (5/6).

Aan mengungkapkan, dari rentetan ancaman itu, yang paling kerap terjadi adalah penangkapan ikan secara ilegal, seperti terjadi di perairan Natuna Utara dan dilakukan oleh kapal-kapal asing.

#### **D. Kekuatan Laut**

Istilah Kekuatan Maritim atau Maritime Power, pada dasarnya terdiri dari dua sub-sistem yang meliputi kekuatan laut atau sea power dan kekuatan angkatan laut atau sea force, keduanya merupakan komplemen satu dengan lainnya dalam membangun kekuatan maritim. Esensi kekuatan laut bagi suatu negara adalah sejauh mana kemungkinan negara dapat menggunakan dan memanfaatkan laut secara efektif untuk kepentingan negaranya. Hal ini mengandung pengertian luas, termasuk di dalamnya aktivitas perdagangan, pelayaran, industri maritim dan pemanfaatan sumberdaya laut serta potensi-potensi strategis lainnya yang dimiliki secara maksimal. Sedangkan kekuatan angkatan laut diperlukan untuk melindungi dan mengamankannya. Namun dalam prakteknya, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan maksud yang sama, yaitu sumber daya laut dan seluruh potensi strategis yang dimilikinya.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri juga bahwa kekayaan alam khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh pihak asing, dan tidak sedikit yang sifatnya ilegal dan mementingkan kepentingan sendiri.

Sebagaimana halnya teori lain yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kekuatan maritim, yaitu posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, serta yang paling penting adalah karakter pemerintahannya.

#### **E. Strategi Pertahanan Laut**

Secara khusus Angkatan Laut memiliki peran-peran yang unik. Peran tersebut adalah :

1. Peran militer, yang ditegakkan dalam rangka menegakkan kedaulatan di laut dengan cara mengupayakan pertahanan negara dan pangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap rencana militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.

2. Peran polisional (*constabulary*), yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.
3. Peran diplomasi (*naval diplomacy*, unjuk kekuatan angkatan laut, *gun boat diplomacy*) merupakan dukungan diplomasi dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara baik dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

Penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, sehingga kedua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain. Sistem Pertahanan Negara, yaitu Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) diletakkan dalam format negara modern melalui kebijakan politik negara, sehingga memberi kesadaran dan tanggung jawab kepada masyarakat bahwa masalah pertahanan negara bukan hanya urusan TNI semata, melainkan masalah seluruh bangsa.

Demikian pula menyangkut pembangunan kemampuan pertahanan negara, bukan hanya tanggung jawab TNI atau Kementerian Pertahanan, melainkan juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa yang meliputi pemerintahan dan segenap komponen masyarakat.

#### **Penggunaan Kekuatan Laut dalam Diplomasi**

Penggunaan kekuatan laut dalam mendukung politik luar negeri tidak dengan menggunakan senjata, tetapi kekuatan laut ini digunakan sebagai suatu isyarat atau pesan. Penggunaan kekuatan laut ini dapat dilakukan dengan pesan/isyarat sebagai berikut: mengkomunikasikan niat suatu negara, menegosiasikan masalah bilateral dua negara, menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk memperoleh *bargaining power* yang lebih baik dalam menciptakan pembentukan pengaruh suatu negara terhadap negara lain baik pada masa damai maupun perang. Pada masa damai, dilakukan dalam bentuk kunjungan kapal perang ke suatu negara. Kunjungan kapal perang Taiwan ke Indonesia, hampir setiap tahun adalah suatu contoh diplomasi AL yang bertujuan untuk menyatakan eksistensi/keberadaan Taiwan terhadap masyarakat internasional, bahwa Taiwan diakui oleh banyak negara sebagai negara berdaulat, dalam rangka menghadapi kebijakan RRC yaitu "*one China policy*". Muhibah ini juga disebut pameran bendera (*Showing The Flag*). *Naval diplomacy* dikatakan sebagai penggunaan kapal perang untuk mendukung politik luar negeri suatu Negara dengan cara memberi sinyal dan bukan dengan cara melepaskan tembakan. Pada

intinya adalah komunikasi yaitu dengan cara bernegosiasi dengan menunjukkan kemampuan/kekuatan yang kita miliki yang lebih dikenal dengan *showing the flag*.

#### **Keamanan Laut Harus Terintegrasi**

Pengamanan laut Indonesia saat ini masih sektoral. Butuh satu lembaga yang memiliki payung hukum yang jelas dan tegas sehingga tidak terjadi tumpang-tindih peraturan. Indonesia memiliki kekayaan laut yang cukup besar. Bahkan, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI) mengungkapkan nilai kekayaan laut di Indonesia mencapai Rp1.772 triliun dari potensi mangrove, terumbu karang, perikanan, minyak bumi, hingga transportasi laut. Dari besarnya potensi itu, wajar saja jika Presiden Joko Widodo mewacanakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sayangnya, masalah di perairan Indonesia masih cukup pelik. Luasnya perairan Indonesia tidak berjalan seimbang dengan upaya pengamanan wilayah laut dari tindak pelanggaran hukum. Beragam pelanggaran terjadi, dari penangkapan ikan secara ilegal, transaksi ilegal kapal minyak, pencucian uang, penyelundupan orang, senjata dan barang ilegal, imigran, perompak laut, hingga terorisme. Presiden pun ingin menciptakan Indonesia Coast Guard yang memiliki kewenangan dan mengatasi masalah di perairan. Pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Saut Gurning, mengungkapkan secara umum pengamanan perairan Indonesia untuk wilayah domestik atau keamanan laut domestik relatif baik. Masalah yang mungkin sering terjadi dalam beberapa waktu belakangan, katanya, yaitu persoalan keamanan laut di perbatasan. "Hal ini mulai dari intervensi patroli armada asing, termasuk masuknya armada nelayan asing melewati batas wilayah perairan dalam atau domestik nasional hingga kejadian dibajaknya awak kapal Indonesia oleh kelompok pengganggu keamanan Abu Sayyaf di Filipina," ungkapnya. Menurut Saut, dari tendensi kejadian itu, kualitas pengamanan domestik Indonesia dapat dikatakan baik. Perhatian lebih besar mungkin perlu bergeser kepada pengamanan wilayah perbatasan, baik untuk aktivitas pelaut kita ke maupun dari wilayah internasional, termasuk menghalau usaha sengaja melewati batas laut nasional, khususnya untuk operasi perikanan tangkap yang ilegal. Ia menjelaskan keamanan nasional punya korelasi kuat terhadap kedaulatan dan optimalisasi sumber daya laut nasional. Pasalnya, usaha sengaja melewati batas wilayah teritorial nasional sama dengan usaha melawan kedaulatan bangsa, khususnya wilayah perairan nasional. Ia mengakui bahwa baru pada masa Presiden Joko Widodo ini, pemerintah punya komitmen menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, khususnya lima pilar utama. Namun, ungkapnya, masih banyak agenda dan usaha yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat berbagai posisi maritim nasional. "Termasuk

memperkuat armada kapal nasional dalam berbagai ukuran, konektivitas, aksesibilitas, serta infrastruktur laut nasional. Tidak hanya untuk angkutan barang, namun juga pariwisata dan eksploitasi berbagai potensi material tambang kita di laut," pungkasnya.

#### Tantangan ke Depan

TNI dalam hal ini salah satu Organisasi Militer yang akan melibatkan seluruh kemampuannya dalam seluruh bidang untuk menjaga keutuhan NKRI dari multi ancaman. Ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan bagi seorang pimpinan TNI. Dengan perkembangan teknologi di dunia yang sangat pesat maka akan dapat merubah semua konsep dasar dan tujuan TNI ke depan. Pimpinan Tertinggi TNI harus dapat mengawali secara umum semua permasalahan baik dalam bentuk ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) bangsa ini, tidak hanya ahli di satu matra saja, dan harus terus mengikuti era perkembangan zaman.

Mengingat ancaman 5-20 tahun kedepan bentuk ancaman yang tidak terlihat itulah yang akan menghancurkan suatu negara. Untuk itu TNI ke depan harus adaptif dan multi rool dihadapkan dengan tehnologi peperangan dan adanya pergeseran peperangan dari hard war ke soft war serta perang modern sehingga mampu menaklukkan semua ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Nasional.

Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Laksamana Muda TNI Yusup menjelaskan ancaman keamanan yang datang dari pihak luar sangat berpotensi mengganggu kedaulatan laut negara.

"Oleh sebab itu dalam menjaga stabilitas kedaulatan laut NKRI pemerintah membuat peraturan perundang-undangan keamanan laut yang dijalankan oleh kementerian atau lembaga terkait," ujarnya. Namun, banyaknya peraturan perundang-undangan di laut yang dijalankan oleh 13 kementerian dan lembaga negara mengakibatkan kurang optimalnya sistem operasi keamanan laut Indonesia. "Maka dibutuhkan sistem keamanan laut yang tangguh melalui penguatan organisasi Bakamla dengan metode patroli *Single Agency Multi Task* (SAMT), model *unity of command*," tutur Yusup.

#### 4. KESIMPULAN REKOMENDASI DAN PEMBATAAN

Tantangan dan tugas TNI AL ke depan berkaitan erat dengan dinamikaperkembangan dari lingkungan strategis yang semakin kompleks dan sulit diprediksi baik di tingkat global, regional maupun tingkat nasional. Keberlangsungan pembangunan kekuatan maritim dalam rangkamewujudkan Indonesia sebagai PMD sangat tergantung pada stabilitas keamanan maritime

diwilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia dan di kawasan. TNI Angkatan Laut sebagai komponenutama pertahanan negara di laut telah dan selalu secara maksimal untuk meningkatkan kekuatan dankemampuan agar dapat melaksanakan tugas dan perannya dalam bidang pertahanan negara di laut serta mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam membangun sektor kelautan atau maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi yang strategis dandihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis, maka suatukeharusan bagi kita untuk memiliki Angkatan Laut yang kuat, handal dan modern agar mampumenghadapi setiap ancaman dan tantangan bangsa ke depan yang akan semakin besar, sulit, kompleks,dinamis dan multi dimensi. Dalam rangka mewujudkan visi Presiden Jokowi dalam kaitannya dengan PMD ini dibutuhkan peran aktif dan nyata serta berkesinambungan denganmengedepankan sinergitas antar entitas di laut dari seluruh komponen bangsauntuk mewujudkan pertahanan Negara di laut yang tangguh dengan mempertimbangkangeopolitik dan geoekonomi negara yang berwawasan kemaritiman, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan pertahanan Negara khususnya di laut yang berwawasan maritim.

Oleh karena itu, diperlukan terobosan yang baru dan berani duduk bersama semua stakeholder untuk merumuskan suatu perencanaan strategi yang matang dan terintegrasi untuk pembangunan pertahanan maritim negara yang mengkolaborasikan semua potensi kemampuan pertahanan Negara yaitu antar matra TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), kementerian, maupun dengan lembaga pemerintah lainnya, serta tetap berpegang pada prinsip – prinsip transparansi dan akuntabel. Walaupun UU No. 34 telahmenyebutkan peran utama TNI-AL dalam kemaritiman, penanganan keamanan maritim Indonesia melibatkan tujuh lembaga yang berbeda yaitu TNI, Kepolisian RepublikIndonesia (Polri), Bea Cukai, Imigrasi, kementerian perhubungan, kementerian lingkungan hidup, dan badan koordinasikeamanan laut (Bakamla). Disaat yang bersamaan kedaulatan wilayah laut yang merupakan bagian penting dalam keamanan maritim dengan aspek keamanan nasional melibatkan lima lembaga, yaituTNI, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian hukum dan HAM.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- A, I. N. P., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *Asro Jurnal-STTAL*, 6, 22.
- Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90.

- Indrawan, J. (2018). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 93–114.
- Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4(2), 17–36.
- Partogi, P., Poros, K., Dunia, M., Widodo, J., & Nainggolan, P. P. (2015). KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA JOKO WIDODO DAN IMPLIKASI INTERNASIONALNYA (Maritime Axis Policy and Its International Implications). *Politica*, 6, 167–190.
- Supandi, A. (2015). Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia the. *Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2*, 5, 1–24.
- Utama, A. P., Trismadi, & Purwanto. (2018). Alur Laut Kepulauan Indonesia Pasca Merdekanya Republik Demokrasi Timor Leste. *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, 4(3), 1–20.
- Yani Antariksa, A. (2014). Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik Di Kawasan Pada Masa Depan Indonesian Naval Diplomacy in the Context of Future Regional Geopolitical Downshift. *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 1.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Alfabeta.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan* (Ed. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yusuf, A. M. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. In *BMC Public Health* (Cet. 4). Kencana.
- Yahya, A.P. (2020). “Antisipasi Ancaman, Ini Strategi Kepala Bakamla Jaga Keamanan Maritim”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/11135761/antisipasi-ancaman-ini-strategi-kepala-bakamla-jaga-keamanan-maritim>, 23 Juni 2020, diakses pada 11 November 2020.
- Setiadji, A. (2017). “Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim”, dalam <http://maritimnews.com/2017/05/kekuatan-pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara-maritim/>, 18 Mei 2017, diakses pada 11 November 2020.
- Bisnis Liputan6.com. (2020). “Pengamat Maritim Ungkap Kondisi Terkini Pengelolaan Pelabuhan oleh Swasta dan BUMN”, dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4160777/pengamat-maritim-ungkap-kondisi-terkini-pengelolaan-pelabuhan-oleh-swasta-dan-bumn>, 21 Januari 2020, diakses pada 13 November 2020.
- Detik News. (2020). “Salah Kalau Menteri Pertahanan Banyak Bicara”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5211118/prabowo-salah-kalau-menteri-pertahanan-banyak-bicara>, 13 Oktober 2020, diakses pada 13 November 2020.
- DPP INSA. (2019). “Ancaman Maritim Indonesia Masih Akan Terus Berkembang”, dalam [http://dppinsa.com/content/detail/ancaman\\_maritim\\_indonesia\\_masih\\_akan\\_terus\\_berkembang](http://dppinsa.com/content/detail/ancaman_maritim_indonesia_masih_akan_terus_berkembang), 19 September 2019, diakses pada 11 November 2020.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2018). “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia”, dalam <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia>, 16 April 2018, diakses pada 13 November 2020.
- Indonesia.go.id. (2019). “Indonesia Poros Maritim Dunia”, dalam <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>, 25 Februari 2019, diakses pada 11 November 2020.
- Hardiana, I & Trixie, B. (2014). “Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim”, dalam <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, 2014, diakses pada 11 November 2020.
- Kompasiana.com. (2015). “Strategi Pertahanan Laut Nusantara”, dalam <https://www.kompasiana.com/cipluk/5528d7ed6ea834d97c8b45b6/strategi-pertahanan-laut-nusantara>, 24 Juni 2015, diakses pada 13 November 2020.
- Mediaindonesia.com. (2020). “Keamanan Maritim Tergantung Sikap Politik”, dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/320311-keamanan-maritim-tergantung-sikap-politik>, 13 Juni 2020, diakses pada 11 November 2020.
- Berlian, M. A. (2019). “TNI Saat Ini & Tantangan ke Depan”, dalam <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/17/337/2130933/tni-saat-ini-tantangan-ke-depan>, 17 November 2019, diakses pada 13 November 2020.
- VOA. (2020). “Bakamla Ungkap Sejumlah Ancaman Keamanan Laut Indonesia”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/bakamla-ungkap-sejumlah-ancaman-keamanan-laut-indonesia/5450902.html>, 5 Juni 2020, diakses pada 13 November 2020.

## STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Oleh:

Ichsanul Mutaqin Ali<sup>1)</sup>, Lukman Yudho P<sup>2)</sup>, Dohar Sianturi<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Universitas Pertahanan  
<sup>1</sup>piutrigk18@gmail.com,  
<sup>2</sup>kamalekumdeplek@gmail.com,  
<sup>3</sup>sianturi\_dohar@yahoo.co.id

### Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang strategi pertahanan laut yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim. Bangsa Indonesia memiliki keunggulan letak yang sangat strategis, namun keunggulan letak geografis dan jalur perdagangan laut strategis tersebut mengundang datangnya beberapa ancaman seperti hadirnya kekuatan militer negara-negara adidaya, munculnya pelaku kejahatan seperti penyelundupan, perdagangan manusia, narkoba dan lain-lain). Untuk itu strategi pertahanan laut yang dapat di terapkan untuk menangkal segala macam bentuk ancaman adalah dengan meningkatkan kemampuan deteksi dini di laut. Salah satunya adalah dengan cara mengoptimalkan dan memanfaatkan peran Pusat Informasi Maritim TNI yang berkolaborasi dengan para stake holder, sehingga seluruh penegak hukum di laut dapat mengetahui secara cepat indikasi akan terjadinya kejahatan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tulisan ini menunjukkan bahwa banyak hal yang harus dibenahi dalam penerapan strategi pertahanan laut untuk menanggulangi ancaman maritim. Dibutuhkan kerjasama yang lebih intensif dan interaksi yang terintegrasi antar lembaga terkait agar upaya penanggulangan ancaman maritim dapat diminimalisir dengan efektif.

**Kata Kunci :** Lingkungan Strategis, Deteksi Dini, *Stake Holder*, KeamananMaritim, ancaman.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah maritime yang sangat luas. Garis pantainya sekitar 81.000 km. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia terdiri atas 3,1 juta km<sup>2</sup> luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km<sup>2</sup> wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari data tersebut dapat dihitung bahwa luas wilayah laut Indonesia adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia . Didalamnya dimensi pertahanan dan keamanan. Penentuan batas-batas yurisdiksi nasional selalu menemui rintangan khususnya dialami oleh negara-negara kepulauan yang memiliki kepentingan memperoleh sumber daya alam laut baik hasil laut seperti perikanan maupun hasil dibawah perut bumi seperti minyak dan gas. Kasus Sipadan dan Ligita, Celah Timor, Laut Ambalat, Laut China Selatan dan lainnya adalah contoh nyata persoalan batas-batas laut nasional. Hal tersebut dapat memicu dan meningkatkan ketegangan (disputes) maupun konflik (conflicts) antar negara. Indonesia sebagai negara kepulauan harus terus berusaha meningkatkan yurisdiksi maritim mereka untuk menanggulangi berbagai macam peluang (opportunities) dan ancaman (treath) yang melingkup.

Kepemerintahan Presiden Jokowi Widodo telah menetapkan kebijakan kemaritiman nasional

melalui konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Konsep ini disampaikan Presiden Jokowi Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS), 13 November 2014. Melalui konsep PMD maka agenda pembangunan nasional akan difokuskan pada lima pilar utama , yaitu:

- Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
- Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
- Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
- Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
- Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Pada dasarnya, kelima pilar PMD tersebut meliputi aspek budaya, ekonomi, konektifitas, diplomasi, dan keamanan maritim.

Rumusan Masalah dalam Tulisan ini adalah, bisa dilihat di dalam kaitan antara perkembangan lingkungan strategis yang melingkupi Indonesia dan kebijakan nasional yang ditempuh oleh pemerintah

Indonesia. Tetapi, pengaruh perubahan lingkungan strategis pada aspek keamanan maritim. Dengan demikian penulis mencoba menuangkan dalam dua pertanyaan besar, yaitu:

- a. Bagaimana analisis lingkungan strategis pada aspek keamanan maritim Indonesia?
- b. Bagaimana tingkat pengaruh perubahan lingkungan strategis kepada keamanan maritim Indonesia?

Sedangkan mamfaat tulisan ini adalah :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Pemimpin TNI/TNI Angkatan Laut dalam menentukan kebijakan dalam merumuskan kebijakan strategi Pertahanan Negara di Laut terhadap perubahan lingkungan strategis sebagai dampak pada keamanan maritime Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori-teori yang terkait pengembangan Strategi Pertahanan Negara di Laut dalam mendukung tugas pokok pada kegiatan dan pelaksanaan tugas militer.
- c. Memberikan kontribusi akademis dalam perumusan dan penelitian design Model Sistem Informasi Pertahanan Negara di Laut (SISNFOHANLA) sebagai pendukung tugas kegiatan terseruktur.

Terkait Lingkungan Strategis, terdapat penjelasan bahwa lingkungan strategis merupakan berbagai konteks, kondisi, hubungan, tren, isu, ancaman, peluang, interaksi, dan dampak terhadap internal maupun eksternal suatu entitas Negara yang mempengaruhi keberhasilannya dalam menjalin hubungan dengan dunia fisik, entitas Negara-negara lain (state actors), aktor non-negara (non-state actors), kesempatan dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan . Aktor non-negara tersebut dapat berupa organisasi-organisasi di sektor privat baik yang berorientasi profit maupun non-profit. Oleh karena itu, lingkungan strategis menjadi ruang dan waktu dimana entitas Negara tumbuh, berkembang, ataupun mengalami kehancuran. Apa yang terjadi ataupun akan terjadi pada lingkungan strategis pada dasarnya bersifat mungkin terjadi, dapat diprediksi, masuk akal, dan tidak/belum diketahui. Akan tetapi, lingkungan strategis menunjukkan dua karakteristik sekaligus yaitu keteracakan (randomness) maupun keteraturuan (order) sehingga tidak sepenuhnya tidak dapat terprediksi, acak atau tidak terkontrol . Situasi tersebut diatas menjadikan lingkungan strategis sebuah fenomena dengan kekompleksitas yang tinggi. Hubungan antar elemen dalam lingkungan strategis begitu kompleks (Complexity). Perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi semakin tidak mudah dalam lingkungan strategis karena sifat kebiasaan (Ambiguity). Perubahan dan perkembangan lingkungan strategis mempunyai implikasi pada output kebijakan dan arah orientasi institusi politik. Hal ini akan membawa implikasi, baik positif maupun negatif sekaligus secara bersamaan. Implikasi positif akan membawa manfaat dalam

mendukung cita-cita, tujuan dan kepentingan politik, sedangkan implikasi negatif menyebabkan peningkatan potensi ancaman bagi keberlangsungan politik. Dimensi politik- pemerintah-hukum, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, teknologi, dan persaingan antar entitas perlu dipindai dalam lingkungan strategis .

Sementara itu, Kepentingan nasional (national interest) merupakan sesuatu yang harus dicapai, dipelihara, dan dijaga oleh entitas Negara. Drew dan Snow menjelaskan Kepentingan nasional dibedakan menjadi bertahan hidup (survival), vital (vital), terutama (major), dan sisi luar (peripheral) . Nuechterlein menjelaskan kepentingan survival merupakan kepentingan nasional pada tingkat intensitas pertama yang hadir untuk mempertahankan eksistensi fisik sebuah bangsa dari bahaya akan serangan (attack) ataupun ancaman serangan (threat of attack). Pada tingkat intensitas kedua, kepentingan vital terjadi ketika sebuah bangsa melindungi kepentingan nasionalnya dengan menggunakan berbagai upaya kekuatan dari keadaan-keadaan yang dipertimbangkan serius untuk dihadapi. Ada dua karakteristik dari kepentingan vital, yaitu pertama, ketika sebuah bangsa merasa tidak ingin berkompromi kepada sesuatu hal. Kedua, ketika sebuah bangsa memutuskan akan menempuh jalur perang. Biasanya, kepentingan vital berkaitan dengan kedaulatan sebuah Negara-bangsa kepada Negara-bangsa lainnya. Pada tingkat intensitas ketiga adalah kepentingan major merupakan suatu kepentingan terganggu atau terpengaruh yang tidak memerlukan penggunaan kekuatan kepada bangsa seperti politik negara, ekonomi dan sosial. Pada batas intensitas kepentingan antara vital dan major inilah wilayah yang paling sulit dimana menentukan waktu yang tepat atas penggunaan kekuatan militer saat berbagai kepentingan terkait politik, ekonomi, dan sosial telah terganggu oleh pihak lawan tertentu. Pada tingkat intensitas keempat, yaitu peripheral merupakan beberapa kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh suatu dampak situasi tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan kepentingan nasional.

Keamanan (security) pada dasarnya merupakan upaya mengelola elemen ancaman (threat elements) dengan suatu tujuan akhir terciptanya lingkungan kehidupan pada negara maupun tataran individu yang terbebas dari segala bentuk ancaman . Worfer secara singkat menyampaikan bahwa keamanan bermakna ketidadaannya ancaman. Sementara itu berbagai macam pendekatan dan rumusan keamanan telah dikembangkan oleh para ahli, mulai dari pendekatan realisme, liberalisme, sosial konstruktifisme, keamanan manusia, dan lain sebagainya. Penjelasan lain menyatakan bahwa sekalipun telah dirumuskan berbagai macam pendekatan dalam 'keamanan' tetapi secara garis besar, keamanan adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebertahanan diri (survival) terhadap berbagai ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka

keamanan memiliki dua komponen utama, yaitu sumber ancaman dan obyek ancaman suatu obyek yang dapat terancam sehingga perlu dilindungi serta dijaga. Hakikat ancaman sendiri dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang dimana sangat tergantung kepada bagaimana cara pandang suatu entitas memandangnya. ancaman sebagai segala jenis hal baik yang bersifat masih dalam potensi maupun bentuk aktifitas yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan termasuk upaya mengubah hakikat suatu negara berdaulat baik yang datang dari luar maupun dalam wilayah negara. Selain ancaman, maka suatu entitas perlu memperhatikan pula peluang (opportunity) yang muncul dari lingkungan.

Terminologi keamanan maritim memberikan berbagai makna yang sangat beragam terhadap orang maupun organisasi tergantung bagaimana kepentingan organisasi dan menyarankan 3 kerangka penting untuk merumuskan konsep keamanan maritim yaitu: keamanan maritim matriks (maritime security matrix), kerangka sekuritisasi maritim (securitization framework), kelompok pengguna praktek keamanan (Security Practice and Communities of Practice). Melalui kerangka keamanan maritim matriks, suatu entitas dapat dipetakan bagaimana akan merumuskan keamanan maritimnya pada empat dimensi, yaitu keamanan nasional (national security), keamanan ekonomi (economy security), keamanan manusia (human security), dan lingkungan maritim (marine environment). Dimensi keamanan nasional bertumpu pada perspektif tradisional yang memandang keamanan nasional (national security) sebagai upaya melindungi keberlangsungan negara sehingga kekuatan laut (sea power) yang diwakili oleh Angkatan Laut (naval forces) sebagai kekuatan yang dominan terkait maritim. Dengan demikian, dalam dimensi ini keamanan maritim identik atau berkaitan dengan penggunaan kekuatan angkatan laut.

Lingkungan strategis sebagai lingkungan yang berkategori makro dapat dianalisis menggunakan perangkat PESTEL (Politics, Economy, Social-Culture, Technology,

Environmental, Legal). Analisis tersebut hanya mengukur elemen-elemen yang relevan mempengaruhi kehidupan atau jalannya suatu organisasi atau entitas tertentu pada periode yang telah ditentukan. Kemudian penilaian tingkat pengaruh elemen-elemen tersebut akan dilakukan relatif terhadap organisasi atau entitas tertentu tersebut. Melalui analisis Dengan demikian lingkungan strategis yang melingkupi keamanan maritim akan dinilai melalui faktor-faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum jika tiap faktor tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap keamanan maritim. Di tiap faktor-faktor tersebut akan dipilih beberapa variabel fenomena yang akan menjadi dasar untuk menilai

tingkat pengaruh tiap faktor tersebut kepada keamanan maritim.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan adalah melakukan pendalaman data-data berdasarkan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut dokumen Buku Putih Pertahanan Indonesia, kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam dokumen buku putih sebelumnya tersebut disebutkan kepentingan nasional Indonesia disusun dalam tiga kategori, yaitu bersifat mutlak, vital, dan penting. Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kepentingan nasional yang bersifat mutlak sehingga segala daya upaya perlu dilakukan untuk kepentingan tersebut. Sementara itu memastikan tetap berlanjutnya pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil, makmur, dan demokratis merupakan kepentingan nasional yang bersifat vital. Sedangkan kepentingan nasional memiliki kategori bersifat penting ketika Indonesia berkepentingan untuk turut menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Ada tiga kaidah pokok untuk mewujudkan kepentingan nasional, yaitu tata kehidupan, upayan pencapaian tujuan, dan sarana yang digunakan. Pencermatan kesatuan tata nilai dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kebhinekaan dalam interaksi sosial yang harmonis adalah kaidah pokok dalam perwujudan kepentingan nasional.

Kaidah upaya pencapaian tujuan menitik beratkan perhatian kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memiliki sifat keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara. Penggunaan seluruh potensi dan kekuatan nasional dilakukan dengan menyeluruh dan terpadu adalah titik tolak dari kaidah pokok sarana yang digunakan. Dalam konteks maritim, kepentingan nasional tersebut akan mengarahkan bagaimana keamanan maritim akan diterjemahkan. Berdasarkan persepektif kepentingan nasional tersebut dihadapkan dengan keamanan maritime maka keamanan maritim Indonesia tampak lebih bercorak kepada keamanan nasional (national security), keamanan manusia (human security), dan keamanan ekonomi (economy security). Sementara lingkungan maritime (marine environment) relatif masih kurang ditekankan, yaitu hanya pada turunan dari pernyataan kepentingan nasional itu sendiri yaitu dijelaskan dalam kaidah-kaidah pokok.

Lebih lanjut Kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang mencakup lima pilar:

- a. Membangun kembali budaya maritim Indonesia (pilar budaya).
- b. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. (pilar ekonomi).
- c. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. (pilar konektivitas).
- d. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. (pilar diplomasi).
- e. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (pilar keamanan maritim).

Menilik kebijakan PMD dalam kerangka konsep keamanan maritim tersebut pada dasarnya adalah "konsep keamanan maritim" itu sendiri. Oleh karena itu ketika pilar keamanan maritim merupakan salah satu pilar dalam kebijakan PMD menjadi bias dan rancu. Pilar budaya dan ekonomi dalam matriks keamanan maritim dapat masuk kedalam aspek keamanan manusia dan keamanan ekonomi. Pilar konektivitas condong sangat kuat kedalam aspek keamanan ekonomi dan lingkungan maritim. Pilar diplomasi dan keamanan maritim menjelaskan aspek keamanan nasional. Dalam sudut pandang kerangka sekuritisasi juga menjelaskan bagaimana cara pandang pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang mewakili NKRI mengenai apa yang seharusnya di

jaga dari berbagai bentuk ancaman dalam konteks kemaritiman. Atau dengan kata lain, secara tidak langsung pemerintah memandang bahwa segala sesuatu yang mengganggu atau menyerang kelima pilar tersebut adalah suatu bentuk ancaman atas keamanan maritim Indonesia. Itulah suatu bentuk serangkaian konstruksi ancaman dalam bentuk pernyataan generik oleh pemerintah Indonesia saat ini yang mewakili NKRI. Akan tetapi sebagaimana Buzan, sampaikan bahwa konstruksi ancaman tersebut akan berhasil jika disampaikan oleh aktor yang memiliki otoritas dan relevan dengan target audiens yang menerima konstruksi tersebut. Syarat aktor yang memiliki otoritas telah terpenuhi, yaitu Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kepemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sedangkan target audiens yang menerima konstruksi tersebut sebagai ancaman merupakan area yang masih abu-abu (grey areas) disebabkan sudah sekian lama bangsa Indonesia tidak cukup memahawi realitas maritim dalam cara pandangnya. Dengan demikian dari sudut pandang kerangka ini terlihat kecenderungan bahwa konstruksi ancaman keamanan maritim masih berada pada sisi aktor yang memiliki otoritas saja, yaitu pemerintah Indonesia yang menampuk kekuasaan saat ini. sekian lama bangsa Indonesia tidak cukup memahami realitas maritim dalam cara pandangnya. Dengan demikian dari sudut pandang kerangka ini terlihat kecenderungan bahwa konstruksi ancaman keamanan maritim masih berada pada sisi aktor yang memiliki otoritas saja, yaitu pemerintah Indonesia yang menampuk kekuasaan saat ini. menunjukkan aspek nasional keamanan yang sangat kental. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 dalam *Oceans and the Law of the Sea* menjelaskan tujuh macam konstruksi ancaman maritim yaitu pembajakan dan perampokan bersenjata, aksi teroris, lalu-lintas ilegal persejataan pemusnah massal, lalu-lintas narkoba, penyelundupan dan penjualan manusia melalui laut, ilegal fishing, dan kerusakan lingkungan laut dengan disengaja dan melawan hukum. Jika dibandingkan dengan rumusan ancaman maritim pembentuk keamanan maritim yg disampaikan oleh PBB tampak lebih spesifik dibandingn kebijakan PMD sehingga ketujuh konstruksi ancaman tersebut telah semuanya masuk kedalam kebijakan PMD.

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab 3.2, maka penyebutan keamanan maritim Indonesia pada penulisan ini ada pada aspek keamanan nasional yang akan menjadi domain kekuatan TNI AL. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia disebutkan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara baik yang bersifat aktual maupun potensial adalah faktor ancaman yang bersifat militer, non- militer, dan hibrida. Ketiga sifat ancaman tersebut dapat berbentuk ancaman nyata dan belum nyata. Selanjutnya Buku Putih Pertahanan Indonesia menjelaskan ancaman nyata adalah bentuk ancaman yang memiliki tingkat keterjadiannya tinggi

yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena kerap kali terjadi maka ancaman nyata mendapatkan prioritas penanganan, meliputi radikalisme-terorisme, separatisme- pemberontakan bersenjata, perompakan- pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan cyber-spionase, dan peredaran- penyalahgunaan narkoba Sedangkan ancaman belum nyata lebih berorientasi kepada bentuk konflik terbuka ataupun perang konvensional, berhadapannya dua. kekuatan angkatan bersenjata dari negara yang berbeda. Jika menggunakan pendekatan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Wingarta menyebutkan maka lingkungan strategis dipetakan dalam gatra alamiah (natural determinants) yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan gatra sosial (social determinants) yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Keseluruhan gatra tersebut disebut juga dengan delapan gatra atau astragatra. Gatra alamiah disebut juga dengan trigatra yang memiliki sifat statis. Sedangkan gatra sosial disebut juga dengan pancagatra yang memiliki sifat dinamis. Ancaman nyata dan belum nyata akan berdampak kepada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. lingkungan strategis yang memunculkan situasi ancaman dan peluang dapat dilihat melalui faktor-faktor politik, ekonomi, Dengan demikian, lingkungan strategis yang melingkupi keamanan maritim Indonesia dalam aspek keamanan nasional yang diwakili oleh kekuatan TNI-AL sehingga akan memunculkan peluang dan ancaman dari tinjauan faktor politik-hukum, ekonomi, pertahanan-keamanan, sosial-budaya, teknologi, dan lingkungan.

Pembahasan mengenai wilayah dan kedaulatan maritim sebuah Negara telah menjadi diskusi penting di mata dunia sejak dulu. Untuk mengatur Zona Ekonomi Eksklusif, PBB mengadakan konferensi hukum laut pertama pada tahun 1958 dan konferensi hukum laut yang kedua pada tahun 1960 yaitu yang lebih dikenal dengan istilah UNCLOS I dan UNCLOS II. Dalam konferensi hukum laut pertama ini melahirkan 4 buah konvensi, dan isi dari konvensi UNCLOS pertama ini adalah: (1) Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone) belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II; (2) Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas): a. Kebebasan pelayaran, b. Kebebasan menangkap ikan, c. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa, d. Kebebasan terbang di atas laut lepas; (3) Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention on fishing and conservation of the living resources of the high sea);

dan (4) Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf).

Bagi Indonesia sendiri domain maritim sangatlah penting. Seperti yang diutarakan oleh Laksamana TNI Agus Suhartono, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki elemen-elemen dari kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim. Makna laut bagi bangsa Indonesia yaitu laut sebagai medium transportasi, medium kesejahteraan, dan medium pertahanan . Jika pemerintah tidak serius dalam menjaga kedaulatan lautnya, maka yang terjadi adalah seperti beberapa kasus seperti Pulau Sipadan dan Ligitan, maupun pulau Ambalat yang saat ini sudah berada dikedaulatan pemerintah Malaysia . Pada kasus Sipadan dan ligitan, pemerintah Indonesia awalnya tidak memasukan kedua pulau tersebut kedalam peta wilayah lautnya, berbeda dengan Malaysia, ketika pulau tersebut masih dalam status quo, mereka sudah membangun resort meskipun kedua pulau tersebut memang tertera berada dalam peta wilayah laut Indonesia. Mereka beranggapan bahwa meskipun kedua pulau tersebut masih sengketa, namun berada pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif sehingga dianggap berhak atas kekayaan dan sumber daya atas pulau tersebut. Contoh lainnya yaitu tentang kasus Ambalat yang bernasib hampir serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam kasus Ambalat, disebutkan bahwa faktanya Ambalat bukan pulau melainkan suatu wilayah perairan yang terletak antara Indonesia dan Malaysia dan berada sekitar 80 mil dari garis pantai Indonesia . Hal tersebut tentu sesuai dengan hasil dari UNCLOS tentang Zona Ekonomi Eksklusif sehingga Ambalat berada dalam zona tersebut yaitu sejauh 200 mil dari garis pantai. Meskipun Ambalat berada pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun tentunya hal tersebut juga berlaku bagi Malaysia karena sama-sama Negara yang meratifikasi UNCLOS, bahwa garis pantai Malaysia pun masih berada pada rentang Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantai. Sehingga terjadinya tumpang tindih penguasaan atas Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan ketentuan UNCLOS tentang Zona Ekonomi. Eksklusif bahwa Indonesia dan Malaysia sama- sama memiliki hak untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada dalam rentang jarak 200 mil dari garis pantai masing- masing negara.

Perundangan yang terkait dengan kelautan mencakup 16 kebijakan setingkat undang-undang yang merentang mulai dari ZEE, konservasi sumber daya hayati sampai dengan pertahanan dan keamanan. Demikian kompleks dan ragam kebijakan terkait kemaritiman yang terfragmentasi dan saling tumpang tindih berpotensi membuat langkah pengambilan keputusan dalam keamanan maritim Indonesia menjadi lambat dan rumit. Salah satu bentuk contoh tumpang-tindih kebijakan adalah permasalahan perbatasan maritim antara provinsi dan kota. Undang- undang No. 22/1999, yang kemudian

digantikan Undang-undang No. 32/2004, mensahkan setiap provinsi memiliki zona maritim sejauh 12 mil yang diukur dari titik pantai, dan setiap wilayah kota otonomi yang memiliki wilayah maritim memiliki zona maritim sejauh 4 mil dari titik pantai. Kebijakan tersebut kemudian berakibat pada tumpang tindih penguasaan wilayah maritim antara provinsi yang bertetangga, dan dengan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Konsekuensi pemberlakuan hukum tersebut adalah masalah kepemilikan dan otoritas terhadap pulau terpencil. Permasalahan juga muncul pada izin berlayar ataupun izin pengelolaan sumber daya perikanan. Walaupun UU No. 34 telah menyebutkan peran utama TNI-AL dalam kemaritiman, penanganan keamanan maritim Indonesia melibatkan tujuh lembaga yang berbeda yaitu TNI, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Bea Cukai, Imigrasi, kementerian perhubungan, kementerian lingkungan hidup, dan badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla). Disaat yang bersamaan kedaulatan wilayah laut yang merupakan bagian penting dalam keamanan maritim dengan aspek keamanan nasional melibatkan lima lembaga, yaitu TNI, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian hukum dan HAM.

Sampai tahun 2020, di prediksi kawasan ASEAN akan menunjukkan pertumbuhan pendapatan domestik bruto (gross domestic products-GDP) yang menggembirakan dengan tumbuh sekitar 50% senilai lebih US\$ 5,000 bn. Kondisi yang patut diperhatikan adalah Amerika Serikat (United State of America-US) yang merupakan Negara dengan perekonomian terkuat pada tahun 2007, senilai GDP hampir S\$ 15,000 bn tetapi kemudian akan disalip oleh China pada tahun 2020 dengan GDP sebesar US\$ 25,000 bn. Pautan antara perekonomian US (US\$22,500 bn) dan China (US\$ 25,000 bn) padatahun 2020 tersebut tidaklah terlalu lebar sehingga kekuatan ekonomi dunia akan mengalami bipolarisasi. Negara-negara dikawasan Asia seperti India, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan peningkatan cukup tinggi pula pada tahun 2020. Situasi khusus terjadi untuk India yang akan diprediksi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan tumbuh hampir 60% atau senilai 10,000 bn pada tahun 2020 dibanding sebelumnya tahun 2007 sebesar US\$ 4,000 bn. Keadaan tersebut akan berpeluang besar meningkatnya kontestasi pengaruh dari Negara-negara besar (great powers) khususnya US dan China ditambah dengan munculnya Amerika-US) yang merupakan Negara dengan perekonomian terkuat pada tahun 2007, senilai GDP hampir US\$ 15,000 bn tetapi kemudian akan disalip oleh China pada tahun 2020 dengan GDP sebesar US\$ 25,000 bn. Pautan antara perekonomian US (US\$22,500 bn) dan China (US\$ 25,000 bn) padatahun 2020 tersebut tidaklah terlalu lebar sehingga kekuatan ekonomi dunia akan

mengalami bipolarisasi. Negara-negara dikawasan Asia seperti India, Perekonomian regional ASEAN diwarnai dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahap demi tahap mulai dari tahun 2016. MEA akan dibangun melalui empat pilar, yaitu pasar dan basis produksi bersama, kawasan kompetitif ekonomi, kesetaraan pembangunan ekonomi, dan integrasi kedalam ekonmi global. Khususnya pilar pertama, pasar dan basis produksi bersama, terdiri dari lima . Kondisi ini akan mendorong peningkatan lalu lintas barang, jasa, dan manusia di kawasan maritim nasional maupun kawasan Asia Tenggara. Potensi tingginya lalu lintas dikawasan maritim tersebut akan memunculkan kondisi keamanan baru mulai dari ancamanperompakan, keselamatan pelayaran, human trafficking, dan lainnya. Integrasi perdagangan dalam MEA akan menciptakan ketergantungan dan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara-negara anggota. Secara bersamaan, ketergantungan dapat meminimalkan potensi-potensi konflik antar negara. World Bank memprediksi perekonomian Indonesia akan bertumbuh kembali setelah masa penurunannya sehingga di tahun 2018 akan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Kemampuan ekonomi Indonesia merupakan modal yang sangat diperlukan sebagai sumber daya dana untuk menjaga keutuhan negara kepulauan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya maritim. Dilihat dari sudut Keterkaitan antara kemampuan ekonomi yang ditunjukkan melalui belanja pemerintah dengan fungsi anggaran pertahanan. Peningkatan belanja fungsi pertahanan hampir 3x lipat dengan capaian Rp. 81,8 triliun, 11% kontribusi terhadap total belanja pemerintah dalam kurun waktu 2007-2013 . Diantara kurun waktu tersebut, yaitu tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup tajam akibat krisis ekonomi dunia, subprime mortgage, yang menekan perekonomian Indonesia. Namun demikian, jika dilihat lebih jauh kekuatan terbesar kita ada pada jumlah tentara angkatan laut dan total kapal yang dimiliki tetapi memiliki kapal patroli yang cukup sedikit sekitar 31. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand dan Malaysia

yang lebih kecil bentang pesisir dan lautnya, Indonesia memiliki armada kapal patroli yg sangat sedikit. Begitu pula dengan kepemilikan kapal jenis frigate dan kapal selam, Indonesia masih terlampau kecil ditinjau dari kondisi negara kepulauan. Kawasan maritim Asia merupakan wilayah yang sangat rawan akan pembajakan dan perampokan, khususnya Kawasan Asia Tenggara. Menurut laporan dari International Maritime Bureau/IMB total insiden pembajakan dan perampokan kapal sebesar 141 kali terjadi di kawasan Asia Tenggara sepanjang tahun 2014. Bahkan keadaan ini lebih tinggi dari kawasan Afrika yang terjadi sebesar 55 kali. Didalam kawasan Asia Tenggara, wilayah maritim Indonesia terjadi insiden pembajakan dan perampokan yang paling banyak. Walaupun telah terjadi penurunan

insiden pembajakan yang signifikan dari 91 insiden pada tahun 2001 menjadi 40 insiden pada tahun 2010 tetapi tetap tertinggi diantara negara-negara tetangga. Wilayah Laut China Selatan secara mengejutkan melonjak secara drastis dengan 31 insiden di tahun 2010 dibanding tahun sebelumnya hanya 13 insiden. Selain itu, IMB melaporkan bahwa dari 245 laporan penyerangan di tahun 2014, sekitar 183 laporan tersebut atau 75% terjadi di enam lokasi yaitu Indonesia, Malaysia, Nigeria, Selat Singapura, Bangladesh, dan India. amun, lebih dari 50% penyerangan alam enam lokasi tersebut terjadi di Indonesia, 100 laporan penyerangan. Contoh lokasi yang paling rawan di wilayah maritim Indonesia adalah selat malaka, yang merupakan jalur strategis perdagangan internasional dengan lebih dari 70.000 kapal melintasinya per tahun. Bahkan lebih jauh Llyod's Association menyatakan bahwa Selat Malaka, bersama dengan negara-negara seperti Irak dan Somalia merupakan daerah yang memiliki bahaya perang dan terorisme. Persoalan lainnya di kemaritiman regional dan nasional adalah apa yang disebut oleh Buku Pertahanan Indonesia (2015) sebagai kejahatan lintas negara (transnational crime) seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan terorisme. Khusus mengenai perdagangan gelap narkoba ditengarai sebagai salah satu sumber pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatisme.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keamanan maritim Indonesia tidak lepas dari kepentingan nasional yang dituju dan menjadi acuan pemerintah Indonesia, yaitu tetap tegaknya NKRI; memastikan tetap berlanjutnya pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil, makmur, dan demokratis; dan turut menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Dalam penulisan ini, lingkungan strategis itu dipetakan ke dalam aktor politik-hukum ekonomi, pertahanan-keamanan, sosial budaya, lingkungan dan teknologi. Peluang dan ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia dihasilkan dari lingkungan strategis yang melingkupinya.

Pada faktor hukum, peluang muncul dari adanya konsolidasi dan budaya politik nasional yang sepiantas lalu seperti mengganggu berjalannya roda pemerintahan. Akan tetapi, konsolidasi ini memunculkan banyak potensi harapan dan dapat memberika ruang perbaikan untuk mencapai tujuan dan memperjuangkan kepentingan nasional. otonomi daerah, fragmentasi kebijakan dan kompleksitas kelembagaan maritim nasional merupakan ancaman keamanan maritim nasional. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) kepada keamanan maritim nasional ada pada pembagian zona teritorial laut, kebijakan Re-Balancing Asia pemerintah US dan fragmentasi kebijakan maritim nasional sehingga memerlukan perhatian dan

penanganan seksama. Ancaman dipertimbangkan datang dari besaran dan pertumbuhan ekonomi China yang ekskalatif dan anggaran fungsi belanja pertahanan yang masih rendah belum mencapai target yang direncanakan. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) pada keamanan maritim nasional datang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, sumber daya alam laut, dan anggaran belanja fungsi pertahanan.

Pada faktor pertahanan-keamanan, hampir keseluruhan variabel kajian menunjukkan kategori ancaman, yaitu konflik perairan di Asia, peningkatan kontestasi kekuatan militer di kawasan Asia, pengeluaran anggaran belanja pertahanan nasional, tingkat insiden pembajakan dan perampokan di perairan Indonesia, kejahatan lintas negara lainnya, dan IUU fishing. Sementara itu kekuatan laut Indonesia merupakan peluang yang dapat dioptimalkan untuk membangun keamanan maritim Indonesia. Kekuatan angkatan laut Indonesia walaupun masih laut Indonesia merupakan peluang yang dapat dioptimalkan untuk membangun keamanan maritim Indonesia. Kekuatan angkatan laut Indonesia walaupun masih Pada faktor sosial budaya, jumlah populasi Indonesia, struktur populasi pada kelompok umur, dan tumbuhnya kesadaran budaya maritim merupakan peluang memperkuat keamanan maritim Indonesia. Namun, pemerataan populasi di wilayah nasional dan budaya masyarakat perbatasan memberikan situasi ancaman kepada keamanan maritim Indonesia. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) datang dari tumbuhnya kesadaran budaya maritim.

Pada faktor lingkungan, peluang terjadi dari kondisi geografis terhadap jalur pelayaran, dan fishing ground. Sedangkan Kondisi geografis terhadap perbatasan negara dan zona bencana merupakan ancaman yang patut dipertimbangkan. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) kepada keamanan maritim Indonesia datang dari hampir seluruh variabel terkecuali zona bencana. Pada faktor teknologi, perkembangan teknologi informasi dan kepemilikan teknologi informasi maritim merupakan peluang untuk meningkatkan kemampuan keamanan maritim Indonesia. Ancaman hadir pada serangan cyber yang ditujukan kepada kepemilikan teknologi informasi maritim.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bandoro, Bantarto. 2013. Bahan Kuliah Cohort 5- Ancaman, Resiko dan Bencana Keamanan/19 September 2013. Unhan. Jakarta.
- Buzan. 2007. What is national security in the age of globalisation?. London School of Economics and Political Science. London
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Departemen Pertahanan RI.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978. Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta.

- Lai, David. 2013. *Asia-Pacific : A Strategic Assesment*. U.S Army War College Press. Carlisle Barracks.
- Liss, Caroline. 2007. *The Privatisation of Maritime Security-Maritime Security in Southeast Asia: Between a rock and a hard place?.* Murdoch University : Publisher.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD, Cet.19*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Teo, Yun. 2007. *Target Malacca Straits: Maritime Terrorism in Southeast. Asia. Studies in Conflict & Terrorism*.
- Wingarta, Putu. 2015. *Pengembangan Ketahanan Nasional berbasis Kebhinekaan (Pendekatan Kewaspadaan Nasional)*. Bakohumas Lemhanas RI. Jakarta.
- Suhartono, Agus. 2010. "Membangun Budaya Maritim Dan Kearifan Lokal Di Indonesia: Perspektif TNI Angkatan Laut". *International Conference on Indonesian Studies*.
- Yarger, Harry. 2006. "Strategic Theory for The 21st Century : The Little Book on Big Strategy". Strategic Studies Institute : Carlisle.
- Humas, "Pidato Presiden Jokowi pada KTT ke 9 Asia Timur" ( <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>) diakses pada 1 Novembrer 2020.

# STRATEGI PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA 1 GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN PERAIRAN NASIONAL DALAM RANGKA Mendukung Operasi Militer Selain Perang

Oleh:

Wijayanto<sup>1)</sup>, Marsono<sup>2)</sup>, Haposan Simatupang<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, Universitas Pertahanan  
<sup>1</sup>wijay4296@gmail.com

## Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya permasalahan dan implikasi dari stabilitas keamanan perairan Indonesia saat ini dimana hal tersebut dipengaruhi berbagai Isu-isu kejahatan yang bersifat lintas Negara, dikorelasikan dengan Penyelenggaraan pengamanan di wilayah ALKI 1 permasalahan yang muncul pertama adalah regulasi, dimana belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI. kedua dari sisi sarana prasarana seperti radar dan alat komunikasi lintas sektoral yang belum dilengkapi dengan radar deteksi maupun alat komunikasi yang terintegrasi, dan mengacu pada hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang. Menganalisis Bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang dan Upaya dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data di dapat dari wawancara, pengamatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pengamanan ALKI 1 dilakukan dengan melaksanakan interoperabilitas lintas sektoral baik TNI dengan instansi lainnya, bentuk Operasi dilaksanakan dengan operasi gabungan terpadu upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1, dimana beberapa hal tersebut masih terkendala beberapa persoalan seperti SDM, maupun sarpras, mengacu pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi penyelenggaraan ALKI 1 perlu diawaki SDM yang berkualitas khususnya mumpuni dalam bidang teknologi, dengan memiliki kemampuan dan kualitas memadai dalam melaksanakan penyelenggaraan pengamanan di wilayah ALKI 1.

**Kata kunci:** Strategi Pengamanan ALKI 1, Pengamanan ALKI 1, Operasi Militer Selain Perang.

## 1. PENDAHULUAN.

Operasi Militer Selain Perang merupakan pola operasi yang dilaksanakan TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang dalam melaksanakan tugasnya salah satunya adalah dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas-tugas nontempur dan tempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana serta untuk kepentingan nasional, termasuk Pengamanan Pelayaran dan Penerbangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau dan terdapat 92 pulau terluar, dimana 67 pulau terluar ini berbatasan langsung dengan Negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil perbatasan.

Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) selain dapat memberikan implikasi dampak positif bagi kegiatan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat, juga dapat berimplikasi menimbulkan potensi ancaman terhadap kepentingan

nasional Indonesia. Kondisi geografi Indonesia memiliki posisi terbuka yang setiap saat dapat menjadi peluang bagi negara lain untuk masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Potensi Ancaman di ALKI tentu akan berdampak kepada lingkungan perairan dan pulau sekitarnya, begitu pula sebaliknya

Seperti yang terjadi di wilayah ALKI 1, Potensi ancaman di ALKI 1 terkait imbas konflik klaim wilayah atas kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan, seperti digunakannya wilayah ALKI 1 untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat. Di samping itu, imbas kepadatan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, seperti digunakannya wilayah ALKI 1 oleh perompak untuk menghindari kejaran aparat keamanan Indonesia dan aparat keamanan gabungan (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) atau penyelundupan. Imbas dari pusat pertumbuhan dan perekonomian Asia dan Asia Tenggara di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Singapura, seperti penyelundupan barang-barang ilegal dan juga perdagangan manusia, turut menjadi potensi ancaman di ALKI 1.

Dikorelasikan dengan Penyelenggaraan pengamanan di wilayah ALKI 1 masih ditemukan permasalahan yang muncul, permasalahan pertama adalah regulasi, dimana belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI antara TNI dengan *stakeholder* di bidang pengamanan ALKI seperti dengan TNI AU, Ditpolairud (Polri) maupun dengan Bakamla, dimana masing-masing lembaga memiliki regulasi sendiri dan berdampak pada pelaksanaan operasi yang terkadang memiliki kesamaan waktu sehingga berdampak pada ketidak efektifan penyelenggaraan operasi.

Kemudian dari sisi Sarana prasarana seperti radar dan alat komunikasi lintas sektoral yang belum dilengkapi dengan radar deteksi maupun alat komunikasi yang terintegrasi menyebabkan terjadinya miskomunikasi maupun miskoordinasi dengan pihak yang sedang melaksanakan operasi/patrol di mana hal tersebut merupakan imbas dari terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pengamanan ALKI. Salah satu contoh nyata nya adalah yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2021 Bakamla telah mendeteksi dan menangkap kapal MT.Horse dan MT.Frea di ALKI 1 diduga melaksanakan pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi rumusan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang? Bagaimana bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang dan Bagaimana upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang?

Referensi dan teori yang peneliti gunakan dalam menjawab dan menganalisa rumusan masalah menggunakan konsep dan teori Strategi, sebagaimana menurut Hart (2001) yang menyatakan bahwa strategi sebagai suatu kalkulasi yang matang terkait dengan tujuan, konsep, dan alat dalam ukuran tertentu dengan memperhatikan resiko yang ada sehingga dapat mencapai tujuan. Strategi juga merupakan suatu seni untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengintegrasikannya dengan lingkungan strategis untuk mencapai tujuan nasional. Konsep tersebut akan menyediakan pedoman bagi negara dalam memaksimalkan kepentingan nasional sekaligus meminimalisir ancaman.

Keberadaan strategi sangat penting untuk memberikan pedoman langkah di dalam perkembangan situasi yang tidak menentu. Strategi berasumsi bahwa masa depan tidak dapat diprediksi namun lingkungan strategis dapat dipelajari dan diakses sehingga mampu merumuskan langkah

antisipasi. Yarger (2006) menambahkan jika strategi dilaksanakan dengan mengaplikasikan *ends, ways, dan means* dalam lingkungan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya untuk mempertajam analisis, teori pendukung yang digunakan adalah dengan menggunakan *Teori Naval Diplomacy*, dimana Menurut Booth (2014) yang menyebutkan bahwa *naval diplomacy* dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh suatu negara dalam pemilihan opsi penawaran kerja sama. Diplomasi jenis ini bahkan dapat digunakan dengan memperlihatkan kekuatan tersebut sebagai unsur pendukung, atau kekuatan yang mewakili tugas tertentu yang diberikan negara terhadap angkatan laut tersebut (Booth 2014). Menurut Booth (2014) Angkatan Laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 (tiga) peran yang dikenal dengan “Trinitas peran angkatan laut” yang terdiri dari Peran Militer (*military*), Peran Polisi (*Constabulary*) dan Peran Diplomasi (*Diplomacy*).

Menurut Booth (2014), *Naval diplomacy* pada hakekatnya hanya berlaku jika kekuatan yang digunakan dalam operasi tersebut relevan, dalam artian benar-benar memberikan pengaruh terhadap prestige yang ingin dicapai. Identifikasi terhadap kuantitas dan kualitas yang menentukan kepantasan dari kekuatan Satgas Maritim TNI sebagai *naval diplomacy* penting dilakukan mengingat dampak dari naval diplomacy dapat memberikan makna yang berbeda-beda

Dan sebagai pendukung teori yang sudah diuraikan sebelumnya, sebagai teori pendukung penulis menggunakan Teori keamanan maritim, Sebagaimana Menurut McNicholas (2008), keamanan maritim adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemilik, operator, administrator kapal, fasilitas pelabuhan, instalasi lepas pantai, serta organisasi kelautan untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan, sabotase, penyitaan, pencurian, dan gangguan lainnya dimana Mayoritas ancaman yang terjadi dalam ruang lingkup keamanan maritim merupakan ancaman non-tradisional seperti terorisme maritim, separatisme, radikalisme yang berujung pada konflik komunal dengan laut sebagai medianya, kerusuhan sosial antarpengguna laut, perompakan dan pembajakan di laut, imigran ilegal, penangkapan dan pembalakan ilegal, serta penyelundupan dan pencemaran laut.

Kemudian menurut Siebels (2020) yang menyebutkan bahwa Keamanan maritim adalah istilah umum yang diinformasikan untuk mengklasifikasikan isu-isu dalam domain maritime yang sering dikaitkan dengan keamanan Nasional, lingkungan laut, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia Ini termasuk lautan dunia tetapi juga laut regional, perairan territorial, Sungai dan pelabuhan. istilah keamanan maritim bervariasi dan sementara tidak ada definisi yang disepakati secara internasional, istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan tantangan regional

dan internasional baru yang ada, dan tantangan regional terhadap domain maritim.

Selain itu, teori pendukung lainnya yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu Teori Penyelenggaraan, sebagaimana yang disebutkan oleh Hasibuan (2011) yang menyebutkan Penyelenggaraan merupakan sebuah proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan yang didalamnya terdapat berbagai macam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan juga dalam penyelenggaraan juga menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas dan juga menyediakan alat-alat yang diperlukan dalam menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Kemudian ditinjau dari bentuk penyelenggaraan, sebagaimana yang disebutkan oleh Handoko (2003) yang mengklasifikasikan beberapa definisi yaitu pertama penyelenggaraan adalah menyusun kembali kerangka tujuan organisasi dengan menetapkan visi dan misi sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi, kemudian pada tahap kedua adalah menata ulang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan peneliti menggunakan penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah (Moleong, 2012)

Pendekatan kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (sugiyono, 2015).

Dari latar belakang penelitian penulis berasumsi bahwa penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode dalam pelaksanaan penelitian hal ini dikarenakan Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Miles, 1992) andasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang.

Dalam konteks Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 berdasarkan hasil penelitian dan data yang didapatkan, dapat diinterpretasikan bahwa dengan belum terpadunya penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 berdampak pada sulitnya mewujudkan kesatuan komando (*unity of command*) dalam penyelenggaraan pengamanan ALKI 1. Dampaknya terhadap hasil operasi sehingga mengacu pada uraian tersebut, dapat di asumsikan bahwa agar strategi Penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 tercapai maka diperlukan kesiapan Alutsista TNI dan unsur instansi pemerintah yang Optimal Untuk Penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1. Penyelenggaraan pengamanan ALKI yang dilaksanakan oleh TNI (Kogasgabpadpam ALKI 1) menggunakan kekuatan dan kemampuan alutsista yang dimiliki TNI AL, TNI AU dan unsur instansi pemerintah.

Sehingga dengan Unsur KRI dan Pesud yang mampu melaksanakan penindakan secara cepat terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ALKI, karena dengan teknologi tinggi dapat melakukan deteksi, pengintaian jarak jauh disertai dengan sistem persenjataan yang mutakhir, penindakan secara cepat dan akurat terhadap kapal maupun pesawat asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ALKI 1 dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di perairan Indonesia guna mendukung Operasi Militer selain Perang.

## Bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang.

Dalam konteks Bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 berdasarkan hasil penelitian dan data yang didapatkan, dapat diinterpretasikan bahwa bentuk OMSP di wilayah ALKI 1 masih bersifat terpusat, dan pihak yang terlibat belum terdukung oleh regulasi yang mendukung interoperabilitas antar instansi, dengan Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang melandasi operasi penyelenggaraan pengamanan ALKI khususnya ALKI 1.

Saat ini Indonesia sudah memiliki Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang dengan hak lintas transit, hak lintas damai serta hak lintas akses dan komunikasi bagi kapal asing. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang ALKI. Pada peraturan ini terdapat beberapa pasal tentang pelayaran yang mengatur perlindungan lingkungan maritim dan lintas alur laut kepulauan. Dalam hal ini regulasi

pada ALKI masih membahas aturan-aturan bagaimana ALKI dan tatacara melintasinya sedangkan aturan penyelenggaraan pengamanan ALKI antara TNI dan instansi/stakeholder pemerintah lainnya belum terpadu.

#### **Upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang.**

Dalam konteks Upaya dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 terhambat oleh Belum terdukungnya sarana prasana TNI pada penyelenggaraan pengamanan ALKI 1. salah satunya interoperability antar satuan akibat adanya perbedaan peralatan komunikasi dan system enkripsi. Kesiapan operasional alutsista dan Interoperabilitas antara TNI AL dengan TNI AU masih terbatas dalam penyelenggaraan pengamanan ALKI 1.

Sementara untuk kekuatan laut juga terdapat keterbatasan dalam jumlah unsur KRI dan Pesud dibandingkan dengan luas wilayah yang harus diamankan tidak seimbang, sehingga hasil yang dicapai masih kurang maksimal dan juga kondisi teknis terkait dengan teknologi merupakan kendala dalam pelaksanaan operasi.

Sehingga mengacu pada uraian tersebut, dapat di asumsikan bahwa perlu Terealisasi regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang melandasi operasi pengamanan ALKI. Pelaksanaan penyelenggaraan pengamanan ALKI berjalan lancar dan saling bersinergi antara instansi yang terkait, karena sudah pemahaman yang sama sesuai dengan PP yang ada.

Penegakkan hukum dapat dilaksanakan dengan tegas dan terarah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam penyelenggaraan pengamanan ALKI 1. Dengan adanya regulasi yang melandasi penyelenggaraan pengamanan ALKI khususnya ALKI 1 akan lebih optimal dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia guna mendukung Operasi Militer selain Perang.

implementasi dalam upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang maka kekuatan dari unsur-unsur TNI AL yang dibantu dengan kekuatan TNI AU serta kekuatan laut dalam wadah Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang terdiri dari: unsur POLRI, Bea Cukai, KPLP dan Perhubungan Laut yang tergabung dalam satuan pengamanan ALKI. Pengamatan dan pendeteksian dapat dilaksanakan secara visual, elektronik dan akustik

#### **4. KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PEMBATAAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas

keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang dapat disimpulkan bahwa dalam aspek *ends* dengan tujuan mendapatkan hasil operasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan adanya koordinasi yang lebih sinergis diantara komponen-komponen yang terlibat dalam operasi pengamanan ALKI yaitu Koarmada I Koopsau I, Koopsau II, Kohanudnas dan unsur yang tergabung dalam wadah Bakamla. Sedangkan dalam aspek *Ways* sebagai upaya dalam Meningkatkan Pola Operasi Penyelenggaraan Pengamanan ALKI. Diperlukan peningkatan dan revisi pola operasi disesuaikan dengan analisa intelijen maritim dan analisa intelijen udara dihadapkan pada terbatasnya jumlah unsur laut dan unsur udara yang dapat digelar sesuai dengan Rencana Operasi Pengamanan ALKI. kehadiran unsur penyelenggaraan Pengamanan ALKI (unsur TNI AL, TNI AU dan unsur yang tergabung dalam wadah Bakamla). Untuk dapat mengefektikan dan mengoptimalkan hasil pengamanan ALKI dihadapkan pada ancaman dari berbagai bentuk pelanggaran, diperlukan perhitungan jumlah kebutuhan ideal KRI dan Pesawat Udara di tiga jalur ALKI agar dapat melaksanakan penyebaran, pengamatan, patroli dan penindakan sebagai Sedangkan *Means* dalam konteks ini dapat dilakukan dengan Kekuatan Hankam Negara di Laut yang dapat diproyeksikan antara lain meliputi Armada Pemerintah, Satuan udara maritim, Armada Niaga, Armada Survei dan pemetaan, dan Armada perikanan..

2. Berdasarkan indikator bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat disimpulkan bahwa Operasi pengamanan ALKI sebagai tugas TNI bidang OMSP dalam mendukung penyelenggaraan tugas keamanan maritim harus dipertegas dengan Peraturan Pemerintah sebagai konsekuensi dari UU no 67 tahun 2002 tentang ALKI, agar penyelenggaraannya memiliki regulasi yang kuat. TNI melaksanakan tugas menyelenggarakan operasi gabungan terpadu pengamanan ALKI dalam rangka OMSP karena diatur dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena kemauan atau kehendak TNI sendiri. Dengan semakin kuatnya struktur payung hukum di bidang keamanan, lebih khusus lagi sektor pengamanan ALKI, maka sangat berpengaruh langsung terhadap optimalnya penyelenggaraan Operasi gabungan terpadu pengamanan ALKI yang dilaksanakan oleh TNI (Kogasgabpadpam ALKI) dengan instansi Pemerintah. Koordinasi lintas aparat dalam menentukan aparat yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum, untuk menghindari tumpang tindih dalam proses penegakan hukum. Sehingga pada dasarnya,

terdukungnya Regulasi yang dapat membangun sinergitas lintas sektoral.

3. Berdasarkan indikator Upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang maka kekuatan dari unsur-unsur TNI AL yang dibantu dengan kekuatan TNI AU serta kekuatan laut dalam wadah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang terdiri dari : unsur POLRI, Bea Cukai, KPLP dan Perhubungan Laut yang tergabung dalam satuan pengamanan ALKI. Pengamatan dan pendeteksian dapat dilaksanakan secara visual, elektronik dan akustik. Kemampuan Dukungan Pengamanan ALKI. Koarmada I selaku Kogasgabpam ALKI 1 dapat memanfaatkan kekuatan yang ada dan menggelarnya dalam rangka pengamanan ALKI dengan menghadirkan unsur-unsur di daerah operasi dengan efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan dampak penangkalan dan penindakan, hal ini harus mendapat dukungan dari Dukungan Intelijen Maritim, Kemampuan K4IPP. (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Informasi, Pengamatan dan pengintaian) dan Pelaksanaan Komunikasi penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Booth, K. (2014). *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge Publisher.
- Hart, L. H. (2001). *Strategy (2nd Edition)*. New York, NY: Frederick Praeger Publisher
- Hasibuan, Malayu S.P, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Hoyt, T.T. (2003) *beyond leadership” (12 konsep kepemimpinan)*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Mahan, A. T. (2003) *The Influence of Sea Power Upon History (2nd Edition)*. New York: Little, Brown and Co.
- Miles, B. & Huberman, M. (2004). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Siagian, Y. M. (2005). *Aplikasi Supply Chain Management Dalam Dunia Bisnis*. Jakarta : Grasindo Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Yarger, H. R. (2006). *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. New York: Blackswell Publisher

# ANALISIS FAKTOR MANUSIA PADA KECELAKAAN KAPAL DI WILAYAH INDONESIA

oleh

Abraham Benedict Cahyasusila<sup>1)</sup>, Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>1</sup>abraham.benedict\_ti2012@yahoo.com,

<sup>2</sup>hanief.bayhaqqi@gmail.com

## Abstrak

Kecelakaan kapal merupakan hal yang sering terjadi di wilayah Indonesia mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2007 hingga 2011 sudah terjadi 27 kasus kecelakaan kapal yang tercatat dalam investigasi KNKT dengan jenis kecelakaan berupa tenggelam, tubrukan, terbakar, dan kandas. Penelitian ini memfokuskan pada faktor manusia terhadap kecelakaan kapal sepanjang tahun 2018 dengan catatan 10 kasus kecelakaan kapal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelompokkan faktor penyebab kecelakaan kapal berdasarkan analisis faktor manusia. Hasil penelitian menunjukkan kategori *unsafe acts* memiliki 11 faktor penyebab kecelakaan kapal dengan persentase 41%. Kategori *precondition for unsafe acts* dan *organizational influences* memiliki persentase yang sama sebesar 22% dengan masing-masing 6 faktor kecelakaan kapal. Sedangkan kategori terakhir merupakan *unsafe supervision* menyumbang sebanyak 15 % dengan jumlah 4 faktor kecelakaan kapal.

**Kata Kunci:** *Kecelakaan Kapal, Unsafe Acts, Precondition, Organizational Influences, Supervision*

## 1.PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Negara maritim atau dapat disebut juga sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau serta mempunyai 95.181 km panjang garis pantai. Indonesia dengan luas wilayah sebesar 1.905 juta km<sup>2</sup>, sebanyak 2/3 dari luas wilayah tersebut merupakan daerah perairan atau lautan. Transportasi laut adalah unsur vital yang menghubungkan antar daerah di Indonesia sebagai negara kepulauan. Melihat pentingnya hubungan antar daerah yang disatukan dengan perairan laut ini membuat banyaknya transportasi laut seperti kapal yang berlayar di wilayah lautan Indonesia. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) mengakibatkan tidak hanya kapal dalam negeri saja yang berlayar di sekitar wilayah Indonesia, akan tetapi menjadi jalur bagi kapal negara lain untuk melintasi wilayah Indonesia. Kepadatan kapal yang tinggimenciptakan resiko kecelakaan yang tinggi.

Data dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat bahwa periodetahun 2007-2011 terjadi 27 kasus kecelakaan kapal di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:**Tabel 1. Data Kecelakaan Kapal yang Diinvestigasi KNKT Tahun 2007 – 2011**

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Jenis Kecelakaan			Korban Jiwa	
			Tenggelam	Terbakar	Tubrukan	Meninggal	Luka-luka
1	2007	7	4	3	0	100	104
2	2008	5	2	3	0	10	51
3	2009	4	2	1	1	447	0
4	2010	5	1	1	3	15	85
5	2011	6	1	3	2	86	346
Total		27	10	11	6	658	586

Sumber: Andoyo, Dkk. 2015

Banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi pada tahun tersebut dimana jumlah korban yang juga menjadi perhatian lebih dalam perbaikan sistem transportasi laut. Untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, dapat ditinjau kembali faktor apa saja sebenarnya yang menjadi penyebab kecelakaan transportasi laut. Dalam melakukan pelayaran, terdapat Peraturan Internasional tentang Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) yang dapat memberikan petunjuk bagi awak kapal dalam pengoperasian kapal untuk memastikan bahwa keselamatan, perlindungan lingkungan, keamanan dan kenyamanan awak kapal, barang, serta kapal itu sendiri terjamin. Berdasarkan laporan hasil investigasi KNKT pada tahun selanjutnya yaitu 2007 hingga 2014, didapatkan kesimpulan bahwa faktor yang dominan dalam penyebab kecelakaan kapal adalah kelalaian manusia (*human error*), diikti dengan kesalahan teknis dan cuaca (Hasugian S, dkk. 2017).

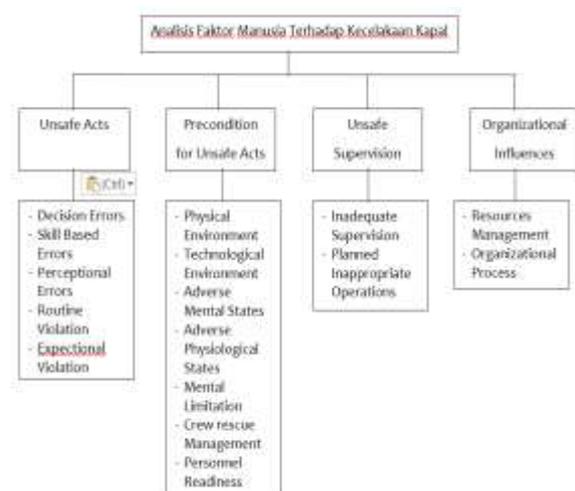
Kecelakaan dalam pelayaran yang disebabkan oleh faktor manusia merupakan faktor yang paling besar dengan kriteria tertinggi adalah faktor fisik (Nathanael, 2011). Human error yang menjadi penyebab kecelakaan transportasi ini memiliki faktor dan aspek lain yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mendorong operator untuk melakukan tindakan yang tidak tepat (*human error*). Harahap (2011) menyatakan bahwa human error sebagai penyebab kecelakaan pada pelayaran antara lain berupa tidak melakukan pengamatan sekitar dengan seksama, tidak berhati-hati, kurangnya perencanaan, gagal menilai situasi, tidak mengambil tindakan awal, gagal mengambil tindakan pelayaran yang seharusnya, tidak mengikuti aturan, menjalankan kapal tidak

dengan kecepatan yang seharusnya, gagal mengendalikan kapal, komunikasi yang gagal, tidak mengenali spesifikasi kapal dengan baik, dan gagal menerima serta mengirimkan sinyal. Pada dasarnya terdapat klasifikasi human error dalam mengklasifikasikan kesalahan yang terjadi. Menurut Ittisar (1979) klasifikasi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sistem *Include Human Error*. Pada sistem ini mekanisme dalam suatu sistem memungkinkan manusia dalam melakukan kesalahan, misalnya adalah manajemen yang tidak menerapkan disiplin secara baik dan ketat.
2. Desain *Include Human Error*. Kesalahan terjadi karena desain atau perancangan sistem kerja yang kurang baik.
3. *Pure Human Error*. Kesalahan yang terjadi karena manusia itu sendiri seperti ketidaktrampilan, kurangnya keahlian, tidak berpengalaman, dan unsur psikologis yang mempengaruhi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan kuantitatif deskriptif dengan maksud menjelaskan fenomena kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Indonesia sepanjang tahun 2018 berdasarkan investigasi KNKT. Penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan sekumpulan data kecelakaan kapal menjadi data numeric perkelompok sesuai dengan analisis faktor manusia yang menyebabkan kecelakaan pada kapal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menampilkan aspek faktor manusia yang sudah digolongkan berdasarkan aspeknya dengan fenomena kecelakaan kapal di Indonesia secara deskripsi sistematis. Klasifikasi atau penggolongan faktor manusia dalam kecelakaan kapal dibagi menjadi beberapa aspek yaitu *Unsafe Acts*, *Precondition for Unsafe Acts*, *Unsafe Supervision*, dan *Organizational Influences* (Lady, dkk. 2014).



Gambar 1. Struktur rancangan metode penelitian  
Sumber: Olahan Penulis

Pada Gambar 1, menunjukkan alur pengelompokan faktor manusia pada kecelakaan kapal di Indonesia. Terdapat 10 kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini dan bersumber dari investigasi oleh KNKT sepanjang tahun 2018. Analisis faktor manusia ini dikelompokkan menjadi 4 kategori faktor manusia, yaitu *unsafe acts*, *precondition for unsafe acts*, *unsafe supervision*, dan *organizational influences*. *Unsafe acts* atau tindakan tidak aman merupakan faktor manusia yang disebabkan oleh kesalahan individu itu sendiri seperti kesalahan operator dalam mengendalikan mesin, dalam hal ini adalah operator kapal. Kelompok faktor selanjutnya adalah *precondition for unsafe acts* atau kondisi tertentu penyebab tindakan tidak aman. Kelompok ini merupakan human error yang disebabkan karena kondisi lingkungan, keadaan kapal, dan kondisi fisik operator kapal yang mempengaruhi kesalahan dari individu itu sendiri sehingga menyebabkan kecelakaan kapal. Kelompok faktor lainnya adalah *unsafe supervision* atau kesalahan pada pengawasan sehingga dalam hal ini merupakan pengawasan dari pihak pelabuhan dalam mengatur jalur perjalanan kapal. Kelompok faktor terakhir yang digunakan dalam menganalisis faktor manusia adalah *organizational influences* atau pengaruh organisasi yang dalam hal ini adalah kesalahan terjadi pada sumber daya manusia dan pengembangannya untuk menjadi anggota awak kapal.

Setelah melakukan pengelompokan faktor manusia yang menyebabkan kecelakaan kapal, selanjutnya 10 kasus kecelakaan kapal yang terjadi sepanjang tahun 2018 yang berhasil di investigasi oleh KNKT dianalisis berdasarkan faktor penyebab kecelakaan pada kapal tersebut. Hasil pengelompokan faktor penyebab kecelakaan ini diakumulasi serta disajikan dalam bentuk diagram sehingga diketahui berapa persen dan faktor mana yang paling besar sebagai penyebab kecelakaan kapal di wilayah Indonesia sepanjang tahun 2018.

## 3. HASIL & PEMBAHASAN

Data kecelakaan kapal yang telah didapatkan dari laporan hasil investigasi KNKT sepanjang tahun 2018 selanjutnya ditabulasikan untuk mengetahui kategori faktor manusia mana yang paling dominan dalam penyebab kecelakaan. Hasil tabulasi tersebut menunjukkan kategori *unsafe acts* adalah kategori faktor manusia yang paling besar dalam menyebabkan kecelakaan kapal dengan jumlah 11 faktor. Disusul oleh kategori *precondition for unsafe acts* dan *organizational influences* dengan jumlah faktor yang sama sebanyak 6 faktor. Kategori terakhir dan yang paling sedikit adalah *unsafe supervision* dengan jumlah 4 faktor. Hasil pengumpulan data tersebut menunjukkan bahwa kategori *unsafe acts* merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi kecelakaan kapal di wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa kategori *unsafe*

acts atau tindakan tidak tepat adalah suatu kesalahan yang dilakukan manusia karena kurangnya pengalaman maupun ketidak tepatan suatu tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu keadaan. Data kecelakaan kapal dengan tabulasi kategori faktor manusia sebagai penyebab kecelakaan kapal disajikan dalam Tabel 2 berikut ini

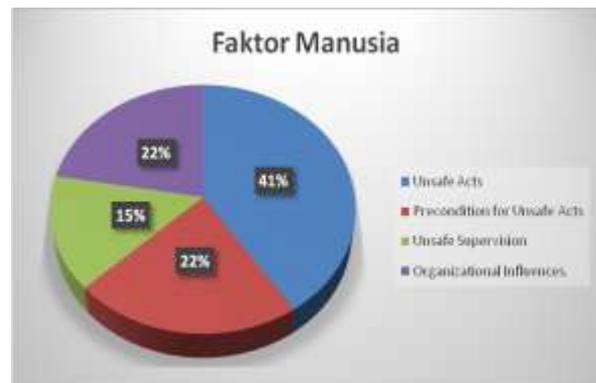
**Tabel 2. Data kecelakaan kapal dan kategori yang menyebabkannya**

No	Nama Kapal / Report Number / Tanggal Tenggelam	Faktor Manusia			
		Unsafe Acts	Precondition for Unsafe Acts	Unsafe Supervision	Organizational Influences
1	Pinang Jaya / KNKT.18.01.05.03 / 27 Januari 2018 (Kapal Tenggelam)	- respons internal yg kurang efektif - penyusunan muatan yg salah	- terpaan ombak setinggi 3 meter		- pengawakan awak kapal tidak sesuai dengan peraturan
2	Kayong Utara / KNKT.18.02.06.0 / 20 Februari 2018 (Kapal Kandas)	- salah menilai kondisi air dangkal - salah mengambil tindakan		- tidak adanya pengawasan manajemen	
3	Labitra Adinda / KNKT.18.05.12.0 / 17 Mei 2018 (Kapal Terbakar)	- sistem CO2 kamar mesin tidak diaktifkan dengan benar	- Kerusakan pada peralatan mesin kapal		- tidak rutin melakukan pelatihan kebakaran
4	Citra Mulia 9 / KNKT.18.05.16.03 / 23 Mei 2018 (Kapal Kemasukan Air)		- ombak yang tinggi hingga 3 meter	- Salah memberikan informasi pelayaran	- tidak dilakukan pelatihan untuk ABK
5	Harapan Baru Express VII / KNKT.18.05.14.0 / 22 Mei 2018 (Kapal Tubrukan)		- kelelahan fisik hingga mengantuk (fatigue)		
6	JWS (IMO No. 9854686) / KNKT.10.07.23.0 / 08 Juli 2018 (Kapal Kandas)	- awak kapal meninggalkan ajungan setelah merubah haluan - tidak mengikuti rencana pelayaran		- lampu suar penanda dalam keadaan mati - alat keselamatan tidak pada tempatnya	
7	Bunga Melati 79 dan Golden Way 3310 / KNKT.18.07.26.0 / 19 Juli 2018 (Tubrukan antar Kapal)	- tidak terjadi komunikasi lewat radio - salah menilai lampu navigasi			- tidak pernah melakukan pelaksanaan pelatihan keselamatan
8	Molise / KNKT.18.08.28.0 / 07 Agustus 2018 (Mesin Motor Meledak)		- kerusakan pada peralatan		
9	Altif / KNKT.18.08.29.0 / 10 Agustus 2018 (Kapal Kandas)	- awak kapal yang kurang terampil			- tidak ada rambu navigasi di jalur

10	Funka Permata / KNKT.18.09.31.0 / 14 September 2018 (Kapal Terbakar)	- awak kapal tidak memahami kondisi darurat	- kesalahan sirkulasi air laut sebagai pendingin mesin		pelayaran - tidak adanya simulasi cara penanganan bencana darurat
----	--	---	--	--	--

Sumber: Olahan Penulis

Dari hasil tabulasi pada Tabel 2, diketahui bahwa penyebab dominan dan paling banyak sebagai faktor kecelakaan kapal dengan analisis faktor manusia adalah *unsafe acts*. Jika dibuat dalam bentuk persen maka analisis penyebab kecelakaan kapal dengan faktor manusia dapat dilihat pada Gambar 2. Dapat dilihat pada Gambar 2 bahwa persentase terbesar ada pada kategori *unsafe acts* dengan besar 41%. Kategori kedua yang setelahnya adalah *precondition for unsafe acts* dan *unsafe supervision* dengan besarnya persentase yang sama yaitu 22%. Pengaruh dari kategori *organizational influences* merupakan faktor yang paling kecil dari penyebab kecelakaan kapal dengan besar 15%.



**Gambar 2. Persentase kategori faktor manusia dalam kecelakaan kapal**  
Sumber: Olahan Penulis

*Unsafe acts* atau dapat disebut juga dengan tindakan tidak aman adalah faktor terbesar dalam kecelakaan yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang salah dalam melakukan penindakan. Walaupun pada dasarnya erdapat juga sebab-sebab lain yang tidak terlihat dalam mempengaruhi kategori ini dalam menyebabkan kecelakaan kapal. Pada analisis dari 10 kasus kecelakaan kapal di Indonesia 41% dari keseluruhan faktor penyebab kecelakaan kapal disebabkan oleh tindakan tidak aman. Sebelas faktor dalam kategori *unsafe acts* ini secara garis besar terjadi karena kesalahan manusia dalam mengendalikan kapal, baik kesalahan menilai situasi, kesalahan dalam menindak lanjuti keadaan sekitar.

Kondisi tertentu penyebab tindakan tidak aman atau disebut juga *precondition for unsafe acts* merupakan faktor kedua penyebab kecelakaan pada kapal. Ada 6 faktor dalam analisis ini yang menjadi penyebab kecelakaan kapal dengan persentase sebesar 22%. Besarnya persentase ini sama halnya dengan kategori pengaruh organisasi atau disebut juga *organizational influences* yang menyumbang

sebanyak 6 faktor dari keseluruhan faktor penyebab kecelakaan kapal. Kategori *precondition for unsafe acts* secara keseluruhan terjadi karena faktor cuaca yang mempengaruhi tindakan manusia dalam mengendalikan kapal, serta kondisi mesin kapal yang tidak optimal juga mempengaruhi tindakan manusia. Sedangkan kategori *organizational influences* berupa kesiapan organisasi dalam merekrut dan memberikan pelatihan dalam menangani bencana kecelakaan kapal.

*Unsafe supervision* atau disebut juga kesalahan pada pengawasan merupakan kategori yang paling kecil dalam mempengaruhi kecelakaan kapal dengan persentase 15%. Sebanyak 4 faktor dari keseluruhan faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kapal terdapat pada kategori kesalahan pada pengawasan. Secara umum faktor tersebut terjadi pada manajemen seperti gagal mengawasi kapal serta jeleknya fasilitas seperti lampu penanda yang tidak menyala.

#### 4. KESIMPULAN

Kecelakaan kapal yang dapat dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 10 kasus dengan data bersumber dari investigasi KNKT pada kecelakaan kapal sepanjang tahun 2018. Dari 10 kasus kecelakaan kapal tersebut, penyebab kecelakaan kapal di wilayah Indonesia sepanjang 2018 dikelompokkan berdasarkan analisis faktor manusia dengan 4 kategori, yaitu *unsafe acts*, *precondition for unsafe acts*, *unsafe supervision*, dan *organizational influences*. Kategori terbesar sebagai penyebab kecelakaan kapal ada pada *unsafe acts* yang memiliki persentase 41% dengan 11 faktor penyebab kecelakaan. Kategori *precondition for unsafe acts* dan *organizational influences* memiliki jumlah faktor yang sama sebanyak 6 faktor dengan persentase 22%. Sedangkan kategori *unsafe supervision* menyumbang sebanyak 4 faktor penyebab kecelakaan kapal dengan persentase 15%. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa kecelakaan kapal banyak disebabkan oleh faktor manusia berupa *unsafe acts* yang menandakan masih banyaknya kesalahan manusia dalam mengendalikan maupun mengambil tindakan yang menjadi penyebab kecelakaan kapal di Indonesia sepanjang tahun 2018.

Perlu dicatat: Penelitian ini hanya mengelompokkan kecelakaan kapal berdasarkan faktor manusia dengan 4 kategori pendukung dalam mengelompokkannya. Riset selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah kategori penyebab kecelakaan kapal guna menambah pengetahuan yang lebih banyak lagi dari faktor manusia. Selain itu penelitian ini juga hanya membagi penyebab kecelakaan ke dalam beberapa kategori tanpa dilakukan analisis lanjutan. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis kelanjutan dari pembagian kategori ini seperti *Analysis Hierarchy Process* (AHP) untuk mengetahui secara dalam faktor manusia dalam kecelakaan kapal karena dapat diperhitungkan dan data didapatkan dari sumber

interview langsung kepada narasumber yang berada di lokasi.

#### 5. REFERENSI

- Andoyo, W Lucky., S Sarwito, dan B Zaman. 2015. *Analisis Human Error terhadap Kecelakaan Kapal pada Sistem Kelistrikan Berbasis Data di Kapal*. Jurnal Teknik ITS. Vol. 04. No. 1. Hal. 10-14.
- Harahap, R.G. dan Rosyid, D.M. 2011. *Studi Peran Keandalan Manusi dalam Tubrukan Kapal (Studi Kasus Pelabuhan Perak Surabaya)*. Jurnal Kelautan. Jurusan Teknik Kelautan. FTK-ITS: Surabaya.
- Hasugian, S., Wahyuni, I S., Rahmawati, M., dan Arleiny. *Pemetaan Karakteristik Kecelakaan Kapal di Perairan Indonesia Berdasarkan Investigasi KNKT*. Warta Penelitian Perhubungan. Volume 29. No. 02. Hal. 229-240.
- Iftikar Z, Sutalaksana. 1979. *Teknik Tata Cara Kerja*. Jurusan Teknik Industri. Institut Teknologi Bandung (ITB): Bandung.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.01.05.03. Tentang Tenggelamnya Pinang Jaya tanggal 27 Januari 2018.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.02.06.03. Tentang Kandasnya Kayong Utara tanggal 20 Februari 2018.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.05.12.03. Tentang Kebakaran di Labitra Adinda tanggal 17 Mei 2018.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.05.14.03. Tentang Tubrukan Harapan Baru Ekspres VII tanggal 22 Mei 2018.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.05.16.03. Tentang Masuknya Air ke Kamar Mesin Citra Mulia 9 tanggal 23 Mei 2018.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.07.26.03. Tentang Tubrukan antara Bunga Melati 79 (IMO 9020584) dengan Tk. Golden Way 3310 tanggal 19 Juli 2018.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.08.28.03. Tentang Meledaknya Mesin Motor Tempel Molise tanggal 7 Agustus 2018.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.08.28.03. Tentang Meledaknya Mesin Motor Tempel Molise tanggal 7 Agustus 2018.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.08.29.03. Tentang Kandasnya Altaf tanggal 10 Agustus 2018.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KNKT.18.09.31.03. Tentang Terbakarnya Fungka Permata V tanggal 14 September 2018.

- Lady, L., P. Marliana, A. Umyati. 2014. Kajian Kecelakaan Kapal di Pelabuhan Banten Menggunakan Human Factor Analysis and Classification System (HFACS). *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*. Vol. 3. No. 2. Hal. 46-52.
- Nathanael Ivan, Gurning, R.O.S., Pitana Trika. 2011. *Analisa Keselamatan Awak Kapal Berdasarkan Konsep The Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di Rute Penyebrangan Ketapang-Gilimanuk*. *Jurnal Kelautan*. Jurusan Teknik Kelautan. FTM-ITS: Surabaya.

# TRANSFORMASI SISTEM *MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL* TNI-AD GUNA Mendukung Kesiapan Alutsista (STUDI KASUS : Bengkel Pusat Peralatan Angkatan Darat)

Oleh:

Hamirudin<sup>1)</sup>, Timbul Siahaan<sup>2)</sup>, Sovian Aritonang<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>Hamirudin.id@gmail.com,

<sup>2</sup>timbulsiahaan57@yahoo.com,

<sup>3</sup>sovian.aritonang@idu.ac.id

## Abstrak

Kondisi alutsista yang prima dijamin dalam kegiatan pembinaan alutsista secara berkelanjutan. Khususnya TNI-AD kegiatan Perawatan dan perbaikan alutsista dilaksanakan oleh Bengkel Pusat Peralatan (Bengpuspal) yang berada di bawah komando pusat peralatan angkatan darat (Puspalad TNI-AD). Sejak saat itu Bengpuspal menjadi andalan TNI-AD untuk melakukan perawatan dan perbaikan alutsista. Namun kondisi Bengpuspal hingga saat ini dinilai tidak berkembang ditengah perkembangan teknologi alutsista global yang semakin modern dan canggih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di Bengpuspal serta untuk mengetahui strategi Bengpuspal untuk melakukan transformasi sistem yang lebih maju dan modern. Penelitian ini mengidentifikasi faktor sistem tata kelola, supply chain, kerjasama industri, program investasi, dan integrasi sistem. PEST analisis dipadukan dengan SWOT analisis untuk memberikan gambaran kondisi internal dan eksternal yang lebih komprehensif. Berdasarkan penelitian diketahui 4 level pemeliharaan dari level organik, bengkel lapangan, bengkel daerah, hingga bengkel pusat belum memiliki satu sistem yang terintegrasi satu dengan lainnya. Bengpuspal tidak berorientasi pada bisnis dan komersil seperti yang diterapkan pada industri jasa MRO sipil. Sehingga dengan demikian, prinsip-prinsip dasar bisnis seperti supply chain management belum di terapkan dengan baik. Namun demikian, Bengpuspal tetap memusatkan investasi peningkatan kemampuan pada bidang fasilitas fisik dan sumberdaya manusia. Disamping itu, Bengpuspal melakukan hubungan kerjasama dengan industri pertahanan walaupun tidak secara langsung. Bengpuspal menjalin kerjasama khususnya pendelegasian personel dalam rangka pelatihan teknisi perawatan dan perbaikan alutsista.

**Kata kunci :** *Maintenance Repair and Overhaul* militer, PEST analisis (Politik, ekonomi, Sosial, Teknologi), Sistem Perawatan Alutsista, SWOT Analisis (*Strengths, Weakness, Oportunities, Threats*), Transformasi sistem.

## 1. PENDAHULUAN

Perawatan alutsista merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung suatu proses operasi militer guna melaksanakan fungsi mempertahankan kedaulatan negara. Prosedur pemeliharaan alutsista TNI tersusun secara bertingkat dan berjenjang sesuai dengan tingkatan pemeliharaan materiil dan tingkatan pelaksana tugas pemeliharaan materiil (Dirjen Kuathan, 2020). Pemeliharaan materiil sebagai pemeliharaan dan pencegahan atau pemeliharaan organik dilaksanakan di satuan pe-makai. Selanjutnya untuk pemeliharaan tingkatlapangan dilaksanakan oleh satuan pemeliharaan di tingkat korem yaitu bengkel lapangan. Untuk pemeliharaan tingkat daerah dikerjakan oleh bengkel daerah yang merupakan satuan pemeliharaan di tingkat kodam. Sedangkan tingkat pemeliharaan tertinggi berada pada bengkel pusat peralatan yang berperan sebagai pusat komando bengkel pusat.

Pemeliharaan dan perbaikan materiil adalah salah satu tugas pembinaan material di Puspalad. Puspalad memiliki satuan pelaksana tugas khusus dalam menyelenggarakan perawatan dan perbaikan

alutsista. Satuan tersebut adalah Bengkel Pusat Peralatan Angkatan Darat disingkat menjadi Bengpuspal Puspalad. Bengpuspal biasa juga disebut dengan unit kekhasan TNI-AD, karena dianggap satu-satunya matra TNI yang memiliki fasilitas pemeliharaan dan perbaikan alutsistanya sendiri (Liputan6, 2009). Bengpuspal saat ini memiliki dua jenis bengkel yang telah lama beroperasi, yakni Bengkel kendaraan dan bengkel senjata dan optronik. Untuk bengkel kendaraan, dibedakan pula berdasarkan jenis kendaraanya, yaitu bengkel kendaraan panser, Bengkel kendaraan Tank, dan Bengkel kendaraan umum, khusus, dan taktis. Sedangkan pada bengkel senjata, Bengpuspal memiliki bengkel senjata dan optronik.

Keberadaan Bengpuspal sejak tahun 1948 menjadikan Bengpuspal telah berumur lebih dari 7 dekade dimana sebagian besar dari fasilitas gedung bengkel masih merupakan warisan dari Belanda yang sudah seharusnya dimodernisasi (Rizal H. , 2007). Selain modernisasi gedung bengkel serta peralatan didalamnya, keberadaan Bengpuspal juga terancam *collaps* karena jumlah personel tenaga teknisi ahli

yang berasal dari kalangan PNS mulai menurun tiap bulan karena usia yang sudah mencapai purna tugas (pensiun). Selain itu, keberadaan Bengpuspal lambat laun akan tergantikan seiring perkembangan industri pertahanan dalam negeri yang mulai menunjukkan peningkatan kemampuan, tidak hanya di bidang produksi, namun dibidang pemeliharaan dan perbaikan alutsista. Sebut saja contohnya PT. Pindad Persero yang memproduksi panser anoa, komodo dan panser Badak (Pindad, 2021). Kegiatan perawatan dan perbaikan pada alutsista tersebut, akan ditangani langsung oleh PT. Pindad baik dikerjakan di fasilitas bengkel peru-sahaan ataupun teknisi perusahaan yang datang menyambangi lokasi tugas dari alutsista tersebut. Belum lagi dibidang senjata dan optronik, satuan pemakai banyak yang ingin mendirikan fasilitas pemeliharaannya sendiri. Permasalahan lain yang lebih serius adalah dengan berkembangnya teknologi persen-jataan dan sistem pertahanan yang semakin kompleks seakan menegaskan bahwa Bengpuspal dan Indonesia masih jauh tertinggal bahkan untuk kegiatan peemeliharaan dan perbaikan. Bengpuspal belum dibekali dengan kemampuan khusus dalam memperbaiki kendaraan tempur, kendaraan taktis, dan sistem senjata yang lebih kompleks seperti melibatkan *software* untuk sistem kontrol, sistem sensor, jaringan dan komunikasi.

Bengpuspal sudah seharusnya bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Bengpuspal harus mampu mengambil bagian dalam kemajuan teknologi pertahanan. Dalam tulisan tesisnya di *US Army War College*, Kolonel Ronald J. Pulignani menjelaskan ada 5 Variabel kajian dalam mewujudkan transformasi sistem fasilitas pemeliharaan alutsista. Semua variabel yang diteliti tersebut akan digunakan juga dalam penelitian kali ini yaitu berturut-turut sistem tata kelola, kerjasama dengan industri pertahanan, *supply chain*, program investasi, integrasi dalam satu sistem bersama. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber di Pusalad dan Bengpuspal, maka di temukan beberapa informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian kali ini. Dibagian analisis kondisi internal dan eksternal penulis menggunakan *tools* analisis PEST yang dipadukan dengan analisis SWOT. PEST analisis dipadukan dengan SWOT analisis digunakan untuk memberikan gambaran kondisi internal dan eksternal organisasi yang lebih komprehensif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi saat ini dan sedang berlangsung dengan tujuan untuk memberikan deskripsi tentang hal yang terjadi pada saat penelitian dilakukan (Hermawan & Yusran, 2017). Menurut Singarimbun dan Effendi (2008) pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menguji substansi dan susunan pertanyaan yang telah

tertera dalam rancangan kuesioner maupun wawancara mendalam dengan subjek penelitian.

Subjek penelitian merupakan suatu hal yang memiliki kedudukan yang penting dalam penelitian karenanya peneliti harus mempersiapkan instrumen sebelum mengumpulkan data (Ismail Nurdin, 2019). Untuk mengetahui kondisi internal dan sistem yang berlaku di Bengpuspal, peneliti melakukan penelitian mulai dari satuan pusat yaitu Pusat Peralatan Angkatan Darat (PUSPALAD). Penelitian lebih lanjut dilakukan di Bengkel Pusat peralatan untuk mengetahui lebih dalam sistem yang berlaku dan mengetahui kondisi internal dan kondisi eksternal yang dihadapi oleh Bengpuspal. Kondisi tersebut kemudian dipetakan dengan menggunakan PEST analisis yang digabung dengan SWOT analisis. Penyajian data diberikan dalam bentuk matriks atau tabel untuk masing-masing faktor dalam PEST.

## 3. HASIL PENELITIAN

### Sistem tata kelola

Sistem manajemen dalam bengkel pusat peralatan angkatan darat mengacu pada keputusan kepala staff angkatan darat no 69 tahun 2016.



Gambar 1. Struktur organisasi Bengpuspal Pusalad  
Sumber : Perkasad No. 69 Tahun 2016

Bengpuspal dikepalai oleh se-orang Pamen Angkatan Darat ber-pangkat Kolonel, sebagai pimpinan Bengpuspal merupakan unsur pelaksana Pusalad yang berkedudukan langsung di bawah Kapuspalad. Kabengpuspal bertugas menyelenggarakan pemeliharaan materiel peralatan dalam rangka mendukung tugas pokok Pusalad. Kabengpuspal dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kapuspalad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapuspalad.

Pembantu-pembantu Kabeng-puspal ada kepala bagian pemeliharaan kendaraan, kepala bagian pemeliharaan senjata dan optronik, serta kepala bagian umum. Sedangkan eselon pelayan kabengpuspal memiliki kasi tuud. Kegiatan teknis pelaksana bengpuspal memiliki kepala bengkel kendaraan, kepala bengkel senjata dan optronik, kepala bengkel teknik dan mekanik, kepala bengkel hidronika dan listrik, dan kepala gudang.

Khususnya di bagian bengkel yang menjadi pusat kegiatan pemeliharaan terdapat bengkel panser, bengkel tank, dan bengkel kendaraan umum, kendaraan taktis, dan kendaraan khusus. Selain bengkel kendaraan ada juga fasilitas bengkel senjata dan optronik dan bengkel peralatan teknik mekanik.

Adapun alur prosedur pemeliharaan tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Bengpuspal adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Prosedur Pemeliharaan Tingkat Pusat

Sumber : Bengpuspal Puspalad, 2021

Keterangan :

1. Satuan pemakai mengajukan perbaikan kendaraan atau senjata ke areal service (paldam);
2. Dasar ajuan satuan pemakai, paldam melaksanakan pemeriksaan materiil dan mengajukan ke puspalad untuk perbaikan; 2a. Kapaldam menembusi kabeng-puspal;
3. Kapuspalad perintah kabengpuspal untuk melaksanakan pemeriksaan materiil bersama tim paldam ke satuan pemakai;
4. Kabengpuspal melaporkan hasil pemeriksaan materiil ke kapuspalad (termasuk kebutuhan suku cadang, kerusakan dll);
5. Kapuspalad mengeluarkan surat perintah pelaksanaan perbaikan dan dukungan suku cadang guna perbaikan ke bengpuspal;
6. Materiil dikirim ke bengpuspal; dan
7. Pengujian kendaraan tempur atau senjata, dan penyerahan materiil hasil perbaikan.

### Kerjasama Industri Pertahanan

Program kerjasama memung-kinkan fasilitas pemeliharaan untuk tetap mempertahankan kemampuan dasar organisasi. Dengan program kerjasama dengan pihak luar memungkinkan untuk meningkatkan kapasitas layanan, meningkatkan keterampilan teknisi, serta mendapat dukungan fasilitas bengkel sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama.

Bengpuspal sebagai bengkel pusat pemeliharaan materiil angkatan darat banyak terlibat dalam program kerjasama pengadaan alutsista. Keterlibatan Bengpuspal selama ini berupa keikutsertaan personil dalam pengadaan alutsista. Personil yang diutus dalam program pengadaan bertugas untuk melaksanakan *transferoftechnology* khususnya di bagian perawatan dan perbaikan.

Kerjasama dengan Industri Pertahanan dalam negeri yang terjalin yaitu dengan PT. Pindad (Persero). Kerjasama yang dijalin berupa kerjasama pelatihan personil untuk perawatan kendaraan tempur jenis panser anoa, komodo, Panser badak 6x6 Kanon 90 mm dan tank harimau. Namun untuk alutsista produk PT. Pindad biasanya untuk kegiatan

pemeliharaannya kembali dilakukan di bengkel milik PT. Pindad itu sendiri.

Sementara di sektor swasta terjadi kerjasama secara tidak langsung yaitu berupa penyediaan spare part dan tools bengkel oleh beberapa produsen swasta dalam negeri. kerjasama tidak berlangsung pada tingkat yang lebih jauh seperti pelatihan personil dan dukungan fasilitas. Kerjasama dengan industri swasta lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan suku cadang yang dilakukan dengan mekanisme tender di tingkat pusat pada saat pelaksanaan perencanaan dan pengadaan rencana tahunan. Perusahaan yang memenangkan tender pengadaan spare part tersebutlah yang akan menjadi partner dalam pengerjaan perbaikan selama jangka waktu yang sudah disepakati bersama.

Bengpuspal belum melakukan kerjasama dengan produsen luar negeri secara langsung. Kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri berkaitan dengan perjanjian kerjasama pada saat pembelian alutsista. Biasanya kerjasama ini dilakukan pada tingkat pusat bersama dengan kementerian pertahanan. Namun, dalam beberapa kerjasama pembelian alutsista seperti pembelian tank leopard, bengpuspal dilibatkan dalam proyek dimana ada perjanjian kerjasama berupa dukungan penyediaan suku cadang hingga dukungan pembuatan workshop untuk kebutuhan pemeliharaannya yang di bangun di Bengpuspal. Selain itu, teknisi di Bengpuspal juga di bimbing langsung oleh teknisi dari negara produsen terkait kegiatan pemeliharaan baik yang dilakukan ketika masih di negara produsen maupun di markas bengpuspal itu sendiri. Begitupula dengan program pengadaan meriam cesar 155/52, personil Bengpuspal juga dilibatkan dalam training khususnya untuk kegiatan perawatan dan perbaikan serta diberikan dukungan berupa spare part dan pengadaan workshop di Bengpuspal.

Tidak semua program pembelian alutsista, Bengpuspal dilibatkan dalam pelatihan teknisi perawatan dan perbaikan. Salah satu contoh pada saat pengadaan peluncur roket astros dari negara Brazil. Pihak Bengpuspal tidak satupun dilibatkan dalam proses kerjasama sehingga Bengpuspal tidak memiliki informasi dan keahlian terkait pemeliharaan dan perbaikan jika terjadi kerusakan pada alutsista tersebut. Namun demikian, Bengpuspal harus tetap melaksanakan kegiatan perbaikan meriam astros, padahal personil Bengpuspal belum dibekali kemampuan memperbaiki alutsista tersebut.

Dari wawancara dengan narasumber, diperoleh informasi bahwa seharusnya dukungan berupa dukungan fasilitas alih teknologi dan training teknisi perbaikan alutsista selalu di siapkan oleh pihak produsen alutsista. Hal ini juga selalu tertuang dalam perjanjian kerjasama pada saat pembelian alutsista. Namun yang sering terjadi adalah Bengpuspal sering tidak di libatkan sehingga produsen tidak mengetahui bahwa ada fasilitas

pemeliharaan dan perbaikan yang dimiliki oleh TNI-AD. Padahal Produsen luar negeri cenderung lebih setuju jika kerjasama bidang pemeliharaannya terpusat di bengpuspal, sehingga produsen alutsista tidak perlu melakukan ToT pemeliharaan di banyak pihak.

### **Supply chain**

Prinsip dasar *supply chain* adalah adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian dari hulu sampai ke hilir. Peran efektifitas rantai pasokan khususnya di perusahaan dengan bisnis *oriented* merupakan faktor mutlak yang harus diperhatikan dalam proses bisnis. Rantai pasokan memberikan kontribusi signifikan dalam persaingan bisnis dalam kecepatan waktu, efisiensi anggaran, inovasi produk/jasa, serta meningkatkan produktivitas. Bengpuspal dalam hal ini bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan dan perbaikan alutsista juga patut menerapkan sistem-sistem *supply chain management* dalam pelaksanaan tugasnya.

Bengpuspal dalam hal pasokan suku cadang, komponen pendukung, maupun material lainnya yang dibutuhkan di bengkel belum menerapkan sistem *supply chain* modern seperti yang diterapkan dalam perusahaan-perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa pemeliharaan. Bengpuspal yang menerima mandat memeriksa materiil sudah mampu mengidentifikasi tingkat kerusakan dan dapat menentukan kebutuhan suku cadang dan material lainnya yang dibutuhkan. Tim lapangan dari Bengpuspal akan memberikan laporan serta membuat daftar keperluan suku cadang kepada Kabeng-puspal yang kemudian diajukan ke Puspalad. Dari Puspalad kemudian mer-angkum seluruh jenis kebutuhan dari berbagai satuan dibawahnya untuk dijadikan sebagai rencana program kerja tahunan. Rencana kerja tahunan ter-sebut masih di ajukan lagi ke Mabes-AD hingga kelevel atas di kementerian per-tahanan untuk di sesuaikan dengan anggaran yang ada. Tidak semua peng-ajuan akan selalu di *approved* dan disetujui, hal ini tergantung pada ketersediaan anggaran sehingga di-sesuaikan lagi berdasarkan tingkat prioritas.

Proses panjang yang terjadi seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri diantaranya adalah suku cadang atau material yang datang tidak sesuai dengan yang diminta. Barang yang tidak sesuai tidak bisa lagi dikem-balikan atau di tukar dengan yang baru yang sesuai dengan spesifikasi yang di ajukan. Tentunya ini menyebabkan ketidak-sesuaian spesifikasi suku cadang dengan alutsista yang diperbaiki sehingga berpotensi membahayakan keselamatan prajurit.

Disegi *supply* Kinerja *supply chain* dalam bisa dikembangkan lagi dengan membentuk jaringan dengan industri-industri komponen dan suku cadang baik BUMN maupun swasta. Kemitraan di sektor hulu dapat meningkatkan produktivitas di sektor industri kom-ponen. sedangkan disektor *demand*, Bengpuspal dapat mengintegrasikan gudang pusat dan gudang daerah terkait kebutuhan stok suku

cadang dan komponen. Terlebih lagi jika integrasi dengan memanfaatkan teknologi *software* yang berupa *enterprise resource planning*, maka akan sangat mem-udahkan dalam ketepatan perencanaan pengadaan suku cadang.

### **Program Investasi Peningkatan Kemampuan**

*Continuous improvement* adalah salah satu prinsip dalam suatu industri manufaktur maupun jasa (Simanjuntak, 2016). Pengem-bangan berkelanjutan didasari oleh pemikiran bahwa dinamika jaman selalu berubah seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Industri manu-faktur maupun jasa secara langsung terlibat dalam arus perkembangan dunia yang begitu cepat dan dinamis. Pihak manajemen yang memiliki otoritas merencanakan per-ubahan patutnya memiliki visi jauh kedepan dalam memprediksi tantangan global yang akan dihadapi sehingga mampu merumuskan strategi peng-embangan yang tepat oleh organisasi.

Bengpuspal menyadari sepe-nuhnya bahwa peningkatan kemam-puan harus terus dilakukan. Mengingat pentingnya Bengpuspal di tubuh TNI-AD membuat Bengpuspal selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk mampu menjalankan tugasnya menyeleng-garakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. Ada dua hal pokok yang bisa ditemukan dalam kondisi Bengpuspal saat ini.

#### **1. Fasilitas fisik**

fasilitas fisik bengpuspal mencakup seluruh kawasan seluas 13 ha lahan beserta seluruh gedung fasilitas baik gedung administrasi, bengkel-bengkel, gudang dan fasilitas penunjang lainnya. Khususnya pada kegiatan pusat pemeliharaan dan perbaikan, beng-puspal memiliki bengkel kendaraan panser, bengkel kendaraan tank, bengkel kendaraan umum/khusus, dan memiliki bengkel senjata dan optronik. Gedung-gedung bengkel yang ada saat ini adalah masih termasuk warisan Belanda yang sudah berumur, walaupun beberapa diantaranya adalah fasilitas baru yang didirikan oleh hasil kerjasama seperti bengkel tank leopard. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki di bengkel pemeliharaan ini tidak jauh berbeda dengan bengkel-bengkel pada umum-nya. Tidak ada tekhnologi khusus yang digunakan, hanya mengandalkan tools yang ada dan keahlian teknisi yang bertugas.

#### **2. Investasi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah salah satu aspek terpenting bahkan tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan organi-sasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya kebe-radaan SDM di dalam sebuah organisasi berperan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Bengpuspal sebagai badan pelaksana tugas dalam hal perawatan dan perbaikan materiil angkatan darat menempatkan keberadaan SDM berkualitas sebagai ujung tombak dari suksesnya pekerjaan. Saat ini Bengpuspal diperkuat oleh 369 orang personel

gabungan sipil (PNS) dan Militer dengan perbandingan 35% militer dan 65% sipil. Jumlah ini masih terbelah kurang dari postur ideal Bengpuspal yang seharusnya berjumlah 552 orang personel. Sejauh proses wawancara yang dilakukan, permasalahan yang paling *urgent* yang ada di Bengpuspal saat ini adalah tentang SDM. SDM Bengpuspal terbagi atas personil sipil dan militer yang tersebar di seluruh bagian organisasi. Khusus pada bengkel pemeliharaan, keberadaan teknisi ahli yang dari kalangan PNS mulai berkurang setiap bulan karena umur personil sudah memasuki purna tugas (pensiun). Pengurangan jumlah teknisi ahli sangat mengkhawatirkan karena tidak dibarengi dengan sistem rekrutmen yang memadai. Teknisi yang sangat diperlukan adalah dari kalangan PNS yang memiliki keterampilan teknik yang mumpuni dengan latar belakang keilmuan keteknikan. Selama ini teknisi-teknisi ahli sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan di berbagai negara yang terlibat langsung program kerjasama pengadaan alutsista. Kemampuan teknisi ahli ini perlu di wariskan kepada generasi selanjutnya namun belum ada rekrutmen PNS lagi sejak tahun 2014. Umur rata-rata PNS di Bengpuspal sudah mencapai 40 tahun sampai 47 tahun yang sebentar lagi akan memasuki waktu pensiun. Personil militer pun setiap tahun tidak pasti ada penambahan. Sudah saatnya investasi di bidang sumber daya manusia ini segera di pikirkan, mulai dari perencanaan kualifikasi, manajemen kinerja, kompensasi, program pengembangan SDM.

#### **Integrasi dalam Satu Sistem Bersama**

Integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh (KBBI, 2020). Sedangkan integrasi sistem adalah proses penyatuan manajemen, komponen fisik maupun virtual dari berbagai elemen organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Integrasi dalam satu sistem bersama dewasa ini menjadi sangat penting bagi suatu instansi atau perusahaan karena ia dapat mampu menjawab berbagai permasalahan umum yang sering terjadi. Antara lain proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, mengurangi tumpang tindih fungsi, database yang akurat, penghematan anggaran, dan peningkatan produktivitas.

Kegiatan pemeliharaan yang dikelola oleh Puspalad meliputi 4 level kegiatan pemeliharaan. Level 1 atau sering disebut juga level organik adalah tingkat pemeliharaan paling rendah yang dilakukan oleh si pemakai alutsista. Pemeliharaan level ini berkedudukan pada satuan masing-masing pemakai. Contoh kegiatan pemeliharaan berupa pengecekan rutin, pembersihan pasca pakai latihan maupun operasi militer, dan perawatan tingkat rendah lain yang masih bisa dilakukan oleh personil pemakai. Pemeliharaan level 2 adalah pemeliharaan yang dilakukan oleh bengkel lapangan yang masih berkedudukan pada tingkat Korem. Jenis perawatan yang dilakukan adalah jenis perawatan yang tidak mampu dilakukan oleh personil pemakai pada level 1

seperti mengganti oli, menambal ban, melakukan pengecekan berkala, dan lain sebagainya. Tingkat pemeliharaan selanjutnya adalah pemeliharaan level 3 yang dilakukan oleh bengkel daerah yang berkedudukan di Kodam-kodam.

Pemeliharaan yang dilakukan adalah kegiatan pemeliharaan yang lebih berat yang tidak mampu lagi dilaksanakan oleh bengkel lapangan. Contoh aktivitas pemeliharaan pada level 3 adalah mengganti sparepart, melakukan pengecekan mesin, sistem kendali, kelistrikan dan lain-lain. Sedangkan tingkat pemeliharaan paling tinggi adalah pemeliharaan level 4 yang dilakukan oleh Bengkel Pusat yang berkedudukan langsung di bawah kendali Puspalad. Jenis perawatan yang dilakukan adalah melakukan maintenance, repair, hingga overhaull alutsista yang mengalami kerusakan berat.

Pelaksanaan tugas dan kaitannya dengan bengkel-bengkel lain di daerah dan satuan pemakai, bengpuspal tidak memiliki satu hubungan sistem yang terintegrasi. Bengkel-bengkel daerah menjalankan fungsinya masing masing sesuai dengan kemampuannya. Prakteknya ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang seharusnya dikerjakan oleh bengkel daerah, namun bengkel daerah tidak memiliki kemampuan dan menyerahkan ke Bengkel pusat. sisi lain, sering terjadi juga satuan pemakai yang melakukan perawatan dan perbaikan alutsistanya sendiri walaupun tingkat kerusakannya sudah pada level 4.

Ada potensi bahwa beberapa satuan pemakai hendak mendirikan fasilitas pemeliharaan level 4 di satuannya masing-masing. Bengpuspal sebagai bengkel pusat harus mampu mempertahankan posisinya sebagai satuan yang memiliki fokus tugas bidang pemeliharaan dan perbaikan alutsista. Pada masa damai, satuan pemakai bisa saja melaksanakan fungsi-fungsi tambahan seperti memelihara dan memperbaiki alutsista. Namun, ketika dimasa konflik, satuan-satuan tersebut akan dikerahkan dalam medan pertempuran dan kesulitan melakukan fungsi pemeliharaan. Oleh karena itu, penting untuk memusatkan satuan pemeliharaan dan perbaikan pada satu bengkel pusat. dengan kata lain, fokus pada tugas dan fungsi masing-masing dan tidak saling mengambil fungsi dan tugas.

Dampak dari integrasi ke dalam satu sistem bersama adalah akan ada fasilitas-fasilitas pemeliharaan yang di bubarkan karena terjadi tumpang tindih tugas. Selain itu, diharuskan penambahan fasilitas baru yang memadai karena utilitas pekerjaan akan sangat padat. Fasilitas baru yang dibangun juga ditopang dengan penambahan sumber daya manusia terampil yang mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas pemeliharaan dan perbaikan dengan baik.

Melihat proses birokrasi Bengpuspal seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, proses birokrasi dan rantai komando yang diterapkan sangatlah panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Sistem

yang diterapkan seperti ini memiliki dampak secara tidak langsung kepada organisasi Bengpuspal. Bengpuspal tidak memiliki kebebasan yang penuh untuk menetapkan kebijakannya sendiri. TNI-AD sebaiknya berani melakukan terobosan ekstrim untuk mengubah Bengpuspal menjadi fasilitas pemeliharaan yang profesional dan modern layaknya Industri pertahanan yang berfokus pada pemeliharaan.

#### 4. PEMBAHASAN

Bagian analisa penulis menggunakan tools PEST yang digabungkan dengan analisa SWOT. Analisa ini memberikan gambaran komprehensif internal dan eksternal organisasi.

##### Politik

Bengkel Pusat Peralatan Angkatan Darat merupakan institusi negara yang tidak bisa dipisahkan dari aspek politik. Kondisi strategis nasional juga akan sangat berpengaruh terhadap dinamika internal organisasi. kondisi politik dalam negeri seperti pesta demokrasi, pergantian presiden, menteri pertahanan, panglima TNI-AD hingga dinamika politik lain yang berpengaruh. Kali ini ulasan tentang pengaruh politik dalam organisasi Bengpuspal adalah sebagai berikut.

Tabel 1. SWOT bidang Politik  
Sumber : diolah peneliti, 2021

<b>INTERNAL</b>	<b>Strength</b> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta	<b>Weakness</b> 1. Program-program modernisasi alutsista yang dicanangkan kementerian pertahanan bertujuan untuk memperbaharui dan meningkatkan kekuatan TNI melalui memperkuat alat utama sistem senjata. Program ini meliputi pengadaan alutsista baru dan memperbaiki alutsista lama yang sudah ada. Namun sayangnya program ini, tidak mengarah pada modernisasi fasilitas-fasilitas perawatan dan perbaikan. Salah satu contohnya adalah Bengpuspal sendiri tidak mendapatkan sentuhan khusus guna peningkatan kemampuan untuk memodernisasi alutsista TNI-AD. program modernisasi alutsista terlalu terfokus pada alat utama sistem senjata dan tidak memberikan perhatian lebih kepada fasilitas pemeliharaan. 2. Kurangnya keberpihakan
	<b>EKSTERNAL</b>	

	Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 460); Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444 Peraturan Kepala Staff Angkatan Darat No. 69 Tahun 2016 tentang Orgas Bengpuspal Peraturan kepala staff angkatan darat No. 26 Tahun 2019 tentang Orgas Puspalad	kebijakan politik anggaran pemerintah kepada Bengpuspal dalam rangka peningkatan kemampuan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan alutsista.
<b>Opportunities</b>	<b>Asumsi Strategi S-O</b>	<b>Asumsi Strategi W-O</b>
Meningkatnya rencana Pembelian alutsista dalam dan luar negeri oleh pemerintah	Perlu adanya kebijakan kuat dari pemerintah untuk menjadikan Bengpuspal sebagai organisasi besar yang bergerak di bidang pemeliharaan dan perbaikan.	Dibutuhkan Undang-undang semacam UU No. 12 Tahun 2016 yang mengatur khusus dibidang pemeliharaan dan perbaikan alutsista.
<b>Threats</b>	<b>Asumsi Strategi S-T</b>	<b>Asumsi Strategi W-T</b>
1. Terdapat persaingan antar satuan pemakai dan bengpuspal dalam hal proses alih teknologi pemeliharaan dan perbaikan. Fenomena ini membuat bengpuspal tidak dilibatkan dalam proses kerjasama pembelian alutsista. 2. Bengpuspal akan bersaing dengan industri pertahanan seperti Pindad, dimana untuk perbaikan panser anoa, komodo, panser badak untuk pemeliharaan dan perbaikan, cenderung di ambil alih oleh PT. Pindad (Persero).	Menekankan tugas dan wewenang masing-masing agar tidak terjadi inefisiensi dan tumpang tindih pekerjaan dalam hal perawatan alutsista.	Meningkatkan kemampuan pada perawatan dan perbaikan alutsista pembelian luar negeri yang tidak bisa dilakukan oleh para pesaing.

##### Ekonomi

Keberadaan Bengpuspal sebagai lembaga militer dengan orientasi non profit menjadikan organisasi ini tidak terlalu memiliki kepentingan besar terhadap bidang ekonomi. Namun faktor

ekonomi seperti ketersediaan anggaran pertahanan negara secara langsung berdampak pada kinerja Bengpuspal.

Tabel 2. SWOT bidang Ekonomi  
Sumber : diolah peneliti, 2021

<b>INTERNAL</b>	<b>Strength</b> Bengpuspal mampu melaksanakan tugas pemeliharaan dan perbaikan alutsista tanpa mengeluarkan modal tertentu	<b>Weakness</b> 1. Bengpuspal tidak mengelola anggarannya sendiri, sehingga tidak mampu melakukan inovasi atau terobosan yang bersifat peningkatan kemampuan fisik maupun kemampuan sumber daya manusianya secara langsung. 2. Anggaran yang serba terbatas yang dikelola dipusat mengharuskan semua program harus berjalan berdasarkan ranking prioritas tahunan. 3. Bengpuspal tidak bisa melakukan proses bisnis karena institusi TNI tidak diperbolehkan untuk berbisnis
	<b>EKSTERNAL</b>	
<b>Opportunities</b>	<b>Asumsi Strategi S-O</b>	<b>Asumsi Strategi W-O</b>
Adanya irisan jenis alutsista yang sama dimiliki mitra lain selain TNI-AD	1. Dalam rangka meningkatkan produktivitas, Bengpuspal disarankan aktif mengadakan kerjasama dengan industri pertahanan dan industri komponen secara mandiri 2. mulai mengerjakan project diluar TNI-AD dengan menawarkan kualitas pemeliharaan dan perbaikan alutsista	Inovasi pengelolaan anggaran yang memungkinkan memberi ruang bagi lembaga untuk melakukan pengembangan organisasi
<b>Threats</b>	<b>Asumsi Strategi S-T</b>	<b>Asumsi Strategi W-T</b>
Investasi yang sangat mahal, membutuhkan modal dalam jumlah besar untuk bertransformasi menjadi sistem yang lebih kompleks dan modern.	Investasi membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga perlu kolaborasi antar sektor	Militer Memikirkan opsi untuk menjalankan instansi profit namun dengan sistem manajemen professional

**Sosial**

Aspek manusia sebagai aktor kegiatan pemeliharaan dan perbaikan adalah ujung tombak dari organisasi ini. Kemajuan sebuah organisasi ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam menguasai ilmu pengetahuan disertai budaya yang konstruktif dan etis, sehingga menghasilkan keluaran dan manfaat bagi seluruh manusia anggota organisasi.

Tabel 3. SWOT bidang Sosial  
Sumber : diolah peneliti, 2021

<b>INTERNAL</b>	<b>Strength</b> • Teknisi terampil di bidang pemeliharaan dan perbaikan tank, panser, ranum, ransus, rantis, serta senjata dan optronik. • Personel militan dan loyal terhadap organisasi • Memiliki etos kerja dan semangat yang tinggi • Lingkungan kerja yang bersahabat	<b>Weakness</b> 1. Jumlah teknisi dari kalangan sipil menurun setiap bulan karena pensiun 2. Tidak ada pengangkatan PNS untuk ditempatkan di Bengpuspal 3. Sistem kompensasi murni hanya gaji, tidak ada insentif tambahan seperti lembur dll.
	<b>EKSTERNAL</b>	
<b>Opportunities</b>	<b>Asumsi Strategi S-O</b>	<b>Asumsi Strategi W-O</b>
Rekrutmen PNS tiap tahun dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi diutamakan untuk rekrutmen PNS untuk formasi di Bengpuspal Program magang (praktek lapangan) Siswa SMK dan mahasiswa	1. Meningkatkan keterampilan teknisi melalui kegiatan pelatihan, sekolah, dan sertifikasi keahlian 2. Meningkatkan loyalitas personil dengan memberikan penghargaan kepada personel yang berprestasi 3. Meningkatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk seluruh personel	Menambah personil teknisi ahli dengan mengajukan program prioritas pengadaan pegawai negeri sipil dilingkunga Bengpuspal
<b>Threats</b>	<b>Asumsi Strategi S-T</b>	<b>Asumsi Strategi W-T</b>
1. Rantai prosedur yang panjang 2. Teknisi Bengpuspal tidak dilibatkan dalam program kerjasama pengadaan alutsista 3. Tidak ada kebijakan yang kuat dari pusat untuk meregenerasi sumber daya manusia khususnya di bagian teknisi.	1. Mendorong Bengpuspal untuk mandiri dalam pengadaan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Mendorong keterlibatan personel dalam program ToT pada saat pembelian alutsista	Mengadakan program kerjasama tenaga magang di instansi kampus dan sekolah kejuruan (SMK)

**Teknologi**

Teknologi yang digunakan oleh militer seharusnya merupakan teknologi terbaru dan paling mutakhir. Pertimbangannya adalah ancaman tidak boleh lebih canggih dibandingkan sistem pertahanan yang dimiliki oleh TNI. Maka dari itu, alutsista TNI selalu dimodernisasi dan di perbaharui.

Tabel 4. SWOT bidang Teknologi  
Sumber : diolah peneliti, 2021

<b>INTERNAL</b>	<b>Strength</b> 1. Bengpuspal memiliki fasilitas berupa bengkel pemeliharaan yang terbagi atas bengkel panser, bengkel tank, dan bengkel kendaraan administrasi, kendaraan umum, dan kendaraan khusus. 2. Untuk pemeliharaan senjata, Bengpuspal	<b>Weakness</b> • Tekhnologi di bengkel pemeliharaan tidak ada peralatan yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Pengerjaan masih cenderung dengan tenaga manual • Mesin mekanik justru mengalami kerusakan, seperti mesin CNC.
	<b>EKSTERNAL</b>	

	memiliki bengkel senjata dan optronik. 3. Bengpuspal memiliki peralatan mekanik dan beberapa mesin canggih, salah satunya adalah mesin CNC, mesin bubut, mesin milling, mesin sekrap, mesin planner dan mesin-mesin mekanik lainnya. Mesin-mesin ini digunakan untuk membuat suku cadang tertentu dalam jumlah terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki kemampuan teknis memperbaiki kerusakan sistem control yang berkaitan dengan sistem komunikasi, sistem kontrol otomatis, sensor, dan kerusakan yang melibatkan piranti lunak dan jaringan.</li> </ul>
<b>Opportunities</b>	<b>Asumsi Strategi S-O</b>	<b>Asumsi Strategi W-O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Program modernisasi alutsista</li> <li>Program transfer of technology</li> <li>Mengembangkan kemampuan komputerisasi, software, jaringan, dan pemrograman.</li> <li>Mengembangkan sistem informasi berbasis aplikasi bengkel terintegrasi dari pusat hingga bengkel-bengkel daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan program modernisasi alutsista tidak hanya pada alutsistanya namun modernisasi hingga fasilitas pemeliharaan dan perbaikan alutsista</li> <li>Kerjasama pembelian alutsista bisa di maksimalkan lagi sehingga Bengpuspal menjadi penerima transfer of technology kerjasama dibidang offset pemeliharaan dan perbaikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sistem perawatan dari serba manual menjadi sistem otomatis.</li> <li>Simulator <i>maintenance, repair, and overhaul</i> alutsista</li> </ol>
<b>Threats</b>	<b>Asumsi Strategi S-T</b>	<b>Asumsi Strategi W-T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Teknologi pertahanan meningkat semakin canggih</li> <li>Akuisisi teknologi pertahanan perkara yang sulit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Upgrade kemampuan teknis untuk alutsista terbaru</li> <li>Upgrade fasilitas bengkel</li> </ol>	Investasi untuk keahlian baru di bidang sistem komunikasi, sistem kontrol otomatis, sensor, software, dan jaringan.

### 5. KESIMPULAN

Bengpuspal memiliki sistem tata kelola yang terstruktur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun bengpuspal memiliki hambatan dan tantangan yang serius dalam bertransformasi menjadi lebih professional dan modern. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan fasilitas pemeliharaan dalam lingkup Puspalad terdiri dari pemeliharaan level 1 di tingkat organik, level 2 ditingkat bengkel lapangan, level 3 di tingkat bengkel daerah, dan level 4 di tingkat bengkel pusat. Semua fasilitas pemeliharaan yang ada belum memiliki satu sistem yang terintegrasi satu dengan lainnya atau masih berjalan sendiri-sendiri. Bengpuspal melaksanakan tugas sebagai fasilitas pemeliharaan tingkat pusat di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat yang menjalankan fungsinya berdasarkan perkasad nomor 69 tahun 2016 dan sesuai doktrin militer dimana instansi

Bengpuspal tidak berorientasi pada bisnis dan komersil seperti yang diterapkan pada industri jasa MRO sipil. Sehingga dengan demikian, prinsip-prinsip dasar bisnis seperti *supply chain management* belum di terapkan dengan baik di Bengpuspal. Namun demikian, Bengpuspal tetap memusatkan investasi peningkatan kemampuan pada bidang fasilitas fisik dan sumberdaya manusia. Disamping itu, Bengpuspal melakukan hubungan kerjasama dengan industri pertahanan walaupun tidak secara langsung. Bengpuspal menjalin kerjasama khususnya pendelegasian personel dalam rangka pelatihan teknis perawatan dan perbaikan alutsista.

2. Berdasarkan hasil analisa SWOT di empat bidang strategis yang digunakan (analisa PEST), peneliti menemukan strategi yang dapat dilakukan untuk menjadikan Bengpuspal bertransformasi menjadi MRO TNI, yaitu sebagai berikut :
  - Mendorong Bengpuspal sebagai pelaku utama dalam penguasaan teknologi MRO alutsista nasional
  - mengadakan kerjasama dengan industri pertahanan dan industri komponen secara mandiri dan mulai mengerjakan *project* di luar TNI-AD dengan menawarkan kualitas pemeliharaan dan perbaikan alutsista yang berkualitas.
  - Meningkatkan keahlian teknis melalui kegiatan pelatihan, sekolah, dan sertifikasi keahlian berstandar internasional.
  - Investasi peningkatan kemampuan fasilitas bengkel dan menjangkau lebih banyak jenis alutsista.

### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Kuathan. (2020, Agustus 12). seminar pemeliharaan alutsista. Diambil kembali dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: <https://www.kemhan.go.id/kuathan/2020/08/12/eminar-pemeliharaan-alutsista.html>
- Hermawan, A., & Yusran, H. L. (2017). *Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif*. Depok: Kencana.
- Ismail Nurdin, S. H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Liputan6. (2009, July 26). *Memelihara Alat Tempur di Bengkel Pusat TNI AD*. Retrieved July 4, 2021, from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/238343/memelihara-alat-tempur-di-bengkel-pusat-tni-ad>
- Pindad. (2021, January 8). *Kendaraan Khusus*. Retrieved April 8, 2021, from pindad.com: <https://pindad.com/special-vehicles>
- Pulignani, R. J. (2007). Transformation of Army Depot System. *Strategic USAWC Research Project*, 10.
- Rizal, H. (2007, Juni 5). Defender. *Legends : Bengpuspal Ditpalad*, pp. 24-25.

Simanjuntak, H. (2016, November 27). *8 Langkah Mudah Melakukan Continuous Improvement*. Retrieved 3 5, 2021, from <https://sentralsistem.com/news/detail/8-langkah-mudah-melakukan-continuous-improvement>

# IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT MELALUI PEMBINAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH PANGKALAN TNI AL TEGAL

Oleh:

**Muhammad Taufik**

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia  
muhammadtaufik@gmail.com,

## Abstrak

Sejalan dengan tugas TNI Angkatan Laut yang telah diamanatkan Undang-undang, maka pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah salah satu implementasi pelaksanaan tugas tersebut. Suatu wilayah akan mempunyai kekuatan pertahanan yang baik apabila pemberdayaan wilayah tersebut dilakukan dengan partisipasi masyarakat setempat yang tinggi. Salah satu Pangkalan TNI AL di kawasan pantai utara Jawa Tengah adalah Lanal Tegal dengan masyarakat di tujuh Pemerintah Daerah tingkat II sebagian besar menggunakan laut sebagai sarana mencari penghidupan. Diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI no. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) menurunkan kepercayaan terhadap Pemerintah dan aparat penegak hukum di laut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan mulai bulan November 2015 – Juni 2016 dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dan FGD. Data divalidasi secara *cross check* dan dianalisa dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komandan Lanal Tegal mempunyai tugas pemberdayaan meliputi pembinaan kemampuan dan optimasi peran (1), sistem dan metode (2), keluarga besar TNI AL dan generasi muda serta masyarakat pesisir. Terdapat dua strategi dalam pelaksanaannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan meningkatkan peran Pangkalan TNI AL dengan Kerjasama berbagai pihak. Permasalahan antar nelayan maupun pemerintah menjadi kendala dalam pemberdayaan wilayah. Selain itu, keterbatasan kesadaran, pemahaman, kondisi dan jumlah personel belum mampu mengcover seluruh wilayah pesisir.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Pembinaan, Wilayah Laut, TNI AL

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan yaitu pada pasal 27 ayat 3 bahwa, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara dan sebagai alat pertahanan negara memiliki fungsi penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokoknya TNI membagi menjadi dua yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pada pasal 7 UU RI nomor 34 tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu operasi militer selain perang TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Sehingga salah satu tugas TNI Angkatan Laut adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Sejalan dengan tugas TNI Angkatan Laut yang telah diamanatkan Undang-undang, maka pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah salah satu implementasi pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan luas lautnya 3 kali luas daratannya, Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Namun demikian sebutan negara maritim tersebut belum tercermin dari aktivitas penduduknya, terutama sikap terhadap Pemerintah terkait kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang telah ditentukan. Sehingga menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim dengan segala potensi sumberdaya yang melimpah dan dapat diandalkan untuk mendukung pertahanan negara di laut.

Suatu wilayah akan mempunyai kekuatan pertahanan yang baik apabila pemberdayaan wilayah tersebut dilakukan dengan partisipasi masyarakat setempat yang tinggi. Masyarakat nelayan merupakan bagian dari komponen cadangan dapat berperan serta dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut sesuai dengan kemampuan, peran dan pelibatan dalam sistem pertahanan negara. Kawasan pantai utara Jawa Tengah merupakan kawasan yang sangat potensial di sektor maritim. Seluruh wilayah pemerintah daerah tingkat II di sepanjang kawasan tersebut mempunyai sumber daya maritim yang dapat dikembangkan mendukung pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung. Salah satu Pangkalan TNI AL di kawasan pantai utara Jawa Tengah adalah Lanal Tegal yang

mempunyai wilayah kerja dengan tujuh Pemerintah Daerah Tingkat II, mulai dari Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang.

Masyarakat di tujuh Pemerintah Daerah tingkat II tersebut yang bermukim di kawasan pesisir tersebut sebagian besar menggunakan laut sebagai sarana mencari penghidupan. Mata pencaharian yang terdapat di kawasan ini antara lain sebagai nelayan, buruh pelabuhan, karyawan objek wisata bahari, pembuat kapal nelayan, karyawan di dok pembuatan dan perbaikan kapal, pedagang ikan, petani tambak yang sebagian besar adalah warga lokal. Namun jumlah sumber daya manusia di bidang maritim yang besar ini masih dikelola dengan manajemen tradisional sehingga belum dapat menghasilkan pendapatan yang memadai bagi masyarakat setempat. Seluruh kegiatan di bidang maritim di kawasan ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masing-masing individu, sehingga belum dapat terlihat sinergitas dalam pola pemberdayaan antara masyarakat dengan Pemerintah.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI no. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia membuat masyarakat nelayan di wilayah Tegal dan sekitarnya merasa bahwa Pemerintah tidak memperhatikan keberadaan nelayan-nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap cantrang (menurut KKP cantrang = *trawls*), sehingga kepercayaan terhadap Pemerintah dan aparat penegak hukum di laut menjadi menurun. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan berkali-kali dilakukan yang dikoordinir oleh kelompok nelayan Tegal di Jakarta dan wilayah Pantai Utara Jawa Tengah sudah menjurus ke arah anarkhis.

Berdasarkan fenomena yang sudah diuraikan di atas, khususnya mengenai pemberdayaan wilayah pertahanan laut dengan melibatkan masyarakat nelayan di kawasan pantai utara Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pangkalan TNI AL Tegal, penulis mencoba menuangkannya dalam tesis dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT MELALUI PEMBINAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH PANGKALAN TNI AL TEGAL"

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2010) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada

umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data.

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan mulai dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. dengan Sumber dan jenis data primer sertasekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*), FGD dengan narasumber dan tokoh-tokoh masyarakat pesisir dan catatan observasi di kawasan pesisir dalam wilayah kerja Lanal Tegal. Data diolah menggunakan pengujian keabsahan dan keterandalan data dengan melaksanakan validasi dengan cara *cross check* dengan para nara sumber yang memiliki keahlian di bidangnya, para pelaku dan pihak-pihak yang terkait sebagai *key persons* serta triangulasi. Data diolah sesuai dengan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) dengan melakukan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada proses analisis, penulis dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menguraikan persoalan-persoalan tersebut berdasarkan data dan pisau analisis yang digunakan. Analisis data ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal secara terperinci berdasarkan pada konsep dan teori yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah

Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang terletak 109°08' sampai 109°10' garis Bujur Timur dan 6°50' sampai 6°53' garis Lintang Selatan. Relief daerahnya merupakan dataran rendah dengan tinggi dari permukaan laut ± 3 meter, terdapat aliran sungai dan struktur tanahnya adalah jenis tanah berpasir dan tanah liat. Berbatasan di sebelah timur adalah Kabupaten Pemalang, sebelah selatan Kabupaten Tegal, sebelah barat Kabupaten Brebes dan sebelah utara adalah Laut Jawa. Luas wilayah Kota Tegal adalah 39,68 km<sup>2</sup>. Secara administrasi wilayah dibagi empat Kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Margadana dengan 27 Kelurahan. Seperti pada umumnya wilayah pesisir pantai di Indonesia pada umumnya dan Pulau Jawa khususnya, iklim di Kota Tegal adalah tropis dan bersuhu udara relatif panas. Dengan kondisi geografi dan iklim yang baik ini, menjadikan Kota Tegal berkembang dari segi perekonomian. Sebagai kota pelabuhan, terdapat tiga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu TPI Tegal Sari, TPI Pelabuhan dan TPI Muara Reja. Produksi dan nilai produksi sub sektor perikanan laut masih cukup besar, meskipun dipengaruhi oleh musim yang sedang berlangsung.

Tiga Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kota Tegal, hanya ada satu TPI yang memberikan pendapatan pajak dari hasil lelang ikan, yaitu TPI Pelabuhan. Sementara yang dua TPI lainnya yaitu TPI Tegal Sari dan TPI Muara Reja tidak ada pendapatan pajak daerah dari hasil lelang ikan

dikarenakan dua tempat tersebut hasil ikan dari nelayan tidak dilakukan lelang, namun langsung dibeli atau disetorkan kepada pembeli ikan atau yang sering disebut di wilayah ini sebagai bakul ikan. Pemetaan monografi menunjukkan bahwa mayoritas nelayan bertempat tinggal di kelurahan Tegal Sari.

Wilayah pesisir kelurahan ini merupakan kawasan yang tandus dan gersang. Ini disebabkan karena pembangunan industri pengolahan ikan yang menjamur di sepanjang pesisir tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Masyarakat pesisir di Kelurahan ini sudah diberikan sosialisasi tentang kelestarian lingkungan baik oleh Pemerintah Kota dan Pangkalan TNI AL Tegal. Beberapa program tentang pembersihan Pelabuhan dan penghijauan bersama yang dilaksanakan rutin setiap bulannya belum dapat memberikan hasil optimal. Kesadaran untuk menjaga kebersihan dari para nelayan dan pelaku usaha seperti pedagang ikan, buruh pelabuhan, buruh jasa angkutan hasil ikan, serta masyarakat Kelurahan secara umum masih perlu ditingkatkan. Sehingga tampak dengan jelas kondisi yang kotor di Pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan dan wilayah pemukiman nelayan.

Pola pembinaan dan pemanfaatan organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dapat dilihat pada gambar 1. perlu adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim untuk dapat mendukung pertahanan laut di wilayah kawasan pantai utara Jawa Tengah. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas kelautan dan perikanan, Kantor kesbangpolinmas, Pangkalan TNI AL Tegal dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memberikan solusi permasalahan terkait pelarangan alat tangkap ikan bagi kapal ikan 30 GT dan perkelahian antar nelayan karena memeperebutkan area tangkap perlu dilakukan secara intensif dan konsisten. Langkah-langkah tersebut dapat berupa sosialisasi peraturan perundangan dengan menggunakan metode penyampaian yang praktis dan aplikatif. Misalnya di dalam penjelasan pasal-pasal di perundangan tersebut disampaikan dengan contoh kasus yang ada.



Gambar 2. Diagram Model Pembinaan Dan Pemanfaatan Dalam Mendukung Pertahanan Wilayah Laut

Sumber : Hasil Olahan Peneliti tahun 2015

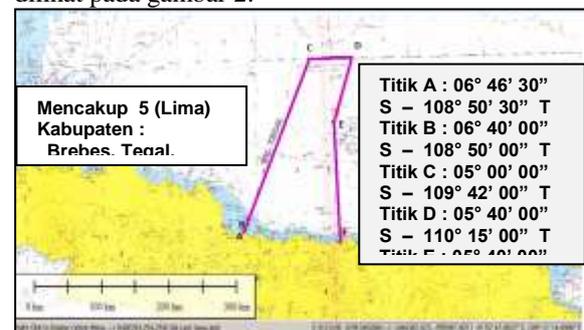
Pada dasarnya tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut sudah melekat pada Pangkalan TNI Angkatan Laut. Sehingga seluruh personil Lanal

sudah semestinya wajib melaksanakan salah satu tugas TNI AL tersebut. Namun dalam kenyataannya, hanya anggota staf Potmar dan Posal jajaran Lanal Tegal yang melaksanakan pemberdayaan wilayah pesisir. Pembekalan kepada seluruh personil Lanal Tegal terkait tugas dawilhanla ini mutlak diperlukan karena ujung tombak pelaksanaan tugas ini salah satunya adalah peran dari personil TNI AL yang langsung berhadapan dengan masyarakat pesisir. Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan pantai utara Jawa Tengah seharusnya sudah mulai diarahkan kepada penyiapan masyarakat pesisir ini sebelum dapat dijadikan komponen cadangan maupun komponen pendukung pertahanan laut. Sehingga personil Lanal ini dituntut mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir di wilayah kerjanya terkait bela negara yang dapat diimplementasikan dengan cara menaati aturan perundangan pemerintah terutama dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pembinaan masyarakat pesisir dan potensi sumber daya maritim yang ada di kawasan pantai utara Pulau Jawa adalah salah satu tugas dan tanggung jawab Komandan Lanal Tegal dalam batas wilayah kerjanya. Dalam penulisan tesis ini, Lanal Tegal adalah salah satu dari objek penelitian. Komandan Lanal Tegal mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut berdasarkan rencana dan program dari Lantamal V/Surabaya, meliputi :

1. Pembinaan kemampuan dan optimalisasi peran Posal dalam membina daerah pesisir guna mendukung kekuatan TNI AL.
2. Pembinaan sistem dan metode dalam rangka membantu pembinaan sistem dan metode TNI AL.
3. Pembinaan keluarga besar TNI AL di lingkungan Lanal Tegal dalam rangka membantu pembinaan keluarga besar TNI AL.
4. Pembinaan kepada generasi muda, masyarakat pesisir dan Pramuka Saka Bahari dalam rangka cinta bahari dan NKRI melalui PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara) dan PKBN (Pendidikan Kesadaran Bela Negara).

Adapun wilayah kerja Lanal Tegal dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Lanal Tegal  
Sumber : Staf Operasi Lantamal V Surabaya

Kondisi seperti yang telah disampaikan di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut masih perlu dioptimalkan, dan untuk meningkatkan kualitas personil dalam melaksanakan tugas tersebut salah satu langkah yang sudah ditempuh adalah menugaskan perwira staf bidang potensi maritim untuk mengikuti kursus dan pelatihan di Dispotmar TNI AL dengan tujuan dapat memahami akan tugas pokok dan fungsinya dalam dawilhanla sekaligus dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh personel Lanal Tegal agar mind set seluruh personel Lanal mempunyai pemahaman tugas dawilhanla ini dengan baik.

Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah diperlukan rumusan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan disertai dengan upaya-upaya untuk mengaplikasikan strategi yang telah ditetapkan serta menjabarkan kebijakan tersebut ke dalam beberapa strategi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga dapat dihasilkan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah yang dapat mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

#### 1. Strategi

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka dapat ditentukan beberapa strategi untuk dapat mewujudkan pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan laut yaitu :

- a. Strategi - 1 : Meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat pesisir melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan pengetahuan, meningkatkan pendidikan untuk menaikkan kemampuan kerja, serta pengembangan potensi sumber daya manusia bidang maritim yang ada dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
- b. Strategi - 2 : Meningkatkan peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal melalui kerja sama Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal dengan pemerintah Provinsi, pemerintah Kota/Kabupaten dan instansi kemaritiman lainnya, implementasi program kerja yang telah disusun guna peningkatan sumber daya manusia bidang maritim, pendayagunaan potensi maritim, meningkatkan pendidikan dan pelatihan personel Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal serta melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat pesisir di wilayah kerja Lanal Tegal dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

#### 2. Upaya

Di dalam implementasi strategi yang telah disusun, maka diperlukan upaya-upaya konkrit

pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir di wilayah kerja Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal untuk pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim dalam mendukung pertahanan negara di laut, seperti :

##### a. Upaya mendukung strategi – 1 :

Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal perlu melakukan peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat pesisir di wilayah kerjanya melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan sosialisasi dan pembelajaran tentang aturan hukum bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir di kawasan pantai utara Jawa Tengah agar dapat lebih memahami dan menaati ketentuan yang berlaku sehingga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan dapat lebih baik.
- 2) Meningkatkan dukungan fasilitas dan kualitas pendidikan di daerah pesisir agar mengurangi anak putus sekolah dan pengangguran sehingga generasi muda dapat membangun daerah nya dengan menerapkan ilmu yang didapatkannya demi kesejahteraan masyarakat dan tercapainya pembangunan nasional.
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja secara baik dan optimal dengan memberikan pemahaman akan pentingnya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif di kawasan pesisir panturan
- 4) Mempelopori peningkatan kehidupan masyarakat pesisir dengan memberikan penyuluhan dan pembekalan tentang aspek maritim, dengan cara mendorong usaha peningkatan hasil tangkapan nelayan melalui pelatihan penggunaan teknologi dalam proses menangkap ikan, mendorong industri pengolahan ikan pada pusat pengumpulan untuk menampung hasil tangkapan dan budi daya ikan, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi penangkapan dan budi daya ikan, udang, terumbu karang dan teknologi eksplorasi dan eksploitasi dasar laut secara efektif, efisien dan ramah lingkungan.
- 5) Mendorong pengembangan industri rumah tangga dengan menggunakan hasil laut dengan bekerja sama dengan koperasi.

##### b. Upaya untuk mendukung strategi – 2:

Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal di kawasan pantai utara Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut bergantung kepada personel yang dimilikinya. Dan upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain :

- 1) Memberikan pembekalan kepada seluruh personel Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal dalam

pelaksanaan tugas dawilhanla melalui kursus dan pelatihan yang telah diprogramkan oleh Dispotmar TNI AL maupun oleh perwira Lanal yang telah mengikuti kursus dan pelatihan tentang dawilhanla.

- 2) Meningkatkan pelaksanaan program pembinaan masyarakat pesisir di wilayah kerja Lanal Tegal yang dimulai dengan mendorong kelompok-kelompok nelayan terus berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di kalangan nelayan.
- 3) Melaksanakan inventarisasi kemampuan dan potensi kawasan pesisir di wilayah kerja Lanal Tegal dalam rangka penyiapan daerah untuk mendukung pertahanan negara, khususnya meningkatkan pemahaman tentang bela negara yang dapat ditunjukkan dengan ketaatan mengikuti peraturan perundangan terutama yang menyangkut sektor kelautan dan perikanan.
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas kegiatan masyarakat pesisir baik kepada nelayan di laut, pelabuhan maupun kegiatan aksi unjuk rasa yang sering dilakukan.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan sosialisasi kesadaran bela negara kepada para nelayan yang dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan wadah PNKT (Paguyuban Nelayan Kota Tegal) yang merupakan binaan Lanal Tegal.
- 6) Melaksanakan penyuluhan hukum dan bela negara serta sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir.
- 7) Melaksanakan program kegiatan bhakti sosial di kawasan pesisir di wilayah kerja Lanal Tegal secara terencana.
- 8) Memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir tentang kepedulian terhadap lingkungan laut dan pesisir melalui pemahaman fungsi ekosistem pantai dan keanekaragaman hayati sehingga fungsinya sebagai penghalang gelombang, habitat dan tempat.
- 9) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dinas pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat pesisir dengan mendirikan rumah baca dan kelompok belajar.

### B. Kendala Dalam Pemberdayaan Wilayah

Masyarakat pesisir di Kota Tegal adalah masyarakat pesisir yang lokasinya dekat di perkotaan. Hal ini berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat nelayan setempat. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya membuat komunikasi antar nelayan di kawasan pantai utara Jawa Tengah terjalin dengan cepat. Dengan canggihnya sistem komunikasi yang ada, maka kemudahan dan kecepatan dalam berkomunikasi

dapat memupuk solidaritas antar nelayan dalam memperjuangkan mata pencahariannya sebagai nelayan yang sudah lama terbentuk semakin kuat. Namun demikian, masih ada beberapa kelompok nelayan yang masih mempunyai permasalahan antar nelayan maupun dengan pemerintah. Kerawanan wilayah Tegal dapat dipetakan pada gambar 3.



Gambar 3. Peta Kerawanan Wilayah Lanal Tegal

Sumber : Staf Intelijen Lanal Tegal.2015

HNSI Kota Tegal merupakan cabang dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai keanggotaan rukun-rukun nelayan di pesisir Kota Tegal. Rukun-rukun nelayan di pesisir Kota Tegal ini adalah kelompok-kelompok nelayan yang terbentuk berdasarkan kesamaan alat tangkap yang digunakan, seperti rukun nelayan cantrang, rukun nelayan purseine, rukun nelayan dogolan yang berjumlah 12 rukun nelayan tersebar di empat kecamatan dan mempunyai anggota 12.934 orang yang terdiri atas pemilik kapal ikan, ABK kapal ikan, pedagang/bakul ikan pelabuhan dan buruh angkut hasil ikan di Pelabuhan ikan. Interaksi organisasi kemasyarakatan di Kota Tegal pada gambar 4.



Gambar 4. Diagram Interaksi Organisasi Kemasyarakatan

Sumber : Hasil Olahan Peneliti. Tahun 2015

Permasalahan yang terkait perkelahian di antara nelayan lokal dapat diminimalkan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah melalui dinas perikanan dan kelautan, Camat dan Kepala Desa untuk memberikan penjelasan terkait area tangkap. Lanal Tegal, Polair dapat mendukung dengan menggiatkan patroli keamanan laut terbatas untuk sebagai pengawas kegiatan nelayan di laut. Selain itu sinergitas antar pemerintah, aparat penegak hukum di laut dan organisasi kemasyarakatan harus

terjalin dengan baik, mengingat perkelahian antar nelayan ini disebabkan perbedaan alat tangkap yang digunakan pada area tangkap yang sama yang semuanya terbentuk kelompok-kelompok nelayan yang menginduk pada organisasi kemasyarakatan yang tidak sama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sering ditemukan kendala dalam hal pengawasan dan pemantauan kegiatan para nelayan terutama pada wilayah dibawah 12 mil laut dari pantai. Kendala ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Lanal Tegal terutama kapal-kapal patrol. Patroli laut terbatas yang dilakukan ini dilakukan untuk memantau dan mengawasi aktifitas nelayan selama berada di laut khususnya dalam hal penggunaan alat tangkap dan perkelahian antar nelayan. Sosialisasi penggunaan alat tangkap dan peraturan perundangan yang mengatur tentang usaha perikanan telah disampaikan secara intensif kepada para nelayan melalui wadah PNKT namun, masih dalam kenyataannya masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang dan bahkan ini menjadi pemicu perkelahian antar nelayan ketika di laut.

Terkait keberadaan personel Lanal Tegal, menurut keterangan Ketua Pokmaswas Tegal Sari, Saudara Khaliri yang pada saat dilaksanakan penelitian ini berada di pelabuhan mengatakan bahwa terkadang kapal yang akan berangkat mencari ikan di laut sebelumnya memantau posisi kapal patroli Angkatan laut yaitu keberadaan dua KAL di bawah operasional Lanal Tegal. Karena masih ada beberapa kali oknum pengawak kapal patrol Angkatan Laut ini meminta kontribusi baik berupa hasil ikan atau uang dari kapal ikan yang diperiksa. Demikian pula saat sudah berada area penangkapan ikan di laut, masih terjadi oknum aparat penegak hukum yang menerima gratifikasi berupa uang untuk meloloskan kapal-kapal ikan yang diperiksa. Sehingga para nelayan terkesan menghindari dari pemeriksaan oleh kapal patrol penegak hukum. Para nelayan melakukan tindakan tersebut karena merasa bahwa kapal ikan mereka belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan sumber manusia bidang maritim di kawasan sebagian kawasan Pantai Utara Jawa Tengah diawali dengan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir oleh Pangkalan TNI AL Tegal.
2. Organisasi kemasyarakatan yaitu HNSI (himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), PNKT (Peguyuban Nelayan Kota Tegal) yang ada di wilayah kerja Lanal Tegal pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama-sama ingin memajukan kesejahteraan masyarakat

nelayan, namun dalam praktek di lapangan sering terjadi perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan perpecahan antar kelompok nelayan.

3. Pangkalan TNI AL Tegal telah melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut dengan mendorong terbentuknya paguyuban nelayan sebagai salah satu solusi pemecahan masalah masyarakat yang kemudian dapat disiapkan sebelum menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Laut.
4. Pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut oleh personel Lanal Tegal belum optimal karena keterbatasan kesadaran dan pemahaman tugas, jumlah personel yang ada belum mampu mengcover seluruh wilayah pesisirnya dengan rata-rata menjelang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan sebagian personel lainnya kondisi kesehatan fisiknya yang tidak memungkinkan untuk beraktifitas secara optimal (perawatan karena sakit dan cacat).
5. Kerjasama Pemerintah dengan Pangkalan TNI AL Tegal sudah berjalan dengan cukup baik.

##### Rekomendasi

Beberapa rekomendasi praktis dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah dalam wilayah kerja Lanal Tegal masih dimulai dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam hal ini masyarakat nelayan sebelum disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara di laut.
2. Dihadapkan pada berbagai permasalahan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah dapat dirumuskan kebijakan "Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir dan peningkatan peran Pangkalan TNI AL Tegal dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut"

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Manajemen. CV. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1
- UU RI nomor 34 tahun 2004 pasal 7

# PENGARUH TEAMWORK DAN LOCUS OF CONTROL (LOC) TERHADAP KINERJA DOPUSBEKTIM DALAM Mendukung KESIAPAN LOGISTIK KOARMADA II

Oleh:

**Endi Esmoyo**

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia  
endiesmoyo@gmail.com

## Abstrak

Peran TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut bergantung pada postur TNI AL yang terintegrasi ke dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) terdiri dari pangkalan, pesawat, kapal perang, dan marinir serta didukung oleh sistem logistik memadai dari pangkalan-pangkalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain penggunaan teknologi yang modern, TNI AL juga memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia yang sinergis dalam mendukung kinerja kesiapan logistik Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) melalui Depo Pusat Pembekalan Timur (DOPUSBEKTIM). Dopusbektim melaksanakan pembinaan terhadap seluruh personelnya untuk meningkatkan kinerja dan pemahaman personel dalam rangka mencapai keberhasilan tugas secara efektif dan efisien. Penelitian ini menganalisis pengaruh teamwork dan locus of control sebagai faktor yang mendukung kinerja personel di Dopusbektim untuk kesiapan logistik Koarmada II, melalui metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatoris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih belum optimalnya kinerja personel di Dopusbektim Koarmada II sehingga perlu adanya teamwork dan locus of control untuk meningkatkan kinerja personel. Dopusbektim perlu untuk melakukan upaya melalui pelaksanaan kegiatan secara berkala dalam rangka meningkatkan kinerja personel dalam hal teamwork dan locus of control sehingga dapat mendukung kesiapan logistik Koarmada II secara optimal.

**Kata kunci:** kinerja, locus of control, personel, teamwork, TNI AL.

## 1. PENDAHULUAN

Perjalanan Indonesia sebagai bangsa maupun sebagai Negara telah banyak mengalami pasang surut. Sebagai bangsa yang telah dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, keutuhan Indonesia banyak mengalami rintangan yang terlihat dari banyaknya tuntutan dan pertikaian kelompok atau golongan untuk mencoba memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran TNI AL sebagai komponen utama pertahanan Negara di laut sangat dibutuhkan untuk melaksanakan operasi perang, menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut, melaksanakan operasi selain perang serta ikut menjaga perdamaian dunia. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut sangat tergantung dari bagaimana postur TNI AL yang dimiliki Postur tersebut terintegrasi ke dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang terdiri dari Pangkalan, Pesawat, KRI, dan Marinir. Dan di dalam sejarah perang dunia serta dalam perang di dunia modern, Negara manapun juga tidak akan bisa menang tanpa Angkatan Laut yang superior (Ojong, 2005).

Kemampuan TNI AL yang tangguh juga harus didukung oleh sistem dukungan logistik yang memadai dari pangkalan-pangkalan yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang dapat mendukung setiap saat dibutuhkan. Baik pada masa damai maupun pada masa perang dengan tingkat kesiapan

tinggi. Dukungan logistik TNI AL adalah hal yang sangat penting dari kekuatan satuan tempur dan merupakan jembatan yang menghubungkan antara pangkalan dengan kekuatan TNI AL yang tersebar di garis depan. Kemampuan operasi memang ditentukan oleh kapal perang dan pasukan yang berada di garis depan namun keberlangsungan (*sustainability*) operasi atau daya ketahanan suatu operasi ditentukan oleh dukungan logistiknya (Setijono, 2008).

Perkembangan industrialisasi dan inovasi teknologi yang semakin pesat membuat lembaga TNI AL menjadi lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi. Dalam hal ini, lembaga dituntut untuk menjalankan perannya yang lebih baik dalam pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja lembaga TNI AL secara optimal. Selain penggunaan teknologi yang modern, lembaga TNI AL juga harus memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik agar terjalin hubungan yang sinergis antara lembaga TNI AL dengan para anggota. Salah satu lembaga TNI AL yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung kinerja kesiapan logistik Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) adalah Depo Pusat Pembekalan Timur (DOPUSBEKTIM). Dopusbektim senantiasa melaksanakan pembinaan terhadap seluruh personelnya dalam rangka mencapai keberhasilan tugasnya. Pembinaan ini ditekankan pada peningkatan kinerja dan pemahaman personil dalam

melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepada mereka. Sebagai organisasi komando pelaksana pembinaan, Dopusbektim dituntut untuk memiliki tingkat kinerja tinggi dalam melaksanakan tugas pokoknya secara efektif dan efisien.

Masalah kinerja bagi Dopusbektim adalah masalah yang sangat penting. Tanpa adanya kinerja yang baik tidak mungkin suatu lembaga khususnya Dopusbektim dapat menghasilkan produk yang kompetitif. Peningkatan kinerja mempunyai implikasi yang positif bagi Dopusbektim itu sendiri, artinya Dopusbektim dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas produk yang optimal. Selain itu juga, mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kehidupan anggota karena memberikan sumbangan terhadap peningkatan kualitas hidup anggota. Kinerja anggota akan meningkat bila didukung oleh penerapan sistem manajemen kinerja dan sistem pengembangan karir yang baik dan efektif.

Berkaitan dengan kinerja anggota untuk menyelesaikan tugas yang di bebaskan tentu juga harus dibarengi dengan hal-hal yang harus dimiliki dalam diri masing-masing anggota seperti teamwork atau kerjasama tim merupakan solusi terbaik untuk mencapai tujuan. Teamwork yang solid akan memudahkan organisasi dalam mendelegasikan tugas-tugas. Namun untuk membuat sebuah tim yang solid dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pihak manajemen. Hal terpenting adalah bahwa teamwork harus dilihat sebagai suatu sumber daya yang harus dikembangkan dan dibina sama seperti sumber daya lain yang ada dalam perusahaan. Proses pembentukan, pembinaan, dan pemeliharaan teamwork harus dilakukan atas dasar kesadaran penuh dari tim tersebut sehingga segala sesuatunya berjalan secara normal.

Selain faktor teamwork sebagai independent variable yang mempengaruhi kinerja, peneliti ingin meneliti *Locus of Control (LOC)* sebagai independent variable kedua yang mempengaruhi kinerja. Dalam sebuah organisasi, *Locus of Control (LOC)* di bidang pekerjaan masing-masing. Kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas, intelegensi dari masing-masing anggota dan hal-hal lain yang menunjang dalam penyelesaian tugas seorang anggota Dopusbektim. Ada keyakinan besar bahwa setiap individu berpengaruh langsung sebagai efek substantif dalam pandangan dan reaksinya terhadap lingkungan (Spector, 1986). Keyakinan inilah yang menurut Rotter (1966) disebut locus of control merupakan "generalized belief that a person can or cannot control his own destiny". Brownell (1981) menulis tentang pendapat Rotter dalam papernya yang mendefinisikan locus of control sebagai tingkatan di mana seseorang menerima tanggung jawab personal terhadap apa yang terjadi pada diri mereka (Rotter, 1966).

LOC berkaitan dengan beberapa variable seperti kinerja, etika kerja dan kepuasan kerja. Furnham (1987) menemukan bahwa individu yang

cenderung percaya pada kinerjanya maka *locus of control*-nya lebih tinggi. Berdasarkan pengamatan dan dari beberapa sumber data di lapangan ditemui bahwa anggota Dopusbektim masih memiliki LOC yang rendah dalam menerima tanggung jawab tugas dan kurang percaya pada hasil kinerja mereka dalam mendukung kesiapan logistik KRI. *Locus of control* dan *teamwork* yang dimiliki oleh tiap anggota Dopusbektim dalam menyelesaikan pekerjaan perlu mendapat perhatian dan dorongan, sehingga dapat mendukung tugas-tugas yang dibebankan kepada anggota dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan kinerja prajurit yang optimal. Berdasarkan penelitian inilah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "PENGARUH TEAMWORK DAN LOCUS OF CONTROL (LOC) TERHADAP KINERJA DOPUSBEKTIM DALAM Mendukung KESIAPAN LOGISTIK KOARMADA II".

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori digunakan dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel melalui uji hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan sejumlah sampel dan data-data numerikal atau berbentuk angka. Penelitian dilakukan di salah satu Lembaga TNI AL di bidang logistik, Depo Pusat Pembekalan Timur (DOPUSBEKTIM) pada bulan November 2016. Jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus slovin dengan hasil 170 anggota Dopusbektim. Data dikumpulkan dengan kuesioner menggunakan skala likert.

Data diolah dengan uji validitas menggunakan korelasi *pearson* sedangkan uji pengujian reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Asumsi klasik diuji menggunakan persamaan regresi linier ganda meliputi uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnoff* dan *probability plots*. Uji multikelinearitas digunakan untuk mengetahui model regresi antar variabel independent untuk kemudian dilakukan uji autokorelasi untuk mengetahui kesesuaian model regresi linear terhadap korelasi antara kesalahan pengganggu periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain menggunakan klasifikasi nilai *Durbin - Watson*. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser* dengan cara meregresikan variabel bebas dengan absolute residual. Apabila nilai probabilitas ( $\text{sig}$ ) > dari 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### C. Demografi responden

Deskripsi profil responden berdasarkan usia, masa dinas, pendidikan terakhir dan jenis kelamin bertujuan untuk menggambarkan dominan karakter responden berdasarkan. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden

No	Karakteristik	Kriteria	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
1.	Usia	a. 20-30 tahun	83	48,82
		b. 31-40 tahun	72	42,35
		c. 41-50 tahun	15	8,83
		d. > 50 tahun	0	0
2.	Masa Kerja	a. 0-10	42	24,71
		b. 11-20	49	28,82
		c. 21-30	79	46,47
		d. 31-40	0	0
		e. >41	0	0
3.	Pendidikan Terakhir	a. SLTP	28	16,47
		b. SLTA	136	80
		c. D-3	0	0
		d. S-1	6	3,53
		e. S-2	0	0
4.	Jenis kelamin	a. Laki-laki	147	86,47
		b. Perempuan	23	13,53

(Sumber : diolah peneliti)

Adapun jumlah butiran kuesioner dalam penelitian ini adalah 37 butiran pertanyaan yang terbagi menjadi tiga bagian, bagian pertama adalah butiran kuesioner variabel *teamwork* ( $X_1$ ) yang berjumlah 15 butiran pertanyaan, bagian kedua adalah butiran kuesioner variabel *locus of control* ( $X_2$ ) yang berjumlah 12 butiran pertanyaan dan terakhir bagian ketiga adalah butiran kuesioner variabel kinerja (Y) yang berjumlah 10 butiran pertanyaan. Berdasarkan hasil deskripsi terhadap variabel *teamwork*, dominan responden memberikan tanggapan setuju terhadap butiran-butiran pertanyaan kuesioner mengenai variabel *teamwork* yakni sekitar 69,96% dan diikuti dengan tanggapan sangat setuju yakni sekitar 18,12%. Deskripsi jawaban responden terhadap butiran-butiran pertanyaan kuesioner variabel *locus of control* ( $X_2$ ) dominan responden menjawab setuju yakni sebesar 75,74% dan diikuti dengan tanggapan responden kurang setuju yakni sebesar 11,47 angka ini berbeda tipis dengan tanggapan setuju yakni sebesar 11,23%. Deskripsi jawaban responden variabel kinerja (Y) menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap butiran-butiran pertanyaan kuesioner mengenai variabel kinerja yakni sebesar 70,29% dan diikuti dengan tanggapan sangat setuju yakni sebesar 19%.

Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat. Dari hasil pengujian dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS, mengenai analisis pengaruh secara simultan dapat disajikan dalam tabel 2. Jika nilai signifikansi < dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya *teamwork* dan *locus of control* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Prajurit (Y). Jika nilai

signifikansi > dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya *teamwork* dan *locus of control* tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja (Y). Hasil uji simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel *teamwork* dan *locus of control* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Prajurit (Y) dengan nilai sig sebesar 0.000 < 0.05.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1152,337	2	576,168	113,291	,000 <sup>b</sup>
	Residual	849,316	167	5,086		
	Total	2001,653	169			

a. Dependent Variable: Kin

b. Predictors: (Constant), LOC, TW

(Sumber: data diolah Peneliti)

Uji parsial dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh *teamwork* ( $X_1$ ) dan *locus of control* ( $X_2$ ) secara parsial terhadap Kinerja (Y). Dari hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 besarnya nilai signifikansi variabel bebas *teamwork* pada uji t adalah 0.000 atau < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga Variabel Bebas *Teamwork* ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja (Y). Berdasarkan  $t_{hitung}$  pada *teamwork* sebesar 6,045. Nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% atau ( $\alpha$ ) 0,05 dengan (n-2) diperoleh nilai  $t_{tabel} = 1,974$ , berarti  $t_{hitung} 6,045 > t_{tabel} 1,974$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa variabel *teamwork* ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap variabel kinerja (Y). Sedangkan besarnya nilai signifikansi variabel bebas *locus of control* pada uji t adalah 0.000 atau < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga Variabel bebas *locus of control* ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja (Y). Sedangkan sesuai nilai  $t_{hitung}$  *locus of control* sebesar 6,972. Nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% atau ( $\alpha$ ) 0,05 dengan (n-2) diperoleh nilai  $t_{tabel} = 1,974$  (dilihat pada  $t_{tabel}$ ). Berarti  $t_{hitung} 6,972 > t_{tabel} 1,974$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa variabel *locus of control* berpengaruh terhadap variabel kinerja.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model Anova	T	Sig.
<i>Teamwork</i> ( $X_1$ )	6,045	0,000
<i>Locus Of Control</i> ( $X_2$ )	6,972	0,000

Sumber: data diolah Peneliti.

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel bebas (*Teamwork* ( $X_1$ ) dan *Locus of Control* ( $X_2$ )) dengan variabel terikat Kinerja (Y), besarnya nilai koefisien korelasi adalah 0.759. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan variabel *Teamwork* ( $X_1$ ) dan *Locus of Control* ( $X_2$ ) dengan variabel Kinerja (Y) adalah kuat yaitu sebesar 75.9%. Nilai koefisien determinasi atau  $R^2$  digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y) yaitu variabel Kinerja. Hasil dari perhitungan SPSS diperoleh nilai  $R^2 = 0.576$  yang berarti bahwa sebesar 57.6% Kinerja Prajurit dapat dijelaskan oleh variabel *Teamwork* ( $X_1$ ) dan *Locus of Control* ( $X_2$ ). Sedangkan sisanya 42.4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Nilai koefisien korelasi parsial ( $r$ ) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara terpisah (satu persatu), pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien korelasi parsial untuk variabel *Teamwork* adalah 0,672. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel *teamwork* ( $X_1$ ) dengan variabel kinerja (Y) adalah kuat yaitu sebesar 67,2%. Sedangkan hubungan antara variabel *locus of control* ( $X_2$ ) dengan variabel kinerja (Y) sebesar 0.695. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel *locus of control* ( $X_2$ ) dengan variabel kinerja (Y) adalah kuat yaitu sebesar 69.5%. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) yang terbesar adalah untuk variabel *locus of control* ( $X_2$ ) yakni sebesar 0.483 atau sebesar 48,3%, yang artinya secara parsial variabel *locus of control* ( $X_2$ ) memberikan pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat yakni kinerja (Y). Sedangkan yang memberikan pengaruh terkecil terhadap variabel terikat adalah variabel *teamwork* ( $X_1$ ) yaitu sekitar 0.452 atau sekitar 45,2%.

#### Tabel 4. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Parsial

Variabel	r	r <sup>2</sup>
<i>Teamwork</i> ( $X_1$ )	0,672	0,452
<i>Locus Of Control</i> ( $X_2$ )	0,695	0,483

Sumber: data diolah Peneliti.

Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada pihak Dopusbektim dalam mengelola Anggotanya, artinya bahwa dalam SDM tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Tujuan mengelola SDM adalah untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas. Dengan koefisien detriminasi R Square sebesar 0,576 atau 57,6% yang menunjukkan pengaruh teamwork dan LOC terhadap kinerja, dapat dilihat masih ada 9,6% faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja Dopusbektim. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil 9,6% pengaruh lain guna meningkatkan kinerja Dopusbektim.

## 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel teamwork terhadap kinerja anggota Dopusbektim, dengan signifikansi  $< 0.05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Terdapat pengaruh yang searah antara variabel Kinerja (Y) dengan variabel

teamwork ( $X_1$ ) yang artinya jika teamwork ditingkatkan, maka Kinerja (Y) akan naik.

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel LOC terhadap kinerja anggota Dopusbektim, dengan signifikansi  $< 0.05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Adanya pengaruh yang searah antara variabel Kinerja (Y) dengan variabel LOC ( $X_2$ ) yang artinya jika LOC meningkat, maka Kinerja (Y) akan naik.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel teamwork dan LOC terhadap kinerja anggota Dopusbektim, dengan signifikansi kurang dari  $< 0,05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Terdapat pengaruh simultan yaitu teamwork dan LOC terhadap Kinerja.

### Rekomendasi

Beberapa rekomendasi praktis dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Pihak Dopusbektim sebaiknya selalu memperhatikan kinerja anggotanya masing-masing, guna melihat kerjasama yang terjalin satu sama lain.
2. Pimpinan Dopusbektim sebaiknya melakukan upaya-upaya guna meningkatkan kinerja, terutama mengenai teamwork dan LOC.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel bebas lain seperti, human capital resource dan leadership.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ojong, P.K. (2005). Perang Eropa Jilid II. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Setijono, E. (2008). Kemampuan dukungan logistik pangkalan TNI Angkatan Laut dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah (Studi di dinas pembekalan pangkalan utama TN AL V) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rotter J.B. (1996) Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs, 80 Whole no.69.

# PENGARUH LITERASI DIGITAL SISWA DAN KETERLIBATAN ORANGTUA TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA KELAS VI DI SEKOLAH DASAR NEGRI BENDA

Oleh:

Raden Rizky Helmi Aldini<sup>1)</sup>, Udan Kusumawan<sup>2)</sup>, Budi Santoso<sup>3)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Terbuka, <sup>3</sup>Universitas Negri Jakarta

<sup>1</sup>aldinikiky@gmail.com

<sup>2</sup>udan@ecampus.ut.ac.id

<sup>3</sup>radwo2003@gmail.com

Perubahan mendasar dalam bidang pendidikan terjadi selama pandemi Covid-19. Dalam aktifitas pembelajaran khususnya, terjadi perubahan signifikan dari pembelajaran klasikal tatap muka menjadi pembelajaran virtual dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pelaksanaannya hal ini memunculkan beberapa masalah baru seperti rendahnya minat belajar siswa. Meskipun penelitian terkait minat belajar siswa pada masa pandemi telah banyak diteliti akan tetapi masih sedikit yang berfokus pada literasi digital dan keterlibatan orang tua terutama pada siswa sekolah dasar. Dalam mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah literasi digital siswa dan keterlibatan orang tua dapat menjadi faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode survey terhadap 49 responden siswa kelas VI di Sekolah Dasar Negri Benda, data yang diperoleh dianalisis dengan smart PLS 3.0. Temuan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara literasi digital terhadap minat belajar siswa dengan nilai SEM sebesar 0,463. Kemudian keterlibatan orang tua juga memiliki pengaruh positif terhadap minat belajar siswa dengan nilai SEM sebesar 0,423. Selanjutnya literasi digital dipengaruhi secara positif oleh keterlibatan orang tua dengan nilai SEM sebesar 0,588. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara keterlibatan orang tua dan minat belajar melalui literasi digital. Hasil perhitungan statistik dalam penelitian ini minat belajar dapat terpengaruh oleh keterlibatan orang tua melalui literasi digital siswa, yang berarti literasi digital siswa dapat membantu menentukan besar atau kecilnya pengaruh keterlibatan orang tua terhadap minat belajar siswa dengan nilai SEM sebesar 0,272. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa literasi digital dan keterlibatan orang tua merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan sebagai upaya untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran daring dimasa pandemi.

Kata kunci: *Literasi digital, Keterlibatan orang tua, Minat Belajar*

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Pada bulan Maret kegiatan belajar yang semula dilakukan secara klasikal disekolah kini telah berubah menjadi kegiatan virtual yang dilaksanakan dirumah masing-masing dimana siswa belajar dengan menggunakan teknologi digital (Kemdikbud, 2020). Aktivitas pembelajaran jarak jauh atau daring menghadirkan beberapa persoalan tidak hanya bagi para guru tetapi juga bagi para siswa dan orang tua. Aktivitas pembelajaran pada masa pandemi yang dirasa belum maksimal dan berdampak pada perubahan perilaku dan minat belajar siswa, hal tersebut terlihat dalam rubrik pengumpulan tugas dan keaktifan siswa selama pembelajaran daring. Ada siswa yang memiliki nilai baik, sangat antusias dan rajin mengerjakan tugas saat pembelajaran di didalam kelas sedangkan saat pembelajaran daring ia menjadi kurang aktif, nilainya menurun dan jarang mengumpulkan tugas, akan tetapi ada siswa saat pembelajaran di dalam kelas ia memiliki nilai yang rendah, jarang mengerjakan tugas dan tidak pernah aktif ketika pembelajaran daring ia mendapatkan nilai tinggi, tugas selalu dikumpulkan dan menjadi aktif untuk bertanya.

Seperti yang kita ketahui pembelajaran jarak jauh memaksa siswa berinteraksi lebih sering menggunakan teknologi digital, penguasaan teknologi digital saat ini akan menentukan kualitas pembelajaran yang akan mempengaruhi tujuan pembelajaran, dalam mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas memberikan tantangan bagi para pendidik karena perubahan yang terjadi pada saat ini. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut salah satunya dengan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam proses pembelajaran.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah peluncuran modul literasi digital Gerakan Literasi Digital Nasional pada tanggal 16 April 2021, diluncurkan dengan empat modul literasi, yaitu; (1) Budaya Bermedia Digital; (2) Aman Bermedia Digital; (3) Etis Bermedia Digital; dan (4) Cakap Bermedia Digital. Empat modul tersebut menurut Menteri Johnny diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang dapat menguasai teknologi dengan cakap (*Kementerian Komunikasi dan Informatika*, n.d.). Hal tersebut juga memiliki andil dalam kegiatan belajar mengajar karena saat ini dilakukan menggunakan teknologi digital sehingga

baik guru, siswa ataupun orang tua harus memiliki kemampuan literasi digital yang baik.

Namun tidak mudah untuk mencapai hal tersebut karena dalam prosesnya masih ditemukan hambatan yang disebabkan rendahnya literasi digital guru, siswa maupun orang tua. Literasi digital siswa yang rendah masih menjadi kendala dalam pembelajaran di masa pandemi, karena masih terdapat siswa yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga kesulitan dalam pengoperasiannya dan pemahaman dalam mencari informasi ataupun berkomunikasi melalui media digital padahal kecakapan literasi digital tersebut merupakan inti dari pembelajaran daring yang dilakukan dari rumah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, dalam menggunakan teknologi digital keterlibatan orang tua dirasa sangat penting karena hal tersebut juga menjadi pembiasaan yang melibatkan orang tua selama proses pembelajaran. selain itu peranan orang tua sangatlah penting untuk membentuk siswa yang dapat menggunakan internet secara positif (Davidson, 2012).

Refleksi peneliti ketika melakukan pembelajaran daring pada awal masa pandemi, banyak siswa masih tidak dapat mencari serta memahami informasi melalui teknologi digital, mengoperasikan aplikasi pembelajaran seperti zoom, google meet, google classroom, google form, dan mereka kesulitan saat harus mencari informasi di internet serta mengunggah video ke youtube. Gambaran tersebut mengindikasikan para siswa belum terbiasa menggunakan teknologi digital serta memanfaatkan aplikasi pembelajaran tersebut dalam aktivitas pembelajaran daring. Sementara untuk membuat variasi dalam pembelajaran agar siswa memiliki hasrat untuk belajar guru harus menggunakan banyak variasi dalam pembelajarannya, karena pada saat dilapangan minat belajar siswa berkurang dari sebelum pembelajaran daring hal ini terlihat dari catatan keaktifan siswa selama pembelajaran daring tidak banyak siswa yang bertanya dan antusias dalam pembelajaran.

Fenomena di atas sering dikaitkan dengan keterlibatan orang tua dalam membantu siswa saat pembelajaran daring dan didapati temuan bahwa belum banyak orang tua yang ikut terlibat dalam pembelajaran jarak jauh sehingga mempengaruhi keaktifan siswa dalam mengumpulkan tugas daring setiap harinya. Keluhan guru yang terjadi saat pembelajaran daring juga dirasakan oleh orang tua, beberapa orang tua banyak yang bercerita tentang putra-putrinya yang menjadi malas selama melakukan pembelajaran di rumah. Mereka seakan kehilangan hasrat untuk belajar secara daring dan ingin cepat masuk ke sekolah.

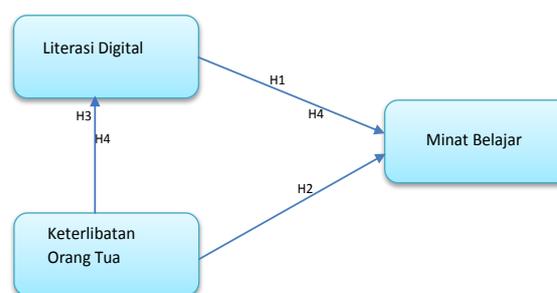
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut, “Apakah terdapat Pengaruh Literasi Digital

Siswa Dan Keterlibatan Orangtua Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas VI Di Sekolah Dasar Negri Benda?”. Dengan mengacu pada permasalahan, tujuan penelitian ini adalah “Untuk menganalisis pengaruh Literasi Digital Siswa Dan Keterlibatan Orangtua Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas VI Di Sekolah Dasar Negri Benda”.

Ada empat hipotesis yang peneliti usulkan dalam penelitian ini, H1 : terdapat pengaruh positif literasi digital terhadap minat belajar siswa, H2 : terdapat pengaruh positif keterlibatan orang tua terhadap minat belajar siswa, H3 : terdapat pengaruh positif keterlibatan orang tua terhadap literasi digital siswa, H4 : terdapat pengaruh tidak langsung antara keterlibatan orang tua terhadap minat belajar siswa melalui literasi digital siswa.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dalam penelitian ini informasi atau data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner, responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 49 siswa yang merupakan siswa kelas VI Sekolah Dasar Negri Benda. Dalam mengukur Minat Belajar Siswa, peneliti menggabungkan beberapa variabel, literasi digital dan Keterlibatan orang tua, dengan literasi digital sebagai variabel intervensi (lihat Gambar 1). Data dalam survei ini dikumpulkan dari kuesioner online menggunakan aplikasi formulir Google yang dibagikan kepada 49 responden. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober 2021.



Gambar 1 The Research Framework.

Dalam mengukur Literasi Digital peneliti menggunakan instrumen yang telah peneliti adopsi dan modifikasi sesuai dengan usia anak sekolah dasar, instrumen literasi digital peneliti kombinasikan dari DIGCOMP yang dikembangkan oleh European Comission (*The Digital Competence Framework 2.0 | EU Science Hub*, n.d.) dan Kusmawan, U. (2021) Evaluasi Kompetensi Digital dan Online. (*EKDO | Home*, n.d.) Keterlibatan orang tua peneliti adaptasi dari instrumen Ema Putri Ristiani (Ristiani, 2015). Minat belajar peneliti modifikasi dari kombinasi instrument (Sarahutu, 2020) dan Kusmawan, U. (2009) Pada penelitian ini responden diberikan 29 item pernyataan dengan

menggunakan skala likert empat poin dari “selalu” (4poin) sampai “tidak pernah” (1poin).

Peneliti menggunakan metode analisis data multivariat untuk menganalisis data lengkap. Penelitian ini mengikuti dua perhitungan utama yaitu outer model dan inner model sebagai syarat untuk analisis model struktural. Estimasi outer model meliputi penilaian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit untuk mencapai kriteria SEM-PLS. Reflektif indikator dinyatakan memenuhi convergent validity dalam kategori baik apabila nilai outer loading > 0,7 akan tetapi nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity. (Ghozali & Latan, 2015) sehubungan dengan itu, konstruk mencapai validitas diskriminan ketika nilai cross-loading lebih tinggi dari 0,70. (Hair et al., 2020) selanjutnya konstruk dinyatakan reliable jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015)

Selain pengujian outer model, penelitian ini mengikuti pengujian inner model, yang menilai model struktural untuk masalah kolinearitas, mengevaluasi koefisien jalur apakah setiap variabel memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung, menguji R-square. R-square menjelaskan apakah variabel eksogen berpengaruh substantive terhadap variabel endogen adapun kriteria dari R-square kuat (0,67), sedang (0,33) dan lemah (0,19).(Ghozali & Latan, 2015) uji Path Coefficient merupakan pengaruh langsung antara variable X dengan variable Y. (*Tutorial Partial Least Square dalam PLS SEM - Uji Statistik*, n.d.) signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode bootstrapping. (Ghozali & Latan, 2015)

### 3. HASIL

#### *Analisi Outer Model*

Outer model menunjukkan hubungan antara setiap blok indikator terhadap variable latennya, pada penelitian ini variable latennya adalah literasi digital siswa, keterlibatan orang tua dan minat belajar dan blok indikator merupakan instrumen yang peneliti berikan kepada responden. Tabel 1 menunjukkan profil responden dimana responden paling banyak berusia 11 tahun dengan persentase 55%, sedangkan untuk jenis kelamin didominasi perempuan 51% dan yang menemani siswa selama pembelajaran daring paling sering adalah Ibu dengan persentase 63%. Siswa yang terlibat sebagai responden adalah 49 siswa kelas VI yang telah terkonfirmasi melakukan kegiatan belajar dengan menggunakan teknologi digital selama pembelajaran jarak jauh.

Tabel 1 Karakteristik

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
<b>Usia</b>		
11 Th	27	55%
12 Th	21	43%
13 Th	1	2%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	25	49%
Perempuan	24	51%
<b>Yang Menemani Belajar Daring</b>		
Ayah	5	10%
Ibu	31	63%
Kakak	9	18%
Lain-lain	5	9%

Tabel 2 menunjukkan uji outer model dalam penelitian ini, tabel diatas tidak ada yang outer loadingnya dibawah 0,5 indikator dinyatakan layak atau valid begitu juga nilai Average Variance Extracted (AVE) yang sudah lebih dari 0,50 yang berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians atau variabel latennya. *Cronbach alpha* berada diatas 0,7 yang berarti setiap instrument dalam variable dinyatakan reliabel diperkuat dengan *Composite reliability* dari ketiga variable laten ada diatas 0,70 maka konstruk dinyatakan reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Outer Model

Construct	Item	Loadi ng	Cronbac h's Alpha	Compos ite Reliabili ty	Average Variance Extracted (AVE)
Literasi Digital	X110	0.725	0.785	0.860	0.607
	X13	0.736			
	X17	0.788			
	X19	0.745			
Keterlibatan Orang Tua	X21	0.735	0.873	0.898	0.560
	X210	0.729			
	X22	0.790			
	X23	0.876			
	X24	0.691			
	X27	0.689			
	X29	0.709			
Minat Belajar Siswa	Y1	0.687	0.819	0.868	0.525
	Y3	0.577			
	Y4	0.770			
	Y5	0.764			
	Y6	0.789			
	Y9	0.739			

Mengukur validitas diskriminan, pada penelitian ini melihat nilai Fornell Larcker Criterion (akar AVE) digambarkan pada Tabel 3 dimana tiap konstruk lebih besar dari pada korelasi dengan variable lainnya, berarti instrumen tersebut telah memenuhi syarat discriminant validitynya yang berarti instrumen dapat menjelaskan fenomena yang diukur. Peneliti juga menggunakan uji heterotrait-monotrait dimana validitas diskriminan diperoleh ketika nilai heterotrait-monotrait kurang dari 0,90. (Henseler et al., 2015) Sebagaimana diinformasikan pada Tabel 4, terlihat bahwa nilai untuk setiap konstruk berkisar antara 0,655 hingga 0,861, dengan begitu berarti telah dikonfirmasi bahwa instrumen dalam penelitian ini dapat menjelaskan setiap variabel yang akan diukur.

Tabel 3. Fornell-Larcker Criterion

	X1 LITERASI DIGITAL	X2 KETERLI BATAN ORANG TUA	Y MINAT BELAJAR
X1 LITERASI DIGITAL	0.779		
X2 KETERLIBATAN ORANG TUA	0.588	0.748	
Y MINAT BELAJAR	0.711	0.695	0.724

Tabel 4. Heterotrait-Monotrait

	X1 LITERASI DIGITAL	X2 KETERLI BATAN ORANG TUA	Y MINAT BELAJAR
X1 LITERASI DIGITAL			
X2 KETERLIBATAN ORANG TUA	0.655		
Y MINAT BELAJAR	0.861	0.739	

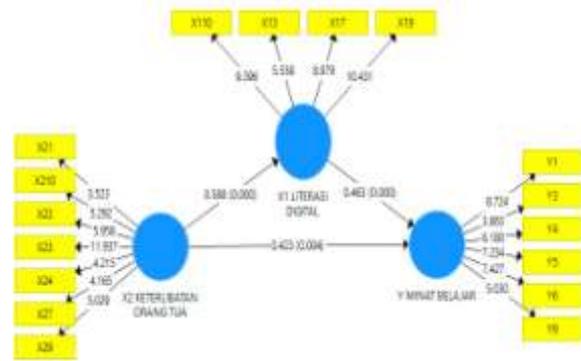
**Analisis Inner Model**

Inner model menunjukkan pengaruh atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk yang berdasarkan pada teori inti dan akan dijelaskan berdasarkan hasil uji goodness of fit, uji path coefficient (direct effect) dan uji indirect effects dengan SmartPLS 3.0 pada Tabel 5 menunjukkan uji goodness-fit-model dan uji f-square, uji goodness-fit-model adalah nilai R Square yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya dari hasil uji R Square didapatkan hasil bahwa keterlibatan orang tua berpengaruh terhadap literasi digital sebesar 33%, selanjutnya keterlibatan orang tua dan literasi digital siswa berpengaruh terhadap minat belajar sebesar 61% perolehan hasil uji R Square membuktikan bahwa variabel endogen dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh variabel eksogen dengan pengaruh dalam kriteria sedang.

Tabel 5. Uji R - Square dan f -Square

	R Square Adjusted	f Square
X1 Literasi Digital	0.332	
Y Minat Belajar	0.607	
X1 Literasi Digital → Y Minat Belajar		0.371
X2 Keterlibatan Orang Tua → Y Minat Belajar		0.310
X2 Keterlibatan Orang Tua → X1 Literasi Digital		0.530

Selain uji R Square peneliti juga melakukan uji f square untuk melihat seberapa besar pengaruh antar variabel, kriteria nilai f square 0,02 kategori kecil, 0,15 kategori sedang, dan nilai 0,35 kategori besar (Hair et al., 2020) dalam penelitian ini nilai f square antara literasi digital terhadap minat belajar adalah 0,371 termasuk berpengaruh besar, keterlibatan orang tua terhadap minat belajar 0,310 termasuk berpengaruh sedang dan keterlibatan orang tua terhadap literasi digital siswa ada dalam pengaruh besar dengan perolehan nilai sebesar 0,530.



Hasil dari analisis bootstrapping PLS SEM dan Uji Hipotesis dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 2 dimana nilai original sample seluruh variabel mendekati +1 yang berarti setiap variabel memiliki pengaruh kearah positif. Pada penelitian ini seluruh P Values kurang dari 0,05 sehingga seluruh hipotesis yang diajukan dapat diterima dan dapat dinyatakan variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan.

Tabel 6. Path coefficients dan Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values	Hasil
H1 X1 Literasi Digital -> Y Minat Belajar	0.463	0.491	0.103	4.507	0.000	Diterima
H2 Keterlibatan Orang Tua -> X1 Literasi Digital	0.588	0.600	0.116	5.059	0.000	Diterima
H3 Keterlibatan Orang Tua -> Y Minat Belajar	0.423	0.373	0.147	2.873	0.004	Diterima
H4 Keterlibatan Orang Tua -> X1 Literasi Digital -> Y Minat Belajar	0.272	0.296	0.090	3.041	0.002	Diterima

Gambar 2. Pengukuran dan pemodelan Smart PLS

**Pembahasan**

Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang signifikan bahwa literasi digital siswa dapat mempengaruhi minat belajarnya, hal ini dapat terlihat dari hasil hitung dalam penelitian ini diperoleh hasil T-Statistics 4,507 dengan P- Values 0,000 dari hasil perhitungan tersebut maka hasil uji hipotesis H1 diterima. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat belajar di masa pandemi Covid-19 adalah dukungan orang tua dan lingkungan serta faktor pendekatan belajar dalam hal ini kemampuan siswa dalam literasi digital. (Yanto et al., 2021)

Konsisten dengan hal tersebut keterlibatan orang tua terhadap minat belajar melalui literasi digital siswa berpengaruh signifikan dengan nilai T-Statistics 3,041 dengan P- Values 0,002 maka H4

diterima, hal ini menunjukkan bahwa literasi digital dapat menjadi variable mediasi sebagian (Patrial Mediation) dimana selain melalui literasi digital keterlibatan orang tua juga memiliki pengaruh langsung terhadap minat belajar siswa. Ketika belajar dirumah siswa-siswi generasi digital native di Indonesia membutuhkan pendampingan orang tua sebagai tindak lanjut pembelajaran dari guru.(Munawar et al., 2019)

Pada pengujian hipotesis H3 diperoleh hasil T-Statistics 2,873 dengan P- Values 0,004 dari hasil perhitungan tersebut maka H3 diterima, dimana keterlibatan orang tua dapat mempengaruhi literasi digital siswa hal ini sesuai dengan teori Epstein (1995) dikutip dalam buku Parental Involvement on Children's Education, ada beberapa tipe keterlibatan orang tua yang bisa dilakukan dalam mendukung pendidikan di sekolah yaitu dalam bentuk parenting, komunikasi, volunteering, belajar di rumah, dan pengambilan keputusan.(Cumming, 2013) Keterlibatan orang tua memiliki peran dalam membentuk anak-anak menggunakan internet secara positif. (Davidson, 2012) Senada dengan hal tersebut dalam penelitian Muniroh Munawar menyatakan bahwa anak-anak membutuhkan pendampingan orang tua saat pembelajaran dari rumah agar memperoleh literasi digital yang sehat. (Munawar et al., 2019)

Dalam penelitian ini memperoleh temuan bahwa keterlibatan orang tua secara signifikan berpengaruh terhadap literasi digital siswa, hal ini dapat terlihat dari hasil hitung dalam penelitian ini diperoleh hasil T-Statistics 5,059 dengan P- Values 0,000 berdasarkan perhitungan tersebut maka H2 diterima. Keterlibatan orang tua sangat penting dalam meningkatkan minat belajar. (L. K. Safitri, 2020) senada dengan hal itu Ulya juga mengungkapkan bahwa keterlibatan orang tua sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan minat belajar siswa.(Ulya, 2020)

Keterlibatan orang tua berperan besar terhadap minat belajar, apabila orang tua melaksanakan perannya dengan baik maka minat belajar siswa pun akan bertambah atau meningkat, karena ketika siswa belajar di rumah maka ada hal-hal yang hilang dari sosok guru yang biasa hadir dalam kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas, ketika kegiatan pembelajaran berubah menjadi daring maka siswa kehilangan sosok guru tersebut, disini posisi orang tua menggantikan sosok guru yang biasa ada dalam pembelajaran putra putrinya, karena bagaimanapun sosok seseorang yang menemani, memberikan pujian, memberikan teguran secara langsung dibutuhkan untuk siswa sekolah dasar karena dengan adanya sosok yang tersebut siswa akan merasa diperhatikan dan membuat minat dalam belajarnya pun bertambah.

Belum banyak penelitian yang menyinggung minat belajar yang dikaitkan pada literasi digital siswa sekolah dasar, padahal pada keadaan seperti

ini hal tersebut sangatlah penting, karena seorang guru diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar detengah pembelajaran daring yang sedang berlangsung saat ini karena kondisi COVID19 yang masih ada ditengah masyarakat.

Maka seharusnya bukan hanya tenaga pendidik yang diberikan pelatihan, tetapi orang tua juga perlu dibekali parenting mengenai cara mendidik putra-putrinya selama pembelajaran daring dari rumah dan literasi digital. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia nanti akan memiliki literasi digital yang baik dan dapat memanfaatkan teknologi secara bijak.

#### 4. KESIMPULAN

Setelah dilakukannya penelitian dan analisis data mengenai pengaruh literasi digital siswa, keterlibatan orang tua terhadap minat belajar siswa didapati hasil yang signifikan secara statistik. Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu menentukan faktor yang dapat mempengaruhi literasi digital dan minat belajar pada siswa kelas VI SD di SDN Benda selama pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19.

Peneliti mengusulkan empat hipotesis dan keempat hipotesis tersebut diterima berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan Smart PLS 3.0 ke empat hipotesis karena nilai T-Statistics >2,01 dan P- Values <0,05. Temuan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara literasi digital terhadap minat belajar siswa dengan nilai SEM sebesar 0,463. Kemudian keterlibatan orang tua juga memiliki pengaruh positif terhadap minat belajar siswa dengan nilai SEM sebesar 0,423.

Selanjutnya literasi digital dipengaruhi secara positif oleh keterlibatan orang tua dengan nilai SEM sebesar 0,588. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara keterlibatan orang tua dan minat belajar melalui literasi digital.

Hasil perhitungan statistik dalam penelitian ini minat belajar dapat terpengaruh oleh keterlibatan orang tua melalui literasi digital siswa, yang berarti literasi digital siswa dapat membantu menentukan besar atau kecilnya pengaruh keterlibatan orang tua terhadap minat belajar siswa dengan nilai SEM sebesar 0,272.

Hasil dari temuan peneliti mengkonfirmasi bahwa literasi digital dan keterlibatan orang tua dapat memengaruhi minat belajar siswa kelas VI SDN Benda selama pembelajaran daring. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa siswa yang memiliki literasi digital yang rendah, mengakibatkan minat belajarnya menurun. Padahal hal ini sangat penting, mengingat pembelajaran daring masih akan dilaksanakan sampai keadaan berlangsung normal, apabila siswa yang memiliki literasi digital yang rendah dibiarkan maka pembelajaran yang dilakukan secara daring tidak membuat siswa tidak lagi berminat untuk belajar dan

dalam jangka panjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak akan tercapai secara optimal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anti, R. H., Astuti, A. P., & Hermanto, B. (2011). Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Minat Belajar Kimia, Pendidikan Muhammadiyah, Universitas Pendahuluan. *Seminar Nasional Pendidikan, Sains Dan Teknologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang*, 307–311.
- Cumming, J. J. (2013). *Parental Involvement on Children's Education*.
- Davidson, C. (2012). Seeking the green basilisk lizard: Acquiring digital literacy practices in the home. *Journal of Early Childhood Literacy*, 12(1), 24–45. <https://doi.org/10.1177/1468798411416788>
- EKDO / Home. (n.d.). Retrieved July 29, 2021, from <http://ekdo.ut.ac.id/home-mahasiswa>
- Ghozali & Latan. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 Edisi 2* (Vol. 2). Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. *Journal of Business Research*, 109(November 2019), 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Kemdikbud. (2020). Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. *Kemdikbud*, 2019, 1–58. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/06/buku-saku-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.). Retrieved July 27, 2021, from [https://kominfo.go.id/content/detail/33924/siaran-pers-no123hmkominfo042021-tentang-menteri-johnny-luncurkan-gerakan-nasional-literasi-digital-untuk-124-juta-masyarakat/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/33924/siaran-pers-no123hmkominfo042021-tentang-menteri-johnny-luncurkan-gerakan-nasional-literasi-digital-untuk-124-juta-masyarakat/0/siaran_pers)
- Kumala, F. N., Nita, C. I. R., Yasa, A. D., Ghufron, A., Pujiastuti, P., & Rahayu, C. P. (2021). Digital Literacy Analysis of Elementary-School Students in Malang. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020)*, 542(Ancosh 2020), 126–130. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210413.030>
- Munawar, M., Fakhruddin, RC, A. R., & Titi Prihatin. (2019). Keterlibatan Orangtua dalam Pendidikan Literasi Digital Anak Usia Dini. *Seminar Nasional Pascasarjana 2019 Issn: 2686-6404*, 1–5.
- Ristiani, E. P. (2015). *Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Se-Daerah Binaan Iii*. 5. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1401411183-s.pdf>
- Riwahyudin, A. (2015). Pengaruh Sikap Siswa Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas V Sekolah Dasar Di Kabupaten Lamandau. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.21009/jpd.061.02>
- Safitri, A., & Nurmawati, N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar Masyarakat Bajo. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan ...* <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/didaktis/article/view/1846>
- Safitri, L. K. (2020). *Peran Orangtua Dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak Pada Pembelajaran Online Di Sd Negeri 5 Metro Pusat*. IAIN METRO.
- Sarahutu, M. G. (2020). Covid-19 Skripsi. *Pembelajaran Online, Minat Belajar, Dan Kehidupan Sehari-Hari Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sanata Dharma Di Tengah Covid-19 Skripsi*, 1 of 140.
- The Digital Competence Framework 2.0 | EU Science Hub*. (n.d.). Retrieved August 24, 2021, from <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework>
- Tutorial Partial Least Square dalam PLS SEM - Uji Statistik*. (n.d.). Retrieved October 23, 2021, from <https://www.statistikian.com/2021/04/tutorial-partial-least-square-dalam-pls-sem.html>
- Wiedarti, Pangesti; Laksono, K., Retnaningdyah, P., Dewayani, S., Muldian, W., Sufyadi, S., Roosaria, D. R., Faizah, D. U., Sulastrii, Rahmawan, N., Rahayu, S. R., Yusuf SA, A., & Antoro, B. (2019). *Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah Dasar*.
- Yanto, N., Wahyuningsih, S., & Suharno. (2021). Analisis Minat Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar di Rumah Sebagai Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 52–57.